

Securing Trust for a Sustainable Future

Meneguhkan Kepercayaan untuk
Masa Depan yang Berkelanjutan

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2025





Securing Trust for a Sustainable Future

Meneguhkan Kepercayaan untuk
Masa Depan yang Berkelanjutan

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2025





Tentang Laporan Tahunan

About the Annual Report

Selamat datang di Laporan Tahunan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) 2025 dengan tema Meneguhkan Kepercayaan untuk Masa Depan yang Berkelanjutan. Tema ini dipilih berdasarkan kajian mendalam yang mengacu pada data, fakta, serta perkembangan bisnis PERURI sepanjang tahun 2025 dan prospek keberlanjutan bisnis di masa depan.

Laporan Tahunan PERURI 2025 disusun sebagai bentuk pemenuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03 Tahun 2023 mengenai Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam penyusunan laporan ini, Perusahaan mengacu pada:

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 (SEOJK 16/2021) tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik termasuk lampiran SEOJK 16/2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Berkelanjutan, yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan;
- Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021;
- ASEAN CG Scorecard.

Laporan Tahunan ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi informasi Perusahaan kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara ("BP BUMN") sebagai Pemilik modal, serta membangun pemahaman dan kepercayaan seluruh Pemangku Kepentingan. Laporan ini menyediakan informasi yang akurat, seimbang, dan relevan. Dalam laporan ini, penyebutan "PERURI" dan "Perusahaan" merujuk pada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, yang bergerak di bidang pencetakan uang Rupiah, baik uang kertas maupun uang logam, pencetakan dokumen sekuriti negara, serta jasa digital sekuriti.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp", atau "IDR" mengacu pada mata uang resmi Republik Indonesia, sementara "Dolar AS" atau "USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah. Laporan tahunan ini tersedia dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, menggunakan font yang jelas dan ukuran yang mudah dibaca, serta dicetak dengan kualitas tinggi. Laporan Tahunan ini dapat diakses dan diunduh melalui situs resmi Perusahaan di www.peruri.co.id.

Welcome to the 2025 Annual Report of Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI), themed "Securing Trust for a Sustainable Future." This theme was selected based on an in-depth assessment referring to PERURI's data, facts, business developments throughout 2025, and the sustainability prospects of its business in the future.

The 2025 PERURI Annual Report has been prepared in compliance with Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, as well as Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities for State-Owned Enterprises. In preparing this report, the Company refers to:

- Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 (SEOJK 16/2021) concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, including the appendix to SEOJK 16/2021 regarding the Technical Guidelines for Preparing Sustainability Reports, which refers to Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance;
- Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUGKI) 2021;
- ASEAN CG Scorecard.

This Annual Report has been prepared with the aim of enhancing the Company's information transparency to the Government of the Republic of Indonesia, particularly the State-Owned Enterprises Regulatory Agency ("BP BUMN") as the capital owner, as well as fostering understanding and trust among all Stakeholders. This report provides accurate, balanced, and relevant information. In this report, the terms "PERURI" and the "Company" refer to Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, which engages in the printing of Rupiah currency, both banknotes and coins, the printing of state security documents, and digital security services.

The references to the currency units "Rupiah," "Rp," or "IDR" refer to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD" refers to the official currency of the United States of America. All financial information is presented in Rupiah. This Annual Report is available in two languages, namely Indonesian and English, using clear fonts and easily readable font sizes, and is printed in high quality. This Annual Report can be accessed and downloaded through the Company's official website at www.peruri.co.id.

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Liability Limitation

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap sebagai pandangan masa depan (*forward looking statements*) terkait hasil aktual, implementasi atau pencapaian Perusahaan. Pernyataan ini dibuat atas berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis Perusahaan. Penting untuk diperhatikan bahwa hasil aktual yang diperoleh Perusahaan dapat berbeda dari yang diperkirakan dikarenakan perubahan ekonomi dan politik nasional dan regional, fluktuasi nilai tukar valuta asing dan harga pasar komoditas, perubahan permintaan dan penawaran pasar, perubahan persaingan usaha, perubahan Undang-undang atau peraturan, penyesuaian prinsip akuntansi, kebijakan dan pedoman, serta asumsi yang digunakan.

This Annual Report contains statements that may be considered forward-looking in nature concerning the Company's actual results, implementation, or achievements. These statements are based on various assumptions regarding current and future conditions as well as the Company's business environment. It is important to note that the Company's actual results may differ materially from those projected due to changes in national and regional economic and political conditions, fluctuations in foreign exchange rates and commodity market prices, shifts in market supply and demand, changes in business competition, amendments to laws or regulations, adjustments to accounting principles, policies and guidelines, and the assumptions applied.



Penjelasan Tema Theme Explanation

Securing Trust for a Sustainable Future Meneguhkan Kepercayaan untuk Masa Depan yang Berkelanjutan

Tahun 2025 menandai fase penting dalam perjalanan transformasi PERURI sebagai perusahaan teknologi *high security*. Setelah melalui tahapan penguatan fondasi dalam beberapa tahun terakhir, PERURI memasuki fase pembuktian atas ketangguhan portofolio bisnis, kematangan transformasi, serta kemampuan Perusahaan dalam mengelola pertumbuhan dan kompleksitas bisnis secara berkelanjutan.

Di tengah perubahan lanskap bisnis, percepatan digitalisasi, serta meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola dan keberlanjutan, PERURI terus memperkuat perannya sebagai penjaga kepercayaan dalam ekosistem ekonomi, administrasi publik, dan layanan digital nasional. Kepercayaan menjadi fondasi yang melekat pada setiap mandat dan layanan PERURI, baik dalam pencetakan mata uang, pengamanan dokumen negara, perlindungan identitas, validitas transaksi elektronik, maupun keterpaduan layanan digital pemerintah.

Transformasi PERURI tidak hanya mencerminkan perluasan portofolio usaha, tetapi juga penguatan kapabilitas dalam mengintegrasikan bisnis konvensional sebagai fondasi stabilitas dengan bisnis digital sebagai penggerak pertumbuhan masa depan. Melalui pengembangan *Banknote Printing Technology*, *Security Printing Technology*, *Digital Security Technology*, dan *Government Technology* (GovTech), PERURI memperkuat posisinya sebagai entitas strategis yang mendukung keamanan instrumen negara sekaligus membangun infrastruktur kepercayaan nasional di era digital.

Sejalan dengan tema "*Securing Trust for a Sustainable Future*", PERURI memaknai kepercayaan sebagai nilai utama yang harus dijaga melalui keaslian, integritas, keamanan, dan keandalan. Dalam setiap transaksi, dokumen resmi, identitas digital, dan layanan publik, PERURI hadir untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan mampu memberikan perlindungan, kepastian, dan keberlanjutan nilai bagi negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui penerapan tata kelola perusahaan yang semakin matang, penguatan manajemen risiko, peningkatan keamanan siber, perlindungan data, ketahanan sistem digital, serta integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis. Dengan pendekatan tersebut, inovasi yang dikembangkan PERURI tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kemajuan teknologi berjalan secara bertanggung jawab, aman, dan berorientasi jangka panjang.

Melalui portofolio bisnis yang semakin seimbang, kapabilitas teknologi yang terus berkembang, serta komitmen kuat terhadap tata kelola dan keberlanjutan, PERURI terus meneguhkan perannya sebagai *guardian of trust* bagi Indonesia. Dari keamanan mata uang hingga layanan digital pemerintah, PERURI berkomitmen untuk menjaga kepercayaan sebagai fondasi bagi stabilitas sistem ekonomi, tata kelola negara, dan pembangunan ekosistem digital nasional yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

The year 2025 marked an important phase in the transformation journey of PERURI as a high-security technology company. After going through stages of strengthening its foundation over the past several years, PERURI entered a phase of demonstrating the resilience of its business portfolio, the maturity of its transformation, and the Company's capability to sustainably manage growth and increasing business complexity.

Amid changes in the business landscape, accelerating digitalization, and growing demands for governance and sustainability, PERURI continued to strengthen its role as a guardian of trust within the economic ecosystem, public administration, and national digital services. Trust serves as the foundation embedded in every mandate and service provided by PERURI, whether in currency printing, state document security, identity protection, electronic transaction validity, or the integration of government digital services.

PERURI's transformation not only reflects the expansion of its business portfolio, but also the strengthening of its capabilities in integrating conventional businesses as the foundation of stability with digital businesses as the driver of future growth. Through the development of *Banknote Printing Technology*, *Security Printing Technology*, *Digital Security Technology*, and *Government Technology*, PERURI reinforced its position as a strategic entity supporting the security of state instruments while simultaneously building the national trust infrastructure in the digital era.

In line with the theme "*Securing Trust for a Sustainable Future*," PERURI defines trust as a core value that must be upheld through authenticity, integrity, security, and reliability. In every transaction, official document, digital identity, and public service, PERURI is present to ensure that the systems utilized are capable of providing protection, certainty, and sustainable value for the state, society, and all stakeholders.

This commitment has been reinforced through the implementation of increasingly mature corporate governance, strengthened risk management, enhanced cybersecurity, data protection, digital system resilience, as well as the integration of sustainability principles into business strategy. Through this approach, the innovations developed by PERURI are not only directed toward driving growth, but also toward ensuring that every technological advancement is carried out responsibly, securely, and with a long-term orientation.

Through an increasingly balanced business portfolio, continuously evolving technological capabilities, and a strong commitment to governance and sustainability, PERURI continues to reaffirm its role as the guardian of trust for Indonesia. From currency security to government digital services, PERURI remains committed to safeguarding trust as the foundation for the stability of the economic system, state governance, and the development of a secure, reliable, and sustainable national digital ecosystem.



Kesinambungan Tema

Theme Continuity



2024

The New Face of PERURI: Innovation for a Sovereign Future

Wajah Baru PERURI: Inovasi untuk Kemajuan Berdaulat

Tahun 2024 menjadi momen penting dalam perjalanan PERURI melalui pembaruan identitas Perusahaan berupa logo dan slogan baru yang mencerminkan semangat transformasi, inovasi, dan kesiapan menghadapi masa depan. Dengan pengalaman lebih dari 53 tahun sebagai penjaga keaslian dokumen negara, PERURI memperkuat bisnis inti percetakan sekuriti sekaligus mengembangkan kapabilitas di bidang *digital security* dan *government technology* (GovTech).

Pembaruan identitas tersebut juga sejalan dengan mandat strategis PERURI sebagai GovTech Indonesia untuk mendukung integrasi layanan digital prioritas pemerintah. Melalui inovasi berkelanjutan, PERURI terus memperkuat perannya dalam membangun ekosistem digital nasional yang aman, tepercaya, dan berdaulat, dengan fondasi inovasi, keamanan, dan kepercayaan.

The year 2024 marked an important milestone in PERURI's journey through the renewal of the Company's identity, reflected in its new logo and slogan, which embody the spirit of transformation, innovation, and readiness for the future. With more than 53 years of experience as the guardian of the authenticity of state documents, PERURI strengthened its core business in security printing while further developing its capabilities in digital security and government technology (GovTech).

This identity renewal was also aligned with PERURI's strategic mandate as GovTech Indonesia to support the integration of the Government's priority digital services. Through continuous innovation, PERURI continues to strengthen its role in building a secure, trusted, and sovereign national digital ecosystem, founded on innovation, security, and trust.

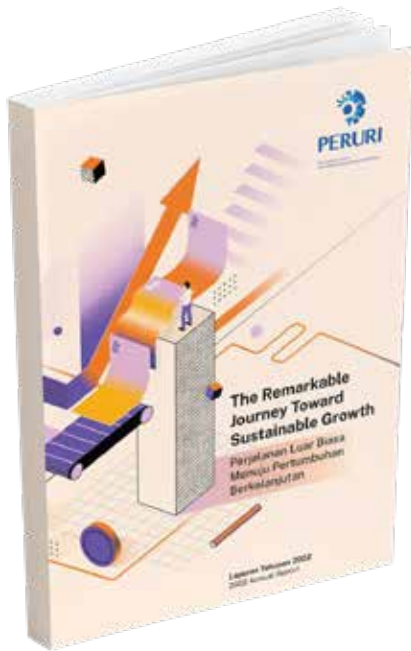


2023

Safeguarding Sovereignty in the Digital Era Menjaga Kedaulatan di Era Digital

Pada 2023, PERURI terus mengukir kepemimpinannya dalam transformasi digital Indonesia. Laporan Tahunan ini mengisahkan perjalanan kami memperkuat infrastruktur digital negara meluncurkan platform yang kuat dan layanan inovatif yang mendefinisikan ulang keamanan dan aksesibilitas. Saat kami memperkuat ranah digital, kami tetap fokus pada keberlanjutan, menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan dalam operasi kami untuk menjaga masa depan. Melalui kolaborasi strategis dan penguatan teknologi yang dilakukan, kami berupaya untuk menjaga kedaulatan dan menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan.

In 2023, PERURI continued to carve out its leadership in Indonesia's digital transformation. This Annual Report chronicles our journey of fortifying the nation's digital infrastructure launching robust platforms and innovative services that redefine security and accessibility. As we bolster our digital frontiers, we steadfastly focus on sustainability, implementing green business practices in our operations to safeguard tomorrow. Through the strategic collaborations and technological strengthening initiatives undertaken, we strive to safeguard sovereignty and create a secure, transparent, and sustainable digital ecosystem.



2022

The Remarkable Journey toward Sustainable Growth Perjalanan Luar Biasa Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan

Tahun yang begitu menantang dan luar biasa bagi PERURI. Fokus kami pada inovasi dan transformasi digital dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong kesuksesan di berbagai proyek digital dan proyek internasional baru. Kami berhasil memperluas jangkauan ke pasar baru dan melampaui target penjualan.

Sembari fokus menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, kami pun terus bersemangat untuk tetap berada di depan. Maju menuju masa depan berkelanjutan dengan mengambil langkah konkret menuju transformasi bisnis hijau, dan memberdayakan tim untuk menjadi talenta digital masa depan. Dengan fondasi inilah, PERURI akan tumbuh lebih tinggi lagi, memberikan kontribusi signifikan untuk bangsa, dan berdampak bagi dunia di masa depan.

What a challenging and amazing year for PERURI. Our focus on innovation and digital transformation in the last several years has led to the successful launch of new and international digital projects. We have expanded our reach to new markets and exceeded our sales target.

As we focus our journey beyond growth, we are more determined than ever to stay ahead of the curve, lead the way to a sustainable future by taking a concrete step toward the green business transformation, and empower our team to be the digital talents of tomorrow. With these foundations in place, PERURI will achieve even greater heights, significantly contribute to our country, and impact the world for years.



2021

The Trusted Authenticity Guarantor for the Nation: Leveraging Competencies for a Sustainable Growth

Sang Penjamin Keaslian untuk Bangsa: Meningkatkan Kompetensi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Selama lebih dari lima dekade, PERURI mendapatkan Amanah dari Pemerintah Indonesia untuk menjalankan kegiatan usaha pencetakan uang Rupiah dan dokumen sekuriti milik negara. Perjalanan panjang ini semakin mengukuhkan kompetensi PERURI sebagai satu-satunya BUMN yang dipercayakan tugas tersebut. PERURI terus berkomitmen untuk menjaga mutu produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan sesuai dengan visi dan misi Perusahaan.

Meskipun pandemi COVID-19 berlanjut hingga 2021, PERURI terus berkarya dan memberikan layanan terbaik dengan fitur sekuriti tertinggi. Transformasi di bidang sumber daya manusia, teknologi, dan bisnis dilakukan untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan era digitalisasi, PERURI memaksimalkan teknologi informasi dan membangun platform digital untuk efisiensi dan keberlanjutan bisnis.

Selama 2021, meskipun dihadapkan pada tantangan pandemi, PERURI berhasil menerapkan strategi yang tepat dan mencatat pencapaian optimal. Kini saatnya PERURI memantapkan langkah selanjutnya. Menyongsong tantangan di era digital dengan memanfaatkan kompetensi yang dimiliki untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan serta bersama terus berdedikasi melayani Indonesia.

For more than five decades, PERURI has been entrusted by the Government of Indonesia to carry out the printing of Rupiah currency and state security documents. This long journey has further strengthened PERURI's competence as the only State-Owned Enterprise entrusted with such responsibility. PERURI remains committed to maintaining product quality and enhancing customer satisfaction in line with the Company's vision and mission.

Although the COVID-19 pandemic continued through 2021, PERURI consistently delivered its best services with the highest security features. Transformations in human resources, technology, and business were undertaken to maintain sustainable growth. In facing the challenges of the digital era, PERURI maximized information technology and developed digital platforms to support business efficiency and sustainability.

Throughout 2021, despite the challenges posed by the pandemic, PERURI successfully implemented the right strategies and achieved optimal performance. Now is the time for PERURI to further strengthen its next steps by embracing the challenges of the digital era, leveraging its competencies to support sustainable growth, and continuously dedicating itself to serving Indonesia.



Daftar Isi

Contents

Tentang Laporan Tahunan About the Annual Report	1
Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Liability Limitation	1
Penjelasan Tema Theme Explanation	3
Kesinambungan Tema Theme Continuity	4
Daftar Isi Contents	8

Ikhtisar Kinerja Utama Key Performance Highlights

Ikhtisar Data Keuangan Penting Highlights of Key Financial Data	12
Informasi Jumlah Saham Share Information	17
Informasi tentang Aksi Korporasi Saham Information on Corporate Actions Related to Shares	17
Informasi tentang Penerbitan Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, serta Pendanaan Lainnya Information on the Issuance of Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds, as well as Other Financing Activities	17
Jejak Langkah Perusahaan Company Milestones	18
Peristiwa Penting 2025 Significant Events 2025	22
Penghargaan 2025 Awards 2025	25
Sertifikasi Certification	26

Laporan Manajemen Management Report

Dewan Pengawas Supervisory Board	30
Laporan Dewan Pengawas Supervisory Board Report	32
Direksi Board of Directors	44
Laporan Direksi Board of Directors' Report	46
Pernyataan Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi Statement of Responsibility by the Supervisory Board and the Board of Directors	68

Profil Perusahaan Company Profile

Data Umum Perusahaan Company General Information	72
Riwayat Singkat PERURI PERURI at a Glance	75
Logo Perusahaan Company Logo	77

Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Values	78
Kegiatan Usaha Business Activities	82
Struktur Organisasi Organizational Structure	91
Wilayah Operasional dan Produk/ Layanan Operational Region and Products/ Services	92
Profil Dewan Pengawas Supervisory Board Profile	94
Profil Direksi Board of Directors Profile	100
Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Affiliation Relationship of the Board of Supervisory and the Board of Directors Members	105
Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi pada Tahun 2025 Information on Changes in the Composition of the Supervisory Board and the Board of Directors During the 2025 Financial Year	107
Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi setelah Tahun Buku Berakhir Information on Changes in the Composition of the Supervisory Board and the Board of Directors After the End of the Financial Year	108
Daftar Pejabat Eksekutif List of Executive Officers	110
Demografi Karyawan Employee Demography	114
Informasi Pemilik Modal Perusahaan Company Shareholders Information	116
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Public Accountant and Public Accounting Firm	118
Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Institutions and Professions	118
Daftar Keanggotaan Asosiasi List of Association Memberships	120
Struktur Grup Group Structure	120
Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi, Joint Venture (JV) dan Special Purpose Vehicle (SPV) List of Subsidiaries and/or Associated Entities, Joint Ventures (JV), and Special Purpose Vehicles (SPV)	121
Informasi pada Situs Perusahaan Information on the Company's Website	123

Analisis dan Pembahasan Manajemen

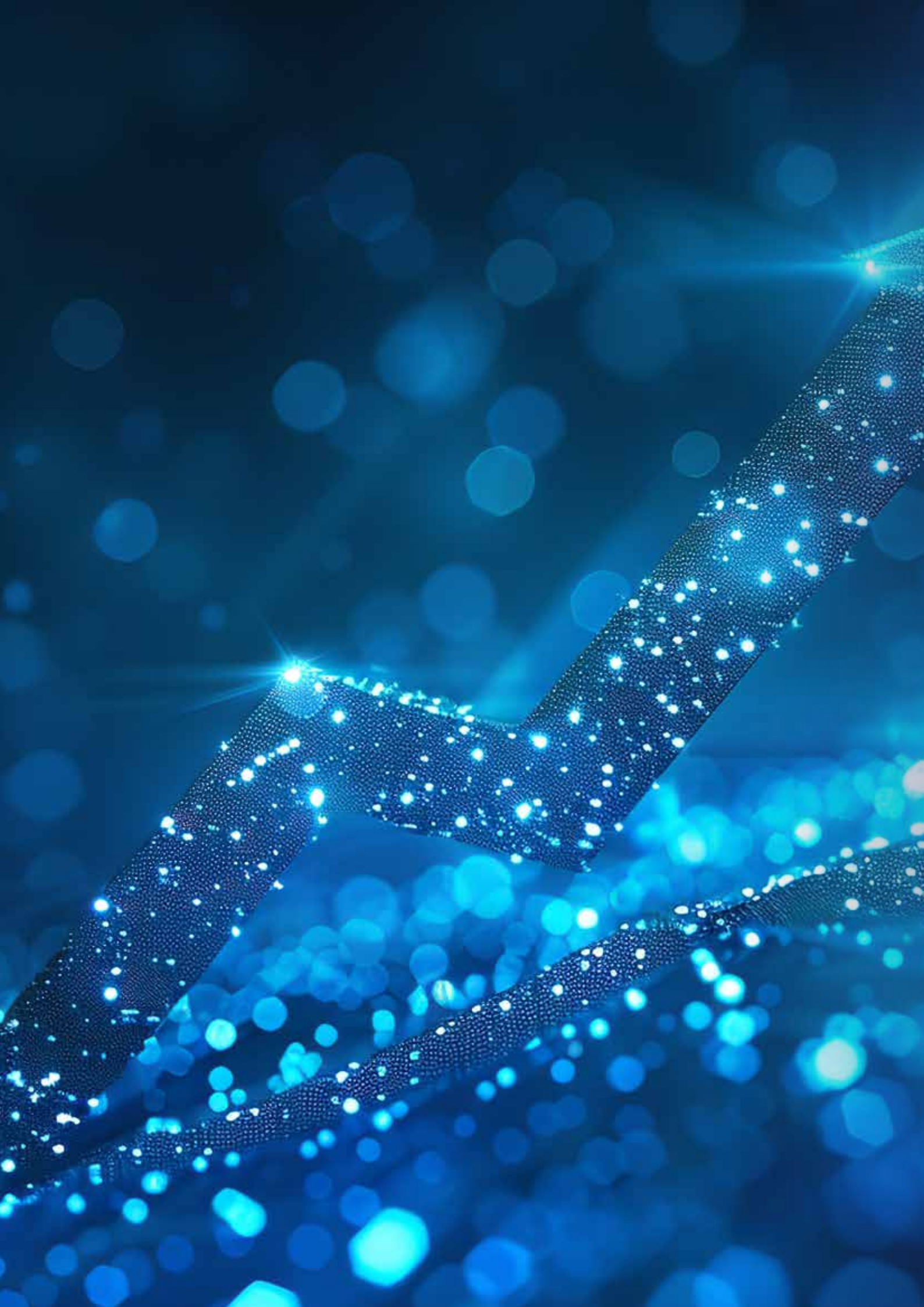
Management Discussion and Analysis

Tinjauan Perekonomian Global Global Economic Overview	126
Tinjauan Perekonomian Nasional Tahun 2025 National Economic Overview in 2025	127
Tinjauan Industri Industry Overview	128
Strategi dan Kebijakan Strategis PERURI 2025 Strategy and Strategic Policies of PERURI In 2025	132
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Operational Overview by Business Segment	134
Kinerja Keuangan Financial Performance	143
Kemampuan Membayar Utang Debt Repayment Ability	159
Tingkat Kolektibilitas Piutang Collectibility of Receivables	162
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Capital Structure and Management Policy on Capital Structure	163
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025, Serta Proyeksi 2026 Comparison of Target and Realization for 2025, and Projection for 2026	164
Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts after the Date of the Accountant's Report	178
Kebijakan dan Pembayaran Dividen Dividend Policy and Payments	178
Pajak dan Kontribusinya Bagi Negara Taxes and Contribution to the State	179
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Use of Proceeds from Public Offering	180
Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal Material Information on Investments, Expansion, Divestment, Merger/ Consolidation, Acquisition, and Debt/ Capital Restructuring	180
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi Material Information on Transactions with Conflict of Interest and/or Related Party Transactions	181
Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Terhadap Perusahaan Changes in Laws and Regulations Affecting the Company	188

Kebijakan Akuntansi Accounting Policies	188
Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal Material Commitments For Capital Expenditures	189
Investasi Barang Modal yang Direalisasikan Tahun Buku 2025 Capital Expenditure Realized in 2025	191
Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan atau Pendapatan Bersih Perusahaan Impact of Price Changes on the Company's Sales or Net Revenue	192
Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Health Level	193
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	194
Prospek Usaha Business Prospects	198
Fungsi Penunjang Perusahaan Company Support Functions	
Sumber Daya Manusia Human Resources	206
Teknologi Informasi Information Technology	224
Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance	
Pernyataan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Statement on Corporate Governance Implementation	240
Struktur Tata Kelola Perusahaan di PERURI Corporate Governance Structure at PERURI	246
Rapat Pembahasan Bersama Joint Deliberation Meeting	248
Dewan Pengawas Supervisory Board	260
Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Pengawas Performance Assessment of the Committee Under the Supervisory Board	277
Dewan Pengawas Independen Independent Supervisory Board	283
Direksi Board of Directors	285
Transparansi Informasi tentang Dewan Pengawas dan Direksi Transparency of Information on the Supervisory Board and Board of Directors	297
Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi Performance Assessment of the Supervisory Board and the Board of Directors	299

Kebijakan Nominasi Dewan Pengawas dan Direksi Supervisory Board and Board of Directors Nomination Policy	305
Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Remuneration Policy for the Board of Directors and Supervisory Board	308
Rapat Dewan Pengawas, Direksi, dan Rapat Gabungan Supervisory Board Meetings, Board of Directors Meetings, and Joint Meetings	310
Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Diversity in the Composition of the Supervisory Board and the Board of Directors	323
Organ Pendukung Dewan Pengawas Supporting Organs of the Supervisory Board	325
Sekretaris Dewan Pengawas Secretary of the Supervisory Board	326
Komite Audit Audit Committee	329
Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	340
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	346
Organ Pendukung Direksi Supporting Organ of the Board of Directors	355
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	355
Satuan Pengawasan Intern (SPI) Internal Audit Unit (SPI)	358
Audit Eksternal/Akuntan Publik External Audit/Public Accountant	376
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	379
Manajemen Risiko Risk Management	382
Perkara Penting Important Cases	406
Sanksi Administratif Administrative Sanctions	407
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja kepada Manajemen dan/atau Karyawan Policy on Long-Term Performance- Based Compensation for Management and/or Employees	407
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Paling Lambat 3 (tiga) Hari Kerja Setelah Terjadinya Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan atas Saham Perusahaan Terbuka Share Ownership of Members of the Board of Directors and Supervisory Board Members No Later than 3 (three) Business Days after the Occurrence of Share Ownership or any Change in Ownership of Shares of a Public Company	408

Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	408
Pedoman Etika dan Perilaku Code of Conduct	414
Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Whistleblowing System	419
Pengendalian Gratifikasi Gratification Control	422
Pengelolaan Benturan Kepentingan Conflict of Interest Handling	425
Kebijakan Anti-Korupsi/ Anti-Fraud Anti-Corruption/Anti-Fraud Policy	425
Kebijakan Pencegahan <i>Insider Trading</i> Insider Trading Prevention Policy	428
Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik Information on Political Funding Contributions	429
Etika Perusahaan dalam Berhubungan dengan Pejabat Publik Company Ethics in Dealing with Public Officials	429
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Officials' Wealth Report (LHKPN)	430
Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services	432
Rantai Pasok Supply Chain	432
Keterbukaan Dalam Praktik <i>Bad Governance</i> Disclosure of Bad Governance Practices	433
Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan Implementation of Corporate Governance Guidelines	434
Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecards (ACGS) Implementation of Asean Corporate Governance Scorecards (ACGS)	478
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social and Environmental Responsibilities	
Komitmen PERURI Terhadap Pembangunan Berkelanjutan PERURI's Commitment to Sustainable Development	498
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan PERURI PERURI Sustainability Performance Highlights	499
Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statements	





Ikhtisar Kinerja Utama Key Performance Highlights

Tahun 2025 menjadi momentum bagi PERURI untuk menjaga ketahanan kinerja di tengah dinamika usaha, sekaligus memperkuat kepercayaan melalui capaian operasional, keuangan, digital, dan keberlanjutan yang semakin terarah.

2025 marked a momentum for PERURI to maintain performance resilience amid business dynamics, while strengthening trust through more focused operational, financial, digital, and sustainability achievements.



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Highlights of Key Financial Data

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	Naik/Turun Increase/Decrease	
						Jumlah Amount	Persentase Percentage
Penjualan Bersih Net sales	4.221.832	3.766.408	4.441.190	3.884.455	3.424.231	455.424	12,09
Beban Pokok Penjualan Cost of sales	(3.224.607)	(2.847.016)	(3.112.435)	(2.705.365)	(2.448.790)	(377.591)	(13,26)
Laba Kotor Gross profit	997.225	919.392	1.328.755	1.179.090	975.442	77.833	8,47
Beban Usaha Operating Expenses	(781.011)	(741.336)	(753.130)	(713.645)	(589.470)	(39.676)	5,35
Pendapatan Keuangan Finance income	84.917	87.258	62.575	23.738	33.754	(2.341)	(2,68)
Beban Keuangan Finance expenses	(34.122)	(44.001)	(55.725)	(73.113)	(116.973)	9.879	(22,45)
Bagian Laba dari Ventura Bersama Share of profits of joint venture	5.085	16.612	26.243	60.517	31.368	(11.526)	(69,39)
Pendapatan (beban) lain Other income (expenses)	52.937	5.786	(13.240)	(8.359)	45.192	47.151	814,95
Sub Jumlah Subtotal	(672.195)	(675.681)	(733.277)	(710.861)	(596.128)	3.486	(0,52)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before income tax	325.031	243.711	595.479	468.229	379.313	81.320	33,37
Beban Pajak Penghasilan Income tax expense							
Pajak Kini Current tax	(98.856)	(98.915)	(176.156)	(118.384)	(92.793)	60	(0,06)
Pajak Tangguhan Deferred tax	12.254	26.995	9.090	1.547	(66.181)	(14.741)	(54,61)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan Total income tax expense	(86.602)	(71.921)	(167.066)	(116.837)	(158.974)	(14.681)	20,41
Laba Tahun Berjalan Profit for the year	238.429	171.790	428.413	351.392	220.340	66.639	38,79
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Other comprehensive income (expenses)							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Items that will not be reclassified to profit or loss:							
Pengukuran kembali atas imbalan pasca kerja Remeasurement of post- employment benefits	27.089	(19.973)	(14.268)	(131.219)	82.812	47.062	235,63
Beban pajak terkait Related income tax	(5.965)	4.397	3.073	28.924	(18.217)	(10.362)	(235,66)

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	Naik/Turun Increase/Decrease	
						Jumlah Amount	Persentase Percentage
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total comprehensive income for the year	259.553	156.215	417.218	249.097	284.935	103.338	66,15
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Profit for the year attributable to:							
Entitas Induk Owners of the parent	235.045	168.242	424.711	347.894	217.451	66.804	39,71
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interest	3.384	3.549	3.702	3.499	2.889	(165)	(4,64)
Jumlah Total	238.429	171.790	428.413	351.392	220.340	66.639	38,79
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Profit for the Current Year Attributable to:							
Entitas Induk Owners of the parent	259.669	156.367	417.113	248.970	284.870	103.302	66,06
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interest	(115)	(152)	105	127	65	37	(24,09)
Jumlah Total	259.553	156.215	417.218	249.097	284.935	103.338	66,15

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statement of Financial Position

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	Naik/Turun Increase/Decrease	
						Jumlah Amount	Persentase Percentage
Aset Lancar Current Assets	3.894.331	3.527.836	3.072.813	2.580.419	1.816.242	366.496	10,39
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	3.318.952	3.352.734	3.478.865	3.744.495	3.954.667	(33.782)	(1,01)
Jumlah Aset Total Assets	7.213.283	6.880.570	6.551.679	6.324.914	5.770.908	332.713	4,84
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.916.069	1.643.274	1.331.442	1.247.073	1.010.889	272.796	16,60
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	725.738	907.440	1.024.097	1.299.040	1.227.171	(181.702)	(20,02)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.641.808	2.550.714	2.355.539	2.546.114	2.238.060	91.094	3,57
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.571.476	4.329.856	4.196.140	3.778.800	3.532.848	241.619	5,58
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	7.213.283	6.880.570	6.551.679	6.324.914	5.770.908	332.713	4,84



Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	Naik/Turun Increase/Decrease	
						Jumlah Amount	Persentase Percentage
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash flows from operating activities	772.451	398.911	682.668	1.036.879	627.082	373.540	93,64
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash flows from investing activities	(409.474)	(217.096)	(149.833)	(70.455)	(406.293)	(192.378)	88,61
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash flows from financing activities	(259.503)	(171.115)	(241.039)	(289.534)	(507.560)	(88.388)	51,65
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	103.474	10.700	291.795	676.890	(286.770)	92.774	867,01
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and cash equivalents at beginning of year	2.155.612	2.144.911	1.853.116	1.176.226	1.462.996	10.700	0,50
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and cash equivalents at end of year	2.259.086	2.155.612	2.144.911	1.853.116	1.176.226	103.474	4,80

Rasio-Rasio Keuangan Utama

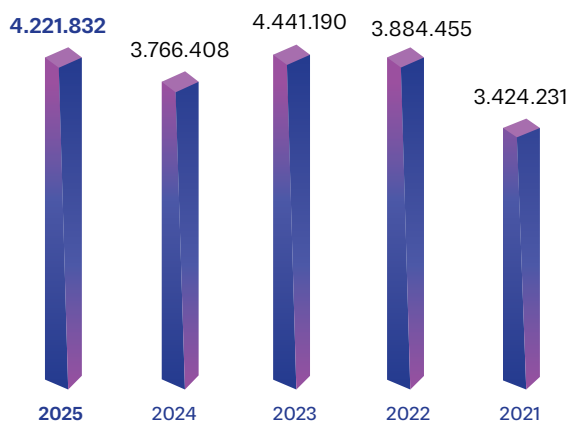
Key Financial Ratios

(dalam persentase)
(in percentage)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Rasio Kas Cash Ratio	117,90	131,18	161,10	148,60	116,36
Rasio Lancar Current Ratio	203,25	214,68	230,79	206,92	179,67
Rasio Utang terhadap Aset Debt to Assets Ratio	36,62	37,07	35,95	40,26	38,78
Rasio Utang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	57,79	58,91	56,14	67,38	63,35
Rasio Laba Operasi Operating Profit Ratio	5,12	4,73	12,96	11,98	11,27
Return on Asset	3,31	2,50	6,54	5,56	3,82
Return on Equity	5,22	3,97	10,21	10,32	6,75
Return on Investment	9,01	8,60	16,20	15,02	15,88
Net Profit Margin	5,65	4,56	9,65	9,05	6,43
EBITDA Margin	15,07	16,15	22,63	23,67	26,34

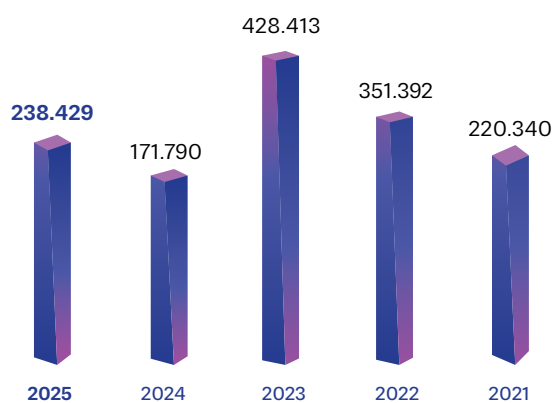
Penjualan Bersih Net Sales

Dalam juta Rupiah
In million Rupiah



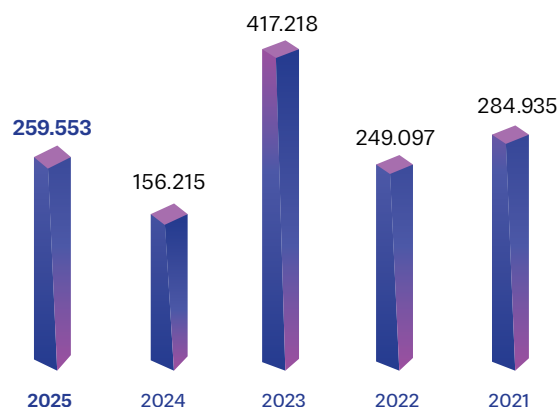
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year

Dalam juta Rupiah
In million Rupiah



Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year

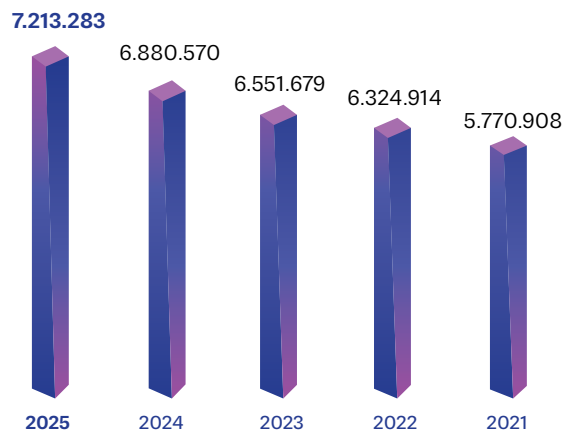
Dalam juta Rupiah
In million Rupiah





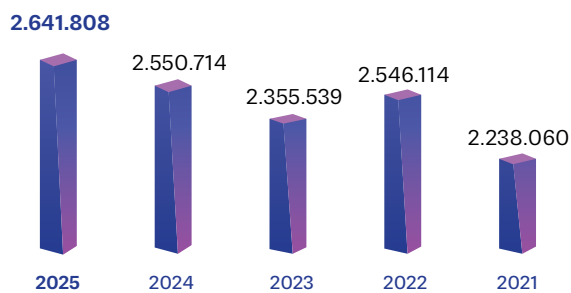
Jumlah Aset Total Assets

Dalam juta Rupiah
In million Rupiah



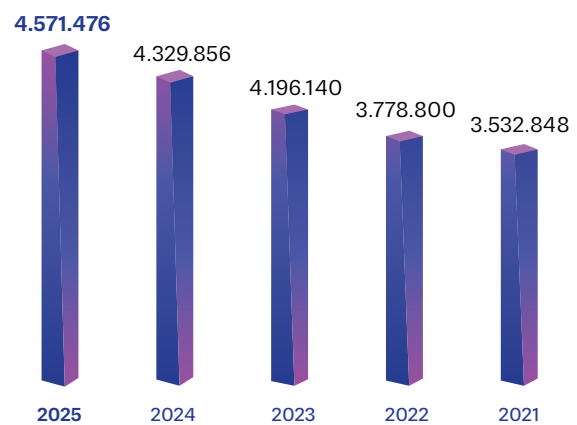
Jumlah Liabilitas Total Liabilities

Dalam juta Rupiah
In million Rupiah



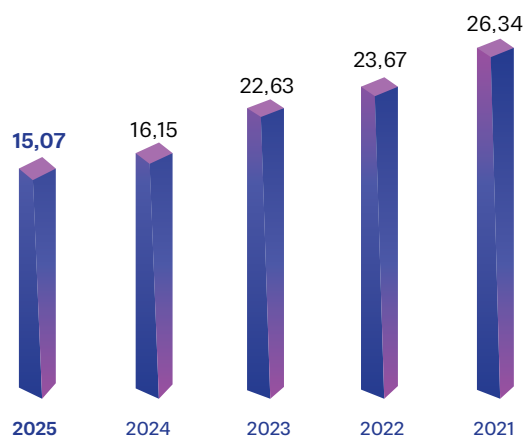
Jumlah Ekuitas Total Equity

Dalam juta Rupiah
In million Rupiah



EBITDA Margin EBITDA Margin

Dalam Persentase
In Percentage



Informasi Jumlah Saham

Share Information

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dinyatakan bahwa Perusahaan Umum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara serta tidak terbagi dalam bentuk saham.

Based on Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs), a Public Corporation (Perusahaan Umum) is a state-owned enterprise whose entire capital is owned by the state and is not divided into shares.

Informasi tentang Aksi Korporasi Saham

Information on Corporate Actions Related to Shares

PERURI tidak memiliki saham yang tercatat maupun diperdagangkan pada bursa efek mana pun, sehingga sepanjang tahun 2025 Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi terkait saham. PERURI merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, di mana seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

PERURI does not have any shares listed or traded on any stock exchange; therefore, throughout 2025 the Company did not undertake any corporate actions related to shares. PERURI is a State-Owned Enterprise as stipulated under Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, whereby all of its capital is fully owned by the State in the form of separated state assets and is not divided into shares.

Sampai dengan akhir tahun 2025, PERURI tidak melakukan Penawaran Umum Saham maupun mencatatkan sahamnya di bursa efek mana pun serta tidak memperdagangkannya kepada publik. Dengan demikian, Perusahaan tidak memiliki informasi mengenai kapitalisasi pasar berdasarkan harga di bursa, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, volume perdagangan saham, maupun penyajian grafik harga penutupan dan volume perdagangan. Selain itu, tidak terdapat informasi terkait penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

As of the end of 2025, PERURI has not conducted any Initial Public Offering (IPO), listed its shares on any stock exchange, or offered its shares to the public. Accordingly, the Company does not have information related to market capitalization based on stock exchange prices, highest, lowest, and closing share prices, share trading volume, or presentation of closing price and trading volume charts. In addition, there is no information regarding share trading suspension and/or delisting.

Informasi tentang Penerbitan Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, serta Pendanaan Lainnya

Information on the Issuance of Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds, as well as Other Financing Activities

Hingga akhir 2025, PERURI tidak melakukan penerbitan obligasi, sukuk atau obligasi konversi serta pendanaan lainnya sehingga Perusahaan tidak melakukan laporan pencatatan tersebut di dalam buku laporan tahunan ini.

As of the end of 2025, PERURI did not issue any bonds, sukuk, convertible bonds, or other forms of financing. Accordingly, the Company has not included any related disclosures in this Annual Report.



Jejak Langkah Perusahaan

Company Milestones

1971

15 September 1971 merupakan tanggal didirikannya Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai hasil gabungan dari dua perusahaan, yaitu Perusahaan Negara (PN) Pertjetakan Kebajoran dan PN Arta Yasa.

September 15, 1971 marks the establishment of Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI), a State-Owned Enterprise, formed from the merger of two companies, namely Perusahaan Negara (PN) Pertjetakan Kebajoran and PN Arta Yasa.

1991

Pemancangan tiang pertama pembangunan gedung PERURI di Karawang oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Groundbreaking ceremony for the construction of the PERURI building complex in Karawang by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

1994

Mesin baru 1 Lini Uang Kertas mulai beroperasi di PERURI Karawang.

The new Banknote Production Line 1 commenced operations at PERURI Karawang.

2003

Penandatanganan *Joint Venture Agreement* dengan SICPA SA.

Signing of the Joint Venture Agreement with SICPA SA.

2005

Peresmian Kawasan Percetakan PERURI Karawang 202 Ha oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Inauguration of the PERURI Karawang Printing Facility, covering an area of 202 hectares, by the President of the Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

2011

Berdirinya PT Peruri Wira Timur pada 6 April 2011 anak perusahaan dari PERURI yang bergerak dibidang *security printing* dan PT Peruri Digital Security pada 15 September 2011 anak perusahaan PERURI yang bergerak di bidang solusi teknologi informasi.

Establishment of PT Peruri Wira Timur on April 6, 2011, a subsidiary of PERURI engaged in security printing, and PT Peruri Digital Security on September 15, 2011, a subsidiary engaged in information technology solutions.

2012

PERURI mengakuisisi PT Kertas Padalarang yakni Perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi kertas atau dokumen keamanan. Di tahun yang sama pada 10 April 2012, PERURI juga mendirikan anak perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan lahan dan jasa properti yang bernama PT Peruri Properti.

PERURI acquired PT Kertas Padalarang, a company engaged in security paper production. In the same year, on April 10, 2012, PERURI also established PT Peruri Properti, a subsidiary engaged in land development and property services.

2013

- PERURI menjadi tuan rumah konferensi Pencetakan Uang Kertas se-Asia Pasifik ke-20 (PRPBC);
- Penguatan Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan, serta Peta Jalan Strategi Bisnis dan Transformasi Perusahaan;
- PERURI bekerja sama dengan Sicpa Asia Development Pte., Ltd untuk pengembangan *track & trace secure label solution*.

- PERURI hosted the 20th Asia Pacific Banknote Printing Conference (PRPBC);
- Strengthening of the Company's Vision, Mission, and Core Values, as well as the Business Strategy Roadmap and Corporate Transformation Plan;
- PERURI collaborated with Sicpa Asia Development Pte. Ltd. for the development of track & trace secure label solutions.

2014

- PERURI ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional Sektor Industri melalui Kepmen Perindustrian No: 466/M-IND/Kep/8/2014;
- Penambahan Gedung Pabrik dan Mesin 1 Lini Uang Kertas di Karawang sebagai inovasi pelanggan dan pemenuhan kebutuhan utama.

- PERURI was designated as a National Vital Object in the Industrial Sector through Minister of Industry Decree No. 466/M-IND/Kep/8/2014;
- Expansion of the banknote production facility and installation of Banknote Production Line 1 in Karawang to support customer innovation and meet core demand.

2015

- PERURI menjadi tuan rumah Konferensi Pencetakan Uang Logam se-Asia Tenggara (*Technical Meeting of Mints in ASEAN-TEMAN*) ke-17 dan tuan rumah *High-Security Printing Conference* pada Desember 2015;
- Penambahan 1 Lini Baru Mesin Cetak Uang Kertas;
- JVA Tinta dengan Sicpa Swiss;
- Penetrasi pasar internasional ke Filipina, Nepal dan Sri Lanka
- PERURI hosted the 17th Technical Meeting of Mints in ASEAN (TEMAN) and the High-Security Printing Conference in December 2015;
- Addition of one new banknote printing production line;
- Joint Venture Agreement for ink with SICPA Switzerland;
- Expansion into international markets including the Philippines, Nepal, and Sri Lanka.

2016

- Perubahan logo baru PERURI dengan tagline *Smart Security System*;
- Peresmian Area Gedung Lini Baru oleh Menteri BUMN;
- Penambahan saham PERURI atas PT Sicpa Peruri Securink sebesar 48%;
- Peluncuran uang rupiah baru, terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam;
- Restrukturisasi PERURI Digital Security (PDS) sebagai bentuk inisiatif bisnis digital PERURI Induk.
- Introduction of PERURI's new logo with the tagline "Smart Security System"
- Inauguration of the New Production Line Facility by the Minister of State-Owned Enterprises
- Increase of PERURI's shareholding in PT Sicpa Peruri Securink to 48%
- Launch of new rupiah banknotes consisting of 7 denominations and 4 coin denominations
- Restructuring of PERURI Digital Security (PDS) as part of PERURI's digital business initiative

2017

- Perolehan Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) sebagai bukti bahwa Perusahaan telah memenuhi standar Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa;
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bank at Work dan Co-Branding antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- Perolehan penghargaan peringkat pertama *Annual Report Award (ARA)* 2016 untuk kategori BUMN Non-Keluangan Non-Listed.
- Acquisition of the Security Management System (SMS) Certification, confirming compliance with self-regulated security management standards
- Signing of Bank at Work and Co-Branding Cooperation Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Achievement of first place in the Annual Report Award (ARA) 2016 for Non-Financial Non-Listed SOEs category

2018

- Akuisisi 55% saham Cardsindo Tiga Perkasa;
- PERURI Resmikan Lembaga Sertifikasi Profesi;
- PERURI resmi menerapkan aplikasi *e-procurement* sebagai instrumen pengadaan barang dan jasa;
- Implementasi ERP SAP sebagai sarana pendukung proses bisnis yang lebih efisien.
- Acquisition of 55% shares of Cardsindo Tiga Perkasa
- Inauguration of PERURI Professional Certification Institute
- Implementation of e-procurement system as a procurement instrument for goods and services
- Implementation of SAP ERP as a supporting system for more efficient business processes

2019

- Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2019 tentang Perum PERURI sebagai bentuk penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2006;
- PERURI mendapatkan SK Pengakuan No. 790 Tahun 2019 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE);
- Peluncuran 3 (tiga) produk digital sekuriti (PERURI Sign, PERURI Code dan PERURI Trust) pada September 2019 melalui *Business Conference and Exhibition*;
- *Grand Launching* M Bloc Space, ruang publik/*creative hub* bagi kalangan milenial Jakarta sebagai bentuk optimalisasi aset idle Perusahaan;
- Penandatanganan Akta Jual Beli antara PERURI dan Bank Indonesia terkait pembangunan Kawasan Sentra Pengelolaan Uang (SPU) di lahan PERURI Karawang;
- Peluncuran Aplikasi Sistem Merkurius, sistem informasi Perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya, informasi dan aktivitas untuk proses bisnis secara lengkap dan *realtime*;
- Kerja sama PERURI dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan untuk layanan *electronic Know Your Customer* (e-KYC) Biometrik;
- Peluncuran *Learning Management System "LiGHT"* (*Learning and Growth*);
- Peluncuran *New Hyperion (E-Budgeting Application)*.
- Enactment of Government Regulation No. 6 of 2019 concerning Perum PERURI as an improvement of Government Regulation No. 32 of 2006
- Receipt of Recognition Decree No. 790 of 2019 from the Ministry of Communication and Informatics as an Electronic Certification Provider (PSrE)
- Launch of three digital security products (PERURI Sign, PERURI Code, and PERURI Trust) in September 2019 through the Business Conference and Exhibition;
- Grand Launching of M Bloc Space, a creative hub and public space for millennials in Jakarta as part of the Company's efforts to optimize its idle assets;
- Signing of Sale and Purchase Agreement between PERURI and Bank Indonesia for the development of the Currency Management Center (SPU) in Karawang
- Launch of the Merkurius System Application, the company's information system designed to fully integrate all resources, information, and activities for business processes in real time;
- Cooperation with the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) for utilization of National ID (NIK) data for electronic Know Your Customer (e-KYC) biometric services
- Launch of Learning Management System "LiGHT" (*Learning and Growth*)
- Launch of New Hyperion (E-Budgeting Application)



2020

- Penyempurnaan Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan "AKHLAK" sebagai *core values* yang baru;
- PERURI ekspor buku paspor ke Sri Lanka sebanyak 1 (satu) juta buku;
- Peluncuran PERURI Research Institute of Authenticity (PRIfA) sebagai wadah riset dan pengembangan Perusahaan untuk mendorong inovasi bisnis;
- Perolehan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016;
- Pencetakan Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) 75.000 sebagai peringatan 75 Tahun RI;
- Pendirian rumah singgah yang didedikasikan untuk tenaga medis sebagai garda terdepan penanggulangan COVID-19;
- Penandatanganan perjanjian kerja sama antara PERURI dengan Pemerintah Peru terkait pencetakan tiga pecahan uang kertas Soles Peru.
- Enhancement of Vision, Mission, and Core Values with "AKHLAK" as the new corporate values,
- Export of 1 (one) million passport books to Sri Lanka,
- The launch of the PERURI Research Institute of Authenticity (PRIfA) as the Company's research and development hub to drive business innovation.
- Acquisition of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certification,
- Printing of 75,000 Special Independence Banknotes (UPK 75.000) to commemorate the 75th Independence Day of Indonesia,
- Establishment of a shelter house dedicated to medical personnel as the frontline in COVID-19 response
- Signing of cooperation agreement with the Government of Peru for printing three denominations of Soles banknotes.

2021

- Pengiriman Perdana Uang Kertas Soles Peru. Proyek pencetakan uang kertas Peru ini merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah bisnis internasional PERURI dan merupakan proyek dengan jarak geografis terjauh;
- Peresmian M Bloc Space Fase Kedua : M Bloc *Market*, *Creative Hall* dan Museum Gallery;
- PERURI dan Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan meluncurkan Meterai Elektronik (*e-meterai*) pada 1 Oktober 2021;
- Peluncuran Prangko Berteknologi *Augmented Reality* dan *Housenote* 3.1 pada peringatan ulang tahun emas PERURI.
- First delivery of Soles Peru banknotes. This banknote printing project for Peru represents the highest achievement in PERURI's international business history and is the project with the longest geographical distance.
- Inauguration of the second phase of M Bloc Space: M Bloc Market, Creative Hall, and Museum Gallery.
- PERURI, together with the Directorate General of Taxes – Ministry of Finance, launched the Electronic Stamp (*e-Meterai*) on October 1, 2021.
- Launch of Augmented Reality Stamps and Housenote 3.1 during PERURI's golden anniversary celebration.

2022

- Perluasan ekosistem meterai elektronik melalui integrasi sistem ke Pemungut Bea Meterai;
- Perluasan *distribution channel* Bisnis Digital;
- Penunjukan Menteri BUMN kepada PERURI sebagai Ketua Subtim PMO Uang Digital Indonesia;
- Penunjukan Menteri BUMN kepada PERURI sebagai Ketua *Organizing Committee* (OC) Tim Dukungan BUMN untuk Percepatan Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
- Expansion of the electronic stamp ecosystem through system integration with Stamp Duty Collectors.
- Expansion of digital business distribution channels.
- Appointment by the Minister of State-Owned Enterprises of PERURI as Chair of the PMO Sub-Team for Indonesia Digital Currency.
- Appointment by the Minister of State-Owned Enterprises of PERURI as Chair of the Organizing Committee (OC) of the SOE Support Team for the Acceleration of Government Electronic-Based System (SPBE) Development.

2023

- PERURI dan BSSN Resmikan PERURI-CSIRT untuk Perkuat Keamanan Siber Nasional;
- *Groundbreaking* Taman Kota PERURI sebagai Langkah awal dalam pembangunan Kota PERURI;
- PERURI mendapatkan mandat sebagai GovTech Indonesia melalui Perpres No. 82 tahun 2023.
- PERURI and the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) inaugurated PERURI-CSIRT to strengthen national cybersecurity.
- Groundbreaking of PERURI City Park as an initial step in the development of PERURI City.
- PERURI was assigned as Indonesia's GovTech under Presidential Regulation No. 82 of 2023.

2024

- Peluncuran Logo Baru PERURI dan tagline "*Innovation for A Sovereign Future*" pada 22 Mei 2024;
- Peluncuran GovTech Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada 27 Mei 2024;
- *Townhall Meeting* INA Digital bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada 7 Juni 2024;
- Peresmian Taman Kota PERURI pada 27 September 2024;
- Rilis Terbatas Tahap Pertama Produk INA DIGITAL pada 30 September 2024.
- Launch of PERURI's new logo and tagline "*Innovation for A Sovereign Future*" on May 22, 2024.
- Launch of GovTech Indonesia by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, at the State Palace, Jakarta on May 27, 2024.
- INA Digital Townhall Meeting with the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment, Luhut Binsar Pandjaitan, on June 7, 2024.
- Inauguration of PERURI City Park on September 27, 2024.
- First limited release of INA DIGITAL products on September 30, 2024.

2025

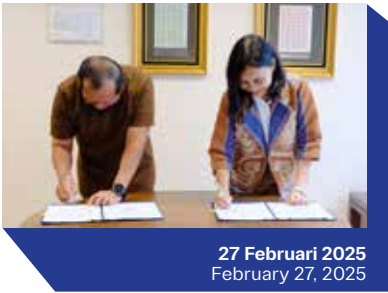
Dukungan PERURI terhadap Proyek Strategis Pemerintah pada Badan Gizi Nasional.

PERURI's Support for the Government's Strategic Project at the National Nutrition Agency.



Peristiwa Penting 2025

Significant Events 2025



27 Februari 2025
February 27, 2025

PERURI Bersama Direktorat Jenderal Pajak Melakukan Penandatanganan Kontrak Pencetakan Meterai Tempel 10.000 Tahap I TA 2025.

PERURI, together with the Directorate General of Taxes, signed the Contract for the Printing of 10,000 Adhesive Stamp Duty Stamps Phase I for Fiscal Year 2025.



27 Februari 2025
February 27, 2025

PERURI Berangkatkan 700 Pemudik Pulang Kampung Secara Gratis.

PERURI Sent Off 700 Passengers for Free Homecoming Travel.



2 Mei 2025
May 2, 2025

PERURI Lepas 23 Calon Jamaah Haji Tahun 2025.

PERURI dispatched 23 prospective pilgrims for Hajj pilgrimage in 2025.



16 Mei 2025
May 16, 2025

PERURI Dipercaya Membuat Koin Noor Dinar, Produk Investasi Emas Mewah yang memiliki fitur keamanan tinggi dengan Sentuhan Budaya Indonesia.

PERURI Has Been Entrusted to Produce the Noor Dinar Coin, a Luxury Gold Investment Product Featuring High-Security Features and a Touch of Indonesian Culture.



14 Juli 2025
July 14, 2025

PERURI dan Kementerian PANRB Tandatangani Perjanjian Penugasan Pengembangan Aplikasi SPBE Prioritas.

PERURI and the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) signed an assignment agreement for the development of priority SPBE applications.



23 Juli 2025
July 23, 2025

PERURI dan Kemendes PDT Sepakati Kerja Sama untuk Percepatan Digitalisasi Desa.

PERURI and the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Kemendes PDT) agreed on cooperation to accelerate village digitalization.



30 Juli 2025
July 30, 2025

PERURI bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Perkuat Sinergi Hukum untuk Dukungan Kepastian Bisnis Berkelanjutan.

PERURI, together with the Attorney General's Office (Civil and Administrative Law Division), strengthened legal synergy to support sustainable business certainty.



10 September 2025
September 10, 2025

PERURI Hadirkan Forum Strategis Ketahanan Digital di Era AI dan Quantum melalui Digital Resilience Summit 2025.

PERURI hosted a strategic forum on digital resilience in the era of AI and quantum through the Digital Resilience Summit 2025.



19 September 2025
September 19, 2025

PERURI bersama Kementerian Ekonomi Kreatif Jalin Sinergi Digitalisasi untuk Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional.

PERURI and the Ministry of Creative Economy established digitalization synergy to strengthen the national creative economy ecosystem.



20 September 2025
September 20, 2025

PERURI Bestari Festival.

PERURI Bestari Festival.



27 September 2025
September 27, 2025

Soft Launching "Padel @ Alley".

Soft Launching of "Padel @ Alley".



1 Oktober 2025
October 1, 2025

PERURI Pertegas Peran sebagai Mitra Strategis Global, Sambut Kehadiran Wakil Presiden Swiss di Karawang.

PERURI reinforced its role as a global strategic partner by welcoming the Vice President of Switzerland at its Karawang facility.



2 Oktober 2025
October 2, 2025

PERURI Dukung Transformasi Digitalisasi Bansos Nasional Lewat Pilot Project Banyuwangi.

PERURI supported national social assistance digital transformation through a pilot project in Banyuwangi.



13 Oktober 2025
October 13, 2025

Go Live Satu Data, Wujudkan Tata Kelola Berbasis Data Terintegrasi.

Go Live of Satu Data system, realizing integrated data-based governance.



23 Oktober 2025
October 23, 2025

PERURI Tanam 2.000 Pohon Mangrove di Perairan Tanjung Pakis Karawang, Aksi Nyata Menjaga Warisan Alam Indonesia.

PERURI planted 2,000 mangrove trees in Tanjung Pakis waters, Karawang, as a concrete action to preserve Indonesia's natural heritage.



25 Oktober 2025
October 25, 2025

Graduation Ceremony PERURI Digital Entrepreneur Academy Level 1 Tahun 2025, Buka Jalan Baru untuk UMKM Naik Kelas.

Graduation Ceremony of PERURI Digital Entrepreneur Academy Level 1 Year 2025, opening new opportunities for MSMEs to scale up.



27 Oktober 2025
October 27, 2025

PERURI Sebagai Pemilik Lahan, Dukung Peluncuran Wajah Baru M Bloc Space.

As land owner, PERURI supported the launch of the new face of M Bloc Space.



30 Oktober 2025
October 30, 2025

Wujudkan Transformasi Digital yang Tangguh, PERURI Raih Sertifikat CSIRT dan Penghargaan Pertahanan Siber BSSN.

Demonstrating strong digital transformation, PERURI received CSIRT certification and cybersecurity award from BSSN.



11 November 2025
November 11, 2025

PERURI dan BPS Perkuat Sinergi Strategis Menuju Transformasi Digital Nasional.

PERURI and Statistics Indonesia (BPS) strengthened strategic synergy toward national digital transformation.



1-3 Desember 2025
December 1–3, 2025

PERURI Ukir Prestasi Global, Housenote 4.0 Bertema The Land of Dreams Dinobatkan sebagai Best Housenote 2025 di Malaysia.

PERURI achieved global recognition as Housenote 4.0 themed "The Land of Dreams" was named Best Housenote 2025 in Malaysia.



9 Desember 2025
December 9, 2025

BP-BUMN Tegaskan Dukungan untuk Transformasi PERURI, Tedi Bharata Beri Arahan Strategis di *Executive Briefing*.

BP-BUMN reaffirmed support for PERURI's transformation; Tedi Bharata provided strategic direction during an Executive Briefing.



9 Desember 2025
December 9, 2025

PERURI Tunjukkan Empati: Bantuan Cepat Tanggap untuk Korban Bencana di Sumatera.

PERURI demonstrated empathy through rapid assistance for disaster victims in Sumatra.



9 Desember 2025
December 9, 2025

Program PRISMA PERURI Bantu UMKM Berhasil Usaha di Platform Digital yang Kian Kompetitif.

PRISMA Program helped MSMEs succeed in an increasingly competitive digital platform economy.



10 Desember 2025
December 10, 2025

PERURI Bersama DJBC Jamin Ketersediaan Pita Cukai Tahun 2026 untuk Jaga Stabilitas Industri Hasil Tembakau dan MMEA.

PERURI together with the Directorate General of Customs and Excise ensured the availability of excise stamps for 2026 to maintain stability in the tobacco and MMEA industries.



13-14 Desember 2025
December 13–14, 2025

Tutup Rangkaian Pembinaan UMKM Selama 2025, PERURI Gelar Festival UMKM di Rumah BUMN Karawang.

Closing MSME development program for 2025, PERURI held an MSME Festival at Rumah BUMN Karawang.



18 Desember 2025
December 18, 2025

PERURI Perkuat Hubungan Industrial Melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2026-2027.

PERURI strengthened industrial relations through the signing of the Collective Labor Agreement (CLA) for the 2026–2027 period.

Penghargaan 2025

Awards 2025



Top CSR Awards

1. TOP CSR Awards Star 4
2. TOP Leader on CSR Commitment 2025

Majalah Top Business
Top Business Magazine

Maret 2025 | March 2025



The 21st High Security Printing™ Asia Conference: Best New Housenote 2025 (Housenote 4.0 The Land of Dreams)

High Security Printing™ Asia

12 Maret 2025 | March 12, 2025



Rating PEFINDO Triple A (AAA)

Standalone dan/and Stable Outlook
(Perusahaan dengan kondisi sangat sehat)

PT Pemeringkat Efek Indonesia

29 April 2025 | April 29, 2025



Indonesia Property & Bank Award (IPBA) 2025

1. The Best State-Owned Company with Highest Digital Safeguarding
2. Sustainable Urban Revitalization Developer

Journalist Media Network (JMN)

25 Juni 2025 | June 25, 2025



UMKM BUMN Award 2025

1. Sektor Craft (gold)
2. Sektor Food & Beverages (silver)
3. The Most Committed Pembina

Majalah BUMN Track
BUMN Track Magazine

25 Juni 2025 | June 25, 2025



TOP GRC Awards #5 Stars

Majalah Top Business
Top Business Magazine

8 September 2025 | September 8, 2025



TJSLP Kabupaten Karawang 2025

(Penghargaan atas Kontribusi aktif membangun Karawang melalui program CSR/TJSL)

Karawang Regency TJSLP 2025
(Award for Active Contributions to the Development of Karawang through CSR/TJSL Programs)

Pemerintah Kabupaten Karawang
Government of Karawang Regency

14 September 2025 | September 14, 2025



Human Capital Resilience & Excellence Award

Bintang 5 (rating tertinggi) untuk kategori/(highest rating) for the category:

1. The Best Sustainable Development and Decent Jobs
2. The Best Innovation in Education and Training
3. The Best Inclusive Human Capital Development

Majalah First Indonesia
First Indonesia Magazine

6 November 2025 | November 6, 2025



Human Resources Excellence Awards (HREA): Silver Award untuk kategori "Excellence in HR Innovation"

Human Resources

6 November 2025 | November 6, 2025



Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT): Gold Rank

NCCR

28 November 2025 | November 28, 2025



BUMN Branding & Marketing Award:

1. Best Data-Driven Marketing Strategy (Platinum)
2. Best Social Media & Influencer Engagement (Gold)

Majalah BUMN Track
BUMN Track Magazine

2 Desember 2025 | December 2, 2025



Keterbukaan Informasi Award:

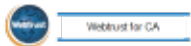
Informatif
Information Transparency Award:
Informative

Komisi Informasi Pusat RI
Central Information Commission of
the Republic of Indonesia

15 Desember 2025 | December 15, 2025

Sertifikasi Certification

Dokumentasi Documentation	Nama Sertifikat Certificate Name	Badan Pemberi Issuing Body	Waktu Diperoleh Date Obtained	Waktu Berlaku Validity Period
	Sertifikasi ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) ISO 45001:2018 Certification – Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	PT Societe Generale de Surveillance (SGS) Indonesia	6 Juni 2023 June 6, 2023	10 Mei 2027 May 10, 2027
	Sertifikasi SNI ISO/IEC 17025:2017 Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi SNI ISO/IEC 17025:2017 Certification – Competence of Testing and Calibration Laboratories	Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Committee (KAN)	21 Juli 2021 July 21, 2021	15 Februari 2026 Until February 15, 2026
	Sertifikasi ISO 28000:2007/SNI ISO 28000:2009 Sistem Manajemen Pengamanan Rantai Pasokan ISO 28000:2007/SNI ISO 28000:2009 Certification – Supply Chain Security Management System	PT Sucofindo	6 Agustus 2024 August 6, 2024	5 Agustus 2027 August 5, 2027
	Sertifikasi Intergraf 14298:2021 Management of Security Printing Processes, penyempurnaan dari standar High Security Management System for Secure Printing CWA 14641:2009. Lingkup proses produksi Uang Kertas (Banknotes) dan produksi Kertas Berharga Non Uang (Security Documents) PERURI telah berstandar Governmental Level. Intergraf 14298:2021 Certification: Management of Security Printing Processes, an update to the High Security Management System for Secure Printing CWA 14641:2009 standard. The scope of PERURI's production processes for banknotes and non-monetary security documents has been certified to the Governmental Level standard.	INTERGRAF (The European Federation for Print & Digital Communication)	24 September 2025 September 24, 2025	27 Oktober 2028 October 27, 2028

Dokumentasi Documentation	Nama Sertifikat Certificate Name	Badan Pemberi Issuing Body	Waktu Diperoleh Date Obtained	Waktu Berlaku Validity Period
	Sertifikasi SMK3 PP 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) SMK3 Certification (Government Regulation No. 50 of 2012) – Occupational Health and Safety Management System	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	6 Oktober 2025 October 6, 2025	6 Oktober 2028 October 6, 2028
	ISO/IEC 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkup Produk Digital (Operational Certificate Authority, Digital Signature, and Electronic Seal) ISO/IEC 27001:2022 – Information Security Management System for Digital Products Scope (Operational Certificate Authority, Digital Signature, and Electronic Seal)	PT CBQA Global Indonesia	28 Oktober 2025 October 28, 2025	26 November 2028 November 26, 2028
	ISO/IEC 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkup Teknologi Informasi (Layanan Network Lini B dan Operational Data Center di PERURI Karawang dan DRC) ISO/IEC 27001:2022 – Information Security Management System for Information Technology Scope (Network Services Line B and Operational Data Center at PERURI Karawang and DRC)	PT CBQA Global Indonesia	18 Desember 2025 December 18, 2025	5 Maret 2029 March 5, 2029
	Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 Certification – Anti-Bribery Management System (ABMS)	PT Mutuagung Lestari	20 Juli 2023 July 20, 2023	20 Juli 2026 July 20, 2026
	Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 Certification – Quality Management System (QMS)	PT Societe Generale de Surveillance (SGS) Indonesia	5 Mei 2024 May 5, 2024	5 Mei 2027 May 5, 2027
	Sertifikasi ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2015 Certification – Environmental Management System (EMS)	PT Societe Generale de Surveillance (SGS) Indonesia	5 Juni 2024 June 5, 2024	19 Mei 2027 May 19, 2027
	WebTrust Seal of Assurance	PT BDO Konsultan Indonesia	28 Februari 2025 February 28, 2025	28 Februari 2026 February 28, 2026
	Sertifikasi Elektronik (PSrE) – Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Electronic Certification Provider (PSrE) Certification	Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Ministry of Communication and Digital Affairs of the Republic of Indonesia	4 Agustus 2025 August 4, 2025	Selamanya Forever



Laporan Manajemen Management Report

Di tengah perubahan lanskap bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan yang semakin kompleks, PERURI terus menjaga kesinambungan bisnis inti, memperkuat kapabilitas digital, dan mengelola transformasi secara hati-hati dan terukur.

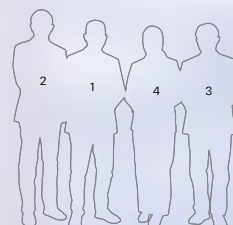
Amid changes in the business landscape and increasingly complex stakeholder needs, PERURI continued to sustain its core business, strengthen digital capabilities, and manage transformation prudently and measurably.



Dewan Pengawas

Supervisory Board





- 1 **Marlison Hakim**
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board
- 2 **Sutanto**
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Supervisory Board
- 3 **Djanurindro Wibowo**
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Supervisory Board
- 4 **Nanik Murwati**
Anggota Dewan Pengawas
Member of the Supervisory Board



Jas yang dikenakan Dewan Pengawas merupakan hasil Program PERURI *WearCycle*. Melalui inisiatif ini, PERURI mendukung ekonomi sirkular dengan memanfaatkan kembali seragam yang sudah tidak digunakan menjadi produk baru yang lebih bernilai. Inisiatif ini juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan mengurangi limbah tekstil serta menekan penggunaan energi dalam produksi tekstil baru.

The blazer worn by the Supervisory Boards are products of the PERURI *WearCycle* Program. Through this initiative, PERURI supports the circular economy by repurposing unused uniforms into new products with greater value. The initiative also contributes to environmental preservation efforts by reducing textile waste and lowering energy consumption associated with the production of new textiles.



Laporan Dewan Pengawas

Supervisory Board Report



Marlison Hakim
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) tidak hanya berorientasi pada penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga mengemban amanat strategis untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 dan penugasan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 yang mempertegas peran PERURI dalam memperkuat sektor sekuriti sekaligus mendukung transformasi digital pemerintahan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, PERURI telah menetapkan arah pengembangan jangka panjang melalui tiga pilar utama, yaitu memperkuat bisnis inti di bidang percetakan sekuriti dan digital security, mengoptimalkan mandat sebagai *Government Technology*, serta memperkuat berbagai faktor pendukung sebagai fondasi keberlanjutan Perusahaan. Ketiga pilar tersebut menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Perusahaan dalam menjaga pertumbuhan yang sehat dan adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha.

Dewan Pengawas memandang bahwa keberhasilan Perusahaan tidak semata-mata diukur dari pencapaian angka-angka kinerja, tetapi juga dari kemampuan menjaga tata kelola yang baik, mengambil keputusan yang tepat, serta menjalankan strategi secara konsisten. Oleh karena itu, Dewan Pengawas senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi guna memastikan setiap kebijakan dan langkah strategis dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan tetap berorientasi pada kepentingan jangka panjang Perusahaan.

Melalui berbagai forum koordinasi, evaluasi, dan pembahasan yang dilakukan secara berkala, Dewan Pengawas terus memantau perkembangan kinerja sekaligus memberikan masukan terhadap berbagai inisiatif yang dijalankan Direksi. Kami meyakini bahwa hubungan kerja yang terbuka, konstruktif, dan saling mendukung merupakan salah satu kunci penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan PERURI.

Melalui laporan ini, kami atas nama Dewan Pengawas ingin menyampaikan pandangan dan penilaian atas kinerja Direksi sepanjang tahun 2025, termasuk berbagai langkah strategis yang telah ditempuh dalam menjalankan amanah Perusahaan. Kami melihat bahwa upaya yang dilakukan Direksi tidak hanya berfokus pada pencapaian target usaha, tetapi juga pada penguatan fondasi PERURI agar semakin siap menghadapi perubahan. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai komitmen Perusahaan dalam menjaga kinerja, memperkuat peran strategisnya, serta terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

As a State-Owned Enterprise, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) is not only oriented toward creating economic value, but also carries a strategic mandate to deliver broader benefits to society and support national development. This mandate is in line with Government Regulation No. 6 of 2019 and the assignment stipulated under Presidential Regulation No. 82 of 2023, which further reinforce PERURI's role in strengthening the security sector while supporting the digital transformation of government.

To address these challenges, PERURI has established its long-term development direction through three main pillars, namely strengthening its core business in security printing and digital security, optimizing its mandate as a Government Technology, and strengthening various supporting factors as the foundation for the Company's sustainability. These three pillars serve as guidelines for all levels of the Company in maintaining healthy growth and adapting to changes in the business environment.

The Supervisory Board views that the Company's success is not solely measured by the achievement of performance indicators, but also by its ability to maintain good governance, make appropriate decisions, and consistently execute its strategies. Therefore, the Supervisory Board continuously performs its oversight function and provides advice to the Board of Directors to ensure that every policy and strategic initiative is implemented effectively, accountably, and remains oriented toward the Company's long-term interests.

Through various coordination, evaluation, and discussion forums conducted periodically, the Supervisory Board continues to monitor performance developments while providing input on various initiatives carried out by the Board of Directors. We believe that an open, constructive, and mutually supportive working relationship is one of the key factors in maintaining PERURI's sustainable growth.

Through this report, on behalf of the Supervisory Board, we would like to present our views and assessment of the Board of Directors' performance throughout 2025, including the various strategic initiatives undertaken in carrying out the Company's mandate. We observe that the efforts made by the Board of Directors are not only focused on achieving business targets, but also on strengthening PERURI's foundation to become increasingly prepared in facing changes. We hope this report provides a comprehensive overview of the Company's commitment to maintaining performance, strengthening its strategic role, and continuing to deliver tangible benefits to society, the nation, and the state.



Pandangan Dewan Pengawas atas Kondisi Ekonomi dan Industri Tahun 2025

Dewan Pengawas memandang bahwa tahun 2025 merupakan periode yang diwarnai oleh dinamika ekonomi global yang penuh tantangan. Perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara maju, normalisasi kebijakan moneter pasca tekanan inflasi, serta belum pulihnya perdagangan internasional secara menyeluruh masih memengaruhi aktivitas ekonomi dunia. Ketegangan perdagangan dan perubahan rantai pasok global juga menambah tingkat ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Dalam perspektif Dewan Pengawas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun ekonomi global tetap tumbuh, dunia usaha masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diantisipasi dengan cermat.

Dewan Pengawas menilai bahwa kondisi tersebut justru menunjukkan pentingnya kemampuan perusahaan untuk tetap lincah dan tangguh dalam menghadapi perubahan. Ketidakpastian global memang membuat banyak pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Namun, di sisi lain, situasi ini juga membuka peluang bagi perusahaan yang memiliki fondasi kuat dan strategi yang tepat untuk terus tumbuh. Dalam konteks tersebut, kami memandang bahwa PERURI berada pada posisi yang cukup baik untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Di tengah kondisi global tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang solid. Pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga menjadi bukti kuatnya daya tahan ekonomi domestik. Konsumsi masyarakat, investasi, dan belanja pemerintah masih menjadi penopang utama pertumbuhan.

Dewan Pengawas melihat bahwa stabilitas makroekonomi yang terjaga menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kondisi tersebut pada akhirnya mendukung meningkatnya kebutuhan terhadap instrumen pembayaran, dokumen sekuriti, serta layanan digital yang semakin relevan dengan perkembangan transaksi dan pelayanan publik saat ini.

Analisis Posisi PERURI Dalam Industri

Dewan Pengawas mencermati bahwa industri percetakan sekuriti dan solusi keamanan tengah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Di satu sisi, digitalisasi berkembang sangat cepat. Di sisi lain, kebutuhan terhadap produk sekuriti fisik tetap tinggi karena berkaitan dengan kepercayaan publik, stabilitas sistem keuangan, dan tata kelola pemerintahan.

Pertumbuhan ekonomi nasional turut memberikan dampak positif terhadap kebutuhan uang kartal, dokumen legal, layanan autentikasi, serta berbagai solusi keamanan digital. Hal ini membuka ruang bagi perusahaan yang mampu beradaptasi dan menawarkan solusi yang relevan.

Supervisory Board's View on the 2025 Economic and Industry Conditions

The Supervisory Board views that 2025 was a period marked by highly challenging global economic dynamics. Slowing growth in several advanced economies, the normalization of monetary policies following inflationary pressures, and the incomplete recovery of international trade continued to affect global economic activities. Trade tensions and shifts in global supply chains also contributed to increased uncertainty for business players.

From the perspective of the Supervisory Board, this condition indicates that although the global economy continues to grow, the business sector is still facing various challenges that need to be carefully anticipated.

The Supervisory Board believes that these conditions demonstrate the importance of a company's ability to remain agile and resilient in responding to changes. While global uncertainties have led many businesses to adopt a more cautious approach in making decisions, these circumstances have also created opportunities for companies with strong foundations and appropriate strategies to continue growing. In this context, we believe that PERURI is in a favorable position to capitalize on existing opportunities while continuing to uphold the principle of prudence.

Amid these global conditions, Indonesia's economy demonstrated solid performance. Sustained national economic growth reflected the strong resilience of the domestic economy. Household consumption, investment, and government spending remained the main drivers of growth.

The Supervisory Board believes that maintained macroeconomic stability has created a conducive business environment. This condition ultimately supported increasing demand for payment instruments, security documents, and digital services, which have become increasingly relevant in line with the development of transactions and public services today.

Analysis of PERURI's Position in the Industry

The Supervisory Board observes that the security printing and security solutions industry is undergoing significant changes. On the one hand, digitalization is advancing rapidly. On the other hand, demand for physical security products remains high as they are closely associated with public trust, financial system stability, and government governance.

National economic growth has also contributed positively to the demand for cash, legal documents, authentication services, and various digital security solutions. This creates opportunities for companies that are able to adapt and offer solutions that are relevant to evolving needs.

Dalam konteks tersebut, PERURI memiliki posisi yang sangat strategis sebagai satu-satunya BUMN yang mendapat mandat untuk mencetak uang rupiah dan memproduksi berbagai dokumen sekuriti negara. Keunggulan ini menjadi modal penting bagi Perusahaan untuk terus memberikan kontribusi bagi negara.

Dewan Pengawas juga memandang bahwa langkah Direksi dalam mengembangkan bisnis keamanan digital merupakan keputusan yang tepat. Upaya transformasi tersebut tidak hanya memperkuat daya saing PERURI, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan. Dengan fondasi bisnis yang kuat serta kemampuan yang terus ditingkatkan, PERURI memiliki peluang yang baik untuk mempertahankan kepemimpinannya sekaligus memperluas kontribusi di masa mendatang.

Penilaian Dewan Pengawas terhadap Kinerja Direksi

Dewan Pengawas menilai bahwa Direksi telah menjalankan tugasnya dengan baik sepanjang tahun buku 2025. Di tengah tantangan industri dan perubahan yang terus berlangsung, Direksi mampu menjaga kinerja Perusahaan tetap positif. Dari sisi keuangan, PERURI membukukan laba bersih konsolidasian tahun berjalan sebesar Rp238,43 miliar. Capaian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang ditempuh manajemen dalam mengelola sumber daya, menjaga efisiensi, dan menangkap peluang usaha telah memberikan hasil yang baik bagi Perusahaan.

Dari aspek operasional, berbagai target penting berhasil dicapai. Penyerahan Uang Kertas Republik Indonesia memperoleh capaian yang relatif baik, menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan strategis nasional. Penyerahan Dokumen Pertanahan juga melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan kemampuan organisasi dalam merespons peningkatan kebutuhan pelanggan.

Kinerja positif juga terlihat dari berbagai lini usaha yang berhasil melampaui target. Tingginya permintaan terhadap produk dokumen sekuriti serta keberhasilan pengembangan layanan digital melalui berbagai proyek pemerintah menunjukkan bahwa Direksi mampu membaca kebutuhan pasar dan meresponsnya dengan cepat. Hal ini menjadi bukti bahwa transformasi yang selama ini dijalankan tidak hanya memperluas sumber pertumbuhan baru, tetapi juga semakin memperkuat relevansi PERURI di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

Pada lini usaha lainnya, penyerahan meterai juga mencatat hasil yang menggembirakan dan semakin memperkuat kontribusi bisnis tradisional Perusahaan. Secara keseluruhan, capaian operasional tersebut menunjukkan kemampuan Direksi dalam menjaga kesinambungan operasional sekaligus mengembangkan peluang usaha baru.

Dewan Pengawas memberikan apresiasi atas capaian Direksi sepanjang tahun 2025. Realisasi KPI Direksi yang melampaui target mencerminkan efektivitas kepemimpinan dan kerja sama yang baik dalam mengelola Perusahaan. Kinerja arus

In this context, PERURI holds a highly strategic position as the only State-Owned Enterprise mandated to print rupiah banknotes and produce various state security documents. This advantage serves as an important foundation for the Company to continue delivering contributions to the country.

The Supervisory Board also views the Board of Directors' initiatives in developing digital security businesses as an appropriate strategic decision. These transformation efforts not only strengthen PERURI's competitiveness but also create new and more sustainable growth opportunities. With a strong business foundation and continuously enhanced capabilities, PERURI has a strong opportunity to maintain its leadership position while expanding its contributions in the future.

Supervisory Board's Assessment of the Board of Directors' Performance

The Supervisory Board assesses that the Board of Directors has performed its duties well throughout the fiscal year 2025. Amid industry challenges and ongoing changes, the Board of Directors was able to maintain the Company's positive performance. From a financial perspective, PERURI recorded consolidated net income for the year of Rp238.43 billion. This achievement demonstrates that the management's efforts in managing resources, maintaining efficiency, and capturing business opportunities have delivered positive results for the Company.

From an operational perspective, various key targets were successfully achieved. The delivery of Indonesian Rupiah Banknotes recorded relatively strong achievement, demonstrating the Company's ability to fulfill strategic national needs. The delivery of Land Documents also exceeded the established target, reflecting the organization's ability to respond to increasing customer demands.

Positive performance was also evident across various business lines that exceeded targets. Strong demand for security document products and the successful development of digital services through various government projects demonstrate that the Board of Directors has been able to identify market needs and respond swiftly. This serves as evidence that the transformation initiatives implemented to date have not only expanded new sources of growth but have also strengthened PERURI's relevance amid the evolving needs of society and the government.

In other business lines, the delivery of stamp products also recorded encouraging results and further strengthened the contribution of the Company's traditional business. Overall, these operational achievements demonstrate the Board of Directors' ability to maintain operational continuity while developing new business opportunities.

The Supervisory Board appreciates the achievements of the Board of Directors throughout 2025. The realization of the Board of Directors' KPIs exceeding targets reflects the effectiveness of leadership and strong collaboration



kas operasional yang kuat serta keberhasilan menghadirkan inovasi, khususnya pada layanan digital, menjadi modal penting bagi PERURI untuk melanjutkan pertumbuhan dan memperkuat daya saingnya di masa mendatang.

Meskipun demikian, Dewan Pengawas tetap memandang adanya beberapa aspek yang perlu terus diperkuat, antara lain optimalisasi capaian EBITDA, pemenuhan volume produksi uang kertas sesuai rencana, serta pemanfaatan investasi mesin dan teknologi agar memberikan manfaat yang semakin optimal. Perhatian terhadap aspek-aspek tersebut penting untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesiapan Perusahaan menghadapi tantangan ke depan.

Secara keseluruhan, Dewan Pengawas menilai bahwa kinerja Direksi pada tahun 2025 telah memberikan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan pertumbuhan PERURI dan menjadi bekal yang baik untuk menyongsong tahun-tahun berikutnya.

Pengawasan Dewan Pengawas Dalam Perumusan dan Implementasi Strategi

Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan atas perumusan dan implementasi strategi Perusahaan secara aktif, terarah, dan berkesinambungan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang disusun Direksi selaras dengan mandat PERURI, arahan Pemilik Modal, perkembangan industri, serta tujuan jangka panjang Perusahaan.

Dalam tahap perumusan strategi, Dewan Pengawas menelaah berbagai asumsi utama yang digunakan Direksi, mulai dari proyeksi permintaan, kesiapan kapasitas produksi, kebutuhan investasi, pengembangan bisnis digital, hingga berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian target. Proses ini dilakukan melalui pembahasan RKAP, evaluasi realisasi kinerja, rapat internal Dewan Pengawas, serta koordinasi bersama Direksi.

Melalui mekanisme tersebut, Dewan Pengawas berupaya memastikan bahwa setiap strategi yang ditetapkan memiliki dasar pertimbangan yang memadai, realistis, dan dapat dijalankan secara efektif.

Pada tahap implementasi, Dewan Pengawas melakukan pemantauan melalui Rapat Koordinasi dengan Direksi yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan. Forum ini menjadi mekanisme utama untuk membahas pelaksanaan kegiatan Direksi, realisasi RKAP yang mencakup kinerja operasional dan keuangan, perkembangan program strategis, serta status tindak lanjut atas arahan dan rekomendasi yang telah diberikan. Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas dan Direksi telah melaksanakan 12 kali Rapat Koordinasi, termasuk beberapa agenda rapat khusus yang membahas isu strategis dan prioritas Perusahaan.

Selain Rapat Koordinasi dengan Direksi, Dewan Pengawas juga melaksanakan rapat internal sebagai forum untuk membahas isu-isu pengawasan, menyelaraskan pandangan

in managing the Company. Strong operating cash flow performance and the success in delivering innovations, particularly in digital services, serve as important foundations for PERURI to continue its growth and strengthen its competitiveness in the future.

Nevertheless, the Supervisory Board continues to recognize several aspects that require further strengthening, including optimizing EBITDA achievement, fulfilling banknote production volumes in accordance with plans, and maximizing the utilization of machinery and technology investments to generate increasingly optimal benefits. Attention to these aspects is essential to improve efficiency, productivity, and the Company's readiness in facing future challenges.

Overall, the Supervisory Board believes that the Board of Directors' performance in 2025 has established a strong foundation for PERURI's sustainable growth and provides a solid basis for navigating the coming years.

Supervisory Board Oversight In the Formulation and Implementation of Strategy

The Supervisory Board actively, systematically, and continuously performs its oversight function over the formulation and implementation of the Company's strategies. This oversight is carried out to ensure that the strategies formulated by the Board of Directors are aligned with PERURI's mandate, the directives of the Capital Owner, industry developments, and the Company's long-term objectives.

During the strategy formulation process, the Supervisory Board reviews various key assumptions used by the Board of Directors, including demand projections, production capacity readiness, investment requirements, digital business development, and various risks that may affect target achievement. This process is conducted through discussions on the Corporate Work Plan and Budget (RKAP), performance realization evaluations, internal Supervisory Board meetings, and coordination with the Board of Directors.

Through this mechanism, the Supervisory Board seeks to ensure that every established strategy is supported by adequate considerations, realistic assumptions, and can be implemented effectively.

During the implementation stage, the Supervisory Board conducted monitoring through Coordination Meetings with the Board of Directors, which were held regularly every month. These forums served as the primary mechanism for discussing the implementation of the Board of Directors' activities, RKAP realization covering operational and financial performance, developments in strategic programs, as well as the status of follow-up actions on directions and recommendations that had previously been provided. Throughout 2025, the Supervisory Board and the Board of Directors conducted 12 Coordination Meetings, including several special meetings dedicated to discussing strategic and priority issues of the Company.

In addition to Coordination Meetings with the Board of Directors, the Supervisory Board also conducted internal meetings as a forum to discuss oversight issues, align

anggota Dewan Pengawas, serta merumuskan arahan yang akan disampaikan kepada Direksi. Secara keseluruhan, pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawas pada tahun 2025 menyelenggarakan 26 kali rapat, baik rapat internal maupun rapat gabungan/koordinasi dengan Direksi, sehingga proses pengawasan dan pemberian nasihat dapat dilakukan secara konsisten, terdokumentasi, dan responsif terhadap perkembangan Perusahaan.

Pengawasan Dewan Pengawas juga diperkuat melalui kunjungan kerja lapangan ke sejumlah unit kerja dan Anak Perusahaan. Pada tahun 2025, Dewan Pengawas melaksanakan kunjungan antara lain ke PT Kertas Padalarang, fasilitas PERURI di Karawang termasuk area *High Security Solution* dan pabrik PERURI, PT Peruri Wira Timur, serta PT Peruri Properti. Melalui kunjungan tersebut, Dewan Pengawas memperoleh pemahaman yang lebih langsung atas kondisi operasional, kesiapan produksi, pengelolaan Anak Perusahaan, serta isu-isu yang memerlukan perhatian dalam mendukung pelaksanaan strategi Perusahaan.

Selain kunjungan kerja lapangan di dalam negeri, Dewan Pengawas juga melaksanakan kunjungan kerja luar negeri dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat terkait proyek uang kertas. Kunjungan tersebut mencakup beberapa perusahaan strategis, antara lain Lanqard, Voith, Louisenthal, KBA, SICPA, IDEMIA, dan De La Rue. Kegiatan ini memperluas referensi Dewan Pengawas dalam memberikan arahan kepada Direksi terkait penguatan kapabilitas produksi uang kertas, teknologi pendukung, kualitas produk, dan ketahanan rantai pasok.

Dewan Pengawas juga memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara strategi penguatan bisnis inti dan pengembangan mandat PERURI sebagai *Government Technology* (GovTech) Indonesia. Dalam pandangan Dewan Pengawas, keberhasilan transformasi PERURI sangat ditentukan oleh kemampuan Perusahaan dalam menjaga keandalan bisnis *security printing*, memperkuat kapabilitas digital, memastikan kesiapan teknologi informasi, serta mengelola risiko penugasan strategis secara cermat. Oleh karena itu, pengawasan Dewan Pengawas diarahkan untuk memastikan bahwa pengembangan bisnis digital dilakukan berdasarkan kajian yang memadai, tata kelola yang kuat, serta pertimbangan risiko dan keberlanjutan kinerja.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa Direksi telah menjalankan strategi Perusahaan secara terarah, dengan sejumlah capaian positif pada lini bisnis inti dan digital. Namun demikian, Dewan Pengawas tetap memberikan perhatian terhadap beberapa area yang memerlukan penguatan, terutama optimalisasi kapasitas produksi, keberlanjutan kontribusi bisnis digital, pengelolaan risiko penugasan strategis, efektivitas belanja modal, penguatan tata kelola terintegrasi, serta tindak lanjut atas rekomendasi audit. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, Dewan Pengawas memastikan bahwa implementasi strategi PERURI tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik, terukur, dan selaras dengan keberlanjutan usaha.

perspectives among Supervisory Board members, and formulate recommendations and directions to be conveyed to the Board of Directors. Overall, the implementation of the Supervisory Board's oversight function in 2025 was conducted 26 meetings, consisting of both internal meetings and joint/coordination meetings with the Board of Directors, enabling the oversight and advisory processes to be carried out consistently, in a well-documented manner, and responsively to the Company's developments.

The Supervisory Board's oversight was also strengthened through field visits to several work units and Subsidiaries. In 2025, the Supervisory Board conducted visits, among others, to PT Kertas Padalarang, PERURI facilities in Karawang including the High Security Solution area and PERURI factory, PT Peruri Wira Timur, as well as PT Peruri Properti. Through these visits, the Supervisory Board obtained a more direct understanding of operational conditions, production readiness, Subsidiary management, as well as issues requiring attention in supporting the implementation of the Company's strategy.

In addition to domestic field visits, the Supervisory Board also conducted overseas working visits in the context of supervision and providing advice related to banknote projects. These visits included several strategic companies, among others Lanqard, Voith, Louisenthal, KBA, SICPA, IDEMIA, and De La Rue. These activities broadened the Supervisory Board's references in providing direction to the Board of Directors regarding the strengthening of banknote production capabilities, supporting technologies, product quality, and supply chain resilience.

The Supervisory Board also paid close attention to the linkage between strategies for strengthening the core business and the development of PERURI's mandate as GovTech Indonesia. In the Supervisory Board's view, the success of PERURI's transformation is highly dependent on the Company's ability to maintain the reliability of its security printing business, strengthen digital capabilities, ensure information technology readiness, and carefully manage the risks associated with strategic assignments. Accordingly, the Supervisory Board's oversight was directed toward ensuring that digital business development was carried out based on adequate assessment, strong governance, as well as proper consideration of risks and business sustainability.

The results of the oversight indicate that the Board of Directors had implemented the Company's strategies in a focused manner, supported by a number of positive achievements in both the core and digital business lines. Nevertheless, the Supervisory Board continued to emphasize several areas requiring further strengthening, particularly the optimization of production capacity, sustainability of digital business contributions, management of strategic assignment risks, effectiveness of capital expenditures, strengthening of integrated governance, as well as follow-up actions on audit recommendations. Through continuous oversight, the Supervisory Board ensured that the implementation of PERURI's strategy remained within the framework of good governance, measurable execution, and sustainable business practices.



Saran dan Nasihat Dewan Pengawas kepada Direksi

Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas menyampaikan arahan strategis kepada Direksi untuk memperkuat kinerja, menjaga kesinambungan bisnis, serta memastikan pelaksanaan strategi Perusahaan tetap selaras dengan mandat dan arah transformasi PERURI. Arahan tersebut diberikan terutama pada aspek penguatan bisnis inti, pengembangan sumber pendapatan baru, peningkatan efisiensi, optimalisasi investasi, penguatan kinerja Anak Perusahaan, serta penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Dewan Pengawas memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan bisnis utama PERURI, khususnya pencetakan uang rupiah dan produk sekuriti negara, mengingat lini bisnis tersebut memiliki peran strategis bagi negara sekaligus menjadi salah satu penopang utama kinerja Perusahaan. Oleh karena itu, Direksi didorong untuk terus memastikan kesiapan bahan baku dan bahan pembantu, optimalisasi kapasitas mesin, pemenuhan standar kualitas, serta ketepatan penyerahan produk sesuai komitmen dengan pemberi kerja.

Sejalan dengan dinamika kebutuhan pasar dan mandat digital yang diemban Perusahaan, Dewan Pengawas juga mendorong Direksi untuk memperkuat diversifikasi pendapatan melalui pengembangan bisnis digital, optimalisasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/GovTech, serta upaya memperoleh kembali peluang bisnis strategis, termasuk produk paspor. Setiap inisiatif bisnis diharapkan didukung oleh kajian yang memadai, proyeksi manfaat yang realistis, dan rencana implementasi yang jelas agar mampu memberikan kontribusi berkelanjutan bagi Perusahaan.

Dari aspek keuangan dan operasional, Dewan Pengawas menekankan pentingnya disiplin efisiensi biaya, peningkatan produktivitas, serta optimalisasi belanja modal agar investasi yang dilakukan benar-benar mendukung transformasi dan pertumbuhan bisnis PERURI. Dewan Pengawas juga mendorong penguatan peran Anak Perusahaan agar selaras dengan arah strategis induk dan mampu memberikan nilai tambah terhadap kinerja konsolidasian.

Dalam menghadapi tahun 2026, Dewan Pengawas memberikan arahan agar RKAP disusun secara selektif, realistis, dan selaras dengan RJPP serta prioritas transformasi PERURI. Rencana kerja tersebut perlu memperhatikan kesiapan operasional, kebutuhan investasi, kapasitas organisasi, serta risiko-risiko strategis yang dapat memengaruhi pencapaian target. Dengan demikian, RKAP 2026 diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi peningkatan kinerja, penguatan daya saing, dan keberlanjutan usaha PERURI.

Recommendations and Advice of the Supervisory Board to the Board of Directors

Throughout 2025, the Supervisory Board provided strategic guidance to the Board of Directors to strengthen performance, maintain business continuity, and ensure that the implementation of the Company's strategies remained aligned with PERURI's mandate and transformation direction. The guidance primarily covered the strengthening of core businesses, development of new sources of revenue, improvement of efficiency, optimization of investments, strengthening the performance of Subsidiaries, and preparation of the work plan for the following year.

The Supervisory Board paid particular attention to the sustainability of PERURI's main businesses, particularly the printing of rupiah banknotes and state security products, considering that these business lines have a strategic role for the country and serve as one of the Company's key performance drivers. Therefore, the Board of Directors was encouraged to continuously ensure the readiness of raw materials and supporting materials, optimize machine capacity, maintain quality standards, and ensure the timely delivery of products in accordance with commitments to clients.

In line with market dynamics and the digital mandate carried by the Company, the Supervisory Board also encouraged the Board of Directors to strengthen revenue diversification through the development of digital businesses, optimization of Electronic-Based Government System (SPBE)/GovTech services, as well as efforts to regain strategic business opportunities, including passport products. Every business initiative is expected to be supported by adequate assessments, realistic benefit projections, and clear implementation plans to ensure sustainable contributions to the Company.

From the financial and operational aspects, the Supervisory Board emphasized the importance of cost efficiency discipline, productivity improvement, and capital expenditure optimization to ensure that investments made truly support PERURI's business transformation and growth. The Supervisory Board also encouraged the strengthening of the role of Subsidiaries to remain aligned with the strategic direction of the Parent Company and contribute added value to consolidated performance.

In facing 2026, the Supervisory Board provided guidance that the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) should be prepared selectively, realistically, and aligned with the Company Long-Term Plan (RJPP) and PERURI's transformation priorities. The work plan needs to consider operational readiness, investment requirements, organizational capacity, and strategic risks that may affect target achievement. Accordingly, the 2026 RKAP is expected to serve as a strong foundation for improving performance, strengthening competitiveness, and ensuring PERURI's business sustainability.

Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan yang Disusun oleh Direksi

Dewan Pengawas memandang bahwa prospek usaha PERURI tahun 2026 perlu disikapi dengan cermat, sejalan dengan dinamika ekonomi global dan domestik yang masih berkembang. Kondisi ekonomi yang moderat, perkembangan geopolitik, serta tekanan pada rantai pasok global perlu menjadi perhatian dalam menjaga kesiapan operasional, fleksibilitas strategi, dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, produk percetakan sekuriti dan solusi keamanan tetap memiliki peran penting dalam mendukung sistem keuangan, administrasi negara, layanan publik, serta kepercayaan terhadap dokumen dan transaksi bernilai strategis. Pada saat yang sama, perubahan kebutuhan pelanggan dan percepatan digitalisasi layanan publik menjadi ruang bagi PERURI untuk terus memperkuat layanan keamanan digital serta dukungan terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Arah strategis yang disusun Direksi dinilai telah mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga kesinambungan bisnis inti sekaligus memperkuat pengembangan bisnis digital. Fokus pada penguatan kapabilitas *Currency Security*, *High Security Solution*, dan *Digital Business*, serta pengembangan peran sebagai *Government Technology* (GovTech) Indonesia, relevan dengan arah perkembangan industri dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Dengan mempertimbangkan karakter bisnis yang strategis dan arah transformasi yang sedang dijalankan, PERURI memiliki peluang untuk menjaga kinerja dan memperkuat perannya pada tahun 2026. Dewan Pengawas mendorong agar pelaksanaan strategi dilakukan secara bertahap, terukur, didukung kajian yang memadai, serta tetap berada dalam koridor tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip kehati-hatian.

Pandangan Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Dewan Pengawas memandang bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di PERURI sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan kerangka regulasi yang berlaku. Penerapan GCG menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada keberlanjutan. Bagi PERURI, penguatan GCG memiliki arti strategis karena karakter bisnis Perusahaan berkaitan langsung dengan mandat negara, produk berfitur sekuriti tinggi, serta pengembangan layanan digital pemerintah.

Dalam mendukung penerapan tersebut, Dewan Pengawas menilai bahwa PERURI telah memiliki perangkat GCG yang memadai sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Perangkat tersebut mencakup *Corporate Policy Manual*, Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*)/

Views on the Company's Business Prospects Prepared by the Board of Directors

The Supervisory Board is of the view that PERURI's business prospects for 2026 should be approached with prudence, in line with ongoing global and domestic economic dynamics. Moderate economic conditions, geopolitical developments, and continued pressure on global supply chains require careful attention to maintaining operational readiness, strategic flexibility, and prudence in business decision-making.

In line with these developments, security printing products and security solutions continue to play an important role in supporting the financial system, state administration, public services, and trust in critical documents and transactions. At the same time, changing customer needs and the acceleration of public service digitalization present opportunities for PERURI to further strengthen its digital security services and its support for the Electronic-Based Government System (SPBE).

The strategic direction formulated by the Board of Directors is considered to have appropriately taken into account the need to maintain the continuity of the core business while strengthening the development of the digital business. The focus on enhancing *Currency Security*, *High Security Solutions*, and *Digital Business* capabilities, as well as developing PERURI's role as Indonesia's *Government Technology* (GovTech) enabler, is aligned with industry trends and stakeholder needs.

Considering the strategic nature of the business and the ongoing transformation agenda, PERURI has opportunities to sustain its performance and strengthen its role in 2026. The Supervisory Board encourages that strategy implementation be carried out in a gradual and measurable manner, supported by adequate studies, and consistently aligned with good corporate governance principles and prudence.

Views on the Implementation of Good Corporate Governance

The Supervisory Board views that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at PERURI throughout 2025 was carried out consistently and in alignment with the applicable regulatory framework. The implementation of GCG serves as an important foundation in ensuring that the Company is managed in a transparent, accountable, integrity-driven, and sustainable manner. For PERURI, strengthening GCG carries strategic importance given the nature of the Company's business, which is closely related to state mandates, high-security-feature products, and the development of government digital services.

In supporting this implementation, the Supervisory Board considers that PERURI has established adequate GCG instruments as guidelines for conducting operational activities and decision-making processes. These instruments include the *Corporate Policy Manual*, *Code of Corporate Governance* (CoCG), *Code of Conduct* (CoC), *Board of Directors Charter*,



CoCG), Pedoman Etika Perilaku (*Code of Conduct/CoC*), Pedoman Kerja Direksi, Pedoman Kerja Dewan Pengawas, Pedoman Kerja Komite, serta berbagai manual dan prosedur operasional lainnya. Keberadaan perangkat tersebut memberikan arah yang jelas dalam memastikan konsistensi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran di seluruh lini organisasi.

Sejalan dengan ketersediaan perangkat GCG tersebut, Dewan Pengawas juga mengapresiasi komitmen Direksi dalam memperkuat internalisasi nilai dan budaya tata kelola melalui sosialisasi, pelatihan, serta penerapan standar etika di lingkungan Perusahaan. Upaya ini tidak hanya mendukung pemenuhan ketentuan regulasi, tetapi juga memperkuat budaya integritas yang menjadi prasyarat penting bagi PERURI dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Dari aspek Sistem Pengendalian Internal, Dewan Pengawas menilai bahwa pengendalian internal PERURI telah menjadi instrumen penting dalam mendukung efektivitas operasional, keandalan pelaporan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dewan Pengawas juga memberikan perhatian terhadap penguatan peran Satuan Pengawasan Intern (SPI), terutama dalam mengawal efektivitas pengendalian internal, tindak lanjut rekomendasi audit, serta peningkatan kredibilitas pelaporan Perusahaan. Untuk itu, Dewan Pengawas mendorong penguatan mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit melalui sistem pelacakan yang lebih terintegrasi dan keterkaitan dengan penilaian kinerja unit kerja maupun individu.

Pada aspek Manajemen Risiko, Dewan Pengawas memandang bahwa penerapan manajemen risiko di PERURI telah mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih terukur. Pengawasan terhadap manajemen risiko dilakukan melalui forum koordinasi Dewan Pengawas dan Direksi, serta didukung oleh peran Komite Pemantau Risiko. Melalui mekanisme tersebut, Dewan Pengawas memperoleh dasar yang memadai untuk menelaah profil risiko, efektivitas mitigasi, serta kesiapan Perusahaan dalam menghadapi risiko strategis, operasional, keuangan, teknologi, kepatuhan, dan reputasi.

Perhatian Dewan Pengawas juga diarahkan pada risiko-risiko yang memiliki keterkaitan langsung dengan arah transformasi Perusahaan, antara lain penguatan bisnis inti, ketahanan rantai pasok bahan baku, pengembangan bisnis digital, penugasan strategis, keamanan informasi, serta tata kelola terintegrasi pada Anak Perusahaan. Dalam hal ini, Dewan Pengawas mendorong agar proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, pemantauan, dan pelaporan risiko terus diperkuat, sehingga manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan strategis Perusahaan.

Terkait penerapan *Whistleblowing System* (WBS), Dewan Pengawas memandang bahwa WBS merupakan mekanisme penting dalam mendukung integritas, akuntabilitas, dan penegakan etika di lingkungan PERURI. Dewan Pengawas

Supervisory Board Charter, Committee Charters, as well as various other operational manuals and procedures. The existence of these instruments provides clear direction in ensuring the consistent implementation of the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness across all levels of the organization.

In line with the availability of these GCG instruments, the Supervisory Board also appreciates the commitment of the Board of Directors in strengthening the internalization of governance values and culture through socialization programs, training, and the implementation of ethical standards within the Company. These efforts not only support compliance with regulatory requirements, but also reinforce a culture of integrity, which is an essential prerequisite for PERURI in maintaining stakeholder trust.

From the perspective of the Internal Control System, the Supervisory Board considers that PERURI's internal controls have become an important instrument in supporting operational effectiveness, reporting reliability, asset safeguarding, as well as compliance with applicable regulations. The Supervisory Board also places particular attention on strengthening the role of the Internal Audit Unit (SPI), especially in overseeing the effectiveness of internal controls, follow-up actions on audit recommendations, and the enhancement of the Company's reporting credibility. Accordingly, the Supervisory Board encourages the strengthening of monitoring mechanisms for audit recommendation follow-ups through a more integrated tracking system and linkage with the performance evaluation of work units and/or individuals.

From the Risk Management perspective, the Supervisory Board considers that the implementation of risk management at PERURI has supported more measured decision-making processes. Oversight of risk management is conducted through coordination forums between the Supervisory Board and the Board of Directors, supported by the role of the Risk Monitoring Committee. Through these mechanisms, the Supervisory Board obtains an adequate basis for reviewing risk profiles, the effectiveness of mitigation measures, as well as the Company's preparedness in addressing strategic, operational, financial, technological, compliance, and reputational risks.

The Supervisory Board also places attention on risks directly related to the Company's transformation direction, including strengthening the core business, resilience of raw material supply chains, digital business development, strategic assignments, information security, as well as integrated governance within Subsidiaries. In this regard, the Supervisory Board encourages the continuous strengthening of risk identification, measurement, mitigation, monitoring, and reporting processes, so that risk management functions not only as a control tool, but also as an integral part of the Company's strategic decision-making process.

With regard to the implementation of the Whistleblowing System (WBS), the Supervisory Board considers the WBS to be an important mechanism in supporting integrity, accountability, and the enforcement of ethics within

mendorong agar setiap laporan yang diterima melalui WBS ditangani secara objektif, rahasia, dan sesuai prosedur, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap pelapor serta tindak lanjut yang proporsional. Peran Dewan Pengawas dalam WBS dijalankan melalui fungsi pengawasan atas efektivitas mekanisme pelaporan, penanganan pengaduan, serta tindak lanjut atas laporan yang bersifat material.

Penerapan GCG di PERURI juga tercermin dari pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawas yang berjalan secara aktif dan terukur. Pada tahun 2025, realisasi capaian KPI Dewan Pengawas sampai dengan Triwulan IV tercatat sebesar 101,89 poin dari target 100 poin, yang mencakup aspek hubungan Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal, hubungan Dewan Pengawas dengan Direksi, serta aspek internal Dewan Pengawas. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah dilaksanakan secara terarah melalui rapat internal, rapat koordinasi dengan Direksi, pemberian saran dan nasihat, serta pemantauan terhadap kepatuhan dan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

Dengan berbagai penguatan tersebut, Dewan Pengawas menilai bahwa penerapan GCG di PERURI pada tahun 2025 telah menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan Perusahaan. Ke depan, Dewan Pengawas mendorong agar kualitas penerapan GCG terus ditingkatkan melalui penguatan pengawasan, efektivitas pengendalian internal, peningkatan maturitas manajemen risiko, optimalisasi WBS, serta penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan praktik terbaik. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi PERURI.

Pandangan atas Integrasi ESG dan Kesiapan Pengungkapan Keberlanjutan

Keberlanjutan menjadi agenda strategis dalam arah pengembangan PERURI, agar pertumbuhan Perusahaan senantiasa selaras dengan tanggung jawab terhadap aspek sosial, lingkungan, serta tata kelola. Oleh karena itu, integrasi aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) perlu terus diselaraskan dengan strategi, pengelolaan risiko, dan pelaporan Perusahaan, terutama mengingat PERURI menjalankan dua ranah usaha yang sama-sama menuntut keandalan, keamanan, dan kepercayaan publik, yaitu produk sekuriti fisik dan layanan digital.

ESG tidak semata-mata menjadi kerangka pelaporan, tetapi juga cara Perusahaan membaca dampak, risiko, dan peluang keberlanjutan yang melekat pada karakter bisnisnya. Pada dimensi lingkungan, perhatian diarahkan pada pengelolaan dampak proses produksi dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab. Pada dimensi sosial, fokus mencakup keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta perlindungan kepentingan pemangku kepentingan. Adapun pada dimensi tata kelola, penekanan diberikan pada akuntabilitas pengelolaan isu keberlanjutan agar selaras dengan proses pengambilan keputusan Perusahaan.

PERURI. The Supervisory Board encourages that every report received through the WBS be handled objectively, confidentially, and in accordance with established procedures, while ensuring whistleblower protection and proportionate follow-up actions. The Supervisory Board's role in the WBS is carried out through oversight of the effectiveness of reporting mechanisms, complaint handling, as well as follow-up actions on material reports.

The implementation of GCG at PERURI is also reflected in the active and measurable execution of the Supervisory Board's oversight function. In 2025, the realization of the Supervisory Board's KPI achievement up to the fourth quarter reached 101.89 points against a target of 100 points, covering aspects related to the Supervisory Board's relationship with the Capital Owner, the Supervisory Board's relationship with the Board of Directors, as well as internal aspects of the Supervisory Board. This achievement demonstrates that the oversight function was carried out in a focused manner through internal meetings, coordination meetings with the Board of Directors, the provision of recommendations and advice, as well as monitoring of compliance and GCG implementation within the Company.

With these strengthening efforts, the Supervisory Board considers that the implementation of GCG at PERURI in 2025 has become an important foundation in supporting the Company's sustainability. Going forward, the Supervisory Board encourages the continued enhancement of GCG implementation quality through stronger oversight, more effective internal controls, increased risk management maturity, optimization of the WBS, as well as alignment with evolving regulations and best practices. These efforts are expected to strengthen stakeholder trust and support the creation of long-term value for PERURI.

Views on the Integration of ESG and Sustainability Disclosure Readiness

Sustainability is a strategic agenda within PERURI's development direction, ensuring that the Company's growth remains aligned with its responsibilities toward social, environmental, and governance aspects. Therefore, the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects needs to be continuously aligned with the Company's strategy, risk management, and reporting processes, particularly considering that PERURI operates in two business areas that both require reliability, security, and public trust, namely physical security products and digital services.

ESG is not merely a reporting framework, but also a means for the Company to assess the impacts, risks, and sustainability opportunities inherent in its business characteristics. From an environmental perspective, attention is directed toward managing the impacts of production processes and utilizing resources responsibly. From a social perspective, the focus includes occupational health and safety, human capital development, and the protection of stakeholder interests. Meanwhile, from a governance perspective, emphasis is placed on the accountability of sustainability issue management to ensure alignment with the Company's decision-making processes.



Sejalan dengan hal tersebut, Dewan Pengawas mendorong PERURI untuk mematangkan kesiapan dalam menghadapi perkembangan standar pelaporan, termasuk Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 yang disusun mengikuti empat pilar utama, yaitu *Governance*, *Strategy*, *Risk Management*, serta *Metrics and Targets*. Pada pilar *Governance*, kesiapan diarahkan pada kejelasan peran dan tanggung jawab dalam pengawasan isu keberlanjutan. Pada pilar *Strategy*, aspek ESG perlu semakin terhubung dengan arah bisnis dan mandat strategis Perusahaan.

Pada pilar *Risk Management*, risiko keberlanjutan perlu semakin terintegrasi ke dalam proses pengelolaan risiko Perusahaan, mulai dari identifikasi hingga pelaporan, sehingga isu ESG dapat dikelola dalam kerangka yang selaras dengan risiko usaha lainnya. Sementara itu, pilar *Metrics and Targets* menekankan penguatan kualitas data, indikator, dan dokumentasi pendukung agar informasi keberlanjutan dapat disajikan secara konsisten, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, kredibilitas pengungkapan keberlanjutan perlu didukung oleh koordinasi lintas fungsi dan mekanisme *assurance* yang memadai. Dewan Pengawas memandang bahwa kesinambungan penguatan pada area tersebut menjadi agenda penting agar PERURI semakin siap mengantisipasi perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan, sekaligus menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

Penilaian Dewan Pengawas Atas Kinerja Komite Di Bawah Dewan Pengawas

Dewan Pengawas menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Pengawas telah menjalankan fungsi pendukung pengawasan secara baik sepanjang tahun 2025. Penilaian tersebut didasarkan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite, keaktifan dalam memberikan kajian dan rekomendasi, kualitas pembahasan dalam rapat, serta kontribusi komite dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Perusahaan.

Komite Audit berperan penting dalam membantu Dewan Pengawas melakukan penelaahan atas laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, pelaksanaan audit internal dan eksternal, tindak lanjut atas rekomendasi audit, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dewan Pengawas menilai bahwa Komite Audit telah memberikan dukungan yang memadai dalam memperkuat kualitas pengawasan, khususnya terkait keandalan pelaporan keuangan, kredibilitas proses pelaporan, dan efektivitas fungsi pengendalian internal.

Komite Pemantau Risiko juga telah menjalankan perannya dalam membantu Dewan Pengawas melakukan penelaahan atas penerapan manajemen risiko Perusahaan. Dukungan komite mencakup pembahasan profil risiko, efektivitas mitigasi, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta pengawasan terhadap risiko-risiko strategis yang

In line with this, the Supervisory Board encourages PERURI to strengthen its readiness in addressing developments in sustainability reporting standards, including Sustainability Disclosure Standards (PSPK) 1 and PSPK 2, which are structured around four main pillars: Governance, Strategy, Risk Management, and Metrics and Targets. Under the Governance pillar, readiness is directed toward establishing clear roles and responsibilities in overseeing sustainability issues. Under the Strategy pillar, ESG aspects need to become increasingly integrated with the Company's business direction and strategic mandate.

Under the Risk Management pillar, sustainability risks need to be increasingly integrated into the Company's risk management process, from identification through reporting, so that ESG issues can be managed within a framework aligned with other business risks. Meanwhile, the Metrics and Targets pillar emphasizes strengthening the quality of data, indicators, and supporting documentation to ensure that sustainability information can be presented consistently, relevantly, and accountably.

Ultimately, the credibility of sustainability disclosures needs to be supported by cross-functional coordination and adequate assurance mechanisms. The Supervisory Board views the continued strengthening of these areas as an important agenda to ensure that PERURI is increasingly prepared to anticipate developments in sustainability disclosure standards while maintaining stakeholder trust in the long term.

Supervisory Board's Assessment of the Performance of Committees Under the Supervisory Board

The Supervisory Board considers that the committees under the Supervisory Board performed their oversight support functions effectively throughout 2025. This assessment is based on the implementation of each committee's duties and responsibilities, their active role in providing reviews and recommendations, the quality of discussions during meetings, as well as the committees' contributions in supporting the effectiveness of the Supervisory Board's oversight function over the management of the Company.

The Audit Committee played an important role in assisting the Supervisory Board in reviewing financial statements, the effectiveness of the internal control system, the implementation of internal and external audits, follow-up actions on audit recommendations, as well as compliance with applicable regulations. The Supervisory Board considers that the Audit Committee provided adequate support in strengthening the quality of oversight, particularly in relation to the reliability of financial reporting, the credibility of reporting processes, and the effectiveness of internal control functions.

The Risk Monitoring Committee also carried out its role in assisting the Supervisory Board in reviewing the implementation of the Company's risk management. The committee's support included discussions on risk profiles, the effectiveness of mitigation measures, the adequacy of risk management policies and procedures, as well as

berkaitan dengan penguatan bisnis inti, pengembangan bisnis digital, penugasan strategis, keamanan informasi, dan tata kelola terintegrasi. Dewan Pengawas menilai bahwa peran Komite Pemantau Risiko semakin penting dalam memastikan bahwa pengambilan keputusan Perusahaan didukung oleh pertimbangan risiko yang memadai.

Sementara itu, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mendukung Dewan Pengawas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait kebijakan nominasi, remunerasi, pengembangan talenta, serta kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan strategis Perusahaan. Dewan Pengawas menilai bahwa peran komite ini relevan dalam mendukung penguatan organisasi, kesinambungan kepemimpinan, serta kesiapan sumber daya manusia PERURI dalam menghadapi transformasi bisnis dan mandat digital yang semakin berkembang.

Dalam pandangan Dewan Pengawas, keberadaan komite-komite tersebut telah memperkuat kualitas pengawasan melalui pembahasan yang lebih mendalam, pemberian rekomendasi yang konstruktif, serta dukungan terhadap proses pengambilan keputusan Dewan Pengawas. Ke depan, Dewan Pengawas mendorong agar seluruh komite terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat koordinasi dengan fungsi terkait, serta memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara terukur untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan pencapaian sasaran strategis PERURI.

Apresiasi dan Penutup

Atas nama Dewan Pengawas, kami menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh insan PERURI atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemilik Modal, para pemangku kepentingan, mitra kerja, dan seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan kepada PERURI. Dengan semangat kebersamaan dan optimisme, kami yakin PERURI akan terus tumbuh, bertransformasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia.

oversight of strategic risks related to strengthening the core business, digital business development, strategic assignments, information security, and integrated governance. The Supervisory Board considers that the role of the Risk Monitoring Committee has become increasingly important in ensuring that the Company's decision-making processes are supported by adequate risk considerations.

Meanwhile, the Nomination and Remuneration Committee supported the Supervisory Board in carrying out its oversight function related to nomination and remuneration policies, talent development, as well as the alignment of the organizational structure with the Company's strategic needs. The Supervisory Board considers that the role of this committee is relevant in supporting organizational strengthening, leadership continuity, as well as PERURI's human capital readiness in facing business transformation and the increasingly evolving digital mandate.

In the view of the Supervisory Board, the existence of these committees has strengthened the quality of oversight through more in-depth discussions, the provision of constructive recommendations, as well as support for the Supervisory Board's decision-making processes. Going forward, the Supervisory Board encourages all committees to continue improving the effectiveness of their duties, strengthen coordination with related functions, and ensure that every recommendation can be followed up in a measurable manner to support the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and the achievement of PERURI's strategic objectives.

Appreciation and Closing Remarks

On behalf of the Supervisory Board, we would like to express our appreciation to the Board of Directors and all PERURI personnel for their dedication, hard work, and commitment demonstrated throughout 2025. We would also like to extend our gratitude to the Capital Owner, stakeholders, business partners, and all parties who have placed their trust in and provided support to PERURI. With a spirit of collaboration and optimism, we believe that PERURI will continue to grow, transform, and deliver its best contributions to Indonesia.

Jakarta, 29 Juni/June 2026



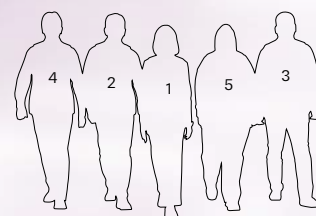
Marlison Hakim
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board



Direksi

Board of Directors





- 1 **Dwina Septiani Wijaya**
Direktur Utama
President Director
- 2 **Saiful Bahri**
Direktur Currency and Security Solution
Director of Currency and Security Solution
- 3 **Fajar Rizki**
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management
- 4 **Gandung Anggoro Murdani**
Direktur Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi
Director of Human Resources, Technology, and Information
- 5 **Farah Fitria Rahmayanti**
Direktur Digital Business
Director of Digital Business



Rompi yang dikenakan Direksi merupakan hasil Program PERURI *WearCycle*. Melalui inisiatif ini, PERURI mendukung ekonomi sirkular dengan memanfaatkan kembali seragam yang sudah tidak digunakan menjadi produk baru yang lebih bernilai. Inisiatif ini juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan mengurangi limbah tekstil serta menekan penggunaan energi dalam produksi tekstil baru.

The vests worn by the Board of Directors are products of the PERURI *WearCycle* Program. Through this initiative, PERURI supports the circular economy by repurposing unused uniforms into new products with greater value. The initiative also contributes to environmental preservation efforts by reducing textile waste and lowering energy consumption associated with the production of new textiles.



Laporan Direksi

Board of Directors' Report



Dwina Septiani Wijaya
Direktur Utama
President Director

Pemilik Modal dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Perkenankan kami, atas nama Direksi, menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) tahun 2025. Tahun ini menjadi periode yang strategis bagi Perusahaan dalam memperkuat peran sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional, melalui pelaksanaan mandat pencetakan Uang Rupiah dan dokumen sekuriti negara. Pada tahun 2025 ini, PERURI berada pada titik penting untuk menjaga momentum pertumbuhan dengan memperkuat keterkaitan antara bisnis inti dan mandat baru sebagai *Government Technology* (GovTech) Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Perusahaan berkomitmen mendukung kedaulatan nasional dan digital, dengan menghadirkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat.

Tinjauan Ekonomi 2025 dalam Konteks Industri PERURI

Perkembangan ekonomi global pada tahun 2025 membentuk lanskap industri sekuriti yang semakin dinamis dan menuntut kemampuan adaptasi yang tepat. Proyeksi International Monetary Fund yang menempatkan pertumbuhan ekonomi global pada kisaran 3,0%–3,2% menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dunia tetap tumbuh, namun dalam laju yang moderat. Perlambatan di sejumlah negara maju, penyesuaian kebijakan moneter, serta melemahnya perdagangan internasional sebagaimana juga disoroti oleh World Bank berdampak pada pola permintaan lintas negara, termasuk terhadap produk sekuriti dan uang kartal. Dalam kondisi tersebut, permintaan global cenderung lebih selektif, sementara kebutuhan terhadap sistem keamanan yang andal tetap menjadi prioritas utama.

Dinamika global tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik yang berdampak pada rantai pasok internasional. Bagi industri percetakan uang dan produk sekuriti, kondisi ini perlu dicermati karena ketersediaan bahan baku tertentu sangat bergantung pada kesinambungan pasokan global, standar kualitas yang ketat, serta jadwal pengadaan yang melibatkan berbagai pihak. Dalam konteks produksi uang kertas, dinamika rantai pasok bahan baku turut memengaruhi waktu ketersediaan material yang diperlukan, sehingga Perusahaan perlu melakukan penyesuaian terhadap jadwal dan aktivitas produksi. Kondisi tersebut dikelola PERURI melalui koordinasi intensif dengan pemberi kerja, penguatan perencanaan produksi, serta optimalisasi kapasitas operasional agar pemenuhan kebutuhan strategis nasional tetap dapat dijaga dengan baik.

Di tengah tantangan tersebut, PERURI juga menghadapi perubahan komposisi portofolio bisnis pada tahun 2025, termasuk belum berlanjutnya perolehan bisnis Paspor RI pada tahun buku berjalan. Kondisi ini menjadi perhatian Perusahaan dalam menjaga kesinambungan pendapatan dari lini produk sekuriti, sekaligus mendorong penguatan diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan daya saing produk, serta optimalisasi peluang pada lini bisnis lain yang memiliki prospek pertumbuhan. Dengan pendekatan tersebut, perubahan pada salah satu portofolio bisnis dikelola sebagai bagian dari dinamika usaha yang perlu direspons melalui penguatan ketahanan model bisnis PERURI.

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

On behalf of the Board of Directors, please allow us to present the 2025 Annual Report of Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI). This year marked a strategic period for the Company in strengthening its role as a State-Owned Enterprise (SOE) contributing to the national economy and development through the implementation of its mandate to print Rupiah currency and state security documents. In 2025, PERURI stood at an important point in maintaining its growth momentum by reinforcing the linkage between its core business and its new mandate as Indonesia's Government Technology (GovTech) provider. In carrying out this role, the Company remains committed to supporting national and digital sovereignty by delivering sustainable added value to the state and society.

2025 Economic Review in the Context of PERURI's Industry

Global economic developments in 2025 shaped an increasingly dynamic security industry landscape that demanded appropriate adaptation. The International Monetary Fund's projection of global economic growth in the range of 3.0%–3.2% indicated that global economic activity continued to grow, albeit at a moderate pace. Slowdowns in several advanced economies, monetary policy adjustments, and weakening international trade, as also highlighted by the World Bank, affected cross-border demand patterns, including demand for security products and currency printing. Under these conditions, global demand tended to become more selective, while the need for reliable security systems remained a key priority.

The global dynamics were also influenced by increasing geopolitical uncertainties that have impacted international supply chains. For the banknote printing and security products industry, this condition requires close attention, as the availability of certain raw materials is highly dependent on the continuity of global supply, stringent quality standards, and procurement schedules involving various parties. In the context of banknote production, raw material supply chain dynamics also affect the timing of the availability of required materials, requiring the Company to make adjustments to production schedules and activities. This condition is managed by PERURI through intensive coordination with clients, strengthening production planning, and optimizing operational capacity to ensure that the fulfillment of strategic national needs can be maintained properly.

Amid these challenges, PERURI also faced changes in the composition of its business portfolio in 2025, including the non-continuation of the Indonesian passport business acquisition during the fiscal year. This condition has become a focus for the Company in maintaining the continuity of revenue from the security products segment, while encouraging the strengthening of revenue source diversification, increasing product competitiveness, and optimizing opportunities in other business lines with growth prospects. Through this approach, changes in one of the business portfolios are managed as part of business dynamics that need to be addressed by strengthening the resilience of PERURI's business model.



Pada saat yang sama, layanan PERURI kepada Badan Gizi Nasional (BGN), yang sebelumnya belum diperhitungkan dalam asumsi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025, turut memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan Perusahaan. Kontribusi tersebut mendukung capaian kinerja tahun buku 2025 dan membantu menjaga keseimbangan portofolio bisnis di tengah perubahan kontribusi dari beberapa lini produk sekuriti fisik. Selain itu, pendapatan dari bisnis digital juga menunjukkan kinerja yang melampaui target RKAP, sehingga memperkuat peran bisnis digital dalam struktur pendapatan PERURI.

Kinerja bisnis digital PERURI pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama apabila dilihat dari kontribusinya terhadap total pendapatan Perusahaan. Peningkatan tersebut mencerminkan bahwa inisiatif transformasi yang telah dijalankan PERURI mulai memberikan hasil terhadap struktur pendapatan Perusahaan. Hal ini sekaligus memperkuat arah transformasi PERURI dari entitas percetakan sekuriti menuju penyedia solusi keamanan fisik dan digital yang relevan dengan kebutuhan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Di tengah dinamika global tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif kuat dan stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11% (*year on year/yoY*) pada tahun 2025. Secara spasial, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 56,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, diikuti oleh Sumatera sebesar 22,22%, Kalimantan 8,12%, Sulawesi 7,22%, Bali dan Nusa Tenggara 2,82%, serta Maluku dan Papua sebesar 2,69%. Dari sisi pertumbuhan, seluruh wilayah mencatat ekspansi positif, dengan Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,23%, diikuti Jawa 5,30%, Bali dan Nusa Tenggara 4,87%, Sumatera 4,81%, dan Kalimantan 4,79%, sementara Maluku dan Papua tumbuh sebesar 1,44%.

Distribusi pertumbuhan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional tidak hanya terpusat di wilayah utama, tetapi juga mulai berkembang di kawasan lain, meskipun dengan tingkat yang bervariasi. Bagi industri PERURI, kondisi ini memiliki implikasi penting, khususnya dalam memastikan ketersediaan dan distribusi produk sekuriti yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dominasi Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi memperkuat kebutuhan terhadap uang kartal dan dokumen sekuriti dalam volume besar, sementara pertumbuhan di wilayah lain mencerminkan potensi peningkatan permintaan yang perlu diantisipasi secara strategis.

Dalam konteks industri PERURI, pertumbuhan ekonomi domestik yang solid mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap uang kartal, dokumen sekuriti, serta instrumen legal lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi dan administrasi negara. Tingginya mobilitas masyarakat dan intensitas transaksi bisnis memperkuat peran produk PERURI sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi nasional. Di sisi lain, perkembangan ekonomi yang semakin merata juga menuntut penguatan sistem distribusi dan layanan agar dapat menjangkau seluruh wilayah secara efektif.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan percepatan digitalisasi di berbagai sektor. Kondisi ini mendorong kebutuhan terhadap solusi keamanan digital, autentikasi, perlindungan data, serta integrasi sistem

At the same time, PERURI's services to the National Nutrition Agency (BGN), which had not previously been included in the assumptions of the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), also made a positive contribution to the Company's revenue. This contribution supported the achievement of performance in the fiscal year 2025 and helped maintain the balance of the business portfolio amid changes in the contribution from several physical security product lines. In addition, revenue from the digital business also demonstrated performance exceeding the RKAP target, thereby strengthening the role of the digital business within PERURI's revenue structure.

PERURI's digital business performance in 2025 showed increasingly significant growth compared to previous years, particularly in terms of its contribution to the Company's total revenue. This increase reflects that the transformation initiatives implemented by PERURI have begun to deliver results in the Company's revenue structure. This also reinforces PERURI's transformation direction from a security printing entity into a provider of physical and digital security solutions that are relevant to the needs of the government, business sector, and society.

Amid these global dynamics, Indonesia's economy demonstrated relatively strong and stable performance. Based on data from Statistics Indonesia (BPS), national economic growth reached 5.11% (yoy) in 2025. Spatially, Indonesia's economic structure continued to be dominated by Java Island, contributing 56.93% to national GDP, followed by Sumatra at 22.22%, Kalimantan at 8.12%, Sulawesi at 7.22%, Bali and Nusa Tenggara at 2.82%, and Maluku and Papua at 2.69%. In terms of growth, all regions recorded positive expansion, with Sulawesi posting the highest growth at 6.23%, followed by Java at 5.30%, Bali and Nusa Tenggara at 4.87%, Sumatra at 4.81%, and Kalimantan at 4.79%, while Maluku and Papua grew by 1.44%.

This distribution of growth indicates that national economic activity is no longer concentrated solely in the main regions, but has also begun to expand into other areas, albeit at varying levels. For PERURI's industry, these conditions carry important implications, particularly in ensuring the availability and equitable distribution of security products throughout Indonesia. Java Island's dominance as the country's economic center reinforces the demand for currency and security documents in large volumes, while growth in other regions reflects the potential for increasing demand that must be strategically anticipated.

Within the context of PERURI's industry, solid domestic economic growth has driven increased demand for currency, security documents, and other legal instruments supporting economic activities and state administration. High public mobility and the intensity of business transactions have further strengthened the role of PERURI's products as part of the national economic infrastructure. At the same time, increasingly even economic growth also requires the strengthening of distribution and service systems to effectively reach all regions.

In addition, economic growth has been accompanied by accelerated digitalization across various sectors. This condition has driven increasing demand for digital security solutions, authentication, data protection, and electronic-

berbasis elektronik. Perkembangan tersebut memberikan peluang bagi PERURI untuk memperluas peran dari bisnis sekuriti fisik menuju penyediaan solusi keamanan digital yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam mendukung percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kinerja PERURI pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Perusahaan tetap memperoleh kepercayaan yang kuat dari pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dari capaian laba bersih yang melampaui target RKAP, peningkatan kontribusi bisnis digital, serta diperolehnya peringkat AAA dari Pefindo. Capaian tersebut selaras dengan tema Laporan Tahunan 2025 yang menekankan pentingnya kepercayaan dalam mendukung transformasi, penguatan kapabilitas, dan kesinambungan pertumbuhan PERURI di tengah perubahan lingkungan usaha.

Dengan demikian, kondisi ekonomi tahun 2025 menunjukkan kombinasi antara ketahanan pasar domestik, tantangan rantai pasok global, pergeseran portofolio bisnis, serta peluang pertumbuhan baru di sektor digital. Hal ini memberikan ruang bagi PERURI untuk menjaga kesinambungan bisnis inti sekaligus mengoptimalkan peluang ekspansi layanan di berbagai wilayah dan segmen industri.

Tantangan yang Dihadapi dan Respons Direksi

Sepanjang tahun 2025, PERURI menghadapi berbagai tantangan yang tidak terlepas dari dinamika lingkungan usaha, perkembangan teknologi, serta peningkatan kompleksitas kebutuhan pemangku kepentingan. Tantangan tersebut muncul seiring dengan peran strategis PERURI sebagai BUMN yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga mengemban amanat negara dalam menjaga kedaulatan dan kepercayaan publik.

Sebagai perwujudan dari visi dan misi Perusahaan, PERURI tetap berkomitmen untuk menjalankan perannya sebagai pemegang amanat kedaulatan Indonesia, menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi inovatif. Dalam konteks ini, PERURI tidak hanya berfokus pada menjaga integritas kegiatan ekonomi melalui penyediaan produk sekuriti yang terpercaya, tetapi juga mengemban mandat baru untuk memperkuat peran dalam transformasi digital layanan pemerintah, khususnya sebagai orkestrator dalam penyelenggaraan SPBE.

Namun demikian, dalam menjalankan peran tersebut, PERURI dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis. Dari sisi operasional, ketersediaan bahan baku menjadi salah satu isu krusial yang memerlukan pengelolaan yang cermat, mengingat ketergantungan pada rantai pasok global sangat memengaruhi model bisnis PERURI. Di sisi lain, percepatan digitalisasi turut meningkatkan risiko keamanan siber, yang menuntut penguatan sistem perlindungan data dan infrastruktur digital secara berkelanjutan.

Selain itu, implementasi SPBE sebagai mandat baru juga menghadirkan kompleksitas tersendiri, khususnya dalam menyelaraskan berbagai sistem, proses, dan pemangku kepentingan lintas instansi. Tantangan ini menuntut PERURI untuk mampu mengambil peran yang lebih strategis dalam mengintegrasikan layanan digital pemerintah, sekaligus memastikan efektivitas sistem yang dibangun.

based system integration. These developments have provided opportunities for PERURI to expand its role from a physical security business into a provider of digital security solutions that are relevant to the needs of the government and society, including in supporting the acceleration of the Electronic-Based Government System (SPBE).

PERURI's performance in 2025 demonstrated that the Company continued to receive strong trust from stakeholders. This was reflected in the achievement of net profit exceeding the RKAP target, the increased contribution of the digital business, and the attainment of an AAA rating from Pefindo. These achievements are aligned with the theme of the 2025 Annual Report, which emphasizes the importance of trust in supporting transformation, strengthening capabilities, and ensuring the sustainable growth of PERURI amid changes in the business environment.

Therefore, the economic conditions in 2025 reflected a combination of domestic market resilience, global supply chain challenges, shifts in the business portfolio, and new growth opportunities in the digital sector. This provided room for PERURI to maintain the sustainability of its core business while optimizing opportunities for service expansion across various regions and industry segments.

Challenges Faced and the Board of Directors' Response

Throughout 2025, PERURI faced various challenges arising from the dynamics of the business environment, technological developments, and the increasing complexity of stakeholder needs. These challenges emerged alongside PERURI's strategic role as a State-Owned Enterprise (SOE) that is not only oriented toward business performance, but also entrusted with the state mandate to safeguard sovereignty and public trust.

As an embodiment of the Company's vision and mission, PERURI remains committed to carrying out its role as the holder of Indonesia's sovereignty mandate, upholding the principles of good governance, and contributing to the improvement of public welfare through the utilization of innovative technology. In this context, PERURI not only focuses on maintaining the integrity of economic activities through the provision of trusted security products, but has also been entrusted with a new mandate to strengthen its role in the digital transformation of government services, particularly as the orchestrator in the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE).

However, in carrying out this role, PERURI faced several strategic challenges. From an operational perspective, the availability of raw materials became one of the crucial issues requiring careful management, given the dependence on global supply chains that remain vulnerable to disruptions. At the same time, the acceleration of digitalization has increased cybersecurity risks, thereby requiring continuous strengthening of data protection systems and digital infrastructure.

In addition, the implementation of SPBE as a new mandate also introduced its own complexities, particularly in aligning various systems, processes, and stakeholders across institutions. These challenges required PERURI to take on a more strategic role in integrating government digital services while ensuring the effectiveness of the systems being developed.



Menanggapi berbagai tantangan tersebut, PERURI terus mengambil langkah-langkah strategis yang terarah. Penguatan integrasi *end-to-end* pada produk sekuriti menjadi prioritas untuk menjaga kesinambungan rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah produk. Selain itu, Perusahaan juga memperkuat pengembangan produk sekuriti digital serta meningkatkan standar dan protokol keamanan siber guna melindungi integritas sistem. Dalam konteks SPBE, PERURI berupaya mempertegas perannya sebagai orkestrator dengan mendorong pengembangan *platform* yang mampu menghubungkan berbagai layanan pemerintah dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Upaya tersebut merupakan bagian dari langkah jangka panjang PERURI dalam membangun kapabilitas yang tidak hanya berfokus pada keunggulan di bidang percetakan sekuriti, tetapi juga pada pengembangan layanan digital pemerintah yang inklusif dan terpadu.

Strategi dan Kebijakan Strategis Tahun 2025

Pada tahun 2025, PERURI menetapkan arah strategis yang terintegrasi melalui kerangka PERURI House 2025–2029 sebagai representasi visi, misi, serta tujuan jangka panjang Perusahaan. Kerangka ini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan strategis yang tidak hanya memperkuat bisnis inti, tetapi juga akselerasi peran baru Perusahaan dalam ekosistem pemerintahan digital. Tema strategis yang diusung, yaitu menjadi perusahaan percetakan uang dan solusi sekuriti yang dikenal secara global sekaligus membangun fondasi pemerintahan digital, mencerminkan ambisi PERURI untuk memperluas kapabilitas dan relevansi bisnis di masa depan.

Dalam implementasinya, strategi PERURI difokuskan pada tiga pilar utama yang saling terintegrasi. Pilar pertama diarahkan pada penguatan bisnis eksisting melalui penerapan *high security philosophy* di seluruh lini usaha. Pada lini *currency*, Perusahaan menitikberatkan pada penguatan integrasi rantai nilai *end-to-end* guna meningkatkan kapabilitas produksi sekaligus menjaga efisiensi dan profitabilitas. Pada lini *non-currency*, strategi difokuskan pada mempertahankan kepemimpinan pasar domestik serta membuka peluang ekspansi ke pasar internasional yang potensial. Sementara itu, pada lini *digital security*, PERURI mendorong percepatan pengembangan produk dan *use case*, termasuk eksplorasi inovasi di bidang mata uang digital, guna memastikan daya saing di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

Pilar kedua berfokus pada pembangunan fondasi sebagai penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam hal ini, PERURI menetapkan kebijakan strategis untuk memperjelas peran dan tanggung jawab di seluruh rantai nilai melalui pendekatan yang terstruktur, sekaligus memastikan adanya mekanisme pendanaan yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas keuangan Perusahaan. Selain itu, penguatan model operasional dan kemitraan strategis menjadi prioritas untuk mendukung pengembangan kapabilitas organisasi. PERURI juga menetapkan standar tata kelola proyek dan arsitektur teknologi yang komprehensif guna memastikan implementasi SPBE berjalan efektif, efisien, dan terintegrasi.

Pilar ketiga berperan sebagai *enabler* yang mendukung keberhasilan kedua pilar utama. Fokus utama pada pilar ini mencakup pengembangan platform digital dan kapabilitas teknologi melalui pembentukan *enterprise architecture*

In response to these challenges, PERURI continued to undertake focused strategic measures. Strengthening end-to-end integration in security products became a priority in order to maintain supply chain continuity and enhance product added value. Furthermore, the Company also strengthened the development of digital security products and enhanced cybersecurity standards and protocols to protect system integrity. Within the context of SPBE, PERURI sought to reinforce its role as an orchestrator by encouraging the development of a common platform capable of connecting various government services within an integrated ecosystem.

These efforts form part of PERURI's long-term initiatives to build capabilities that are not only focused on excellence in the field of security printing, but also on the development of inclusive and integrated government digital services.

Strategies and Strategic Policies for 2025

In 2025, PERURI established an integrated strategic direction through the PERURI House 2025–2029 framework as a representation of the Company's vision, mission, and long-term objectives. This framework serves as the foundation for formulating strategic policies that not only strengthen the core business, but also accelerate the Company's new role within the digital government ecosystem. The strategic theme adopted, namely to become a globally recognized banknote printing and security solutions company while laying the foundation for digital government, reflects PERURI's ambition to expand its capabilities and business relevance in the future.

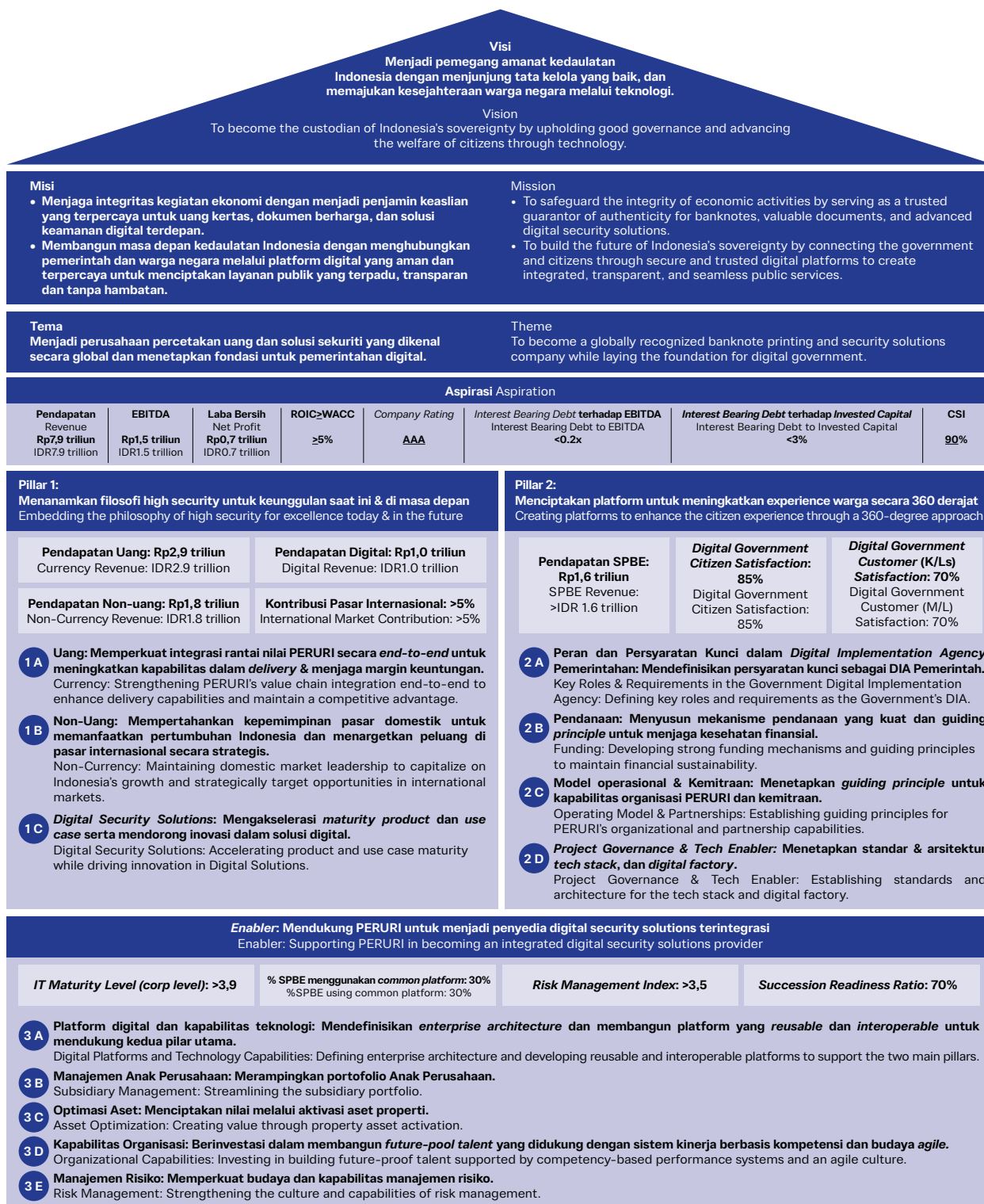
In its implementation, PERURI's strategy is focused on three interrelated main pillars. The first pillar is directed toward strengthening the existing business through the application of a high security philosophy across all business lines. In the currency segment, the Company emphasizes strengthening end-to-end value chain integration to enhance production capabilities while maintaining efficiency and profitability. In the non-currency segment, the strategy focuses on maintaining domestic market leadership while opening opportunities for expansion into potential international markets. Meanwhile, in the digital security segment, PERURI encourages the acceleration of product and use case development, including the exploration of innovations in the field of digital currency, in order to ensure competitiveness amid rapid technological developments.

The second pillar focuses on building the foundation as the organizer of the Electronic-Based Government System (SPBE). In this regard, PERURI established strategic policies to clarify roles and responsibilities across the entire value chain through a structured approach, while also ensuring sustainable funding mechanisms to maintain the Company's financial stability. In addition, strengthening the operating model and strategic partnerships has become a priority to support the development of organizational capabilities. PERURI has also established comprehensive project governance standards and technology architecture to ensure that the implementation of SPBE is effective, efficient, and integrated.

The third pillar serves as an enabler supporting the success of the two main pillars. The primary focus of this pillar includes the development of digital platforms and technological capabilities through the establishment of

yang terintegrasi. Di sisi lain, PERURI melakukan penataan portofolio anak perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan sinergi bisnis, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset guna menciptakan nilai tambah. Penguatan kapabilitas organisasi juga menjadi perhatian utama melalui investasi pada pengembangan talenta yang adaptif dan berbasis kinerja. Selain itu, Perusahaan terus memperkuat budaya dan sistem manajemen risiko untuk memastikan keberlanjutan usaha di tengah dinamika lingkungan bisnis.

an integrated enterprise architecture. At the same time, PERURI is streamlining its subsidiary portfolio to improve effectiveness and business synergies, while optimizing asset utilization to create added value. Strengthening organizational capabilities has also become a major priority through investment in adaptive and performance-based talent development. In addition, the Company continues to strengthen its risk management culture and systems to ensure business sustainability amid the dynamics of the business environment.



1. Sebagai % dari pendapatan Non-Uang
1. As a percentage of Non-Currency Revenue

2. UN e-Gov Digital Index
2. UN e-Gov Digital Index

3. Digital Implementation Agency
3. Digital Implementation Agency

Catatan: Target termasuk SPBE
Note: Targets include SPBE.



Secara keseluruhan, ketiga pilar tersebut diturunkan ke dalam 12 objektif strategis dan diimplementasikan melalui 30 inisiatif strategis yang telah diprioritaskan secara terukur. Inisiatif-inisiatif tersebut juga diselaraskan dengan arah kebijakan Badan Pengaturan (BP) BUMN, antara lain melalui penguatan ketahanan rantai pasok uang, peningkatan kapabilitas *end-to-end* pada produk sekuriti, pengembangan solusi digital yang skalabel, serta penegasan peran PERURI sebagai orkestrator dalam ekosistem pemerintahan digital.

Melalui strategi dan kebijakan tersebut, PERURI tidak hanya berupaya menjaga keberlanjutan dan keunggulan bisnis inti, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang, dengan mengintegrasikan kekuatan sekuriti fisik dan digital dalam satu ekosistem yang bernilai tambah tinggi.

Peran Direksi dalam Merumuskan dan Menerapkan Strategi

Direksi PERURI memimpin perumusan strategi Perusahaan melalui proses yang terstruktur, berbasis evaluasi kinerja, dinamika industri, kebutuhan pemangku kepentingan, dan arah kebijakan nasional. Tahun 2025 menjadi tahun pengujian strategi yang sesungguhnya: di satu sisi, pendapatan segmen Paspor RI mengalami penurunan seiring belum berlanjutnya permintaan dari Kementerian Imigrasi, sementara di sisi lain, segmen Digital mencatat pertumbuhan luar biasa hingga 433,7% didorong oleh penugasan GovTech Indonesia dan proyek dari instansi pemerintah. Dalam konteks inilah Direksi menjalankan peran strategisnya.

Direktur Utama memimpin arah kebijakan strategis Perusahaan dan memastikan keselarasan antara penguatan bisnis inti percetakan uang yang tetap menjadi kontributor utama dengan porsi 58,6% dari total penjualan, dan akselerasi transformasi digital sebagai mesin pertumbuhan baru. Di tengah dinamika 2025, Direktur Utama memimpin keputusan untuk memprioritaskan penguatan *pipeline* GovTech dan diversifikasi pelanggan segmen digital guna mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan tunggal.

Direktur Currency & Security Solution mengarahkan strategi penguatan bisnis uang dan produk sekuriti. Pada tahun 2025, realisasi penyerahan Uang Kertas RI mencapai Rp2.471,12 miliar, meningkat 43,75% dibanding tahun 2024 sebesar Rp1.719.001 juta. Direktur ini memimpin respons strategis terhadap kendala rantai pasok kertas uang akibat faktor geopolitik global, sekaligus mengakselerasi pengembangan segmen Dokumen Sekuriti yang berhasil melampaui target 145,8%.

Direktur Digital Business memimpin transformasi PERURI sebagai *platform* GovTech Indonesia. Pada 2025, segmen Digital membukukan pendapatan Rp873,98 miliar, dari hanya Rp163,77 miliar pada 2024, dengan katalis utama berupa integrasi SPBE lintas kementerian (Kemendikdasmen, Kemenkes, KemenPANRB, Kemensaintek) dan penugasan BGN. Direktur Digital Business memimpin ekspansi model bisnis dari *transactional* menuju *platform ecosystem*, termasuk penguatan posisi e-Meterai yang tumbuh 22,4%.

Overall, these three pillars are translated into 12 strategic objectives and implemented through 30 measurable and prioritized strategic initiatives. These initiatives are also aligned with the policy direction of the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (BP BUMN), including strengthening the resilience of the currency supply chain, enhancing end-to-end capabilities for security products, developing scalable digital solutions, and reinforcing PERURI's role as an orchestrator within the digital government ecosystem.

Through these strategies and policies, PERURI not only seeks to maintain the sustainability and excellence of its core business, but also to build a strong foundation for long-term growth by integrating the strengths of physical and digital security within a high value-added ecosystem.

The Role of the Board of Directors In Formulating and Implementing Strategy

PERURI's Board of Directors led the formulation of the Company's strategy through a structured process based on performance evaluation, industry dynamics, stakeholder needs, and national policy directions. The year 2025 became a true test of the Company's strategy: on one hand, revenue from the Indonesian Passport segment declined sharply due to unrealized orders from the Ministry of Immigration, while on the other hand, the Digital segment recorded extraordinary growth of 433.7%, driven by the GovTech Indonesia assignment and projects from government institution. It was within this context that the Board of Directors carried out its strategic role.

The President Director led the Company's strategic policy direction and ensured alignment between strengthening the core banknote printing business — which remained the backbone of the Company with a contribution of 58.6% of total sales — and accelerating digital transformation as a new growth engine. Amid the dynamics of 2025, the President Director led the decision to prioritize strengthening the GovTech pipeline and diversifying the Digital segment's client base in order to reduce dependence on a single source of revenue.

The Director of Currency & Security Solution directed strategies to strengthen the currency and security products business. In 2025, the realization of Indonesian Banknote deliveries reached Rp2,471,118 billion, an increase of 43.75% compared to Rp1,719,001 million, in 2024. This Director led the strategic response to banknote paper supply chain constraints caused by global geopolitical factors, while simultaneously accelerating the development of the Security Documents segment, which successfully exceeded its target by 145.8%.

The Director of Digital Business led PERURI's transformation into Indonesia's GovTech platform. In 2025, the Digital segment recorded revenue of Rp873.98 billion — rising from only Rp163.77 billion in 2024 — with the main catalysts being cross-ministerial SPBE integration (Ministry of Primary and Secondary Education, Ministry of Health, Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, and Ministry of Higher Education, Science and Technology) as well as the BGN assignment. The Director of Digital Business led the expansion of the business model from a transactional approach toward a platform ecosystem, including strengthening the position of e-Meterai, which grew by 22.4%.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko memastikan strategi bertumpu pada fondasi keuangan yang sehat. Di tengah tekanan profitabilitas akibat menurunnya pendapatan Paspor RI (turun Rp844 miliar dibanding 2024), fungsi keuangan memainkan peran kritis dalam realokasi sumber daya, pengendalian beban, serta pengelolaan pinjaman bank yang berhasil diturunkan 41,1% menjadi Rp297,27 miliar. Kontribusi pajak Perusahaan kepada negara tetap signifikan sebesar Rp415,81 miliar sepanjang 2025.

Direktur SDM, Teknologi dan Informasi memperkuat kesiapan organisasi dan teknologi untuk mendukung dualitas bisnis fisik-digital PERURI. Prioritas strategis tahun 2025 mencakup penguatan kapabilitas tim Digital untuk menangani eskalasi volume GovTech, peningkatan keamanan siber seiring dengan meluasnya ekosistem layanan digital pemerintah, serta pembangunan arsitektur teknologi yang mampu mendukung integrasi multi-kementerian secara simultan.

Melalui pembagian peran yang jelas dan kepemimpinan fungsional yang kuat, Direksi memastikan PERURI mampu merespons tahun 2025 yang penuh dinamika, mempertahankan keandalan bisnis inti percetakan uang, sekaligus mengakselerasi posisi sebagai mitra teknologi terpercaya pemerintah Indonesia.

Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Direksi memastikan implementasi strategi tahun 2025 berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut yang terstruktur. Seluruh strategi dan inisiatif utama Perusahaan diturunkan ke dalam program kerja RKAP 2025 yang memuat target kinerja, indikator pencapaian, penanggung jawab, serta tahapan pelaksanaan pada masing-masing fungsi. Dengan demikian, setiap unit kerja memiliki acuan yang jelas dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, Direksi menyelenggarakan 39 kali Rapat Direksi, dengan agenda yang mencakup pembahasan kinerja, RKAP, penyesuaian strategi, penguatan bisnis inti, pengembangan bisnis digital, pengelolaan SDM, pengadaan, manajemen risiko, serta proyek strategis Perusahaan. Tingkat kehadiran Direksi juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam proses pengambilan keputusan.

Melalui forum tersebut, Direksi melakukan evaluasi atas capaian kinerja, menelaah perkembangan pelaksanaan program kerja, mengidentifikasi deviasi terhadap target, serta menetapkan langkah korektif yang diperlukan agar implementasi strategi tetap berjalan secara terarah.

Pemantauan pelaksanaan strategi dilakukan melalui evaluasi kinerja berbasis *Key Performance Indicators* (KPI), laporan realisasi RKAP, pembahasan kinerja bulanan, serta forum Direksi yang membahas perkembangan program strategis dan kebutuhan penyesuaian atas target maupun prioritas Perusahaan. Melalui mekanisme tersebut, Direksi dapat memperoleh informasi kinerja secara berkala, mengidentifikasi potensi deviasi sejak dini, serta menetapkan langkah korektif secara tepat waktu.

The Director of Finance and Risk Management ensured that the strategy rested upon a sound financial foundation. Amid profitability pressures caused by the collapse of Indonesian Passport revenue (down by Rp844 billion compared to 2024), the finance function played a critical role in resource reallocation, expense control, and bank loan management, which was successfully reduced by 41.1% to Rp297.27 billion. The Company's tax contribution to the state also remained significant at Rp415.81 billion throughout 2025.

The Director of Human Resources, Technology and Information strengthened organizational and technological readiness to support PERURI's dual physical-digital business model. Strategic priorities in 2025 included strengthening the capabilities of the Digital team to handle the escalation of GovTech volumes, enhancing cybersecurity in line with the expansion of the government digital services ecosystem, and building a technology architecture capable of supporting simultaneous multi-ministerial integration.

Through a clear division of roles and strong functional leadership, the Board of Directors ensured that PERURI was able to navigate the dynamic conditions of 2025: maintaining the reliability of its core banknote printing business while accelerating its position as a trusted technology partner of the Government of Indonesia.

Processes Undertaken by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation

The Board of Directors ensured that the implementation of the 2025 strategy was carried out in accordance with the established direction through structured mechanisms covering planning, execution, monitoring, evaluation, and follow-up actions. All of the Company's key strategies and initiatives were translated into the 2025 RKAP work programs, which included performance targets, achievement indicators, responsible parties, and implementation stages for each function. Through this approach, each work unit had clear guidance in supporting the achievement of the Company's strategic objectives.

Throughout 2025, the Board of Directors conducted 39 Board of Directors Meetings, covering agendas related to performance discussions, RKAP, strategic adjustments, strengthening the core business, digital business development, human capital management, procurement, risk management, and the Company's strategic projects. The attendance level of the Board of Directors also reflected a strong commitment to the decision-making process.

Through these forums, the Board of Directors evaluated performance achievements, reviewed the progress of work program implementation, identified deviations from targets, and determined the necessary corrective actions to ensure that strategy implementation remained on track.

Monitoring of strategy implementation was conducted through performance evaluations based on Key Performance Indicators (KPIs), RKAP realization reports, monthly performance reviews, as well as Board of Directors forums discussing the progress of strategic programs and the need for adjustments to the Company's targets and priorities. Through these mechanisms, the Board of Directors was able to obtain periodic performance information, identify potential deviations at an early stage, and determine timely corrective actions.



Mekanisme pemantauan tersebut menjadi penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan mandat PERURI, terutama pada lini produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan negara dan layanan publik. Pada saat realisasi penyerahan Paspor RI berada di bawah target RKAP akibat tidak masuknya pesanan dari Kementerian Imigrasi, Direksi menetapkan langkah korektif melalui penyesuaian prioritas produksi, penguatan pemanfaatan kapasitas pada produk dokumen sekuriti lainnya, percepatan *pipeline* bisnis digital, serta pengendalian beban operasional. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan kinerja Perusahaan di tengah perubahan kebutuhan pelanggan strategis.

Di sisi lain, peningkatan volume layanan GovTech dan penugasan Badan Gizi Nasional yang belum direncanakan dalam RKAP dikelola melalui penguatan koordinasi lintas fungsi, percepatan kesiapan infrastruktur teknologi, penyesuaian alokasi sumber daya, serta pemantauan progres secara berkala. Respons tersebut memperlihatkan kemampuan PERURI dalam menyesuaikan prioritas pelaksanaan strategi, khususnya dalam mendukung perluasan mandat Perusahaan dari *high security printing* menuju layanan digital pemerintah yang aman, andal, dan terintegrasi. Melalui langkah tersebut, PERURI mampu merealisasikan pendapatan bisnis digital sebesar Rp873,98 miliar atau 239,5% di atas RKAP.

Untuk inisiatif strategis berskala besar, Direksi menerapkan mekanisme pelaporan progres secara lebih intensif sesuai dengan karakter dan tingkat kompleksitas masing-masing program. Pengembangan layanan GovTech dipantau melalui koordinasi lintas fungsi, pembahasan progres implementasi, serta pemantauan kesiapan teknologi dan operasional secara berkala. Sementara itu, penguatan bisnis sekuriti dipantau melalui evaluasi atas kesiapan produksi, ketersediaan bahan baku, kapasitas mesin, kualitas produk, serta ketepatan pemenuhan kebutuhan pelanggan strategis. Mekanisme ini memastikan setiap inisiatif strategis dapat dikendalikan secara responsif, terukur, dan selaras dengan prioritas Perusahaan.

Proses *monitoring* implementasi strategi juga diperkuat melalui pengawasan dari Dewan Pengawas, dukungan Komite Audit, serta peran Satuan Pengawas Intern (SPI) dan fungsi Manajemen Risiko. Setiap deviasi yang bersifat material, perkembangan pelaksanaan program strategis, serta langkah korektif yang diperlukan disampaikan melalui mekanisme laporan dan pembahasan berkala antara Direksi dan organ pengawas Perusahaan. Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan strategi PERURI senantiasa berada dalam koridor tata kelola yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan sasaran jangka panjang Perusahaan.

Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, PERURI mencatatkan kinerja yang solid, baik dari aspek operasional, keuangan, teknologi informasi dan digital, maupun pengembangan sumber daya manusia. Capaian tersebut mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam menjaga kesinambungan bisnis inti sebagai penyedia produk sekuriti negara, sekaligus memperkuat pengembangan layanan digital dan dukungan terhadap transformasi layanan pemerintahan berbasis elektronik.

These monitoring mechanisms became particularly important in maintaining the continuity of PERURI's mandate implementation, especially for product lines directly related to state needs and public services. When the realization of Indonesian Passport deliveries fell below the RKAP target due to the absence of orders from the Ministry of Immigration, the Board of Directors established corrective measures through adjustments to production priorities, strengthening the utilization of capacity for other security document products, accelerating the digital business pipeline, and controlling operational expenses. These measures were implemented to maintain the Company's performance balance amid changes in the needs of strategic customers.

On the other hand, the increase in GovTech service volumes and the National Nutrition Agency's assignment, which had not been planned in the RKAP, were managed through strengthened cross-functional coordination, accelerated technology infrastructure readiness, adjustments to resource allocation, and periodic progress monitoring. This response demonstrated PERURI's ability to adjust the priorities of strategy implementation, particularly in supporting the expansion of the Company's mandate from high-security printing toward secure, reliable, and integrated government digital services. Through these measures, PERURI successfully realized Digital revenue of Rp873.98 billion, or 239.5% above the RKAP target.

For large-scale strategic initiatives, the Board of Directors implemented more intensive progress reporting mechanisms in accordance with the characteristics and complexity of each program. The development of GovTech services was monitored through cross-functional coordination, implementation progress discussions, and periodic monitoring of technological and operational readiness. Meanwhile, the strengthening of the security business was monitored through evaluations of production readiness, raw material availability, machine capacity, product quality, and the timeliness of fulfilling the needs of strategic customers. This mechanism ensured that each strategic initiative could be managed responsively, measurably, and in alignment with the Company's priorities.

The strategy implementation monitoring process was further strengthened through the oversight of the Supervisory Board, the support of the Audit Committee, as well as the roles of the Internal Audit Unit and the Risk Management function. Any material deviations, developments in the implementation of strategic programs, and necessary corrective actions were communicated through periodic reporting and discussion mechanisms between the Board of Directors and the Company's supervisory organs. Through these mechanisms, PERURI's strategy implementation consistently remained within a governance framework that was transparent, accountable, and aligned with the Company's long-term objectives.

2025 Performance Achievements

Throughout 2025, PERURI recorded solid performance across operational, financial, information technology and digital, as well as human capital development aspects. These achievements reflect the Company's ability to maintain the sustainability of its core business as a provider of state security products, while also strengthening the development of digital services and support for the transformation of electronic-based government services.

Kinerja tahun 2025 juga menunjukkan bahwa PERURI mampu menjaga relevansi perannya di tengah perubahan kebutuhan pelanggan strategis, perkembangan teknologi, serta perluasan mandat Perusahaan sebagai GovTech Indonesia. Dengan fondasi bisnis *high security printing* yang kuat dan pengembangan kapabilitas digital yang semakin terarah, PERURI terus memperkuat posisinya sebagai institusi strategis yang menjaga kepercayaan dalam ekosistem sekuriti fisik dan digital.

Kinerja Operasional

Dari aspek operasional, PERURI berhasil menjaga pemenuhan kebutuhan produk-produk strategis negara, terutama pada lini Uang Rupiah, meterai, dokumen sekuriti, dan produk digital. Pada lini Uang Kertas RI, realisasi penyerahan tahun 2025 mencapai Rp2.471.118 juta, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.719.001 juta. Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan terhadap uang kartal serta kemampuan PERURI dalam menjaga kapasitas produksi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan nasional. Sementara itu, penyerahan Uang Logam pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp104.978 juta, yang menunjukkan keberlanjutan peran PERURI dalam mendukung ketersediaan alat pembayaran tunai.

Pada produk meterai, realisasi penyerahan mencapai 400,85 juta keping, sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 429,30 juta keping. Meskipun demikian, kinerja tersebut tetap menunjukkan pentingnya peran PERURI dalam menyediakan instrumen legal yang dibutuhkan masyarakat, dunia usaha, dan administrasi negara. Pada segmen pita cukai, dokumen pertanahan, serta dokumen keimigrasian, PERURI terus menjaga kualitas dan ketepatan pemenuhan kebutuhan pelanggan strategis melalui penguatan proses produksi, pengendalian kualitas, dan pengelolaan kapasitas.

Kinerja positif juga tercermin pada segmen dokumen sekuriti. Pada tahun 2025, Perusahaan membukukan penjualan dokumen sekuriti sebesar Rp38,03 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp27,44 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan atas produk bernilai sekuriti tinggi, antara lain sertifikat, buku pelaut, ijazah dan transkrip, serta dokumen keimigrasian. Capaian tersebut mempertegas posisi PERURI sebagai penyedia solusi sekuriti yang dipercaya untuk mendukung kebutuhan administrasi negara dan institusi strategis.

Pada lini digital, PERURI menunjukkan perkembangan yang kuat. Realisasi penyerahan produk Smartcard mencapai Rp124,91 miliar, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp34,04 miliar. Selain itu, pengembangan Meterai Elektronik dan *Digital Product/Solution* terus menjadi ruang pertumbuhan penting bagi Perusahaan, terutama dalam menjawab kebutuhan autentikasi, keamanan transaksi elektronik, dan layanan digital yang membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi.

Secara keseluruhan, kinerja operasional tahun 2025 menunjukkan kemampuan PERURI dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan mandat bisnis inti dan pengembangan lini usaha digital. Capaian ini menjadi dasar penting bagi Perusahaan untuk memperkuat daya saing di bidang *high security printing*, *high security solution*, dan *digital trust services*.

The 2025 performance also demonstrated that PERURI was able to maintain the relevance of its role amid changing needs of strategic customers, technological developments, and the expansion of the Company's mandate as GovTech Indonesia. Supported by a strong high-security printing business foundation and increasingly focused digital capability development, PERURI continued to strengthen its position as a strategic institution that safeguards trust within both the physical and digital security ecosystems.

Operational Performance

From an operational perspective, PERURI successfully maintained the fulfillment of strategic state product needs, particularly in the Rupiah Currency, stamp duty, security documents, and digital products segments. In the Indonesian Banknotes segment, the 2025 delivery realization reached Rp2,471,118 million, a significant increase compared to Rp1,719,001 million in 2024. This increase reflected the high demand for currency and PERURI's ability to maintain production capacity to support national requirements. Meanwhile, coin deliveries in 2025 amounted to Rp104,978 million, demonstrating the continuity of PERURI's role in supporting the availability of cash payment instruments.

For stamp duty products, delivery realization reached 400.85 million pieces, slightly decreasing compared to 429.30 million pieces in 2024. Nevertheless, this performance continued to demonstrate the important role of PERURI in providing legal instruments required by the public, businesses, and state administration. In the excise stamp, land document, and immigration document segments, PERURI consistently maintained the quality and timely fulfillment of strategic customer needs through strengthened production processes, quality control, and capacity management.

Positive performance was also reflected in the security documents segment. In 2025, the Company recorded security document sales of Rp38.03 billion, increasing from Rp27.44 billion in 2024. This growth was driven by rising demand for high-security products, including certificates, seafarer books, diplomas and transcripts, as well as immigration documents. These achievements further reinforced PERURI's position as a trusted security solutions provider supporting the needs of state administration and strategic institutions.

In the digital segment, PERURI demonstrated strong growth. Realization of Smartcard product deliveries reached Rp124.91 billion, increasing significantly compared to Rp34.04 billion in 2024. In addition, the development of Electronic Stamp Duty and Digital Products/Solutions continued to become important growth areas for the Company, particularly in addressing the needs for authentication, electronic transaction security, and digital services requiring a high level of trust.

Overall, operational performance in 2025 demonstrated PERURI's ability to maintain a balance between fulfilling its core business mandate and developing digital business lines. These achievements provide an important foundation for the Company to strengthen its competitiveness in the fields of high-security printing, high-security solutions, and digital trust services.



Kinerja Keuangan

Dari aspek keuangan, PERURI secara konsolidasian mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif pada tahun 2025. Penjualan bersih mencapai Rp4.221,83 miliar, meningkat 12,09% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.766,41 miliar. Pertumbuhan tersebut mencerminkan kemampuan PERURI dalam menjaga kesinambungan pendapatan dari lini bisnis utama, disertai upaya penguatan portofolio usaha yang mendukung kebutuhan pelanggan strategis dan agenda transformasi bisnis Perusahaan.

Dari sisi profitabilitas, laba sebelum pajak penghasilan meningkat menjadi Rp325,03 miliar pada tahun 2025, dibandingkan Rp243,71 miliar pada tahun 2024, atau tumbuh 33,37%. Laba tahun berjalan juga meningkat menjadi Rp238,43 miliar, dari sebelumnya Rp171,79 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah laba komprehensif tahun berjalan tercatat sebesar Rp259,55 miliar, meningkat dibandingkan Rp156,21 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan PERURI dalam menjaga kinerja laba di tengah perubahan komposisi pendapatan, dinamika permintaan pelanggan strategis, serta kebutuhan investasi untuk mendukung penguatan bisnis inti dan pengembangan layanan digital.

Total aset PERURI secara konsolidasian pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp7.213,28 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp6.880,57 miliar. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh kenaikan aset lancar dari Rp3.527,84 miliar menjadi Rp3.894,33 miliar, sementara aset tidak lancar tercatat sebesar Rp3.318,95 miliar, relatif lebih rendah dibandingkan Rp3.352,73 miliar pada tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur aset PERURI tetap mendukung kebutuhan operasional, likuiditas, serta pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Di sisi liabilitas, total liabilitas PERURI secara konsolidasian pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.641,81 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.550,71 miliar. Kenaikan tersebut terutama berasal dari peningkatan liabilitas jangka pendek menjadi Rp1.916,07 miliar, dibandingkan Rp1.643,27 miliar pada tahun 2024, yang antara lain mencerminkan peningkatan aktivitas operasional dan kewajiban jangka pendek grup. Sementara itu, liabilitas jangka panjang menurun menjadi Rp725,74 miliar, dibandingkan Rp907,44 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan pengelolaan kewajiban jangka panjang yang tetap terkendali sejalan dengan kebutuhan pendanaan dan struktur keuangan Perusahaan.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan tahun 2025 menunjukkan bahwa PERURI mampu menjaga pertumbuhan pendapatan, meningkatkan profitabilitas, serta mempertahankan struktur keuangan yang mendukung kebutuhan operasional dan agenda transformasi. Capaian ini menjadi landasan penting bagi PERURI untuk melanjutkan penguatan bisnis inti, memperkuat kapabilitas layanan sekuriti, dan memperluas kontribusi pada layanan digital pemerintah.

Financial Performance

From a financial perspective, PERURI recorded positive consolidated performance growth in 2025. Net sales reached Rp4,221.83 billion, an increase of 12.09% compared with Rp3,766.41 billion in 2024. This growth reflects PERURI's ability to maintain revenue continuity from its core business lines, supported by efforts to strengthen its business portfolio in line with the needs of strategic customers and the Company's business transformation agenda.

In terms of profitability, profit before income tax increased to Rp325.03 billion in 2025, compared with Rp243.71 billion in 2024, or grew by 33.37%. Profit for the year also increased to Rp238.43 billion, from Rp171.79 billion in 2024. Meanwhile, total comprehensive income for the year was recorded at Rp259.55 billion, higher than Rp156.21 billion in the previous year. This improvement demonstrates PERURI's ability to maintain profitability amid changes in revenue composition, dynamic demand from strategic customers, and investment requirements to support the strengthening of its core business and the development of digital services.

PERURI's total consolidated assets in 2025 were recorded at Rp7,213.28 billion, increasing from Rp6,880.57 billion in 2024. The increase was mainly supported by higher current assets, which rose from Rp3,527.84 billion to Rp3,894.33 billion, while non-current assets were recorded at Rp3,318.95 billion, slightly lower than Rp3,352.73 billion in the previous year. This condition indicates that PERURI's asset structure continued to support operational requirements, liquidity, and sustainable business development.

On the liabilities side, PERURI's total consolidated liabilities in 2025 were recorded at Rp2,641.81 billion, increasing from Rp2,550.71 billion in 2024. The increase was primarily driven by higher current liabilities, which rose to Rp1,916.07 billion from Rp1,643.27 billion in 2024, reflecting, among others, increased operational activities and the Group's short-term obligations. Meanwhile, non-current liabilities decreased to Rp725.74 billion from Rp907.44 billion in the previous year. This decline reflects the Company's controlled management of long-term obligations in line with its funding needs and financial structure.

Overall, PERURI's financial performance in 2025 demonstrates its ability to maintain revenue growth, improve profitability, and sustain a financial structure that supports operational requirements and the transformation agenda. These achievements provide an important foundation for PERURI to continue strengthening its core business, enhancing its security service capabilities, and expanding its contribution to government digital services.

Kinerja Teknologi Informasi dan Digital

Pada tahun 2025, PERURI terus memperkuat kapabilitas teknologi informasi dan digital untuk mendukung transformasi bisnis menuju perusahaan teknologi berbasis *high security solution*. Penguatan tersebut dijalankan melalui penyusunan *Master Plan* Teknologi Informasi 2025–2029, pengembangan *enterprise architecture*, peningkatan keandalan infrastruktur, serta penguatan tata kelola TI yang mengacu pada praktik terbaik, antara lain COBIT, ISO 27001, ISO 20000, ISO 14298, *NIST Cybersecurity Framework*, dan standar relevan lainnya.

Capaian penting di bidang TI tercermin dari pemenuhan *Service Level Agreement* layanan TI sebesar 100%, pengembangan *data architecture modelling*, pelaksanaan *penetration testing* aplikasi dan infrastruktur, *table top exercise*, *cyber drill*, implementasi *cyber threat intelligence*, serta penggunaan *tools vulnerability assessment and penetration testing*. PERURI juga berhasil mempertahankan sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 *Information Security Management Systems*, yang menunjukkan komitmen Perusahaan dalam menjaga keamanan informasi, keandalan sistem, serta perlindungan terhadap data dan aset digital.

Dukungan TI terhadap proses bisnis juga diwujudkan melalui berbagai inisiatif digitalisasi internal, antara lain sistem *quality monitoring* SBU HSS, digitalisasi dokumen pengadaan proses BAST, digitalisasi pencatatan hasil produksi uang logam, pengembangan PERURI Connect, implementasi presensi berbasis *face recognition*, serta pengembangan sistem penilaian kinerja. Inisiatif tersebut memperkuat efisiensi proses, akurasi data, transparansi, serta kesiapan Perusahaan dalam menjalankan bisnis sekuriti fisik maupun digital.

Dalam mendukung mandat PERURI sebagai GovTech Indonesia dan penyelenggaraan SPBE, penguatan teknologi informasi tidak hanya diarahkan pada aspek infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan platform, interoperabilitas sistem, tata kelola data, keamanan siber, serta kesinambungan layanan. Dengan fondasi tersebut, PERURI semakin siap memperluas peran dalam ekosistem layanan digital pemerintah yang aman, andal, dan terintegrasi.

Pengembangan SDM

Di bidang sumber daya manusia, PERURI terus memperkuat kapabilitas karyawan agar selaras dengan kebutuhan transformasi bisnis, pengembangan solusi digital, dan pelaksanaan mandat SPBE. Pengelolaan SDM mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan *Human Capital Master Plan*, dengan fokus pada penguatan kompetensi, manajemen talenta, pengembangan kepemimpinan, serta pembentukan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas.

Sepanjang tahun 2025, PERURI melaksanakan berbagai program pengembangan kompetensi, termasuk pelatihan teknis, pengembangan diri, kepemimpinan, pelatihan bersertifikasi, serta program pembelajaran di dalam dan luar negeri. Perusahaan merealisasikan biaya pelatihan sebesar Rp9,48 miliar dengan total 3.781 peserta, yang

Information Technology and Digital Performance

In 2025, PERURI continued to strengthen its information technology and digital capabilities to support business transformation toward becoming a technology company based on high-security solutions. These enhancements were carried out through the preparation of the 2025–2029 Information Technology Master Plan, the development of enterprise architecture, improvements in infrastructure reliability, and the strengthening of IT governance based on best practices, including COBIT, ISO 27001, ISO 20000, ISO 14298, the NIST Cybersecurity Framework, and other relevant standards.

Key achievements in the IT sector were reflected in the fulfillment of a 100% IT service Service Level Agreement, the development of data architecture modelling, implementation of application and infrastructure penetration testing, table top exercises, cyber drills, implementation of cyber threat intelligence, and the use of vulnerability assessment and penetration testing tools. PERURI also successfully maintained its ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management Systems certification, demonstrating the Company's commitment to maintaining information security, system reliability, and the protection of data and digital assets.

IT support for business processes was also realized through various internal digitalization initiatives, including the quality monitoring system for SBU HSS, digitalization of procurement documents for the BAST process, digitalization of coin production recording, development of PERURI Connect, implementation of face recognition-based attendance systems, and development of performance appraisal systems. These initiatives strengthened process efficiency, data accuracy, transparency, and the Company's readiness to operate both physical and digital security businesses.

In supporting PERURI's mandate as GovTech Indonesia and the implementation of SPBE, the strengthening of information technology was directed not only toward infrastructure aspects, but also toward platform readiness, system interoperability, data governance, cybersecurity, and service continuity. With this foundation, PERURI is increasingly prepared to expand its role within a secure, reliable, and integrated government digital services ecosystem.

Human Capital Development

In the field of human capital, PERURI continued to strengthen employee capabilities to align with the needs of business transformation, digital solution development, and the implementation of the SPBE mandate. Human capital management refers to the Company's Long-Term Plan and Human Capital Master Plan, with a focus on strengthening competencies, talent management, leadership development, as well as fostering an adaptive and integrity-driven work culture.

Throughout 2025, PERURI implemented various competency development programs, including technical training, self-development, leadership programs, certification-based training, as well as domestic and international learning programs. The Company realized training expenses of Rp9.48 billion with a total of 3,781 participants, reflecting PERURI's



mencerminkan komitmen PERURI untuk menempatkan pengembangan SDM sebagai investasi strategis dalam mendukung pencapaian target bisnis.



PERURI juga memperkuat manajemen talenta dan perencanaan suksesi melalui program *talent identification*, *talent development*, *career management*, serta pengembangan kapabilitas digital. Inisiatif tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan talenta yang mampu mendukung kebutuhan strategis Perusahaan, terutama pada bidang *digital solutions*, SPBE, teknologi informasi, dan *high security printing*.



Selain penguatan kompetensi, PERURI terus menginternalisasikan *core values* dan budaya integritas di seluruh organisasi. Upaya ini menjadi fondasi penting agar Insan PERURI mampu menjalankan peran secara profesional, bertanggung jawab, serta selaras dengan karakter bisnis Perusahaan yang berkaitan erat dengan kepercayaan publik dan kepentingan strategis negara.



Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target

Realisasi kinerja operasional PERURI (induk) dibandingkan dengan target RKAP menunjukkan capaian yang bervariasi di masing-masing lini bisnis, dengan sebagian besar segmen mampu memenuhi bahkan melampaui target, meskipun terdapat beberapa area yang menghadapi kendala.

Pada lini Uang Kertas RI, realisasi pendapatan penyerahan Rp2.471.118 juta, atau mencapai 93,65% dari RKAP tahun 2025 sebesar Rp2.638.799 juta. Capaian ini berada sedikit di bawah target, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa dinamika geopolitik yang berdampak pada kelancaran rantai pasok kertas uang, serta faktor internal seperti kendala permesinan, ketersediaan bahan tinta, dan aspek sumber daya manusia. Sementara itu, pada lini Uang Logam, Perusahaan berhasil mencapai realisasi sebesar Rp104.978 juta, atau mencapai 100% dari RKAP tahun 2025 sebesar Rp104.978 juta yang sepenuhnya sesuai dengan pesanan dalam Rencana Cetak Uang (RCU).

Pada segmen Dokumen Sekuriti, kinerja menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Produk Meterai mencatat kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar 400,85 juta keping atau 121,47% dari target. Kinerja positif juga ditunjukkan oleh Dokumen Pertanahan yang mencapai 4,49 juta lembar atau 203,60% dari target, serta Dokumen Sekuriti yang terealisasi sebesar Rp38,03 miliar atau 145,14% dari target, didorong oleh tingginya permintaan atas berbagai dokumen bernilai sekuriti tinggi.

Pada segmen Pita Cukai dan Prangko, realisasi penyerahan pita cukai mencapai 186,42 juta lembar atau 105,57% dari target RKAP, sejalan dengan pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sementara itu, realisasi Prangko tercatat sebesar 0,11 juta keping, yang menunjukkan penyesuaian terhadap dinamika permintaan pasar.

Di segmen digital, kinerja menunjukkan tren yang positif. Produk Meterai Elektronik mencapai realisasi 50,03 juta keping

commitment to positioning human capital development as a strategic investment in supporting the achievement of business targets.

PERURI also strengthened talent management and succession planning through talent identification, talent development, career management, and digital capability development programs. These initiatives were aimed at ensuring the availability of talent capable of supporting the Company's strategic needs, particularly in the areas of digital solutions, SPBE, information technology, and high-security printing.

In addition to competency enhancement, PERURI continued to internalize AKHLAK values and a culture of integrity throughout the organization. These efforts serve as an important foundation to ensure that PERURI employees are able to carry out their roles professionally, responsibly, and in alignment with the Company's business characteristics, which are closely related to public trust and the strategic interests of the state.

Comparison Between Performance Realization and Targets

The realization of PERURI's (parent) operational performance compared to RKAP targets showed varying achievements across business lines, with most segments meeting or even exceeding targets, although several areas encountered challenges.

In the Indonesian Banknotes segment, realization of delivery revenue reached Rp2,471,118 million, or 93.65% of the 2025 RKAP target of Rp2,638,799 million. This achievement was slightly below target, influenced by external factors in the form of geopolitical dynamics affecting the smoothness of banknote paper supply chains, as well as internal factors such as machinery constraints, ink material availability, and human resource aspects. Meanwhile, in the Coins segment, the Company successfully achieved realization of Rp104,978 million, or 100% of the 2025 RKAP target of Rp104,978 million fully aligned with orders under the Currency Printing Plan (RCU).

In the Passport and Security Documents segment, performance showed fairly significant variations. Stamp Duty products recorded very strong performance with realization reaching 400.85 million pieces, or 121.47% of the target. Positive performance was also demonstrated by Land Documents, which reached 4.49 million sheets, or 203.60% of the target, as well as Security Documents, which realized sales of Rp38.03 billion, or 145.14% of the target, driven by high demand for various high-security documents.

In the Excise Stamp and Postage Stamp segment, excise stamp deliveries reached 186.42 million sheets, or 105.57% of the RKAP target, in line with orders from the Directorate General of Customs and Excise. Meanwhile, postage stamp realization amounted to 0.11 million pieces, reflecting adjustments to market demand dynamics.

In the digital segment, performance showed a positive trend. Electronic Stamp Duty products achieved realization of 50.03

atau 103,37% dari target, sementara Smartcard mencatat realisasi sebesar Rp124,91 miliar atau 118,80% dari target. Namun demikian, *Digital Product/Solution* masih berada di bawah target dengan realisasi sebesar Rp22,92 miliar atau 57,14% dari RKAP, yang mencerminkan perlunya percepatan pengembangan pasar dan pematangan *use case* produk digital.

Darisi kinerja keuangan, secara umum PERURI menunjukkan capaian yang solid. Total aset terealisasi sebesar Rp7.071,43 miliar atau 109,96% dari target, didukung oleh peningkatan aset lancar yang mencapai Rp3.601,86 miliar atau 125,77% dari target serta aset tidak lancar sebesar Rp3.469,57 miliar atau 97,26% dari target.

Di sisi liabilitas, total liabilitas mencapai Rp2.373,29 miliar atau 133,02% dari target, dengan liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.709,71 miliar atau 196,62% dari target, dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp663,58 miliar atau 72,56% dari target. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan pendanaan jangka pendek dalam mendukung operasional.

Pada aspek profitabilitas, realisasi penjualan bersih mencapai Rp4.016,63 miliar atau 91,48% dari target, yang menunjukkan adanya tekanan pada sisi pendapatan. Meskipun demikian, Perusahaan tetap mampu menjaga kinerja laba dengan baik, tercermin dari laba sebelum pajak sebesar Rp301,56 miliar atau 103,85% dari target, serta laba tahun berjalan sebesar Rp223,71 miliar atau 105,75% dari target.

Secara keseluruhan, perbandingan antara realisasi dan target RKAP tahun 2025 menunjukkan bahwa PERURI mampu mempertahankan kinerja yang resilien di tengah berbagai tantangan, dengan kekuatan utama pada lini produk sekuriti dan digital, serta pengelolaan keuangan yang tetap solid dan terkendali.

Prospek Usaha Perusahaan

PERURI pada tahun 2026 dipandang akan berada dalam lanskap industri yang semakin dinamis, dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik. International Monetary Fund (IMF) dalam forum *Spring Meetings* 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1% pada tahun 2026, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar 3,4%. Bahkan, dalam skenario yang lebih berat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk gangguan pada jalur energi strategis seperti Selat Hormuz, pertumbuhan global berpotensi turun hingga kisaran 2,0%–2,5%, dengan tekanan inflasi yang dapat meningkat hingga di atas 5%–6%. Kondisi tersebut mencerminkan adanya risiko terhadap stabilitas ekonomi global, khususnya melalui kenaikan harga energi, tekanan inflasi, serta pengetatan pasar keuangan.

Sejalan dengan dinamika global tersebut, prospek perekonomian nasional juga menunjukkan moderasi pertumbuhan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar sekitar 5,0% pada tahun 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar 5,11%. Sementara itu, World Bank memproyeksikan pertumbuhan pada kisaran 4,7%, dan Organisation for Economic Co-

million pieces, or 103.37% of the target, while Smartcard products recorded realization of Rp124.91 billion, or 118.80% of the target. However, Digital Products/Solutions remained below target with realization of Rp22.92 billion, or 57.14% of the RKAP target, reflecting the need to accelerate market development and further mature digital product use cases.

From a financial performance perspective, PERURI generally recorded solid achievements. Total assets were realized at Rp7,071.43 billion, or 109.96% of the target, supported by an increase in current assets reaching Rp3,601.86 billion, or 125.77% of the target, as well as non-current assets amounting to Rp3,469.57 billion, or 97.26% of the target.

On the liabilities side, total liabilities reached Rp2,373.29 billion, or 133.02% of the target, with current liabilities amounting to Rp1,709.71 billion, or 196.62% of the target, and non-current liabilities amounting to Rp663.58 billion, or 72.56% of the target. This reflected increased short-term funding requirements to support operations.

In terms of profitability, net sales realization reached Rp4,016.63 billion or 91.48% of the target, indicating pressure on the revenue side. Nevertheless, the Company was still able to maintain solid profitability performance, as reflected in profit before tax of Rp301.56 billion, or 103.85% of the target, and profit for the year of Rp223.71 billion, or 105.75% of the target.

Overall, the comparison between realization and the 2025 RKAP targets demonstrated that PERURI was able to maintain resilient performance amid various challenges, with key strengths in the security products and digital business lines, as well as financial management that remained solid and well-controlled.

Company Business Prospects

In 2026, PERURI is expected to operate within an increasingly dynamic industry landscape, influenced by the global economic slowdown and rising geopolitical uncertainty. In its 2026 Spring Meetings, the International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth of 3.1% in 2026, lower than the 3.4% realization recorded in 2025. Furthermore, under a more severe scenario arising from escalating conflicts in the Middle East, including disruptions to strategic energy routes such as the Strait of Hormuz, global growth could potentially decline to the range of 2.0%–2.5%, with inflationary pressures potentially rising above 5%–6%. These conditions reflect risks to global economic stability, particularly through rising energy prices, inflationary pressures, and tightening financial markets.

In line with these global dynamics, the outlook for the national economy also indicates moderated growth. The IMF projects Indonesia's economic growth at around 5.0% in 2026, slightly lower than the 5.11% realization in 2025. Meanwhile, the World Bank projects growth in the range of 4.7%, while the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) estimates approximately 4.8%. This



operation and Development (OECD) memperkirakan sekitar 4,8%. Perlambatan ini berpotensi berdampak pada daya beli masyarakat, aktivitas dunia usaha, serta dinamika pasar tenaga kerja.

Dalam konteks industri sekuriti dan solusi keamanan, kondisi tersebut menuntut PERURI untuk menjaga keseimbangan antara ketahanan bisnis inti dan akselerasi pengembangan bisnis baru. Permintaan terhadap uang kartal dan dokumen sekuriti diperkirakan tetap terjaga seiring dengan kebutuhan negara dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan administrasi pemerintahan. Namun demikian, tren digitalisasi pembayaran dan layanan publik akan terus mendorong pergeseran kebutuhan menuju solusi keamanan digital dan layanan berbasis teknologi. Oleh karena itu, posisi PERURI sebagai penyedia solusi *high security printing* sekaligus pengembang layanan digital menjadi semakin relevan dalam menjawab kebutuhan industri yang berkembang.

Menjawab dinamika tersebut, PERURI telah menetapkan arah strategis tahun 2026 yang berfokus pada penguatan kapabilitas dan integrasi strategi bisnis. Fokus utama Perusahaan mencakup penguatan fondasi digital untuk mendukung peran sebagai GovTech Indonesia, modernisasi dan penguatan rantai nilai uang kertas guna menjaga kualitas dan efisiensi produksi, serta penguatan kepemimpinan pasar domestik pada produk sekuriti non-uang melalui inovasi berkelanjutan. Selain itu, Perusahaan juga mendorong akselerasi pertumbuhan produk digital dan solusi, termasuk e-meterai, guna memperluas basis pendapatan dan meningkatkan penetrasi pasar.

Dari sisi portofolio bisnis, arah pengembangan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025–2029 menegaskan pentingnya integrasi rantai nilai *end-to-end* pada bisnis uang kertas, sekaligus eksplorasi pasar internasional strategis. Pada segmen non-uang, PERURI berfokus mempertahankan kepemimpinan pasar domestik serta memperluas eksistensi pada segmen baru yang memiliki sinergi dengan bisnis inti. Sementara itu, pada bisnis digital, strategi diarahkan pada percepatan maturitas *use case* (*PERURI Code*, *PERURI Sign*, *PERURI Trust*), penguatan strategi *go-to-market*, serta kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan BUMN dalam kerangka GovTech dan SPBE.

Dalam mendukung implementasi strategi tersebut, Perusahaan juga memperkuat fungsi pendukung melalui peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi dan *cyber resilience*, optimalisasi kinerja anak perusahaan, serta pengelolaan aset yang lebih produktif. Selain itu, penguatan budaya inovasi dan tata kelola perusahaan yang baik menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis di tengah perubahan industri yang cepat.

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik yang moderat, serta kebutuhan industri yang terus berkembang menuju integrasi antara keamanan fisik dan digital, PERURI memiliki peluang yang kuat untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar domestik

slowdown could potentially affect public purchasing power, business activities, and labor market dynamics.

Within the context of the security and security solutions industry, these conditions require PERURI to maintain a balance between the resilience of its core business and the acceleration of new business development. Demand for currency and security documents is expected to remain stable in line with the state's need to maintain the stability of the financial system and government administration. However, trends toward the digitalization of payments and public services will continue to drive shifts in demand toward digital security solutions and technology-based services. Therefore, PERURI's position as a provider of high-security printing solutions as well as a developer of digital services is becoming increasingly relevant in addressing evolving industry needs.

In response to these dynamics, PERURI has established its 2026 strategic direction focused on strengthening capabilities and integrating business strategies. The Company's main priorities include strengthening the digital foundation to support its role as GovTech Indonesia, modernizing and strengthening the banknote value chain to maintain production quality and efficiency, as well as reinforcing domestic market leadership in non-currency security products through continuous innovation. In addition, the Company is also accelerating the growth of digital products and solutions, including e-stamp duty, in order to broaden its revenue base and increase market penetration.

From a business portfolio perspective, the development direction outlined in the Company's 2025–2029 Long-Term Plan (RJPP) emphasizes the importance of end-to-end value chain integration in the banknote business, while also exploring strategic international markets. In the non-currency segment, PERURI focuses on maintaining domestic market leadership while expanding its presence in new segments that have synergies with the core business. Meanwhile, in the digital business segment, strategies are directed toward accelerating the maturity of use cases (*Code*, *Sign*, *Trust*), strengthening go-to-market strategies, and enhancing collaboration with ministries/agencies and SOEs within the GovTech and SPBE framework.

To support the implementation of these strategies, the Company is also strengthening supporting functions through the enhancement of human capital capabilities, strengthening technology infrastructure and cyber resilience, optimizing subsidiary performance, and implementing more productive asset management. In addition, strengthening a culture of innovation and good governance remains an important foundation for maintaining business sustainability amid rapid industry changes.

By considering the moderate global and domestic economic conditions, as well as industry needs that continue to evolve toward the integration of physical and digital security, PERURI has strong opportunities to maintain its position as a domestic market leader while selectively increasing

sekaligus meningkatkan penetrasi di pasar internasional secara selektif. Komitmen Perusahaan untuk meningkatkan kapabilitas *Digital Business*, *Currency Security*, dan *High Security Solution*, serta memperkuat peran sebagai GovTech Indonesia, menjadi landasan utama dalam mencapai sasaran strategis tahun 2026 yang berfokus pada pertumbuhan pendapatan, ekspansi pasar, serta akselerasi bisnis digital dan SPBE melalui implementasi 3 pilar utama dan 19 inisiatif strategis.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di PERURI pada tahun 2025 dilaksanakan secara konsisten sebagai fondasi dalam menjaga integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kinerja Perusahaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kebijakan, penyempurnaan proses, serta penerapan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memastikan seluruh aktivitas operasional dan pengambilan keputusan berjalan sesuai ketentuan, etika bisnis, dan kepentingan pemangku kepentingan.

Dalam implementasinya, PERURI mengacu pada prinsip TARIF, yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*). Sejalan dengan perkembangan praktik tata kelola, PERURI juga mengadopsi prinsip-prinsip dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021, yang menekankan perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.

Penerapan prinsip tersebut tercermin dalam komitmen Perusahaan untuk menjunjung etika, menjaga independensi, menyediakan informasi yang material dan relevan, serta memastikan seluruh kinerja dan aktivitas Perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Direksi juga memastikan bahwa kebijakan tata kelola perusahaan yang baik diterapkan secara terintegrasi, baik di lingkungan PERURI maupun Anak Perusahaan, melalui harmonisasi kebijakan dan penguatan keselarasan arah pengelolaan di tingkat grup.

Pengelolaan Sistem Pengendalian Internal

PERURI menerapkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) untuk menjaga efektivitas operasional, keandalan pelaporan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal. Dalam pelaksanaannya, SPIP mencakup lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta mekanisme pemantauan yang berjalan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025, PERURI memperkuat peran SPIP tidak hanya sebagai mekanisme pengendalian operasional, tetapi juga sebagai fondasi dalam menjaga kredibilitas pelaporan Perusahaan. Penguatan ini menjadi semakin penting seiring dengan kebutuhan Perusahaan untuk menyusun laporan keuangan, Laporan Tahunan, dan pengungkapan keberlanjutan secara andal, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut,

penetration into international markets. The Company's commitment to enhancing Digital Business, Currency Security, and High Security Solution capabilities, as well as strengthening its role as GovTech Indonesia, serves as the primary foundation for achieving its 2026 strategic objectives focused on revenue growth, market expansion, and the acceleration of digital business and SPBE through the implementation of 3 main pillars and 19 strategic initiatives.

Implementation of Good Corporate Governance

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) at PERURI in 2025 was carried out consistently as a foundation for maintaining the Company's integrity, transparency, accountability, and performance sustainability. This commitment was realized through the strengthening of policies, refinement of processes, and implementation of supervision and control mechanisms to ensure that all operational activities and decision-making processes were conducted in accordance with regulations, business ethics, and stakeholder interests.

In its implementation, PERURI adheres to the TARIF principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness. In line with the development of governance practices, PERURI also adopts the principles contained in the Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUGKI) 2021, which emphasize ethical conduct, accountability, transparency, and sustainability.

The implementation of these principles is reflected in the Company's commitment to upholding ethics, maintaining independence among corporate organs, providing material and relevant information, and ensuring that all Company performance and activities can be clearly and measurably accounted for. The Board of Directors also ensures that governance policies are implemented in an integrated manner, both within PERURI and its Subsidiaries, through policy harmonization and strengthening alignment of management direction at the group level.

Management of the Internal Control System

PERURI implements the Company's Internal Control System (SPIP) to maintain operational effectiveness, reporting reliability, asset safeguarding, as well as compliance with laws and regulations and internal provisions. In its implementation, the SPIP encompasses the control environment, control activities, information and communication systems, as well as continuous monitoring mechanisms.

In 2025, PERURI strengthened the role of the SPIP not only as an operational control mechanism, but also as a foundation for maintaining the credibility of the Company's reporting. This strengthening became increasingly important in line with the Company's need to prepare financial statements, Annual Reports, and sustainability disclosures in a reliable, consistent, and accountable manner. In this context, the internal control system plays a role in ensuring that the



sistem pengendalian internal berperan dalam memastikan bahwa data, proses, dan informasi yang digunakan dalam pelaporan telah melalui mekanisme verifikasi, dokumentasi, dan pengawasan yang memadai.

Peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) menjadi elemen penting dalam memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal. SPI berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama dan menjalankan fungsi *assurance* serta konsultasi secara independen, objektif, dan profesional. Ruang lingkup SPI mencakup penyusunan kebijakan pengawasan berbasis risiko, pelaksanaan *Risk Based Internal Audit* (RBIA), audit dan konsultasi atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal, serta penilaian atas penerapan *Governance, Risk, and Control* (GRC) pada seluruh entitas Perusahaan.

Dalam mendukung kredibilitas pelaporan keuangan, PERURI juga memperkuat pengendalian melalui pendekatan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR). Penguatan ICoFR diarahkan untuk memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan didukung oleh pengendalian yang memadai, mulai dari pencatatan transaksi, validasi data, otorisasi, rekonsiliasi, hingga penyajian laporan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, ICoFR menjadi instrumen penting dalam memitigasi risiko salah saji material, meningkatkan kualitas pengendalian atas proses pelaporan keuangan, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan Perusahaan.

Kredibilitas pelaporan juga diperkuat melalui sinergi antara SPI, fungsi Manajemen Risiko, Komite Audit, auditor eksternal, serta pengawasan Direksi dan Dewan Pengawas. Komite Audit pada tahun 2025 melaksanakan rapat internal sebanyak 12 kali dan rapat koordinasi dengan SPI sebanyak 5 kali, termasuk pembahasan atas efektivitas pengendalian internal, laporan hasil pemeriksaan SPI, *Whistleblowing System* (WBS), realisasi kegiatan SPI, serta laporan berkala keuangan dan kinerja manajemen. Mekanisme ini memperkuat rantai pengawasan dari tingkat operasional hingga organ pengawas, sehingga isu pengendalian, risiko, dan pelaporan dapat ditelaah secara lebih komprehensif.

Melalui penerapan SPIP, penguatan SPI, implementasi ICoFR, serta dukungan mekanisme *assurance* internal dan eksternal, PERURI memastikan bahwa proses pelaporan Perusahaan disusun dengan dasar pengendalian yang kuat. Pendekatan ini mendukung penyajian informasi yang akurat, transparan, dan kredibel, baik dalam laporan keuangan, Laporan Tahunan, maupun pengungkapan keberlanjutan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sepanjang tahun 2025, Direksi menilai bahwa Sistem Pengendalian Internal PERURI telah berjalan secara memadai dalam mendukung efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Direksi juga menilai bahwa Satuan Pengawasan Intern telah menjalankan fungsi *assurance* dan konsultasi secara independen, objektif, dan profesional, termasuk

data, processes, and information used in reporting have undergone adequate verification, documentation, and supervision mechanisms.

The role of the Internal Audit Unit (SPI) became an important element in strengthening the effectiveness of the internal control system. The SPI reports directly to the President Director and carries out assurance and consulting functions independently, objectively, and professionally. The scope of the SPI includes the preparation of risk-based supervision policies, implementation of Risk-Based Internal Audit (RBIA), audit and consultancy activities related to governance, risk management, and internal control, as well as assessment of the implementation of Governance, Risk, and Control (GRC) across all Company entities.

In supporting the credibility of financial reporting, PERURI also strengthened controls through the Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) approach. The strengthening of ICoFR was directed toward ensuring that the financial reporting preparation process was supported by adequate controls, ranging from transaction recording, data validation, authorization, reconciliation, to the presentation of reports in accordance with applicable accounting standards. Accordingly, ICoFR became an important instrument in mitigating the risk of material misstatement, improving the quality of controls over financial reporting processes, and strengthening stakeholder confidence in the information presented by the Company.

The credibility of reporting was also strengthened through synergy among the SPI, Risk Management function, Audit Committee, external auditors, as well as oversight by the Board of Directors and Supervisory Board. In 2025, the Audit Committee held 12 internal meetings and 5 coordination meetings with the SPI, including discussions on the effectiveness of internal controls, SPI audit findings, the Whistleblowing System (WBS), realization of SPI activities, as well as periodic financial and management performance reports. These mechanisms strengthened the oversight chain from the operational level to the supervisory organs, enabling control, risk, and reporting issues to be reviewed more comprehensively.

Through the implementation of the SPIP, strengthening of the SPI, implementation of ICoFR, and support from internal and external assurance mechanisms, PERURI ensured that the Company's reporting processes were prepared on the basis of strong control systems. This approach supports the presentation of accurate, transparent, and credible information in the financial statements, Annual Report, and sustainability disclosures.

Based on the results of monitoring and evaluation throughout 2025, the Board of Directors assessed that PERURI's Internal Control System had functioned adequately in supporting operational effectiveness, the reliability of financial reporting, asset safeguarding, as well as compliance with applicable regulations. The Board of Directors also assessed that the Internal Audit Unit had carried out its assurance and consulting functions independently, objectively, and

dalam mendukung penguatan ICoFR serta kredibilitas pelaporan Perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko pada tahun 2025 diarahkan untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi Perusahaan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, serta pelaporan risiko secara terstruktur. PERURI menerapkan pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM) yang mengacu pada ISO 31000:2018, sehingga pengelolaan risiko dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi di seluruh aktivitas bisnis.

Dalam pelaksanaannya, PERURI memastikan bahwa manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Risiko yang berkaitan dengan rantai pasok, fluktuasi nilai tukar, perubahan kebutuhan pelanggan, percepatan digitalisasi, keamanan siber, serta implementasi mandat GovTech dan SPBE dikelola melalui proses penilaian dan mitigasi yang terukur.

Keterkaitan antara manajemen risiko dan pengendalian internal juga diperkuat melalui sistem informasi manajemen risiko, pelaporan risiko kepada Direksi dan Dewan Pengawas, serta koordinasi dengan SPI dan organ pengawas. Dengan mekanisme tersebut, risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja, operasional, keuangan, reputasi, maupun keberlanjutan usaha dapat dipantau dan ditindaklanjuti secara tepat waktu.

Berdasarkan evaluasi atas penerapan manajemen risiko tahun 2025, Direksi menilai bahwa sistem manajemen risiko PERURI telah berjalan secara memadai dan mampu mendukung proses pengambilan keputusan yang terukur. Penerapan tersebut didukung oleh kebijakan, prosedur, proses identifikasi dan mitigasi risiko, serta mekanisme pelaporan risiko yang membantu Perusahaan dalam mengelola risiko strategis, operasional, keuangan, teknologi, kepatuhan, dan reputasi secara lebih terstruktur.

Penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sebagai perusahaan yang mengemban mandat strategis negara dan bergerak pada produk serta layanan berfitur sekuriti tinggi, PERURI menempatkan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Pada tahun 2025, Perusahaan terus memperkuat penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui penguatan kebijakan, sosialisasi, pengendalian gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, serta peningkatan kesadaran Insan PERURI terhadap risiko penyuapan dan pelanggaran etika.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan terhadap seluruh proses bisnis Perusahaan. Direksi memastikan bahwa prinsip anti-penyuapan diterapkan dalam proses pengadaan, kerja sama dengan mitra, hubungan dengan pelanggan, serta pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, budaya integritas dapat terus diperkuat di seluruh lini organisasi.

professionally, including in supporting the strengthening of ICoFR and the credibility of the Company's reporting.

Implementation of Risk Management

The implementation of risk management in 2025 was directed toward protecting and creating value for the Company through structured processes of risk identification, measurement, monitoring, control, and reporting. PERURI applies an Enterprise Risk Management (ERM) approach referring to ISO 31000:2018, thereby ensuring that risk management is carried out comprehensively and in an integrated manner across all business activities.

In its implementation, PERURI ensures that risk management functions not only as a mitigation tool, but also as a basis for strategic decision-making. Risks related to supply chains, exchange rate fluctuations, changes in customer needs, accelerated digitalization, cybersecurity, as well as the implementation of Government Technology and SPBE mandates are managed through measurable assessment and mitigation processes.

The linkage between risk management and internal control is also strengthened through the risk management information system, risk reporting to the Board of Directors and Supervisory Board, as well as coordination with the Internal Audit Unit (SPI) and supervisory organs. Through these mechanisms, risks that have the potential to affect performance, operations, finance, reputation, and business sustainability can be monitored and followed up in a timely manner.

Based on the evaluation of the implementation of risk management in 2025, the Board of Directors assessed that PERURI's risk management system had functioned adequately and was able to support measured decision-making processes. This implementation was supported by policies, procedures, risk identification and mitigation processes, as well as risk reporting mechanisms that assisted the Company in managing strategic, operational, financial, technological, compliance, and reputational risks in a more structured manner.

Strengthening the Anti-Bribery Management System

As a company entrusted with a strategic state mandate and engaged in products and services with high-security features, PERURI places integrity as the primary foundation in conducting its business activities. In 2025, the Company continued to strengthen the implementation of its Anti-Bribery Management System through the enhancement of policies, socialization programs, gratification control, conflict of interest management, as well as increasing PERURI employees' awareness of bribery risks and ethical violations.

The implementation of the Anti-Bribery Management System was directed not only toward fulfilling compliance aspects, but also toward maintaining stakeholder trust in all of the Company's business processes. The Board of Directors ensured that anti-bribery principles were implemented in procurement processes, partnerships with business partners, customer relations, and strategic decision-making. Through these efforts, a culture of integrity can continue to be strengthened across all levels of the organization.



Pengelolaan *Whistleblowing System*

PERURI menyediakan mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan atas dugaan pelanggaran, penyimpangan, maupun tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik dan ketentuan Perusahaan. Sistem ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong keterlibatan Insan PERURI dan pemangku kepentingan dalam menjaga integritas organisasi.

Pada tahun 2025, Direksi memastikan bahwa setiap laporan yang diterima melalui WBS ditangani sesuai prosedur yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan, perlindungan pelapor, objektivitas pemeriksaan, serta tindak lanjut yang proporsional. Pengelolaan WBS juga menjadi bahan evaluasi bagi Perusahaan untuk memperkuat pengendalian internal, meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran, serta memperbaiki proses yang masih memerlukan penyempurnaan.

Perkara Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usaha, PERURI senantiasa memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perikatan kontraktual, serta ketentuan internal yang berlaku. Pengelolaan perkara hukum dilakukan secara cermat untuk memitigasi potensi dampak terhadap operasional, keuangan, reputasi, dan keberlanjutan usaha Perusahaan.

Apabila terdapat perkara hukum pada tahun 2025, Direksi memastikan bahwa setiap perkara ditangani melalui mekanisme hukum yang tepat, dengan dukungan fungsi legal dan koordinasi lintas unit terkait. Perusahaan juga melakukan evaluasi atas akar permasalahan untuk memperkuat aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan manajemen risiko ke depan.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perkara hukum material yang berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan, operasional, reputasi, maupun kelangsungan usaha PERURI.

Assessment Penerapan GCG

PERURI secara berkala melakukan penilaian atas penerapan GCG untuk mengukur efektivitas implementasi tata kelola dan mengidentifikasi area yang masih perlu diperkuat. *Assessment* GCG dilakukan terhadap aspek-aspek utama tata kelola, termasuk komitmen penerapan GCG, peran Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, pengungkapan informasi dan transparansi, serta aspek lainnya. Mekanisme penilaian tersebut dilaksanakan melalui *assessment* berkala dan *review* tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian.

Hasil *assessment* menjadi dasar bagi Direksi dan organ pendukung untuk menyusun rencana tindak lanjut, memperbaiki proses, menyempurnakan kebijakan, dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh lini organisasi. Dengan demikian, *assessment* GCG tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga menjadi mekanisme perbaikan berkelanjutan agar tata kelola PERURI semakin efektif, adaptif, dan

Management of the *Whistleblowing System*

PERURI provides a *Whistleblowing System* (WBS) mechanism as a reporting channel for alleged violations, irregularities, or actions inconsistent with the Company's code of conduct and regulations. This system serves as one of the important instruments in strengthening governance, enhancing accountability, and encouraging the involvement of PERURI employees and stakeholders in maintaining organizational integrity.

In 2025, the Board of Directors ensured that every report received through the WBS was handled in accordance with applicable procedures, while upholding the principles of confidentiality, whistleblower protection, objectivity in investigations, and proportionate follow-up actions. The management of the WBS also serves as an evaluation tool for the Company to strengthen internal controls, improve the effectiveness of violation prevention measures, and enhance processes that still require refinement.

Legal Cases

In conducting its business activities, PERURI consistently ensures compliance with applicable laws and regulations, contractual obligations, and internal provisions. The management of legal cases is carried out carefully in order to mitigate potential impacts on the Company's operations, financial condition, reputation, and business sustainability.

If any legal cases arose during 2025, the Board of Directors ensured that each case was handled through appropriate legal mechanisms, supported by the legal function and coordination across relevant units. The Company also conducted evaluations of the root causes in order to strengthen future compliance, internal control, and risk management aspects.

Throughout 2025, there were no material legal cases that had a significant impact on PERURI's financial condition, operations, reputation, or business continuity.

Assessment of GCG Implementation

PERURI periodically conducts assessments of GCG implementation to measure the effectiveness of governance practices and identify areas that still require strengthening. The GCG assessment covers key governance aspects, including commitment to GCG implementation, the role of the Capital Owner/RPB, the Supervisory Board, the Board of Directors, information disclosure and transparency, as well as other governance aspects. The assessment mechanism is carried out through periodic assessments and reviews of follow-up actions on recommendations resulting from the assessment.

The assessment results serve as the basis for the Board of Directors and supporting organs to prepare follow-up action plans, improve processes, refine policies, and enhance the quality of governance implementation across all organizational lines. Accordingly, the GCG assessment functions not only as an evaluation instrument, but also as a continuous improvement mechanism to ensure that PERURI's governance becomes increasingly effective,

selaras dengan ekspektasi Pemilik Modal serta pemangku kepentingan.

Pada tahun 2025, hasil *assessment* GCG menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan berada pada kategori Sangat Baik dengan skor 92,47. Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2,6 poin. Direksi menindaklanjuti hasil *assessment* melalui penguatan kebijakan, penyempurnaan prosedur, peningkatan sosialisasi, serta pemantauan pelaksanaan rekomendasi secara berkala.

Integrasi Integritas, Keberlanjutan, ESG, dan Kesiapan Pengungkapan Keberlanjutan

Direksi memastikan bahwa prinsip integritas dan keberlanjutan menjadi landasan dalam penyusunan strategi jangka panjang, kebijakan strategis, dan arah pengembangan usaha PERURI. Bagi Perusahaan, integritas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai prasyarat utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap produk dan layanan PERURI yang memiliki fungsi strategis bagi negara. Sementara itu, keberlanjutan diarahkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan bisnis Perusahaan tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.

Integrasi aspek ESG dilakukan melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan produk dan layanan yang aman serta tepercaya, efisiensi operasional, pengelolaan dampak lingkungan dari proses produksi, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam konteks bisnis PERURI, aspek ESG juga memiliki keterkaitan erat dengan keamanan produk, perlindungan data, keandalan layanan digital, serta kontribusi Perusahaan dalam mendukung transformasi layanan publik melalui penguatan peran sebagai GovTech Indonesia.

Direksi juga mendorong kesiapan Perusahaan dalam memenuhi perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan, termasuk kesiapan terhadap Standar Pelaporan Keberlanjutan (SPK) 1 dan SPK 2. Kesiapan tersebut dibangun secara bertahap melalui penguatan empat pilar utama, yaitu *Governance*, *Strategy*, *Risk Management*, serta *Metrics and Targets*. Pendekatan ini menjadi dasar bagi PERURI untuk meningkatkan kualitas tata kelola keberlanjutan, memperkuat integrasi isu ESG ke dalam strategi bisnis, serta memastikan ketersediaan data dan proses pelaporan yang semakin terukur.

Pada pilar *Governance*, PERURI memperkuat peran Direksi dan fungsi terkait dalam mengawasi isu keberlanjutan, termasuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan pengambilan keputusan strategis telah mempertimbangkan aspek integritas, tata kelola, risiko, dan dampak keberlanjutan. Pengawasan tersebut juga didukung oleh mekanisme pengendalian internal, manajemen risiko, serta pelaporan berkala kepada manajemen dan organ pengawas Perusahaan.

adaptive, and aligned with the expectations of the Capital Owner and stakeholders.

In 2025, the results of the GCG assessment indicated that PERURI's governance implementation was categorized as Very Good, with a score of 92.47. Compared to the previous year, this achievement represented an increase of 2.6 points. The Board of Directors followed up on the assessment results through policy strengthening, procedure refinement, enhanced socialization, as well as periodic monitoring of the implementation of recommendations.

Integration of Integrity, Sustainability, ESG, and Sustainability Disclosure Readiness

The Board of Directors ensures that the principles of integrity and sustainability serve as the foundation in the formulation of PERURI's long-term strategy, strategic policies, and business development direction. For the Company, integrity is not only interpreted as compliance with regulations, but also as a primary prerequisite for maintaining public trust in PERURI's products and services, which carry strategic functions for the state. Meanwhile, sustainability is directed toward ensuring that the Company's business growth continues to consider a balance among economic, social, environmental, and governance aspects.

The integration of ESG aspects is carried out through the strengthening of governance, risk management, human capital management, development of secure and reliable products and services, operational efficiency, management of environmental impacts arising from production processes, as well as the implementation of social and environmental responsibility programs. Within the context of PERURI's business, ESG aspects are also closely related to product security, data protection, reliability of digital services, as well as the Company's contribution in supporting the transformation of public services through strengthening its role as GovTech Indonesia.

The Board of Directors also encourages the Company's readiness to comply with evolving sustainability disclosure standards, including preparedness for SPK 1 and SPK 2. This readiness is developed gradually through the strengthening of four main pillars, namely *Governance*, *Strategy*, *Risk Management*, and *Metrics and Targets*. This approach serves as the foundation for PERURI to improve the quality of sustainability governance, strengthen the integration of ESG issues into business strategy, and ensure the availability of increasingly measurable data and reporting processes.

Under the *Governance* pillar, PERURI strengthens the role of the Board of Directors and related functions in overseeing sustainability issues, including ensuring that policies, programs, and strategic decision-making processes have taken into account integrity, governance, risk, and sustainability impact considerations. This oversight is also supported by internal control mechanisms, risk management, as well as periodic reporting to management and the Company's supervisory organs.



Pada pilar *Strategy*, PERURI mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam arah pengembangan usaha, baik pada bisnis sekuriti fisik maupun layanan digital. Dalam bisnis sekuriti fisik, perhatian diberikan pada efisiensi proses produksi, pengelolaan dampak lingkungan, serta pemenuhan standar keamanan produk. Sementara itu, dalam layanan digital, keberlanjutan dikaitkan dengan keamanan data, keandalan sistem, perlindungan informasi, serta kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik.

Pada pilar *Risk Management*, PERURI secara bertahap memperkuat integrasi risiko ESG dan risiko terkait keberlanjutan ke dalam proses identifikasi, penilaian, mitigasi, dan pemantauan risiko Perusahaan. Risiko yang dikelola mencakup risiko lingkungan dari kegiatan produksi, risiko keselamatan dan kesehatan kerja, risiko keamanan informasi, risiko kepatuhan, serta risiko yang berkaitan dengan pengembangan layanan digital dan pelaksanaan mandat strategis Perusahaan. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan ESG tidak berdiri terpisah, melainkan menjadi bagian dari kerangka manajemen risiko Perusahaan.

Pada pilar *Metrics and Targets*, PERURI terus memperkuat kualitas data, indikator, dan mekanisme pelaporan keberlanjutan agar informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan semakin konsisten, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan ini mencakup pengumpulan data lintas fungsi, validasi informasi, penyelarasan indikator keberlanjutan dengan kebutuhan pelaporan, serta peningkatan kualitas dokumentasi pendukung.

Untuk menjaga keandalan pelaporan, Direksi memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan, Laporan Tahunan, dan pengungkapan keberlanjutan didukung oleh sistem pengendalian internal, manajemen risiko, mekanisme *review*, fungsi *assurance*, dan pengawasan manajemen yang memadai. Penguatan tersebut juga sejalan dengan implementasi ICoFR yang berperan dalam meningkatkan keandalan proses pelaporan keuangan serta memperkuat kredibilitas informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Dengan pendekatan tersebut, PERURI berupaya memastikan bahwa integritas, keberlanjutan, ESG, dan kesiapan pengungkapan keberlanjutan tidak hanya menjadi komitmen kebijakan, tetapi juga tercermin dalam tata kelola, proses bisnis, pengelolaan risiko, budaya kerja, dan kualitas pelaporan Perusahaan. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya PERURI untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjaga relevansi perannya sebagai institusi strategis dalam ekosistem sekuriti fisik dan digital Indonesia.

Under the *Strategy* pillar, PERURI integrates sustainability issues into its business development direction, both for physical security businesses and digital services. In the physical security business, attention is focused on production process efficiency, management of environmental impacts, and compliance with product security standards. Meanwhile, in digital services, sustainability is associated with data security, system reliability, information protection, as well as contributions toward improving the quality of public services.

Under the *Risk Management* pillar, PERURI gradually strengthens the integration of ESG risks and sustainability-related risks into the Company's risk identification, assessment, mitigation, and monitoring processes. The managed risks include environmental risks arising from production activities, occupational health and safety risks, information security risks, compliance risks, as well as risks related to the development of digital services and the implementation of the Company's strategic mandates. Through this approach, ESG management does not stand separately, but rather becomes part of the Company's overall risk management framework.

Under the *Metrics and Targets* pillar, PERURI continues to strengthen the quality of sustainability data, indicators, and reporting mechanisms so that the information disclosed to stakeholders becomes increasingly consistent, relevant, and accountable. These improvements include cross-functional data collection, information validation, alignment of sustainability indicators with reporting requirements, as well as enhancement of supporting documentation quality.

To maintain reporting reliability, the Board of Directors ensures that the preparation of financial statements, the Annual Report, and sustainability disclosures is supported by adequate internal control systems, risk management, review mechanisms, assurance functions, and management oversight. These strengthening efforts are also aligned with the implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR), which plays a role in improving the reliability of financial reporting processes and strengthening the credibility of information disclosed to stakeholders.

Through this approach, PERURI seeks to ensure that integrity, sustainability, ESG, and sustainability disclosure readiness are not only policy commitments, but are also reflected in the Company's governance, business processes, risk management, work culture, and reporting quality. These efforts form an important part of PERURI's commitment to strengthening public trust and maintaining the relevance of its role as a strategic institution within Indonesia's physical and digital security ecosystem.

Apresiasi dan Penutup

Sebagai penutup, Direksi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan PERURI atas dedikasi, profesionalisme, dan komitmen yang telah diberikan sepanjang tahun 2025 dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan usaha. Kinerja yang dicapai Perusahaan merupakan hasil dari kerja sama yang solid, semangat kolaborasi, serta kemampuan adaptasi yang kuat di seluruh lini organisasi.

Direksi juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pengawas atas arahan dan pengawasan yang konstruktif, serta kepada Pemerintah selaku Pemilik Modal atas kepercayaan yang senantiasa diberikan. Apresiasi turut kami sampaikan kepada seluruh mitra kerja, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan sinergi yang berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja Perusahaan.

Direksi berkomitmen untuk terus memperkuat kinerja Perusahaan melalui pengembangan kapabilitas, peningkatan kualitas layanan, serta pengelolaan usaha yang mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan keberlanjutan. Dengan fondasi yang telah dibangun, PERURI optimis dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional serta memperkuat perannya sebagai institusi strategis dalam mendukung kedaulatan dan kemajuan Indonesia.

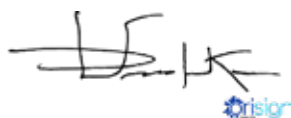
Appreciation and Closing Remarks

As a closing remark, the Board of Directors would like to express its highest appreciation to all PERURI employees for their dedication, professionalism, and commitment throughout 2025 in facing various business dynamics and challenges. The Company's achievements are the result of solid teamwork, a strong spirit of collaboration, and strong adaptability across all levels of the organization.

The Board of Directors also extends its gratitude to the Supervisory Board for its constructive guidance and oversight, as well as to the Government as the Capital Owner for its continued trust and confidence. We also express our appreciation to all business partners, customers, and other stakeholders for their continuous support and synergy in contributing to the Company's performance achievements.

The Board of Directors remains committed to continuously strengthening the Company's performance through capability development, service quality improvement, as well as business management that prioritizes the principles of good governance and sustainability. With the foundation that has been established, PERURI is optimistic that it can continue to make meaningful contributions to the national economy and strengthen its role as a strategic institution in supporting Indonesia's sovereignty and progress.

Jakarta, 29 Juni/June 2026



Dwina Septiani Wijaya
Direktur Utama
President Director



Pernyataan Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi

Statement of Responsibility by the Supervisory Board and the Board of Directors

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan 2025 Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that the 2025 Annual Report of Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) contains comprehensive and accurate information. We take full responsibility for the accuracy of the content of this Annual Report.

Hereby, this statement is made truthfully.

Jakarta, 29 Juni/June 2026

Dewan Pengawas Supervisory Board

Marlison Hakim
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board

Sutanto
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Nanik Murwati
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Djanurindro Wibowo
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Udi Suhandoro
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Mukhamad Taufiq
Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Direksi
Board of Directors




Dwina Septiani Wijaya
Direktur Utama
President Director




Saiful Bahri
Direktur *Currency and Security Solution*
Director of Currency and Security Solution




Fajar Rizki
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management




Gandung Anggoro Murdani
Direktur SDM, Teknologi dan Informasi
Director of Human Resources and Information Technology




Farah Fitria Rahmayanti
Direktur *Digital Business*
Director of Digital Business





Profil Perusahaan Company Profile

Dengan mandat strategis dalam percetakan uang, dokumen sekuriti, dan layanan keamanan digital, PERURI terus memperkuat identitasnya sebagai institusi kepercayaan yang berperan dalam mendukung kedaulatan ekonomi dan digital Indonesia.

With a strategic mandate in currency printing, security documents, and digital security services, PERURI continued to strengthen its identity as a trust institution that supports Indonesia's economic and digital sovereignty.



Data Umum Perusahaan

Company General Information



Kantor Pusat Head Office

Jl. Palatehan No. 4, Blok K-V,
Kebayoran Baru,
Jakarta 12160

Nama Perusahaan Company Name	Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia The Indonesian Government Security Printing and Minting Corporation
Nama Singkatan Abbreviation Name	PERURI
Tanggal Pendirian Date of Establishment	15 September 1971 September 15, 1971
Status Badan Hukum Legal Entity Status	Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Perusahaan Umum (Perum) State Owned Enterprise (SOEs); Public Corporations
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1971 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2006 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2019. Government Regulation No. 60 of 1971 was amended further by Government Regulation No. 25 of 1982, then by Government Regulation No. 34 of 2000, Government Regulation No. 32 of 2006, and perfected for the final time by Government Regulation No. 06 of 2019.
Bidang Usaha Business Field	Pencetakan uang Rupiah, baik uang kertas maupun uang logam, pencetakan dokumen sekuriti untuk negara, serta jasa digital sekuriti. Printing/minting of Rupiah currency, both banknotes and coins, as well as printing of security documents for the state as well as digital security services.
Modal Dasar Authorized Capital	Rp363.573.454.896
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Total Issued And Fully Paid Capital	Rp363.573.454.896



**Kepemilikan
Ownership**

100% milik Pemerintah Republik Indonesia
100% Owned by the Government of the Republic of Indonesia

**Kelompok Usaha
Business Group**

Perusahaan Anak
Subsidiaries

- PT Peruri Wira Timur (PWT)
- PT Peruri Digital Security (PDS)
- PT Kertas Padalarang (PTKP)
- PT Peruri Properti (Pepro)

Perusahaan Cucu

Second-tier Subsidiary

PT Cardsindo Tiga Perkasa

Perusahaan Afiliasi

Affiliated Company

PT Sicpa Peruri Securink

**Media Sosial
Social Media**

 @peruri.indonesia

 @peruri.indonesia

 PERURI

 @peruri.indonesia

 @peruri_id



Akses Informasi terhadap Perusahaan termasuk Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan

Access to Information on the Company, including Branch Offices or Representative Offices

Kantor Pusat PERURI PERURI Head Office	Jl. Palatehan No. 4, Blok K-V Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia. Tel.: (021) 7395000 Fax.: (021) 7221567 E-mail: contact@peruri.co.id Website: www.peruri.co.id
Kawasan Produksi Production Area	Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang Jawa Barat 41363, Indonesia
Entitas Anak Subsidiaries	PT Peruri Wira Timur Jl. Ahmad Yani No. 119, Surabaya, Jawa Timur Tel.: (031) 8438843 Fax.: (031) 8417033 E-mail: depjul@peruriwiratimur.co.id Website: www.peruriwiratimur.co.id
	PT Peruri Digital Security Jalan Sunan Kalijaga No. 11, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Tel.: (021) 29642737 E-mail: info@peruridigit.co.id Website: www.peruridigit.co.id
	PT Kertas Padalarang Jalan Cihaliwung No. 181, Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat Tel.: (022) 6809315, 6809393 Fax.: (022) 6809284 E-mail: office@kertas-padalarang.co.id Website: www.kertas-padalarang.co.id
	PT Peruri Properti Jalan Sunan Kalijaga No. 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Tel.: (021) 7257889/7227848 E-mail: pproperty@gmail.com Website: www.peruriproperty.co.id
Entitas Anak Tidak Langsung Indirect Subsidiary	PT Cardsindo Tiga Perkasa Jalan Raya Mekarjaya No. 121, Kawasan Industri Mekarjaya Raya Mauk KM 7, Sepatan Raya, Tangerang 15131 Tel.: (021) 59370576 Sales: sales@cardsindo.com Support: mkt-support@cardsindo.com Website: www.cardsindo.co
Perusahaan Afiliasi Affiliated Company	PT Sicpa Peruri Securink Jalan Tarum Barat, Kawasan Produksi PERURI, Desa Parungmulya, Ciampel, Karawang, Jawa Barat Tel.: (0267) 440911 Fax: (0267) 440913 Website www.sicpa.com/offices/indonesia-kebayoran-baru

Riwayat Singkat PERURI

PERURI at a Glance



Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hasil peleburan (merger) antara Perusahaan Negara (PN) Arta Yasa dengan PN Pertjetakan Kebajoran. PERURI didirikan pada 15 September 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1971 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2006 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2019.

Sejak awal berdirinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 1971 pasal 3 bahwa tujuan dan lapangan usaha PERURI adalah mencetak uang kertas dan uang logam untuk Bank Indonesia (BI) dan mencetak barang-barang

Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) is a State-Owned Enterprise (SOE) resulting from the merger between Perusahaan Negara (PN) Arta Yasa and PN Pertjetakan Kebajoran. PERURI was established on September 15, 1971, based on Government Regulation No. 60 of 1971, which was subsequently amended by Government Regulation No. 25 of 1982, then amended by Government Regulation No. 34 of 2000 and Government Regulation No. 32 of 2006, and was most recently refined through Government Regulation No. 06 of 2019.

Since its establishment, pursuant to Government Regulation No. 60 of 1971 Article 3, PERURI's objectives and business scope have included printing banknotes and coins for Bank Indonesia (BI), as well as producing printed materials,



cetakan, surat-surat berharga serta membuat barang-barang logam lainnya untuk pemerintah, BI, lembaga-lembaga negara dan umum. Kemudian pada penyempurnaan terakhir sesuai PP Nomor 06 Tahun 2019 bidang usaha tidak hanya meliputi pencetakan uang Rupiah dan pencetakan dokumen sekuriti untuk negara tetapi diperluas dengan menyediakan jasa digital sekuriti. Hingga saat ini PERURI merupakan satu-satunya BUMN yang mendapat kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan pencetakan uang Rupiah, baik uang kertas maupun uang logam, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dengan pengalaman panjang menjaga keaslian uang Republik Indonesia dan dokumen sekuriti lainnya, pada 2019 PERURI bertransformasi masuk ke dalam bisnis *digital security*. Peristiwa ini dimulai dengan masuknya PERURI sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui SK Pengakuan No. 790 Tahun 2019. Di tahun yang sama dengan masuknya PERURI sebagai PSrE, PERURI pertama kali meluncurkan produk atau layanan *digital security* kepada publik melalui 3 lini produknya yaitu PERURI Sign, PERURI Code dan PERURI Trust.

Upaya PERURI menjalankan bisnis *digital security* membuahkan kepercayaan yang tinggi dari pelanggan baik di sektor pemerintahan, BUMN, maupun swasta. Keberhasilan ini mendatangkan kepercayaan tambahan dari pemerintah, di mana PERURI ditunjuk sebagai pihak resmi yang membuat dan mendistribusikan Meterai Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2021. Dengan fitur keamanan tinggi yang dimiliki, *e-Meterai* dari PERURI mampu menjamin keaslian dan keabsahan dokumen elektronik, sehingga mengurangi risiko pemalsuan dan memastikan kepatuhan hukum dalam transaksi digital.

Kapabilitas digital PERURI mencapai tonggak penting dengan ditunjuknya Perusahaan oleh pemerintah sebagai *Government Technology* (GovTech Indonesia). Penugasan ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 yang menempatkan PERURI sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah Indonesia. Amanah ini menjadi bukti nyata kredibilitas dan kompetensi PERURI dalam mendukung pemerintah akselerasi transformasi digital. Dengan peran strategis ini, PERURI berkontribusi pada penyediaan layanan publik yang terintegrasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas dalam membangun ekosistem digital nasional yang berkelanjutan.

Informasi Perubahan Nama Perusahaan pada Tahun Buku

Sejak didirikan pada 15 September 1971 hingga tahun buku 2025, PERURI tidak pernah melakukan perubahan nama. Konsistensi penggunaan nama tersebut tetap dipertahankan hingga saat ini sebagaimana ditegaskan dalam uraian mengenai sejarah pendirian Perusahaan.

securities, and other metal products for the Government, BI, state institutions, and the general public. In its most recent refinement under Government Regulation No. 06 of 2019, PERURI's business scope not only covers the printing of Rupiah currency and security documents for the state, but has also been expanded to include digital security services. To date, PERURI remains the only State-Owned Enterprise entrusted by the Government of the Republic of Indonesia to carry out the printing of Rupiah currency, both banknotes and coins, as mandated under Law No. 7 of 2011 concerning Currency.

With its extensive experience in safeguarding the authenticity of Indonesian currency and other security documents, PERURI underwent a transformation in 2019 by entering the digital security business. This milestone began with PERURI's appointment as an Electronic Certification Provider (PSrE) under the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia through Recognition Decree No. 790 of 2019. In the same year, following its designation as a PSrE, PERURI officially launched its digital security products and services to the public through three product lines, namely PERURI Sign, PERURI Code, and PERURI Trust.

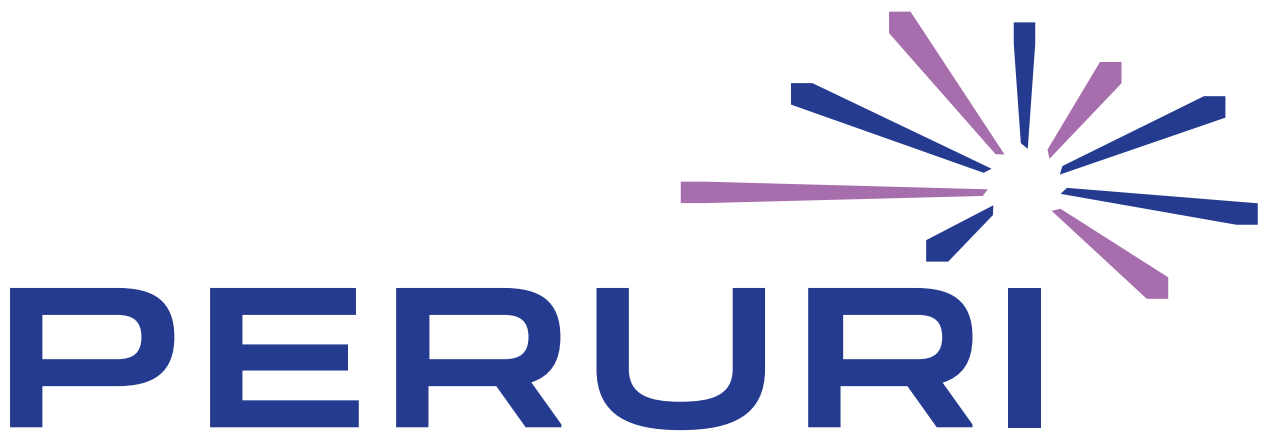
PERURI's efforts in developing its digital security business have earned strong trust from customers across the government, state-owned enterprises, and private sectors. This achievement led to further recognition from the Government, whereby PERURI was appointed as the official party responsible for producing and distributing Electronic Stamp Duty (*e-Meterai*) based on Government Regulation No. 86 of 2021. With its high-security features, PERURI's *e-Meterai* ensures the authenticity and validity of electronic documents, thereby reducing the risk of forgery and ensuring legal compliance in digital transactions.

PERURI's digital capability reached a significant milestone with its appointment by the Government as Indonesia's *Government Technology* (GovTech). This assignment is based on Presidential Regulation No. 82 of 2023, which designates PERURI as the provider of integrated ecosystem services for Indonesia's government digital services. This mandate serves as a tangible proof of PERURI's credibility and competence in supporting the Government's efforts to accelerate digital transformation. Through this strategic role, PERURI contributes to the delivery of integrated public services and provides tangible benefits to the wider community in building a sustainable national digital ecosystem.

Information on Changes to the Company Name during the Financial Year

Since its establishment on September 15, 1971, up to the financial year 2025, PERURI has never changed its name. The consistent use of the name has been maintained to this day, as reaffirmed in the description of the Company's founding history.

Logo Perusahaan Company Logo



Makna Logo Perusahaan

Garis lurus pada logo PERURI merefleksikan perjalanan teknologi PERURI yang panjang dari masa ke masa. Bagian tengah merefleksikan teknologi yang terfokus pada keamanan tingkat tinggi sebagai inti yang mendorong PERURI untuk melakukan terobosan.

Pancaran sinar ke segala penjuru merefleksikan inovasi transformatif yang menyebar ke seluruh aspek kehidupan.

Warna *Core Blue* menggambarkan teknologi, keamanan dan kedaulatan; *Hi-Tech Violet* menggambarkan digital dan transformasi; *Beyond Purple* menggambarkan inovasi, *beyond* dan akselerasi.

Meaning of the Company Logo

The straight lines in the PERURI logo reflect PERURI's long technological journey across different eras. The central element represents high-security-focused technology as the core driving force behind PERURI's breakthroughs.

The radiating beams in all directions symbolize transformative innovation that spreads across all aspects of life.

The Core Blue color represents technology, security, and sovereignty; Hi-Tech Violet represents digitalization and transformation; and Beyond Purple represents innovation, going beyond, and acceleration.



Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Values



Visi Vision

Menjadi pemegang amanat kedaulatan Indonesia dengan menjunjung tata kelola yang baik, dan memajukan kesejahteraan warga negara melalui teknologi.

To become the custodian of Indonesia's sovereignty by upholding good governance and advancing the welfare of citizens through technology.

Penjelasan Visi

- Why:** PERURI berperan menjaga kedaulatan Indonesia, untuk melindungi dan memajukan kemakmuran sosial-ekonomi bangsa.
- What & Where:** PERURI mengemban tugas menjaga tata kelola dan meningkatkan kesejahteraan yang meliputi keseluruhan siklus kehidupan masyarakat secara *end-to-end*, dengan memanfaatkan teknologi, menjelaskan tindakan yang dilakukan dan di mana dampaknya dirasakan.
- Who:** Fokus pada siklus kehidupan masyarakat Indonesia, menegaskan siapa yang mendapat manfaat dari visi tersebut.

Vision Explanation

- Why:** PERURI plays a role in safeguarding Indonesia's sovereignty to protect and enhance the nation's socio-economic prosperity.
- What & Where:** PERURI carries out its mandate to uphold governance and improve welfare across the entire end-to-end lifecycle of society, leveraging technology, thereby defining the actions undertaken and where their impacts are realized.
- Who:** The focus is on the lifecycle of Indonesian society, emphasizing who benefits from this vision.





Misi Mission

1. Menjaga integritas kegiatan ekonomi dengan menjadi penjamin keaslian yang terpercaya untuk uang kertas, dokumen berharga, dan solusi keamanan digital terdepan.
 2. Membangun masa depan kedaulatan Indonesia dengan menghubungkan pemerintah dan warga negara melalui platform digital yang aman dan terpercaya untuk menciptakan layanan publik yang terpadu, transparan dan tanpa hambatan.
-
1. To safeguard the integrity of economic activities by serving as a trusted guarantor of authenticity for banknotes, valuable documents, and advanced digital security solutions.
 2. To build the future of Indonesia's sovereignty by connecting the government and citizens through secure and trusted digital platforms to create integrated, transparent, and seamless public services.

Penjelasan Misi

Misi PERURI dinyatakan dalam dua pernyataan yang mencakup:

1. Menjaga integritas kegiatan ekonomi dengan menjadi penjamin keaslian yang terpercaya untuk uang kertas, dokumen berharga, dan solusi keamanan digital terdepan mengartikulasikan:
 - a. *What:* Misi ini terfokus pada perlindungan integritas aktivitas ekonomi negara.
 - b. *How:* Hal ini dicapai melalui penguatan mata uang, pengamanan dokumen, dan penerapan solusi autentikasi digital terdepan.
 - c. *Who:* Semua upaya ditujukan demi kesejahteraan warga negara Indonesia.
2. Membangun masa depan kedaulatan Indonesia dengan menghubungkan pemerintah dan warga negara melalui platform digital yang aman dan terpercaya untuk menciptakan layanan publik yang terpadu, transparan dan tanpa hambatan menguraikan:
 - a. *What:* Misi ini bertujuan untuk mengubah cara interaksi antara pemerintah dan warga negara
 - b. *How:* Perubahan ini diwujudkan dengan menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan pengalaman yang seamless untuk masyarakat.
 - c. *Who:* Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman layanan publik yang terpadu, transparan, dan efisien bagi masyarakat.

Dengan visi dan misi yang telah tercipta ini, PERURI tidak hanya memperkuat fondasi dari apa yang telah dicapai selama ini, tetapi juga menetapkan arah yang jelas menuju inovasi dan pertumbuhan di masa depan. Visi dan misi ini bukan sekedar kata, tetapi merupakan pedoman yang akan mengarahkan PERURI dalam mewujudkan aspirasinya untuk Indonesia yang lebih berdaulat, sejahtera, dan terhubung.

Mission Explanation

PERURI's mission is articulated in two statements, encompassing:

1. Safeguarding the integrity of economic activities by serving as a trusted guarantor of authenticity for banknotes, valuable documents, and advanced digital security solutions, which articulates:
 - a. *What:* This mission focuses on protecting the integrity of the nation's economic activities.
 - b. *How:* This is achieved through strengthening currency, securing documents, and implementing advanced digital authentication solutions.
 - c. *Who:* All efforts are directed toward the welfare of Indonesian citizens.
2. Building the future of Indonesia's sovereignty by connecting the government and citizens through secure and trusted digital platforms to create integrated, transparent, and seamless public services, which outlines:
 - a. *What:* This mission aims to transform the way the government and citizens interact.
 - b. *How:* This transformation is realized by providing integrated digital platforms with a seamless user experience for the public.
 - c. *Who:* The objective is to create an integrated, transparent, and efficient public service experience for society.

With this vision and mission, PERURI not only strengthens the foundation of what has been achieved to date, but also establishes a clear direction toward future innovation and growth. These vision and mission statements are not merely words, but serve as guiding principles that will steer PERURI in realizing its aspirations for a more sovereign, prosperous, and connected Indonesia.



Tata Nilai Perusahaan Corporate Values

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif merupakan nilai-nilai inti AKHLAK yang terintegrasi dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan aktivitas kerja sehari-hari di PERURI.

Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative are the core AKHLAK values that are integrated and serve as guidelines in carrying out daily work activities at PERURI.

AKHLAK

Amanah Trustworthy	Kompeten Competent	Harmonis Harmonious	Loyal Loyal	Adaptif Adaptive	Kolaboratif Collaborative
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan, bertindak jujur, bertanggung jawab, dan disiplin.	Terus belajar, mengembangkan diri, dan meningkatkan kompetensi untuk memberikan hasil kerja terbaik.	Saling peduli, menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, serta Perusahaan di atas kepentingan pribadi.	Terus berinovasi, proaktif, dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan teknologi.	Membangun kerja sama yang sinergis dan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
Uphold the trust that has been given, and act with integrity, accountability, and discipline.	Continuously learn, develop oneself, and enhance competencies to deliver the best work outcomes.	Care for one another, respect differences, and foster a conducive work environment.	Dedicated and prioritize the interests of the nation, the state, and the Company above personal interests.	Continuously innovate, be proactive, and quickly adapt to changes in situations and technology.	Build synergistic collaboration and provide opportunities for various stakeholders to contribute.

Sosialisasi dan Internalisasi Tata Nilai/Budaya Perusahaan

Pada tahun 2025, PERURI melaksanakan berbagai program sosialisasi dan internalisasi tata nilai serta budaya perusahaan untuk memperkuat pemahaman karyawan terhadap arah budaya Perusahaan. Inisiatif tersebut juga diarahkan untuk menginternalisasikan nilai AKHLAK dan mendorong perilaku kerja yang selaras dengan agenda transformasi bisnis. Pelaksanaannya dilakukan melalui sejumlah program, antara lain *Development Change Agent*, AKHLAK Culture Festival & Communication Culture by BOD, *Awarding Change Agent*, serta *Change Champion and Change Leader Workshop*.

Rangkaian program tersebut menjadi sarana bagi PERURI untuk menyelaraskan aspirasi budaya dengan visi dan misi Perusahaan, memperkuat peran pemimpin dan agen perubahan, serta membangun budaya kerja yang menekankan inovasi, kolaborasi, dan produktivitas. Untuk memperkuat efektivitas implementasinya, PERURI juga melaksanakan *Workshop Culture GAP* dan *Evaluasi Berbasis Kompetensi & Inovasi* yang melibatkan Kepala Departemen sebagai peserta.

Selain itu, Perusahaan terus menjalankan internalisasi pemahaman dan penerapan *Respectful Workplace Policy* secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan kerja yang positif, nyaman, dan mendukung karyawan untuk bekerja secara optimal.

Socialization and Internalization of Corporate Values/Corporate Culture

In 2025, PERURI implemented various programs to socialize and internalize corporate values and culture, aimed at strengthening employees' understanding of the Company's cultural direction. These initiatives were also designed to internalize AKHLAK values and encourage work behaviors aligned with the business transformation agenda. The programs were carried out through several initiatives, including *Development Change Agent*, AKHLAK Culture Festival & Communication Culture by BOD, *Awarding Change Agent*, and *Change Champion and Change Leader Workshop*.

These programs served as platforms for PERURI to align cultural aspirations with the Company's vision and mission, strengthen the roles of leaders and change agents, and build a work culture that emphasizes innovation, collaboration, and productivity. To further enhance implementation effectiveness, PERURI also conducted the *Culture GAP* and *Competency & Innovation-Based Evaluation Workshop*, involving Heads of Department as participants.

In addition, the Company continued to internalize the understanding and implementation of the *Respectful Workplace Policy* to create a positive and comfortable work environment that supports employees in performing optimally.





Kegiatan Usaha

Business Activities

Kegiatan Usaha Berdasarkan PP No. 06 Tahun 2019

PERURI merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum yang kegiatan usahanya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut, pendirian PERURI memiliki maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan pencetakan Mata Uang Rupiah, pembuatan dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Sejalan dengan maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha utama PERURI mencakup:

1. Mencetak Mata Uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan Bank Indonesia;
2. Membuat dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Dokumen Keimigrasian dan Benda Meterai guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan instansi yang berwenang;
3. Membuat dokumen lain untuk negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Pita Cukai dan Dokumen Pertanahan;
4. Membuat dokumen lainnya untuk negara yang memiliki fitur sekuriti dan barang cetakan logam non uang;
5. Mencetak mata uang dan membuat dokumen negara lain yang memiliki fitur sekuriti atas permintaan negara yang bersangkutan, sepanjang telah terpenuhinya pencetakan Mata Uang Rupiah;
6. Menyediakan jasa yang mempunyai fitur sekuriti yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan;
7. Pabrikasi kertas uang, kertas sekuriti, dan tinta sekuriti; dan
8. Jasa digital sekuriti.

Selain kegiatan usaha utama tersebut, PERURI dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya sepanjang memberikan dukungan finansial terhadap aktivitas inti Perusahaan serta dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai, sesuai dengan penetapan Menteri.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan pada Tahun Buku

Sampai dengan akhir tahun 2025, PERURI telah melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2019.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan terhadap sistem keamanan yang terintegrasi,

Business Activities Based on Government Regulation No. 06 of 2019

PERURI is a State-Owned Enterprise in the form of a Public Company (Perum), whose business activities are governed by Government Regulation No. 6 of 2019 concerning Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Under this regulation, the establishment of PERURI aims to support and implement Government policies and programs in the fields of economic and national development through the provision of goods and/or services related to the printing of Rupiah currency, the production of state documents with security features, as well as the optimization of the Company's resources based on the principles of good corporate governance.

In line with these purposes and objectives, PERURI's main business activities include:

1. Printing Rupiah currency to meet the demand of Bank Indonesia;
2. Producing state documents with security features in the form of Immigration Documents and Stamp Duty Items to meet the requirements of authorized institutions;
3. Producing other state documents with security features, including Excise Stamps and Land Documents;
4. Producing other state documents with security features and non-currency metal print products;
5. Printing currency and producing other state documents with security features for other countries upon request, provided that the domestic demand for Rupiah currency has been fulfilled;
6. Providing security-featured services related to the Company's purposes, objectives, and business activities;
7. Manufacturing banknote paper, security paper, and security ink; and
8. Digital security services.

In addition to these core business activities, PERURI may undertake other business activities provided that they support the Company's core operations financially and are carried out in order to optimize the utilization of the resources owned and/or controlled by the Company, in accordance with the determination of the Minister.

Business Activities Conducted During the Financial Year

As of the end of 2025, PERURI has carried out its business activities in accordance with the provisions stipulated under Government Regulation Number 06 of 2019.

In line with technological advancements and the increasing demand for integrated security systems, in 2025 PERURI

pada tahun 2025 PERURI memperkuat transformasi dari *security printing* menuju *digital security* dengan tetap berpijak pada kompetensi inti sebagai penjamin keaslian terpercaya.

Transformasi ini tidak mengubah mandat dasar Perusahaan, melainkan memperluas implementasinya melalui pengembangan jasa sekuriti, jasa digital sekuriti, dan solusi teknologi pemerintahan.

Dalam kerangka tersebut, kegiatan usaha PERURI pada tahun 2025 dijalankan melalui empat pilar bisnis utama, yaitu **Banknote Printing Technology**, **Security Printing Technology**, **Digital Security Technology**, dan **Government Technology**, yang menghubungkan mandat regulasi, kapabilitas Perusahaan, serta portofolio produk dan layanan untuk mendukung keamanan mata uang, dokumen, identitas, transaksi elektronik, dan keterpaduan layanan digital nasional.

Pilar Bisnis PERURI

1. Banknote Printing Technology

Sebagai satu-satunya perusahaan yang dipercaya mencetak uang Rupiah, PERURI terus berinovasi dengan teknologi tercanggih dan fitur keamanan tinggi, seperti tinta khusus, *security thread*, dan *watermark*, untuk memastikan integritas uang Rupiah dan melindunginya dari pemalsuan. Teknologi otomatisasi dan control kualitas terpadu diterapkan pada setiap tahap produksi, dari desain hingga pengemasan.

2. Security Printing Technology

PERURI mencetak dokumen penting dengan teknologi canggih dan protokol keamanan ketat. Dengan pengawasan ketat dan tim ahli terlatih, PERURI memastikan keamanan dokumen seperti meterai, pita cukai, paspor, dan dokumen pertanahan. Semua proses dijaga kerahasiaannya dengan teknologi mutakhir untuk melindungi informasi dari gangguan luar.

3. Digital Security Technology

PERURI menggunakan teknologi *digital security* untuk melindungi dokumen elektronik dengan enkripsi data, tanda tangan digital, dan stempel digital. Sebagai satu-satunya BUMN Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, PERURI memastikan setiap transaksi dan komunikasi digital aman dan sah di Indonesia dengan sertifikat elektronik yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

4. Government Technology (GovTech)

Dalam perannya sebagai GovTech di Indonesia, PERURI mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan. PERURI menyediakan solusi teknologi canggih, termasuk infrastruktur dan aplikasi digital, yang esensial untuk implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, sehingga turut meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik di tingkat nasional.

strengthened its transformation from security printing to digital security while remaining grounded in its core competence as a trusted guarantor of authenticity.

This transformation does not alter the Company's fundamental mandate, but rather expands its implementation through the development of security services, digital security services, and government technology solutions.

Within this framework, PERURI's business activities in 2025 were carried out through four main business pillars, namely **Banknote Printing Technology**, **Security Printing Technology**, **Digital Security Technology**, and **Government Technology**, which integrate regulatory mandates, the Company's capabilities, and its portfolio of products and services to support the security of currency, documents, identities, electronic transactions, and the integration of national digital services.

PERURI Business Pillars

1. Banknote Printing Technology

As the only company entrusted with printing Rupiah currency, PERURI continues to innovate using advanced technology and high-security features, such as specialized inks, holograms, and watermarks, to ensure the integrity of the Rupiah and protect it from counterfeiting. Automation technology and integrated quality control are applied at every stage of production, from design to packaging.

2. Security Printing Technology

PERURI produces critical documents using advanced technology and strict security protocols. With rigorous supervision and a team of trained experts, PERURI ensures the security of documents such as stamp duty items, excise stamps, passports, and land documents. All processes are safeguarded with state-of-the-art technology to maintain confidentiality and protect information from external threats.

3. Digital Security Technology

PERURI utilizes digital security technology to protect electronic documents through data encryption, digital signatures, and digital stamps. As the only State-Owned Enterprise acting as an Electronic Certification Authority, PERURI ensures that all digital transactions and communications in Indonesia are secure and legally valid through electronic certificates recognized by the Ministry of Communication and Digital.

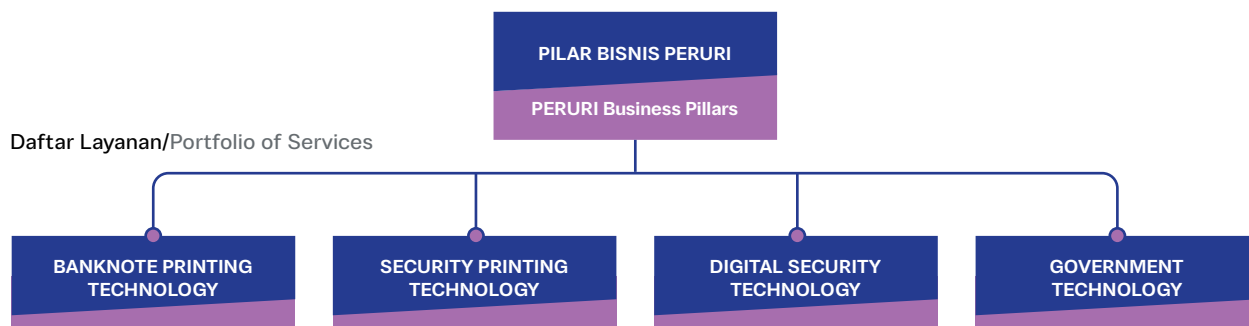
4. Government Technology (GovTech)

In its role as a GovTech provider in Indonesia, PERURI supports digital transformation in the government sector. PERURI delivers advanced technology solutions, including digital infrastructure and applications, which are essential for the implementation of the Electronic-Based Government System, thereby enhancing efficiency, transparency, and public services at the national level.



Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai struktur portofolio usaha PERURI, pilar bisnis Perusahaan dipetakan ke dalam produk dan jasa utama yang dijalankan pada tahun buku 2025. Pemetaan ini menunjukkan bahwa setiap produk dan layanan PERURI merupakan bentuk implementasi dari kapabilitas bisnis yang dikembangkan Perusahaan, baik pada bidang pencetakan sekuriti, keamanan digital, maupun teknologi pemerintahan.

To provide a more comprehensive overview of PERURI's business portfolio structure, the Company's business pillars are mapped into the main products and services delivered during the 2025 financial year. This mapping demonstrates that each of PERURI's products and services represents the implementation of the Company's developed business capabilities across security printing, digital security, and government technology.



Dasar Hukum/Legal Mandates

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 6 Th. 2019 • UU Mata Uang No. 7 - Th. 2011 | <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 6 Th. 2019 • UU No. 10 - Th. 2020 • PP No. 86 - Th. 2021 • PP No. 51 - Th. 2020 • Permenlu No. 13 - Th. 2022 | <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 6 Th. 2019 • UU No. 10 - Th. 2020 • PP No. 86 - Th. 2021 | <ul style="list-style-type: none"> • Perpres No. 82 Th. 2023 |
|--|---|---|---|

Produk/Products

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Uang Kertas/Banknotes • Uang Logam/Coins | <ul style="list-style-type: none"> • Paspor/Passport • Meterai/Tax Stamp • Pita Cukai/Excise Stamp • Sertipikat Tanah/Land Certificate | <ul style="list-style-type: none"> • PERURI Digital Product • PERURI Digital Solution • PERURI Graph Analytic • E-Meterai • Smart Card | <ul style="list-style-type: none"> • INApas • INAku • INAgov |
|---|--|---|---|

PERURI mengembangkan portofolio bisnis melalui pengembangan kapabilitas internal serta dukungan entitas anak sesuai bidang usaha masing-masing, meliputi *security printing*, *digital security*, *security paper*, dan properti. Uraian lebih lanjut mengenai entitas anak disajikan pada subbab Struktur Grup dan Entitas Anak dalam Bab Profil Perusahaan ini.

PERURI develops its business portfolio through the enhancement of internal capabilities as well as support from its subsidiaries in accordance with their respective business fields, including security printing, digital security, security paper, and property. Further details regarding the subsidiaries are presented in the subsection Group Structure and Subsidiaries in this Company Profile chapter.

Produk dan Jasa

Produk dan layanan yang menjadi fokus utama (*core business*) PERURI meliputi sebagai berikut:

1. Uang Kertas dan Logam

Salah satu kegiatan usaha dari PERURI adalah mencetak uang baik uang kertas maupun uang logam, dilakukan terutama sesuai dengan permintaan dari Bank Indonesia, ataupun dalam hal lainnya sesuai dengan permintaan negara lain. PERURI menerapkan Prosedur Standar Operasional dengan tingkat keamanan yang tinggi, dari awal proses desain, penyediaan tinta, pencetakan hingga hasil akhir menjadi uang kertas dan logam siap edar.

2. Logam Non-Uang

Produk PERURI untuk logam non-uang memiliki beberapa aspek yang selalu diterapkan dalam setiap

Products and Services

The products and services that constitute PERURI's core business include the following:

1. Banknotes and Coins

One of PERURI's business activities is printing currency, both banknotes and coins, primarily based on requests from Bank Indonesia, as well as, where applicable, requests from other countries. PERURI applies Standard Operating Procedures with a high level of security, covering the entire process from initial design, provision of paper and ink, printing, to the final output of banknotes and coins ready for circulation.

2. Non-Currency Metal

PERURI's non-currency metal products incorporate several key aspects in every production process to

pencetakannya untuk menjaga kualitas serta keamanan produk yang dihasilkannya, antara lain pemilihan kualitas bahan terbaik, kerumitan desain serta ketajaman pencetakan. Beberapa hasil produk logam non uang dari PERURI antara lain, logam emas, *commemorative coin*, medali, lencana, plakat dan penghargaan masa bakti.

3. Kertas Berharga Non-Uang

Kertas berharga non-uang adalah dokumen keimigrasian, pita cukai, meterai, prangko, sertifikat, ijazah, transkrip nilai, dokumen perbankan, dokumen pertanahan serta lainnya yang merupakan dokumen yang berkaitan erat dengan masalah keamanan negara serta masyarakat. Untuk menjaga kualitas pencetakan kertas berharga non uang PERURI senantiasa mengembangkan teknologi keamanan secara berkala terkait pemenuhan kebutuhan dari setiap permintaan yang datang.

4. Solusi Bisnis Digital

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Digitalisasi menjadi bagian dari keseharian serta kehidupan masyarakat. Kebutuhan meningkat akan suatu sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi dengan baik, transparan, *real time*, serta memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk menghindari dari upaya pemalsuan. Solusi bisnis digital merupakan transformasi bisnis sekaligus pengembangan usaha yang dilakukan PERURI guna menjawab akan kebutuhan era digital.

Portofolio solusi bisnis digital PERURI, antara lain:

a. PERURI Sign

Tanda tangan elektronik tersertifikasi dari PERURI yang dilekatkan dan terasosiasi dengan dokumen elektronik untuk digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi yang menjaga keabsahan informasi elektronik. Produk digital yang dibuat untuk menjamin kerahasiaan data (*confidentiality*), melindungi integritas isi dokumen (*data integrity*), menjamin keaslian data (*authentication*) dan jaminan nirsangkal (*non-repudiation*) dari suatu dokumen elektronik. PERURI Sign tersedia dalam *dedicated portal* dan dapat dilakukan integrasi antar sistem melalui API *on-cloud* dan *on-premise*.

b. PERURI Shield

Sebagai platform layanan transaksi digital terpadu, portal bersama ini menyediakan ekosistem sistem yang komprehensif dalam satu tempat. Layanan yang disediakan mencakup tandatangan elektronik (PERURI Sign), stempel elektronik (PERURI Tera), dan meterai elektronik, serta fitur e-invoice, tersedia *payment gateway* untuk memfasilitasi proses pembayaran secara aman dan efisien. Layanan ini dirancang untuk memudahkan proses dokumen dan transaksi digital secara aman, efisien, dan terintegrasi, baik melalui portal siap pakai maupun integrasi dengan sistem pelanggan.

PERURI Shield memperkuat nilai tambah layanan digital PERURI karena mampu menyatukan beberapa fitur keamanan dan transaksi digital dalam satu

maintain quality and security, including the selection of high-quality materials, intricate design, and precision in minting. Examples of PERURI's non-currency metal products include gold bullion, commemorative coins, medals, badges, plaques, and long-service awards.

3. Non-Currency Security Paper

Non-currency security paper includes immigration documents, excise stamps, stamp duty, postage stamps, certificates, diplomas, academic transcripts, banking documents, land documents, and others, which are closely related to national and public security. To maintain the quality of these products, PERURI continuously develops security technologies in line with evolving requirements and demands.

4. Digital Business Solutions

The rapid advancement of information technology has transformed various aspects of people's lives. Digitalization has become an integral part of daily activities. There is an increasing need for well-integrated information management systems that are transparent, real-time, and equipped with high levels of security to prevent counterfeiting. PERURI's digital business solutions represent both a business transformation and business development initiative to address the demands of the digital era.

PERURI's digital business solutions portfolio includes:

a. PERURI Sign

A certified electronic signature from PERURI affixed and associated with an electronic document to be used as a verification and authentication tool that maintains the validity of electronic information. A platform created to ensure data confidentiality, protect the integrity of document content, guaranty data authenticity, and provide non-repudiation assurance for an electronic document. PERURI Sign is available in a dedicated portal and can be integrated between systems thru on-cloud and on-premise APIs.

b. PERURI Shield

As an integrated digital transaction service platform, this joint portal provides a comprehensive system ecosystem in one place. The services provided include electronic signatures (PERURI Sign), electronic stamps (PERURI Tera), and electronic seals, as well as e-invoice features, with a payment gateway available to facilitate secure and efficient payment processes. This service is designed to facilitate secure, efficient, and integrated digital document and transaction processes, either through a ready-to-use portal or system integration.

PERURI Shield enhances the value of PERURI's digital services by integrating various security and digital transaction features into a single ecosystem,



Kawasan Produksi
Production Area

Desa Parung Mulya,
Ciampel, Karawang,
Jawa Barat 41361

ekosistem layanan. Dengan demikian, pelanggan dapat mengelola proses dokumen, validasi, dan transaksi elektronik secara lebih sederhana tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kepatuhan.

c. PERURI ID

Identitas digital berbasis sertifikat elektronik yang diterbitkan dan tersertifikasi oleh PERURI. Layanan ini digunakan untuk menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang terintegrasi dengan data kependudukan tervalidasi, sehingga transaksi dapat dilakukan secara lebih aman dan terpercaya.

PERURI ID mendukung penguatan validasi identitas, keamanan transaksi elektronik, serta integrasi dengan ekosistem digital nasional. Layanan ini relevan dengan kebutuhan masyarakat dan institusi terhadap identitas digital yang sah, aman, dan dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan digital.

d. PERURI Tera

Layanan stempel elektronik dan segel elektronik yang diterbitkan dan tersertifikasi oleh PERURI untuk menjamin asal, integritas, dan keutuhan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Stempel

enabling customers to manage document processes, validation, and electronic transactions more efficiently without compromising security and compliance.

c. PERURI ID

A digital identity based on electronic certificates issued and certified by PERURI. This service is used to verify the legal status of parties involved in electronic transactions which are integrated with validated population data, enabling more secure and reliable transactions.

PERURI ID supports identity validation, electronic transaction security, and integration with the national digital ecosystem. This service meets the needs of both individuals and institutions for a legitimate, secure, and functional digital identity.

d. PERURI Tera

Electronic seal and electronic stamp service issued and certified by PERURI to ensure the origin, integrity, and authenticity of electronic information and/or documents. Electronic stamps provide



elektronik digunakan untuk memberikan validasi resmi pada dokumen elektronik, menjamin keaslian dokumen, serta memudahkan proses pengesahan dokumen secara digital.

Sementara itu, segel elektronik dapat digunakan untuk memastikan produk terlindungi dari pemalsuan, menjaga integritas dan validasi barang, mendukung pelacakan dan distribusi, serta memenuhi kebutuhan regulasi dan standar hukum. Melalui PERURI Tera, Perusahaan memperluas kapabilitas pengamanan dari dokumen elektronik menuju pengamanan produk dan rantai distribusi.

e. Meterai Elektronik

Meterai berbentuk elektronik sebagai bukti pelunasan pajak atas transaksi dokumen elektronik. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang dinamis dan pergeseran ke arah transaksi tanpa kertas, e-Meterai menjamin kepatuhan hukum dan meningkatkan potensi pendapatan negara. Diterapkan secara digital melalui sistem meterai elektronik dan membantu mengamankan dokumen elektronik, memastikan keaslian dan legalitasnya dalam transaksi digital

official validation for electronic documents, ensuring authenticity and facilitating digital document legalization.

Electronic seals, on the other hand, help protect products from counterfeiting, maintain integrity and validation, support tracking and distribution, and comply with regulatory and legal standards. Through PERURI Tera, the Company expands its security capabilities from electronic documents to product and distribution chain protection.

e. Electronic Stamp Duty (e-Meterai)

An electronic stamp serving as proof of tax payment for electronic document transactions. In line with the dynamic development of information technology and the shift toward paperless transactions, e-Meterai ensures legal compliance and supports state revenue generation. Implemented digitally, it helps secure electronic documents while ensuring their authenticity and legal validity in digital transactions.



f. PERURI Graph Analytics

Layanan analitik berbasis teknologi *graph analytics* yang membantu pengguna memahami keterhubungan antar-data secara komprehensif. Layanan ini dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam berbagai kebutuhan, antara lain *risk compliance*, *fraud detection*, *identity and access management*, *master data management*, *network and IT operations*, *real-time recommendations*, pengawasan, keamanan, penegakan hukum, keamanan siber, serta pengelolaan sumber daya.

Dengan kemampuan memetakan relasi antar-data, PERURI Graph Analytics membantu organisasi melihat pola, hubungan, dependensi, dan anomali yang tidak selalu terlihat melalui pendekatan analitik konvensional. Layanan ini memperluas kontribusi PERURI dari penyedia autentikasi dan verifikasi menuju penyedia solusi analitik untuk mendukung keputusan strategis dan pengendalian risiko.

g. Smart Card

Kartu praktis yang dilengkapi teknologi sekuriti, termasuk chip, untuk menyimpan dan mengelola data secara aman. Produk ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi maupun proses identifikasi secara cepat, mudah, dan aman, baik secara *contact* maupun *contactless*.

Smart Card PERURI dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan, antara lain kartu pembayaran non-tunai, kartu SIM, kartu transaksi (kartu uang elektronik), kartu loyalitas (kartu hadiah, kartu souvenir) serta kartu identifikasi (kartu akses). Produk ini menunjukkan perluasan kapabilitas PERURI dalam mendukung kebutuhan identifikasi, transaksi, dan pengamanan berbasis kartu.

h. Digital Solution: Design, Development, dan Operation

PERURI juga menyediakan layanan solusi digital secara menyeluruh melalui tahapan *design*, *development*, dan *operation*. Pada tahap *design*, PERURI merancang sistem digital dengan pendekatan proaktif dan analisis menyeluruh untuk mengantisipasi risiko sejak awal serta menghasilkan rancangan solusi yang efektif, efisien, aman, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pelanggan.

Pada tahap *development*, PERURI mengembangkan solusi digital dengan pendekatan *security by design*, praktik pengkodean aman, pengujian menyeluruh, uji penetrasi, dan analisis kerentanan. Pendekatan ini memastikan sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi sesuai kebutuhan, tetapi juga memiliki ketahanan terhadap ancaman siber dan mampu menjaga integritas layanan.

f. PERURI Graph Analytics

An analytics service based on graph analytics technology that helps users understand the interconnections between data comprehensively. It supports data-driven decision-making in areas such as risk compliance, fraud detection, identity and access management, master data management, network and IT operations, real-time recommendations, monitoring, security, law enforcement, cybersecurity, and resource management.

By mapping relationships between data points, this service helps organizations identify patterns, dependencies, and anomalies that may not be visible through conventional analytics. It expands PERURI's role from authentication and verification provider to an analytics solution provider supporting strategic decisions and risk control.

g. Smart Card

A convenient card equipped with security technology, including a chip, to securely store and manage data. It enables fast, easy, and secure transactions and identification processes, both contact and contactless.

PERURI Smart Cards can be developed for various purposes, including non-cash payment cards, SIM cards, transaction cards, electronic money cards, loyalty cards, gift cards, souvenir cards, and identification or access cards, demonstrating PERURI's expanded capabilities in card-based security, identification, and transactions

h. Digital Solutions: Design, Development, and Operation

PERURI provides end-to-end digital solutions through the stages of design, development, and operation. In the design stage, PERURI develops digital systems using a proactive approach and comprehensive analysis to anticipate risks early and deliver effective, efficient, secure, and scalable solutions.

In the development stage, PERURI applies a security-by-design approach, secure coding practices, comprehensive testing, penetration testing, and vulnerability analysis to ensure system resilience against cyber threats and maintain service integrity.

Pada tahap *operation*, PERURI menyediakan pengelolaan operasional, baik teknis maupun nonteknis, termasuk pemantauan sistem secara *real-time* 24/7, pembaruan keamanan berkala, respons insiden, penerapan kebijakan dan prosedur keamanan, pelatihan pengguna, dokumentasi operasional, serta asistensi kebijakan internal. Layanan ini mendukung pelanggan dalam menjaga keandalan, keamanan, dan kepatuhan operasional sistem digital.

In the operation stage, PERURI offers both technical and non-technical operational management, including 24/7 real-time monitoring, regular security updates, incident response, implementation of security policies and procedures, user training, operational documentation, and internal policy assistance. This service supports customers in maintaining system reliability, security, and compliance.

5. Government Technology (GovTech)

Sebagai GovTech Indonesia, PERURI menjalankan peran strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan melalui penyediaan infrastruktur dan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peran tersebut dijalankan untuk mempercepat keterpaduan layanan digital pemerintah, meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.

Mandat GovTech Indonesia sejalan dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Perpres tersebut mengatur percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional.

5. Government Technology (GovTech)

As Indonesia's GovTech, PERURI plays a strategic role in supporting government digital transformation through the provision of infrastructure and applications for the Electronic-Based Government System (SPBE). This role is carried out to accelerate the integration of government digital services, enhance efficiency, transparency, accountability, and improve the quality of public services.

The mandate of Indonesia's GovTech aligns with Presidential Regulation No. 82 of 2023 concerning the Acceleration of Digital Transformation and Integration of National Digital Services. This regulation governs the acceleration of digital transformation through the implementation of Priority SPBE Applications by prioritizing integration and interoperability to achieve a unified national digital service ecosystem.

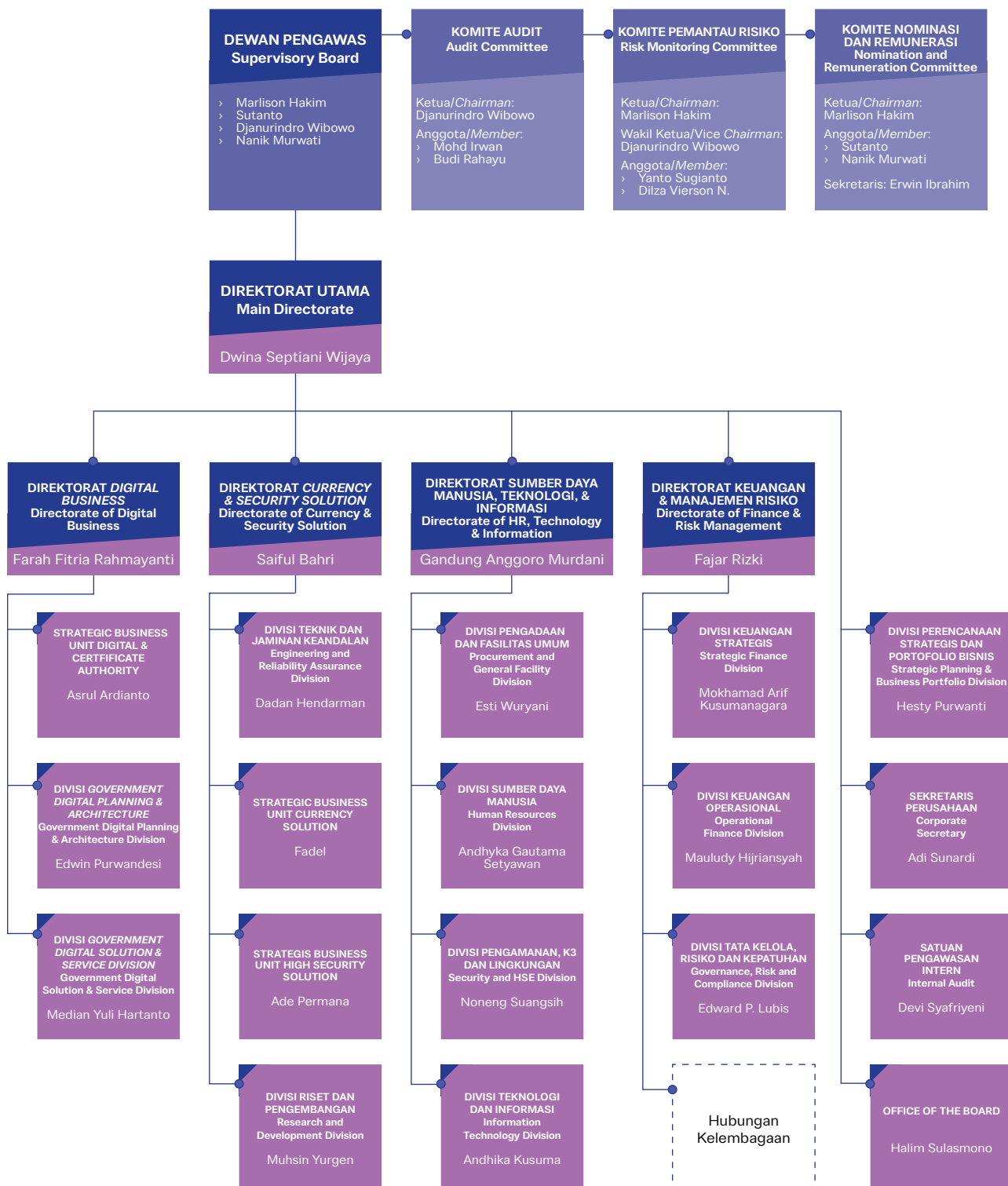




Struktur Organisasi

Organizational Structure

Struktur Organisasi PERURI per 31 Desember 2025
PERURI Organizational Structure as of December 31, 2025



DEWAN PENGAWAS
Supervisory Board

DIREKTORAT
Directorate

DIVISI SETINGKAT
Division or Equivalent

FUNGSIONAL
Function



Wilayah Operasional dan Produk/Layanan

Operational Region and Products/Services



No	Entitas Entity	Alamat Address	Produk/Layanan Products/Services
1	PT Kertas Padalarang	Jl. Cihaliwung No. 81, Padalarang 40553, Bandung Barat, Jawa Barat	› Kertas sekuriti › Kertas khusus › Kerja sama produk dan layanan › Security paper › Specialty paper › Product and service collaboration
2	PT Peruri Wira Timur	Jl. Ahmad Yani No. 119 Surabaya 60237 Jawa Timur	› Dokumen Pendidikan › Dokumen Perizinan › Buku › Label › Dokumen Lain › Educational documents › Licensing documents › Books › Labels › Other documents
3	PT Peruri Properti	Jl. Sunan Kalijaga No. 15, Jakarta Selatan 12160	› Konstruksi › Building Management Pengelolaan Aset › Construction › Building management and asset management



No	Entitas Entity	Alamat Address	Produk/Layanan Products/Services
4	PT Peruri Digital Security	Jl. Sunan Kalijaga No. 11, Jakarta Selatan 12160	› ICT Manage Service › Digital Solution (E-meterai) › Digital Product › Business Solution
5	PT Cardsindo Tiga Perkasa	Kawasan Industri Mekar Jaya Jl. Mekar Jaya 121 Mauk Km 7 Tangerang	› Telco (Simcard, Voucher isi ulang, dan Packaging) › Banking (Debit chip NSICCS, Kartu Prepaid, SAM card) › Retail (Game, Member card, Asuransi, Hotel, Managment building, gift voucher) › Telecommunications (SIM cards, top-up vouchers, and packaging) › Banking (NSICCS chip debit cards, prepaid cards, SAM cards) › Retail (games, membership cards, insurance, hotels, building management, gift vouchers)
6	PT Peruri Securink	Jl. Tarum Barat, Kawasan PERURI Desa Parung, Ciampel, Karawang, Jawa Barat	Tinta sekuriti yang terbatas pada pelanggan yang terdaftar di Botasupal Security ink limited to customers registered with Botasupal



Profil Dewan Pengawas

Supervisory Board Profile



Marlison Hakim

Ketua Dewan Pengawas

Chairman of the Supervisory Board

Masa Jabatan 10 Juni 2024–10 Juni 2029, Periode Ke-1
Term of Office June 10, 2024–June 10, 2029, 1st Term

Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI)
Citizenship Indonesian Citizen

Usia 59 tahun
Age 59 years

Domisili Jakarta
Domicile

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PERURI berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-130/MBU/06/2024 tanggal 10 Juni 2024.

Riwayat Pendidikan

- › Magister Manajemen dari Universitas Brawijaya (2007);
- › Sarjana Manajemen dari Universitas Indonesia (1992);
- › Diploma Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan gelar Diploma Akuntansi (1988)

Sertifikasi Profesi

- › Instruktur Master Level 6, BNSP (2025)
- › Instruktur/Trainer Level 4, BNSP (2025)
- › Qualified Risk Governance Professional (QRGP)–BNSP (2024)
- › Sertifikasi Pengajar Pengelolaan Uang Tunai
- › Advance Procurement Skills, BIMC London (2019)

Riwayat Jabatan

Di PERURI:

Ketua Dewan Pengawas PERURI (10 Juni 2024–10 Juni 2028)

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

- › Asisten Gubernur, Kepala Departemen Pengelolaan Uang, Bank Indonesia (2024);
- › Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Pengelolaan Uang, Bank Indonesia (2020–2024);
- › Direktur, Kepala Departemen Pengadaan Strategis, Bank Indonesia (2018–2020);
- › Direktur, Kepala Grup Departemen Pengadaan Strategis, Bank Indonesia (2016–2018);
- › Direktur, Kepala Grup Departemen Logistik dan Pengamanan, Bank Indonesia (2015–2016);
- › Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah (2013–2015);
- › Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi (2012–2013);
- › Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara (2009–2012);
- › Staf – Asisten Direktur, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bank Indonesia Jember dan Bank Indonesia Kediri (1995–2009)

Rangkap Jabatan

Di PERURI:

- › Ketua Komite Pemantauan Risiko.
- › Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia dengan jabatan Asisten Gubernur periode tahun 2020–2025, rangkap jabatan sejak 2024.

Appointment History

Serving as Chairman of the Supervisory Board of PERURI based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-130/MBU/06/2024 dated June 10, 2024.

Educational Background

- › Master of Management from Universitas Brawijaya (2007)
- › Bachelor of Management from Universitas Indonesia (1992)
- › Diploma in Accounting from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1988)

Professional Certifications

- › Master Instructor Level 6, BNSP (2025)
- › Instructor/Trainer Level 4, BNSP (2025)
- › Qualified Risk Governance Professional (QRGP)–BNSP (2024)
- › Cash Management Instructor Certification
- › Advance Procurement Skills, BIMC London (2019)

Career History

At PERURI:

Chairman of the Supervisory Board (June 10, 2024–June 10, 2029)

At Other Institutions/Companies:

- › Assistant Governor, Head of Currency Management Department, Bank Indonesia (2024)
- › Executive Director, Head of Currency Management Department, Bank Indonesia (2020–2024)
- › Director, Head of Strategic Procurement Department, Bank Indonesia (2018–2020)
- › Director, Group Head of Strategic Procurement Department, Bank Indonesia (2016–2018)
- › Director, Group Head of Logistics and Security Department, Bank Indonesia (2015–2016)
- › Deputy Head of Bank Indonesia Representative Office for Central Java Province (2013–2015)
- › Head of Bank Indonesia Representative Office for Jambi Province (2012–2013)
- › Head of Bank Indonesia Representative Office for North Maluku Province (2009–2012)
- › Staff – Assistant Director, Bank Indonesia Representative Office Central Kalimantan, Bank Indonesia Lampung Province, Bank Indonesia Jember, and Bank Indonesia Kediri (1995–2009)

Concurrent Positions

At PERURI:

- › Chairman of the Risk Monitoring Committee
- › Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

At Other Institutions/Companies:

Head of Currency Management Department of Bank Indonesia with the position of Assistant Governor for the 2020–2025 period, holding concurrent position since 2024.



Sutanto

Anggota Dewan Pengawas
Member of the Supervisory Board

Masa Jabatan 11 Juni 2024–11 Juni 2029, Periode Ke-2
Term of Office June 11, 2024–June 11, 2029, 2nd Term

Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI)
Citizenship Indonesian Citizen

Usia 62 tahun
Age 62 years

Domisili Jakarta
Domicile

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas PERURI berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-132/MBU/06/2024 tanggal 11 Juni 2024.

Riwayat Pendidikan

- › Magister Hukum dari Universitas Kadiri (2025);
- › Lembaga Ketahanan Nasional RI (2015);
- › Sekolah Pimpinan Kepolisian RI (2004);
- › Sarjana Ilmu Hukum Universitas Proklamasi 45 (1999);
- › Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1995);
- › Akademi Kepolisian (1988).

Sertifikasi Profesi

Qualified Risk Governance Professional (QRGP) – BNSP (2024)

Riwayat Jabatan

Di PERURI:
Anggota Dewan Pengawas (11 Juni 2024-11 Juni 2029)

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

- › Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara (2021–2024);
- › Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) (Februari 2021–Februari 2022);
- › Deputy VIII–Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur BIN (2020–2021);
- › Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Intelijen Negara/Kalakhar Botasupal (2018–2020);
- › Direktur Kontra Infiltrasi dan Sabotase Deputy III BIN (2015–2018);
- › Direktur Intelkam Polda Metro Jaya (2013–2015);
- › Kepala Biro Operasi Polda Maluku (2011–2013);
- › Direktur Intelkam Polda Bangka Belitung (2008–2010);
- › Kapolres Bangka Polda Bangka Belitung (2007–2008);
- › Kapolres Bangka Tengah Polda Bangka Belitung (2005–2007).

Rangkap Jabatan

Di PERURI:
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

- › Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara sejak Februari 2022.
- › Komisaris PT Aneka Gas Industri Tbk (2022-sekarang)

Appointment History

Serving as Member of the Supervisory Board of PERURI based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-132/MBU/06/2024 dated June 11, 2024.

Educational Background

- › Master of Law from Universitas Kadiri (2025);
- › National Resilience Institute of the Republic of Indonesia (Lemhannas RI) (2015);
- › Indonesian National Police Leadership School (2004);
- › Bachelor of Law from Universitas Proklamasi 45 (1999);
- › College of Police Science (1995);
- › Police Academy (1988).

Professional Certifications

Qualified Risk Governance Professional (QRGP) – BNSP (2024)

Career History

At PERURI:
Member of the Supervisory Board (June 11, 2024–June 11, 2029)

At Other Institutions/Companies:

- › Special Staff to the Head of the State Intelligence Agency (2021–2024)
- › Deputy Head of the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) (February 2021–February 2022)
- › Deputy VIII – Intelligence for Apparatus Security, State Intelligence Agency (2020–2021)
- › Expert Staff for Legal and Human Rights Affairs, State Intelligence Agency/Head of BOTASUPAL Secretariat (2018–2020)
- › Director of Counter Infiltration and Sabotage, Deputy III, State Intelligence Agency (2015–2018)
- › Director of Intelligence and Security, Polda Metro Jaya (2013–2015)
- › Head of Operations Bureau, Polda Maluku (2011–2013)
- › Director of Intelligence and Security, Polda Bangka Belitung (2008–2010)
- › Chief of Police, Bangka Resort Police, Polda Bangka Belitung (2007–2008)
- › Chief of Police, Central Bangka Resort Police, Polda Bangka Belitung (2005–2007)

Concurrent Positions

At PERURI:
Member of the Nomination and Remuneration Committee

At Other Institutions/Companies:

- › Special Staff to the Head of the State Intelligence Agency since February 2022. oncurrent position since 2024.
- › Commissioner, PT Aneka Gas Industri Tbk (2022-present)



Djanurindro Wibowo

Anggota Dewan Pengawas

Member of the Supervisory Board

Masa Jabatan 31 Juli 2023 - 31 Juli 2028, Periode Ke-1

Term of Office July 31, 2023 – July 31, 2028, 1st Term

Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI)

Citizenship Indonesian Citizen

Usia 55 tahun

Age 55 years

Domisili Jakarta

Domicile

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas PERURI berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-220/MBU/07/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Riwayat Pendidikan

- › Program Manajemen Eksekutif Bea Cukai (Non Gelar) - University of Canberra (2017);
- › S2 Teknik dan Manajemen Industri dari Institut Teknologi Bandung (1998);
- › S1 Teknik Sipil dan Perencanaan dari Institut Teknologi Bandung (1994).

Sertifikasi Profesi

- › Ahli Pengadaan Nasional – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- › Qualified Risk Governance Professional (QRGP) – BNSP (2024)

Riwayat Jabatan

Di PERURI:

Anggota Dewan Pengawas PERURI (31 Juli 2023 - 31 Juli 2028)

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

- › Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten (September 2023–saat ini);
- › Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan, DJKN (2021–September 2022);
- › Kasubdit Impor, Dit Teknis Kepabeanan, DJBC (2016–2021);
- › Kepala KPPBC TMP Cikarang (2015–2016);
- › Kepala KPPBC TMP A Bekasi (2014–2015);
- › Kepala KPPBC TMP B Balikpapan (2012–2014);
- › Kepala KPPBC TMP C Bontang (2008–2012).

Rangkap Jabatan

Di PERURI:

Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko I.

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten sejak September 2023.

Appointment History

Serving as Member of the Supervisory Board of PERURI based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-220/MBU/07/2023 dated July 31, 2023.

Educational Background

- › Executive Customs Management Program (Non-Degree), University of Canberra (2017)
- › Master's Degree in Industrial Engineering and Management, Institut Teknologi Bandung (1998)
- › Bachelor's Degree in Civil Engineering and Planning, Institut Teknologi Bandung (1994)

Professional Certifications

- › National Procurement Expert – National Public Procurement Agency
- › Qualified Risk Governance Professional (QRGP) – BNSP (2024)

Career History

At PERURI:

Member of the Supervisory Board (July 31, 2023 – July 31, 2028)

At Other Institutions/Companies:

- › Head of Regional Office, Directorate General of State Assets, Banten (September 2023–present)
- › Policy Harmonization Analyst, Directorate General of State Assets (2021–September 2022)
- › Head of Import Sub-Directorate, Directorate of Technical Customs, Directorate General of Customs and Excise (2016–2021)
- › Head of Customs and Excise Office (KPPBC TMP) Cikarang (2015–2016)
- › Head of Customs and Excise Office (KPPBC TMP A) Bekasi (2014–2015)
- › Head of Customs and Excise Office (KPPBC TMP B) Balikpapan (2012–2014)
- › Head of Customs and Excise Office (KPPBC TMP C) Bontang (2008–2012)

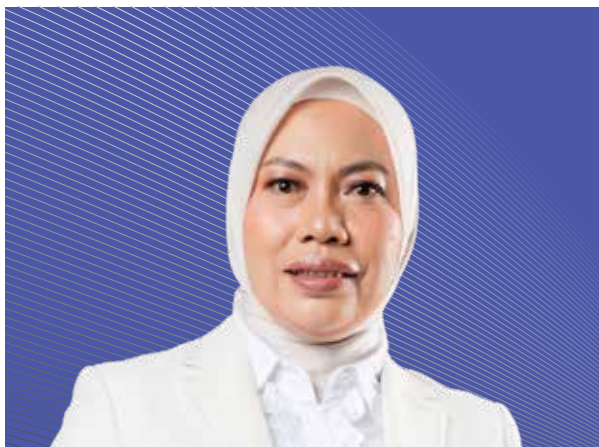
Concurrent Positions

At PERURI:

Vice Chairman of the Risk Monitoring Committee I

At Other Institutions/Companies:

Head of Regional Office, Directorate General of State Assets, Banten since September 2023.



Nanik Murwati

Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board

Masa Jabatan 31 Juli 2023 - 31 Juli 2028, Periode Ke-1
Term of Office July 31, 2023 – July 31, 2028, 1st Term

Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI)
Citizenship Indonesian Citizen

Usia 53 tahun
Age 53 years

Domisili Jakarta
Domicile

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas PERURI berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-220/MBU/07/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Riwayat Pendidikan

- › Program Doktor Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2022–April 2025);
- › S2 Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (2010);
- › S1 Ilmu Manajemen Universitas Jember (1994).

Sertifikasi Profesi

Qualified Risk Governance Professional (QRGP) – BNSP (2024)

Riwayat Jabatan

Di PERURI:

Anggota Dewan Pengawas PERURI (31 Juli 2023–31 Juli 2028)

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

- › Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2022–saat ini);
- › Asisten Deputy Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan Sumber Daya Manusia Aparatur (2021–2022);
- › Asisten Deputy Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Polhukam dan Pemda (2016–2021);
- › Asisten Deputy Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan I Polhukam (2014 – 2016).

Rangkap Jabatan

Di PERURI:

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak 2022.

Appointment History

Serving as Member of the Supervisory Board of PERURI based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-220/MBU/07/2023 dated July 31, 2023.

Educational Background

- › Doctoral Program in Government Science, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2022–April 2025)
- › Master's Degree in Administrative Science, Universitas Indonesia (2010)
- › Bachelor's Degree in Management, Universitas Jember (1994)

Professional Certifications

Qualified Risk Governance Professional (QRGP) – BNSP (2024)

Career History

At PERURI:

Member of the Supervisory Board (July 31, 2023–July 31, 2028)

At Other Institutions/Companies:

- › Deputy for Institutional and Administrative Affairs, Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (2022–present)
- › Assistant Deputy for Performance Improvement and Reward System of Civil Apparatus Human Resources (2021–2022)
- › Assistant Deputy for Assessment and Coordination of Institutional and Administrative Policy Implementation for Political, Legal, Security Affairs and Regional Governments (2016–2021)
- › Assistant Deputy for Assessment and Coordination of Institutional Policy Implementation I for Political, Legal, and Security Affairs (2014–2016)

Concurrent Positions

At PERURI:

Member of the Nomination and Remuneration Committee

At Other Institutions/Companies:

Deputy for Institutional and Administrative Affairs, Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform since 2022.



Udi Suhandoro

Anggota Dewan Pengawas

Member of the Supervisory Board

Masa Jabatan 17 Maret 2026–17 Maret 2031, Periode Ke-1
Term of Office March 17, 2026–March 17, 2031, 1st Term

Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI)
Citizenship Indonesian Citizen

Usia 50 tahun
Age 50 years

Domisili Depok
Domicile

Riwayat Penunjukan

Menjabat menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas PERURI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor 181 Tahun 2026 tanggal 17 Maret 2026.

Appointment History

Serving as Member of the Supervisory Board of PERURI based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-130/MBU/06/2024 dated June 10, 2024.

Riwayat Pendidikan

- › S2 Bidang Hukum Universitas Bung Karno (2024)
- › S1 Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (1998)

Educational Background

- › Master's Degree in Law, Universitas Bung Karno (2024)
- › Bachelor's Degree in Economics, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (1998)

Riwayat Jabatan

Di PERURI:
Anggota Dewan Pengawas PERURI (17 Maret 2026–17 Maret 2031)

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

- › Komisaris PT Bumi Kencana Indah (Cimahi Mall) (2025–Sekarang)
- › Direktur PT Bumi Kencana Indonesia (Cimahi Mall) (2020–2025)

Career History

At PERURI:
Member of the Supervisory Board (March 17, 2026–March 17, 2031)

At Other Institutions/Companies:

- › Commissioner of PT Bumi Kencana Indah (Cimahi Mall) (2025–Present)
- › Director of PT Bumi Kencana Indonesia (Cimahi Mall) (2020–2025)

Rangkap Jabatan

Di PERURI:
Tidak Ada

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

Komisaris PT Bumi Kencana Indah (Cimahi Mall) (2025–Sekarang)

Concurrent Positions

At PERURI:
None

At Other Institutions/Companies:

Commissioner of PT Bumi Kencana Indah (Cimahi Mall) (2025–Present)



Mukhamad Taufiq

Anggota Dewan Pengawas

Member of the Supervisory Board

Masa Jabatan 29 April 2026–29 April 2031, Periode Ke-1

Term of Office April 29, 2026–April 29, 2031, 1st Term

Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI)

Citizenship Indonesian Citizen

Usia 55 tahun

Age 55 years

Domisili Jakarta

Domicile

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas PERURI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor 252 Tahun 2026 tanggal 29 April 2026.

Riwayat Pendidikan

- › S2 - Hukum Bisnis Universitas Indonesia (UI) (2013)
- › S1 - Ekonomi Manajemen Universitas Diponegoro (UNDIP) (1995)

Sertifikasi Profesi

- Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
- Ahli Pengadaan Nasional
- Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Riwayat Jabatan

Di PERURI:

Anggota Dewan Pengawas PERURI (29 April 2026–29 April 2031)

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

- Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya, dan Manajemen Risiko, Perum Jasa Tirta I (29 Desember 2021–24 Februari 2026)
- Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja, PT Perikanan Indonesia (5 Agustus 2021–15 Oktober 2024)
- Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja, PT Perikanan Indonesia (15 Oktober 2019–2 Desember 2021)
- Anggota Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (24 Mei 2019–14 Oktober 2019)
- Anggota Komisaris PT Utama Karya (Persero) (17 Oktober 2014–23 Mei 2019)

Rangkap Jabatan

Di PERURI:

Tidak ada

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

Direktur Kepatuhan BUMN (2026-sekarang)

Appointment History

Serving as a Member of the Supervisory Board of PERURI based on the Decision of the Head of the State-Owned Enterprises Regulatory Agency Number 252 of 2026 dated April 29, 2026.

Educational Background

- › Master's Degree in Business Law, University of Indonesia (UI) (2013)
- › Bachelor's Degree in Management Economics, Diponegoro University (UNDIP) (1995)

Professional Certifications

- Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
- National Procurement Expert
- Government Goods/Services Procurement Expert

Career History

At PERURI:

Member of the Supervisory Board (April 29, 2026–April 29, 2031)

At Other Institutions/Companies:

- Director of Finance, Resource Management, and Risk Management, Perum Jasa Tirta I (December 29, 2021–February 24, 2026)
- Director of Finance and Work Support, PT Perikanan Indonesia (August 5, 2021–October 15, 2024)
- Director of Finance and Work Support, PT Perikanan Indonesia (October 15, 2019–December 2, 2021)
- Member of the Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (May 24, 2019–October 14, 2019)
- Member of the Board of Commissioners of PT Utama Karya (Persero) (October 17, 2014–May 23, 2019)

Concurrent Positions

At PERURI:

None

At Other Institutions/Companies:

Director of Compliance at State-Owned Enterprises (2026–present)



Profil Direksi

Board of Directors Profile



Dwina Septiani Wijaya

Direktur Utama
President Director

Masa Jabatan 2022-2027, Periode Ke-2
Term of Office 2022 to 2027, 2nd Term

Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI)
Citizenship Indonesian Citizen

Usia 60 tahun
Age 60 years

Domisili Jakarta
Domicile

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Utama PERURI berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-247/MBU/11/2017 tanggal 20 November 2017 dan diperpanjang melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-260/MBU/11/2022.

Appointment History

Serving as President Director of PERURI based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-247/MBU/11/2017 dated November 20, 2017, and reappointed through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-260/MBU/11/2022.

Riwayat Pendidikan

- › London School of Economics (LSE), Inggris (2009);
- › HEC School of Management di Paris, Perancis (2009);
- › Trium Emba Program, New York University, Amerika Serikat (Magister) (1993);
- › Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Bandung, Indonesia (S1) (1989).

Educational Background

- › London School of Economics (LSE), United Kingdom (2009)
- › HEC School of Management, Paris, France (2009)
- › TRIUM EMBA Program, New York University, United States (Master's Degree) (1993)
- › Bachelor's Degree in Civil Engineering and Planning, Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1989)

Riwayat Jabatan

Di PERURI:

- › Direktur Utama PERURI (2022-2027)
- › Direktur Utama PERURI (2017-2022)

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

- › Staf Khusus Menteri BUMN (Juli 2017-November 2017);
- › Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (2013-2017);
- › Direktur Keuangan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2009-2013);
- › Direktur Utama PT Bahana TCW Investment Management (2003-2009);
- › Direktur Investasi PT Bahana TCW (2002-2003);
- › Manajer Portofolio PT Bahana TCW (1994-2000);
- › Manajer Risiko Pengelolaan Dana PT Bank Niaga, Jakarta (1990-1994).

Career History

At PERURI:

- › President Director of PERURI (2022-2027)
- › President Director of PERURI (2017-2022)

At Other Institutions/Companies:

- › Special Staff to the Minister of State-Owned Enterprises (July 2017-November 2017)
- › President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (2013-2017)
- › Finance Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2009-2013)
- › President Director of PT Bahana TCW Investment Management (2003-2009)
- › Investment Director of PT Bahana TCW (2002-2003)
- › Portfolio Manager of PT Bahana TCW (1994-2000)
- › Fund Management Risk Manager of PT Bank Niaga, Jakarta (1990-1994)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan maupun di luar Perusahaan.

Concurrent Positions

Does not hold concurrent positions within the Company or outside the Company.



Saiful Bahri

Direktur Currency and Security Solution
Director of Currency and Security Solution

Masa Jabatan 21 November 2022–21 November 2027,
Term of Office Periode Ke-2
November 21, 2022–November 21, 2027,
2nd Term

Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI)
Citizenship Indonesian Citizen

Usia 54 tahun
Age 54 years

Domisili Bogor
Domicile

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Operasi PERURI berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-247/MBU/11/2017 tanggal 20 November 2017 dan diperpanjang melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-260/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022. Kemudian pada 31 Juli 2023, terdapat perubahan nomenklatur jabatan Direksi menjadi Direktur *Currency & Security Solution* berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN RI No. SK-221/MBU/07/2023.

Appointment History

Serving as Director of Operations of PERURI based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-247/MBU/11/2017 dated November 20, 2017, and reappointed through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-260/MBU/11/2022 dated November 21, 2022. Subsequently, on July 31, 2023, there was a change in the Board of Directors' nomenclature to Director of Currency & Security Solution based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-221/MBU/07/2023.

Riwayat Pendidikan

- › Gelar Doktor Manajemen Bisnis, Institut Pertanian Bogor (IPB) (2022);
- › Gelar Magister Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB) (2014);
- › Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro (2001);
- › Diploma III (D3) Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro (1994).

Educational Background

- › Doctoral Degree in Business Management, Institut Pertanian Bogor (IPB) (2022)
- › Master's Degree in Management, Institut Pertanian Bogor (IPB) (2014)
- › Bachelor's Degree in Management, Faculty of Economics, Universitas Diponegoro (2001)
- › Diploma (D3) in Accounting, Faculty of Economics, Universitas Diponegoro (1994)

Riwayat Jabatan

Di PERURI:

- › Direktur Currency and Security Solution (2022–2027)
- › Direktur Currency and Security Solution (2017–2022)

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

- › Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) (2012–2017);
- › Direktur Operasional dan Komersial PT Balai Pustaka (Persero) (2010–2012);
- › *Marketing Corporate* Penerbit Grafindo Media Pratama (2008–2010);
- › Direktur Utama PT Widya Pustaka (Ganeca Exact Group) (2006–2008);
- › Direktur Pemasaran Penerbit & Percetakan Ganeca Exact Group (2002);
- › Marketing Manager Penerbit & Percetakan Aneka Ilmu (1996–2002).

Career History

At PERURI:

- › Director of Currency and Security Solution (2022–2027)
- › Director of Currency and Security Solution (2017–2022)

At Other Institutions/Companies:

- › President Director of PT Balai Pustaka (Persero) (2012–2017)
- › Director of Operations and Commercial of PT Balai Pustaka (Persero) (2010–2012)
- › Corporate Marketing, Penerbit Grafindo Media Pratama (2008–2010)
- › President Director of PT Widya Pustaka (Ganeca Exact Group) (2006–2008)
- › Marketing Director, Penerbit & Percetakan Ganeca Exact Group (2002)
- › Marketing Manager, Penerbit & Percetakan Aneka Ilmu (1996–2002)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan maupun di luar Perusahaan.

Concurrent Positions

Does not hold concurrent positions within the Company or outside the Company.



Fajar Rizki

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Masa Jabatan 31 Juli 2023–31 Juli 2028, Periode Ke-2
Term of Office July 31, 2023–July 31, 2028, 2nd Term

Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI)
Citizenship Indonesian Citizen

Usia 57 tahun
Age 57 years

Domisili Jakarta
Domicile

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha PERURI berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-209/MBU/07/2018 tanggal 18 Juli 2018. Kemudian pada 31 Juli 2023, diperpanjang dan mendapatkan pengalihan penugasan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN RI No. SK-221/MBU/07/2023.

Appointment History

Serving as Director of Business Development of PERURI based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-209/MBU/07/2018 dated July 18, 2018. Subsequently, on July 31, 2023, his term was extended and his assignment was changed to Director of Finance and Risk Management based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-221/MBU/07/2023.

Riwayat Pendidikan

- › S2 Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta (2008);
- › S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Pancasila, Indonesia (1993).

Educational Background

- › Master's Degree in Management, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta (2008)
- › Bachelor's Degree in Management Economics, Universitas Pancasila, Indonesia (1993)

Riwayat Jabatan

Di PERURI:

- › Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (2023–2028)
- › Kepala Divisi Pengelolaan Aset dan Anak Perusahaan PERURI (Mei 2018–Juli 2018);
- › Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PERURI (2014–2017);
- › Kepala Departemen Keuangan PERURI (2013).

Career History

At PERURI:

- › Director of Finance and Risk Management (2023–2028)
- › Head of Asset and Subsidiaries Management Division, PERURI (May 2018–July 2018)
- › Head of Finance and Accounting Division, PERURI (2014–2017)
- › Head of Finance Department, PERURI (2013)

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

- › Tidak ada

At Other Institutions/Companies:

- › None

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan maupun di luar Perusahaan.

Concurrent Positions

Does not hold concurrent positions within the Company or outside the Company.



Gandung Anggoro Murdani

Direktur Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi
Director of Human Resources, Technology and Information

Masa Jabatan 10 Juli 2025-10 Juli 2030, Periode Ke-2
Term of Office July 10, 2025–July 10, 2030, 2nd Term

Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI)
Citizenship Indonesian Citizen

Usia 60 tahun
Age 60 years

Domisili Jakarta
Domicile

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum PERURI berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-81/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020. Kemudian pada 26 Maret 2021 terdapat perubahan nomenklatur menjadi Direktur SDM, Teknologi dan Informasi sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. SK-96/MBU/03/2021. Pada 10 Juli 2025, masa jabatannya diperpanjang melalui SK-199/MBU/07/2025 tanggal 10 Juli 2025.

Appointment History

Serving as Director of Human Resources and General Affairs of PERURI based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-81/MBU/03/2020 dated March 18, 2020. Subsequently, on March 26, 2021, there was a change in nomenclature to Director of Human Resources, Technology and Information in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-96/MBU/03/2021.

Riwayat Pendidikan

- › S2 Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta, Indonesia (2008);
- › S1 Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1990).

Educational Background

- › Master's Degree in Management, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta, Indonesia (2008)
- › Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1990)

Riwayat Jabatan

Di PERURI:

- › Direktur Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi (2025-2030)
- › Direktur Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi (2020-2025)

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

- › Direktur SDM & Umum PERURI (2020-2021);
- › Senior Vice President Head Corporate HR & GA PT IBS Group (2018-2020);
- › Kepala Divisi SDM PERURI (2015-2018);
- › Head HR, GA, Legal & Regional Head Jawa Barat dan Sumatera Aora TV (2013-2014);
- › Tenaga Profesional Pendamping di PERURI (2013);
- › Advisor, HR dan Pengembangan Bisnis BSPI Foundation (2011-2013);
- › Group Head of Human Capital PT Indosat Tbk (2007-2011).

Career History

At PERURI:

- › Director of Human Resources, Technology and Information (2025-2030)
- › Director of Human Resources, Technology and Information (2020-2025)

At Other Institutions/Companies:

- › Director of Human Resources & General Affairs, PERURI (2020-2021)
- › Senior Vice President, Head of Corporate HR & GA, PT IBS Group (2018-2020)
- › Head of Human Resources Division, PERURI (2015-2018)
- › Head of HR, GA, Legal & Regional Head for West Java and Sumatera, Aora TV (2013-2014)
- › Professional Advisor, PERURI (2013)
- › Advisor for HR and Business Development, BSPI Foundation (2011-2013)
- › Group Head of Human Capital, PT Indosat Tbk (2007-2011)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan maupun di luar Perusahaan.

Concurrent Positions

Does not hold concurrent positions within the Company or outside the Company.



Farah Fitria Rahmayanti

Direktur Digital Business

Director of Digital Business

Masa Jabatan 13 Juli 2023–13 Juli 2028, Periode Ke-1
Term of Office July 13, 2023–July 13, 2028, 1st Term

Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI)
Citizenship Indonesian Citizen

Usia 51 tahun
Age 51 years

Domisili Jakarta
Domicile

Riwayat Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Digital Business PERURI berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-221/MBU/07/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Riwayat Pendidikan

- › S2 *International Business* - INSEAD (2014);
- › S1 Teknik Informatika STT Telkom Bandung (1997).

Riwayat Jabatan

Di PERURI:

- › Direktur Digital Buskominess (2023–2028)
- › Head of SBU Digital PERURI (Juli 2017–Juli 2023)

Di Lembaga/Perusahaan Lain:

- › Telkom Indonesia (1997–2017)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Perusahaan maupun di luar Perusahaan.

Appointment History

Serving as Director of Digital Business of PERURI based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-221/MBU/07/2023 dated July 31, 2023.

Educational Background

- › Master's Degree in International Business, INSEAD (2014)
- › Bachelor's Degree in Informatics Engineering, STT Telkom Bandung (1997)

Career History

At PERURI:

- › Director of Digital Business (2023–2028)
- › Head of SBU Digital, PERURI (July 2017–July 2023)

At Other Institutions/Companies:

- › Telkom Indonesia (1997–2017)

Concurrent Positions

Does not hold concurrent positions within the Company or outside the Company.

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi

Affiliation Relationship of the Board of Supervisory and the Board of Directors Members

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Pengawas

Affiliation Relationship of the Board of Supervisory

Nama dan Jabatan Name and Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
	Dewan Pengawas Supervisory Board		Direksi Board of Directors		Pemilik Modal Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Pengawas Supervisory Board		Direksi Board of Directors		Pemilik Modal Pengendali Controlling Shareholders			
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Marlison Hakim (Ketua Dewan Pengawas/ Chairman of the Supervisory Board)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sutanto (Anggota Dewan Pengawas/ Member of the Supervisory Board)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Djanurindro Wibowo (Anggota Dewan Pengawas/ Member of the Supervisory Board)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Nanik Murwati (Anggota Dewan Pengawas/ Member of the Supervisory Board)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓



Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Affiliation Relationships of the Board of Directors

Nama dan Jabatan Name and Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
	Dewan Pengawas Supervisory Board		Direksi Board of Directors		Pemilik Modal Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Pengawas Supervisory Board		Direksi Board of Directors		Pemilik Modal Pengendali Controlling Shareholders			
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dwina Septiani Wijaya (Direktur Utama/ President Director)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Saiful Bahri Direktur Currency and Security Solution		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Fajar Rizki (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Gandung Anggoro Murdani (Direktur Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Farah Fitria Rahmayanti (Direktur Digital Business)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi pada Tahun 2025

Information on Changes in the Composition of the Supervisory Board and the Board of Directors During the 2025 Financial Year

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas dan Alasan Perubahannya

Pada tahun 2025 terdapat perubahan susunan keanggotaan Dewan Pengawas, yaitu, Sdri. Conny Lolyta Rumondor dan Sdr. Salamat Simanullang dikarenakan telah berakhir masa jabatannya, masing-masing pada 27 Agustus 2025 dan 23 September 2025. Pemberhentian secara hormat dan resmi dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 181 Tahun 2026 tanggal 17 Maret 2026.

Dengan demikian, susunan dan komposisi Dewan Pengawas per 31 Desember 2025 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas, dan 3 (tiga) orang Anggota Dewan Pengawas.

Changes in the Composition of the Supervisory Board and the Reasons for the Changes

In 2025, there were changes in the composition of the Supervisory Board, namely, Mrs. Conny Lolyta Rumondor and Mr. Salamat Simanullang, as their terms of office had expired on August 27, 2025, and September 23, 2025, respectively. Their honorable and official dismissal was carried out through the Minister of State-Owned Enterprises Decree No. 181 of 2026 dated March 17, 2026.

Thus, as of December 31, 2025, the Supervisory Board consists of 1 (one) Chairman and 3 (three) Members.

Susunan dan Komposisi Dewan Pengawas per 31 Desember 2025 Composition of the Supervisory Board as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Term Period
Marlison Hakim	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	SK-130/MBU/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 SK-130/MBU/06/2024 dated June 10, 2024	10 Juni 2024-10 Juni 2029 June 10, 2024 – June 10, 2029	Periode Ke-1 1 st Term
Sutanto	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	SK-93/MBU/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 SK-93/MBU/05/2019 dated May 13, 2019	13 Mei 2019-13 Mei 2024 May 13, 2019 – May 13, 2024	Periode Ke-2 2 nd Term
		SK-132/MBU/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 SK-132/MBU/06/2024 dated June 12, 2024	12 Juni 2024-12 Juni 2029 June 12, 2024 – June 12, 2029	
Nanik Murwati	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	SK-220/MBU/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 SK-220/MBU/07/2023 dated July 31, 2023	31 Juli 2023-31 Juli 2028 July 31, 2023 – July 31, 2028	Periode Ke-1 1 st Term
Djanurindro Wibowo	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	SK-220/MBU/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 SK-220/MBU/07/2023 dated July 31, 2023	31 Juli 2023-31 Juli 2028 July 31, 2023 – July 31, 2028	Periode Ke-1 1 st Term

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi PERURI. Namun demikian, terdapat pengangkatan kembali Sdr. Gandung Anggoro Murdani sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-199/MBU/07/2025 tanggal 10 Juli 2025.

Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and the Reasons for the Changes

Throughout 2025, there were no changes in the composition of PERURI's Board of Directors. However, Gandung Anggoro Murdani was reappointed as Director of Human Capital, Technology, and Information pursuant to the Decree of the Minister of SOEs No. SK-199/MBU/07/2025 dated July 10, 2025.



Pengangkatan kembali tersebut merupakan penetapan Pemilik Modal sesuai kewenangannya dan tidak mengubah komposisi Direksi PERURI.

Dengan demikian, susunan Direksi per 31 Desember 2025 tetap terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang anggota Direksi.

The reappointment was made by the Capital Owner in accordance with its authority and did not change the composition of PERURI's Board of Directors.

Therefore, as of December 31, 2025, the Board of Directors continued to comprise 1 (one) President Director and 4 (four) Directors.

Susunan dan Komposisi Direksi per 31 Desember 2025 Composition of the Board of Directors as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Dwina Septiani Wijaya	Direktur Utama President Director	SK-260/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022 SK-260/MBU/11/2022 dated November 21, 2022	2022-2027	Periode Ke-2 2 nd Term
Saiful Bahri	Direktur Currency and Security Solution Director of Currency and Security Solution	SK-260/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022 SK-260/MBU/11/2022 dated November 21, 2022	21 November 2022-21 November 2027 November 21, 2022-November 21, 2027	Periode Ke-2 2 nd Term
		SK-132/MBU/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 SK-132/MBU/06/2024 dated June 12, 2024	12 Juni 2024-12 Juni 2029 June 12, 2024-June 12, 2029	
Fajar Rizki	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	SK-221/MBU/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 SK-221/MBU/07/2023 dated July 31, 2023	31 Juli 2023-31 Juli 2028 July 31, 2023-July 31, 2028	Periode Ke-2 2 nd Term
Gandung Anggoro Murdani	Direktur Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Director of Human Resources, Technology and Information	SK-199/MBU/07/2025 tanggal 10 Juli 2025 SK-199/MBU/07/2025 dated July 10, 2025	10 Juli 2025-10 Juli 2030 July 10, 2025-July 10, 2030	Periode Ke-2 2 nd Term
Farah Fitria Rahmayanti	Direktur Digital Business Director of Digital Business	SK-221/MBU/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 SK-221/MBU/07/2023 dated July 31, 2023	31 Juli 2023-31 Juli 2028 July 31, 2023-July 31, 2028	Periode Ke-1 1 st Term

Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi setelah Tahun Buku Berakhir Information on Changes in the Composition of the Supervisory Board and the Board of Directors After the End of the Financial Year

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Pengawas dan Alasan Perubahannya

Sejak berakhirnya tahun buku 2025 hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Pengawas PERURI. Perubahan tersebut terjadi

Changes in the Composition of Members of the Supervisory Board and the Reasons for the Changes

Following the end of fiscal year 2025 and up to the issuance of this Annual Report, there were changes in the structure and composition of PERURI's Supervisory Board. The

sehubungan dengan pengangkatan Udi Suhandoro sebagai Anggota Dewan Pengawas PERURI berdasarkan Keputusan Kepala BP BUMN Nomor 181 Tahun 2026 tanggal 17 Maret 2026, serta pengangkatan Mukhamad Taufiq sebagai Anggota Dewan Pengawas PERURI berdasarkan Keputusan Kepala BP BUMN Nomor 252 Tahun 2026 tanggal 29 April 2026.

Perubahan komposisi tersebut merupakan penetapan Kepala BP BUMN sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengangkatan tersebut, susunan dan komposisi Dewan Pengawas PERURI hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas dan 5 (lima) orang Anggota Dewan Pengawas, dengan susunan sebagai berikut:

changes were related to the appointment of Udi Suhandoro as Member of the Supervisory Board of PERURI pursuant to the Decree of the Head of the SOE Regulatory Agency (BP BUMN) No. 181 of 2026 dated March 17, 2026, as well as the appointment of Mukhamad Taufiq as Member of the Supervisory Board of PERURI pursuant to the Decree of the Head of BP BUMN No. 252 of 2026 dated April 29, 2026.

The changes in composition represented the decision of the Head of BP BUMN in accordance with his authority under the prevailing regulations. Following these appointments, the structure and composition of PERURI's Supervisory Board up to the issuance of this Annual Report consisted of 6 (six) members, comprising 1 (one) Chair of the Supervisory Board and 5 (five) Members of the Supervisory Board, with the following composition:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office
Marlison Hakim	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	SK-130/MBU/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 SK-130/MBU/06/2024 dated June 10, 2024	10 Juni 2024-10 Juni 2029 June 10, 2024 – June 10, 2029	Periode Ke-1 1 st Term
Sutanto	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	SK-93/MBU/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 SK-93/MBU/05/2019 dated May 13, 2019	13 Mei 2019-13 Mei 2024 May 13, 2019 – May 13, 2024	Periode Ke-2 2 nd Term
		SK-132/MBU/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 SK-132/MBU/06/2024 dated June 12, 2024	12 Juni 2024-12 Juni 2029 June 12, 2024 – June 12, 2029	
Nanik Murwati	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	SK-220/MBU/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 SK-220/MBU/07/2023 dated July 31, 2023	31 Juli 2023-31 Juli 2028 July 31, 2023 – July 31, 2028	Periode Ke-1 1 st Term
Djanurindro Wibowo	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	SK-220/MBU/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 SK-220/MBU/07/2023 dated July 31, 2023	31 Juli 2023-31 Juli 2028 July 31, 2023 – July 31, 2028	Periode Ke-1 1 st Term
Udi Suhandoro	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Keputusan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor 181 Tahun 2026 tanggal 17 Maret 2026 Decision of the Head of the State-Owned Enterprises Regulatory Agency No. 181 of 2026 dated March 17, 2026	17 Maret 2026-17 Maret 2031 March 17, 2026 – March 17, 2031	Periode Ke-1 1 st Term
Mukhamad Taufiq	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Keputusan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor 252 Tahun 2026 tanggal 29 April 2026 Decision of the Head of the State-Owned Enterprises Regulatory Agency Number 252 of 2026 dated April 29, 2026.	29 April 2026-29 April 2031 April 29, 2026 – April 29, 2031	Periode Ke-1 1 st Term

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Sejak berakhirnya tahun buku 2025 hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Anggota Direksi PERURI.

Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and the Reasons for the Changes

Since the end of fiscal year 2025 until the issuance of this Annual Report, there have been no changes in the composition of PERURI's Board of Directors.



Daftar Pejabat Eksekutif

List of Executive Officers



Devi Syafriyeni

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit

Usia	47 tahun
Age	47 years
Pendidikan	S2
Terakhir	Master's Degree
Education	



Adi Sunardi

Kepala Sekretariat Perusahaan
Head of Corporate Secretary

Usia	40 tahun
Age	40 years
Pendidikan	S1
Terakhir	Bachelor's Degree
Education	



Median Yuli Hartanto

Kepala Divisi Digital Product & Operation
Head of Digital Product & Operation Division

Usia	36 tahun
Age	36 years
Pendidikan	S1
Terakhir	Bachelor's Degree
Education	



Dadan Hendarman

Kepala Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan
Head of Engineering and Reliability Assurance Division

Usia	51 tahun
Age	51 years
Pendidikan	S2
Terakhir	Master's Degree
Education	



Fadel

Kepala *Strategic Business Unit (SBU)* Currency Solution
Head of Strategic Business Unit (SBU) Currency Solution

Usia	53 tahun
Age	53 years
Pendidikan	S2
Terakhir	Master's Degree
Education	



Ade Permana

Kepala *Strategic Business Unit (SBU)* High Security Solution
Head of Strategic Business Unit (SBU) High Security Solution

Usia	55 tahun
Age	55 years
Pendidikan	S2
Terakhir	Master's Degree
Education	



Esti Wuryani
Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum
Head of Procurement and Public Facilities Division

Usia Age	48 tahun 48 years
Pendidikan Terakhir Education	S2 Master's Degree



Noneng Suangsih
Kepala Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan
Head of Security, OHS and Environment Division

Usia Age	52 tahun 52 years
Pendidikan Terakhir Education	S2 Master's Degree



Mauludy Hijriansyah
Kepala Divisi Keuangan Operasional
Head of Operational Finance Division

Usia Age	41 tahun 41 years
Pendidikan Terakhir Education	S1 Bachelor's Degree



Mokhamad Arif Kusumanagara
Kepala Divisi Keuangan Strategis
Head of Strategic Finance Division

Usia Age	41 tahun 41 years
Pendidikan Terakhir Education	S1 Bachelor's Degree



Hesty Purwanti
Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Portofolio Bisnis
Head of Strategic Planning and Business Portfolio Division

Usia Age	62 tahun 62 years
Pendidikan Terakhir Education	S2 Master's Degree



Andhyka Gautama Setyawan
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
Head of Human Resources Division

Usia Age	40 tahun 40 years
Pendidikan Terakhir Education	S2 Master's Degree



Edwin Purwandesi

Kepal Divisi Digital Strategy, Planning, & Architecture

Head of Digital Strategy, Planning, & Architecture Division

Usia	53 tahun
Age	53 years
Pendidikan	S1
Terakhir	Bachelor's
Education	Degree



Asrul Ardianto

Kepala Divisi Strategic Business Unit Digital & Certificate Authority

Head of Strategic Business Unit Digital & Certificate Authority

Usia	50 tahun
Age	50 years
Pendidikan	S1
Terakhir	Bachelor's
Education	Degree



Muhsin Yurgen

Kepala Divisi Riset dan Pengembangan

Head of Research and Development Division

Usia	54 tahun
Age	54 years
Pendidikan	D3
Terakhir	Diploma 3
Education	



Andhika Kusuma

Kepala Divisi Teknologi Informasi

Head of Information Technology Division

Usia	40 tahun
Age	40 years
Pendidikan	S1
Terakhir	Bachelor's
Education	Degree



Edward Parlindungan Lubis

Kepala Divisi Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan

Head of Governance, Risk and Compliance

Usia	58 tahun
Age	58 years
Pendidikan	S2
Terakhir	Master's Degree
Education	





Demografi Karyawan

Employee Demography

Per 31 Desember 2025, jumlah karyawan PERURI tercatat sebanyak 3.612 orang, dengan 1.468 di antaranya berstatus karyawan tetap. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan penyesuaian terhadap kebutuhan dan perkembangan bisnis Perusahaan. Berikut disajikan rincian demografi karyawan Perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

As of December 31, 2025, PERURI recorded a total of 3,612 employees, of which 1,468 were permanent employees. This figure shows an increase compared to the previous year, in line with adjustments to the Company's business needs and development. The following presents the Company's employee demographic breakdown over the past 3 (three) years:

Profil Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia

Employee Profile by Age Group

Usia Age Group	2025	2024	2023
<30 tahun/years old	1.439	1.077	924
30-50 tahun years old	1.989	1.518	1.360
>50 tahun years old	184	175	151
Total	3.612	2.770	2.435

Profil Karyawan Berdasarkan Gender

Employee Profile by Gender

Jenis Kelamin Gender	Wilayah Kerja Area of Operation	2025		2024		2023	
		Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Laki-laki Male	Jakarta	641	17,75	237	8,56	179	7,35
	Karawang	2.292	63,46	2.033	73,39	1.788	73,43
Perempuan Female	Jakarta	412	11,41	173	6,25	117	4,8
	Karawang	267	7,39	327	11,81	351	14,41
Total		3.612	100	2.770	100	2.435	100

Profil Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Employee Profile by Organizational Level

Jabatan Position	2025	2024	2023
Dewan Pengawas dan Komite Supervisory Board and Committees	14	15	14
Direksi Board of Directors	5	5	5
Kepala Divisi/Setingkat Head of Division/Equivalent	30	22	18
Kepala Departemen/Setingkat Head of Department/Equivalent	79	80	57
Kepala Seksi/Setingkat Head of Section/Equivalent	154	149	115
Kepala Unit/Setingkat Head of Unit/Equivalent	326	338	323
Pelaksana Staff	3.004	2.161	1.903
Total	3.612	2.770	2.435

Profil Karyawan Berdasarkan Pendidikan Employee Profile by Education

Pendidikan Education	2025	2024	2023
S3 Doctoral Degree	5	3	2
S2 Master's Degree	149	90	73
S1 Bachelor's Degree	1.195	588	506
D4 Diploma IV	21	10	10
D3 Diploma III	144	124	131
D1 Diploma I	3	2	2
SMA Senior High School	2.095	1.953	1.711
SMP Junior High School	0	0	0
Total	3.612	2.770	2.435

Profil Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Employee Profile by Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2025	2024	2023
Dewan Pengawas dan Komite Supervisory Board and Committees	14	15	14
Direksi Board of Directors	5	5	5
Karyawan Tetap Permanent Employees	1.468	1.38	1.417
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Fixed-Term Employment Agreement (PKWT)	607	888	704
Tenaga Profesional Berjangka Waktu (TPBW) Fixed-Term Professional Personnel (TPBW)	628	85	18
Honorar Contract worker	0	1	1
<i>Outsourcing</i>	777	273	242
Magang Interns	113	123	34
Total	3.612	2.770	2.435



Informasi Pemilik Modal Perusahaan

Company Shareholders Information

Nama Pemilik Modal Shareholder Name	Per 1 Januari 2025 As of January 1, 2025		Per 31 Desember 2025 As of December 31, 2025	
	Jumlah Kepemilikan Number of Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Jumlah Kepemilikan Number of Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
Pemilik Modal dengan Kepemilikan Saham 5% atau Lebih Shareholders with 5% or More Ownership				
Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	363.573.454.896	100%	363.573.454.896	100%
Pemilik Modal dengan Kepemilikan Saham Kurang dari 5% Shareholders with Less Than 5% Ownership				
Tidak Ada None				

Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung atas Saham Perusahaan oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas

Tidak terdapat kepemilikan saham PERURI, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh anggota Direksi maupun anggota Dewan Pengawas.

Direct and Indirect Share Ownership in the Company by Members of the Board of Directors and Supervisory Board

There is no ownership of PERURI shares, either directly or indirectly, by members of the Board of Directors or the Supervisory Board.

Informasi Klasifikasi Kepemilikan Saham

Share Ownership Classification Information

Klasifikasi Classification	Per 1 Januari 2025 As of January 1, 2025			Per 31 Desember 2025 As of December 31, 2025		
	Jumlah Pemilik Modal Number of Shareholders	Jumlah Saham (Rp) Number of Shares (Rp)	Persentase (%) Percentage (%)	Jumlah Pemilik Modal Number of Shareholders	Jumlah Saham (Rp) Number of Shares (Rp)	Persentase (%) Percentage (%)
Pemodal Nasional Domestic Investors						
Perorangan Individuals	-	-	-	-	-	-
Lembaga Institutions	1	363.573.454.896	100,00	1	363.573.454.896	100,00
Sub Total Subtotal	1	363.573.454.896	100,00	1	363.573.454.896	100,00
Pemodal Asing Foreign Investors						
Perorangan Individuals						
Lembaga Institutions	-	-	-	-	-	-
Sub Total Subtotal	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	1	363.573.454.896	100,00	1	363.573.454.896	100,00

Informasi Pemilik Modal Utama dan Pengendali Perusahaan, Baik Langsung maupun Tidak Langsung, Sampai kepada Pemilik Individu

Information on Major and Controlling Shareholders of the Company, Both Directly and Indirectly, up to Individual Ownership Level



Pemerintah Republik Indonesia melalui BP BUMN merupakan pemilik modal sekaligus pemegang kendali dan pemilik manfaat akhir PERURI dengan porsi kepemilikan sebesar 100%. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, seluruh modal Perusahaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Dewan Pengawas, Direksi, maupun Manajemen tidak memiliki kepemilikan saham di Perusahaan.

The Government of the Republic of Indonesia thru BP BUMN is the capital owner, controlling shareholder, and ultimate beneficial owner of PERURI with a 100% ownership stake. In accordance with Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, the entire capital of the Company originates from separated state assets and is not divided into shares. The Supervisory Board, Board of Directors, and Management do not hold any share ownership in the Company.

Kronologi Pencatatan Saham

Informasi terkait kronologi pencatatan saham Perum PERURI merujuk pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menyatakan bahwa Perusahaan Umum merupakan BUMN dengan seluruh modal dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Dengan kepemilikan 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia, tidak terdapat proses pencatatan saham, sehingga informasi kronologis pencatatan saham tidak disajikan dalam laporan tahun ini.

Chronology of Share Listing

Information regarding the chronology of share listing of Perum PERURI refers to the provisions of Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, which stipulates that a Public Company (Perum) is a state-owned enterprise whose entire capital is owned by the State and is not divided into shares. With 100% ownership by the Government of the Republic of Indonesia, there has been no share listing process; therefore, information on the chronology of share listing is not presented in this annual report.

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Hingga akhir 2025, PERURI tidak melakukan penerbitan efek dalam bentuk apapun seperti obligasi, sukuk, obligasi konversi atau efek lainnya di Bursa Efek Indonesia atau pun luar negeri. Dengan demikian Perusahaan tidak menyajikan kronologis penerbitan dan/ atau pencatatan efek lainnya dan tidak terdapat informasi terkait apapun dengannya.

Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities

As of the end of 2025, PERURI has not issued any securities, such as bonds, sukuk, convertible bonds, or any other financial instruments, on either the Indonesia Stock Exchange or international exchanges. Therefore, No. chronology or related information regarding the issuance or listing of other securities is presented.



Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Public Accountant and Public Accounting Firm

Akuntan Publik Public Accountant	Drs. Sikanto, Ak., CA, CPA, ASEAN CPA, MM	
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	PKF – Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan/Partners	
Alamat Address	UOB Plaza Building Lantai 42/42 2 nd Floor Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10 Jakarta 10230 Tel.: 021-3144003 Fax.: 021-3144213 E-mail: jkt-office@pkfhadiwinata.com Website: https://pkfhadiwinata.com	
Tahun Penugasan Year of Appointment	2025	
Jasa Audit Audit Services	1. Jasa Audit atas Laporan Keuangan Induk dan Konsolidasian PERURI 2. Jasa Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 3. Evaluasi atas Sistem Pengendali Intern 4. Audit atas Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Perum Peruri	1. Audit Services for PERURI's Parent Company and Consolidated Financial Statements 2. Compliance Audit Services Regarding Legislation 3. Evaluation of the Internal Control System 4. Audit of the Financial Statements for Perum Peruri's SME Funding Program
Jasa Non-Audit Non-Audit Services	1. Evaluasi atas kinerja dan tingkat capaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Kolegial dan Individual Direksi 2. <i>Review Chart of Account (Agreed upon Procedures)</i> terhadap <i>Information Package</i> 3. Review Penilaian Peringkat Komposit Risiko	1. Evaluation of the Performance and Achievement Levels of Key Performance Indicators (KPIs) for the Board of Directors as a Group and Individually 2. Review of the Chart of Accounts (Agreed-Upon Procedures) for the Information Package 3. Review of the Composite Risk Rating Assessment
Rincian Fee Jasa Audit dan Non-Audit Details of Audit and Non-Audit Fee	Total Jasa Audit dan Non-Audit Rp1.368.075.000 (include PPN)	The total audit and non-audit fees amount to Rp1,368,075,000 (including VAT)

Lembaga dan Profesi Penunjang

Supporting Institutions and Professions

Konsultan Hukum & Notaris/PPAT Biro Hukum dan Kebijakan Perusahaan

Legal Consultant & Notary/Land Deed Official (PPAT) – Corporate Legal and Policy Bureau

1. Prof. Dr. Suparji Ahmad Jl. Kampung Melayu Kecil No. 2, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan Tlp: 081287474189 Fax: - E-mail: suparjiachmad@yahoo.com Website: -	7. PT. Rumah Paten Indonesia Ruko No. 1, Perumahan Cibubur Village, Jl. Radar Auri No. 61, Cisalak, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16452 Tlp: 08111071075 Fax: - E-mail: register@rumahpaten.id Website: www.rumahpaten.id
2. Kemalsjah Associates Graha CIMB Niaga Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman Kav.58, Jakarta Tlp: (021) 2505010 Fax: (021) 2505020 E-mail: pangeran@kemalsjahlaw.com Website: -	8. PT. Legalitas Srikandi Investama (Legalexica) AXA Tower, 45 th Floor, CEO Suite, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 Tlp: (021) 30053667 Fax: +62 21 3005 3600 E-mail: admin@legalexica.com Website: www.legalexica.com

3. Assegaf Hamzah & Partners Capital Place, Level 36-37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Tlp: (021) 25557800 Fax: (021) 25557899 E-mail: info@ahp.co.id Website: www.ahp.id	9. Taufik Mappaenre & Partners Legal Consultant Office 8 Building, 18A Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan Tlp: (021) 30024464 Fax: - E-mail: consulting@tmplegalconsultant.net Website: -
4. K&K Advocates KMO Building, 5th Floor, Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 Tlp: (021) 29020331 Fax: +61 21 2902 3107 E-mail: office@kk-advocates.com Website: www.kk-advocates.com	10. Trifida At Law Menara Kadin 9th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No. 2-3 Jakarta 12950 Tlp: - Fax: - E-mail: info@trifida.id Website: www.trifida.id
5. Johansyah, S.H (JohanS & Co) Jl. Cideng Barat No. 45-I, Jakarta Pusat 10150 Tlp: (021) 63863827 Fax: - E-mail: johanscojkt@yahoo.com Website: -	11. Trilexica At Law World Trade Centre (WTC) 5 Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Tlp: (021) 50110920 Fax: - E-mail: Info@trilexica.id Website: www.trilexica.id
6. Andy Pratomo, S.H Pamulang Permai I C 45 No. 12, Tangerang Selatan Tlp: 081210319599 Fax: - E-mail: andypratomo@live.com Website: -	12. Juris Resia & Co Menara Kuningan Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said No. 5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 Tlp: (021) 57940130 Fax: - E-mail: contact@juristresia.com Website: juristresia.com

Notaris & PPAT Notary & Land Deed Official (PPAT)

1. Ashoya Ratam, S.H, M.Kn Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180 Tlp: (021) 29236060 Fax: (021) 29236070 E-mail: notarisgeneralmail@ashoyaratam.com Website: -	3. Diharini, S.H, M.Kn Jl. Cilandak Tengah III No. 10, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 Tlp: 087800040049 Fax: - E-mail: notarisdiharini@gmail.com Website: -
2. Dessi, S.H, M.Kn Jl. Delima Raya No. 12, Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur Tlp: (021) 22086957 Fax: - E-mail: notarisdessi@gmail.com Website: notarisdessi.com	4. Otty Hari Chandra Ubayani, S.H.,Sp.N.,M.H. Jl. Tebet Barat VIII No. 31, Tebet, Jakarta Selatan 12810 Tlp: (021) 83705530 – 8302759 – 8356275 Fax: (021) 83705504 E-mail: ottyhcu@gmail.com Website: -



Daftar Keanggotaan Asosiasi

List of Association Memberships



Sampai dengan akhir tahun 2025, PERURI tercatat sebagai anggota pada sejumlah asosiasi berikut:

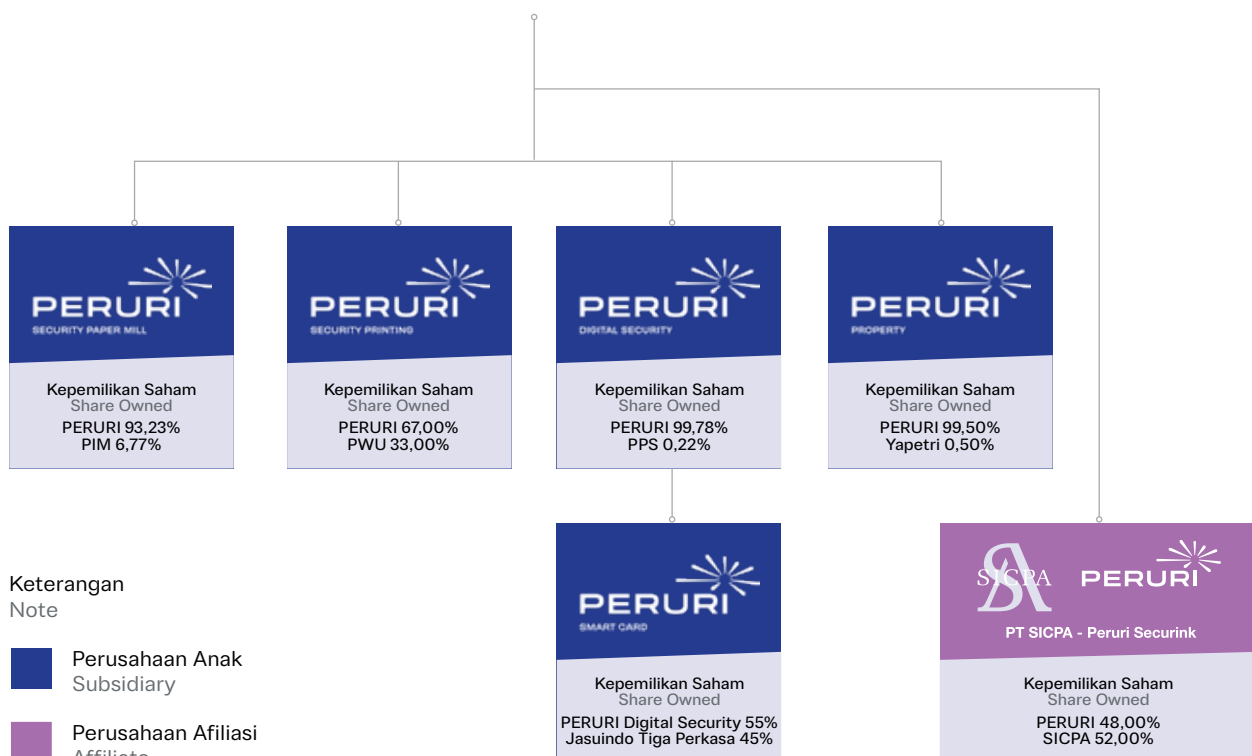
As of the end of 2025, PERURI is a member of the following associations:

Nama Asosiasi Association Name	Skala Organisasi Organizational Scope	Status Keanggotaan Membership Status
Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia Indonesian Security Printing Association	Nasional National	Aktif Active
Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia Indonesian Printing Industry Association	Nasional National	Aktif Active
Kamar Dagang dan Industri Indonesia Indonesian Chamber of Commerce and Industry	Nasional National	Aktif Active
Asosiasi Digital Trust Indonesia Indonesia Digital Trust Association	Nasional National	Aktif Active
Asosiasi Fintech Indonesia Indonesia Fintech Association	Nasional National	Aktif Active



Struktur Grup

Group Structure



Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi, Joint Venture (JV) dan Special Purpose Vehicle (SPV)

List of Subsidiaries and/or Associated Entities, Joint Ventures (JV), and Special Purpose Vehicles (SPV)

No	Nama Entitas Entity Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan % Ownership %	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)	Status Operasi Operating Status
Entitas Anak Subsidiaries						
1	PT Kertas Padalarang	› Kertas Sekuriti › Kertas Khusus › Kertas Sigaret › Kertas Umum › Kerjasama Layanan dan Produk › Security paper › Specialty paper › Cigarette paper › General paper › Product and service cooperation	Jalan Cihaliwung No. 181, Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat	PERURI 93,23% PT Pengelola Investama Mandiri 6,77%	192.345.955.301	Beroperasi Operating
2.	PT Peruri Wira Timur	› Percetakan Sekuriti Printing › Percetakan Umum › Percetakan Packaging Perdagangan Umum › Security printing › General printing › Packaging printing and general trading	Jl. Ahmad Yani No. 119, Surabaya, Jawa Timur	PERURI 67% PT Panca Wira Usaha Jatim 33%	82.725.637.125	Beroperasi Operating
3	PT Peruri Properti	› Jasa Optimalisasi Aset › Jasa Pengelolaan Aset dan Gedung › Jasa Pemeliharaan Gedung › Jasa Konstruksi › Asset optimization services › Property and building management › Building maintenance services › Construction services	Jalan Sunan Kalijaga No. 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	PERURI 99,5% Yapetri 0,5%	123.259.696.647	Beroperasi Operating



No	Nama Entitas Entity Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address	Kepemilikan % Ownership %	Total Aset (Rp) Total Assets (Rp)	Status Operasi Operating Status
4	PT Peruri Digital Security	Perdagangan barang dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: › perdagangan bahan bahan kertas plastik untuk pembuatan kartu elektrik, chip, dan bahan-bahan baku lainnya › jasa keamanan digital, solusi Informasi Teknologi (IT), usaha lain yang berkaitan dengan usaha tersebut › industri percetakan khusus, industri kartu cerdas (<i>smart card</i>) › perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer, dan piranti lunak, › aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya › aktivitas pengolahan data, hosting ybdi, portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersial. Trading of goods and services. To achieve its objectives, the Company carries out the following business activities: › trading of paper materials, plastics for electronic card production, chips, and other raw materials › digital security services › Information Technology (IT) solutions; other related business activities › security printing industry; smart card industry › wholesale trading of computers, computer equipment, and software; other information technology and computer services activities › data processing activities, hosting services › web portals and/or digital platforms for commercial purposes.	Jalan Sunan Kalijaga No. 11, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	PERURI 99,78% PT Pundi Puri Sejahtera 0,22%	155.322.868.156	Beroperasi Operating

Entitas Anak Tidak Langsung Indirect Subsidiaries

5	PT Cardsindo Tiga Perkasa	Pembuatan kartu kontak dan kontakles (smartcard), kartu yang berbahan plastik, kartu scratch, dan pengemasan fulfillment. Production of contact and contactless smart cards, plastic cards, scratch cards, and fulfillment packaging	Jalan Raya Mekarjaya No. 121, Kawasan Industri Mekarjaya Raya Mauk KM 7, Sepatan Raya, Tangerang 15131	PT Peruri Digital Security 55% PT Jasuindo Tiga Perkasa 45%	64.338.198.208	Beroperasi Operating
6	PT Sicpa Peruri Securink	Tinta cetak Uang dan kertas berharga Security ink for banknotes and security documents	Jalan Tarum Barat, Kawasan Produksi PERURI, Desa Parungmulya, Ciampel, Karawang, Jawa Barat	SICPA SA. 52% PERURI 48%	893.751.810.852	Beroperasi Operating

Informasi pada Situs Perusahaan Information on the Company's Website

PERURI mengelola situs resmi yang dapat diakses oleh publik melalui alamat www.peruri.co.id. Kehadiran situs tersebut merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), khususnya dalam menyediakan keterbukaan informasi kepada masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Melalui situs resmi tersebut, Perusahaan menyajikan informasi umum mengenai profil dan kegiatan usaha, termasuk berbagai aktivitas yang dirangkum dalam berita terkini, informasi pendaftaran mitra bisnis, serta peluang karier. Situs PERURI secara konsisten diperbarui dan dilengkapi dengan informasi relevan lainnya guna memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan mutakhir bagi para pemangku kepentingan.

PERURI manages an official website that can be accessed by the public at www.peruri.co.id. The existence of this website reflects the Company's commitment to strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG), particularly in providing information transparency to the public, the government, and other stakeholders.

Through the official website, the Company provides general information on its profile and business activities, including various updates presented in the form of news highlights, business partner registration information, and career opportunities. The PERURI website is continuously updated and supplemented with other relevant information to ensure the availability of accurate and up-to-date information for stakeholders.





Activity

Avg. Visit Duration
00:02:07

Revenue Rate
46.13%

Business activity of company and subdivisions

Over the past 12 months



Business activity



Relative activity



Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

Kinerja tahun 2025 menunjukkan kemampuan PERURI dalam menyeimbangkan bisnis sekuriti fisik dengan pengembangan layanan digital, di tengah perubahan portofolio usaha, dinamika rantai pasok, dan peluang pertumbuhan baru.

The 2025 performance reflected PERURI's ability to balance its physical security business with the development of digital services amid changes in the business portfolio, supply chain dynamics, and new growth opportunities.



Tinjauan Perekonomian Global

Global Economic Overview

Perekonomian global sepanjang tahun 2025 masih diwarnai ketidakpastian, terutama akibat dinamika geopolitik, penyesuaian arah kebijakan perdagangan, perubahan rantai pasok, serta perbedaan kecepatan pemulihan antarnegara. Meski demikian, perekonomian global tetap menunjukkan ketahanan, didukung oleh investasi teknologi, penyesuaian sektor swasta, kondisi keuangan yang relatif lebih akomodatif, serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter di sejumlah kawasan.

Dalam *World Economic Outlook Update* edisi Januari 2026, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% pada 2026 dan 3,2% pada 2027. IMF juga mencatat bahwa investasi teknologi, dukungan kebijakan, kondisi keuangan yang lebih akomodatif, serta kemampuan adaptasi sektor swasta membantu menahan tekanan dari perubahan kebijakan perdagangan global. Namun, pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan melambat dari 4,1% pada 2025 menjadi 2,6% pada 2026, sebelum meningkat menjadi 3,1% pada 2027.

Sejalan dengan itu, World Bank dalam *Global Economic Prospects* edisi Januari 2026 menilai bahwa ekonomi global tetap menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan. Pertumbuhan global pada 2025 diperkirakan mencapai 3,3%, ditopang oleh penyesuaian rantai pasok, kondisi keuangan global yang lebih longgar, serta peningkatan investasi terkait kecerdasan buatan, meskipun pemulihan masih berlangsung tidak merata antarwilayah.

Bagi dunia usaha, kondisi tersebut menegaskan pentingnya ketahanan operasional, efisiensi, perlindungan data, serta kemampuan beradaptasi terhadap percepatan teknologi, terutama terkait kecerdasan buatan (AI). Bagi PERURI, perubahan lanskap global ini cukup relevan karena digitalisasi ekonomi dan meningkatnya transaksi elektronik mendorong kebutuhan terhadap sistem keamanan, autentikasi, sertifikasi elektronik, serta layanan berbasis kepercayaan digital. Dengan demikian, tantangan global tidak hanya menjadi faktor eksternal yang perlu diantisipasi, tetapi juga membuka ruang bagi PERURI untuk memperluas peran dari penyedia produk sekuriti fisik menjadi penyedia solusi keamanan dan kepercayaan digital.

Sumber:

1. International Monetary Fund, *World Economic Outlook Update*, Januari 2026.
2. World Bank, *Global Economic Prospects*, Januari 2026.

The global economy throughout 2025 remained marked by uncertainty, primarily driven by geopolitical dynamics, adjustments in trade policy directions, changes in supply chains, and varying paces of recovery across countries. Nevertheless, the global economy continued to demonstrate resilience, supported by technology investment, private sector adjustments, relatively more accommodative financial conditions, as well as fiscal and monetary policy support in several regions.

In the January 2026 edition of the *World Economic Outlook Update*, the International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth of 3.3% in 2026 and 3.2% in 2027. The IMF also noted that technology investment, policy support, more accommodative financial conditions, and the private sector's adaptive capacity helped mitigate pressures arising from changes in global trade policies. However, global trade volume growth is projected to slow from 4.1% in 2025 to 2.6% in 2026, before increasing to 3.1% in 2027.

In line with this, the World Bank, in its January 2026 edition of *Global Economic Prospects*, assessed that the global economy continued to demonstrate resilience amid rising trade tensions and policy uncertainty. Global growth in 2025 was estimated to reach 3.3%, supported by supply chain adjustments, more accommodative global financial conditions, and increased investment related to artificial intelligence, although the recovery remained uneven across regions.

For the business sector, these conditions highlight the importance of operational resilience, efficiency, data protection, and the ability to adapt to accelerating technological developments, particularly those related to artificial intelligence (AI). For PERURI, these global landscape changes are highly relevant as economic digitalization and the increasing volume of electronic transactions drive the need for security systems, authentication, electronic certification, and digital trust-based services. Accordingly, global challenges are not only external factors that need to be anticipated, but also create opportunities for PERURI to expand its role from a provider of physical security products into a provider of digital security and trust solutions.

Sources:

1. International Monetary Fund, *World Economic Outlook Update*, January 2026.
2. World Bank, *Global Economic Prospects*, January 2026.

Tinjauan Perekonomian Nasional Tahun 2025

National Economic Overview in 2025

Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang resilien. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 5 Februari 2026, ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 5,02%. Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp23.821,1 triliun, sementara PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau setara USD5.083,4.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor barang dan jasa, serta aktivitas produksi pada berbagai lapangan usaha. Pada triwulan IV-2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor utama, sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh kuat dan ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan tertinggi. Dari sisi lapangan usaha, sektor jasa lainnya, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang kuat, sedangkan industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDB.

Stabilitas makroekonomi nasional juga tetap terjaga. Bank Indonesia dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 menyampaikan bahwa stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terpelihara, sementara digitalisasi sistem pembayaran terus berkembang. Inflasi berada dalam kisaran sasaran, didukung oleh sinergi kebijakan moneter dan fiskal serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah. World Bank dalam *Indonesia Economic Prospects* edisi Desember 2025 juga menilai bahwa fundamental makroekonomi Indonesia tetap solid, ditopang oleh inflasi inti yang terkendali, pengelolaan fiskal yang terjaga, cadangan devisa yang memadai, dan sistem perbankan yang sehat.

Secara keseluruhan, ketahanan ekonomi nasional diperkirakan dapat memberikan landasan yang penting bagi keberlanjutan permintaan atas produk dan layanan inti, seperti pencetakan uang Rupiah, paspor, meterai, pita cukai, dokumen pertanahan, dan dokumen berfitur sekuriti lainnya. Pada saat yang sama, pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi, perluasan transaksi elektronik, serta penguatan layanan publik digital membuka peluang bagi PERURI untuk memperluas kontribusi pada layanan sekuriti digital, termasuk tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, meterai elektronik, identitas digital, dan autentikasi dokumen.

Sumber:

1. Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik "Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen", 5 Februari 2026;
2. Bank Indonesia, Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025;
3. World Bank, *Indonesia Economic Prospects* edisi Desember 2025;
4. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *APBN Kita* edisi Desember 2025.

Amid global uncertainty, Indonesia's economy in 2025 continued to demonstrate resilient performance. Based on the Statistics Indonesia (BPS) Official Statistics Release dated February 5, 2026, Indonesia's economy in 2025 grew by 5.11%, higher than the 5.02% growth recorded in 2024. Gross Domestic Product (GDP) at current prices was recorded at Rp23,821.1 trillion, while GDP per capita reached Rp83.7 million or equivalent to USD5,083.4.

The growth was supported by household consumption, investment, exports of goods and services, as well as production activities across various business sectors. In the fourth quarter of 2025, Indonesia's economy grew by 5.11% year-on-year. From the expenditure side, household consumption remained the main contributor, while Gross Fixed Capital Formation recorded strong growth and exports of goods and services recorded the highest growth. From the business sector perspective, other services, business services, transportation and warehousing, as well as information and communication sectors demonstrated strong growth, while the manufacturing industry remained the largest contributor to GDP.

National macroeconomic stability was also maintained. Bank Indonesia, during the 2025 Bank Indonesia Annual Meeting, stated that external stability and the financial system remained well maintained, while the digitalization of the payment system continued to expand. Inflation remained within the target range, supported by monetary and fiscal policy synergies as well as strengthened coordination in controlling inflation at both national and regional levels. The World Bank, in the December 2025 edition of *Indonesia Economic Prospects*, also assessed that Indonesia's macroeconomic fundamentals remained solid, supported by controlled core inflation, prudent fiscal management, adequate foreign exchange reserves, and a sound banking system.

Overall, national economic resilience is expected to provide an important foundation for the continued demand for core products and services, such as Rupiah banknote printing, passports, duty stamps, excise tax stamps, land documents, and other security-featured documents. At the same time, growth in the information and communication sector, the expansion of electronic transactions, and the strengthening of digital public services present opportunities for PERURI to expand its contribution to digital security services, including electronic signatures, electronic certificates, electronic duty stamps, digital identity, and document authentication.

Sources:

1. Statistics Indonesia (BPS), Official Statistics Release "Indonesia's Economy in 2025 Grew by 5.11 Percent", February 5, 2026;
2. Bank Indonesia, 2025 Bank Indonesia Annual Meeting;
3. World Bank, *Indonesia Economic Prospects*, December 2025 edition;
4. Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, *APBN Kita*, December 2025 edition.



Tinjauan Industri Industry Overview

Perkembangan industri yang menjadi ruang usaha PERURI pada tahun 2025 ditandai oleh perubahan penting dari produk sekuriti fisik menuju layanan sekuriti yang semakin terintegrasi dengan ekosistem digital. Kebutuhan terhadap pencetakan uang, dokumen negara, meterai, pita cukai, paspor, sertifikat tanah, dan dokumen bernilai sekuriti tetap memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan administrasi negara. Namun, transformasi digital di sektor publik dan korporasi memperluas kebutuhan terhadap layanan yang mampu menjamin keaslian, validitas, integritas, dan keamanan dokumen maupun transaksi elektronik.

PERURI menjalankan peran pada tiga lanskap utama, yaitu industri pencetakan sekuriti (*security printing*), industri keamanan digital (*digital security*), dan layanan teknologi pemerintah (*government technology/GovTech*). Ketiga lanskap tersebut saling terkait karena kebutuhan terhadap keamanan tidak lagi terbatas pada produk fisik, tetapi juga mencakup autentikasi identitas, validasi dokumen, perlindungan data, dan kepercayaan dalam layanan digital.

Dalam industri *security printing*, kebutuhan terhadap produk berfitur pengaman tinggi tetap relevan meskipun pembayaran digital terus berkembang. Riset Mordor Intelligence memperkirakan nilai pasar *security printing* global sebesar USD32,76 miliar pada 2025 dan meningkat menjadi USD33,66 miliar pada 2026. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa uang kertas, dokumen identitas, pita cukai, paspor, dan dokumen sekuriti lainnya masih membutuhkan teknologi pengaman berlapis, pengendalian mutu yang ketat, serta proses produksi dengan standar keamanan tinggi.

Pada saat yang sama, perkembangan teknologi mendorong industri sekuriti untuk memperkuat fitur verifikasi, autentikasi, dan pelacakan dokumen. Dalam konteks global, Bank for International Settlements (BIS) mencatat bahwa

The development of industries within PERURI's business scope in 2025 was marked by significant changes from physical security products toward security services that are increasingly integrated with the digital ecosystem. The demand for banknote printing, state documents, duty stamps, excise tax stamps, passports, land certificates, and other security-featured documents continues to play a strategic role in the administration of the state. However, digital transformation in the public and corporate sectors has expanded the need for services capable of ensuring the authenticity, validity, integrity, and security of documents and electronic transactions.

PERURI operates across three main landscapes, namely the security printing industry, digital security industry, and government technology (GovTech) services. These three landscapes are interconnected as security needs are no longer limited to physical products, but also encompass identity authentication, document validation, data protection, and trust in digital services.

In the security printing industry, the demand for high-security-featured products remains relevant despite the continued growth of digital payments. Mordor Intelligence research estimates that the global security printing market was valued at USD32.76 billion in 2025 and is projected to increase to USD33.66 billion in 2026. This growth indicates that banknotes, identity documents, excise tax stamps, passports, and other security documents continue to require multi-layered security technologies, stringent quality control, and production processes with high security standards.

At the same time, technological developments are encouraging the security industry to strengthen document verification, authentication, and tracking features. In the global context, the Bank for International Settlements (BIS)

91% dari 93 bank sentral yang disurvei pada 2024 sedang mengeksplorasi *central bank digital currency* (CBDC), baik ritel, *wholesale*, maupun keduanya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa masa depan industri sekuriti akan semakin dipengaruhi oleh integrasi antara instrumen fisik, infrastruktur digital, dan sistem kepercayaan elektronik.

Di Indonesia, industri keamanan digital tumbuh sejalan dengan ekspansi ekonomi digital, layanan keuangan digital, transaksi elektronik, dan digitalisasi layanan publik. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi pada triwulan IV-2025 menjadi salah satu indikator meningkatnya peran teknologi dalam aktivitas ekonomi nasional. Perkembangan tersebut mendorong kebutuhan terhadap tanda tangan elektronik, meterai elektronik, sertifikat elektronik, identitas digital, autentikasi berlapis, serta solusi verifikasi dokumen yang dapat mendukung keamanan dan kekuatan pembuktian dalam transaksi digital.

Selain itu, penguatan GovTech menjadi bagian penting dari agenda transformasi digital nasional. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menjadi landasan bagi keterpaduan layanan digital pemerintah, termasuk melalui penyelenggaraan ekosistem layanan digital yang lebih terintegrasi, aman, dan mudah diakses. Arah ini menunjukkan bahwa layanan digital pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada penyediaan aplikasi, tetapi pada pembentukan ekosistem layanan publik yang terpadu dan memiliki tata kelola data yang lebih kuat.

Bagi PERURI, perkembangan tersebut membuka ruang strategis untuk memperkuat peran di bidang sekuriti fisik sekaligus memperluas kontribusi pada layanan sekuriti digital dan GovTech. Dengan basis kompetensi dalam *security printing*, pengalaman dalam pengelolaan produk bernilai sekuriti tinggi, serta pengembangan layanan digital seperti sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik, meterai elektronik, dan autentikasi dokumen, PERURI berada pada posisi yang relevan untuk menjawab kebutuhan industri yang semakin menuntut keamanan, validitas, dan kepercayaan.

Dengan demikian, dinamika industri tahun 2025 mempertegas arah transformasi PERURI dari penyedia produk sekuriti fisik menjadi penyedia solusi keamanan dan kepercayaan yang mendukung administrasi negara, transaksi elektronik, dan layanan publik digital. Perubahan ini menjadi konteks penting bagi PERURI dalam menyusun strategi, memperkuat kapabilitas teknologi, menjaga keberlanjutan bisnis inti, serta mengembangkan sumber pertumbuhan baru secara terukur.

Sumber:

1. Mordor Intelligence, *Security Printing Market — Companies & Industry Analysis*, 2026;
2. Bank for International Settlements (BIS), *Advancing in Tandem — Results of the 2024 BIS Survey on Central Bank Digital Currencies and Crypto*, 2025;
3. Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik "Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV dan Tahun 2025", 5 Februari 2026;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

noted that 91% of 93 central banks surveyed in 2024 were exploring central bank digital currency (CBDC), whether retail, wholesale, or both. This development indicates that the future of the security industry will increasingly be influenced by the integration of physical instruments, digital infrastructure, and electronic trust systems.

In Indonesia, the digital security industry is growing in line with the expansion of the digital economy, digital financial services, electronic transactions, and the digitalization of public services. The growth of the information and communication sector in the fourth quarter of 2025 was one of the indicators of the increasing role of technology in national economic activities. These developments have driven the need for electronic signatures, electronic duty stamps, electronic certificates, digital identities, multi-factor authentication, and document verification solutions that can support security and legal evidentiary strength in digital transactions.

In addition, the strengthening of GovTech has become an important part of the national digital transformation agenda. Presidential Regulation No. 82 of 2023 concerning the Acceleration of Digital Transformation and the Integration of National Digital Services serves as the foundation for integrated government digital services, including through the establishment of a more integrated, secure, and accessible digital service ecosystem. This direction indicates that government digital services are no longer focused solely on providing applications, but also on establishing an integrated public service ecosystem with stronger data governance.

For PERURI, these developments provide strategic opportunities to strengthen its role in physical security while expanding its contribution to digital security services and GovTech. With its competency base in security printing, experience in managing high-value security products, and the development of digital services such as electronic certificates, electronic signatures, electronic duty stamps, and document authentication, PERURI is well-positioned to address industry needs that increasingly demand security, validity, and trust.

Accordingly, industry dynamics in 2025 reaffirm PERURI's transformation direction from a provider of physical security products into a provider of security and trust solutions that support state administration, electronic transactions, and digital public services. This transformation serves as an important context for PERURI in formulating strategies, strengthening technological capabilities, maintaining the sustainability of its core business, and developing new sources of growth in a measurable manner.

Sources:

1. Mordor Intelligence, *Security Printing Market — Companies & Industry Analysis*, 2026;
2. Bank for International Settlements (BIS), *Advancing in Tandem — Results of the 2024 BIS Survey on Central Bank Digital Currencies and Crypto*, 2025;
3. Statistics Indonesia (BPS), Official Statistics Release "Economic Growth in the Fourth Quarter and 2025", February 5, 2026;
4. Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government System;
5. Presidential Regulation No. 132 of 2022 concerning the National Electronic-Based Government System Architecture;
6. Presidential Regulation No. 82 of 2023 concerning the Acceleration of Digital Transformation and the Integration of National Digital Services.



Posisi PERURI dalam Industri

PERURI memiliki posisi yang khas dan strategis dalam industri sekuriti nasional. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara, PERURI mengemban mandat penting dalam pencetakan Mata Uang Rupiah, pembuatan dokumen negara berfitur sekuriti, serta pengembangan layanan digital sekuriti. Mandat tersebut menempatkan PERURI tidak hanya sebagai pelaku industri, tetapi juga sebagai institusi strategis yang mendukung kedaulatan moneter, keandalan administrasi negara, dan keamanan dokumen bernilai tinggi.

Secara historis, PERURI didirikan pada 15 September 1971 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, PERURI memperoleh amanah untuk mencetak Mata Uang Rupiah, baik uang kertas maupun uang logam. PERURI juga ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional sektor industri melalui Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 466/M-IND/Kep/8/2014, yang menegaskan pentingnya peran Perusahaan dalam mendukung kepentingan strategis negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019, ruang lingkup tugas PERURI mencakup: (i) pencetakan Mata Uang Rupiah atas permintaan Bank Indonesia; (ii) pembuatan dokumen negara dengan fitur sekuriti meliputi Dokumen Keimigrasian (paspor) dan Benda Meterai; (iii) pembuatan Pita Cukai dan Dokumen Pertanahan (sertipikat tanah); (iv) pembuatan dokumen negara lain bercirikan sekuriti dan barang cetakan logam non-uang; (v) pencetakan mata uang dan dokumen negara lain atas permintaan negara bersangkutan, sepanjang kebutuhan domestik telah terpenuhi; (vi) penyediaan jasa berfitur sekuriti; serta (vii) fabrikasi kertas uang, kertas sekuriti, dan tinta sekuriti.

PERURI memperluas kapabilitasnya ke ranah *digital security* dengan portofolio produk utama, yaitu PERURI Sign (sertifikat dan tanda tangan elektronik), PERURI Code (QR Code aman), dan PERURI Trust (otentikasi). PERURI tercatat sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) tersertifikasi melalui SK Pengakuan Nomor 790 Tahun 2019 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Penugasan resmi PERURI sebagai penerbit Meterai Elektronik (e-Meterai) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 terus menjadi pilar pendapatan baru sepanjang 2025, sejalan dengan meningkatnya adopsi e-meterai untuk kontrak bisnis, dokumen perpajakan, dan dokumen layanan publik.

Di tingkat industri, PERURI memiliki keunggulan yang dibangun dari pengalaman panjang dalam mengelola produk bernilai sekuriti tinggi, kemampuan menjaga kerahasiaan proses, pemenuhan standar keamanan, serta kepercayaan yang diberikan oleh negara. Di tingkat internasional, PERURI juga menjadi bagian dari ekosistem percetakan sekuriti global melalui kapabilitas pencetakan uang, dokumen sekuriti, dan produk berfitur pengamanan tinggi, termasuk

PERURI's Position in the Industry

PERURI holds a distinctive and strategic position in the national security industry. As a State-Owned Enterprise with its entire capital owned by the State, PERURI carries an important mandate in printing Rupiah Currency, producing security-featured state documents, and developing digital security services. This mandate positions PERURI not only as an industry player, but also as a strategic institution supporting monetary sovereignty, the reliability of state administration, and the security of high-value documents.

Historically, PERURI was established on September 15, 1971 through Government Regulation No. 60 of 1971. Based on Law No. 7 of 2011 concerning Currency, PERURI was entrusted with the mandate to print Rupiah Currency, both banknotes and coins. PERURI was also designated as a National Vital Object in the industrial sector through the Decree of the Minister of Industry No. 466/M-IND/Kep/8/2014, reaffirming the importance of the Company's role in supporting the strategic interests of the state.

Based on Government Regulation No. 6 of 2019, PERURI's scope of duties includes: (i) printing Rupiah Currency upon the request of Bank Indonesia; (ii) producing security-featured state documents, including Immigration Documents (passports) and Duty Stamps; (iii) producing Excise Tax Stamps and Land Documents (land certificates); (iv) producing other state documents with security characteristics and non-currency metal printed products; (v) printing currencies and other state documents upon the request of other countries, provided that domestic requirements have been fulfilled; (vi) providing security-featured services; and (vii) manufacturing banknote paper, security paper, and security ink.

PERURI has expanded its capabilities into the digital security sector with key product portfolios, namely PERURI Sign (electronic certificates and electronic signatures), PERURI Code (secure QR Code), and PERURI Trust (authentication). PERURI is registered as a certified Electronic Certification Provider (PSrE) through Recognition Decree No. 790 of 2019 issued by the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia.

PERURI's official assignment as the issuer of Electronic Duty Stamps (e-Meterai) based on Government Regulation No. 86 of 2021 continued to serve as a pillar of new revenue growth throughout 2025, in line with the increasing adoption of e-Meterai for business contracts, tax documents, and public service documents.

At the industry level, PERURI's competitive advantages are built upon extensive experience in managing high-security-value products, the ability to maintain process confidentiality, compliance with security standards, and the trust granted by the state. Internationally, PERURI is also part of the global security printing ecosystem through its capabilities in printing currencies, security documents, and high-security-featured products, including experience in



pengalaman dalam memenuhi kebutuhan dokumen negara untuk sejumlah negara mitra. PERURI telah dipercaya mencetak dokumen negara untuk Sri Lanka, Nepal, Filipina, dan Peru.

Dengan kombinasi mandat sekuriti fisik, kapabilitas sekuriti digital, dan peran dalam GovTech, PERURI berada pada posisi strategis untuk mendukung kedaulatan negara dan transformasi digital nasional. Posisi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh kemampuan PERURI dalam membangun kepercayaan melalui keaslian dokumen, keamanan data, validitas transaksi, dan integrasi layanan digital.

Sumber:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Bea Meterai.
5. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 466/M-IND/Kep/8/2014 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Sektor Industri.
6. Surat Keputusan Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Nomor 790 Tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
8. PPID PERURI. 2025. Program/Kegiatan PERURI Tahun 2025. Jakarta: PERURI.
9. Siaran Pers PERURI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, peluncuran platform Rumah Pendidikan, 21 Januari 2025.

fulfilling state document requirements for several partner countries. PERURI has been entrusted to print state documents for Sri Lanka, Nepal, the Philippines, and Peru.

With a combination of physical security mandates, digital security capabilities, and a role in GovTech, PERURI is strategically positioned to support state sovereignty and national digital transformation. This position is not only determined by production capacity, but also by PERURI's ability to build trust through document authenticity, data security, transaction validity, and digital service integration.

Sources:

1. Government Regulation No. 60 of 1971 concerning the Establishment of Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 2011 concerning Currency.
3. Government Regulation No. 6 of 2019 concerning Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia.
4. Government Regulation No. 86 of 2021 concerning Stamp Duty.
5. Decree of the Minister of Industry No. 466/M-IND/Kep/8/2014 concerning the Designation of National Vital Objects in the Industrial Sector.
6. Recognition Decree of Electronic Certification Provider No. 790 of 2019, Ministry of Communication and Informatics.
7. Presidential Regulation No. 82 of 2023 concerning the Acceleration of Digital Transformation and the Integration of National Digital Services.
8. PPID PERURI. 2025. PERURI Programs/Activities in 2025. Jakarta: PERURI.
9. PERURI and Ministry of Primary and Secondary Education Press Release, Launch of the Rumah Pendidikan Platform, January 21, 2025.



Strategi dan Kebijakan Strategis PERURI 2025

Strategy and Strategic Policies of PERURI In 2025

Tahun 2025 ditetapkan sebagai fase *Strengthening Foundation*, penguatan fondasi bisnis dan kapabilitas Perusahaan sebagai prasyarat pertumbuhan jangka menengah. Melalui Kebijakan Umum Perusahaan (KUP) 2025, PERURI mengangkat tema "*Leveraging Innovation for Sustainable Growth*" sebagai pedoman strategis yang mengarahkan seluruh program kerja pada dua agenda utama yang dijalankan secara paralel, yaitu memperkuat bisnis inti di bidang uang, dokumen sekuriti, dan solusi keamanan digital, serta mengakselerasi mandat baru sebagai *Digital Implementation Agency* dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyusunan strategi dan kebijakan strategis tahun 2025 juga mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi makro, baik global maupun domestik.

Strategi tahun 2025 dituangkan ke dalam tiga pilar sasaran strategis yang diimplementasikan melalui 20 inisiatif strategis di seluruh unit kerja.

The year 2025 was designated as the *Strengthening Foundation* phase, focusing on strengthening the Company's business foundation and capabilities as a prerequisite for medium-term growth. Through the 2025 General Corporate Policy (KUP), PERURI adopted the theme "*Leveraging Innovation for Sustainable Growth*" as a strategic guideline that directs all work programs toward two main agendas implemented in parallel, namely strengthening the core business in currency, security documents, and digital security solutions, as well as accelerating its new mandate as a *Digital Implementation Agency* within the framework of the Electronic-Based Government System (SPBE). The formulation of strategies and strategic policies for 2025 also took into consideration developments in both global and domestic macroeconomic conditions.

The 2025 strategy was translated into three strategic objective pillars, which were implemented through 20 strategic initiatives across all work units.

Sasaran Strategis dan Inisiatif Strategis Tahun 2025

Strategic Objectives and Strategic Initiatives in 2025

Pilar Strategis Strategic Pillar	Inisiatif Strategis Tahun 2025 Strategic Initiatives in 2025
<i>Create Platforms to Enhance Citizen Experiences</i>	Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas (RACI) di seluruh rantai nilai pemerintahan digital & menyelaraskan dengan <i>stakeholder</i> . Establish clear roles and responsibilities (RACI) across the digital government value chain and align them with stakeholders.
	Mengupayakan mekanisme <i>Centralized Funding</i> yang kuat untuk SPBE. Develop a strong <i>Centralized Funding</i> mechanism for SPBE.
	Memperkuat peran PERURI sebagai orkestrator/pengarah strategis dan <i>digital implementation agency</i> . Strengthen PERURI's role as a strategic orchestrator/director and digital implementation agency.
	Memperkuat protokol dan tindakan <i>cybersecurity</i> . Strengthen cybersecurity protocols and measures.
	Menerapkan strategi manajemen <i>talent</i> secara E2E. Implement an E2E talent management strategy.
	Menerapkan model operasional yang strategis, <i>agile</i> , dan adaptif dalam SPBE PERURI. Implement a strategic, agile, and adaptive operating model within PERURI's SPBE framework.
	Membentuk kemitraan yang kuat dan strategis dengan BUMN lain dan pelaku teknologi utama. Establish strong and strategic partnerships with other SOEs and key technology players.
<i>Embed High Security Philosophy to Win Today & in the Future</i>	Memastikan ketahanan rantai pasok uang domestik. Ensure the resilience of the domestic currency supply chain.
	Modernisasi mesin percetakan uang untuk memproduksi uang dengan kualitas yang lebih baik. Modernize currency printing machines to produce currency with improved quality.
	Meningkatkan kapabilitas <i>end-to-end</i> dalam produksi paspor untuk memperkuat rantai nilai. Enhance end-to-end capabilities in passport production to strengthen the value chain.
	Mengembangkan <i>use case scalable</i> untuk produk digital (<i>Code, Sign, Trust</i>) dalam prioritas vertikal. Develop scalable use cases for digital products (<i>Code, Sign, Trust</i>) in priority verticals.
	Mengembangkan strategi <i>go-to-market</i> yang kuat untuk produk dan solusi digital. Develop a strong go-to-market strategy for digital products and solutions.



Pilar Strategis Strategic Pillar	Inisiatif Strategis Tahun 2025 Strategic Initiatives in 2025
	Meningkatkan <i>value creation</i> dari produk sekuriti lainnya (pita cukai, materai) dengan mempertahankan kepemimpinan pasar. Increase value creation from other security products (excise tax stamps, duty stamps) while maintaining market leadership.
	Memperluas pasar produk uang non-RI dan produk non-uang dengan ekspansi ke pasar internasional strategis. Expand the market for non-RI currency products and non-currency products through expansion into strategic international markets.
<i>Support to Become World Class Integrated Digital Security Solutions Provider</i>	Menentukan <i>enterprise architecture</i> dan meningkatkan <i>maturity platform</i> untuk mendukung 2 pilar strategis. Define enterprise architecture and enhance platform maturity to support the two strategic pillars.
	Meninjau dan merampingkan portofolio anak perusahaan. Review and streamline the subsidiaries' portfolio.
	Mengoptimalkan aset properti dengan membangun proyek <i>mixed-used</i> pada lokasi-lokasi strategis dan meninjau <i>use-case</i> untuk aset lainnya. Optimize property assets by developing mixed-use projects at strategic locations and reviewing use cases for other assets.
	Mengartikulasikan, mengaktifkan, dan menanamkan budaya korporat baru untuk memungkinkan evaluasi berbasis kompetensi dan inovasi. Articulate, activate, and embed a new corporate culture to enable competency- and innovation-based evaluation.
	Menerapkan kebijakan SDM <i>end-to-end</i> dan melakukan transformasi. Implement end-to-end human resources policies and transformation.
	Memperkuat kerangka kerja dan budaya manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan model bisnis baru. Strengthen the risk management framework and culture to ensure the sustainability of the new business model.

Ketiga pilar tersebut didukung oleh penguatan fungsi-fungsi *supporting* yang mencakup inovasi teknologi berkelanjutan, pengembangan *human capital*, penguatan tata kelola dan kepatuhan, manajemen risiko terintegrasi, optimalisasi sinergi PERURI Group, serta penguatan fungsi riset dan inovasi.

The three pillars are supported by the strengthening of supporting functions, including sustainable technological innovation, human capital development, strengthened governance and compliance, integrated risk management, optimization of PERURI Group synergies, as well as the strengthening of research and innovation functions.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Operational Overview by Business Segment

Laporan keuangan konsolidasian PERURI tidak menerapkan PSAK 108: Segmen Operasi. Oleh karena itu, pembahasan tinjauan operasi disajikan berdasarkan kelompok produk dan layanan yang tercermin dalam akun penjualan bersih. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap kinerja PERURI.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, penjualan bersih PERURI disajikan berdasarkan sektor produk yang mencakup:

1. **Uang Kertas;**
2. **Uang Logam & Logam Non-Uang;**
3. **Paspor & Dokumen Sekuriti;**
4. **Pita Cukai;**
5. **Digital;**
6. **Lainnya.**

Pengelompokan tersebut mencerminkan cakupan usaha PERURI dalam menjalankan mandat pencetakan uang Rupiah, penyediaan dokumen negara dan dokumen berfitur sekuriti, pengembangan layanan digital sekuriti, serta kontribusi dari entitas anak yang dikonsolidasikan.

Produksi: Proses, Kapasitas, dan Perkembangannya

Kegiatan produksi dan layanan PERURI dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan, yang mencakup pencetakan Mata Uang Rupiah, pembuatan dokumen negara dan dokumen lain yang memiliki fitur sekuriti, penyediaan jasa berfitur sekuriti, pabrikasi kertas uang, kertas sekuriti dan tinta sekuriti, serta jasa digital sekuriti. Ruang lingkup tersebut sejalan dengan kegiatan usaha utama PERURI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 dan dijelaskan dalam Catatan 1 atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Secara umum, proses produksi produk sekuriti fisik dilakukan melalui tahapan perencanaan kebutuhan produksi, pengadaan dan pengendalian bahan baku, pelaksanaan produksi sesuai karakteristik produk dan pesanan, pengendalian mutu dan keamanan, penyelesaian akhir, serta penyerahan kepada pelanggan sesuai ketentuan kontrak dan standar yang berlaku. Proses tersebut diterapkan pada produk seperti uang kertas, uang logam, logam non-uang, paspor, dokumen sekuriti, meterai, pita cukai, prangko, dokumen pertanahan, serta produk berfitur sekuriti lainnya.

Dalam proses produksi, bahan material yang digunakan berasal dari komponen lokal dan impor. Pada tahun 2025, kegiatan usaha pencetakan uang, baik uang kertas maupun uang logam, memiliki porsi sebesar 64,14% terhadap kegiatan usaha Perusahaan. Sementara itu, kegiatan usaha pencetakan dokumen sekuriti non-uang, layanan digital,

The consolidated financial statements of PERURI do not apply PSAK 108: Operating Segments. Therefore, the operational review is presented based on product and service groupings reflected in net sales accounts. This approach is used to provide an overview of the contribution of each revenue source to PERURI's performance.

Based on the consolidated financial statements, PERURI's net sales are presented by product sector, which comprises:

1. **Banknotes;**
2. **Coins & Non-Currency Metal;**
3. **Passport & Security Document;**
4. **Excise Stamps;**
5. **Digital;**
6. **Others.**

This classification reflects the scope of PERURI's business in carrying out its mandate to print the Indonesian Rupiah currency, provide state documents and security-featured documents, develop digital security services, as well as contributions from consolidated subsidiaries.

Production: Process, Capacity, and Development

PERURI's production and service activities are carried out in accordance with the Company's business scope, which includes the printing of Rupiah Currency, production of state documents and other security-featured documents, provision of security-featured services, manufacturing of banknote paper, security paper and security ink, as well as digital security services. This scope is aligned with PERURI's core business activities as stipulated in Government Regulation No. 6 of 2019 and described in Note 1 to the Consolidated Financial Statements.

In general, the production process for physical security products consists of several stages, including production planning, procurement and control of raw materials, production execution in accordance with product specifications and orders, quality and security control, finishing processes, and delivery to customers in accordance with contractual provisions and applicable standards. This process is applied to products such as banknotes, coins, non-currency metal products, passports, security documents, duty stamps, excise stamps, postage stamps, land documents, and other security-featured products.

In the production process, materials used are sourced from both domestic and imported components. In 2025, currency printing activities, comprising both banknotes and coins, accounted for 64.14% of the Company's business activities. Meanwhile, non-currency security document printing, digital services, and other products contributed 35.86%.

dan produk lainnya berkontribusi sebesar 35,86%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa bisnis pencetakan uang masih menjadi kegiatan utama PERURI, sementara produk dan layanan non-uang, termasuk digital, terus menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha Perusahaan.

Untuk layanan digital, proses operasi memiliki karakter yang berbeda dibandingkan produk sekuriti fisik karena tidak sepenuhnya berbasis pada kapasitas mesin produksi. Layanan digital dijalankan melalui tahapan pengembangan sistem, integrasi, pengujian, pengamanan data, penyediaan layanan, pemeliharaan sistem, serta pemenuhan ruang lingkup pekerjaan sesuai kebutuhan pelanggan atau instansi pemberi kerja. Dengan karakter tersebut, kinerja layanan digital dinilai berdasarkan penyelesaian pekerjaan, nilai layanan yang direalisasikan, kesiapan sistem, keandalan teknologi, keamanan informasi, serta pemenuhan ketentuan kontrak.

Berdasarkan karakteristik tersebut, pengukuran kinerja operasi PERURI tidak hanya dilihat dari volume produksi, tetapi juga dari kemampuan Perusahaan dalam memenuhi pesanan, menjaga kualitas dan keamanan produk, mengoptimalkan kapasitas, serta menyediakan layanan digital yang andal. Dengan demikian, pembahasan tinjauan operasi pada bagian ini disajikan melalui realisasi produksi, kapasitas dan utilisasi, pendapatan berdasarkan kelompok produk dan layanan, serta profitabilitas konsolidasian.

This composition indicates that currency printing remains PERURI's core business, while non-currency products and services, including digital offerings, continue to play an important role in the Company's business development.

For digital services, the operational process differs from physical security products as it is not entirely dependent on production machine capacity. Digital services are carried out through system development, integration, testing, data security, service provision, system maintenance, and fulfillment of contractual scope in accordance with customer or contracting institution requirements. Under this model, performance is assessed based on service completion, realized service value, system readiness, technology reliability, information security, and compliance with contractual obligations.

Based on these characteristics, PERURI's operational performance measurement is not solely based on production volume, but also on the Company's ability to fulfill orders, maintain product quality and security, optimize capacity, and deliver reliable digital services. Accordingly, the operational review in this section is presented through production realization, capacity and utilization, revenue by product and service group, and consolidated profitability.

Kinerja Produksi 2025 Production Performance 2025

Jenis Produk Product Type	Satuan Unit	RKAP Tahun 2025 RKAP 2025	Realisasi Tahun 2025 Realization 2025	Realisasi Tahun 2024 Realization 2024	Pencapaian (%) Achievement (%)	Naik/(Turun) (%) Increase/ (Decrease) (%)
1	2	3	4	5	6=4:3	7= (4-5):5
UANG KERTAS BANKNOTES						
Uang Kertas RI Indonesian Banknotes	Juta Rupiah Million Rupiah	2.638.799	2.471.118	1.719.001	93,65	43,75
UANG LOGAM & LOGAM NON-UANG COINS & NON-CURRENCY METAL						
Uang Logam RI Indonesian Coins	Juta Rupiah Million Rupiah	104.978	104.978	89.901	100,00	16,77
Logam Non-Uang DN Non-Currency Metal (Domestic)	Buah Units	7.794,00	5.218,00	4.841,00	66,95	7,79
PASPOR & DOKUMEN SEKURITI PASSPORT & SECURITY DOCUMENT						
Paspor RI Indonesian Passport	Juta Buku Million books	4,00	0,04	6,60	0,95	(99,42)
Meterai Duty Stamp	Juta Keping Million pieces	330,00	400,85	429,30	121,47	(6,63)
Dokumen Pertanahan Land Documents	Juta Lembar Million sheets	2,21	4,49	10,53	203,60	(57,32)
Dokumen Sekuriti DN Domestic Security Documents	Juta Rupiah Million Rupiah	26.199,95	38.026,60	27.437,80	145,14	38,59



Jenis Produk Product Type	Satuan Unit	RKAP Tahun 2025 RKAP 2025	Realisasi Tahun 2025 Realization 2025	Realisasi Tahun 2024 Realization 2024	Pencapaian (%) Achievement (%)	Naik/(Turun) (%) Increase/ (Decrease) (%)
1	2	3	4	5	6=4:3	7= (4-5):5
PITA CUKAI & PRANGKO EXCISE STAMPS & POSTAGE STAMPS						
Pita Cukai HT dan MMEA DN HT and MMEA DN Excise Stamps	Juta LK Million sheets	176,59	186,42	187,78	105,57	(0,72)
Prangko DN Domestic Postage Stamps	Juta Keping Million pieces	0,13	0,11	0,14	85,04	(22,41)
DIGITAL						
Meterai Elektronik Electronic Duty Stamp	Juta Keping Million pieces	48,40	50,03	40,89	103,37	22,36
Digital Product/Solution	Juta Rupiah Million Rupiah	40.110,51	22.917,28	33.405,68	57,14	(31,40)
Smartcard	Juta Rupiah Million Rupiah	105.139,87	124.906,09	34.039,46	118,80	266,94
SPBE	Juta Rupiah Million Rupiah	182.219,13	192.173,81	64.658,55	105,46	197,21
Badan Gizi Nasional National Nutrition Agency	Juta Rupiah Million Rupiah	-	495.641,47	-	100,00	100,00
PRODUK LUAR NEGERI OVERSEAS PRODUCTS						
Paspor Luar Negeri Overseas Passport	Juta Buku Million books	-	-	0,43	-	(100,00)

Uang Kertas

Realisasi penyerahan produk Uang Kertas RI tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.471.118 juta, atau mencapai 93,65% dari RKAP tahun 2025 sebesar Rp2.638.799 juta. Capaian tersebut dipengaruhi oleh sejumlah tantangan, baik dari faktor geopolitik yang berdampak pada kelancaran rantai pasok kertas uang maupun dinamika operasional internal yang memerlukan penyesuaian pada aspek kapasitas produksi, pengelolaan sumber daya, serta ketersediaan bahan pendukung produksi.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.719.001 juta, realisasi penyerahan produk Uang Kertas RI meningkat 43,75%, yang menunjukkan peningkatan nilai penyerahan produk uang kertas pada tahun berjalan.

Uang Logam dan Logam Non-Uang

› Uang Logam

Realisasi penyerahan produk Uang Logam RI tahun 2025 tercatat sebesar Rp104.978 juta, atau mencapai 100,00% dari RKAP tahun 2025 sebesar Rp104.978 juta. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi penyerahan produk Uang Logam RI telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp89.901 juta, realisasi penyerahan produk Uang Logam RI meningkat 16,77%, yang mencerminkan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan produk uang logam pada tahun berjalan.

Banknotes

The realization of Indonesian Rupiah Banknotes product delivery in 2025 was recorded at Rp2,471,118 million, or 93.65% of the 2025 RKAP target of Rp2,638,799 million. This achievement was influenced by several challenges, including geopolitical factors that affected the smooth supply chain of banknote paper, as well as internal operational dynamics that required adjustments in production capacity, resource management, and the availability of production supporting materials.

When compared to the 2024 realization of Rp1,719,001 million, the realization of Indonesian Rupiah Banknotes product delivery increased by 43.75%, indicating an increase in the value of banknote product delivery during the year.

Coins and Non-Currency Metal

› Coins

The realization of Indonesian Rupiah Coins product delivery in 2025 was recorded at Rp104,978 million, or 100.00% of the 2025 RKAP target of Rp104,978 million. This achievement indicates that the realization of Indonesian Rupiah Coins product delivery was in line with the target set. When compared to the 2024 realization of Rp89,901 million, the realization of Indonesian Rupiah Coins product delivery increased by 16.77%, reflecting the continued fulfillment of coin product requirements during the year.

› Logam Non-Uang

Realisasi penyerahan produk Logam Non-Uang Dalam Negeri tahun 2025 sejumlah 5.218,00 buah atau mencapai 66,95% dari RKAP tahun 2025 sejumlah 7.794,00 buah, pencapaian tersebut didominasi oleh produk medali, koin emas dan stempel tera. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 4.841,00 buah, penyerahan Logam Non Uang meningkat 7,79%, namun belum mencapai target RKAP karena realisasi pesanan pada beberapa produk logam non-uang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tahun berjalan.

Paspor dan Dokumen Sekuriti

Selain memproduksi uang kertas dan uang logam, PERURI juga menghasilkan produk paspor serta berbagai dokumen sekuriti.

› Paspor

Realisasi penyerahan produksi Paspor RI pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,04 juta buku atau mencapai 0,95% dari target RKAP sebesar 4,00 juta buku. Capaian tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan dan realisasi permintaan paspor dari instansi terkait selama periode berjalan.

› Meterai

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan melakukan penyerahan produk Meterai tahun 2025 sejumlah 400,85 juta keping atau mencapai 121,47% dari RKAP tahun 2025 sejumlah 330,00 juta keping. Meskipun melampaui target RKAP, realisasi tersebut menurun 6,63% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 429,30 juta keping, sejalan dengan dinamika kebutuhan dan realisasi pesanan selama tahun berjalan.

› Dokumen Pertanahan

Sepanjang tahun 2025 Perusahaan melakukan penyerahan produk dokumen pertanahan sejumlah 4,49 juta lembar atau mencapai 203,60% dari target pengiriman RKAP tahun 2025 sejumlah 2,21 juta lembar. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 10,53 juta lembar, realisasi tersebut menurun 57,32%. Penurunan tersebut berkaitan dengan pola realisasi pesanan dan tahapan pencetakan Dokumen Pertanahan yang menyesuaikan dengan kondisi anggaran dari instansi pemberi kerja.

› Dokumen Sekuriti

Selama tahun 2025, Perusahaan melakukan penyerahan produksi pesanan produk sekuriti senilai Rp38,03 miliar atau 145,14% dari RKAP tahun 2025 senilai Rp26,20 miliar, pencapaian ini didominasi oleh produk Sertifikat, Buku Pelaut, Ijazah & Transkrip serta Dokumen Imigrasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp27,44 miliar, realisasi tersebut meningkat 38,59%. Penurunan tersebut berkaitan dengan pola realisasi pesanan dan tahapan pencetakan Dokumen Pertanahan yang menyesuaikan dengan kondisi anggaran dari instansi pemberi kerja.

› Non-Currency Metal

The realization of domestic non-currency metal product deliveries in 2025 amounted to 5,218 units, or 66.95% of the 2025 RKAP target of 7,794 units. This achievement was primarily driven by products such as medals, gold coins, and official seals. Compared to the 2024 realization of 4,841.00 units, the delivery of Non-Currency Metal products increased by 7.79%, but has not yet reached the RKAP target because the realization of orders for several non-currency metal products was not fully in line with the current year's plan.

Passport and Security Document

In addition to banknotes and coins, PERURI also produces passports and various security documents.

› Passport

The realization of Indonesian passport production in 2025 recorded 0.04 million books, or 0.95% of the 2025 RKAP target of 4.00 million books. This achievement was influenced by adjustments in demand requirements and the realization of passport orders from the relevant authorities during the reporting period.

› Duty Stamp

Throughout 2025, the Company delivered 400.85 million duty stamp pieces, or 121.47% of the 2025 RKAP target of 330.00 million pieces. Although it exceeded the RKAP target, the realization decreased by 6.63% compared to the 2024 realization of 429.30 million pieces, in line with the dynamics of demand and order realization during the year.

› Land Documents

In 2025, the Company delivered 4.49 million sheets of land documents, or 203.60% of the 2025 RKAP target of 2.21 million sheets. Compared to the 2024 realization of 10.53 million sheets, the realization decreased by 57.32%. This decrease was related to the order realization pattern and the stages of Land Document printing, which were adjusted to the budget conditions of the employing institutions.

› Security Documents

Throughout 2025, the Company recorded the delivery of security document orders amounting to Rp38.03 billion, or 145.14% of the 2025 RKAP target of Rp26.20 billion. This achievement was primarily driven by products such as certificates, seafarer books, diplomas & transcripts, and immigration documents. Compared to the 2024 realization of Rp27.44 billion, the realization increased by 38.59%. The decrease was related to the order realization pattern and the stages of Land Document printing, which were adjusted to the budget conditions of the employing institutions.



Pita Cukai & Prangko

- › Pita Cukai
Pada tahun 2025, realisasi penyerahan produksi Pita Cukai HT dan MMEA DN tahun 2025 sejumlah 186,42 juta LK atau mencapai 105,57% dari RKAP tahun 2025 sejumlah 176,59 juta LK. Capaian tersebut sesuai dengan pesanan Order Bea Cukai (OBC) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 187,78 juta LK, realisasi tersebut relatif stabil dengan penurunan tipis sebesar 0,72%.
- › Prangko
Pada tahun 2025, realisasi penyerahan produk Prangko Dalam Negeri tahun 2025 sejumlah 0,11 juta keping atau mencapai 85,04% dari RKAP tahun 2025 sejumlah 0,13 juta keping. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 0,14 juta keping, mengalami penurunan sebesar 22,41% yang dipengaruhi oleh dinamika pesanan, perubahan desain, serta jadwal pengiriman yang relatif singkat pada produk prangko.

Digital

PERURI telah mengembangkan beberapa kategori produk digital yang meliputi meterai elektronik, digital *product/solution*, *smartcard*, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Badan Gizi Nasional.

- › Meterai Elektronik
Realisasi penyerahan produk Meterai Elektronik tahun 2025 sejumlah 50,03 juta keping atau mencapai 103,37% dari RKAP tahun 2025 sejumlah 48,40 juta keping. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 40,89 juta keping, mengalami peningkatan sebesar 22,36% yang mencerminkan peningkatan pemanfaatan meterai elektronik dalam aktivitas transaksi dan layanan digital.
- › Digital Product/ Solution
Realisasi penyerahan Digital Product/Solution tahun 2025 tercatat sebesar Rp22,92 miliar atau mencapai 57,14% dari target RKAP sebesar Rp40,11 miliar. Capaian tersebut dipengaruhi oleh adanya penyesuaian timeline dan pergeseran realisasi beberapa pesanan pelanggan ke tahun 2026. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp33,41 miliar, realisasi *Digital Product/Solution* menurun 31,40%.
- › Smartcard
Realisasi penyerahan produk Smartcard tahun 2025 senilai Rp124,91 miliar atau mencapai 118,80% dari RKAP tahun 2025 sebesar Rp105,14 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp34,04 miliar, mengalami peningkatan sebesar 266,94% yang menunjukkan peningkatan signifikan pada realisasi pesanan produk *smartcard* selama tahun berjalan.
- › Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Realisasi penyerahan produk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) senilai Rp192,17 miliar atau mencapai 105,46% dari RKAP tahun 2025 sebesar Rp182,22 miliar. Kontribusi pendapatan SPBE berasal

Excise Stamps & Postage Stamps

- › Excise Stamps
In 2025, the actual delivery of HT and MMEA DN Excise Stamps for 2025 totaled 186.42 million LK, or 105.57% of the 2025 Budget Plan (RKAP) of 176.59 million LK. This achievement was in line with the Customs Order (OBC) from the Directorate General of Customs and Excise. Compared to the 2024 realization of 187.78 million LK, the realization remained relatively stable, with a slight decrease of 0.72%.
- › Postage Stamps
In 2025, the realization of domestic postage stamp deliveries amounted to 0.11 million pieces, or 85.04% of the 2025 RKAP target of 0.13 million pieces. Compared to the 2024 realization of 0.14 million pieces, this represents a decline of 22.41%, which was influenced by order dynamics, design changes, and relatively short delivery schedules for stamp products.

Digital

PERURI has developed several categories of digital products, including electronic duty stamps, digital products/solutions, smartcards, Electronic-Based Government System (SPBE), and services for the National Nutrition Agency.

- › Electronic Duty Stamp
In 2025, the realization of electronic duty stamp deliveries reached 50.03 million pieces, or 103.37% of the 2025 RKAP target of 48.40 million pieces. Compared to the 2024 realization of 40.89 million pieces, this represents an increase of 22.36%, which reflects the increased utilization of electronic stamps in digital transaction activities and services.
- › Digital Products/Solutions
The realization of digital product/solution deliveries in 2025 amounted to Rp22.92 billion, or 57.14% of the RKAP target of Rp40.11 billion. This performance was influenced by adjustments in project timelines and the shifting of several customer orders into 2026. Compared to the 2024 realization of Rp33.41 billion, the realization of Digital Products/Solutions decreased by 31.40%.
- › Smartcard
The realization of smartcard deliveries in 2025 amounted to Rp124.91 billion, or 118.80% of the 2025 RKAP target of Rp105.14 billion. Compared to the 2024 realization of Rp34.04 billion, this represents a significant increase of 266.94%, which indicates a significant increase in the realization of smartcard product orders during the year.
- › Electronic-Based Government System (SPBE)
The realization of SPBE-related services amounted to Rp192.17 billion, or 105.46% of the 2025 RKAP target of Rp182.22 billion. SPBE revenue contributions were derived from contracts related to application integration with the

dari kontrak atas pengintegrasian aplikasi SPBE dengan Kemendikdasmen, pekerjaan integrasi layanan Kemenkes, kontrak pembuatan STG dengan KemenPANRB serta penyelenggaraan aplikasi dengan Kemensaintek.

- › Badan Gizi Nasional (BGN)
Realisasi penugasan BGN tahun 2025 senilai Rp495,64 miliar, atas realisasi produk tersebut sebelumnya tidak direncanakan dalam RKAP tahun 2025, sehingga menjadi tambahan kontribusi terhadap kinerja layanan digital pada tahun berjalan.

Produk Luar Negeri

- › Paspor Luar Negeri
Selama tahun 2025 belum ada kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PERURI. Dengan demikian, realisasi Paspor Luar Negeri tercatat nihil dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 0,43 juta buku.

Kapasitas Produksi

Pemanfaatan Kapasitas

Pada tahun 2025, PERURI mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas produksi untuk memenuhi pemesanan cetak Uang Kertas RI dan Uang Logam RI. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mesin, ketersediaan bahan baku dan bahan pendukung, pengaturan jadwal produksi, serta pemenuhan standar mutu.

Pada lini Uang Kertas RI, pemanfaatan kapasitas dipengaruhi oleh tantangan operasional, antara lain gangguan teknis pada beberapa mesin produksi dan keterlambatan kedatangan bahan kertas uang. Sementara itu, pada lini Uang Logam RI, pemanfaatan kapasitas didukung oleh penggunaan mesin otomatis dalam proses penghitungan dan pengemasan, sehingga proses penyelesaian pesanan dapat berjalan lebih efisien.

Penjualan Konsolidasi dan Profitabilitas

Pendapatan usaha yang diperoleh dari penjualan berbagai produk yang dihasilkan, meliputi uang kertas, uang logam dan logam non-uang, paspor serta dokumen sekuriti, pita cukai dan prangko, produk digital, serta lainnya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Ministry of Primary and Secondary Education, healthcare service integration projects with the Ministry of Health, STG development contracts with the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, as well as application service provision with the Ministry of Science and Technology.

- › National Nutrition Agency (BGN)
The implementation of the 2025 BGN assignment, amounted to Rp495.64 billion, was not previously planned in the 2025 RKAP, thereby contributing additional support to the performance of digital services during the year.

Overseas Products

- › Overseas Passport
During 2025, there were no export activities carried out by PERURI. Thus, the realization of Overseas Passport production was recorded as nil, compared to 0.43 million booklets in 2024.

Production Capacity

Capacity Utilization

In 2025, PERURI optimized the utilization of its production capacity to fulfill orders for the printing of Indonesian Banknotes and Indonesian Coins. These efforts were carried out by taking into account machine readiness, the availability of raw materials and supporting materials, production scheduling, and compliance with applicable quality standards.

In the Indonesian Banknotes production line, capacity utilization was affected by operational challenges, including technical disruptions in several production machines and delays in the arrival of banknote paper. Meanwhile, in the Indonesian Coins production line, capacity utilization was supported by the use of automated machines in the counting and packaging process, enabling order completion to be carried out more efficiently.

Consolidated Sales and Profitability

Operating revenues generated from the sales of various products produced, including banknotes, coins and non-currency metal, passport and security document, excise stamps and postage stamps, digital products, as well as others in 2025 are as follows:

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

No	Sektor Produk Product Sector	RKAP tahun 2025 2025 RKAP	Realisasi tahun 2025 (Audited) 2025 Realization (Audited)	Realisasi tahun 2024 (Audited) 2024 Realization (Audited)	Pencapaian (%) Achievement (%)	Naik / (Turun) (%) Increase / (Decrease) (%)
	1	2	3	4	5=3:2	6=(3-4):4
1	Uang Kertas Banknotes					
	Uang Kertas RI Indonesian Banknotes	2.638.799	2.471.118	1.719.001	93,65	43,75
	Total Sektor Uang Kertas Total Banknotes Sector	2.638.799	2.471.118	1.719.001	93,65	43,75
2	Uang Logam & Logam Non-Uang Coins & Non-Currency Metal					
	Uang Logam RI Indonesian Coins	104.978	104.978	89.901	100,00	16,77
	Logam Non-Uang DN Domestic Non-Currency Metal	3.679	2.519	2.615	68,47	(3,66)
	Total Uang Logam dan Logam Non-Uang Total Coins & Non-Currency Metal	108.657	107.497	92.515	98,93	16,19
3	Paspor & Dokumen Sekuriti Passport & Security Document					
	Paspor RI Indonesian Passports	800.419	11.305	855.420	1,41	(98,68)
	Meterai Stamp Duty	75.900	92.196	98.739	121,47	(6,63)
	Dokumen Pertanahan Land Documents	5.405	12.181	30.478	225,34	(60,03)
	Dokumen Sekuriti DN Domestic Security Documents	25.819	37.647	27.333	145,81	37,74
	Total Paspor dan Dokumen Sekuriti Total Passports & Security Documents	907.543	153.329	1.011.970	16,89	(84,85)
4	Pita Cukai dan Prangko Excise Stamps and Postage Stamps					
	Pita Cukai HT dan MMEA DN HT and MMEA DN Excise Stamps	369.328	408.401	387.579	110,58	5,37
	Prangko DN Domestic Postage Stamps	778	1.391	1.964	178,68	(29,18)
	Total Pita Cukai Total Excise Stamps	370.106	409.792	389.543	110,72	5,20
5	Digital					
	Meterai Elektronik Electronic Stamp Duty	37.607	38.876	31.771	103,37	22,36
	Digital Product/ Solution	39.977	22.382	33.303	55,99	(32,79)
	Smartcard	105.140	124.906	34.039	118,80	266,94
	SPBE	182.219	192.174	64.659	105,46	197,21
	Badan Gizi Nasional National Nutrition Agency	-	495.641	-	100,00	100,00
	Total Digital	364.943	873.980	163.772	239,48	433,66
6	Produk Luar Negeri Overseas Products					
	Paspor LN Overseas Passports	-	-	13.966	(100,00)	(100,00)
	Total Produk Luar Negeri Total Overseas Products	-	-	13.966	(100,00)	(100,00)
7	Kontribusi Anak Perusahaan Subsidiary Contributions	296.956	206.117	375.641	69,41	(45,13)
	Total Penjualan Konsolidasian Total Consolidated Sales	4.687.004	4.221.832	3.766.408	90,08	12,09

Uang Kertas

Realisasi pendapatan produk Uang Kertas RI tahun 2025 adalah sebesar Rp2.471,12 miliar atau mencapai 93,65% dari RKAP tahun 2025 sebesar Rp2.638,80 miliar. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024 senilai Rp1.719,00 miliar mengalami peningkatan sebesar 43,75%. Capaian ini dipengaruhi oleh dinamika rantai pasok global serta sejumlah penyesuaian operasional dalam proses produksi.

Uang Logam dan Logam Non-Uang

Realisasi pendapatan sektor Uang Logam dan Logam Non-Uang selama tahun 2025 sebesar Rp107,50 miliar, atau mencapai 98,93% dari RKAP 2025 sebesar Rp108,66 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan uang logam dan logam non-uang pada tahun 2024 sebesar Rp92,52 miliar, mengalami peningkatan sebesar 16,19%. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh pendapatan Uang Logam RI sebesar Rp104,98 miliar yang mencapai 100,00% dari RKAP dan meningkat 16,77% dibandingkan tahun 2024, sejalan dengan Perjanjian Jasa Pencetakan untuk Uang Logam RI.

Paspor dan Dokumen Sekuriti

Realisasi pendapatan sektor Paspor dan Dokumen Sekuriti selama tahun 2025 sebesar Rp153,33 miliar atau mencapai 16,89% dari RKAP 2025 sebesar Rp907,54 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan paspor dan dokumen sekuriti pada tahun 2024 sebesar Rp1.011,97 miliar, mengalami penurunan sebesar 84,85%. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan dan realisasi penerimaan paspor dari instansi terkait selama periode berjalan.

Pita Cukai dan Prangko

Realisasi pendapatan sektor Pita Cukai dan Prangko selama tahun 2025 sebesar Rp409,79 miliar dari RKAP 2025 sebesar Rp370,11 miliar atau mencapai 110,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pita cukai pada tahun 2024 sebesar Rp389,54 miliar mengalami peningkatan sebesar 5,20%. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh pendapatan Pita Cukai HT dan MMEA Dalam Negeri sebesar Rp408,40 miliar yang mencapai 110,58% dari RKAP dan meningkat 5,37% dibandingkan tahun 2024, sejalan dengan pesanan Order Bea Cukai (OBC) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Digital

Realisasi pendapatan atas produk digital selama tahun 2025 sebesar Rp873,98 miliar atau mencapai 239,48% dari RKAP 2025 sebesar Rp364,95 miliar. Pendapatan produk digital terdiri dari meterai elektronik sebesar Rp38,88 miliar, *digital product/solution* Rp22,38 miliar, *smartcard* Rp124,91 miliar, SPBE Rp 192,17 miliar, dan Badan Gizi Nasional Rp495,64 miliar. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp163,77 miliar mengalami peningkatan sebesar 433,66%. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh realisasi penugasan BGN senilai Rp495,64 miliar yang sebelumnya tidak direncanakan dalam RKAP 2025, serta peningkatan kontribusi SPBE dan *smartcard* pada tahun berjalan.

Banknotes

The realization of Indonesian banknote product revenue in 2025 amounted to Rp2,471.12 billion or reached 93.65% of the 2025 RKAP target of Rp2,638.80 billion. Compared to revenue in 2024 amounting to Rp1,719.00 billion, it increased by 43.75%. This achievement was influenced by global supply chain dynamics and several operational adjustments in the production process.

Coins and Non-Currency Metal

The realization of revenue from the Coins and Non-Currency Metal sector in 2025 amounted to Rp107.50 billion, or reached 98.93% of the 2025 RKAP target of Rp108.66 billion. Compared to the realization of revenue from coins and non-currency metals in 2024 amounting to Rp92.52 billion, it increased by 16.19%. The increase was mainly supported by revenue from Indonesian Coins amounting to Rp104.98 billion, which reached 100.00% of the RKAP and increased by 16.77% compared to 2024, in line with the Printing Service Agreement for Indonesian Coins.

Passport and Security Document

The realization of revenue from the Passport and Security Document sector in 2025 amounted to Rp153.33 billion, or reached 16.89% of the 2025 RKAP target of Rp907.54 billion. Compared to the realization of revenue from passports and security documents in 2024 amounting to Rp1,011.97 billion, it decreased by 84.85%. This decline was primarily influenced by adjustments in needs and the realization of passport receipts from related agencies during the current period.

Excise Stamps and Postage Stamps

The realization of revenue from the Excise Stamps and Postage Stamps sector in 2025 amounted to Rp409.79 billion against the 2025 RKAP target of Rp370.11 billion, or reached 110.72%. Compared to the realization of excise stamp revenue in 2024 amounting to Rp389.54 billion, it increased by 5.20%. The increase was mainly supported by revenue from HT and MMEA DN Excise Stamps amounting to Rp408.40 billion, which reached 110.58% of the RKAP and increased by 5.37% compared to 2024, in line with the Customs Order (OBC) from the Directorate General of Customs and Excise.

Digital

The realization of revenue from digital products in 2025 amounted to Rp873.98 billion or reached 239.48% of the 2025 RKAP target of Rp364.95 billion. Revenue from digital products consisted of electronic stamp duty amounting to Rp38.88 billion, digital product/solution amounting to Rp22.38 billion, smartcard amounting to Rp124.91 billion, SPBE amounting to Rp192.17 billion, and the National Nutrition Agency amounting to Rp495.64 billion. Compared to revenue in 2024 amounting to Rp163.77 billion, it increased by 433.66%. This increase was mainly driven by the realization of BGN amounting to Rp495.64 billion, which was not previously included in the 2025 RKAP, as well as the increased contribution from SPBE and smartcard services during the year.



Produk Luar Negeri

Selama tahun 2025 belum ada kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PERURI. Dengan demikian, pendapatan Produk Luar Negeri tercatat nihil dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp13,97 miliar.

Kontribusi Anak Perusahaan

Realisasi pendapatan dari sektor lainnya secara total selama tahun 2025 sebesar Rp206,12 miliar atau mencapai 69,41% dari target RKAP 2025 sebesar Rp296,96 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp375,64 miliar, mengalami penurunan sebesar 45,13%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Anak Perusahaan belum setinggi tahun sebelumnya dan belum mencapai target tahun berjalan.

Overseas Products

During 2025, PERURI did not conduct any export activities. Accordingly, revenue from Overseas Products was recorded as nil, compared to Rp13.97 billion in 2024.

Subsidiary Contributions

The realization of total revenue from other sectors in 2025 amounted to Rp206.12 billion or reached 69.41% of the 2025 RKAP target of Rp296.96 billion. Compared to the realization in 2024 amounting to Rp375.64 billion, it decreased by 45.13%. The decrease indicates that the contribution from Subsidiaries has not yet reached the level of the previous year and has not met the current year's target.



Kinerja Keuangan

Financial Performance

Kinerja Perusahaan pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, hal ini tercermin pada total pendapatan usaha konsolidasian dari hasil penjualan sektor uang, non-uang, digital dan kontribusi anak perusahaan adalah sebesar Rp4.221,83 miliar atau naik 12,09% dari tahun 2024 sebesar Rp3.766,41 miliar.

Laba bersih konsolidasian tahun 2025 tercatat sebesar Rp238,43 miliar atau naik 38,79% dari laba bersih konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp171,79 miliar. Laju pertumbuhan majemuk tahunan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) atas laba bersih periode 2021–2025 adalah sebesar 1,59%, atau naik dari CAGR selama 5 tahun atas laba bersih periode 2020–2024 yang tercatat sebesar -10,62%.

The Company's performance in 2025 improved compared to 2024, as reflected in the consolidated operating revenue from sales of currency, non-currency, digital sectors, and subsidiary contributions amounting to Rp4,221.83 billion, an increase of 12.09% compared to 2024 which amounted to Rp3,766.41 billion.

The consolidated net profit in 2025 was recorded at Rp238.43 billion, an increase of 38.79% compared to the consolidated net profit in 2024 of Rp171.79 billion. The Compound Annual Growth Rate (CAGR) of net profit for the 2021–2025 period was 1.59%, an increase from the 5-year CAGR of net profit for the 2020–2024 period, which was recorded at -10.62%.

Tinjauan Keuangan

Tinjauan atas kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia (PSAK). Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) dan memperoleh opini "wajar dalam semua hal yang material".

Financial Overview

This financial performance overview is prepared based on the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2025, which have been presented in accordance with the generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia (PSAK). The financial statements have been audited by Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners (PKF) and received an opinion of "fair in all material respects."

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statements of Financial Position

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Naik/ Turun Increase/Decrease	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Aset Lancar Current Assets				
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	2.259.086	2.155.612	103.474	4,80
Piutang Usaha Trade Receivables				
Pihak Berelasi Related Parties	18.309	17.693	616	3,48
Pihak Ketiga Third Parties	430.525	608.241	(177.716)	(29,22)
Piutang Lain-lain Other Receivables				
Pihak Berelasi Related Parties	356	288	69	23,83
Pihak Ketiga Third Parties	5.994	14.793	(8.799)	(59,48)
Persediaan Inventories	730.816	509.297	221.519	43,50
Pajak Dibayar Di Muka Prepaid Taxes	28.168	43.341	(15.173)	(35,01)

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Naik/ Turun Increase/Decrease	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Uang Muka Dan Beban Dibayar Di Muka Advances and Prepaid Expenses	421.078	178.573	242.505	135,80
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	3.894.331	3.527.836	366.496	10,39
Aset Tidak Lancar Non-current Assets				
Investasi pada Ventura Bersama Investment in Associates	208.081	202.996	5.085	2,51
Taksiran pengembalian pajak Estimated tax refund claim	3.931	4.362	(431)	(9,87)
Surat berharga Marketable securities	-	-	-	-
Properti investasi Investment properties	18.360	9.144	9.216	100,78
Aset Tetap – Bersih Fixed Assets – Net	2.673.053	2.679.438	(6.385)	(0,24)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	12.585	13.214	(629)	(4,76)
Aset hak guna usaha Right-of-use Assets	4.873	1.925	2.948	153,20
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-current Assets	398.069	441.657	(43.588)	(9,87)
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	3.318.952	3.352.734	(33.782)	(1,01)
Jumlah Aset Total Assets	7.213.283	6.880.570	332.713	4,84

Aset

Total aset Perusahaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp7,21 triliun, meningkat 4,84% atau sebesar Rp332,71 miliar dibandingkan posisi tahun 2024 sebesar Rp6,88 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan aset lancar, khususnya kas dan setara kas, persediaan, serta uang muka dan beban dibayar di muka. Rincian dan penjelasan masing-masing komponen aset disajikan sebagai berikut:

Aset Lancar

Saldo aset lancar tahun 2025 sebesar Rp3.894,33 miliar atau mencapai 123,44% dari RKAP sebesar Rp3.154,81 miliar. Bila dibandingkan dengan saldo aset lancar tahun 2024 sebesar Rp3.527,84 miliar mengalami kenaikan sebesar 10,39%, hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan saldo piutang proyek strategis serta persediaan bahan baku dan *work in process* (WIP) yang dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan produksi dan *delivery* Uang Kertas RI pada tahun 2026.

Komponen yang terdapat dalam aset lancar di antaranya:

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas kecil, giro, deposito berjangka dalam bentuk mata uang Rupiah, Valuta Asing (Valas) seperti Dolar AS, Euro dan Japan Yen dan bagi hasil atas deposito Syariah Rupiah. Kas dan setara kas Perusahaan pada tahun 2025 sebesar Rp2.259,09 miliar atau mengalami peningkatan

Assets

The Company's total assets in 2025 were recorded at Rp7.21 trillion, an increase of 4.84% or Rp332.71 billion compared to the 2024 position of Rp6.88 trillion. The increase was mainly derived from the growth in current assets, particularly cash and cash equivalents, inventories, as well as advances and prepaid expenses. Details and explanations of each asset component are presented as follows:

Current Assets

The balance of current assets in 2025 amounted to Rp3,894.33 billion or reached 123.44% of the RKAP target of Rp3,154.81 billion. Compared to the current asset balance in 2024 of Rp3,527.84 billion, it increased by 10.39%. This was mainly influenced by the increase in strategic project receivables as well as raw material inventories and work in process (WIP) prepared to support production requirements and the delivery of Indonesian Banknotes in 2026.

The components included in current assets are as follows:

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of petty cash, current accounts, time deposits denominated in Rupiah, Foreign Currency (FCY) such as US Dollars, Euros, and Japanese Yen, as well as profit sharing from Rupiah Sharia deposits. The Company's cash and cash equivalents in 2025 amounted

4,80% atau sebesar Rp103,47 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp2.155,61 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan saldo kas di bank, khususnya pada pihak berelasi, meskipun saldo setara kas dalam bentuk deposito berjangka mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Piutang Usaha

Piutang usaha Perusahaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp448,83 miliar, mengalami penurunan 28,29% atau sebesar Rp177,10 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp625,93 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya piutang usaha pihak ketiga dari Rp608,24 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp430,52 miliar pada tahun 2025, di tengah kenaikan terbatas piutang pihak berelasi. Piutang usaha tersebut terbagi atas piutang usaha dengan pihak berelasi dan pihak ketiga yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 4,08% dan 95,92% dari piutang usaha bersih.

Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain yang dimiliki Perusahaan pada tahun 2025 terdiri atas piutang bunga deposito, piutang bunga obligasi dan lainnya. Jumlah piutang lain-lain pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp6,35 miliar, mengalami penurunan 57,89% atau sebesar Rp8,73 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp15,08 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan piutang lain-lain pihak ketiga, sementara penyisihan kerugian penurunan nilai ekspektasian relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

Persediaan

Persediaan yang dimiliki oleh Perusahaan terdiri atas persediaan bahan baku, bahan penolong, barang jadi dan barang setengah jadi serta barang umum lainnya. Jumlah persediaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp730,82 miliar, mengalami peningkatan sebesar 43,50% atau Rp221,52 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp509,30 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan persediaan bahan baku serta WIP uang kertas yang disiapkan untuk mendukung pemenuhan target *delivery* Uang Kertas RI pada tahun 2026.

Pajak Dibayar Dimuka

Pajak dibayar dimuka tahun 2025 tercatat sebesar Rp28,17 miliar, mengalami penurunan sebesar 35,01% atau Rp15,17 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp43,34 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya saldo pajak dibayar di muka, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sejalan dengan penyelesaian dan pemanfaatan lebih bayar pajak pada periode berjalan.

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp421,08 miliar atau naik sebesar 135,80% atau Rp242,51 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp178,57 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan uang muka kepada pemasok serta kenaikan beban dibayar di muka lainnya, yang mencerminkan kebutuhan pendanaan awal untuk pengadaan dan penyelesaian pekerjaan pada periode berjalan.

to Rp2,259.09 billion, representing an increase of 4.80% or Rp103.47 billion compared to 2024 of Rp2,155.61 billion. The increase was mainly driven by higher cash balances in banks, particularly with related parties, although cash equivalents in the form of time deposits decreased compared to the previous year.

Trade Receivables

The Company's trade receivables in 2025 were recorded at Rp448.83 billion, a decrease of 28.29% or Rp177.10 billion compared to 2024 of Rp625.93 billion. The decrease was mainly driven by the decrease in third-party trade receivables from Rp608.24 billion in 2024 to Rp430.52 billion in 2025, amid a limited increase in receivables from related parties. The trade receivables consisted of receivables from related parties and third parties, which contributed 4.08% and 95.92%, respectively, of net trade receivables.

Other Receivables

The Company's other receivables in 2025 consisted of interest receivables from deposits, interest receivables from bonds, and other receivables. Total other receivables in 2025 were recorded at Rp6.35 billion, a decrease of 57.89% or Rp8.73 billion compared to 2024 of Rp15.08 billion. The decrease was mainly influenced by a decline in other third-party receivables, while the allowance for expected credit loss impairment remained relatively stable compared to the previous year.

Inventories

The Company's inventories consist of raw materials, supporting materials, finished goods, work in process, and other general supplies. Total inventories in 2025 were recorded at Rp730.82 billion, an increase of 43.50% or Rp221.52 billion compared to 2024 of Rp509.30 billion. The increase was mainly influenced by higher raw material inventories and work-in-progress (WIP) for banknotes prepared to support the fulfillment of Indonesian Banknote delivery targets in 2026.

Prepaid Taxes

Prepaid taxes in 2025 were recorded at Rp28.17 billion, a decrease of 35.01% or Rp15.17 billion compared to 2024 of Rp43.34 billion. The decrease was mainly driven by a decrease in prepaid tax balances, particularly Value-Added Tax (VAT), in line with the settlement and utilization of tax overpayments during the current period.

Advances and Prepaid Expenses

Advances and prepaid expenses in 2025 were recorded at Rp421.08 billion, an increase of 135.80% or Rp242.51 billion compared to 2024 of Rp178.57 billion. The increase was mainly influenced by higher advances to suppliers and an increase in other prepaid expenses, reflecting the upfront funding needs for procurement and project execution during the current period.



Aset Tidak Lancar

Perusahaan mencatat total aset tidak lancar pada tahun 2025 sebesar Rp3,32 triliun, menurun 1,01% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,35 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan aset tidak lancar lainnya, aset tetap bersih, aset pajak tangguhan, dan taksiran pengembalian pajak, meskipun terdapat kenaikan pada properti investasi, investasi pada ventura bersama, dan aset hak guna usaha.

Adapun komponen yang terdapat pada aset tidak lancar, diantaranya:

Investasi pada Ventura Bersama

Perusahaan melakukan investasi pada ventura bersama untuk pekerjaan tinta sekuriti. Hal ini terlihat dari investasi pada ventura bersama pada bagian aset tidak lancar. Investasi saham pada ventura bersama tahun 2025 tercatat senilai Rp208,08 miliar, naik 2,51% atau sebesar Rp5,09 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp202,99 miliar. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh bagian atas laba bersih ventura bersama PT Sicpa Peruri Securink yang diakui pada tahun berjalan.

Taksiran Pengembalian Pajak

Taksiran Pengembalian Pajak merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayarkan kepada negara. Perusahaan mencatat taksiran pengembalian pajak pada tahun 2025 sebesar Rp3,93, menurun 9,87% atau sebesar Rp0,43 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp4,36 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya saldo klaim pengembalian pajak pada akhir tahun berjalan.

Properti Investasi

Properti Investasi terdiri dari tanah, bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa. Perusahaan mencatat properti investasi pada tahun 2025 sebesar Rp18,36 miliar, naik 100,78% atau sebesar Rp9,22 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp9,14 miliar. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan properti investasi dari entitas anak serta reklasifikasi aset tetap lahan ke properti investasi.

Aset Tetap

Aset tetap Perusahaan terdiri dari tanah, bangunan, mesin pabrik, peralatan pabrik, peralatan kantor, furniture, serta kendaraan. Perusahaan mencatat aset tetap pada tahun 2025 sebesar Rp2,67 triliun, menurun 0,24% atau sebesar Rp6,39 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp2,68 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh beban penyusutan tahun berjalan dan pengurangan aset tetap, meskipun terdapat penambahan aset tetap serta reklasifikasi dari aset dalam penyelesaian.

Aset Pajak Tangguhan

Perusahaan mencatat aset pajak tangguhan pada tahun 2025 senilai Rp12,59 miliar, mengalami penurunan 4,76% atau sebesar Rp629 juta dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp13,21 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi

Non-Current Assets

The Company recorded total non-current assets in 2025 amounting to Rp3.32 trillion, a decrease of 1.01% compared to the previous year of Rp3.35 trillion. The decrease was mainly influenced by the decline in other non-current assets, net fixed assets, deferred tax assets, and estimated tax refunds, despite increases in investment properties, investments in joint ventures, and right-of-use assets.

The components included in non-current assets are as follows:

Investment in Joint Ventures

The Company made investments in joint ventures for security ink production activities. This is reflected in the investment in joint ventures under non-current assets. Equity investments in joint ventures in 2025 were recorded at Rp208.08 billion, an increase of 2.51% or Rp5.09 billion compared to 2024 of Rp202.99 billion. The increase was mainly influenced by the share of profit from the joint venture PT Sicpa Peruri Securink recognized during the current year.

Estimated Tax Refunds

Estimated tax refunds represent refunds for excess tax payments made to the state. The Company recorded estimated tax refunds in 2025 amounting to Rp3.93 billion, a decrease of 9.87% or Rp0.43 billion compared to 2024 of Rp4.36 billion. The decrease was mainly influenced by a decrease in the balance of tax refund claims at the end of the current year.

Investment Properties

Investment properties consist of land, buildings, or parts of buildings, or both, held by the owner or lessee. The Company recorded investment properties in 2025 amounting to Rp18.36 billion, an increase of 100.78% or Rp9.22 billion compared to 2024 of Rp9.14 billion. The increase was mainly influenced additional investment properties from subsidiaries, as well as the reclassification of land from property, plant, and equipment to investment property.

Fixed Assets

The Company's fixed assets consist of land, buildings, factory machinery, factory equipment, office equipment, furniture, and vehicles. The Company recorded fixed assets in 2025 amounting to Rp2.67 trillion, a decrease of 0.24% or Rp6.39 billion compared to 2024 of Rp2.68 trillion. This decrease was mainly driven by depreciation expense for the current year and the reduction of property, plant, and equipment, despite additions to fixed assets and reclassification from construction in progress.

Deferred Tax Assets

The Company recorded deferred tax assets in 2025 amounting to Rp12.59 billion, a decrease of 4.76% or Rp629 million compared to 2024 of Rp13.21 billion. The decrease was mainly influenced by temporary differences forming the

oleh perubahan temporer yang menjadi dasar pengakuan aset pajak tangguhan pada akhir tahun berjalan.

Aset Hak Guna Usaha

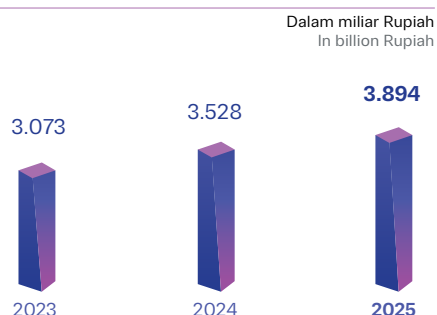
Aset hak guna usaha merupakan sewa guna usaha atas bangunan dan kendaraan. Aset hak guna usaha pada tahun 2025 sebesar Rp4,87 miliar, mengalami peningkatan 153,20% atau sebesar Rp2,95 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp1,93 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan aset hak guna atas kendaraan dan bangunan, setelah dikurangi penyusutan dan pengurangan aset hak guna pada periode berjalan.

basis for the recognition of deferred tax assets at the end of the current year.

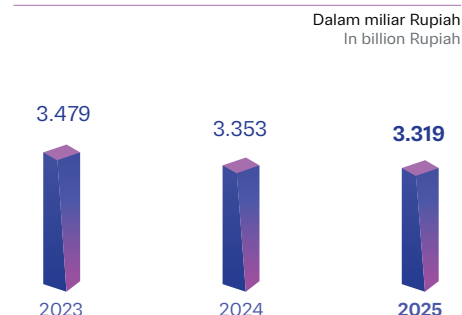
Right-of-Use Assets

Right-of-use assets represent leases of buildings and vehicles. Right-of-use assets in 2025 amounted to Rp4.87 billion, an increase of 153.20% or Rp2.95 billion compared to 2024 of Rp1.93 billion. The increase was mainly influenced by additions to right-of-use assets for vehicles and buildings, net of depreciation and reductions in right-of-use assets during the period.

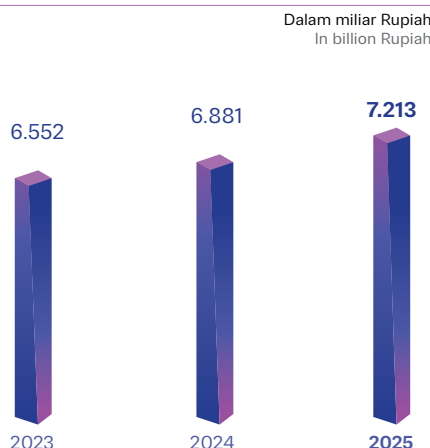
Aset Lancar Current Assets



Aset Tidak Lancar Non-Current Assets



Total Aset Total Assets



Aset Tidak Lancar Lainnya

Perusahaan mencatat aset tidak lancar lainnya yang dimiliki terdiri dari aset yang dibatasi penggunaannya, aset tak berwujud (perangkat lunak dan Hak Guna Bangunan), dan aset lainnya. Pada tahun 2025, aset tidak lancar lainnya tercatat sebesar Rp398,07 miliar, menurun 9,87% atau sebesar Rp43,59 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp441,66 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan nilai buku aset tak berwujud seiring pengakuan amortisasi tahun berjalan, meskipun aset tidak lancar lainnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Other Non-Current Assets

The Company recorded other non-current assets consisting of restricted-use assets, intangible assets (software and Building Use Rights), and other assets. In 2025, other non-current assets were recorded at Rp398.07 billion, a decrease of 9.87% or Rp43.59 billion compared to 2024 of Rp441.66 billion. The decrease was mainly influenced by a decline in the carrying amount of intangible assets due to the recognition of amortization for the current year, although other non-current assets increased compared to the previous year.



Liabilitas Liabilities

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Naik/Turun Increase/Decrease	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities				
Bagian jangka pendek dari: Current portion of:				
Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank loans	235.698	323.545	(87.846)	(27,15)
Liabilitas sewa Lease liabilities	1.577	439	1.138	259,20
Utang usaha Trade payables				
Pihak berelasi Related parties	423.605	266.315	157.290	59,06
Pihak ketiga Third parties	623.825	474.006	149.819	31,61
Utang pajak Taxes payable	133.199	80.883	52.316	64,68
Beban yang masih harus dibayar Accrued expenses	414.493	425.063	(10.571)	(2,49)
Liabilitas kontrak Contract liabilities	14.074	12.030	2.044	16,99
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities	69.598	60.993	8.606	14,11
Jumlah liabilitas jangka pendek Total current liabilities	1.916.069	1.643.274	272.796	16,60
Liabilitas Jangka Panjang Non-current liabilities				
Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank loans	74.426	192.389	(117.963)	(61,31)
Kewajiban imbalan pascakerja Post-employment benefit obligations	418.279	414.789	3.490	0,84
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	24.248	31.166	(6.918)	(22,20)
Liabilitas sewa Lease liabilities	2.076	172	1.903	1.104,23
Liabilitas jangka panjang lainnya Other non-current liabilities	206.710	268.924	(62.214)	(23,13)
Jumlah liabilitas jangka panjang Total non-current liabilities	725.738	907.440	(181.702)	(20,02)
Jumlah Liabilitas Total liabilities	2.641.808	2.550.714	91.094	3,57

Perusahaan telah membukukan total liabilitas pada tahun 2025 sebesar Rp2,64 triliun, nilai tersebut meningkat sebesar 3,57% atau sebesar Rp91,09 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2,55 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan liabilitas jangka pendek, khususnya utang usaha dan utang pajak, meskipun liabilitas jangka panjang menurun sejalan dengan berkurangnya pinjaman bank jangka panjang dan liabilitas jangka panjang lainnya. Penjelasan per kelompok liabilitas disajikan sebagai berikut:

The Company recorded total liabilities in 2025 amounting to Rp2.64 trillion, an increase of 3.57% or Rp91.09 billion compared to the previous year of Rp2.55 trillion. The increase was mainly driven by higher current liabilities, particularly trade payables and tax payables, although non-current liabilities declined in line with the decrease in long-term bank loans and other non-current liabilities. A detailed explanation of each liability group is presented below:

Liabilitas Jangka Pendek

Saldo liabilitas lancar tahun 2025 sebesar Rp1.916,07 miliar atau mencapai 179,56% dari RKAP tahun 2025 sebesar Rp1.067,09 miliar. Bila dibandingkan dengan saldo liabilitas lancar tahun 2024 sebesar Rp1.643,27 miliar mengalami kenaikan sebesar 16,60%. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh utang usaha induk yang berada di atas target.

Pinjaman Bank yang akan Jatuh Tempo Dalam Setahun

Pada tahun 2025, saldo pinjaman Bank yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp235,70 miliar, menurun 27,15% atau sebesar Rp87,85 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 323,55 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan porsi pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, khususnya pada pihak berelasi, sejalan dengan pembayaran pokok pinjaman bank selama tahun berjalan.

Utang Usaha

Utang usaha Perusahaan terdiri dari utang usaha lokal dan impor. Utang usaha pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.047,43 miliar, naik 41,48% atau sebesar Rp307,11 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp740,32 miliar. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan pembelian bahan baku dan kewajiban kepada pemasok sejalan dengan penyelesaian produksi dan proyek tahun berjalan.

Utang Pajak

Perusahaan mencatat utang pajak pada tahun 2025 sebesar Rp133,20 miliar, naik 64,68% atau sebesar Rp52,32 miliar dibandingkan dengan periode 2024 sebesar Rp80,88 miliar. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan kewajiban pajak pada akhir tahun berjalan, sejalan dengan aktivitas operasional, penjualan, dan pengakuan laba kena pajak tahun 2025.

Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar yang dimiliki Perusahaan pada tahun 2025 sebesar Rp414,49 miliar, turun 2,49% atau sebesar Rp10,57 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp425,06 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya akrual beban pegawai dan beban bunga pinjaman, sementara akrual retensi relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak merupakan tanda persetujuan untuk mengerjakan proyek atau pekerjaan yang diberikan oleh pelanggan. Perusahaan mencatat liabilitas kontrak pada tahun 2025 sebesar Rp14,07 miliar, meningkat 16,99% atau sebesar Rp2,04 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp12,03 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan liabilitas kontrak dari pelanggan usaha, meskipun liabilitas kontrak yang berasal dari sewa mengalami penurunan.

Liabilitas Sewa dan Jangka Pendek Lainnya

Liabilitas Sewa dan Jangka pendek lainnya tercatat sebesar Rp71,18 miliar, naik 15,86% atau sebesar Rp9,74 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp61,43 miliar. Kenaikan

Current Liabilities

The balance of current liabilities in 2025 amounted to Rp1,916.07 billion or reached 179.56% of the 2025 RKAP target of Rp1,067.09 billion. Compared to the 2024 balance of Rp1,643.27 billion, it increased by 16.60%. This increase was mainly driven by the parent company's trade payables exceeding the target.

Bank Loans due within One Year

In 2025, the balance of bank loans due within one year amounted to Rp235.70 billion, a decrease of 27.15% or Rp87.85 billion compared to 2024 of Rp323.55 billion. The decrease was mainly influenced by a decrease in the current portion of long-term bank loans due within one year, particularly with related parties, in line with the repayment of bank loan principal during the year.

Trade Payables

The Company's trade payables consist of domestic and import payables. In 2025, trade payables amounted to Rp1,047.43 billion, an increase of 41.48% or Rp307.11 billion compared to 2024 of Rp740.32 billion. The increase was mainly influenced by higher procurement of raw materials and increased obligations to suppliers in line with production completion and ongoing project requirements.

Tax Payables

The Company recorded tax payables in 2025 amounting to Rp133.20 billion, an increase of 64.68% or Rp52.32 billion compared to the 2024 period of Rp80.88 billion. The increase was mainly driven by higher tax liabilities at the end of the current year, in line with operational activities, sales, and the recognition of taxable profit in 2025.

Accrued Expenses

Accrued expenses in 2025 amounted to Rp414.49 billion, a decrease of 2.49% or Rp10.57 billion compared to 2024 of Rp425.06 billion. The decrease was mainly influenced by a decrease in accrued employee expenses and interest expenses, while retention accruals remained relatively stable compared to the previous year.

Contract Liabilities

Contract liabilities represent commitments to execute projects or work agreed upon with customers. The Company recorded contract liabilities in 2025 amounting to Rp14.07 billion, an increase of 16.99% or Rp2.04 billion compared to 2024 of Rp12.03 billion. The increase was mainly influenced by higher contract liabilities from business customers, although contract liabilities arising from leases decreased.

Lease Liabilities and Other Current Liabilities

Lease liabilities and other current liabilities amounted to Rp71.18 billion in 2025, an increase of 15.86% or Rp9.74 billion compared to 2024 of Rp61.43 billion. The increase was mainly



tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan liabilitas jangka pendek lainnya untuk kebutuhan operasional serta kenaikan bagian liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang tercatat sebesar Rp725,74 miliar pada tahun 2025, turun 20,02% atau sebesar Rp181,70 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp907,44 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pinjaman bank jangka panjang dan liabilitas jangka panjang lainnya. Penjelasan per segmen disajikan sebagai berikut:

Pinjaman Bank Jangka Panjang

Perusahaan mencatat pinjaman bank jangka panjang tahun 2025 sebesar Rp74,43 miliar, terjadi penurunan 61,31% atau sebesar Rp117,96 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 192,40 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman bank serta reklasifikasi sebagian pinjaman jangka panjang ke bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Kewajiban Imbalan Pasca-Kerja

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja pada tahun 2025 sebesar Rp418,28 miliar, naik 0,84% atau sebesar Rp3,49 miliar bila dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp414,79 miliar. Peningkatan ini sebagaimana hasil perhitungan aktuarial atas imbalan pasca kerja pada tahun 2025.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Perusahaan mencatat liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2025 sebesar Rp24,25 miliar, turun 22,20% atau sebesar Rp6,92 miliar bila dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp31,17 miliar. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh perubahan temporer kena pajak yang menjadi dasar pengakuan liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun berjalan.

Liabilitas Sewa dan Tidak Lancar Lainnya

Liabilitas sewa dan tidak lancar lainnya pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp208,79 miliar, turun 22,41% atau sebesar Rp 60,31 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp269,10 miliar.

influenced by higher other current liabilities for operational needs, as well as an increase in the current portion of lease liabilities due within one year.

Non-Current Liabilities

Non-current liabilities were recorded at Rp725.74 billion in 2025, a decrease of 20.02% or Rp181.70 billion compared to 2024 of Rp907.44 billion. The decrease was mainly influenced by the reduction in long-term bank loans and other non-current liabilities. The details by segment are presented as follows:

Long-Term Bank Loans

The Company recorded long-term bank loans in 2025 amounting to Rp74.43 billion, a decrease of 61.31% or Rp117.96 billion compared to 2024 of Rp192.40 billion. The decrease was mainly driven by bank loan repayments and the reclassification of a portion of long-term loans into the current portion due within one year.

Post-Employment Benefit Obligations

The Company recorded employee benefit liabilities in 2025 amounting to Rp418.28 billion, an increase of 0.84% or Rp3.49 billion compared to 2024 of Rp414.79 billion. The increase was in line with the actuarial valuation results of post-employment benefits in 2025.

Deferred Tax Liabilities

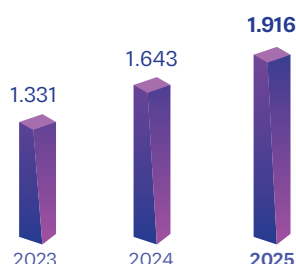
The Company recorded deferred tax liabilities in 2025 amounting to Rp24.25 billion, a decrease of 22.20% or Rp6.92 billion compared to 2024 of Rp31.17 billion. The decrease was mainly influenced by taxable temporary differences forming the basis for the recognition of deferred tax liabilities at the end of the current year.

Lease Liabilities and Other Non-Current Liabilities

Lease liabilities and other non-current liabilities in 2025 were recorded at Rp208.79 billion, a decrease of 22.41% or Rp60.31 billion compared to 2024 of Rp269.10 billion.

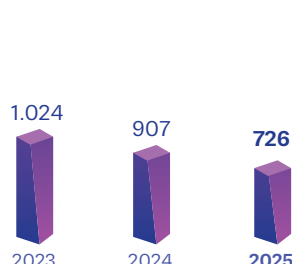
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities

Dalam miliar Rupiah
In billion Rupiah



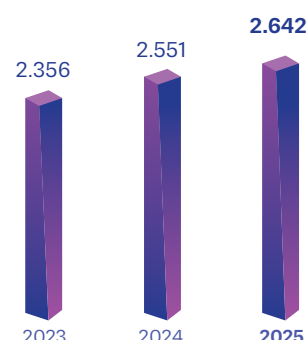
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities

Dalam miliar Rupiah
In billion Rupiah



Total Liabilitas Total Liabilities

Dalam miliar Rupiah
In billion Rupiah



Ekuitas Equity

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Naik/Turun Increase/Decrease	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Ekuitas Equity				
Modal saham Share capital	363.573	363.573	-	-
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	(64.059)	(64.059)	-	-
Komponen ekuitas lainnya Other equity components	(195.476)	(216.483)	21.007	(10,75)
Saldo laba Retained earnings				
Telah ditentukan penggunaannya Appropriated	4.200.993	4.049.492	151.501	3,61
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	235.045	168.242	66.804	28,42
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Equity attributable to				
Pemilik Entitas Induk Owners of the parent entity	4.540.076	4.300.765	239.311	5,27
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests	31.399	29.091	2.308	7,35
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.571.476	4.329.856	241.619	5,29

Laporan perubahan ekuitas pada akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp4.571,48 miliar, yaitu meningkat 5,29% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4.329,86 miliar yang terdiri atas modal sebesar Rp363,57 miliar, tambahan modal disetor sebesar negatif Rp64,06 miliar dan cadangan sebesar Rp4.200,99 miliar. Selain itu, terdapat komponen ekuitas lainnya sebesar negatif Rp195,48 miliar yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 10,75% dan kepentingan non-pengendali sebesar Rp31,39 miliar yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 7,35%.

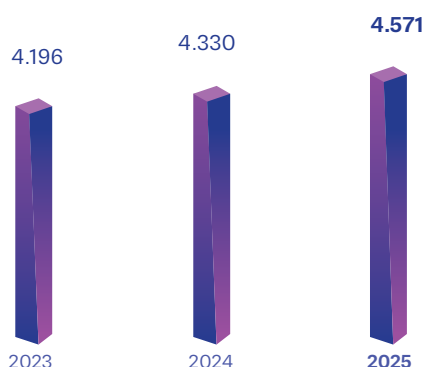
The statement of changes in equity at the end of 2025 amounted to Rp4,571.48 billion, an increase of 5.29% compared to 2024, which was Rp4,329.86 billion, consisting of capital amounting to Rp363.57 billion, additional paid-in capital of negative Rp64.06 billion, and reserves of Rp4,200.99 billion. Additionally, there was another equity component of negative Rp195.48 billion, a decrease of 10.75% from 2024, and non-controlling interests of Rp31.39 billion, an increase of 7.35% from 2024.



Total Ekuitas

Total Equity

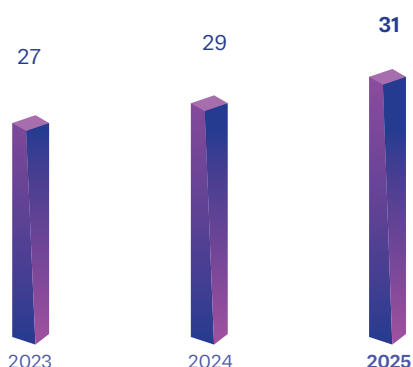
Dalam miliar Rupiah
In billion Rupiah



Kepentingan Non-Pengendali

Non-Controlling Interests

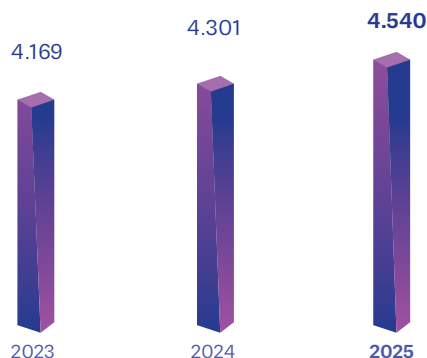
Dalam miliar Rupiah
In billion Rupiah



Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk

Equity Attributable to the Parent Entity

Dalam miliar Rupiah
In billion Rupiah



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Naik/Turun Increase/Decrease	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Penjualan Bersih Net sales	4.221.832	3.766.408	455.424	12,09
Beban Pokok Penjualan Cost of sales	(3.224.607)	(2.847.016)	(377.591)	13,26
Laba Kotor Gross profit	997.225	919.392	77.833	8,47
Beban Penjualan Selling expenses	(29.723)	(33.587)	3.864	(11,50)
Beban Umum dan Administrasi General and administrative expenses	(751.288)	(707.748)	(43.540)	6,15
Pendapatan Keuangan Finance income	84.917	87.258	(2.341)	(2,68)
Beban Keuangan Finance expenses	(34.122)	(44.001)	9.879	(22,45)
Bagian Laba dari Ventura Bersama Share of profits of joint venture	5.085	16.612	(11.526)	(69,39)
Pendapatan (Beban) Lain Other income (expenses)	52.937	5.786	47.151	814,95

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Naik/Turun Increase/Decrease	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Sub Jumlah Subtotal	(672.195)	(675.681)	3.486	(0,52)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before income tax	325.031	243.711	81.320	33,37
Beban Pajak Penghasilan Income tax expense				
Pajak Kini Current tax	(98.856)	(98.915)	59	(0,06)
Pajak Tangguhan Deferred tax	12.254	26.995	(14.741)	(54,61)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan Total income tax expense	(86.602)	(71.921)	(14.681)	20,41
Laba Tahun Berjalan Profit for the year	238.429	171.790	66.639	38,79
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Other comprehensive income (expenses)				
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi: Items that will not be reclassified to profit or loss:				
Pengukuran Kembali Atas Imbalan Pascakerja Remeasurement of post-employment benefits	27.089	(19.973)	47.062	235,63
Beban Pajak Terkait Related income tax	(5.965)	4.397	(10.362)	(236,66)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total comprehensive income for the year	259.553	156.215	103.338	66,15
Laba Bersih Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Profit for the year attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of the parent	235.045	168.242	66.803	39,71
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interest	3.384	3.549	(165)	(4,65)
	238.429	171.790	66.639	38,79
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Total comprehensive income for the year attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of the parent	259.669	156.367	103.302	66,06
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interest	(115)	(152)	37	(24,09)
	259.553	156.215	103.338	66,15

Penjualan Bersih

Realisasi total penjualan konsolidasian hasil kegiatan seluruh sektor usaha PERURI Grup tahun 2025 sebesar Rp4.221,83 miliar atau meningkat 12,09% atau sebesar Rp455,42 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3.766,41 miliar. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh pertumbuhan pendapatan pada sektor Uang Kertas, Pita Cukai, dan Digital. Kinerja sektor Digital memberikan kontribusi signifikan seiring dengan realisasi pekerjaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *smartcard*, meterai elektronik, serta penugasan BGN.

Net Sales

The consolidated total sales realization from all business segments of the PERURI Group in 2025 amounted to Rp4,221.83 billion, an increase of 12.09% or Rp455.42 billion compared to 2024 of Rp3,766.41 billion. This increase was mainly supported by revenue growth in the Banknotes, Excise Stamps, and Digital sectors. The performance of the Digital segment made a significant contribution, driven by the realization of work under the Electronic-Based Government System (SPBE), smartcards, electronic stamps, as well as BGN assignment.



Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan konsolidasian tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.224,61 miliar, meningkat 13,26% atau sebesar Rp377,59 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.847,02 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan volume dan nilai penjualan konsolidasian, khususnya pada produk dan layanan yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan tahun berjalan.

Laba Kotor

Laba kotor mencapai Rp997,23 miliar, meningkat 8,47% atau sebesar Rp77,83 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp919,39 miliar. Kenaikan laba kotor terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan bersih yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Beban Usaha

Beban usaha konsolidasian yang terdiri dari beban penjualan serta beban umum dan administrasi tahun 2025 tercatat sebesar Rp781,01 miliar, meningkat 5,35% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp741,34 miliar. Beban penjualan menurun 11,51% menjadi Rp29,72 miliar dari Rp33,59 miliar pada tahun sebelumnya, sedangkan beban umum dan administrasi meningkat 6,15% menjadi Rp751,29 miliar dari Rp707,75 miliar. Kenaikan beban umum dan administrasi terutama mencerminkan kebutuhan operasional dan pendukung usaha PERURI Grup, sementara penurunan beban penjualan menunjukkan adanya pengendalian biaya pada aktivitas penjualan.

Pendapatan dan Beban Di luar Usaha

Pendapatan diluar usaha pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp173,92 miliar, naik 50,61% atau sebesar Rp58,44 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp115,48 miliar. Nilai pendapatan diluar usaha ini diantaranya diperoleh dari:

- › Pendapatan bunga Rp84,92 miliar.
- › Penyerapan laba bersih perusahaan ventura bersama (PT SPS) sebesar Rp5,09 miliar.
- › Penjualan Aset Rp3,30 miliar.
- › Penerimaan denda atas keterlambatan pengiriman Rp0,54 miliar.
- › Sewa tanah dan bangunan sebesar Rp1,96 miliar.
- › Pendapatan lain-lain Rp78,12 miliar.

Sedangkan beban di luar usaha pada 2025 tercatat sebesar Rp65,11 miliar, naik 30,67% atau sebesar Rp15,28 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp49,82 miliar.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Perusahaan mencatat laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp325,03 miliar pada tahun 2025, naik 33,37% atau sebesar Rp81,32 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp243,71 miliar. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh kenaikan penjualan bersih, perbaikan pendapatan lain-lain, serta penurunan beban keuangan.

Beban Pajak Penghasilan

Perusahaan mencatat beban pajak penghasilan pada tahun 2025 sebesar Rp86,60 miliar, naik 20,41% atau sebesar Rp14,68 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp71,92 miliar. Kenaikan tersebut sejalan dengan peningkatan laba sebelum pajak penghasilan pada tahun berjalan. Beban pajak

Cost of Sales

The consolidated cost of sales in 2025 was recorded at Rp3,224.61 billion, an increase of 13.26% or Rp377.59 billion compared to 2024 of Rp2,847.02 billion. This increase was in line with the higher volume and value of consolidated sales, particularly for products and services that made significant contributions to revenue during the year.

Gross Profit

Gross profit reached Rp997.23 billion, an increase of 8.47% or Rp77.83 billion compared to 2024 of Rp919.39 billion. The increase in gross profit was mainly driven by higher net sales growth compared to the previous year.

Operating Expenses

The consolidated operating expenses, which consist of selling expenses and general and administrative expenses, were recorded at Rp781.01 billion in 2025, an increase of 5.35% compared to 2024 of Rp741.34 billion. Selling expenses decreased by 11.51% to Rp29.72 billion from Rp33.59 billion in the previous year, while general and administrative expenses increased by 6.15% to Rp751.29 billion from Rp707.75 billion. The increase in general and administrative expenses mainly reflects the operational and business support requirements of the PERURI Group, while the decline in selling expenses indicates cost control in sales activities.

Other Income and Other Expenses

Other income in 2025 was recorded at Rp173.92 billion, an increase of 50.61% or Rp58.44 billion compared to 2024 of Rp115.48 billion. This other income mainly consisted of:

- › Interest income of Rp84.92 billion
- › Share of profit from joint venture entities (PT SPS) of Rp5.09 billion
- › Gain on asset disposal of Rp3.30 billion
- › Penalties for late delivery of Rp0.54 billion
- › Land and building rental income of Rp1.96 billion
- › Other income of Rp78.12 billion

Meanwhile, other expenses in 2025 were recorded at Rp65.11 billion, an increase of 30.67% or Rp15.28 billion compared to 2024 of Rp49.82 billion.

Profit Before Tax

The Company recorded profit before income tax of Rp325.03 billion in 2025, an increase of 33.37% or Rp81.32 billion compared to 2024 of Rp243.71 billion. This increase was mainly supported by higher net sales, improved other income, and a decrease in finance expenses.

Income Tax Expense

The Company recorded income tax expense in 2025 amounting to Rp86.60 billion, an increase of 20.41% or Rp14.68 billion compared to 2024 of Rp71.92 billion. This increase was in line with the higher profit before income tax in the current year. Income tax expense consists of current

penghasilan terdiri dari pajak kini sebesar Rp98,86 miliar dan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp12,25 miliar.

Laba Tahun Berjalan

Realisasi laba bersih konsolidasian tahun 2025 adalah sebesar Rp238,43 miliar, meningkat 38,79% atau sebesar Rp66,64 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp171,79 miliar. Laba tersebut diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp235,05 miliar dan kepentingan non-pengendali sebesar Rp3,38 miliar. Peningkatan laba tahun berjalan terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan bersih, peningkatan pendapatan lain-lain, penurunan beban keuangan, serta kontribusi positif dari kinerja Induk dan Anak Perusahaan.

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Pada tahun 2025, Perusahaan mencatat penghasilan komprehensif lain sebesar Rp21,12 miliar, naik 235,62% atau sebesar Rp36,70 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar negatif Rp15,58 miliar. Beban komprehensif ini timbul karena adanya perhitungan PSAK 24 atas imbalan kerja dan penyesuaian terkait beban pajak terkait.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan

Pada tahun 2025, Perusahaan mencatat laba komprehensif sebesar Rp259,55 miliar, naik 66,15% atau sebesar Rp103,34 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp156,22 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan laba tahun berjalan serta perbaikan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2025.

tax of Rp98.86 billion and deferred tax benefit of Rp12.25 billion.

Profit for the Year

The consolidated net profit realization in 2025 was Rp238.43 billion, an increase of 38.79% or Rp66.64 billion compared to 2024 of Rp171.79 billion. The profit is attributable to owners of the parent entity in the amount of Rp235.05 billion and non-controlling interests of Rp3.38 billion. The increase in profit for the year was mainly driven by higher net sales, improved other income, lower finance expenses, and positive contributions from the performance of the Parent Company and its Subsidiaries.

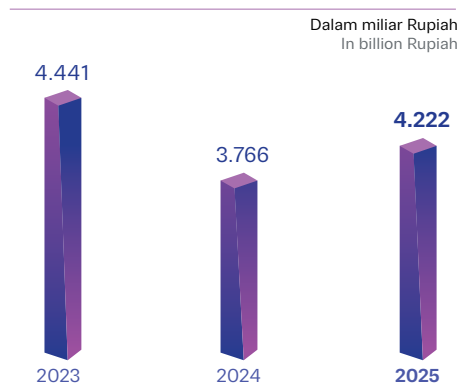
Other Comprehensive Income (Loss)

In 2025, the Company recorded other comprehensive income of Rp21.12 billion, an increase of 235.62% or Rp36.70 billion compared to 2024 of negative Rp15.58 billion. This comprehensive income was mainly driven by PSAK 24 actuarial calculations on employee benefits and related tax adjustments.

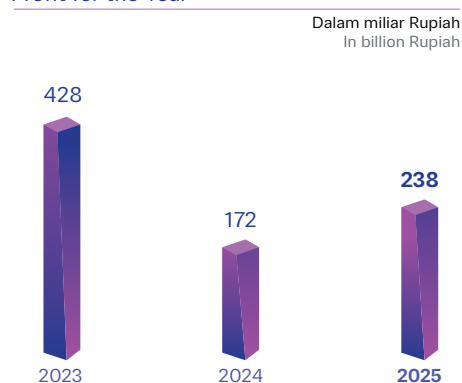
Total Comprehensive Income for the Year Attributable

In 2025, the Company recorded total comprehensive income of Rp259.55 billion, an increase of 66.15% or Rp103.34 billion compared to 2024 of Rp156.22 billion. The increase was mainly driven by higher profit for the year and improved other comprehensive income in 2025.

Penjualan Bersih Net Sales



Laba Bersih Tahun Berjalan Profit for the Year



Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statements of Cash Flows

(dalam juta Rupiah) (in million Rupiah)				
Uraian Description	2025	2024	Naik/Turun Increase/Decrease	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities				
Penerimaan dari Pelanggan Receipts from Customers	4.956.080	3.953.524	1.002.556	25,36
Pembayaran kepada Supplier Payments to Suppliers	(2.775.607)	(2.267.635)	(507.972)	22,40



(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Naik/Turun Increase/Decrease	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Pembayaran untuk Direksi dan Karyawan Payments to Directors and Employees	(1.003.274)	(844.673)	(158.601)	18,78
Pembayaran untuk Aktivitas Operasional Lainnya Payments for Other Operating Activities	(84.001)	(92.761)	8.760	(9,44)
Penerimaan Kas dari Bunga Deposito dan Jasa Giro Interest Income from Deposits and Current Account	83.186	87.275	(4.089)	(4,69)
Penerimaan Klaim Pajak Receipt of Tax Claim	25.371	43.542	(18.171)	(41,73)
Pembayaran Denda Pajak Payment of Tax Penalties	(603)	(175)	(428)	243,93
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Payment of Corporate Income Tax	(6.590)	(75.433)	68.844	(91,26)
Pembayaran Pajak Lainnya Payment of Other Taxes	(422.111)	(404.752)	(17.359)	4,29
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided from Operating Activities	772.451	398.911	373.540	93,64
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities				
Perolehan Aset Tak Berwujud Acquisition of Intangible Assets	(30.307)	(35.701)	5.394	(15,11)
Perolehan Aset Tetap Acquisition of Fixed Assets	(375.905)	(225.947)	(149.958)	66,37
Penerimaan Kas dari Penjualan Aset Tetap Proceeds from Sale of Fixed Assets	1.889	373	1.517	406,96
Penerimaan Kas Dividen Cash Dividends	-	21.319	(21.319)	(100,00)
Perolehan properti investasi Acquisition of Property Investment	(6.702)	-	(6.702)	100,00
Penambahan atas surat berharga yang dipasarkan Additional investment in marketable securities	-	20.000	(20.000)	(100,00)
Lainnya – bersih Others - net	1.550	2.861	(1.311)	(45,82)
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(409.474)	(217.096)	(192.378)	88,61
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities				
Pinjaman Bank Jangka Panjang Long-term Bank Loans				
Penerimaan Utang Bank Proceed from Bank Loans	132.708	153.267	(20.559)	(13,41)
Pembayaran Utang Bank Payment of Bank Loans	(340.570)	(255.338)	(85.232)	33,38
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan Payment of Interest and Finance Cost	(33.706)	(44.187)	10.481	(23,72)
Pembayaran Dividen Dividends Paid	(17.934)	(22.498)	4.564	(20,29)
Lainnya – bersih Others - net	-	(2.358)	2.358	(100,00)
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	(259.503)	(171.115)	(88.388)	51,65
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net increase in cash and cash equivalents	103.474	10.700	92.774	867,01

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Naik/Turun Increase/Decrease	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and cash equivalents at beginning of year	2.155.612	2.144.911	10.700	0,50
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and cash equivalents at end of year	2.259.086	2.155.612	103.474	4,80

Kas dan setara kas pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.259,09 miliar, mengalami peningkatan sebesar 4,80% atau sebesar Rp103,47 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.155,61 miliar. Penjelasan atas peningkatan tersebut adalah sebagai berikut:

Cash and cash equivalents in 2025 were recorded at Rp2,259.09 billion, an increase of 4.80% or Rp103.47 billion compared to 2024 of Rp2,155.61 billion. The details of this increase are as follows:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2025, arus kas dari aktivitas operasi tercatat sebesar Rp772,45 miliar, mengalami peningkatan 93,64% atau sebesar Rp373,54 miliar dibandingkan periode 2024 sebesar Rp398,91 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan.

Cash Flows from Operating Activities

In 2025, cash flows from operating activities amounted to Rp772.45 billion, an increase of 93.64% or Rp373.54 billion compared to 2024 of Rp398.91 billion. This increase was mainly influenced by higher receipts from customers.

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2025 tercatat sebesar negatif Rp409,47 miliar, mengalami kenaikan sebesar 88,61% atau sebesar Rp192,38 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar negatif Rp217,10 miliar. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan perolehan aset.

Cash Flows Used in Investing Activities

Cash flows used in investing activities in 2025 amounted to negative Rp409.47 billion, an increase of 88.61% or Rp192.38 billion compared to 2024 of negative Rp217.10 billion. This increase was mainly influenced by higher acquisition of assets.

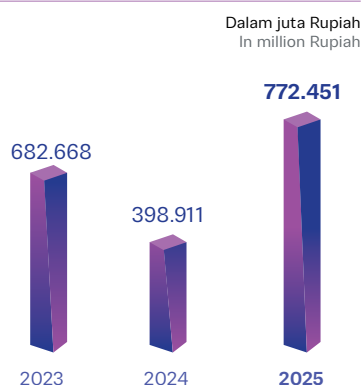
Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2025, pengeluaran arus kas dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar negatif Rp259,50 miliar, mengalami peningkatan sebesar 51,65% atau sebesar Rp88,39 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar negatif Rp171,12 miliar. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran pinjaman bank.

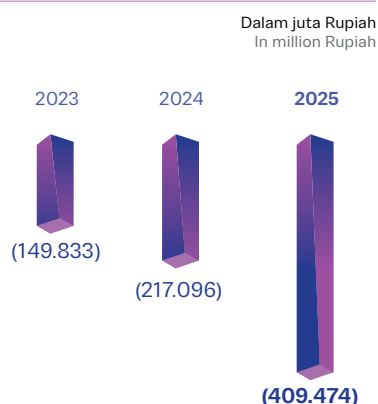
Cash Flows Used in Financing Activities

In 2025, cash outflows from financing activities amounted to negative Rp259.50 billion, an increase of 51.65% or Rp88.39 billion compared to 2024 of negative Rp171.12 billion. This increase was mainly influenced by higher bank loan repayments.

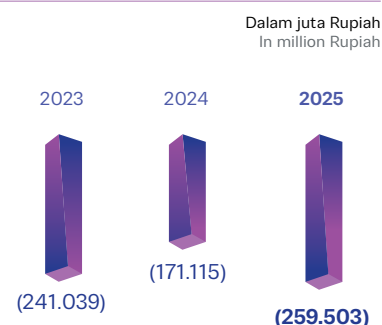
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities



Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investment Activities



Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities





Rasio Keuangan Penting

Perusahaan dalam menganalisis pencapaian kinerja keuangan dan operasional sepanjang tahun 2024 dan 2025 menggunakan beberapa rasio keuangan konsolidasian penting, diantaranya menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas.

Rasio likuiditas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini memberikan gambaran mengenai tingkat likuiditas suatu perusahaan. Kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dapat dianalisis melalui rasio kas dan rasio lancar, yang mencerminkan seberapa cepat perusahaan dapat mengonversi asetnya menjadi kas untuk membayar kewajiban tersebut.

Sedangkan, Rasio leverage atau solvabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan Perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, dengan memanfaatkan aset atau kekayaan yang dimiliki. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar risiko yang dihadapi perusahaan jika terjadi likuidasi atau penutupan. Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi cenderung memiliki risiko kerugian yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan rasio yang lebih rendah. Kemampuan solvabilitas ini dapat dianalisis melalui rasio liabilitas terhadap aset (*debt to asset ratio*) dan rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*).

Selain itu, Rasio profitabilitas sebagai indikator yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengukur sejauh mana keputusan dan kebijakan yang diambil oleh manajemen berhasil dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini memberikan gambaran mengenai efektivitas manajemen dalam mengelola Perusahaan, dan menjadi salah satu komponen utama dalam laporan keuangan, karena tujuan utama Perusahaan adalah mencapai hasil operasi yang menguntungkan. Pada tahun 2025, tingkat profitabilitas Perusahaan dapat dilihat melalui beberapa rasio, antara lain *Net Profit Margin*, *Return on Investment (ROI)*, dan *Return on Net Worth (RONW)*, yang menggambarkan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan dan aset yang dimiliki.

Key Financial Ratios

The Company, in analyzing the achievement of financial and operational performance throughout 2024 and 2025, uses several key consolidated financial ratios, including liquidity ratios, solvency ratios, and profitability ratios.

Liquidity ratios are indicators used to measure the Company's ability to meet its short-term obligations. These ratios provide an overview of the Company's liquidity level. The Company's ability to meet short-term obligations can be analyzed through the cash ratio and current ratio, which reflect how quickly the Company can convert its assets into cash to settle its liabilities.

Meanwhile, leverage or solvency ratios are measurement tools used to assess the Company's ability to meet all of its obligations, both short-term and long-term, by utilizing its assets or equity. These ratios provide an overview of the level of risk faced by the Company in the event of liquidation or closure. Companies with higher solvency ratios tend to have greater risk of loss compared to those with lower ratios. Solvency can be analyzed through the debt to asset ratio and debt to equity ratio.

In addition, profitability ratios are indicators used by the Company to measure the extent to which management decisions and policies are effective in generating profit. These ratios provide an overview of management effectiveness in managing the Company and are a key component of financial reporting, as the primary objective of the Company is to achieve profitable operations. In 2025, the Company's profitability level can be observed through several ratios, including *Net Profit Margin*, *Return on Investment (ROI)*, and *Return on Net Worth (RONW)*, which reflect the Company's ability to generate profit from its revenue and assets.

Kemampuan Membayar Utang

Debt Repayment Ability

Dalam menilai kemampuan Perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, digunakan sejumlah indikator keuangan, antara lain rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan Tingkat kemampuan Perusahaan dalam jangka pendeknya tercermin dalam rasio kas dan rasio lancar.

Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki Perusahaan dengan jumlah liabilitas jangka pendeknya sedangkan rasio lancar dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendeknya.

Rasio Likuiditas

Liquidity Ratios

Kinerja Keuangan Financial Performance	Hasil Perhitungan Rasio Ratio Calculation Result		Perubahan Change	
	2025	2024		
1	2	3	4=2-3	5=4:3
Rasio Kas/Cash Ratio (%)	117,90	131,18	-13,28	-10,12
Rasio Lancar/Current Ratio (%)	203,25	214,68	-11,44	-5,33

Hal ini berarti bahwa kas dan setara kas serta aset lancar Perusahaan mampu memenuhi liabilitas jangka pendek Perusahaan masing-masing sebanyak 1,17 dan 2,03 kali atau 1 Rupiah liabilitas jangka pendek Perusahaan dapat dijamin pembayarannya dengan 1,17 Rupiah kas dan setara kas serta aset lancar Perusahaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 Perusahaan mampu menutupi liabilitas lancarnya dengan menggunakan seluruh aset lancarnya.

Semakin besar nilai rasio akan semakin liquid dan Perusahaan dalam kondisi sehat.

In assessing the Company's ability to meet all of its obligations, both short-term and long-term, several financial indicators are used, including liquidity ratios and solvency ratios.

Liquidity Ratio

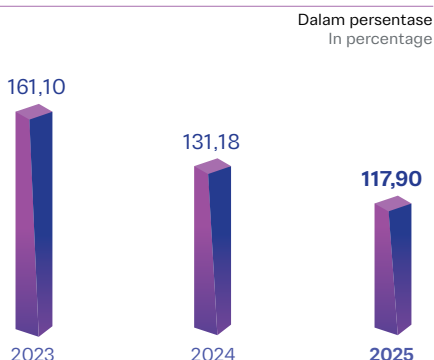
The liquidity ratio is a measure used to calculate the Company's ability to meet its short-term obligations. This ratio reflects the Company's short-term capability, which is represented by the cash ratio and the current ratio.

The cash ratio is calculated by comparing the Company's cash and cash equivalents with its total current liabilities, while the current ratio is calculated by comparing total current assets with total current liabilities.

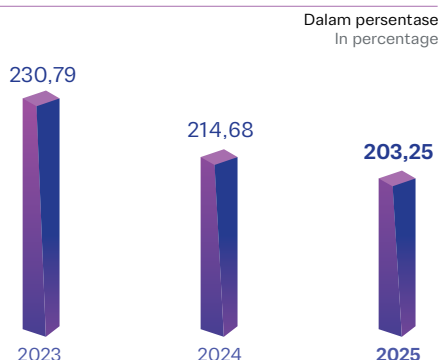
This means that the Company's cash and cash equivalents, as well as current assets, are sufficient to cover its short-term liabilities by 1.17 times and 2.03 times, respectively. In other words, each Rp1 of the Company's short-term liabilities can be covered by Rp1.17 of cash and cash equivalents and by the Company's current assets. This also indicates that throughout 2025, the Company was able to cover its current liabilities using its total current assets.

The higher the ratio value, the more liquid the Company is, indicating a healthier financial condition.

Rasio Kas Cash Ratio



Rasio Lancar Current Ratio





Rasio Leverage atau Solvabilitas

Rasio Leverage atau solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aset atau kekayaan yang dimiliki Perusahaan hingga Perusahaan tutup atau dilikuidasi. Perusahaan yang memiliki rasio solvabilitas yang tinggi maka memiliki risiko kerugian yang lebih besar daripada Perusahaan dengan rasio yang rendah. Kemampuan ini antara lain dapat diukur melalui rasio liabilitas terhadap aset (*debt to asset ratio*) dan rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*).

Rasio liabilitas terhadap aset (*debt to asset ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pendanaan Perusahaan dibiayai oleh liabilitas Perusahaan dibanding dengan total aset yang dimiliki oleh Perusahaan, dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset. Selain itu, kemampuan Perusahaan juga dapat diukur dari rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap Rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan liabilitasnya, dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas. Liabilitas sebaiknya modal sendiri agar beban Perusahaan tidak bertambah.

Rasio Solvabilitas Solvency Ratios

Kinerja Keuangan Financial Performance	Hasil Perhitungan Rasio Ratio Calculation Result		Perubahan Change	
	2025	2024		
1	2	3	4=2-3	5=4:3
Rasio Utang terhadap Aset Debt to Asset Ratio (%)	36,62	37,07	-0,45	-1,21
Rasio Utang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio (%)	57,79	58,91	-1,12	-1,90

Rasio liabilitas terhadap aset Perusahaan pada tahun 2025 tercatat sebesar 36,62% menurun 0,45% dibandingkan tahun 2024 sebesar 37,07%, hal ini menunjukkan bahwa pendanaan Perusahaan yang dibiayai oleh liabilitas Perusahaan sebesar 36,62% dari total aset yang dimiliki Perusahaan.

Rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) Perusahaan pada tahun 2025 tercatat sebesar 57,79% menurun 1,12% dibandingkan tahun 2024 sebesar 58,91%, hal ini menunjukkan besarnya pendanaan Perusahaan yang dibiayai oleh total liabilitas sebesar 57,79% dari total ekuitasnya.

Semakin besar nilai kedua rasio diatas, maka semakin besar liabilitas yang dimiliki Perusahaan, artinya semakin besar kewajiban Perusahaan yang harus dipenuhi.

Leverage Ratio or Solvency Ratio

The leverage ratio or solvency ratio is a ratio used to assess the Company's ability to settle all of its obligations, both short-term and long-term, using the collateral of its assets or wealth, up to the point the Company ceases operations or is liquidated. A Company with a high solvency ratio carries a higher risk of loss compared to a Company with a lower ratio. This ability can be measured, among others, through the debt to asset ratio and the debt to equity ratio.

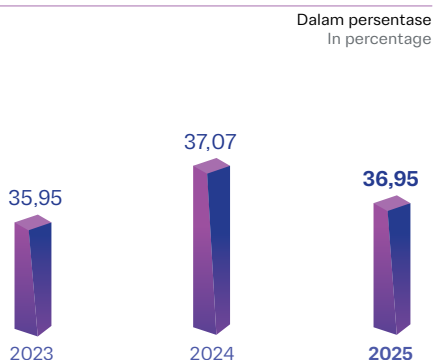
The debt to asset ratio is used to measure the extent to which the Company's financing is funded by liabilities in comparison with its total assets. It is calculated by comparing total liabilities to total assets. In addition, the Company's ability can also be measured using the debt to equity ratio, which is used to assess how much of each rupiah of equity is used as collateral for total liabilities. It is calculated by comparing total liabilities to total equity. Liabilities should ideally be lower than equity so that the Company's financial burden does not increase.

The Company's debt to asset ratio in 2025 was recorded at 36.62%, a decrease of 0.45% compared to 2024, which was 37.07%. This indicates that 36.62% of the Company's total assets were financed by liabilities.

The Company's debt to equity ratio in 2025 was recorded at 57.79%, a decrease of 1.12% compared to 2024, which was 58.91%. This shows that the Company's total liabilities amounted to 57.79% of its total equity.

The higher the value of these two ratios, the greater the Company's liabilities, meaning the higher the level of obligations that must be fulfilled by the Company.

Rasio Utang terhadap Aset Debt to Asset Ratio



Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen Perusahaan mampu menghasilkan keuntungan. Rasio ini mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya Perusahaan dan menjalankan operasi bisnisnya. Sebagai indikator utama dalam laporan keuangan, rasio profitabilitas sangat penting karena tujuan utama Perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang optimal dari operasionalnya.

Tingkat profitabilitas Perusahaan dapat dilihat melalui beberapa rasio kunci, antara lain *Net Profit Margin*, yang menunjukkan persentase keuntungan bersih dari total pendapatan; *Return on Investment (ROI)*, yang mengukur pengembalian terhadap investasi yang telah dilakukan oleh Perusahaan; serta *Return on Net Worth (RONW)*, yang menunjukkan seberapa efektif Perusahaan menghasilkan laba dari modal yang dimiliki.

Rasio Profitabilitas Profitability Ratios

Kinerja Keuangan Financial Performance	Hasil Perhitungan Rasio Ratio Calculation Result		Perubahan Change
	2025	2024	
<i>Net Profit Margin (%)</i>	5,65	4,56	1,09
<i>Return on Investment (%)</i>	9,01	8,60	0,41
<i>Return on Net Worth (%)</i>	5,22	3,89	1,33

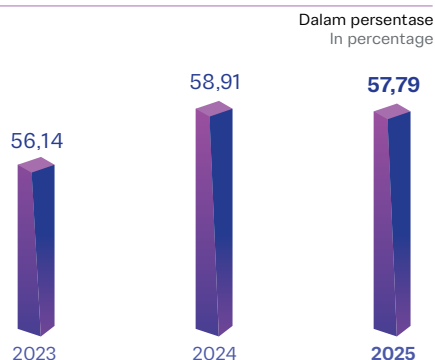
Rasio Net Profit Margin

Pada tahun 2025, Perusahaan mencatat rasio *net profit margin* sebesar 5,65%, berarti bahwa besarnya prosentase laba bersih yang diperoleh Perusahaan dari setiap penjualannya sebesar 5,65% atau meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,56%.

Return on Investment

Pada tahun 2025, Perusahaan mencatat rasio *return on investment* sebesar 9,01%, yang berarti bahwa besarnya persentase laba bersih yang diperoleh Perusahaan dari nilai investasi sebesar 9,01% atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 8,60%.

Rasio Utang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio



Profitability Ratio

The profitability ratio serves as a tool to assess the extent to which the policies and decisions made by the Company's management are able to generate profit. This ratio reflects management's effectiveness in managing the Company's resources and carrying out its business operations. As a key indicator in financial reporting, the profitability ratio is highly important, as the Company's primary objective is to generate optimal profit from its operations.

The Company's level of profitability can be observed through several key ratios, including *Net Profit Margin*, which shows the percentage of net profit relative to total revenue; *Return on Investment (ROI)*, which measures the return on investments made by the Company; and *Return on Net Worth (RONW)*, which indicates how effectively the Company generates profit from its equity.

Net Profit Margin Ratio

In 2025, the Company recorded a net profit margin ratio of 5.65%, indicating that the percentage of net profit generated from each sale was 5.65%, an increase compared to 4.56% in 2024.

Return on Investment

In 2025, the Company recorded a return on investment ratio of 9.01%, which means that the percentage of net profit generated from the value of investments was 9.01%, an increase compared to 8.60% in the previous year.



Return on Net Worth

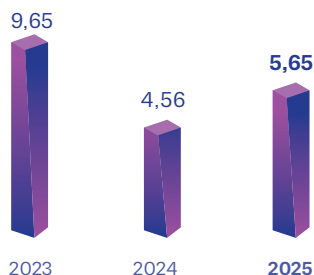
Perusahaan mencatat rasio *return on net worth* pada tahun 2025 sebesar 5,22% atau meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 3,89%. Hal ini terkait pula dengan penurunan saldo laba ditahan dalam ekuitas pada tahun 2025 yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba bersih tahun 2024.

Return on Net Worth

The Company recorded a return on net worth ratio of 5.22% in 2025, an increase compared to 3.89% in 2024. This is also related to the decrease in retained earnings within equity in 2025, which was higher than the net profit in 2024.

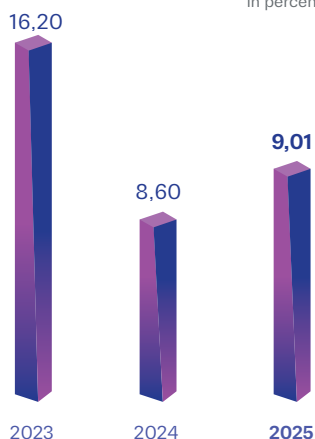
Margin Laba Bersih Net Profit Margin

Dalam persentase
In percentage



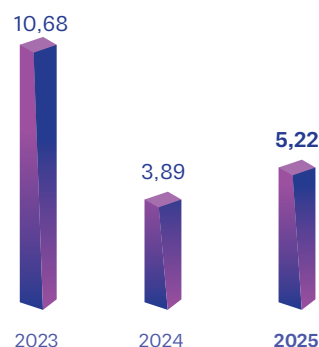
Rasio Pengembalian atas Investasi Return on Investment

Dalam persentase
In percentage



Rasio Pengembalian atas Kekayaan Bersih Return on Net Worth

Dalam persentase
In percentage



Tingkat Kolektibilitas Piutang Collectability of Receivables

Piutang usaha merupakan tagihan kepada pelanggan yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa dalam kegiatan operasional sehari-hari Perusahaan. Piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila diperkirakan dapat direalisasikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun, sedangkan piutang yang penyelesaiannya melebihi periode tersebut dicatat sebagai aset tidak lancar.

Perusahaan secara rutin melakukan evaluasi terhadap kolektibilitas piutang, baik itu piutang usaha maupun non-usaha. Jika terdapat piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih, maka Perusahaan akan membuat penyisihan untuk piutang tak tertagih. Pada tahun 2025, rasio *collection period* untuk piutang usaha Perusahaan tercatat sebesar 39 hari, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 61 hari.

Trade receivables represent claims against customers arising from the sale of goods or services in the Company's daily operational activities. These receivables are classified as current assets if they are expected to be realized within no more than one year, while receivables with settlement periods exceeding that timeframe are recorded as non-current assets.

The Company regularly evaluates the collectability of receivables, both trade and non-trade receivables. If any receivables are deemed uncollectible, the Company will recognize an allowance for doubtful accounts. In 2025, the Company's trade receivables collection period ratio was recorded at 39 days, a decrease compared to 61 days in 2024.

Kolektibilitas Piutang Collectability of Receivables

Kinerja Keuangan Financial Performance	Hasil Perhitungan Rasio Ratio Calculation Results		Perubahan Change	Persentase (%) Percentage
	2025	2024		
Collection Period (hari) Collection Period (days)	39	61	-22	-36,03

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Uraian Description	2025 (dalam juta rupiah) 2025 (in million rupiah)	Kontribusi (%) Contribution (%)	2024 (dalam juta rupiah) 2024 (in million rupiah)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Pertumbuhan Growth	
	1	2	3	4	Nominal (dalam juta rupiah) Nominal (in million rupiah)	%
					5=1-3	6=5:3
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.916.069	26,56	1.643.274	23,88	272.796	16,60
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	725.738	10,06	907.440	13,19	(181.701,90)	(20,02)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.641.808	36,62	2.550.714	37,07	91.093,90	3,57
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.571.476	63,38	4.329.856	62,93	241.619,20	5,58
Total Modal yang Diinvestasikan Total Invested Capital	7.213.283	100,00	6.880.570	100,00	332.713,11	4,84

Tujuan utama pengelolaan Perusahaan adalah menjaga rasio permodalan pada tingkat yang sehat guna mendukung keberlangsungan usaha serta pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian Indonesia yang terus berkembang, sekaligus memperhitungkan secara cermat berbagai risiko usaha yang dihadapi. Dengan demikian, pengelolaan modal diarahkan untuk memastikan ketersediaan fleksibilitas keuangan yang memadai dalam menunjang operasional Perusahaan, sekaligus meminimalkan potensi risiko di masa mendatang.

Komposisi struktur modal Perusahaan pada tahun 2025 lebih didominasi oleh ekuitas dibanding liabilitas. Pada tahun 2025, aset yang dibiayai ekuitas adalah 63,38% lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,58%. Sedangkan aset yang dibiayai liabilitas pada tahun 2025 adalah sebesar 36,62% lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 3,57%.

PERURI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Pendirian Perusahaan bertujuan untuk memberikan kemanfaatan umum, khususnya dalam penyediaan uang kertas dan uang logam Rupiah Republik Indonesia serta pencetakan dokumen sekuriti untuk kebutuhan dalam negeri. Selain itu, PERURI juga memproduksi uang dan berbagai produk sekuriti negara lainnya, serta menyediakan jasa berfitur sekuriti, termasuk pembuatan kertas sekuriti, tinta sekuriti, dan layanan digital sekuriti yang mendukung kepentingan negara.

The Company's main objective in capital management is to maintain a healthy capital ratio to support business continuity and sustainable business growth. This policy is established by taking into account the dynamics of the continuously evolving Indonesian economy, while carefully considering various business risks faced. Accordingly, capital management is directed to ensure sufficient financial flexibility to support the Company's operations, while minimizing potential risks in the future.

The Company's capital structure composition in 2025 was dominated by equity rather than liabilities. In 2025, assets financed by equity accounted for 63.38%, higher than in 2024 by 5.58%. Meanwhile, assets financed by liabilities in 2025 accounted for 36.62%, higher than in 2024 by 3.57%.

PERURI is a State-Owned Enterprise (SOE) fully owned by the Government of the Republic of Indonesia and is not divided into shares. The establishment of the Company aims to provide public benefits, particularly in the provision of Indonesian Rupiah banknotes and coins, as well as the printing of security documents for domestic needs. In addition, PERURI also produces currency and various other state security products, and provides security-featured services, including the production of security paper, security ink, and digital security services that support national interests.



Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Selama tahun 2025, PERURI memiliki kebijakan untuk membiayai sebagian besar kegiatan usahanya dengan menggunakan modal yang dimiliki.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

PERURI mengelola rencana struktur permodalan berdasarkan telaah dan penilaian dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan, perkiraan arus kas operasi, estimasi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan. PERURI dapat mengusahakan pendanaan melalui modal sendiri ataupun melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi.

Management Policy on Capital Structure

During 2025, PERURI adopted a policy of financing most of its business activities using internally generated capital.

Basis for Management Policy on Capital Structure

PERURI manages its capital structure plan based on review and assessment, taking into account future capital requirements, projected operating cash flows, estimated capital expenditures, and strategic investment opportunities. To maintain and adjust its capital structure, PERURI may seek funding through internal capital or make adjustments in response to changes in economic conditions.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025, Serta Proyeksi 2026

Comparison of Target and Realization for 2025, and Projection for 2026

Pembahasan mengenai target/proyeksi dan realisasi kinerja disajikan untuk memberikan gambaran atas pencapaian Perusahaan terhadap rencana yang telah ditetapkan pada awal tahun buku. Uraian ini mencakup perbandingan antara target, realisasi, dan proyeksi atas posisi keuangan konsolidasian, laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, arus kas konsolidasian, struktur modal, proyeksi kebijakan dividen, serta target lain yang dianggap penting bagi Perusahaan, yaitu penyerahan produk strategis.

The discussion on targets/projections and performance realization is presented to provide an overview of the Company's achievements against the plans established at the beginning of the financial year. This section covers a comparison between targets, realization, and projections for the consolidated statement of financial position, consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of cash flows, capital structure, projected dividend policy, and other targets considered important by the Company, namely strategic product deliveries.

Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Position

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2025 2025 Realization	RKAP 2025 2025 RKAP	% Pencapaian Target % Achievement of RKAP Target	RKAP 2026 2026 RKAP
Aset Lancar Current Assets	3.894.331	3.154.812	123,44	3.273.525
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	3.318.952	3.368.985	98,51	4.209.972
Jumlah Aset Total Assets	7.213.283	6.523.797	110,57	7.483.497
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.916.069	1.067.087	179,56	1.604.187
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	725.738	970.952	74,74	1.216.089
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.641.808	2.038.039	129,62	2.820.276
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.571.476	4.485.758	101,91	4.663.221
Jumlah Liabilitas & Ekuitas Total Liabilities & Equity	7.213.283	6.523.797	110,57	7.483.497

Pada tahun 2025, realisasi jumlah aset lancar tercatat sebesar Rp3.894,33 miliar atau 123,44% dari target 2025 sebesar Rp3.154,81 miliar dan realisasi aset tidak lancar sebesar Rp3.318,95 miliar atau 98,51% dari target tahun 2025 sebesar Rp3.368,99 miliar. Perusahaan memproyeksikan aset lancar pada tahun 2026 akan mencapai Rp3.273,53 miliar dan aset tidak lancar pada tahun 2026 akan mencapai Rp4.209,97 miliar.

In 2025, the realization of current assets was recorded at Rp3,894.33 billion or 123.44% of the 2025 target of Rp3,154.81 billion, while non-current assets amounted to Rp3,318.95 billion or 98.51% of the 2025 target of Rp3,368.99 billion. The Company projects that current assets in 2026 will reach Rp3,273.53 billion and non-current assets will reach Rp4,209.97 billion.

Realisasi jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.916,07 miliar atau 179,56% dari target tahun 2025 sebesar Rp1.067,09 miliar dan realisasi liabilitas jangka panjang sebesar Rp725,74 miliar atau 74,74% dari target tahun 2025 sebesar Rp970,95 miliar. Perusahaan memproyeksikan liabilitas jangka pendek pada tahun 2026 akan mencapai Rp1.604,19 miliar dan liabilitas jangka panjang akan mencapai Rp1.216,09 miliar.

The realization of current liabilities in 2025 was recorded at Rp1,916.07 billion or 179.56% of the 2025 target of Rp1,067.09 billion, while non-current liabilities amounted to Rp725.74 billion or 74.74% of the 2025 target of Rp970.95 billion. The Company projects that current liabilities in 2026 will reach Rp1,604.19 billion and non-current liabilities will reach Rp1,216.09 billion.

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2025 2025 Realization	RKAP 2025 2025 RKAP	Pencapaian Target (%) % Target Achievement	RKAP 2026 2026 RKAP
Penjualan Bersih Net Sales	4.221.832	4.687.004	90,08	6.564.868
Beban Pokok Penjualan Cost of Sales	(3.224.607)	(3.498.846)	92,16	(5.207.093)
Laba Kotor Gross Profit	997.225	1.188.158	83,93	1.357.776
Beban Usaha Operating Expenses	(781.011)	(891.514)	87,61	(1.027.192)
Beban Penjualan Selling Expenses	(29.723)	(44.702)	66,49	(56.539)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(751.288)	(846.812)	88,72	(970.653)
Pendapatan Keuangan Finance Income	84.917	86.399	98,28	59.438
Beban Keuangan Finance Costs	(34.122)	(49.218)	69,33	(51.621)
Bagian Laba dari Ventura Bersama Share of Profit from Joint Venture	5.085	3.151	161,40	36.684
Pendapatan (Beban) Lain Other Income (Expenses)	52.937	(24.921)	(212,42)	3.455
Sub Jumlah Subtotal	(672.195)	(876.104)	76,73	(979.237)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	325.031	312.054	104,16	378.539
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense				
Pajak Kini Current Tax	(98.856)	(86.149)	114,75	(96.172)
Pajak Tangguhan Deferred Tax	12.254	-	-	-
Jumlah Beban Pajak Penghasilan Total Income Tax Expense	(86.602)	(86.149)	100,53	(96.172)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	238.429	225.905	105,54	282.366

Uraian Description	Realisasi 2025 2025 Realization	RKAP 2025 2025 RKAP	Pencapaian Target (%) % Target Achievement	RKAP 2026 2026 RKAP
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Loss)				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Items not to be reclassified to profit or loss:				
Pengukuran kembali atas imbalan Pascakerja Remeasurement of post-employment benefits	27.089	-	100	-
Beban pajak terkait Related tax expense	(5.965)	-	100	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	259.553	225.905	114,89	282.366
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	235.045	225.165	104,39	281.282
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	3.384	741	456,81	1.085
Jumlah Total	238.429	225.905	105,54	282.366
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Income for the Year Attributable to:				
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for Year				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	259.669	225.165	115,32	281.282
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	(115)	741	(15,57)	1.085
Total Total	259.553	225.905	114,89	282.366

Pada tahun 2025, realisasi penjualan sebesar Rp4.221,83 miliar atau mencapai 90,08% dari target sebesar Rp4.687,00 miliar. Realisasi kinerja penjualan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Uang Kertas senilai Rp2.471,12 miliar atau mencapai 93,65% dari RKAP tahun 2025 senilai Rp2.638,80 miliar. Realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh dinamika rantai pasok kertas uang, kesiapan permesinan, serta ketersediaan bahan pendukung produksi.
- Uang Logam & Logam Non-Uang senilai Rp107,50 miliar atau mencapai 98,93% dari RKAP tahun 2025 senilai Rp108,66 miliar. Capaian tersebut terutama didukung oleh penyerahan Uang Logam RI yang sesuai dengan jumlah pesanan Rencana Cetak Uang (RCU), sementara realisasi Logam Non-Uang ditopang oleh produk medali, koin emas, dan stempel tera.
- Paspor dan Dokumen Sekuriti senilai Rp153,33 miliar atau mencapai 16,89% dari target RKAP tahun 2025 senilai Rp907,54 miliar. Realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh tidak terealisasinya pesanan Paspor RI sesuai rencana, sehingga pendapatan pada kelompok Paspor dan Dokumen Sekuriti berada jauh di bawah target meskipun terdapat kontribusi dari produk meterai, dokumen pertanahan, dan dokumen sekuriti dalam negeri.
- Pita Cukai senilai Rp409,79 miliar atau mencapai 110,72% dari RKAP tahun 2025 senilai Rp370,11 miliar. Hal ini sesuai dengan pesanan Order Bea Cukai (OBC) dari Ditjen Bea Cukai.

In 2025, sales realization amounted to Rp4,221.83 billion, or 90.08% of the target of Rp4,687.00 billion. The 2025 sales performance realization is as follows:

- Banknotes amounted to Rp2,471.12 billion, or 93.65% of the 2025 RKAP of Rp2,638.80 billion. This realization was mainly influenced by dynamics in the banknote paper supply chain, machine readiness, and the availability of production supporting materials.
- Coins & Non-Currency Metal amounted to Rp107.50 billion, or 98.93% of the 2025 RKAP of Rp108.66 billion. This achievement was mainly supported by the delivery of Indonesian coins in line with the Rencana Cetak Uang (RCU) order volume, while non-currency metal performance was supported by medals, gold coins, and official seals.
- Passport and Security Document amounted to Rp153.33 billion, or 16.89% of the 2025 RKAP target of Rp907.54 billion. This was mainly affected by the non-realization of Indonesian passport orders as planned, resulting in significantly lower revenue despite contributions from stamps, land documents, and domestic security documents.
- Excise Stamps amounted to Rp409.79 billion, or 110.72% of the 2025 RKAP of Rp370.11 billion, in line with Customs Order (OBC) from the Directorate General of Customs and Excise.

- › Digital senilai Rp873,98 miliar atau mencapai 239,48% dari RKAP tahun 2025 senilai Rp364,94 miliar. Realisasi ini terutama dipengaruhi oleh kontribusi pekerjaan BGN, SPBE, dan Smartcard.
- › Kontribusi Anak Perusahaan senilai Rp206,12 miliar atau mencapai 69,41% dari RKAP tahun 2025 senilai Rp296,96 miliar. Realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya capaian pendapatan pada beberapa anak perusahaan.

- › Digital segment amounted to Rp873.98 billion, or 239.48% of the 2025 RKAP of Rp364.94 billion. This realization was mainly driven by contributions from BGN, SPBE, and smartcard projects.
- › Subsidiaries contributed Rp206.12 billion, or 69.41% of the 2025 RKAP of Rp296.96 billion. This was mainly due to suboptimal revenue performance from several subsidiaries.

Arus Kas Konsolidasian Consolidated Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2025 2025 Realization	RKAP 2025 2025 RKAP	Pencapaian Target (%) % Target Achievement	RKAP 2026 2026 RKAP
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	772.451	496.105	155,70	642.351
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(409.474)	(798.342)	51,29	(827.033)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(259.503)	3.260	(7.958,99)	401.861
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	103.474	(298.976)	(34,61)	217.179
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	2.155.612	2.155.612	100,00	2.009.143
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	2.259.086	1.856.635	121,68	2.226.322

Pada tahun 2025, arus kas dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan masing-masing adalah Rp772,45 miliar, negatif Rp409,47 miliar dan negatif Rp 259,50 miliar sehingga saldo akhir kas dan setara kas tahun 2025 sebesar Rp2.259,09 miliar atau mencapai 121,68% dari target Rp1.856,64 miliar. Perusahaan menargetkan saldo akhir kas dan setara kas pada tahun 2026 sebesar Rp2.226,32 miliar. Pergerakan arus kas tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh arus kas operasi yang melampaui target, realisasi arus kas investasi yang digunakan lebih rendah dibandingkan rencana, serta arus kas pendanaan neto negatif yang terutama berasal dari pembayaran pinjaman bank, beban bunga dan keuangan, serta dividen setelah memperhitungkan penerimaan pinjaman bank.

In 2025, cash flows from operating, investing, and financing activities amounted to Rp772.45 billion, negative Rp409.47 billion, and negative Rp259.50 billion, respectively, resulting in an ending cash and cash equivalents balance of Rp2,259.09 billion, or 121.68% of the target of Rp1,856.64 billion. The Company targets an ending cash and cash equivalents balance of Rp2,226.32 billion in 2026. The 2025 cash flow movement was mainly influenced by operating cash flows that exceeded the target, lower-than-planned investing cash outflows, and net negative financing cash flows primarily driven by bank loan repayments, finance costs, and dividends, after taking into account bank loan proceeds.

Struktur Modal Konsolidasian Consolidated Capital Structure

(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in million rupiah, unless stated otherwise)

Uraian Description	Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Target (%) % Target Achievement	Proyeksi 2026 2026 Projection
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.067.087	1.916.069	179,56	1.604.187
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	970.952	725.738	74,74	1.216.089
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.038.039	2.641.808	129,62	2.820.276
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.485.758	4.571.476	101,91	4.663.221



(dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in million rupiah, unless stated otherwise)

Uraian Description	Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Target (%) % Target Achievement	Proyeksi 2026 2026 Projection
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	6.523.798	7.213.283	110,57	7.483.497
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (%) Debt to Total Liabilities and Equity Ratio (%)	31,24	36,62	117,23	37,69
Rasio Ekuitas terhadap Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (%) Equity to Total Liabilities and Equity Ratio (%)	68,76	63,38	92,17	62,31
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	45,43	57,79	127,19	60,48

Pada tahun 2025, struktur modal konsolidasian PERURI terdiri atas jumlah liabilitas sebesar Rp2.641,81 miliar atau 129,62% dari target 2025, serta jumlah ekuitas sebesar Rp4.571,48 miliar atau 101,91% dari target 2025. Jumlah liabilitas dan ekuitas tercatat sebesar Rp7.213,28 miliar atau 110,57% dari target 2025. Realisasi liabilitas yang berada di atas target terutama tercermin dari liabilitas jangka pendek yang mencapai Rp1.916,07 miliar atau 179,56% dari target, sedangkan liabilitas jangka panjang tercatat sebesar Rp725,74 miliar atau 74,74% dari target. Komposisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan pendanaan jangka pendek pada tahun berjalan, namun tetap diimbangi oleh basis ekuitas yang kuat.

Dari sisi komposisi pendanaan, struktur modal PERURI tahun 2025 tetap didominasi oleh ekuitas, dengan rasio ekuitas terhadap jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar 63,38%, sementara rasio liabilitas tercatat sebesar 36,62%. Rasio liabilitas terhadap ekuitas tercatat sebesar 57,79%, lebih tinggi dibandingkan target 2025 sebesar 45,43%, namun masih menunjukkan struktur permodalan yang relatif sehat karena ekuitas tetap lebih besar dibandingkan liabilitas. Pada tahun 2026, PERURI memproyeksikan jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar Rp7.483,50 miliar, dengan porsi liabilitas sebesar 37,69% dan ekuitas sebesar 62,31%. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa struktur modal PERURI tetap diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan penguatan permodalan dalam mendukung kesinambungan usaha.

Proyeksi Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen PERURI mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, serta arahan Pemilik Modal yang ditetapkan melalui Rapat Pembahasan Bersama (RPB). Pembagian laba dilakukan setiap akhir periode setelah laporan tahunan memperoleh persetujuan melalui RPB, dengan penetapan penggunaan laba untuk dividen dan cadangan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan dividen mempertimbangkan kinerja keuangan, kecukupan likuiditas, kebutuhan pendanaan operasional dan investasi, struktur permodalan, kesinambungan usaha, serta mandat strategis PERURI.

In 2025, PERURI's consolidated capital structure consisted of total liabilities of Rp2,641.81 billion, or 129.62% of the 2025 target, and total equity of Rp4,571.48 billion, or 101.91% of the 2025 target. Total liabilities and equity amounted to Rp7,213.28 billion, or 110.57% of the 2025 target. The realization of liabilities above target was mainly reflected in current liabilities, which reached Rp1,916.07 billion or 179.56% of the target, while non-current liabilities were recorded at Rp725.74 billion or 74.74% of the target. This composition indicates an increase in short-term funding needs during the year, while still being supported by a strong equity base.

In terms of funding composition, PERURI's capital structure in 2025 remained dominated by equity, with the equity to total liabilities and equity ratio at 63.38%, while the liability ratio stood at 36.62%. The debt to equity ratio was recorded at 57.79%, higher than the 2025 target of 45.43%, but still reflecting a relatively healthy capital structure as equity remained higher than liabilities. In 2026, PERURI projects total liabilities and equity of Rp7,483.50 billion, with a liability portion of 37.69% and equity of 62.31%. This projection indicates that PERURI's capital structure continues to be directed toward maintaining a balance between financing needs and capital strengthening in support of business sustainability.

Dividend Policy Projection

PERURI's dividend policy refers to the applicable laws and regulations governing State-Owned Enterprises, Government Regulation No. 6 of 2019 concerning Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, as well as directives from the Capital Owner as determined through the Joint Deliberation Meeting (RPB). Profit distribution is carried out at the end of each period after the annual financial statements have been approved through the RPB, with the allocation of profits to dividends and reserves. In its implementation, the dividend policy takes into account financial performance, liquidity adequacy, operational and investment funding needs, capital structure, business continuity, and PERURI's strategic mandate.

Target Lain yang Dianggap Penting Perusahaan

Selain indikator laba rugi, arus kas, dan struktur modal, PERURI juga menetapkan penyerahan produk strategis sebagai target lain yang dianggap penting dalam mengukur kinerja operasional Perusahaan.

Other Important Company Targets

In addition to profit or loss indicators, cash flows, and capital structure, PERURI also sets strategic product deliveries as other important targets in measuring the Company's operational performance.

Penyerahan Produk Strategis Strategic Product Deliveries

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2025 2025 Realization	RKAP 2025 2025 RKAP	Pencapaian Target (%) % Target Achievement	RKAP 2026 2026 RKAP
Uang Kertas Banknotes					
Uang Kertas RI Indonesian Banknotes	Juta Rupiah Million Rupiah	2.471.118	2.638.799	93,65	3.524.624
Uang Logam & Logam Non-Uang Coins & Non-Currency Metal					
Uang Logam RI Indonesian Coins	Juta Rupiah Million Rupiah	104.978	104.978	100,00	129.180
Logam Non-Uang DN Non-Currency Metal (Domestic)	Buah Pieces	5.218,00	7.794,00	66,95	7.110
Paspor & Dokumen Sekuriti Passport & Security Document					
Paspor RI Indonesian Passports	Juta Buku Million booklets	0,04	4,00	0,95	1,51
Meterai Stamp	Juta Keping Million pieces	400,85	330,00	121,47	330,00
Dokumen Pertanahan Land Documents	Juta Lembar Million sheets	4,49	2,21	203,60	4,00
Dokumen Sekuriti DN Domestic Security Documents	Juta Rupiah Million Rupiah	38.026,60	26.199,95	145,14	20.920,70
Pita Cukai dan Prangko Excise Stamps and Postage Stamps					
Pita Cukai dan MMEA DN Excise Stamps and Domestic MMEA	Juta LK Million LK	186,42	176,59	105,57	166,92
Prangko DN Domestic Postage Stamps	Juta Keping Million pieces	0,11	0,13	85,04	0,15
Digital					
Meterai Elektronik Electronic Stamps	Juta Keping Million pieces	50,03	48,40	103,37	50,50
Digital Product/Solution	Juta Rupiah Million Rupiah	22.917,28	40.110,51	57,14	101.997,86
Smartcard	Juta Rupiah Million rupiah	124.906,09	105.139,87	118,80	70.875,21
SPBE	Juta Rupiah Million rupiah	192.173,81	182.219,13	105,46	1.673.562,83
Badan Gizi Nasional National Nutrition Agency	Juta Rupiah Million rupiah	495.641,47	-	100	...



Pada tahun 2025, sejumlah produk dan layanan mencatat realisasi di atas target, antara lain Uang Logam RI sebesar 100,00%, Meterai sebesar 121,47%, Dokumen Pertanahan sebesar 203,60%, Dokumen Sekuriti DN sebesar 145,14%, Pita Cukai HT dan MMEA DN sebesar 105,57%, Meterai Elektronik sebesar 103,37%, *Smartcard* sebesar 118,80%, serta SPBE sebesar 105,46% dari RKAP 2025.

Di sisi lain, beberapa produk masih mencatat realisasi di bawah target, antara lain Uang Kertas RI sebesar 93,65%, Logam Non-Uang DN sebesar 66,95%, Paspor RI sebesar 0,95%, Prangko DN sebesar 85,04%, dan *Digital Product/Solution* sebesar 57,14% dari RKAP 2025. PERURI juga merealisasikan penugasan Badan Gizi Nasional senilai Rp495,64 miliar, yang tidak direncanakan dalam RKAP 2025, namun memberikan kontribusi penting terhadap kinerja layanan digital pada tahun berjalan.

Untuk tahun 2026, PERURI menetapkan sasaran penyerahan produk strategis dengan fokus pada penguatan layanan digital, produk sekuriti, dan dokumen negara. Hal ini tercermin dari target SPBE sebesar Rp1.673,56 miliar, Digital Product/Solution sebesar Rp101,99 miliar, Smartcard sebesar Rp70,88 miliar, Meterai Elektronik sebesar 50,50 juta keping, serta target produk sekuriti dan dokumen negara lainnya, seperti Meterai, Dokumen Pertanahan, Dokumen Sekuriti DN, Paspor RI, dan Pita Cukai HT dan MMEA DN.

Pencapaian Target Anak Perusahaan Tahun 2025

Secara umum, gambaran kinerja anak perusahaan pada tahun 2025 tercermin dalam laporan keuangan pokok masing-masing entitas anak sebagai berikut:

PT Kertas Padalarang (PT KP)

Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	% Pencapaian Target % Target Achievement
Aset Assets			
Aset Lancar Current Assets	106.767	117.281	109,85
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	69.769	75.065	107,59
Jumlah Aset Total Assets	176.536	192.346	108,96
Liabilitas & Ekuitas Liabilities & Equity			
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	37.793	53.052	140,37
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	14.955	15.281	102,18

In 2025, several products and services recorded realization above target, including Indonesian Coins at 100.00%, Stamps at 121.47%, Land Documents at 203.60%, Domestic Security Documents at 145.14%, HT and MMEA DN Excise Stamps at 105.57%, Electronic Stamps at 103.37%, Smartcards at 118.80%, and SPBE at 105.46% of the 2025 RKAP.

On the other hand, several products recorded realization below target, including Indonesian Banknotes at 93.65%, Non-Currency Metal Domestic at 66.95%, Indonesian Passport at 0.95%, Domestic Postage Stamps at 85.04%, and Digital Product/Solution at 57.14% of the 2025 RKAP. PERURI also realized the assignment for the National Nutrition Agency amounting to Rp495.64 billion, which was not planned in the 2025 RKAP, but contributed significantly to the performance of digital services during the year.

For the year 2026, PERURI has set targets for the delivery of strategic products with a focus on strengthening digital services, security products, and state documents. This is reflected in the SPBE target of Rp1,673.56 billion, Digital Product/Solution target of Rp101.99 billion, Smartcard target of Rp70.88 billion, Electronic Stamp target of 50.50 million pieces, as well as targets for other security products and state documents, such as Stamps, Land Documents, DN Security Documents, Indonesian Passports, and HT and MMEA DN Excise Stamps.

Achievement of Subsidiaries' Targets in 2025

In general, the performance of the subsidiaries in 2025 is reflected in the financial statements of each respective subsidiary as follows:

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	% Pencapaian Target % Target Achievement
Ekuitas Equity	123.787	124.013	100,18
Jumlah Liabilitas & Ekuitas Total Liabilities & Equity	176.536	192.346	108,96

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian **Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income**

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	% Pencapaian Target % Target Achievement
Penjualan Bersih Net Sales	207.085	189.315	91,42
Harga Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(164.408)	(150.217)	91,37
Laba (Rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	42.677	39.097	91,61
Biaya Usaha Operating Expenses	(35.407)	(32.538)	91,90
Pendapatan/(Biaya) Lain-lain: Other Income/(Expenses):			
Pendapatan Lain-lain Other Income	644	2.557	397,36
Biaya Lain-lain Other Expenses	(1.317)	(1.021)	77,53
Jumlah Total	(673)	1.536	428,17
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Profit/(Loss) Before Tax	6.596	8.096	122,73
Pajak Kini Current Tax	(1.668)	(2.890)	173,30
Pajak Tangguhan Deferred Tax	-	406	100,00
Pajak Tax	(1.668)	(2.484)	148,96
Laba/(Rugi) setelah pajak Profit/(Loss) After Tax	4.929	5.612	113,86
Beban Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Expenses for the Year	-	(457)	-
Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	4.929	5.154	104,58

Secara umum, berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pencapaian laporan posisi keuangan PT Kertas Padalarang melebihi pencapaian target tahun 2025. Posisi Aset pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp192,34 miliar atau mencapai 108,96% dari target RKAP tahun 2025 sebesar Rp176,53 miliar. Posisi Liabilitas jangka pendek pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp53,05 miliar atau mencapai 140,37% dari target RKAP tahun 2025 sebesar Rp37,79 miliar. Posisi Liabilitas jangka panjang pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp15,28 miliar atau mencapai 102,18% dari target RKAP tahun 2025 sebesar Rp14,96 miliar. Ekuitas pada tahun 2025 sebesar Rp124,01 miliar atau mencapai 100,18% dari target RKAP tahun 2025 sebesar Rp123,79 miliar.

In general, based on the table above, it can be seen that the realization of PT Kertas Padalarang's statement of financial position exceeded the 2025 target. Total assets in 2025 were recorded at Rp192.34 billion, reaching 108.96% of the 2025 RKAP target of Rp176.53 billion. Current liabilities in 2025 amounted to Rp53.05 billion, reaching 140.37% of the 2025 RKAP target of Rp37.79 billion. Non-current liabilities in 2025 were recorded at Rp15.28 billion, reaching 102.18% of the 2025 RKAP target of Rp14.96 billion. Equity in 2025 amounted to Rp124.01 billion, reaching 100.18% of the 2025 RKAP target of Rp123.79 billion.



Pada Laporan Laba (Rugi) tahun 2025, tercatat bahwa PT Kertas Padalarang membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp5,61 miliar atau mencapai 113,86% dari target RKAP tahun 2025 sebesar Rp4,93 miliar. Dari sisi penjualan, realisasi penjualan sektor kertas Banderol berada 104,77% di atas target RKAP Tahun 2025 yang disebabkan tingginya realisasi Order Bea Cukai (OBC) yang diterima dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2025. Sedangkan realisasi penjualan sektor Kertas Security NonBanderol berada di bawah target RKAP namun secara bauran produk terdapat beberapa kertas yang melebihi target RKAP diantaranya kertas meterai dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

PT Peruri Wira Timur (PT PWT)

Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	% Pencapaian Target % Target Achievement
Aset Assets			
Aset Lancar Current Assets	52.416	54.056	103,13
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	29.199	28.669	98,19
Jumlah Aset Total Assets	81.615	82.726	101,36
Liabilitas & Ekuitas Liabilities & Equity			
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	8.470	9.307	109,88
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	-	-	-
Ekuitas Equity	73.145	73.419	100,37
Jumlah Liabilitas & Ekuitas Total Liabilities & Equity	81.615	82.726	101,36

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	% Pencapaian Target % Target Achievement
Penjualan Bersih Net Sales	68.960	65.661	95,22
Harga Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(33.601)	(32.392)	96,40
Laba/(Rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	35.360	33.269	94,09
Biaya Usaha Operating Expenses	(24.341)	(22.537)	92,59

In the 2025 income statement, PT Kertas Padalarang recorded a net profit of Rp5.61 billion, reaching 113.86% of the 2025 RKAP target of Rp4.93 billion. From the sales perspective, realization in the stamp paper segment reached 104.77% above the 2025 RKAP target, driven by the high realization of Customs Orders (OBC) received from the Directorate General of Customs and Excise during 2025. Meanwhile, sales realization in the non-stamp security paper segment was below the RKAP target; however, within the product mix, several paper types exceeded targets, including stamp paper and Police Clearance Certificate (SKCK) paper.

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	% Pencapaian Target % Target Achievement
Pendapatan/(Biaya) Lain-lain: Other Income/(Expenses):			
Pendapatan Lain-lain Other Income	619	859	138,84
Biaya Lain-lain Other Expenses	(246)	(89)	36,20
Jumlah Total	373	770	206,52
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Profit/(Loss) Before Tax	11.391	11.502	100,97
Pajak Kini Current Tax	(2.848)	(1.986)	69,74
Pajak Tangguhan Deferred Tax	-	(440)	-
Pajak Tax	(2.848)	(2.426)	85,19
Laba/(Rugi)Setelah Pajak Profit/(Loss) After Tax	8.543	9.076	106,23
Beban Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Expenses for the Year	-	(259)	-
Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income/(Loss) for the Year	8.543	8.817	103,21

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa laporan posisi keuangan PT Peruri Wira Timur Per 31 Desember 2025 secara umum mencapai target. Posisi total aset terealisasi sebesar Rp82,73 miliar atau 101,36% dari RKAP Tahun 2025 sebesar Rp81,62 miliar, menunjukkan realisasi yang cukup terkendali. Pencapaian Aset Lancar sebesar 103,13% dari target RKAP Tahun 2025 membuktikan likuiditas yang cukup baik dan mendukung peningkatan aktivitas operasional, sementara Aset Tidak Lancar tercapai sebesar 98,19% mencerminkan penyesuaian belanja modal yang lebih selektif. Liabilitas Jangka Pendek tercapai sebesar Rp9,31 miliar atau mencapai 109,88% meningkat seiring ekspansi aktivitas yang dilakukan, namun hal tersebut masih proporsional dengan struktur aset dan tetap terjaga pada level kewajiban yang rendah ($\pm 11\%$ dari total aset). Ekuitas mencapai 100,37% atau sebesar Rp73,42 miliar dibandingkan dengan target RKAP Tahun 2025 sebesar Rp73,15 miliar. Hal ini menunjukkan permodalan Perusahaan cukup kuat untuk menjaga stabilitas sekaligus memiliki ruang yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ke depan.

Pada Laporan Laba/Rugi Tahun 2025, realisasi penjualan bersih sebesar Rp65,66 miliar atau mencapai 95,22% dari RKAP Tahun 2025 sebesar Rp68,96 miliar. Realisasi laba kotor sebesar Rp33,27 miliar atau mencapai 94,09% dibandingkan target RKAP 2025 sebesar Rp35,36 miliar. Realisasi pada biaya usaha sebesar Rp22,54 miliar atau mencapai 92,59% dari target RKAP Tahun 2025 sebesar Rp24,34 miliar. Realisasi laba bersih setelah pajak sebesar Rp9,08 miliar atau mencapai 106,23% dibandingkan dengan target RKAP Tahun 2025 sebesar Rp8,54 miliar.

Based on the table above, PT Peruri Wira Timur's statement of financial position as of 31 December 2025 generally achieved its planned targets. Total assets were realized at Rp82.73 billion, or 101.36% of the 2025 RKAP target of Rp81.62 billion, reflecting overall controlled and stable financial performance. Current assets reached 103.13% of the 2025 RKAP target, indicating adequate liquidity to support operational activities and business continuity. Non-current assets reached 98.19% of the target, reflecting a more measured and selective approach to capital expenditure during the year. Current liabilities amounted to Rp9.31 billion, or 109.88% of the RKAP target, in line with increased operational activities; however, this level remains proportionate to the Company's asset base and represents approximately 11% of total assets, indicating a still-conservative leverage position. Equity stood at Rp73.42 billion, or 100.37% of the RKAP target of Rp73.15 billion, demonstrating a solid capital position that supports financial stability and provides sufficient capacity for future growth.

On the income statement side, PT Peruri Wira Timur recorded net sales of Rp65.66 billion, or 95.22% of the 2025 RKAP target of Rp68.96 billion. Gross profit reached Rp33.27 billion, or 94.09% of the target, while operating expenses were efficiently managed at Rp22.54 billion, equivalent to 92.59% of the RKAP target. Despite slightly lower revenue realization, the Company delivered a stronger bottom-line performance, with net profit after tax reaching Rp9.08 billion, or 106.23% of the 2025 RKAP target of Rp8.54 billion, reflecting improved operational efficiency and stronger-than-expected profitability.



PT Peruri Properti (PT PEPRO)

Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	% Pencapaian Target % Target Achievement
Aset Assets			
Aset Lancar Current Assets	118.588	108.292	91,32
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	8.557	14.968	174,91
Jumlah Aset Total Assets	127.145	123.260	96,94
Liabilitas & Ekuitas Liabilities & Equity			
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	85.213	81.413	95,54
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	1.903	1.761	92,54
Ekuitas Equity	40.029	40.085	100,14
Jumlah Liabilitas & Ekuitas Total Liabilities & Equity	127.145	123.260	96,94

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	% Pencapaian Target % Target Achievement
Penjualan Bersih Net Sales	82.469	75.336	91,35
Harga Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(66.025)	(58.523)	88,64
Laba/(rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	16.444	16.813	102,24
Biaya Usaha Operating Expenses	(10.210)	(10.261)	100,50
Pendapatan/(Biaya) Lain-lain: Other Income/(Expenses):			
Pendapatan Lain-lain Other Income	35	53	150,86
Biaya Lain-lain Other Expenses	(2.302)	(2.442)	106,05
Jumlah Total	(2.267)	(2.388)	94,65
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Profit/(Loss) Before Tax	3.967	4.164	104,96
Pajak Kini Current Tax	(2.794)	(2.909)	104,11
Pajak Tangguhan Deferred Tax	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	% Pencapaian Target % Target Achievement
Pajak Tax	(2.794)	(2.909)	104,11
Laba/(Rugi) Setelah Pajak Profit/(Loss) After Tax	1.173	1.255	106,98
Beban Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Expenses for the Year	-	(25)	-
Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income/(Loss) for the Year	1.173	1.230	104,83

Realisasi total aset PT Peruri Properti pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp123,26 miliar atau mencapai 96,94% dari target RKAP tahun 2025 sebesar Rp127,15 miliar. Realisasi aset tidak lancar tercapai sebesar 174,91%. Hal ini disebabkan karena adanya optimalisasi aset berupa investasi properti di area Palatehan (Perum Peruri) yaitu pembuatan lapangan Padel serta perbaikan infrastruktur pada area tersebut. Pembangunan ini bertujuan untuk aktivasi di area tersebut guna menunjang ekosistem *sport* (olahraga) dan *Food and Beverage* (FnB) yang dapat menghubungkan area lapangan Padel, Mbloc, KALA, dan Taman Kota PERURI.

Tidak tercapainya liabilitas jangka pendek Pepro disebabkan karena adanya pembayaran pokok utang bank sebagai upaya untuk mengefisienkan beban bunga. Selain itu, juga terdapat peningkatan pendapatan diterima dimuka pada liabilitas lancar yang disebabkan atas penerimaan *down payment* (DP) untuk pekerjaan *Adaptive Reuse*.

Sedangkan dari Laporan Laba (Rugi) tahun 2025 tercatat bahwa mencatat laba bersih tahun berjalan sebesar Rp1,26 miliar atau mencapai 106,98% dari target RKAP tahun 2025 sebesar Rp1,17 miliar. Realisasi atas pendapatan sebesar Rp75,3 4 sebesar Rp82,47 miliar. Realisasi pendapatan tersebut terdiri atas Pengelolaan Aset sebesar sebesar Rp8,93 miliar, Building Management sebesar Rp4,5 miliar atau mencapai 108,43% dari RKAP 2025 sebesar Rp4,21 miliar, dan Kontruksi sebesar Rp58,30 miliar atau mencapai 84,19% dari RKAP 2025 sebesar Rp69,32 miliar. Ketidakcapaian kontruksi disebabkan karena mundurnya beberapa proyek yang semula direncanakan akan terealisasi di 2025, namun bergeser ke tahun 2026. Di satu sisi, realisasi atas pengelolaan aset yang melebihi RKSP 2025 memiliki kontribusi yang lebih baik sehingga menyebabkan laba bersih tercapai.

The realization of PT Peruri Properti's total assets in 2025 was recorded at Rp123.26 billion, or 96.94% of the 2025 RKAP target of Rp127.15 billion. The underperformance in total assets was mainly influenced by lower realization of current assets, while non-current assets reached 174.91% of the target. This increase in non-current assets was driven by the optimization of property assets through investments in the Palatehan area (Perum Peruri), including the development of a padel court and infrastructure improvements. These developments aim to activate the area and support a sports and Food and Beverage (F&B) ecosystem, connecting the padel court area, Mbloc, KALA, and Taman Kota PERURI.

The lower realization of current liabilities was primarily due to bank loan principal repayments as part of efforts to optimize interest expenses. In addition, there was an increase in unearned revenue under current liabilities, driven by down payments received for Adaptive Reuse projects.

From the income statement perspective, PT Peruri Properti recorded net profit for the year of Rp1.26 billion, achieving 106.98% of the 2025 RKAP target of Rp1.17 billion. Total revenue realization amounted to Rp75.34 billion, compared to the RKAP target of Rp82.47 billion. Revenue consists of Asset Management of Rp8.93 billion, Building Management of Rp4.50 billion (108.43% of the 2025 RKAP target of Rp4.21 billion), and Construction of Rp58.30 billion (84.19% of the 2025 RKAP target of Rp69.32 billion). The lower realization in the construction segment was mainly due to the postponement of several projects originally planned for 2025, which have been shifted to 2026. On the other hand, the stronger performance in the asset management segment, which exceeded the RKAP target, contributed positively to overall profitability, resulting in the achievement of net profit for the year.



PT Peruri Digital Security (PT PDS) dan Entitas Anak

Laporan Posisi Keuangan
Statement of Financial Position(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	% Pencapaian Target % Target Achievement
Aset Assets			
Aset Lancar Current Assets	57.792	57.469	99,44
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	99.249	97.854	98,59
Jumlah Aset Total Assets	157.041	155.323	98,91
Liabilitas & Ekuitas Liabilities & Equity			
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	113.402	107.555	94,84
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	124.530	130.089	104,46
Ekuitas Equity	(80.891)	(82.321)	101,77
Jumlah Liabilitas & Ekuitas Total Liabilities & Equity	157.041	155.323	98,91

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	% Pencapaian Target % Target Achievement
Penjualan Bersih Net Sales	193.165	174.731	90,46
Harga Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	(150.171)	(140.988)	93,89
Laba/(rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	42.994	33.744	78,48
Biaya Usaha Operating Expenses	(31.031)	(28.444)	91,66
Pendapatan/(Biaya) Lain-lain: Other Income/(Expenses):			
Pendapatan Lain-lain Other Income	546	7.123	1.305,70
Biaya Lain-lain Other Expenses	(10.370)	(10.288)	99,21
Jumlah Total	(9.824)	(3.165)	167,79
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Profit/(Loss) Before Tax	2.139	2.135	9,80
Pajak Kini Current Tax	-	-	-
Pajak Tangguhan Deferred Tax	-	(935)	-
Pajak Tax	-	(935)	-

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	% Pencapaian Target % Target Achievement
Laba/(Rugi) Setelah Pajak Profit/(Loss) After Tax	2.139	1.200	56,10
Beban Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Expenses for the Year	-	(491)	-
Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income/(Loss) for the Year	2.139	709	33,16

Berdasarkan tabel di atas, total Aset konsolidasian pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp155,32 miliar atau 98,91% dari target RKAP tahun 2025 sebesar Rp157,04 miliar. Sedangkan Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian tahun 2025 tercatat bahwa PT PDS mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp1,20 miliar atau tercapai sebesar 56,10% dari target laba RKAP 2025 sebesar Rp2,14 miliar.

Berdasarkan aspek posisi keuangan, Perusahaan telah melakukan pengelolaan dengan baik dan cukup terkendali dengan mencapai target RKAP sebesar 98,91%. Meskipun kinerja laba (rugi) masih belum mencapai target RKAP, namun manajemen senantiasa melakukan pengelolaan aset maupun liabilitas dengan baik. Sehingga realisasi dari posisi keuangan Perusahaan dapat terkendali sesuai target RKAP.

Kemudian dari aspek kinerja laba rugi, Perusahaan mencapai target RKAP sebesar 56,10%. Hal ini dikarenakan belum tercapainya pendapatan operasional selama tahun 2025 (tercapai 90,46%). Dengan adanya ketidakcapaian pendapatan operasional tersebut, maka manajemen melakukan *monitoring* dan pengendalian beban usaha (*operating expenditure*) agar *cost structure* dari beban usaha tetap terkendali sesuai dengan RKAP. Meski demikian, adanya beban bunga bank maupun *shareholder loan* turut menekan kinerja laba rugi Perusahaan.

Based on the table above, total consolidated assets in 2025 were recorded at Rp155.32 billion, or 98.91% of the 2025 RKAP target of Rp157.04 billion. Meanwhile, the 2025 consolidated statement of profit or loss shows that PT PDS recorded profit for the year of Rp1.20 billion, or 56.10% of the 2025 RKAP target of Rp2.14 billion.

From a financial position perspective, the Company's performance was well managed and remained under control, achieving 98.91% of the RKAP target. Although profitability has not yet reached the RKAP target, management consistently maintained sound control over both assets and liabilities. As a result, the Company's financial position remained stable and aligned with the planned targets.

From a profit and loss perspective, the Company achieved 56.10% of the RKAP target. This was mainly due to the underperformance of operating revenue in 2025, which reached 90.46% of the target. In response, management implemented strict monitoring and control over operating expenditures to ensure that the cost structure remained in line with the RKAP. However, finance costs, including bank interest and shareholder loans, continued to exert pressure on the Company's profitability.



Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts after the Date of the Accountant's Report

Manajemen telah melakukan pembayaran insentif dan jasa produksi atas Tahun Buku 2025 kepada seluruh karyawan pada bulan Februari 2026 setelah laporan keuangan audited 2025 diterbitkan.

Management has distributed employee incentives and production service bonuses for the Fiscal Year 2025 to all employees in February 2026, following the issuance of the audited financial statements for 2025.

Kebijakan dan Pembayaran Dividen

Dividend Policy and Payments

Kebijakan dividen atau pembagian laba PERURI ditetapkan setelah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan memperoleh persetujuan dari Pemilik Modal dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB). Laba yang diperoleh Perusahaan selanjutnya dialokasikan sesuai keputusan Pemilik Modal, termasuk untuk pembayaran dividen tunai kepada Negara Republik Indonesia serta pembentukan cadangan sesuai ketentuan yang berlaku.

PERURI's dividend or profit distribution policy is determined after the Annual Report and Financial Statements have been approved by the Capital Owner in the Joint Deliberation Meeting (RPB). The Company's profit is subsequently allocated in accordance with the Capital Owner's decision, including cash dividend payments to the Government of the Republic of Indonesia and the establishment of reserves in accordance with applicable regulations.

Pada tahun 2025 dan 2024, PERURI membagikan dividen tunai masing-masing sebesar Rp16,74 miliar dan Rp21,24 miliar. Pembagian dividen tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Pemilik Modal No. S-383/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025 untuk tahun buku 2024 dan Surat Pemilik Modal No. S-346/MBU/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 untuk tahun buku 2023.

In 2025 and 2024, PERURI distributed cash dividends amounting to Rp16.74 billion and Rp21.24 billion, respectively. The dividend distributions were determined based on Capital Owner Letter No. S-383/MBU/06/2025 dated 30 June 2025 for the 2024 financial year, and Capital Owner Letter No. S-346/MBU/06/2024 dated 28 June 2024 for the 2023 financial year.

Rincian kebijakan dan pembayaran dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir adalah sebagai berikut:

The details of dividend policy and payments for the last two (2) financial years are as follows:

Uraian Description	Tahun Buku 2024 Fiscal Year 2024	Tahun Buku 2023 Fiscal Year 2023
Dasar Penetapan Basis of Determination	Surat Pemilik Modal No. S-383/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025 Capital Owner Letter No. S-383/MBU/06/2025 dated June 30, 2025	Surat Pemilik Modal No. S-346/MBU/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 Capital Owner Letter No. S-346/MBU/06/2024 dated June 28, 2024
Laba Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Net Profit Attributable to Owners of the Parent Entity	Rp168.241.660.681	Rp424.711.103.722
Jumlah Dividen yang Dibayarkan Total Cash Dividends Paid	Rp16.740.811.007	Rp21.235.555.186
Rasio Dividen terhadap Laba Bersih Dividend Payout Ratio	9,95%	5,00%
Tanggal Pembayaran Dividen Kas Cash Dividend Payment Date	4 Desember 2025 December 4, 2025	19 Juli 2024 July 19, 2024
Dividen per Saham Dividend per Share	Tidak berlaku Not applicable	Tidak berlaku Not applicable

Pajak dan Kontribusinya bagi Negara

Taxes and Contribution to the State

PERURI senantiasa berkomitmen untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemenuhan administrasi perpajakan, pelaporan pajak, serta pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Pengelolaan aspek perpajakan PERURI dilaksanakan melalui kerangka governansi yang terstruktur, mencakup proses identifikasi kewajiban perpajakan, perhitungan, pembayaran, pelaporan, dokumentasi, serta pemantauan berkala atas pemenuhan kewajiban pajak.

Selama tiga tahun terakhir, PERURI tidak pernah memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apa pun. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan senantiasa menjaga kepatuhan perpajakan dan memastikan bahwa pengelolaan kewajiban perpajakan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rincian kontribusi pembayaran kepada Pemerintah berdasarkan arus kas berupa pajak dan PNPB PERURI Induk kepada negara pada tahun buku 2025 selama tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

PERURI is consistently committed to fulfilling its tax obligations in accordance with applicable laws and regulations. This commitment is demonstrated through timely compliance with tax administration, tax reporting, and tax payments in accordance with prevailing requirements.

PERURI's tax management is carried out through a structured governance framework, covering the identification of tax obligations, tax calculation, payment, reporting, documentation, and periodic monitoring of tax compliance.

Over the past three years, PERURI has never been found guilty by the highest tax court in relation to any tax-related matters. This reflects the Company's strong tax compliance and its prudent, transparent, and regulation-compliant management of tax obligations.

Details of PERURI Induk's cash flow-based payments to the government in the form of taxes and non-tax state revenue for the 2025 fiscal year and the preceding three years are presented as follows:

(dalam juta rupiah)
(in million rupiah)

Keterangan Description	2025	2024	2023
A. Pajak Taxes:			
Pajak Penghasilan (PPh) Income Tax (PPh)	167.777	232.726	217.617
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Value Added Tax (VAT) & Luxury Goods Sales Tax (PPnBM)	233.384	209.757	313.672
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPRD), termasuk PBB P2 (Perkotaan dan Pedesaan) Regional Taxes and Levies (DPRD), including Urban and Rural Land and Building Tax (PBB P2)	14.649	13.872	13.571
Sub Jumlah Subtotal	415.810	456.354	544.860
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non-Tax State Revenue (PNBP):			
Dividen Dividend	16.741	21.236	-
PNBP Lainnya Other Non-Tax Revenues	546	214	27
Sub Jumlah Subtotal	17.287	21.449	27
Jumlah Kontribusi Kepada Negara Total Contribution to the State	433.097	477.803	544.887



Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

PERURI bukan merupakan perusahaan publik maupun emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hingga akhir tahun 2025, PERURI tidak melakukan penawaran umum, baik saham, obligasi, maupun instrumen pasar modal lainnya, sehingga tidak terdapat informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

PERURI is not a public company or an issuer listed on the Indonesia Stock Exchange. As of the end of 2025, PERURI did not conduct any public offering, whether of shares, bonds, or other capital market instruments. Therefore, there is no information on the realization of the use of proceeds from public offering to be disclosed.

Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information on Investments, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

Sepanjang tahun buku 2025 PERURI tidak melakukan transaksi material berupa investasi strategis, ekspansi usaha baru, divestasi, penggabungan usaha, peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang, restrukturisasi modal, maupun transaksi material lainnya di luar kegiatan usaha normal Perusahaan.

Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai tanggal, nilai, objek transaksi, pihak yang melakukan transaksi, maupun penjelasan kewajaran transaksi atas transaksi material insidental tersebut.

Throughout the 2025 financial year, PERURI did not undertake any material transactions, including strategic investments, new business expansion, divestments, mergers, consolidations, acquisitions, debt restructuring, capital restructuring, or other material transactions outside the Company's normal business activities.

Accordingly, there is no information to disclose regarding transaction dates, values, objects, involved parties, or explanations of transaction fairness related to such incidental material transactions.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Material Information on Transactions with Conflict of Interest and/or Related Party Transactions

Pada tahun 2025, tidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi yang terjadi adalah transaksi dengan para pihak berelasi.

In 2025, there were no material transactions involving conflicts of interest and/or related parties that fall under incidental material transactions.

Perusahaan melakukan transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai PSAK Nomor 224 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", dimana dari definisi pihak-pihak berelasi sesuai PSAK Nomor 224 adalah orang atau entitas yang terkait dengan PERURI atau entitas pelapor.

The Company conducts transactions with several related parties in accordance with PSAK No. 224 on "Related Party Disclosures," where related parties are defined as individuals or entities that are related to PERURI (the reporting entity).

Definisi pihak berelasi adalah sebagai berikut: Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang terkait dengan PERURI (entitas pelapor).

A related party is defined as follows: a related party is a person or entity that is related to PERURI (the reporting entity).

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian Bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait entitas dengan entitas lain);
 - f. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

1. A person or close family member is related to the reporting entity if that person:
 - a. Has control or joint control over the reporting entity;
 - b. Has significant influence over the reporting entity; or
 - c. Is a member of key management personnel of the reporting entity or its parent entity.
2. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions apply:
 - a. The entity and the reporting entity are members of the same group (i.e., parent, subsidiary, and fellow subsidiaries are related to each other);
 - b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is also a member);
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the same third entity;
 - e. The entity and the reporting entity are members of the same group;
 - f. One entity is an associate or joint venture of the other entity;



- g. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- h. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- i. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- j. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan Bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a;
- k. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

- g. Both entities are joint ventures of the same third party;
- h. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- i. The entity is a post-employment benefit plan for employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related;
- j. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1)(a);
- k. A person identified in (1)(a)(i) has significant influence over the entity or is part of its key management personnel (or of a parent entity).

Entitas berelasi dengan Pemerintah merupakan entitas yang berada di bawah pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan Pemerintah. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan Pemerintah adalah BP BUMN.

Sesuai dengan PSAK No. 224, PERURI dan entitas anak menerapkan ketentuan pengecualian yang membebaskan kewajiban penyajian informasi secara sangat rinci atas transaksi dan saldo dengan pihak berelasi. Meskipun demikian, hubungan dengan entitas yang memiliki keterkaitan dengan Pemerintah beserta transaksi dan saldo terkait tetap diungkapkan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip transparansi serta kepatuhan terhadap standar akuntansi yang relevan.

Tanggal, Nilai, dan Objek Transaksi

Untuk transaksi material insidental sebagaimana disebutkan di atas, sepanjang tahun buku 2025 tidak terdapat transaksi yang dilakukan oleh PERURI. Oleh karena itu, tidak terdapat tanggal, nilai, maupun objek transaksi yang perlu diungkapkan.

Untuk transaksi dengan pihak berelasi yang bersifat rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, transaksi dilakukan sepanjang tahun buku 2025 dalam rangka mendukung kegiatan usaha dan operasional Perusahaan. Nilai transaksi dan saldo disajikan berdasarkan posisi 31 Desember 2025 sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025.

Rincian realisasi transaksi dengan pihak berelasi pada tahun buku 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

An entity is also considered related to the Government if it is under the control, joint control, or significant influence of the Government. In this context, "Government" refers to the BP BUMN.

In accordance with PSAK No. 224, PERURI and its subsidiaries apply exemption provisions that relieve the requirement for highly detailed disclosure of transactions and balances with related parties. Nevertheless, relationships with government-related entities, as well as the related transactions and balances, are still disclosed in accordance with applicable standards, emphasizing transparency and compliance with relevant accounting standards.

Transaction Date, Value, and Object

For incidental material transactions as described above, no such transactions occurred during the 2025 financial year. Therefore, there are no transaction dates, values, or objects to disclose.

For recurring, routine, and/or ongoing related party transactions, such transactions were conducted throughout the 2025 financial year to support the Company's business and operational activities. Transaction values and balances are presented as of December 31, 2025 as disclosed in the 2025 Consolidated Financial Statements.

Details of related party transactions for the 2025 and 2024 financial years are as follows:

Realisasi Transaksi dengan Pihak Berelasi Realization of Transactions with Related Parties

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian Description	2025	2024
Aset Assets		
Bank Cash in Banks	799.541	479.974
Deposito Deposits	1.398.805	1.471.666
Piutang usaha Trade Receivables	18.309	17.693
Piutang lain-lain Other Receivables	356	288
Aset tidak lancar lainnya Other Non-Current Assets	55.173	54.459
Liabilitas Liabilities		
Utang usaha Trade Payables	423.605	266.315
Pinjaman bank Bank Loans	297.268	504.815
Beban Expenses		
Beban bunga pinjaman Interest Expense on Loans	25.591	41.191

Nama Pihak yang Melakukan Transaksi dan Sifat Hubungan Berelasi

Names of Parties Conducting Transactions and Nature of Related Party Relationships

Daftar Pihak Berelasi List of Related Parties

No.	Nama Pihak Name of Party	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi Transaction
1	Pemerintah Republik Indonesia	Pemilik Modal Shareholder	Pemilik Modal, Dividen Shareholder, dividend
2	PT Sicpa Peruri Securink	Investasi pada Ventura Bersama Investment in joint venture	Pinjaman Pemegang Saham dan pembelian bahan baku Shareholder loan purchase of raw materials and Sales
3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Kas dan Setara Kas dan Pinjaman Cash and cash equivalents, and loans
4	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Kas dan Setara Kas, Pinjaman dan Penjualan Cash and cash equivalents, loans and sales
5	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Kas dan Setara Kas, Aset yang Dibatasi Penggunaannya, Pinjaman dan Penjualan Cash and cash equivalents, restricted assets, loans and sales
6	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Cash and cash equivalents, loans
7	PT Pertamina (Persero)	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Penjualan Sales
8	PT Pos Indonesia (Persero)	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Penjualan Sales
9	PT Industri Kereta Api (Persero)	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Penjualan Sales



No.	Nama Pihak Name of Party	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi Transaction
10	PT Utama Karya (Persero)	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Penjualan Sales
11	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Penjualan Sales
12	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Penjualan Sales
13	Perum Percetakan Negara RI	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Penjualan Sales
14	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Penjualan Sales
15	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Penjualan Sales
16	PT Len Industri (Persero)	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Penjualan Sales
17	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Penjualan Sales
18	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Penjualan Sales
19	PT Brantas Abipraya	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Penjualan Sales
20	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara State Owned Entity	Pembelian Purchase
21	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Kas dan Setara Kas Cash and cash equivalents
22	PT Jasaraharja Putera	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Asuransi Aset, Penjualan Assets insurance, Sales
23	PT Asuransi Jasa Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Asuransi Aset Assets insurance
24	PT BGR Logistik Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Jasa Pemindahan Handling service
25	PT Pegadaian	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
26	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
27	PT Kawasan Industri Terpadu Batang	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
28	PT Mandiri Sekuritas	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
29	PT Jaminan Kredit Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
30	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
31	PT PP Presisi	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
32	PT Telkom Akses	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
33	PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
34	PT Borneo Alumina Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
35	PT Pupuk Kalimantan Timur	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
36	PT Pupuk Iskandar Muda	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
37	PT Pupuk Kujang Cikampek	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
38	PT Pupuk Indonesia Niaga	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales

No.	Nama Pihak Name of Party	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi Transaction
39	PT Pupuk Indonesia Utilitas	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
40	PT Pupuk Indonesia Logistik	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
41	PT Rekayasa Industri	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
42	PT Balebat Desikasi Prima	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
43	PT Terminal Petikemas Surabaya	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
44	PT Asuransi Jiwa Taspen	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
45	PT Varia usaha Beton	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
46	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
47	PT Kawasan Industri Makasar	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
48	PT PLN Nusantara Power	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
59	PT Kawasan Berikat Nusantara	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
50	PT Saka Energi Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
51	PT Indonesia Comnets Plus	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
52	PT BRI Multifinance Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan, Pembelian Sales, Purchase
53	PT Sucofindo	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan, Pembelian Sales, Purchase
54	PT Sigma Cipta Caraka	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan, Pembelian Sales, Purchase
55	PT Kimia Farma Diagnostika	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Pembelian Purchase
56	PT Bahana Sekuritas	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan Sales
57	PT BRI Asuransi Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Penjualan, Pembelian Sales, Purchase
58	PT Administrasi Medika	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Pembelian Purchase
59	PT Infomedia Nusantara	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Pembelian Purchase
60	PT PINS Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Pembelian Purchase
61	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Pembelian Purchase
62	PT Solusi Bangun Beton	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Pembelian Purchase
63	PT Sinergi Informatika Semen Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Pembelian Purchase
64	PT Rumah Sakit Pelni	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Pembelian Purchase
65	PT Asuransi BRI Life	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Pembelian Purchase
66	PT Metra Digital Media	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara Subsidiary of State Owned Entity	Pembelian Purchase
67	Dewan Pengawas dan Direksi	Manajemen kunci Key management	Kompensasi dan Remunerasi Compensation and remuneration



Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan usaha dan operasional PERURI. Transaksi tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan Perusahaan, prosedur internal, ketentuan pengadaan, persetujuan sesuai kewenangan, dan praktik bisnis yang berlaku umum.

Dengan demikian, transaksi dengan pihak berelasi diperlakukan sebagai transaksi usaha dan operasional yang wajar sepanjang dilakukan sesuai ketentuan, kewenangan, serta kebutuhan bisnis Perusahaan. Selama tahun 2025, tidak terdapat temuan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak berelasi.

Pemenuhan Ketentuan Terkait

PERURI memenuhi ketentuan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi melalui penyajian dalam Catatan 33 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025. Pengungkapan tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, khususnya PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Catatan tersebut memuat hubungan pihak berelasi, sifat transaksi, serta saldo dan transaksi dengan pihak berelasi yang meliputi pos aset, liabilitas, dan beban. Pengungkapan ini menjadi bagian dari pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Perusahaan.

Pengungkapan dalam Hal Terdapat Hubungan Afiliasi

Pernyataan Direksi atas Prosedur yang Memadai dan Prinsip Transaksi yang Wajar

Direksi menyatakan bahwa transaksi dengan pihak berelasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, termasuk dengan memperhatikan prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*) sepanjang relevan dengan sifat transaksi.

Prosedur tersebut mencakup proses pengendalian internal, persetujuan sesuai kewenangan, pengelolaan risiko, pencatatan akuntansi, serta pengungkapan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025.

Peran Dewan Pengawas dan Komite Audit

Sebagai Perusahaan Umum, fungsi pengawasan yang dalam kriteria ARA disebut sebagai peran Dewan Komisaris dijalankan oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dan Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan sesuai kewenangan masing-masing.

Dalam konteks transaksi dengan pihak berelasi, pengawasan dilakukan melalui penelaahan laporan keuangan, pembahasan dengan manajemen, serta komunikasi dengan auditor eksternal sepanjang relevan dengan proses audit

Explanation of Transaction Fairness

Transactions with related parties are conducted to support PERURI's business activities and operational needs. These transactions are carried out based on the Company's requirements, internal procedures, procurement regulations, approval authority limits, and generally accepted business practices.

Accordingly, related party transactions are treated as normal business and operational transactions, provided that they are conducted in accordance with applicable regulations, authorized approvals, and the Company's business requirements. During 2025, there were no findings of violations of laws and regulations related to transactions with related parties.

Compliance with Relevant Provisions

PERURI fulfills the disclosure requirements related to related party transactions through presentation in Note 33 of the 2025 Consolidated Financial Statements. This disclosure is prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, specifically PSAK 224 on Related Party Disclosures.

The note includes information on related party relationships, the nature of transactions, as well as balances and transactions with related parties covering asset, liability, and expense accounts. This disclosure forms part of the Company's commitment to transparency and accountability in financial reporting.

Disclosure of Affiliated Relationships

Statement of the Board of Directors on Adequate Procedures and Arm's Length Principle

The Board of Directors states that related party transactions have undergone adequate procedures to ensure that such transactions are conducted in accordance with generally accepted business practices, including the application of the arm's length principle, where relevant to the nature of the transaction.

These procedures include internal control processes, approval in accordance with delegated authority, risk management, accounting records, and disclosure in the 2025 Consolidated Financial Statements.

Role of the Supervisory Board and Audit Committee

As a Public Corporation (Perum), the supervisory function equivalent to the Board of Commissioners is performed by the Supervisory Board. The Supervisory Board and the Audit Committee carry out oversight functions over financial reporting, internal control, and compliance within their respective authorities.

In the context of related party transactions, oversight is conducted through the review of financial statements, discussions with management, and communication with external auditors, as relevant to the audit and reporting

dan pelaporan keuangan. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan secara memadai dan dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Afiliasi atau Transaksi Material yang Bersifat Rutin, Berulang, dan/atau Berkelanjutan

Transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan PERURI merupakan transaksi yang mendukung kegiatan usaha dan operasional Perusahaan serta bersifat rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sesuai kebutuhan usaha. Transaksi tersebut mencakup aktivitas perbankan, pendanaan, penempatan dana, piutang dan utang usaha, pembelian, penjualan, asuransi aset, jasa, beban bunga pinjaman, serta kompensasi dan remunerasi manajemen kunci.

Transaksi dimaksud merupakan bagian dari aktivitas usaha normal Perusahaan dan, untuk transaksi tertentu, dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha. Oleh karena itu, transaksi tersebut tidak dimaksudkan sebagai transaksi material insidental di luar kegiatan usaha normal Perusahaan.

Rujukan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Tahunan

Informasi lebih lanjut mengenai saldo dan transaksi dengan pihak berelasi disajikan dalam Catatan 33 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025 tentang Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi.

Informasi Persetujuan Pemilik Modal Independen atas Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan

Selama tahun buku 2025, PERURI tidak memiliki transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi yang memerlukan persetujuan Pemilik Modal independen.

Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS independen yang menyetujui transaksi tersebut. Selain itu, PERURI berbentuk Perusahaan Umum dan seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sehingga mekanisme persetujuan pemilik modal independen/RUPS independen sebagaimana berlaku pada Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk Perseroan Terbatas tidak berlaku bagi PERURI.

Pernyataan Tidak Terdapat Transaksi Benturan Kepentingan

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025 dan konfirmasi internal Perusahaan, selama tahun buku 2025 PERURI tidak memiliki transaksi benturan kepentingan. Dengan demikian, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang memerlukan persetujuan Pemilik Modal independen atau mekanisme persetujuan khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasar modal terkait transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.

process. These mechanisms are intended to ensure that related party transactions are adequately disclosed and conducted in accordance with generally accepted business practices.

Affiliate Transactions or Material Transactions that are Routine, Recurrent, and/or Ongoing

Transactions with related parties conducted by PERURI are transactions that support the Company's business activities and operations and are routine, recurrent, and/or ongoing in nature according to business needs. These transactions include banking activities, financing, fund placements, trade receivables and payables, purchases, sales, asset insurance, services, loan interest expenses, as well as compensation and remuneration of key management personnel.

Such transactions constitute part of the Company's normal business activities and, for certain transactions, are carried out to generate operating income. Therefore, these transactions are not intended as incidental material transactions outside the Company's normal business activities.

Reference to Disclosures in the Annual Financial Statements

Further information regarding balances and transactions with related parties is presented in Note 33 to the 2025 Consolidated Financial Statements regarding Balances and Transactions with Related Parties.

Information on Independent Shareholders' Approval for Affiliate Transactions and/or Conflict of Interest Transactions

During fiscal year 2025, PERURI did not have any affiliate transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of transactions requiring approval from independent shareholders.

Accordingly, there is no information regarding the date of the independent GMS convened to approve such transactions. In addition, PERURI is a Public Corporation (Perusahaan Umum) and all of its capital is owned by the Government of the Republic of Indonesia; therefore, the mechanism for independent shareholders' approval/independent GMS as applicable to Issuers or Public Companies in the form of Limited Liability Companies does not apply to PERURI.

Statement on the Absence of Conflict of Interest Transactions

Based on the 2025 Consolidated Financial Statements and the Company's internal confirmation, during fiscal year 2025 PERURI did not have any conflict of interest transactions. Accordingly, there were no conflict of interest transactions requiring approval from independent shareholders or other specific approval mechanisms as referred to in capital market regulations concerning affiliate transactions and conflict of interest transactions.



Perubahan Peraturan Perundangan-undangan yang Berpengaruh Terhadap Perusahaan

Changes in Laws and Regulations Affecting the Company

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak material terhadap kegiatan usaha, posisi keuangan, maupun kinerja PERURI. Perusahaan senantiasa melakukan pemantauan terhadap perkembangan regulasi yang relevan dengan bidang usaha, penugasan, tata kelola, kepatuhan, serta operasional Perusahaan guna memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Throughout the year 2025, there were no changes in legislation that materially impacted PERURI's business activities, financial position, or performance. The company continuously monitors the development of regulations relevant to its business field, assignments, governance, compliance, and operations to ensure that all business activities are conducted in accordance with applicable laws and regulations.

Kebijakan Akuntansi

Accounting Policies

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang berlaku.

The preparation and presentation of the Financial Statements are carried out by referring to the applicable accounting policies.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Bagi Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian PERURI dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berlaku, dan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI).

Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Financial Statements

The consolidated financial statements of PERURI and its Subsidiaries have been prepared and presented using the applicable accounting policies and in accordance with the Financial Accounting Standards ("SAK") established by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI).

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

The consolidated financial statements have been prepared based on the going concern assumption and the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, which uses the cash basis. The measurement basis used in the preparation of these consolidated financial statements is the historical cost concept, except for certain accounts that are based on other measurement bases as described in the accounting policies for each respective account.

Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal

Material Commitments For Capital Expenditures

Pada tahun 2025, Perusahaan memiliki ikatan material sebagaimana ditetapkan dalam RKAP 2025 untuk investasi barang modal berupa komitmen pembelian aset tetap dan aset tak berwujud. Berdasarkan Catatan 34 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2025 teraudit, komitmen tersebut mencakup peralatan kantor, alat dan perkakas, mesin dan peralatan pabrik, tanah dan bangunan, serta aset tak berwujud. Informasi tersebut disajikan sebagai bagian dari Komitmen dan Kontinjensi, khususnya pada pengungkapan Komitmen Pembelian Aset Tetap.

In 2025, the Company had material commitments as stipulated in the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) for capital expenditure in the form of commitments to purchase fixed assets and intangible assets. Based on Note 34 to the audited 2025 Consolidated Financial Statements, such commitments include office equipment, tools and equipment, machinery and plant equipment, land and buildings, as well as intangible assets. This information is presented as part of Commitments and Contingencies, specifically in the disclosure of Commitments for the Purchase of Fixed Assets.

Rincian ikatan material untuk investasi barang modal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The details of material commitments for capital expenditure in 2025 are as follows:

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Tahun 2025 Material Commitments for Capital Expenditures in 2025

Barang Modal Capital Goods	Nilai Ikatan (Rp Juta) Commitment Value (Rp Million)	Tujuan Ikatan Purpose of Commitment	Sumber Dana Source of Funds	Mata Uang Currency
Peralatan Kantor Office Equipment	18.553	Mendukung kelancaran aktivitas administrasi, operasional kantor, serta peningkatan efektivitas kerja unit-unit Perusahaan. Supporting the smooth implementation of administrative activities, office operations, and improving the work effectiveness of the Company's units.	Kas internal Perusahaan dan/atau fasilitas pendanaan yang tersedia sesuai kebijakan keuangan Perusahaan. The Company's internal cash and/or available financing facilities in accordance with the Company's financial policies.	Rupiah
Alat dan Perkakas Tools and Equipment	13.261	Mendukung kebutuhan pemeliharaan, perbaikan, dan keberlanjutan operasional mesin serta peralatan produksi. Supporting maintenance, repair, and operational continuity requirements of machinery and production equipment.	Kas internal Perusahaan dan/atau fasilitas pendanaan yang tersedia sesuai kebijakan keuangan Perusahaan. The Company's internal cash and/or available financing facilities in accordance with the Company's financial policies.	Rupiah
Mesin dan Peralatan Pabrik Machinery and Plant Equipment	491.478	Mendukung peningkatan keandalan, kapasitas, efisiensi, dan kesinambungan fasilitas produksi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan produk sekuriti. Supporting improvements in the reliability, capacity, efficiency, and continuity of production facilities, particularly in meeting the requirements for security products.	Kas internal Perusahaan dan/atau fasilitas pendanaan yang tersedia sesuai kebijakan keuangan Perusahaan. The Company's internal cash and/or available financing facilities in accordance with the Company's financial policies.	Rupiah
Tanah dan Bangunan Land and Buildings	38.306	Mendukung pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas kerja, fasilitas produksi, serta sarana pendukung operasional Perusahaan. Supporting the development, maintenance, and improvement of work facilities, production facilities, and operational support facilities of the Company.	Kas internal Perusahaan dan/atau fasilitas pendanaan yang tersedia sesuai kebijakan keuangan Perusahaan. The Company's internal cash and/or available financing facilities in accordance with the Company's financial policies.	Rupiah
Aset Tak Berwujud Intangible Assets	27.228	Mendukung pengembangan sistem, aplikasi, perangkat lunak, dan/atau infrastruktur digital yang menunjang operasional serta layanan berbasis teknologi. Supporting the development of systems, applications, software, and/or digital infrastructure that support operations and technology-based services.	Kas internal Perusahaan dan/atau fasilitas pendanaan yang tersedia sesuai kebijakan keuangan Perusahaan. The Company's internal cash and/or available financing facilities in accordance with the Company's financial policies.	Rupiah
Total	588.826			



Langkah Perlindungan atas Risiko Mata Uang Asing

Seluruh ikatan material untuk investasi barang modal tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Catatan 34 atas Laporan Keuangan Konsolidasian dicatat dalam mata uang Rupiah. Dengan demikian, eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang secara langsung terkait dengan ikatan material investasi barang modal tersebut relatif terbatas.

Namun demikian, Perusahaan tetap memiliki eksposur terhadap risiko mata uang asing dalam kegiatan usahanya, mengingat Perusahaan melakukan transaksi tertentu dalam mata uang asing serta memiliki aset dan liabilitas keuangan yang didenominasi dalam mata uang asing. Risiko penjabaran mata uang dapat timbul ketika kewajiban transaksi komersial atau aset tertentu diakui dalam mata uang selain mata uang fungsional Perusahaan.

Untuk mengelola risiko tersebut, Perusahaan memantau risiko nilai tukar mata uang asing secara cermat dan mempertahankan dana dalam berbagai mata uang untuk meminimalkan risiko yang timbul akibat perbedaan waktu antara penerimaan dan pembayaran. Perusahaan juga tidak mengambil posisi spekulatif dalam mata uang asing. Perubahan nilai tukar telah dan diperkirakan akan tetap dapat memengaruhi hasil usaha dan arus kas Perusahaan, terutama apabila terdapat transaksi pembelian atau penjualan tertentu dalam valuta asing. Oleh karena itu, pengelolaan risiko mata uang dilakukan melalui pemantauan eksposur secara berkala serta penerapan kebijakan keuangan yang hati-hati sesuai kebutuhan operasional Perusahaan.



Measures to Protect Against Foreign Currency Risk

All material commitments for capital expenditure in 2025 as presented in Note 34 to the Consolidated Financial Statements are recorded in Rupiah. Accordingly, the foreign exchange risk exposure directly related to such material capital expenditure commitments is relatively limited.

However, the Company remains exposed to foreign currency risk in its business activities, considering that the Company conducts certain transactions in foreign currencies and has financial assets and liabilities denominated in foreign currencies. Foreign currency translation risk may arise when commercial transaction obligations or certain assets are recognized in currencies other than the Company's functional currency.

To manage such risks, the Company closely monitors foreign exchange risk and maintains funds in various currencies to minimize risks arising from timing differences between receipts and payments. The Company also does not take speculative positions in foreign currencies. Exchange rate fluctuations have affected and are expected to continue affecting the Company's operating results and cash flows, particularly when certain purchase or sales transactions are conducted in foreign currencies. Therefore, foreign currency risk management is carried out through regular exposure monitoring and the implementation of prudent financial policies in accordance with the Company's operational needs.



Investasi Barang Modal yang Direalisasikan Tahun Buku 2025

Capital Expenditure Realized in 2025

Realisasi investasi barang modal selama tahun 2025 sebesar Rp493,26 miliar atau mencapai 83,78% dari RKAP 2025 sebesar Rp588,85 miliar. Rincian atas realisasi investasi barang modal konsolidasi selama tahun 2025 sebagai berikut:

Realization of capital expenditure during 2025 amounted to Rp493.26 billion or 83.78% of the 2025 RKAP target of Rp588.85 billion. The details of consolidated capital expenditure realization during 2025 are as follows:

(dalam jutaan Rupiah)
(in millions of Rupiah)

Jenis Investasi Barang Modal Type of capital expenditure investment	Tujuan Investasi Barang Modal Purpose of capital expenditure investment	Nilai Investasi Investment value				
		RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 Realization	Realisasi 2024 Realization	Pencapaian terhadap RKAP Achievement against RKAP	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease)
1	2	3	4	5	6 = 4:3	7=(4-5):4
Kendaraan Vehicle	Mendukung mobilitas operasional dan kegiatan pendukung Perusahaan. Pada tahun 2025, tidak terdapat realisasi investasi kendaraan. Supporting operational mobility and the Company's supporting activities. In 2025, there was no realization of vehicle investment.	20	-	377	-	(100,00%)
Peralatan Kantor Office Equipment	Mendukung kelancaran aktivitas administrasi, operasional kantor, dan peningkatan efektivitas kerja unit-unit Perusahaan. Supporting the smooth implementation of administrative activities, office operations, and improving the work effectiveness of the Company's units.	18.553	17.128	14.396	92,32%	18,98%
Alat dan Perkakas/ Spareparts Tools and Equipment/Spare Parts	Mendukung pemeliharaan, perbaikan, dan keberlanjutan operasional mesin serta peralatan produksi. Supporting the maintenance, repair, and operational continuity of machinery and production equipment.	13.261	12.204	4.720	92,03%	158,55%
Mesin dan Peralatan Pabrik Machinery and Plant Equipment	Mendukung peningkatan keandalan, kapasitas, efisiensi, dan kesinambungan fasilitas produksi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan produk sekuriti. Supporting improvements in reliability, capacity, efficiency, and continuity of production facilities, particularly in fulfilling security product requirements.	491.478	424.897	265.081	86,45%	60,29%
Tanah dan Bangunan Land and Buildings	Mendukung pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas kerja, fasilitas produksi, serta sarana pendukung operasional Perusahaan. Supporting the development, maintenance, and improvement of work facilities, production facilities, and operational support facilities of the Company.	38.306	18.032	16.494	47,08%	9,33%



(dalam jutaan Rupiah)
(in millions of Rupiah)

Jenis Investasi Barang Modal Type of capital expenditure investment	Tujuan Investasi Barang Modal Purpose of capital expenditure investment	Nilai Investasi Investment value				
		RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	Realisasi 2024 2024 Realization	Pencapaian terhadap RKAP Achievement against RKAP	Naik/(Turun) Increase/ (Decrease)
1	2	3	4	5	6 = 4:3	7=(4-5):4
Aset Tak Berwujud Intangible Assets	Mendukung pengembangan sistem, aplikasi, perangkat lunak, dan/atau infrastruktur digital yang menunjang kegiatan operasional dan layanan berbasis teknologi. Supporting the development of systems, applications, software, and/or digital infrastructure that support operational activities and technology-based services.	27.228	21.046	62.195	77,29%	(66,16%)
Total Capex Total Capex		588.846	493.306	363.263	83,78%	35,80%

Realisasi investasi barang modal tahun 2025 mencerminkan upaya PERURI dalam menjaga keandalan aset produksi, meningkatkan efektivitas operasional, serta memperkuat dukungan teknologi dan infrastruktur kerja. Realisasi yang berada di bawah RKAP terutama mencerminkan penyesuaian prioritas pelaksanaan investasi, kesiapan pengadaan, serta kebutuhan operasional tahun berjalan.

Realization of capital expenditure in 2025 reflects PERURI's efforts to maintain production asset reliability, improve operational effectiveness, and strengthen support for workplace technology and infrastructure. The realization being below the RKAP mainly reflects adjustments in investment implementation priorities, procurement readiness, and operational needs during the current year.

Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan atau Pendapatan Bersih Perusahaan

Impact of Price Changes on the Company's Sales or Net Revenue

Selama tahun 2025, PERURI tidak terkena dampak yang signifikan atas perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih Perusahaan.

During 2025, PERURI was not significantly affected by changes in prices on the Company's sales or net revenue.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Health Level

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dijelaskan bahwa penilaian Tingkat kesehatan BUMN dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Nasional/Internasional/Nasional yang terafiliasi dengan Pemeringkat Internasional.

PERURI telah menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sebagai lembaga pemeringkat nasional untuk melakukan evaluasi tingkat kesehatan PERURI Tahun Buku 2025. Hasil penilaian tersebut telah disampaikan dalam bentuk sertifikat rating melalui Surat Nomor: RTG-070/PEF-DIR/III/2026 tanggal 25 Maret 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Based on Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, it is stated that the assessment of the health level of SOEs is conducted by a National/International Rating Agency or a National Rating Agency affiliated with an International Rating Agency.

PERURI has appointed PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) as the national rating agency to conduct an evaluation of PERURI's health level for Fiscal Year 2025. The results of this assessment have been issued in the form of a rating certificate through Letter No. RTG-070/PEF-DIR/III/2026 dated March 25, 2026, with the following details:

Peringkat Berdiri Sendiri Standalone Rating	Peringkat Akhir Final Rating	Tingkat Kesehatan Company Health Level
idAAA(sa) (Triple A; Standalone) Obligor berperingkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior . Tanda (sa) menunjukkan bahwa peringkat adalah peringkat berdiri sendiri (<i>standalone rating</i>).	IdAAA/Stable (Triple A; Stable Outlook) Obligor berperingkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior .	Sangat Sehat Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 pasal 81.
idAAA(sa) (Triple A; Standalone) An obligor rated idAAA is the highest rating assigned by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). The obligor's capacity to meet its long-term financial commitments, relative to other Indonesian obligors, is superior. The " (sa) " notation indicates that the rating is a standalone rating.	idAAA/Stable (Triple A; Stable Outlook) An obligor rated idAAA is the highest rating assigned by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). The obligor's capacity to meet its long-term financial commitments, relative to other Indonesian obligors, is superior .	Very Healthy In accordance with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 Article 81.



Aspek Pemasaran

Marketing Aspects

Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang difokuskan untuk memperkuat basis pelanggan, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing produk dan layanan, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Strategi pemasaran tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan karakteristik setiap lini produk, kebutuhan pelanggan, peluang pengembangan pasar, serta arah transformasi PERURI sebagai perusahaan teknologi penjamin keaslian.

Pada segmen digital, strategi pemasaran difokuskan pada perluasan pangsa pasar, optimalisasi pengelolaan akun strategis, sinergi program SPBE, dan penguatan *branding* PERURI sebagai penyedia solusi digital yang aman dan terpercaya. Sementara pada segmen non-uang, strategi pemasaran diarahkan pada penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pelanggan, mitra, dan unit kerja terkait, termasuk peningkatan kualitas produk, pengelolaan pesanan, negosiasi harga, pembaruan fitur, serta pemenuhan kebutuhan pelanggan secara berkelanjutan.

Marketing Strategy

The marketing strategy is focused on strengthening the customer base, expanding markets, and enhancing the competitiveness of products and services, both in domestic and international markets. The 2025 marketing strategy is formulated by taking into account the characteristics of each product line, customer needs, market development opportunities, and PERURI's transformation direction as a technology company providing authentication solutions.

In the digital segment, the marketing strategy is focused on expanding market share, optimizing strategic account management, strengthening e-Government (SPBE) program synergy, and reinforcing PERURI's branding as a secure and reliable digital solutions provider. Meanwhile, in the non-currency segment, the marketing strategy is directed toward strengthening coordination with ministries/agencies, customers, partners, and related work units, including improving product quality, order management, price negotiation, feature enhancement, and continuous fulfillment of customer needs.

Produk Product	Strategi Strategy	
Digital	Channel Management Improvement: Memperluas pangsa pasar di segmen <i>Healthcare, Education, Financial, Telco & Ecommerce</i>, dan <i>Energy & Manufacture</i> melalui model kemitraan yang dirancang khusus dengan mengoptimalkan keahlian unik dari mitra <i>system integrator</i> strategis PERURI untuk memberikan solusi yang relevan dan inovatif.	Channel Management Improvement: Expanding market share in the Healthcare, Education, Financial, Telco & Ecommerce, and Energy & Manufacturing segments through a tailored partnership model by optimizing the unique expertise of PERURI's strategic system integrator partners to deliver relevant and innovative solutions.
	Account Management Revamp: Berfokus pada optimalisasi nilai dari <i>High Value Account</i> (HVA) dengan secara proaktif menawarkan solusi digital yang merupakan <i>bundling</i> dari portofolio digital yang terbukti memberikan dampak positif dan menjawab tantangan bisnis pelanggan, berdasarkan analisis <i>use case</i> yang komprehensif.	Account Management Revamp: Focused on optimizing value from High Value Accounts (HVA) by proactively offering digital solutions bundled from the digital portfolio that have proven to deliver positive impact and address customer business challenges, based on comprehensive use case analysis.
	Sinergi dengan program SPBE: Mewujudkan program SPBE di kementerian dan lembaga khususnya yang menangani Project Strategis Nasional dan mendorong pertumbuhan pendapatan dari segmen pemerintah yang market melalui <i>upselling</i> produk dan solusi digital turunan SPBE.	Synergy with the SPBE program: Supporting the implementation of the e-Government (SPBE) program in ministries and institutions, particularly those handling National Strategic Projects, and driving revenue growth from government segments through upselling of SPBE-derived digital products and solutions.
	Branding PERURI sebagai Govtech: Memanfaatkan penugasan Govtech dari pemerintah kepada PERURI sebagai <i>proof point</i> kredibilitas dan keahlian dalam membangun solusi digital yang aman dan terpercaya, guna memperkuat <i>branding</i> secara signifikan di pasar bisnis digital yang lebih luas.	Branding PERURI as a Government Technology: Leveraging the government's Govtech assignment to PERURI as a proof point of credibility and expertise in building secure and reliable digital solutions, in order to significantly strengthen branding in the broader digital business market.

Produk Product	Strategi Strategy	
Paspor (Ditjen Imigrasi) Passport (Directorate General of Immigration)	Mengembangkan kapabilitas teknologi pencetakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, khususnya Blangko Paspor, melalui penguatan kemandirian produksi bahan baku strategis, terutama polikarbonat, guna meningkatkan ketahanan rantai pasok, mengurangi ketergantungan terhadap pemasok eksternal, serta memperkuat daya saing dari aspek spesifikasi, kualitas, dan efisiensi biaya.	Developing technological capabilities for the printing of Republic of Indonesia travel documents, particularly passport blanks, through the strengthening of independent production of strategic raw materials, especially polycarbonate, to enhance supply chain resilience, reduce dependence on external suppliers, and strengthen competitiveness in terms of specifications, quality, and cost efficiency.
Dokumen Kekonsuleran (Kementerian Luar Negeri) Consular Documents (Ministry of Foreign Affairs)	Memperkuat sinergi lintas fungsi untuk memastikan peningkatan kualitas produk secara berkelanjutan sehingga mampu memenuhi standar keamanan, kepatuhan, dan ekspektasi pelanggan.	Strengthening cross-functional synergy to ensure continuous product quality improvement, enabling compliance with security standards, regulatory requirements, and customer expectations.
Dokumen Pertanahan (Kementerian ATR/BPN) Land Documents (Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency)	Mengoptimalkan kolaborasi lintas unit untuk meningkatkan kualitas hasil produksi, menjaga keandalan layanan, serta mendukung pemenuhan kebutuhan pelanggan secara konsisten.	Optimizing cross-unit collaboration to improve production quality, maintain service reliability, and support consistent fulfillment of customer needs.
Meterai Tempel (Direktorat Jenderal Pajak) Adhesive Stamp Duty (Directorate General of Taxes)	Memperkuat koordinasi strategis dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam mendukung penyesuaian harga Meterai Tempel Desain Baru sekaligus memastikan keberlanjutan layanan dan penciptaan nilai bagi para pemangku kepentingan.	Strengthening strategic coordination with the Directorate General of Taxes to support the price adjustment of the New Design Adhesive Stamp Duty, while ensuring service continuity and value creation for stakeholders.
Pita Cukai (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) Excise Paper (Directorate General of Customs and Excise)	Berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengembangan fitur keamanan pita cukai untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemalsuan, mendukung kepatuhan regulasi, dan menjawab kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.	Collaborating with the Directorate General of Customs and Excise in developing excise stamp security features to enhance protection against counterfeiting, support regulatory compliance, and respond to evolving customer needs.
Dokumen PTN/PTS (Perguruan Tinggi Negeri/Swasta) University Documents (Public and Private Universities)	Mengoptimalkan sinergi dengan anak perusahaan guna memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas kapabilitas layanan.	Optimizing synergy with subsidiaries to strengthen production capacity, improve operational efficiency, and expand service capabilities.
	Memperkuat perencanaan dan pengendalian produksi untuk memastikan ketepatan waktu penyelesaian dan pengiriman sesuai komitmen layanan kepada pelanggan.	Strengthening production planning and control to ensure timely completion and delivery in accordance with service commitments to customers.
	Meningkatkan daya saing melalui penguatan proposisi nilai yang mengedepankan kualitas, keamanan, dan keandalan produk.	Enhancing competitiveness by strengthening the value proposition that emphasizes product quality, security, and reliability.
	Mengoptimalkan strategi harga melalui evaluasi berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara daya saing dan profitabilitas.	Optimizing the pricing strategy through continuous evaluation to maintain a balance between competitiveness and profitability.
	Mendorong adopsi ijazah hybrid melalui pendekatan berbasis solusi yang menonjolkan manfaat dari sisi keamanan, efisiensi, dan transformasi digital.	Encouraging the adoption of hybrid diplomas through a solution-based approach that highlights benefits in terms of security, efficiency, and digital transformation.
Prangko RI Indonesian Postage Stamps	Memperkuat pengendalian operasional dan koordinasi produksi guna memastikan ketepatan waktu pengiriman serta mempertahankan keandalan layanan kepada pelanggan.	Strengthening operational control and production coordination to ensure timely delivery and maintain service reliability for customers.



Produk Product	Strategi Strategy	
Logam Non-Uang Non-Currency Metal Products	Memperluas peluang bisnis melalui penguatan hubungan dengan pelanggan serta peningkatan pemahaman terhadap nilai tambah, kualitas, dan keunggulan produk logam non-uang PERURI.	Expanding business opportunities by strengthening customer relationships and improving understanding of the added value, quality, and advantages of PERURI's non-currency metal products.
Sertifikat Sekuriti Security Certificates	Memperkuat hubungan strategis dengan pelanggan melalui pendekatan berbasis kebutuhan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan serta mengidentifikasi peluang bisnis baru.	Strengthening strategic relationships with customers through a needs-based approach to improve customer loyalty and identify new business opportunities.
	Mengoptimalkan sinergi lintas fungsi melalui evaluasi kinerja dan koordinasi berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas layanan dan kualitas pemenuhan kebutuhan pelanggan.	Optimizing cross-functional synergy through performance evaluation and continuous coordination to improve service effectiveness and the quality of customer needs fulfillment.
	Memperluas peluang pasar dengan menawarkan solusi produk alternatif yang memenuhi kebutuhan pelanggan sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan perusahaan.	Expanding market opportunities by offering alternative product solutions that meet customer needs while optimizing the Company's revenue potential.
Buku Pelaut Seafarer Books	Memperkuat koordinasi dengan pelanggan dan unit produksi untuk memastikan kelancaran proses produksi, ketepatan waktu penyelesaian, serta kualitas produk sesuai standar yang ditetapkan.	Strengthening coordination with customers and production units to ensure smooth production processes, timely completion, and product quality in accordance with established standards.

Pangsa Pasar

PERURI memiliki posisi yang sangat strategis dalam industri percetakan uang dan dokumen sekuriti nasional. Berbekal pengalaman panjang serta komitmen tinggi terhadap kualitas, keamanan, dan ketepatan, PERURI terus memperluas pangsa pasar baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Selain memenuhi kebutuhan uang kertas dan uang logam domestik, PERURI juga mengembangkan penetrasi pasar global melalui penyediaan berbagai produk unggulan di bidang sekuriti dan dokumen negara.

Dalam rangka memperkuat kepemimpinannya di pasar domestik, PERURI secara konsisten menjalin koordinasi dan sinergi dengan kementerian serta lembaga negara guna memastikan pemenuhan kebutuhan dokumen strategis nasional. Kolaborasi tersebut menjadi landasan penting dalam menjamin kesinambungan pasokan, kelancaran proses produksi, serta ketepatan distribusi sesuai standar yang ditetapkan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, PERURI juga menunjukkan ekspansi yang progresif ke sektor digital dengan menghadirkan solusi keamanan berbasis teknologi, antara lain *e-Meterai*, *Digital Certificate*, *Perisai (Digital Signature)*, *PERURI Tera (Digital Seal)*, *Keyla (Token)*, dan *PERURI Box (Digital Locker)*. Inisiatif ini berkontribusi signifikan dalam mendukung agenda transformasi digital nasional sekaligus membuka peluang untuk memperluas jangkauan layanan ke pasar global.

Sebagai bentuk pengakuan atas kapabilitas dan peran strategisnya di bidang digital, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan PERURI sebagai GovTech Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. Penetapan ini menandai babak baru transformasi PERURI, yang tidak hanya berperan dalam penyediaan dokumen sekuriti fisik dan digital, tetapi juga menjadi katalis dalam integrasi dan percepatan layanan pemerintahan berbasis digital.

Upaya strategis tersebut diperkuat melalui kemitraan dengan berbagai perusahaan teknologi, yang mendukung pengayaan portofolio layanan serta penguatan posisi PERURI pada sektor *high security technology*. Dengan mengintegrasikan pengalaman industri konvensional dan kapabilitas digital yang terus berkembang, PERURI semakin kokoh sebagai mitra strategis pemerintah dan pelaku utama di pasar domestik, sekaligus membuka ruang pertumbuhan dan penetrasi pasar global secara terarah dan berkelanjutan.

Market Share

PERURI holds a highly strategic position in the national currency printing and security document industry. Supported by extensive experience and a strong commitment to quality, security, and accuracy, PERURI continues to expand its market share both domestically and internationally. In addition to fulfilling domestic banknote and coin requirements, PERURI is also developing global market penetration through the provision of various flagship products in the security and state document sector.

In order to strengthen its leadership in the domestic market, PERURI consistently establishes coordination and synergy with ministries and government institutions to ensure the fulfillment of national strategic document needs. This collaboration serves as an important foundation to guarantee supply continuity, smooth production processes, and accurate distribution in accordance with established standards.

In line with technological developments, PERURI is also demonstrating progressive expansion into the digital sector by providing technology-based security solutions, including *e-Stamp (e-Meterai)*, *Digital Certificate*, *Perisai (Digital Signature)*, *PERURI Tera (Digital Seal)*, *Keyla (Token)*, and *PERURI Box (Digital Locker)*. These initiatives significantly contribute to supporting the national digital transformation agenda while opening opportunities to expand service reach into global markets.

As a form of recognition of its capability and strategic role in the digital sector, the Government of the Republic of Indonesia appointed PERURI as Indonesia's GovTech through Presidential Regulation No. 82 of 2023. This designation marks a new chapter in PERURI's transformation, where it not only provides physical and digital security documents but also acts as a catalyst for the integration and acceleration of digital government services.

These strategic efforts are further strengthened through partnerships with various technology companies, supporting the enrichment of the service portfolio and reinforcing PERURI's position in the high-security technology sector. By integrating conventional industry experience with continuously developing digital capabilities, PERURI is increasingly solidified as a strategic government partner and a key player in the domestic market, while also creating structured and sustainable opportunities for global market expansion.



Prospek Usaha

Business Prospects

Perekonomian global diproyeksikan masih bergejolak dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Eskalasi perang tarif dan meluasnya konflik geopolitik menimbulkan ketidakstabilan yang berpotensi menghambat prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Meningkatnya ketegangan, fragmentasi, serta kecenderungan proteksionisme akan mendorong biaya tinggi, mengganggu kelancaran rantai pasok global, dan memperlambat kinerja perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor.

Meningkatnya ketidakpastian global menekan kinerja sektor manufaktur. Sebanyak 73,9% negara G20 dan ASEAN-6 masih berada di zona kontraksi pada Juli 2025. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur kawasan ASEAN melemah, tercermin dari penurunan output, pesanan baru, dan jumlah tenaga kerja. Di sisi lain, beberapa negara menunjukkan perbaikan kinerja manufaktur.

Pada tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh resilien sebesar 4,87% (yoy) pada triwulan I di tengah peningkatan tekanan global. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan pertumbuhan mendekati 5%, didukung oleh stimulus fiskal seperti THR, diskon listrik dan tol, serta stabilisasi harga pangan. Investasi tumbuh moderat, sementara konsumsi pemerintah berkontraksi akibat efek basis tinggi pasca Pemilu. Perekonomian Indonesia kembali tumbuh positif pada triwulan II sebesar 5,12% (yoy) ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan juga kinerja ekspor. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,97% (yoy), mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

Inflasi diperkirakan masih berada dalam batas sasaran pemerintah pada tahun 2025. Meskipun pada triwulan pertama sempat di luar rentang sasaran akibat pemberian diskon listrik sebagai stimulus daya beli, inflasi kembali ke dalam rentang sasaran pada Juli 2025 dengan realisasi sebesar 2,37% (yoy). Meski demikian, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, seperti ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut dan potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat memengaruhi harga energi domestik. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan BGN juga perlu dikelola dengan cermat agar pasokan pangan nasional tetap aman. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, inflasi tahun 2025 diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,2–2,6% (yoy).

Nilai tukar rupiah pada tahun 2026 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh dinamika global yang penuh ketidakpastian, meskipun volatilitas cenderung mereda dibandingkan dengan tahun 2025. Meredanya volatilitas nilai tukar terutama disebabkan oleh pasar keuangan global yang telah mengantisipasi arah kebijakan perdagangan ekonomi AS.

Pemulihan global yang masih terbatas, peningkatan produksi minyak global, dan kondisi geopolitik memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Dari sisi permintaan,

The global economy is projected to remain volatile with a high level of uncertainty. The escalation of trade wars and the expansion of geopolitical conflicts have created instability that may hinder global economic growth prospects. Increasing tensions, fragmentation, and protectionist tendencies will drive up costs, disrupt global supply chains, and slow down international trade performance, particularly exports and imports.

Rising global uncertainty is also pressuring the manufacturing sector. As many as 73.9% of G20 and ASEAN-6 countries remained in contraction zone in July 2025. The ASEAN manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) weakened, reflected in declines in output, new orders, and employment levels. On the other hand, several countries showed improvements in manufacturing performance.

In 2025, Indonesia's economy remained resilient, growing by 4.87% (yoy) in the first quarter amid increasing global pressures. Household consumption was the main driver, growing close to 5%, supported by fiscal stimulus such as holiday allowances (THR), electricity and toll discounts, and food price stabilization. Investment grew moderately, while government consumption contracted due to a high base effect following the general election. The Indonesian economy returned to positive growth in the second quarter at 5.12% (yoy), supported by strong domestic demand and export performance. Household consumption grew by 4.97% (yoy), reflecting sustained public purchasing power.

Inflation is expected to remain within the government's target range in 2025. Although in the first quarter it exceeded the target range due to electricity tariff discounts as a purchasing power stimulus, inflation returned to the target range in July 2025, recorded at 2.37% (yoy). However, several risks must be anticipated, such as ongoing global economic uncertainty and potential increases in global oil prices that may affect domestic energy prices. In addition, the implementation of the BGN projects must be carefully managed to ensure national food supply stability. Considering these factors, inflation in 2025 is projected to remain under control within the range of 2.2%–2.6% (yoy).

The rupiah exchange rate in 2026 is expected to remain influenced by global uncertainty, although volatility is projected to ease compared to 2025. The reduction in exchange rate volatility is mainly driven by global financial markets having already priced in the direction of US trade policy.

Limited global recovery, increased global oil production, and geopolitical conditions are affecting global crude oil price movements. On the demand side, stagnant global economic

pertumbuhan ekonomi dunia yang stagnan membatasi kenaikan permintaan minyak global. Selain itu, inovasi dan pertumbuhan produksi moda transportasi berbasis *non-fossil fuel* juga berperan dalam mereduksi permintaan. Sementara itu, dari sisi suplai, kebijakan peningkatan produksi minyak mentah OPEC yang akan dimulai pada semester II 2025 serta naiknya produksi minyak non-OPEC diprediksi dapat mendorong turunnya harga pada 2026. Dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang memperburuk ekspektasi terhadap pemulihan pertumbuhan ekonomi dunia turut memberikan dampak pada dinamika harga minyak mentah global.

Dengan memperhatikan peluang dan juga risiko yang ada, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro sesuai dengan yang tertera pada Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro penyusunan APBN Tahun Anggaran 2026, yaitu sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4% (yoy) dan inflasi yang ditargetkan pada APBN adalah pada kisaran 2,5% (yoy).

Strategi dan Arah Kebijakan PERURI 2026

Guna mewujudkan Visi Perusahaan, PERURI juga telah mengembangkan Inisiatif Strategis tahun 2025–2029. Dalam hal ini, manajemen PERURI telah menetapkan tema spesifik dan fokus yang jelas setiap tahunnya. Pada tahun 2026, tema yang ditetapkan mengacu pada arah pengembangan bisnis Perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan melalui integrasi strategi serta dengan tetap melakukan peningkatan kapabilitas (*enhancing capabilities*). Fokus Perusahaan tahun 2026 secara garis besar adalah sebagai berikut:

- **Penguatan Fondasi Transformasi Digital**
Memperkuat fondasi transformasi digital sebagai kunci dalam melaksanakan penugasan sebagai GovTech Indonesia.
- **Memperkuat Rantai Nilai Uang Kertas**
Memperkuat rantai nilai uang kertas, modernisasi mesin cetak untuk menjaga kualitas dan efisiensi produksi.
- **Memperkuat Kepemimpinan Pasar Domestik**
Memperkuat kepemimpinan pasar domestik atas produk sekuriti non-uang dengan inovasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis.
- **Mengakselerasi Pertumbuhan Produk Digital dan Solutions**
Meningkatkan skalabilitas dan penetrasi pasar produk dan solusi digital, termasuk e-Meterai, untuk memperluas jangkauan layanan dan pendapatan.
- **Memperkuat Budaya Inovasi**
Mendorong budaya inovasi, riset yang mendukung pengembangan bisnis serta perbaikan berkelanjutan melalui *empowering* karyawan yang diawali dengan komitmen pimpinan.
- **Penguatan Kapabilitas**
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang mendukung bisnis dan *organizational resilience*.

growth is limiting the increase in global oil demand. In addition, innovation and growth in non-fossil fuel-based transportation modes are also contributing to reduced demand. On the supply side, OPEC's policy to increase crude oil production starting in the second half of 2025, along with rising non-OPEC production, is expected to put downward pressure on prices in 2026. Trade war dynamics between the United States and China, which further weaken expectations for global economic recovery, also impact global oil price movements.

Considering both opportunities and risks, the Government proposes macroeconomic indicators as stated in Book II of the Financial Note and the Draft State Budget (APBN) for Fiscal Year 2026, which will be used as the macroeconomic assumptions for preparing the 2026 APBN. These include Indonesia's economic growth target of 5.4% (yoy) and an inflation target of 2.5% (yoy).

Strategy and Policy Direction of PERURI in 2026

In order to realize the Company's Vision, PERURI has also developed Strategic Initiatives for the 2025–2029 period. In this regard, PERURI's management has established a specific annual theme with clear focus areas each year. In 2026, the theme is aligned with the Company's business development direction in achieving its vision and mission through strategy integration while continuing to enhance capabilities. The Company's main focus areas for 2026 are as follows:

- **Strengthening the Digital Transformation Foundation**
Strengthening the foundation of digital transformation as a key enabler in carrying out the mandate as Indonesia's GovTech.
- **Strengthening the Banknote Value Chain**
Strengthening the banknote value chain and modernizing printing machines to maintain production quality and efficiency.
- **Strengthening Domestic Market Leadership**
Strengthening domestic market leadership in non-currency security products through continuous innovation to meet dynamic market needs.
- **Accelerating Growth of Digital Products and Solutions**
Enhancing scalability and market penetration of digital products and solutions, including e-Stamp (e-Meterai), to expand service reach and revenue streams.
- **Strengthening Innovation Culture**
Encouraging an innovation-driven culture and research supporting business development and continuous improvement through employee empowerment, initiated by strong leadership commitment.
- **Capability Enhancement**
Improving human capital competencies, strengthening supporting technological infrastructure, and enhancing organizational resilience.



• Peningkatan *Brand Awareness*

Menguatkan *brand awareness* PERURI sebagai perusahaan teknologi yang berfokus pada penjaminan keaslian, baik di pasar domestik maupun internasional.

• Strengthening *Brand Awareness*

Strengthening PERURI's brand awareness as a technology company focused on authentication, both in domestic and international markets.

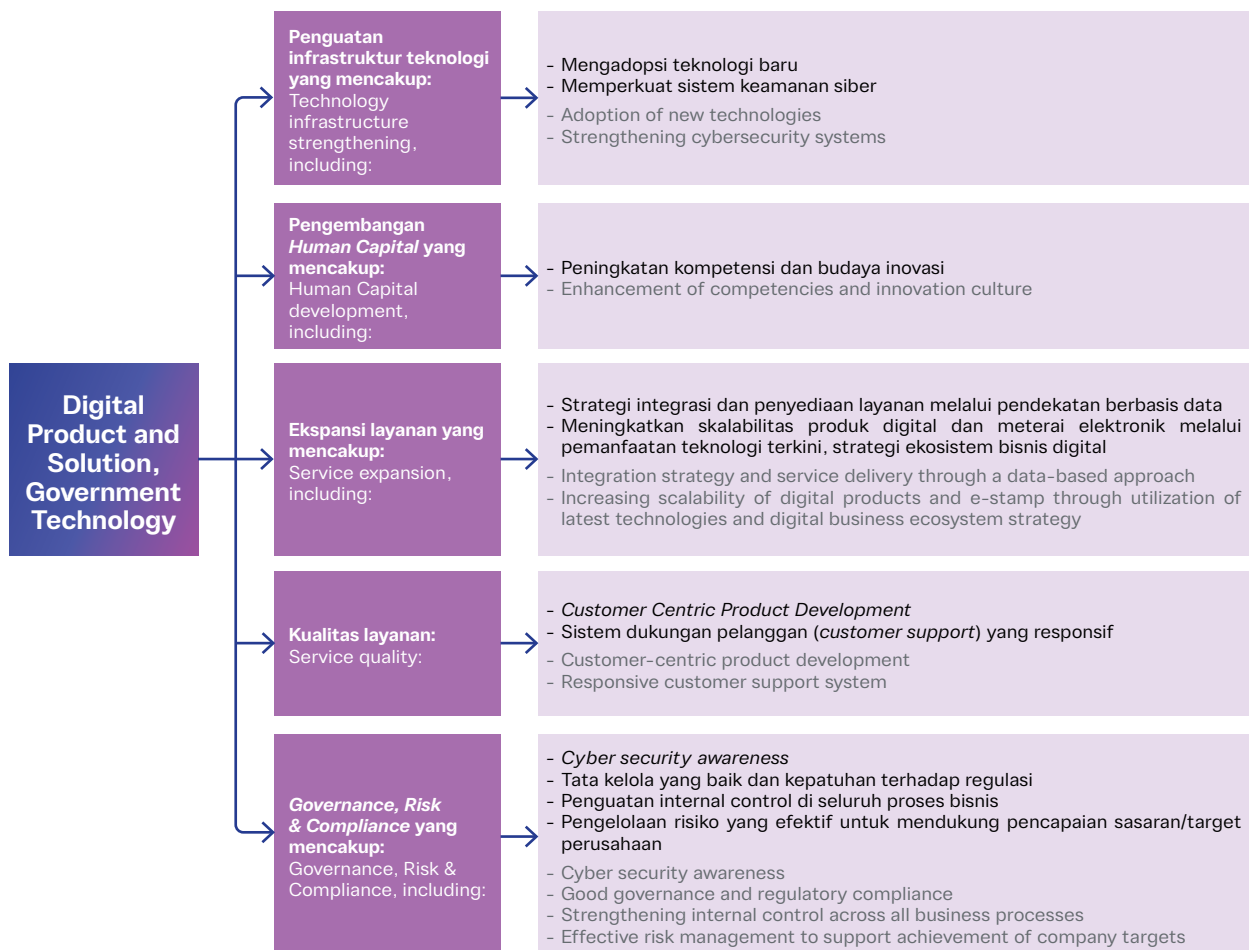
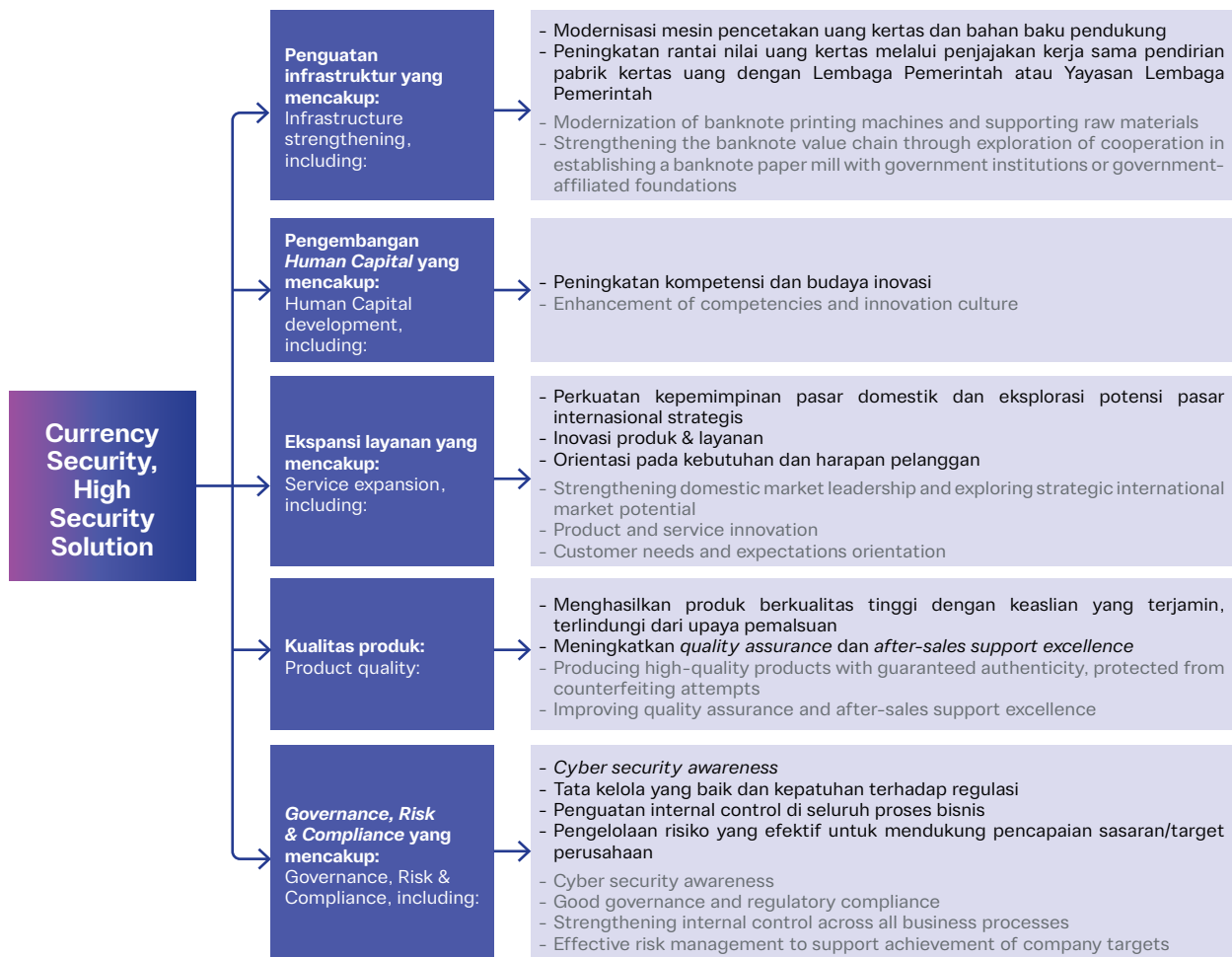
Arahan strategis untuk masing-masing produk sesuai bisnis utama Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RJPP 2025 – 2029

Strategic guidelines for each product in line with the Company's core business, as set forth in the 2025–2029 RJPP

	Produk Product	Arahan Strategis RJPP Strategic Direction under RJPP
Uang Currency	Uang kertas domestik Domestic banknotes	Memperkuat integrasi rantai nilai untuk meningkatkan kapabilitas dan margin keuntungan. Strengthening value chain integration to improve capability and profit margin.
	Uang kertas internasional International banknotes	Mengeksplorasi potensi pasar baru, negara-negara yang dapat menjadi pintu masuk untuk memasuki segmen non-uang. Exploring new market potential and countries that can serve as entry points into the non-currency segment.
Non-Uang Non-Currency	Personal ID domestik (termasuk paspor) Domestic personal ID (including passports)	Mempertahankan kepemimpinan pasar domestik dengan meningkatkan kapabilitas. Maintaining domestic market leadership by enhancing capabilities.
	Pita Cukai Excise stamps	Mempertahankan kepemimpinan pasar domestik dan meningkatkan eksistensi di potensi segmen baru. Maintaining domestic market leadership and strengthening presence in potential new segments.
	Kartu pembayaran domestik Domestic payment cards	Fokus pada pelanggan strategis dan produk pilihan, yang memiliki sinergi dengan produk inti PERURI. Focusing on strategic customers and selected products that have synergy with PERURI's core products.
	Dokumen sekuriti internasional International security documents	Eksplorasi potensi pasar internasional strategis dilakukan untuk terus membangun kapabilitas dan kapasitas. Exploring strategic international market opportunities to continuously build capability and capacity.
Solusi Sekuriti Digital Digital Security Solutions	Produk digital (Code, Sign, Trust) Digital products (Code, Sign, Trust)	Akselerasi maturitas use case dan memperkuat go-to market (GTM) strategy, potensi untuk kerja sama dengan mitra/BUMN dan integrasi dengan program Govtech. Accelerating use case maturity and strengthening go-to-market (GTM) strategy, with potential collaboration with partners/SOEs and integration with GovTech programs.
	E-meterai e-Stamp (e-Meterai)	Akselerasi volume melalui GTM bersama dengan DJP untuk meningkatkan kepatuhan dan adopsi. Accelerating volume through joint GTM with the Directorate General of Taxes to increase compliance and adoption.
Digital Govt Digital Government	K/L SPBE (Pendidikan, kesehatan, sosial, etc.) K/L SPBE (Education, Health, Social, etc.)	Mendesain arsitektur dan platform umum yang memungkinkan interoperabilitas dan <i>customer journey</i> , membangun kapabilitas melalui <i>internal capability</i> dan kerja sama dengan mitra terpilih. Designing a common architecture and platform enabling interoperability and customer journey integration, while building capability through internal capacity and selected strategic partnerships.

Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas *Digital Business*, *Currency Security* dan *High Security Solution* serta meningkatkan peluang bisnis sebagai *Government Technology* (GovTech) Indonesia.

The Company is committed to enhancing its capabilities in Digital Business, Currency Security, and High Security Solutions, as well as expanding business opportunities as Indonesia's Government Technology (GovTech).





Dalam melaksanakan penugasan dan pengembangan bisnis sesuai dengan tema dan arahan strategis Pedoman Umum Perusahaan tahun 2026 maka fungsi *supporting* sangat diperlukan, di antaranya adalah:

1. Memperkuat kapabilitas SDM untuk mendukung operasional perusahaan, melalui strategi manajemen talenta, kebijakan, dan transformasi;
2. Penguatan infrastruktur dan kehandalan operasional untuk meningkatkan cyber resilience secara menyeluruh;
3. Peningkatan pertumbuhan dan profitabilitas kinerja anak Perusahaan;
4. Pelaksanaan inisiatif strategis baru, baik pada PERURI sebagai induk usaha maupun di Anak Perusahaan;
5. Fokus terhadap pertumbuhan bisnis serta tetap memperhatikan tata kelola Perusahaan yang baik dan memenuhi aspek *compliance*;
6. Optimalisasi aset dengan berfokus pada memberikan return yang optimal bagi *stakeholders*;
7. Inovasi teknologi yang berkelanjutan untuk mendukung bisnis PERURI.

Dengan demikian, sasaran strategis Perusahaan tahun 2026 tetap berfokus pada 3 (tiga) pilar utama yang diimplementasikan melalui 19 (Sembilan belas) inisiatif strategis yang tercermin dalam program kerja dan/atau *project management*. Selain itu, perusahaan juga fokus pada pencapaian target pendapatan, kepemimpinan pasar domestik, eksplorasi potensi pasar internasional strategis dan akselerasi bisnis digital serta SPBE.

In executing the tasks and business development in accordance with the theme and strategic directions of the 2026 Company General Guidelines, the supporting function is highly required, which includes:

1. Strengthening Human Resource (HR) capabilities to support company operations through talent management strategies, policies, and transformation;
2. Strengthening infrastructure and operational reliability to increase overall cyber resilience;
3. Increasing the growth and profitability performance of Subsidiaries;
4. Executing new strategic initiatives, both at PERURI as the parent company and at Subsidiaries;
5. Focusing on business growth while remaining mindful of good Corporate Governance and fulfilling compliance aspects;
6. Asset optimization by focusing on providing optimal returns for stakeholders;
7. Sustainable technology innovation to support the business of PERURI.

Thus, the Company's strategic objectives for the year 2026 remain focused on 3 (three) main pillars implemented through 19 (nineteen) strategic initiatives reflected in work programs and/or project management. In addition, the Company also focuses on achieving revenue targets, domestic market leadership, exploring strategic international market potential, and accelerating digital business as well as the SPBE (Electronic-Based Government System).







Fungsi Penunjang Perusahaan Company Support Functions

Transformasi PERURI didukung oleh penguatan sumber daya manusia, teknologi informasi, organisasi, dan sistem kerja yang semakin adaptif untuk menjawab kebutuhan bisnis sekuriti dan layanan digital yang terus berkembang.

PERURI's transformation was supported by the strengthening of human resources, information technology, organization, and increasingly adaptive work systems to respond to the evolving needs of security businesses and digital services.



Sumber Daya Manusia

Human Resources



PERURI berkomitmen mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi dengan tetap menjunjung Tata Nilai Perusahaan dalam menghadapi dinamika perkembangan bisnis. Dalam mewujudkan komitmen tersebut, Divisi SDM memegang peranan yang sangat strategis.

Guna mempersiapkan Perusahaan agar mampu beradaptasi di era digital sekaligus memenuhi tuntutan perkembangan bisnis, Divisi SDM menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas digital karyawan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan SDM yang dirancang untuk mendukung transformasi digital Perusahaan serta memastikan kesiapan karyawan dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa mendatang.

Pengelolaan dan Pengembangan SDM

Pengelolaan dan pengembangan SDM di PERURI memegang peranan krusial dalam mendukung tercapainya visi dan misi Perusahaan. Sebagai entitas yang beroperasi di industri yang dinamis dan terus berkembang, PERURI memahami bahwa investasi pada pengelolaan SDM yang efektif dan berkelanjutan akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan daya saing serta keberlanjutan usaha.

Untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam dunia bisnis, PERURI secara konsisten berkomitmen membangun SDM yang berkualitas, kompeten, dan memiliki daya saing tinggi. Pengelolaan SDM di PERURI tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga diarahkan pada pengembangan kompetensi dan kapasitas individu agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta dinamika kebutuhan pasar. Melalui pengelolaan dan pengembangan SDM yang terintegrasi, Perusahaan memastikan setiap karyawan memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik dari sisi keterampilan teknis maupun kemampuan nonteknis.

PERURI is committed to developing superior, adaptive, and highly competitive Human Resources (HR), while upholding the Company's Core Values in responding to the dynamics of business development. In realizing this commitment, the HR Division plays a highly strategic role.

In order to prepare the Company to adapt to the digital era and meet evolving business demands, the HR Division implements various initiatives to enhance employees' digital capacity and capabilities. This effort is part of the Company's HR management strategy designed to support its digital transformation and ensure employee readiness in facing future challenges and opportunities.

Human Resource Management and Development

Human resource (HR) management and development at PERURI plays a crucial role in supporting the achievement of the Company's vision and mission. As an entity operating in a dynamic and continuously evolving industry, PERURI recognizes that investment in effective and sustainable HR management will contribute positively to improving competitiveness and ensuring business sustainability.

To address various challenges and changes in the business environment, PERURI is consistently committed to building a high-quality, competent, and highly competitive workforce. HR management at PERURI is not only aimed at fulfilling operational needs, but is also directed toward developing individual competencies and capabilities so that employees are able to adapt to technological advancements and evolving market demands. Through integrated HR management and development, the Company ensures that every employee is provided with opportunities to grow and develop, both in terms of technical skills and non-technical competencies.

Fokus Pengelolaan dan Pengembangan SDM Tahun 2025

Pada tahun 2025, PERURI memfokuskan pengelolaan dan pengembangan SDM pada penguatan “*Future Ready Workforce*”, yaitu pengembangan tenaga kerja yang mampu mendukung transformasi bisnis, penguatan kapabilitas digital, serta keberlanjutan kinerja Perusahaan. Fokus tersebut dijalankan melalui perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang lebih akurat, pengembangan kompetensi, penguatan budaya inovasi, penerapan teknologi dalam pengelolaan SDM, serta peningkatan keterlibatan dan kesejahteraan karyawan.

Penguatan SDM PERURI dijalankan melalui beberapa inisiatif utama, meliputi *Strategic Workforce Planning*, manajemen talenta dan suksesi, pengembangan kompetensi dan kapabilitas digital, program pengembangan kepemimpinan, manajemen kinerja, penguatan sistem *reward and recognition*, internalisasi budaya AKHLAK, serta program *employee well-being*. Seluruh inisiatif tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan talenta yang adaptif, kompeten, berorientasi kinerja, dan siap mendukung kebutuhan organisasi di masa depan.

Melalui *Strategic Workforce Planning*, PERURI memetakan kebutuhan SDM berdasarkan arah bisnis, proyeksi pertumbuhan, kebutuhan kapabilitas, dan produktivitas tenaga kerja untuk periode 2025–2029. Upaya ini diperkuat melalui pengembangan *Integrated Talent Management System* yang mengintegrasikan data talenta, hasil *assessment*, pelatihan, penghargaan, struktur organisasi, *career path*, *career plan*, serta perencanaan suksesi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen yang lebih terarah.

Di sisi pengembangan kompetensi, PERURI memperkuat model kompetensi, *Digital Competency Model*, serta program *upskilling* dan *reskilling* untuk mendukung kesiapan SDM dalam menghadapi transformasi digital. Pengembangan ini mencakup kompetensi teknis, manajerial, kepemimpinan, digital, serta kompetensi pendukung lainnya yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan bisnis Perusahaan.

PERURI juga memperkuat manajemen kinerja melalui penyelarasan sasaran individu dengan arah strategis Perusahaan, mulai dari RJPP, KUP, *Corporate KPI*, OMTI, hingga SKI. Penyelarasan ini didukung oleh pengembangan aplikasi Kinerjaku Fase II agar proses pengelolaan dan evaluasi kinerja berjalan lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan target korporasi.

Selain aspek kompetensi dan kinerja, PERURI menempatkan budaya, inovasi, dan kesejahteraan karyawan sebagai elemen penting dalam pengelolaan SDM. Internalisasi nilai AKHLAK, penguatan *culture agent*, *change champion*, *change leader*, serta pelaksanaan Innovation Awards & Kaizen Awards menjadi sarana untuk mendorong kolaborasi, inovasi, produktivitas, dan keterlibatan karyawan. Program

Focus of Human Capital Management and Development in 2025

In 2025, PERURI focused its human capital management and development on strengthening a “*Future Ready Workforce*”, namely the development of a workforce capable of supporting business transformation, digital capability enhancement, and the Company’s sustainable performance. This focus was carried out through more accurate workforce planning, competency development, reinforcement of an innovation culture, adoption of technology in human capital management, as well as improvement of employee engagement and well-being.

PERURI’s human capital strengthening was implemented through several key initiatives, including Strategic Workforce Planning, talent and succession management, competency and digital capability development, leadership development programs, performance management, strengthening of the reward and recognition system, internalization of AKHLAK culture, and employee well-being programs. These initiatives were directed at ensuring the availability of adaptive, competent, performance-oriented talents who are ready to support the organization’s future needs.

Through Strategic Workforce Planning, PERURI mapped its human capital needs based on business direction, growth projections, capability requirements, and workforce productivity for the 2025–2029 period. This effort was reinforced through the development of an Integrated Talent Management System, which integrates talent data, assessment results, training records, recognition data, organizational structure, career paths, career plans, and succession planning to support more focused management decision-making.

In competency development, PERURI strengthened its competency model, Digital Competency Model, as well as upskilling and reskilling programs to support human capital readiness in facing digital transformation. This development covered technical, managerial, leadership, digital, and other supporting competencies relevant to organizational needs and the Company’s business development.

PERURI also enhanced performance management by aligning individual objectives with the Company’s strategic direction, starting from the Long-Term Corporate Plan, Corporate Management Policy, Corporate KPI, OMTI, to Individual Performance Targets. This alignment was supported by the development of the Kinerjaku Phase II application to ensure that performance management and evaluation processes are more structured, measurable, and aligned with corporate targets.

Beyond competency and performance aspects, PERURI placed culture, innovation, and employee well-being as key elements in human capital management. The internalization of AKHLAK values, strengthening of culture agents, change champions, and change leaders, as well as the implementation of the Innovation Awards & Kaizen Awards, served as platforms to encourage collaboration, innovation,



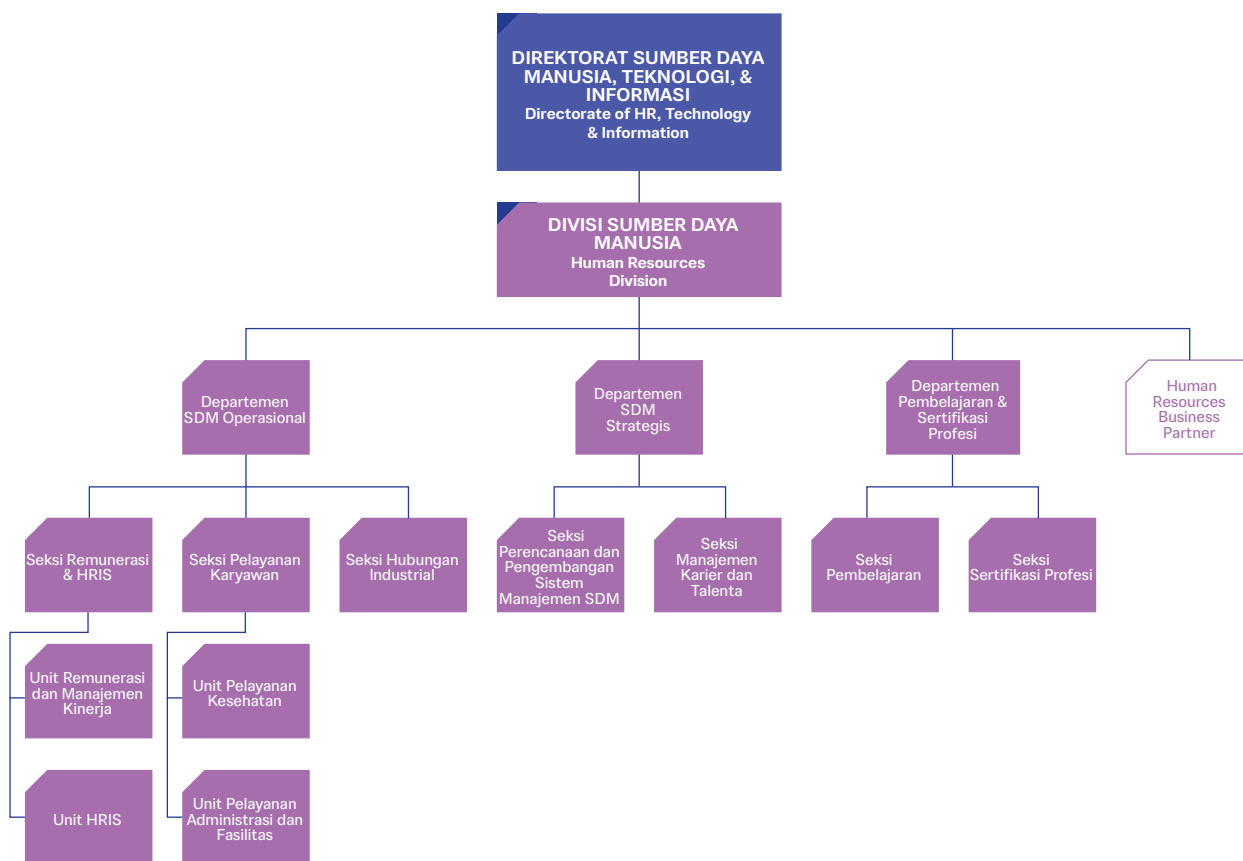
employee well-being juga dijalankan untuk mendukung kesejahteraan fisik, mental, finansial, dan sosial, sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat, positif, dan produktif.

Melalui fokus tersebut, PERURI memperkuat kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan bisnis dan teknologi. Integrasi antara perencanaan tenaga kerja, manajemen talenta, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, sistem penghargaan, budaya inovasi, dan kesejahteraan karyawan menjadi fondasi penting dalam membangun SDM yang kompeten, adaptif, dan siap mendukung transformasi PERURI sebagai perusahaan teknologi berbasis *high security solution*.

Struktur Organisasi SDM

Struktur Organisasi SDM PERURI per 31 Desember 2025

PERURI Human Resources Organization Structure as of December 31, 2025



Pengelolaan SDM dilaksanakan melalui Divisi SDM yang berada di bawah tanggung jawab Direktur SDM, Teknologi, dan Informasi. Divisi SDM memiliki peran strategis dalam merencanakan, mengelola, serta mengembangkan SDM Perusahaan secara komprehensif.

Ruang lingkup tugas Divisi SDM meliputi perencanaan SDM yang berkelanjutan, pengembangan kompetensi karyawan, dan penciptaan lingkungan kerja yang mendorong produktivitas serta inovasi. Seluruh proses pengelolaan tersebut diselaraskan dengan kebutuhan organisasi dan responsif terhadap dinamika pasar yang terus berkembang,

productivity, and employee engagement. Employee well-being programs were also implemented to support physical, mental, financial, and social well-being, thereby fostering a healthy, positive, and productive work environment.

Through these focus areas, PERURI strengthened its organizational readiness in responding to business and technological changes. The integration of workforce planning, talent management, competency development, performance management, reward systems, innovation culture, and employee well-being forms an essential foundation for building competent, adaptive human capital that is ready to support PERURI's transformation as a high security solution technology company.

Human Resources Organization Structure

Human resource management is carried out through the HR Division, which operates under the responsibility of the Director of Human Resources, Technology, and Information. The HR Division plays a strategic role in planning, managing, and developing the Company's human resources in a comprehensive manner.

The scope of the HR Division's responsibilities includes sustainable workforce planning, employee competency development, and the creation of a work environment that fosters productivity and innovation. All of these management processes are aligned with organizational needs and are responsive to continuously evolving market dynamics,

sehingga Perusahaan senantiasa memiliki tim yang siap menghadapi tantangan di masa depan dan mampu memberikan nilai tambah optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Strategi Pengelolaan SDM

Perusahaan melalui Divisi SDM melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta *Human Capital Master Plan*. Penerapan sistem dan tata kelola SDM yang efektif diharapkan dapat memperkuat kegiatan operasional maupun fungsi manajerial, baik di tingkat Perusahaan maupun anak perusahaan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, strategi dan kebijakan di bidang SDM diimplementasikan melalui sejumlah inisiatif strategi yang meliputi:

Inisiatif Divisi SDM 2025

enabling the Company to consistently maintain a workforce that is well-prepared to face future challenges and capable of delivering optimal value to all stakeholders.

Human Resource Management Strategy

Through the HR Division, the Company manages its Human Resources in alignment with the Company's Long-Term Plan and the Human Capital Master Plan. The implementation of effective HR systems and governance is expected to strengthen both operational activities and managerial functions, at the Company level as well as across its subsidiaries.

To achieve these objectives, HR strategies and policies are implemented through a number of strategic initiatives, which include:

HR Division Initiatives 2025

- 1 Pelaksanaan tindak lanjut/rekomendasi berdasarkan hasil EES 2025:
 1. *Performance Management*–Harmonisasi Nilai Kinerja Individu (NKI) menggunakan sistem terintegrasi.
 2. *Work Life Balance*– Peningkatan program Well Being kepada seluruh karyawan yang mencakup aspek fisik, mental, sosial dan finansial.

Implementation of follow-up actions/recommendations based on the 2025 EES results:

 1. Performance Management – Harmonization of Individual Performance Scores (NKI) using an integrated system.
 2. Work-Life Balance – Enhancement of well-being programs for all employees, covering physical, mental, social, and financial aspects.
- 2 Pelaksanaan inisiatif strategis berdasarkan HC Masterplan tahun 2025:
 1. Membangun *HR Operating Model* yang Efektif.
 2. Pengembangan dan Implementasi proses Onboarding yang telah terintegrasi berdasarkan *Talent Mobility* atau *New Hire*.
 3. Penerapan *Integrated Tools Coaching* yang di dukung oleh *tools* dan *coaching tracker*.
 4. Pengembangan Kompetensi yang selaras dengan *Success Profile middle to top management*.
 5. Mengimplementasikan EVP untuk kandidat yang sesuai dan terintergrasi dengan pengembangan karir.
 6. Pengembangan dan Implementasi proses *Onboarding* yang telah terintegrasi berdasarkan *Talent Mobility* atau *New Hire*.
 7. Implementasi KRA untuk operator.
 8. *Performance Management (PM) Analytics*.

Implementation of strategic initiatives based on the 2025 HC Master Plan:

 1. Establishing an effective HR Operating Model.
 2. Development and implementation of an integrated onboarding process based on Talent Mobility or New Hire.
 3. Implementation of Integrated Coaching Tools supported by tools and coaching trackers.
 4. Competency development aligned with the Success Profile for middle to top management.
 5. Implementation of EVP for suitable candidates integrated with career development.
 6. Development and implementation of an integrated onboarding process based on Talent Mobility or New Hire.
 7. Implementation of KRA for operators.
 8. Performance Management (PM) Analytics.
- 3 Pemahaman pegawai atas AKHLAK dengan melaksanakan:
 1. Program implementasi budaya Akhlak melalui peningkatan peran *Change Leader*, *Change Agent* dan seluruh karyawan.
 2. Pengukuran indeks implementasi Akhlak.

Enhancing employees' understanding of AKHLAK values through:

 1. Implementation of AKHLAK culture programs by strengthening the roles of Change Leaders, Change Agents, and all employees.
 2. Measurement of the AKHLAK implementation index.
- 3 Pelaksanaan project yang telah ditetapkan guna penyelarasan dan eksekusi strategi di antaranya:
 1. Project Penerapan E2E kebijakan SDM dan Transformasi.
 2. Pelaksanaan Project Penerapan Strategi Manajemen Talenta E2E (*End-to-End*) untuk Memastikan Kapasitas DM Tercukupi Khususnya Keahlian Strategis untuk Digital Solutions dan SPBE.
 3. Pemenuhan Pelaksanaan Project Mengartikulasikan, mengaktifkan, dan menanamkan budaya korporat baru untuk memungkinkan evaluasi berbasis kompetensi dan inovasi.

Execution of designated projects to ensure alignment and strategy execution, including:

 1. E2E (End-to-End) HR policy implementation and transformation project.
 2. Implementation of the E2E Talent Management Strategy Project to ensure sufficient DM capacity, particularly in strategic expertise for Digital Solutions and SPBE.
 3. Implementation of projects to articulate, activate, and embed a new corporate culture to enable competency- and innovation-based evaluation.



4	Pelaksanaan <i>supporting roles</i> dalam PM: 1. Implementasi SPBE dengan pengembangan kapabilitas organisasi PERURI melalui kemitraan, dan adopsi teknologi. 2. Project Penguatan Kerangka dan budaya manajemen risiko untuk menjaga model bisnis baru. Execution of supporting roles in PM: 1. Implementation of SPBE through the development of PERURI's organizational capabilities via partnerships and technology adoption. 2. Project to strengthen the risk management framework and culture to sustain the new business model.
5	Pelaksanaan Transformasi Organisasi dan Kultur melalui perkembangan inovasi dan <i>continuous improvement</i>. Implementation of organizational and cultural transformation through innovation development and continuous improvement.
6	Pengimplementasian inovasi. Implementation of innovation initiatives.
7	Pelaksanaan kegiatan yang menunjang Milenial dalam nominated talent dan perempuan dalam <i>nominated talent</i> dengan <i>action plan</i>: 1. Pelaksanaan <i>Talent Management Program</i> (<i>all level</i>): a. <i>Talent Identification</i> b. <i>Talent development</i>, c. <i>Career Management</i>. b. Program <i>Talent Pool</i> Direksi BUMN: a. <i>Talent approval</i> oleh komite Talenta/Komite Nominasi dan Remunerasi, b. <i>Update</i> kelengkapan oleh <i>selected/Nominated Talent</i>, c. Koordinasi proses validasi oleh <i>Cluster Talent Comitee</i>, d. <i>Update Selected/Nominated Talent</i> pada portal HC BUMN oleh Admin. <i>Approval</i> oleh PIC Talent BUMN (Direktur HC). Execution of initiatives supporting Millennials and women within nominated talent through the following action plans: 1. Talent Management Program (all levels): a. Talent Identification, b. Talent Development, c. Career Management. 2. BUMN Directors Talent Pool Program: a. Talent approval by the Talent Committee/Nomination and Remuneration Committee, b. Updating documentation by selected/nominated talent, c. Coordination of validation process by the Cluster Talent Committee, d. Updating selected/nominated talent in the BUMN HC portal by Admin, with approval by the PIC of BUMN Talent (HC Director).
8	Pelaksanaan persiapan talent/suksesor untuk posisi jabatan structural. Preparation of talent/successors for structural positions.
9	Peningkatan kapabilitas talent BUMN dalam transformasi digitalisasi Perusahaan. Enhancement of BUMN talent capabilities in the Company's digital transformation.
10	Mengetahui tingkat produktivitas karyawan yang berkontribusi dalam pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan dengan sasaran peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis Perusahaan. Assessment of employee productivity levels contributing to the achievement of the Company's short-term and long-term objectives, with the aim of improving profitability and business growth.
11	Tahapan yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1. Setiap divisi perlu mengumpulkan daftar kebutuhan training kepada Dept. PSP di awal tahun. 2. Dept. PSP melakukan review dan menyediakan kebutuhan training unit kerja. 3. Dept. PSP melakukan monitoring atas keikutsertaan training setiap unit kerja. The following steps are to be undertaken: 1. Each division submits a list of training needs to the PSP Department at the beginning of the year. 2. The PSP Department reviews and provides training requirements for each work unit. 3. The PSP Department monitors training participation across all work units.

Sistem Rekrutmen

Untuk mendukung ekspansi pasar global, pertumbuhan Perusahaan dalam memperluas pangsa pasar Internasional, mengembangkan bisnis di sektor digital, serta menjaga keberlanjutan usaha dibidang *high security printing*, PERURI melaksanakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia melalui proses rekrutmen yang terstandarisasi dan modern serta disesuaikan dengan kompetensi yang diperlukan.

Perkembangan bisnis yang pesat membutuhkan sudut pandang yang beragam. PERURI membuka jalur rekrutmen yang inklusif untuk menciptakan ekosistem kerja yang inovatif. PERURI menerapkan proses rekrutmen yang terbuka, nasional, serta melibatkan mitra eksternal terpercaya yang memiliki reputasi tinggi di bidang rekrutmen. Seluruh proses dilaksanakan secara adil, non diskriminatif, terbuka dan transparan.

Recruitment System

To support global market expansion, the Company's growth in expanding its international market share, developing its digital business, and maintaining business sustainability in the high-security printing sector, PERURI fulfills its human resource needs through a standardized and modern recruitment process tailored to the required competencies.

Rapid business development requires diverse perspectives. PERURI opens inclusive recruitment pathways to create an innovative work ecosystem. The Company implements an open, nationwide recruitment process and collaborates with reputable external partners with strong expertise in recruitment. All processes are conducted fairly, non-discriminatorily, openly, and transparently.

PERURI melakukan proses rekrutmen tahun 2025 melalui:

- › Rekrutmen Internal: dilakukan melalui mekanisme *job tender*, mutasi antar unit, dan perbantuan internal.
- › Rekrutmen Eksternal: dilakukan melalui berbagai skema seperti Rekrutmen Mandiri, Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) untuk umum, disabilitas, Rekrutmen Professional Hire, program Magang Generasi Bertalenta (Magenta), serta rekrutmen untuk karyawan PKWT.

In 2025, PERURI carries out its recruitment process through:

- › Internal Recruitment: conducted through job tender mechanisms, inter-unit transfers, and internal secondments.
- › External Recruitment: conducted through various schemes such as Independent Recruitment, the Joint BUMN Recruitment (RBB) for general applicants and persons with disabilities, Professional Hire recruitment, the Magenta (Generasi Bertalenta Internship) program, as well as recruitment for fixed-term contract employees (PKWT).

Data Rekrutmen Karyawan 2025 Employee Recruitment Data 2025

Status Ketenagakerjaan Employment Status	Jumlah (orang) Number (persons)
Karyawan Tetap Permanent Employees	66
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Fixed-Term Employment Agreement (PKWT)	637
Tenaga Profesional Berjangka Waktu (TPBW) Fixed-Term Professional Personnel (TPBW)	67
Honoror Honorary Employees	0
Magang Interns	275

Tingkat Turnover Karyawan

Tingkat *turnover* karyawan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan Perusahaan sekaligus efektivitas strategi pengelolaan sumber daya manusia yang diterapkan. *Turnover* karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jumlah karyawan yang direkrut atau bergabung dengan Perusahaan serta jumlah karyawan yang keluar, baik karena pengunduran diri, pensiun, maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, PHK adalah berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha karena alasan tertentu yang menyebabkan hak dan kewajiban kedua belah pihak turut berakhir. Dalam undang-undang tersebut, terdapat dua jenis PHK yang diatur, yaitu:

1. PHK sukarela, yang terjadi karena pengunduran diri (*resign*), memasuki masa pensiun, atau karena meninggal dunia.
2. PHK tidak sukarela, yang dilakukan karena alasan efisiensi Perusahaan atau kondisi tertentu di luar kendali Perusahaan yang memaksa untuk melakukan pemecatan (*force majeure*).

Kedua kategori PHK tersebut memiliki dampak langsung terhadap tingkat *turnover* karyawan, yang merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas pengelolaan SDM. Tingkat *turnover* yang tinggi dapat mencerminkan adanya tantangan dalam aspek retensi, lingkungan kerja, maupun tingkat kesejahteraan karyawan.

Employee Turnover Rate

Employee turnover rate is one of the key indicators in assessing the Company's overall health as well as the effectiveness of its human resource management strategies. Employee turnover is influenced by various factors, including the number of employees recruited or joining the Company and the number of employees leaving, whether due to resignation, retirement, or termination of employment.

In accordance with the provisions of labor law, termination of employment refers to the end of the working relationship between an employee and the employer for certain reasons, resulting in the cessation of rights and obligations of both parties. The law recognizes two types of termination of employment:

1. Voluntary termination, which occurs due to resignation, retirement, or death.
2. Involuntary termination, which occurs due to company efficiency measures or certain conditions beyond the Company's control that necessitate termination (*force majeure*).

Both categories of termination have a direct impact on the employee turnover rate, which serves as a key indicator in evaluating the effectiveness of HR management. A high turnover rate may reflect challenges in employee retention, work environment, or employee welfare.



Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan perlu melakukan pemantauan dan analisis atas tingkat *turnover* karyawan secara komprehensif dan berkesinambungan. Langkah ini penting untuk memastikan penyusunan kebijakan SDM yang tepat sasaran, meningkatkan tingkat kepuasan dan keterikatan karyawan, serta menjaga keberlangsungan operasional Perusahaan agar tetap stabil dan produktif.

Data Turnover Karyawan Tahun 2025

Employee Turnover Data in 2025

Keterangan Description	2025	2024
Mengundurkan Diri Resignation	147	47
Pensiun Retirement	22	29
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Termination of Employment (PHK)	0	0
Meninggal Dunia Deceased	4	5
Habis Kontrak End of Contract	1.207	563
Jumlah Total	1.380	644
%	48,68%	25,79%

Manajemen Talenta

Manajemen Talenta merupakan suatu proses terstruktur untuk mengidentifikasi, memperoleh, mengembangkan, dan mengelola sumber daya manusia guna menghasilkan individu yang unggul dan berkualitas. Implementasi manajemen talenta difokuskan pada karyawan level senior serta individu yang menempati posisi-posisi strategis di dalam Perusahaan.

Tujuan utama penerapan Manajemen Talenta di PERURI adalah menyusun perencanaan suksesi yang objektif, sistematis, transparan, tepat waktu, dan akuntabel, sehingga dapat mempercepat penyiapan kader pemimpin masa depan. Di samping itu, Manajemen Talenta diarahkan untuk memperkuat peran PERURI sebagai *talent pool* yang andal bagi BUMN lainnya dalam kerangka Program Manajemen Talenta dan Suksesi yang diinisiasi oleh BP BUMN.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, implementasi Manajemen Talenta di PERURI dijalankan melalui sejumlah aktivitas utama yang mencakup:

1. *Talent Identification* (proses ini dimulai dari *Talent Sourcing* sampai dengan *Talent Classification*) and *Assessment*
2. *Talent Development*
3. Pemantauan dan Evaluasi

Output dari proses Manajemen Talenta berupa pemetaan dan klasifikasi talenta yang dilakukan menggunakan metode *9-grid box*, dengan sumbu horizontal merepresentasikan aspek kinerja karyawan dan sumbu vertikal menggambarkan tingkat potensi yang diukur melalui hasil *Assessment Center*.

In this regard, the Company needs to conduct comprehensive and continuous monitoring and analysis of employee turnover rates. This is essential to ensure the formulation of well-targeted HR policies, improve employee satisfaction and engagement, and maintain stable and productive business operations.

Talent Management

Talent Management is a structured process to identify, acquire, develop, and manage human resources in order to produce high-quality and high-performing individuals. The implementation of talent management is focused on senior-level employees as well as individuals occupying strategic positions within the Company.

The primary objective of implementing Talent Management at PERURI is to establish a succession planning process that is objective, systematic, transparent, timely, and accountable, thereby accelerating the preparation of future leadership candidates. In addition, Talent Management is directed at strengthening PERURI's role as a reliable talent pool for other SOEs within the framework of the Talent Management and Succession Program initiated by the BP BUMN.

To achieve these objectives, the implementation of Talent Management at PERURI is carried out through several key activities, including:

1. Talent Identification (covering processes from Talent Sourcing to Talent Classification) and Assessment
2. Talent Development
3. Monitoring and Evaluation

The output of the Talent Management process is in the form of talent mapping and classification using the 9-box grid method, where the horizontal axis represents employee performance and the vertical axis represents potential levels measured through Assessment Center results.

Sistem Manajemen Kinerja

Penilaian Kinerja Karyawan

PERURI mengimplementasikan *Key Performance Indicator* (KPI) yang mencakup penetapan target, mekanisme pengukuran, serta pemantauan atas capaian indikator kinerja karyawan. Evaluasi kinerja dan kompetensi dilakukan secara berkala, dan hasilnya menjadi landasan dalam penetapan kebijakan remunerasi maupun pengembangan karier.

Proses penilaian diawali dengan penyusunan Kontrak Manajemen (KM) bagi Direksi, Kepala Divisi, serta Kepala Departemen/Biro, yang kemudian diturunkan ke dalam Sasaran Kinerja Individu (SKI) untuk Kepala Seksi, Kepala Unit, hingga staf pelaksana. Sistem evaluasi kinerja ini terus dikembangkan dan disempurnakan melalui program kerja berkelanjutan oleh Divisi SDM guna memastikan proses penilaian berlangsung objektif, adil, dan proporsional.

Penyempurnaan tersebut diarahkan untuk memperkuat motivasi karyawan dalam mencapai target organisasi serta menghasilkan penilaian yang mencerminkan kontribusi nyata setiap individu. Melalui sistem evaluasi kinerja yang efektif, PERURI berupaya mendorong optimalisasi kinerja karyawan sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan terkait remunerasi dan pengembangan didasarkan pada hasil penilaian yang akurat dan berkeadilan.

Manajemen Karier

Manajemen Karier merupakan serangkaian proses yang disusun secara sistematis untuk mengelola serta mengembangkan perjalanan karier karyawan, dengan tujuan menyelaraskan aspirasi individu dengan kebutuhan dan strategi Perusahaan. Proses ini dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang siklus kerja karyawan di Perusahaan, sejak tahap rekrutmen hingga berakhirnya masa kerja.

Performance Management System

Employee Performance Appraisal

PERURI implements a *Key Performance Indicator* (KPI) system that includes target setting, measurement mechanisms, and monitoring of employee performance achievements. Performance and competency evaluations are conducted periodically, and the results serve as the basis for determining remuneration policies as well as career development.

The appraisal process begins with the preparation of Management Contracts (Kontrak Manajemen/KM) for the Board of Directors, Division Heads, and Department/Bureau Heads, which are then cascaded into Individual Performance Targets (Sasaran Kinerja Individu/SKI) for Section Heads, Unit Heads, and operational staff. This performance evaluation system continues to be developed and refined through ongoing work programs by the HR Division to ensure that the appraisal process is objective, fair, and proportional.

These enhancements are aimed at strengthening employee motivation in achieving organizational targets and generating assessments that reflect each individual's actual contribution. Through an effective performance evaluation system, PERURI strives to optimize employee performance while ensuring that all decisions related to remuneration and development are based on accurate and equitable assessment results.

Career Management

Career Management is a series of systematically structured processes to manage and develop employees' career journeys, with the aim of aligning individual aspirations with the Company's needs and strategies. This process is carried out continuously throughout the employee lifecycle, from recruitment to the end of employment.





Pelaksanaan Manajemen Karier terbagi dalam tiga kelompok utama, yaitu:

1. Identifikasi kebutuhan organisasi akan jabatan yang diperlukan, melalui perencanaan sumber daya manusia, analisis kapasitas kerja, dan rencana pengembangan unit organisasi.
2. Identifikasi karakteristik dan kompetensi karyawan, antara lain melalui penilaian kompetensi dan/atau *self assessment*.
3. Penyediaan sarana pengembangan karyawan, berdasarkan potensi yang dimiliki dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, manajemen karier merupakan tanggung jawab bersama antara organisasi, atasan, dan karyawan. Organisasi menyediakan sistem, sarana, dan informasi terkait perencanaan serta pengembangan karier. Karyawan bertanggung jawab menetapkan arah dan tujuan pengembangan karier pribadi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, atasan berperan memfasilitasi pengembangan karyawan sekaligus menjadi mediator untuk menyelaraskan kebutuhan karyawan dengan kebutuhan organisasi.

Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Karier

Manajemen Karier PERURI dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan utama sebagai berikut:

- a. *Penilaian Diri/Self Assessment*
Self assessment merupakan proses penilaian diri karyawan atas karakteristik dan kompetensi yang dimilikinya. Proses ini membantu karyawan mengenali aspirasi, minat karier, kekuatan, motivasi, serta kebutuhan pengembangan diri. Hasilnya dapat dituangkan dalam *Individual Development Plan* yang disepakati oleh karyawan dan atasan sebagai dasar perencanaan pengembangan kompetensi individu.
- b. *Succession Plan*
Succession plan merupakan sistem yang dikembangkan Perusahaan untuk mengidentifikasi karyawan pimpinan yang berpotensi dan siap menempati jabatan-jabatan utama. Program ini bertujuan menyiapkan kader kepemimpinan terbaik untuk menjaga kesinambungan bisnis Perusahaan.
- c. *Pergerakan Karier/Career Movement*
Pergerakan karier merupakan perpindahan karyawan antarunit maupun di dalam unit organisasi untuk mengembangkan pengetahuan, kompetensi, keterampilan, serta mendukung pembinaan karyawan. Pergerakan karier dilakukan dengan prinsip penempatan karyawan pada posisi yang tepat agar motivasi, semangat, dan produktivitas kerja meningkat.
- d. *Pelatihan*
PERURI menyediakan program pelatihan, baik *in house* maupun eksternal, untuk memenuhi kebutuhan pengembangan karyawan. Program pelatihan mencakup pelatihan teknis, pengembangan diri, dan kepemimpinan.

1. The implementation of career management includes three main areas, namely:
2. Identification of the Company's organizational needs for required positions, through human capital planning, workload capacity analysis, and organizational unit development planning;
3. Identification of employees' characteristics and competencies, among others through competency assessment and/or self-assessment;
4. Provision of employee development facilities based on individual potential and aligned with the overall needs of the organization.

In its implementation, career management is a shared responsibility of the organization, direct supervisors, and employees. The organization provides the systems, facilities, and information required for career planning and development. Employees are responsible for determining the direction and objectives of their own career development in accordance with their interests and competencies. Meanwhile, direct supervisors play a role in facilitating employee development and acting as mediators to align employees' career aspirations with organizational needs.

Career Planning and Development Activities

PERURI's Career Management is implemented through several main activities, as follows:

- a. *Self-Assessment*
Self-assessment is a process through which employees assess their own characteristics and competencies. This process helps employees identify their aspirations, career interests, strengths, motivations, and development needs. The results may be reflected in an *Individual Development Plan* agreed upon by the employee and the direct supervisor as the basis for individual competency development planning.
- b. *Succession Plan*
Succession plan is a system developed by the Company to identify leaders with potential and readiness to occupy key positions. This program aims to prepare the best leadership talents to ensure business continuity.
- c. *Career Movement*
Career movement refers to the movement of employees across units or within an organizational unit to develop their knowledge, competencies, and skills, as well as to support employee development. Career movement is carried out based on the principle of placing employees in the right positions to enhance motivation, engagement, and work productivity.
- d. *Training*
PERURI provides both in-house and external training programs to meet employee development needs. These programs include technical training, personal development, and leadership development.

e. *On the Job Orientation*

On the job orientation merupakan aktivitas pelatihan dan pengembangan karyawan yang diperoleh melalui pengalaman atau penugasan langsung di tempat kerja di luar unit organisasi tempat karyawan ditempatkan.

f. *Penugasan Khusus/Special Assignment*

Penugasan khusus merupakan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada karyawan untuk menangani proyek tertentu dalam periode waktu tertentu. Penugasan ini diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pelaksanaan proyek serta kualifikasi atau kompetensi karyawan.

Pergerakan Karier

PERURI menetapkan empat jenis pergerakan karier, yaitu:

1. Rotasi

Rotasi merupakan pergerakan karier secara lateral, yaitu perpindahan karyawan ke jabatan lain pada *layer* atau *grade* yang sama.

2. Promosi

Promosi merupakan pergerakan karier ke jabatan dengan tanggung jawab lebih besar pada *layer* atau *grade* yang lebih tinggi. Untuk memperoleh promosi, karyawan harus memiliki kinerja yang sangat baik selama dua tahun terakhir. Khusus untuk promosi jabatan, persetujuan Direksi perlu disertai *assessment* pribadi karyawan yang dilakukan oleh Divisi SDM.

3. Demosi

Demosi merupakan perpindahan karyawan ke jabatan atau posisi dengan *layer* atau *grade* yang lebih rendah. Umumnya demosi dilakukan sebagai sanksi atau karena kinerja karyawan yang kurang baik.

4. Relokasi Karier/Penugasan di Luar Organisasi

Relokasi karier merupakan pergerakan karyawan ke unit organisasi di luar Perusahaan, anak perusahaan, atau perusahaan afiliasi.

Kewenangan dalam Pergerakan Karier

Kewenangan pergerakan karier melibatkan atasan terkait, pejabat pemberi usulan, pejabat penerima, serta Divisi SDM. Atasan terkait memiliki kewenangan untuk mengusulkan pergerakan karier. Pejabat calon atasan baru berwenang mengajukan permintaan, melakukan evaluasi, dan menyetujui perpindahan karyawan. Divisi SDM berperan memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pengembangan Kompetensi

PERURI secara berkelanjutan memperkuat kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan produktivitas, kesiapan talenta, serta kebutuhan transformasi bisnis Perusahaan. Pengembangan kompetensi diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas teknis, manajerial, kepemimpinan, digital, serta kompetensi pendukung lainnya yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan bisnis PERURI.

e. *On-the-Job Orientation*

On-the-job orientation is a training and development activity gained through direct experience or assignment in the workplace outside the organizational unit where the employee is assigned.

f. *Special Assignment*

Special assignment refers to the assignment of specific duties and responsibilities to employees to handle certain projects within a defined period. Such assignments are given by considering the importance of the project as well as the qualifications or competencies of the employees.

Career Movement

PERURI defines four types of career movement, namely:

1. Rotation

Rotation is a lateral career movement, in which employees are transferred to other positions within the same layer or grade.

2. Promotion

Promotion is a career movement to a position with greater responsibilities at a higher layer or grade. To be eligible for promotion, employees must demonstrate excellent performance over the last two years. For position promotion, approval from the Board of Directors must be supported by an individual assessment conducted by the Human Capital Division.

3. Demotion

Demotion is the movement of employees to a position at a lower layer or grade. In general, demotion is carried out as a sanction or due to unsatisfactory employee performance.

4. Career Relocation / Assignment Outside the Organization

Career relocation refers to the movement of employees to an organizational unit outside the Company, a subsidiary, or an affiliated company.

Authority in Career Movement

The authority for career movement involves relevant supervisors, proposing officials, receiving officials, and the Human Capital Division. Relevant supervisors have the authority to propose career movement. Prospective new supervisors have the authority to submit requests, conduct evaluations, and approve employee transfers. The Human Capital Division provides recommendations and/or approvals in accordance with the applicable mechanism.

Competency Development

PERURI continuously strengthens its human capital competencies to support productivity improvement, talent readiness, and the Company's business transformation needs. Competency development is directed toward enhancing technical, managerial, leadership, digital, and other supporting competencies that are relevant to organizational requirements and PERURI's business development.



Sepanjang tahun 2025, PERURI menyelenggarakan 308 sesi pelatihan, baik secara internal maupun eksternal, dengan total 3.781 peserta dan mencapai 69.968 jam pelatihan.

Program pelatihan tersebut mencakup berbagai kategori, antara lain pelatihan wajib, kepemimpinan dan manajerial, perencanaan dan strategi, penjualan dan pengembangan usaha, desain, produksi, pengendalian kualitas, K3 dan lingkungan, operasional, SDM, pengamanan, public relation, hukum, keuangan, teknik dan rekayasa, akuntansi, teknologi informasi dan pengembangan digital, audit internal, manajemen risiko, learning center, pelatihan bagi karyawan PKWT, *prohire*, calon karyawan organik, pelatihan pekerjaan jasa, pelatihan luar negeri non-investasi, serta pelatihan atas investasi.

Pengembangan Kompetensi Tahun 2025 2025 Competency Development

Throughout 2025, PERURI organized 308 training sessions, both internally and externally, with a total of 3,781 participants and 69,968 training hours.

These training programs covered various categories, including mandatory training, leadership and managerial training, planning and strategy, sales and business development, design, production, quality control, occupational health, safety and environment, operations, human capital, security, public relations, legal, finance, engineering and technical training, accounting, information technology and digital development, internal audit, risk management, learning center, training for fixed-term contract employees, *prohires*, and prospective permanent employees, service work training, non-investment overseas training, and investment-related training.

No.	Kategori Program Program Category	Jumlah Pelatihan Number of Training	Tempat Pelaksanaan (DN/LN) Training Location (Domestic/Overseas)
1	Pelatihan Wajib Mandatory Programs	21	DN Domestic
2	Pelatihan Kepemimpinan, Pengembangan Kepribadian, dan Manajerial Leadership, Personal Development, and Managerial Training	31	DN Domestic
3	Pelatihan Perencanaan dan Strategi Planning and Strategy Training	3	DN Domestic
4	Program Pelatihan Penjualan dan Pengembangan Usaha Sales and Business Development Training Program	7	DN Domestic
5	Program Pelatihan Desain Design Training Program	6	DN Domestic
6	Program Pelatihan Produksi Production Training Program	14	DN Domestic
7	Program Pelatihan Pengendalian Kualitas Quality Control Training Program	4	DN Domestic
8	Program Pelatihan K3 & Lingkungan Occupational Health, Safety, and Environment Training Program	23	DN Domestic
9	Program Pelatihan Operasional (Logistik, Procurement, dan Umum) Operational Training Program (Logistics, Procurement, and General Affairs)	13	DN Domestic
10	Program Pelatihan SDM Human Capital Training Program	14	DN Domestic
11	Program Pelatihan Pengamanan Security Training Program	6	DN Domestic
12	Program Pelatihan Public Relation, Sekretariat & Protokoler Public Relations, Secretariat, and Protocol Training Program	6	DN Domestic
13	Program Pelatihan Hukum Legal Training Program	3	DN Domestic
14	Program Pelatihan Keuangan Finance Training Program	16	DN Domestic
15	Program Pelatihan Teknik dan Rekayasa Technical and Engineering Training Program	10	DN Domestic
16	Program Pelatihan Akuntansi Accounting Training Program	5	DN Domestic
17	Program Pelatihan Teknologi Informasi dan Pengembangan Digital Information Technology and Digital Development Training Program	42	DN Domestic

No.	Kategori Program Program Category	Jumlah Pelatihan Number of Training	Tempat Pelaksanaan (DN/LN) Training Location (Domestic/Overseas)
18	Program Pelatihan Audit Internal Internal Audit Training Program	9	DN Domestic
19	Program Pelatihan Manajemen Risiko Risk Management Training Program	24	DN Domestic
20	Program Pelatihan <i>Learning Center</i> Learning Center Training Program	3	DN Domestic
21	Program Pelatihan Karyawan PKWT, <i>Prohire</i> , dan Calon Karyawan Organik Training Program for Fixed-Term Contract Employees, Prohires, and Prospective Permanent Employees	6	DN Domestic
22	Training Pekerjaan Jasa Service Work Training	21	DN Domestic
23	Pelatihan atas Investasi Investment Training	20	DN & LN Domestic & Overseas
24	Pelatihan Luar Negeri Non-Investasi Non-Investment Overseas Training	1	LN Overseas

Program pengembangan kompetensi juga mencakup Program Peningkatan Keterampilan Karyawan, yang terdiri dari program sertifikasi, non-sertifikasi, investasi dalam negeri, investasi luar negeri, dan pra-pensiun. Pada tahun 2025, jumlah peserta program sertifikasi mencapai 623 peserta, sedangkan program non-sertifikasi diikuti oleh 2.903 peserta. Selain itu, PERURI merealisasikan program investasi dalam negeri sebanyak 125 peserta, program investasi luar negeri sebanyak 110 peserta, serta program pra-pensiun sebanyak 20 peserta.

Competency development also includes the Employee Skills Enhancement Program, comprising certification, non-certification, domestic investment, overseas investment, and pre-retirement programs. In 2025, the certification program was attended by 623 participants, while the non-certification program was attended by 2,903 participants. In addition, PERURI realized domestic investment programs for 125 participants, overseas investment programs for 110 participants, and pre-retirement programs for 20 participants.

Program Peningkatan Keterampilan Karyawan Employee Skills Enhancement Program

Program	Jumlah Peserta Number of Participants		
	2025	2024	2023
Sertifikasi Certification	623	697	658
Non-Sertifikasi Non-Certification	2.903	2.261	2.315
Investasi Dalam Negeri Domestic Investment	125	147	57
Investasi Luar Negeri Overseas Investment	110	56	235
Pra-Pensiun Pre-Retirement	20	60	80

Melalui beragam inisiatif tersebut, PERURI memastikan bahwa proses pengembangan karier dan peningkatan kompetensi karyawan berlangsung secara berkesinambungan. Upaya ini selaras dengan komitmen Perusahaan untuk membentuk SDM yang unggul dan siap menghadapi dinamika serta tantangan bisnis di masa mendatang. Sepanjang tahun 2025, PERURI mengalokasikan biaya pelatihan sebesar Rp9.476.266.802. Biaya ini sebagai bentuk investasi strategis dalam pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas SDM guna mendukung pencapaian target bisnis Perusahaan.

Through these various initiatives, PERURI ensures that career development and competency enhancement processes are carried out on a continuous basis. These efforts are aligned with the Company's commitment to building a high-quality workforce that is well-prepared to face future business dynamics and challenges. In 2025, PERURI allocated a training budget of Rp9,476,266,802, reflecting a strategic investment in competency development and capacity building to support the achievement of the Company's business targets.



Biaya Pelatihan Karyawan Tahun 2025

Employee Training Costs in 2025

Uraian Description	Total Peserta (orang) Total Participants (persons)	Biaya (Rp) Cost (Rp)
Pelatihan Dalam Negeri Domestic Training	3.671	9.061.450.391
Pelatihan Luar Negeri Overseas Training	110	414.816.411
Jumlah Total	3.781	9.476.266.802

Talent Development Program

Talent Development Program (TDP) merupakan salah satu inisiatif strategis PERURI yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi karyawan agar mencapai tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Program ini berfokus pada penguatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja melalui berbagai kegiatan pengembangan yang mencakup aspek teknis, kepemimpinan, dan manajerial, sekaligus mendukung pengembangan jalur karier karyawan.

Pada tahun 2025, PERURI melanjutkan agenda pengembangan talenta sebagaimana telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Implementasi program difokuskan pada pendidikan dan pelatihan yang menunjang pembentukan kepemimpinan profesional serta peningkatan kompetensi yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Salah satu inisiatif yang dijalankan adalah program *Talent Development* bagi jabatan Kepala Unit dan Kepala Seksi, yang dirancang untuk mempersiapkan karyawan menghadapi tanggung jawab pada level manajerial yang lebih tinggi.

Melalui pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, PERURI berkomitmen membangun SDM yang adaptif dan siap menghadapi dinamika serta tantangan bisnis yang terus berkembang.

Talent Development Program

The *Talent Development Program* (TDP) is one of PERURI's strategic initiatives designed to optimize employee potential in order to achieve higher levels of competence. This program focuses on strengthening skills, knowledge, and work attitudes through various development activities covering technical, leadership, and managerial aspects, while also supporting employees' career path development.

In 2025, PERURI continued its talent development agenda as established in the previous year. The program implementation focused on education and training that support the development of professional leadership and the enhancement of competencies aligned with the Company's Long-Term Plan. One of the initiatives carried out was the *Talent Development Program* for Unit Head and Section Head positions, designed to prepare employees to take on responsibilities at higher managerial levels.

Through a comprehensive and integrated approach, PERURI remains committed to building an adaptive workforce that is well-prepared to face evolving business dynamics and challenges.

No	Nama Program Pengembangan Development Program Name	Jumlah Peserta (orang) Total Participants (persons)
1.	<i>Talent Development Program</i> Level Kepala Unit (Supervisor) Talent Development Program at Unit Head Level (Supervisor)	30
2.	<i>Talent Development Program</i> Level Kepala Seksi (Asisten Manager) Talent Development Program at Section Head Level (Assistant Manager)	31
3.	<i>Talent Development Program</i> Level Kepala Departemen (Manager) Talent Development Program at Department Head Level (Manager)	33
Total		94

Program Pelatihan Bela Negara

Dalam menghadapi dinamika bisnis dan tuntutan sebagai entitas strategis nasional, PERURI perlu memastikan bahwa setiap karyawan tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas, disiplin, dan komitmen kebangsaan yang kuat. Program Bela Negara merupakan rangkaian *onboarding* karyawan yang dirancang sebagai langkah strategis untuk menanamkan nilai-nilai dasar tersebut sejak awal masa bergabung.

State Defense Training Program

In navigating business dynamics and fulfilling its role as a national strategic entity, PERURI needs to ensure that every employee is not only competent, but also possesses strong integrity, discipline, and national commitment. The *State Defense Program* is part of the employee onboarding series designed as a strategic initiative to instill these core values from the very beginning of employment.

Melalui program ini, karyawan baru dibekali pemahaman dan internalisasi sikap cinta tanah air, tanggung jawab, serta loyalitas yang selaras dengan budaya dan peran PERURI. Dengan demikian, diharapkan terbentuk insan PERURI yang profesional, berkarakter, dan siap berkontribusi dalam mendukung ketahanan organisasi serta kepentingan nasional. Program pelatihan bela negara yang dilakukan tahun 2025 diikuti sebanyak 90 orang peserta.

Program Layanan SDM

Kesehatan dan Kesejahteraan Karyawan

PERURI menempatkan aspek kesehatan karyawan sebagai prioritas utama dengan menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang menyeluruh. Seluruh karyawan, baik karyawan tetap maupun organik, memperoleh akses terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan serta manfaat layanan kesehatan tanpa batasan plafon (*unlimited*). Selain itu, karyawan juga difasilitasi dengan program pemeriksaan kesehatan berkala (*medical check-up*) guna memastikan kondisi kesehatan tetap terjaga secara optimal.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Perusahaan menyediakan fasilitas layanan kesehatan internal berupa Klinik PERURI yang berstandar Klinik Pratama dan berlokasi di Kawasan PERURI Karawang. Klinik ini difungsikan sebagai pusat pelayanan medis, termasuk penanganan kegawatdaruratan, bagi seluruh karyawan di lingkungan Perusahaan.

Through this program, new employees are equipped with an understanding and internalization of patriotism, responsibility, and loyalty aligned with PERURI's culture and role. As a result, it is expected to develop PERURI personnel who are professional, have strong character, and are ready to contribute to strengthening organizational resilience as well as national interests. The State Defense Training Program conducted in 2025 was attended by a total of 90 participants.

Human Capital Services Program

Employee Health and Well-being

PERURI places employee health as a top priority by providing comprehensive healthcare services. All employees, both permanent and organic, are granted access to BPJS Kesehatan membership as well as healthcare benefits with no coverage limit (*unlimited*). In addition, employees are facilitated with periodic medical check-ups to ensure their health conditions are maintained optimally.

As part of this commitment, the Company provides internal healthcare facilities through the PERURI Clinic, which meets the standards of a Primary Clinic and is located in the PERURI Karawang Area. This clinic serves as a medical service center, including emergency handling, for all employees within the Company.





Pada tahun 2025, PERURI melibatkan Unit K3 dan Seksi Pelayanan Karyawan dalam pelaksanaan *Health Risk Assessment* (HRA) yang dilakukan bekerja sama dengan dokter okupasi dan tenaga paramedis. Kegiatan ini ditujukan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi potensi risiko kesehatan di lingkungan kerja, memberikan rekomendasi pencegahan Penyakit Akibat Kerja (PAK), serta menyelenggarakan sosialisasi terkait langkah-langkah pencegahan PAK di tempat kerja. Sejalan dengan dukungan terhadap program BP BUMN dalam peningkatan kesejahteraan fisik karyawan, PERURI juga mengimplementasikan program "PERURI Sehat" yang berfokus pada upaya pencegahan dan penurunan risiko penyakit kronis.

Dalam mendukung aspek sosial, Perusahaan secara rutin menyelenggarakan kegiatan donor darah di lingkungan kerja sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial sekaligus menjaga kesehatan karyawan.

Informasi Karyawan

Dalam rangka meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi data pribadi dan administrasi kepegawaian, PERURI mengimplementasikan aplikasi *Employee Self Service* (ESS). Melalui aplikasi ini, karyawan dapat secara mandiri mengakses berbagai informasi penting, antara lain data personal, catatan kehadiran, layanan *helpdesk* SDM, serta riwayat Surat Keputusan (SKEP) jabatan.

Program Pensiun

PERURI berkomitmen memberikan perlindungan dan kepastian bagi karyawan dalam menghadapi masa purnatugas melalui implementasi Program Pensiun Iuran Pasti. Di samping itu, Perusahaan turut mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh karyawan.

Sesuai ketentuan dalam SKEP-494/IX/2020 serta penyempurnaan Surat Keputusan Direksi No. 856/X/2015, masa kerja karyawan di PERURI berakhir pada usia 56 tahun sebagai batas pensiun normal, dengan opsi pensiun dipercepat yang dapat diajukan mulai usia 46 tahun. Bagi karyawan yang menuntaskan masa kerja hingga usia pensiun normal, Perusahaan memberikan fasilitas Masa Persiapan Pensiun dengan durasi maksimal tiga bulan. Program pensiun tersebut merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam menyediakan jaminan keamanan finansial dan memastikan kesejahteraan karyawan pada masa purnatugas.

Pemenuhan Hak Karyawan

PERURI berkomitmen untuk menjamin terpenuhinya hak karyawan melalui penerapan program remunerasi yang kompetitif di seluruh jenjang jabatan, mulai dari level pemula hingga manajerial. Paket remunerasi tersebut mencakup imbalan jangka pendek dan jangka panjang, termasuk manfaat pascakerja serta kompensasi dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja.

In 2025, PERURI involved the Occupational Health and Safety (OHS) Unit and the Employee Services Section in conducting a Health Risk Assessment (HRA) in collaboration with occupational doctors and paramedics. This activity aims to identify and evaluate potential health risks in the workplace, provide recommendations for the prevention of Occupational Diseases, and carry out awareness programs regarding preventive measures in the work environment. In line with supporting the BP BUMN program to enhance employees' physical well-being, PERURI also implemented the "PERURI Sehat" program, which focuses on preventing and reducing the risk of chronic diseases.

To support social aspects, the Company regularly organizes blood donation activities within the workplace as a form of contribution to social well-being while also promoting employee health.

Employee Information

To enhance ease of access to personal data and employment administration, PERURI has implemented the Employee Self Service (ESS) application. Through this application, employees can independently access various important information, including personal data, attendance records, HR helpdesk services, and the history of Appointment Decrees (SKEP).

Retirement Program

PERURI is committed to providing protection and certainty for employees in preparing for retirement through the implementation of a Defined Contribution Pension Program. In addition, the Company also supports the National Social Security System through participation in BPJS Ketenagakerjaan, which provides comprehensive protection for all employees.

In accordance with the provisions set out in SKEP-494/IX/2020 and the refinement of the Board of Directors' Decree No. 856/X/2015, the employment period at PERURI ends at the age of 56 as the normal retirement age, with an early retirement option that can be proposed starting from the age of 46. For employees who complete their service until the normal retirement age, the Company provides a Pre-Retirement Preparation Period of up to three months. This retirement program reflects the Company's commitment to ensuring financial security and employee well-being in the post-employment phase.

Fulfillment of Employee Rights

PERURI is committed to ensuring the fulfillment of employee rights through the implementation of a competitive remuneration program across all job levels, from entry-level to managerial positions. The remuneration package includes both short-term and long-term benefits, covering post-employment benefits as well as compensation in the event of employment termination.

Imbalan yang diterima karyawan merupakan hak atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan karyawan serta kondisi dan kemampuan usaha Perusahaan. Penyesuaian gaji pokok dilakukan secara berkala dengan mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan berbagai faktor relevan lainnya guna memastikan tingkat penghasilan tetap kompetitif. PERURI juga berupaya memberikan imbalan di atas ketentuan upah minimum yang berlaku, khususnya bagi karyawan tetap pada golongan terendah.

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja unggul, PERURI memberikan remunerasi tambahan tahunan kepada karyawan berprestasi. Selain itu, PERURI secara berkelanjutan menyempurnakan struktur remunerasi yang kompetitif untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi talenta terbaik.

Dalam rangka menekan tingkat *turnover* serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Perusahaan melaksanakan berbagai program penghargaan dan apresiasi bagi karyawan. PERURI juga menyediakan beragam program pengembangan, meliputi peningkatan *soft competency*, *technical competency*, pengembangan profesional, kepemimpinan, hingga sertifikasi. Investasi berkelanjutan dalam pengembangan kompetensi ini memastikan karyawan memiliki kapabilitas yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan menghadapi dinamika tantangan di masa mendatang.

Survei Employee Experience

Survei *Employee Experience* merupakan instrumen strategis yang digunakan PERURI untuk memahami serta mengevaluasi pengalaman kerja karyawan secara komprehensif. Sebagai organisasi yang berkomitmen terhadap peningkatan kinerja dan penciptaan lingkungan kerja yang positif, PERURI menyadari bahwa tingkat kepuasan dan keterikatan karyawan memiliki peran signifikan dalam mendukung pencapaian sasaran korporasi. Oleh karena itu, Perusahaan secara berkala melaksanakan survei *Employee Experience* guna memperoleh umpan balik atas berbagai aspek pengalaman kerja karyawan.

Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja, mengukur tingkat keterikatan karyawan, serta memahami persepsi mereka terhadap kebijakan, budaya Perusahaan, dan dinamika hubungan kerja. Hasil survei dimanfaatkan sebagai landasan dalam penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM serta penyesuaian strategi Perusahaan agar selaras dengan kebutuhan dan ekspektasi karyawan.

Pada tahun 2025, PERURI kembali menyelenggarakan survei keterikatan karyawan dan memperoleh hasil bahwa tingkat *engagement* karyawan PERURI berada pada kategori *engaged* dengan skor 8,3, konsisten dengan capaian tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat kepuasan karyawan mencatat skor 8,1 atau berada pada kategori *very satisfied*, juga sejalan dengan hasil tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterikatan dan kepuasan

The compensation received by employees represents their entitlement for the execution of assigned duties and responsibilities, while also taking into account employee needs as well as the Company's business conditions and capabilities. Adjustments to base salary are carried out periodically with reference to the Regional Minimum Wage (UMK) and other relevant factors to ensure that compensation levels remain competitive. PERURI also strives to provide remuneration above the applicable minimum wage provisions, particularly for permanent employees in the lowest grade.

As a form of appreciation for outstanding performance, PERURI provides additional annual remuneration to high-performing employees. Furthermore, PERURI continuously refines its competitive remuneration structure to attract, retain, and motivate top talent.

In an effort to reduce turnover rates and create a conducive working environment, the Company implements various employee recognition and appreciation programs. PERURI also offers a wide range of development programs, including soft competency and technical competency enhancement, professional development, leadership development, and certification. This continuous investment in competency development ensures that employees possess the necessary capabilities to support business growth and address future challenges.

Employee Experience Survey

The Employee Experience Survey is a strategic instrument used by PERURI to comprehensively understand and evaluate employees' work experiences. As an organization committed to improving performance and fostering a positive work environment, PERURI recognizes that employee satisfaction and engagement play a significant role in supporting the achievement of corporate objectives. Therefore, the Company periodically conducts an Employee Experience Survey to obtain feedback on various aspects of employees' work experiences.

This survey aims to identify factors influencing job satisfaction, measure employee engagement levels, and understand employees' perceptions of Company policies, organizational culture, and workplace dynamics. The survey results are utilized as a basis for improving human capital management policies and adjusting the Company's strategies to align with employees' needs and expectations.

In 2025, PERURI once again conducted an employee engagement survey and found that the level of employee engagement was in the "engaged" category with a score of 8.3, consistent with the previous year's achievement. Meanwhile, employee satisfaction recorded a score of 8.1, also in the very satisfied category, similarly aligned with the results of the previous year. These results indicate that PERURI's employee engagement and satisfaction levels



PERURI tetap terjaga pada level yang tinggi, mencerminkan lingkungan kerja yang positif serta komitmen Perusahaan dalam menciptakan budaya kerja yang mendukung kinerja dan kesejahteraan karyawan.

remain high, reflecting a positive work environment and the Company's commitment to fostering a work culture that supports employee performance and well-being.

Skor Keterikatan Karyawan Employee Engagement Survey

Uraian Description	2025	2024	2023
Skor Score	8,3	8,1 (engaged)	8,1 (engaged)

Indeks Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction Index

Uraian Description	2025	2024	2023
Skor Score	8,1 (very satisfied)	7, 8 (satisfied)	7, 8 (satisfied)

Realisasi Program Pengelolaan SDM Tahun 2025

Realisasi program pengelolaan Sumber Daya Manusia PERURI sepanjang tahun 2025 menunjukkan komitmen berkelanjutan Perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM guna mendukung pencapaian sasaran strategis. Di tengah dinamika industri yang semakin kompleks, PERURI memprioritaskan penguatan kompetensi SDM yang profesional, unggul, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Adapun capaian pelaksanaan program pengelolaan SDM selama tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan *Strategic Workforce Planning* dan *Future Ready Workforce*;

Realization of Human Capital Management Programs in 2025

The realization of PERURI's Human Capital Management programs throughout 2025 demonstrates the Company's continuous commitment to enhancing the quality and capability of its human resources in support of the achievement of strategic objectives. Amid increasingly complex industry dynamics, PERURI prioritizes strengthening a professional, high-performing, and adaptive workforce capable of responding to future challenges.

The key achievements of human capital management program implementation in 2025 are as follows:

1. Strengthening Strategic Workforce Planning and Future Ready Workforce;

2. Pengembangan manajemen talenta, karier, dan suksesi;
3. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas digital SDM;
4. Penguatan manajemen kinerja berbasis *cascading* KPI;
5. Penguatan budaya, inovasi, dan kesejahteraan karyawan.

Rencana Pengelolaan dan Pengembangan SDM ke Depan

Investasi dalam rencana pengembangan karyawan membuka peluang strategis bagi PERURI untuk memperkuat kesiapan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif di masa depan. Oleh karena itu, pengembangan karyawan menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan jangka panjang Perusahaan. Melalui perencanaan yang terarah dan pelaksanaan yang optimal, PERURI dapat membentuk SDM yang inovatif dan kreatif, sekaligus menjaga keberlanjutan serta kualitas kapabilitas yang dimiliki.

Sejalan dengan hal tersebut, divisi yang bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi SDM telah merancang berbagai program pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan karyawan, antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (*Talent Development Program* dan *Post Assessment Development*): Merancang *Learning Journey* khusus untuk memperkuat 11 *Competencies* seperti *Strategic Orientation* dan *Leadership of Changes*, di berbagai tingkatan manajerial.
2. Optimalisasi Manajemen Talenta: Mengimplementasikan aplikasi *Talent Management System* untuk memetakan *Top Talent* pada 9 *Grid Box* dan menyusun jalur karier (*Career Path* yang terstruktur guna menjaga ketersediaan *Pipeline* suksesi Perusahaan).
3. Pengembangan Aplikasi *On-Boarding* untuk karyawan Baru: bertujuan untuk memfasilitasi proses orientasi dan integrasi karyawan secara efektif, sehingga karyawan dapat memahami budaya Perusahaan, peraturan, tugas, serta lingkungan kerja dengan lebih cepat dan terstruktur.

2. Developing Talent and Succession Management;
3. Enhancing Competencies and Digital Capabilities;
4. Strengthening Performance Management;
5. Strengthening Culture, Innovation, and Employee Well-Being.

Future Human Capital Management and Development Plan

Investment in employee development planning provides a strategic opportunity for PERURI to strengthen its readiness in facing increasingly competitive business conditions in the future. Therefore, employee development serves as a key factor in supporting the Company's long-term success. Through well-directed planning and optimal implementation, PERURI can develop an innovative and creative workforce while maintaining sustainability and the quality of existing capabilities.

In line with this, the division responsible for human capital competency development has designed various development programs aimed at enhancing employee quality and skills, including the following:

1. Tiered Leadership Development Program (Talent Development Program and Post-Assessment Development): Designing a customized learning journey to strengthen 11 competencies, such as Strategic Orientation and Leadership of Change, across various managerial levels.
2. Talent Management Optimization: Implementing a Talent Management System application to map Top Talent across 9 Grid Boxes and develop structured career paths to ensure the availability of the Company's succession pipeline.
3. Development of an Onboarding Application for New Employees: Aimed at effectively facilitating the orientation and integration process so that employees can understand the company's culture, policies, responsibilities, and work environment more quickly and in a structured manner.



Teknologi Informasi Information Technology

Dalam menghadapi tantangan era digital dan meningkatnya kebutuhan akan solusi keamanan yang terpercaya, PERURI telah melakukan transformasi fundamental menjadi perusahaan teknologi *high security solution*. Transformasi ini menandai komitmen Perusahaan untuk terus relevan, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

PERURI memiliki empat pilar bisnis utama yaitu *banknote printing technology*, *security printing technology*, *digital security technology* dan *government technology* yang menjadi fondasi strategis dalam menyediakan produk dan layanan bernilai tinggi yang mengedepankan aspek keamanan, keandalan, dan keberlanjutan.

Dalam konteks tersebut, Divisi Teknologi Informasi (TI) berperan sebagai katalis transformasi, yang memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya mendukung proses bisnis, tetapi juga menjadi penggerak utama inovasi, integrasi sistem, dan penguatan tata kelola teknologi. Melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, dan automasi proses bisnis, Divisi TI berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan tujuan strategis Perusahaan.

Tata Kelola TI

Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai wujud tanggung jawab Direksi dan manajemen Perusahaan. Implementasinya tercermin melalui kepemimpinan, struktur organisasi, serta proses yang dirancang untuk memastikan pengelolaan TI dilakukan secara optimal dalam mendukung strategi dan pencapaian tujuan Perusahaan. Pimpinan PERURI berkomitmen menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

In responding to the challenges of the digital era and the increasing demand for reliable security solutions, PERURI has undertaken a fundamental transformation into a high security solution technology company. This transformation reflects the Company's commitment to remaining relevant, innovative, and competitive at both national and global levels.

PERURI has four main business pillars, namely banknote printing technology, security printing technology, digital security technology, and government technology, which serve as the strategic foundation in delivering high-value products and services that prioritize security, reliability, and sustainability.

In this context, the Information Technology (IT) Division acts as a catalyst for transformation, ensuring that the utilization of information technology not only supports business processes but also serves as a key driver of innovation, system integration, and strengthening of technology governance. Through improvements in effectiveness, efficiency, and business process automation, the IT Division directly contributes to the achievement of the Company's vision and strategic objectives.

IT Governance

Information Technology Governance is an integral part of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as a form of responsibility of the Board of Directors and Company management. Its implementation is reflected through leadership, organizational structure, and processes designed to ensure that IT management is carried out optimally in supporting the Company's strategy and achievement of objectives. PERURI's management is committed to implementing Information and Communication Technology Governance in accordance with GCG principles.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penetapan Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi sebagai kerangka utama dalam memastikan pengelolaan TI yang efektif dan akuntabel.

Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi senantiasa ditinjau dan disempurnakan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku dari Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), khususnya terkait Pedoman Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN. Selain itu, kebijakan ini juga mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) sistem manajemen tata kelola TI yang diakui secara internasional, antara lain COBIT, ISO 20000, ISO 27001, ISO 14298, serta standar internasional relevan lainnya.

Penyusunan Kebijakan Tata Kelola TI ini bertujuan untuk memenuhi berbagai sasaran yang telah ditetapkan oleh BP BUMN, antara lain:

1. Koordinasi kerja antara BP BUMN dan PERURI dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi (TI);
2. Teknologi Informasi PERURI selaras dengan kebutuhan bisnisnya;
3. Teknologi Informasi PERURI dapat memampukan (*enable*) bisnis dan memberikan manfaat optimal;
4. Memberikan standar pengelolaan dan penggunaan sumber daya atau layanan TI;
5. Sumber daya TI PERURI dimanfaatkan seluruh pengguna secara optimal dengan penuh tanggung jawab untuk menunjang tercapainya tujuan PERURI;
6. Risiko-risiko penggunaan TI dikelola dengan baik;
7. Menjamin kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) data dan sumber daya TI; dan
8. Menjamin kepatuhan (*compliance*) terhadap Kebijakan Tata Kelola TI yang ditetapkan.

This commitment is realized through the establishment of the Information Technology Governance Policy as the main framework to ensure effective and accountable IT management.

The Information Technology Governance Policy is continuously reviewed and refined with reference to applicable regulations from the State-Owned Enterprises Regulatory Agency (BP BUMN), particularly regarding the Guidelines for the Preparation of IT Management in SOEs. In addition, this policy also adopts internationally recognized best practices in IT governance management system, including COBIT, ISO 20000, ISO 27001, ISO 14298, and other relevant international standards.

The formulation of this IT Governance Policy aims to fulfill several objectives set by the BP BUMN, including:

1. Coordination between the BP BUMN and PERURI can be carried out effectively and efficiently through the utilization of Information Technology (IT);
2. PERURI's Information Technology is aligned with its business needs;
3. PERURI's Information Technology enables business operations and delivers optimal benefits;
4. Providing standards for the management and use of IT resources and services;
5. PERURI's IT resources are optimally utilized by all users responsibly to support the achievement of PERURI's objectives;
6. Risks related to the use of IT are properly managed;
7. Ensuring the confidentiality, integrity, and availability of data and IT resources; and
8. Ensuring compliance with the established IT Governance Policy.

Organisasi Pengelola Kegiatan Inisiatif Utama

Organization for Managing Key Initiative Activities

Komite Pengarah Steering Committee	Tim Komite yang berperan memastikan keselarasan Rencana Strategis TI dengan RJPP, memastikan implementasi Rencana Strategis TI yang dituangkan dalam RKAP, dan mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau implementasi penyelenggaraan TI A committee responsible for ensuring alignment between the IT Strategic Plan and the Long-Term Corporate Plan (RJPP), ensuring the implementation of the IT Strategic Plan as outlined in the Annual Work and Budget Plan (RKAP), as well as evaluating, directing, and monitoring the implementation of IT governance activities.
Koordinator Strategis Strategic Coordinator	Peran atau <i>role</i> yang ditugaskan kepada Departemen Perencanaan dan Arsitektur TI untuk merencanakan (<i>plan</i>), memantau (<i>monitor</i>), mengendalikan (<i>control</i>), dan melaporkan (<i>report</i>) setiap aktivitas terkait Inisiatif Strategis TI A role assigned to the IT Planning and Architecture Department to plan, monitor, control, and report all activities related to IT Strategic Initiatives.
Pelaksana Program Program Implementer	Pihak yang diberikan wewenang untuk melaksanakan atau mengelola program kegiatan Inisiatif Strategis TI. Peran tersebut wajib memberikan laporan kepada Koordinator Strategis atas semua kegiatan terkait Inisiatif Strategis TI yang ditugaskan kepadanya, termasuk kegiatan atau masalah yang membutuhkan eskalasi The party authorized to execute or manage IT Strategic Initiative programs. This role is required to report to the Strategic Coordinator on all assigned initiative activities, including any activities or issues that require escalation.



Penerapan Program Program Implementation Owner	Pihak ini terdapat pada Direktorat yang direncanakan sebagai pemilik produk (<i>product owner</i>) dari Inisiatif Strategis TI. Peran sebagai pemilik produk inisiatif tidak harus sebagai pelanggan secara langsung karena peran ini dibutuhkan erat bekerja sama dengan Pelaksana Program untuk memastikan produk dari Inisiatif Strategis TI dapat diterapkan kepada pelanggan atau pengguna akhir (<i>end user</i>). This role resides within the Directorate designated as the product owner of the IT Strategic Initiative. The role is not necessarily a direct customer but is required to work closely with the Program Implementer to ensure that the output of the IT Strategic Initiative can be implemented for customers or end users.
Pengguna/Pelanggan Users/Customers	Pihak yang menggunakan produk dari Inisiatif Strategis TI, yaitu sebagai pelanggan atau pengguna akhir (<i>end user</i>). Penentuan siapa yang akan menjadi pengguna dan pihak yang menerapkan program ditentukan bersama antara Pelaksana Program dan Pihak yang Menerapkan Program. The parties who use the output of the IT Strategic Initiative, namely customers or end users. The determination of who acts as the user and who acts as the implementation owner is agreed upon jointly by the Program Implementer and the Program Implementation Owner.

Kepatuhan Teknologi Informasi

Divisi Teknologi Informasi memiliki tanggung jawab dalam menetapkan serta mengelola pengendalian atas keamanan data dan informasi Perusahaan, yang mencakup aspek kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*). Sejalan dengan tanggung jawab tersebut, Divisi TI wajib memastikan kepatuhan terhadap seluruh regulasi dan standar yang berlaku.

- › *Master Plan* TI (MPTI) disusun dengan merujuk kepada *Framework The Open Group Architecture Framework (TOGAF)* untuk mengkaji konteks organisasi dan menyusun visi aspiratif kapabilitas bisnis/operasional secara *high-level*, sebagai acuan dalam pengembangan *enterprise architecture*. Dalam penyusunan MPTI juga menggunakan referensi standar internasional lainnya seperti *Control Objective for Information and related Technology (COBIT)* dan *Information Technology Infrastructure Library (ITIL)* serta merujuk pada persyaratan yang ditentukan oleh BP BUMN yang berlaku. Dalam MPTI digambarkan secara rinci terkait *Business Architecture, Information Architecture, Application Architecture, Technology Architecture, Transition Architecture, IT Security* dan *IT Risk Management, IT Organization, IT Valuation* dan *IT Program Roadmap*.
- › Tata Kelola TI merujuk kepada COBIT, ISO 27001 - *Information Security Management System Requirements*, NIST *Cybersecurity Framework*, ISO 22301 - *Business Continuity Management System*, ISO 27701 - *Privacy Information Management*, ISO 20000-1 - *Service Management System Requirements*, ISO 14298 - *Management of security printing processes*, *Project Management Body of Knowledge (PMBOK)*, dan standar *best practice* tata kelola TI lainnya yang relevan sebagai kebijakan dan tata kelola TI dalam pengembangan dan operasional TI.
- › Prosedur merujuk pada TOGAF, ITIL, COBIT, ISO 27001, ISO 14298, peraturan pemerintah terkait dan sistem manajemen yang diimplementasikan di PERURI.
- › ITIL, COBIT, ISO 27001, ISO 20000, Indeks KAMI, INDI4.0 dan sistem manajemen yang diimplementasikan di PERURI.

Information Technology Compliance

The Information Technology (IT) Division is responsible for establishing and managing controls over the Company's data and information security, covering confidentiality, integrity, and availability aspects. In line with this responsibility, the IT Division is required to ensure compliance with all applicable regulations and standards.

- › The IT Master Plan (MPTI) is developed with reference to The Open Group Architecture Framework (TOGAF) to assess the organizational context and define a high-level aspirational vision of business and operational capabilities, serving as the foundation for enterprise architecture development. The preparation of the MPTI also incorporates other international standards such as Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) and Information Technology Infrastructure Library (ITIL), as well as requirements issued by the Ministry of SOEs (BP BUMN). The MPTI comprehensively covers Business Architecture, Information Architecture, Application Architecture, Technology Architecture, Transition Architecture, IT Security and IT Risk Management, IT Organization, IT Valuation, and the IT Program Roadmap.
- › IT Governance refers to COBIT, ISO 27001 - Information Security Management System Requirements), NIST Cybersecurity Framework, ISO 22301 - Business Continuity Management System), ISO 27701 - Privacy Information Management, ISO 20000-1 -Service Management System Requirements, ISO 14298 -Management of Security Printing Processes, Project Management Body of Knowledge (PMBOK), and other relevant IT governance best practice standards as the basis for IT policies and governance in IT development and operations.
- › TOGAF, ITIL, COBIT, ISO 27001, ISO 14298, relevant government regulations, and the management systems implemented at PERURI.
- › ITIL, COBIT, ISO 27001, ISO 20000, the KAMI Index, INDI4.0, and the management systems implemented at PERURI.

Pemanfaatan TI dalam Operasional Bisnis

Berdasarkan *Master Plan* Teknologi Informasi (MPTI) Tahun 2025–2029, Aspirasi Pemilik Modal menjadi pedoman dalam menentukan arahan perusahaan yang diturunkan dalam implikasi pada TI (*IT Implication*) atau potensi dukungan TI.

a. IT Implication

Kategori Category	Arahan Direction	Implikasi TI IT Implication
BUMN Sistemik B	Direktur Risiko masing-masing perusahaan wajib Menyusun rencana darurat (<i>contingency plan</i>). Directors of Risk in each company are required to prepare a contingency plan.	Mengoptimalkan IT <i>Continuity</i> yang terdiri dari Disaster Recovery Plan dan Disaster Recovery Center Optimize IT Continuity, consisting of Disaster Recovery Plan (DRP) and Disaster Recovery Center (DRC).
	Wajib menjalankan <i>roadmap</i> implementasi <i>Internal Control Over Financial Reporting</i> Mandatory implementation of Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) roadmap	1. Menerapkan sistem <i>Governance, Risk and Compliance</i> (GRC). 2. Menerapkan kendali TI baik kendali umum maupun spesifik. 1. Implementation of Governance, Risk and Compliance (GRC) system. 2. Implementation of IT controls, both general controls and application-specific controls.
	Wajib menjalankan tata kelola tiga lini dalam implementasi ICOFR Mandatory implementation of three lines governance in ICOFR	Menerapkan sistem <i>Governance, Risk and Compliance</i> Implementation of Governance, Risk and Compliance (GRC) system.
Penetapan Aspek <i>Environmental, Social and Governance</i> Establishment of Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects	<i>Environmental</i> dengan menilai kegiatan sebuah Perusahaan maupun supplier yang berdampak lingkungan secara fisik. Environmental: assessing company and supplier activities that have physical environmental impacts.	Sistem <i>Vendor management</i> yang menilai aspek <i>environmental vendor</i> . Vendor management system assessing environmental aspects of vendors.
	Social dengan menilai kegiatan sebuah perusahaan yang berdampak pada aksi sosial. Social assessing company activities that have social impact.	Sistem pendukung TJSL. Supporting system for Corporate Social Responsibility (TJSL).
	Governance dengan menilai kualitas dan ketepatan waktu dalam mengambil keputusan, struktur tata kelola, dan distribusi tanggung jawab pada <i>stakeholder</i> . Governance: assessing decision-making quality and timeliness, governance structure, and distribution of responsibilities among stakeholders.	1. Implementasi GRC 2. Implementasi sistem dukungan <i>analytics</i> 1. Implementation of GRC. 2. Implementation of analytics support systems.

Utilization of IT in Business Operations

Based on the Information Technology Master Plan (MPTI) for 2025–2029, the Shareholders' Aspirations serve as the guiding principle in determining the Company's strategic direction, which is further translated into IT implications or potential IT support.

a. IT Implication



Kategori Category	Arahan Direction	Implikasi TI IT Implication
Perusahaan Teknologi Technology Company	Peningkatan rantai nilai uang kertas, modernisasi percetakan uang kertas dan bahan baku pendukung. Enhancement of banknote value chain, modernization of banknote printing, and supporting raw materials.	Implementasi <i>smart factory</i> Implementation of smart factory.
	Menetapkan <i>guiding principle</i> , bisnis proses dan skema kerjasama dalam menjalankan penugasan PERURI sebagai penyelenggara SPBE. Establish guiding principles, business processes, and collaboration schemes in PERURI's role as SPBE operator.	1. Implementasi <i>Enterprise Architecture</i> 2. Interoperabilitas sistem dalam Kerjasama 1. Implementation of Enterprise Architecture. 2. System interoperability in collaboration arrangements.
	Penguatan kapabilitas sumber daya Strengthening resource capabilities	1. Sistem <i>Human Capital Management</i> 2. Sistem <i>Talent Management</i> 1. Human Capital Management System. 2. Talent Management System.
	Memastikan tata kelola implementasi Perpres No. 82 tahun 2023 mengenai transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional dalam SPBE Ensuring governance of implementation of Presidential Regulation No. 82 of 2023 regarding digital transformation and integration of national digital services within SPBE	1. Implementasi manajemen TI untuk mendukung <i>end to-end</i> pengelolaan TI. 2. Dukungan sistem TI untuk transformasi digital. 1. Implementation of IT management to support end-to-end IT governance. 2. IT system support for digital transformation.
	Melakukan <i>risk assessment</i> Conducting Risk assessment	Implementasi <i>Governance, Risk and Compliance</i> Implementation of Governance, Risk and Compliance (GRC).

b. Rekomendasi Langkah Lanjut IT *Implication*

Dari IT *Implication* yang telah didefinisikan, Divisi TI melakukan tindak lanjut penerapan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategi serta Arah Kebijakan dan Strategi PERURI. Berikut ini adalah beberapa acuan untuk tindak lanjut:

1. *Master Plan* TI harus didokumentasikan dan disetujui secara resmi, misal dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Utama.
2. Setiap perubahan dalam Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi harus dianalisis, untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap arah pengembangan TI (IT Implications).
3. *Application Architecture & Technology Architecture* harus memperhatikan dan mencerminkan IT Implications

c. Realisasi Program Kerja yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi Tahun 2025

b. Recommended Next Steps for IT Implication

Based on the defined IT Implications, the IT Division follows up with implementation actions to support the achievement of Strategic Objectives as well as PERURI's Policy Direction and Strategy. The following are key references for further actions:

1. The IT Master Plan must be formally documented and approved, for example through a Decree of the President Director.
2. Any changes to Strategic Objectives, Policy Directions, and Strategies must be analyzed to identify their impact on IT development direction (IT Implications).
3. Application Architecture and Technology Architecture must take into account and reflect the defined IT Implications.

c. Realization of Work Programs Related to Information Technology in 2025

No	Program Kerja Work Program	Progress Progress	Kegiatan Activities
1	Pemenuhan SLA Layanan TI: › Pemeliharaan Perangkat Telepon <i>Wireless</i> › Pemeliharaan Perangkat Pabx › Pemeliharaan Server › Pemeliharaan Jaringan › Biaya Pemeliharaan Data Center	100%	› Operation & Pemeliharaan Perangkat PABX (<i>Daily Monitoring</i>) › Operation & Pemeliharaan Server (<i>Daily Monitoring</i>) › Operation & Pemeliharaan Jaringan (<i>Daily Monitoring</i>) › Operation & Pemeliharaan Data Center (<i>Daily Monitoring</i>) › Pengecekan Berkala dan Checklist Aplikasi (<i>Daily Monitoring</i>) › <i>Preventive dan Corrective Maintenance Aplikasi</i> › Preventive dan Corrective Maintenance End User Device › Monitoring dan Evaluasi Manage Operation (Monthly Meeting)
	Fulfillment of IT Service SLA: › Maintenance of Wireless Telephone Devices › Maintenance of PABX Devices › Server Maintenance › Network Maintenance › Data Center Maintenance Cost		› PABX Device Operation & Maintenance (Daily Monitoring) › Server Operation & Maintenance (Daily Monitoring) › Network Operation & Maintenance (Daily Monitoring) › Data Center Operation & Maintenance (Daily Monitoring) › Application Periodic Checks and Checklist (Daily Monitoring) › Preventive and Corrective Maintenance of Applications › Preventive and Corrective Maintenance of End-User Devices › Monitoring and Evaluation of Managed Operations (Monthly Meeting)

No	Program Kerja Work Program	Progress Progress	Kegiatan Activities
2	Masing-masing unit kerja melakukan perencanaan digitalisasi inovasi untuk mendukung program Perusahaan Each work unit conducts digital innovation planning to support Company programs	100%	Mengikuti Ajang IAKA Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut: › 1 Judul sebagai Juara 1 › 1 Judul sebagai Juara 2 › 50 Judul sebagai Gold › 11 Judul sebagai Silver Participation in IAKA 2025 with the following results: › 1 entry as 1st Winner › 1 entry as 2nd Winner › 50 entries awarded Gold › 11 entries awarded Silver
3	› Pengembangan <i>Data Architecture Modelling</i> pada <i>Enterprise Architecture Tool</i> › Penyusunan <i>Master Plan</i> TI Tahun 2025-2029 › Penetration Testing Aplikasi dan Infrastruktur › <i>Assessment</i> dan Perencanaan <i>Data Governance Cyber Threat Intelligence</i> › <i>IT Security Tools</i> › Development of Data Architecture Modelling in Enterprise Architecture Tool › Preparation of IT Master Plan for 2025–2029 › Application and Infrastructure Penetration Testing › Assessment and Planning of Data Governance and Cyber Threat Intelligence › IT Security Tools	100%	› Pengembangan <i>Data Arsitektur Modelling</i> pada Produk Non Uang › Penyusunan <i>Master Plan</i> TI /Rencana Strategis TI Tahun 2025-2029 › Pelaksanaan <i>Penetration Testing</i> Aplikasi dan Infrastruktur › Pelaksanaan <i>Table Top Exercise</i> dan <i>Cyber Drill</i> › Pelaksanaan <i>Assessment</i> dan Perencanaan <i>Data Governance</i> › Implementasi <i>Cyber Threat Intelligence</i> › Implementasi <i>tools Vulnerability Assessment</i> dan <i>Penetration Testing</i> › Development of Data Architecture Modelling for Non-Banknote Products › Preparation of IT Master Plan / IT Strategic Plan 2025–2029 › Implementation of Application and Infrastructure Penetration Testing › Implementation of Table Top Exercise and Cyber Drill › Implementation of Data Governance Assessment and Planning › Implementation of Cyber Threat Intelligence › Implementation of Vulnerability Assessment and Penetration Testing tools
4	› <i>Monitoring</i> MPTI Tahun 2025 › Resertifikasi ISO 27001:2022 › Monitoring of IT Master Plan (MPTI) 2025 › ISO 27001:2022 Recertification	100%	› <i>Monitoring</i> pekerjaan TI berdasarkan <i>Roadmap</i> MPTI Tahun 2025 › Pelaksanaan Resertifikasi ISO 27001:2022 dengan hasil yaitu Recommended to Maintain the Certification of ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management Systems (ISMS) › Monitoring of IT activities based on the 2025 MPTI Roadmap › Implementation of ISO 27001:2022 Recertification with the result: Recommended to Maintain Certification of ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management Systems (ISMS)
5	› Pelatihan Internal (<i>inhouse</i>, dll) › Pelatihan Eksternal (luar kota, luar negeri, dll) › Pelatihan Bersertifikasi › Seminar, Lokakarya, dll	100%	› Certified Network Defender › Sertifikasi Kompetensi Network Administrator Madya › EXIN Certified Data Centre Professional (CDCP) › Juniper Networks Certified Associate - Junos (JNCIA-Junos) › Nutanix Certified Professional 5- Multicloud Infrastructure (NCP-MCI) › Fortinet Network Security Expert Level 1: Certified Associate (NSE1) › Fortinet Network Security Expert Level 2: Certified Associate (NSE2) › Fortinet Network Security Expert Level 3: Certified Associate (NSE3) › Certified Secure Computer User (CSCU) › Certificate National Cyber Exercise › Tsinghua University Happy Digital X: Cities, Systems, Products and Services Program › EC-Council Associate Certified Chief Information Security Officer › Developing Database For Information System Applications (BNSP) › Installation Local Area Network (BNSP) › Object Oriented Programming (BNSP) › Developing Dynamic Web Application (BNSP) › ECIH (E-Council Certified Incident Handler) › BSCP › CEH (EC-Council Certified Ethical Hacker) › CITA-F › Archimate › Enterprise Big Data Professional (EBDP) › Certified DevSecOps Engineer (ECDE) › Junior Network Administrator › Atlassian Agile Project Management Professional Certificate › Certified Blockchain Professional (CBP) › Design Data Center Specialist › Cisco Certified Support Technician (CCST) Networking › Cisco Certified Support Technician (CCST) IT Support



No	Program Kerja Work Program	Progress Progress	Kegiatan Activities
5	- Internal Training (in-house, etc.) - External Training (out-of-town, overseas, etc.) - Certified Training Programs - Seminars, Workshops, etc.	100%	- Certified Network Defender - Junior Network Administrator Competency Certification - EXIN Certified Data Centre Professional (CDCP) - Juniper Networks Certified Associate – Junos (JNCIA-Junos) - Nutanix Certified Professional 5 – Multicloud Infrastructure (NCP-MCI) - Fortinet Network Security Expert Level 1: Certified Associate (NSE1) - Fortinet Network Security Expert Level 2: Certified Associate (NSE2) - Fortinet Network Security Expert Level 3: Certified Associate (NSE3) - Certified Secure Computer User (CSCU) - Certificate National Cyber Exercise - Tsinghua University Happy Digital X: Cities, Systems, Products and Services Program - EC-Council Associate Certified Chief Information Security Officer - Developing Database for Information System Applications (BNSP) - Installation Local Area Network (BNSP) - Object Oriented Programming (BNSP) - Developing Dynamic Web Application (BNSP) - ECIH (E-Council Certified Incident Handler) - BSCP - CEH (EC-Council Certified Ethical Hacker) - CITA-F - ArchiMate - Enterprise Big Data Professional (EBDP) - Certified DevSecOps Engineer (ECDE) - Junior Network Administrator - Atlassian Agile Project Management Professional Certificate - Certified Blockchain Professional (CBP) - Data Center Design Specialist - Cisco Certified Support Technician (CCST) Networking - Cisco Certified Support Technician (CCST) IT Support

Realisasi Investasi Divisi TI Tahun 2025

Realization of IT Division Investment in 2025

No	Jenis Investasi Type of Investment	Realisasi (Rp Juta) Realization (Rp Million)	Status
1	Big Data Platform	3.976	Selesai Completed
2	Resilience Backup and Restore System (Replacement FA3663)	4.294	Selesai Completed
3	Radius Network Access Control (Replacement FA3124)	2.714	Selesai Completed
4	Upgrade, Enhancement Performance & Security Improvement Database	3.382	Selesai Completed

Implementasi Digitalisasi Sistem Perusahaan (Baru/Update) Tahun 2025

Implementation of Company System Digitalization (New/Updated) in 2025

No	Program Kerja Work Program	Progress Progress	Kegiatan Activities
1	Sistem Quality Monitoring SBU HSS	100%	Implementasi dan pengembangan <i>Sistem Quality Monitoring</i> untuk mendukung pengendalian mutu dan monitoring kinerja operasional SBU HSS, bekerja sama dengan SBU HSS dan Divisi Tekmindal terkait guna memastikan akurasi data dan efektivitas pelaporan monitoring kualitas.
	SBU HSS Quality Monitoring System		Implementation and development of a Quality Monitoring System to support quality control and operational performance monitoring of SBU HSS, in collaboration with SBU HSS and the related Performance Management Division, to ensure data accuracy and effective quality monitoring reporting.

No	Program Kerja Work Program	Progress Progress	Kegiatan Activities
2	Digitalisasi Dokumen Pengadaan Proses BAST	100%	Implementasi dan pengembangan digitalisasi proses Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengendalian dokumen pengadaan, bekerja sama dengan Divisi Pengadaan dalam rangka optimalisasi proses administrasi secara digital.
	Procurement Document Digitalization – BAST Process		Implementation and development of digitalization for the Handover Certificate (Berita Acara Serah Terima/ BAST) process to improve efficiency, transparency, and procurement document control, in collaboration with the Procurement Division to optimize digital administrative processes.
3	Digitalisasi Pencatatan Hasil Produksi Uang Logam	100%	Implementasi dan pengembangan sistem digital pencatatan hasil produksi uang logam guna meningkatkan akurasi, efisiensi pelaporan, dan kemudahan <i>monitoring</i> produksi, bekerja sama dengan SBU CS untuk mendukung proses operasional dan terdokumentasi dengan baik.
	Digitalization of Coin Production Output Recording		Implementation and development of a digital system for recording coin production output to improve accuracy, reporting efficiency, and production monitoring, in collaboration with SBU CS to support well-documented operational processes.
4	PERURI Connect Modul Reward dan Event	100%	Implementasi dan pengembangan Modul <i>Reward</i> dan Event pada platform PERURI Connect guna mendukung pengelolaan program apresiasi dan kegiatan karyawan secara terstruktur dan terdigitalisasi, bekerja sama dengan Divisi SDM untuk meningkatkan <i>engagement</i> , transparansi, dan efektivitas pengelolaan program.
	PERURI Connect – Reward and Event Module		Implementation and development of the Reward and Event Module on the PERURI Connect platform to support structured and digitized employee appreciation and event management programs, in collaboration with the Human Capital Division to enhance engagement, transparency, and program effectiveness.
5	Presensi Face Recognition Tahun 2025 area Lini B dan Partial Lini A	100%	Implementasi system presensi berbasis Face Recognition pada area Lini B dan sebagian Lini A guna meningkatkan akurasi pencatatan kehadiran serta pengendalian akses area kerja, bekerja sama dengan Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek keamanan biometrik
	Face Recognition Attendance System 2025 (Lini B and Partial Lini A Areas)		Implementation of a Face Recognition-based attendance system in Lini B and selected Lini A areas to improve attendance recording accuracy and work area access control, in collaboration with the Security, Occupational Safety & Health, and Environment Division to ensure compliance with biometric security aspects.
6	Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja	100%	Analisa dan pengembangan Sistem Penilaian Kinerja guna mendukung proses evaluasi kinerja karyawan yang lebih terstruktur, terukur, dan terdigitalisasi, bekerja sama dengan Divisi SDM untuk meningkatkan objektivitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan kinerja
	Kinerjaku Performance Appraisal System Development		Analysis and development of the Kinerjaku Performance Appraisal System to support a more structured, measurable, and digitalized employee performance evaluation process, in collaboration with the Human Capital Division to improve objectivity, transparency, and performance management effectiveness.



Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2026

Information Technology Development Plan for 2026



No	Program	Project
1	Tata Kelola TI dan Tata Kelola Data IT Governance and Data Governance	Pengembangan Layer Data Produk Digital pada Enterprise Architecture Tool Development of Digital Product Data Layer in Enterprise Architecture Tool Surveillance Sertifikasi ISO 27001:2022 ISO 27001:2022 Certification Surveillance <i>Roll Out Master Plan TI</i> Roll Out of IT Master Plan <i>Assessment IT Maturity Level</i> IT Maturity Level Assessment Implementasi Data Governance Implementation of Data Governance
2	Pengembangan Infrastruktur & Keamanan TI IT Infrastructure and Security Development	Penetration Testing Aplikasi dan Infrastruktur Application and Infrastructure Penetration Testing <i>IT Security Tool</i> <i>Cyber Threat Intelligence</i> Operasional Keamanan TI: › <i>Vulnerability Assessment</i> › <i>Attack Surface Management</i> › <i>Data Loss Prevention (DLP)</i> IT Security Operations: › Vulnerability Assessment › Attack Surface Management › Data Loss Prevention (DLP) Capex Pengadaan Server Virtualisasi DRC (Replacement Asset) Capex for DRC Virtualization Server Procurement (Asset Replacement) Capex Pengadaan Router Internet /UTM (Replacement Asset) Capex for Internet Router / UTM Procurement (Asset Replacement) Capex Pengadaan Core Switch (Replacement Asset) Capex for Core Switch Procurement (Asset Replacement) › Pemeliharaan Perangkat Operasional TI › Perpanjangan License › Perpanjangan ATS › Maintenance of IT Operational Equipment › License Renewal › ATS Renewal
3	Pengembangan Aplikasi, Data Analytics & AI Application, Data Analytics & AI Development	Penyelesaian Implementasi Sistem Aplikasi Upgrade/Baru: › Data Analytic Tools dan ETL Data › Upgrade ESS › Upgrade AFIS › Digitalisasi Pencatatan Maintenance & Produksi Pita Cukai SSO › ITMS › <i>Face Recognition</i> › <i>Secure Software Development</i> Completion of Application System Implementation (Upgrade/New): › Data Analytics Tools and Data ETL › ESS Upgrade › AFIS Upgrade › Digitalization of Maintenance & Excise Tape Production Recording › Single Sign-On (SSO) › ITMS › Face Recognition System › Secure Software Development Pengembangan Sistem <i>Monitoring</i> Proses Produksi dan Bisnis Digital Development of Production Process Monitoring System and Digital Business System Capex Replacement Server ERP SAP Capex Replacement for SAP ERP Server



Proses Governansi Terkait Isu Teknologi Informasi

Divisi TI secara konsisten menerapkan proses governansi TI yang terstruktur untuk mengelola berbagai isu strategis, termasuk gangguan layanan (*IT disruption*), ancaman keamanan siber, dan risiko bencana terhadap infrastruktur teknologi informasi.

Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh risiko utama dapat diidentifikasi secara dini, dikelola secara terukur, dimitigasi, dipantau, serta dilaporkan kepada Direksi secara akuntabel, sejalan dengan Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan seluruh standar internasional yang menjadi acuan Perusahaan sebagaimana diuraikan pada bagian Tata Kelola TI dan Kepatuhan Teknologi Informasi.

Proses governansi TI dijalankan melalui siklus yang mencakup identifikasi risiko, pencatatan dalam *risk register*, penilaian tingkat risiko, penetapan mitigasi, pelaksanaan kontrol, pemantauan berkala, eskalasi isu material, serta pelaporan kepada Direksi. Dengan alur tersebut, pengelolaan risiko TI tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pengambilan keputusan manajemen untuk menjaga keandalan layanan, keamanan informasi, dan kesinambungan operasional Perusahaan.

Di sisi lain dalam upaya penguatan governansi TI, Divisi TI juga telah menetapkan pedoman dan prosedur untuk memastikan tata kelola risiko yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk gangguan operasional, ancaman keamanan siber, dan pemulihan dari bencana.

IT Governance Process Related to Information Technology Issues

The IT Division consistently implements a structured IT governance process to manage various strategic issues, including service disruptions (*IT disruption*), cybersecurity threats, and risks of disasters affecting information technology infrastructure.

This process is designed to ensure that all key risks are identified early, managed in a measurable manner, mitigated, monitored, and reported to the Board of Directors in an accountable way, in alignment with the Information Technology Governance Policy and all relevant international standards adopted by the Company, as described in the sections on IT Governance and IT Compliance.

The IT governance process is carried out through a cycle that includes risk identification, recording in the risk register, risk assessment, determination of mitigation actions, implementation of controls, periodic monitoring, escalation of material issues, and reporting to the Board of Directors. Through this process flow, IT risk management is not limited to technical aspects, but also becomes part of the management decision-making mechanism to ensure service reliability, information security, and business continuity.

Meanwhile, as part of efforts to strengthen IT governance, the IT Division has also established guidelines and procedures to ensure effective risk management in the face of various challenges, including operational disruptions, cybersecurity threats, and disaster recovery.



Dalam pengelolaan risiko TI, Divisi TI menyusun dan memutakhirkan *risk register* sebagai dokumen pencatatan atas seluruh potensi risiko yang dapat terjadi dalam proses bisnis TI. Dokumen tersebut mencakup pemetaan risiko, identifikasi penyebab dan dampak, penilaian tingkat risiko, rencana mitigasi, serta langkah pengendalian untuk meminimalkan dampak jika risiko tersebut terjadi. Setiap potensi gangguan layanan, baik yang bersifat teknis, operasional, maupun eksternal, dikaji dalam kerangka manajemen risiko TI agar tidak mengganggu keberlangsungan layanan strategis Perusahaan. Melalui mekanisme ini, seluruh risiko yang berkaitan dengan gangguan layanan, keamanan siber, kegagalan infrastruktur, maupun pemulihan layanan dapat dipantau secara terukur dan menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen.

Secara organisasi, proses governansi TI dijalankan melalui pembagian peran yang melibatkan *Steering Committee*, Koordinator Strategis, Pelaksana Program, Penerapan Program, serta Pengguna/Pelanggan, sebagaimana diuraikan pada bagian Organisasi Pengelola Kegiatan Inisiatif Utama. Struktur ini memperkuat akuntabilitas pengelolaan TI sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporan kepada manajemen dan Direksi.

Pengelolaan Gangguan Layanan TI

Untuk mengelola risiko gangguan layanan TI, PERURI menerapkan mekanisme pemantauan harian (*daily monitoring*) yang dilengkapi dengan kegiatan *preventive* dan *corrective maintenance* terhadap seluruh komponen infrastruktur dan layanan utama Perusahaan. Pedoman dan prosedur pengelolaan operasional TI telah ditetapkan untuk memastikan tata kelola risiko yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk gangguan operasional, ancaman keamanan siber, dan pemulihan dari bencana.

In managing IT risks, the IT Division develops and updates a risk register as a documentation tool for all potential risks that may occur in IT business processes. This document includes risk mapping, identification of causes and impacts, risk level assessment, mitigation plans, and control measures to minimize impact should the risks occur. Every potential service disruption, whether technical, operational, or external, is assessed within the IT risk management framework to ensure it does not interfere with the continuity of the Company's strategic services. Through this mechanism, all risks related to service disruptions, cybersecurity, infrastructure failures, and service recovery can be monitored in a measurable manner and serve as a basis for management decision-making.

From an organizational perspective, the IT governance process is implemented through a defined role structure involving the Steering Committee, Strategic Coordinator, Program Implementer, Program Implementation Owner, and Users/Customers, as outlined in the section on Organization for Managing Key Initiative Activities. This structure strengthens accountability in IT management from planning, execution, monitoring, to reporting to management and the Board of Directors.

IT Service Disruption Management

To manage the risk of IT service disruptions, PERURI implements a daily monitoring mechanism supported by preventive and corrective maintenance activities across all infrastructure components and key services of the Company. Operational guidelines and procedures for IT management have been established to ensure effective risk governance in addressing various challenges, including operational disruptions, cybersecurity threats, and disaster recovery.

Sebagaimana tercantum dalam Realisasi Program Kerja Tahun 2025, pemenuhan SLA layanan TI telah dicapai sebesar 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas mekanisme pemantauan dan pemeliharaan yang diterapkan secara konsisten sepanjang tahun, sekaligus menjadi indikator utama keandalan layanan TI dalam mendukung operasional bisnis Perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan berhasil menjaga ketersediaan layanan TI pada tingkat 99,76%, yang mencerminkan keandalan dukungan teknologi terhadap kelangsungan operasional dan proses bisnis. Rata-rata waktu pemulihan layanan tercatat 64 menit, didukung oleh penguatan kapasitas infrastruktur, mekanisme eskalasi yang terstruktur, serta perbaikan teknis yang berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Perusahaan dalam memastikan layanan TI yang andal, responsif, dan berorientasi pada keberlangsungan bisnis.

Pengelolaan Keamanan Siber

Dalam aspek keamanan siber, PERURI menerapkan *Information Security Management System* (ISMS) berbasis ISO 27001 sebagai kerangka utama untuk memastikan keamanan informasi dikelola melalui kebijakan, kontrol, audit, dan evaluasi berkala. Pada tahun 2025, sebagaimana tercatat dalam Realisasi Program Kerja, PERURI telah berhasil menyelesaikan resertifikasi ISO 27001:2022 dengan hasil *Recommended to Maintain the Certification of ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management Systems* (ISMS). Capaian ini mengonfirmasi bahwa sistem manajemen keamanan informasi Perusahaan telah berjalan sesuai standar internasional yang berlaku dan terus dipelihara secara berkelanjutan.

Penguatan keamanan siber dilaksanakan melalui serangkaian program yang mencakup *penetration testing*, *table top exercise*, *cyber drill*, *cyber threat intelligence*, serta implementasi *tools vulnerability assessment* and *penetration testing*, yang realisasinya telah diuraikan pada bagian Realisasi Program Kerja Tahun 2025. Dari perspektif governansi risiko, keseluruhan program tersebut berfungsi sebagai mekanisme uji kesiapan yang memungkinkan Perusahaan mengidentifikasi celah keamanan secara proaktif, menguji efektivitas prosedur respons insiden, serta memperkuat koordinasi antarunit dalam menghadapi ancaman siber.

Selain itu, PERURI melaksanakan penilaian kematangan keamanan siber menggunakan Instrumen Keamanan Siber (IKAS) yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hasil penilaian IKAS pada tahun 2025 memperoleh total skor indeks kematangan sebesar 4,13 atau berada pada Level 4 (Terkelola). Hasil penilaian ini menjadi dasar bagi Perusahaan dalam memperkuat kontrol keamanan, meningkatkan kesiapan respons insiden, dan memprioritaskan area yang masih memerlukan peningkatan pada periode berikutnya.

Untuk memperkuat budaya keamanan informasi, Perusahaan juga aktif melaksanakan peningkatan kesadaran melalui pelatihan, simulasi serangan siber, serta kampanye kepatuhan guna meminimalkan risiko yang bersumber dari faktor manusia. Upaya ini menjadi pelengkap penting dari kontrol teknis yang telah diterapkan, sehingga pengelolaan keamanan siber mencakup dimensi teknologi sekaligus dimensi sumber daya manusia secara menyeluruh.

As stated in the 2025 Work Program Realization, the achievement of IT service SLA fulfillment reached 100%. This achievement reflects the effectiveness of the monitoring and maintenance mechanisms consistently implemented throughout the year, and serves as a key indicator of IT service reliability in supporting the Company's business operations.

Throughout 2025, the Company successfully maintained IT service availability at 99.76%, reflecting the reliability of technology support in sustaining operational activities and business processes. The average service recovery time was recorded at 64 minutes, supported by strengthened infrastructure capacity, structured escalation mechanisms, and continuous technical improvements. These efforts form part of the Company's commitment to ensuring reliable, responsive, and

Cybersecurity Management

In the aspect of cybersecurity, PERURI implements an Information Security Management System (ISMS) based on ISO 27001 as the primary framework to ensure that information security is managed through policies, controls, audits, and periodic evaluations. In 2025, as stated in the Work Program Realization, PERURI successfully completed the ISO 27001:2022 recertification with the result "Recommended to Maintain the Certification of ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management Systems (ISMS)". This achievement confirms that the Company's information security management system has been operating in accordance with applicable international standards and is continuously maintained in a sustainable manner.

Strengthening of cybersecurity is carried out through a series of programs including penetration testing, table top exercises, cyber drills, cyber threat intelligence, and the implementation of vulnerability assessment and penetration testing tools, as detailed in the 2025 Work Program Realization section. From a risk governance perspective, these programs function as readiness testing mechanisms that enable the Company to proactively identify security gaps, test incident response procedures, and strengthen cross-unit coordination in addressing cyber threats.

In addition, PERURI conducts cybersecurity maturity assessments using the Cybersecurity Maturity Index (IKAS) established by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN). The 2025 IKAS assessment resulted in a maturity index score of 4.13, classified as Level 4 (Managed). This result serves as a basis for the Company to further strengthen security controls, enhance incident response readiness, and prioritize areas that require improvement in the following period.

To strengthen information security culture, the Company also actively conducts awareness programs through training, cyber attack simulations, and compliance campaigns to minimize risks originating from human factors. These initiatives complement the technical controls implemented, ensuring that cybersecurity management covers both technological and human resource dimensions comprehensively.



Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat insiden keamanan siber yang tercatat.

Pengelolaan Pemulihan Bencana dan Kesiambungan Layanan

PERURI memperkuat kesiapan pemulihan bencana melalui pengelolaan *IT continuity*, yang mencakup penyusunan *contingency plan*, *Disaster Recovery Plan* (DRP), serta dukungan *Disaster Recovery Center* (DRC). Kerangka ini memastikan bahwa layanan kritikal Perusahaan dapat dipulihkan secara terukur apabila terjadi gangguan besar atau kondisi darurat yang berdampak terhadap infrastruktur TI.

Pada tahun 2025, PERURI telah menyelesaikan investasi pada *Resilience Backup and Restore System Replacement* sebagaimana tercatat dalam Realisasi Investasi Divisi TI Tahun 2025. Investasi ini secara langsung mendukung peningkatan ketahanan sistem dan kesiapan pemulihan data, sehingga memperkuat fondasi *IT continuity* Perusahaan. Untuk periode berikutnya, rencana pengembangan infrastruktur DRC, termasuk pengadaan server virtualisasi, penguatan sistem keamanan, dan pembaruan perangkat jaringan, telah ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2026. PERURI telah melakukan uji

PERURI secara berkala melaksanakan uji *Disaster Recovery Plan/Business Continuity Plan* pada tahun 2025, dengan cakupan pengujian pada aplikasi kritikal. Pelaksanaan uji ini menjadi bagian dari penguatan ketahanan operasional dan kesiapan infrastruktur pemulihan, sekaligus menjadi dasar penyempurnaan prosedur pemulihan layanan secara berkelanjutan.

Pelaporan Risiko TI kepada Direksi

Seluruh hasil pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas pengelolaan TI dilaporkan kepada Direksi melalui mekanisme pelaporan berkala dan/atau forum manajemen yang relevan. Materi pelaporan mencakup perkembangan implementasi *Master Plan* TI, status inisiatif strategis TI, capaian SLA layanan TI, hasil *assessment IT Maturity Level*, hasil penilaian IKAS, status sertifikasi ISO 27001:2022, pengelolaan risiko TI, isu yang membutuhkan eskalasi, serta tindak lanjut atas rekomendasi audit atau penilaian.

Melalui pelaporan tersebut, Direksi memperoleh informasi yang memadai untuk memberikan arahan, menetapkan prioritas perbaikan, serta memastikan bahwa risiko TI telah dikelola sesuai tingkat risiko dan kebutuhan strategis Perusahaan. Dengan demikian, proses governansi TI tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian teknis, tetapi juga sebagai instrumen pengambilan keputusan strategis yang mendukung keberlanjutan transformasi Perusahaan.

Pada tahun 2025, pelaporan risiko dan kinerja TI kepada Direksi dilakukan secara bulanan melalui rapat Direktorat SDM Teknologi dan Informasi. Pembahasan mencakup status risiko utama TI, insiden layanan dan keamanan siber, progres implementasi dan *improvement* layanan keamanan TI, pengembangan dan penguatan tata kelola TI berbasis COBIT dan ISO 27001, hasil *audit/assessment*, *maturity level* TI, serta tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Throughout 2025, there were no cybersecurity incidents recorded,

Disaster Recovery and Service Continuity Management

PERURI strengthens disaster recovery readiness through IT continuity management, which includes the development of contingency plans, Disaster Recovery Plans (DRP), and support from the Disaster Recovery Center (DRC). This framework ensures that the Company's critical services can be restored in a controlled and measurable manner in the event of major disruptions or emergency conditions affecting IT infrastructure.

In 2025, PERURI completed the investment in the Resilience Backup and Restore System Replacement, as recorded in the IT Division Investment Realization for 2025. This investment directly supports the enhancement of system resilience and data recovery readiness, thereby strengthening the Company's IT continuity foundation. For the following period, the development plan for DRC infrastructure—including virtualization server procurement, strengthening of security systems, and network device upgrades—has been established in the 2026 Information Technology Development Plan.

PERURI periodically conducted Disaster Recovery Plan/Business Continuity Plan (DRP/BCP) testing throughout 2025, covering critical applications. The implementation of these tests' forms part of the company's efforts to strengthen operational resilience and recovery infrastructure readiness, while also serving as a foundation for the continuous improvement of service recovery procedures.

IT Risk Reporting to the Board of Directors

All results of IT monitoring, evaluation, and assessment are reported to the Board of Directors through periodic reporting mechanisms and/or relevant management forums. The reporting materials include the progress of IT Master Plan implementation, status of IT strategic initiatives, IT service SLA achievements, IT Maturity Level assessment results, IKAS assessment results, ISO 27001:2022 certification status, IT risk-management updates, issues requiring escalation, and follow-up actions on audit or assessment recommendations.

Through this reporting, the Board of Directors obtains sufficient information to provide direction, set improvement priorities, and ensure that IT risks are managed in accordance with the Company's risk appetite and strategic needs. In this way, IT governance serves not only as a technical control mechanism but also as a strategic decision-making instrument supporting the sustainability of the Company's transformation.

In 2025, IT risk and performance reporting to the Board of Directors was conducted on a monthly basis through the Human Capital, Technology, and Information Directorate meetings. The discussions covered the status of key IT risks, service and cybersecurity incidents, the progress of IT security service implementation and improvement initiatives, the development and strengthening of IT governance based on COBIT and ISO 27001, audit/assessment results, IT maturity levels, as well as follow-up actions on improvement recommendations.

Arahan Direksi ditindaklanjuti oleh Divisi TI melalui pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko, penguatan kontrol dan monitoring keamanan informasi, improvement infrastruktur dan layanan TI, pengelolaan change management dan ERP, penyempurnaan dokumentasi dan kebijakan keamanan informasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan dipantau secara berkala sampai dengan penyelesaian.

Audit, Assessment, dan Tindak Lanjut

Untuk memastikan efektivitas tata kelola TI, PERURI melaksanakan penilaian kematangan TI atau *IT Maturity Level* (ITML) menggunakan *framework* COBIT secara berkala setiap dua tahun. Penilaian terakhir pada tahun 2024 menghasilkan skor 3,8 dengan kategori Terdefinisi, sedangkan penilaian IKAS pada tahun 2025 memperoleh skor 4,13 atau Level 4 (Terkelola). Hasil resertifikasi ISO 27001:2022, penilaian ITML, dan penilaian IKAS tersebut dilaporkan kepada Direksi sebagai dasar evaluasi dan penetapan arah peningkatan berkelanjutan atas tata kelola TI Perusahaan.

Tindak Lanjut Hasil Audit

Dalam rangka menindaklanjuti hasil audit dan/atau penilaian atas penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) tahun 2025, PERURI terus memperkuat tata kelola TI sebagai bagian dari peningkatan efektivitas pengendalian internal, pengelolaan risiko, serta dukungan terhadap transformasi digital perusahaan sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

Upaya tindak lanjut dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan dan prosedur tata kelola TI, penguatan keamanan informasi, optimalisasi pengelolaan layanan TI, peningkatan penerapan *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP), serta pengembangan arsitektur TI yang terintegrasi guna mendukung efisiensi operasional dan kualitas layanan perusahaan.

Pada aspek pengelolaan data, PERURI memperkuat implementasi tata kelola data melalui penyusunan Kebijakan Tata Kelola Data, pedoman data *ownership*, serta penerapan *business glossary* untuk mendukung kualitas, konsistensi, integritas, dan keterpaduan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Melalui inisiatif tersebut, PERURI telah membangun proses penyelenggaraan TI yang terdokumentasi, dijalankan secara konsisten, serta didukung mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pengelolaan TI juga diperkuat melalui penerapan manajemen risiko, standar dan prosedur operasional, pengukuran layanan melalui SLA, pelaksanaan audit dan assessment keamanan, *cyber drill*, *penetration testing*, serta pelaporan kepada Direksi.

Ke depan, PERURI akan terus melakukan penguatan tata kelola TI dan tata kelola data secara berkelanjutan guna meningkatkan keandalan layanan, keamanan informasi, serta mendukung keberhasilan transformasi digital perusahaan.

Directions and recommendations from the Board of Directors were subsequently followed up by the IT Division through the implementation of risk mitigation action plans, enhancement of information security controls and monitoring, improvement of IT infrastructure and services, management of change management and ERP initiatives, refinement of information security policies and documentation, as well as continuous monitoring and evaluation activities, which were periodically tracked until completion.

Audit, Assessment, and Follow-up

To ensure the effectiveness of IT governance, PERURI conducts periodic IT Maturity Level (ITML) assessments using the COBIT framework every two years. The most recent assessment in 2024 resulted in a score of 3.8 with a Defined category, while the IKAS assessment in 2025 achieved a score of 4.13 at Level 4 (Managed). The results of the ISO 27001:2022 recertification, ITML assessment, and IKAS assessment are reported to the Board of Directors as a basis for evaluation and for determining the direction of continuous improvement of the Company's IT governance.

Follow-up on Audit Results

In order to follow up on the results of the 2025 audit and/or assessment of Information Technology (IT) operations, PERURI continues to strengthen IT governance as part of efforts to improve the effectiveness of internal controls, risk management, and support for the company's digital transformation in accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Follow-up efforts are carried out through the refinement of IT governance policies and procedures, the strengthening of information security, the optimization of IT service management, the improvement of the implementation of the Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP), and the development of an integrated IT architecture to support operational efficiency and the quality of the company's services.

In terms of data management, PERURI has strengthened the implementation of data governance by drafting a Data Governance Policy, data ownership guidelines, and the adoption of a business glossary to support data quality, consistency, integrity, and integration as the foundation for more effective decision-making.

Through these initiatives, PERURI has established documented IT management processes that are consistently executed and supported by periodic monitoring and evaluation mechanisms. IT management has also been strengthened through the implementation of risk management, operational standards and procedures, service measurement via SLAs, security audits and assessments, cyber drills, and penetration testing.

Moving forward, PERURI will continue to strengthen its IT and data governance on an ongoing basis to improve service reliability and information security, as well as to support the success of the company's digital transformation.



Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance

PERURI memperkuat fondasi tata kelola perusahaan yang baik melalui peningkatan integritas, pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan, dan transparansi sebagai dasar dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

PERURI strengthened the foundation of good corporate governance through enhanced integrity, internal control, risk management, compliance, and transparency as the basis for maintaining stakeholder trust.



Pernyataan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Statement on Corporate Governance Implementation

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Konsisten dan Berkelanjutan

Penerapan GCG secara konsisten merupakan faktor penting dalam pengelolaan Perusahaan, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi semakin meningkat, baik dari aspek keamanan dan integritas produk sekuriti, dinamika transformasi digital, maupun meningkatnya ekspektasi para pemangku kepentingan. PERURI meyakini bahwa penerapan GCG yang berlandaskan standar etika tertinggi mampu menciptakan Perusahaan yang berdaya saing tinggi, tepercaya, dan tumbuh secara berkelanjutan.

PERURI terus memperkuat komitmen untuk mengimplementasikan praktik terbaik (*best practices*) prinsip-prinsip GCG demi memberikan nilai lebih bagi para pemangku kepentingan. Nilai lebih tersebut diwujudkan melalui perilaku yang sejalan dengan budaya Perusahaan, penyediaan produk dan layanan yang andal dan aman, pengembangan bisnis yang inovatif dan efisien, serta penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan usaha.

Komitmen ini menjadi semakin relevan seiring peran strategis PERURI sebagai pengemban tugas pencetakan uang dan pengamanan dokumen negara, sekaligus penyelenggara keterpaduan layanan digital pemerintah (GovTech), di mana kepercayaan publik merupakan inti keberlangsungan Perusahaan. Karena itu, PERURI senantiasa memperkuat infrastruktur tata kelola serta meningkatkan sistem dan prosedur secara berkesinambungan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG di seluruh lini Perusahaan.

Penerapan GCG di PERURI mengacu pada prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan yang berlaku serta praktik terbaik, sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Hal ini mencerminkan tekad manajemen untuk menjadikan PERURI Perusahaan yang tumbuh berkelanjutan dengan kualitas produk dan proses kerja yang baik, menjunjung Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), serta menjalankan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dasar Hukum Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PERURI berlandaskan pada hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang di bidang BUMN hingga perangkat tata kelola internal Perusahaan, yang mencakup antara lain:

Commitment to Consistent and Sustainable Corporate Governance Implementation

The consistent implementation of Good Corporate Governance (GCG) constitutes a critical factor in the management of the Company, given the increasing risks and challenges it faces, including those related to the security and integrity of security products, the dynamics of digital transformation, and the growing expectations of stakeholders. PERURI believes that the implementation of GCG, founded on the highest ethical standards, enables the creation of a highly competitive, trusted, and sustainably growing company.

PERURI continues to strengthen its commitment to implementing best practices in GCG principles in order to deliver greater value to its stakeholders. Such added value is realized through conduct that aligns with the Company's culture, the provision of reliable and secure products and services, innovative and efficient business development, and the implementation of risk management and internal control systems that ensure accountability and business sustainability.

This commitment becomes increasingly relevant in line with PERURI's strategic role as the institution entrusted with currency printing and the security of state documents, as well as the operator of integrated government digital services (GovTech), where public trust is fundamental to the Company's sustainability. Accordingly, PERURI continuously strengthens its governance infrastructure and enhances its systems and procedures on an ongoing basis to support the effective implementation of GCG across all levels of the Company.

The implementation of GCG at PERURI is guided by GCG principles in accordance with applicable regulations and best practices, in line with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. This reflects management's determination to establish PERURI as a sustainably growing company with high-quality products and work processes, adherence to the Code of Conduct, and a strong commitment to environmental and social responsibility.

Legal Basis for Corporate Governance

The implementation of good corporate governance at PERURI is based on the hierarchy of laws and regulations, ranging from laws in the field of State-Owned Enterprises (BUMN) to the Company's internal governance framework, which includes, among others:

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang telah mengalami beberapa perubahan, antara lain melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, yang menjadi dasar pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

Pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2019 menegaskan bahwa Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Komitmen tersebut diperkuat pada tataran regulasi BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Pasal 3, yang menyatakan bahwa setiap BUMN wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam seluruh kegiatan usaha pada setiap tingkatan organisasi. PERURI senantiasa menyelaraskan penerapan tata kelolanya dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Tujuan penerapan tata kelola perusahaan di PERURI bertujuan, antara lain:

- a. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara Nasional maupun Internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- b. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
- c. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.

1. Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, which has undergone several amendments, including through Law No. 1 of 2025 on the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, and was most recently amended by Law No. 16 of 2025 on the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises.
2. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
3. Government Regulation No. 6 of 2019 concerning the Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, which serves as the basis for the Company's establishment and Articles of Association;
4. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises;
5. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
6. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;

In Government Regulation No. 6 of 2019 emphasizes that the Company conducts its business activities based on the principles of sound corporate management. This commitment is reinforced at the BUMN regulatory level through Article 3 of Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, which states that every BUMN is obliged to implement the principles of Good Corporate Governance in all business activities at every organizational level. PERURI constantly aligns its governance implementation with the applicable regulatory framework.

Objectives of Corporate Governance Implementation

The objectives of implementing corporate governance at PERURI include, among others:

- a. To optimize the Company's value so that the Company possesses strong competitiveness, both nationally and internationally, thereby enabling it to sustain its existence and achieve sustainable growth to fulfill the Company's objectives and goals.
- b. To promote professional, efficient, and effective management of the Company, as well as to empower the functions and enhance the autonomy of the Company's organizational units.
- c. To encourage Company bodies to make decisions and take actions grounded in high moral values and compliance with laws and regulations, as well as an awareness of the Company's social responsibility toward stakeholders and the preservation of the environment surrounding the Company.



- d. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam Perekonomian Nasional.
- e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Prinsip TARIF dan ETAK

PERURI menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang meliputi Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*), yang dikenal dengan akronim TARIF. Selain itu, Perusahaan juga mengikuti perkembangan praktik tata kelola dengan mengadopsi 4 (empat) prinsip sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan (ETAK).

Keempat prinsip tersebut merupakan bentuk penyempurnaan dan pengembangan dari prinsip TARIF yang telah diterapkan sebelumnya. Adapun implementasi dari keempat prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut adalah sebagai berikut:

- d. To increase the Company's contribution to the national economy.
- e. To foster a conducive climate for the development of national investment.

Corporate Governance Principles

Implementation of TARIF and ETAK Principles

PERURI implements the principles of Good Corporate Governance, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness, collectively known by the acronym TARIF. In addition, the Company keeps pace with the evolution of governance practices by adopting four principles set forth in the 2021 Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUGKI 2021), namely Ethical Behavior, Accountability, Transparency, and Sustainability (ETAK).

These four principles represent a refinement and enhancement of the TARIF principles that had previously been implemented. The implementation of these four Good Corporate Governance principles is described as follows:

Prinsip Principle	Penerapan Implementation
Perilaku Beretika Ethical Behavior	Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (<i>respect</i>), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Perusahaan memperhatikan kepentingan Pemilik modal dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (<i>fairness</i>) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. In conducting its business activities, the Company consistently upholds honesty, treats all parties with respect, honors its commitments, and continuously builds and maintains moral values and trust. The Company takes into account the interests of its Capital owner and other stakeholders based on the principles of fairness, and is managed independently to ensure that no corporate organ dominates another and that no undue intervention by external parties occurs.
Transparansi Transparency	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemilik modal, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. To maintain objectivity in conducting its business, the Company provides material and relevant information in a manner that is readily accessible and understandable to stakeholders. The Company takes the initiative to disclose not only matters required by prevailing laws and regulations, but also information that is important for decision-making by Capital owner, creditors, and other stakeholders.
Akuntabilitas Accountability	Perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemilik modal dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. The Company is accountable for its performance in a transparent and fair manner. Accordingly, it is managed properly, measurably, and in accordance with the Company's interests, while taking into consideration the interests of the Capital owner and other stakeholders. Accountability is a prerequisite for achieving sustainable performance.
Keberlanjutan Sustainability	Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. The Company complies with applicable laws and regulations and is committed to fulfilling its responsibilities to society and the environment in order to contribute to sustainable development. This commitment is carried out through collaboration with all relevant stakeholders to improve their quality of life in a manner that is aligned with the Company's business interests and the sustainable development agenda.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2025

Pelaksanaan tata kelola perusahaan di PERURI diwujudkan melalui penguatan mekanisme pengelolaan dan pengawasan pada seluruh aspek perusahaan, mulai dari penyampaian laporan kinerja dan laporan keuangan kepada pemilik modal, pemenuhan kewajiban kepatuhan, pengelolaan risiko, penguatan sistem pengendalian internal, hingga pelaksanaan pengawasan oleh organ perusahaan. PERURI juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan kewenangan, tanggung jawab, dan ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2025, implementasi tata kelola perusahaan di PERURI tercermin melalui berbagai kegiatan, antara lain

- Penyampaian laporan kinerja dan laporan keuangan kepada pemilik modal;
- Pelaksanaan kegiatan bisnis sesuai ketentuan hukum serta melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan;
- Pelaksanaan rapat yang melibatkan organ perusahaan yaitu Direksi, Dewan Pengawas, Komite Dewan Pengawas;
- Pelaksanaan Program Tata Kelola Perusahaan seperti Program Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing system* (WBS), Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- Pelaksanaan program peningkatan awareness melalui kegiatan induksi, sosialisasi, *e-learning* kepada seluruh karyawan;
- Pelaksanaan audit internal dan eksternal guna memastikan pengelolaan dan pengawasan perusahaan dilakukan dengan baik.

Sebagai bentuk komitmen PERURI dalam memastikan implementasi prinsip-prinsip GCG secara berkelanjutan dan objektif, dilaksanakan penilaian terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan secara mandiri atau *self assessment* maupun oleh pihak independen/eksternal.

Pengukuran/Assessment Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penilaian (*assessment*) atas kecukupan infrastruktur serta praktik Tata Kelola Perusahaan di PERURI dilaksanakan melalui evaluasi terhadap sejumlah aspek penilaian, yang mencakup penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta implementasinya oleh PERURI sebagai kerangka utama dalam struktur Tata Kelola Perusahaan.

Pengukuran terhadap penerapan GCG dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- Penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;

Implementation of Good Corporate Governance in 2025

The implementation of corporate governance at PERURI is reflected through the strengthening of management and oversight mechanisms across all aspects of the Company's operations, ranging from the submission of performance and financial reports to the capital owner, fulfillment of compliance obligations, risk management, enhancement of the internal control system, to the execution of oversight functions by the Company's governing bodies. PERURI also ensures that decision-making processes and business activities are carried out in accordance with the applicable authorities, responsibilities, and prevailing regulations.

Throughout 2025, the implementation of corporate governance at PERURI was reflected through various activities, including:

- Submission of performance reports and financial statements to the capital owner;
- Conducting business activities in compliance with applicable laws and regulations, and implementing social and environmental responsibility programs;
- Conducting meetings involving the Company's governing bodies, namely the Board of Directors, Supervisory Board, and Supervisory Board Committees;
- Implementation of Corporate Governance programs, including the Gratification Control Program, Whistleblowing System (WBS), and Anti-Bribery Management System;
- Implementation of awareness enhancement programs through induction sessions, socialization activities, and e-learning programs for all employees;
- Conducting internal and external audits to ensure that the management and oversight of the Company are carried out effectively.

As part of PERURI's commitment to ensuring the continuous and objective implementation of GCG principles, assessments of the implementation of corporate governance are conducted both through self-assessment and by independent external parties.

Measurement/Assessment of Corporate Governance Implementation

The assessment of the adequacy of corporate governance infrastructure and practices at PERURI is carried out through an evaluation of a number of assessment aspects, encompassing the application of Good Corporate Governance (GCG) principles and their implementation by PERURI as the primary framework of its corporate governance structure.

The measurement of GCG implementation is conducted in 2 (two) forms, namely:

- Assessment is a program designed to identify the implementation of GCG within State-Owned Enterprises (SOEs) through the measurement of GCG implementation and practices, conducted periodically every 2 (two) years;



2. Evaluasi (*review*) yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

Penilaian tersebut dilakukan terhadap 6 (enam) aspek yaitu:

1. Komitmen terhadap penerapan GCG yang baik secara berkelanjutan;
2. Pemilik Modal dan RPB/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi;
6. Aspek lainnya.

Adapun penilaian (*assessment*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PERURI dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemilik modal dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam kegiatan usaha dan mewujudkan Visi dan Misinya.
2. Bentuk komitmen agar senantiasa selalu berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan menjunjung transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Bentuk komitmen implementasi tata kelola dalam proses bisnis juga dijadikan sebagai pijakan kokoh untuk mewujudkan Visi dan Misi PERURI sehingga azas dan prinsip GCG selalu menjadi acuan standar yang bertujuan untuk meningkatkan nilai, efisiensi, efektivitas serta tanggung jawab sosial lingkungan.

Laporan Hasil Penilaian GCG 2024 dan Tindak Lanjutnya pada Tahun 2025

PERURI telah melakukan evaluasi penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun Buku (TB) 2024 secara mandiri sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Penilaian tersebut dilakukan dengan Kerangka Kerja dan Metodologi *Assessment* GCG BUMN mengacu pada SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Evaluasi GCG Tahun Buku 2024 dilakukan pada 16 September 2025 sampai dengan 10 November 2025 oleh Tim Internal Satuan Pengawasan Intern sebagaimana Surat Tugas Nomor: ST-14/KSPI/IX/2025. Metode pelaksanaan evaluasi GCG dilakukan melalui reviu atas dokumen-dokumen yang relevan dengan faktor uji kesesuaian dalam kerangka kerja penilaian penerapan GCG TB 2024.

Setelah dilakukan evaluasi, PERURI memperoleh capaian hasil dengan Skor Implementasi GCG TB 2024 adalah 92.47 yang artinya mengalami peningkatan sebesar 2,6 dari pencapaian hasil *Assessment* tahun sebelumnya. Terdapat 29 rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut. Adapun perolehan skor kami sampaikan sebagai berikut:

2. Review is a program to describe the follow-up to the implementation and application of GCG in BUMN which is carried out in the following year after the assessment as referred to in letter a, which includes evaluation of the assessment results and follow-up to the recommendations.

The assessment covers 6 (six) aspects, namely:

1. Commitment to the sustainable implementation of Good Corporate Governance;
2. Shareholders and RPB/Capital Owner;
3. Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. Board of Directors;
5. Information disclosure and transparency; and
6. Other aspects.

The Good Corporate Governance assessment at PERURI is conducted with the following objectives:

1. To safeguard the interests of all stakeholders and enhance value for the capital owner through the implementation of Good Corporate Governance in business operations and in the realization of the Company's Vision and Mission.
2. To demonstrate the Company's commitment to consistently upholding business ethics and transparency in accordance with applicable laws, regulations, and provisions.
3. To reinforce the commitment to implementing governance principles within business processes, serving as a solid foundation for realizing PERURI's Vision and Mission, while ensuring that GCG principles and practices remain the standard reference for enhancing value creation, efficiency, effectiveness, and social and environmental responsibility.

GCG 2024 Assessment Results Report for and Follow-Up Actions in 2025

PERURI conducted a self-assessment of its Good Corporate Governance (GCG) implementation for Fiscal Year (FY) 2024 in accordance with the mandate of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The assessment was carried out using the SOE GCG Assessment Framework and Methodology, referring to SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The evaluation of GCG implementation for FY2024 was conducted from September 16, 2025 to November 10, 2025 by the Internal Audit Unit Team, as stipulated in Assignment Letter No. ST-14/KSPI/IX/2025. The evaluation was performed through a review of documents relevant to the compliance-testing factors within the FY2024 GCG assessment framework.

Based on the evaluation results, PERURI achieved a GCG Implementation Score of 92.47 for FY2024, representing an increase of 2.6 points compared to the assessment results of the previous year. The evaluation also generated 29 recommendations for further improvement. The score achievement is presented as follows:

Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	Hasil Result		Penjelasan Description
		Skor Score	Capaian (%) Achievement (%)	
I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7	6,720	96,00	Sangat Baik Very Good
II Pemilik Modal Capital Owner	9	9,000	100,00	Sangat Baik Very Good
III Dewan Pengawas Supervisory Board	35	33,361	95,32	Sangat Baik Very Good
IV Direksi Board of Directors	35	32,650	93,29	Sangat Baik Very Good
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9	8,328	91,53	Sangat Baik Very Good
VI Aspek Lainnya Other Aspects	5	2,500	50,00	Sangat Baik Very Good
Skor Keseluruhan Overall Score	100	92,469	92,47	Sangat Baik Very Good
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Classification			Sangat Baik Very Good	

Tindak Lanjut Penilaian Penerapan GCG Tahun Buku 2024 di 2025

Sebagai bagian dari prinsip *continuous improvement*, hasil *self-assessment* GCG Tahun Buku 2024 menghasilkan sejumlah rekomendasi dan *area of improvement* (Aol) yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing organ dan unit kerja terkait.

Follow-Up Actions on the FY2024 GCG Assessment in 2025

As part of its commitment to the principle of continuous improvement, the results of the FY2024 GCG self-assessment identified a number of recommendations and areas for improvement (Aol) that require follow-up actions by the relevant corporate organs and work units.

Aspek Pengujian Assessment Aspect	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations
I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	4
II Pemilik Modal Capital Owner	0
III Dewan Pengawas Supervisory Board	4
IV Direksi Board of Directors	16
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	3
VI Aspek Lainnya Other Aspects	2
Jumlah Rekomendasi Total Recommendations	29

Secara total, terdapat 29 rekomendasi atau Aol yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh organ perusahaan sebagai langkah perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan GCG di lingkungan PERURI. Rekomendasi tersebut mencakup penyempurnaan kebijakan, peningkatan efektivitas pelaksanaan, penguatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi transparansi dan komunikasi korporasi.

In total, there were 29 recommendations or Areas of Improvement (Aol) that required follow-up by all corporate organs as part of PERURI's continuous efforts to enhance the implementation of Good Corporate Governance (GCG). These recommendations covered the refinement of policies, improvement of implementation effectiveness, strengthening of the internal control system, as well as the optimization of transparency and corporate communication.



Struktur Tata Kelola Perusahaan di PERURI

Corporate Governance Structure at PERURI

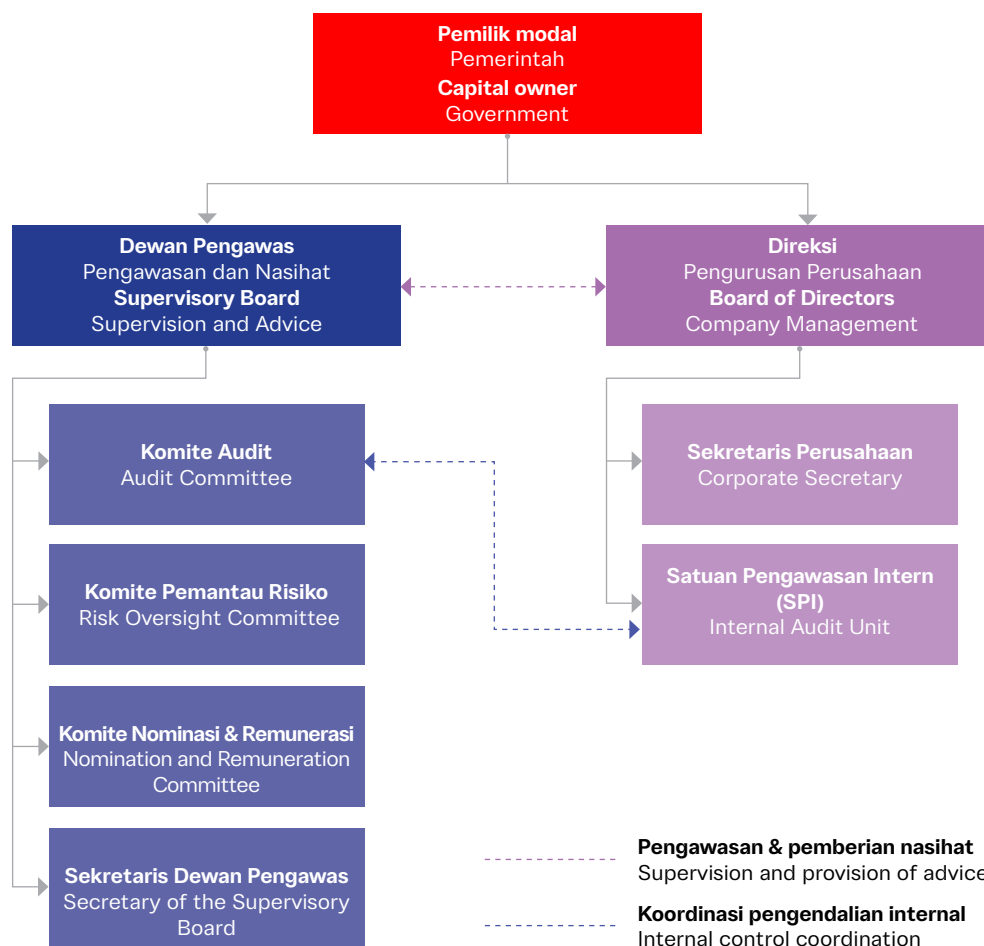
Sebagai Perusahaan Umum (Perum), PERURI memiliki struktur tata kelola yang berlandaskan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023. Modal PERURI merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan seluruhnya dimiliki oleh negara.

Struktur tata kelola PERURI terdiri atas organ utama dan organ pendukung yang menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan secara seimbang berdasarkan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*).

As a State-Owned Public Corporation (Perum), PERURI has established its corporate governance structure in accordance with Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and its amendments, Government Regulation No. 6 of 2019 concerning Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, and the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023. PERURI's capital constitutes separated state assets and is wholly owned by the Government of Indonesia.

PERURI's corporate governance structure comprises both principal and supporting organs that carry out management and oversight functions in a balanced manner, based on a system of checks and balances designed to ensure effective governance and accountability.

Struktur Tata Kelola PERURI PERURI Governance Structure



Organ Utama

Pemilik Modal. Kewenangan tertinggi dalam PERURI berada pada Pemerintah selaku pemilik modal, yang antara lain menetapkan kebijakan strategis, mengesahkan rencana dan laporan Perusahaan, serta mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Pengawas. Kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Principal Organs

Capital Owner. The Government, as the capital owner, holds the highest authority within PERURI. Its authority includes, among others, determining strategic policies, approving the Company's plans and reports, and appointing and dismissing members of the Board of Directors and the Supervisory Board. Such authority is exercised in accordance with the prevailing laws and regulations.

Dewan Pengawas. Dewan Pengawas merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan, serta memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.

Direksi. Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Organ Pendukung

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, masing-masing organ utama dilengkapi dengan perangkat pendukung. Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Sekretaris Dewan Pengawas. Sementara itu, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Seluruh organ tersebut menjalankan fungsinya berdasarkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, *Charter* masing-masing organ, serta perangkat tata kelola internal Perusahaan, sehingga tercipta keseimbangan antara fungsi pengurusan dan pengawasan dalam mendukung penerapan *Good Corporate Governance*.

Perangkat Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

PERURI memiliki perangkat kebijakan tata kelola perusahaan (*soft structure*) sebagai landasan dalam memastikan seluruh proses pengurusan dan pengawasan Perusahaan berjalan secara terarah, tertib, dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perangkat kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi organ Perusahaan, organ pendukung, serta seluruh insan PERURI dalam menjalankan tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kebijakan yang terdokumentasi, penerapan tata kelola perusahaan tidak hanya bertumpu pada pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi sistem kerja yang mengatur proses pengambilan keputusan, hubungan antarorgan, pengendalian internal, kepatuhan, etika bisnis, serta pelaksanaan operasional Perusahaan.

Perangkat kebijakan tata kelola perusahaan PERURI antara lain meliputi:

1. *Corporate Policy Manual* (CPM) dan manual turunannya;
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance/CoCG*);
3. Pedoman Etika Perilaku (*Code of Conduct/CoC*);
4. Pedoman Kerja Direksi (*Board of Directors Charter*);
5. Pedoman Kerja Dewan Pengawas (*Board of Supervisors Charter*);
6. Pedoman Kerja Komite; dan
7. Prosedur operasional baku (*standard operating procedure/SOP*) serta pedoman pelaksanaan lainnya.

Melalui perangkat kebijakan tersebut, PERURI memperkuat konsistensi penerapan tata kelola perusahaan pada seluruh jenjang organisasi. Kebijakan ini sekaligus menjadi acuan dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, akuntabel, transparan, patuh terhadap ketentuan, serta responsif terhadap dinamika bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Supervisory Board. The Supervisory Board is the Company's governing body responsible for supervising management policies and the overall management of the Company, as well as providing advice to the Board of Directors in the best interests and objectives of the Company.

Board of Directors. The Board of Directors is the Company's governing body vested with full authority and responsibility for managing the Company in the interests and objectives of the Company, and also represents the Company both in and out of court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Supporting Organs

To support the effective execution of their duties, each principal organ is supported by dedicated governance bodies. The Supervisory Board is assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, and the Secretary of the Supervisory Board. Meanwhile, the Board of Directors is supported by the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit (SPI).

All of these organs perform their respective functions based on clearly defined roles and responsibilities, as stipulated in the Articles of Association, the Charter of each governing body, and the Company's internal governance framework, to ensure an appropriate balance between management and oversight functions, thereby supporting the effective implementation of *Good Corporate Governance*.

Corporate Governance Policy Framework

PERURI has established a corporate governance policy framework (*soft structure*) as the foundation for ensuring that all Company management and oversight processes are conducted in a structured, orderly, and consistent manner in accordance with the principles of *Good Corporate Governance*. These policies serve as guidelines for the Company's governing bodies, supporting organs, and all PERURI personnel in carrying out their duties, authorities, responsibilities, and work conduct in compliance with applicable regulations. Through documented policies, the implementation of corporate governance is not solely focused on regulatory compliance but also serves as a management system governing decision-making processes, inter-organ relationships, internal controls, compliance, business ethics, and the execution of the Company's operations.

PERURI's corporate governance policy framework includes, among others:

1. Corporate Policy Manual (CPM) and its subsidiary manuals;
2. Code of Corporate Governance (CoCG);
3. Code of Conduct (CoC);
4. Board of Directors Charter;
5. Board of Supervisors Charter;
6. Committee Charters; and
7. Standard Operating Procedures (SOPs) and other implementation guidelines.

Through these policy instruments, PERURI strengthens the consistent implementation of corporate governance across all levels of the organization. These policies also serve as a reference for fostering a work culture that upholds integrity, accountability, transparency, compliance with applicable regulations, and responsiveness to business dynamics and stakeholder needs.



Rapat Pembahasan Bersama

Joint Deliberation Meeting

Rapat Pembahasan Bersama (RPB) merupakan forum koordinasi strategis antara PERURI dan BP BUMN selaku pemilik modal, yang diselenggarakan untuk memastikan keselarasan antara rencana usaha dan arah kebijakan Perusahaan dengan kebijakan Pemerintah serta dinamika pasar terkini. RPB menjadi salah satu instrumen utama dalam proses perencanaan dan pengendalian kinerja, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan korporasi.

Dalam implementasinya, RPB membahas secara komprehensif dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), termasuk proyeksi keuangan, sasaran kinerja operasional, rencana investasi strategis, serta aspek manajemen risiko dan tata kelola. Melalui forum ini, manajemen memaparkan dasar asumsi, arah strategi pengembangan usaha, serta berbagai skenario yang akan dijalankan dalam jangka pendek maupun menengah.

Penyelenggaraan RPB 2025

Hasil Keputusan RPB 2025 dan Realisasinya

RPB tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025 tidak dilaksanakan melalui rapat fisik, melainkan melalui penetapan keputusan tertulis oleh Pemilik Modal. RPB tahunan tersebut ditetapkan oleh Kepala BP BUMN selaku wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal melalui Keputusan No. S-383/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang memuat persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 beserta keputusan strategis lainnya.

Berikut adalah keputusan RPB 2025 dan realisasinya:

The Joint Deliberation Meeting (RPB) serves as a strategic coordination forum between PERURI and the BP BUMN as the shareholder, which is conducted to ensure alignment between the Company's business plans and strategic direction with Government policies and prevailing market dynamics. RPB serves as one of the primary instruments in the performance planning and control process, while also reflecting the Company's commitment to accountability and transparency in corporate management.

In its implementation, the Joint Deliberation Meeting comprehensively discusses the Company's Long-Term Plan (RJPP) and Annual Work Plan and Budget (RKAP), including financial projections, operational performance targets, strategic investment plans, as well as risk management and governance aspects. Through this forum, management presents the underlying assumptions, business development strategies, and various scenarios to be implemented in both the short and medium term.

Joint Deliberation Meeting in 2025

Resolutions of the 2025 Joint Deliberation Meeting and The Realization

The annual Joint Deliberation Meeting (RPB) in 2025 was not conducted through a physical meeting but rather through a written resolution of the Capital Owner. The annual RPB was established by the Head of BP BUMN, acting on behalf of the Government as the Capital Owner, through Decree No. S-383/MBU/06/2025 dated June 30, 2025, which contained the approval and ratification of the Fiscal Year 2024 Annual Report and Financial Statements, along with other strategic resolutions.

The following are the resolutions of the 2025 Joint Deliberation Meeting and their realization:

No.	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi di Tahun 2025 Realization in 2025
1	Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Pengawas dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00197/2.1133/AU.1/11/0259-2/1/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, serta tercatat pada Laporan Keuangan Perusahaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Hasil keputusan secara langsung telah direalisasikan.

No.	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi di Tahun 2025 Realization in 2025																																																																												
	Approved the 2024 Annual Report, including the Supervisory Board's Supervisory Report and the Social and Environmental Responsibility Program Implementation Report, and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2024, which were audited by the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF), as stated in its report No. 00197/2.1133/AU.1/11/0259-2/1/II/2025 dated February 17, 2025, expressing an opinion that the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024, and its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended were presented fairly, in all material respects, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and also granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Supervisory Board for their management and supervisory actions performed during the fiscal year ended December 31, 2024, insofar as such actions did not constitute criminal acts and/or violations of applicable laws and legal procedures, were recorded in the Company's Financial Statements, and were not contrary to prevailing laws and regulations. Adapun pokok-pokok Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2024, sebagai berikut: The highlights of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2024 are as follows: a. Laporan Laba Rugi Konsolidasian per 31 Desember 2024 a. Consolidated Statement of Profit or Loss as of December 31, 2024. <table><tr><td>Pendapatan Revenue</td><td>Rp</td><td>3.766.408</td><td>juta million</td></tr><tr><td>Beban Pokok Penjualan Cost of Sales</td><td>Rp</td><td>2.847.016</td><td>juta million</td></tr><tr><td>Laba Kotor Gross Profit</td><td>Rp</td><td>919.392</td><td>juta million</td></tr><tr><td>Beban Usaha Operating Expenses</td><td>Rp</td><td>741.336</td><td>juta million</td></tr><tr><td>Laba Operasi Operating Profit</td><td>Rp</td><td>178.056</td><td>juta million</td></tr><tr><td>Pendapatan Lain-Lain Other Income</td><td>Rp</td><td>115.477</td><td>juta million</td></tr><tr><td>Beban Lain-Lain Other Expenses</td><td>Rp</td><td>49.822</td><td>juta million</td></tr><tr><td>Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax</td><td>Rp</td><td>243.711</td><td>juta million</td></tr><tr><td>Pajak Penghasilan Income Tax Expense</td><td>Rp</td><td>71.921</td><td>juta million</td></tr><tr><td>Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year</td><td>Rp</td><td>171.790</td><td>juta million</td></tr></table> b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2024 b. Consolidated Statement of Financial Position as of December 31, 2024 <table><tr><td colspan="4">Aset Assets</td></tr><tr><td>Aset Lancar Current Assets</td><td>Rp</td><td>3.527.836</td><td>juta million</td></tr><tr><td>Aset Tidak Lancar Non-Current Assets</td><td>Rp</td><td>3.352.734</td><td>juta million</td></tr><tr><td>Total Aset Total Assets</td><td>Rp</td><td>6.880.570</td><td>juta million</td></tr><tr><td colspan="4">Liabilitas & Ekuitas Liabilities and Equity</td></tr><tr><td>Liabilitas Lancar Current Liabilities</td><td>Rp</td><td>1.643.274</td><td>juta million</td></tr><tr><td>Liabilitas Tidak Lancar Non-Current Liabilities</td><td>Rp</td><td>907.440</td><td>juta million</td></tr><tr><td>Ekuitas Equity</td><td>Rp</td><td>4.329.856</td><td>juta million</td></tr><tr><td>Total Liabilitas & Ekuitas Total Liabilities & Equity</td><td>Rp</td><td>6.880.570</td><td>juta million</td></tr></table>	Pendapatan Revenue	Rp	3.766.408	juta million	Beban Pokok Penjualan Cost of Sales	Rp	2.847.016	juta million	Laba Kotor Gross Profit	Rp	919.392	juta million	Beban Usaha Operating Expenses	Rp	741.336	juta million	Laba Operasi Operating Profit	Rp	178.056	juta million	Pendapatan Lain-Lain Other Income	Rp	115.477	juta million	Beban Lain-Lain Other Expenses	Rp	49.822	juta million	Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	Rp	243.711	juta million	Pajak Penghasilan Income Tax Expense	Rp	71.921	juta million	Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	Rp	171.790	juta million	Aset Assets				Aset Lancar Current Assets	Rp	3.527.836	juta million	Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	Rp	3.352.734	juta million	Total Aset Total Assets	Rp	6.880.570	juta million	Liabilitas & Ekuitas Liabilities and Equity				Liabilitas Lancar Current Liabilities	Rp	1.643.274	juta million	Liabilitas Tidak Lancar Non-Current Liabilities	Rp	907.440	juta million	Ekuitas Equity	Rp	4.329.856	juta million	Total Liabilitas & Ekuitas Total Liabilities & Equity	Rp	6.880.570	juta million	The resolution has been fully implemented.
Pendapatan Revenue	Rp	3.766.408	juta million																																																																											
Beban Pokok Penjualan Cost of Sales	Rp	2.847.016	juta million																																																																											
Laba Kotor Gross Profit	Rp	919.392	juta million																																																																											
Beban Usaha Operating Expenses	Rp	741.336	juta million																																																																											
Laba Operasi Operating Profit	Rp	178.056	juta million																																																																											
Pendapatan Lain-Lain Other Income	Rp	115.477	juta million																																																																											
Beban Lain-Lain Other Expenses	Rp	49.822	juta million																																																																											
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	Rp	243.711	juta million																																																																											
Pajak Penghasilan Income Tax Expense	Rp	71.921	juta million																																																																											
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	Rp	171.790	juta million																																																																											
Aset Assets																																																																														
Aset Lancar Current Assets	Rp	3.527.836	juta million																																																																											
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	Rp	3.352.734	juta million																																																																											
Total Aset Total Assets	Rp	6.880.570	juta million																																																																											
Liabilitas & Ekuitas Liabilities and Equity																																																																														
Liabilitas Lancar Current Liabilities	Rp	1.643.274	juta million																																																																											
Liabilitas Tidak Lancar Non-Current Liabilities	Rp	907.440	juta million																																																																											
Ekuitas Equity	Rp	4.329.856	juta million																																																																											
Total Liabilitas & Ekuitas Total Liabilities & Equity	Rp	6.880.570	juta million																																																																											



No.	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi di Tahun 2025 Realization in 2025
-----	-------------------------------	--

c. Laporan Arus Kas Konsolidasian per 31 Desember 2024
c. Consolidated Cash Flow Statement as of December 31, 2024

Kas dari Aktivitas Operasi Cash from Operating Activities	Rp	398.911	juta million
Kas dari Aktivitas Investasi Cash from Investing Activities	Rp	(217.096)	juta million
Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash from Financing Activities	Rp	(171.115)	juta million
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase in Cash and Cash Equivalents	Rp	10.700	juta million
Kas Akhir Periode Cash at the End of the Period	Rp	2.155.612	juta million

d. Investasi per 31 Desember 2024
d. Investment as of December 31, 2024

Kendaraan Vehicles	Rp	377	juta million
Alat Kantor Office equipment	Rp	14.396	juta million
Alat dan Perkakas Tools and Equipment	Rp	4.720	juta million
Mesin Pabrik Factory Machineries	Rp	265.081	juta million
Tanah dan Bangunan Land and Buildings	Rp	16.494	juta million
Aset Tak Berwujud Intangible Assets	Rp	62.195	juta million
Total Total	Rp	363.263	juta million

e. Realisasi capaian skor *Key Performance Indicators* (KPI) sebesar 106,78 dengan Peringkat Akhir (Final Rating) idAAA/Stable dan Tingkat Kesehatan "Sangat Sehat".

e. Realization of Key Performance Indicators (KPI) score achievement of 106.78 with a Final Rating of idAAA/Stable and a Health Level of "Very Healthy".

- 2 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai laporan No. PHHARP-NA/008/B/MK/2025 tanggal 17 Februari 2025 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan atas pengurusan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut di atas dan bukan merupakan tindak pidana, serta menyetujui dan mengesahkan Keuangan Perusahaan yang di dalamnya terdapat pembiayaan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dijalankan unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (CID) pada Perum Peruri untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai laporan No. 00178/2.1133/AU.2/11/0259-2/0/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

The resolution has been fully implemented.

Approved and ratified the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program for the fiscal year ended December 31, 2024, which were audited by the Public Accounting Firm (KAP) PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as stated in Report No. PHHARP-NA/008/B/MK/2025 dated February 17, 2025, and granted release and discharge to the Board of Directors and the Supervisory Board for their management actions insofar as such actions were reflected in the aforementioned report and did not constitute criminal acts, and also approved and ratified the Company's Financial Statements, which include the financing of the Social and Environmental Responsibility Program implemented by the Community Involvement and Development (CID) Unit of Perum PERURI for the fiscal year ended December 31, 2024. These financial statements were audited by the Public Accounting Firm (KAP) PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan as stated in Report No. 00178/2.1133/AU.2/11/0259-2/0/II/2025 dated February 17, 2025, which expressed an opinion that the financial statements present fairly, in all material respects, in accordance with Financial Accounting Standards (SAK).

No.	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi di Tahun 2025 Realization in 2025
3	Menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian 2024 yang dapat diatribusikan kepada Hasil keputusan Pemilik Entitas Induk sebesar Rp168.241.660.681 (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus secara langsung telah Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), direalisasikan dengan rincian sebagai berikut: a. Sebesar 9,95% dari Laba Bersih atau sebesar Rp16.740.811.007 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tujuh Rupiah) ditetapkan sebagai dividen yang dibayarkan secara tunai ke rekening yang akan ditunjuk oleh Menteri BUMN. b. Sebesar 90,05% dari Laba Bersih atau Rp151.500.849.674 (Seratus Lima Puluh Satu Miliar Lima Ratus Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) ditetapkan sebagai Laba Ditahan. Resolved to allocate the 2024 Consolidated Net Profit attributable to the Owners of the Parent Entity amounting to Rp168,241,660,681 (one hundred sixty-eight billion two hundred forty-one million six hundred sixty thousand six hundred eighty-one Rupiah), as follows: a. An amount of 9.95% of Net Profit, or Rp16,740,811,007 (sixteen billion seven hundred forty million eight hundred eleven thousand seven Rupiah), was designated as dividends to be paid in cash to the account designated by the Minister of State-Owned Enterprises. b. An amount of 90.05% of Net Profit, or Rp151,500,849,674 (one hundred fifty-one billion five hundred million eight hundred forty-nine thousand six hundred seventy-four Rupiah), was designated as retained earnings.	The resolution has been fully implemented.
4	Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Direksi dan Dewan Hasil keputusan Pengawas Perusahaan Tahun Buku 2025 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas atas secara langsung telah kinerja Tahun Buku 2024, akan ditetapkan secara tersendiri. The determination of remuneration (salary/honorarium, facilities, and allowances) for the Board of Directors and the Supervisory Board for Fiscal Year 2025, as well as tantiem for the Board of Directors and the Supervisory Board in respect of their performance for Fiscal Year 2024, shall be stipulated separately.	The resolution has been fully implemented.
5	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perusahaan untuk Tahun Buku 2025: a. Menunjuk kembali KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perusahaan untuk Tahun Buku 2025. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Pengawas Perum Peruri untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perusahaan. c. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Pengawas untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perusahaan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) for Fiscal Year 2025: a. Reappointed KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) as the external auditor to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Company's Micro and Small Business Financing Program (PUMK) for Fiscal Year 2025. b. Granted authority and power to the Supervisory Board of Perum PERURI to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for other reporting periods during Fiscal Year 2025 for the Company's purposes and interests. c. Delegated authority to the Supervisory Board to determine the audit fees, any additional scope of work deemed necessary, and other reasonable terms and conditions for the appointed Public Accounting Firm, as well as to appoint a substitute Public Accounting Firm should KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF), for any reason, be unable to complete the audit of the Company's Financial Statements, the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK), and other reports for Fiscal Year 2025, including determining the audit fees and other terms and conditions applicable to the substitute Public Accounting Firm.	The resolution has been fully implemented.



No.	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi di Tahun 2025 Realization in 2025
6	Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serta ditindaklanjuti oleh Direksi dan Dewan Pengawas, sebagai berikut: - Pendapatan dari bisnis pencetakan uang sebagai pilar utama pendapatan Perusahaan agar terus dioptimalkan, baik dari segi total nilai, margin dan kualitas produk guna menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan. - Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan bisnis digital sehingga diperoleh strategi yang tepat untuk pengembangannya guna memastikan peningkatan penetrasi pasar (layanan dan <i>market share</i>) secara lebih luas serta perolehan margin keuntungan atas kegiatan bisnis digital tersebut. - Upaya pengendalian biaya dengan merincikan biaya produksi per produk dan pendayagunaan aset non produktif agar senantiasa ditingkatkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan profitabilitas perusahaan serta mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya perusahaan. - Penyebab dan kendala dalam merealisasikan program belanja modal (investasi <i>capex</i>) pada Tahun 2024 agar di evaluasi secara menyeluruh guna menjadi <i>Lesson learned</i> di tahun berikutnya sehingga ke depan realisasi investasi/<i>capex</i> tercapai sesuai dengan target dan memberikan <i>return</i> sebagaimana diharapkan. - Terkait penugasan-penugasan yang diberikan kepada Perum Peruri: - Penugasan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 agar dipastikan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan, dan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait keberlanjutan penugasan tersebut. - Atas penugasan Perum PERURI dalam percepatan digitalisasi Program Makan Bergizi Gratis agar dipastikan dapat memberikan kemanfaatan sebesar besarnya bagi perusahaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. - Penugasan e-Meterai: - Meningkatkan koordinasi strategis dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan untuk mendorong percepatan penyusunan dan penerbitan regulasi yang mewajibkan penggunaan e-Meterai dalam transaksi digital. - Perum Peruri bersama DJP melakukan <i>review</i> terhadap skema penetapan harga per keping e-Meterai agar mencerminkan biaya riil produksi dan operasional serta memberikan kompensasi yang wajar sesuai ketentuan penugasan BUMN. - Perum Peruri diharapkan dapat mengembangkan sistem dan layanan yang lebih <i>user-friendly</i> dan terintegrasi sehingga meningkatkan <i>user experience</i> dan interoperabilitas sistem e-Meterai. - Kebijakan tata kelola efektif dan <i>parenting</i> strategi agar senantiasa dijalankan sesuai kebutuhan anak perusahaan. - Dalam rangka perbaikan kinerja pada unit bisnis dan anak perusahaan agar dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara komprehensif, terutama terhadap unit bisnis dan entitas anak yang masih mengalami kerugian untuk segera mampu mencatatkan laba bersih sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara konsolidasi. - Pengisian dan pemutakhiran data Portal Sistem Aplikasi Terpadu Badan Usaha Milik Negara, Portal HC, Portal TJSL, dan Portal Publik agar dilakukan secara akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. - Temuan, catatan dan saran/rekomendasi dari Auditor baik internal maupun eksternal agar diselesaikan dan dibahas secara komprehensif bersama Dewan Pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri BUMN. - Dalam pelaksanaan Program TJSL dan Pendanaan UMK Tahun Buku 2024, agar arahan Keasdepan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat ditindaklanjuti sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor: RIS-36/DSI.MBU.B/05/2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang Pembahasan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perum Peruri Tahun Buku 2024. - Direksi diminta untuk memperhatikan dan menindaklanjuti arahan dan saran-saran dari Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagaimana termuat dalam surat Nomor: 24/Dewan Pengawas D/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 perihal Tanggapan atas Laporan Manajemen Perum Peruri Tahun 2024 (<i>Audited</i>). - Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan Program TJSL dan Pendanaan UMK, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal, Laporan Penilaian KPI yang telah diaudit oleh KAP, Risalah Rapat Pembahasan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSL Tahun Buku 2024 dan Tanggapan Dewan Pengawas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini.	Hasil keputusan secara langsung telah direalisasikan.

No.	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi di Tahun 2025 Realization in 2025
	The following matters require attention and follow-up by the Board of Directors and the Supervisory Board: - Revenue from the banknote printing business as the main pillar of the Company's revenue should continue to be optimized in terms of total value, margin, and product quality in order to maintain the sustainability of the Company's growth. - Conduct a comprehensive evaluation of the implementation of the digital business in order to obtain the appropriate strategy for its development, thereby ensuring increased market penetration (services and market share) on a broader scale as well as improved profit margins from such digital business activities. - Efforts to control costs by detailing production costs per product and optimizing the utilization of non-productive assets should continue to be enhanced to support improvements in the Company's productivity and profitability, as well as to realize the optimal management of the Company's resources. - The causes and constraints in realizing the capital expenditure (capex) program in 2024 should be comprehensively evaluated to serve as lessons learned for subsequent years, so that future investment/capex realization can achieve the established targets and generate the expected returns. - With respect to the assignments given to Perum Peruri: - The Electronic-Based Government System (SPBE) assignment as stipulated in Presidential Regulation No. 82 of 2023 should be managed in a manner that does not result in losses to the Company, and intensive coordination should be maintained with the relevant Ministries/Agencies regarding the continuation of such assignment. - With regard to Perum PERURI's assignment in accelerating the digitalization of the Free Nutritious Meals Program, it should be ensured that the assignment provides the greatest possible benefit to the Company and is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations. - e-Meterai Assignment: - Enhance strategic coordination with the Directorate General of Taxes (DGT) and the Ministry of Finance to encourage the acceleration of the preparation and issuance of regulations mandating the use of e-Meterai in digital transactions. - Perum Peruri together with the DGT should review the pricing scheme for e-Meterai to ensure that it reflects the actual production and operational costs and provides reasonable compensation in accordance with the provisions governing SOE assignments. - Perum Peruri is expected to develop more user-friendly and integrated systems and services in order to improve user experience and the interoperability of the e-Meterai system. - Effective governance policies and parenting strategies should continue to be implemented in accordance with the needs of subsidiaries. - In order to improve the performance of business units and subsidiaries, comprehensive monitoring and evaluation should be conducted, particularly for business units and subsidiaries that are still experiencing losses, so that they may promptly achieve net profit and support the improvement of the Company's consolidated performance. - The inputting and updating of data in the State-Owned Enterprises Integrated Application System Portal, HC Portal, TJSL Portal, and Public Portal should be carried out accurately and in a timely manner in accordance with the applicable provisions. - Findings, observations, and recommendations from both internal and external auditors should be resolved and discussed comprehensively with the Supervisory Board and subsequently reported to the Minister of State-Owned Enterprises. - In the implementation of the TJSL Program and UMK Financing Program for Fiscal Year 2024, the directions of the Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility should be followed up as set forth in Minutes of Meeting No. RIS-36/DSI.MBU.B/05/2025 dated May 23, 2025 concerning the Discussion of the Financial Statements and the Implementation of the Social and Environmental Responsibility Program of Perum Peruri for Fiscal Year 2024. - The Board of Directors is requested to pay attention to and follow up on the directions and recommendations of the Supervisory Board, which constitute an integral part of this resolution, as contained in Letter No. 24/Dewan Pengawas D/III/2025 dated March 26, 2025 regarding the Response to the Management Report of Perum Peruri for 2024 (Audited). - The Financial Statements, the TJSL Program and UMK Financing Program Implementation Reports, the Performance Evaluation Report, the Compliance with Laws and Regulations and Internal Control Report, the KPI Assessment Report audited by the Public Accounting Firm, the Minutes of Meeting on the Discussion of the Financial Statements and the Implementation of the TJSL Program for Fiscal Year 2024, and the Response of the Supervisory Board constitute an integral part of this approval.	The resolution has been fully implemented.

Penggunaan Pihak Independen dalam RPB

Tidak terdapat pihak independen untuk melakukan perhitungan suara karena keputusan RPB tidak dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara, melainkan melalui persetujuan tertulis Pemilik Modal.

Use of Independent Parties in the Joint Deliberation Meeting

There were no independent parties involved in vote counting, as the resolutions of the Joint Deliberation Meeting were not adopted through a voting mechanism but rather through the written approval of the Capital Owner.



Pelaksanaan RPB Tahunan Sebelumnya (Tahun Buku 2023) dan Realisasi di 2024

Pada tahun 2024, PERURI mengadakan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) pada tanggal 28 Juni 2024 dan bertempat di Gedung Kementerian BUMN untuk tahun buku 2023 (Audited). Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam mempertahankan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemilik modal.

RPB ini menjadi platform untuk membahas secara mendalam berbagai isu strategis, kinerja operasional, serta rencana jangka panjang perusahaan. Dalam rapat tersebut, kontribusi dan masukan konstruktif dari perwakilan Kementerian BUMN sangat krusial dalam memberikan arah yang jelas bagi perkembangan PERURI.

PERURI tetap berkomitmen untuk menjalankan komunikasi yang terbuka dan efisien dengan pemangku kepentingan, khususnya pemilik modal. Perusahaan meyakini bahwa Rapat Teknis yang diadakan menjadi sarana yang efektif dalam memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sejalan dengan ekspektasi pemilik modal serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis kolaborasi.

Sebagai hasil dari diskusi tersebut, Kementerian BUMN mengeluarkan surat persetujuan dengan No. S-346/MBU/06/2024 yang berisi tentang Persetujuan Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia untuk tahun buku 2023. Berikut rincian surat yang ditandatangani oleh Menteri BUMN:

Implementation of the Previous Annual Joint Deliberation Meeting (Fiscal Year 2023) and Its Realization in 2024

In 2024, PERURI held a Joint Deliberation Meeting (RPB) on June 28, 2024, at the Ministry of State-Owned Enterprises Building to discuss the audited results for Fiscal Year 2023. This meeting reflected the Company's commitment to maintaining effective communication with the Government of the Republic of Indonesia as the Capital Owner.

The Joint Deliberation Meeting served as a platform for in-depth discussions on various strategic issues, operational performance, and the Company's long-term plans. During the meeting, the contributions and constructive input provided by representatives of the Ministry of State-Owned Enterprises were instrumental in providing clear direction for PERURI's future development.

PERURI remains committed to maintaining open and effective communication with its stakeholders, particularly the Capital Owner. The Company believes that the Joint Deliberation Meeting serves as an effective forum for ensuring that the actions taken are aligned with the Capital Owner's expectations and support collaborative decision-making.

As an outcome of the discussions, the Ministry of State-Owned Enterprises issued Approval Letter No. S-346/MBU/06/2024 concerning the Approval of the Annual Report and the Ratification of the Financial Statements of Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia for Fiscal Year 2023. The details of the letter signed by the Minister of State-Owned Enterprises are presented as follows:



No.	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi di Tahun 2025 Realization in 2025
1	Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Hasil keputusan Pengawas dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta secara langsung telah mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 yang telah direalisasikan. diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00118/2.1133/AU.1/11/0259-1/1/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang Tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, serta tercatat pada Laporan Keuangan Perusahaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pokok-pokok Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023, sebagai berikut: - Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2023: - Total Aset: Rp6.551.678.517.405 - Total Liabilitas: Rp2.355.538.558.819 - Total Ekuitas: Rp4.196.139.958.586 - Laporan Laba Rugi Konsolidasian per 31 Desember 2023: - Penjualan Bersih: Rp4.441.189.903.953 - Beban Pokok Penjualan: Rp(3.112.434.601.476) - Laba Kotor: Rp1.328.755.302.477 - Laba Sebelum Pajak Penghasilan: Rp595.478.771.029 - Laba Tahun Berjalan: Rp428.413.007.102 - Laporan Arus Kas Konsolidasian per 31 Desember 2023: - Aktivitas Operasi: Rp682.667.626.217 - Aktivitas Investasi: Rp(149.833.111.627) - Aktivitas Pendanaan: Rp241.039.101.286) - Kas/Setara Kas Naik/(Turun): Rp291.795.413.304 - Kas/Setara Kas Awal: Rp1.853.115.729.959 - Kas/Setara Kas Akhir: Rp2.144.911.143.263 - Investasi per 31 Desember 2023: - Kendaraan: Rp1.340.880.000 - Peralatan Kantor: Rp7.682.328.106 - Alat dan Perkakas/Spareparts: Rp2.265.326.367 - Mesin dan Peralatan Pabrik: Rp113.459.841.347 - Tanah dan Bangunan: Rp7.359.741.963 - Aset Tak Berwujud: Rp110.313.580.503 - Total Capex: Rp 242.421.698.286 - Realisasi capaian skor <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) sebesar 107,81 dengan Peringkat Akhir (Final Rating) idAAA/Stable dan Tingkat Kesehatan "Sangat Sehat"	





Approved the Annual Report for Fiscal Year 2023, including the Supervisory Board's The resolution has been Supervisory Report and the Social and Environmental Responsibility Program Implementation fully implemented. Report, and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023, which were audited by the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) as stated in its Report No. 00118/2.1133/AU.1/11/0259-1/1/II/2024 dated February 22, 2024, with an unqualified opinion ("fairly presented, in all material respects"). The resolution also granted full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Supervisory Board for their management and supervisory actions carried out during the fiscal year ended December 31, 2023, provided that such actions did not constitute criminal acts and/or violate applicable legal provisions and procedures, were recorded in the Company's Financial Statements, and were not contrary to prevailing laws and regulations.

The highlights of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023 are as follows:

- a. Consolidated Statement of Financial Position as of December 31, 2023:
 - a. Total Assets: Rp6,551,678,517,405
 - b. Total Liabilities: Rp2,355,538,558,819
 - c. Total Equity: Rp4,196,139,958,586
- b. Consolidated Statement of Profit or Loss as of December 31, 2023:
 - a. Net Sales: Rp4,441,189,903,953
 - b. Cost of Sales: Rp(3,112,434,601,476)
 - c. Gross Profit: Rp1,328,755,302,477
 - d. Profit Before Income Tax: Rp595,478,771,029
 - e. Profit for the Year: Rp428,413,007,102
- c. Consolidated Statement of Cash Flows as of December 31, 2023:
 - a. Operating Activities: Rp682,667,626,217
 - b. Investing Activities: Rp(149,833,111,627)
 - c. Financing Activities: Rp241,039,101,286
 - d. Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents: Rp291,795,413,304
 - e. Beginning Cash and Cash Equivalents: Rp1,853,115,729,959
 - f. Ending Cash and Cash Equivalents: Rp2,144,911,143,263
- d. Investments as of December 31, 2023:
 - a. Vehicles: Rp1,340,880,000
 - b. Office Equipment: Rp7,682,328,106
 - c. Tools and Equipment/Spare Parts: Rp2,265,326,367
 - d. Plant Machinery and Equipment: Rp113,459,841,347
 - e. Land and Buildings: Rp7,359,741,963
 - f. Intangible Assets: Rp110,313,580,503
 - g. Total Capex: Rp242,421,698,286
- e. Realized Key Performance Indicators (KPI) score of 107.81, with a Final Rating of idAAA/ Stable and a Health Level classification of "Very Healthy."

- 2 Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Hasil keputusan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari secara langsung telah Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, direalisasikan. Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sesuai dengan Laporan No.00114/2.1133/AU.2/11/0259-1/1/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Ratified the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) The resolution has been for the fiscal year ended December 31, 2023, which form part of the Social and Environmental fully implemented. Responsibility Report and which were audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) as stated in Report No. 00114/2.1133/AU.2/11/0259-1/1/II/2024 dated February 22, 2024, with an opinion that the financial statements were fairly presented, in all material respects. The resolution also granted full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Supervisory Board for their management and supervisory actions in relation to the Micro and Small Business Financing Program for Fiscal Year 2023, provided that such actions did not constitute criminal acts and were reflected in the aforementioned report.

- 3 Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Hasil keputusan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari secara langsung telah Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, direalisasikan. Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sesuai dengan Laporan No.00114/2.1133/AU.2/11/0259-1/1/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

No.	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi di Tahun 2025 Realization in 2025
	Ratified the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK) The resolution has been for the fiscal year ended December 31, 2023, which form part of the Social and Environmental Responsibility Report and were audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) as stated in Report No. 00114/2.1133/AU.2/11/0259-1/1/II/2024 dated February 22, 2024, with an opinion that the financial statements were fairly presented, in all material respects, and granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Supervisory Board for their management and supervisory actions in relation to the Micro and Small Business Financing Program for Fiscal Year 2023, provided that such actions did not constitute criminal acts and were reflected in the aforementioned report.	
4	Menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian 2023 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp424.711.103.722 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) sebagai berikut: Sebesar 5,00% dari Laba Bersih atau sebesar Rp21.235.555.186 (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah) ditetapkan sebagai dividen. Sebesar 95,00% dari Laba Bersih atau Rp403.475.548.536 (Empat Ratus Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.	Hasil keputusan telah direalisasikan.
	Resolved to allocate the 2023 Consolidated Net Profit attributable to the Owners of the Parent Entity amounting to Rp424,711,103,722 (four hundred twenty-four billion seven hundred eleven million one hundred three thousand seven hundred twenty-two Rupiah) as follows: a) An amount of 5.00% of Net Profit, or Rp21,235,555,186 (twenty-one billion two hundred thirty-five million five hundred fifty-five thousand one hundred eighty-six Rupiah), was designated as dividends. b) An amount of 95.00% of Net Profit, or Rp403,475,548,536 (four hundred three billion four hundred seventy-five million five hundred forty-eight thousand five hundred thirty-six Rupiah), was designated as retained earnings.	
5	Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Tahun Buku 2024 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas atas kinerja Tahun Buku 2023, akan ditetapkan secara tersendiri.	Hasil keputusan telah direalisasikan.
	The remuneration (salary/honorarium, facilities, and allowances) for the Board of Directors and the Supervisory Board for Fiscal Year 2024, as well as the tantiem for the Board of Directors and the Supervisory Board in respect of their performance for Fiscal Year 2023, shall be determined separately.	
6	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perusahaan untuk Tahun Buku 2024: - Menunjuk kembali KAP Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perusahaan untuk Tahun Buku 2024. - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Pengawas PERURI untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perusahaan. - Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Pengawas untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perusahaan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.	Hasil keputusan secara langsung telah direalisasikan.



No.

Hasil Keputusan
ResolutionRealisasi di Tahun 2025
Realization in 2025

Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Company's Micro and Small Business fully implemented. The resolution has been Financing Program (PUMK) for Fiscal Year 2024:

- a. Reappointed KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) as the external auditor to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Company's Micro and Small Business Financing Program (PUMK) for Fiscal Year 2024.
- b. Granted authority and power to PERURI's Supervisory Board to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for other reporting periods during Fiscal Year 2024 for the purposes and interests of the Company.
- c. Delegated authority to the Supervisory Board to determine the audit fees, any additional scope of work deemed necessary, and other reasonable terms and conditions for the appointed Public Accounting Firm, as well as to appoint a substitute Public Accounting Firm should KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF), for any reason, be unable to complete the audit of the Company's Financial Statements, the Financial Statements of the Micro and Small Business Financing Program (PUMK), and other reports for Fiscal Year 2024, including determining the audit fees and other terms and conditions applicable to such substitute Public Accounting Firm.

- 7 Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serta ditindaklanjuti oleh Direksi dan Dewan Pengawas, Hasil keputusan telah sebagai berikut: direalisasikan.

- a. Pendapatan dari bisnis pencetakan uang sebagai pilar utama pendapatan Perusahaan agar terus dioptimalkan, baik dari segi total nilai, margin dan kualitas produk guna menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan.
- b. Pengembangan bisnis digital agar dilakukan dengan dasar kajian yang komprehensif dan strategi yang matang sehingga mampu meningkatkan penetrasi pasar (layanan dan *market share*) secara lebih luas guna memastikan perolehan margin keuntungan atas kegiatan bisnis digital.
- c. Upaya pengendalian biaya dan pendayagunaan aset non produktif agar senantiasa ditingkatkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan profitabilitas Perusahaan serta mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya perusahaan.
- d. Penyebab dan kendala dalam merealisasikan program belanja modal (investasi capex) pada Tahun 2023 agar dievaluasi secara menyeluruh guna menjadi *benchmark* di tahun berikutnya sehingga kedepan realisasi investasi/capex tercapai sesuai dengan target dan memberikan *return* sebagaimana diharapkan.
- e. Dalam rangka penugasan PERURI dalam percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023, Direksi diminta untuk:
 1. Memastikan kesiapan teknis mencakup dukungan infrastruktur dasar, SDM yang dimiliki Perusahaan, kepastian pendanaan, Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh Kementerian/Lembaga yang akan bekerja sama dalam hal penugasan kepada PERURI.
 2. Memastikan adanya kejelasan atas target *output* dan *outcome* terkait penugasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta melakukan penghitungan secara cermat terkait biaya yang dikeluarkan dengan margin yang akan diterima guna memastikan penugasan tersebut tidak berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perusahaan.
 3. Memastikan bahwa seluruh pelaksanaan penugasan yang dilakukan oleh PERURI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kemanfaatan yang optimal bagi Perusahaan.
- f. Kebijakan tata kelola efektif dan *parenting strategy* agar senantiasa dijalankan sesuai kebutuhan anak perusahaan.
- g. Dalam rangka perbaikan kinerja pada unit bisnis dan anak perusahaan agar dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara komprehensif, terutama terhadap unit bisnis dan entitas anak yang masih mengalami kerugian dan/atau kinerjanya masih jauh dibawah target yang ditetapkan.
- h. Pengisian dan pemutakhiran data Portal Sistem Aplikasi Terpadu Badan Usaha Milik Negara, Portal HC, Portal TJSL, dan Portal Publik agar dilakukan secara akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Temuan, catatan dan saran/rekomendasi dari Auditor baik internal maupun eksternal agar diselesaikan dan dibahas secara komprehensif bersama Dewan Pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri BUMN.
- j. Dalam pelaksanaan Program TJSL dan Pendanaan UMK Tahun Buku 2023, agar arahan Kedepan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat ditindaklanjuti sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat No.: RIS-18/DSI.MBU.B/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Pembahasan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PERURI Tahun Buku 2023.
- k. Direksi diminta untuk memperhatikan dan menindaklanjuti arahan dan saran-saran dari Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagaimana termuat dalam surat No: 22/Dewan Pengawas-D/IV/2024 tanggal 25 April 2024 perihal Tanggapan atas Laporan Manajemen PERURI Tahun 2023 (*Audited*).
- l. Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan Program TJSL dan Pendanaan UMK, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal, Laporan Penilaian KPI yang telah diaudit oleh KAP, Risalah Rapat Pembahasan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSL Tahun Buku 2023 dan Tanggapan Dewan Pengawas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini.

No.	Hasil Keputusan Resolution	Realisasi di Tahun 2025 Realization in 2025
	The following matters require attention and follow-up by the Board of Directors and the Supervisory Board: - Revenue from the banknote printing business as the main pillar of the Company's revenue should continue to be optimized in terms of total value, margin, and product quality in order to maintain the sustainability of the Company's growth. - The development of the digital business should be carried out based on comprehensive studies and well-developed strategies to increase market penetration (services and market share) on a broader scale and ensure the achievement of profit margins from digital business activities. - Efforts to control costs and optimize the utilization of non-productive assets should continue to be enhanced to support improvements in the Company's productivity and profitability, as well as to realize the optimal management of the Company's resources. - The causes and constraints in realizing the capital expenditure (capex) program in 2023 should be comprehensively evaluated to serve as a benchmark for subsequent years, so that future investment/capex realization can achieve the established targets and generate the expected returns. - In relation to PERURI's assignment to accelerate digital transformation and the integration of national digital services as stipulated in Presidential Regulation No. 82 of 2023, the Board of Directors is requested to: - Ensure technical readiness, including the availability of basic infrastructure support, the Company's human resources, funding certainty, and Standard Operating Procedures (SOPs) across all Ministries/Agencies that will cooperate in relation to the assignment to PERURI. - Ensure clarity regarding the output and outcome targets of the Electronic-Based Government System (SPBE) assignment and carefully calculate the costs incurred and the margins to be received in order to ensure that the assignment does not adversely affect the Company's financial performance. - Ensure that all assignments carried out by PERURI are implemented in accordance with the prevailing laws and regulations and provide optimal benefits to the Company. - Effective governance policies and parenting strategy should continue to be implemented in accordance with the needs of subsidiaries. - In order to improve the performance of business units and subsidiaries, comprehensive monitoring and evaluation should be conducted, particularly for business units and subsidiary entities that are still experiencing losses and/or whose performance remains significantly below the established targets. - The inputting and updating of data in the State-Owned Enterprises Integrated Application System Portal, HC Portal, TJSL Portal, and Public Portal should be carried out accurately and in a timely manner in accordance with the applicable provisions. - Findings, observations, and suggestions/recommendations from both internal and external auditors should be resolved and discussed comprehensively with the Supervisory Board and subsequently submitted to the Minister of State-Owned Enterprises. - In the implementation of the TJSL Program and UMK Financing Program for Fiscal Year 2023, the directions of the Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility should be followed up as set forth in Minutes of Meeting No. RIS-18/DSI.MBU.B/05/2024 dated May 2, 2024 concerning the Discussion of the Financial Statements and the Implementation of PERURI's Social and Environmental Responsibility Program for Fiscal Year 2023. - The Board of Directors is requested to pay attention to and follow up on the directions and recommendations of the Supervisory Board, which constitute an integral part of this resolution, as contained in Letter No. 22/Dewan Pengawas-D/IV/2024 dated April 25, 2024 regarding the Response to PERURI's 2023 Management Report (Audited). - The Financial Statements, the TJSL Program and UMK Financing Program Implementation Reports, the Performance Evaluation Report, the Compliance with Laws and Regulations and Internal Control Report, the KPI Assessment Report audited by the Public Accounting Firm, the Minutes of Meeting concerning the Discussion of the Financial Statements and the Implementation of the TJSL Program for Fiscal Year 2023, and the Response of the Supervisory Board constitute an integral part of this approval.	The resolution has been fully implemented.



Dewan Pengawas

Supervisory Board

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perum PERURI, Dewan Pengawas merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan. Dewan Pengawas juga bertanggung jawab memastikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten di seluruh jenjang organisasi.

Pengawasan terhadap Direksi dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan telah berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Dewan Pengawas berpedoman pada *Charter* Dewan Pengawas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor: SK-11/DP/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang *Charter* Dewan Pengawas Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

Charter tersebut berfungsi sebagai landasan dan rujukan bagi Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya. Adapun substansi utama yang diatur dalam *Charter* tersebut meliputi:

1. Pembentukan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Larangan, Pemberhentian, dan Penghasilan Dewan Pengawas;
2. Tugas, Kewenangan, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas;
3. Kegiatan dan Tata Kerja Dewan Pengawas;
4. Rapat Dewan Pengawas;
5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pengawas;
6. Informasi untuk Dewan Pengawas;
7. Tata Kelola di Lingkungan Dewan Pengawas;
8. Perangkat Pendukung Dewan Pengawas.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan kinerja Direksi, memberikan arahan serta rekomendasi yang konstruktif, dan memastikan bahwa Direksi menjalankan mandatnya secara optimal demi memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah diatur dan dituangkan secara komprehensif dalam *Charter* Dewan Pengawas, sebagai berikut:

Based on Government Regulation No. 6 of 2019 concerning Perum PERURI, the Supervisory Board is a corporate organ responsible for supervising and providing advice to the Board of Directors in managing the Company. The Supervisory Board is also responsible for ensuring the consistent implementation of Good Corporate Governance principles throughout all levels of the organization.

The supervision of the Board of Directors is carried out to ensure that the management of the Company is conducted in accordance with the Articles of Association, the resolutions of the Joint Deliberation Meeting (RPB), and the prevailing laws and regulations.

Supervisory Board Charter and Rules of Procedure

In carrying out its duties and authorities, the Supervisory Board is guided by the Supervisory Board Charter as stipulated through Decree No. SK-11/DP/XII/2025 dated December 31, 2025 concerning the Supervisory Board Charter of Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

The Charter serves as the foundation and reference for the Supervisory Board in performing its duties, functions, and responsibilities. The key matters governed under the Charter include:

1. The establishment, appointment, term of office, prohibitions, dismissal, and remuneration of the Supervisory Board;
2. The duties, authorities, obligations, and responsibilities of the Supervisory Board;
3. The activities and working procedures of the Supervisory Board;
4. Supervisory Board meetings;
5. The Supervisory Board's annual work plan and budget;
6. Information for the Supervisory Board;
7. Governance within the Supervisory Board; and
8. Supporting organs of the Supervisory Board.

Duties and Responsibilities of the Supervisory Board

The Supervisory Board is responsible for carrying out the oversight function over the performance of duties and the performance of the Board of Directors, providing guidance and constructive recommendations, and ensuring that the Board of Directors carries out its mandate optimally in the interests of all stakeholders.

The duties and responsibilities of the Supervisory Board are comprehensively set out in the Supervisory Board Charter, as follows:

1. Melakukan Pengawasan terhadap kebijakan Pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya mengenai Perusahaan dan usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, termasuk Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan sesuai maksud dan tujuan Perusahaan.

Wewenang Dewan Pengawas

Dewan Pengawas, baik secara individual maupun kolegal, memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Memeriksa buku, surat, dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, serta memeriksa surat berharga dan kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
8. Membentuk komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan Pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan Pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Ketua Dewan Pengawas BUMN berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan anggota Direksi BUMN;
14. Ketua Dewan Pengawas BUMN dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi BUMN berdasarkan alasan kepentingan BUMN yang bersangkutan;
15. Dewan Pengawas berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada

1. To supervise the management policies and the overall management of the Company and its business activities carried out by the Board of Directors, including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan, Annual Work Plan and Budget, Articles of Association, Ministerial Resolutions, and/or applicable laws and regulations; and
2. To provide advice to the Board of Directors in the interests of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives.

Authorities of the Supervisory Board

The Supervisory Board, both individually and collectively, has the following authorities in carrying out its duties and responsibilities:

1. To examine books, correspondence, and other documents, inspect cash for verification purposes and other purposes, as well as examine the Company's securities and assets;
2. To enter premises, buildings, and offices used by the Company;
3. To request explanations from the Board of Directors and/or other officers regarding matters related to the management of the Company;
4. To be informed of policies and actions that have been and will be undertaken by the Board of Directors;
5. To request the Board of Directors and/or other officers under the Board of Directors, with the knowledge of the Board of Directors, to attend Supervisory Board meetings;
6. To appoint and dismiss the Secretary to the Supervisory Board at the Company's expense, if deemed necessary;
7. To temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions of this Government Regulation;
8. To establish committees other than the Audit Committee, if deemed necessary, taking into account the Company's capabilities;
9. To engage experts for specific matters and for a specified period at the Company's expense, if deemed necessary;
10. To undertake the management of the Company under certain circumstances and for a specified period in accordance with the provisions of this Government Regulation;
11. To attend meetings of the Board of Directors and provide views on matters being discussed;
12. To exercise other supervisory authorities insofar as they do not conflict with the Articles of Association, Ministerial Resolutions, and/or applicable laws and regulations;
13. The Chairman of the Supervisory Board of an SOE is authorized to approve or reject leave requests submitted by members of the Board of Directors of the SOE;
14. The Chairman of the Supervisory Board of an SOE may postpone annual leave requested by members of the Board of Directors based on considerations relating to the interests of the relevant SOE;
15. The Supervisory Board is authorized to supervise management policies and the overall management of



umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi; dan

16. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada butir (15), dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

Kewajiban Dewan Pengawas

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan Pengurusan Perusahaan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi Pengurusan Perusahaan;
5. Melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Menteri mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
8. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas yang dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
9. Menyusun indikator pencapaian kinerja Dewan Pengawas untuk dimintakan persetujuan Menteri;
10. Membentuk Komite Audit;
11. Mengusulkan auditor eksternal kepada Menteri;
12. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya serta menyampaikan aslinya kepada Direksi;
13. Memberikan laporan tentang tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru berakhir kepada Menteri;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas Pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Mematuhi Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban;
17. Dalam mengawasi Perusahaan, Dewan Pengawas melaksanakan arahan yang sewaktu-waktu dapat diberikan oleh Menteri;
18. Arahan sebagaimana dimaksud pada butir (17) sesuai dengan Anggaran Dasar, Keputusan Menteri, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Dewan Pengawas wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;

the SOE, including its business activities, and to provide advice to the Board of Directors; and

16. The supervision and provision of advice referred to in point (15) shall be carried out in the interests of the SOE and in accordance with the purposes and objectives of the SOE, and shall not be intended to serve the interests of any particular party or group.

Obligations of the Supervisory Board

1. To provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;
2. To examine, review, and sign the Company's Long-Term Plan and the Company's Annual Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors in accordance with the provisions of this Government Regulation;
3. To provide opinions and recommendations to the Minister regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Annual Work Plan and Budget;
4. To monitor developments in the Company's activities and provide opinions and recommendations to the Minister regarding any matters deemed important to the management of the Company;
5. To immediately report to the Minister any indication of a decline in the Company's performance;
6. To examine and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and to sign the annual report;
7. To provide explanations, opinions, and recommendations to the Minister regarding the annual report, if requested;
8. To prepare the annual work plan and budget of the Supervisory Board, which shall be incorporated into the Company's Annual Work Plan and Budget;
9. To prepare the Supervisory Board's performance indicators for approval by the Minister;
10. To establish an Audit Committee;
11. To propose an external auditor to the Minister;
12. To prepare minutes of Supervisory Board meetings, retain copies thereof, and submit the originals to the Board of Directors;
13. To submit a report to the Minister on the supervisory duties carried out during the most recently completed fiscal year;
14. To perform other obligations in connection with supervisory duties and the provision of advice, insofar as they do not conflict with the Articles of Association, Ministerial Resolutions, and/or applicable laws and regulations;
15. To comply with the Articles of Association, Ministerial Resolutions, and/or applicable laws and regulations;
16. To uphold the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness;
17. In supervising the Company, the Supervisory Board shall implement directives that may be issued by the Minister from time to time;
18. The directives referred to in point (17) shall be in accordance with the Articles of Association, Ministerial Resolutions, and applicable laws and regulations;
19. The Supervisory Board shall have a charter and rules of procedure that are binding on each member of the Board of Commissioners/Supervisory Board;

20. Dewan Pengawas harus memantau dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
21. Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan/atau hasil lembaga pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Dewan Pengawas harus memastikan bahwa dalam laporan tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku yang meliputi rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan;
23. Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya;
24. Dewan Pengawas wajib melakukan evaluasi tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas dewan, komite, dan setiap individu komisaris;
25. Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada butir (24) didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan; dan
26. Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada butir (24) disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada RUPS/ Menteri.

Kualifikasi dan Persyaratan Dewan Pengawas

Anggota Dewan Pengawas PERURI wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu persero atau perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
3. Berkewarganegaraan Indonesia.

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Dewan Pengawas 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN tentang pengangkatan/pemberhentian Dewan Pengawas Perum Peruri, selama tahun 2025 terdapat perubahan susunan keanggotaan Dewan Pengawas, yaitu, Sdri. Conny Lolyta

20. The Supervisory Board shall monitor and ensure that Good Corporate Governance has been implemented effectively and sustainably;
21. The Supervisory Board shall ensure that the Board of Directors has followed up on the findings of Internal Audit, External Audit, audits conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), audits conducted by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), and/or the results of other supervisory authorities in accordance with applicable laws and regulations;
22. The Supervisory Board shall ensure that the annual report contains information regarding the identity, principal occupation, positions held by members of the Board of Commissioners/Supervisory Board in other companies, including meetings held during the fiscal year, both internal meetings and joint meetings with the Board of Directors, as well as the honorarium, facilities, and/or other allowances received from the relevant SOE;
23. The Supervisory Board shall report to the SOE its share ownership and/or that of its family members in the relevant SOE and other companies, including any changes thereto;
24. The Supervisory Board shall conduct an objective annual evaluation to determine the effectiveness of the board, committees, and each individual commissioner;
25. The annual evaluation referred to in point (24) shall be based on specific, measurable, achievable, and relevant benchmarks or assessment criteria; and
26. The annual evaluation referred to in point (24) shall be submitted by the Supervisory Board to the GMS/Minister.

Qualifications and Requirements of the Supervisory Board

Members of PERURI's Supervisory Board are required to meet the following qualifications and requirements:

1. To possess integrity and dedication, understand management issues related to at least one management function, have adequate knowledge of the Company's line of business, and be able to devote sufficient time to carrying out their duties;
2. To have the legal capacity to perform legal acts and have never been declared bankrupt, nor have served as a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Supervisory Board that was found guilty of causing a limited liability company or public corporation to be declared bankrupt, and have never been convicted of a criminal offense resulting in losses to state finances; and
3. To be an Indonesian citizen.

Number and Composition of the Supervisory Board in 2025

Based on the Minister of State-Owned Enterprises' Decrees concerning the appointment and dismissal of members of the Supervisory Board of Perum Peruri, there were changes in the composition of the Supervisory Board during 2025.



Rumondor dan Sdr. Salamat Simanullang diberhentikan dengan hormat sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 181 Tahun 2026 tanggal 17 Maret 2026.

Dengan demikian, susunan Dewan Pengawas Perum Peruri Per 31 Desember 2025, susunan Dewan Pengawas PERURI sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Period
Marlison Hakim	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	SK-130/MBU/06/2024	5 tahun 5 years	10 Juni 2024-10 Juni 2029, Periode Ke-1 June 10, 2024 – June 10, 2029, 1 st Term
Sutanto	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	SK-132/MBU/06/2024	5 tahun 5 years	11 Juni 2024-11 Juni 2029, Periode Ke-2 June 11, 2024 – June 11, 2029, 2 nd Term
Djanurindro Wibowo	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	SK-220/MBU/07/2023	5 tahun 5 years	31 Juli 2023 – 31 Juli 2028, Periode Ke-1 July 31, 2023 – July 31, 2028, 1 st Term
Nanik Murwati	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	SK-220/MBU/07/2023	5 tahun 5 years	31 Juli 2023 – 31 Juli 2028, Periode Ke-1 July 31, 2023 – July 31, 2028, 1 st Term

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Pengawas

1. Pengunduran Diri
 - a. Setiap anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Menteri dan tembusan kepada anggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi.
 - b. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada butir a sudah harus diterima oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
 - c. Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada butir b menyebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat pengunduran diri diterima, tanggal efektif pengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri diterima Menteri.
 - d. Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada butir b tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, anggota Dewan Pengawas tersebut berhenti dengan sendirinya terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri diterima Menteri.

Ms. Conny Lolyta Rumondor and Mr. Salamat Simanullang were honorably discharged pursuant to the Minister of State-Owned Enterprises Decree No. 181 of 2026 dated March 17, 2026.

Accordingly, as of December 31, 2025, the composition of the Supervisory Board of Perum Peruri was as follows:

Term of Office of the Supervisory Board

Based on the provisions of Article 28 paragraph (3) of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, members of the Supervisory Board serve a term of office of 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) additional term of office.

Resignation and Dismissal Mechanism of the Supervisory Board

1. Resignation
 - a. Each member of the Supervisory Board has the right to resign from office by submitting a letter of resignation to the Minister, with copies to the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.
 - b. The resignation letter referred to in point a must be received by the Minister no later than 30 (thirty) days prior to the effective date of resignation.
 - c. If the resignation letter referred to in point b specifies an effective date that is less than 30 (thirty) days from the date the resignation letter is received, the effective date of resignation shall be calculated as 30 (thirty) days from the date the resignation letter is received by the Minister.
 - d. If the resignation letter referred to in point b does not specify an effective date of resignation, the member of the Supervisory Board shall automatically cease to hold office 30 (thirty) days from the date the resignation letter is received by the Minister.

- e. Apabila Menteri tidak memberikan keputusan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau sampai dengan tanggal efektif yang diminta, anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri berhenti dengan sendirinya pada hari ke-30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri diterima oleh Menteri.

2. Pemberhentian

- a. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada butir a dilakukan berdasarkan alasan bahwa pada kenyataannya anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - i. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - ii. Tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;
 - iv. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - v. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
 - vi. Mengundurkan diri.
- c. Selain alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada butir b, demi kepentingan dan tujuan Perusahaan, anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh Menteri.
- d. Rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir c diberitahukan kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada butir b huruf (a) sampai dengan huruf (d) dan butir c diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- f. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada butir e disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahukan sebagaimana dimaksud pada butir d.
- g. Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, ketentuan mengenai waktu sebagaimana dimaksud pada butir f dianggap telah terpenuhi.
- h. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada butir d masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

- e. If the Minister does not issue a decision within 30 (thirty) days or by the requested effective date, the resigning member of the Supervisory Board shall automatically cease to hold office on the 30th (thirtieth) day from the date the resignation letter is received by the Minister.

2. Dismissal

- a. A member of the Supervisory Board may be dismissed before the expiry of his/her term of office by a Ministerial Resolution stating the reasons therefor.
- b. The dismissal of a member of the Supervisory Board as referred to in point a may be based on the following grounds:
 - i. Failure to properly perform his/her duties;
 - ii. Failure to comply with the Articles of Association and/or applicable laws and regulations;
 - iii. Involvement in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
 - iv. Engaging in conduct that violates ethics and/or propriety that should be upheld by a member of the Supervisory Board of a State-Owned Enterprise;
 - v. Being found guilty by a final and binding court decision; and/or
 - vi. Resignation.
- c. In addition to the grounds for dismissal referred to in point b, and in the interests and for the purposes of the Company, a member of the Supervisory Board may be dismissed by the Minister on other grounds deemed appropriate by the Minister.
- d. The plan to dismiss a member of the Supervisory Board as referred to in points a and c shall be communicated to the relevant member of the Supervisory Board, either verbally or in writing, by the Minister or an appointed official.
- e. A dismissal decision based on the grounds referred to in point b items (i) through (iv), and point c, shall be made only after the relevant member has been given the opportunity to present a defense.
- f. The defense referred to in point e shall be submitted in writing to the Minister or an official appointed by the Minister within a maximum period of 14 (fourteen) days from the date the relevant member of the Supervisory Board is notified as referred to in point d.
- g. If the member of the Supervisory Board subject to dismissal has already submitted a defense or stated no objection to the proposed dismissal at the time of notification, the time requirement referred to in point f shall be deemed fulfilled.
- h. While the proposed dismissal referred to in point d is still under process, the relevant member of the Supervisory Board shall continue to perform his/her duties properly.

- i. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada butir b huruf (c) dan huruf (e) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- j. Alasan pemberhentian yang dinilai tepat oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada butir c, antara lain:
 - i. dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
 - ii. dalam rangka penataan susunan keanggotaan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; atau
 - iii. memasuki masa usia pensiun dari aparatur sipil negara, untuk anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang merupakan penerima penugasan dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain.

- i. Dismissal on the grounds referred to in point b items (iii) and (v) shall constitute dismissal without honor.
- j. Other grounds deemed appropriate by the Minister as referred to in point c include:
 - i. In connection with the restructuring of the Company;
 - ii. In connection with the reorganization of the composition of the Board of Commissioners/Supervisory Board of an SOE; or
 - iii. Reaching the mandatory retirement age for civil servants, in the case of members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of an SOE who have been assigned by a technical ministry or other government institution.

Pembagian Tugas dan Wewenang antar Anggota Dewan Pengawas

Division of Duties and Authorities among Members of the Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas	Division of Duties
Marlison Hakim	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	Pengawasan Induk Koordinator Tugas Anggota Dewan Pengawas	Parent Company Oversight Coordinator of the duties of Supervisory Board members
		Penugasan Sebagai Komite • Ketua Komite Pemantauan Risiko • Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Committee Assignments • Chairman of the Risk Monitoring Committee • Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
		Pengawasan Anak Perusahaan, Cucu dan Afiliasi • PT Peruri Properti • PT Kertas Padalarang	Oversight of Subsidiaries, Second-tier subsidiaries, and Affiliates • PT Peruri Properti • PT Kertas Padalarang
Sutanto	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Pengawasan Induk • Direktorat Currency & Security Solution • Direktorat SDM, Teknologi dan Informasi	Parent Company Oversight • Directorate of Currency & Security Solutions • Directorate of Human Resources, Technology and Information
		Penugasan Sebagai Komite Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	Committee Assignments Member of the Nomination and Remuneration Committee
		Pengawasan Anak Perusahaan, Cucu dan Afiliasi • PT Sicpa Peruri Securink • PT Kertas Padalarang	Oversight of Subsidiaries, Second-Tier Subsidiaries, and Affiliates • PT Sicpa Peruri Securink • PT Kertas Padalarang
Djanurindro Wibowo	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Pengawasan Induk • Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko • Direktorat Digital Business	Parent Company Oversight • Directorate of Finance and Risk Management • Directorate of Digital Business
		Penugasan Sebagai Komite Ketua Komite Audit	Committee Assignments Chairman of the Audit Committee
		Pengawasan Anak Perusahaan, Cucu dan Afiliasi • PT Peruri Digital Security termasuk PT CTP • PT Peruri Wira Timur	Oversight of Subsidiaries, Second-Tier Subsidiaries, and Affiliates • PT Peruri Digital Security, including PT CTP • PT Peruri Wira Timur

Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas	Division of Duties
Nanik Murwati	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	Pengawasan Induk - Direktorat Digital Business - Direktorat SDM, Teknologi dan Informasi Penugasan Sebagai Komite Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	Parent Company Oversight - Directorate of Digital Business - Directorate of Human Resources, Technology and Information Committee Assignments Member of the Nomination and Remuneration Committee
		Pengawasan Anak Perusahaan, Cucu dan Afiliasi - PT Peruri Digital Security termasuk PT CTP - PT Peruri Wira Timur	Oversight of Subsidiaries, Second-Tier Subsidiaries, and Affiliates - PT Peruri Digital Security, including PT CTP - PT Peruri Wira Timur

Independensi Dewan Pengawas

Setiap anggota Dewan Pengawas menjalankan tugasnya secara independen dan bebas dari pengaruh maupun intervensi pihak mana pun. Dalam rangka menjaga objektivitas dan integritas, masing-masing anggota Dewan Pengawas berkewajiban untuk mengungkapkan kepemilikan saham pribadi maupun keluarga, serta menandatangani pernyataan independensi yang menegaskan tidak adanya hubungan kepengurusan, kepemilikan, atau kepentingan pribadi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) yang dapat memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan.

Keputusan Direksi yang Perlu Mendapat Persetujuan Tertulis Dewan Pengawas

Sesuai dengan PP No. 6 tahun 2019, Pasal 32, hal-hal yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas, yaitu:

- Mengagunkan aktiva/ aset tetap untuk mendapatkan kredit jangka pendek;
- Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aktiva/ aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/ BTO*), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, kecuali pinjaman yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan, dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Pengawas;
- Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
- Melepaskan aktiva/aset tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/ atau
- Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Sepanjang tahun 2025, hal-hal yang wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas, yaitu:

Independence of the Supervisory Board

Each member of the Supervisory Board performs his/her duties independently and free from the influence or intervention of any party. In order to maintain objectivity and integrity, each member of the Supervisory Board is required to disclose his/her personal and family share ownership and sign a statement of independence affirming the absence of any management, ownership, or personal interests that may give rise to a conflict of interest and potentially impair his/her independence in decision-making.

Board of Directors' Decisions Requiring Written Approval from the Supervisory Board

In accordance with Article 32 of Government Regulation No. 6 of 2019, the following matters require the written approval of the Supervisory Board:

- Pledging fixed assets to obtain short-term credit facilities;
- Entering into cooperation arrangements with business entities or other parties in the form of licensing agreements, management contracts, asset leasing, Joint Operation Agreements (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO), and other cooperation arrangements with values or terms determined by the Minister;
- Obtaining or extending medium-term or long-term loans, except for loans arising from business transactions and loans provided to subsidiaries, provided that loans to subsidiaries are reported to the Supervisory Board;
- Writing off uncollectible receivables and obsolete inventories;
- Disposing of movable fixed assets with an economic useful life generally applicable in the industry of up to 5 (five) years; and/or
- Establishing the organizational structure one level below the Board of Directors.

During 2025, the following matters required the approval of the Supervisory Board:



- a. Rekomendasi Top 20% *Talent BOD-1/"Selected Talent"* PERURI 2025;
- b. Penyampaian evaluasi *Nominated Talent* PERURI 2025;
- c. Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur SDM Teknologi Informasi PERURI;
- d. Persetujuan terkait perubahan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
- e. Persetujuan Kontrak Manajemen Individual Direksi Perum PERURI Tahun 2025;
- f. Persetujuan Dokumen Rencana Darurat (*Contingency Plan*) PERURI Tahun 2025;
- g. Persetujuan Strategi Risiko pada Revisi RKAP 2025;
- h. Rekomendasi Dewan Pengawas atas Permohonan Pengagunaan Aset Tetap sebagai Persyaratan Pembiayaan Kredit Investasi Capex Tahun 2024;
- i. Rekomendasi atas Usulan Batas Kewenangan Kerja Sama Bisnis pada Level Direksi, Dewan Pengawas, dan Pemilik Modal;
- j. Persetujuan Strategi Risiko pada RKAP 2026;
- k. Aspirasi Dewan Pengawas dalam Penyusunan Rencana Kerja (RKT) SPI Tahun 2026;
- l. Rekomendasi Dewan Pengawas Terkait Pergantian Komisaris Anak Perusahaan PT Kertas Padalarang (KP);
- m. Rekomendasi Dewan Pengawas terkait pengisian Komisaris PT Kertas Padalarang;
- n. Persetujuan Laporan Pemutakhiran Kategori dan Klasifikasi Risiko PERURI *Group*;
- o. Rekomendasi Dewan Pengawas Terkait Pergantian Direktur Utama PT Cardsindo Tiga Perkasa;
- p. Persetujuan Dewan Pengawas atas Usulan Prosedur Kerja Sama Bisnis PERURI.

Keputusan, Rekomendasi, dan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas

Pelaksanaan Program Pengawasan Dewan Pengawas Tahun 2025

Untuk memenuhi penugasan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas Tahun 2025, bersama ini disampaikan realisasi atas capaian *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Pengawas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 yaitu sebesar 101,89 poin dari target Tahun 2025 sebesar 100 poin. Adapun rincian atas kinerja Dewan Pengawas dimaksud terbagi menjadi 11 (sebelas) *indicator* dalam 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

1. Aspek Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal dengan capaian 25% dari target 25%
2. Aspek Dewan Pengawas dengan Direksi dengan capaian 50% dari target 50%.
3. Aspek Internal Dewan Pengawas dengan capaian 25% dari target 25%.

Dalam rangka memenuhi tugas pengawasan, Dewan Pengawas PERURI secara konsisten menjaga koordinasi dan komunikasi baik dengan Direksi agar pengawasan dan pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif.

- a. Recommendation of the Top 20% BOD-1 Talent/"Selected Talent" of PERURI for 2025;
- b. Submission of the evaluation of PERURI's Nominated Talent for 2025;
- c. Appointment of the Acting Director of Human Resources and Information Technology of PERURI;
- d. Approval of changes to the organizational structure one level below the Board of Directors;
- e. Approval of the Individual Management Contracts of the Board of Directors of Perum PERURI for 2025;
- f. Approval of PERURI's 2025 Contingency Plan Document;
- g. Approval of the Risk Strategy in the Revised 2025 RKAP;
- h. Recommendation of the Supervisory Board regarding the pledge of fixed assets as a requirement for financing the 2024 capex investment credit facility;
- i. Recommendation on the proposed authority limits for business cooperation at the level of the Board of Directors, Supervisory Board, and Capital Owner;
- j. Approval of the Risk Strategy in the 2026 RKAP;
- k. Supervisory Board input in the preparation of the 2026 Internal Audit Unit (SPI) Work Plan (RKT);
- l. Recommendation of the Supervisory Board regarding the replacement of a Commissioner of PT Kertas Padalarang (KP);
- m. Recommendation of the Supervisory Board regarding the appointment of a Commissioner of PT Kertas Padalarang;
- n. Approval of the PERURI Group Risk Category and Classification Update Report;
- o. Recommendation of the Supervisory Board regarding the replacement of the President Director of PT Cardsindo Tiga Perkasa; and
- p. Approval by the Supervisory Board of the proposed PERURI Business Cooperation Procedure.

Resolutions, Recommendations, and Implementation of Duties of the Supervisory Board

Implementation of the Supervisory Board's Oversight Program in 2025

In fulfilling its assignments in accordance with the 2025 Work Plan and Budget of the Supervisory Board, the realization of the Supervisory Board's Key Performance Indicators (KPI) achievement up to the fourth quarter of 2025 reached 101.89 points against the 2025 target of 100 points. The Supervisory Board's performance was measured through 11 (eleven) indicators across 3 (three) aspects, as follows:

1. Supervisory Board and Capital Owner Aspect, achieving 25% against a target of 25%;
2. Supervisory Board and Board of Directors Aspect, achieving 50% against a target of 50%; and
3. Internal Supervisory Board Aspect, achieving 25% against a target of 25%.

In carrying out its oversight duties, PERURI's Supervisory Board consistently maintained coordination and communication with the Board of Directors to ensure that oversight and corporate management were conducted

Selanjutnya, Dewas juga aktif memberi saran dan nasihat, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan *Good Corporate Governance* (GCG) berjalan dengan baik. Pengawasan dilakukan secara konstruktif dan kolaboratif, yang ditunjukkan dengan total 24 (dua puluh empat) rapat baik internal maupun gabungan agar target perusahaan sesuai dengan RJPP dan RKAP dapat tercapai. Lebih lanjut, Dewan Pengawas mendukung penuh prospek usaha PERURI yang selaras dengan visi dan misi perusahaan, termasuk percepatan transformasi bisnis digital dan optimalisasi produk baru di tahun 2025 demi pertumbuhan kinerja.

Kegiatan Dewan Pengawas dan Komite Dewan Pengawas pada Tahun 2025

1. Kunjungan Kerja Lapangan

Selama tahun 2025 Dewan Pengawas melakukan kegiatan pengawasan melalui kunjungan kerja lapangan yang disertai dengan pemberian nasihat kepada Direksi, sebagai berikut:

- Kunjungan ke PT Kertas Padalarang pada tanggal 15 Januari 2025 oleh Bapak Marlison Hakim;
- Kunjungan ke Karawang (*High Security Solution* - Produk Non Uang) pada tanggal 16 Januari 2025 oleh Bapak Marlison Hakim;
- Kunjungan Kerja Anggota Dewan Pengawas ke Pabrik PERURI di Karawang pada tanggal 5 Maret 2025 oleh Ibu Conny Lolyta Rumondor;
- Kunjungan ke PT Peruri Wira Timur (PWT) pada tanggal 16-17 Juni 2025 oleh Bapak Marlison Hakim dan Bapak Sutanto; dan
- Kunjungan ke PT Peruri Properti pada tanggal 30 Juli 2025 oleh Bapak Marlison Hakim dan Bapak Salamat Simanullang.

2. Kunjungan Kerja Luar Negeri

Selama tahun 2025, pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja luar negeri dilakukan dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat terkait proyek uang kertas dengan mengunjungi beberapa perusahaan, yaitu:

- Landqard, Voith, dan Louisenthal pada tanggal 4-10 Februari 2025 oleh Bapak Marlison Hakim dan Bapak Sutanto;
- KBA, SICPA, dan IDEMIA pada tanggal 7-15 Juni 2025 oleh Bapak Djanurindro Wibowo dan Ibu Conny Lolyta Rumondor; dan
- De La Rue, London pada tanggal 11-18 Agustus 2025 oleh Bapak Sutanto dan Bapak Salamat Simanullang.

Saran dan Nasihat kepada Direksi

1. Finansial

Dewan Pengawas mendorong Manajemen agar fokus perbaikan perlu diarahkan pada stabilitas ketersediaan bahan baku dan bahan pembantu, optimalisasi kapasitas mesin, menjaga kualitas produksi, memperoleh kembali kontrak paspor RI dan diversifikasi sumber pendapatan, efisiensi biaya, dan penguatan kinerja Anak Perusahaan, dengan nasihat/rekomendasi di antaranya sebagai berikut:

effectively. The Supervisory Board also actively provided recommendations and advice and ensured compliance with applicable regulations and Good Corporate Governance (GCG) principles. Oversight activities were conducted in a constructive and collaborative manner, as reflected in a total of 24 (twenty-four) meetings, both internal and joint meetings, to support the achievement of the Company's targets as set out in the RJPP and RKAP. Furthermore, the Supervisory Board fully supported PERURI's business prospects in line with the Company's vision and mission, including the acceleration of digital business transformation and the optimization of new products in 2025 to drive performance growth.

Activities of the Supervisory Board and Supervisory Board Committees in 2025

1. Site Visits

During 2025, the Supervisory Board conducted oversight activities through site visits, accompanied by the provision of advice to the Board of Directors, as follows:

- Visit to PT Kertas Padalarang on January 15, 2025, by Mr. Marlison Hakim;
- Visit to Karawang (*High Security Solution* – Non-Currency Products) on January 16, 2025, by Mr. Marlison Hakim;
- Site Visit by a Member of the Supervisory Board to the PERURI Plant in Karawang on March 5, 2025, by Ms. Conny Lolyta Rumondor;
- Visit to PT Peruri Wira Timur (PWT) on June 16–17, 2025, by Mr. Marlison Hakim and Mr. Sutanto; and
- Visit to PT Peruri Properti on July 30, 2025, by Mr. Marlison Hakim and Mr. Salamat Simanullang.

2. Overseas Business Visits

During 2025, overseas business visits were conducted as part of the Supervisory Board's oversight and advisory functions in relation to the banknote project through visits to several companies, as follows:

- Visits to Landqard, Voith, and Louisenthal on February 4–10, 2025, by Mr. Marlison Hakim and Mr. Sutanto;
- Visits to KBA, SICPA, and IDEMIA on June 7–15, 2025, by Mr. Djanurindro Wibowo and Ms. Conny Lolyta Rumondor; and
- Visit to De La Rue, London, on August 11–18, 2025, by Mr. Sutanto and Mr. Salamat Simanullang.

Advice and Recommendations to the Board of Directors

1. Financial

The Supervisory Board encouraged Management to focus improvement efforts on the stability of the availability of raw and auxiliary materials, optimization of machine capacity, maintenance of production quality, regaining the Republic of Indonesia passport contract, diversification of revenue sources, cost efficiency, and strengthening the performance of Subsidiaries. The advice/recommendations included the following:



- a. Manajemen agar tetap memberikan perhatian penuh terhadap bisnis utama PERURI yaitu percetakan uang yang memberikan kontribusi dan margin yang signifikan terhadap penjualan dan laba bersih PERURI, antara lain dengan memastikan penyerahan produk sesuai dengan kesepakatan dengan pemberi kerja, menjaga kualitas dari produk uang.
- b. Manajemen agar melakukan langkah-langkah yang aktif dan intensif untuk mendapatkan kembali order paspor dalam negeri dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan agar target pencapaian produk paspor di tahun 2026 dapat tercapai.
- c. Manajemen perlu memastikan bahwa pertumbuhan kinerja tidak bergantung pada faktor *non-recurring* melainkan ditopang oleh penguatan *recurring income* khususnya bisnis digital, optimalisasi layanan SPBE (Govtech), diversifikasi sumber pendapatan.
- d. Guna menghindari fluktuasi kinerja keuangan karena ketergantungan pada proyek tertentu, diperlukan strategi portofolio bisnis yang lebih seimbang dengan penguatan lini bisnis jangka menengah dan panjang, serta pengelolaan kontrak yang lebih terstruktur dan terukur.
- e. Dewan Pengawas juga menekankan agar manajemen dapat melakukan efisiensi biaya secara berkesinambungan agar dapat meningkatkan margin/kinerja perusahaan.
- f. Perlunya penguatan pada perspektif *learning growth* serta *internal business process* dalam rangka menjaga *sustainability* usaha.

2. Bisnis

- a. Direksi agar melakukan penghitungan dan simulasi kemampuan PERURI dalam memproduksi uang kertas pada tahun 2026 secara tepat dan akurat guna memastikan kapasitas produksi uang kertas PERURI Tahun 2026. Apabila dari hasil penghitungan dan simulasi tersebut ternyata PERURI tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi target produksi uang kertas sesuai kontrak dengan BI, maka PERURI agar mempertimbangkan untuk melakukan addendum kontrak dengan BI.
- b. Direksi agar melakukan langkah-langkah strategis dan kongkrit untuk dapat mempertahankan permintaan pesanan dari Kementerian atau lembaga terkait melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas, kualitas serta efisiensi.
- c. Khusus untuk bisnis Digital, Direksi agar melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan untuk menyusun kajian secara komprehensif terkait dengan keberlangsungan bisnis digital PERURI agar tidak membebani dan menggerus laba dari segmen lainnya.
- d. Direksi agar memastikan inisiatif strategis yang telah dituangkan di dalam RKAP 2026 tersebut telah didukung dengan kajian yang komprehensif dari berbagai aspek termasuk aspek Risiko yang relevan dan berpengaruh terhadap kinerja PERURI dalam mencapai target komitmen dalam RKAP dan RJPP.

- a. Management should continue to give full attention to PERURI's core business, namely banknote printing, which contributes significantly to PERURI's sales and net profit margins, including by ensuring product delivery in accordance with agreements with customers and maintaining the quality of banknote products.
- b. Management should undertake active and intensive measures to regain domestic passport orders from the Ministry of Immigration and Corrections so that the passport product target for 2026 can be achieved.
- c. Management should ensure that performance growth is not dependent on non-recurring factors but is supported by strengthening recurring income, particularly from the digital business, optimizing SPBE (GovTech) services, and diversifying revenue sources.
- d. To avoid fluctuations in financial performance due to dependence on certain projects, a more balanced business portfolio strategy is required through strengthening medium- and long-term business lines, as well as implementing more structured and measurable contract management.
- e. The Supervisory Board also emphasized the need for Management to continuously implement cost-efficiency measures in order to improve the Company's margins and performance.
- f. It is necessary to strengthen the learning and growth perspective as well as internal business processes in order to maintain business sustainability.

2. Business

- a. The Board of Directors should conduct accurate calculations and simulations of PERURI's banknote production capability in 2026 to ensure the Company's banknote production capacity for 2026. If the results of such calculations and simulations indicate that PERURI does not have sufficient capacity to meet the banknote production target stipulated in its contract with BI, PERURI should consider entering into a contract addendum with BI.
- b. The Board of Directors is requested to take strategic and concrete steps to maintain order demand from relevant ministries or agencies by improving capacity, capabilities, quality, and efficiency.
- c. With regard to the Digital Business segment, the Board of Directors should conduct a comprehensive evaluation as a basis for preparing a comprehensive study on the sustainability of PERURI's digital business, so that it does not become a burden on or erode profits generated by other business segments.
- d. The Board of Directors should ensure that the strategic initiatives incorporated into the 2026 RKAP are supported by comprehensive studies from various perspectives, including risk aspects that are relevant to and may affect PERURI's ability to achieve the targets and commitments set forth in the RKAP and RJPP.

- e. Direksi agar melengkapi inisiatif strategis tersebut dengan timeline dan PIC yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya agar dapat dilakukan *monitoring* atas setiap tahapan pelaksanaannya.

3. Manajemen Risiko

- a. Pengelolaan risiko *corporate* Tahun 2026
Dewan Pengawas menekankan bahwa penilaian risiko harus selaras dengan kondisi risiko riil (*residual risk*) serta mitigasi risiko yang bersifat preventif dan terukur untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan RKAP 2026.
- b. Penugasan dari Kementerian/Lembaga
Terhadap pelaksanaan penugasan dari Kementerian/Lembaga, pelaksanaan manajemen risiko agar dilakukan secara cermat dan akurat dengan mempertimbangkan aspek legal, aspek waktu, aspek teknologi, aspek finansial, dan aspek SOM.
- c. Tata Kelola Terintegrasi
Terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, seluruh aspek pelaksanaan sudah semakin terpenuhi meliputi infrastruktur, fungsi, dan dokumen, serta identifikasi risiko pada anak perusahaan. Selanjutnya Dewan Pengawas berharap agar Manajemen memperkuat SPI dalam mengawal efektifitas pengendalian internal, serta perubahan/penyesuaian STO dan transformasi bisnis tidak menimbulkan *gap* fungsi strategis yang dapat berdampak pada operasional Perusahaan.

4. Internal Control

Penguatan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi audit dapat dilakukan dengan mengadopsi *system tracking* terpusat dan mengintegrasikan penyelesaian tindaklanjut tersebut dengan penilaian kinerja unit kerja dan/atau individu.

5. Penyusunan RKAP Tahun 2026

Penyusunan RKAP agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. PERURI perlu lebih mengedepankan aspek efisiensi dalam pengelolaan biaya. Mencermati pengeluaran biaya tidak hanya dari sisi besaran biaya, tetapi juga dari aspek kebutuhan dan rasionalitasnya.
- b. Manajemen agar melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap *Capex* Tahun 2025 yang tidak terealisasi sehingga digeser ke tahun 2026, serta memastikan proyeksi *Capex* Tahun 2026 dapat tercapai sesuai dengan *timeline-nya*, sehingga Rencana Investasi Tahun 2026 agar sejalan dengan transformasi bisnis Perum PERURI, serta menunjang *core business* PERURI sehingga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan pendapatan.
- c. Rencana strategis Anak Perusahaan agar sejalan dalam mendukung rencana strategis PERURI. Selain itu, peningkatan kompetensi dan peluang bisnis Anak Perusahaan agar mampu memberikan nilai tambah terhadap kinerja konsolidasian PERURI, serta perlunya penguatan pengawasan secara terintegrasi.

- e. The Board of Directors should complement these strategic initiatives with implementation timelines and designated persons in charge (PICs) to facilitate monitoring of each stage of implementation.

3. Risk Management

- a. Corporate Risk Management in 2026
The Supervisory Board emphasized that risk assessments should be aligned with actual risk conditions (residual risk) and supported by preventive and measurable risk mitigation measures, which should receive due attention in the implementation of the 2026 RKAP.
- b. Ministries/Agencies Assignment
In relation to the implementation of Ministries/Agencies assignment, risk management should be carried out carefully and accurately, taking into account legal, timing, technological, financial, and human resource aspects.
- c. Integrated Governance
With respect to the implementation of Integrated Governance, all implementation aspects have increasingly been fulfilled, including infrastructure, functions, documentation, and risk identification at subsidiaries. The Supervisory Board further expects Management to strengthen the Internal Audit Unit (SPI) in safeguarding the effectiveness of internal controls and to ensure that changes/adjustments to the Organizational Structure and Work Procedures (STO) and business transformation initiatives do not create gaps in strategic functions that could adversely affect the Company's operations.

4. Internal Control

Monitoring of the implementation of audit recommendations can be strengthened by adopting a centralized tracking system and integrating the completion of follow-up actions into the performance evaluation of work units and/or individuals.

5. Preparation of the 2026 RKAP

The preparation of the 2026 RKAP should take into account the following matters:

- a. PERURI should place greater emphasis on efficiency in cost management. Cost expenditures should be assessed not only from the perspective of their amount but also in terms of necessity and reasonableness.
- b. Management should monitor and evaluate the 2025 capex projects that were not realized and have been carried forward to 2026, and ensure that the projected 2026 capex can be realized in accordance with the established timeline. The 2026 Investment Plan should be aligned with the business transformation of Perum PERURI and support PERURI's core business so that it contributes significantly to revenue growth.
- c. The strategic plans of Subsidiaries should be aligned with and support PERURI's strategic plans. In addition, enhancing the competencies and business opportunities of Subsidiaries is expected to create added value for PERURI's consolidated performance, while integrated oversight should continue to be strengthened.



Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas

Kebijakan

Kebijakan pelatihan dan peningkatan kompetensi Dewan Pengawas diatur dalam *Charter* Dewan Pengawas sebagai pedoman dalam memastikan bahwa setiap anggota Dewan Pengawas senantiasa memiliki kapasitas, wawasan, dan pemahaman yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Kebijakan ini menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi yang berkelanjutan agar Dewan Pengawas mampu merespons dinamika bisnis, perkembangan regulasi, serta kompleksitas risiko yang dihadapi Perusahaan.

Adapun ketentuan terkait pelatihan dan peningkatan kompetensi Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- Setiap tahun masing-masing anggota Dewan Pengawas wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau audit.
- Mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam butir a paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan dalam satu tahun.
- Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan milik atau dikendalikan oleh BUMN

Seluruh Dewan Pengawas pada tahun 2025 telah mengikuti kegiatan sebagai berikut:

Training and Competency Development of the Supervisory Board

Policy

The policy on training and competency development for the Supervisory Board is stipulated in the Supervisory Board Charter as a guideline to ensure that each member of the Supervisory Board consistently possesses the capacity, insight, and adequate understanding required to effectively perform the oversight function. This policy emphasizes the importance of continuous competency development so that the Supervisory Board is able to respond to business dynamics, regulatory developments, and the complexity of risks faced by the Company.

The provisions regarding training and competency development of the Supervisory Board are as follows:

- Each member of the Supervisory Board is required to attend at least one training program each year on topics related to risk management, fraud, business, corporate business activities, law, compliance, finance, accounting, and/or audit.
- Participation in the training referred to in point a must amount to at least 20 (twenty) training hours in a year.
- The training attended must constitute Continuing Professional Education (PPL) organized by professional institutions, regulators, training institutions accredited by an accreditation body, and/or training institutions owned by or controlled by State-Owned Enterprises (SOEs).

All members of the Supervisory Board has participated in the following activities during 2025:

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Tahun 2025 Training and Competency Development of the Supervisory Board in 2025

No.	Nama Pejabat dan Jabatan Name and Position	Nama Training Training Program	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
1	Marlison Hakim (Ketua Dewan Pengawas) (Chairman of the Supervisory Board)	<i>Onboarding Commissioner</i>	26–27 Februari 2025 February 26–27, 2025	BSE Leadership School
		Instruktur L6 L6 Instructor	4–5 Maret 2025 March 4–5, 2025	PT Agira Brilian Inovasi
		Strategi Keefektifan Penilaian <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) dan Penyusunan Roadmap Perbaikan Rekomendasi Temuan Penilaian Strategy for Effective Risk Maturity Index (RMI) Assessment and Preparation of a Roadmap for the Improvement of Assessment Findings Recommendations	12 Maret 2025 March 12, 2025	BPKP
		Pelatihan Program Pemeliharaan Uang Tunai Cash Handling Program Training	8–9 Mei 2025 May 8–9, 2025	BRIEF Indonesia

No.	Nama Pejabat dan Jabatan Name and Position	Nama Training Training Program	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
2	Sutanto (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Supervisory Board)	Strategi Keefektifan Penilaian <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) dan Penyusunan Roadmap Perbaikan Rekomendasi Temuan Penilaian Strategy for Effective Risk Maturity Index (RMI) Assessment and Preparation of a Roadmap for the Improvement of Assessment Findings Recommendations	12 Maret 2025 March 12, 2025	BPKP
		Webinar Agentic AI in Finance: A New Era of Autonomous Decision Making	3 Juli 2025 July 3, 2025	OJK Institute
		Mewujudkan Hari Tua yang Sejahtera: Strategi Peningkatan Kepesertaan Dana Pensiun di Sektor Informal Achieving a Prosperous Retirement: Strategies to Increase Pension Fund Participation in the Informal Sector	21 Agustus 2025 August 21, 2025	OJK Institute
		<i>The Sustainable Financing Opportunities in the Indonesian Insurance Industry</i>	2 Oktober 2025 October 2, 2025	OJK Institute
		<i>Risk Appetite and Risk Culture: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan</i> Risk Appetite and Risk Culture: Key Pillars in Strengthening Risk Management in the Financial Sector	9 Oktober 2025 October 9, 2025	OJK Institute
		OJK Mengajar: Menumbuhkan Generasi Melek Finansial Memahami Dinamika Ekonomi dan Stabilitas Keuangan sebagai Pilar Perekonomian Nasional OJK Teaching Program: <i>Fostering a Financially Literate Generation through Understanding Economic Dynamics and Financial Stability as Pillars of the National Economy</i>	11 November 2025 November 11, 2025	OJK Institute
		<i>A Complete Course for CGI, ICSAN, ACCA, ICA, MBA Students, A Guide to Company Secretaries, Board Members and Directors</i>	18 Desember 2025 December 18, 2025	Prof. Jhon Martey FCG (Udemy)
		<i>Focus Group Discussion "Urgensi Reformasi POLRI dalam Mewujudkan POLRI yang Profesional"</i> Focus Group Discussion: <i>The Urgency of Police Reform in Realizing a Professional Indonesian National Police</i>	19 Oktober 2025 October 19, 2025	Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Doctoral Program in Legal Studies, Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
		<i>Focus Group Discussion "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia"</i> Focus Group Discussion: <i>Resolution of Land Ownership Disputes Based on Indonesian Laws and Regulations</i>	17 November 2025 November 17, 2025	Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Doctoral Program in Legal Studies, Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
		<i>Focus Group Discussion "Catatan Kritis Menyongsong Berlakunya KUHP dan KUHP Baru"</i> Focus Group Discussion: <i>Critical Notes on the Implementation of the New Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHP)</i>	17 Desember 2025 December 17, 2025	Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Doctoral Program in Legal Studies, Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



No.	Nama Pejabat dan Jabatan Name and Position	Nama Training Training Program	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
3	Salamat Simanullang (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Supervisory Board)	Strategi Keefektifan Penilaian <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) dan Penyusunan <i>Roadmap</i> Perbaikan Rekomendasi Temuan Penilaian Strategy for Effective Risk Maturity Index (RMI) Assessment and Preparation of a Roadmap for the Improvement of Assessment Findings Recommendations	12 Maret 2025 March 12, 2025	BPKP
4	Djanurindro Wibowo (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Supervisory Board)	Strategi Keefektifan Penilaian <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) dan Penyusunan <i>Roadmap</i> Perbaikan Rekomendasi Temuan Penilaian Strategy for Effective Risk Maturity Index (RMI) Assessment and Preparation of a Roadmap for the Improvement of Assessment Findings Recommendations	12 Maret 2025 March 12, 2025	BPKP
		<i>Webinar "Mid-Year Capital Market Review 2025: Evaluasi Kinerja Pasar dan Strategi Investasi ke Depan"</i> Webinar: Mid-Year Capital Market Review 2025: Market Performance Evaluation and Forward-Looking Investment Strategies	7 Agustus 2025 August 7, 2025	OJK Institute
		<i>Digital Resilience Summit</i>	10 September 2025 September 10, 2025	PERURI Digital
		<i>The Sustainable Financing Opportunities in the Indonesian Insurance Industry</i>	2 Oktober 2025 October 2, 2025	OJK Institute
		<i>Risk Appetite and Risk Culture: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan</i> Risk Appetite and Risk Culture: Key Pillars in Strengthening Risk Management in the Financial Sector	9 Oktober 2025 October 9, 2025	OJK Institute
		Peran Digital Forensik dalam Penanganan dan Pengungkapan Kejahatan Keuangan The Role of Digital Forensics in the Handling and Investigation of Financial Crimes	13 Oktober 2025 October 13, 2025	OJK Institute
		OJK Mengajar: Menumbuhkan Generasi Melek Finansial Memahami Dinamika Ekonomi dan Stabilitas Keuangan sebagai Pilar Perekonomian Nasional OJK Teaching Program: Fostering a Financially Literate Generation through Understanding Economic Dynamics and Financial Stability as Pillars of the National Economy	11 November 2025 November 11, 2025	OJK Institute
		<i>A Complete Course for CGI, ICSAN, ACCA, ICA, MBA Students, A Guide to Company Secretaries, Board Members and Directors</i>	18 Desember 2025 December 18, 2025	Prof. Jhon Martey FCG (Udemy)

No.	Nama Pejabat dan Jabatan Name and Position	Nama Training Training Program	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
5	Nanik Murwati (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Supervisory Board)	Strategi Keefektifan Penilaian Risk Maturity Index (RMI) dan Penyusunan Roadmap Perbaikan Rekomendasi Temuan Penilaian Strategy for Effective Risk Maturity Index (RMI) Assessment and Preparation of a Roadmap for the Improvement of Assessment Findings Recommendations	12 Maret 2025 March 12, 2025	BPKP
		Webinar Agentik AI in Finance: A New Era of Autonomous Decision Making	3 Juli 2025 July 3, 2025	OJK Institute
		Webinar "Mid-Year Capital Market Review 2025: Evaluasi Kinerja Pasar dan Strategi Investasi ke Depan" Webinar: Mid-Year Capital Market Review 2025: Market Performance Evaluation and Forward-Looking Investment Strategies	7 Agustus 2025 August 7, 2025	OJK Institute
		Mewujudkan Hari Tua yang Sejahtera: Strategi Peningkatan Kepesertaan Dana Pensiun di Sektor Informal Achieving a Prosperous Retirement: Strategies to Increase Pension Fund Participation in the Informal Sector	21 Agustus 2025 August 21, 2025	OJK Institute
		<i>The Sustainable Financing Opportunities in the Indonesian Insurance Industry</i>	2 Oktober 2025 October 2, 2025	OJK Institute
		<i>Risk Appetite and Risk Culture: Pilar Utama dalam Penguatan Manajemen Risiko di Sektor Keuangan</i> Risk Appetite and Risk Culture: Key Pillars in Strengthening Risk Management in the Financial Sector	9 Oktober 2025 October 9, 2025	OJK Institute
		Peran Digital Forensik dalam Penanganan dan Pengungkapan Kejahatan Keuangan The Role of Digital Forensics in the Handling and Investigation of Financial Crimes	13 Oktober 2025 October 13, 2025	OJK Institute
		OJK Mengajar: Menumbuhkan Generasi Melek Finansial Memahami Dinamika Ekonomi dan Stabilitas Keuangan sebagai Pilar Perekonomian Nasional OJK Teaching Program: Fostering a Financially Literate Generation through Understanding Economic Dynamics and Financial Stability as Pillars of the National Economy	11 November 2025 November 11, 2025	OJK Institute
6	Conny Lolyta Rumondor (Anggota Dewan Pengawas) (Member of the Supervisory Board)	A Complete Course for CGI, ICSAN, ACCA, ICA, MBA Students, A Guide to Company Secretaries, Board Members and Directors	18 Desember 2025 December 18, 2025	Prof. Jhon Martey FCG (Udemy)
		Strategi Keefektifan Penilaian Risk Maturity Index (RMI) dan Penyusunan Roadmap Perbaikan Rekomendasi Temuan Penilaian Strategy for Effective Risk Maturity Index (RMI) Assessment and Preparation of a Roadmap for the Improvement of Assessment Findings Recommendations	12 Maret 2025 March 12, 2025	BPKP

Program Pengenalan Perusahaan bagi Dewan Pengawas Baru

Kebijakan

Kebijakan program pengenalan bagi anggota Dewan Pengawas yang baru pertama kali diangkat diatur dalam *Charter* Dewan Pengawas PERURI. Program ini bertujuan memastikan anggota Dewan Pengawas yang baru diangkat memiliki pemahaman memadai mengenai profil, kegiatan

Orientation Program for Newly Appointed Members of the Supervisory Board

Policy

The orientation program policy for members of the Supervisory Board who are appointed for the first time is stipulated in PERURI's Supervisory Board Charter. The program is intended to ensure that newly appointed members of the Supervisory Board have an adequate understanding



usaha, struktur organisasi, arah strategis, kerangka tata kelola, serta tugas dan tanggung jawab pengawasan Perusahaan. Program diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengangkatan, dengan tanggung jawab penyelenggaraan berada pada Sekretaris Perusahaan atau pihak yang menjalankan fungsinya. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Materi Program Pengenalan

Materi program pengenalan mencakup, antara lain:

1. Gambaran umum Perusahaan: tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan; kinerja keuangan dan operasi; organisasi dan pengembangannya; strategi; rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang; posisi kompetitif; serta risiko dan isu strategis lainnya;
2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh Perusahaan;
3. Tanggung jawab hukum anggota Dewan Pengawas;
4. Kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem pengendalian intern, serta tugas dan peran Komite Audit dan komite lainnya;
5. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
6. Hak dan kewajiban Dewan Pengawas.

Bentuk dan Penyelenggaraan

Materi Program Pengenalan tidak terbatas pada hal yang disebutkan di atas. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan formal maupun informal, kunjungan ke fasilitas Perusahaan, serta agenda lain sesuai kebutuhan dan karakteristik jabatan. Penyelenggaraan dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan dapat dibantu oleh pejabat terkait. Sekretaris Dewan Pengawas berkoordinasi dengan Sekretaris Perusahaan untuk menetapkan jadwal dan tempat, serta menyiapkan notulen, termasuk catatan tingkat kehadiran dan keaktifan anggota Dewan Pengawas.

Realisasi Tahun Buku 2025

Sepanjang tahun buku 2025 terdapat perubahan komposisi Dewan Pengawas berupa berakhirnya masa jabatan 2 (dua) anggota, yaitu Conny Lolyta Rumondor pada 27 Agustus 2025 dan Salamat Simanullang pada 23 September 2025. Namun, sepanjang tahun buku 2025 tidak terdapat pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang baru. Mengingat program pengenalan Perusahaan ditujukan bagi anggota yang baru pertama kali diangkat, maka pada tahun buku 2025 PERURI tidak menyelenggarakan program pengenalan Perusahaan bagi Dewan Pengawas baru.

of the Company's profile, business activities, organizational structure, strategic direction, governance framework, as well as the Company's oversight duties and responsibilities. The program must be provided no later than 1 (one) month from the date of appointment, with responsibility for its implementation assigned to the Corporate Secretary or the party performing such function. This policy is in line with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Orientation Program Materials

The orientation program materials include, among others:

1. A general overview of the Company, including its objectives, nature and scope of activities; financial and operational performance; organizational structure and development; strategy; short-term and long-term business plans; competitive position; and other strategic risks and issues;
2. The implementation of Good Corporate Governance within the Company;
3. The legal responsibilities of members of the Supervisory Board;
4. Delegated authorities, internal and external audit functions, the internal control system, as well as the duties and roles of the Audit Committee and other committees;
5. The duties and responsibilities of the Supervisory Board; and
6. The rights and obligations of the Supervisory Board.

Format and Implementation

The Orientation Program materials are not limited to the matters described above. The Orientation Program may take the form of presentations, formal or informal meetings, visits to the Company's facilities, as well as other activities tailored to the needs and characteristics of the position. The implementation of the program is coordinated by the Corporate Secretary and may be supported by relevant officers. The Secretary of the Supervisory Board coordinates with the Corporate Secretary to determine the schedule and venue, as well as to prepare the minutes of meetings, including records of the attendance and participation levels of Supervisory Board members.

Realization in Fiscal Year 2025

During fiscal year 2025, there were changes in the composition of the Supervisory Board due to the expiration of the terms of office of 2 (two) members, namely Conny Lolyta Rumondor on August 27, 2025 and Salamat Simanullang on September 23, 2025. However, throughout fiscal year 2025, no new members of the Supervisory Board were appointed. As the Company Orientation Program is intended for members who are appointed for the first time, PERURI did not conduct an Orientation Program for new Supervisory Board members during fiscal year 2025.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Pengawas

Performance Assessment of the Committee Under the Supervisory Board

Kebijakan dan mekanisme evaluasi kinerja komite di bawah Dewan Pengawas dilaksanakan secara menyeluruh, baik secara kolegal maupun individual. Proses penilaian tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas dengan mengacu pada parameter yang meliputi kecukupan struktur organisasi serta efektivitas pelaksanaan tugas komite sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diemban.

The policy and mechanism for evaluating the performance of the committees under the Supervisory Board are implemented comprehensively, both on a collegial and individual basis. The assessment process is conducted by the Supervisory Board with reference to parameters that include the adequacy of the organizational structure and the effectiveness of committee performance in carrying out their duties in accordance with their respective functions and responsibilities.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Pengawas

Performance Assessment of the Secretary of the Supervisory Board

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Pengawas dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Badan Pengaturan BUMN Nomor S-37/Wk2.BPU/01/2026 tanggal 29 Januari 2026 perihal Permintaan Penilaian Kinerja dan Perilaku Perwakilan Kementerian BUMN pada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN. Berdasarkan ketentuan tersebut, penilaian dilakukan secara daring melalui tautan yang telah ditetapkan dan disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Maret 2026. Proses penilaian ini menjadi mekanisme evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Pengawas dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Pengawas kepada Direksi.

Assessment Procedure

The performance assessment of the Secretary of the Supervisory Board is conducted with reference to the State-Owned Enterprises Regulatory Agency Letter No. S-37/Wk2.BPU/01/2026 dated January 29, 2026 regarding the Request for Performance and Conduct Assessment of Representatives of the Ministry of State-Owned Enterprises in SOEs, SOE Subsidiaries, and SOE Consolidated Affiliated Companies. Pursuant to the provisions of the letter, the assessment is carried out online through the designated link and must be submitted no later than March 1, 2026. This assessment process serves as an evaluation mechanism of the Secretary of the Supervisory Board's performance in supporting the effectiveness of the Supervisory Board's oversight and advisory functions to the Board of Directors.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian Sekretaris Dewan Pengawas mencakup aspek kinerja dan perilaku. Aspek kinerja digunakan untuk menilai kontribusi Sekretaris Dewan Pengawas dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Pengawas, termasuk pencapaian hasil kerja sesuai target, keaktifan dalam kegiatan Dewan Pengawas, serta penguasaan pengetahuan yang relevan dengan bidang tugas dan praktik tata kelola perusahaan. Sementara itu, aspek perilaku digunakan untuk menilai sikap, tindakan, dan interaksi kerja, antara lain orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, kemampuan membangun hubungan kerja yang harmonis, loyalitas, adaptabilitas, dan kolaborasi.

Assessment Criteria

The assessment criteria for the Secretary of the Supervisory Board encompass both performance and behavioral aspects. The performance aspect is used to evaluate the Secretary of the Supervisory Board's contribution in supporting the Supervisory Board's oversight and advisory functions, including the achievement of work targets, active participation in Supervisory Board activities, and mastery of knowledge relevant to the scope of duties and corporate governance practices. Meanwhile, the behavioral aspect is used to assess attitudes, conduct, and workplace interactions, including service orientation, accountability, competence, the ability to build harmonious working relationships, loyalty, adaptability, and collaboration.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Pengawas dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, kontribusi, serta pencapaian kinerja Sekretaris Dewan Pengawas sepanjang tahun buku. Penilaian tersebut menjadi sarana bagi Dewan Pengawas untuk memastikan bahwa organ pendukung Dewan Pengawas telah menjalankan fungsinya secara efektif, tertib, dan sesuai kebutuhan pelaksanaan pengawasan.

Assessing Party

The performance assessment of the Secretary of the Supervisory Board is conducted by the Chairman of the Supervisory Board, taking into consideration the execution of duties and responsibilities, contributions, and performance achievements of the Secretary of the Supervisory Board throughout the fiscal year. The assessment serves as a means for the Supervisory Board to ensure that its supporting organ has performed its functions effectively, in an orderly manner, and in accordance with the requirements of the Supervisory Board's oversight activities.



Hasil Penilaian

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Hal tersebut mengacu pada hasil evaluasi atas kinerja yang didasari pada sejumlah aspek penilaian, antara lain meliputi:

1. Secara aktif meminta data dan informasi terkait perkembangan terkini perusahaan kepada Sekretaris Perusahaan dalam rangka menunjang tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
2. Menyiapkan agenda khusus terkait pembahasan kesesuaian visi dan misi terhadap perubahan lingkungan bisnis perusahaan.
3. Meminta data/informasi kepada Sekretaris Perusahaan berkaitan dengan *monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Pengawas.
4. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Pengawas.
5. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan.
6. Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
7. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas.
8. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Pengawas.
9. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas.
10. Mengadministrasikan, memantau, dan memastikan setiap anggota Dewan Pengawas memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi minimal 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) tahun serta memiliki minimal 1 (satu) sertifikasi profesi yang masih berlaku di bidang Manajemen Risiko, Tata Kelola, atau Keuangan sesuai dengan ketentuan PER-3/MBU/03/2023.
11. Memfasilitasi proses penilaian kinerja Dewan Pengawas yang mencakup evaluasi terhadap efektivitas Dewan Pengawas secara kolektif, kinerja Komite-komite di bawahnya, serta kinerja individu setiap anggota Dewan Pengawas.
Sekretaris Dewas memastikan ketersediaan data pendukung untuk penilaian KPI Personal yang akan disampaikan kepada Menteri/Pemilik Modal.
12. Bertanggung jawab atas akurasi dan ketepatan waktu penginputan data komposisi serta kualifikasi organ pendukung Dewan Pengawas ke dalam *Management Information System* (MIS) Anaplan BP BUMN atau media pelaporan digital lainnya yang ditetapkan oleh instansi Pembina.
13. Menyiapkan agenda, data pendukung, dan risalah rapat yang secara spesifik membahas mengenai progres pelaksanaan diagnostik *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR) serta evaluasi atas kebijakan ambang batas (*threshold*) kewenangan transaksi di lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan secara berkala berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan pada awal

Assessment Results

Throughout 2025, the Secretary of the Supervisory Board performed his/her duties and responsibilities effectively. This conclusion is based on the results of the performance evaluation, which considered a number of assessment aspects, including:

1. Actively request data and information regarding the company's latest developments from the Corporate Secretary in order to support the Supervisory Board's oversight and advisory duties to the Board of Directors.
2. Prepare a special agenda for discussing the alignment of the company's vision and mission with changes in the business environment.
3. Request data and information from the Corporate Secretary regarding the monitoring of follow-up actions on the Supervisory Board's decisions, recommendations, and directives.
4. Prepare meetings, including briefing sheets for the Supervisory Board.
5. Prepare minutes of Supervisory Board meetings in accordance with the Company's Articles of Association.
6. Manage Supervisory Board documents, including incoming and outgoing correspondence, meeting minutes, and other documents.
7. Draft the Supervisory Board's Work Plan and Budget.
8. Draft the Supervisory Board's reports.
9. Perform other duties assigned by the Supervisory Board.
10. Administer, monitor, and ensure that each member of the Supervisory Board fulfills the competency development requirement of at least 20 (twenty) hours per year and holds at least 1 (one) valid professional certification in the fields of Risk Management, Corporate Governance, or Finance in accordance with the provisions of PER-3/MBU/03/2023.
11. Facilitate the Supervisory Board's performance evaluation process, which includes an assessment of the Supervisory Board's effectiveness as a collective body, the performance of its subordinate committees, and the individual performance of each Supervisory Board member.
The Secretary of the Supervisory Board ensures the availability of supporting data for the assessment of individual KPIs to be submitted to the Minister/Shareholder.
12. Be responsible for the accuracy and timeliness of data entry regarding the composition and qualifications of the Supervisory Board's supporting bodies into the BP BUMN Anaplan Management Information System (MIS) or other digital reporting platforms designated by the supervising agency.
13. Prepares the agenda, supporting data, and meeting minutes that specifically discuss the progress of the Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) diagnostic and the evaluation of transaction authority threshold policies within the Company and its Subsidiaries.

Performance Assessment of the Audit Committee

Assessment Procedure

The performance assessment of the Audit Committee is conducted periodically based on performance indicators

tahun buku. Komite Audit terlebih dahulu menyusun indikator kinerja tahunan yang akan menjadi acuan pelaksanaan tugas selama satu tahun. Indikator tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Pengawas, disahkan oleh Dewan Pengawas, serta menjadi bagian dari RKAP Perusahaan.

Selanjutnya, realisasi atas indikator kinerja Komite Audit dilaporkan secara triwulanan melalui laporan kinerja Komite Audit. Laporan tersebut memuat pelaksanaan program kerja, capaian indikator kinerja, serta hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas. Setiap laporan triwulanan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk ditelaah dan ditandatangani sebagai bentuk pengesahan atas hasil pemantauan kinerja Komite Audit.

Selain penilaian berkala tersebut, Komite Audit juga melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) sebagai salah satu indikator kinerja. Hasil *self-assessment* disusun dalam laporan tersendiri dan disampaikan satu kali dalam setahun kepada Dewan Pengawas. Dengan mekanisme tersebut, penilaian kinerja Komite Audit dilaksanakan secara terstruktur melalui penetapan indikator, pelaporan berkala, evaluasi oleh Dewan Pengawas, serta penilaian mandiri tahunan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas bersama Ketua Komite Audit berdasarkan efektivitas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kontribusi Komite Audit selama tahun buku berjalan.

Kriteria dan Hasil Penilaian

Penilaian kinerja Komite Audit tahun 2025 dilakukan berdasarkan parameter, ukuran/frekuensi, dan bobot yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komite Audit tahun 2025. Parameter penilaian mencakup pelaksanaan fungsi penelaahan, evaluasi, koordinasi, pengawasan proses audit, penyusunan laporan, pengembangan kompetensi, serta pelaksanaan *self-assessment*.

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan, antara lain penelaahan atas sistem pengendalian intern, evaluasi laporan hasil pemeriksaan SPI termasuk WBS, penelaahan laporan keuangan dan kinerja manajemen, koordinasi dengan SPI dan KAP, pengawasan proses General Audit, penyusunan laporan periodik, serta program sertifikasi dan pelatihan.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, Komite Audit memperoleh total nilai realisasi bobot sebesar 120,40%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Komite Audit telah memenuhi target yang ditetapkan, bahkan pada beberapa parameter melampaui target/frekuensi dalam RKA tahun 2025.

established at the beginning of the fiscal year. The Audit Committee first formulates its annual performance indicators, which serve as the basis for carrying out its duties throughout the year. These indicators are subsequently incorporated into the Supervisory Board's Work Plan and Budget (RKA), approved by the Supervisory Board, and included as part of the Company's RKAP.

The realization of the Audit Committee's performance indicators is reported quarterly through the Audit Committee Performance Report. The report contains the implementation of work programs, achievement of performance indicators, and matters requiring the attention of the Supervisory Board. Each quarterly report is submitted to the Supervisory Board for review and signature as a form of endorsement of the Audit Committee's performance monitoring results.

In addition to the periodic assessment, the Audit Committee also conducts a self-assessment as one of its performance indicators. The results of the self-assessment are documented in a separate report and submitted to the Supervisory Board once a year. Through this mechanism, the performance assessment of the Audit Committee is carried out in a structured manner through the establishment of performance indicators, periodic reporting, evaluation by the Supervisory Board, and an annual self-assessment.

Assessing Parties

The performance assessment of the Audit Committee is conducted by the Chairman of the Supervisory Board together with the Chairman of the Audit Committee, based on the effectiveness of the Committee's execution of its duties and responsibilities, as well as its contributions throughout the fiscal year.

Assessment Criteria and Results

The Audit Committee's performance assessment in 2025 was conducted based on the parameters, measures/frequency, and weightings stipulated in the 2025 Audit Committee Work Plan and Budget (RKA). The assessment parameters covered the implementation of review, evaluation, coordination, audit process oversight, report preparation, competency development, and self-assessment functions.

Throughout 2025, the Audit Committee carried out various activities in accordance with the established work program, including reviews of the internal control system, evaluation of SPI audit reports including WBS, reviews of financial statements and management performance, coordination with SPI and KAP, oversight of the General Audit process, preparation of periodic reports, as well as certification and training programs.

Based on the evaluation results up to the fourth quarter of 2025, the Audit Committee achieved a total weighted realization score of 120.40%. This achievement indicates that the Audit Committee's duties were carried out in line with the established targets, with several parameters exceeding the targets/frequency set in the 2025 RKA.



Penilaian Komite Pemantau Risiko

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan secara berkala berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan pada awal tahun buku. Komite Pemantau Risiko terlebih dahulu menyusun indikator kinerja tahunan yang akan menjadi acuan pelaksanaan tugas selama satu tahun. Indikator tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Pengawas, disahkan oleh Dewan Pengawas, serta menjadi bagian dari RKAP Perusahaan.

Selanjutnya, realisasi atas indikator kinerja Komite Pemantau Risiko dilaporkan secara triwulanan melalui laporan kinerja Komite Pemantau Risiko. Laporan tersebut memuat pelaksanaan program kerja, capaian indikator kinerja, serta hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas, khususnya yang berkaitan dengan pemantauan profil risiko, efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tindak lanjut atas area yang memerlukan perbaikan. Setiap laporan triwulanan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk ditelaah dan ditandatangani sebagai bentuk pengesahan atas hasil pemantauan kinerja Komite Pemantau Risiko.

Selain penilaian berkala tersebut, Komite Pemantau Risiko juga melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) sebagai salah satu indikator kinerja. Hasil *self-assessment* disusun dalam laporan tersendiri dan disampaikan satu kali dalam setahun kepada Dewan Pengawas. Dengan mekanisme tersebut, penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko dilaksanakan secara terstruktur melalui penetapan indikator, pelaporan berkala, evaluasi oleh Dewan Pengawas, serta penilaian mandiri tahunan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas bersama Ketua Komite Pemantau Risiko berdasarkan efektivitas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta kontribusi Komite dalam mendukung fungsi pengawasan selama tahun buku berjalan.

Kriteria dan Hasil Penilaian

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko tahun 2025 dilakukan oleh Dewan Pengawas berdasarkan parameter, ukuran/frekuensi, dan bobot yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komite Pemantau Risiko tahun 2025. Parameter penilaian mencakup pelaksanaan fungsi penelaahan, pemantauan, koordinasi, pelaporan, pengembangan kompetensi, serta pelaksanaan *self-assessment*.

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan, antara lain telaah atas sistem dan penerapan manajemen risiko serta Tata Kelola Terintegrasi, pemantauan efektivitas manajemen risiko, penyusunan laporan triwulanan, rapat internal Komite, rapat koordinasi

Assessment of the Risk Monitoring Committee

Assessment Procedure

The performance assessment of the Risk Monitoring Committee is conducted periodically based on performance indicators established at the beginning of the fiscal year. The Risk Monitoring Committee first formulates its annual performance indicators, which serve as the basis for carrying out its duties throughout the year. These indicators are subsequently incorporated into the Supervisory Board's Work Plan and Budget (RKA), approved by the Supervisory Board, and included as part of the Company's RKAP.

The realization of the Risk Monitoring Committee's performance indicators is reported quarterly through the Risk Monitoring Committee Performance Report. The report contains the implementation of work programs, achievement of performance indicators, and matters requiring the attention of the Supervisory Board, particularly those related to monitoring the Company's risk profile, the effectiveness of risk management, the internal control system, and follow-up actions on areas requiring improvement. Each quarterly report is submitted to the Supervisory Board for review and signature as a form of endorsement of the Risk Monitoring Committee's performance monitoring results.

In addition to the periodic assessment, the Risk Monitoring Committee also conducts a self-assessment as one of its performance indicators. The results of the self-assessment are documented in a separate report and submitted to the Supervisory Board once a year. Through this mechanism, the performance assessment of the Risk Monitoring Committee is carried out in a structured manner through the establishment of performance indicators, periodic reporting, evaluation by the Supervisory Board, and an annual self-assessment.

Assessing Parties

The performance assessment of the Risk Monitoring Committee is conducted by the Chairman of the Supervisory Board together with the Chairman of the Risk Monitoring Committee, based on the effectiveness of the Committee's execution of its duties and responsibilities, as well as its contributions in supporting the Supervisory Board's oversight function throughout the fiscal year.

Assessment Criteria and Results

The performance assessment of the Risk Monitoring Committee in 2025 was conducted by the Supervisory Board based on the parameters, measures/frequency, and weightings stipulated in the 2025 Risk Monitoring Committee Work Plan and Budget (RKA). The assessment parameters covered the implementation of review, monitoring, coordination, reporting, competency development, and self-assessment functions.

Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee carried out various activities in accordance with the established work program, including reviews of the risk management system and the implementation of Integrated Governance, monitoring of risk management effectiveness, preparation of quarterly reports, internal Committee meetings, coordination

dengan Komite Dewan Pengawas, Divisi Manajemen Risiko, dan unit terkait Tata Kelola Terintegrasi, serta telaah atas perkembangan bisnis digital PERURI.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, Komite Pemantau Risiko memperoleh total nilai realisasi bobot sebesar 110,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko telah memenuhi target yang ditetapkan, dengan beberapa parameter melampaui target/frekuensi dalam RKA tahun 2025.

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan secara berkala berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan pada awal tahun buku. Komite Nominasi dan Remunerasi terlebih dahulu menyusun indikator kinerja tahunan yang akan menjadi acuan pelaksanaan tugas selama satu tahun. Indikator tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Pengawas, disahkan oleh Dewan Pengawas, serta menjadi bagian dari RKAP Perusahaan.

Selanjutnya, realisasi atas indikator kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilaporkan secara triwulanan melalui laporan kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi. Laporan tersebut memuat pelaksanaan program kerja, capaian indikator kinerja, serta hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas. Setiap laporan triwulanan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk ditelaah dan ditandatangani sebagai bentuk pengesahan atas hasil pemantauan kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Selain penilaian berkala tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi juga melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) sebagai salah satu indikator kinerja. Hasil *self-assessment* disusun dalam laporan tersendiri dan disampaikan satu kali dalam setahun kepada Dewan Pengawas. Dengan mekanisme tersebut, penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan secara terstruktur melalui penetapan indikator, pelaporan berkala, evaluasi oleh Dewan Pengawas, serta penilaian mandiri tahunan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas bersama Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan efektivitas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta kontribusi Komite dalam mendukung fungsi pengawasan dan tata kelola Perseroan selama tahun buku berjalan.

meetings with the Supervisory Board Committees, the Risk Management Division, and units related to Integrated Governance, as well as reviews of PERURI's digital business development.

Based on the evaluation results up to the fourth quarter of 2025, the Risk Monitoring Committee achieved a total weighted realization score of 110.00%. This achievement indicates that the Risk Monitoring Committee's duties were carried out in line with the established targets, with several parameters exceeding the targets/frequency set in the 2025 RKA.

Performance Assessment of the Nomination and Remuneration Committee

Assessment Procedure

The performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee is conducted periodically based on performance indicators established at the beginning of the fiscal year. The Nomination and Remuneration Committee first formulates its annual performance indicators, which serve as the basis for carrying out its duties throughout the year. These indicators are subsequently incorporated into the Supervisory Board's Work Plan and Budget (RKA), approved by the Supervisory Board, and included as part of the Company's RKAP.

The realization of the Nomination and Remuneration Committee's performance indicators is reported quarterly through the Nomination and Remuneration Committee Performance Report. The report contains the implementation of work programs, achievement of performance indicators, and matters requiring the attention of the Supervisory Board. Each quarterly report is submitted to the Supervisory Board for review and signature as a form of endorsement of the Nomination and Remuneration Committee's performance monitoring results.

In addition to the periodic assessment, the Nomination and Remuneration Committee also conducts a self-assessment as one of its performance indicators. The results of the self-assessment are documented in a separate report and submitted to the Supervisory Board once a year. Through this mechanism, the performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee is carried out in a structured manner through the establishment of performance indicators, periodic reporting, evaluation by the Supervisory Board, and an annual self-assessment.

Assessing Parties

The performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee is conducted by the Chairman of the Supervisory Board together with the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, based on the effectiveness of the Committee's execution of its duties and responsibilities, as well as its contributions in supporting the Company's oversight and governance functions throughout the fiscal year.



Kriteria dan Hasil Penilaian

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2025 dilakukan berdasarkan parameter, ukuran/frekuensi, dan bobot yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2025. Parameter penilaian mencakup pelaksanaan fungsi pemantauan, telaah, evaluasi, koordinasi, pelaporan, serta pelaksanaan *self-assessment*.

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan, antara lain pemantauan, telaah, dan evaluasi terhadap sistem manajemen sumber daya manusia, implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi, telaah dan pengusulan *Top Talent* BOD-1 dan Talent Pool BUMN, rapat sinergi dengan Direktur SDM, Teknologi dan Informasi, rapat internal Komite, penyusunan laporan periodik, serta pelaksanaan *self-assessment* kinerja Komite.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi memperoleh total nilai realisasi bobot sebesar 106,60%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi target yang ditetapkan, dengan beberapa parameter melampaui target/frekuensi dalam RKA tahun 2025.

Assessment Criteria and Results

The performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee in 2025 was conducted based on the parameters, measures/frequency, and weightings stipulated in the 2025 Nomination and Remuneration Committee Work Plan and Budget (RKA). The assessment parameters covered the implementation of monitoring, review, evaluation, coordination, reporting, and self-assessment functions.

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee carried out various activities in accordance with the established work program, including monitoring, review, and evaluation of the human capital management system, implementation of nomination and remuneration policies, review and recommendation of BOD-1 Top Talent and SOE Talent Pool, synergy meetings with the Director of Human Resources, Technology and Information, internal Committee meetings, preparation of periodic reports, and implementation of the Committee's performance self-assessment.

Based on the evaluation results up to the fourth quarter of 2025, the Nomination and Remuneration Committee achieved a total weighted realization score of 106.60%. This achievement indicates that the Nomination and Remuneration Committee's duties were carried out in line with the established targets, with several parameters exceeding the targets/frequency set in the 2025 RKA.

Dewan Pengawas Independen

Independent Supervisory Board

Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 mengatur bahwa komposisi Dewan Pengawas paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Pengawas Independen.

Pada tahun buku 2025, fungsi tersebut diemban oleh Conny Lolyta Rumondor selaku Anggota Dewan Pengawas Independen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-130/MBU/06/2024 tanggal 10 Juni 2024. Masa jabatan yang bersangkutan berakhir pada 27 Agustus 2025, dan ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. 181 Tahun 2026 tanggal 17 Maret 2026.

Sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan, posisi Anggota Dewan Pengawas Independen belum diisi kembali, sehingga susunan Dewan Pengawas PERURI per 31 Desember 2025 yang terdiri atas 4 (empat) anggota belum memenuhi ketentuan minimal 20% anggota independen.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas PERURI merupakan kewenangan Kepala BP BUMN selaku wakil Pemerintah sebagai pemilik modal, sehingga komposisi Dewan Pengawas pada suatu periode mengikuti keputusan pengangkatan yang ditetapkan. PERURI menyadari ketentuan pemenuhan proporsi tersebut dan berkomitmen mendukung pemenuhannya melalui penyampaian usulan kepada BP BUMN pada proses pengangkatan atau penyegaran komposisi Dewan Pengawas berikutnya. Dalam pelaksanaan tugasnya sepanjang tahun buku 2025, seluruh anggota Dewan Pengawas tetap mengedepankan prinsip independensi, objektivitas, dan kehati-hatian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Kriteria Penentuan Dewan Pengawas Independen

Anggota Dewan Pengawas Independen adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemilik modal pengendali, atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pernyataan Independensi Dewan Pengawas Independen

Selama menjabat pada tahun buku 2025, Anggota Dewan Pengawas Independen PERURI, Conny Lolyta Rumondor, telah memenuhi seluruh kriteria independensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 stipulates that at least 20% (twenty percent) of the composition of the Supervisory Board shall consist of Independent Supervisory Board Members.

In fiscal year 2025, this function was carried out by Conny Lolyta Rumondor as an Independent Supervisory Board Member, who was appointed based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-130/MBU/06/2024 dated June 10, 2024. Her term of office ended on August 27, 2025 and was officially stipulated through the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. 181 of 2026 dated March 17, 2026.

As of the issuance of this Annual Report, the position of Independent Supervisory Board Member has not yet been filled. Therefore, the composition of PERURI's Supervisory Board as of December 31, 2025, consisting of 4 (four) members, has not met the minimum requirement of 20% independent members.

The appointment and dismissal of members of PERURI's Supervisory Board are the authority of the Head of BP BUMN as the representative of the Government as the capital owner. Therefore, the composition of the Supervisory Board in a given period follows the appointment decisions that have been stipulated. PERURI is aware of the requirement to fulfill such proportion and is committed to supporting its fulfillment through the submission of proposals to the BP BUMN in the next appointment or refreshment process of the Supervisory Board composition. In carrying out their duties throughout fiscal year 2025, all members of the Supervisory Board continued to uphold the principles of independence, objectivity, and prudence in performing their oversight and advisory functions to the Board of Directors.

Criteria for Determining an Independent Supervisory Board

An Independent Supervisory Board Member is a member of the Supervisory Board who has no financial, management, share ownership, and/or family relationship with other members of the Supervisory Board, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders, or any relationship with the relevant SOE, which may affect his or her ability to act independently.

Independence Statement of the Independent Supervisory Board

During her tenure in fiscal year 2025, PERURI's Independent Supervisory Board Member, Conny Lolyta Rumondor, fulfilled all independence criteria as stipulated in Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023.



Yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, maupun pemilik modal, serta tidak memiliki hubungan dengan PERURI yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Pemenuhan kriteria tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Independensi yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Pemenuhan kriteria independensi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Kriteria Independensi Independence Criteria	Pemenuhan Compliance Status
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawas lain, Direksi, dan/atau pemilik modal Does not have any financial relationship with other members of the Supervisory Board, members of the Board of Directors, and/or the capital owner	Terpenuhi Complied
Tidak memiliki hubungan kepengurusan pada Perusahaan lain yang menimbulkan benturan kepentingan Does not hold a management position in another company that may give rise to a conflict of interest	Terpenuhi Complied
Tidak memiliki hubungan kepemilikan yang menimbulkan benturan kepentingan Does not have any ownership relationship that may give rise to a conflict of interest	Terpenuhi Complied
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain, Direksi, dan/atau pemilik modal Does not have any family relationship with other members of the Supervisory Board, members of the Board of Directors, and/or the capital owner	Terpenuhi Complied
Tidak memiliki hubungan dengan PERURI yang dapat memengaruhi independensi Does not have any relationship with PERURI that may affect independence	Terpenuhi Complied

Masa jabatan Conny Lolyta Rumondor sebagai Anggota Dewan Pengawas Independen berakhir pada 27 Agustus 2025. Sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan, posisi Anggota Dewan Pengawas Independen belum diisi kembali, sehingga tidak terdapat Pernyataan Independensi Dewan Pengawas Independen untuk periode setelah tanggal tersebut. PERURI berkomitmen mendukung pemenuhan ketentuan komposisi anggota Dewan Pengawas Independen pada proses pengangkatan berikutnya, sebagaimana diuraikan pada bagian Dewan Pengawas Independen.

She had no financial, management, ownership, and/or family relationship with other members of the Supervisory Board, members of the Board of Directors, or the capital owner, and had no relationship with PERURI that could affect her ability to act independently. Compliance with these criteria was set forth in an Independence Statement signed by the respective member.

Compliance with the independence criteria is described as follows:

Conny Lolyta Rumondor's term of office as an Independent Supervisory Board Member ended on August 27, 2025. As of the issuance date of this Annual Report, the position of Independent Supervisory Board Member has not yet been filled. Accordingly, there is no Independence Statement of the Independent Supervisory Board Member for the period following such date. PERURI remains committed to supporting compliance with the requirement regarding the composition of Independent Supervisory Board Members in the next appointment process, as described in the section on Independent Supervisory Board.

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ utama Perusahaan yang memegang peran strategis dalam pengelolaan seluruh aktivitas dan operasional usaha. Dalam kapasitasnya sebagai pengurus, Direksi bertanggung jawab menetapkan keputusan-keputusan strategis guna mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan. Tanggung jawab tersebut dijalankan secara kolegal oleh seluruh anggota Direksi melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, serta strategi yang berorientasi pada keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Selain itu, Direksi juga berkewajiban memastikan bahwa setiap kegiatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Board of Director Charter: Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Direksi berpedoman pada *Board of Director Charter* yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. KEP-2/III/2024 tanggal 21 Maret 2024. Pedoman tersebut menjadi acuan utama bagi Direksi dalam melaksanakan peran dan fungsinya secara terarah guna mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

Board of Director Charter disusun dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan memberikan panduan bagi Direksi dalam mengelola Perusahaan secara efektif dan efisien. Dokumen ini juga mengatur hubungan kerja Direksi dengan berbagai pihak, termasuk BP BUMN selaku pemilik modal, Dewan Pengawas, serta para pemangku kepentingan lainnya. Melalui pedoman tersebut, Direksi diharapkan mampu menetapkan keputusan strategis yang selaras dengan tujuan Perusahaan dan kepentingan seluruh pihak terkait.

Adapun substansi utama yang diatur dalam *Board of Director Charter* meliputi antara lain:

1. Pendahuluan;
2. Dasar Hukum Pembentukan dan Organisasi Direksi;
3. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Direksi;
4. Prinsip Dasar dan Hubungan Kerja Direksi dengan *stakeholder*;
5. Penutup.

Kualifikasi dan Persyaratan Menjadi Anggota Direksi

- a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah:
 1. Dinyatakan pailit;

The Board of Directors is the Company's primary organ that plays a strategic role in managing all business activities and operations. In its capacity as the management body, the Board of Directors is responsible for making strategic decisions to support the achievement of the Company's vision and mission. This responsibility is carried out collectively by all members of the Board of Directors through the formulation and implementation of policies, programs, and strategies aimed at ensuring sustainable business growth and continuity. In addition, the Board of Directors is responsible for ensuring that all Company activities are conducted in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

Board of Directors Charter: Guidelines and Rules of Procedure of the Board of Directors

In carrying out its duties and authorities, the Board of Directors refers to the Board of Directors Charter, which was established through Board of Directors Decree No. KEP-2/III/2024 dated March 21, 2024. The Charter serves as the primary guideline for the Board of Directors in performing its roles and functions in a structured manner to achieve the Company's vision and mission.

The Board of Directors Charter is prepared with reference to the prevailing laws and regulations and is intended to provide guidance for the Board of Directors in managing the Company effectively and efficiently. The document also governs the working relationship between the Board of Directors and various parties, including the BP BUMN as Shareholder, the Supervisory Board, and other stakeholders. Through this Charter, the Board of Directors is expected to make strategic decisions that are aligned with the Company's objectives and the interests of all relevant stakeholders.

The principal matters governed under the Board of Directors Charter include, among others:

1. Introduction;
2. Legal Basis for the Establishment and Organization of the Board of Directors;
3. Duties, Authorities, and Obligations of the Board of Directors;
4. Basic Principles and Working Relationships between the Board of Directors and Stakeholders; and
5. Closing.

Qualifications and Requirements for Membership of the Board of Directors

- a. Any individual who is legally competent to perform legal acts and has never:
 1. Been declared bankrupt;



2. Menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit; dan
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya.
- b. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud diatas, yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya, jujur, perilaku yang baik dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan formal di atas ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Pengawas mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut;
- d. Persyaratan lain untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, seseorang tersebut juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
 1. bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 2. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
 3. tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
 4. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
 5. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
 6. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
 7. sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
 8. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir
- e. Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota Direksi berasal dari calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim dan/ atau lembaga profesional yang dibentuk dan/atau ditunjuk oleh Menteri;

2. Served as a member of the board of directors, board of commissioners, or supervisory board that was found guilty of causing an SOE, Subsidiary, and/or other business entity to be declared bankrupt; and
3. Been convicted of a criminal offense that caused losses to the state finances, an SOE, a Subsidiary, and/or another business entity.
- b. In addition to meeting the criteria referred to above, any individual who may be appointed as a member of the Board of Directors must possess the expertise, integrity, leadership, experience, and competence necessary to perform his/her duties, be honest, demonstrate good conduct, and have a high level of dedication to advancing and developing the Company;
- c. The appointment of a member of the Board of Directors who does not satisfy the formal requirements referred to above shall be null and void by operation of law from the time the other members of the Board of Directors or the Supervisory Board become aware of such non-compliance.
- d. In addition to the foregoing requirements, a person may only be appointed as a member of the Board of Directors if he/she also meets the following requirements:
 1. Is not an official of a political party, a legislative candidate, and/or a member of the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), Provincial Regional House of Representatives (DPRD Province), or Regency/ Municipal Regional House of Representatives (DPRD Regency/Municipality);
 2. Is not a candidate for regional head/deputy regional head and/or a regional head/deputy regional head, including acting regional heads/deputy regional heads;
 3. Has not served as a member of the Board of Directors of the relevant SOE or Subsidiary for 2 (two) terms of office;
 4. Is not currently serving as an official of a ministry/ institution, a member of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of another SOE, a member of the Board of Directors of another SOE, or a member of the Board of Directors of a Subsidiary and/or another business entity;
 5. Does not currently hold a position that, under the prevailing laws and regulations, is prohibited from being held concurrently with the position of member of the Board of Directors;
 6. Has the dedication and is able to devote full time to carrying out his/her duties, as evidenced by a statement letter signed by the individual concerned;
 7. Is physically and mentally fit, meaning that he/she is not suffering from any illness that may hinder the performance of duties as a member of the Board of Directors, as evidenced by a medical certificate issued by a hospital; and
 8. Possesses a Taxpayer Identification Number (NPWP) and has fulfilled his/her tax payment obligations during the preceding 2 (two) years.
- e. Candidates appointed as members of the Board of Directors shall be selected from candidates who have passed a fit and proper test conducted by a team and/ or professional institution established and/or appointed by the Minister.

- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak berlaku bagi pengangkatan kembali pada posisi jabatan yang sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya;
- g. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada huruf f wajib menandatangani kontrak manajemen pengangkatannya sebagai anggota Direksi sebelum ditetapkan;
- h. Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan;
- i. Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

Pada tahun 2025, seluruh anggota Direksi PERURI telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas.

Ketentuan Masa Jabatan

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

- a. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 1. Meninggal dunia;
 2. Masa jabatannya berakhir;
 3. Diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri; dan/atau
 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan Peraturan Perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang;
- b. Anggota Direksi yang jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud diatas, kecuali karena meninggal dunia, tetap bertanggungjawab terhadap tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Menteri.

Kebijakan Suksesi Direksi dan Manajemen Kunci

Kebijakan suksesi Direksi dan manajemen kunci di PERURI dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, serta didukung oleh prinsip tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam konteks suksesi Direksi, proses pengangkatan Direksi berada dalam kewenangan Pemilik Modal sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan mendukung kesinambungan

- f. The provision referred to in point e shall not apply to the reappointment of a member of the Board of Directors to the same position, provided that the individual has been assessed as having performed his/her duties satisfactorily during his/her term of office.
- g. Candidates for the Board of Directors who have passed the fit and proper test as referred to in point e and members of the Board of Directors who are reappointed as referred to in point f shall be required to sign a management contract for their appointment as members of the Board of Directors before such appointment is finalized.
- h. The number of members of the Board of Directors shall be determined by the Minister in accordance with the Company's needs.
- i. Where the Board of Directors consists of more than 1 (one) member, one of the members shall be appointed as President Director.

In 2025, all members of PERURI's Board of Directors fulfilled all of the requirements and provisions referred to above.

Term of Office Provision

Members of the Board of Directors shall be appointed for a term of office of 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) additional term of office.

- a. The office of a member of the Board of Directors shall terminate if:
 1. The member passes away;
 2. The term of office expires;
 3. The member is dismissed pursuant to a decision of the Minister; and/or
 4. The member no longer satisfies the requirements to serve as a member of the Board of Directors under the provisions of the Articles of Association and prevailing laws and regulations, including prohibited concurrent positions.
- b. A member of the Board of Directors whose term of office ends as referred to above, except due to death, shall remain accountable for actions taken during his/her tenure that have not yet been accounted for and accepted by the Minister.

Succession Policy for the Board of Directors and Key Management

PERURI's succession policy for the Board of Directors and key management is implemented with reference to the prevailing laws and regulations, primarily Government Regulation No. 6 of 2019 concerning Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia and Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, and is supported by governance principles as stipulated in Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

In the context of succession of the Board of Directors, the appointment of members of the Board of Directors falls under the authority of the Owner of Capital in accordance with the



kepemimpinan melalui penyiapan kandidat potensial dalam talent pool, sedangkan kesinambungan manajemen kunci didukung melalui sistem manajemen talenta yang mencakup identifikasi, pemetaan, pengembangan, serta pemantauan talenta potensial secara berkelanjutan.

Manajemen talenta berfokus pada pendekatan strategis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengelola talenta unggul, khususnya dalam mendukung kesiapan suksesi pada level Direksi dan manajemen kunci. Melalui mekanisme ini, Perusahaan berupaya membangun arsitektur perencanaan suksesi yang objektif, terstruktur, transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

Pelaksanaan manajemen talenta dijalankan melalui tiga pilar utama, yaitu identifikasi talenta, pengembangan talenta, serta pemantauan dan evaluasi. Identifikasi talenta dilakukan melalui penelusuran kandidat potensial (*talent sourcing*) dan pemetaan kompetensi menggunakan *9-Box Grid*, sedangkan pengembangan talenta didukung melalui peta jalan karier (*career roadmap*) dan program pembelajaran terarah. Untuk memastikan efektivitasnya, Perusahaan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap perkembangan setiap talenta.

Dalam mendukung proses tersebut, Perusahaan menggunakan platform PERMATA (PERURI Manajemen Talenta) sebagai sistem pengelolaan data talenta yang terintegrasi dan real-time. Pemetaan talenta mempertimbangkan aspek kinerja dan potensi, termasuk melalui metodologi *Assessment Center*. Pada tahun 2025, Perusahaan juga memperkuat inklusivitas melalui *Key Performance Indicator* (KPI) Korporasi terkait Talent Diversity, yang diwujudkan dalam pemenuhan representasi perempuan dan talenta muda pada nominated talent di lingkungan BUMN. Melalui mekanisme ini, talenta unggul dipersiapkan dalam *talent pool* untuk mendukung kesinambungan kepemimpinan dan kebutuhan suksesi posisi strategis, termasuk kandidat potensial yang dapat dipertimbangkan dalam proses suksesi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Independensi Anggota Direksi

Direksi PERURI berkewajiban untuk senantiasa menjaga independensi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan terpeliharanya independensi tersebut, Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal tanpa adanya pengaruh eksternal yang berpotensi mengganggu objektivitas dan integritas pengambilan keputusan.

Setiap anggota Direksi dituntut untuk bertindak secara profesional, objektif, dan bebas dari tekanan maupun benturan kepentingan, sehingga setiap keputusan yang diambil senantiasa mengutamakan kepentingan Perusahaan serta para pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan independensi Direksi tetap terjaga, Perusahaan telah menetapkan

applicable provisions. The Company supports leadership continuity by preparing potential candidates through a talent pool, while the continuity of key management is supported through a talent management system that includes the identification, mapping, development, and continuous monitoring of potential talents.

Talent management focuses on a strategic approach to identifying, developing, and managing outstanding talents, particularly in supporting succession readiness at the Board of Directors and key management levels. Through this mechanism, the Company seeks to build a succession planning architecture that is objective, structured, transparent, timely, and accountable.

The implementation of talent management is carried out through three main pillars, namely talent identification, talent development, and monitoring and evaluation. Talent identification is conducted through talent sourcing and competency mapping using the 9-Box Grid, while talent development is supported through a career roadmap and targeted learning programs. To ensure its effectiveness, the Company conducts continuous monitoring and evaluation of each talent's development.

To support this process, the Company uses the PERMATA platform (PERURI Talent Management) as an integrated and real-time talent data management system. Talent mapping takes into account performance and potential aspects, including through the Assessment Center methodology. In 2025, the Company also strengthened inclusivity through the Corporate Key Performance Indicator (KPI) related to Talent Diversity, which was realized through the fulfillment of women and young talent representation in nominated talent within the SOE environment. Through this mechanism, outstanding talents are prepared in the talent pool to support leadership continuity and succession needs for strategic positions, including potential candidates who may be considered in the Board of Directors succession process in accordance with the applicable provisions.

Independence of the Board of Directors

PERURI's Board of Directors is required to maintain its independence at all times as stipulated in the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations. By maintaining such independence, the Board of Directors is able to carry out its duties and responsibilities optimally without any external influence that may interfere with the objectivity and integrity of its decision-making process.

Each member of the Board of Directors is required to act professionally, objectively, and free from pressure or conflicts of interest, thereby ensuring that every decision made consistently prioritizes the interests of the Company and its stakeholders.

As part of the efforts to ensure that the independence of the Board of Directors is maintained, the Company has

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman kerja Direksi;
2. Membuat laporan secara berkala terkait kepemilikan saham di perusahaan lain;
3. Membuat pernyataan tertulis yang berisi penegasan bahwa keputusan senantiasa berdasarkan prinsip kemandirian (*independency*), penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*), profesional dan berdasarkan kepada kepentingan Perusahaan, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Direksi bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mengoptimalkan aset Perusahaan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan Perusahaan. Selain itu, Direksi berwenang menetapkan keputusan serta mengambil tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi berhak mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk seluruh hal yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan, dengan tetap memperhatikan batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB).

Adapun tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan;
2. Berwenang penuh untuk melakukan segala tindakan terkait dengan pengurusan Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara dan Anggaran Dasar;
3. Menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan;
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
5. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
6. Mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
7. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;

established the following provisions:

1. Preparing the Board of Directors' work guidelines;
2. Submitting periodic reports regarding share ownership in other companies; and
3. Making a written statement affirming that decisions are always made based on the principles of independence, duty of care and loyalty, professionalism, and the interests of the Company, free from conflicts of interest, and in compliance with the prevailing laws and regulations.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors

The Board of Directors is responsible for safeguarding, managing, and optimizing the Company's assets while upholding integrity, professionalism, and compliance with the prevailing laws and regulations for the benefit of the Company. In addition, the Board of Directors has the authority to make decisions and take actions relating to the administration and management of the Company in order to achieve its established purposes and objectives.

In carrying out its duties, the Board of Directors is entitled to represent the Company both in and out of court in all matters relating to the interests of the Company, subject to the limitations stipulated in the prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the Joint Deliberation Meeting (RPB).

The duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors include, among others, the following:

1. To carry out the management of the Company;
2. To exercise full authority to undertake all actions relating to the management of the Company in accordance with policies deemed appropriate, within the limits prescribed by the laws and regulations governing state-owned enterprises and the Articles of Association;
3. To establish policies for the management of the Company;
4. To delegate the authority of the Board of Directors to one or more members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or to represent the Company in and out of court;
5. To delegate the authority of the Board of Directors to one or more employees of the Company, acting individually or jointly, or to other persons, to represent the Company in and out of court;
6. To establish provisions concerning the Company's employment matters, including the determination of salaries, pensions or old-age security benefits, and other remuneration for the Company's employees in accordance with the prevailing laws and regulations, provided that the determination of salaries, pensions or old-age security benefits, and other remuneration exceeding the obligations prescribed by laws and regulations must first obtain the approval of the Minister;
7. To appoint and dismiss employees of the Company in accordance with the Company's employment regulations and the prevailing laws and regulations;



8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawasan Intern dan jabatan lainnya;
9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Dalam rangka melaksanakan pengurusan Perusahaan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan sesuai dengan kebijakan pengurusan Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Ruang Lingkup Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Berdasarkan *Board of Director Charter*, pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi PERURI diatur sebagai berikut:

Direktur Utama

- a. Mengurus perusahaan sesuai maksud dan tujuan Perusahaan;
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas Perusahaan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang ditetapkan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional di bidang pelaksanaan audit internal, kesekretariatan Perusahaan, manajemen risiko serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi internalisasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten;
- e. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan WBS pada internal PERURI yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh pengelola WBS BUMN;
- f. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam Rapat Direksi;
- g. Berhak dan berwenang bertindak selaku koordinator dari anggota Direksi;
- h. Memastikan informasi yang terkait dengan Perusahaan selalu tersedia bila diperlukan oleh Dewan Pengawas;
- i. Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi secara periodik sesuai ketetapan Direksi atau rapat-rapat lain apabila dipandang perlu sesuai usulan Direksi;
- j. Mengesahkan Keputusan Direksi tentang Kebijakan Manajemen Perusahaan;
- k. Mengelola pelaksanaan Sistem Manajemen; dan

8. To appoint and dismiss the Corporate Secretary, the Head of the Internal Audit Unit, and other positions;
9. To undertake all other actions and deeds relating to the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company in and out of court in all matters and events, subject to the limitations stipulated in the Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations; and
10. In carrying out the management of the Company, each member of the Board of Directors shall have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company in accordance with the Company's management policies established through resolutions of the Board of Directors.

Scope of Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

Based on the Board of Directors Charter, the duties and responsibilities of each member of PERURI's Board of Directors are assigned as follows:

President Director

- a. Manage the Company in accordance with its purposes and objectives;
- b. Plan, coordinate, direct, control, supervise, and evaluate the Company's activities to ensure that all operations are conducted in line with the established vision, mission, business objectives, strategies, policies, and work programs;
- c. Coordinate the implementation of operational duties relating to internal audit, corporate secretarial functions, risk management, and ensuring compliance with the prevailing laws and regulations;
- d. Coordinate, control, and evaluate the consistent internalization of the principles of Good Corporate Governance;
- e. Be responsible for the implementation of the Whistleblowing System (WBS) within PERURI, which in its day-to-day operation is supported by the SOE WBS administrator;
- f. Have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors based on policies established at Board of Directors Meetings;
- g. Have the right and authority to act as the coordinator of the members of the Board of Directors;
- h. Ensure that information relating to the Company is always available whenever required by the Supervisory Board;
- i. Convene and chair Board of Directors Meetings periodically in accordance with the resolutions of the Board of Directors or other meetings whenever deemed necessary based on proposals from members of the Board of Directors;
- j. Approve Board of Directors Resolutions concerning the Company's Management Policies;
- k. Manage the implementation of the Management System; and

- I. Menunjuk anggota Direksi lain untuk bertindak atas nama Direksi.

Direktur Digital Business

- a. Merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi digital untuk mendukung tujuan bisnis Perusahaan;
- b. Menilai tren industri dan teknologi terbaru untuk memastikan Perusahaan selalu mengikuti perkembangan terkini;
- c. Mengelola dan mengembangkan portofolio produk dan layanan digital Perusahaan, serta memastikan pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan pasar;
- d. Mengidentifikasi dan menerapkan teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
- e. Memimpin dan mengelola proyek-proyek digital dari konsep hingga implementasi dan memastikan proyek-proyek tersebut berjalan sesuai rencana, anggaran, dan batas waktu yang ditetapkan;
- f. Membangun dan menjaga hubungan dengan mitra strategis, vendor teknologi, dan pihak ketiga, serta menegosiasikan kesepakatan kerjasama untuk mendukung strategi digital Perusahaan;
- g. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi digital dan standar keamanan, serta mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan keamanan digital;
- h. Mengikuti perkembangan industri dan inovasi di dunia digital, serta mencari peluang baru dan mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin mempengaruhi Perusahaan.

Direktur Currency and Security Solution

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis proses produksi untuk mencapai tingkat kualitas produk sesuai dengan standar mutu;
- b. Mengoordinasikan dalam perumusan dan pencapaian kualitas produk uang kertas, uang logam dan logam non uang dan kertas berharga non-uang agar dapat berjalan dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu;
- c. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pencapaian sasaran/target di masing-masing unit produksi untuk memastikan adanya perkembangan yang progresif dan berkesinambungan sebagai dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Perusahaan;
- d. Bersama-sama Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya melakukan *monitoring* dan pengawasan pelaksanaan Sistem Manajemen.

Direktur SDM, Teknologi, dan Informasi

- a. Mengarahkan dan mengoordinasikan dalam penyusunan rencana strategis untuk pengembangan SDM, pengamanan, pengadaan, kebijakan pengadaan dan pergudangan, fasilitas umum dan lingkungan;
- b. Memantau penyusunan kebijakan untuk menjalankan fungsi pengadaan barang dan jasa, pengendalian jasa, persediaan barang dan gudang, penyediaan fasilitas umum agar dapat berjalan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu;
- c. Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM, pengamanan, pengadaan, kebijakan pengadaan dan pergudangan, fasilitas umum

- I. Designate another member of the Board of Directors to act on behalf of the Board of Directors.

Director of Digital Business

- a. Formulate, develop, and implement digital strategies to support the Company's business objectives;
- b. Assess the latest industry and technology trends to ensure that the Company remains abreast of current developments;
- c. Manage and develop the Company's portfolio of digital products and services, and ensure that product development aligns with market needs;
- d. Identify and implement innovative technologies to enhance operational efficiency and effectiveness;
- e. Lead and manage digital projects from concept through implementation and ensure that such projects are executed in accordance with established plans, budgets, and timelines;
- f. Establish and maintain relationships with strategic partners, technology vendors, and third parties, and negotiate cooperation agreements to support the Company's digital strategy;
- g. Ensure the Company's compliance with digital regulations and security standards, and develop and implement digital security policies;
- h. Keep abreast of industry developments and innovations in the digital sector, while identifying new opportunities and potential risks that may affect the Company.

Director of Currency and Security Solution

- a. Coordinate the preparation of strategic plans for production processes to achieve product quality levels in accordance with established quality standards;
- b. Coordinate the formulation and achievement of quality targets for banknotes, coins, non-currency metal products, and non-currency security documents to ensure timely delivery, accurate quantities, and the required quality standards;
- c. Coordinate all activities aimed at achieving the targets of each production unit to ensure progressive and sustainable improvement in support of the achievement of the Company's mission and vision;
- d. Together with the President Director and other members of the Board of Directors, monitor and oversee the implementation of the Management System.

Director of Human Resources, Technology, and Information

- a. Direct and coordinate the preparation of strategic plans for human resources development, security, procurement, procurement policy and warehousing, as well as general facilities and environmental management;
- b. Oversee the formulation of policies governing the procurement of goods and services, service control, inventory and warehouse management, and the provision of general facilities to ensure timely implementation, appropriate quantities, and required quality standards;
- c. Plan, develop, and implement strategies in the areas of human resources management and development, security, procurement, procurement policy and warehousing, as well as general facilities and



dan lingkungan agar sasaran strategis Perusahaan dapat tercapai;

- d. Menyusun kebijakan pokok dan pelaksanaan fungsi manajemen SDM, pengamanan, pengadaan, kebijakan pengadaan pergudangan, fasilitas umum dan lingkungan untuk kelancaran dalam pengelolaan Perusahaan;
- e. Kompetensi yang direncanakan agar proses pengelolaan Perusahaan dapat berjalan dengan lancar;
- f. Bersama-sama Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya melakukan *monitoring* dan pengawasan pelaksanaan Sistem Manajemen, menjalankan dan menjaga Tata Kelola Teknologi Informasi di PERURI berjalan dengan aman, efektif dan efisien.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

- a. Mengarahkan dan mengoordinasikan dalam penyusunan strategis untuk pengelolaan keuangan dan investasi;
- b. Mengoordinasikan perumusan strategi jangka panjang sebagai dasar perumusan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan bekerjasama dengan Direksi lainnya;
- c. Memberlakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi dan mengevaluasi berbagai jenis risiko finansial yang dapat dihadapi Perusahaan;
- d. Mengarahkan dan memantau kebutuhan dana operasional dan investasi serta terjaganya keamanan dalam pengelolaan dana Perusahaan agar kegiatan Perusahaan dapat berjalan sesuai rencana;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional di bidang pelaksanaan manajemen risiko;
- f. Bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi Baru

Kebijakan

Kebijakan program pengenalan perusahaan bagi Direksi baru tertuang di *Charter* Direksi. Setiap anggota Direksi baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai PERURI. Tugas dan tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris

Perusahaan. Program pengenalan meliputi:

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
- b. Gambaran mengenai perusahaan dengan tujuan, sifat, lingkup pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan audit eksternal dan internal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;

environmental management to support the achievement of the Company's strategic objectives;

- d. Formulate key policies and oversee the implementation of human resources management, security, procurement, procurement policy and warehousing, as well as general facilities and environmental management functions to ensure the effective management of the Company;
- e. Develop the competencies required to ensure that the Company's management processes are carried out effectively and efficiently;
- f. Together with the President Director and other members of the Board of Directors, monitor and oversee the implementation of the Management System, and ensure that Information Technology Governance at PERURI is implemented and maintained in a secure, effective, and efficient manner.

Director of Finance and Risk Management

- a. Direct and coordinate the preparation of strategic plans for financial and investment management;
- b. Coordinate the formulation of long-term strategies as the basis for preparing the Company's Work Plan and Budget (RKAP), in collaboration with the other members of the Board of Directors;
- c. Implement measures to mitigate and evaluate various types of financial risks that may be encountered by the Company;
- d. Direct and monitor operational and investment funding requirements, as well as ensure the security of the management of the Company's funds, so that the Company's activities can be carried out in accordance with plan;
- e. Coordinate the implementation of operational duties relating to risk management;
- f. Be responsible for coordinating and providing direction on the implementation of the principles of Good Corporate Governance.

Company Orientation Program for Newly Appointed Directors

Policy

The policy governing the Company Orientation Program for newly appointed Directors is set out in the Board of Directors Charter. Every member of the Board of Directors who is appointed for the first time shall be provided with an orientation program regarding PERURI. The responsibility for organizing the orientation program rests with the Corporate Secretary or any person performing the function of Corporate Secretary.

The orientation program includes:

- a. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles by the Company;
- b. An overview of the Company, including its objectives, nature of business, short-term and long-term scope of activities, competitive position, risks, and other strategic issues;
- c. Information relating to the authority delegated to external and internal auditors, as well as the internal control system and policies, including the Audit Committee;

- d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi, serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;
- e. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit-unit bisnis dan proyek-proyek PERURI serta pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap relevan dengan kebutuhan untuk mengenal PERURI, anak Perusahaan serta proyek-proyeknya lebih jauh.

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat anggota Direksi baru, sehingga tidak ada penyelenggaraan program pengenalan perusahaan bagi Direksi baru.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Dalam rangka memperkuat kapasitas individu guna menghadapi dinamika dan tingkat persaingan usaha yang semakin meningkat, PERURI merancang dan menyelenggarakan program pengembangan kompetensi bagi Direksi. Program ini ditujukan untuk memperkaya wawasan strategis serta memperbarui perspektif manajerial, sekaligus membuka peluang penguatan jejaring profesional yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi. Melalui inisiatif tersebut, Perusahaan menargetkan terwujudnya kinerja korporasi yang unggul dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan, termasuk pelatihan, *workshop*, seminar, dan sosialisasi, dengan rincian sebagai berikut:

- d. Information regarding the duties and responsibilities of the Supervisory Board and the Board of Directors, as well as prohibited matters; and
- e. Orientation activities that may take the form of presentations, meetings, visits to PERURI's business units and projects, as well as reviews of documents or other programs deemed relevant to gaining a deeper understanding of PERURI, its subsidiaries, and its projects.

Throughout 2025, there were no newly appointed members of the Board of Directors. Accordingly, no Company Orientation Program for newly appointed Directors was conducted during the year.

Training and Competency Development of the Board of Directors

In order to strengthen individual capabilities in responding to increasingly dynamic business conditions and a higher level of competition, PERURI designs and implements competency development programs for members of the Board of Directors. These programs are intended to enrich strategic insights and update managerial perspectives, while also creating opportunities to strengthen professional networks that can optimize the utilization of organizational resources. Through these initiatives, the Company aims to achieve superior and sustainable corporate performance.

Throughout 2025, the Board of Directors participated in various development activities, including training programs, workshops, seminars, and socialization programs, with details as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Pelaksanaan Date	Tempat Penyelenggaraan Venue	Penyelenggara Organizer
Dwina Septiani Wijaya	Forum	<i>Women Leadership Series #3</i>	21 April 2025 April 21, 2025	Grha Pertamina	SRIKANDI BUMN
	Workshop	Digital Resilience Summit 2025: Integrating Cybersecurity, AI, Quantum Technology & Data Privacy for National Resilience	10 September 2025 September 10, 2025	INA Digital Hall	PERURI - Xynesys
	Workshop	Russian International Creative Seasons (RICS) Conference	8-9 Oktober 2025 October 8–9, 2025	Saint Petersburg, Rusia	Federasi Rusia
	Workshop	<i>In-House Training</i> Strategi dan Pemodelan Risiko In-House Training on Risk Strategy and Modeling	21 November 2025 November 21, 2025	Jakarta	PERURI
	Workshop	<i>Risk Beyond 2025</i>	2-5 Desember 2025 December 2–5, 2025	Bali	PERURI
	Workshop	<i>Executive Briefing "Strengthening Governance Through Effective Internal Control to Enhance Business Resilience"</i>	9 Desember 2025 December 9, 2025	Jakarta	PERURI



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Pelaksanaan Date	Tempat Penyelenggaraan Venue	Penyelenggara Organizer
Saiful Bahri	Workshop	<i>Factory Acceptance Test</i> Mesin Cetak Paspor dan <i>Benchmarking</i> Teknologi Terbaru pada Mesin Cetak Uang Factory Acceptance Test of Passport Printing Machines and Benchmarking of the Latest Banknote Printing Technologies	19–22 Mei 2025 May 19–22, 2025	Jepang Japan	Komori
	Workshop	Bootcamp Satu Data PERURI <i>Center of Excellence (CoE) Business Intelligence Analyst</i> PERURI One Data Center of Excellence (CoE) Business Intelligence Analyst Bootcamp	23 Mei 2025 May 23, 2025	Karawang	PERURI
	Workshop	<i>Benchmarking</i> dan <i>Factory Visit</i> SICPA SA, Koenig & Bauer dan IDEMIA Benchmarking and Factory Visits to SICPA SA, Koenig & Bauer, and IDEMIA	9–13 Juni 2025 June 9–13, 2025	Swiss & Belanda Switzerland & the Netherlands	SICPA SA, Koenig & Bauer dan IDEMIA SICPA SA, Koenig & Bauer and IDEMIA
	Workshop	<i>Benchmarking</i> dan <i>Factory Visit</i> De La Rue Benchmarking and Factory Visit to De La Rue	11–15 Agustus 2025 August 11–15, 2025	UK	De La Rue
	Workshop	<i>Digital Resilience Summit</i> 2025	10 September 2025 September 10, 2025	Jakarta	PERURI
	Workshop	<i>Bootcamp</i> PERURI <i>Own Voice</i> 2025	17 Oktober 2025 October 17, 2025	Jakarta	PERURI
	Workshop	<i>Public Hearing</i> Penyusunan Visi dan Misi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Tahun 2025 – 2029 Public Hearing on the Formulation of the Vision and Mission of the Faculty of Economics and Business for 2025–2029	30 Oktober 2025 October 30, 2025	Online (Daring) Online	Universitas Diponegoro
	Training	<i>Kick-Off Meeting</i> Pemodelan Risiko serta <i>In-House Training</i> Strategi dan Pemodelan Risiko Kick-Off Meeting on Risk Modeling and In-House Training on Risk Strategy and Modeling	21 November 2025 November 21, 2025	Jakarta	PERURI
	Workshop	<i>Risk Beyond</i> 2025	2–5 Desember 2025 December 2–5, 2025	Bali	PERURI
Gandung Anggoro Murdani	Workshop	<i>Executive Briefing “Strengthening Governance Through Effective Internal Control to Enhance Business Resilience”</i>	9 Desember 2025 December 9, 2025	Jakarta	PERURI
	Workshop	<i>Digital Resilience Summit</i> 2025	10 September 2025 September 10, 2025	Jakarta	PERURI
	Workshop	<i>Empowering Indonesia’s Corporate Leaders for Global Sustainability Action</i>	24 September 2025 September 24, 2025	Jakarta	NEYEN
	Workshop	<i>Bootcamp</i> PERURI <i>Own Voice</i> 2025	17 Oktober 2025 October 17, 2025	Jakarta	PERURI

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Pelaksanaan Date	Tempat Penyelenggaraan Venue	Penyelenggara Organizer
Farah Fitria Rahmayanti	Workshop	<i>In-House Training Strategi dan Pemodelan Risiko</i> In-House Training on Risk Strategy and Modeling	21 November 2025 November 21, 2025	Jakarta	PERURI
	Forum	Harmonisasi Penerapan Sistem Sertifikasi Kerja Nasional di Lingkungan BUMN Harmonization of the Implementation of the National Professional Certification System within SOEs	26 November 2025 November 26, 2025	Jakarta	FKLSP BUMN
	Workshop	<i>Executive Briefing "Strengthening Governance Through Effective Internal Control to Enhance Business Resilience"</i>	9 Desember 2025 December 9, 2025	Jakarta	PERURI
	Training	<i>Strategic Leadership & Visioning: Crafting and communicating organizational vision, aligning teams toward long-term goals</i>	29 - 30 Desember 2025 December 29–30, 2025	Online (Zoom)	PT Kami Klisque Indonesia
	Workshop	<i>Digital Resilience Summit 2025</i>	10 September 2025 September 10, 2025	Jakarta	PERURI
	Workshop	<i>Indonesia's AI Moment: Seize the Opportunities</i>	23 April 2025 April 23, 2025	Westin Hotel	Ecosystem
	Workshop	<i>Indonesia Digital Forum 2025</i>	15 Mei 2025 May 15, 2025	JW Marriot Hotel Jakarta	Indonesia Digital Forum
	Workshop	<i>Quarterly Meeting DPO Telkom Group TW-2 2025</i> Quarterly Meeting of Telkom Group DPO Q2 2025	25 Juli 2025 July 25, 2025	The Telkom Hub	Telkom Indonesia
	Workshop	<i>Digital Resilience Summit 2025: Integrating Cybersecurity, AI, Quantum Technology & Data Privacy for National Resilience</i>	10 September 2025 September 10, 2025	INA Digital Hall	PERURI - Xynesys
	Workshop	<i>AI Innovation Summit 2025</i>	16 September 2025 September 16, 2025	JS Luwansa Hotel	KORIKA
	Workshop	<i>Russian International Creative Seasons (RICS) Conference</i>	8-9 Oktober 2025 October 8–9, 2025	Saint Petersburg, Rusia	Federasi Rusia
	Workshop	<i>Bali Blockchain Summit 2025</i>	30 Oktober 2025 October 30, 2025	Bali	Bali Blockchain Center
	Workshop	<i>In-House Training Strategi dan Pemodelan Risiko</i> In-House Training on Risk Strategy and Modeling	21 November 2025 November 21, 2025	Jakarta	PERURI
	Workshop	<i>Executive Briefing "Strengthening Governance Through Effective Internal Control to Enhance Business Resilience"</i>	9 Desember 2025 December 9, 2025	Jakarta	PERURI
	Training	<i>The Complete Networking Fundamentals Course. Your CCNA Start</i>	8 Desember 2025 December 8, 2025	Online	Udemy



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Pelaksanaan Date	Tempat Penyelenggaraan Venue	Penyelenggara Organizer
Fajar Rizki	Pre Program	<i>Chief Risk Officer (CRO) School</i>	2 - 13 Mei 2025 May 2–13, 2025	Online (Zoom)	BP BUMN
	Offline Class		14 - 16 Mei 2025 May 14–16, 2025	Bali Beach Hotel	
	Post Program (Mentoring)		17, 22 Juni 2025 June 17 and 22, 2025	Kantor BPKP BPKP Office	
	Workshop	<i>In-House Training Strategi dan Pemodelan Risiko In-House Training on Risk Strategy and Modeling</i>		Jakarta	
	Workshop	<i>Executive Briefing "Strengthening Governance Through Effective Internal Control to Enhance Business Resilience"</i>		Jakarta	

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2025, Direksi PERURI tidak memiliki komite di bawah Direksi. Dengan demikian, tidak terdapat pelaksanaan penilaian kinerja terhadap komite di bawah Direksi pada tahun buku 2025.

Pelaksanaan fungsi pengelolaan, koordinasi, kepatuhan, administrasi korporasi, serta pengendalian internal di bawah Direksi tetap dijalankan sesuai struktur organisasi dan ketentuan internal yang berlaku, dengan dukungan Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Directors

As of the end of 2025, the Board of Directors of PERURI does not have any committees under the Board of Directors. Accordingly, no performance assessment of committees under the Board of Directors was conducted during fiscal year 2025.

The execution of management, coordination, compliance, corporate administration, and internal control functions under the Board of Directors continued to be carried out in accordance with the applicable organizational structure and internal provisions, with the support of the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit (SPI) in line with their respective duties and responsibilities.

Transparansi Informasi tentang Dewan Pengawas dan Direksi

Transparency of Information on the Supervisory Board and Board of Directors

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi

Rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas yang dijabat oleh pejabat Pemerintah dan Kementerian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemilik akhir Perusahaan, dalam rangka memastikan pengelolaan PERURI oleh Direksi berjalan sesuai dengan ketentuan. Seluruh rangkap jabatan tersebut telah dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tetap selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Adapun informasi mengenai rangkap jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan disajikan pada tabel berikut:

Disclosure of Concurrent Positions Held by Members of the Supervisory Board and Board of Directors

Concurrent positions held by members of the Supervisory Board who also serve as officials of the Government and Ministries of the Republic of Indonesia form part of the oversight mechanism exercised by the Government of the Republic of Indonesia as the ultimate owner of the Company, in order to ensure that PERURI is managed by the Board of Directors in accordance with the prevailing provisions. All such concurrent positions have been carried out in compliance with the applicable laws and regulations and therefore remain consistent with the principles of Good Corporate Governance.

Information regarding the concurrent positions held by members of the Company's Supervisory Board and Board of Directors is presented in the following table:

Dewan Pengawas dan Direksi yang Memiliki Rangkap Jabatan Members of the Supervisory Board and Board of Directors Holding Concurrent Positions	Jabatan di PERURI Position at PERURI	Rangkap Jabatan pada Perusahaan/Institusi Lain Concurrent Position at Other Companies/Institutions
Dewan Pengawas Supervisory Board		
Marlison Hakim		Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia dengan jabatan Asisten Gubernur periode tahun 2020-2025 Head of the Currency Management Department of Bank Indonesia with the position of Assistant Governor for the 2020–2025 period
Sutanto		Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara sejak Februari 2022 Special Staff to the Head of the State Intelligence Agency since February 2022
Djanurindro Wibowo		› Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten › Keberatan Banding dan Peraturan - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak Maret 2026. › Head of the Regional Office of the Directorate General of State Assets for Banten Appeals, Objections and Regulations – Directorate General of Customs and Excise since March 2026
Nanik Murwati		Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak 2022 Deputy for Institutional Affairs and Administrative Reform, Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, since 2022
Direksi Board of Directors		
Dwina Septiani Wijaya		Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan yang mengandung benturan kepentingan di Perusahaan maupun instansi lainnya None of the members of the Board of Directors hold concurrent positions that involve a conflict of interest within the Company or at any other organization.
Saiful Bahri		
Gandung Anggoro Murdani		
Fajar Rizki		
Farah Fitria Rahmayanti		



Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas dan Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2025, seluruh saham PERURI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai kepemilikan saham PERURI oleh Dewan Pengawas dan/atau keluarganya, maupun oleh Direksi dan/atau keluarganya.

Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan pengelolaan potensi benturan kepentingan, PERURI mengungkapkan informasi mengenai kepemilikan saham oleh anggota Dewan Pengawas dan Direksi, baik pada Perusahaan maupun pada entitas lain sebagai berikut:

Nama Name	Saham PERURI PERURI Shares		Saham Perusahaan Lain (>5%) Shares in Other Companies (>5%)	
	Nilai Value	%	Nilai Value	%
Dewan Pengawas Supervisory Board				
Marlison Hakim				
Sutanto		Nihil Nil	Nihil Nil	
Djanurindro Wibowo				
Nanik Murwati				
Direksi Board of Directors				
Dwina Septiani Wijaya				
Saiful Bahri		Nihil Nil	Nihil Nil	
Gandung Anggoro Murdani				
Fajar Rizki				
Farah Fitria Rahmayanti				

Policy on Disclosure of Shareholdings by Members of the Supervisory Board and the Board of Directors

Until the end of 2025, all shares of PERURI are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, there is no information regarding the ownership of PERURI shares by the Supervisory Board and/or their families, or by the Board of Directors and/or their families.

As a manifestation of its commitment to transparency and the management of potential conflicts of interest, PERURI discloses information regarding share ownership by members of the Supervisory Board and Board of Directors, both in the Company and in other entities, as follows:

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi

Performance Assessment of the Supervisory Board and Board of Directors

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilaksanakan setiap tahun buku sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja tahunan, sesuai mandat Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia. Penilaian didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator/KPI*) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Pengawas sebagai bagian dari RKAP, dan mencakup penilaian secara kolegal maupun individual.

Penilaian dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan target KPI Dewan Pengawas pada awal tahun yang dituangkan dalam RKA Dewan Pengawas, serta penetapan pembagian tugas pengawasan masing-masing anggota melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas No. SK-07/DP/IX/2025;
2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun buku sesuai pembagian tugas yang ditetapkan;
3. Pengukuran realisasi capaian terhadap target KPI, baik kolegal maupun individual, yang dilakukan secara berkala;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban capaian KPI Dewan Pengawas kepada Pemilik Modal; dan
5. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, baik secara kolegal maupun individual, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan melalui mekanisme penilaian individual yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Pengawas sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun buku berjalan. Adapun penilaian atas capaian kinerja (KPI) Dewan Pengawas disampaikan kepada BP BUMN dalam bentuk laporan penugasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria yang Digunakan

Penilaian kinerja Dewan Pengawas tahun buku 2025 didasarkan pada indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator/KPI*) yang terbagi atas tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal
2. Aspek Dewan Pengawas dengan Direksi
3. Aspek Internal Dewan Pengawas

Performance Assessment of the Supervisory Board

Assessment Procedure

The performance assessment of the Supervisory Board is conducted annually as part of the accountability mechanism and annual performance evaluation, in accordance with the mandate of Government Regulation No. 6 of 2019 concerning Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia. The assessment is based on the achievement of Key Performance Indicators (KPI) set out in the Supervisory Board's Work Plan and Budget (RKA) as part of the RKAP, and covers both collegial and individual assessments.

The assessment is carried out through the following stages:

1. Establishment of the Supervisory Board's KPI targets at the beginning of the year as set out in the Supervisory Board's RKA, as well as the determination of the supervisory duties of each member through Supervisory Board Decree No. SK-07/DP/IX/2025;
2. Performance of supervisory duties and the provision of advice to the Board of Directors throughout the fiscal year in accordance with the assigned duties;
3. Measurement of the realization of KPI achievements against the established targets, both collegially and individually, on a periodic basis;
4. Reporting and accountability for the achievement of the Supervisory Board's KPI to the Capital Owner; and
5. Evaluation of the effectiveness of the performance of the Supervisory Board's duties, both collegially and individually, as a basis for continuous improvement.

Assessing Parties

The performance assessment of the Supervisory Board is conducted through an individual assessment mechanism signed by each member of the Supervisory Board as a form of evaluation of the performance of his/her duties and responsibilities during the fiscal year. The assessment of the Supervisory Board's performance achievement (KPI) is submitted to BP BUMN in the form of an assignment report in accordance with the prevailing provisions.

Criteria Applied

The performance assessment of the Supervisory Board for fiscal year 2025 is based on Key Performance Indicators (KPI), which are divided into three aspects, namely:

1. Supervisory Board and Capital Owner Aspect;
2. Supervisory Board and Board of Directors Aspect; and
3. Internal Supervisory Board Aspect.



Masing-masing aspek dijabarkan ke dalam parameter yang terukur:

- › Aspek Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal mencakup pemberian tanggapan atas RKAP dan RKA TJSL, Laporan Kinerja Tahunan Perusahaan (*audited*), serta Laporan Kinerja Triwulanan Perusahaan; evaluasi dan pengusulan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP); penyampaian Laporan Pengawasan Dewan Pengawas; pemetaan *talent pool* (*track record*) BOD-1; serta pengusulan penilaian tingkat kesehatan Perusahaan.
- › Aspek Dewan Pengawas dengan Direksi mencakup pemberian persetujuan dan rekomendasi atas usulan Direksi yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas; pelaksanaan rapat koordinasi dengan Direksi beserta penyelesaian risalahnya; serta pemantauan tindak lanjut temuan SPI dan auditor eksternal.
- › Aspek Internal Dewan Pengawas mencakup pelaksanaan rapat Dewan Pengawas (jumlah, kehadiran, dan penyelesaian risalah); peningkatan kompetensi anggota Dewan Pengawas; serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas.

Hasil Penilaian

Hasil evaluasi kinerja Dewan Pengawas dilaksanakan dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Kinerja (KPI) Dewan Pengawas Perusahaan, sebagai berikut:

Each aspect is further elaborated into measurable parameters:

- › The Supervisory Board and Capital Owner Aspect includes providing responses to the RKAP and TJSL Work Plan and Budget (RKA), the Company's Annual Performance Report (*audited*), and the Company's Quarterly Performance Reports; evaluating and proposing the appointment of a Public Accounting Firm (KAP); submitting the Supervisory Board's Supervisory Report; mapping the BOD-1 talent pool (*track record*); and proposing the Company's health level assessment.
- › The Supervisory Board and Board of Directors Aspect includes providing approvals and recommendations on proposals submitted by the Board of Directors that fall under the authority of the Supervisory Board; conducting coordination meetings with the Board of Directors and completing the minutes thereof; and monitoring the follow-up of findings from the Internal Audit Unit (SPI) and external auditors.
- › The Internal Supervisory Board Aspect includes the implementation of Supervisory Board meetings (number of meetings, attendance, and completion of minutes); competency development of Supervisory Board members; and the preparation of the Supervisory Board's Work Plan and Budget.

Assessment Results

The performance evaluation results of the Supervisory Board were determined with reference to the Company's Supervisory Board Key Performance Indicators (KPIs), as follows:

No.	Aspek Paramater Parameter Aspect	Periode Period	Satuan Unit	Ukuran/ Frekuensi RKA 2025 Measure/ Frequency (2025 Budget)	Bobot 2025 Weight	Realisasi 2025 Realization	Realisasi Bobot 2025 Weight Realization
I. ASPEK DEWAN PENGAWAS DENGAN PEMILIK MODAL SUPERVISORY BOARD AND CAPITAL OWNER ASPECT							
1	Memberikan tanggapan kepada Pemilik Modal terkait dengan: Providing responses to the Capital Owner regarding:						
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TJSL Company Work Plan and Budget (RKAP) and TJSL Work Plan and Budget (RKA TJSL)	Tahunan Annual	Surat Letter	1	4	1	4
	b. Kinerja Tahunan Perusahaan (Audited) Audited Annual Company Performance Report	Tahunan Annual	Surat Letter	1	4	1	4
	c. Kinerja Triwulanan Perusahaan Quarterly Company Performance Report	Triwulan Quarterly	Surat Letter	3	3	3	3

No.	Aspek Parameter Parameter Aspect	Periode Period	Satuan Unit	Ukuran/ Frekuensi RKA 2025 Measure/ Frequency (2025 Budget)	Bobot 2025 Weight	Realisasi 2025 Realization	Realisasi Bobot 2025 Weight Realization
2	Evaluasi KAP dan Pengusulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan AUP kepada Pemilik Modal Evaluation of the Public Accounting Firm (KAP) and proposal for the appointment of a Public Accounting Firm and AUP to the Capital Owner	Tahunan Annual	Surat Letter	Jumlah Usulan Number of Proposals	3	4	3
3	Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Supervisory Board Supervisory Report	Triwulan Quarterly	Kali Times	4	4	4	4
4	Pemetaan talent pool (track record) BOD-1 (berdasarkan integritas dan performance) Talent pool mapping (track record) of BOD-1 (based on integrity and performance)	Setahun Annual	Surat Letter	1	4	1	4
5	Penunjukan Jasa Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Appointment of a Company Health Assessment Service Provider	Setahun Annual	Surat Letter	1	3		3
Sub Total I Subtotal I					25		25
II. ASPEK DEWAN PENGAWAS DENGAN DIREKSI SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS ASPECT							
6	Memberikan persetujuan/rekomendasi atas usulan Direksi yang merupakan wewenang Dewan Pengawas Providing approval/recommendations on proposals submitted by the Board of Directors that fall under the authority of the Supervisory Board	Tahunan Annual	Surat Letter	Jumlah Usulan Number of Proposals	10	20	10
7	Rapat Koordinasi: Coordination Meetings:						
	Jumlah rapat Number of meetings	Bulanan Monthly	Kali Times	12	12	12	12
	Kehadiran rapat Meeting attendance	Bulanan Monthly	Kali Times	12	12	12	12
	Penyelesaian risalah rapat Completion of meeting minutes	Bulanan Monthly	Dokumen Document	12	12	12	12
8	Monitoring dan tindaklanjut temuan SPI dan eksternal auditor Monitoring and follow-up of findings from the Internal Audit Unit (SPI) and external auditors	Tahunan Annual	Surat Letter	2	4	2	4
Sub Total II Subtotal II					50		50



No.	Aspek Paramater Parameter Aspect	Periode Period	Satuan Unit	Ukuran/ Frekuensi RKA 2025 Measure/ Frequency (2025 Budget)	Bobot 2025 2025 Weight	Realisasi 2025 2025 Realization	Realisasi Bobot 2025 2025 Weight Realization
III. ASPEK INTERNAL DEWAN PENGAWAS INTERNAL SUPERVISORY BOARD ASPECT							
9	Rapat Dewan Pengawas Supervisory Board Meetings						
	Jumlah Rapat Number of meetings	Bulanan Monthly	Kali Times	12	4	6	4
	Kehadiran Rapat Meeting attendance	Bulanan Monthly	Kali Times	12	4	6	4
	Penyelesaian Risalah Rapat Completion of meeting minutes	Bulanan Monthly	Dokumen Document	12	4	6	4
10	Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas melalui seminar, workshop, pelatihan dan lain-lain Competency enhancement of Supervisory Board members through seminars, workshops, training programs, and other development activities	Tahunan Annual	%	100	7	127	8.89
11	Rencana Kerja dan Anggaran Dewas Tahun 2026 Supervisory Board Work Plan and Budget for 2026	Tahunan Annual	Kali Times	1	6	1	6
Sub Total III Subtotal III					25		25
Grand Total Grand Total					100		101,89

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan dan Pihak yang Melakukan Penilaian

KPI Direksi disusun sesuai dengan strategi yang ditetapkan perusahaan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dengan mempertimbangkan Aspirasi Pemilik Modal dari Badan Pengaturan BUMN. Evaluasi dan pengawasan dilakukan secara berkala setiap bulan untuk memastikan pencapaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolektif direviu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan setelah tahun buku berakhir sebagai bagian dari proses audit tahunan.

Kriteria yang Digunakan

Kinerja Direksi dinilai untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengurusan Perusahaan berjalan secara efektif, profesional, dan selaras dengan target perusahaan. Penyusunan KPI Direksi mengacu pada lima perspektif sebagai berikut:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
2. Inovasi Model Bisnis
3. Kepemimpinan Teknologi
4. Peningkatan Investasi
5. Pengembangan Talenta

Performance Assessment of the Board of Directors

Assessment Implementation Procedure and Assessing Party

The Board of Directors' KPIs are formulated in accordance with the strategies set forth by the company in its Long-Term Corporate Plan (RJPP), taking into account the aspirations of the shareholders as expressed by the State-Owned Enterprises Regulatory Agency. Evaluations and oversight are conducted on a monthly basis to ensure that performance aligns with established targets. The calculation of the Board of Directors' KPI performance is collectively reviewed by the Public Accounting Firm (KAP) that audits the company's financial statements after the fiscal year ends as part of the annual audit process.

Criteria Used

The performance of the Board of Directors is assessed to ensure that the management function of the Company is carried out effectively, professionally, and in alignment with corporate objectives. The Board of Directors' KPIs are formulated based on the following five perspectives:

1. Economic and Social Value Creation for Indonesia
2. Business Model Innovation
3. Technology Leadership
4. Investment Enhancement
5. Talent Development

Pencapaian Kinerja Direksi

Pencapaian KPI PERURI Tahun 2025 tercapai melebihi target yaitu sebesar 105,50%. Hal ini dikontribusi oleh pencapaian indikator finansial (ROIC ≥ WACC dan CFO) dan juga indikator non finansial yang melebihi target akhir tahunnya antara lain yaitu Penggunaan Produk Dalam Negeri, Tingkat Efisiensi Proses Produksi, Tingkat Daur Ulang Limbah, Solusi untuk K/L Terkait SPBE, Solusi Digital Non SPBE Prioritas, Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI), Realisasi Nilai Investasi, *Digital Talent* BUMN, *Talent Diversity* dan *Human Capital Management Maturity Level* (HCMML). Pencapaian ini mencerminkan dedikasi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh unit kerja di PERURI dalam menjalankan berbagai inisiatif sepanjang tahun 2025.

Performance Achievements of the Board of Directors

PERURI's 2025 KPI targets were exceeded, reaching 105.50%. This was driven by the achievement of financial indicators (ROIC ≥ WACC and CFO) as well as non-financial indicators that exceeded their year-end targets, including the Use of Domestic Products, Production Process Efficiency Rate, Waste Recycling Rate, Solutions for Ministries/Agencies Related to SPBE, Priority Non-SPBE Digital Solutions, the Information Technology Strategic Plan (RSTI), Investment Value Realization, SOE Digital Talent, Talent Diversity, and Human Capital Management Maturity Level (HCMML). These achievements reflect the dedication and strong collaboration of all work units at PERURI in implementing various initiatives throughout 2025.

Hasil Penilaian Berdasarkan KPI Direksi

Board of Directors Assessment based on KPI

Hasil Laporan Evaluasi Kinerja Berdasarkan KPI Direksi Secara Kolegial

Performance Evaluation Report Based on the Board of Directors' Collegial KPI

No.	Perspektif/Parameter Perspective/Parameter	Satuan Unit	Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Nilai 2025 2025 Score
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia							
A. Economic and Social Value for Indonesia							
Finansial Financial							
1	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	715	636	Maximize	15,00	13,36
2	ROIC ≥ WACC	%	-2,90	-0,23	Maximize	10,00	11,00
3	Cash Flow from Operation	Rp Miliar Rp Billion	496	772	Maximize	7,00	7,70
Operasional Operational							
4	Tingkat Efisiensi Proses Produksi Production Process Efficiency Rate	%	100	100,46	Maximize	8,00	8,04
5	Penggunaan Produk Dalam Negeri Domestic Product Utilization	%	60	68,24	Maximize	7,0	7,70
Sosial Social							
6	Tingkat Daur Ulang Limbah Waste Recycling Rate	%	58	65,96	Maximize	7,00	7,70
B. Inovasi Model Bisnis							
B. Business Model Innovation							
7	Solusi untuk K/L Terkait SPBE Solutions for K/L Related to SPBE	Jumlah Number	2	3	Maximize	6,00	6,60
8	Solusi Digital Non SPBE Prioritas Non-Priority SPBE Digital Solutions	Jumlah Number	2	3	Maximize	6,00	6,60



No.	Perspektif/Parameter Perspective/Parameter	Satuan Unit	Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Nilai 2025 2025 Score
C. Kepemimpinan Teknologi C. Technology Leadership							
9	Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Information Technology Strategic Plan (RSTI)	Waktu (Bulan) Time (Month)	Desember 2025 December 2025	Mei 2025 May 2025	Minimize	5,00	5,50
10	Digital Talent BUMN SOE Digital Talent	%	20	26,49	Maximize	4,00	4,40
11	Roadmap Bisnis Digital Digital Business Roadmap	Waktu (Bulan) Time (Month)	Desember 2025 December 2025	Desember 2025 December 2025	Minimize	6,00	6,00
D. Peningkatan Investasi D. Investment Enhancement							
12	Realisasi Nilai Investasi Investment Realization Value	%	55	74,53	Maximize	7,00	7,70
E. Pengembangan Talenta E. Talent Development							
13	Talent Diversity	%	16,25	30,00	Maximize	6,00	6,60
14	Human Capital Management Maturity Level	Skor Score	2,6	2,9	Maximize	6,00	6,60
Total							105,50

Hasil Laporan Evaluasi Kinerja Berdasarkan KPI Direksi Secara Individual

Realisasi capaian KPI Direksi Tahun 2025 sebagai berikut:

Individual Board of Directors KPI Assessment Results

The realization of the Board of Directors' KPI achievements for 2025 is as follows:

No	Capaian KPI KPI Achievement	Target (%) Target (%)	Realisasi (%) Realization (%)
1	Capaian KPI Perusahaan (Kolegial) Company KPI Achievement (Collegial)	100,00	105,50
2	Direktur Currency and Security Solution Director of Currency and Security Solution	100,00	91,39
3	Direktur Digital Business Director of Digital Business	100,00	105,93
4	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	100,00	103,20
5	Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Director of Human Resources, Technology and Information	100,00	103,96

Kebijakan Nominasi Dewan Pengawas dan Direksi

Supervisory Board and Board of Directors Nomination Policy

Kebijakan dan Prosedur Nominasi Dewan Pengawas

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas PERURI merupakan kewenangan Kepala BP BUMN selaku Pemilik Modal dan dilaksanakan sesuai ketentuan PP No. 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Proses nominasi anggota Dewan Pengawas mencakup tahapan penjangkaran bakal calon, penilaian, usulan pengangkatan, dan penetapan oleh Pemilik Modal.

Proses nominasi tersebut memperhatikan kebutuhan komposisi Dewan Pengawas, keberagaman kompetensi, independensi, kecukupan waktu, serta potensi benturan kepentingan agar fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dapat berjalan efektif. Dengan pendekatan tersebut, nominasi anggota Dewan Pengawas tidak hanya diarahkan untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga untuk memastikan tersedianya organ pengawasan yang memiliki kapasitas, objektivitas, dan pemahaman memadai terhadap mandat strategis PERURI.

Penjangkaran bakal calon anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Pemilik Modal dari berbagai sumber, dengan seluruh bakal calon diadministrasikan oleh Deputi yang berwenang. Setiap bakal calon wajib memenuhi syarat materiil, syarat formal, dan syarat lain sesuai ketentuan yang berlaku. Syarat materiil meliputi integritas, dedikasi, pemahaman atas masalah manajemen perusahaan, pengetahuan yang memadai di bidang usaha PERURI, serta ketersediaan waktu yang cukup. Syarat formal dan syarat lain mencakup, antara lain, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara, tidak sedang menjabat pada posisi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian terhadap pemenuhan syarat materiil dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pemilik Modal melalui penelaahan *curriculum vitae* dan dokumen pendukung, pernyataan tertulis mengenai integritas, dan/atau wawancara. Hasil penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria "Disarankan" atau "Tidak Disarankan". Calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan memperoleh kriteria "Disarankan" selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan

Supervisory Board Nomination Policy and Procedure

The appointment of members of PERURI Supervisory Board is under the authority of the Head of the BUMN Agency as the Capital Owner and is carried out in accordance with the provisions of Government Regulation (PP) No. 6 of 2019 concerning Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, and PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The nomination process for members of the Supervisory Board includes the stages of candidate screening, assessment, recommendation for appointment, and appointment determination by the Capital Owner.

The nomination process takes into account the required composition of the Supervisory Board, diversity of competencies, independence, sufficient availability of time, and potential conflicts of interest to ensure that the supervisory and advisory functions provided to the Board of Directors can be carried out effectively. Through this approach, the nomination of Supervisory Board members is not only aimed at fulfilling administrative requirements but also at ensuring the availability of a supervisory organ with adequate capacity, objectivity, and understanding of PERURI's strategic mandate.

The screening of prospective Supervisory Board members is conducted by the Capital Owner from various sources, with all prospective candidates administered by the authorized Deputy. Each prospective candidate must fulfill material requirements, formal requirements, and other requirements in accordance with the applicable provisions. The material requirements include integrity, dedication, understanding of corporate management matters, adequate knowledge of PERURI's business activities, and sufficient availability of time. The formal and other requirements include, among others, never having been declared bankrupt, never having served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners/Supervisory Board who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt, never having been convicted of a criminal act causing losses to state finances, not currently holding a position that may potentially result in a conflict of interest, and fulfilling tax obligations in accordance with the applicable provisions.

The assessment of the fulfillment of material requirements is conducted by a team appointed by the Capital Owner through a review of the curriculum vitae and supporting documents, written statements regarding integrity, and/or interviews. The assessment results are presented in the form of a qualitative narrative with the criteria of "Recommended" or "Not Recommended." Candidates who are declared to have fulfilled the requirements and obtained



menjadi anggota Dewan Pengawas melalui Keputusan Pemilik Modal.



Sebelum ditetapkan, calon anggota Dewan Pengawas yang terpilih wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Pemilik Modal. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya PERURI dan Pemilik Modal untuk memastikan bahwa proses nominasi Dewan Pengawas dilaksanakan secara objektif, terdokumentasi, dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.



Kebijakan dan Prosedur Nominasi Direksi

Pengangkatan anggota Direksi PERURI merupakan kewenangan Kepala BP BUMN selaku Pemilik Modal dan dilaksanakan berdasarkan PP No. 6 Tahun 2019, PER-2/MBU/03/2023, serta PER-3/MBU/03/2023. Proses nominasi Direksi menerapkan pendekatan *talent management* yang terstruktur melalui mekanisme Manajemen Talenta dan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

Mekanisme tersebut diarahkan untuk memastikan tersedianya kandidat Direksi yang memiliki kompetensi, rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, pemahaman terhadap mandat strategis PERURI, serta kemampuan menjalankan pengurusan Perusahaan secara profesional dan berkelanjutan. Proses nominasi juga memperhatikan kebutuhan organisasi, kesinambungan kepemimpinan, penguatan tata kelola, serta kesiapan PERURI dalam menjalankan penugasan Pemerintah dan pengembangan usaha sesuai arah strategis Perusahaan.

the "Recommended" criteria are subsequently proposed to be appointed as members of the Supervisory Board through a Decree of the Capital Owner.

Prior to appointment, the selected Supervisory Board candidates are required to sign a statement of commitment to perform their duties properly and willingness to be dismissed at any time based on the consideration of the Capital Owner. This mechanism forms part of the efforts of PERURI and the Capital Owner to ensure that the Supervisory Board nomination process is carried out objectively, documented, and aligned with the principles of good corporate governance.

Board of Directors Nomination Policy and Procedure

The appointment of members of the PERURI Board of Directors is under the authority of the Head of the BUMN Agency as the Capital Owner and is carried out based on Government Regulation (PP) No. 6 of 2019, PER-2/MBU/03/2023, and PER-3/MBU/03/2023. The Board of Directors' nomination process applies a structured talent management approach through the Talent Management mechanism and Fit and Proper Test (UKK).

The mechanism is aimed at ensuring the availability of Board of Directors candidates who possess the required competencies, track record, integrity, leadership capacity, understanding of PERURI's strategic mandate, and ability to manage the Company in a professional and sustainable manner. The nomination process also takes into account organizational needs, leadership continuity, strengthening of governance, and PERURI's readiness in carrying out Government assignments and business development in line with the Company's strategic direction.



Penjaringan calon anggota Direksi bersumber dari Talenta BUMN, Talenta BP BUMN, dan Talenta eksternal. Talenta BUMN dapat berasal dari Direksi BUMN yang sedang menjabat maupun karyawan satu tingkat di bawah Direksi, sedangkan Talenta eksternal dapat dijangkau oleh Pemilik Modal melalui referensi pihak ketiga dan/atau *head hunter* apabila diperlukan. Dewan Pengawas melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, atau komite dengan nomenklatur lain yang memiliki fungsi sejenis, berperan dalam melakukan evaluasi dan kalibrasi atas daftar Talenta Terseleksi berdasarkan kinerja dan kapasitas, untuk selanjutnya menominasikan Talenta kepada Pemilik Modal.

Calon yang telah dinominasikan selanjutnya mengikuti UKK yang dilaksanakan oleh Komite Suksesi. UKK merupakan proses penilaian atas kompetensi, daftar prestasi, keahlian, dan kepribadian calon, yang dapat melibatkan lembaga profesional independen dalam pelaksanaan asesmen. Proses tersebut bertujuan memastikan bahwa calon anggota Direksi memiliki kelayakan, kapasitas, dan integritas yang memadai untuk menjalankan pengurusan PERURI sesuai maksud dan tujuan Perusahaan.

Calon yang dinyatakan lulus UKK wajib menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya. Penetapan anggota Direksi dilakukan melalui Keputusan Pemilik Modal, dan anggota Direksi mulai menjabat efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Dengan mekanisme tersebut, nominasi Direksi PERURI dilaksanakan secara berjenjang, berbasis kompetensi, terdokumentasi, dan selaras dengan kebutuhan strategis Perusahaan.

The selection of candidates for members of the Board of Directors is sourced from SOE Talent, BP BUMN Talent, and external talent. SOE Talent may consist of incumbent SOE Directors or employees one level below the Board of Directors, while external talent may be sourced by the Capital Owner through third-party references and/or headhunters when required. The Supervisory Board, through the Nomination and Remuneration Committee or another committee with equivalent functions, plays a role in evaluating and calibrating the Selected Talent list based on performance and capacity, and subsequently nominating the talents to the Capital Owner.

Nominated candidates subsequently undergo a Fit and Proper Test (UKK) conducted by the Succession Committee. The UKK is an assessment process of the candidates' competencies, achievements, expertise, and personality, which may involve independent professional institutions in conducting the assessment. This process aims to ensure that candidates for members of the Board of Directors possess the appropriate qualifications, capacity, and integrity to manage PERURI in accordance with the Company's purposes and objectives.

Candidates who pass the UKK are required to sign a Management Contract prior to the determination of their appointment. The appointment of members of the Board of Directors is determined through a Decree of the Capital Owner, and members of the Board of Directors effectively assume their positions as of the date stipulated in such decision. Through this mechanism, the nomination of the PERURI Board of Directors is carried out in a structured, competency-based, documented manner and aligned with the Company's strategic needs.



Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas

Remuneration Policy for the Board of Directors and Supervisory Board

Penetapan besaran remunerasi, termasuk gaji atau honorarium bagi Direksi dan Dewan Pengawas, dilakukan dengan mengacu pada besaran remunerasi Direktur Utama serta mempertimbangkan faktor jabatan masing-masing. Kebijakan ini berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Prosedur Pengusulan hingga Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Penetapan remunerasi Ketua Dewan Pengawas mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dengan besaran sebesar 45% dari remunerasi Direktur Utama. Sementara itu, remunerasi Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebesar 90% dari remunerasi Ketua Dewan Pengawas.

Prosedur untuk mengusulkan dan menetapkan remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas melakukan *review* atas kebijakan dan mekanisme penyusunan usulan remunerasi Direksi Perusahaan setiap tahunnya serta menguji kesesuaiannya dalam pelaksanaannya;
2. Dewan Pengawas melakukan pengkajian atas usulan remunerasi Direksi dalam penyusunan RKAP tahunan dengan pertimbangan, antara lain:
 - a. Ketentuan dalam peraturan Menteri BUMN mengenai Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
 - b. Prognosa pencapaian kinerja dan KPI tahun sebelumnya;
 - c. Kemampuan keuangan Perusahaan dan kewajarannya.
3. Dewan Pengawas selaku Komite Remunerasi menyampaikan surat Usulan Remunerasi kepada BP BUMN yang berisikan Usulan Remunerasi Gaji/Honorarium dan Tantiem tahun buku sebelumnya;
4. Setiap tahun Direksi dan Dewan Pengawas menerima jawaban dari BP BUMN berupa Surat Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas.

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Adapun komponen remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Remunerasi Dewan Pengawas
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas;
 - d. Tantiem/Insentif Kinerja;
 - e. LTI / Insentif Jangka Panjang;

The determination of remuneration, including salaries or honorarium for the Board of Directors and the Supervisory Board, is based on the remuneration of the President Director and takes into account the position factor of each respective member. This policy refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Procedure for the Proposal and Determination of Remuneration for the Supervisory Board and Board of Directors

The remuneration of the Chairperson of the Supervisory Board is determined in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023, at an amount equivalent to 45% of the remuneration of the President Director. Meanwhile, the remuneration of each Supervisory Board Member is set at 90% of the remuneration of the Chairperson of the Supervisory Board.

The procedure for proposing and determining remuneration is as follows:

1. The Supervisory Board reviews the policies and mechanisms for preparing the remuneration proposal for the Board of Directors on an annual basis and assesses the appropriateness of their implementation.
2. The Supervisory Board evaluates the proposed remuneration of the Board of Directors during the preparation of the annual RKAP, taking into consideration, among others:
 - a. The provisions of the Minister of State-Owned Enterprises regulations concerning the Guidelines for Determining the Compensation of Boards of Directors, Boards of Commissioners, and Supervisory Boards of State-Owned Enterprises;
 - b. The projected performance achievements and KPIs of the previous year;
 - c. The Company's financial capability and the reasonableness of the proposed remuneration.
3. The Supervisory Board acting as the Remuneration Committee, submits a remuneration proposal letter to the BP BUMN, containing proposals regarding salaries/honorarium and tantiem for the previous financial year;
4. Each year the Board of Directors and the Supervisory Board receive a response from the BP BUMN in the form of a Determination Letter on the Compensation of the Board of Directors and the Supervisory Board.

Remuneration Structure of the Supervisory Board and the Board of Directors

The remuneration components for the Supervisory Board and the Board of Directors consist of the following elements:

1. Supervisory Board Remuneration
 - a. Honorarium;
 - b. Allowances;
 - c. Facilities;
 - d. Tantiem/Performance Incentives;
 - e. LTI / Long-Term Incentives;

- f. Pajak atas honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban Perusahaan, sedangkan pajak atas tantiem/insentif kinerja bagi Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Pengawas.
2. Remunerasi Direksi
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas;
 - d. Tantiem/Insentif Kinerja;
 - e. LTI/Insentif Jangka Panjang;
 - f. Pajak atas gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Perusahaan, sedangkan pajak atas tantiem/insentif kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.
- f. Taxes on honorarium, allowances, and facilities for the Supervisory Board are borne by and charged to the Company, while taxes on tantiem/performance incentives for the Supervisory Board are borne by and charged to each member of the Supervisory Board.
2. Board of Directors Remuneration
 - a. Salary;
 - b. Allowances;
 - c. Facilities;
 - d. Tantiem/Performance Incentives;
 - e. LTI/Long-Term Incentives;
 - f. Taxes on salaries, allowances, and facilities for the Board of Directors are borne by and charged to the Company, while taxes on tantiem/performance incentives for the Board of Directors are borne by and charged to each member of the Board of Directors.

Jabatan Position	Faktor Jabatan tmt 2024 Position Factor Effective Since 2024	Gaji/ Honorarium Salary/ Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Asuransi Purnabakti Post-Employment Insurance Allowance	THR Religious Holiday Allowance	Tantiem Tantiem
		Faktor Jabatan x Gaji Direktur Utama Position Factor x President Director's Salary	20% x Honorarium 20% x Honorarium	27.500.000.-	5% x Gaji/ Honorarium 5% x Salary/ Honorarium	1x Gaji/ Honorarium 1x Salary/ Honorarium	Sesuai Penetapan As Determined
Ketua Dewan Pengawas Chairperson of the Supervisory Board	45%	✓	✓	-	✓	✓	✓
Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	40,50%	✓	✓	-	✓	✓	✓
Direktur Utama President Director	100%	✓	-	✓	✓	✓	✓
Direktur Lainnya Other Directors	85%	✓	-	✓	✓	✓	✓

Pengungkapan Indikator untuk Penetapan Remunerasi Direktur Utama dan Perhitungan Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Lainnya

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, besaran gaji Direktur Utama menjadi acuan utama dalam penentuan gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya. Penetapan remunerasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan Perusahaan serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Disclosure of Indicators for Determining the Remuneration of the President Director and the Calculation of Remuneration for the Supervisory Board and Other Members of the Board of Directors

In accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023, the salary of the President Director serves as the primary reference in determining the salary or honorarium of members of the Supervisory Board and other members of the Board of Directors. The determination of such remuneration is carried out by taking into consideration the Company's health level while remaining guided by the prevailing regulatory provisions.

Transparansi Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi 2025 Transparency of Supervisory Board and Board of Directors Remuneration in 2025

Uraian Description	Total (Rp)/tahun Total (Rp)/year
Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas Total Remuneration of the Supervisory Board	13.837.763.939
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration of the Board of Directors	17.684.347.476



Rapat Dewan Pengawas, Direksi, dan Rapat Gabungan

Supervisory Board Meetings, Board of Directors Meetings, and Joint Meetings

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Internal Dewan Pengawas

Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 12 (dua belas) kali dalam satu tahun atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas telah melaksanakan Rapat Internal Dewan Pengawas sebanyak 14 (empat belas) kali.

Policy and Implementation of the Internal Supervisory Board Meetings

The Supervisory Board holds meetings on a regular basis at least 12 (twelve) times in a year or at least 1 (one) time each month. Throughout 2025, the Supervisory Board held 14 (fourteen) Internal Supervisory Board Meetings.

Agenda Rapat Internal Dewan Pengawas Agenda of Internal Supervisory Board Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Tema Theme
1	31/01/2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan Desember 2024; 2. Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; 3. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Desember 2024 (Agenda Khusus: Implementasi RJPP s.d. 2024 dan SMAP).	1. Finansial 2. Bisnis Digital 3. Manajemen Risiko 4. Internal Kontrol 5. Implementasi RJPP 2020-2024 6. Hal-hal khusus: SMAP
		1. Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to December 2024; 2. Presentation of Supervisory Board concerns; 3. Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to December 2024 (Special Agenda: RJPP implementation up to 2024 and Anti-Bribery Management System (SMAP)).	1. Financial 2. Digital Business 3. Risk Management 4. Internal Control 5. RJPP 2020–2024 Implementation 6. Special Matters: SMAP
2	28/02/2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan Januari 2025; 2. Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; 3. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Januari 2025 (Agenda Khusus: Teknologi Informasi).	1. Finansial 2. Bisnis Digital 3. Manajemen Risiko 4. Internal Kontrol 5. Implementasi Sistem Teknologi Informasi
		1. Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to January 2025; 2. Presentation of Supervisory Board concerns; 3. Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to January 2025 (Special Agenda: Information Technology).	1. Financial 2. Digital Business 3. Risk Management 4. Internal Control 5. Information Technology System Implementation
3	21/03/2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan Februari 2025; 2. Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; 3. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Februari 2025 (Agenda Khusus: Kepatuhan terhadap Per Undang-undangan dan Pembahasan Arahan Menteri atas Persetujuan RKAP 2025).	1. Finansial 2. Bisnis 3. Manajemen Risiko 4. Internal Kontrol 5. Kepatuhan 6. Arahan Menteri RKAP 2025
		1. Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to February 2025; 2. Presentation of Supervisory Board concerns; 3. Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to February 2025 (Special Agenda: Compliance with Laws and Regulations and Discussion on the Minister's Directives regarding the Approval of the 2025 RKAP).	1. Financial 2. Business 3. Risk Management 4. Internal Control 5. Compliance 6. Minister's Directives on the 2025 RKAP

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Tema Theme
4	26/04/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Deras dan Direksi s.d. Bulan Maret 2025; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Maret 2025 (Agenda Khusus: Pembahasan atas implementasi RJP PERURI s. d. Triwulan I dan Pembahasan Kinerja TJSL PERURI).	- Finansial - Bisnis - Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi - Internal Kontrol - Hasil Audit TJSL Tahun 2024
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to March 2025; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to March 2025 (Special Agenda: Discussion on the implementation of PERURI's Long-Term Plan up to the first quarter and discussion on PERURI's TJSL performance).	- Financial - Business - Integrated Risk Management and Governance - Internal Control - Results of the 2024 TJSL Audit
5	26/05/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Deras dan Direksi s.d. Bulan April 2025; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan April 2025 (Agenda Khusus: Pembahasan Kinerja Anak Perusahaan (Audited 2024)).	- Finansial - SPBE & Bisnis Digital - Manajemen Risiko - Internal Kontrol - Kinerja Anak Perusahaan (Audited 2024)
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to April 2025; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to April 2025 (Special Agenda: Discussion on Subsidiary Performance (Audited 2024)).	- Financial - SPBE and Digital Business - Risk Management - Internal Control - Subsidiary Performance (Audited 2024)
6	25/06/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Deras dan Direksi s.d. Bulan Mei 2025; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Mei 2025 (Agenda Khusus: Tanggapan atas Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2025 Perum Percetakan Uang Republik Indonesia).	- Financial - Business - Risk Management - Internal Control
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to May 2025; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to May 2025 (Special Agenda: Response to the First Quarter 2025 Financial Performance of Perum Percetakan Uang Republik Indonesia).	- Financial - Business - Risk Management - Internal Control
7	30/07/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Deras dan Direksi s.d. Bulan Juni 2025; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Juni 2025 (Agenda Khusus: Pembahasan Kinerja SDM dan Umum serta Pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) di Perusahaan).	- Finansial - Bisnis - Manajemen Risiko - Internal Kontrol - Sumber Daya Manusia - Revisi RKAP 2025
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to June 2025; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to June 2025 (Special Agenda: Discussion on Human Resources and General Affairs Performance and the Implementation of the Whistleblowing System (WBS) in the Company).	- Financial - Business - Risk Management - Internal Control - Human Resources 2025 RKAP Revision
8	27/08/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Deras dan Direksi s.d. Bulan Juli 2025; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Juli 2025 (Agenda Khusus: Pembahasan atas implementasi Kebijakan Mutu dan Pelayanan; serta - Pembahasan atas implementasi RJP Perum Peruri).	- Finansial - Bisnis - Manajemen Risiko - Internal Kontrol - Sumber Daya Manusia - Implementasi Rjp Perum Peruri Tahun 2025-2029



No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Tema Theme
		1. Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to July 2025; 2. Presentation of Supervisory Board concerns; 3. Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to July 2025 (Special Agenda: Discussion on the implementation of the Quality and Service Policy; and discussion on the implementation of Perum Peruri's Long-Term Plan).	1. Financial 2. Business 3. Risk Management 4. Internal Control 5. Human Resources 6. Implementation of Perum Peruri's 2025–2029 Long-Term Plan
9	23/09/2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan Agustus 2025; 2. Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; 3. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Agustus 2025 (Agenda Khusus: Tindak Lanjut Surat Evaluasi KBUMN Semester I; 4. Pembahasan atas Implementasi Kebijakan Mutu dan Pelayanan; <i>Review</i> Pedoman/Charter Dewan Pengawas dan Organ Dewan Pengawas; serta RKA Dewas 2026).	1. Finansial 2. Bisnis 3. Manajemen Risiko 4. Internal Control 5. Sumber Daya Manusia
		1. Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to August 2025; 2. Presentation of Supervisory Board concerns; 3. Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to August 2025 (Special Agenda: Follow-up to the SOE Ministry's Semester I Evaluation Letter; 4. Discussion on the implementation of the Quality and Service Policy; review of the Supervisory Board Charter/Guidelines and Supervisory Board Organs; and the 2026 Supervisory Board Budget Plan (RKA)).	1. Financial 2. Business 3. Risk Management 4. Internal Control 5. Human Resources
10	19/10/2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan September 2025; 2. Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; 3. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan September 2025 (Agenda Khusus: Pembahasan RKAP Perum Peruri 2025; Pembahasan Pengadaan KAP General Audit Tahun Buku 2025; dan Penetapan Asesor GC).	1. Finansial 2. Bisnis 3. Manajemen Risiko 4. Internal Control 5. Penyusunan RKAP Tahun 2026
		1. Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to September 2025; 2. Presentation of Supervisory Board concerns; 3. Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to September 2025 (Special Agenda: Discussion on Perum Peruri's 2026 RKAP; discussion on the procurement of the General Audit Public Accounting Firm (KAP) for the 2025 financial year; and appointment of the GCG Assessor).	1. Financial 2. Business 3. Risk Management 4. Internal Control 5. Preparation of the 2026 RKAP
11	24/11/2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan Oktober 2025; 2. Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; 3. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Oktober 2025 (Agenda Khusus: Organ Luar PERURI; dan Implementasi s.d Tw III 2025 atas Rjp Perum Peruri Tahun 2025 2029).	1. Finansial 2. Bisnis 3. Manajemen Risiko 4. Internal Control 5. Organ Luar PERURI
		1. Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to October 2025; 2. Presentation of Supervisory Board concerns; 3. Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to October 2025 (Special Agenda: External Organs of PERURI; and implementation of Perum Peruri's 2025–2029 Long-Term Plan up to Q3 2025).	1. Financial 2. Business 3. Risk Management 4. Internal Control 5. External Organs of PERURI
12	28/11/2025	Pembahasan agenda Kunjungan Bank Indonesia ke PERURI Karawang dan SPU Bank Indonesia	1. Finansial 2. Bisnis 3. Manajemen Risiko 4. Internal Control 5. Organ Luar PERURI

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Tema Theme
		Discussion on the agenda of the visit of Bank Indonesia to PERURI Karawang and the SPU of Bank Indonesia.	1. Financial 2. Business 3. Risk Management 4. Internal Control 5. External Organs of PERURI
13	5/12/2025	1. Pembahasan Persiapan Pengawasan Dewas atas RKAP 2026 dan KPI Direksi 2026; 2. Pembahasan atas Pelaksanaan Penugasan Dewas dan Komite Dewas dalam Menjalankan RKA Dewas Tahun 2026.	1. Finansial 2. Bisnis 3. Manajemen Risiko 4. Internal Control 5. Sumber Daya Manusia 6. Arahan Pemegang Saham RKAP 2026
		1. Discussion on preparations for the Supervisory Board's oversight of the 2026 RKAP and the 2026 Board of Directors' KPIs; 2. Discussion on the implementation of assignments of the Supervisory Board and Supervisory Board Committees in carrying out the 2026 Supervisory Board Work Plan and Budget (RKA).	1. Financial 2. Business 3. Risk Management 4. Internal Control 5. Human Resources 6. Shareholder Directives on the 2026 RKAP
14	18/12/2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan November 2025; 2. Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; 3. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan November 2025 (Agenda Khusus: Pembahasan Terkait Capaian Produksi Uang dan Bisnis <i>Update</i> pekerjaan BGN).	1. Finansial 2. Bisnis 3. Manajemen Risiko 4. Internal Control 5. Sumber Daya Manusia 6. Arahan Pemegang Saham Rkap 2026 7. Implementasi Rjp 2025-2029 Perum Peruri 8. Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa
		1. Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to November 2025; 2. Presentation of Supervisory Board concerns; 3. Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to November 2025 (Special Agenda: Discussion on Currency Production Achievement and BGN projects).	1. Financial 2. Business 3. Risk Management 4. Internal Control 5. Human Resources 6. Shareholder Directives on the 2026 RKAP 7. Implementation of the Long-Term Plan of Perum Peruri 2025-2029 8. Procurement Policy for Goods and Services

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Pengawas pada Rapat Internal Dewan Pengawas Recapitulation of Supervisory Board Attendance at Internal Supervisory Board Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Marlison Hakim	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	12	14	100
Sutanto	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	12	14	100
Djanurindro Wibowo	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	12	14	100
Nanik Murwati	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	12	12	100



Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi

Rapat Koordinasi dengan Direksi diselenggarakan setiap bulan guna membahas pelaksanaan kegiatan Direksi, realisasi RKAP yang mencakup kinerja operasional dan keuangan, serta perkembangan status dan rencana tindak lanjut (*action plan*) yang diperlukan.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Pengawas dan Direksi telah melaksanakan Rapat Koordinasi sebanyak sebanyak 12 (dua belas) kali, termasuk di dalamnya beberapa agenda Rapat Khusus.

Policy and Implementation of of Supervisory Board Meetings with the Board of Directors

Coordination Meetings with the Board of Directors are held monthly to discuss the implementation of the Board of Directors' activities, the realization of the RKAP covering operational and financial performance, as well as the status developments and required follow-up action plans.

Throughout 2025, the Supervisory Board and the Board of Directors held a total of 12 (twelve) Coordination Meetings, including several Special Meeting agendas.

Agenda Rapat Koordinasi dan Rapat Khusus Dewan Pengawas dengan Direksi

Agenda of Coordination Meetings and Special Meetings of the Supervisory Board with the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Tema Theme
1	31/01/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan Desember 2024; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Desember 2024 (Agenda Khusus: Implementasi RJPP s.d. 2024 dan SMAP).	- Finansial - Bisnis Digital - Manajemen Risiko - Internal Kontrol - Implementasi RJPP 2020–2024 - Hal-hal khusus: SMAP
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to December 2024; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to December 2024 (Special Agenda: Implementation of the RJPP up to 2024 and SMAP).	- Financial - Digital Business - Risk Management - Internal Control - Implementation of the 2020–2024 RJPP - Special Matters: SMAP
2	28/02/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan Januari 2025; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Januari 2025 (Agenda Khusus: Teknologi Informasi).	- Finansial - Bisnis Digital - Manajemen Risiko - Internal Kontrol - Implementasi Sistem Teknologi Informasi
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to January 2025; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to January 2025 (Special Agenda: Information Technology).	- Financial - Digital Business - Risk Management - Internal Control - Implementation of the Information Technology System
3	21/03/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan Februari 2025; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Februari 2025 (Agenda Khusus: Kepatuhan terhadap Per Undang-undangan dan Pembahasan Arahan Menteri atas Persetujuan RKAP 2025).	- Finansial - Bisnis - Manajemen Risiko - Internal Kontrol - Kepatuhan - Arahan Menteri RKAP 2025
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to February 2025; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to February 2025 (Special Agenda: Compliance with Laws and Regulations and Discussion on the Minister's Directives regarding the Approval of the 2025 RKAP).	- Financial - Business - Risk Management - Internal Control - Compliance - Minister's Directives on the 2025 RKAP

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Tema Theme
4	30/04/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d Bulan Maret 2025; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d Bulan Maret 2025 (Agenda Khusus: Pembahasan atas implementasi RJP PERURI Triwulan I tahun 2025 dan Pembahasan Hasil Audit KAP 2024 terkait TJSL).	- Finansial - Bisnis - Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi - Internal Kontrol - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to March 2025; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to March 2025 (Special Agenda: Discussion on the implementation of PERURI's Long-Term Plan in the first quarter of 2025 and discussion on the results of the 2024 Public Accounting Firm audit related to TJSL).	- Financial - Business - Integrated Risk Management and Governance - Internal Control - Social and Environmental Responsibility
5	26/05/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan April 2025; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan April 2025 (Agenda Khusus: Pembahasan Kinerja Anak Perusahaan (Audited 2024)).	- Finansial - SPBE & Bisnis Digital - Manajemen Risiko - Internal Kontrol - Kinerja Anak Perusahaan (Audited 2024)
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to April 2025; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to April 2025 (Special Agenda: Discussion on Subsidiary Performance (Audited 2024)).	- Financial - SPBE & Digital Business - Risk Management - Internal Control - Subsidiary Performance (Audited 2024)
6	25/06/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan Mei 2025; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Mei 2025 (Agenda Khusus: Tanggapan atas Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2025 Perum Percetakan Uang Republik Indonesia).	- Finansial - Bisnis - Manajemen Risiko - Internal Kontrol
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to May 2025; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to May 2025 (Special Agenda: Response to the First Quarter 2025 Financial Performance of Perum Percetakan Uang Republik Indonesia).	- Financial - Business - Risk Management - Internal Control
7	30/07/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan Juni 2025 - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Juni 2025 (Agenda Khusus: Pembahasan Kinerja SDM dan Umum; serta Pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) di Perusahaan).	- Finansial - Bisnis - Manajemen Risiko - Internal Kontrol A. <i>Whistleblowing System</i> (WBS) B. Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) - Sumber Daya Manusia - Revisi Rkap 2025
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to June 2025; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to June 2025 (Special Agenda: Discussion on Human Resources and General Affairs Performance; and the implementation of the Whistleblowing System (WBS) in the Company).	- Financial - Business - Risk Management - Internal Control A. Whistleblowing System (WBS) B. Anti-Bribery Management System (SMAP) - Human Resources 2025 RKAP Revision



No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Tema Theme
8	27/08/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan Juli 2025; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Juli 2025 (Agenda Khusus: Pembahasan atas implementasi Kebijakan Mutu dan Pelayanan; serta Pembahasan atas implementasi RJP Perum Peruri).	- Finansial - Bisnis - Manajemen Risiko - Internal Control - Sumber Daya Manusia - Implementasi RJP Perum PERURI Tahun 2025-2029
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to July 2025; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to July 2025 (Special Agenda: Discussion on the implementation of the Quality and Service Policy; and discussion on the implementation of the Long-Term Plan of Perum Peruri).	- Financial - Business - Risk Management - Internal Control - Human Resources - Implementation of the Long-Term Plan of Perum PERURI 2025-2029
9	26/09/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan Agustus 2025; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Agustus 2025 (Agenda Khusus: Tindak Lanjut Surat Evaluasi KBUMN Semester I; serta Pembahasan atas Implementasi Kebijakan Mutu dan Pelayanan).	- Finansial - Bisnis - Manajemen Risiko - Internal Control - Sumber Daya Manusia - Hal-hal khusus: Tindak Lanjut Surat Evaluasi KBUMN Semester I; serta Pembahasan atas Implementasi Kebijakan Mutu dan Pelayanan).
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to August 2025; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to August 2025 (Special Agenda: Follow-up to the Semester I Evaluation Letter from the Ministry of SOEs; and discussion on the implementation of the Quality and Service Policy).	- Financial - Business - Risk Management - Internal Control - Human Resources - Special Matters: Follow-up to the Semester I Evaluation Letter from the Ministry of SOEs; and discussion on the implementation of the Quality and Service Policy
10	28/10/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan September 2025; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan September 2025 (Agenda Khusus: Finalisasi Penyusunan RKAP Tahun 2026; General Audit TB 2025 ; serta Tindak Lanjut Surat Kinerja Semester I Tahun 2025).	- Finansial - Bisnis - Manajemen Risiko - Internal Control - Penyusunan RKAP Tahun 2026 - Hal-hal khusus: Finalisasi Penyusunan RKAP Tahun 2026; General Audit TB 2025; serta Tindak Lanjut Surat Kinerja Semester I Tahun 2025).
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to September 2025; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to September 2025 (Special Agenda: Finalization of the preparation of the 2026 RKAP; General Audit FY 2025; and follow-up to the Semester I 2025 Performance Letter).	- Financial - Business - Risk Management - Internal Control - Preparation of the 2026 RKAP - Special Matters: Finalization of the preparation of the 2026 RKAP; General Audit FY 2025; and follow-up to the Semester I 2025 Performance Letter
11	24/11/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d. Bulan Oktober 2025; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan Oktober 2025 (Agenda Khusus: Organ Luar PERURI; dan	- Finansial - Bisnis - Manajemen Risiko - Internal Control - Organ Luar PERURI - Implementasi RJP Perum PERURI Tahun 2025-2029
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to October 2025; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to October 2025 (Special Agenda: External Organs of PERURI; and	- Financial - Business - Risk Management - Internal Control - External Organs of PERURI - Implementation of the Long-Term Plan of Perum PERURI 2025-2029

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Tema Theme
12	18/12/2025	- Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Dewas dan Direksi s.d Bulan November 2025; - Pemaparan <i>Concern</i> Dewan Pengawas; - Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Perusahaan s.d. Bulan November 2025 (Agenda Khusus: Pembahasan Terkait Capaian Produksi Uang dan Bisnis <i>Update</i> pekerjaan BGN).	- Finansial - Bisnis - Manajemen Risiko - Internal Control - Sumber Daya Manusia - Arahan Pemegang Saham Rkap 2026 - Implementasi RJP 2025-2029 Perum PERURI - Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
		- Follow-up on the results of the Coordination Meeting between the Supervisory Board and the Board of Directors up to November 2025; - Presentation of Supervisory Board concerns; - Discussion on the evaluation of the Company's performance achievements up to November 2025 (Special Agenda: Discussion on Currency Production Achievement and BGN projects).	- Financial - Business - Risk Management - Internal Control - Human Resources - Shareholder Directives on the 2026 RKAP - Implementation of the 2025–2029 Long-Term Plan of Perum PERURI - Procurement Policy for Goods and Services

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi pada Rapat Koordinasi 2025 Recapitulation of Supervisory Board and Board of Directors Attendance at Coordination Meetings in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran %
Dewan Pengawas Supervisory Board				
Marlison Hakim	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	12	12	100
Sutanto	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	12	11	92
Djanurindro Wibowo	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	12	12	100
Nanik Murwati*	Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board	12	10	83
Direksi Board of Directors				
Dwina Septiani Wijaya	Direktur Utama President Director	12	12	100
Saiful Bahri	Direktur <i>Currency and Security Solution</i> Director of Currency and Security Solution	12	12	100
Gandung Anggoro Murdani	Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Director of Human Resources, Technology and Information	12	8	66,7
Fajar Rizki	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	12	12	100
Farah Fitria Rahmayanti	Direktur <i>Digital Business</i> Director of Digital Business	12	11	91,7

* Ketidakhadiran dalam rangka dinas
* Absence due to official duty.



Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan, dan dalam pelaksanaannya Direksi dapat mengundang pejabat terkait sesuai dengan kebutuhan pembahasan. Sepanjang tahun 2025, Direksi telah melaksanakan rapat internal sebanyak 30 (tiga puluh) kali.

Policy and Implementation of Board of Directors Meetings

Board of Directors Meetings are held at least 1 (one) time each month, and in their implementation, the Board of Directors may invite relevant officers as required by the matters under discussion. Throughout 2025, the Board of Directors held 30 (thirty) internal meetings.

Agenda dan Kehadiran Rapat Direksi

Agenda and Attendance of Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Jam Time	Agenda Agenda	Kehadiran Direksi Attendance of Board of Directors				
				DU	DK	DM	DS	DP
1	13 Januari 2025 January 13, 2025	14:00 – 17:00	1. <i>Update Track & Trace</i> 2. Pembahasan Govtech Edu 1. Track & Trace Update 2. Discussion on GovTech Edu	✓	✓	✓	✓	✓
2	21 Januari 2025 January 21, 2025	10:30 – 00:30	1. <i>Project Korlantas</i> 2. Paparan Kinerja s.d Desember 2024 3. Pembahasan Materi RKAP 2025 4. Agenda SDM 1. Korlantas Project 2. Performance Presentation up to December 2024 3. Discussion on 2025 RKAP Materials 4. Human Resources Agenda	✓	✓	✓	✓	✓
3	4 Februari 2025 February 4, 2025	11:00 – 11:30	Pembahasan Revisi Harga Tinta Discussion on Ink Price Revision	✓	✓	✓	✓	✗
4	11 Februari 2025 February 11, 2025	11:00 – 11:30	1. Pembahasan progress PKU 2. Agenda SDM 1. Discussion on PKU Progress 2. Human Resources Agenda	✓	✓	✓	✓	✓
5	18 Februari 2025 February 18, 2025	10:00 – 18:00	1. SWP (<i>Strategic Workforce Planning</i>) Konsultan Korn Ferry 2. Agenda SDM 1. SWP (<i>Strategic Workforce Planning</i>) by Korn Ferry Consultant 2. Human Resources Agenda	✓	✓	✓	✓	✓
6	11 Maret 2025 March 11, 2025	11:00 – 16:36	1. Penyampaian hasil GA KAP 2. Progres pekerjaan konsultan pemeringkat Pefindo 3. <i>Update</i> terkait pekerjaan reuiu komposit risiko 4. <i>Update Project</i> Paspor RI 5. Agenda SDM. 1. Presentation of General Audit Results by Public Accounting Firm (KAP) 2. Progress of Pefindo Rating Consultant Engagement 3. Update on Composite Risk Review Engagement 4. Update on the Indonesian Passport Project 5. Human Resources Agenda	✓	✓	✓	✓	✓
7	18 Maret 2025 March 18, 2025	11:00 – 15:00	1. Usulan Asesmen Jajaran Direktorat CSS; 2. Agenda SDM; 3. Usulan Target Internal SBU 2025; 4. Paparan Kinerja Februari 2025 1. Proposed Assessment of the CSS Directorate Management Team 2. Human Resources Agenda 3. Proposed 2025 Internal Targets for SBUs 4. Performance Presentation for February 2025	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Tanggal Date	Jam Time	Agenda Agenda	Kehadiran Direksi Attendance of Board of Directors				
				DU	DK	DM	DS	DP
8	25 Maret 2025 March 25, 2025	11:00 - 13:30	1. Persiapan <i>Rating</i> Pefindo 2. Pembahasan Lanjutan Target Internal 3. Agenda SDM 1. Preparation for Pefindo Rating 2. Further Discussion on Internal Targets 3. Human Resources Agenda	✓	✓	X	✓	✓
9	15 April 2025 April 15, 2025	11:00 - 15:00	1. Proyeksi Cetak Uang TA 2026-2027 2. Dampak Perubahan Nilai Kurs terhadap Capex 2025 3. Kontrak Manajemen 2025 1. Currency Printing Projection for 2026-2027 2. Impact of Exchange Rate Changes on 2025 Capex 3. 2025 Management Contract	✓	✓	X	✓	✓
10	22 April 2025 April 22, 2025	10:30 - 15:00	1. <i>Update Project</i> Satu Data 2. Usulan penambahan BTK dan tindak lanjut temuan HCTS 3. Laporan Kinerja s.d Maret & Sensitivitas Laba/Rugi RKAP 2025 1. One Data Project Update 2. Proposal for Additional BTK and Follow-up on HCTS Findings 3. Performance Report up to March and Profit/Loss Sensitivity of the 2025 RKAP	✓	✓	X	✓	✓
11	29 April 2025 April 29, 2025	13:00 - 16:30	1. <i>Update</i> Investasi Mesin 2. <i>Supply Chain</i> Bahan Uang Rupiah 3. SDM : Suksesi, HR <i>Dashboard</i> dan Beasiswa 1. Machinery Investment Update 2. Rupiah Currency Materials Supply Chain 3. Human Resources: Succession, HR Dashboard, and Scholarships	✓	✓	X	✓	✓
12	6 Mei 2025 May 6, 2025	11:00 - 14:00	1. Penetapan Tugas Fungsional dan Tugas Pembinaan Tata Kelola Terintegrasi 2. <i>Update</i> Pengadaan Paspor 3. SDM: Struktur Organisasi 1. Assignment of Functional Duties and Integrated Governance Development Duties 2. Passport Procurement Update 3. Human Resources: Organizational Structure	✓	✓	X	✓	✓
13	15 Mei 2025 May 15, 2025	10:30 - 13:30	1. <i>Update</i> Talenta BUMN 2. <i>Kick Off</i> Satu Data 3. <i>Update proof of concept track & trace</i> pada Pikai (PT Djarum, Kudus) 1. SOE Talent Update 2. One Data Kick-Off 3. Update on the Track & Trace Proof of Concept at Pikai (PT Djarum, Kudus)	✓	X	X	✓	✓
14	20 Mei 2025 May 20, 2025	15:30 - 17:30	1. Kinerja Perusahaan Kinerja s.d April 2025 2. Kinerja Bisnis Anak Perusahaan 1. Company Performance up to April 2025 2. Subsidiary Business Performance	✓	✓	X	✓	✓
15	3 Juni 2025 June 3, 2025	10:00 - 13:30	1. <i>Update</i> Rencana Perhitungan HCU BI 2. <i>Progress</i> Program Beasiswa PERURI 3. Pembahasan Rencana Akuisisi PNRI (ada teman) 1. Update on the BI HCU Calculation Plan 2. Progress of the PERURI Scholarship Program 3. Discussion on the Planned Acquisition of PNRI	✓	✓	X	✓	✓
16	11 Juni 2025 June 11, 2025	11:00 - 13:30	1. <i>Update</i> Kontrak Kemenkes 2. <i>Overview</i> Materi untuk Wamen 3. <i>Update</i> Pencetakan Uang RI 1. Update on Ministry of Health Contract 2. Overview of Materials for the Vice Minister 3. Update on Indonesian Currency Printing	✓	✓	X	✓	X



No.	Tanggal Date	Jam Time	Agenda Agenda	Kehadiran Direksi Attendance of Board of Directors				
				DU	DK	DM	DS	DP
17	17 Juni 2025 June 17, 2025	10:30 – 15:00	1. Kinerja Keuangan Periode s.d Mei 2025 2. <i>Highlight</i> Direktorat Digital: - Arahan Bisnis <i>Smart Card</i> - Penyelesaian Pekerjaan Kemendikbud 2024 - Case APH PERURI Group - Bispro Kemitraan. 3. Tindak lanjut kunjungan ke KBA dan IDEMIA 1. Financial Performance up to May 2025 2. Highlights from the Digital Directorate: - Smart Card Business Directives - Completion of the 2024 Ministry of Education Project - PERURI Group Case APH - Partnership Business Process 3. Follow-up to visits to KBA and IDEMIA	✓	✓	✗	✓	✓
18	24 Juni 2025 June 24, 2025	10:00 – 16:00	1. Usulan Perubahan KEP Pengadaan 2. Tindaklanjuti SOP Kerja Sama 3. Agenda SDM 4. Persetujuan Laporan <i>Contingency Plan</i> 1. Proposed Revision of Procurement Decree (KEP); 2. Follow-up on Cooperation SOP 3. Human Resources Agenda 4. Approval of the Contingency Plan Report	✓	✓	✗	✓	✓
19	1 Juli 2025 July 1, 2025	10:30 – 13:30	1. Pembahasan Lanjutan Manual Pengadaan 2. Laporan Progres PKU. 1. Continued Discussion on the Procurement Manual 2. PKU Progress Report	✓	✓	✗	✓	✓
20	8 Juli 2025 July 8, 2025	10:30 – 12:30	1. Digitalisasi SBU 2. Usulan Revisi RKAP 2025 1. SBU Digitalization; 2. Proposed Revision of the 2025 RKAP	✓	✓	✗	✓	✓
21	15 Juli 2025 July 15, 2025	11:30 – 13:20	1. <i>Update Project Smart Card BRI</i> 2. <i>Update Project BGN</i> 3. Usulan <i>Direct Hiring Talent Project</i> SPBE Kemenkes 1. Update on the BRI Smart Card Project 2. Update on the BGN Project 3. Proposal for Direct Hiring of Talent for the Ministry of Health SPBE Project	✓	✓	✓	✓	✓
22	16 Juli 2025 July 16, 2025	13:30 – 15:00	1. Program CISO 1. CISO Program	✓	✓	✓	✓	✓
23	23 Juli 2025 July 23, 2025	14:30 – 16:30	1. Kinerja Perusahaan periode sd Juni 2025 – <i>Update</i> Usulan Revisi RKAP 2025 1. Company Performance up to June 2025 – Update on the Proposed Revision of the 2025 RKAP	✓	✓	✓	✓	✓
24	5 Agustus 2025 August 5, 2025	10:00 – 13:00	1. <i>Update HCU</i> 2. Usulan <i>Threshold</i> Kerjasama Bisnis 1. HCU Update 2. Proposed Business Cooperation Threshold	✓	✗	✓	✓	✓
25	12 Agustus 2025 August 12, 2025	10:00 – 12:30	1. Agenda SDM (STO) 1. Human Resources Agenda (STO)	✗	✓	✓	✓	✗
26	19 Agustus 2025 August 19, 2025	15:00 – 18:55	1. <i>Update Project Paspor</i> 2. <i>Career Path & Succession Plan Program dan Talent Development Program</i> 3. Laporan Kinerja Juli 2025 1. Update on the Passport Project 2. Career Path & Succession Plan Program and Talent Development Program 3. July 2025 Performance Report	✓	✓	✓	✓	✓
27	26 Agustus 2025 August 26, 2025	10:30 – 12:30	1. Sensitivitas Pendapatan Paspor RI 1. Revenue Sensitivity of the Indonesian Passport Project	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Tanggal Date	Jam Time	Agenda Agenda	Kehadiran Direksi Attendance of Board of Directors				
				DU	DK	DM	DS	DP
28	2 September 2025 September 2, 2025	10:00 - 13:00	1. Audit ICoFR 2. <i>Update smartcard</i> 1. ICoFR Audit 2. Smart Card Update	✓	✓	✗	✓	✓
29	9 September 2025 September 9, 2025	10:00 - 13:00	1. Reimburse PDS 2. <i>Update STO</i> 3. PKB 2026-2027 1. PDS Reimbursement 2. STO Update 3. 2026-2027 Collective Labor Agreement (PKB)	✓	✗	✓	✓	✓
30	16 September 2025 September 16, 2025	10:00 - 13:00	1. <i>Go Live Big Data</i> 2. Persiapan Pekerjaan Revitalisasi Gedung Heritage dan Pabrik Jakarta 1. Big Data Go-Live 2. Preparation for the Heritage Building and Jakarta Factory Revitalization Project	✓	✓	✓	✓	✓
31	23 September 2025 September 23, 2025	10:30 - 14:30	1. Usulan KPI Kolegial 2026 2. Laporan status BGN 3. Laporan Kinerja Perusahaan Periode Agustus 2025. 1. Proposed 2026 Collegial KPIs 2. BGN Status Report; 3. Company Performance Report for August 2025	✓	✓	✓	✓	✗
32	30 September 2025 September 30, 2025	10:00 - 13:00	1. Usulan Tema Konferensi TEMAN 22 2. Ambang Batas Kerja Sama Bisnis 1. Proposed Theme for TEMAN 22 Conference 2. Business Cooperation Threshold	✓	✓	✓	✓	✓
33	14 Oktober 2025 October 14, 2025	14:00 - 19:00	1. <i>Project Satu Data</i> 2. <i>Update Project Paspor</i> 3. Sensitivitas RKAP 2025 (batal) 4. <i>Update PDS</i> - <i>Clickcharge</i> - <i>Reimbursement Govtech</i> 1. One Data Project 2. Passport Project Update 3. 2025 RKAP Sensitivity (cancelled) 4. PDS Update - Clickcharge - GovTech Reimbursement	✓	✓	✓	✓	✓
34	21 Oktober 2025 October 21, 2025	10:00 - 19:00	1. Demo Satu Data: <i>Financial Report</i> ; 2. Kinerja September 2025 & Sensitivitas RKAP 2025 3. Usulan RKAP 2026 4. Strategi Pemenuhan Penugasan BGN & <i>Project Manage Service</i> Sarana IT dan IoT SPPG 1. One Data Demonstration: Financial Report 2. September 2025 Performance & 2025 RKAP Sensitivity 3. Proposed 2026 RKAP 4. Strategy for Fulfilling BGN Assignment and IT Infrastructure and IoT SPPG Project Management Services	✓	✓	✓	✓	✓
35	18 November 2025 November 18, 2025	10:00 - 16:00	1. <i>Updated License SAP</i> 2. PKB 2026 - 2027 3. Kinerja Oktober 2025 (batal) 4. Rencana tindak lanjut <i>Project BGN</i> 1. SAP License Update 2. 2026-2027 Collective Labor Agreement (PKB) 3. October 2025 Performance (cancelled) 4. Follow-up Action Plan for the BGN Project	✓	✓	✓	✓	✓



No.	Tanggal Date	Jam Time	Agenda Agenda	Kehadiran Direksi Attendance of Board of Directors				
				DU	DK	DM	DS	DP
36	25 November 2025 November 25, 2025	10:00 – 14:00	1. Pembahasan Lanjutan PKB 2026 – 2027 2. <i>Update Project</i> Paspor RI 1. Continued Discussion on the 2026–2027 Collective Labor Agreement (PKB) 2. Update on the Indonesian Passport Project	✓	✓	✓	✓	✓
37	2 Desember 2025 December 2, 2025	10:00 – 13:00	1. Laporan <i>Update</i> Paspor 2. Laporan <i>progress</i> penyelesaian penugasan BGN 1. Passport Update Report 2. Progress Report on the BGN assignment projects	✓	✓	✓	✓	✓
38	16 Desember 2025 December 16, 2025	10:00 – 13:30	1. <i>Update Trace & Track</i> Pita Cukai 2. Kinerja November 2025 1. Excise Stamp Track & Trace Update 2. November 2025 Performance	✓	✓	✓	✓	✓
39	30 Desember 2025 December 30, 2025	16:00 – 18:00	Laporan <i>Progress Project</i> BGN BGN Project Progress Report	✓	✓	✓	✓	✓

Presentase Tingkat Kehadiran Direksi
Percentage of Board of Directors Attendance

97,44% 92,31% 66,67% 100% 89,74%

✓=Hadir/Present ✗=Tidak Hadir/Absent

Catatan/Notes:

DU: Direktur Utama/President Director

DK: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/Director of Finance and Risk Management

DM: Direktur SDM, Teknologi dan Informasi/Director of Human Resources, Technology and Information

DS: Direktur Digital Business/Director of Digital Business

DP: Direktur Currency and Security Solution/Director of Currency and Security Solution

Rekapitulasi Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal Direksi Tahun 2025

Recapitulation of the Board of Directors' Attendance at Internal Board of Directors Meetings in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Persentase Percentage
Dwina Septiani Wijaya	Direktur Utama President Director	39	38	97,44%
Fajar Rizki	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	39	36	92,31%
Gandung Anggoro Murdani	Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Director of Human Capital, Technology and Information	39	25	64,10%
Farah Fitria Rahmayanti	Direktur Digital Business Director of Digital Business	39	39	100,00%
Saiful Bahri	Direktur Currency and Security Solution Director of Currency and Security Solution	39	35	89,74%

Kebijakan, Pelaksanaan Frekuensi, dan Mekanisme Kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB)

Rapat Pembahasan Bersama (RPB) merupakan forum pengambilan keputusan Pemilik Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Umum (*Perum*). Dalam pelaksanaannya, RPB dapat diselenggarakan secara fisik, elektronik, maupun sirkuler, sesuai dengan kebutuhan pembahasan dan mekanisme pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh Pemilik Modal.

Pada tahun 2025, RPB dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali secara sirkuler oleh Pemilik Modal. Dengan mekanisme tersebut, RPB tidak diselenggarakan dalam bentuk rapat fisik maupun rapat virtual yang memerlukan daftar hadir Dewan Pengawas dan Direksi. Oleh karena itu, tingkat kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi dalam RPB tidak dihitung sebagaimana kehadiran dalam Rapat Internal maupun Rapat Dewan Pengawas bersama Direksi. Pelaksanaan RPB tahun 2025 didokumentasikan dalam keputusan/risalah RPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Policy, Implementation of Frequency, and Attendance Mechanism of the Supervisory Board and the Board of Directors in the Joint Discussion Meeting (RPB)

The Joint Discussion Meeting (RPB) is a decision-making forum of the Owner of Capital in accordance with the applicable provisions for a State-Owned Public Company (*Perum*). In practice, RPB may be held physically, electronically, or by circular resolution, depending on the matters to be discussed and the decision-making mechanism determined by the Owner of Capital.

In 2025, the RPB was conducted once by circular resolution of the Owner of Capital. Under this mechanism, the RPB was not convened as a physical or virtual meeting requiring an attendance list of the Supervisory Board and the Board of Directors. Therefore, the attendance rate of the Supervisory Board and the Board of Directors at the RPB is not calculated in the same manner as attendance at Internal Meetings or Meetings of the Supervisory Board with the Board of Directors. The implementation of the RPB in 2025 was documented in the RPB resolution/minutes in accordance with the applicable provisions.

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi

Diversity in the Composition of the Supervisory Board and the Board of Directors

PERURI menetapkan kebijakan terkait keberagaman dalam komposisi Dewan Pengawas dan Direksi dengan mempertimbangkan kebutuhan serta tingkat kompleksitas usaha Perusahaan. Kebijakan tersebut memperhatikan unsur keberagaman yang mencakup latar belakang pendidikan, kompetensi, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan. Selain itu, Perusahaan juga mempertimbangkan aspek keberagaman lainnya, termasuk *gender*.

Pada tahun 2025, Dewan Pengawas dan Direksi PERURI diisi oleh para profesional dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Keberagaman ini memberikan perspektif yang komprehensif dan menjadi nilai tambah dalam mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan. Informasi lebih lanjut mengenai profil, latar belakang, dan pengalaman Dewan Pengawas dan Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERURI establishes a policy regarding diversity in the composition of the Supervisory Board and the Board of Directors by considering the needs and level of complexity of the Company's business. The policy takes into account diversity elements that include educational background, competencies, expertise, knowledge, and relevant experience. In addition, the Company also considers other diversity aspects, including gender.

In 2025, PERURI's Supervisory Board and Board of Directors were comprised of professionals with diverse educational backgrounds and experiences. This diversity provides comprehensive perspectives and constitutes added value in supporting sustainable business development. Further information regarding the profiles, backgrounds, and experience of the Supervisory Board and the Board of Directors can be found in the Company Profile section of this Annual Report.



Organ Pendukung Dewan Pengawas

Supporting Organs of the Supervisory Board

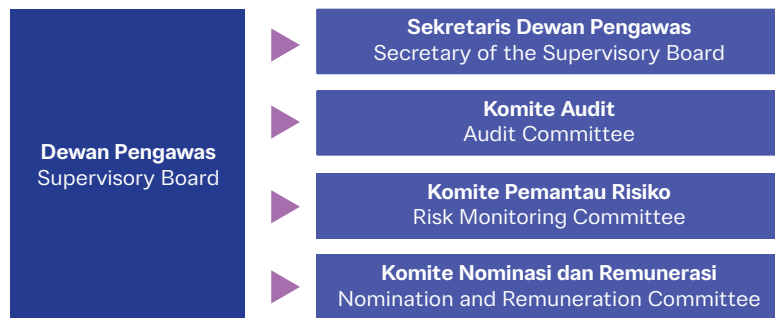
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat dan rekomendasi, Dewan Pengawas didukung oleh empat organ pendukung utama, yaitu Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Keempat organ tersebut bekerja secara terpadu untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, termasuk dalam mengawasi kinerja Perusahaan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif.

Melalui dukungan tersebut, Dewan Pengawas diharapkan mampu memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sekaligus mendorong pencapaian tujuan strategis PERURI secara optimal dan berkelanjutan.

In carrying out its supervisory function as well as providing advice and recommendations, the Supervisory Board is supported by four main supporting organs, namely the Secretary of the Supervisory Board, the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. These four organs work in an integrated manner to support the effectiveness of the implementation of the Supervisory Board's duties, including overseeing the Company's performance and providing constructive recommendations.

Through such support, the Supervisory Board is expected to be able to ensure the implementation of Good Corporate Governance while encouraging the optimal and sustainable achievement of PERURI's strategic objectives.

Dewan Pengawas dan Organ Pendukung Supervisory Board and Supporting Organs





Sekretaris Dewan Pengawas

Secretary of the Supervisory Board

Dewan Pengawas membentuk Sekretaris Dewan Pengawas sebagai organ pendukung untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan fungsi Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Sekretaris Dewan Pengawas juga bertujuan untuk memastikan terjalinnya komunikasi yang efektif antara Dewan Pengawas, Direksi, dan para pihak terkait lainnya, sehingga pengelolaan Perusahaan dapat berlangsung secara transparan dan selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode tambahan maksimal 2 (dua) tahun. Ketentuan tersebut tidak mengurangi kewenangan Dewan Pengawas untuk memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pejabat Sekretaris Dewan Pengawas

Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SR-504/S.MBU/09/2023 tanggal 8 September 2023 tentang Usulan Penggantian Sekretaris Dewan Pengawas Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, diusulkan Sdr. Hario Premono untuk menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas.

The Supervisory Board establishes the Secretary of the Supervisory Board as a supporting organ to support the smooth implementation of its duties and responsibilities. The duties and functions of the Secretary of the Supervisory Board are determined by the Supervisory Board with reference to the prevailing laws and regulations.

The existence of the Secretary of the Supervisory Board is also intended to ensure effective communication between the Supervisory Board, the Board of Directors, and other related parties, so that the management of the Company can be carried out transparently and in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

Term of Office Provisions

The term of office of the Secretary of the Supervisory Board appointed by the Supervisory Board is valid for a period of no more than 3 (three) years and may be extended for an additional period of up to 2 (two) years. This provision does not reduce the authority of the Supervisory Board to dismiss the Secretary of the Supervisory Board at any time if deemed necessary, in accordance with the prevailing regulations.

Secretary of the Supervisory Board

Based on the Letter of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SR-504/S.MBU/09/2023 dated September 8, 2023 concerning the Proposal for the Replacement of the Secretary of the Supervisory Board of Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Mr. Hario Premono was proposed to serve as Secretary of the Supervisory Board.

HARIO PREMONO

Sekretaris Dewan Pengawas

Secretary of the Supervisory Board

Kewarganegaraan Nationality	Warga Negara Indonesia (WNI) Indonesian Citizen
Domisili Domicile	Jakarta
Usia Age	35 tahun 35 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	S2 Manajemen, Universitas Indonesia (2022) Master's Degree in Management, Universitas Indonesia (2022)
Pengalaman Kerja Work Experience	› Kepala Subbagian Dukungan Strategis Wakil Menteri BUMN (2023-sekarang) › Kepala Subbagian Dukungan Strategis Menteri BUMN (2020-2023) › HR Analis KBUMN (2018-2020) › SOE Data Analis (2015-2018) › Head of Subdivision for Strategic Support to the Vice Minister of State-Owned Enterprises (2023-present) › Head of Subdivision for Strategic Support to the Minister of State-Owned Enterprises (2020-2023) › HR Analyst, Ministry of State-Owned Enterprises (2018-2020) › SOE Data Analyst (2015-2018)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Pengawas

Sekretaris Dewan Pengawas menjalankan tugasnya berdasarkan pedoman kerja yang diatur dalam *Charter* Dewan Pengawas. Mengacu pada ketentuan dalam *charter* tersebut, tugas Sekretaris Dewan Pengawas meliputi:

1. Secara aktif meminta data dan informasi terkait perkembangan terkini perusahaan kepada Sekretaris Perusahaan dalam rangka menunjang tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
2. Menyiapkan agenda khusus terkait pembahasan kesesuaian visi dan misi terhadap perubahan lingkungan bisnis Perusahaan;
3. Meminta data/informasi kepada Sekretaris Perusahaan berkaitan dengan *monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Pengawas;
4. Mempersiapkan rapat;
5. Membuat risalah Rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
6. Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
7. Menyusun rancangan RKA Dewan Pengawas;
8. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Pengawas;
9. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas.

Tugas lain Sekretaris Dewan Pengawas sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi secara berkala yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas;
3. Mengkoordinasikan anggota komite Dewan Pengawas jika diperlukan;
4. Sebagai penghubung Dewan Pengawas dengan pihak lain;
5. Membuat konsep surat kepada Sekretaris Perusahaan dalam rangka program pengenalan Dewan Pengawas.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

Sepanjang tahun buku 2025, Sekretaris Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mencakup antara lain:

1. Meminta data dan informasi terkini mengenai perkembangan Perusahaan kepada Sekretaris Perusahaan guna menunjang tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
2. Menyiapkan agenda khusus pembahasan kesesuaian visi dan misi terhadap perubahan lingkungan bisnis Perusahaan;
3. Meminta data dan informasi kepada Sekretaris Perusahaan terkait pemantauan tindak lanjut atas keputusan, rekomendasi, dan arahan Dewan Pengawas;

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Supervisory Board

The Secretary of the Supervisory Board carries out his duties based on the work guidelines stipulated in the Supervisory Board Charter. Referring to the provisions in the charter, the duties of the Secretary of the Supervisory Board include:

1. Actively requesting data and information regarding the latest developments of the Company from the Corporate Secretary in order to support the supervisory and advisory functions to the Board of Directors;
2. Preparing a special agenda related to the discussion of the alignment of the vision and mission with changes in the Company's business environment;
3. Requesting data/information from the Corporate Secretary related to the monitoring of follow-up actions on the decisions, recommendations, and directives of the Supervisory Board;
4. Preparing meetings;
5. Preparing minutes of Supervisory Board Meetings in accordance with the provisions of the Company's articles of association;
6. Administering Supervisory Board documents, including incoming correspondence, outgoing correspondence, meeting minutes, and other documents;
7. Preparing the draft Supervisory Board Work Plan and Budget (RKA);
8. Preparing draft Supervisory Board reports;
9. Carrying out other duties assigned by the Supervisory Board.

Other duties of the Secretary of the Supervisory Board are as follows:

1. Ensuring that the Supervisory Board complies with laws and regulations and implements the principles of GCG;
2. Providing periodic information required by the Supervisory Board;
3. Coordinating members of the Supervisory Board committees when necessary;
4. Acting as a liaison between the Supervisory Board and other parties;
5. Preparing draft correspondence to the Corporate Secretary in relation to the Supervisory Board induction program.

Implementation of Duties in 2025

Throughout the 2025 financial year, the Secretary of the Supervisory Board carried out his duties and responsibilities, which included, among others:

1. Requesting the latest data and information regarding the Company's developments from the Corporate Secretary to support the supervisory and advisory functions to the Board of Directors;
2. Preparing a special agenda for discussing the alignment of the vision and mission with changes in the Company's business environment;
3. Requesting data and information from the Corporate Secretary related to monitoring follow-up actions on the decisions, recommendations, and directives of the Supervisory Board;



4. Mempersiapkan rapat Dewan Pengawas, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*);
5. Menyusun risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
6. Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, mencakup surat masuk, surat keluar, risalah rapat, dan dokumen lainnya;
7. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas;
8. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Pengawas;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas;
10. Mengadministrasikan, memantau, dan memastikan setiap anggota Dewan Pengawas memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi minimal 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) tahun serta memiliki paling sedikit 1 (satu) sertifikasi profesi yang masih berlaku di bidang Manajemen Risiko, Tata Kelola, atau Keuangan sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023;
11. Memfasilitasi proses penilaian kinerja Dewan Pengawas yang mencakup evaluasi efektivitas Dewan Pengawas secara kolektif, kinerja komite di bawahnya, serta kinerja individu setiap anggota, termasuk memastikan ketersediaan data pendukung penilaian KPI personal yang disampaikan kepada Menteri BUMN selaku pemilik modal;
12. Memastikan akurasi dan ketepatan waktu penginputan data komposisi dan kualifikasi organ pendukung Dewan Pengawas ke dalam *Management Information System* (MIS) Anaplan BP BUMN atau media pelaporan digital lain yang ditetapkan instansi Pembina;
13. Menyiapkan agenda, data pendukung, dan risalah rapat yang membahas progres pelaksanaan diagnostik *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR) serta evaluasi kebijakan ambang batas (*threshold*) kewenangan transaksi di lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan.

4. Preparing Supervisory Board meetings, including meeting materials (*briefing sheets*);
5. Preparing minutes of Supervisory Board meetings in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;
6. Administering Supervisory Board documents, including incoming correspondence, outgoing correspondence, meeting minutes, and other documents;
7. Preparing the draft Supervisory Board Work Plan and Budget;
8. Preparing draft Supervisory Board reports;
9. Carrying out other duties assigned by the Supervisory Board;
10. Administering, monitoring, and ensuring that each member of the Supervisory Board fulfills the competency development requirement of at least 20 (twenty) hours within 1 (one) year and possesses at least 1 (one) valid professional certification in the fields of Risk Management, Governance, or Finance in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023;
11. Facilitating the Supervisory Board performance assessment process, which includes the evaluation of the effectiveness of the Supervisory Board collectively, the performance of committees under the Supervisory Board, and the individual performance of each member, including ensuring the availability of supporting data for the assessment of personal KPIs submitted to the Minister of State-Owned Enterprises as the capital owner;
12. Ensuring the accuracy and timeliness of data input regarding the composition and qualifications of the supporting organs of the Supervisory Board into the BP BUMN Anaplan Management Information System (MIS) or other digital reporting media designated by the supervising institution;
13. Preparing agendas, supporting data, and minutes of meetings discussing the progress of the implementation of the Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) diagnostic and the evaluation of transaction authority threshold policies within the Company and its Subsidiaries.

Komite Audit

Audit Committee

PERURI membentuk Komite Audit sebagai organ pendukung Dewan Pengawas dalam memberikan telaah serta pendapat yang profesional dan independen atas laporan maupun hal-hal lain yang disampaikan Direksi kepada Dewan Pengawas. Komite Audit memiliki peran strategis dalam memastikan keandalan dan transparansi laporan keuangan Perusahaan, serta dalam mengawasi efektivitas pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria dan Pengangkatan Anggota Komite Audit

Mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Anggota Komite Audit wajib memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut:

- › Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
- › Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
- › Mampu berkomunikasi secara efektif;
- › Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- › Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.

Susunan dan Komposisi Komite Audit

Susunan dan komposisi Komite Audit per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

PERURI established the Audit Committee as a supporting organ of the Supervisory Board in providing professional and independent reviews and opinions on reports and other matters submitted by the Board of Directors to the Supervisory Board. The Audit Committee has a strategic role in ensuring the reliability and transparency of the Company's financial statements, as well as in overseeing the effectiveness of risk management and compliance with the provisions of prevailing laws and regulations.

Criteria and Appointment of Audit Committee Members

Referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, members of the Audit Committee are required to meet the following requirements:

- › Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/audit;
- › Have no personal interests/affiliations that may give rise to negative impacts and conflicts of interest with the Company;
- › Be able to communicate effectively;
- › Be able to provide sufficient time to complete their duties; and
- › Other requirements stipulated in the Audit Committee Charter, if necessary.

Composition of the Audit Committee

The composition of the Audit Committee as of December 31, 2025, are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis for Appointment	Periode dan Masa Jabatan Term and Period of Office
Djanurindro Wibowo	Ketua (merangkap Anggota Dewan Pengawas) Chairman (concurrently Member of the Supervisory Board)	SK-220/MBU/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 SK-220/MBU/07/2023 dated July 31, 2023	Mengikuti Masa Jabatan Dewan Pengawas Follows the Term of Office as the Supervisory Board
Mohd Irwan	Anggota Member	SK Dewas No. SK-14/DP/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024. Supervisory Board Decree No. SK-14/DP/X/2024 dated October 4, 2024	Periode Pertama, 4 Oktober 2024 – Oktober 2027 First Term, October 4, 2024 – October 2027
Budi Rahayu	Anggota Member	SK Dewan Pengawas No SK - 07/DP/IX/2025 tanggal 26 September 2025 Supervisory Board Decree No. SK-07/DP/IX/2025 dated September 26, 2025	Periode Pertama, 17 November 2025-17 November 2028 First Term, November 17, 2025 – November 17, 2028



Profil Anggota Komite Audit Profile of Audit Committee Members

DJANURINDRO WIBOWO

Ketua (merangkap Anggota Dewan Pengawas)

Chairman (concurrently serving as Member of the Supervisory Board)

Profil dapat dilihat pada bagian profil Dewan Pengawas pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile can be found in the Supervisory Board Profile section under the Company Profile chapter of this Annual Report.

MOHD IRWAN

Anggota Komite Audit

Member of the Audit Committee

Kewarganegaraan Nationality	Warga Negara Indonesia (WNI) Indonesian Citizen	
Usia Age	58 tahun 58 years old	
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia (2002) - Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada (1992)	
Pengalaman Kerja Work Experience	Di PERURI: Tidak Ada	At PERURI: None
	Di Perusahaan/Lembaga Lain: - Kepala Divisi (Koordinator) Kelompok Koordinasi Manajemen Kinerja, Departemen Regional, Bank Indonesia (2019 - 2022) - Deputi Kepala Perwakilan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalimantan Selatan (2015-2019) - Staf - Deputi Direktur, Departemen Sumber Daya Manusia, Bank Indonesia (1997 - 2015)	At Other Companies/Institutions: - Division Head (Coordinator), Performance Management Coordination Group, Regional Department, Bank Indonesia (2019-2022) - Deputy Head of Representative Office, Bank Indonesia Representative Office of South Kalimantan Province (2015-2019) - Staff - Deputy Director, Human Resources Department, Bank Indonesia (1997-2015)
Sertifikasi Certifications	- Advokat - Kongres Advokat Indonesia (2023) - Sentral Banking - Basic Bank Indonesia Institute (2019) - Organizational Leadership Development - Bank Indonesia Institute (2018) - Sertifikasi Kebanksentralan - Bank Indonesia (2016) - Certified Interviewer of Targeted Selection - Daya Dimensi Indonesia (2013)	
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Di PERURI: Tidak ada	At PERURI: None
	Di Perusahaan/Lembaga Lain: Tidak ada	At Other Companies/Institutions: None

BUDI RAHAYU

Anggota Komite Audit

Member of the Audit Committee

Kewarganegaraan Nationality	Warga Negara Indonesia (WNI) Indonesian Citizen	
Usia Age	59 Tahun 59 years old	
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Magister dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Program Studi Administrasi Perpajakan (2003) - Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1994) - Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1988)	

Pengalaman Kerja Work Experience	Di PERURI: Tidak ada Di Perusahaan/Lembaga Lain: › KAP Heliantono & Rekan, Audit Partner (2016–2025) › KKA I GDE EKA SARMAJA, FSAI & REKAN, Consultant (2024 – 2025) › PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. - Member and Secretary of Audit Committee (2020–2024) › PT GTSI International, Tbk. - Member of Audit Committee (2022–2023) › PT ASURANSI ASEI INDONESIA, subsidiary of PT Reasuransi Indonesia – Member of Audit Committee (2015–2021)	At PERURI: None At Other Companies/Institutions: › KAP Heliantono & Rekan, Audit Partner (2016–2025) › KKA I GDE EKA SARMAJA, FSAI & REKAN, Consultant (2024–2025) › PT Bank Maybank Indonesia Tbk. – Member and Secretary of the Audit Committee (2020–2024) › PT GTSI International Tbk. – Member of the Audit Committee (2022–2023) › PT Asuransi ASEI Indonesia, a subsidiary of PT Reasuransi Indonesia – Member of the Audit Committee (2015–2021)
Sertifikasi Certifications	› Certification in Audit Committee Practices (CACP) › Indonesia Certified Public Accountant (CPA) › Indonesia Chartered Accountant (CA) › Register Negara Akuntan (RNA)	› Certification in Audit Committee Practices (CACP) › Indonesia Certified Public Accountant (CPA) › Indonesia Chartered Accountant (CA) › State Registered Accountant (RNA)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Di PERURI: Tidak ada Di Perusahaan/Lembaga Lain: Tidak ada	At PERURI: None At Other Companies/Institutions: None

Pernyataan Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit PERURI berkewajiban untuk mempertahankan independensinya dengan tidak memiliki keterkaitan finansial, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi, Pemilik Modal, serta Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada entitas induk maupun anak perusahaan. Ketentuan ini diberlakukan guna menjamin bahwa setiap anggota Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif serta bebas dari pengaruh yang berpotensi memengaruhi kualitas pertimbangan dan rekomendasi yang disampaikan.

Statement of Independence of the Audit Committee

All members of PERURI's Audit Committee are required to maintain their independence by not having any financial, management, share ownership, or family relationships with the Supervisory Board, the Board of Directors, Shareholders, or the Internal Audit Unit (SPI) of either the parent entity or its subsidiaries. This provision is implemented to ensure that each member of the Audit Committee is able to carry out his or her duties and responsibilities objectively and free from any influence that may potentially affect the quality of the considerations and recommendations provided.

Transparansi Hubungan Afiliasi Komite Audit

Transparency of Audit Committee Affiliation Relationships

Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship	Djanurindro Wibowo Ketua Chairman	Mohd Irwan Anggota Member	Budi Rahayu Anggota Member
Dengan Anggota Dewan Pengawas With Members of the Supervisory Board	X	X	X
Dengan Direksi With the Board of Directors	X	X	X
Dengan Pemerintah Indonesia sebagai Pemilik Modal With the Government of Indonesia as Capital Owner	X	X	X

√=Ada x=Tidak Ada
√ = Yes x = No



Piagam Komite Audit

Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Komite Audit memiliki Piagam yang berlaku efektif sejak 21 Maret 2024. Piagam Komite Audit tersebut mengatur berbagai aspek, antara lain mengenai keanggotaan, struktur organisasi, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, mekanisme rapat, aktivitas, serta ketentuan lainnya yang relevan.

Tugas Komite Audit

1. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas;
2. Bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas;
3. Bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan;
4. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas tugas eksternal auditor dan internal auditor;
5. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal;
6. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
7. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
8. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya;
9. Setiap anggota Komite Audit dapat mengikuti Pendidikan atau pelatihan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya;
10. Melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sesuai peraturan perundang-undangan;
11. Bertanggungjawab terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit. Melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan/diinstruksikan oleh Dewan Pengawas, dan melaporkannya kepada Dewan Pengawas.

Di samping tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur, Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan tambahan kepada Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Piagam Komite Audit.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Komite Audit

PERURI senantiasa menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Komite Audit melalui penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan. Kebijakan Perusahaan mewajibkan seluruh anggota Komite Audit untuk mengikuti pelatihan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya, guna memperdalam pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, praktik terbaik, serta dinamika dan tantangan terkini di bidang audit dan pengawasan.

Audit Committee Charter

The Audit Committee is required to hold meetings at least 1 (one) time in each month. The Audit Committee has a Charter that has been effective since March 21, 2024. The Audit Committee Charter regulates various aspects, including membership, organizational structure, authority, duties and responsibilities, meeting mechanisms, activities, and other relevant provisions.

Duties of the Audit Committee

1. In carrying out its duties, the Audit Committee is directly accountable to the Supervisory Board;
2. Works collectively in carrying out its duties to assist the Supervisory Board;
3. Is independent both in the performance of its duties and in its reporting;
4. Ensures the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the duties of external auditors and internal auditors;
5. Evaluates the implementation of activities and audit results conducted by the Internal Audit Unit (SPI) as well as external auditors;
6. Provides recommendations regarding improvements to the management control system and its implementation;
7. Ensures that satisfactory evaluation procedures are in place for all information issued by the Company;
8. Identifies matters requiring the attention of the Supervisory Board as well as other duties of the Supervisory Board;
9. Each member of the Audit Committee may participate in education or training to support the performance of his or her duties;
10. Carries out duties related to risk management in accordance with laws and regulations;
11. Is responsible for preparing the Audit Committee Work Plan and Budget. Carries out all activities planned/ instructed by the Supervisory Board and reports them to the Supervisory Board.

In addition to the duties and responsibilities as stipulated above, the Supervisory Board may assign additional duties to the Audit Committee in accordance with the provisions set forth in the Audit Committee Charter.

Training and Competency Development of the Audit Committee

PERURI continuously demonstrates its commitment to enhancing the competencies and capabilities of the Audit Committee through the implementation of ongoing training and development programs. The Company's policy requires all members of the Audit Committee to participate in training relevant to their duties and responsibilities, in order to deepen their understanding of prevailing regulations, best practices, as well as the latest developments and challenges in the fields of audit and supervision.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Komite Audit 2025

Audit Committee Training and Competency Development in 2025

No	Tanggal Date	Nama Kegiatan Training Program	Peserta Participants
1	19 Februari 2025 February 19, 2025	Pelatihan <i>Financial Risk Management</i> IAI Financial Risk Management Training – IAI	Heru Sidarta (4 jam) Heru Sidarta (4 hours)
2	12 & 19 Maret 2025 March 12 & 19, 2025	<i>Risk Management Webinar</i> – BPKP bertemakan Strategi Keefektifan Penilaian <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) dan Penyusunan Roadmap Perbaikan Rekomendasi Temuan Penilaian Risk Management Webinar – BPKP themed Strategy for the Effectiveness of Risk Maturity Index (RMI) Assessment and Preparation of a Roadmap for Improvement of Assessment Finding Recommendations	1. Heru Sidarta (4 jam) 2. Mohd Irwan (4 jam) 1. Heru Sidarta (4 hours) 2. Mohd Irwan (4 hours)
3	7 & 8 Mei 2025 May 7 & 8, 2025	<i>Master Class Internal Audit</i> (CIAL)	1. Heru Sidarta (16 jam) 2. Mohd Irwan (16 jam) 1. Heru Sidarta (16 hours) 2. Mohd Irwan (16 hours)

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Audit

Kebijakan

Rapat Komite Audit merupakan forum koordinasi, pembahasan, dan perumusan rekomendasi Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pendukung pengawasan Dewan Pengawas, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pelaporan keuangan, audit internal dan eksternal, pengendalian internal, serta isu-isu lain yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas.

Kebijakan rapat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan secara tertib, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun ketentuan mengenai rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan atau sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- Komite Audit dapat mengadakan rapat di luar jadwal rapat berkala untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/atau mendesak;
- Komite Audit dapat mengundang satuan kerja/unit kerja terkait untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait;
- Setiap rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan oleh Perusahaan;
- Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada poin d disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Pengawas; dan
- Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat dilaporkan dalam Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Komite Audit.

Policy and Implementation of Audit Committee Meetings

Policy

Audit Committee Meetings are a forum for coordination, discussion, and formulation of recommendations by the Audit Committee in carrying out its function of supporting the Supervisory Board's oversight, particularly with respect to compliance with laws and regulations, financial reporting, internal and external audits, internal control, and other issues requiring the attention of the Supervisory Board.

The policy governing Audit Committee Meetings is set out in the Audit Committee Charter, which is intended to ensure that the implementation of the Audit Committee's duties is conducted in an orderly, documented, and accountable manner. The provisions regarding Audit Committee Meetings are as follows:

- The Audit Committee shall hold meetings at least 1 (one) time each month or in accordance with the minimum meeting frequency of the Supervisory Board as stipulated in the Articles of Association;
- The Audit Committee may hold meetings outside the regular meeting schedule to discuss matters deemed necessary and/or urgent;
- The Audit Committee may invite relevant work units/divisions to attend meetings with the knowledge of the relevant member of the Board of Directors;
- Every Audit Committee meeting shall be documented in meeting minutes signed by the attending Audit Committee members and documented by the Company;
- The meeting minutes referred to in point d shall be submitted in writing by the Audit Committee to the Supervisory Board; and
- The attendance of Audit Committee members at meetings shall be reported in the Audit Committee's Quarterly Reports and Annual Report.



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali rapat internal, 5 (lima) kali rapat koordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI). Total rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali rapat.

Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran Komite Audit dalam rapat, sebagai berikut:

Frequency and Attendance Rate of Audit Committee

Throughout 2025, the Audit Committee held 12 (twelve) internal meetings and 5 (five) coordination meetings with the Internal Audit Unit (SPI). The total number of meetings held was 17 (seventeen).

The frequency and attendance rate of the Audit Committee at meetings were as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Salamat Simanullang	Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas (1 Januari 2025–23 September 2025) Chairman concurrently serving as Member of the Supervisory Board (January 1, 2025– September 23, 2025)	12	12	100%
Djanurindro Wibowo	Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas (23 September 2025–31 Desember 2025) Chairman concurrently serving as Member of the Supervisory Board (September 23, 2025– December 31, 2025)	5	5	100%
Mohd Irwan	Anggota Member	17	17	100%
Heru Sidarta	Anggota Member	17	17	100%

Catatan: Salamat Simanullang mengakhiri masa keanggotaannya pada 23 September 2025 dan digantikan oleh Djanurindro Wibowo. Jumlah rapat masing-masing dihitung sesuai periode keanggotaan dalam Komite Audit sepanjang tahun buku 2025.

Note: Salamat Simanullang ended his membership on September 23, 2025 and was replaced by Djanurindro Wibowo. The number of meetings for each member was calculated based on their respective membership periods in the Audit Committee during the 2025 financial year.

Agenda Rapat Internal Komite Audit

Sepanjang tahun buku 2025, Komite Audit menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat internal dengan agenda sebagai berikut:

Agenda of Internal Audit Committee Meetings

Throughout the 2025 financial year, the Audit Committee held 12 (twelve) internal meetings with the following agenda:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	30 Januari 2025 January 30, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Internal Komite Audit Bulan Desember 2024 2. Evaluasi LHP atas Audit Kinerja PT PEPRO Tahun 2023 3. <i>Update</i> Progres Penyelesaian Hasil Audit Interim <i>General Audit</i> TB 2024 4. <i>Concern</i> atas Rencana Pembangunan Pabrik Kertas Uang (PKU) 5. Pelaksanaan RKA Komite Audit s.d. Triwulan IV Tahun 2024 6. Pembahasan RKT SPI PERURI Grup Tahun 2025 7. Kegiatan Kunjungan Komite Dewas ke PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) – Pendampingan <i>General Audit</i> TB 2024
		1. Follow-up on the Internal Audit Committee Meeting of December 2024 2. Evaluation of the Audit Report on the Performance Audit of PT PEPRO for 2023 3. Update on the Progress of Follow-up Actions on the Interim General Audit FY 2024 Findings 4. Concerns regarding the Currency Paper Factory (PKU) Development Plan 5. Implementation of the Audit Committee Work Plan and Budget up to Q4 2024 6. Discussion of the 2025 Internal Audit Unit (SPI) Annual Work Plan for the PERURI Group 7. Supervisory Board Committee Visit to PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) – Assistance in the FY 2024 General Audit

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
2	24 Februari 2025 February 24, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Internal Komite Audit Bulan Januari 2025 2. Evaluasi LHP atas Kepatuhan PT PWT 3. Hasil Evaluasi BPKP RI atas Penyelenggaraan Tata Kelola Data Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 4. Hasil Evaluasi BPKP RI atas Penyelenggaraan SPBE dan Integrasi dengan Satu Data Indonesia dan Pusat Data Nasional Tahun 2024 5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Perum Peruri 6. Progres Pelaksanaan <i>General Audit</i> & AUP TB 2024 1. Follow-up on the Internal Audit Committee Meeting of January 2025 2. Evaluation of the Audit Report on Compliance Audit of PT PWT 3. Results of the BPKP RI Evaluation of the Governance of Social Welfare Data Management in 2024 4. Results of the BPKP RI Evaluation of SPBE Implementation and Integration with One Data Indonesia and the National Data Center in 2024 5. Enhancement of Domestic Product Utilization (P3DN) at Perum Peruri 6. Progress of the General Audit & AUP FY 2024
3	21 Maret 2025 March 21, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Internal Komite Audit Bulan Februari 2025 2. Progres <i>Monitoring</i> Rekomendasi Hasil Audit 3. Progres <i>Monitoring</i> Pelaksanaan <i>roadmap</i> ICOFR 4. Hasil Audit Investigasi terhadap Proses Produksi & <i>Quality Control</i> Uang Kertas Tahun 2024 1. Follow-up on the Internal Audit Committee Meeting of February 2025 2. Progress in Monitoring Audit Recommendation Follow-up Actions 3. Progress in Monitoring the Implementation of the ICOFR Roadmap 4. Results of the Investigative Audit on the Production Process & Quality Control of Banknotes in 2024
4	26 April 2025 April 26, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Internal Komite Audit Bulan Maret 2025 2. Progres <i>Monitoring</i> Rekomendasi Hasil Audit 3. Mekanisme dan <i>Monitoring</i> Pengawasan Internal AP sejalan dengan Prinsip Tata Kelola Terintegrasi 4. Evaluasi Kinerja Keuangan AP Tahun 2020–2024 (audited) 5. Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan I Tahun 2025 1. Follow-up on the Internal Audit Committee Meeting of March 2025 2. Progress in Monitoring Audit Recommendation Follow-up Actions 3. Mechanism and Monitoring of Internal Oversight of Subsidiaries in line with the Principles of Integrated Governance 4. Evaluation of the Financial Performance of Subsidiaries for 2020–2024 (audited) 5. Audit Committee Activity Report for the First Quarter of 2025
5	26 Mei 2025 May 26, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Internal Komite Audit Bulan April 2025 2. Progres Sertifikasi Aset Tetap PT KP 3. Progres Tindak Lanjut Temuan Audit BPK Terkait HCTS 4. Kajian <i>Smart Factory</i> di PERURI 1. Follow-up on the Internal Audit Committee Meeting of April 2025 2. Progress of Fixed Asset Certification at PT KP 3. Progress of Follow-up Actions on BPK Audit Findings Related to HCTS 4. Smart Factory Study at PERURI
6	25 Juni 2025 June 25, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Internal Komite Audit Bulan Mei 2025 2. Laporan Evaluasi Pembangunan <i>Digital Platform Smart Factory</i> 3. Laporan atas Penilaian Peringkat Komposit Risiko TB 2024 4. Audit Kinerja Pemeliharaan Permesinan dan Pengendalian Kualitas Produk 5. Progres Tindak Lanjut Hasil Observasi ICOFR 1. Follow-up on the Internal Audit Committee Meeting of May 2025 2. Evaluation Report on the Development of the Smart Factory Digital Platform 3. Report on the Composite Risk Rating Assessment for FY 2024 4. Performance Audit of Machinery Maintenance and Product Quality Control 5. Progress of Follow-up Actions on ICOFR Observation Results
7	25 Juli 2025 July 25, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Internal Komite Audit Bulan Juni 2025 2. Usulan Pengadaan <i>General Audit</i> TB 2025 3. Capaian Kinerja Komite Audit Semester I 2025 4. <i>Monitoring</i> Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Internal s.d. Juni 2025 5. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Bisnis Proses Percetakan oleh Konsultan TUV 6. Evaluasi Sistem dan Pengelolaan WBS 1. Follow-up on the Internal Audit Committee Meeting of June 2025 2. Proposal for the Procurement of the FY 2025 General Audit 3. Audit Committee Performance Achievement for the First Semester of 2025 4. Monitoring of the Completion of Follow-up Actions on Internal Audit Findings up to June 2025 5. Monitoring and Evaluation of the Printing Business Process by TUV Consultant 6. Evaluation of the WBS System and Management



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
8	27 Agustus 2025 August 27, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Internal Komite Audit Bulan Juli 2025 2. Usulan Kebijakan Batas Kewenangan Negosiasi, Penandatanganan Kontrak, dan Kerja Sama Bisnis 3. Pengaturan Kebijakan secara Terintegrasi di Perum Peruri 4. Laporan Hasil Audit Kepatuhan PT PDS 1. Follow-up on the Internal Audit Committee Meeting of July 2025 2. Proposed Policy on the Limits of Authority for Negotiation, Contract Signing, and Business Cooperation 3. Integrated Policy Arrangement at Perum Peruri 4. Compliance Audit Report of PT PDS
9	23 September 2025 September 23, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Internal Komite Audit Bulan Agustus 2025 2. Implementasi ICOFR Perum Peruri Tahun 2025 (Peran Dewas dan SPI) 3. Laporan Hasil Audit Pemberian <i>shareholder loan</i> 4. Laporan Hasil Pemantauan TL Rekomendasi BPK RI s.d. Semester II 2024 1. Follow-up on the Internal Audit Committee Meeting of August 2025 2. Implementation of ICOFR at Perum Peruri in 2025 (Role of the Supervisory Board and SPI) 3. Audit Report on the Provision of Shareholder Loans 4. Report on the Monitoring of Follow-up Actions on BPK RI Recommendations up to the Second Semester of 2024
10	19 Oktober 2025 October 19, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Internal Komite Audit Bulan September 2025 2. <i>Internal Control Improvement</i> Unit Percetakan Uang Kertas PERURI 3. Kesiapan dan Efektivitas Fungsi Pengendalian Internal dalam Menjamin Integritas Operasional, Kepatuhan, dan Tata Kelola Perusahaan 4. <i>Update</i> Pelaksanaan Implementasi ICOFR Perum Peruri Tahun 2025 5. <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal s.d. Triwulan III Tahun 2025 6. Pelaksanaan RKA Komite Audit s.d. Triwulan III Tahun 2025 1. Follow-up on the Internal Audit Committee Meeting of September 2025 2. Internal Control Improvement at the PERURI Banknote Printing Unit 3. Readiness and Effectiveness of the Internal Control Function in Ensuring Operational Integrity, Compliance, and Corporate Governance 4. Update on the Implementation of ICOFR at Perum Peruri in 2025 5. Monitoring of Follow-up Actions on Internal Audit Recommendations up to the Third Quarter of 2025 6. Implementation of the Audit Committee Work Plan and Budget up to the Third Quarter of 2025
11	21 November 2025 November 21, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Internal Komite Audit Bulan Oktober 2025 2. <i>Update</i> Implementasi ICOFR Perum Peruri 3. <i>Update</i> Pelaksanaan <i>General Audit</i> TB 2025 oleh KAP PKF 4. Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Tahun 2024 5. Aspirasi Dewan Pengawas pada RKT SPI 2026 6. Pelaksanaan Pengadaan (Capex) dan Operasional Bisnis di PERURI 1. Follow-up on the Internal Audit Committee Meeting of October 2025 2. Update on the Implementation of ICOFR at Perum Peruri 3. Update on the Implementation of the FY 2025 General Audit by KAP PKF 4. Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2024 5. Supervisory Board Aspirations for the 2026 SPI Annual Work Plan 6. Implementation of Procurement (Capex) and Business Operations at PERURI
12	17 Desember 2025 December 17, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Internal Komite Audit Bulan November 2025 2. Audit Kinerja Pemeliharaan Permesinan dan Pengendalian Produk Uang dan Non-Uang 3. Laporan Kunjungan ke DRC Surabaya 4. SOP Kerja Sama Bisnis 5. Tindak Lanjut Pembahasan Konsep Kerja Dewan Pengawas dan Komite di Tahun 2026 1. Follow-up on the Internal Audit Committee Meeting of November 2025 2. Performance Audit of Machinery Maintenance and Control of Currency and Non-Currency Product Quality 3. Report on the Visit to the Surabaya DRC 4. Business Cooperation SOP 5. Follow-up Discussion on the Supervisory Board and Committee Work Concept for 2026

Rapat Koordinasi Komite Audit dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Komite Audit menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat koordinasi triwulanan dengan SPI, dengan agenda sebagai berikut:

Coordination Meetings of the Audit Committee with the Internal Audit Unit (SPI)

The Audit Committee held 5 (five) quarterly coordination meetings with the Internal Audit Unit (SPI), with the following agenda:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	31 Januari 2025 January 31, 2025	1. Tindak Lanjut Rakor Triwulan III Tahun 2024 2. Progres Kegiatan Audit SPI s.d. Desember 2024 3. Proses <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Audit s.d. Desember 2024 4. Progres Kegiatan Non-Audit s.d. Desember 2024 5. Evaluasi atas Efektivitas Pelaksanaan WBS 1. Follow-up on the Q3 2024 Coordination Meeting 2. Progress of SPI Audit Activities up to December 2024 3. Monitoring Process of Audit Follow-up Actions up to December 2024 4. Progress of Non-Audit Activities up to December 2024 5. Evaluation of the Effectiveness of WBS Implementation
2	11 Maret 2025 March 11, 2025	1. <i>Update</i> Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Audit 2. Progres Penyelesaian <i>roadmap</i> ICOFR 3. Progres Penyelesaian Surat Dewas 4. Rencana Pengadaan <i>General Audit</i> TB 2025 5. Mekanisme TKT dalam Aspek Governance pada SPI terhadap Anak Perusahaan 6. Addendum Penambahan Pekerjaan pada <i>General Audit</i> 2024 terkait Penilaian Komposit Risiko oleh KAP 1. Update on the Progress of Completing Follow-up Actions on Audit Recommendations 2. Progress of Completion of the ICOFR Roadmap 3. Progress of Completion of Supervisory Board Letters 4. Procurement Plan for the FY 2025 General Audit 5. TKT Mechanism in the Governance Aspect of SPI Oversight of Subsidiaries 6. Addendum for Additional Work under the 2024 General Audit related to the Composite Risk Assessment by the Public Accounting Firm (KAP)
3	27 April 2025 April 27, 2025	1. Tindak Lanjut Rakor Triwulan IV Tahun 2024 2. Progres Kegiatan Audit SPI s.d. Triwulan I 2025 3. Proses <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Audit s.d. Desember 2024 4. Progres Kegiatan Non-Audit s.d. Desember 2024 5. Progres Penyelesaian Rekomendasi Diagnostik ICOFR 6. Mekanisme dan <i>Monitoring</i> Pengawasan Internal AP sejalan dengan Prinsip Tata Kelola Terintegrasi 7. Tindak Lanjut atas Evaluasi Hasil Audit Khusus pada Proses Produksi dan <i>Quality Control</i> Uang Kertas di SBU HSS 8. <i>Update</i> Progres Jasa Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2024 9. Evaluasi Pelaksanaan <i>General Audit</i> TB 2024 10. Evaluasi atas Efektivitas Pelaksanaan WBS 1. Follow-up on the Q4 2024 Coordination Meeting 2. Progress of SPI Audit Activities up to Q1 2025 3. Monitoring Process of Audit Follow-up Actions up to December 2024 4. Progress of Non-Audit Activities up to December 2024 5. Progress of Completion of ICOFR Diagnostic Recommendations 6. Mechanism and Monitoring of Internal Oversight of Subsidiaries in line with the Principles of Integrated Governance 7. Follow-up to the Evaluation of Special Audit Results on the Production Process and Quality Control of Banknotes at the HSS SBU 8. Update on the Progress of the Company Health Level Assessment Services for 2024 9. Evaluation of the Implementation of the FY 2024 General Audit 10. Evaluation of the Effectiveness of WBS Implementation
4	25 Juli 2025 July 25, 2025	1. Tindak Lanjut Rakor Triwulan I Tahun 2025 2. Progres Pelaksanaan Program Kerja Audit s.d. Juni 2025 3. Progres Kegiatan Non-Audit s.d. Juni 2025 4. Progres <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Audit s.d. Juni 2025 5. Tata Kelola Terintegrasi – Audit Intern Terintegrasi 6. <i>Monitoring</i> Evaluasi Bisnis Proses Percetakan oleh TUV 7. Evaluasi atas Efektivitas Pelaksanaan WBS 1. Follow-up on the Q1 2025 Coordination Meeting 2. Progress of the Audit Work Program Implementation up to June 2025 3. Progress of Non-Audit Activities up to June 2025 4. Progress of Monitoring Audit Follow-up Actions up to June 2025 5. Integrated Governance – Integrated Internal Audit 6. Monitoring of the Evaluation of the Printing Business Process by TUV 7. Evaluation of the Effectiveness of WBS Implementation



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
5	14 Oktober 2025 October 14, 2025	1. Evaluasi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Terintegrasi 2. Mitigasi Risiko Finansial dan TKT Anak Perusahaan 3. Pengawasan Independen dan Kecukupan Sistem Pengendalian Internal (SPI) 4. <i>Update Proyek SDM, Career & Succession plan</i> , dan Harmonisasi Kebijakan Induk dan Anak 1. Evaluation of Integrated Risk Management and Compliance 2. Financial Risk Mitigation and TKT of Subsidiaries 3. Independent Oversight and Adequacy of the Internal Control System (SPI) 4. Update on Human Resources Projects, Career & Succession Plan, and Harmonization of Parent and Subsidiary Policies

Rapat Koordinasi dengan SPI, KAP, dan Unit Terkait dalam Rangka General Audit Coordination Meetings with SPI, Public Accounting Firms, and Related Units in Relation to the General Audit

No.	Tanggal Date	Agenda/Perihal Agenda/Subject	Peserta Participants
1	9–10 Januari 2025 January 9–10, 2025	Rapat Progres <i>General Audit</i> TB 2024 – Kunjungan ke <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) Surabaya Progress Meeting on the FY 2024 General Audit – Visit to the Disaster Recovery Center (DRC) in Surabaya	Komite Audit, Divisi TI, SBU Digital, dan SPI Audit Committee, Information Technology Division, Digital SBU, and SPI
2	17 Februari 2025 February 17, 2025	Closing Meeting Konsinyering <i>General Audit</i> PERURI Group TB 2024 Closing Meeting of the FY 2024 General Audit Consignment for the PERURI Group	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Dewan Pengawas, Komite Audit, Divisi Keuangan Strategis, Divisi Keuangan Operasional, dan SPI Director of Finance and Risk Management, Supervisory Board, Audit Committee, Strategic Finance Division, Operational Finance Division, and SPI
3	29 September 2025 September 29, 2025	Rapat Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>) <i>Jasa General Audit</i> , Evaluasi <i>Key Performance Indicator</i> , dan Review Penilaian Peringkat Komposit Risiko Perum Peruri TB 2025 Explanatory Meeting (<i>Aanwijzing</i>) for General Audit Services, Evaluation of Key Performance Indicators, and Review of the Composite Risk Rating Assessment of Perum Peruri for FY 2025	Komite Audit, SPI, Divisi Pengadaan & Fasilitas Umum, dan Calon KAP Audit Committee, SPI, Procurement & General Facilities Division, and Prospective Public Accounting Firms

Realisasi Kegiatan Komite Audit Realization of Audit Committee Activities

No.	Uraian Description	Ukuran/Frekuensi RKA RKA Measurement/ Frequency	Bobot Weight	Realisasi 2025 2025 Realization	% Realisasi Bobot % Weight Realization
1	Melakukan telaah atas kebijakan sistem pengendalian intern dan efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas yang disusun oleh SPI Conduct a review of the internal control system policy and the effectiveness of entity-level internal controls prepared by SPI	1 kali 1 time	8%	1 kali 1 time	8,00
2	Melakukan Evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan SPI Termasuk WBS Conduct an Evaluation of SPI Audit Reports, Including WBS	2 kali 2 times	8%	2 kali 2 times	8,00
3	Melakukan Telaah atas Realisasi Kegiatan SPI Conduct a Review of the Realization of SPI Activities	4 kali 4 times	6%	4 kali 4 times	6,00

No.	Uraian Description	Ukuran/Frekuensi RKA RKA Measurement/ Frequency	Bobot Weight	Realisasi 2025 2025 Realization	% Realisasi Bobot % Weight Realization
4	Melakukan Telaah atas Laporan Keuangan dan Kinerja Manajemen serta Menyusun Masukan untuk Dewan Pengawas sebagai Bahan Rapat Dewan Pengawas Conduct a Review of Financial Statements and Management Performance and Prepare Input for the Supervisory Board as Material for Supervisory Board Meetings	12 kali 12 times	7%	9 kali 9 times	7,00
5	Melaksanakan tugas khusus dari Dewan Pengawas dan Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Carry Out Special Assignments from the Supervisory Board and Prepare Reports on the Implementation of Such Assignments	*) sesuai penugasan *) as assigned	5%	42 kali 42 times	5,00
6	Rapat Koordinasi dalam Rangka Sinergitas dengan Satuan Pengawasan Internal Coordination Meetings to Promote Synergy with the Internal Audit Unit	4 kali 4 times	10%	5 kali 5 times	12,50
7	Rapat Internal Komite Audit Internal Audit Committee Meetings	12 kali 12 times	10%	12 kali 12 times	10,00
8	Rapat Koordinasi Komite Dewan Pengawas Coordination Meetings of Supervisory Board Committees	4 kali 4 times	5%	4 kali 4 times	5,00
9	Proses pengadaan jasa KAP untuk General Audit Tahun Buku 2025 Procurement Process for Public Accounting Firm (KAP) Services for the FY 2025 General Audit	4 kali 4 times	7%	6 kali 6 times	10,50
10	Proses pengadaan Jasa Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan (Pemeriksaan) Tahun Buku 2025 Procurement Process for Company Health Level Assessment Services (Rating) for FY 2025	4 kali 4 times	7%	4 kali 4 times	7,00
11	Rapat dengan KAP Terkait Progres Pelaksanaan General Audit dan Temuan-Temuan Hasil Audit Meetings with the Public Accounting Firm Regarding the Progress of the General Audit and Audit Findings	2 kali 2 times	6%	4 kali 4 times	12,00
12	Menganalisis Hasil Audit KAP atas Laporan Audit 2024 Analyze the KAP Audit Results on the 2024 Audit Report	1 kali 1 time	8%	2 kali 2 times	16,00
13	Menyusun Laporan Periodik Kegiatan Komite Audit Prepare Periodic Audit Committee Activity Reports	4 kali 4 times	5%	4 kali 4 times	5,00
14	Mengikuti <i>Workshop</i> , Seminar (Masing-masing Komite @20 jam) Participate in Workshops and Seminars (Each Committee Member @20 hours)	40 jam 40 hours	4%	44 jam 44 hours	4,40
15	<i>Self-Assessment</i> Kinerja Komite Audit 2024 Audit Committee Performance Self-Assessment 2024	1 kali 1 time	4%	1 kali 1 time	4,00
Total Nilai Total Score			100%		120,4



Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

PERURI membentuk Komite Pemantau Risiko untuk mendukung Dewan Pengawas dalam melakukan pemantauan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait efektivitas penerapan manajemen risiko di Perusahaan. Komite ini berperan strategis dalam memastikan bahwa proses pengelolaan risiko dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan apabila diperlukan guna meningkatkan kualitas manajemen risiko.

Selain itu, berdasarkan Surat No. S-55/MBU/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Percetakan Uang Republik Indonesia Tahun 2023 yang menetapkan Perum PERURI sebagai BUMN dengan Kategori Konglomerasi dan Klasifikasi Risiko Sistemik B, Komite Pemantau Risiko juga merangkap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam yang berlaku efektif sejak 21 Maret 2024. Piagam Komite Pemantau Risiko dan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut mengatur berbagai ketentuan, antara lain mengenai komposisi keanggotaan, struktur organisasi, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, mekanisme rapat, aktivitas, serta aspek-aspek lainnya yang relevan.

PERURI established the Risk Monitoring Committee to support the Supervisory Board in conducting monitoring activities and providing advice to the Board of Directors regarding the effectiveness of risk management implementation within the Company. The Committee plays a strategic role in ensuring that risk management processes are carried out in accordance with established standards and in providing recommendations for improvement, where necessary, to enhance the quality of risk management.

In addition, based on Letter No. S-55/MBU/01/2023 dated January 30, 2023 concerning the Approval of the 2023 Work Plan and Budget (RKAP) of Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, which designated Perum PERURI as an SOE under the Conglomeration Category with Systemic Risk Classification B, the Risk Monitoring Committee also concurrently carries out the duties and responsibilities of the Integrated Governance Committee.

Risk Monitoring Committee Charter

The Risk Monitoring Committee has a Charter that has been effective since March 21, 2024. The Risk Monitoring Committee Charter and the Integrated Governance Committee Charter regulate various provisions, including the composition of membership, organizational structure, authority, duties and responsibilities, meeting mechanisms, activities, and other relevant aspects.

Susunan dan Komposisi Komite Pemantau Risiko 2025

Structure and Composition of the Risk Monitoring Committee in 2025

Nama Name	Jabatan Position	No. & Tanggal SK Decree No. & Date	Periode dan Masa Jabatan Term and Period of Office
Marlison Hakim	Ketua Chairman	SK Dewas No. SK-13/DP/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 Supervisory Board Decree No. SK-13/DP/VI/2024 dated June 28, 2024	Mengikuti periode dan masa jabatan sebagai Dewan Pengawas Follows the period and term of office as a Member of the Supervisory Board
Djanurindro Wibowo*	Wakil Ketua I Vice Chairman I	SK Dewas No. SK-13/DP/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 Supervisory Board Decree No. SK-13/DP/VI/2024 dated June 28, 2024	Mengikuti periode dan masa jabatan sebagai Dewan Pengawas Follows the period and term of office as a Member of the Supervisory Board
Yanto Sugianto	Anggota Member	SK Ketua Dewas No. SK-01/DP/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 Chairman of the Supervisory Board Decree No. SK-01/DP/I/2023 dated January 31, 2023	31 Januari 2023–31 Januari 2026 January 31, 2023 – January 31, 2026
Dilza Vierson N	Anggota Member	K Ketua Dewas No. SK-04/DP/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 Chairman of the Supervisory Board Decree No. SK-04/DP/VII/2023 dated July 24, 2023	24 Juli 2023–24 Juli 2026 July 24, 2023 to July 24, 2026

* tidak lagi menjabat sejak 26 September 2025

* No longer served in the position as of September 26, 2025.

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profile of Risk Monitoring Committee Members

MARLISON HAKIM

Ketua Komite Pemantau Risiko 2025

Chairman of the Risk Monitoring Committee 2025

Profil dapat dilihat pada bagian profil Dewan Pengawas pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini
The profile can be found in the Supervisory Board Profile section under the Company Profile chapter of this Annual Report.

DJANURINDRO WIBOWO

Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko I

Vice Chairman I of the Risk Monitoring Committee

Profil dapat dilihat pada bagian profil Dewan Pengawas pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini
The profile can be found in the Supervisory Board Profile section under the Company Profile chapter of this Annual Report.

YANTO SUGIANTO

Anggota Komite Pemantau Risiko

Member of the Risk Monitoring Committee

Kewarganegaraan Nationality	Warga Negara Indonesia (WNI) Indonesian Citizen	
Usia Age	70 tahun 70 years old	
Riwayat Pendidikan Educational Background	› Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi › Bachelor of Accounting, Faculty of Universitas Padjadjaran (1982) Economics, Universitas Padjadjaran (1982) › Magister Manajemen Universitas Widyatama › Master of Management, Universitas (2009) Widyatama (2009)	
Pengalaman Kerja Work Experience	Di PERURI: Anggota Komite Audit Perum PERURI (2015-2020) Di Perusahaan/Lembaga Lain: › Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada › Head of the Internal Audit Unit (SPI), Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya (2016-2017) Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya (2016-2017) › Tenaga Ahli Menteri Pendidikan dan › Expert Staff to the Minister of Education and Kebudayaan (2015) Culture (2015) › Inspektur II eselon II golongan IV.d Bidang › Inspector II, Echelon II, Grade IV.d, Basic Pengawasan Pendidikan dasar dan Balitbang Education and Research & Development pada Itjen Kemdikbud (2012-2015) Supervision Division, Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture (2012-2015)	At PERURI Member of the Audit Committee of Perum PERURI (2015-2020) At Other Companies/Institutions: › Head of the Internal Audit Unit (SPI), Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya (2016-2017) › Expert Staff to the Minister of Education and Culture (2015) › Inspector II, Echelon II, Grade IV.d, Basic Education and Research & Development Supervision Division, Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture (2012-2015)
Sertifikasi Certifications	› <i>Certified Risk Management Professional</i> › Certified Risk Management Professional (CRMP) › <i>Qualified Risk Governance Professional</i> › Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Di PERURI: Tidak Ada Di Perusahaan/Lembaga Lain: Penata Kelola Perusahaan Negara (PKPN) Madya, Badan Pengaturan BUMN	At PERURI: None At Other Companies/Institutions: Intermediate Officer for State-Owned Enterprise Governance (PKPN Madya), State- Owned Enterprises Regulatory Agency



DILZA VIERSON

Anggota Komite Pemantau Risiko

Member of the Risk Monitoring Committee

Kewarganegaraan Nationality	Warga Negara Indonesia (WNI) Indonesian Citizen	
Usia Age	56 tahun 56 years old	
Riwayat Pendidikan Educational Background	> STIE "KBP" Padang (1995) > STIE "GANESHA" Program Pasca Sarjana (2003) > STIE "KBP" Padang (1995) > STIE "GANESHA" Postgraduate Program (2003)	
Pengalaman Kerja Work Experience	Di PERURI: Tidak ada Di Perusahaan/Lembaga Lain: > Anggota Komite Manajemen Risiko PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2020-2023) > Anggota Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (2016-2017) > Anggota Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (2013-2016) > Anggota Dewan Komisaris PT Kliring Berjangka Indonesia (2012-2013) > Anggota Dewan Komisaris PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (2011-2013) > Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VI (2008-2011) > Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XII (2003-2008)	At PERURI: None At Other Companies/Institutions: > Member of the Risk Management Committee of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (2020-2023) > Member of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara III (2016-2017) > Member of the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani (2013-2016) > Member of the Board of Commissioners of PT Kliring Berjangka Indonesia (2012-2013) > Member of the Board of Commissioners of PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (2011-2013) > Secretary of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara VI (2008-2011) > Secretary of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara XII (2003-2008)
Sertifikasi Certifications	Certified Risk Management Professional (CRMP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Di PERURI: Tidak Ada Di Perusahaan/Lembaga Lain: Penata Kelola Perusahaan Negara (PKPN) Madya, Badan Pengaturan BUMN	At PERURI: None At Other Companies/Institutions: Intermediate Officer for State-Owned Enterprise Governance (PKPN Madya), State-Owned Enterprises Regulatory Agency

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen, bebas dari pengaruh pihak manapun, serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas. Dalam menjalankan perannya, komite ini berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi milik PERURI, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Perusahaan.

Setiap informasi yang diperoleh hanya digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sesuai dengan tujuan serta kepentingan Perusahaan.

Independence of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee carries out its duties and functions independently, free from the influence of any party, and is directly accountable to the Supervisory Board. In carrying out its role, the Committee is required to maintain the confidentiality of all documents, data, and information belonging to PERURI, whether originating from internal or external sources of the Company.

Any information obtained is used solely to support the implementation of the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee in accordance with the objectives and interests of the Company.

Transparansi Hubungan Afiliasi Komite Pemantau Risiko

Transparency of Risk Monitoring Committee Affiliation Relationships

Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship	Marlison Hakim Ketua Chairman	Djanurindro Wibowo Wakil Ketua I Vice Chairman I	Yanto Sugianto Anggota Member	Dilza Vierson Anggota Member
Dengan Anggota Dewan Pengawas With Members of the Supervisory Board	x	x	x	x
Dengan Direksi With the Board of Directors	x	x	x	x
Dengan Pemerintah Indonesia sebagai Pemilik Modal With the Government of Indonesia as Capital Owner	x	x	x	x

√=Ada x=Tidak Ada
√ = Yes x = No

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas;
2. Melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko Perusahaan;
3. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko;
5. Melakukan evaluasi laporan pertanggung-jawaban Direksi atas penerapan kebijakan manajemen risiko;
6. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko.

Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

1. The Risk Monitoring Committee is independent both in the performance of its duties and in its reporting and is directly accountable to the Supervisory Board;
2. Conducts evaluations of the Company's risk management policies;
3. Conducts evaluations of the alignment between risk management policies and the implementation of such policies;
4. Conducts monitoring and evaluation of the implementation of the duties of the Risk Management Unit;
5. Conducts evaluations of the Board of Directors' accountability reports on the implementation of risk management policies;
6. Submits recommendations to the Supervisory Board regarding policies adopted by the Board of Directors relating to risk management.

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diwajibkan untuk menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali serta rapat koordinasi triwulanan dengan Divisi Manajemen Risiko sebanyak 4 (empat) kali.

Adapun rincian tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat tersebut disajikan sebagai berikut:

Policy and Implementation of the Risk Monitoring Committee Meetings

The Risk Monitoring Committee is required to hold meetings at least 1 (one) time each month. Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee held 12 (twelve) internal meetings and 4 (four) quarterly coordination meetings with the Risk Management Division.

The details of the attendance rate of each member at such meetings are presented as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	% Kehadiran % Attendance
Marlison Hakim	Ketua Chairman	12	12	100
Djanurindro Wibowo*	Wakil Ketua I Vice Chairman I	12	9	100
Yanto Sugianto	Anggota Member	12	12	100
Dilza Vierson	Anggota Member	12	12	100



Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	% Kehadiran % Attendance
Rapat Koordinasi dengan Risk Management Coordination Meetings with the Risk Management Division				
Marlison Hakim	Ketua Chairman	4	4	100
Djanurindro Wibowo*	Wakil Ketua I Vice Chairman I	4	3	100
Yanto Sugianto	Anggota Member	4	4	100
Dilza Vierson	Anggota Member	4	4	100

*sudah tidak lagi menjabat sebagai wakil ketua sejak 26 September 2025.

* No longer served as Vice Chairman as of September 26, 2025.

Realisasi Kegiatan Komite Pemantau Risiko Realization of Risk Monitoring Committee Activities

No.	Uraian Description	Ukuran/Frekuensi RKA RKA Measurement/Frequency	Bobot Weight	Realisasi 2025 2025 Realization	% Realisasi Bobot % Weight Realization
1	Melakukan Telaahan atas Sistem Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025 Conduct a Review of the Risk Management System and Integrated Governance in 2025	1 kali 1 time	10%	1 kali 1 time	10%
2	Melakukan Telaah atas Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Secara Bulanan Conduct a Review of the Implementation of Risk Management and Integrated Governance on a Monthly Basis	12 kali 12 times	7%	12 kali 12 times	7%
3	Melakukan Pemantauan atas Efektivitas Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Conduct Monitoring of the Effectiveness of Risk Management and Integrated Governance	4 kali 4 times	10%	4 kali 4 times	10%
4	Melaksanakan tugas khusus dari Dewan Pengawas Carry Out Special Assignments from the Supervisory Board	*) sesuai penugasan *) as assigned	5%	44	5%
5	Menyusun laporan triwulanan kegiatan Komite PR termasuk kegiatan terkait Tata Kelola Terintegrasi Prepare Quarterly Reports on the Activities of the Risk Monitoring Committee, including activities related to Integrated Governance	4 kali 4 times	5%	4 kali 4 times	5%
6	Melakukan Rapat Internal Komite PR yang di dalamnya membahas terkait Tata Kelola Terintegrasi Hold Internal Meetings of the Risk Monitoring Committee, including discussions related to Integrated Governance	12 kali 12 times	10%	12 kali 12 times	10%
7	Self-Assessment kinerja Komite PR Tahun 2024 Performance Self-Assessment of the Risk Monitoring Committee for 2024	1 kali 1 time	5%	1 kali 1 time	5%
8	Melakukan telaah perkembangan bisnis PERURI Conduct a Review of PERURI's Business Development	4 kali 4 times	10%	4 kali 4 times	10%
9	Mengikuti program pelatihan sebagai KPR (Masing masing Komite @20 jam) Participate in Training Programs as a Risk Monitoring Committee (each Committee member @20 hours)	40 jam 40 hours	5%	40 jam 40 hours	5%

No.	Uraian Description	Ukuran/Frekuensi RKA RKA Measurement/Frequency	Bobot Weight	Realisasi 2025 2025 Realization	% Realisasi Bobot % Weight Realization
10	Rapat Koordinasi Komite Dewan Pengawas Coordination Meetings of Supervisory Board Committees	4 kali 4 times	8%	4 kali 4 times	8%
11	Rapat Koordinasi dalam rangka sinergitas dengan Divisi Manajemen Risiko Coordination Meetings to Promote Synergy with the Risk Management Division	4 kali 4 times	10%	4 kali 4 times	10%
12	Mengikuti program sertifikasi dan pelatihan sebagai KTKT (Masing-masing Komite @20 jam) Participate in Certification and Training Programs as an Integrated Governance Committee (each Committee member @20 hours)	40 jam 40 hours	5%	80 jam 80 hours	10%
13	Rapat Koordinasi dalam rangka sinergitas dengan unit terkait TKT Coordination Meetings to Promote Synergy with Units Related to Integrated Governance	2 kali 2 times	10%	2 kali 2 times	10%
Total Nilai Total Score			100%		110%

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Komite Pemantau Risiko melalui program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kebijakan yang berlaku mewajibkan seluruh anggota Komite Pemantau Risiko untuk mengikuti pelatihan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya, guna memperdalam pemahaman atas regulasi, praktik terbaik, serta perkembangan dan tantangan terkini di bidang manajemen risiko.

Training and Competency Development of the Risk Monitoring Committee

The Company continuously demonstrates its commitment to enhancing the competencies and capabilities of the Risk Monitoring Committee through training and development programs conducted on an ongoing basis. The applicable policy requires all members of the Risk Monitoring Committee to participate in training relevant to their duties and responsibilities, in order to deepen their understanding of regulations, best practices, as well as the latest developments and challenges in the field of risk management.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko 2025 Training and Competency Development of the Risk Monitoring Committee in 2025

No	Tanggal Date	Nama Kegiatan Activity	Peserta Participants
1	12 & 19 Maret 2025 March 12 & 19, 2025	<i>Risk Management Webinar</i> - BPKP bertemakan Strategi Keefektifan Penilaian <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) dan Penyusunan <i>Roadmap</i> Perbaikan Rekomendasi Temuan Penilaian Risk Management Webinar - BPKP with the theme "Strategies for Effective Risk Maturity Index (RMI) Assessment and Preparation of Improvement Roadmaps for Assessment Findings Recommendations"	- Yanto Sugianto (4 jam) - Dilza Vierson (4 jam) - Yanto Sugianto (4 hours) - Dilza Vierson (4 hours)
2	21 & 22 Agustus 2025 August 21 & 22, 2025	GRC Summit 2025 Yogyakarta	- Yanto Sugianto (14 jam) - Dilza Vierson (14 jam) - Yanto Sugianto (14 hours) - Dilza Vierson (14 hours)
3	2 Oktober 2025 October 2, 2025	Webinar OJK <i>Sustainable Finance</i>	- Yanto Sugianto (2 jam) - Dilza Vierson (2 jam) - Yanto Sugianto (2 hours) - Dilza Vierson (2 hours)
4	4 & 5 Desember 2025 December 4 & 5, 2025	Mengikuti <i>Risk Beyond 2025</i> – CRMS Participation in Risk Beyond 2025 - CRMS	- Yanto Sugianto (20 jam) - Dilza Vierson (20 jam) - Yanto Sugianto (20 hours) - Dilza Vierson (20 hours)



Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk sebagai organ pendukung Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait proses nominasi dan kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas. Komite ini bertanggung jawab memastikan bahwa proses seleksi dan penetapan remunerasi dilaksanakan secara transparan, objektif, dan adil, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan Perusahaan.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Piagam Nomor SK 09/DP/III/2024 yang berlaku efektif sejak 21 Maret 2024. Piagam tersebut mengatur berbagai ketentuan, antara lain mengenai komposisi keanggotaan, struktur organisasi, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, mekanisme rapat, aktivitas, serta aspek-aspek lainnya yang relevan.

Ketentuan Masa Jabatan dan Rangkap Jabatan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun serta dapat ditetapkan kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Proses pengangkatan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, independensi, dan integritas calon anggota.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diperkenankan merangkap jabatan sepanjang tidak menimbulkan benturan kepentingan dan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi sesuai dengan ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

The Nomination and Remuneration Committee was established as a supporting organ of the Supervisory Board in carrying out its supervisory function and providing recommendations to the Board of Directors regarding the nomination process and remuneration policies for the Board of Directors and the Supervisory Board. The Committee is responsible for ensuring that the selection process and determination of remuneration are carried out in a transparent, objective, and fair manner, and are aligned with the provisions of prevailing laws and regulations and the interests of the Company.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee has Charter No. SK 09/DP/III/2024, which has been effective since March 21, 2024. The Charter regulates various provisions, including the composition of membership, organizational structure, authority, duties and responsibilities, meeting mechanisms, activities, and other relevant aspects.

Term of Office and Concurrent Positions Provisions

Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed by the Supervisory Board for a term of office of no more than 3 (three) years and may be reappointed for 1 (one) subsequent term. The appointment process is carried out by considering the competence, independence, and integrity of prospective members.

Members of the Nomination and Remuneration Committee may hold concurrent positions provided that such positions do not give rise to conflicts of interest and that the principles of independence are upheld in accordance with the provisions of Good Corporate Governance.

Susunan dan Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi 2025

Composition of the Nomination and Remuneration Committee in 2025

Nama Name	Jabatan Position	No. & Tanggal SK Decree No. & Date	Periode dan Masa Jabatan Term and Period of Office
Marlison Hakim	Ketua Chairman	SK Dewas No. SK-13/DP/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 Supervisory Board Decree No. SK-13/DP/VI/2024 dated June 28, 2024	Periode Pertama (28 Juni 2024 – sekarang) First Term (June 28, 2024 – present)
Sutanto	Anggota Member	SK Dewas No. SK-13/DP/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 Supervisory Board Decree No. SK-13/DP/VI/2024 dated June 28, 2024	Periode Pertama (28 Juni 2024 – sekarang) First Term (June 28, 2024 – present)
Nanik Murwati	Anggota Member	SK Dewas No. SK-13/DP/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 Supervisory Board Decree No. SK-13/DP/VI/2024 dated June 28, 2024	Periode Pertama (28 Juni 2024 – sekarang) First Term (June 28, 2024 – present)

Nama Name	Jabatan Position	No. & Tanggal SK Decree No. & Date	Periode dan Masa Jabatan Term and Period of Office
Gumilar Rahadhyhan Prasetya	Sekretaris Secretary	SK Dewas No. SK-03/DP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 Supervisory Board Decree No. SK-03/DP/IV/2023 dated April 17, 2023	Periode kedua (17 April 2023-sekarang) Second term (April 17, 2023-present)
Erwin Ibrahim	Sekretaris Secretary	SK Dewas No. SK-02/DP/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 Supervisory Board Decree No. SK-02/DP/VI/2025 dated June 13, 2025	Periode pertama (13 Juni 2025-sekarang) First term (June 13, 2025-present)

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

MARLISON HAKIM

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi 2025

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee 2025

Profil dapat dilihat pada bagian profil Dewan Pengawas pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile can be found in the Supervisory Board Profile section under the Company Profile chapter of this Annual Report.

SUTANTO

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Dewan Pengawas

Member of the Nomination and Remuneration Committee/Supervisory Board

Profil dapat dilihat pada bagian profil Dewan Pengawas pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile can be found in the Supervisory Board Profile section under the Company Profile chapter of this Annual Report.

NANIK MURWATI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Dewan Pengawas

Member of the Nomination and Remuneration Committee/Supervisory Board

Profil dapat dilihat pada bagian profil Dewan Pengawas pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile can be found in the Supervisory Board Profile section under the Company Profile chapter of this Annual Report.

Periode, Masa Jabatan, serta Rangkap Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun serta dapat ditetapkan kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Proses pengangkatan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, independensi, dan integritas calon anggota.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diperkenankan merangkap jabatan sepanjang tidak menimbulkan benturan kepentingan dan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi sesuai dengan ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Term, Tenure, and Concurrent Positions of the Nomination and Remuneration Committee

Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed by the Supervisory Board for a term of office of no more than 3 (three) years and may be reappointed for 1 (one) subsequent term. The appointment process is carried out by taking into consideration the competence, independence, and integrity of prospective members.

Members of the Nomination and Remuneration Committee may hold concurrent positions provided that such positions do not create conflicts of interest and continue to uphold the principle of independence in accordance with the provisions of Good Corporate Governance.



Nama Name	Jabatan Position	Nomor & Tanggal SK Decree Number & Date	Periode dan Masa Jabatan Term and Period of Office	Rangkap Jabatan Concurrent Positions
Marlison Hakim	Ketua Chairman	SK Dewas No. SK-13/DP/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 Supervisory Board Decree No. SK-13/DP/VI/2024 dated June 28, 2024	Periode Pertama (28 Juni 2024 – sekarang) First Term (June 28, 2024 – present)	› Ketua Dewan Pengawas › Kepala Departemen › Pengelolaan Uang Bank Indonesia dengan jabatan Asisten Gubernur periode tahun 2020-2025, rangkap jabatan sejak 2024. › Chairman of the Supervisory Board › Head of the Currency Management Department of Bank Indonesia with the position of Assistant Governor for the 2020–2025 period, holding concurrent positions since 2024
Sutanto	Anggota Member	SK Dewas No. SK-13/DP/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 Supervisory Board Decree No. SK-13/DP/VI/2024 dated June 28, 2024	Periode Pertama (28 Juni 2024 – sekarang) First Term (June 28, 2024 – present)	› Anggota Dewan Pengawas › Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara sejak Februari 2022. › Member of the Supervisory Board › Special Staff to the Head of the State Intelligence Agency since February 2022
Nanik Murwati	Anggota Member	SK Dewas No. SK-13/DP/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 Supervisory Board Decree No. SK-13/DP/VI/2024 dated June 28, 2024	Periode Pertama (28 Juni 2024 – sekarang) First Term (June 28, 2024 – present)	› Anggota Dewan Pengawas › Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak 2022. › Member of the Supervisory Board › Deputy for Institutional Affairs and Administrative Reform, Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform since 2022
Gumilar Rahadhyhan Prasetya	Sekretaris	SK Dewas No. SK-03/DP/IV/2023 Tanggal 17 April 2023 Supervisory Board Decree No. SK-03/DP/IV/2024 dated April 17, 2024	Periode Pertama (17 April 2023 – sekarang) First Term (April 17, 2023 – present)	Tidak Ada None

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya secara profesional serta menjunjung tinggi prinsip independensi, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan independensi yang ditetapkan dan berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya secara objektif, mengedepankan kepentingan Perusahaan, serta bebas dari pengaruh eksternal dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee carries out its duties, responsibilities, and authorities professionally while upholding the principle of independence, without interference from any party that is contrary to the provisions of prevailing laws and regulations.

All members of the Nomination and Remuneration Committee have fulfilled the established independence requirements and are committed to carrying out their duties objectively, prioritizing the interests of the Company, and remaining free from external influence in every decision-making process.

Transparansi Hubungan Afiliasi Komite Nominasi dan Remunerasi Transparency of Affiliation Relationships of the Nomination and Remuneration Committee

Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship	Marlison Hakim Ketua Chairman	Sutanto Anggota Member	Nanik Murwati Anggota Member	Gumilar Rahadhyhan Prasetya Sekretaris Secretary
Dengan Anggota Dewan Pengawas With Members of the Supervisory Board	x	x	x	x
Dengan Direksi With the Board of Directors	x	x	x	x
Dengan Pemerintah Indonesia sebagai Pemilik Modal With the Government of Indonesia as Capital Owner	x	x	x	x

√= Ada/Yes X= Tidak Ada/No

Tugas dan Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Terkait fungsi Nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai:
 - › Komposisi jabatan anggota Direksi, Direksi Anak Perusahaan, dan/atau anggota Dewan Pengawas;
 - › Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - › Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, Direksi Anak Perusahaan, dan/atau anggota Dewan Pengawas;
 - b. Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, Direksi Anak Perusahaan, dan/ atau anggota Dewan Pengawas berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, Direksi Anak Perusahaan, dan/atau anggota Dewan Pengawas;
 - d. Memberikan usulan calon dan memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, Direksi Anak Perusahaan, dan/atau anggota Dewan Pengawas kepada Dewan pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Pembahasan Bersama (RPB); dan
 - e. Memberikan rekomendasi lain terkait nominasi yang diperlukan oleh Dewan Pengawas sesuai penugasan yang diberikan.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai Struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi;
 - b. Memberikan rekomendasi lain terkait remunerasi yang diperlukan oleh Dewan Pengawas sesuai tugas yang diberikan.
3. Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, Direksi Anak Perusahaan, dan/ atau anggota Dewan Pengawas.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan secara berkala dengan frekuensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap periode 4 (empat) bulan. Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat internal serta 12 (dua belas) kali rapat koordinasi, dengan tingkat kehadiran peserta sebagaimana dirinci berikut ini:

Duties and Functions of the Nomination and Remuneration Committee

1. Related to the Nomination Function:
 - a. Provide recommendations to the Supervisory Board regarding:
 - › The composition of positions of members of the Board of Directors, Directors of Subsidiaries, and/ or members of the Supervisory Board;
 - › Policies and criteria required in the Nomination process; and
 - › Performance evaluation policies for members of the Board of Directors, Directors of Subsidiaries, and/or members of the Supervisory Board;
 - b. Assist the Supervisory Board in conducting performance assessments of members of the Board of Directors, Directors of Subsidiaries, and/ or members of the Supervisory Board based on established benchmarks as evaluation materials;
 - c. Provide recommendations to the Supervisory Board regarding competency development programs for members of the Board of Directors, Directors of Subsidiaries, and/or members of the Supervisory Board;
 - d. Propose candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors, Directors of Subsidiaries, and/or members of the Supervisory Board to the Supervisory Board for submission to the Joint Deliberation Meeting (RPB); and
 - e. Provide other nomination-related recommendations required by the Supervisory Board in accordance with the assignments given.
2. Related to the Remuneration Function:
 - a. Provide recommendations to the Supervisory Board regarding the remuneration structure, remuneration policies, and remuneration amounts;
 - b. Provide other remuneration-related recommendations required by the Supervisory Board in accordance with the assignments given.
3. Assist the Supervisory Board in conducting performance assessments in relation to the appropriateness of the remuneration received by each member of the Board of Directors, Directors of Subsidiaries, and/or members of the Supervisory Board.

Nomination and Remuneration Committee Meetings

Nomination and Remuneration Committee Meetings are held periodically with a frequency of at least 1 (one) meeting in every 4 (four)-month period. Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee held 5 (five) internal meetings and 12 (twelve) coordination meetings, with attendance rates as detailed below:



Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Marlison Hakim	Ketua Chairman	17	17	100
Sutanto	Anggota Member	17	17	100
Nanik Murwati	Anggota Member	17	17	100.
Gumilar Rahadhyhan P	Sekretaris Secretary	17	17	100
Rapat Koordinasi dengan SDM Coordination Meeting with Human Resources				
Marlison Hakim	Ketua Chairman	17	17	100
Sutanto	Anggota Member	17	17	100
Nanik Murwati	Anggota Member	17	17	100
Gumilar Rahadhyhan P	Sekretaris Secretary	17	17	100

Agenda Rapat Internal Internal Meeting Agenda

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda
20 Januari 2025 January 20, 2025	1. Laporan Capaian dan Kegiatan KNR TW IV 2024; 2. Rencana Kerja KNR 2025; 3. Ringkasan Pembahasan Rapat KNR-SDM selama 2024; 4. <i>Key Highlights</i> Lingkup SDM, Nominasi, dan Remunerasi (Penyiapan <i>Talent Pool</i> BUMN 2025 dan <i>Time Table</i> Kegiatan). 1. Report on the Achievements and Activities of the Nomination and Remuneration Committee (KNR) for Q4 2024; 2. KNR Work Plan for 2025; 3. Summary of Discussions from KNR-Human Resources Meetings during 2024; 4. Key Highlights on Human Resources, Nomination, and Remuneration Matters (Preparation of the 2025 SOE Talent Pool and Activity Timeline).
24 Februari 2025 February 24, 2025	1. Pengusulan <i>Top Talent</i>; 2. Penilaian BoD. 1. Proposal for Top Talent Nomination; 2. Board of Directors Assessment.
27 April 2025 April 27, 2025	1. Permohonan Persetujuan Pengisian Jabatan Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi serta merangkap sebagai Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi Dewan Pengawas Perum PERURI. 1. Request for Approval on the Appointment of the Secretary of the Nomination and Remuneration Committee who also concurrently serves as the Secretary of the Integrated Governance Committee of the Supervisory Board of Perum PERURI.
25 Agustus 2025 August 25, 2025	1. Pembahasan tindak lanjut kinerja SDM s.d Juli 2025; 2. Pembahasan <i>action plan</i> perpindahan karyawan GovTech <i>Health</i> (203 orang) dari PDS ke <i>Holding</i>; 3. Pembahasan Tindak Lanjut <i>Succession Plan</i> atas laporan <i>Work Force Analytics</i>. 1. Discussion on Follow-up Actions for Human Resources Performance up to July 2025; 2. Discussion on the Action Plan for the Transfer of GovTech Health Employees (203 employees) from PDS to the Holding Company; 3. Discussion on Succession Plan Follow-up based on the Workforce Analytics Report.

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda
19 September 2025 September 19, 2025	1. <i>Update Transisi Karyawan Govtech Health;</i> 2. <i>Update Pembatasan Masa Kerja PKWT (5 tahun);</i> 3. <i>Analisis Risiko SDM di Tahun 2025;</i> 4. <i>Analisis Return on Training Investment (ROTI);</i> 5. <i>Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewas.</i> 1. Update on the Transition of GovTech Health Employees; 2. Update on the Limitation of PKWT Employment Period (5 years); 3. Human Resources Risk Analysis in 2025; 4. Analysis of Return on Training Investment (ROTI); 5. Remuneration Policy for the Board of Directors and Supervisory Board.

Agenda Rapat Sinergi Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Divisi SDM

Agenda of the Synergy Meetings between the Nomination and Remuneration Committee and the Human Resources Division

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda
20 Januari 2025 January 20, 2025	1. <i>Top Talent BoD-1 PERURI 2025;</i> 2. <i>Strategic Workforce Planning;</i> 3. <i>Employee Engagement Survey Result.</i> 1. PERURI BoD-1 Top Talent 2025; 2. Strategic Workforce Planning; 3. Employee Engagement Survey Results.
27 Februari 2025 February 27, 2025	1. <i>Top Talent PERURI 2025;</i> 2. <i>Tindak Lanjut Strategic Workforce Planning;</i> 3. <i>Kebijakan Remunerasi Direksi & Dewas Tahun 2025.</i> 1. PERURI Top Talent 2025; 2. Follow-up Actions on Strategic Workforce Planning; 3. 2025 Remuneration Policy for the Board of Directors and Supervisory Board.
21 Maret 2025 March 21, 2025	1. <i>Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja dikaitkan dengan Pengembangan Teknologi dalam bisnis PERURI;</i> 2. <i>Kebijakan Pengembangan Talenta dan Karir PERURI Tahun 2025;</i> 3. <i>Struktur Organisasi BoD-1.</i> 1. Workforce Planning Policy in Relation to Technology Development in PERURI's Business; 2. PERURI Talent and Career Development Policy for 2025; 3. BoD-1 Organizational Structure.
27 April 2025 April 27, 2025	1. <i>Pengusulan Honorarium 2025 Direksi/Dewas dan tantiem 2024;</i> 2. <i>Action Plan dari hasil Survei kepuasan Karyawan (Employee Engagement Survey);</i> 3. <i>Capaian KPI TW1, untuk SDM;</i> 4. <i>HC master plan 2025;</i> 5. <i>Update hasil proyek "alignment Culture ke bisnis strategy PERURI saat ini";</i> 6. <i>Penerapan/Assessment Kompetensi SDM PERURI.</i> 1. Proposal for 2025 Honorarium for the Board of Directors/Supervisory Board and 2024 Tantien; 2. Action Plan based on Employee Engagement Survey Results; 3. Q1 KPI Achievement for Human Resources; 4. 2025 Human Capital Master Plan; 5. Update on the "Culture Alignment with PERURI's Current Business Strategy" Project Results; 6. Implementation/Assessment of PERURI Human Resources Competencies.
26 Mei 2025 May 26, 2025	1. <i>Update Proses Rekrutmen Operator;</i> 2. <i>PKWT 5 Tahun;</i> 3. <i>Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2026-2027.</i> 1. Update on Operator Recruitment Process; 2. 5-Year PKWT; 3. Negotiation of the Collective Labor Agreement (PKB) for the 2026–2027 Period.
25 Juni 2025 June 25, 2025	1. <i>Succession Plan BoD-1 dan BoD-2;</i> 2. <i>Development Plan untuk Mendapatkan Talent BoD-1;</i> 3. <i>Dana Pensiun Update, Pendanaan dan Liabilities-nya.</i> 1. BoD-1 and BoD-2 Succession Plan; 2. Development Plan to Obtain BoD-1 Talent; 3. Pension Fund Update, Funding, and Liabilities.
25 Juli 2025 July 25, 2025	1. <i>Update Strategi SDM dalam Penugasan SPBE beserta Pemenuhan dan Pengelolaan Karyawan di Unit Bisnis SPBE;</i> 2. <i>Update Culture Implementation;</i> 1. Update on Human Resources Strategy in SPBE Assignment, including Employee Fulfillment and Management in SPBE Business Units; 2. Update on Culture Implementation.



Tanggal Rapat Meeting Date

Agenda Agenda

22 Agustus 2025
August 22, 2025

1. *Action plan* perpindahan karyawan GovTech Health (203 orang) dari PDS ke Holding:
 - a. *Legal compliance* dan *administration* (kontrak, legalitas, dll);
 - b. *Assessment/selection* untuk penempatan sesuai kebutuhan;
 - c. Pengukuran kinerja dan produktivitas sesuai target;
 - d. Evaluasi kinerja sesuai dinamika kontrak.
2. *Update Tindak Lanjut Succession Plan* atas laporan *Work Force Analytic*.
 1. Action Plan for the Transfer of GovTech Health Employees (203 employees) from PDS to the Holding Company:
 - a. Legal compliance and administration (contracts, legality, etc.);
 - b. Assessment/selection for placement according to requirements;
 - c. Performance and productivity measurement in accordance with targets;
 - d. Performance evaluation based on contract dynamics;
 2. Update on Succession Plan Follow-up based on the Workforce Analytics Report.

22 September 2025
September 22, 2025

1. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewas pasca pidato Presiden;
2. 3 (tiga) risiko tertinggi di SDM yang harus menjadi perhatian s.d. akhir tahun 2025;
3. Evaluasi terhadap *Return On Investment* (ROI) dari *Development Program* yang sudah dijalankan;
1. Remuneration Policy for the Board of Directors and Supervisory Board following the President's speech;
2. The three (3) highest Human Resources risks requiring attention up to the end of 2025;
3. Evaluation of Return on Investment (ROI) from the Development Programs that have been implemented.

Realisasi Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Realization of Nomination and Remuneration Committee Activities

No.	Uraian Description	Ukuran/ Frekuensi RKA Measurement/ Frequency	Bobot Weight	Realisasi 2025 2025 Realization	% Realisasi Bobot % Weight Realization
1	Melakukan Pemantauan, Telaah dan Evaluasi terhadap Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia yang diterapkan Perusahaan pada tahun 2025 Monitoring, reviewing, and evaluating the Human Resources Management System implemented by the Company in 2025	2 kali 2 times	10%	2 kali 2 times	10%
2	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap implementasi Kebijakan Remunerasi Tahun 2025 Monitoring and evaluating the implementation of the 2025 Remuneration Policy	1 kali 1 time	10%	1 kali 1 time	10%
3	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Implementasi Kebijakan Nominasi Tahun 2025 Monitoring and evaluating the implementation of the 2025 Nomination Policy	1 kali 1 time	10%	1 kali 1 time	10%
4	Melakukan Pemetaan dan Pengusulan Talent Pool BOD-1 dan Talent Pool BUMN Tahun 2025 (berdasarkan usulan Direksi yang mengacu pada perrforma dan sikap kerja) Mapping and proposing the BOD-1 Talent Pool and SOE Talent Pool for 2025 (based on the Board of Directors' proposal referring to performance and work attitude)	1 kali 1 time	10%	1 kali 1 time	10%
5	Rapat Sinergi Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Direktur SDM, Teknologi dan Informasi dalam rangka membahas isu dalam lingkup nominasi, remunerasi dan sumber daya manusia Synergy meetings between the Nomination and Remuneration Committee and the Director of Human Resources, Technology and Information to discuss issues related to nomination, remuneration, and human resources	12 kali 12 times	10%	12 kali 12 times	10%
6	Rapat Internal Komite Nominasi dan Remunerasi Internal Meetings of the Nomination and Remuneration Committee	3 kali 3 times	10%	5 kali 5 times	16,6%
7	Rapat Koordinasi bersama Komite Audit dalam hal adanya temuan audit dalam lingkup nominasi dan remunerasi Coordination meetings with the Audit Committee in the event of audit findings related to nomination and remuneration matters	1 kali 1 time	10%	Tidak terdapat temuan No findings	10%

No.	Uraian Description	Ukuran/ Frekuensi RKA Measurement/ Frequency	Bobot Weight	Realisasi 2025 2025 Realization	% Realisasi Bobot % Weight Realization
8	Melaksanakan Tugas Khusus dari Dewan Pengawas dan Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Carrying out special assignments from the Supervisory Board and preparing reports on the results of assignment implementation	*Sesuai penugasan *In accordance with assignment	10%	Sesuai penugasan In accordance with assignment	10%
9	Menyusun Laporan Periodik Kegiatan Komite KNR Preparing Periodic Reports on KNR Committee Activities	4 kali 4 times	10%	4 kali 4 times	10%
10	Self-Assessment Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi 2024 Self-Assessment of the Performance of the Nomination and Remuneration Committee for 2024	1 kali 1 time	10%	1 kali 1 time	10%
Total Nilai Total Score			100%		106,6%

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Perusahaan tetap menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Komite Nominasi dan Remunerasi melalui program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Kebijakan Perusahaan mewajibkan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mengikuti pelatihan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya, guna memperdalam pemahaman atas regulasi, praktik terbaik, serta dinamika dan tantangan terkini di bidang nominasi dan remunerasi.

Training and Competency Development of the Nomination and Remuneration Committee

The Company continues to demonstrate its commitment to enhancing the competencies and capabilities of the Nomination and Remuneration Committee through continuous training and development programs. The Company's policy requires all members of the Nomination and Remuneration Committee to participate in training programs relevant to their duties and responsibilities, in order to strengthen their understanding of regulations, best practices, as well as the latest developments and challenges in the areas of nomination and remuneration.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi 2025

Training and Competency Development of the Nomination and Remuneration Committee 2025

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan Training	Tanggal Pelatihan Date of Training	Penyelenggara Organizer
Marlison Hakim	Ketua Chairman	<i>Onboarding Commissioner</i>	26-27 Februari 2025 February 26-27, 2025	BSE Leadership School
Sutanto	Anggota Member	<i>Webinar Agent AI in Finance: A New Era of Autonomous Decision Making</i>	3 Juli 2025 July 3, 2025	OJK Institute
		Mewujudkan Hari Tua yang Sejahtera: Strategi Peningkatan Kepesertaan Dana Pensiun di Sektor Informal Ensuring a Secure Retirement: Strategies for Increasing Pension Fund Enrollment in the Informal Sector	21 Agustus 2025 August 21, 2025	OJK Institute
Nanik Murwati		<i>A Complete Course for CGI, ICSAN, ACCA, ICA, MBA Students, A Guide to Company Secretaries, Board Members and Directors</i>	18 Desember 2025 December 18, 2025	Prof John Martey, FCG



Organ Pendukung Direksi

Supporting Organ of the Board of Directors

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan salah satu organ Perusahaan yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Tanggung jawab utama Sekretaris Perusahaan meliputi pembentukan dan pemeliharaan citra positif Perusahaan, serta memastikan penyampaian informasi material kepada seluruh pemangku kepentingan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sekretaris Perusahaan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi, dengan tetap melakukan koordinasi bersama organ Perusahaan lainnya, termasuk Dewan Pengawas serta auditor internal dan eksternal.

Sekretaris Perusahaan juga memiliki peran strategis dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif, baik antar organ Perusahaan maupun antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan perannya, Sekretaris Perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta mendukung implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi berkewajiban untuk menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan secara optimal.

Dasar Pengangkatan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui mekanisme internal Perusahaan dengan memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara langsung kepada Direktur Utama.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP-218/III/2021 Tanggal 31 Maret 2021, jabatan Sekretaris Perusahaan hingga saat ini diemban oleh Adi Sunardi.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is one of the Company's organs that plays a role in supporting the implementation of the duties and functions of the Board of Directors. The main responsibilities of the Corporate Secretary include establishing and maintaining the Company's positive image, as well as ensuring the disclosure of material information to all stakeholders in a timely, accurate manner, and in accordance with the applicable provisions. The Corporate Secretary is appointed by the Board of Directors and reports directly to the Board of Directors, while continuing to coordinate with other Company organs, including the Supervisory Board and internal and external auditors.

The Corporate Secretary also has a strategic role in facilitating effective communication, both among the Company's organs and between the Company and its stakeholders. In carrying out this role, the Corporate Secretary ensures compliance with prevailing laws and regulations and supports the implementation of Good Corporate Governance principles. In this regard, the Board of Directors is responsible for ensuring that the Corporate Secretary function is carried out optimally.

Basis of Appointment

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director through the Company's internal mechanism with the approval of the Supervisory Board. In carrying out his/her duties, the Corporate Secretary is responsible and reports directly to the President Director.

Based on the Board of Directors' Decree No. SKEP-218/III/2021 dated March 31, 2021, the position of Corporate Secretary is currently held by Adi Sunardi.



Struktur Organ Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Organizational Structure



Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of the Corporate Secretary

ADI SUNARDI
Kepala Sekretariat Perusahaan
Head of Corporate Secretary

Kewarganegaraan
Nationality Warga Negara Indonesia (WNI)
Indonesian Citizen (WNI)

Domisili
Domicile Jakarta

Usia
Age 40 tahun
40 years old

Riwayat Pendidikan
**Educational
Background** S1 Akuntansi Universitas Padjadjaran, Jawa Barat (2009)
Bachelor's Degree in Accounting, Universitas Padjadjaran, West Java (2009)

Pengalaman Kerja
**Professional
Experience**

- › Kepala Sekretariat Perusahaan - PERURI (2019-sekarang)
- › Kepala Biro Kesekretariatan dan Protokol PERURI (2019)
- › Kepala Departemen Pengelolaan Anak Perusahaan PERURI (2016-2019)
- › Head of Corporate Secretary - PERURI (2019-present)
- › Head of Corporate Secretariat and Protocol Bureau - PERURI (2019)
- › Head of Subsidiary Management Department - PERURI (2016-2019)

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Perusahaan

Main Duties and Functions of the Corporate Secretary

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP-2/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang *Board of Director Charter* (Pedoman Kerja Direksi) PERURI, tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa PERURI mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diminta serta memberikan informasi yang materil dan relevan kepada *stakeholder*;
3. Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*);
4. Menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RPB dan Rapat Direksi serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk risalah Rapat Direksi dan Rapat Dewan Pengawas.

Based on the Board of Directors' Decree No. KEP-2/III/2024 dated March 21, 2024 concerning the Board of Directors Charter (Board of Directors Work Guidelines) of PERURI, the duties and functions of the Corporate Secretary are as follows:

1. Ensuring that PERURI complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of Good Corporate Governance principles;
2. Providing information required by the Board of Directors and the Supervisory Board periodically and whenever requested, as well as providing material and relevant information to stakeholders;
3. The Corporate Secretary carries out duties as a liaison officer;
4. Carrying out the functions related to the implementation and documentation of RPB and Board of Directors' Meetings, as well as maintaining Company documents, including the minutes of Board of Directors' Meetings and Supervisory Board Meetings.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan sejumlah kegiatan guna mendukung pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsi yang diembannya. Rincian aktivitas yang dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi melalui penyusunan dan pengelolaan risalah rapat Direksi, penyediaan sarana pendukung rapat, serta pendokumentasian materi dan keputusan rapat guna memperkuat akuntabilitas proses pengambilan keputusan.
2. Mengelola kebijakan Perusahaan melalui koordinasi kodifikasi kebijakan, review dan evaluasi kebijakan eksisting, serta dukungan terhadap proses pengesahan kebijakan Perusahaan level 1 dan/atau level 2 agar kebijakan internal tetap tertib, relevan, dan selaras dengan kebutuhan organisasi.
3. Melaksanakan fungsi review regulasi dan kepatuhan melalui *monitoring* dan evaluasi atas regulasi baru maupun eksisting yang berkaitan dengan kegiatan bisnis PERURI, termasuk dukungan terhadap penyesuaian kebijakan dan proses internal sesuai perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mendukung tindak lanjut penguatan pengendalian internal melalui inventarisasi kebijakan, dokumentasi prosedur penyusunan kebijakan, monitoring atas kebijakan yang berlaku, serta pemantauan tindak lanjut sosialisasi kebijakan oleh pemilik kebijakan.
5. Mengelola komunikasi korporat dan penguatan citra Perusahaan melalui pelaksanaan campaign brand image PERURI sebagai perusahaan teknologi, penyusunan konten untuk berbagai saluran komunikasi, penyelenggaraan survei pengukuran indeks, serta dukungan terhadap strategi rebranding PERURI.
6. Mendukung pelaksanaan Program TJSL melalui penyaluran Program TJSL sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, pengukuran dampak sosial program, serta penyusunan strategi kolaborasi BUMN pada bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK.
7. Mendukung penguatan pelaporan keberlanjutan melalui penyusunan Sustainability Report kinerja tahun 2024 dan keikutsertaan PERURI dalam *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) tahun 2025, guna meningkatkan kualitas komunikasi kinerja keberlanjutan kepada pemangku kepentingan.
8. Mendukung transformasi organisasi, inovasi, dan penugasan strategis melalui dukungan terhadap pengembangan inovasi, *continuous improvement*, implementasi inovasi, serta pelaksanaan peran pendukung dalam *Project Management* sesuai penugasan Perusahaan.
9. Memperkuat tata kelola arsip dan administrasi korporasi melalui inventarisasi arsip secara digital, pengesahan pedoman tata naskah dinas dan tata kearsipan, relokasi arsip, serta alih media dokumen fisik menjadi dokumen digital untuk mendukung tertib administrasi dan keterlacakan dokumen Perusahaan.

Brief Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Throughout 2025, the Corporate Secretary carried out various activities to support the implementation of its duties, responsibilities, and functions. The details of activities performed by the Corporate Secretary are as follows:

1. Supporting the effectiveness of the Board of Directors' duties through the preparation and management of Board of Directors' meeting minutes, provision of meeting support facilities, and documentation of meeting materials and decisions to strengthen the accountability of the decision-making process.
2. Managing the Company's policies through coordination of policy codification, review and evaluation of existing policies, as well as support for the approval process of Level 1 and/or Level 2 Company policies to ensure that internal policies remain orderly, relevant, and aligned with organizational needs.
3. Carrying out regulatory review and compliance functions through monitoring and evaluation of new and existing regulations related to PERURI's business activities, including support for adjustments to internal policies and processes in accordance with developments in applicable laws and regulations.
4. Supporting follow-up actions to strengthen internal control through policy inventory, documentation of policy preparation procedures, monitoring of applicable policies, and monitoring of follow-up actions for policy socialization by policy owners.
5. Managing corporate communications and strengthening the Company's image through the implementation of PERURI's brand image campaign as a technology company, preparation of content for various communication channels, implementation of index measurement surveys, and support for PERURI's rebranding strategy.
6. Supporting the implementation of the TJSL Program through the distribution of TJSL Programs in accordance with the 2025 Work Plan and Budget, measurement of program social impacts, and preparation of SOE collaboration strategies in the areas of education, environment, and MSME development.
7. Supporting the strengthening of sustainability reporting through the preparation of the 2024 performance Sustainability Report and PERURI's participation in the 2025 Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT), to improve the quality of sustainability performance communication to stakeholders.
8. Supporting organizational transformation, innovation, and strategic assignments through support for innovation development, continuous improvement, innovation implementation, and the execution of supporting roles in Project Management based on Company assignments.
9. Strengthening corporate records and administrative governance through digital archive inventory, approval of official document management and records management guidelines, archive relocation, and conversion of physical documents into digital documents to support orderly administration and document traceability.



Pelatihan, *Workshop* dan Seminar Kepala Sekretariat Perusahaan Tahun 2025 Training, Workshops, and Seminars of the Head of Corporate Secretary in 2025

No.	Tanggal Date	Jenis Kegiatan Type of Activity	Nama/ Judul Kegiatan Name/Title of Activity	Penyelenggara Organizer	Tempat Venue	Keikutsertaan Direksi Participation of BOD	Jumlah jam training Number of training hours
		Training/ Webinar/ Sosialisasi Training/ Webinar/ Socialization			Offline (Nama Tempat)/ Online (Zoom) Offline (Venue Name)/Online (Zoom)	(Peserta, Pembicara, Opening Speech) (Participant, Speaker, Opening Speech)	
Adi Sunardi							
1	31 Juli - 1 Agustus 2025 July 31 - August 1, 2025	Workshop	Workshop Keterbukaan Informasi Publik Public Information Disclosure Workshop	PERURI	Yogyakarta	Peserta Participant	16 jam 16 hours
2	21 November 2025 November 21, 2025	Workshop	In-House Training Strategi dan Pemodelan Risiko In-House Training on Risk Strategy and Modeling	PERURI	Jakarta	Peserta Participant	8 jam 8 hours
3	9 Desember 2025 December 9, 2025	Workshop	Executive Briefing " Strengthening Governance Through Effective Internal Control to Enhance Business Resilience"	PERURI	Jakarta	Peserta Participant	8 jam 8 hours

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan organ internal Perusahaan yang menjalankan fungsi pemberian *assurance* dan konsultasi secara independen, objektif, dan profesional, dengan tetap berpedoman pada kode etik auditor internal.

Tugas utama SPI adalah melaksanakan pemeriksaan secara objektif atas bukti-bukti yang tersedia guna memberikan penilaian yang independen terhadap penerapan tata kelola, efektivitas manajemen risiko, serta proses pengendalian yang berlangsung di dalam organisasi.

Landasan Hukum dan Kedudukan SPI

Pembentukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) didasarkan pada sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia;

INTERNAL AUDIT UNIT (SPI)

The Internal Audit Unit (SPI) is an internal Company organ that performs independent, objective, and professional assurance and consulting functions, while adhering to the internal auditor code of ethics.

The main duties of SPI are to conduct objective reviews of available evidence in order to provide independent assessments of the implementation of governance, the effectiveness of risk management, and the control processes carried out within the organization.

Legal Basis and Position of SPI

The establishment of the Internal Audit Unit (SPI) is based on several provisions of applicable laws and regulations, as follows:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Government Regulation No. 23 of 2022 concerning Amendments to Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
3. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
4. Government Regulation No. 6 of 2019 concerning Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia;

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Struktur dan Kedudukan SPI

Structure and Position of SPI



Kedudukan SPI

Position of SPI

- SPI berkedudukan langsung dibawah Direktur Utama, dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
- KSPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

- SPI is directly under the President Director and is headed by the Head of Internal Audit Unit (KSPI), who is directly accountable to the President Director;
- The KSPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Supervisory Board/ Board of Commissioners.

Ruang Lingkup Tugas SPI

Scope of Duties of SPI

Ruang lingkup pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal (SPI) meliputi hal-hal sebagai berikut:

The scope of duties of the Internal Audit Unit (SPI) includes the following:

- Menyusun Kebijakan Pengawasan berdasarkan risiko atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang terdiri dari:
 - Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dengan pendekatan pada Internal Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Internal Audit/RBIA*);
 - Program Kerja Non Audit Tahunan (PKNAT).
- Melakukan audit dan jasa konsultasi atas penerapan tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian internal untuk peningkatan efisiensi, efektivitas dan nilai ekonomis pada seluruh kegiatan operasional Perusahaan;
- Melaksanakan Audit Khusus (*Investigative Audit*) atas kasus-kasus berindikasi penyimpangan/kecurangan (*fraud*) yang ditemukan, isu-isu yang menjadi perhatian Direksi atau informasi yang diperoleh dari *Whistleblowing System*, atas persetujuan dan/atau instruksi Direktur Utama;
- Melaksanakan penilaian atas penerapan GRC (*Governance, Risk dan Control*) pada seluruh entitas Perusahaan;
- Melaksanakan audit lain secara segera atas transaksi tertentu yang dipandang perlu dan memiliki dampak risiko kerugian Perusahaan;

- Preparing Risk-Based Audit Policies based on the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
- Preparing the Annual Work Plan (RKT), consisting of:
 - Annual Audit Work Program (PKAT) using a Risk-Based Internal Audit (RBIA) approach;
 - Annual Non-Audit Work Program (PKNAT).
- Conducting audits and consulting services on the implementation of governance, risk management, and internal controls to improve efficiency, effectiveness, and economic value across all of the Company's operational activities;
- Conducting Special Audits (Investigative Audits) on cases indicating irregularities/fraud identified, issues requiring the attention of the Board of Directors, or information obtained from the Whistleblowing System, based on the approval and/or instruction of the President Director;
- Conducting assessments of the implementation of GRC (Governance, Risk, and Control) across all Company entities;
- Conducting other immediate audits of certain transactions deemed necessary and having potential impacts on the Company's risk of loss;



7. Memantau dan mendorong *auditee* untuk menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal;
8. Melaksanakan pendampingan pada seluruh pelaksanaan kegiatan audit yang dilakukan oleh lembaga auditor independen baik Negara, Pemerintah dan Swasta (Seperti: BPK, BPKP, dan KAP).

Tanggung Jawab SPI

1. Mendukung pencapaian seluruh visi dan misi Perusahaan, memberikan keyakinan yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan;
2. Mengkomunikasikan kebijakan audit, rencana kerja audit, dan kebutuhan sumber daya kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas/Dewan untuk mendapat dukungan;
3. Memberikan arahan agar proses audit internal berjalan dengan baik;
4. Mengkoordinasikan proses audit internal dan eksternal agar berjalan secara efisien;
5. Menyajikan laporan hasil kegiatan audit dan kinerja SPI secara tepat waktu, objektif dan bermanfaat;
6. Melaksanakan dan mengembangkan program mutu (*Quality Assurance*) SPI;
7. Mengembangkan kompetensi auditor dalam menghadapi tantangan perkembangan bisnis dan perkembangan praktik audit; dan
8. Menjaga kerahasiaan seluruh data pemeriksaan dan digunakan hanya untuk kepentingan Perusahaan.

Wewenang SPI

Untuk memastikan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Internal (SPI) terlaksana secara efektif dan optimal, SPI diberikan kewenangan untuk:

1. Menentukan objek audit, ruang lingkup, strategi, metode, dan frekuensi audit internal secara independen;
2. Memiliki akses masuk setiap unit kerja (*auditee*) baik mengakses sistem informasi, dokumen, rekaman, properties, serta memasuki area kerja dan informasi lisan dari semua personil pada unit kerja (*auditee*) dengan tetap menjaga keamanan serta kerahasiaan data dan/atau informasi.
3. Memiliki akses terhadap Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi (perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN, selanjutnya disebut Perusahaan Terafiliasi) dalam rangka tugas pengawasan.
4. Memberikan penilaian atas kecukupan (kualitas) pengendalian internal, GCG dan pengelolaan risiko di unit kerja;
5. Merekomendasikan pemberian sanksi bagi staf dan para pimpinan unit kerja yang terbukti lalai dalam menjaga kecukupan pengendalian internal dan tata kelola sebagai bentuk akuntabilitasnya;
6. Melakukan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Direksi, Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit jika diperlukan;
7. Menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh

7. Monitoring and encouraging auditees to follow up on recommendations from SPI audit reports and external auditors' reports;
8. Providing assistance in all audit activities conducted by independent auditor institutions, including State, Government, and private institutions (such as BPK, BPKP, and Public Accounting Firms).

Responsibilities of SPI

1. Supporting the achievement of all the Company's vision and mission, providing independent and objective assurance with the aim of increasing value and improving the Company's operations;
2. Communicating audit policies, audit work plans, and resource requirements to the President Director and the Supervisory Board/Board to obtain support;
3. Providing direction so that the internal audit process runs properly;
4. Coordinating the internal and external audit processes so that they run efficiently;
5. Presenting reports on the results of audit activities and SPI performance in a timely, objective, and useful manner;
6. Implementing and developing the SPI Quality Assurance program;
7. Developing auditor competencies in facing challenges from business developments and the development of audit practices; and
8. Maintaining the confidentiality of all examination data and using it only for the benefit of the Company.

Authority of SPI

To ensure that the functions, duties, and responsibilities of the Internal Audit Unit (SPI) are carried out effectively and optimally, SPI is granted the authority to:

1. Determine audit objects, scope, strategies, methods, and frequency of internal audits independently;
2. Have access to enter every work unit (*auditee*), including accessing information systems, documents, records, properties, as well as entering work areas and obtaining oral information from all personnel in the work unit (*auditee*) while maintaining the security and confidentiality of data and/or information.
3. Have access to Subsidiaries and/or Affiliated Companies (companies whose shares of more than 50% are owned by Subsidiaries, a combination of Subsidiaries, or a combination of Subsidiaries with SOEs, hereinafter referred to as Affiliated Companies) in the context of supervisory duties.
4. Provide assessments on the adequacy (quality) of internal controls, GCG, and risk management in work units;
5. Recommend the imposition of sanctions for staff and leaders of work units who are proven negligent in maintaining the adequacy of internal controls and governance as a form of their accountability;
6. Conduct direct or indirect communication with the Board of Directors, Supervisory Board/Board of Commissioners, and/or Audit Committee if required;
7. Attend meetings organized by work units, whether

unit kerja baik itu rapat internal Perusahaan maupun rapat yang diselenggarakan dengan pihak luar, sebagai peninjau bila dipandang perlu;

8. Menghadiri kegiatan pencacahan, pemusnahan dan penghapusan barang, akan tetapi tidak menandatangani Berita Acara; dan
9. Dalam melaksanakan kegiatan audit dapat meminta pendampingan pihak-pihak yang memiliki keahlian setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama.

Tugas Pokok dan Fungsi SPI

A. Biro Audit Keuangan dan *Fraud*

1. Memantau dan memastikan terpenuhinya seluruh aktivitas keuangan, operasional, dan teknologi informasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. Mengoordinasikan Kegiatan audit rutin dan insidental;
3. Melakukan audit khusus terhadap dugaan penyimpangan atas suatu aturan atau prosedur yang berlaku;
4. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan fungsi kontrol dalam berbagai kegiatan keuangan dalam operasional perusahaan;
5. Mengelola *Whistleblowing System*;
6. Melakukan investigasi atas indikasi adanya pelanggaran aturan disiplin karyawan untuk kategori sedang dan berat.

B. Biro Audit Operasional dan Teknologi Informasi

1. Memantau dan memastikan terpenuhinya seluruh aktivitas informasi teknologi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. Mengoordinasikan kegiatan audit rutin dan insidental;
3. Melakukan audit khusus terhadap dugaan adanya penyimpangan atas suatu aturan atau prosedur yang berlaku;
4. Memberikan rekomendasi terkait dengan efektivitas fungsi informasi teknologi.

C. Biro Perencanaan Audit

1. Menyusun *audit planning* tahunan dan *audit charter*;
2. Memberikan rekomendasi terkait kriteria dan kebijakan audit;
3. Memberi saran dalam menciptakan standar dan kualifikasi ketentuan-ketentuan dalam audit;
4. Mengkompilasi hasil dan temuan audit dan melakukan *monitoring* tindak lanjut audit;
5. Melaksanakan pendampingan audit eksternal

Kepala SPI dan Dasar Pengangkatan

SPI berada langsung di bawah Direktur Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas. Berdasarkan Surat Keputusan No. SKEP-182/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, Perusahaan menetapkan Devi Syafriyeni sebagai Kepala SPI.

internal Company meetings or meetings held with external parties, as an observer if deemed necessary;

8. Attend inventory counting, destruction, and disposal activities, but not sign the Minutes of Meeting; and
9. In conducting audit activities, request assistance from parties with expertise after obtaining approval from the President Director.

Main Duties and Functions of SPI

A. Financial Audit and Fraud Bureau

1. Monitor and ensure the fulfillment of all financial, operational, and information technology activities in accordance with applicable procedures and provisions;
2. Coordinate routine and incidental audit activities;
3. Conduct special audits on suspected deviations from applicable rules or procedures;
4. Provide recommendations for improving control functions in various financial activities in the Company's operations;
5. Manage the *Whistleblowing System*;
6. Conduct investigations into indications of violations of employee disciplinary rules for the medium and severe categories.

B. Operational and Information Technology Audit Bureau

1. Monitor and ensure the fulfillment of all information technology activities in accordance with applicable procedures and provisions;
2. Coordinate routine and incidental audit activities;
3. Conduct special audits on suspected deviations from applicable rules or procedures;
4. Provide recommendations related to the effectiveness of information technology functions.

C. Audit Planning Bureau

1. Prepare annual audit planning and audit charter;
2. Provide recommendations related to audit criteria and policies;
3. Provide advice in creating standards and qualification requirements in audits;
4. Compile audit results and findings and monitor audit follow-ups;
5. Conduct assistance for external audits.

Head of SPI and Legal Basis of Appointment

SPI is directly under the President Director and is led by a Head of SPI who is directly responsible to the President Director. The Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director with the written approval of the Supervisory Board. Based on Decision Letter No. SKEP-182/III/2020 dated March 30, 2020, the Company appointed Devi Syafriyeni as Head of SPI.



Profil Kepala SPI Profile of Head of SPI

DEVI SYAFRIYENI
Kepala SPI
Head of SPI

Kewarganegaraan Nationality	Warga Negara Indonesia (WNI) Indonesian Citizen (WNI)
Domisili Domicile	Bogor, Jawa Barat Bogor, West Java
Usia Age	47 tahun 47 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	› S2, Finance Management, Universitas Indonesia, Depok (2012). › S1, Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat (2005). › Master's Degree, Finance Management, Universitas Indonesia, Depok (2012). › Bachelor's Degree, Accounting, Universitas Padjadjaran, West Java (2005).
Pengalaman Kerja Work Experience	Di PERURI: Kepala SPI PERURI (2020-sekarang) Di Perusahaan/Lembaga Lain: › Direktur PT Sicpa Peruri Securink (2017-2019). › Kepala Divisi Akuntansi dan Administrasi Anak Perusahaan (2016-2017). At PERURI: Head of SPI PERURI (2020-present) At Other Companies/Institutions: › Director of PT Sicpa Peruri Securink (2017-2019). › Head of Accounting and Administration Division of Subsidiary (2016-2017).
Sertifikasi Certifications	› <i>Professional Auditor Internal</i> › <i>Chartered Accountant</i> › <i>Qualified Risk Management Officer (QRMO)</i> › ERMAP oleh/by ERM Academy (ERMA)

Jumlah Karyawan dan Sertifikasi SPI

Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah personel SPI tercatat sebanyak 14 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Number of SPI Employees and Their Qualifications

As of December 31, 2025, the number of SPI personnel was recorded at 14 people, with the following details:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan terakhir Latest Education	Sertifikasi Certification	
				Nama Sertifikasi Certification Name	Lembaga penerbit Issuing Institution
1	Devi Syafriyeni	Kepala SPI Head of SPI	S2_Manajemen Keuangan Master's Degree – Finance Management	1 <i>Professional Internal Auditor (PIA)</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Internal
				2 <i>Chartered Accountant</i>	IAI - BSE BUMN
				3 <i>Qualified Risk Management Officer (QRMO)</i>	LSP MKS
2	Nurwandi	Kepala Biro Audit Operasional & TI Head of Operational & IT Audit Bureau	S1-Teknik Elektro Bachelor's Degree – Electrical Engineering	1 <i>Professional Internal Auditor (PIA)</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Internal
				2 <i>Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1</i> Government Procurement of Goods/Services Level 1	Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah LKPP National Public Procurement Agency (LKPP)
				3 <i>Sertifikasi Enterprise Risk Management Certified Professional/ ERMCP (SMM003)</i> Enterprise Risk Management Certified Professional / ERMCP (SMM003)	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
				4 <i>Certified Information System Audit (CISA)</i>	Inixindo

No.	Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan terakhir Latest Education	Sertifikasi Certification	
				Nama Sertifikasi Certification Name	Lembaga penerbit Issuing Institution
3	Deslina Pinem	Kepala Biro Audit Keuangan & <i>Fraud</i> Head of Financial Audit & Fraud Bureau	S1-Akuntansi Bachelor's Degree – Accounting	1 <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit
				2 <i>Chartered Accountant</i>	IAI - BSE BUMN
				3 <i>Qualified Risk Management Officer (QRMO)</i>	LSP MKS
				4 ERMAP	ERM Academy (ERMA)
4	M. Erfo Pratama	Kepala Biro Perencanaan Audit Head of Audit Planning Bureau	S2-Manajemen Master's Degree – Management	1 <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit
				2 <i>Chartered Accountant</i>	IAI - BSE BUMN
				3 <i>Qualified Risk Management Officer (QRMO)</i>	LSP MKS
5	Rizki Tamayanti	Auditor Muda Junior Auditor	S1-Akuntansi Bachelor's Degree – Accounting	1 <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit
				2 <i>Qualified Risk Management Officer (QRMO)</i>	LSP MKS
				3 ERMAP	ERM Academy (ERMA)
6	Hani Sabrina	Auditor Muda Junior Auditor	S1-Hukum Bachelor's Degree – Law	1 <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit
				2 <i>Qualified Risk Management Officer (QRMO)</i>	LSP MKS
				3 ERMAP	ERM Academy (ERMA)
7	Dedi Kurniawan	Auditor Muda Junior Auditor	S1-Akuntansi Bachelor's Degree – Accounting	1 <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit
				2 ERMAP	ERM Academy (ERMA)
				3 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Government Procurement of Goods/Services Level 1	Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah LKPP National Public Procurement Agency (LKPP)
8	Veryal Ana Fitri	Auditor Pertama First Auditor	S1_Teknik Industri Bachelor's Degree – Industrial Engineering	1 <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit
				2 <i>Qualified Risk Management Officer (QRMO)</i>	LSP MKS
				3 Sertifikasi <i>Governance Fundamentals (with CGP Certification)</i> Governance Fundamentals Certification (with CGP Certification)	LSP-MKS
9	Adi Purnomo	Auditor Pertama First Auditor	S1-Akuntansi Bachelor's Degree – Accounting	1 <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit
				2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Government Procurement of Goods/Services Level 1	Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah LKPP National Public Procurement Agency (LKPP)
				3 Sertifikasi <i>Governance Fundamentals (with CGP Certification)</i> Governance Fundamentals Certification (with CGP Certification)	LSP MKS
				4 Sertifikasi <i>Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i> Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) Certification	Enterprise Risk Maagement Associate Academy (ERMA)



No.	Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan terakhir Latest Education	Sertifikasi Certification	
				Nama Sertifikasi Certification Name	Lembaga penerbit Issuing Institution
10	Novianti Mega	Auditor Pertama First Auditor	S1-Sistem Informasi Bachelor's Degree – Information Systems	1 <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit
				2 <i>Sertifikasi Governance Fundamentals (with CGP Certification)</i> Governance Fundamentals Certification (with CGP Certification)	LSP MKS
				3 <i>Sertifikasi Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i> Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) Certification	Enterprise Risk Management Associate Academy (ERMA)
11	Suratno	Auditor Pertama First Auditor	S1-Ekonomi Manajemen Bachelor's Degree – Management Economics	1 <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
				2 <i>Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PJB) Level 1</i> Government Procurement of Goods and Services Certification (PJB) Level 1	Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) National Public Procurement Agency (LKPP)
12	Dewi Wahyuningsih	Koordinator Perencanaan dan Pengelolaan Audit Audit Planning and Management Coordinator	S1-Ekonomi Manajemen Bachelor's Degree – Management Economics	1 <i>Professional Auditor Internal</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Internal
				2 <i>Qualified Risk Management Officer (QRMO)</i>	LSP MKS
13	Fahmi Fadilah Hasan	Penanggung Jawab Dukungan dan Analisa Data Audit Person in Charge of Audit Support and Data Analysis	S1-Ekonomi Ketataniagaan Bachelor's Degree – Public Administration	1 <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit
				2 <i>Certified Practioner of Internal Audit (CPIA)</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
				3 <i>Qualified Risk Management Officer (QRMO)</i>	LSP MKS
14	Hery Indriyanto	Staf Perencanaan dan Pengelolaan Audit Audit Planning and Management Staff	SMA-IPA Fisika Senior High School (SMA) – Physics Science	1 <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit
				2 <i>Certified Practioner of Internal Audit (CPIA)</i>	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)

Piagam SPI

SPI memiliki Piagam SPI atau *Audit Policy & Charter* yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam tersebut memuat prinsip-prinsip dasar praktik profesional SPI, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, kedudukan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, fungsi serta ruang lingkup penugasan, termasuk prinsip independensi, objektivitas, profesionalisme, imparisalitas, dan kode etik yang wajib dipatuhi oleh SPI.

Internal Audit Charter

SPI has an Internal Audit Charter or Audit Policy & Charter which serves as a reference in carrying out its duties and responsibilities. The Charter contains the basic principles of SPI professional practices, vision and mission, objectives, organizational structure, position, authority, duties and responsibilities, functions, and scope of assignments, including the principles of independence, objectivity, professionalism, impartiality, and code of ethics that must be complied with by SPI.

Piagam Audit Internal terakhir diperbarui pada 13 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan Direksi serta Dewan Pengawas. Dokumen ini mengatur pelaksanaan kegiatan audit sekaligus menjadi pedoman untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta penerapan tata kelola yang berkelanjutan.

Kode Etik SPI

Kode Etik SPI diatur dalam *Audit Policy & Charter*. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, SPI berpedoman pada kode etik sebagai berikut:

1. Integritas

Internal auditor harus:

- › Dapat dipercaya dengan melakukan audit;
- › Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi;
- › Tidak akan secara sengaja menjadi pihak dalam kegiatan ilegal atau melakukan tindakan yang dapat didiskreditkan ke profesi audit internal atau ke Perusahaan;
- › Harus mendukung dan berkontribusi pada tujuan Perusahaan yang berlaku; dan
- › Menjaga etika integritas dan menjadi panutan serta contoh (*role model*) bagi seluruh orang di Perusahaan

2. Objektif

- › Tidak boleh berpihak saat audit namun harus bersikap netral dan menjadi kepentingan Perusahaan
- › Tidak boleh berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan apa pun yang dapat merusak, atau dianggap merusak penilaian mereka yang tidak bias. Partisipasi ini mencakup aktivitas atau hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan Perusahaan;
- › Tidak akan menerima apa pun yang dapat merusak, atau dianggap mengganggu penilaian auditor;
- › Pengungkapan semua fakta material yang diketahui oleh auditor, agar pelaporan audit objektif.

3. Kerahasiaan

- › Harus bijaksana dalam penggunaan dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama audit;
- › Tidak boleh menggunakan informasi dari keuntungan pribadi apa pun atau dengan cara apa pun yang akan bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan sah dan etis Perusahaan.

4. Kompetensi

- › Hanya akan melibatkan layanan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan;
- › Harus melakukan layanan audit internal sesuai dengan standar internasional untuk praktik profesional audit internal;
- › Harus terus meningkatkan kemahiran dan keefektifan serta kualitas layanan auditor internal.

The latest Internal Audit Charter was updated on March 13, 2023 and has obtained approval from the Board of Directors and the Supervisory Board. This document regulates the implementation of audit activities as well as serves as a guideline to ensure the effectiveness, efficiency, and adequacy of the internal control system, risk management, and the implementation of sustainable governance.

Internal Audit Code of Ethics

The Internal Audit Code of Ethics is stipulated in the Audit Policy & Charter. In carrying out its duties and responsibilities, SPI refers to the following code of ethics:

1. Integrity

Internal auditors must:

- › Be trustworthy by conducting audits;
- › Comply with laws and make disclosures as required by laws and the profession;
- › Not knowingly become a party to illegal activities or engage in actions that may discredit the internal audit profession or the Company;
- › Support and contribute to the applicable objectives of the Company; and
- › Maintain integrity ethics and become a role model and example for all people in the Company.

2. Objectivity

- › Must not take sides during audits but must act neutrally and in the interest of the Company;
- › Must not participate in any activities or relationships that may impair, or be perceived to impair, their unbiased judgment. Such participation includes activities or relationships that may conflict with the interests of the Company;
- › Will not accept anything that may impair, or be perceived to interfere with, the auditor's judgment;
- › Disclosure of all material facts known by the auditor, so that audit reporting is objective.

3. Confidentiality

- › Must be prudent in the use of and maintaining the confidentiality of information obtained during the audit;
- › Must not use information for any personal gain or in any manner that would be contrary to the law or detrimental to the legitimate and ethical objectives of the Company.

4. Competence

- › Will only involve services that have the necessary knowledge, skills, and experience;
- › Must perform internal audit services in accordance with international standards for the professional practice of internal auditing;
- › Must continuously improve the proficiency and effectiveness as well as the quality of internal auditor services.



Realisasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SPI 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa Audit Internal adalah kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan. Pelaksanaan fungsi audit internal di PERURI dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Sepanjang tahun 2025, SPI telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) serta Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) Tahun 2025 yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Pengawas. Pelaksanaan audit dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based audit*) guna memastikan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Adapun penjelasan mengenai pelaksanaan Audit pada tahun 2025 berdasarkan jenis penugasan, dapat disampaikan sebagai berikut:

- › 8 (delapan) kegiatan audit umum;
- › 1 (satu) kegiatan audit Anak Perusahaan;
- › 1 (satu) kegiatan audit khusus;
- › 1 (satu) kegiatan konsultasi.

Selain kegiatan audit sebagaimana di atas, SPI juga menjalankan kegiatan pengawasan non audit lainnya. Adapun kegiatan non audit tersebut diantaranya berupa pendampingan auditor/konsultan eksternal, monitoring penyelesaian tindaklanjut hasil audit, pengelolaan *whistleblowing system* (WBS), *review* pemeringkatan komposit risiko, penilaian kapabilitas internal audit, dan penilaian *risk maturity index*, serta kegiatan peningkatan kompetensi.

Realization of SPI Duties and Responsibilities Implementation in 2025

Based on the Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, it is explained that Internal Audit is an independent and objective assurance and consulting activity, with the objective of providing added value and improving the Company's operations, through a systematic and orderly approach, by evaluating and improving the effectiveness of internal controls, risk management, and corporate governance processes. The implementation of the internal audit function at PERURI is carried out by the Internal Audit Unit (SPI).

Throughout 2025, SPI has carried out its duties and functions in accordance with the Internal Audit Charter and the 2025 Annual Audit Work Plan (RKAT) which have been approved by the Board of Directors and the Supervisory Board. The audit implementation was carried out using a risk-based audit approach to ensure the effectiveness of internal controls, risk management, and corporate governance. The explanation regarding the implementation of Audits in 2025 based on the types of assignments is as follows:

- › 8 (eight) general audit activities;
- › (one) Subsidiary audit activity;
- › 1 (one) special audit activity;
- › 1 (one) consulting activity.

In addition to the audit activities as mentioned above, SPI also carried out other non-audit supervisory activities. The non-audit activities included assistance to external auditors/consultants, monitoring the completion of audit findings follow-ups, management of the whistleblowing system (WBS), review of composite risk ratings, assessment of internal audit capabilities, and assessment of the risk maturity index, as well as competency development activities.

Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Auditor dan Staf SPI Implementation of Competency Development for Auditors and SPI Staff

Pelaksanaan Pelatihan/ Diklat Th 2025 Training/Education Implementation in 2025				
No.	Nama Name	Nama Pelatihan/ Diklat Training/Education Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
1	Devi Syafriyeni	1 Workshop Pemahaman dan Asesmen GCG Tahun 2025 Workshop on Understanding and Assessment of GCG 2025	IICG	17-18 Sep 2025 September 17-18, 2025
		2 Memperkuat Tata Kelola Melalui Pengendalian Internal yang Efektif untuk Meningkatkan Resiliensi Bisnis Strengthening Governance Through Effective Internal Control to Improve Business Resilience	PWC	9 Des 2025 December 9, 2025
		3 Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) tahun 2025 National Internal Audit Seminar (SNIA) 2025	YPIA	3-4 Des 2025 December 3-4, 2025
		4 PSAK Key Updates & Pratical Insights	Ikatan Akuntan Indonesia	11-12 Des 2025 December 11-12, 2025

No.	Nama Name	Pelaksanaan Pelatihan/ Diklat Th 2025 Training/Education Implementation in 2025		
		Nama Pelatihan/ Diklat Training/Education Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
2	Nurwandi	1 ERM <i>Fundamentals (with ERMCP Certifications)</i>	CRMS Indonesia	14 Juli 2025 July 14, 2025
		2 <i>Workshop Pemahaman dan Asesmen GCG Tahun 2025</i> Workshop on Understanding and Assessment of GCG 2025	IICG	17-18 September 2025 September 17-18, 2025
		3 <i>Certified Information System Audit (CISA)</i>	Inixindo	19 Oktober 2025 October 19, 2025
		4 <i>In-House Training Strategi dan Permodelan Risiko</i> In-House Training on Risk Strategy and Modeling	Veda Praxis	21 November 2025 November 21, 2025
3	Deslina Pinem	1 <i>Sertifikasi Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i> Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) Certification	CRMS Indonesia	2-3 Desember 2025 December 2-3, 2025
		2 <i>In-House Training Strategi dan Permodelan Risiko</i> In-House Training on Risk Strategy and Modeling	Veda Praxis	21 November 2025 November 21, 2025
		3 <i>Workshop Pemahaman dan Asesmen GCG Tahun 2025</i> Workshop on Understanding and Assessment of GCG 2025	IICG	17-18 September 2025 September 17-18, 2025
4	Dedi Kurniawan	1 PBJ Level 1 + Sertifikasi PBJ Level 1 + Certification	Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN)	11-27 Februari 2025 February 11-27, 2025
		2 <i>Workshop Pemahaman dan Asesmen GCG Tahun 2025</i> Workshop on Understanding and Assessment of GCG 2025	IICG	17-18 September 2025 September 17-18, 2025
5	Veryal Ana Fitri	1 <i>Pelatihan & Sertifikasi Governance Fundamentals (with CGP Certification)</i> Training & Certification on Governance Fundamentals (with CGP Certification)	CRMS	4-7 Februari 2025 February 4-7, 2025
		2 <i>Workshop Pemahaman dan Asesmen GCG Tahun 2025</i> Workshop on Understanding and Assessment of GCG 2025	IICG	17-18 September 2025 September 17-18, 2025
6	Adi Purnomo	1 <i>High Level Training PDP tahun 2025</i> High Level Training PDP 2025	PT Xynexis Internasional	12-13 Juni 2025 June 12-13, 2025
		2 <i>Pelatihan & Sertifikasi Governance Fundamentals (with CGP Certification)</i> Training & Certification on Governance Fundamentals (with CGP Certification)	CRMS	4-7 Februari 2025 February 4-7, 2025
		3 <i>Workshop Pemahaman dan Asesmen GCG Tahun 2025</i> Workshop on Understanding and Assessment of GCG 2025	IICG	17-18 September 2025 September 17-18, 2025
7	Novianti Mega Prastanti	1 <i>Workshop Pemahaman dan Asesmen GCG Tahun 2025</i> Workshop on Understanding and Assessment of GCG 2025	IICG	17-18 September 2025 September 17-18, 2025
		2 <i>Sertifikasi Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i> Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) Certification	CRMS Indonesia	2-5 Desember 2025 December 2-5, 2025
		3 <i>Pelatihan & Sertifikasi Governance Fundamentals (with CGP Certification)</i> Training & Certification on Governance Fundamentals (with CGP Certification)	CRMS	4-7 Februari 2025 February 4-7, 2025
8	M. Erfo Pratama	1 <i>Internal Control Testing</i>	CRMS Indonesia	15-16 Mei 2025 May 15-16, 2025
		2 <i>Workshop Pemahaman dan Asesmen GCG Tahun 2025</i> Workshop on Understanding and Assessment of GCG 2025	IICG	17-18 September 2025 September 17-18, 2025
		3 <i>PSAK Key Updates & Pratical Insights</i>	Ikatan Akuntan Indonesia	11-12 Desember 2025 December 11-12, 2025



Pelaksanaan Pelatihan/ Diklat Th 2025 Training/Education Implementation in 2025				
No.	Nama Name	Nama Pelatihan/ Diklat Training/Education Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
9	Dewi Wahyuningsih	1 <i>HR for Non HR Manager Training Course</i>	HR House Indonesia	18-19 Juni 2025 June 18-19, 2025
		2 <i>Internal Control Testing</i>	CRMS Indonesia	15-16 Mei 2025 May 15-16, 2025
		3 <i>Workshop Pemahaman dan Asesmen GCG Tahun 2025</i> Workshop on Understanding and Assessment of GCG 2025	IICG	17-18 September 2025 September 17-18, 2025
		4 <i>Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) tahun 2025</i> National Internal Audit Seminar (SNIA) 2025	YPIA	3-4 Desember 2025 December 3-4, 2025
10	Suratno	1 <i>Workshop Pemahaman dan Asesmen GCG Tahun 2025</i> Workshop on Understanding and Assessment of GCG 2025	IICG	17-18 September 2025 September 17-18, 2025
		2 <i>Internal Control Testing</i>	CRMS Indonesia	15-16 Mei 2025 May 15-16, 2025
		3 <i>PBJ Level 1 + Sertifikasi</i> PBJ Level 1 + Certification	Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN)	10-27 September 2025 September 10-27, 2025
11	Hery Indriyanto	1 <i>Workshop Pemahaman dan Asesmen GCG Tahun 2025</i> Workshop on Understanding and Assessment of GCG 2025	IICG	17-18 September 2025 September 17-18, 2025
		2 <i>Internal Control Testing</i>	CRMS Indonesia	15-16 Mei 2025 May 15-16, 2025
		3 <i>Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) tahun 2025</i> National Internal Audit Seminar (SNIA) 2025	YPIA	3-4 Desember 2025 December 3-4, 2025
12	Fahmi Fadilah Hasan	1 <i>Workshop Pemahaman dan Asesmen GCG Tahun 2025</i> Workshop on Understanding and Assessment of GCG 2025	IICG	17-18 September 2025 September 17-18, 2025
		2 <i>Internal Control Testing</i>	CRMS Indonesia	15-16 Mei 2025 May 15-16, 2025
		3 <i>Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) tahun 2025</i> National Internal Audit Seminar (SNIA) 2025	YPIA	3-4 Desember 2025 December 3-4, 2025
13	Rizki Tamayanti	1 <i>Sertifikasi Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i> Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) Certification	CRMS Indonesia	2-5 Desember 2025 December 2-5, 2025
		2 <i>Workshop Pemahaman dan Asesmen GCG Tahun 2025</i> Workshop on Understanding and Assessment of GCG 2025	IICG	17-18 September 2025 September 17-18, 2025
		3 <i>PSAK Key Updates & Pratical Insights</i>	Ikatan Akuntan Indonesia	11-12 Desember 2025 December 11-12, 2025
		4 <i>Qualified Risk Management Officer (QRMO)</i>	CRMS Indonesia	2-5 Desember 2025 December 2-5, 2025
14	Hani Sabrina	1 <i>Sertifikasi Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i> Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) Certification	CRMS Indonesia	2-5 Desember 2025 December 2-5, 2025
		2 <i>Peserta Workshop Implementasi Keterbukaan Informasi Publik</i> Workshop Participant on Public Information Disclosure Implementation	Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia	1 Agustus 2025 August 1, 2025
		3 <i>Workshop Pemahaman dan Asesmen GCG Tahun 2025</i> Workshop on Understanding and Assessment of GCG 2025	IICG	17-18 September 2025 September 17-18, 2025

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat SPI

Berdasarkan PER-2/MBU/03/2023 pasal 64 juga diatur bahwa SPI memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyelenggaraan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Pengawas dan Komite Audit. Oleh karena itu untuk menjalankan tugas tersebut maka SPI melakukan rapat dengan Direktur Utama secara berkala setiap mingguan atau insidental jika ada hal-hal lain yang membutuhkan perhatian. Begitu juga dengan Dewan Pengawas dan Komite Audit, secara berkala SPI melakukan rapat setiap triwulanan atau insidental jika ada hal-hal yang membutuhkan perhatian.

Sepanjang tahun 2025, SPI menyelenggarakan rapat sebanyak 121 kali. Berikut agenda rapat, daftar kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran SPI dalam setiap rapat.

Agenda Rapat SPI SPI Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
1	6 Januari 2025 January 6, 2025	<i>Pre-Exit Audit</i> PWT Pre-Exit Audit PWT	SPI, PWT
2	10 Januari 2025 January 10, 2025	Undangan Pembahasan PPUMDB Discussion Meeting on PPUMDB	Keuangan, RM, SDM, SPI Finance, RM, HR, SPI
3	15 Januari 2025 January 15, 2025	Undangan Pembahasan Hasil Audit ICOFR Divisi Dafasum Discussion Meeting on ICOFR Audit Results of Dafasum Division	SPI, RM, Dafasum
4	16 Januari 2025 January 16, 2025	Pembahasan RKT Discussion of Work Plan (RKT)	SPI, Komite Audit SPI, Audit Committee
5	20 Januari 2025 January 20, 2025	Undangan Rapat Pembahasan terkait Kontrak Pencetakan Pita Cukai Discussion Meeting Related to Excise Tape Printing Contract	SBU HSS, SPI, Bea Cukai SBU HSS, SPI, Customs
6	24 Januari 2025 January 24, 2025	Undangan Rapat Komite Etik SPBE 24 Jan 2025 SPBE Ethics Committee Meeting Invitation	SPI, Legal, BPM-COE, SDM, TI, Digital SPI, Legal, BPM-COE, HR, IT, Digital
7		Undangan Diskusi Finalisasi SKEP Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan PERURI Discussion Meeting on Finalization of SKEP Policy for Archiving Implementation within PERURI Environment	SPI, Corporate Secretary
8	3 Februari 2025 February 3, 2025	Raditama	DU, SPI President Director, SPI
9	5 Februari 2025 February 5, 2025	Undangan <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Forum Group Discussion (FGD) on Government Procurement of Goods and Services	SPI, RM, Digital
10		Pembahasan ICOFR dengan PDS Discussion of ICOFR with PDS	SPI, PDS
11	10 Februari 2025 February 10, 2025	Forum Kadiv Division Head Forum	Direksi, Para Kadiv Board of Directors, Division Heads
12	11 Februari 2025 February 11, 2025	Undangan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Harmonization Meeting on Personal Data Protection Policy	SPI, Digital, BPM-COE, RM, SDM, Keuangan, Digital, Legal, TI SPI, Digital, BPM-COE, RM, HR, Finance, Digital, Legal, IT
13	17 Februari 2025 February 17, 2025	Closing Rapat Pembahasan/Konsinyering General Audit PERURI Group TB 2024 Closing Meeting on Discussion/Consolidation of General Audit of PERURI Group FY 2024	SPI, KeuOps, Sesper, BPM-COE, TI SPI, Operations Finance, Corporate Secretary, BPM-COE, IT

Policy and Implementation of SPI Meeting Frequency

Based on PER-2/MBU/03/2023 Article 64, it is also stipulated that SPI has the authority, duties, and responsibilities to conduct periodic and incidental meetings with the Board of Directors, Supervisory Board, and Audit Committee. Therefore, to carry out these duties, SPI conducts meetings with the President Director on a weekly basis or incidentally if there are other matters requiring attention. Likewise, with the Supervisory Board and Audit Committee, SPI periodically conducts meetings every quarter or incidentally if there are matters requiring attention.

Throughout 2025, SPI held 121 meetings. The following are the meeting agendas, attendance lists, and recapitulation of SPI attendance levels in each meeting.



No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
14	19 Februari 2025 February 19, 2025	Rapat Koordinasi dengan SBU Coordination Meeting with SBU	SPI, SBU
15	24 Februari 2025 February 24, 2025	RAPIM Management Meeting (RAPIM)	Direksi, Para Kadiv Board of Directors, Division Heads
16	25 Februari 2025 February 25, 2025	RAPIM Management Meeting (RAPIM)	Direksi, Para Kadiv, Para Kadep Board of Directors, Division Heads, Department Heads
17	26 Februari 2025 February 26, 2025	Undangan <i>Closing Meeting Project Integrated Business Process</i> Closing Meeting Invitation for Integrated Business Process Project	Para Kadiv Division Heads
18		<i>Entry Meeting Audit PDS</i>	SPI, PDS
19	4 Maret 2025 March 4, 2025	Undangan Rapat Pembahasan Skema Meterai Elektronik Jalur Pemungut Discussion Meeting on Electronic Stamp Duty Collector Scheme	SPI, Keuangan, RM, TI, Digital, BPM-COE SPI, Finance, RM, IT, Digital, BPM-COE
20	10 Maret 2025 March 10, 2025	Exit Meeting Konsultasi Persiapan Audit BPK – KemenPANRB Exit Meeting on Consultation for BPK - KemenPANRB Audit Preparation	SPI, Digital
21	11 Maret 2025 March 11, 2025	Rapat Direksi Board of Directors Meeting	Direksi, SPI Board of Directors, SPI
22	12 Maret 2025 March 12, 2025	Pembahasan SPBE Kemenkes 2025 Discussion on 2025 SPBE Kemenkes	SPI, RM, Keuangan, BPM-COE, Digital SPI, RM, Finance, BPM-COE, Digital
23	13 Maret 2025 March 13, 2025	Undangan <i>One on One Meeting</i> Sosialisasi Implementasi Rekomendasi Project IIBPMS 2024 – Direktorat Utama One-on-One Meeting on Socialization of the Implementation of Recommendations of the 2024 IIBPMS Project – Main Directorate	Jajaran Direktorat Utama Main Directorate Team
24	18 Maret 2025 March 18, 2025	Rapat Negosiasi Harga Addendum Penambahan Lingkup Pekerjaan Pengadaan KAP untuk Jasa Audit dan AUP Tahun Buku 2024 Price Negotiation Meeting for Addendum on Additional Scope of Work for KAP Procurement for Audit and AUP Services for FY 2024	SPI, KAP SPI, Public Accounting Firm
25	19 Maret 2025 March 19, 2025	<i>Entry Meeting</i> Audit Kepatuhan Pelaksanaan Pengelolaan Remunerasi Karyawan Entry Meeting on Compliance Audit of Employee Remuneration Management Implementation	SPI, SDM SPI, HR
26	21 Maret 2025 March 21, 2025	Undangan <i>Sharing Session</i> dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK Sharing Session Invitation from the Deputy for Prevention and Monitoring of KPK	Direksi, Para Kadiv Board of Directors, Division Heads
27	25 Maret 2025 March 25, 2025	Undangan Rapat Direksi Board of Directors Meeting Invitation	Para Direksi, SPI Board of Directors, SPI
28		Diskusi Smart Factory dengan TI Discussion on Smart Factory with IT	SPI, TI SPI, IT
29	26 Maret 2025 March 26, 2025	Undangan Forum Manajemen Management Forum Invitation	Direksi, Para Kadiv Board of Directors, Division Heads
30		<i>Management Meeting</i> Pemeringkatan PERURI TB 2024 PERURI FY 2024 Rating Management Meeting	SPI, Direksi, Keustra, Sesper SPI, Board of Directors, Keustra, Corporate Secretary
31	16 April 2025 April 16, 2025	Undangan Pembahasan Ketentuan Pembentukan Tim dan Pemberian Honorarium Bagi Pihak Eksternal yang Membantu Tugas Tim Discussion Meeting on Provisions for the Establishment of Teams and Provision of Honorarium for External Parties Assisting Team Duties	Sesper, RM, SDM, Keu-Ops Corporate Secretary, RM, HR, Operations Finance

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
33	24 April 2025 April 24, 2025	Undangan Pembahasan Materi Rakor Discussion Meeting on Coordination Meeting Materials	Komite Audit, Para Kadiv Audit Committee, Division Heads
34	27 April 2025 April 27, 2025	Rapat Sinergi dengan Komite Audit Synergy Meeting with Audit Committee	Komdit, SPI Audit Committee, SPI
35		Rapat TKT TKT Meeting	Dewas, Komdit, SPI, Keuangan, SDM, Komisaris AP Supervisory Board, Audit Committee, SPI, Finance, HR, Subsidiary Commissioners
36	30 April 2025 April 30, 2025	Rapat Koordinasi Penguatan <i>Quality Assurance</i> Coordination Meeting on Strengthening Quality Assurance	BI, SBU Uang, SPI, Tekmindal, Keamanan, Risbang BI, SBU Currency, SPI, Tekmindal, Security, Research & Development
37	5 Mei 2025 May 5, 2025	Raditama	DU, SPI President Director, SPI
38		Undangan Pembahasan Serah Terima Pekerjaan <i>Assessment</i> GCG dan ICOFR Discussion Meeting on Handover of GCG and ICOFR Assessment Work	SPI, RM
39	8 Mei 2025 May 8, 2025	Undangan Rapat Pembahasan Evaluasi Kinerja <i>Audited</i> TB 2024 dan Triwulan I Tahun 2025 Discussion Meeting on Evaluation of Audited Performance FY 2024 and First Quarter of 2025	DK, DS, SPI, BPM-COE, KeuOps, RM
40	22 Mei 2025 May 22, 2025	Undangan Pendampingan Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Pengadaan Pencetakan Blangko Dokumen Perjalanan RI TA 2024 oleh BPK RI Assistance Meeting on Follow-up Actions for the Examination of Procurement of Printing of Indonesian Travel Document Forms for FY 2024 by BPK RI	BPK, SBU HSS, SPI
41	2 Juni 2025 June 2, 2025	Undangan Konsinyering Finalisasi Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PERURI 2024 Consolidation Meeting Invitation for Finalization of PERURI 2024 Annual Report and Sustainability Report	SPI, BPM-COE, SBU, RM, TI, SDM, PAM, Keuangan SPI, BPM-COE, SBU, RM, IT, HR, PAM, Finance
42	3 Juni 2025 June 3, 2025	Undangan Koordinasi Coordination Meeting Invitation	SPI, SDM, PAM SPI, HR, PAM
43	10 Juni 2025 June 10, 2025	Undangan Penyampaian Hasil Analisis Program Penguatan <i>Quality Assurance</i> Pencetakan Uang Rupiah Presentation Meeting on Analysis Results of the Strengthening Quality Assurance Program for Rupiah Printing	BI, SBU HSS, Risbang, RM, BPM-COE BI, SBU HSS, Research & Development, RM, BPM- COE
44	13 Juni 2025 June 13, 2025	<i>Pre-Exit Meeting</i> Audit Kinerja PT Kertas Padalarang Pre-Exit Meeting for Performance Audit of PT Kertas Padalarang	SPI, PAP, PTKP
45	17 Juni 2025 June 17, 2025	Entry Meeting Audit Tekmindal	SPI, Tekmindal
46	20 Juni 2025 June 20, 2025	Diskusi dengan Komite Audit Discussion with Audit Committee	SPI, Komdit SPI, Audit Committee
47	23 Juni 2025 June 23, 2025	Raditama	DU, SPI President Director, SPI
48	24 Juni 2025 June 24, 2025	Undangan <i>Monitoring</i> Profil Risiko Satuan Pengawas Intern Meeting Invitation on Monitoring Internal Audit Unit Risk Profile	SPI, RM
49		<i>Entry Meeting</i> Audit Aset Entry Meeting Asset Audit	SPI, Aset, Keuangan, BPM- COE
50	25 Juni 2025 June 25, 2025	Undangan <i>Preliminary</i> Pemaparan Anaplan (Lanjutan) untuk Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Preliminary Presentation Meeting on Anaplan (Follow-up) for Preparation of Consolidated Financial Statements	SPI, Legal, Keustra, TI SPI, Legal, Keustra, IT
51	2 Juli 2025 July 2, 2025	<i>Pre-exit</i> Audit PDS	SPI, PDS



No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
52	9 Juli 2025 July 9, 2025	Rapat Koordinasi Penyampaian Progres Tindaklanjut SPBE dengan BPKP Coordination Meeting on Submission of SPBE Follow-up Progress with BPKP	SPI, BPM-COE, Digital, SDM, RM, Sesper SPI, BPM-COE, Digital, HR, RM, Corporate Secretary
53		Undangan Harmonisasi Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas Harmonization Meeting Invitation on Archiving and Official Document Administration Policy Implementation	Semua unit All Units
54	15 Juli 2025 July 15, 2025	Undangan Penyambutan Direktur SDM dan TI Welcome Meeting Invitation for HR and IT Director	Direksi, Para Kadiv Board of Directors, Division Heads
55	21 Juli 2025 July 21, 2025	Undangan sebagai Narasumber <i>Internal Organizational Awareness</i> dan Induksi bagi Karyawan Magang Rekrutmen Internal Tahun 2025 Invitation as Internal Speaker for Internal Organizational Awareness and Induction for 2025 Internal Recruitment Internship Employees	SPI, SDM SPI, HR
56	25 Juli 2025 July 25, 2025	Undangan Rapat Sinergi dengan Komite Audit Synergy Meeting Invitation with Audit Committee	SPI, Komdit SPI, Audit Committee
57		Undangan Sosialisasi Rencana Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada Perum Peruri Tahun 2025 Socialization Meeting Invitation on the Activity Plan for Performance and Financial Accountability Evaluation at Perum Peruri in 2025	SPI, Para Kadiv SPI, Division Heads
58	28 Juli 2025 July 28, 2025	Rapat Pimpinan Management Meeting	Direksi, Para Kadiv, Para Kadep Board of Directors, Division Heads, Department Heads
59	30 Juli 2025 July 30, 2025	Undangan Menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan JAMDATUN Invitation to Attend the Signing of Cooperation Agreement with JAMDATUN	SBU, RM, SPI, KeuOps, Sesper SBU, RM, SPI, Operations Finance, Corporate Secretary
60		Entry Meeting Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan oleh BPKP Entry Meeting for Performance and Financial Accountability Evaluation by BPKP	SBU, Keuangan SBU, Finance
61	4 Agustus 2025 August 4, 2025	Raditama	DU, SPI President Director, SPI
62	7 Agustus 2025 August 7, 2025	Kunjungan Studi Banding BPK AKN III terkait Desain dan Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan PERURI BPK AKN III Benchmarking Study Visit Regarding Risk Management Design and Implementation within PERURI Environment	SPI, Sesper, SBU CS, Pengamanan SPI, Corporate Secretary, SBU CS, Security
63	8 Agustus 2025 August 8, 2025	Pre Exit Audit SHL	SPI, Keuangan SPI, Finance
64	12 Agustus 2025 August 12, 2025	Pembahasan Awal Penilaian RMI TB 2024 Initial Discussion on RMI Assessment FY 2024	SPI, RM
65	19 Agustus 2025 August 19, 2025	<i>Kick-Off Meeting</i> Penilaian RMI PERURI TB 2024 Kick-Off Meeting for RMI Assessment of PERURI FY 2024	Semua unit All Units
66	20 Agustus 2025 August 20, 2025	Konfirmasi BPKP terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perum PERURI BPKP Confirmation Regarding Performance and Financial Accountability Evaluation of Perum PERURI	SPI, RM, Keuangan, Sesper SPI, RM, Finance, Corporate Secretary
67		<i>Entry meeting</i> Audit Risbang Entry Meeting Audit Research & Development	SPI, Risbang SPI, Research & Development
68	21 Agustus 2025 August 21, 2025	Undangan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Manajemen Risiko BUMN s.d. TW II 2025 Invitation for Monitoring, Evaluation, and Supervision of SOE Risk Management up to Second Quarter of 2025	BUMN, SPI, RM

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
69	26 Agustus 2026 August 26, 2025	Konfirmasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada Perum PERURI Tahun 2025 Confirmation of Performance and Financial Accountability Evaluation at Perum PERURI in 2025	SPI, Keustra
70	28 Agustus 2025 August 28, 2025	Undangan Diskusi Hasil Analisis Observasi <i>On Site</i> dan <i>Business Process Mapping</i> Dalam Rangka Penguatan Quality Assurance Pencetakan Uang Rupiah Discussion Meeting Invitation on the Results of On-Site Observation Analysis and Business Process Mapping for Strengthening Quality Assurance of Rupiah Printing	SBU CS, RM, BPM-COE, Tekmindal, Risbang SBU CS, RM, BPM-COE, Tekmindal, Research & Development
71		Undangan Rapat Koordinasi Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) Tahun 2025 Coordination Meeting Invitation for Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) 2025	BPM-COE, SPI, RM, Legal
72		Konfirmasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada Perum PERURI Tahun 2025 Confirmation of Performance and Financial Accountability Evaluation at Perum PERURI in 2025	SPI, Keuangan, BPM-COE SPI, Finance, BPM-COE
73		<i>Exit Meeting</i> Tekmindal	SPI, Tekmindal
74	29 Agustus 2025 August 29, 2025	Undangan Pelaksanaan Kegiatan Knowledge Transfer Produk <i>Cyber Insurance</i> oleh PT Media Artha Proteksi Invitation for Implementation of Knowledge Transfer Activity on Cyber Insurance Products by PT Media Artha Proteksi	RM, Keuangan, SPI, HAL RM, Finance, SPI, HAL
75		ISO 37001 - Undangan Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun 2025 ISO 37001 – Management Review Invitation for Anti-Bribery Management System 2025	Semua unit All Units
76	01 September 2025 September 1, 2025	Undangan <i>Kick-Off Meeting</i> Jasa Pendampingan Implementasi <i>Internal Control Over Finance Reporting</i> (ICOFR) PERURI 2025 Kick-Off Meeting Invitation for PERURI 2025 Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Implementation Assistance Services	Semua unit All Units
77	04 September 2025 September 4, 2025	Undangan Harmonisasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Harmonization Meeting Invitation on Goods and Services Procurement Policy	SPI, Dafasum, RM, KeuOPs SPI, Dafasum, RM, Operations Finance
78	08 September 2025 September 8, 2025	<i>Entry Meeting</i> Pemaparan dan <i>Walkthrough</i> PDDT AKN II BPK RI Semester II 2024 dan Semester I 2025 Entry Meeting for Presentation and Walkthrough of PDDT AKN II BPK RI Semester II 2024 and Semester I 2025	SPI, SBU, Keustra, Tekmindal, Pengadaan SPI, SBU, Keustra, Tekmindal, Procurement
79	09 September 2025 September 9, 2025	Undangan Radir ICOFR Radir ICOFR Invitation	Direksi, SPI, RM, BPM-COE Board of Directors, SPI, RM, BPM-COE
80		Undangan <i>Walkthrough</i> Implementasi ICOFR PERURI 2025 Walkthrough Meeting on PERURI 2025 ICOFR Implementation	Semua unit All Units
81	10-11 September 2025 September 10-11, 2025	Undangan Menghadiri <i>Digital Resilience Summit</i> 2025 Invitation to Attend Digital Resilience Summit 2025	Para Kadiv Division Heads
82	12 September 2025 September 12, 2025	<i>Exit Meeting</i> PDDT AKN II BPK RI Semester II 2024 dan Semester I 2025 Exit Meeting for PDDT AKN II BPK RI Semester II 2024 and Semester I 2025	SPI, SBU CS, RM, Tekmindal, PAM, Keustra SPI, SBU CS, RM, Tekmindal, PAM, Keustra
83		Undangan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Perancangan Jalur Karir dan Implementasi Sistem Suksesi - Direktorat Utama Focus Group Discussion (FGD) Invitation on Career Path Design and Succession System Implementation – Main Directorate	Jajaran DU Main Directorate Team
84		Undangan Harmonisasi Kebijakan Pemegang Operasional Harian (POH) Harmonization Meeting Invitation on Operational Daily Holder (POH) Policy	SPI, Legal, KeuOps SPI, Legal, Operations Finance
85	16 September 2025 September 16, 2025	Undangan Rapat Pembahasan Risiko Kualitatif untuk Penetapan Materialitas dalam Implementasi IcoFR Risk Discussion Meeting on Qualitative Risk for Materiality Determination in ICOFR Implementation	SPI, RM



No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
86	17 September 2025 September 17, 2025	<i>Exit Meeting</i> atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada Perum PERURI Tahun 2025 Exit Meeting on Performance and Financial Accountability Evaluation at Perum PERURI in 2025	SPI, DK RM, Keustra, BPM-COE
87	18 September 2025 September 18, 2025	Rapat Koordinasi terkait Hasil Evaluasi dari BPKP Coordination Meeting Related to BPKP Evaluation Results	SPI, Keustra, BPM-Coe, Digital
88	17-19 September 2025 September 17-19, 2025	<i>Workshop</i> Pemahaman dan Asesmen GCG Tahun 2025 Workshop on Understanding and Assessment of GCG 2025	SPI
89	19 September 2025 September 19, 2025	Undangan <i>Kick Off Meeting Project</i> BGN Kick-Off Meeting Invitation for BGN Project	Digital, SPI, Legal, RM, Dafasum
90	22 September 2025 September 22, 2025	Undangan Rapat Koordinasi dengan Bank Indonesia Coordination Meeting Invitation with Bank Indonesia	SPI, SBU CS, RM, Risbang, Tekmindal, BPM-COE SPI, SBU CS, RM, Research & Development, Tekmindal, BPM-COE
91	22-24 September 2025 September 22-24, 2025	Konsinyering RMI RMI Consolidation Meeting	SPI, RM
92	29 September 2025 September 29, 2025	Undangan Rapat Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>) KAP Work Explanation Meeting (<i>Aanwijzing</i>) Invitation for KAP	Dafasum, SPI
93	14 Oktober 2025 October 14, 2025	Undangan Pembahasan Materi Rapat Sinergi dengan Komdit Discussion Meeting Invitation on Meeting Materials for Synergy Meeting with Audit Committee	SPI, Komdit SPI, Audit Committee
94	16 Oktober 2025 October 16, 2025	Undangan Rapat Negosiasi Harga Pengadaan Jasa General Audit, Evaluasi <i>Key Performance Indicator</i> , dan <i>Review</i> Penilaian Peringkat Komposit Risiko Perum PERURI Tahun Buku 2025 Price Negotiation Meeting Invitation for Procurement of General Audit Services, Key Performance Indicator Evaluation, and Review of Composite Risk Rating Assessment of Perum PERURI FY 2025	SPI, Dafasum
95	17 Oktober 2025 October 17, 2025	<i>Exit Meeting</i> Audit Tekmindal	SPI, Tekmindal
96		Rapat Koordinasi <i>Matrix</i> temuan BPK BPK Findings Matrix Coordination Meeting	SPI
97	20 Oktober 2025 October 20, 2025	Rapat Sinergi & TKT dengan Dewan Pengawas Synergy & TKT Meeting with Supervisory Board	Jajaran Dewas, SPI, DK, Keuangan, Komut AP, SDM Supervisory Board Team, SPI, DK, Finance, Subsidiary President Commissioner, HR
98	22 Oktober 2025 October 22, 2025	<i>Entry Meeting</i> Audit Kepatuhan Pengelolaan Produk E-meterai Entry Meeting on Compliance Audit of E-Meterai Product Management	SPI, Digital, Keuangan, RM SPI, Digital, Finance, RM
99		<i>Entry Meeting</i> Audit Kepatuhan Pengelolaan SPBE Entry Meeting on Compliance Audit of SPBE Management	SPI, Digital, Keuangan, RM SPI, Digital, Finance, RM
100	24 Oktober 2025 October 24, 2025	Undangan <i>Walkthrough</i> Implementasi <i>Internal Control Over Financial Reporting</i> (ICOFR) PERURI Tahun 2025 – WBS Walkthrough Meeting Invitation on PERURI 2025 Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Implementation – WBS	RM, SPI
101	28 Oktober 2025 October 28, 2025	Undangan Diskusi terkait Perkembangan Upaya Penguatan Pengendalian Intern Proses Pencetakan Uang Rupiah Discussion Invitation Regarding the Development of Efforts to Strengthen Internal Control over the Rupiah Printing Process	SBU CS, SPI
102	29 Oktober 2025 October 29, 2025	RAPIM Management Meeting (RAPIM)	Direksi, Kadiv, Kadev, Dir.AP Board of Directors, Division Heads, Department Heads, Directors of Subsidiaries
103	30 Oktober 2025 October 30, 2025	<i>Kick Off Meeting General Audit</i> PERURI Group Tahun Buku 2025 Kick-Off Meeting for General Audit of PERURI Group FY 2025	Direksi, Kadiv, Dir.AP Board of Directors, Division Heads, Directors of Subsidiaries
104	03 November 2025 November 3, 2025	Undangan Rapat Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>) Jasa Penilaian (<i>Pemeringkatan</i>) Work Explanation Meeting (<i>Aanwijzing</i>) Invitation for Assessment (Rating) Services	Dafasum, SPI

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
105	05 November 2025 November 5, 2025	Undangan Pembahasan Tindak Lanjut <i>Current System Appraisal</i> (CSA) Pada Praktik <i>Quality Assurance</i> Pencetakan Uang Rupiah Discussion Invitation on Follow-up Actions for Current System Appraisal (CSA) on Quality Assurance Practices for Rupiah Printing	SBU CS, RM, SDM, Tekmindal, BPM-COE, Sesper SBU CS, RM, HR, Tekmindal, BPM-COE, Corporate Secretary
106	07 November 2025 November 7, 2025	Undangan Sosialisasi terkait Dokumen Awal <i>Business Process Mapping & Risk Control Matrix</i> Implementasi ICoFR Socialization Invitation on Initial Documents of Business Process Mapping & Risk Control Matrix for ICoFR Implementation	Semua unit All Units
107	11 November 2025 November 11, 2025	Undangan Penyelarasan Program Kerja PERURI terhadap Rencana Strategis BPS Invitation for Alignment of PERURI Work Programs with BPS Strategic Plan	Direksi, Para Kadiv Board of Directors, Division Heads
108	19 November 2025 November 19, 2025	Undangan Pembahasan Revisi <i>Corporate Policy Manual</i> (CPM) dan <i>Audit Policy Charter</i> Discussion Invitation on Revision of Corporate Policy Manual (CPM) and Audit Policy Charter	Sesper, Legal, RM Corporate Secretary, Legal, RM
109		Undangan Rapat Pengadaan untuk <i>Project</i> Project Procurement Meeting Invitation	SPI, DM, RM, Legal, BPM-COE, Keustra, Pengadaan, Digital SPI, DM, RM, Legal, BPM-COE, Keustra, Procurement, Digital
110	21 November 2025 November 21, 2025	<i>Kick-Off</i> Pemodelan Risiko Risk Modeling Kick-Off	Direksi, Para Kadiv Board of Directors, Division Heads
111	25 November 2025 November 25, 2025	Undangan <i>Forum Group Discussion Risk Control Matrix</i> Proses ELC pada Implementasi <i>Internal Control over Financial Reporting</i> (ICoFR) Focus Group Discussion (FGD) Invitation on Risk Control Matrix for ELC Process in Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) Implementation	SPI, RM
112	26 November 2025 November 26, 2025	Undangan <i>Workshop</i> Pemahaman Audit Sistem Manajemen berbasis ISO 19011:2018 Workshop Invitation on Understanding Management System Audit Based on ISO 19011:2018	Perwakilan semua unit Representatives of All Units
113	1 Desember 2025 December 1, 2025	<i>Pre Exit</i> Audit Risbang Pre-Exit Audit Research & Development	SPI, Risbang SPI, Research & Development
114	9 Desember 2025 December 9, 2025	Undangan/ <i>Invitation Executive Briefing - Strengthening Governance Through Effective Internal Control to Enhance Business Resilience</i>	Direksi, Para Kadiv Board of Directors, Division Heads
115	10 Desember 2025 December 10, 2025	Undangan <i>Kick Off Meeting</i> Pengadaan Jasa Survei Persepsi Anti Penyuapan Pemasok dan Karyawan Tahun 2025 Kick-Off Meeting Invitation for Procurement of Anti-Bribery Perception Survey Services for Suppliers and Employees in 2025	SPI, RM, BPM-COE
116	15 Desember 2025 December 15, 2025	Raditama	DU, SPI
117		Undangan Rapat Pembahasan Aspek Risiko RKAP 2026 Bersama BP BUMN Meeting Invitation on Discussion of RKAP 2026 Risk Aspects with BP BUMN	SPI, DK RM
118	17 Desember 2025 December 17, 2025	Pembahasan Hasil General Audit Interim PERURI Group 2025 Discussion on Interim General Audit Results of PERURI Group 2025	SPI, KAP, Keuangan SPI, KAP, Finance
119		<i>Pre-Exit Meeting</i> Audit Kepatuhan Pelaksanaan Pengelolaan Remunerasi Karyawan Pre-Exit Meeting on Compliance Audit of Employee Remuneration Management Implementation	SPI, SDM SPI, HR
120	22 Desember 2025 December 22, 2025	<i>Pre-Exit Meeting</i> Audit Kinerja Pengelolaan Aset Tidak Lancar Pre-Exit Meeting on Performance Audit of Non-Current Asset Management	SPI, Keuangan SPI, Finance
121	23 Desember 2025 December 23, 2025	Undangan Forum Manajemen Management Forum Invitation	Direksi, Para Kadiv Board of Directors, Division Heads



Audit Eksternal/Akuntan Publik

External Audit/Public Accountant

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan operasionalnya, PERURI berada dalam pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan serta Kantor Akuntan Publik. Pada tahun 2025, PERURI menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternal untuk melaksanakan audit independen atas aspek keuangan dan kepatuhan Perusahaan. Penunjukan KAP yang mengaudit laporan keuangan PERURI untuk tahun buku 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Pengawas serta memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dan selanjutnya ditetapkan melalui Rapat Pembahasan Bersama (RPB).

Komite Audit memiliki tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan/atau pemberhentian auditor eksternal, termasuk pertimbangan atas ruang lingkup penugasan dan besaran imbalan jasa audit. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap independensi, kompetensi, objektivitas, pengalaman, serta kualitas pelaksanaan audit oleh KAP yang bersangkutan, sesuai dengan Piagam Komite Audit dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Pengawas menyampaikan usulan kepada Pemilik Modal untuk memperoleh keputusan atas penetapan KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perusahaan. Dengan mekanisme tersebut, proses penunjukan auditor eksternal dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung kualitas pelaporan keuangan PERURI.

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Pengadaan Jasa General Audit untuk PERURI pada Tahun Buku 2025 dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Untuk menjamin independensi serta kualitas temuan pemeriksaan, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk tidak memiliki potensi benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Proses penunjukan KAP dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Selama lima tahun terakhir, yakni periode 2020 hingga 2025, opini auditor eksternal yang diterbitkan selalu wajar tanpa pengecualian.

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	PKF – Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan/Partners
Signing Partner	Drs. Sikanto, Ak., CA, CPA, Asean CPA, MM
Periode Penugasan Assignment Period	2025

In carrying out its business activities and operations, PERURI is under the supervision of the Audit Board of the Republic of Indonesia and Public Accounting Firms. In 2025, PERURI appointed a Public Accounting Firm (KAP) as an external auditor to conduct an independent audit of the Company's financial and compliance aspects. The appointment of the KAP to audit PERURI's financial statements for 2025 fiscal year was made taking into account the Supervisory Board's proposal and in accordance with the recommendations of the Audit Committee, and was subsequently approved through the Joint Discussion Meeting (RPB).

The Audit Committee is responsible for providing recommendations to the Supervisory Board regarding the appointment, reappointment, and/or dismissal of the external auditor, including considerations on the scope of assignment and the amount of audit fee. Such recommendations are prepared based on an evaluation of the independence, competence, objectivity, experience, and quality of audit performance of the relevant KAP, in accordance with the Audit Committee Charter and applicable provisions.

Based on the Audit Committee's recommendation, the Supervisory Board submits a proposal to the Owner of Capital to obtain a decision on the appointment of the KAP that will audit the Company's financial statements. Through this mechanism, the external auditor appointment process is carried out in an objective, transparent, and accountable manner to support the quality of PERURI's financial reporting.

Mechanism for Appointment of Public Accountant

The procurement of General Audit Services for PERURI for fiscal year 2025 was carried out through a direct appointment mechanism. To ensure the independence and quality of audit findings, the appointed Public Accounting Firm (KAP) does not have any potential conflict of interest with the Company.

The KAP appointment process was carried out in accordance with the applicable goods and services procurement procedures. During the last five years, namely the period from 2020 to 2025, the external auditor's opinions issued have always been unqualified opinions.

Jasa Services	› Jasa Audit atas Laporan Keuangan Induk dan Konsolidasian PERURI › Jasa Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan › Evaluasi atas Sistem Pengendali Intern › Audit atas Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Perum Peruri › Evaluasi atas kinerja dan tingkat capaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Kolegial dan Individual Direksi › <i>Review Chart of Account (Agreed upon Procedures)</i> terhadap Information Package › <i>Review</i> Penilaian Peringkat Komposit Risiko › Audit Services on PERURI Parent and Consolidated Financial Statements › Compliance Audit Services on Laws and Regulations › Evaluation of Internal Control System › Audit on Financial Statements of Perum Peruri MSME Funding Program › Evaluation of performance and achievement level of Collegial and Individual Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Directors › Review of Chart of Account (Agreed Upon Procedures) on Information Package › Review of Composite Risk Rating Assessment
Biaya Fees	Total Jasa Audit atas Laporan Keuangan Induk dan Konsolidasian Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK sebesar Rp1.368.075.000 (include PPN) The total Audit Services Fee for the Parent and Consolidated Financial Statements and the Implementation Report of the MSME Funding Program amounted to Rp1,368,075,000 (including VAT).

Berikut adalah informasi terperinci mengenai Akuntan Publik beserta Kantor Akuntan Publik yang bertugas melakukan audit atas laporan keuangan tahunan PERURI selama lima tahun terakhir:

The following is detailed information regarding the Public Accountant and Public Accounting Firm assigned to audit PERURI's annual financial statements during the last five years:

2024	
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Signing Partner	Drs. Sikanto, Ak., CA, CPA, Asean CPA, MM
Jasa Services	› Laporan Keuangan Induk dan Konsolidasian Perum PERURI › Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK › Evaluasi <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi secara Individual dan Kolegial › Laporan Audit Kepatuhan terhadap Perundang -undangan dan Kepatuhan Pengendalian Internal › <i>Agreed Upon Procedures</i> (AUP) Perum PERURI Tahun Buku 2024 › Laporan Penilaian Komposit Risiko › Perum PERURI Parent and Consolidated Financial Statements › Financial Statements of the MSME Funding Program Implementation › Evaluation of Individual and Collegial Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI) › Audit Report on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control Compliance › Agreed Upon Procedures (AUP) of Perum PERURI for Fiscal Year 2024 › Composite Risk Assessment Report
Biaya Fee	Rp1.348.200.000 (Sudah termasuk PPN) Rp1,348,200,000 (including VAT)
2023	
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Signing Partner	Drs. Sikanto, Ak., CA, CPA, Asean CPA, MM
Jasa Services	› Laporan Keuangan Induk dan Konsolidasian Perum PERURI › Laporan Pelaksanaan Program TJSL dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK › Evaluasi <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi secara Individual dan Kolegial › <i>Agreed Upon Procedures</i> (AUP) Perum PERURI Tahun Buku 2023 › Laporan Audit Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Kepatuhan Pengendalian Internal › Perum PERURI Parent and Consolidated Financial Statements › Report on the Implementation of the TJSL Program and Financial Statements of the MSME Funding Program Implementation › Evaluation of Individual and Collegial Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI) › Agreed Upon Procedures (AUP) of Perum PERURI for Fiscal Year 2023 › Audit Report on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control Compliance
Biaya Fee	Rp1.184.370.000 (Sudah termasuk PPN) Rp1,184,370,000 (including VAT)



2022

Kantor Akuntan Publik PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Public Accounting Firm

Signing Partner Bandana SE, Ak., CA, CPA, ACPA

Jasa Services

- › Laporan Keuangan PERURI (Induk) Tahun 2022
- › Laporan Keuangan Konsolidasian PERURI Tahun Buku 2022
- › Laporan Hasil Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
- › Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem Pengendalian Intern Perum Peruri Untuk Tahun Buku 2022
- › Laporan Keuangan TJSL Perum Peruri Tahun 2022
- › Laporan Hasil Penilaian KPI Direksi Secara Individual Dan Kolegial Tahun 2022
- › Laporan Hasil Pemetaan *Chart of Account* (COA) Di Level GL BUMN Dengan Coa Level GI Kementerian BUMN
- › PERURI (Parent) Financial Statements for 2022
- › PERURI Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2022
- › Audit Report on Compliance with Laws and Regulations
- › Evaluation Report on the Internal Control System of Perum Peruri for Fiscal Year 2022
- › TJSL Financial Statements of Perum Peruri for 2022
- › Assessment Report on Individual and Collegial Board of Directors' KPI for 2022
- › Report on Chart of Account (COA) Mapping at SOE GL Level with Ministry of SOEs GL COA Level

Biaya Fee Rp1.125.000.000 (Sudah termasuk PPN)
Rp1,125,000,000 (including VAT)

2021

Kantor Akuntan Publik PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Public Accounting Firm

Signing Partner Bandana SE, Ak., CA, CPA, ACPA

Jasa Services

- › Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021
- › Laporan Keuangan Induk Tahun Buku 2021
- › Laporan Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2021
- › Laporan KPI Kolegial Tahun Buku 2021
- › Laporan keuangan TJSL Tahun Buku 2021
- › Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan
- › Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal
- › Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2021
- › Parent Financial Statements for Fiscal Year 2021
- › Performance Evaluation Report for Fiscal Year 2021
- › Collegial KPI Report for Fiscal Year 2021
- › TJSL Financial Statements for Fiscal Year 2021
- › Compliance Report on Laws and Regulations
- › Compliance Report on Internal Control

Biaya Fee Rp948.609.372 (Sudah termasuk PPN)
Rp948,609,372 (including VAT)

2020

Kantor Akuntan Publik PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Public Accounting Firm

Signing Partner Bandana SE, Ak., CA, CPA, ACPA

Jasa Services

- › Laporan Keuangan Induk Tahun Buku 2020.
- › Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2020.
- › Laporan Keuangan Unit PKBL Tahun Buku 2020.
- › Laporan Evaluasi Kinerja dan KPI Tahun Buku 2020.
- › Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern.
- › Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan
- › Parent Financial Statements for Fiscal Year 2020
- › Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2020
- › PKBL Unit Financial Statements for Fiscal Year 2020
- › Performance Evaluation and KPI Report for Fiscal Year 2020
- › Compliance Report on Internal Control
- › Compliance Report on Laws and Regulations

Biaya Fee Rp766.953.495 (Sudah termasuk PPN)
Rp766,953,495 (including VAT)

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) merupakan kerangka pengawasan dan pengendalian yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Perusahaan. SPIP yang efektif menjadi elemen kunci dalam menjamin kelancaran operasional serta menciptakan lingkungan Perusahaan yang sehat, aman, dan terpercaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Direksi diwajibkan untuk menerapkan sistem Pengendalian Internal yang efektif guna melindungi investasi dan aset Perusahaan. Sistem Pengendalian Internal ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur;
2. Aktivitas Pengendalian;
3. Sistem Informasi dan komunikasi;
4. Pemantauan

SPIP dalam Implementasi Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian Internal dalam Implementasi Manajemen Risiko mencakup diantaranya pelaporan keuangan dan kegiatan operasi yang akurat dan tepat waktu. Pengendalian Internal yang efektif adalah pengendalian yang jika dioperasikan dengan benar, dapat secara efektif mencegah atau mendeteksi kesalahan yang mengakibatkan suatu risiko bagi Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan dan Surat Keputusan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara ("BP BUMN" atau sebelumnya "Kementerian BUMN") Nomor SK-5/DKU.MBU/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR), PERURI sebagai salah satu BUMN Sistemik B perlu mengimplementasikan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Pada tahun 2025, PERURI telah melaksanakan tahapan Perancangan dan Implementasi ICOFR sesuai dengan peta jalan yang tercantum pada Surat BP BUMN No. S-6/DKU.MBU/02/2025 terkait penetapan peta jalan implementasi ICOFR BUMN. Pelaksanaan tahapan Perancangan dan Implementasi ICOFR yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan cakupan/scope ICOFR yang meliputi materialitas, akun dan pengungkapan laporan keuangan signifikan, lokasi/perusahaan signifikan, proses bisnis signifikan, aplikasi signifikan, dan ITGC;
2. Pengidentifikasian risiko dan pengendalian terkait proses bisnis ICOFR;
3. Pendokumentasian rancangan proses bisnis dan pengendalian ICOFR dalam bentuk *Business Process Mapping* (BPM) dan *Risk Control Matrices* (RCM);

The Company's Internal Control System (SPIP) is a framework of supervision and control that is implemented continuously by the Company. An effective SPIP is a key element in ensuring smooth operations and in creating a healthy, safe, and reliable corporate environment.

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, the Board of Directors is required to implement an effective Internal Control System in order to protect the Company's investments and assets. This Internal Control System covers the following aspects:

1. The internal control environment within the Company, implemented in a disciplined and structured manner;
2. Control activities;
3. Information and communication systems;
4. Monitoring.

The Internal Control System in the Implementation of Risk Management

The Internal Control System in the Implementation of Risk Management includes, among others, accurate and timely financial reporting and operational activities. Effective Internal Control is control that, if operated properly, can effectively prevent or detect errors that result in a risk to the Company.

Based on Government Regulation (PP) Number 43 of 2025 concerning Financial Reporting and the Decree of the State-Owned Enterprises Regulatory Agency ("BP BUMN" or previously "Ministry of SOEs") Number SK-5/DKU.MBU/11/2024 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICOFR), PERURI as one of the Systemic B SOEs is required to implement internal control over financial reporting.

In 2025, PERURI has carried out the ICOFR Design and Implementation stages in accordance with the roadmap stipulated in BP BUMN Letter No. S-6/DKU.MBU/02/2025 regarding the determination of the ICOFR implementation roadmap for SOEs. The implementation of the ICOFR Design and Implementation stages that have been carried out are as follows:

1. Determination of the ICOFR scope covering materiality, significant financial statement accounts and disclosures, significant locations/companies, significant business processes, significant applications, and ITGC;
2. Identification of risks and controls related to ICOFR business processes;
3. Documentation of ICOFR business process design and controls in the form of Business Process Mapping (BPM) and Risk Control Matrices (RCM);



4. *Monitoring* pemenuhan dan reviu tindak lanjut terhadap hasil reviu *diagnostic* ICOFR 2024 di PERURI.

Sistem Pengendalian Internal dalam Implementasi Manajemen Risiko pada kegiatan operasional juga dilakukan guna memastikan pelaksanaan proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan melalui *internal control testing* yang dilakukan setiap tahun. Pelaksanaan *internal control testing* mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh BP BUMN Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Pada tahun 2025, PERURI melaksanakan penilaian atas penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) sesuai dengan Instruksi Kepala SPI Nomor ST-24/KSPI/XII/2025 mengenai Pelaksanaan *Self Assessment* Penerapan SPIP Tahun 2025.

Penilaian terhadap penerapan SPIP bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pengendalian internal di PERURI telah diterapkan secara memadai dan efektif. Indikator keberhasilan yang diharapkan meliputi:

- Kegiatan yang Efektif dan Efisien**
Mendukung pencapaian tujuan Perusahaan secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.
- Laporan Keuangan yang Dapat Diandalkan**
Memastikan informasi keuangan yang disajikan akurat, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Pengamanan Aset Perusahaan**
Melindungi aset Perusahaan dari risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan.
- Ketaatan Terhadap Peraturan Perusahaan dan Perundang-undangan**
Menjamin semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku

Hasil penilaian penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan di PERURI menunjukkan capaian sebesar 87,08%, yang dikategorikan dengan predikat BAIK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen dan Aspek Penerapan Sistem Pengendalian Internal Components and Aspects of Internal Control System Implementation	Bobot Weight	Nilai Score	Capaian Achievement
1	Lingkungan Pengendalian Internal Internal Control Environment	35	30,72	87,78
2	Aktivitas Pengendalian Control Activities	35	30,69	87,68
3	Sistem Informasi dan Komunikasi Information and Communication System	15	12,97	86,45
4	Pemantauan Monitoring	15	12,70	84,66
Skor Total Total Score			87,08	

4. Monitoring of compliance and review of follow-up actions on the results of the 2024 ICOFR diagnostic review at PERURI.

The Internal Control System in the Implementation of Risk Management for operational activities is also carried out to ensure the implementation of business processes in accordance with the applicable provisions in the Company through internal control testing conducted annually. The implementation of internal control testing refers to the technical guidelines issued by BP BUMN Number SK-7/DKU.MBU/10/2023.

Review of the Effectiveness of the Internal Control System

In 2025, PERURI conducted an assessment of the implementation of the Company's Internal Control System (SPIP) in accordance with the Instruction of the Head of SPI Number ST-24/KSPI/XII/2025 regarding the Implementation of the 2025 SPIP Self-Assessment.

The assessment of SPIP implementation aims to evaluate the extent to which the internal control system at PERURI has been adequately and effectively implemented. The expected success indicators include:

- Effective and Efficient Activities**
Supporting the achievement of Company objectives optimally through the effective and efficient use of resources.
- Reliable Financial Reporting**
Ensuring that the financial information presented is accurate, reliable, and in accordance with applicable accounting standards.
- Safeguarding of Company Assets**
Protecting Company assets from the risk of loss, damage, or misuse.
- Compliance with Company Regulations and Laws**
Ensuring that all activities are carried out in accordance with applicable legal and regulatory provisions.

The results of the assessment of the implementation of the Company's Internal Control System at PERURI showed an achievement of 87.08%, categorized as GOOD, with the following details:

Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern Dengan Kerangka Internasional (COSO – Internal Control Framework)

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Organisasi telah menerapkan lingkungan pengendalian yang mendukung terciptanya tata kelola yang baik melalui:

- › Penegakan integritas dan nilai etika serta komitmen terhadap kompetensi Karyawan
- › Penetapan struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas;
- › Perhatian dan arahan dari Pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Organisasi telah melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap kegiatan operasional dan administratif, antara lain melalui:

- › Identifikasi risiko pada proses bisnis utama;
- › Evaluasi kemungkinan dan dampak risiko;
- › Penyusunan langkah mitigasi untuk meminimalkan potensi kerugian atau penyimpangan.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian telah diterapkan melalui:

- › Kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi
- › Pemisahan fungsi
- › Otorisasi atas transaksi dan kegiatan
- › Pengendalian atas sistem informasi, dan administratif
- › Rekonsiliasi

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Organisasi telah menyediakan mekanisme penyampaian informasi yang memadai melalui:

- › Koordinasi antar unit kerja
- › Penggunaan system informasi dan komunikasi
- › Palaporan secara berkala
- › Penyampaian kebijakan dan prosedur kepada seluruh karyawan

5. Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Pemantauan terhadap efektivitas pengendalian internal dilakukan melalui:

- › Evaluasi dan review berkala;
- › Audit internal/pemeriksaan rutin;
- › Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi perbaikan.

Pernyataan Direksi dan Dewan Pengawas atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Pengawas, Direksi, dan Komite Audit menilai bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di PERURI sepanjang tahun 2025 berjalan dengan memadai dan efektif dalam menghadapi tantangan eksternal serta memenuhi kebutuhan operasional dan bisnis Perusahaan.

Temuan dan aspek-aspek yang menjadi fokus dalam evaluasi ini akan dijadikan acuan oleh manajemen untuk memperkuat kualitas pengendalian internal dan meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan pada tahun-tahun berikutnya.

Compliance of the Internal Control System with the International Framework (COSO – Internal Control Framework)

1. Control Environment

The organization has implemented a control environment that supports the creation of good governance through:

- › Enforcement of integrity and ethical values and commitment to employee competence
- › Establishment of organizational structure and clear division of duties
- › Attention and direction from Management in the implementation of operational activities

2. Risk Assessment

The organization has carried out identification and analysis of risks in operational and administrative activities, including through:

- › Identification of risks in key business processes;
- › Evaluation of the likelihood and impact of risks;
- › Preparation of mitigation measures to minimize potential losses or irregularities.

3. Control Activities

Control activities have been implemented through:

- › Documented policies and procedures
- › Segregation of duties
- › Authorization of transactions and activities
- › Controls over information systems and administrative processes
- › Reconciliations

4. Information and Communication

The organization has provided adequate information delivery mechanisms through:

- › Coordination between work units
- › Use of information and communication systems
- › Periodic reporting
- › Dissemination of policies and procedures to all employees

5. Monitoring Activities

Monitoring of the effectiveness of internal control is carried out through:

- › Periodic evaluation and review;
- › Internal audit/routine examination;
- › Follow-up on findings and improvement recommendations.

Statement of the Board of Directors and the Supervisory Board on the Adequacy of the Internal Control System

The Supervisory Board, the Board of Directors, and the Audit Committee assess that the implementation of the Internal Control System (SPI) at PERURI throughout 2025 has been adequate and effective in addressing external challenges and meeting the Company's operational and business needs.

The findings and aspects that became the focus of this evaluation will serve as a reference for management to strengthen the quality of internal control and improve the effectiveness of the Company's management in the following years.



Manajemen Risiko

Risk Management

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Dalam penerapan manajemen risiko, PERURI telah menetapkan struktur organisasi yang membawahi fungsi manajemen risiko. Pada periode 1 Januari s.d. 31 Maret 2025, Divisi Manajemen Risiko membawahi 2 (dua) departemen, yakni Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Analisis dan Evaluasi Risiko Usaha. Selanjutnya, pada 1 April 2025 terdapat perubahan struktur organisasi pada fungsi manajemen risiko sebagaimana yang ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi Perum PERURI nomor: SKEP-194/III/2025 tentang Struktur Organisasi Perum Percetakan Uang RI dan Surat Keputusan Direksi nomor: SKEP-214/IV/2025 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi nomor: SKEP-194/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Struktur Organisasi Perum Peruri sebagai berikut:

Struktur Organisasi Divisi Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan



Profil Kepala Divisi Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan

Pada periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025, Divisi Manajemen Risiko dipimpin oleh Titi Andayani selaku Kepala Divisi. Selanjutnya, terdapat perubahan struktur organisasi sehingga nomenklatur Divisi Manajemen Risiko berubah menjadi Divisi Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PERURI Nomor: SKEP-200/III/2025 tanggal 25 Maret 2025, terhitung mulai tanggal 1 April 2025 ditetapkan Kepala Divisi Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan yakni Edward Parlindungan Lubis dengan profil sebagai berikut:

Organizational Structure of Risk Management

In the implementation of risk management, PERURI has established an organizational structure that oversees the risk management function. For the period January 1 to March 31, 2025, the Risk Management Division consisted of 2 (two) departments, namely the Risk Management Department and the Business Risk Analysis and Evaluation Department. Subsequently, on April 1, 2025, there was a change in the organizational structure of the risk management function as stipulated in the Board of Directors Decree of Perum PERURI Number SKEP-194/III/2025 concerning the Organizational Structure of Perum Percetakan Uang RI and Board of Directors Decree Number SKEP-214/IV/2025 concerning the Refinement of Board of Directors Decree Number SKEP-194/III/2025 dated March 24, 2025 regarding the Organizational Structure of Perum Peruri, as follows:

Organizational Structure of Governance, Risk, and Compliance Division

Profile of Head of Governance, Risk, and Compliance Division

For the period January 1, 2025 to March 31, 2025, the Risk Management Division was led by Titi Andayani as Head of Division. Subsequently, there was a change in the organizational structure, whereby the nomenclature of the Risk Management Division was changed to the Governance, Risk, and Compliance Division. Based on the Board of Directors Decree of PERURI Number SKEP-200/III/2025 dated March 25, 2025, effective April 1, 2025, the Head of the Governance, Risk, and Compliance Division was appointed, namely Edward Parlindungan Lubis, with the following profile:

EDWARD PARLINDUNGAN LUBIS
Kepala Divisi Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan
 Head of Governance, Risk, and Compliance Division

Kewarganegaraan Nationality	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	59 tahun 59 years old
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	P. Sidempuan, 1 April 1967 P. Sidempuan, April 1, 1967
Pendidikan: › Magister/S-2 (University of Hawaii at Manoa, USA, Master of Business Administration, 1994) › Sarjana/S-1 (Institut Teknologi Bandung, Jurusan Teknik Elektro, 1991)	Education: › Master's Degree – University of Hawaii at Manoa, USA, Master of Business Administration, 1994 › Bachelor's Degree – Institut Teknologi Bandung, Department of Electrical Engineering, 1991
Pengalaman Kerja: › April 2025 s.d. sekarang – Kepala Divisi Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan – Perum Peruri › Juni 2024 s.d April 2025 – Subject Matter Expert – Perum PERURI › 2020 – 2024: PT Bahana Sekuritas (Member of IFG) – Direktur Utama › 2009 – 2020: PT Bahana TCW Investment Management – Direktur Utama › 2003 – 2009: PT Bahana TCW Investment Management – Direktur › 2001 – 2003: PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) – Assistant Vice President – Capital Markets Risk Management	Work Experience: › April 2025 to present – Head of Governance, Risk and Compliance Division – Perum Peruri › June 2024 to April 2025 – Subject Matter Expert – Perum PERURI › 2020 – 2024: PT Bahana Sekuritas (Member of IFG) – President Director › 2009 – 2020: PT Bahana TCW Investment Management – President Director › 2003 – 2009: PT Bahana TCW Investment Management – Director › 2001 – 2003: PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) – Assistant Vice President – Capital Markets Risk Management

Tugas Pokok dan Fungsi Divisi Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor: SKEP-214/IV/2025 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi nomor: SKEP-294/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Percetakan Uang RI, tugas pokok dan fungsi masing-masing departemen di bawah Divisi Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. Departemen Tata Kelola dan Kepatuhan
 1. Mengkoordinir, memantau dan melaporkan status Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta Pakta Integritas karyawan PERURI Group.
 2. Melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kebijakan dan pedoman tata Kelola terintegrasi, manajemen Risiko, dan kepatuhan.
 3. Mengkoordinir pemenuhan faktor uji kesesuaian dalam penilaian *Good Corporate Governance* (GCG).
 4. Melaksanakan evaluasi implementasi tata Kelola & kepatuhan terintegrasi atas regulasi eksternal/internal dengan implementasi proses bisnis yang dijalankan oleh seluruh unit kerja & anak Perusahaan.
 5. Menjalankan fungsi *Data Protection Officer* (DPO) untuk implementasi Pelindungan Data Pribadi (PDP).
 6. Melaksanakan fungsi Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) sesuai dengan Pedoman Gratifikasi.
 7. Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan *awareness* kepada seluruh karyawan tentang penerapan tata Kelola terintegrasi dan kepatuhan.
 8. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan/triwulanan/tahunan terkait implementasi tata Kelola terintegrasi dan kepatuhan Perusahaan secara berkala kepada *stakeholder* yang berkaitan.

Main Duties and Functions of Governance, Risk, and Compliance

Based on Board of Directors Decree Number SKEP-214/IV/2025 concerning the Refinement of Board of Directors Decree Number SKEP-294/III/2025 dated March 24, 2025 on the Organizational Structure of Perum Percetakan Uang RI, the main duties and functions of each department under the Governance, Risk and Compliance Division are as follows:

- a. Governance and Compliance Department
 1. Coordinating, monitoring, and reporting the status of State Officials' Wealth Reports (LHKPN) and Employee Integrity Pacts within the PERURI Group.
 2. Conducting evaluation and updating of integrated governance, risk management, and compliance policies and guidelines.
 3. Coordinating the fulfillment of suitability test factors in the assessment of Good Corporate Governance (GCG).
 4. Conducting evaluation of the implementation of integrated governance and compliance against external/internal regulations with business processes implemented by all work units and subsidiaries.
 5. Performing the function of Data Protection Officer (DPO) for the implementation of Personal Data Protection (PDP).
 6. Performing the function of the Gratification Management Unit (UPG) in accordance with the Gratification Guidelines.
 7. Conducting socialization and awareness enhancement to all employees regarding the implementation of integrated governance and compliance.
 8. Preparing and submitting monthly/quarterly/annual reports related to the implementation of integrated governance and compliance to relevant stakeholders.



b. Departemen Manajemen Risiko Strategis

1. Mengusulkan kebijakan strategi Risiko Perusahaan/*Risk Appetite Statement* (RAS) beserta Batasan kapasitas Risiko, toleransi Risiko, selera Risiko, dan limit Risiko.
2. Melaksanakan pendampingan kepada seluruh *risk owner* (*first line*) dalam implementasi *Risk Based Budgeting* Induk dan Anak Perusahaan sebagai bagian dari RKAP.
3. Melaksanakan evaluasi Indeks Komposit Risiko dan *Stress Testing* atas konteks internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Perusahaan.
4. Melakukan analisis, evaluasi, koordinasi dengan *risk owner* dalam pelaksanaan *monitoring* risiko terkait optimalisasi aset, aksi korporasi, capex, pelaksanaan inisiatif bisnis, RJPP dan portofolio bisnis Perusahaan.
5. Melaksanakan monitoring dan konsolidasi dengan *risk owner* dalam penyusunan profil risiko korporat baik secara *top-down* maupun *bottom-up*.
6. Mengembangkan analisis data pemodelan risiko sebagai bagian dari *Early Warning Signal* (EWS) bagi manajemen.
7. Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan *awareness* kepada seluruh karyawan tentang penerapan manajemen risiko dalam setiap proyek strategis Perusahaan.
8. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan/triwulanan/tahunan atas risiko korporat, optimalisasi aset, aksi korporasi, inisiatif bisnis, dan portofolio bisnis Perusahaan secara berkala kepada *stakeholder* yang berkaitan.

c. Departemen Manajemen Risiko Operasional

1. Melakukan pendampingan kepada seluruh *risk owner* sebagai *first line* dalam penyusunan profil risiko unit kerja dan Anak Perusahaan.
2. Melakukan pemutakhiran dan memantau implementasi *Business Continuity Management* untuk memastikan adanya *contingency plan* pada setiap proses bisnis.
3. Mengkoordinir pemenuhan faktor uji kesesuaian *Risk Maturity Index* (RMI).
4. Melakukan koordinasi dengan *risk owner* (*first line*) dalam pelaksanaan *monitoring* profil risiko serta memberikan *feedback* atas pergerakan *exposure* risiko unit kerja dan anak Perusahaan.
5. Menyusun dan memastikan ketersediaan pengendalian internal (*Risk Control Matrix*) pada setiap proses yang dijalankan, termasuk *Internal Control Over Financial Report* (ICOFR).
6. Mengelola dan memantau *Loss Event Database* (LED) pada seluruh unit kerja.
7. Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan *awareness* kepada seluruh karyawan tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi.
8. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan/triwulanan/tahunan atas pergerakan profil risiko seluruh unit kerja dan anak Perusahaan secara berkala kepada *stakeholder* yang berkaitan.

b. Strategic Risk Management Department

1. Proposing the Company's risk strategy policy/*Risk Appetite Statement* (RAS) including risk capacity limits, risk tolerance, risk appetite, and risk limits.
2. Providing assistance to all risk owners (*first line*) in implementing *Risk Based Budgeting* for the Parent Company and Subsidiaries as part of the RKAP.
3. Conducting evaluation of the Composite Risk Index and *Stress Testing* on internal and external conditions affecting Company performance achievement.
4. Conducting analysis, evaluation, and coordination with risk owners in monitoring risks related to asset optimization, corporate actions, capital expenditure (capex), business initiatives, RJPP, and the Company's business portfolio.
5. Monitoring and consolidation with risk owners in preparing the corporate risk profile both *top-down* and *bottom-up*.
6. Developing risk modeling data analysis as part of an early warning system (EWS) for management.
7. Conducting socialization and awareness enhancement to all employees regarding risk management implementation in every strategic project of the Company.
8. Preparing and submitting monthly/quarterly/annual reports on corporate risk, asset optimization, corporate actions, business initiatives, and business portfolio to relevant stakeholders.

c. Operational Risk Management Department

1. Assisting all risk owners as first line in preparing unit and subsidiary risk profiles.
2. Updating and monitoring the implementation of *Business Continuity Management* to ensure contingency plans exist for each business process.
3. Coordinating the fulfillment of *Risk Maturity Index* (RMI) suitability assessment factors.
4. Coordinating with risk owners (*first line*) in monitoring risk profiles and providing feedback on risk exposure movements of work units and subsidiaries.
5. Preparing and ensuring the availability of internal controls (*Risk Control Matrix*) in every process, including *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR).
6. Managing and monitoring the *Loss Event Database* (LED) across all work units.
7. Conducting socialization and awareness enhancement to all employees regarding integrated risk management implementation.
8. Preparing and submitting monthly/quarterly/annual reports on the movement of risk profiles of all work units and subsidiaries to relevant stakeholders.

Sertifikasi Manajemen Risiko

kompetensi anggota juga diperkuat dengan sertifikasi profesional yang relevan dengan fungsi Divisi Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan di PERURI. Adapun sertifikat yang dimiliki para anggota dan berlaku pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Risk Management Certification

The competence of members is also strengthened through professional certifications relevant to the function of the Governance, Risk and Compliance Division at PERURI. The certifications held by members and valid in 2025 are as follows:

No.	Nama Anggota Name of Member	Nama Sertifikasi Certification Name	Lembaga Sertifikasi Certification Body	Berlaku s.d. Valid Until
1	Edward Parlindungan Lubis	<i>Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)</i>	ERM Academy (ERMA)	Juni 2027 June 2027
		<i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i>	LSP MKS	Juni 2028 June 2028
		<i>Certified Indonesian Personal Data Protection Officer (CIPDPO)</i>	CBQA Global	15 Mei 2028 May 15, 2028
2	Dien Rusda Arini	<i>Certified Governance Risk Compliance Professional (GRCCP)</i>	LSP MKS	2 Juni 2028 June 2, 2028
		<i>Certified Governance Risk and Compliance Analyst (CGRCA)</i>	OCEG	22 Mei 2026 May 22, 2026
		<i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i>	LSP MKS	19 Desember 2025 December 19, 2025
		<i>Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)</i>	LSP MKS	5 Desember 2027 December 5, 2027
3	Raditya Zulmahdi	Certified In Strategy Execution Professional	ONE GML	Seumur Hidup Lifetime
		<i>Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i>	ERM Academy (ERMA)	2 Juni 2027 June 2, 2027
		<i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i>	LSP MKS	18 Desember 2027 December 18, 2027
		<i>Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)</i>	ERM Academy (ERMA)	5 Desember 2027 December 5, 2027
		<i>Certified Governance Professional (CGP)</i>	LSP MKS	14 September 2025 September 14, 2025
4	Rara Dzikrina Istiqomah	Certified In Strategy Execution Professional	ONE GML	Seumur Hidup Lifetime
		<i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i>	LSP MKS	30 Oktober 2027 October 30, 2027
		<i>Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)</i>	ERM Academy (ERMA)	21 Oktober 2026 October 21, 2026
		<i>Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i>	ERM Academy (ERMA)	17 Juli 2026 July 17, 2026
		Certified Data Analyst	LSP Data	12 Desember 2028 December 12, 2028
5	Tatit Prihandoyo	<i>Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)</i>	ERM Academy (ERMA)	Juni 2027 June 2027
		<i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i>	LSP MKS	1 Juni 2028 June 1, 2028
6	Safitri Nurrohmaningrum	<i>Certified Governance Professional (CGP)</i>	LSP MKS	19 Desember 2028 December 19, 2028
		<i>Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i>	ERM Academy (ERMA)	Januari 2027 January 2027
		<i>Certified Governance Risk Compliance Professional (GRCCP)</i>	LSP GRK	25 Juni 2027 June 25, 2027
		Certified Strategy Execution Professional	ONE GML	Seumur Hidup Lifetime



No.	Nama Anggota Name of Member	Nama Sertifikasi Certification Name	Lembaga Sertifikasi Certification Body	Berlaku s.d. Valid Until
7	Danang Anasa Raharja	<i>Qualified Risk Management Analyst (QRMA)</i>	LSP MKS	5 Maret 2028 March 5, 2028
		<i>Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i>	ERM Academy (ERMA)	4 Maret 2027 March 4, 2027
8	Rossy Avrini	<i>Certified Compliance Professional (CCP)</i>	LSP MKS	17 April 2028 April 17, 2028
		<i>Chartered Accountant (CA)</i>	Ikatan Akuntan Indonesia	Seumur Hidup Lifetime
		<i>Certified Professional Management Accountant (CPMA)</i>	Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia	Seumur Hidup Lifetime
		<i>Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i>	ERM Academy (ERMA)	8 Desember 2028 December 8, 2028
9	Putri Lianita	<i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i>	LSP MKS	25 Juni 2027 June 25, 2027
		<i>Enterprise Risk Management Certified Profesional (ERMCP)</i>	Enterprise Risk Management	25 Juni 2026 June 25, 2026
		<i>Certified Compliance Professional (CCP)</i>	LSP MKS	17 April 2028 April 17, 2028
		<i>Certified Governance Risk Compliance Professional (GRCCP)</i>	LSP MKS	10 Oktober 2028 October 10, 2028
		<i>Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i>	ERM Academy (ERMA)	10 Agustus 2026 August 10, 2026
10	Taufik Hidayat	<i>Qualified Risk Management Analist (QRMA)</i>	LSP MKS	31 Oktober 2026 October 31, 2026
		<i>Qualified Risk Management Officer (QRMO)</i>	LSP MKS	20 September 2027 September 20, 2027
		<i>Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i>	ERM Academy (ERMA)	20 September 2027 September 20, 2027
		<i>Certified Governance Professional (CGP)</i>	LSP MKS	30 Juli 2027 Juli 30, 2027
		<i>Certified Indonesian Personal Data Protection Officer (CIPDPO)</i>	CBQA Global	15 Mei 2028 May 15, 2028

Pelatihan Divisi Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan

Sesuai dengan Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko nomor: SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN bahwa organ pengelola risiko BUMN/Anak Perusahaan BUMN wajib memenuhi kualifikasi yang terdiri dari sertifikasi dan pelatihan.

PERURI memprioritaskan pengembangan kompetensi personil pada fungsi manajemen risiko sebagai organ pengelola risiko guna menjamin efektivitas dan keandalan sistem manajemen risiko yang diterapkan serta pemenuhan terhadap ketentuan regulator. Pemutakhiran kapabilitas teknis dan sertifikasi profesi dilakukan untuk memastikan seluruh anggota memiliki kualifikasi yang relevan dengan standar serta praktik terbaik di industri yang mencakup program pelatihan dan sertifikasi bagi seluruh personel di Jajaran Divisi Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan.

Adapun program pelatihan yang diikuti oleh jajaran Divisi Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Governance, Risk, and Compliance Division Training

In accordance with the Decree of the Deputy for Finance and Risk Management Number SK-3/DKU.MBU/05/2023 concerning Technical Guidelines on the Composition and Qualifications of Risk Management Organs within SOEs, SOE/ SOE Subsidiary risk management organs are required to meet qualifications consisting of certification and training.

PERURI prioritizes competency development of personnel in the risk management function as the risk management organ to ensure the effectiveness and reliability of the implemented risk management system as well as compliance with regulatory requirements. The updating of technical capabilities and professional certifications is carried out to ensure that all members possess qualifications relevant to industry standards and best practices, which include training and certification programs for all personnel within the Governance, Risk, and Compliance Division.

The training programs attended by personnel of the Governance, Risk, and Compliance Division throughout 2025 are as follows:

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Lembaga Pelatihan Institution	Tanggal Pelaksanaan Date
1	<i>Certified Data Protection</i>	Privasimu	28-30 April 2025 April 28–30, 2025
2	<i>ERM Implementation (ERMCP & QRMP Certification)</i>	CRMS Indonesia	10-13 Juni 2025 June 10–13, 2025
3	<i>Risk Strategy dan/and Modelling</i>	Veda Praxis	21 November 2025 November 21, 2025
4	<i>Masterclass dan/and Risk Beyond</i>	CRMS Indonesia	3-5 Desember 2025 December 3–5, 2025
5	<i>CPMA Training</i>	FEB UI	Februari - Mei 2025 February–May 2025
6	<i>Risk Appetite Statement (RAS)</i>	CRMS Indonesia	21-23 April 2025 April 21–23, 2025
7	<i>CGRCP & CGRCA</i>	CRMS Indonesia	20-23 Mei 2025 May 20–23, 2025
8	<i>Cyber Risk</i>	CRMS Indonesia	30-31 Januari 2025 January 30–31, 2025
9	<i>Risk Modeling</i>	CRMS Indonesia	26-27 Mei 2025 May 26–27, 2025
10	<i>Data Analytic</i>	CRMS Indonesia	8-9 Oktober 2025 October 8–9, 2025
11	<i>Chartered Accountant (CA) Professional Training</i>	FEB UI	15 Februari - 3 Mei 2025 February 15 – May 3, 2025
12	<i>Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)</i>	K BUMN	18-19 Februari 2025 February 18–19, 2025
13	<i>Internal Control Testing</i>	CRMS Indonesia	15-16 Mei 2025 May 15–16, 2025
14	<i>Certified Data Analyst</i>	PPM Manajemen	10- 12 Desember 2025 December 10–12, 2025
15	<i>Internal Control Testing, Masterclass</i>	K BUMN	18-19 Februari 2025 February 18–19, 2025
16	<i>Business Acumen</i>	MarkPlus Institute	20-21 Mei 2025 May 20–21, 2025
17	<i>Finance for non finance</i>	Prasmul	5-7 Maret 2025 March 5–7, 2025
18	<i>Risk Maturity Assessment for BUMN</i>	CRMS Indonesia	23-24 Juni 2025 June 23–24, 2025
19	<i>BCMCP</i>	RAP Academy	4-7 Agustus 2025 August 4–7, 2025
20	<i>QRMA Certification</i>	CRMS Indonesia	11-14 Februari 2025 February 11–14, 2025
21	<i>ERMAP</i>	CRMS Indonesia	11-14 Februari 2025 February 11–14, 2025
22	<i>Workshop & Penyuluhan Penerapan UU PDP Tahun 2025</i>	UGM	27 Februari 2025 February 27, 2025
23	<i>Risk Based Budgeting</i>	CRMS Indonesia	3-4 Juni 2025 June 3–4, 2025
24	<i>Compliance Certification by LSP MKS: CCP</i>	CRMS Indonesia	14-17 April 2025 April 14–17, 2025
25	<i>Risk Based Decision Making</i>	CRMS Indonesia	22-23 September 2025 September 22–23, 2025
26	<i>Training dan/and Sertifikasi ERMAP</i>	CRMS Indonesia	1-3 Desember 2025 dan 8 Desember 2025 December 1–3, and December 8, 2025
27	<i>Risk Beyond</i>	CRMS Indonesia	4-5 Desember 2025 December 4–5, 2025
28	<i>Implementing GRC with Certifications by LSP CGK & OCEG</i>	CRMS Indonesia	7-10 Oktober 2025 October 7–10, 2025
29	<i>Managing Legal Risk – based on ISO 31022</i>	CRMS Indonesia	5-6 Juni 2025 June 5–6, 2025
30	<i>ICoFR</i>	CRMS Indonesia	25-26 Agustus 2025 August 25–26, 2025
31	<i>Data Protection & Privacy Essentials</i>	CRMS Indonesia	29-30 September 2025 September 29–30, 2025



SISTEM MANAJEMEN RISIKO

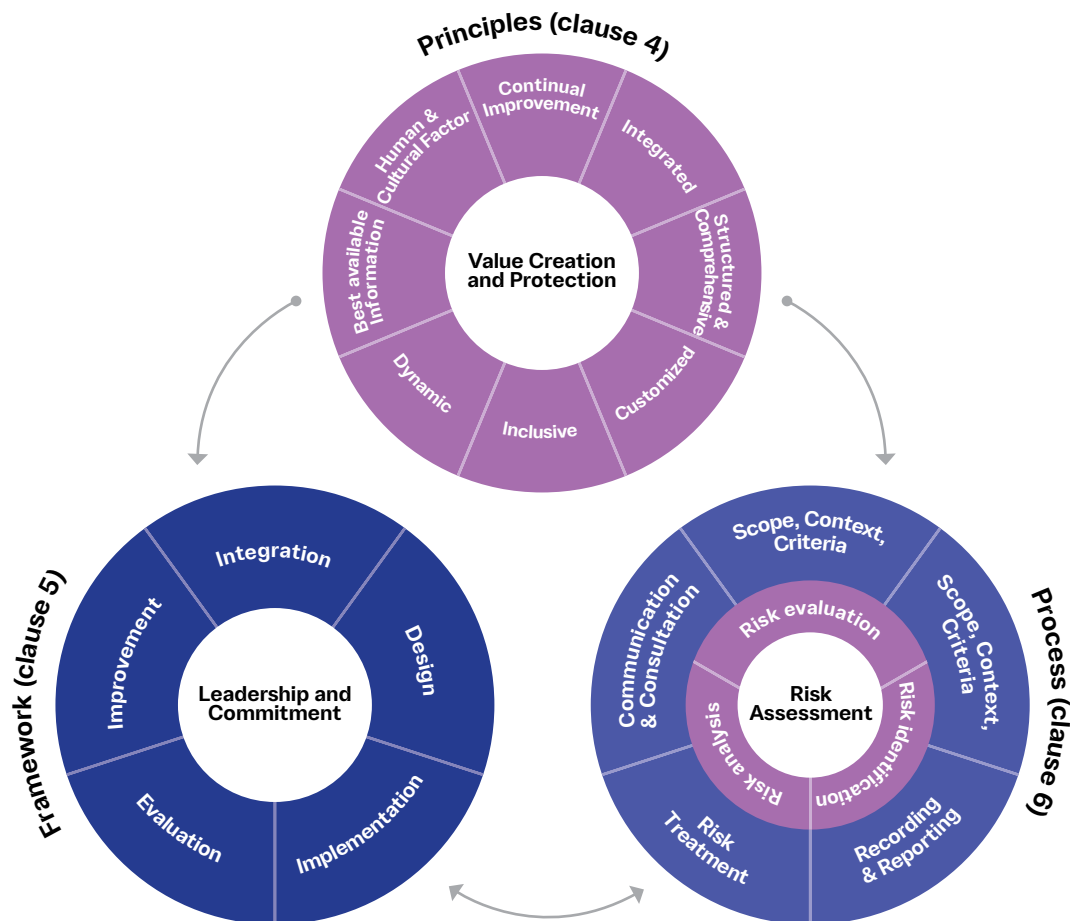
Sebagai bentuk komitmen Direksi dalam pelaksanaan manajemen risiko, PERURI telah merumuskan kebijakan manajemen risiko yang tertuang dalam *Corporate Policy Manual* (CPM) dan *Risk Management and Compliance Manual* (RMCM). Kebijakan ini diterapkan secara menyeluruh di seluruh tingkatan perusahaan, mencakup seluruh fungsi, satuan kerja, dan divisi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana manajemen risiko.

Pelaksanaan manajemen risiko di PERURI dilakukan dengan pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM), yang bertujuan untuk mengelola risiko Perusahaan secara komprehensif, meliputi berbagai jenis risiko, lokasi, dan aktivitas bisnis. Proses manajemen risiko di PERURI mengacu pada prinsip, kerangka kerja, dan praktik terbaik yang tertuang dalam ISO 31000:2018 (*Risk Management – Principles and Guidelines*).

RISK MANAGEMENT SYSTEM

As a form of the Board of Directors' commitment to the implementation of risk management, PERURI has formulated risk management policies as set out in the *Corporate Policy Manual* (CPM) and the *Risk Management and Compliance Manual* (RMCM). These policies are implemented comprehensively across all levels of the Company, covering all functions, work units, and divisions responsible for the implementation of the risk management plan.

The implementation of risk management at PERURI is carried out using an *Enterprise Risk Management* (ERM) approach, which aims to manage the Company's risks in a comprehensive manner, covering various types of risks, locations, and business activities. The risk management process at PERURI refers to the principles, framework, and best practices set out in ISO 31000:2018 (*Risk Management – Principles and Guidelines*).



Berdasarkan ISO 31000:2018, proses manajemen risiko di PERURI mencakup beberapa tahapan berikut:

1. Komunikasi dan Konsultasi;
Komunikasi dan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan harus dilakukan pada setiap aktivitas. Hal ini untuk memastikan terakomodirnya ide, pandangan dan persepsi para pemangku kepentingan dalam menyusun *risk treatment plan*. Setiap perkembangan dan perubahan *risk treatment* harus diinformasikan kepada pemangku kepentingan

Based on ISO 31000:2018, the risk management process at PERURI includes the following stages:

1. Communication and Consultation;
Communication and consultation with all stakeholders must be carried out in every activity. This is to ensure that stakeholders' ideas, views, and perceptions are accommodated in preparing the risk treatment plan. Every development and change in risk treatment must be communicated to stakeholders.

2. Menetapkan Konteks Risiko

Penetapan konteks risiko mencakup penentuan ruang lingkup, tujuan, serta kriteria risiko yang akan digunakan. Pada tahap ini, Perusahaan mempertimbangkan konteks internal & eksternal termasuk lingkungan bisnis, regulasi, dan ekspektasi pemangku kepentingan sehingga proses manajemen risiko yang dilakukan selaras dengan arah dan strategi Perusahaan.

3. *Assessment* Risiko;

Pelaksanaan *Assessment* Risiko meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Proses menemukan berbagai sumber risiko, penyebab, dan potensi dampak yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran.

b. Analisis Risiko

Proses ini membantu dalam memahami karakteristik risiko melalui penilaian Tingkat kemungkinan dan dampak dari masing-masing risiko yang telah teridentifikasi. Proses analisis risiko dapat menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif.

c. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dan kriteria yang telah ditetapkan guna menentukan prioritas penanganan dari masing-masing risiko, apakah risiko tersebut akan diterima (*accept*), ditolak (*avoid*), dimitigasi (*mitigate*), dan transfer risiko.

4. *Risk Treatment*

Berdasarkan hasil evaluasi risiko, perusahaan menentukan rencana perlakuan risiko (*risk treatment*) yang akan dilaksanakan. Rencana perlakuan risiko dapat berupa rencana proaktif (perlakuan risiko untuk meminimalisir kemungkinan terjadi) dan rencana reaktif (perlakuan risiko untuk meminimalisir dampak jika risiko tersebut terjadi).

5. *Monitoring and Review*

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas proses manajemen risiko yang dilakukan, perusahaan melakukan monitoring dan *review*. Kegiatan ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas perlakuan risiko yang dilakukan dan perubahan konsisi internal atau eksternal yang dapat berpengaruh bagi perusahaan.

6. *Recording & Reporting*

Setiap proses manajemen risiko didukung melalui dokumentasi secara memadai dan pelaporan secara berkala kepada *stakeholder* terkait.

Selain itu, sebagai BUMN Konglomerasi, PERURI wajib menerapkan model tata kelola risiko tiga lini (*Three Lines Model*) dalam implementasi manajemen risiko. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-2/MBU/03/2023. Konsep *Three Lines Model* merupakan tata kelola risiko yang menjelaskan peran dan tanggungjawab masing-masing lini sebagai bentuk pengendalian internal perusahaan. Adapun Model Tiga Lini (*Three Lines Model*) yang dilakukan PERURI dapat digambarkan sebagai berikut:

2. Establishing the Risk Context

Establishing the risk context includes determining the scope, objectives, and risk criteria to be used. At this stage, the Company considers the internal & external context, including the business environment, regulations, and stakeholder expectations, so that the risk management process carried out is aligned with the Company's direction and strategy.

3. Risk Assessment;

The implementation of Risk Assessment includes the following stages:

a. Risk Identification

The process of identifying various sources of risk, causes, and potential impacts that may affect the achievement of objectives.

b. Risk Analysis

This process helps in understanding the characteristics of risk through the assessment of the likelihood level and impact of each identified risk. The risk analysis process may use qualitative or quantitative methods.

c. Risk Evaluation

Risk evaluation is carried out by comparing the results of the analysis with the established criteria to determine the priority of handling each risk, whether the risk will be accepted (*accept*), avoided (*avoid*), mitigated (*mitigate*), or transferred (*transfer risk*).

4. Risk Treatment

Based on the results of the risk evaluation, the Company determines the risk treatment plan to be implemented. The risk treatment plan may take the form of proactive plans (risk treatment to minimize the likelihood of occurrence) and reactive plans (risk treatment to minimize the impact if the risk occurs).

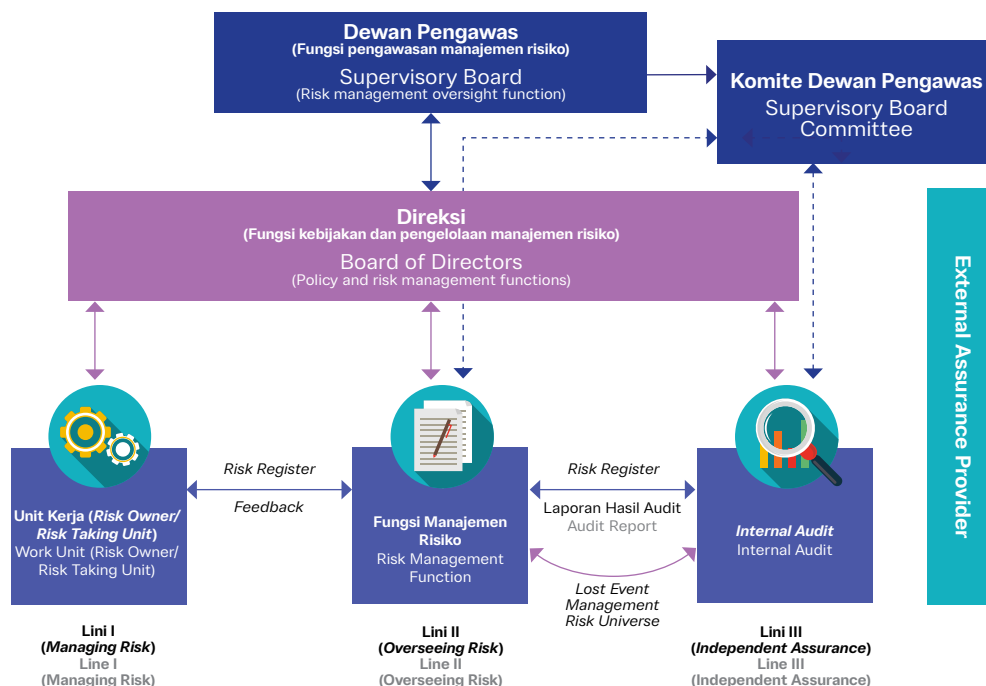
5. Monitoring and Review

To ensure the continuity and effectiveness of the risk management process carried out, the Company conducts monitoring and review. This activity includes evaluation of the effectiveness of risk treatments carried out and changes in internal or external conditions that may affect the Company.

6. Recording & Reporting

Every risk management process is supported by adequate documentation and periodic reporting to relevant stakeholders.

In addition, as a Conglomerate SOE, PERURI is required to implement the Three Lines Model in the implementation of risk management. This is in line with the provisions of Minister of SOEs Regulation Number PER-2/MBU/03/2023. The Three Lines Model is a risk governance concept that explains the roles and responsibilities of each line as a form of the Company's internal control. The Three Lines Model implemented by PERURI can be described as follows:



Adapun peran dari setiap lini adalah sebagai berikut:

1. Lini Pertama

Lini pertama dilaksanakan oleh unit kerja yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Dalam hal ini, lini pertama merupakan pemilik sasaran/pemilik risiko (*risk owner/risk taking unit*) yang langsung mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proses bisnis.

2. Lini Kedua

Lini kedua sebagai fungsi manajemen risiko dan kepatuhan independen merupakan unit yang mengukur, memantau dan memperlakukan risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan manajemen risiko perusahaan.

3. Lini Ketiga

Lini ketiga sebagai fungsi Audit Intern merupakan unit yang memastikan tata Kelola dan pengendalian risiko telah diterapkan secara efektif oleh Perusahaan.

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Strategi Risiko

Peraturan internal perusahaan terkait manajemen risiko mengacu pada ISO 31000:2018. Selain itu telah terdapat mekanisme penetapan strategi risiko termasuk nilai ambang risiko yang terdiri dari kapasitas risiko (*risk capacity*), selera risiko (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), dan batasan risiko (*risk limit*) sebagai instrumen kontrol untuk menjaga tingkat eksposur risiko. Ketentuan terkait manajemen risiko telah tertuang dalam berbagai perangkat kebijakan antara lain:

1. *Corporate Policy Manual* (CPM) dan Manual Turunannya;
2. Prosedur operasional baku (*Standard Operating Procedure/SOP*); serta
3. Pedoman kerja lainnya.

The roles of each line are as follows:

1. First Line

The first line is carried out by the work units that perform the Company's daily operational activities. In this case, the first line is the owner of objectives/the risk owner (*risk owner/risk taking unit*) that directly identifies and manages risks in business processes.

2. Second Line

The second line, as an independent risk management and compliance function, is a unit that measures, monitors, and treats risks in aggregate, and develops the Company's risk management methodologies and policies.

3. Third Line

The third line, as the Internal Audit function, is a unit that ensures that governance and risk controls have been implemented effectively by the Company.

Adequacy of Risk Management Policies and Procedures and Establishment of Risk Strategy

The Company's internal regulations related to risk management refer to ISO 31000:2018. In addition, a mechanism has been established for determining risk strategy, including risk thresholds consisting of risk capacity, risk appetite, risk tolerance, and risk limits, as control instruments to maintain the level of risk exposure. Provisions related to risk management are set out in various policy instruments, including:

1. *Corporate Policy Manual* (CPM) and its derivative manuals;
2. *Standard Operating Procedures* (SOP); and
3. Other work guidelines.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi/Aplikasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dimiliki dan dikembangkan oleh Perusahaan untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara lebih efektif. Aplikasi ini mulai dikembangkan pada akhir tahun 2018 dengan nama *Risk Control Self-Assessment* (RCSA).

Pada tahun 2025 dilakukan perubahan nama aplikasi menjadi *Eyerisk* serta terdapat pemeliharaan dan pengembangan sistem guna mendukung implementasi manajemen risiko yang selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN. Adapun ruang lingkup pengembangan tersebut meliputi:

1. Penambahan Modul *Risk Appetite Statement* beserta *threshold*;
2. Penambahan modul *monitoring* KRI;
3. Penambahan modul *input Loss Event Database*;
4. Penambahan sub menu ikhtisar perubahan *level, All Report*;
5. Penambahan modul *monitoring* analisis perubahan level.

Penerapan Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2025, PERURI telah menjalankan berbagai program manajemen risiko sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas implementasi manajemen risiko, antara lain:

Sepanjang tahun 2025 berbagai kegiatan manajemen risiko telah dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas dan efektivitas penerapan manajemen risiko di PERURI, antara lain:

1. Budaya & Kapabilitas
 - a. Peningkatan budaya dan kapabilitas mengenai Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan untuk level karyawan melalui program internalisasi bagi karyawan di berbagai unit kerja, dan program induksi bagi karyawan baru baik organik maupun PKWT
 - b. Program *refreshment* bagi *Risk Agent*, *Anti Bribery Agent* dan Anak Perusahaan sebagai pembekalan untuk penyusunan profil risiko masing-masing unit kerja
 - c. Pelaksanaan *Executive Briefing* tahun 2025 dengan mengusung tema *Strengthening Governance Through Effective Internal Control to Enhance Business Resilience* yang dihadiri oleh Dewan Pengawas, Direksi, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan Direksi Anak Perusahaan.
 - d. Sertifikasi dan program pelatihan terkait manajemen risiko bagi seluruh organ pengelola risiko Perusahaan. Adapun % pemenuhan sertifikasi sebesar 96,38%, pemenuhan pelatihan sebesar 94,10%, dan secara keseluruhan pemenuhan keduanya sebesar 95,24%
 - e. Pelaksanaan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) Award PERURI tahun 2025. Program ini merupakan penghargaan/*reward* terkait implementasi GRC yang terdiri dari 4 (empat) kategori pemenang yakni *The Most Committed Leader to*

Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Control Processes, and Risk Management Information System

Risk Management Information System/Application

The Risk Management Information System is part of the management information system owned and developed by the Company to support the implementation of risk management more effectively. This application was initially developed at the end of 2018 under the name Risk Control Self-Assessment (RCSA).

In 2025, the application name was changed to *Eyerisk*, accompanied by system maintenance and development to support the implementation of risk management in alignment with the provisions of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises.

1. Addition of the Risk Appetite Statement module, along with thresholds;
2. Addition of the KRI monitoring module;
3. Addition of the Loss Event Database input module;
4. Addition of the Overview of Level Changes"submenu under All Reports;
5. Addition of the level change analysis monitoring module.

Risk Management Implementation

Throughout 2025, PERURI has carried out various risk management programs as part of efforts to improve the quality and effectiveness of risk management implementation, including the following:

Throughout 2025, various risk management activities have been conducted as an effort to improve the quality and effectiveness of risk management implementation at PERURI, including:

1. Culture & Capability
 - a. Enhancement of culture and capability related to Governance, Risk Management, and Compliance for employee level through internalization programs for employees in various work units, and induction programs for new employees, both organic and fixed-term contract (PKWT).
 - b. Refreshment programs for Risk Agents, Anti-Bribery Agents, and Subsidiaries as preparation for the preparation of risk profiles for each work unit.
 - c. Implementation of the 2025 Executive Briefing with the theme "Strengthening Governance Through Effective Internal Control to Enhance Business Resilience," attended by the Supervisory Board, Board of Directors, Division Heads, Department Heads, and Directors of Subsidiaries.
 - d. Certification and training programs related to risk management for all risk management organs of the Company. The certification fulfillment rate is 96.38%, training fulfillment is 94.10%, and the overall combined fulfillment is 95.24%.
 - e. Implementation of the PERURI GRC Award 2025. This program is a recognition/reward related to GRC implementation consisting of four award categories, namely The Most Committed Leader to GRC 2025, The Most Outstanding Employee of GRC Award, Risk



GRC 2025, The Most Outstanding Employee of GRC Award, Risk Agent of the Year 2025, dan Anti Bribery Agent of The Year.

- f. *Training Awareness* dan Penyusunan Dokumen BCM, dilakukan untuk membangun pemahaman dan kompetensi unit kerja terkait BCM dan mengetahui tahapan penyusunan dokumen BCM.

- g. Survei Pemetaan Budaya GRC Tahun 2025 dengan hasil bahwa karyawan memiliki persepsi yang sangat baik mengenai Implementasi *Governance, Risk Management, and Compliance (GRC)* di PERURI (skor 93,33%).

2. Organisasi dan Tata Kelola

- a. Pemutakhiran kebijakan manajemen risiko yakni *Corporate Policy Manual (CPM)* dan *Risk Management and Compliance Manual (RMCM)* menyesuaikan dengan Peraturan Menteri nomor PER-2/MBU/03/2023 serta petunjuk teknisnya.
- b. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, meliputi Harmonisasi & Review Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Induk dengan Anak Perusahaan, Pemenuhan Organ Pengelola Risiko PERURI Group, Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Audit Terintegrasi, Implementasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Induk dengan Anak Perusahaan, serta Rapat sinergi Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan fungsi Manajemen Risiko Induk-Anak Perusahaan

3. Kerangka Risiko dan Kepatuhan

- a. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemutakhiran Kebijakan dan Prosedur BCM. Adapun beberapa agenda yang telah dilakukan terkait BCM sebagai berikut:
 - i. Pelaksanaan *Gap Analysis* dan Pemutakhiran Kebijakan BCM dengan memperhatikan perkembangan bisnis Perusahaan yang mengacu pada ISO 22301:2019 sebagai salah satu referensi.
 - ii. Pelaksanaan Simulasi *Business Continuity Plan (BCP) Drill Exercise SBU High Security Solution* pada proses bisnis pembuatan acuan cetak pelat pita cukai dengan solusi yang diujikan adalah pemanfaatan mesin acuan cetak yang tidak terdampak oleh insiden disruptif padam listrik pada tanggal 20 Agustus 2025. Adapun hasil evaluasi atas simulasi tersebut antara lain perlunya pemutakhiran dokumen BCP dan pelaksanaan simulasi yang berkaitan dengan sistem pengamanan perusahaan;
 - iii. Pengadaan Jasa Konsultan, untuk mendukung kegiatan *Review Business Continuity Management System (BCMS)* dan *Review*, penyesuaian dan pemutakhiran dokumen BCP sesuai dengan kondisi bisnis PERURI saat ini;
 - iv. Pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)* Penyusunan Dokumen BCM, pendampingan kepada unit kerja untuk melakukan penyusunan dokumen BCM yang terdiri dari *Business Impact Analysis, Disruptive Risk Assessment, Business Continuity Strategy* dan *Business Continuity Plan* serta melakukan *challenge session* untuk

Agent of the Year 2025, and Anti-Bribery Agent of the Year.

- f. *Training Awareness* and preparation of BCM documents, conducted to build understanding and competence of work units related to BCM and to understand the stages of BCM document preparation.

- g. 2025 GRC Culture Mapping Survey, with results showing that employees have a very good perception of the implementation of Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) at PERURI (score 93.33%).

2. Organization and Governance

- a. Updating of risk management policies, namely the Corporate Policy Manual (CPM) and Risk Management and Compliance Manual (RMCM), in accordance with Minister of SOEs Regulation PER-2/MBU/03/2023 and its technical guidelines.
- b. Implementation of Integrated Governance, including Harmonization & Review of Integrated Governance Policies between Parent Company and Subsidiaries, Fulfillment of PERURI Group Risk Management Organs, Implementation of Integrated Risk Management and Integrated Audit, Implementation of Integrated Governance Policy between Parent Company and Subsidiaries, and synergy meetings between the Risk Monitoring Committee and Integrated Governance Committee with the risk management function of the Parent Company and Subsidiaries.

3. Risk and Compliance Framework

- a. In 2025, updates to BCM policies and procedures were carried out. Several BCM-related agendas include:
 - i. Gap analysis and updating of BCM policies considering business developments, referring to ISO 22301:2019 as one of the references.
 - ii. Implementation of Business Continuity Plan (BCP) Drill Simulation at SBU High Security Solution in the production process of cigarette stamp printing plates, with the solution tested being the use of printing machines not affected by a disruptive incident of power outage on August 20, 2025. The evaluation results include the need to update BCP documents and conduct simulations related to company security systems.
 - iii. Procurement of consulting services to support the Review of the Business Continuity Management System (BCMS) and review, adjustment, and updating of BCP documents in accordance with PERURI's current business conditions;
 - iv. Focus Group Discussion (FGD) on BCM document preparation, providing assistance to work units in preparing BCM documents consisting of Business Impact Analysis, Disruptive Risk Assessment, Business Continuity Strategy, and Business Continuity Plan, including challenge sessions to ensure critical business processes

memastikan bisnis proses yang penting dan kritikal di unit kerja terkait telah terpetakan dan sesuai dengan *best practice*.

- b. Penyusunan Dokumen *Contingency Plan* sebagai salah satu pedoman dalam penanganan kondisi krisis telah dilakukan pada Juni 2025 mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 dan Aspirasi Pemegang Saham Tahun 2025 Nomor: S-468/MBU/09/2024
4. Proses & Kontrol Risiko
- a. Pelaksanaan *monitoring* Profil Risiko Korporat dan Unit Kerja sebagai bagian dari upaya pengawasan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan. Kegiatan *monitoring* mencakup pemantauan perubahan level risiko dan efektivitas pengendaliannya. Selain itu, dilakukan pemutakhiran terhadap *Loss Event Database* dari setiap kejadian risiko.
 - b. Penyusunan Profil Risiko Tahun 2026 yang terdiri dari:
 - i. Profil Risiko Korporat yang disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) melalui pendekatan *Risk Based Budgeting*.
 - ii. Profil Risiko Unit Kerja, yaitu pelaksanaan *risk assessment* atas setiap sasaran unit kerja yang dilakukan oleh *risk owner* sebagai lini pertama, dibantu oleh *risk agent* dan *anti-bribery agent* yang ditunjuk pada unit kerja tersebut;
 - iii. Profil Risiko Proyek/Inisiatif Bisnis, yaitu *risk assessment* untuk setiap portofolio bisnis yang dijalankan oleh PERURI.
 - c. Penyusunan *Risk Control Matrix* dalam rangka implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR). Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan perancangan dengan melakukan identifikasi risiko *fraud* pada proses bisnis yang berdampak pada pencatatan pelaporan keuangan termasuk mengidentifikasi aktivitas pengendaliannya.

5. Model, Data, dan Teknologi Risiko

Dalam implementasi manajemen risiko, Perusahaan telah memiliki aplikasi *Eyerisk*. Aplikasi tersebut digunakan untuk digitalisasi proses manajemen risiko dari penyusunan konteks, *risk assessment*, *risk treatment*, *risk monitoring & reporting*. Pada tahun 2025, dilakukan pengembangan aplikasi untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 dan SK-6/DKU.MBU/10/2023. Pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan melalui kegiatan pemeliharaan (*maintenance*) sistem termasuk di dalamnya penyelesaian *bugs*. Selain itu juga dilakukan pembaruan pada *risk library* agar tetap relevan dengan profil risiko Perusahaan 2025.

Selera dan Strategi Risiko PERURI Tahun 2025

Dalam rangka menciptakan dan melindungi nilai serta mendukung pertumbuhan bisnis BUMN yang berkelanjutan, BP BUMN mewajibkan seluruh BUMN untuk menyusun strategi risiko. Setiap pengambilan keputusan strategis perusahaan oleh Direksi selalu diawali dengan kajian inisiatif strategis dengan mempertimbangkan batasan risiko yang ditetapkan pada RKAP tahun berjalan.

are properly identified and aligned with best practices.

- b. Preparation of *Contingency Plan* documents as one of the crisis management guidelines conducted in June 2025, referring to Minister of SOEs Regulation PER-2/MBU/03/2023 and Shareholder Aspirations for 2025 No. S-468/MBU/09/2024.

4. Risk Processes & Controls

- a. Monitoring of Corporate and Work Unit Risk Profiles as part of continuous oversight of the effectiveness of risk management implementation within the Company. Monitoring activities include tracking changes in risk levels and control effectiveness. In addition, updates are made to the Loss Event Database for each risk event.
- b. Preparation of the 2026 Risk Profile consisting of:
 - i. Corporate Risk Profile prepared together with the Company Work Plan and Budget (RKAP) using a Risk-Based Budgeting approach.
 - ii. Work Unit Risk Profile, which is risk assessment of each unit's objectives carried out by risk owners as the first line, assisted by risk agents and anti-bribery agents assigned in the respective work units.
 - iii. Project/Business Initiative Risk Profile, which is risk assessment for each business portfolio carried out by PERURI.
- c. Preparation of the Risk Control Matrix in the context of implementing Internal Control over Financial Reporting (ICoFR). This activity is part of the design phase, carried out by identifying fraud risks in business processes that impact financial reporting records, including the identification of related control activities.

5. Risk Model, Data, and Technology

In risk management implementation, the Company has an application called *Eyerisk*. This application is used to digitize the risk management process from context setting, risk assessment, risk treatment, risk monitoring & reporting. In 2025, system development was carried out to align with Minister of SOEs Regulation PER-2/MBU/03/2023 and SK-6/DKU.MBU/10/2023. Continuous improvement and maintenance activities were conducted, including bug fixing. In addition, the risk library was updated to remain relevant to the Company's 2025 risk profile.

PERURI Risk Appetite and Risk Strategy in 2025

In order to create and protect value as well as support sustainable growth of SOEs' businesses, the BP BUMN requires all SOEs to prepare risk strategies. Every strategic decision-making process by the Board of Directors always begins with a strategic initiative assessment by considering the risk limits established in the current year's RKAP.



Perusahaan telah menyusun metrik strategi risiko yang merupakan penjabaran dari strategi risiko untuk masing-masing taksonomi risiko. Metrik Strategi Risiko digunakan sebagai dasar dalam menetapkan berbagai pilihan strategi yang akan menjadi usulan dalam rancangan perencanaan strategis RKAP. Adapun Metrik Strategi Risiko PERURI Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The Company has prepared risk strategy metrics, which are an elaboration of the risk strategy for each risk taxonomy. The Risk Strategy Metrics are used as the basis for determining various strategic options that will become proposals in the RKAP strategic planning framework. The Risk Strategy Metrics of PERURI in 2025 are as follows:

No.	Taksonomi Risiko Risk Taxonomy	Pernyataan Selera Risiko Risk Appetite Statement	Sikap Terhadap Risiko Risk Attitude	Parameter Parameter	Limit Limit
1	Risiko Industri Umum – Hukum, Reputasi & Kepatuhan General Industry Risk – Legal, Reputation & Compliance	PERURI tidak memberikan ruang pada setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk perusakan terhadap lingkungan serta kelalaian terhadap keamanan siber dan perlindungan data pribadi. PERURI does not allow any room for violations of laws and regulations, including environmental damage and negligence in cybersecurity and personal data protection.	Tidak Toleran Intolerant	Jumlah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk kontrak, peraturan lingkungan, keamanan siber, dan PDP. Number of violations of laws and regulations, including contracts, environmental regulations, cybersecurity, and Personal Data Protection (PDP). Jumlah serangan siber yang berhasil masuk ke komputer, sistem, dan jaringan PERURI. Number of successful cyberattacks infiltrating PERURI's computers, systems, and networks.	0 0
2	Risiko Industri Umum – Hukum, Reputasi & Kepatuhan General Industry Risk – Legal, Reputation & Compliance	PERURI menjalankan bisnis dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang terintegrasi, melengkapi dan menjalankan organ pengelola risiko secara aktif dan <i>prudent</i> , serta menjunjung tinggi tata nilai AKHLAK. PERURI conducts business by implementing good corporate governance and integrated risk management, complementing and actively and prudently managing risk governance organs, and upholding the AKHLAK core values.	Tidak Toleran Intolerant	Jumlah temuan GCG dan RMI yang tidak ditindaklanjuti. Number of GCG and RMI findings that have not been followed up. Jumlah kualifikasi organ yang tidak sesuai dengan ketentuan PER-2. Number of organ qualifications that do not comply with PER-2 provisions. Jumlah pelanggaran etika yang dilakukan oleh karyawan. Number of ethical violations committed by employees.	0 0 0
3	Risiko Fiskal Dividen Fiscal Risk – Dividend	– PERURI berkomitmen memenuhi target pembayaran dividen BUMN kepada Negara sesuai persetujuan dengan Pemilik Modal. PERURI is committed to meeting the target of SOE dividend payments to the State in accordance with the approval of the Capital Owner.	Tidak Toleran Intolerant	Persentase realisasi laba bersih dibandingkan target per bulan. Percentage of realized net profit compared to the monthly target.	100
4	Risiko Kebijakan Sektoral Policy Risk – Sectoral	– PERURI meminimalkan disrupsi bisnis dan operasional kegiatan usaha dari kemungkinan dampak rencana kebijakan Kementerian/Lembaga Pemerintah/Lembaga Negara lainnya. PERURI minimizes business and operational disruptions arising from potential impacts of policy plans by Ministries/Government Institutions/Other State Institutions.	Konservatif Conservative	Persentase realisasi penyerahan produk penugasan per bulan. Percentage of monthly realization of assignment product delivery.	100

No.	Taksonomi Risiko Risk Taxonomy	Pernyataan Selera Risiko Risk Appetite Statement	Sikap Terhadap Risiko Risk Attitude	Parameter Parameter	Limit Limit
5	Risiko Industri Umum – Keuangan General Industry Risk – Financial	PERURI memenuhi kewajiban keuangan, mempertahankan struktur keuangan yang sehat, dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan. PERURI fulfills financial obligations, maintains a sound financial structure, and ensures business continuity on an ongoing basis.	Konservatif Conservative	Current Ratio (%).	125
6	Risiko Industri Umum – Operasional General Industry Risk – Operational	PERURI berfokus menjalankan kegiatan bisnis utamanya dengan kualitas terbaik serta menjaga aspek ESG. PERURI focuses on conducting its core business activities with the highest quality while maintaining ESG aspects.	Konservatif Conservative	Tingkat <i>inschiet</i> produk Uang Kertas RI (%). Defect rate of Indonesian Rupiah Banknote products (%). Tingkat <i>inschiet</i> produk Uang Logam RI (%). Defect rate of Indonesian Rupiah Coin products (%). Tingkat <i>inschiet</i> produk non-uang, Meterai RI (%). Defect rate of non-currency products, Indonesian Stamp Duty products (%). Tingkat <i>inschiet</i> produk non-uang, Paspor RI (%). Defect rate of non-currency products, Indonesian Passport products (%). Tingkat <i>inschiet</i> produk non-uang, Pita Cukai RI (%). Defect rate of non-currency products, Indonesian Excise Stamp products (%).	6,16 0,107 12,50 3,20 6,00
7	Risiko Kebijakan – SDM Policy Risk – Human Resources	Perusahaan secara aktif meningkatkan keterampilan dan kompetensi kelas dunia untuk menciptakan SDM unggul dan profesional. The Company actively improves world-class skills and competencies to create excellent and professional human resources.	Moderat Moderate	Tingkat kelulusan asesi pada kegiatan asesmen kompetensi, baik internal maupun eksternal, per bulan (%). Pass rate of assessee in competency assessment activities, both internal and external, per month (%).	90
8	Risiko Struktur – Struktur Korporasi Structural Risk – Corporate Structure	PERURI mengambil risiko moderat dalam memperkuat ekosistem bisnis melalui kerja sama sinergis antar-BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. PERURI takes moderate risks in strengthening the business ecosystem through synergistic cooperation among SOEs and SOE Subsidiaries.	Moderat Moderate	Pertumbuhan transaksi intragroup (%). Intragroup transaction growth (%).	5
9	Risiko Industri Umum – Pasar & Makroekonomi General Industry Risk – Market & Macroeconomics	PERURI melakukan optimalisasi pengelolaan volatilitas pasar dan makroekonomi untuk dimonetisasi melalui pengelolaan yang prudent dan terukur. PERURI optimizes the management of market and macroeconomic volatility to be monetized through prudent and measurable management.	Moderat Moderate	Tingkat Suku Bunga (%). Interest Rate (%).	6,7



No.	Taksonomi Risiko Risk Taxonomy	Pernyataan Selera Risiko Risk Appetite Statement	Sikap Terhadap Risiko Risk Attitude	Parameter Parameter	Limit Limit
10	Risiko Industri Umum – Formulasi Strategis General Industry Risk – Strategic Formulation	PERURI secara aktif mempertimbangkan kalkulasi risiko yang matang dan sepadan dengan nilai kembalian investasi (<i>return</i>) untuk menciptakan nilai melalui transformasi, yang tidak terbatas pada inovasi model bisnis, eksplorasi dan pengembangan, optimalisasi penataan portofolio, serta pertumbuhan anorganik. PERURI actively considers mature risk calculations that are commensurate with investment returns to create value through transformation, including but not limited to business model innovation, exploration and development, portfolio restructuring optimization, and inorganic growth.	Strategis Strategic	ROIC > WACC (%).	1,25
11	Risiko Industri Umum – Formulasi Strategis General Industry Risk – Strategic Formulation	PERURI mengoptimalkan sumber daya idle atau yang belum memenuhi kapasitas usaha melalui berbagai upaya organik dan anorganik dengan menerima risiko bisnis yang wajar dan terukur. PERURI optimizes idle resources or resources that have not yet met business capacity through various organic and inorganic efforts by accepting reasonable and measurable business risks.	Strategis Strategic	Persentase realisasi pemenuhan optimalisasi aset dibandingkan dengan target per bulan. Percentage of realized asset optimization fulfillment compared to the monthly target.	100
12	Risiko Industri Umum – Teknologi & Keamanan Siber General Industry Risk – Technology & Cybersecurity	PERURI menempatkan prioritas utama dalam pengembangan pasar percetakan sekuriti dan <i>digital security</i> dengan mengutamakan keamanan informasi, keandalan infrastruktur IT, serta kualitas produk untuk mencapai pertumbuhan pelanggan dan peningkatan kepuasan pelanggan. PERURI places the highest priority on developing the security printing and digital security markets by prioritizing information security, IT infrastructure reliability, and product quality to achieve customer growth and increase customer satisfaction.	Strategis Strategic	Pelaksanaan pengujian keamanan IT setiap bulan. Implementation of IT security testing every month.	100

Risiko yang dihadapi PERURI Tahun 2025 dan Upaya Pengelolaannya

Perusahaan telah mengidentifikasi beberapa risiko signifikan yang akan dihadapi dan ditetapkan upaya mitigasinya guna meminimalisir kejadian risiko maupun dampak yang ditimbulkan bila risiko tersebut terjadi. Seluruh risiko maupun rencana mitigasi telah dikelola secara efektif dan dipantau secara berkala. Profil risiko PERURI terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- › Risiko Eksisting, merupakan risiko yang melekat pada kegiatan usaha PERURI.
- › Risiko Baru, merupakan risiko yang muncul karena perusahaan mengambil sasaran dan strategi sebagai inisiatif untuk *unlock value*.
- › Risiko *Emerging*, merupakan risiko yang ditemukan karena adanya gejala atau ancaman perubahan lingkungan bisnis.

Risks Faced by PERURI in 2025 and Their Mitigation Measures

In 2025, the Company has identified several key risks that require close attention. Mitigation measures have been established to reduce both the likelihood of these risks occurring and their potential impact should they materialize. All risks and corresponding mitigation plans are managed effectively and monitored on a regular basis. PERURI's risk profile is grouped into 3 (three) categories:

- › Existing Risks, which are inherent risks embedded in PERURI's ongoing business activities.
- › New Risks, which arise as the Company pursues new targets and strategies aimed at unlocking value.
- › Emerging Risks, which are identified based on signals or potential threats from changes in the business environment.

Adapun profil risiko PERURI tahun 2025 beserta upaya mitigasinya diuraikan pada tabel berikut:

The 2025 PERURI risk profile, along with its mitigation actions, is presented in the following table:

No.	Peristiwa Risiko Risk Events	Dampak Impacts	Perlakuan/Mitigasi Risk Treatment/Mitigation
1	Keterlambatan kedatangan/ kelangkaan bahan baku dari Bank Indonesia. [Risiko Emerging] Delay in arrival / shortage of raw materials from Bank Indonesia. [Emerging Risk]	Target pendapatan produk uang RI tidak tercapai, <i>carry over</i> pesanan uang RI TA 2025 ke TA 2026. Revenue target for Bank Indonesia currency products not achieved; carry-over of 2025 currency orders to FY 2026.	1. Melakukan <i>improvement</i> terhadap pelaksanaan monitoring kedatangan bahan baku 2. Meningkatkan pola koordinasi yang lebih intens dengan Bank Indonesia 3. Inisiasi project pembuatan pabrik kertas uang (PKU) 1. Improving monitoring of raw material arrivals. 2. Strengthening more intensive coordination with Bank Indonesia. 3. Initiation of the banknote paper factory (PKU) project.
2	Kegagalan mendapatkan order produk paspor RI [Risiko Emerging] Failure to obtain orders for Indonesian passport products. [Emerging Risk]	› Kehilangan portofolio produk paspor › Target pendapatan produk paspor tidak tercapai › Penurunan laba bersih yang signifikan › Loss of passport product portfolio › Failure to achieve passport revenue targets › Significant decline in net profit	1. Menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan regulator untuk penguatan regulasi proses pengadaan paspor RI 2. Peningkatan koordinasi dengan ditjen Imigrasi terkait kebutuhan paspor 3. Mencari pasar baru untuk mengantisipasi perubahan bisnis paspor menjadi pasar kompetisi 4. Efisiensi biaya & evaluasi <i>cost structure</i> 1. Strengthening more intensive communication with regulators to reinforce regulations for Indonesian passport procurement processes. 2. Increasing coordination with the Directorate General of Immigration regarding passport requirements. 3. Exploring new markets to anticipate the transition of the passport business into a competitive market. 4. Cost efficiency and cost structure evaluation.
3	Permintaan pasar untuk produk digital, solusi digital, dan e-meterai yang terbatas. [Risiko Emerging] Limited market demand for digital products, digital solutions, and electronic stamp (e-meterai). [Emerging Risk]	Target pendapatan produk, solusi digital, dan e-meterai tidak tercapai. Failure to achieve revenue targets for digital products, solutions, and e-meterai.	1. Merencanakan dan mengelola kampanye pemasaran yang mempromosikan merek, produk, dan layanan perusahaan, serta menganalisa tren dan metrik. 2. Berkomunikasi dengan asosiasi calon pelanggan yang ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi pengenalan produk digital PERURI 3. Pembuatan penawaran upselling yang sesuai dengan produk yang telah digunakan top 10 <i>customer</i> sebelumnya melalui skema <i>bundling</i> atau <i>cross-promotion</i> 4. Melakukan cross-selling kepada pelanggan SPBE (K/L) untuk memperluas pasar produk digital 5. Pembentukan kerja sama bisnis (Kemitraan Sinergi BUMN) untuk memperluas pasar produk digital 6. Inisiasi kerjasama dengan Kementerian (Kemendagri, Kemenhub, Kepolisian) untuk penggunaan meterai elektronik 7. Penyusunan Strategi Marketing untuk bisnis digital 1. Planning and managing marketing campaigns to promote the Company's brand, products, and services, and analyzing trends and metrics. 2. Communicating with potential customer associations followed by socialization activities for PERURI digital products. 3. Developing upselling offers based on products used by top 10 customers through bundling or cross-promotion schemes. 4. Conducting cross-selling to SPBE customers (ministries/agencies) to expand the digital product market. 5. Establishing business cooperation (SOE synergy partnerships) to expand the digital product market. 6. Initiating cooperation with ministries (Ministry of Home Affairs, Ministry of Transportation, National Police) for the use of electronic stamps. 7. Developing marketing strategies for the digital business.



No.	Peristiwa Risiko Risk Events	Dampak Impacts	Perlakuan/Mitigasi Risk Treatment/Mitigation
4	Tidak terlaksananya kontrak dengan K/L untuk project SPBE. [Risiko Baru] Failure to execute contracts with ministries/agencies for SPBE projects. [New Risk]	Target pendapatan SPBE tidak tercapai. Failure to achieve SPBE revenue targets.	1. Melakukan eskalasi dan komunikasi ke seluruh stakeholder untuk menyesuaikan ekspektasi pada proyek SPBE 2. Mempercepat pembuatan dan formalisasi model bisnis SPBE 3. Menyiapkan strategi <i>Go To Market</i> (GTM) <i>Solution Services</i> 4. Melakukan peninjauan intens dengan K/L potensial untuk implementasi SPBE 5. Memastikan adanya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dari K/L sebelum melakukan pembayaran kepada mitra 1. Escalating and communicating with all stakeholders to align expectations on SPBE projects. 2. Accelerating the development and formalization of the SPBE business model. 3. Preparing Go-To-Market (GTM) strategy for Solution Services. 4. Conducting intensive engagement with potential ministries/agencies for SPBE implementation. 5. Ensuring the existence of a Completion Report (BAPP) from ministries/agencies before payments to partners.
5	Kinerja keuangan Anak Perusahaan tidak optimal [Risiko Eksisting] Suboptimal financial performance of Subsidiaries. [Existing Risk]	Target kontribusi pendapatan Anak Perusahaan tidak tercapai. Failure to achieve subsidiary revenue contribution targets.	1. Pelaksanaan supervisi penyusunan RJPP Anak Perusahaan Tahun 2026 - 2030 melalui kegiatan <i>Preliminary Workshop</i> Kerangka Kerja Penyusunan RJPP Anak Perusahaan (PERURI Group) yang diharapkan dapat menjadi instrumen dalam menentukan arah kebijakan strategis jangka panjang Anak Perusahaan. 2. Evaluasi kinerja masing-masing Anak Perusahaan 3. Pelaksanaan sinergi PERURI Group (Induk-Anak Perusahaan) dalam pelaksanaan project strategis 1. Supervising the preparation of Subsidiaries' RJPP 2026–2030 through a Preliminary Workshop on the framework for RJPP preparation of PERURI Group, as a tool to determine long-term strategic direction. 2. Evaluating the performance of each Subsidiary. 3. Implementing PERURI Group synergy (Parent–Subsidiaries) in strategic project execution.
6	Terhambatnya proses produksi Uang dan Non Uang [Risiko Eksisting]	Penurunan laba bersih perusahaan, pergeseran pendapatan ke tahun selanjutnya, adanya denda dari pelanggan dan reputasi perusahaan menurun.	1. Melakukan asistensi produksi ke pemasok untuk memitigasi rendahnya kualitas LKU 2. Mengusulkan penerapan kebijakan baru bersama dengan Bank Indonesia dan Pemasok terkait dengan kualitas LKU, khususnya mengenai dusting (pendebuan), metode alternatif uji sampling, penguatan <i>Quality Assurance</i> 3. Meneliti dan menentukan metoda/alat untuk menguji kualitas bahan uang sebelum lanjut ke pencetakan 4. Menerapkan kebijakan yang <i>strict</i> terhadap bahan baku berkualitas rendah, dalam rangka menghindari <i>Reputation Risk</i> 5. Melakukan partnership dengan principal dan pemasok bahan 6. Monitoring kedatangan bahan baku dan proses produksi lebih awal (setelah mendapat informasi yang valid) 7. Update teknologi dan inisiasi digitalisasi produksi 8. Melakukan <i>vendor sourcing</i> 9. Menerapkan kebijakan pemisahan parsial & good sheet 10. Review bisnis proses dan kecukupan <i>internal control</i> 11. Re-layout posisi permesinan cetak (sesuai dengan kedatangan bahan baku dan lean production process) 12. Evaluasi dan perbaikan metode kerja pengiriman 13. Memastikan kesiapan dan pengaturan jam kerja karyawan 14. Review kesiapan <i>supply chain</i> untuk seluruh portofolio produk <i>security printing</i>

No.	Peristiwa Risiko Risk Events	Dampak Impacts	Perlakuan/Mitigasi Risk Treatment/Mitigation
6	Disruption in production of monetary and non-monetary products. [Existing Risk]	Decline in company net profit, revenue shifting to subsequent years, penalties from customers, and reputational decline.	1. Providing production assistance to suppliers to mitigate low quality of raw materials (LKU). 2. Proposing new policies with Bank Indonesia and suppliers regarding raw material quality, especially dusting, alternative sampling methods, and strengthening Quality Assurance. 3. Researching and determining methods/tools to test material quality before printing. 4. Implementing strict policies on low-quality raw materials to avoid reputational risk. 5. Partnering with principals and material suppliers. 6. Early monitoring of raw material arrival and production processes (based on valid information). 7. Technology updates and initiation of production digitalization. 8. Vendor sourcing. 9. Implementing partial separation and good sheet policies. 10. Reviewing business processes and adequacy of internal controls. 11. Re-layouting printing machine positions (aligned with material arrival and lean production process). 12. Evaluating and improving delivery methods. 13. Ensuring workforce readiness and work schedule arrangements. 14. Reviewing supply chain readiness for the entire security printing product portfolio.
7	Biaya operasional <i>digital product, digital solution</i> , dan e-meterai menggerus laba bisnis digital. [Risiko Eksisting] Operational costs of digital products, digital solutions, and e-stamp services are eroding the profitability of the digital business. [Existing Risk]	Penurunan laba bersih Perusahaan dari produk e-meterai Decline in the Company's net profit from the e-stamp product.	1. Meninjau portofolio bisnis digital dan mengevaluasi kebutuhan infrastruktur yang lebih efisien 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas produk eksisting dengan berbagai masukan baik dari internal maupun dari eksternal 3. Review & evaluasi strategi pembentukan harga untuk menghasilkan harga yang kompetitif 4. Mengevaluasi <i>technology existing</i> yang memiliki <i>fixed cost</i> tinggi untuk dialihkan menjadi <i>variable cost</i> 5. Efisiensi pengeluaran seperti <i>Annual Technical Support</i> dan <i>Layanan Managed Operation/Managed Services</i> 6. Menyusun kajian <i>re-engineering</i> untuk bisnis e-meterai 1. Reviewing the digital business portfolio and evaluating the need for a more efficient infrastructure. 2. Enhancing the capacity and capability of existing products based on various inputs from both internal and external stakeholders. 3. Reviewing and evaluating pricing strategies to achieve competitive pricing. 4. Evaluating existing technologies with high fixed costs to be shifted into variable costs. 5. Improving expenditure efficiency such as Annual Technical Support and Managed Operation/Managed Services. 6. Conducting a re-engineering study for the e-stamp business.
8	Terjadinya <i>Cyberattack</i> atau gangguan layanan pada Sistem dan Jaringan Perusahaan. [Risiko Eksisting]	› <i>Opportunity loss</i> bisnis perusahaan dan denda/ pinalti sehingga menurunkan laba bersih dari produk Digital; › Adanya kebocoran data pribadi; › Reputasi perusahaan kurang baik; › Teguran dari regulator/ pencabutan sertifikasi IT Perusahaan (PSrE, ISO 27001 - <i>Information Security Management System</i>, dsb).	1. Implementasi <i>Security Operation Center (SoC)</i> 2. Pelaksanaan <i>Vulnerability Assessment, Penetration Testing, Attack Surface Management</i>, Sosialisasi dan Operasional CSIRT 3. <i>Capacity and Resource Management</i> 4. Evaluasi Kinerja <i>Managed Operation/Managed Service</i> 5. Melakukan patroli siber dan aktivasi CSIRT 6. Menyusun kajian <i>re-engineering</i> untuk mengkaji efektivitas sistem e-meterai 7. Melakukan <i>cloudification</i> dan <i>load test</i> untuk menguji kapasitas yang diperlukan 8. Penyusunan <i>Record of Processing Activities (RoPA) & Data Protection Impact Assessment (DPIA)</i> 9. Pelaksanaan <i>hardening</i> terhadap infrastruktur sesuai standar keamanan yang ditetapkan 10. Pelaksanaan <i>Vulnerability Assessment</i> dan Penetration Test ulang pada saat instalasi aplikasi baik dari sisi infra, keamanan maupun aplikasinya.



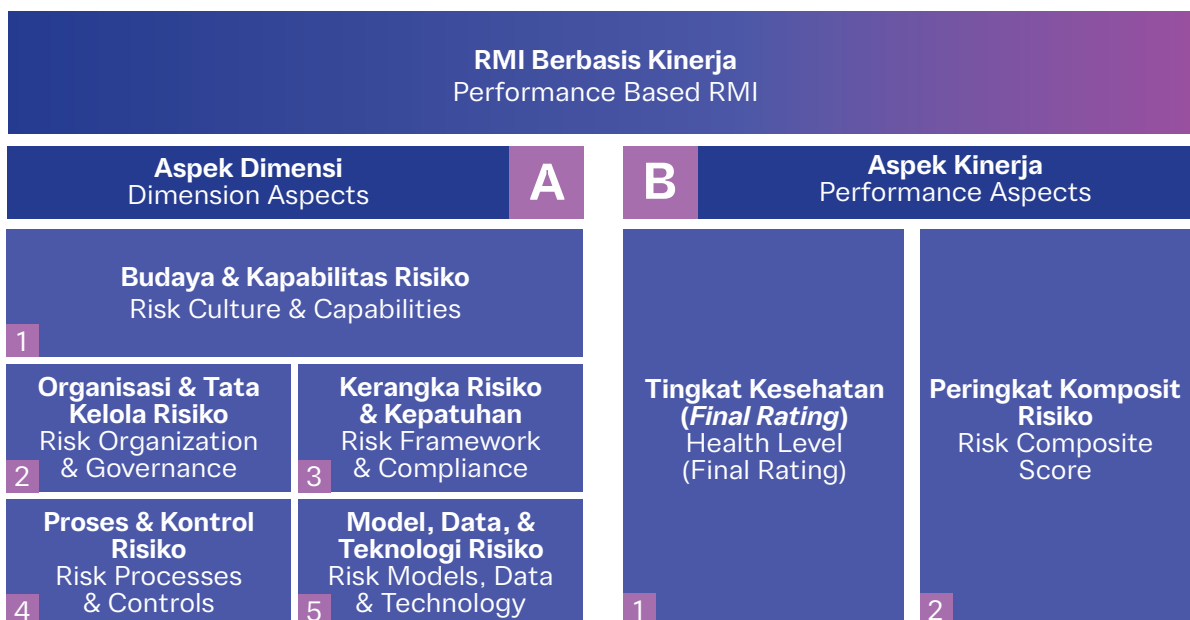
No.	Peristiwa Risiko Risk Events	Dampak Impacts	Perlakuan/Mitigasi Risk Treatment/Mitigation
8	Occurrence of cyberattacks > or service disruptions in the Company's systems and networks. [Existing Risk]	Loss of business opportunities and imposition of penalties/ fines, resulting in a decrease in net profit from digital products; > Personal data breaches; > Reputational damage to the Company; > Regulatory warnings or revocation of the Company's IT certifications (PSrE, ISO 27001 – Information Security Management System, etc.).	1. Implementation of a Security Operation Center (SOC). 2. Conducting Vulnerability Assessment, Penetration Testing, Attack Surface Management, as well as CSIRT socialization and operations. 3. Capacity and resource management. 4. Evaluation of Managed Operation/Managed Service performance. 5. Conducting cyber patrols and activating CSIRT. 6. Preparing a re-engineering study to assess the effectiveness of the e-stamp system. 7. Performing cloudification and load testing to assess required system capacity. 8. Preparation of Record of Processing Activities (RoPA) and Data Protection Impact Assessment (DPIA). 9. Implementation of infrastructure hardening in accordance with established security standards. 10. Conducting repeat Vulnerability Assessment and Penetration Testing during application installation, covering infrastructure, security, and application layers.
9	Terhambatnya implementasi Solusi SPBE pada KL. [Risiko Baru] Obstruction in the implementation of SPBE solutions at Ministries/ Agencies (K/L). [New Risk]	Penurunan laba bersih Perusahaan karena biaya implementasi SPBE melebihi pendapatan yang diterima Decline in the Company's net profit due to SPBE implementation costs exceeding the revenue received.	1. Koordinasi rutin & penetapan ruang lingkup sesuai kebutuhan masing-masing K/L. 2. Menjalankan <i>Information Technology Security Assessment</i> (ITSA) sesuai dengan standar dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terhadap layanan aplikasi dan API layanan 3. Standardisasi UAT 4. Memastikan seluruh <i>output/ deliverables</i> sesuai dengan <i>Definition of Done</i> (DoD) 1. Routine coordination and determination of scope in accordance with the needs of each Ministry/Agency (K/L). 2. Implementation of Information Technology Security Assessment (ITSA) in accordance with standards set by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) for application services and API services. 3. Standardization of User Acceptance Testing (UAT). 4. Ensuring all outputs/deliverables comply with the Definition of Done (DoD).

Evaluasi atas Efektivitas Manajemen Risiko Pada Tahun Buku 2025

Perusahaan telah melakukan Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index/RMI*) untuk mengukur efektivitas implementasi manajemen risiko. Pelaksanaan penilaian RMI ini juga wajib dilakukan oleh setiap BUMN sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023. Sejalan dengan Peraturan Menteri tersebut, PERURI telah melakukan penilaian indeks kematangan risiko (*risk maturity index/RMI*) untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di PERURI. Penilaian tersebut dilakukan setiap tahun baik secara mandiri (*self-assessment*) maupun penilaian oleh eksternal. Adapun metode dan aspek penilaian yang dilakukan mengacu pada Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:

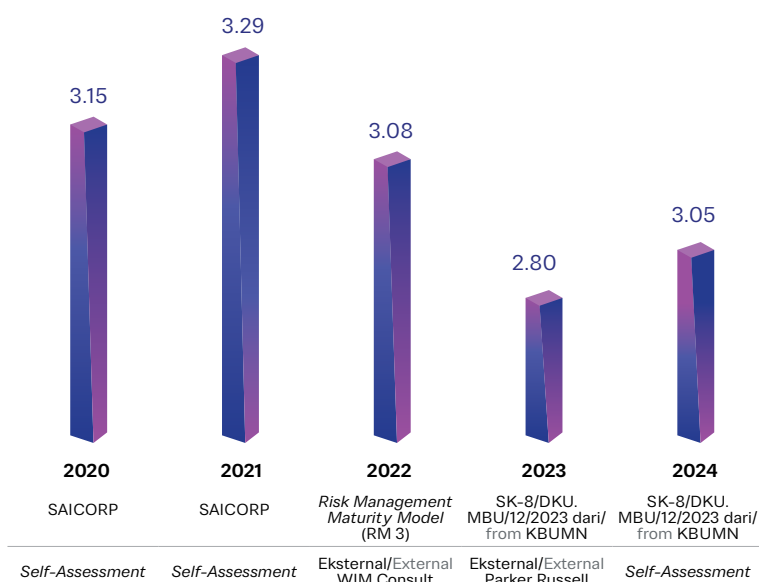
Evaluation of the Effectiveness of Risk Management in the 2025 Financial Year

The Company has conducted a Risk Maturity Index (RMI) assessment to measure the effectiveness of its risk management implementation. The RMI assessment is also mandatory for all State-Owned Enterprises (SOEs), as stipulated in Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023. In line with this regulation, PERURI has carried out the Risk Maturity Index (RMI) assessment to evaluate the implementation of risk management within PERURI. The assessment is conducted annually, both through self-assessment and external assessment. The methodology and assessment criteria refer to the Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of SOEs No. SK-8/DKU.MBU/12/2023 on Technical Guidelines for Risk Maturity Index Assessment within State-Owned Enterprises, as follows:



Pada penilaian RMI untuk tahun buku 2020 sampai dengan 2022 PERURI menggunakan metode dari *South Australian Insurance Corporation* (SAICORP) pada penilaian RMI. Selanjutnya, untuk penilaian RMI tahun buku 2023 s.d. 2024 metode yang digunakan mengacu pada Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko nomor: SK-8/DKU.MBU/12/2023. Perbedaan metode penilaian RMI ini terletak pada aspek dimensi penilaian dan tambahan aspek kinerja pada metode penilaian sesuai SK-8/DKU.MBU/12/2023. Adapun hasil penilaian RMI PERURI selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

For the RMI assessment covering the financial years 2020 to 2022, PERURI used the methodology of the South Australian Insurance Corporation (SAICORP). Subsequently, for the 2023 to 2024 financial years, the assessment methodology referred to the Decree of the Deputy for Finance and Risk Management No. SK-8/DKU.MBU/12/2023. The difference between these RMI methodologies lies in the assessment dimensions, as well as the inclusion of performance aspects in the methodology under SK-8/DKU.MBU/12/2023. The results of PERURI's RMI assessment over the past five years are as follows:



Penilaian RMI tahun buku 2024 yang dilaksanakan tahun 2025 dilakukan secara *self-assesment* oleh tim penilai internal yang merupakan gabungan dari PERURI dan Anak Perusahaan, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama nomor: SKEP-515/VIII/2025; 028/KPTS/PTKP/VIII/2025; SK017/PWT/VIII/2025; SKEP-Dir.003/Ppro/VIII/2025; 19-PDS/Skep/SKB/VIII/2025 tentang Tim Penilai Internal Indeks Kematangan Risiko/ *Risk Maturity Index* (RMI) PERURI Group.

The RMI assessment for the 2024 financial year, conducted in 2025, was carried out through a self-assessment by an internal assessment team consisting of PERURI and its Subsidiaries, in accordance with the Joint Decree No. SKEP-515/VIII/2025; 028/KPTS/PTKP/VIII/2025; SK017/PWT/VIII/2025; SKEP-Dir.003/Ppro/VIII/2025; and 19-PDS/Skep/SKB/VIII/2025 concerning the Internal Assessment Team for the Risk Maturity Index (RMI) of the PERURI Group.



Tingkat Maturitas Manajemen Risiko yang dilakukan PERURI pada tahun buku 2024 dan dievaluasi pada tahun 2025 dengan memperoleh nilai 3,05 dalam kategori Fase Praktik yang Baik menggambarkan pencapaian yang signifikan dalam pengelolaan risiko perusahaan. Penilaian ini menunjukkan pelaksanaan system manajemen risiko yang diterapkan PERURI telah sesuai dengan standar yang diharapkan dalam pengelolaan risiko.

Penelaahan Direksi/Dewan Pengawas atas Sistem Manajemen Risiko

Dewan Pengawas dan Direksi melaksanakan evaluasi terhadap Sistem Manajemen Risiko dalam forum Rapat Koordinasi Dewan Pengawas dan Direksi. Selain itu, Dewan Pengawas melalui Komite Pemantau Risiko secara berkala menyelenggarakan Rapat Sinergi bersama Divisi Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan yang dilaksanakan setiap triwulan.

Dalam Rapat Sinergi tersebut, Komite melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan Sistem Manajemen Risiko di PERURI. Adapun pelaksanaan Rapat Sinergi antara Komite Pemantau Risiko dan Divisi Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan diselenggarakan sebagai berikut:

The Company's Risk Management Maturity Level for the 2024 financial year, evaluated in 2025, achieved a score of 3.05, categorized as the "Good Practice Phase." This reflects a significant achievement in the Company's risk management practices. The assessment indicates that PERURI's risk management system has been implemented in accordance with the expected standards for risk management governance.

Review by the Board of Directors/Supervisory Board on the Risk Management System

The Supervisory Board and the Board of Directors conduct evaluations of the Risk Management System through the Joint Coordination Meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors. In addition, the Supervisory Board, through the Risk Monitoring Committee, regularly holds Sinergy Meetings with the Governance, Risk, and Compliance Division on a quarterly basis.

During these Sinergy Meetings, the Committee evaluates the effectiveness of the implementation of the Risk Management System at PERURI. The implementation of the Sinergy Meetings between the Risk Monitoring Committee and the Governance, Risk, and Compliance Division is carried out as follows:

No.	Agenda Agenda	Materi Rapat Meeting Materials
1	Rapat Koordinasi Komite Pemantau Risiko Triwulan IV tahun 2024 Tanggal 20 Januari 2025 Risk Monitoring Committee Coordination Meeting – Q4 2024 Date: January 20, 2025	1. Tindak lanjut rapat koordinasi Komite Pemantau Risiko dan Divisi Manajemen Risiko triwulan III tahun 2024. 2. Profil risiko korporat <i>year to date</i> Desember 2024. 3. Profil risiko bisnis <i>digital year to date</i> Desember 2024. 4. Pelaporan tata kelola terintegrasi Desember 2024. 5. Strategi risiko PERURI tahun 2025.. 1. Follow-up on the Risk Monitoring Committee and Risk Management Division coordination meeting for Q3 2024. 2. Corporate risk profile Year-to-date December 2024. 3. Digital business risk profile Year-to-date December 2024. 4. Integrated governance reporting for December 2024. 5. PERURI risk strategy for 2025.
2	Rapat Koordinasi Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Triwulan I 2025 Tanggal 27 April 2025 Risk Monitoring Committee & Integrated Governance Coordination Meeting – Q1 2025 Date: April 27, 2025	1. Tindak Lanjut Rapat Komite Pemantau Risiko dan Divisi Manajemen Risiko Triwulan IV tahun 2024. 2. Evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko terkait kinerja PERURI s.d. Triwulan I 2025. 3. Evaluasi implementasi Tata Kelola Terintegrasi antara Induk dan Anak Perusahaan PERURI. 1. Follow-up on the Risk Monitoring Committee and Risk Management Division meeting for Q4 2024. 2. Evaluation of the effectiveness of risk management implementation related to PERURI's performance up to Q1 2025. 3. Evaluation of integrated governance implementation between the Parent and Subsidiaries within PERURI.
3	Rapat Koordinasi Komite Pemantau Risiko Semester I 2025 Tanggal 25 Juli 2025 Risk Monitoring Committee Coordination Meeting – Semester I 2025 Date: July 25, 2025	1. Tindak lanjut rapat koordinasi Komite Pemantau Risiko dan Divisi Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan Triwulan I 2025. 2. Implementasi Profil Risiko (Korporat, Bisnis PERURI (CS, HSS, Digital Bisnis), dan Anak Perusahaan) serta Sistem Manajemen Anti Suap. 3. Tindak lanjut persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia Tahun Buku 2024. 1. Follow-up on the Risk Monitoring Committee and Governance, Risk, and Compliance Division coordination meeting for Q1 2025. 2. Implementation of risk profiles (corporate, PERURI business units including CS, HSS, and Digital Business, and subsidiaries) as well as the Anti-Bribery Management System. 3. Follow-up on the approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statements of Perum Percetakan Uang Republik Indonesia for the 2024 financial year.

No.	Agenda Agenda	Materi Rapat Meeting Materials
4	Rapat Koordinasi Komite Dewan Pengawas Bersama Manajemen Triwulan III 2025 Tanggal 20 Oktober 2025 Supervisory Board Committee Coordination Meeting with Management – Q3 2025 Date: October 20, 2025	1. Evaluasi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Terintegrasi. 2. Mitigasi risiko finansial dan tata kelola terintegrasi Anak Perusahaan. 3. Pengawasan Independen dan Kecukupan Sistem Pengendalian Internal (SPI). 4. <i>Update</i> proyek SDM, <i>Career & Succession Plan</i>, dan Harmonisasi Kebijakan Induk dan Anak Perusahaan. 1. Evaluation of integrated risk management and compliance. 2. Mitigation of financial and integrated governance risks in subsidiaries. 3. Independent oversight and adequacy of the Internal Control System. 4. Updates on HR projects, career & succession planning, and harmonization of policies between Holding and Subsidiaries.

Selain rapat koordinasi di atas, setiap bulan juga dilakukan Rapat Koordinasi Dewan Pengawas dan Direksi untuk membahas kinerja perusahaan antara lain mencakup kinerja keuangan dan implementasi manajemen risiko. Pada rapat tersebut Dewan Pengawas juga memberikan poin concern atas materi yang disampaikan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direksi.

In addition to the coordination meetings mentioned above, monthly Coordination Meetings between the Supervisory Board and the Board of Directors are also conducted to discuss the Company's performance, including financial performance and risk management implementation. During these meetings, the Supervisory Board also provides points of concern regarding the materials presented, which are subsequently followed up by the Board of Directors.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Pengawas atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Statement of the Board of Directors and/or Supervisory Board or Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System

Dewan Pengawas, Direksi, dan Komite Audit berpandangan bahwa sistem Manajemen Risiko yang diterapkan Perusahaan sepanjang tahun 2025 telah berjalan secara memadai serta efektif dalam mengantisipasi berbagai risiko dan tantangan eksternal yang dihadapi.

The Supervisory Board, Board of Directors, and Audit Committee are of the view that the Risk Management System implemented by the Company throughout 2025 has been adequately and effectively implemented in anticipating various risks and external challenges faced by the Company.

Temuan dan aspek-aspek yang menjadi fokus dalam evaluasi ini akan dijadikan acuan oleh manajemen untuk memperkuat kualitas pengendalian internal dan meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan pada tahun-tahun berikutnya.

The findings and aspects highlighted in this evaluation will serve as a reference for management to strengthen the quality of internal controls and improve the effectiveness of the Company's management in the following years.

Perbaikan dan Peningkatan Pengelolaan Risiko

Improvements and Enhancement of Risk Management

Penilaian RMI Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada 15 Agustus sampai dengan 31 Oktober mengacu pada SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Internal yang diketuai oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern, dengan anggota yang terdiri dari SPI Induk, Divisi Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan, serta SPI Anak Perusahaan, sebagaimana ditetapkan dalam SKEP Bersama Nomor SKEP-515/VIII/2025 tentang Tim Penilai Internal Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) PERURI Group. Berikut rincian hasil penilaian RMI PERURI:

The RMI assessment for Fiscal Year 2024 conducted from August 15 to October 31 refers to SK-8/DKU.MBU/12/2023 concerning Technical Guidelines for the Assessment of the Risk Maturity Index within State-Owned Enterprises. The assessment was carried out by an Internal Assessment Team chaired by the Head of the Internal Audit Unit, with members consisting of the Parent SPI, the Governance, Risk, and Compliance Division, and the Subsidiary SPI, as stipulated in Joint Decree No. SKEP-515/VIII/2025 concerning the Internal Assessment Team for the Risk Maturity Index (RMI) of PERURI Group. The following is the detailed results of PERURI's RMI assessment:



Paramater Parameter	Dimensi Dimension	Deskripsi Description	Skor Dimensi Dimension Score	Skor Score
1–3	1	Budaya dan Kapabilitas Risiko Risk Culture and Capability	4,0	
4–19	2	Organisasi dan Tata Kelola Risiko Risk Organization and Governance	3,9	
20–33	3	Kerangka Risiko dan Kepatuhan Risk Framework and Compliance	3,4	
34–40	4	Proses dan Kontrol Risiko Risk Processes and Controls	3,7	
41–42	5	Model, Data, dan Teknologi Risiko Risk Models, Data, and Technology	1,5	
1–42	Skor aspek dimensi Dimension aspect score			3,3

No.	Aspek Aspect	Nilai Aspek Aspect Value	Nilai Konversi Conversion Value	Bobot Weight	Nilai Konversi x bobot Conversion Value × Weight	Skor 2024 2024 Score
1	Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (Final Rating) Final Health Level Rating (Final Rating)	AAA	100	50%	50,0	
2	Peringkat Komposit Risiko Risk Composite Rating	2	78	50%	39,0	
1-2	Skor Aspek Kinerja Performance Aspect Score					89,0
	Penyesuaian Skor Score Adjustment					(0,25)
	SKOR RMI RMI SCORE					3,05

Hasil penilaian RMI PERURI menunjukkan skor 3,05, yang menempatkan Perusahaan pada fase praktik yang baik (*good practice*). Capaian tersebut mencerminkan bahwa penerapan manajemen risiko telah berjalan secara terstruktur, konsisten, dan terintegrasi dalam proses bisnis utama. Hasil penilaian ini telah didokumentasikan dalam Laporan Penilaian Risk Maturity Index PERURI Tahun 2024 Nomor 01/RMI/SPI/IX/2025 dan telah disampaikan kepada Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, pada 16 Oktober 2025.

Dalam rangka meningkatkan tingkat kematangan risiko secara berkelanjutan, Perusahaan telah menetapkan rencana tindak lanjut terhadap area perbaikan dari hasil penilaian RMI Tahun Buku 2024 yang dikemas menjadi 12 program rekomendasi dengan *timeline* penyelesaian sampai dengan tahun 2027 sebagaimana berikut:

PERURI RMI assessment results show a score of 3.05, placing the Company in the good practice phase. This achievement reflects that the implementation of risk management has been carried out in a structured, consistent, and integrated manner within the main business processes. The results of this assessment have been documented in PERURI Risk Maturity Index Assessment Report 2024 Number 01/RMI/SPI/IX/2025 and were submitted to the Deputy for Finance and Risk Management, Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia, on October 16, 2025.

In order to continuously improve the level of risk maturity, the Company has established a follow-up action plan for the improvement areas identified from the 2024 Risk Maturity Index assessment, structured into 12 recommendation programs with a completion timeline up to 2027, as follows:

No.	Rekomendasi Recommendation	Output Output
1	Peningkatan Program Budaya Risiko dan Sadar Risiko Strengthening the Risk Culture and Risk Awareness Program	Peningkatan budaya risiko dan sadar risiko dengan peningkatan skor RMI Risk Improvement of risk culture and risk awareness leading to an increase in the RMI score

No.	Rekomendasi Recommendation	Output Output
2	Penerapan Transformasi ERM Implementation of ERM Transformation	Peningkatan Kualitas Kerangka <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM) Improvement of the quality of the Enterprise Risk Management (ERM) framework
3	Penerapan Rencana Darurat (<i>Contingency Plan</i>) Implementation of a Contingency Plan	Pengujian dan pelaporan evaluasi rencana keberlangsungan bisnis dan cakupan <i>Business Continuity Plan</i> (BCP). Testing and reporting of business continuity plan (BCP) evaluation and coverage
4	Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko Monitoring the Implementation of Risk Management	Peningkatan pemantauan penerapan Manajemen Risiko atas eksposur dan peristiwa risiko Perusahaan. Improvement of monitoring of Risk Management implementation related to the Company's risk exposure and risk events
5	Permutakhiran Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan atau Dokumen yang Relevan Lainnya Updating Risk Management Policies and Other Relevant Policies or Documents	Tinjauan/pembaruan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko sesuai dengan persyaratan regulator. Review/update of Risk Management Policies and Procedures in accordance with regulatory requirements
6	Program Pelatihan Khusus Special Training Program	Peningkatan keterampilan dari program pelatihan khusus Enhancement of skills through specialized training programs
7	Pemenuhan Program Sertifikasi Certification Program Fulfillment	Sertifikasi manajemen risiko untuk seluruh organ pengelola risiko Risk management certification for all risk management governance organs
8	Akuntabilitas Organ Pengelola Risiko Accountability of Risk Management Governance Organs	Komposisi organ pengelola Risiko sesuai klasifikasi Risiko BUMN sesuai ketentuan dalam PER-2/MBU/03/ 2023 maupun Juknis SK-3. Composition of risk management governance organs in accordance with SOE risk classification as stipulated in PER-2/MBU/03/2023 and Technical Guidelines SK-3
9	Pemenuhan Organ Pengelola Risiko Fulfillment of Risk Management Organs	Pemenuhan tim <i>risk model and analytics inhouse</i> khusus sesuai SK-8/DKU.MBU/12/2023. Fulfillment of an in-house risk model and analytics team in accordance with SK-8/DKU.MBU/12/2023
10	Optimalisasi Teknologi Technology Optimization	Laporan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan seluruh unit bisnis/anak perusahaan dengan basis sistem informasi manajemen risiko. Integrated Risk Management reporting across all business units/subsidiaries based on a risk management information system
11	Integrasi Arsitektur TI IT Architecture Integration	Pengembangan Database Risiko Terintegrasi dan pemantauan melalui <i>Advance Analytics</i> untuk <i>Early Warning System</i> Development of an Integrated Risk Database and monitoring through Advanced Analytics for an Early Warning System
12	Digitalisasi Permodelan dalam Manajemen Risiko Digitalization of Risk Modeling in Risk Management	Penerapan teknologi pemodelan risiko untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas manajemen risiko Implementation of risk modeling technology to improve the accuracy and effectiveness of risk management

Atas rencana tindak lanjut tersebut, dilakukan *monitoring* secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan peningkatan penerapan manajemen risiko.

The above follow-up plan is subject to regular monitoring to ensure the effectiveness and sustainability of improvements in the implementation of risk management.



Perkara Penting

Important Cases

Permasalahan Hukum Perdata yang Dihadapi Perusahaan pada 2025

PERURI senantiasa menjalankan seluruh aktivitas usahanya dengan berpedoman pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, sebagaimana entitas bisnis pada umumnya, Perusahaan menghadapi beberapa perkara hukum perdata yang timbul dalam pelaksanaan operasional maupun hubungan kemitraan usaha.

Seluruh perkara hukum perdata tersebut telah ditangani secara profesional dan proporsional melalui langkah hukum yang tepat, baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan atas kepentingan Perusahaan. PERURI juga melakukan koordinasi secara intensif dengan penasihat hukum internal dan eksternal guna memastikan penyelesaian perkara berada dalam koridor hukum serta tidak menimbulkan dampak material terhadap kelangsungan usaha maupun reputasi Perusahaan.

Sampai dengan akhir tahun 2025, tidak terdapat perkara hukum perdata yang menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan, kegiatan operasional, maupun keberlangsungan usaha PERURI. Perusahaan tetap berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan penerapan tata kelola yang baik sebagai bagian integral dari integritas korporasi.

Permasalahan Hukum Pidana yang Dihadapi Perusahaan pada 2025

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak menghadapi perkara hukum pidana.

Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Perusahaan

Dampak atas permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan melalui proses hukum tidak bersifat signifikan, mengingat Perusahaan telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang sesuai dengan tingkat risiko yang timbul.

Pengungkapan Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Pengawas dan Direksi

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Dewan Pengawas maupun Direksi Perusahaan yang menghadapi permasalahan hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana.

Civil Legal Matters Faced by the Company in 2025

PERURI consistently conducts all of its business activities in accordance with applicable laws and regulations. Nevertheless, as with business entities in general, the Company faced several civil legal matters arising from operational activities and business partnership relationships.

All civil legal matters have been handled professionally and proportionally through appropriate legal measures, both through litigation and non-litigation mechanisms, while continuing to uphold the principles of prudence, regulatory compliance, and protection of the Company's interests. PERURI also maintains intensive coordination with internal and external legal advisors to ensure that the resolution of such matters remains within the applicable legal framework and does not result in material impacts on business continuity or the Company's reputation.

As of the end of 2025, there were no civil legal matters that resulted in significant impacts on PERURI's financial condition, operational activities, or business continuity. The Company remains committed to consistently upholding compliance with applicable laws and implementing good corporate governance as an integral part of corporate integrity.

Criminal Legal Matters Faced by the Company in 2025

Throughout 2025, the Company was not involved in any criminal legal matters.

Impact of Legal Matters on the Company

The impact of legal matters faced by the Company through legal proceedings was not significant, as the Company had implemented mitigation measures appropriate to the level of risks arising.

Disclosure of Legal Matters Involving the Supervisory Board and Board of Directors

Throughout 2025, there were no members of the Supervisory Board or Board of Directors who were involved in any legal matters, either civil or criminal.

Pengungkapan Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Pada tahun 2025, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh entitas anak Perusahaan, baik yang berkaitan dengan aspek perdata maupun pidana.

Perkara Penting di Luar Aspek Hukum

Sepanjang tahun 2025, PERURI tidak mencatat adanya perkara material di luar aspek hukum yang melibatkan Perusahaan sebagai entitas, entitas anak, maupun anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

Perkara Penting Terkait Dengan Buruh dan Karyawan

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat permasalahan yang timbul antara Perusahaan dengan buruh maupun karyawan.

Disclosure of Legal Matters Involving Subsidiaries

In 2025, there were no legal matters involving the Company's subsidiaries, whether related to civil or criminal aspects.

Important Cases Outside Legal Matters

Throughout 2025, PERURI did not record any material cases outside legal matters involving the Company as an entity, its subsidiaries, or members of the Supervisory Board and Board of Directors.

Important Cases Related to Labor and Employees

Throughout 2025, there were no issues arising between the Company and laborers or employees.

Sanksi Administratif Administrative Sanctions

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif yang bersifat material dan berdampak terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Selain itu, tidak terdapat pula sanksi administratif yang dijatuhkan oleh otoritas terkait kepada Perusahaan sebagai entitas, anak perusahaan, maupun kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

Throughout 2025, there were no material administrative sanctions that had an impact on the continuity of the Company's business. In addition, there were no administrative sanctions imposed by the relevant authorities on the Company as an entity, its subsidiaries, or members of the Board of Directors and Supervisory Board.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja kepada Manajemen dan/atau Karyawan

Policy on Long-Term Performance-Based Compensation for Management and/or Employees

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen Perseroan (MSOP/ESOP)

Perusahaan tidak menerapkan Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Karyawan (*Employee and Management Stock Option Plan/ESOP-MSOP*). Seluruh modal PERURI atau sebesar 100% tetap dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, informasi terkait kepemilikan saham publik maupun program kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan tidak tersedia.

Employee and/or Management Share Ownership Program (MSOP/ESOP)

The Company does not implement a Management and Employee Share Ownership Program (*Employee and Management Stock Option Plan/ESOP-MSOP*). All of PERURI's capital, or 100%, remains owned by the Government of the Republic of Indonesia. Accordingly, information regarding public share ownership or share ownership programs for management and employees is not available.



Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Paling Lambat 3 (tiga) Hari Kerja Setelah Terjadinya Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan atas Saham Perusahaan Terbuka

Share Ownership of Members of the Board of Directors and Supervisory Board Members No Later than 3 (three) Business Days after the Occurrence of Share Ownership or any Change in Ownership of Shares of a Public Company

Mengingat seluruh saham PERURI dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan tidak tercatat sebagai perusahaan terbuka, maka ketentuan tersebut tidak relevan untuk diterapkan pada PERURI.

Considering that all shares of PERURI are fully owned by the Government of the Republic of Indonesia and the Company is not listed as a public company, this provision is not relevant to be implemented by PERURI.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

PERURI menegaskan komitmennya untuk selalu mengedepankan prinsip transparansi sebagai fondasi utama dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sejalan dengan hal tersebut, PERURI menyediakan akses informasi dan data perusahaan yang mudah dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan dari kebijakan ini adalah agar para pemangku kepentingan memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai kinerja Perusahaan, baik dari aspek keuangan maupun non-keuangan. Informasi tersebut disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk siaran pers, paparan publik, serta platform komunikasi resmi lainnya.

Korespondensi dan Laporan Berkala

PERURI menyampaikan informasi keuangan maupun non-keuangan secara transparan kepada pemilik modal, pemangku kepentingan, serta lembaga terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Penyampaian informasi dilakukan tepat waktu dan disajikan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, serta memadai, sesuai dengan prosedur, jenis, dan cakupan yang diatur dalam regulasi mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan.

Informasi tersebut disajikan melalui laporan yang meliputi:

1. Laporan Triwulan;
2. Penjelasan dan klarifikasi atas pemberitaan di media massa;

PERURI reaffirms its commitment to continuously uphold the principle of transparency as a fundamental foundation in the implementation of Good Corporate Governance. In line with this commitment, PERURI provides easily accessible information and company data to all stakeholders.

The purpose of this policy is to ensure that stakeholders obtain a comprehensive understanding of the Company's performance, both from financial and non-financial aspects. Such information is communicated through various communication channels, including press releases, public presentations, and other official communication platforms.

Correspondence and Periodic Reports

PERURI provides financial and non-financial information transparently to shareholders, stakeholders, and relevant institutions in accordance with applicable regulations. The disclosure of information is carried out in a timely manner and presented in a complete, accurate, up-to-date, comprehensive, and adequate manner, in accordance with the procedures, types, and scope stipulated under regulations concerning Transparency of the Company's Financial Condition.

The information is presented through reports, including:

1. Quarterly Reports;
2. Explanations and clarifications regarding news coverage in mass media;

3. Keterbukaan informasi terkait corporate action;
4. Laporan administrasi bulanan pemilik modal;
5. Laporan Tahunan.

Situs Perusahaan

PERURI secara proaktif menyampaikan informasi melalui media cetak maupun elektronik, termasuk melalui situs resmi Perusahaan yang dapat diakses dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. *Website* resmi dengan domain www.peruri.co.id tersedia 24 jam sehari untuk memberikan akses informasi yang luas bagi publik.

Melalui platform tersebut, PERURI memudahkan pemangku kepentingan untuk memperoleh berbagai informasi, meliputi identitas korporasi, kinerja keuangan dan operasional, publikasi resmi, produk dan layanan, aksi korporasi, visi dan misi Perusahaan, serta informasi relevan lainnya.

Saluran Komunikasi Internal

Selain memanfaatkan berbagai media komunikasi untuk menyebarkan informasi mengenai Perusahaan, PERURI juga menyelenggarakan beragam forum tatap muka guna memfasilitasi interaksi antara Direksi, manajemen, dan karyawan. PERURI mengelola komunikasi internal secara sistematis untuk memastikan seluruh karyawan, sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, memperoleh informasi yang akurat dan terkini melalui berbagai saluran komunikasi internal.

Hubungan Media

PERURI secara proaktif membangun dan memelihara hubungan yang harmonis dengan media massa melalui beragam kegiatan, termasuk distribusi siaran pers secara rutin. Upaya ini menjadi salah satu prioritas utama Perusahaan, mengingat PERURI menghargai peran strategis media massa dalam mendukung perkembangan, perjalanan, dan pencapaian kinerja Perusahaan.

Siaran Pers

Siara Pers PERURI 2025 PERURI Press Releases 2025

No.	Nomor Siaran Pers Press Release Number	Judul Siaran Press Release Title
1	01/PR-PERURI/I/2025	PERURI Serahkan Satu Unit Ambulans untuk Tingkatkan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Jomin Kabupaten Karawang PERURI Hands Over One Ambulance Unit to Improve Healthcare Services in Jomin District, Karawang Regency
2	02/PR-PERURI/I/2025	PERURI dan Kementerian Perdagangan Jalin Diskusi Strategis untuk Dukung Transformasi Digital PERURI and the Ministry of Trade Hold Strategic Discussion to Support Digital Transformation
3	03/PR-PERURI/I/2025	PERURI Beberkan Strategi Bisnis Bagi UMKM Dalam Acara “Ngobrol Santai” yang Diselenggarakan IKA PPM dan Rumah Perubahan PERURI Shares Business Strategies for MSMEs at “Ngobrol Santai” Event Organized by IKA PPM and Rumah Perubahan

3. Disclosure of information related to corporate actions;
4. Monthly capital owner administration reports;
5. Annual Reports.

Company Website

PERURI proactively provides information through both print and electronic media, including through the Company's official website, which is available in both Indonesian and English. The official website with the domain www.peruri.co.id is accessible 24 hours a day to provide broad access to information for the public.

Through this platform, PERURI facilitates stakeholders in obtaining various information, including corporate identity, financial and operational performance, official publications, products and services, corporate actions, the Company's vision and mission, as well as other relevant information.

Internal Communication Channels

In addition to utilizing various communication media to disseminate information regarding the Company, PERURI also organizes various face-to-face forums to facilitate interaction between the Board of Directors, management, and employees. PERURI manages internal communication systematically to ensure that all employees, as one of the key stakeholders, receive accurate and up-to-date information through various internal communication channels.

Media Relations

PERURI proactively builds and maintains harmonious relationships with mass media through various activities, including regular distribution of press releases. This effort is one of the Company's key priorities, considering that PERURI recognizes the strategic role of mass media in supporting the Company's growth, journey, and performance achievements.

Press Releases



No.	Nomor Siaran Pers Press Release Number	Judul Siaran Press Release Title
4	04/PR-PERURI/II/2025	Guna Wujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PERURI Berkomitmen Berantas Tindakan Korupsi di Lingkungan Perusahaan To Realize Good Corporate Governance, PERURI Committed to Eradicating Corruption within the Company
5	05/PR-PERURI/II/2025	Hadir Dalam Forum ASBANDA 2025, PERURI Siap Menjadi Mitra Strategis Digitalisasi Bank Daerah Attending ASBANDA Forum 2025, PERURI Ready to Become a Strategic Digitalization Partner for Regional Banks
6	06/PR-PERURI/II/2025	Berkomitmen Ciptakan Ekosistem Bisnis yang Inklusif, PERURI Libatkan UMKM Binaannya Pameran di INACRAFT 2025 Committed to Creating an Inclusive Business Ecosystem, PERURI Involves Its Assisted MSMEs in INACRAFT 2025 Exhibition
7	07/PR-PERURI/II/2025	PERURI Creators Impact: Pembinaan dan Pelatihan Content Creator Dukung Kreativitas Digital PERURI Creators Impact: Content Creator Development and Training to Support Digital Creativity
8	08/PR-PERURI/II/2025	PERURI Bawa UMKM Binaan Pameran di INACRAFT 2025 Guna Memajukan Ekonomi Kreatif Indonesia PERURI Brings Assisted MSMEs to INACRAFT 2025 Exhibition to Advance Indonesia's Creative Economy
9	09/PR-PERURI/II/2025	PERURI Libatkan UMKM Binaan dalam Pelatihan UMKM Naik Kelas yang Digelar oleh Kementerian BUMN PERURI Involves Assisted MSMEs in MSME Upgrading Training Organized by the Ministry of SOEs
10	10/PR-PERURI/II/2025	PERURI Gelar Sosialisasi Kesadaran Kanker di Desa Parungmulya PERURI Holds Cancer Awareness Campaign in Parungmulya Village
11	11/PR-PERURI/III/2025	PERURI Akan Berangkatkan 700 Pemudik Secara Gratis ke Jawa Tengah, Antusiasme Masyarakat Luar Biasa PERURI to Send 700 Travelers Home to Central Java for Free, Showing Great Public Enthusiasm
12	12/PR-PERURI/III/2025	Tanda Tangan Digital PERURI Permudah Administrasi, Mudik Lebaran Tetap Nyaman PERURI Digital Signature Simplifies Administration, Ensuring a Comfortable Eid Homecoming
13	13/PR-PERURI/III/2025	PERURI Resmikan "Fuerza Arena Mini Football", Fasilitas Olahraga Terpadu di Jakarta Barat PERURI Inaugurates "Fuerza Arena Mini Football", an Integrated Sports Facility in West Jakarta
14	14/PR-PERURI/III/2025	Hangatkan Ramadan, PERURI Bagikan Takjil Gratis untuk Masyarakat Sekitar Bringing Warmth During Ramadan, PERURI Distributes Free Takjil to the Surrounding Community
15	15/PR-PERURI/III/2025	PERURI Salurkan Bantuan Sembako Ramadan Sekaligus Dukung UMKM Binaan PERURI Distributes Ramadan Basic Food Packages While Supporting Assisted MSMEs
16	16/PR-PERURI/III/2025	PERURI Berikan Santunan Kepada 100 Anak Yatim dan Libatkan UMKM Binaan Dalam Kemeriahan Acara Sparkling Ramadan PERURI Provides Assistance to 100 Orphans and Involves Assisted MSMEs in Sparkling Ramadan Celebration
17	17/PR-PERURI/III/2025	PERURI Berangkatkan 700 Pemudik Pulang Kampung Secara Gratis PERURI Sends 700 Travelers Home for Free
18	18/PR-PERURI/IV/2025	Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, PERURI Resmikan Rumah Layak Huni di Kabupaten Karawang To Realize Sustainable Development, PERURI Inaugurates Livable Houses in Karawang Regency
19	19/PR-PERURI/IV/2025	Peringati Hari Kartini, PERURI Gelar Womenpreneur Guna Wujudkan Perempuan Mandiri dan Berdaya Saing Commemorating Kartini Day, PERURI Holds Womenpreneur Program to Create Independent and Competitive Women
20	20/PR-PERURI/IV/2025	PERURI Kembali Raih Peringkat AAA dari Pefindo, Tegaskan Konsistensi Kinerja Sangat Sehat PERURI Once Again Achieves AAA Rating from Pefindo, Affirming Consistently Strong Performance
21	21/PR-PERURI/V/2025	Peringati Hari Pendidikan Nasional, PERURI Menyerahkan Bantuan Komputer Kepada 15 Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Karawang Commemorating National Education Day, PERURI Provides Computer Assistance to 15 Public Elementary Schools in Karawang Regency
22	22/PR-PERURI/V/2025	PERURI Dukung UMKM Tembus Pasar Negara Luar Lewat Borobudur Internasional Bike Week 2025 PERURI Supports MSMEs to Enter International Markets through Borobudur International Bike Week 2025

No.	Nomor Siaran Pers Press Release Number	Judul Siaran Press Release Title
23	23/PR-PERURI/V/2025	PERURI Dipercaya Rana Precious Metal Membuat Noor Dinar dan Rana Gold Bar, Produk Investasi Emas Mewah dengan Sentuhan Budaya Indonesia PERURI Entrusted by Rana Precious Metal to Produce Noor Dinar and Rana Gold Bar, Luxury Gold Investment Products with Indonesian Cultural Touch
24	24/PR-PERURI/V/2025	PERURI Gelar Workshop Mengukir Umbi untuk Tingkatkan Keterampilan Pelaku UMKM PERURI Holds Umbi Carving Workshop to Improve MSME Skills
25	25/PR-PERURI/VI/2025	PERURI Salurkan Hewan Kurban untuk Masyarakat Karawang dalam Rangka Iduladha 1446 H PERURI Distributes Sacrificial Animals to the Karawang Community in Commemoration of Eid al-Adha 1446 H
26	26/PR-PERURI/VI/2025	PERURI Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Ajang TOP CSR Awards 2025 PERURI Wins Two Prestigious Awards at TOP CSR Awards 2025
27	27/PR-PERURI/VI/2025	PERURI Gerak Cepat Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Pergeseran Tanah di Purwakarta PERURI Quickly Distributes Logistics Assistance to Victims of Landslide Disaster in Purwakarta
28	28/PR-PERURI/VI/2025	Hebat! UMKM Binaan PERURI Raih Penghargaan. Bukti Nyata Pembinaan yang Tak Main-Main Outstanding! PERURI Assisted MSMEs Win Awards, Demonstrating Genuine Development Commitment
29	29/PR-PERURI/VI/2025	Jalankan Aksi Konkret Penghijauan Daerah, PERURI Serahkan 255 Bibit Pohon ke DLH Kabupaten Karawang Implementing Concrete Reforestation Actions, PERURI Hands Over 255 Tree Seedlings to Karawang Environmental Agency
30	30/PR-PERURI/VII/2025	PERURI Terapkan Teknologi Smart Farming dan Internet of Things (IoT) untuk Dongkrak Produktivitas Petani di Garut PERURI Implements Smart Farming Technology and Internet of Things (IoT) to Increase Farmer Productivity in Garut
31	31/PR-PERURI/VII/2025	PERURI Kenalkan Peran GovTech Indonesia Kepada CPNS Kementerian PANRB PERURI Introduces the Role of Indonesian GovTech to Civil Servant Candidates of the Ministry of PANRB
32	32/PR-PERURI/VII/2025	PERURI Curi Perhatian AYALA Corporation Lewat Inovasi Pendidikan Digital PERURI Captures AYALA Corporation's Attention through Digital Education Innovation
33	33/PR-PERURI/VII/2025	PERURI dan Kementerian PANRB Tandatangani Perjanjian Penugasan Pengembangan Aplikasi SPBE Prioritas PERURI and Ministry of PANRB Sign Assignment Agreement for Development of Priority SPBE Applications
34	34/PR-PERURI/VII/2025	Pengakuan atas Transformasi Human Capital, PERURI Borong 5 Penghargaan di HCREA 2025 Recognition of Human Capital Transformation, PERURI Wins 5 Awards at HCREA 2025
35	35/PR-PERURI/VII/2025	UMKM Binaan PERURI Unjuk Gigi di Panggung Internasional Mega Halal Bangkok 2025 PERURI Assisted MSMEs Showcase Products on International Stage at Mega Halal Bangkok 2025
36	36/PR-PERURI/VII/2025	PERURI dan Kemendes PDT Sepakati Komitmen Kerja Sama untuk Percepatan Digitalisasi Desa PERURI and Ministry of Villages Agree on Collaboration Commitment to Accelerate Village Digitalization
37	37/PR-PERURI/VIII/2025	PERURI Latih Kemampuan Public Speaking yang Efektif dan Berdampak Bagi UMKM PERURI Trains Effective and Impactful Public Speaking Skills for MSMEs
38	38/PR-PERURI/VIII/2025	PERURI bersama JAMDATUN Perkuat Sinergi untuk Dukung Kepastian Bisnis Berkelanjutan PERURI and JAMDATUN Strengthen Synergy to Support Sustainable Business Certainty
39	39/PR-PERURI/VIII/2025	PERURI Own Voice: Saat Suara Karyawan Menjadi Wajah Perubahan PERURI Own Voice: When Employees' Voices Become the Face of Change
40	40/PR-PERURI/VIII/2025	PERURI Dukung Konservasi Terumbu Karang di Banyuwangi, Dorong Kelestarian Laut dan Ekowisata PERURI Supports Coral Reef Conservation in Banyuwangi, Promoting Marine Preservation and Ecotourism
41	41/PR-PERURI/VIII/2025	PERURI Wujudkan Desa Berdaya Saing melalui Pelatihan Budidaya Kambing dan Domba PERURI Develops Competitive Villages through Goat and Sheep Farming Training
42	42/PR-PERURI/IX/2025	Kembali ke Akar: Menggali Makna Jaga, Serap, dan Tumbuh di Road to PERURI Bestari Festival 2025 Back to the Roots: Exploring the Meaning of Preserve, Absorb, and Grow at Road to PERURI Bestari Festival 2025
43	43/PR-PERURI/IX/2025	Buktikan Tata Kelola Kuat, PERURI Sabet Predikat Tertinggi di TOP GRC Awards 2025 Demonstrating Strong Governance, PERURI Achieves the Highest Recognition at TOP GRC Awards 2025



No.	Nomor Siaran Pers Press Release Number	Judul Siaran Press Release Title
44	44/PR-PERURI/IX/2025	PERURI Hadirkan Forum Strategis Ketahanan Digital di Era AI dan Quantum melalui Digital Resilience Summit 2025 PERURI Presents Strategic Digital Resilience Forum in the AI and Quantum Era through Digital Resilience Summit 2025
45	45/PR-PERURI/IX/2025	Aktif Bangun Karawang Berkelanjutan, PERURI Terima Penghargaan TJSLP dari Pemkab Karawang Actively Building Sustainable Karawang, PERURI Receives TJSLP Award from Karawang Regency Government
46	46/PR-PERURI/IX/2025	PERURI Gaungkan Pondasi Penguatan Ketahanan Digital Nasional untuk Ekosistem AI yang Berkelanjutan PERURI Promotes Foundations for Strengthening National Digital Resilience for a Sustainable AI Ecosystem
47	47/PR-PERURI/IX/2025	PERURI bersama Kementerian Ekonomi Kreatif Jalin Sinergi Digitalisasi untuk Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional PERURI and Ministry of Creative Economy Establish Digitalization Synergy to Strengthen National Creative Economy Ecosystem
48	48/PR-PERURI/IX/2025	PERURI Bersama Kemendiktisaintek Gelar Sosialisasi Ijazah Digital untuk Perguruan Tinggi PERURI and the Ministry of Higher Education, Science, and Technology Hold Digital Diploma Socialization for Universities
49	49/PR-PERURI/IX/2025	PERURI Tunjukkan Komitmen Hijau di Forum Pemimpin Korporasi "inFUSE Executive Workshop" PERURI Demonstrates Green Commitment at "inFUSE Executive Workshop" Corporate Leaders Forum
50	50/PR-PERURI/X/2025	PERURI Dukung Transformasi Digitalisasi Bansos Nasional Lewat Pilot Project Banyuwangi PERURI Supports National Social Assistance Digital Transformation through Banyuwangi Pilot Project
51	51/PR-PERURI/X/2025	PERURI Wujudkan Komitmen Hijau Lewat Kolaborasi 28 BUMN Melalui Program Olah Sampah di Likupang PERURI Realizes Green Commitment Through Collaboration with 28 SOEs Through the Waste Management Program in Likupang
52	52/PR-PERURI/X/2025	PERURI Tanam 2.000 Pohon Mangrove di Perairan Tanjung Pakis Karawang, Aksi Menjaga Warisan Alam Indonesia PERURI Plants 2,000 Mangrove Trees in the Waters of Tanjung Pakis, Karawang, as an Action to Preserve Indonesia's Natural Heritage
53	53/PR-PERURI/X/2025	PERURI Sebagai Pemilik Lahan, Dukung Peluncuran Wajah Baru M Bloc Space PERURI, as the Landowner, Supports the Launch of the New Look of M Bloc Space
54	54/PR-PERURI/X/2025	Graduation Ceremony PERURI Digital Entrepreneur Academy Level 1 Tahun 2025, Buka Jalan Baru untuk UMKM Naik Kelas Graduation Ceremony of PERURI Digital Entrepreneur Academy Level 1 2025, Opening New Opportunities for MSMEs to Advance
55	55/PR-PERURI/XI/2025	PERURI dan Telkom University Jalin Kolaborasi untuk Hilirisasi Aplikasi Ijazah Digital dan Penguatan Talenta Digital PERURI and Telkom University Collaborate to Accelerate the Downstream Development of Digital Diploma Applications and Strengthen Digital Talent
56	56/PR-PERURI/XI/2025	Validasi Transformasi Human Capital: PERURI Raih Penghargaan "Excellence in HR Innovation" di HREA 2025 Validating Human Capital Transformation: PERURI Wins "Excellence in HR Innovation" Award at HREA 2025
57	57/PR-PERURI/XI/2025	PERURI Asri Hadirkan Solusi Sampah Berbasis Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Telukjambe Karawang PERURI Asri Presents Waste Management Solutions Through the Empowerment of Housewives in Telukjambe, Karawang
58	58/PR-PERURI/XI/2025	PERURI Wujudkan Komitmen Keberlanjutan melalui Program Kolaborasi TJSL BUMN "ATA MODO" di Desa Komodo PERURI Realizes Sustainability Commitment Through the BUMN TJSL Collaborative Program "ATA MODO" in Komodo Village
59	59/PR-PERURI/XI/2025	PERURI Dorong Kedaulatan Data dan Kepercayaan Digital di Bali Blockchain Summit 2025 PERURI Promotes Data Sovereignty and Digital Trust at Bali Blockchain Summit 2025
60	60/PR-PERURI/XI/2025	Transformasi Menuju Data-Driven Economy: Rencana Kolaborasi Strategis PERURI dan BPS dalam Penguatan Data Nasional Transformation Toward a Data-Driven Economy: PERURI and BPS Plan Strategic Collaboration to Strengthen National Data

No.	Nomor Siaran Pers Press Release Number	Judul Siaran Press Release Title
61	61/PR-PERURI/XII/2025	Raih Peringkat Emas ASRRAT 2025, PERURI Buktikan Komitmen Laporan Keberlanjutan Kelas Internasional Achieving Gold Rating at ASRRAT 2025, PERURI Proves Commitment to World-Class Sustainability Reporting
62	62/PR-PERURI/XII/2025	PERURI Raih Penghargaan Platinum dan Gold di BUMN Branding dan Marketing Award 2025 PERURI Wins Platinum and Gold Awards at the 2025 BUMN Branding and Marketing Award
63	63/PR-PERURI/XII/2025	PERURI Ukir Prestasi Global, Housenote 4.0 Bertema “The Land of Dreams” Dinobatkan sebagai Best Housenote 2025 di Malaysia PERURI Achieves Global Recognition, Housenote 4.0 Themed “The Land of Dreams” Named Best Housenote 2025 in Malaysia
64	64/PR-PERURI/XII/2025	Program PRISMA PERURI Bantu UMKM Berhasil Usaha di Platform Digital yang Kompetitif PERURI's PRISMA Program Helps MSMEs Successfully Operate on a Competitive Digital Platform
65	65/PR-PERURI/XII/2025	BP-BUMN Tegaskan Dukungan untuk Transformasi PERURI, Tedi Bharata Beri Arahan Strategis di Executive Briefing BP-BUMN Reaffirms Support for PERURI Transformation, Tedi Bharata Provides Strategic Direction at Executive Briefing
66	66/PR-PERURI/XII/2025	PERURI Perkuat Komitmen Turunkan Stunting Lewat Program Pemberian Makanan Tambahan di Desa Parungmulya Karawang PERURI Strengthens Commitment to Reducing Stunting Through the Supplementary Feeding Program in Parungmulya Village, Karawang
67	67/PR-PERURI/XII/2025	PERURI Bersama DJBC Jamin Ketersediaan Pita Cukai Tahun 2026 untuk Jaga Stabilitas Industri Hasil Tembakau dan MMEA PERURI Together with DJBC Ensures Availability of Excise Stamps in 2026 to Maintain Stability of the Tobacco Products and MMEA Industries
68	68/PR-PERURI/XII/2025	PERURI Tunjukkan Empati: Bantuan Cepat Tanggap untuk Korban Bencana di Sumatera PERURI Demonstrates Empathy: Provides Rapid Response Assistance for Disaster Victims in Sumatra
69	69/PR-PERURI/XII/2025	PERURI Pertahankan Predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 PERURI Maintains Informative Rating at the 2025 Public Information Disclosure Award
70	70/PR-PERURI/XII/2025	Tutup Rangkaian Pembinaan UMKM Selama 2025, PERURI Gelar Festival UMKM di Rumah BUMN Karawang Concluding the 2025 MSME Development Series, PERURI Holds MSME Festival at Rumah BUMN Karawang
71	71/PR-PERURI/XII/2025	PERURI Inisiasi Program Kampung Iklim di Karawang untuk Wujudkan Desa Tangguh dan Berkelanjutan PERURI Initiates Climate Village Program in Karawang to Create a Resilient and Sustainable Village



Pedoman Etika dan Perilaku

Code of Conduct

Kode Etik atau Pedoman Etika Perilaku (*Code of Conduct/ CoC*) PERURI disusun sebagai pedoman dalam berinteraksi dan bertindak di lingkungan kerja maupun dalam aktivitas bisnis, baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Dokumen ini menjadi rujukan utama bagi karyawan, Direksi, dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta berintegritas.

CoC PERURI mencerminkan kebijakan Perusahaan yang menjunjung tinggi keberagaman dan mendorong terwujudnya hubungan kerja yang harmonis. Melalui penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, Perusahaan berkomitmen untuk menjaga produktivitas serta kualitas kinerja secara berkelanjutan.

PERURI meyakini bahwa sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai budaya Perusahaan akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja serta pencapaian sasaran strategis Perusahaan.

Kode Etik

Kode Etik atau Pedoman Etika Perilaku (*Code of Conduct/ CoC*) dirancang untuk menjadi pedoman bersikap dan/atau bertindak pada aspek-aspek etika bisnis perusahaan dan etika kerja, Karyawan, Direksi dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas baik di Perusahaan maupun di luar perusahaan. CoC PERURI juga mencerminkan kebijakan Perusahaan yang mengedepankan penghargaan terhadap keberagaman dan mempromosikan kerja sama yang harmonis. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, Perusahaan bertujuan untuk menjaga produktivitas dan kualitas kerja yang optimal. PERURI meyakini bahwa sikap dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai budaya Perusahaan akan memiliki dampak positif terhadap citra, kinerja perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik modal dan pencapaian tujuan Perusahaan.

A. Pokok-Pokok Isi Kode Etik

1. Ruang lingkup Kode Etik yang ditetapkan Direksi dan Dewan Pengawas dalam *Corporate Policy Manual* Bab II Kelembagaan sub bab Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Etika Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai berikut :
2. Panduan Etika dan Perilaku Kerja, termasuk di dalamnya memuat komitmen seluruh Insan PERURI dalam mewujudkan Kode Etik Perusahaan;
3. Standar Etika dengan *Stakeholders*, yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip pengelolaan hubungan dengan *stakeholders*;
4. Etika Perilaku dan Etika Bisnis, meliputi integritas dalam berbisnis dan integritas Laporan Keuangan;
5. Larangan adanya Benturan Kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Insan PERURI;
6. Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi;

PERURI Code of Conduct (CoC) is prepared as a guideline for interactions and conduct within the workplace and business activities, both within and outside the Company. This document serves as the main reference for employees, the Board of Directors, and the Supervisory Board in carrying out their duties and responsibilities in a professional and integrity-driven manner.

PERURI's CoC reflects the Company's policy that upholds diversity and encourages the establishment of harmonious working relationships. Through the creation of a healthy and conducive work environment, the Company is committed to maintaining sustainable productivity and performance quality.

PERURI believes that attitudes and behaviors aligned with the Company's cultural values will provide positive contributions to improving performance and achieving the Company's strategic objectives.

Code of Conduct

The Code of Conduct (CoC) is designed to serve as a guide for the conduct and/or actions of employees, the Board of Directors, and the Supervisory Board regarding aspects of corporate business ethics and workplace ethics in the performance of their duties, both within and outside the Company. PERURI's CoC also reflects the Company's policy of upholding respect for diversity and promoting harmonious collaboration. By fostering a healthy and conducive working environment, the Company aims to maintain optimal productivity and work quality. PERURI believes that attitudes and behaviors aligned with the Company's cultural values will positively contribute to the Company's image and performance, enhance corporate value for shareholders, and support the achievement of the Company's objectives.

A. Key Elements of the Code of Conduct

1. The scope of the Code of Conduct established by the Board of Directors and the Supervisory Board in the Corporate Policy Manual, Chapter II Institutional Framework, subsection Code of Corporate Governance and Code of Conduct, is as follows:
2. Guidelines on work ethics and behavior, including commitments of all PERURI personnel to uphold the Company's Code of Conduct;
3. Ethical standards for stakeholders, including principles governing relationships with stakeholders;
4. Behavioral and business ethics, covering integrity in business practices and financial reporting integrity;
5. Prohibition of conflicts of interest in carrying out duties and functions as PERURI personnel;
6. Implementation of a gratuity control program;

7. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Perlindungan Saksi Pelapor *Whistleblowing System*;
9. Penetapan *reward and punishment* bagi Karyawan dalam rangka penerapan Kode Etik Perusahaan.

B. Pernyataan Kode Etik Berlaku di Seluruh Level Organisasi Perusahaan

1. Tidak melakukan segala bentuk tindakan koruptif/fraud, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan pengelolaan dan pengawasan kegiatan Perusahaan;
2. Tidak melakukan praktik – praktik penyuapan dan senantiasa menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk mewujudkan kondisi bisnis yang bersih;
3. Mematuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Etika Perilaku serta Peraturan Perusahaan lainnya;
4. Turut serta dalam penyelenggaraan sistem pengendalian/pengawasan yang jujur, adil dan dapat dipertanggung jawabkan;
5. Menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan prinsip – prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*) serta melaksanakan pemantauan atas penerapan manajemen risiko demi tercapainya tujuan Perusahaan;
6. Tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PERURI dan/atau anak perusahaan dan akan melaporkan jika ditemukan ada potensi konflik kepentingan berkaitan dengan pekerjaan di PERURI;
7. Mendukung peran manajemen lainnya dalam mencegah, mendeteksi dan mendorong pelaporan penyuapan dan memastikan tidak ada personel yang menderita diskriminasi terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik;
8. Menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Insan PERURI.

Tanggung Jawab dalam Penerapan Pedoman Etika Perilaku

Seluruh Insan PERURI memiliki tanggung jawab dalam menerapkan pedoman etika, yaitu:

1. Tanggung Jawab Para Pemimpin PERURI

- a. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku melalui:
 1. Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap pedoman perilaku.
 2. Melakukan pengawasan untuk mendorong secara teratur atas program-program yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan PERURI.
 3. Memberikan contoh yang baik dalam cara berbicara, bersikap maupun dalam bertindak sehari-hari.
- b. Memastikan bahwa setiap Insan PERURI mengerti bahwa ketaatan atas pedoman perilaku sama pentingnya dengan pencapaian untuk kerja.

7. Submission of State Officials' Wealth Reports (LHKPN);
8. Protection of whistleblowers through the Whistleblowing System;
9. Implementation of reward and punishment mechanisms for employees in relation to the enforcement of the Company's Code of Conduct.

B. Statement of the Code of Conduct Applicable at All Levels of the Organization

1. Not engaging in any form of corrupt practices, fraud, collusion, or nepotism in carrying out the management and supervision of Company activities;
2. Not engaging in bribery practices and consistently implementing an Anti-Bribery Management System to foster a clean business environment;
3. Complying with the Corporate Governance Guidelines and Code of Conduct, as well as other Company regulations;
4. Participating in the implementation of an honest, fair, and accountable control and supervisory system;
5. Performing duties, functions, and authorities in accordance with Good Corporate Governance principles (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*), and conducting monitoring of risk management implementation to achieve Company objectives;
6. Having no conflict of interest and/or not being involved in transactions that create conflicts of interest with PERURI and/or its subsidiaries, and reporting any potential conflicts of interest related to work at PERURI when identified;
7. Supporting the role of other management functions in preventing, detecting, and encouraging reporting of bribery, and ensuring that no personnel suffer discrimination for reports made in good faith;
8. Maintaining integrity in carrying out duties and responsibilities as a PERURI employee.

Responsibilities in Implementing the Code of Conduct

All PERURI personnel have the responsibility to implement the Code of Conduct, as follows:

1. Responsibilities of PERURI Leaders

- a. Building and maintaining a culture of compliance with the Code of Conduct through:
 1. Personally encouraging adherence to the Code of Conduct;
 2. Supervising and regularly promoting programs aimed at strengthening compliance within PERURI;
 3. Setting a good example in speech, behavior, and daily actions.
- b. Ensuring that every PERURI employee understands that compliance with the Code of Conduct is as important as achieving performance targets.



- c. Mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap pedoman perilaku dalam mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada Insan PERURI.
- d. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap pedoman perilaku melalui upaya:
 - 1. Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap pedoman perilaku yang berhubungan dengan proses bisnis dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis.
 - 2. Melakukan identifikasi dan melaporkan sesuai prosedur yang ditetapkan terhadap anak perusahaan, afiliasi serta mitra kerja yang dapat menimbulkan kemungkinan pelanggaran terhadap pedoman perilaku.
 - 3. Memastikan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan tentang pedoman perilaku bagi seluruh Insan Perum PERURI, anak perusahaan, afiliasi dan melakukan sosialisasi kepada mitra kerja agar pihak-pihak tersebut mengerti dan memahami pedoman perilaku secara menyeluruh.
- e. Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran terhadap pedoman perilaku melalui :
 - 1. Menerapkan pengawasan untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas pedoman perilaku.
 - 2. Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan yang sesuai untuk melindungi kerahasiaan dari Insan PERURI yang melaporkan.
 - 3. Memastikan dilaksanakannya evaluasi secara berkala terhadap dilaksanakannya pedoman perilaku oleh Satuan Pengawas Intern untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.
- f. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran pedoman perilaku dengan:
 - 1. Memperbaiki secara cepat kekurangan yang dijumpai dalam penilaian kepatuhan atas pelaksanaan pedoman perilaku.
 - 2. Memberikan tindakan/sanksi indisipliner melalui mekanisme sidang disiplin pegawai.
 - 3. Melakukan konsultasi dengan Satuan Pengawas Intern atau Divisi Pengamanan Perusahaan atas pelanggaran terhadap pedoman perilaku yang terjadi memerlukan campur tangan penegak hukum atau pihak yang berwajib.

2. Tanggung Jawab Insan PERURI

- a. Mempelajari secara detail pedoman perilaku yang terkait dengan pekerjaannya. Setiap Insan PERURI harus memahami pedoman perilaku yang dituangkan dalam pedoman ini.
- b. Segera melaporkan kepada Divisi Pengamanan dan atau Satuan Pengawas Intern setiap menjumpai masalah mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap pedoman perilaku.
- c. Memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan atau melaporkan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap pedoman perilaku.

- c. Considering compliance with the Code of Conduct in evaluating and rewarding PERURI personnel.
- d. Preventing potential violations of the Code of Conduct through efforts such as:
 - 1. Ensuring that risks of potential violations related to business processes are identified early and systematically;
 - 2. Identifying and reporting, in accordance with established procedures, subsidiaries, affiliates, and business partners that may pose risks of Code of Conduct violations;
 - 3. Ensuring education and training on the Code of Conduct is provided to all PERURI personnel, subsidiaries, affiliates, and business partners so that all parties fully understand the Code of Conduct.
- e. Detecting potential violations of the Code of Conduct through:
 - 1. Implementing supervision to minimize the risk of violations;
 - 2. Establishing appropriate reporting systems to protect the confidentiality of employees reporting potential violations;
 - 3. Ensuring periodic evaluation of Code of Conduct implementation by the Internal Audit Unit to assess effectiveness and identify areas for improvement.
- f. Following up on reports of potential violations of the Code of Conduct by:
 - 1. Promptly correcting deficiencies identified in compliance assessments;
 - 2. Applying disciplinary actions/sanctions through employee disciplinary proceedings;
 - 3. Consulting with the Internal Audit Unit or Corporate Security Division when violations may require intervention by law enforcement or relevant authorities.

2. Responsibilities of PERURI Personnel

- a. Studying in detail the Code of Conduct relevant to their job responsibilities. Every PERURI employee must understand the provisions set out in the Code of Conduct.
- b. Immediately reporting to the Security Division and/ or Internal Audit Unit any potential violations of the Code of Conduct.
- c. Understanding the procedures used to report or communicate potential violations of the Code of Conduct.

Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan karyawan Perusahaan

1. Mematuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Etika Perilaku serta Peraturan perusahaan lainnya;
2. Menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Insan PERURI;
3. Tidak melakukan segala bentuk tindakan koruptif/fraud, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan pengurusan dan pengawasan kegiatan perusahaan;
4. Tidak melakukan praktik-praktik penyuapan dan senantiasa menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk mewujudkan kondisi bisnis yang bersih;
5. Menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*) serta melaksanakan pemantauan atas penerapan manajemen risiko demi tercapainya tujuan perusahaan;
6. Tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PERURI dan/atau anak perusahaan dan akan melaporkan jika ditemukan ada potensi konflik kepentingan berkaitan dengan pekerjaan di PERURI;
7. Setuju untuk menyerahkan Data Pribadi saya kepada PERURI ("Perusahaan"), dengan tujuan untuk diproses, disimpan, dikumpulkan ataupun dikirim kepada pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan Perusahaan untuk keperluan ke karyawanan dan kepentingan internal Perusahaan;
8. Mendukung peran manajemen lainnya dalam mencegah, mendeteksi dan mendorong pelaporan penyuapan dan memastikan tidak ada personel yang menderita diskriminasi terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik;
9. Turut serta dalam penyelenggaraan sistem pengendalian/pengawasan yang jujur, adil dan dapat dipertanggung jawabkan;
10. Memahami dan menaati seluruh ketentuan dalam UU No 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan berkomitmen untuk melakukan kebijakan internal PERURI sehubungan dengan keamanan data pribadi namun tidak terbatas pada kontrol akses dalam melindungi informasi dan media yang diklasifikasikan sebagai data pribadi yang bersifat rahasia dan dibatasi oleh PERURI.

Pernyataan Kepatuhan Insan PERURI

- a. Pernyataan kepatuhan ini didokumentasikan sebagai bagian dari dokumen kesepakatan antara Perusahaan dengan Insan PERURI;
- b. Setiap Insan PERURI menerima satu salinan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan menandatangani Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
- c. Surat pernyataan harus diperbaharui dan ditandatangani apabila terjadi perubahan Pedoman Perilaku.

A statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and the Company employees

1. Comply with the Corporate Governance Guidelines, Code of Ethics, and other company regulations;
2. Maintain integrity in carrying out my duties and responsibilities as a PERURI employee;
3. Refrain from any form of corruption, fraud, collusion, or nepotism in managing and overseeing company activities;
4. Refrain from engaging in bribery practices and consistently implement the Anti-Bribery Management System to foster a clean business environment;
5. Perform my duties, functions, and exercise my authority in accordance with the principles of good corporate governance (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness*) and monitor the implementation of risk management to achieve the company's objectives;
6. To have no conflicts of interest and/or be involved in transactions that present a conflict of interest with PERURI and/or its subsidiaries, and to report any potential conflicts of interest related to work at PERURI if discovered;
7. Agree to submit my Personal Data to PERURI ("the Company"), for the purpose of processing, storing, collecting, or transmitting it to third parties that have partnered with the Company for employment-related purposes and the Company's internal interests;
8. Support the role of other management in preventing, detecting, and encouraging the reporting of bribery, and ensure that no employee suffers discrimination as a result of reports made in good faith;
9. Participate in the implementation of an honest, fair, and accountable control/oversight system;
10. Understand and comply with all provisions of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection by committing to implement PERURI's internal policies regarding personal data security, including but not limited to access controls to protect information and media classified as confidential personal data and restricted by PERURI.

PERURI Employee Compliance Statement

- a. This compliance statement is documented as part of the agreement between the Company and PERURI employees;
- b. Each PERURI Employee receives a copy of the Code of Conduct and signs a Statement confirming that they have received, understood, and agreed to comply with the Code of Conduct;
- c. The statement must be updated and signed in the event of changes to the Code of Conduct.



Sosialisasi Kode Etik

Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan sosialisasi Pedoman Etika Perilaku (*Code of Conduct*) kepada seluruh jajaran serta para pemangku kepentingan guna menjaga kejujuran, integritas, dan keadilan dalam setiap transaksi maupun aktivitas operasional di lingkungan kerja masing-masing.

Seluruh Insan PERURI di setiap tingkat organisasi diwajibkan mengikuti kegiatan sosialisasi Kode Etik dan Sepanjang tahun 2025, PERURI berkomitmen mendorong penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan nilai-nilai etika dan integritas Perusahaan.

Selain itu, seluruh karyawan baru diwajibkan mengikuti Program Pelatihan Induksi yang mencakup sosialisasi Kode Etik Perusahaan. Perusahaan juga melaksanakan kegiatan internalisasi terkait *Good Corporate Governance* (GCG), Manajemen Risiko, serta Program Pengendalian Gratifikasi yang diikuti oleh seluruh karyawan melalui kegiatan *Refreshment Anti-Corruption* bagi *Risk Agent* dan *Anti-Bribery Agent*, Induksi bagi Karyawan Baru dan Sosialisasi kepada karyawan. Tim Auditor Internal turut berperan aktif dalam sosialisasi Kode Etik melalui program yang berfokus pada peningkatan kesadaran Anti-Penyuapan dan Keamanan Informasi.

Sebagai bagian dari keterlibatan pemangku kepentingan eksternal, para rekanan Perusahaan juga mendapatkan sosialisasi Kode Etik melalui kegiatan Vendor Gathering PERURI 2025 guna memastikan keselarasan nilai integritas dalam hubungan kerja sama bisnis.

Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Standar Etika Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak mencatat adanya pelanggaran terhadap Kode Etik, baik yang melibatkan pihak internal maupun pihak eksternal.

Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi terhadap Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) guna memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional serta menilai efektivitas implementasi program penerapan GCG yang telah dijalankan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan senantiasa melakukan penyempurnaan dan pengembangan Pedoman GCG secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Penyesuaian pedoman juga dilaksanakan apabila terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, maupun struktur dan kebijakan organisasi yang berkaitan dengan substansi Pedoman GCG.

Code of Conduct Socialization

Each Head of Work Unit is required to conduct socialization of the Code of Conduct to all personnel within their respective units, as well as to relevant stakeholders, in order to uphold honesty, integrity, and fairness in all transactions and operational activities within their respective work environments.

All PERURI personnel at every level of the organization are required to participate in Code of Conduct socialization activities. Throughout 2025, PERURI is committed to encouraging the signing of Integrity Pacts as a manifestation of commitment to the implementation of the Company's ethical values and integrity standards.

In addition, all new employees are required to participate in the Employee Induction Program, which includes socialization of the Company's Code of Conduct. The Company also conducts internalization programs related to Good Corporate Governance (GCG), Risk Management, and the Gratuity Control Program, attended by all employees through Anti-Corruption Refreshment sessions for Risk Agents and Anti-Bribery Agents, new employee induction programs, and employee-wide socialization activities. The Internal Audit team also plays an active role in Code of Conduct socialization through programs focused on enhancing awareness of anti-bribery practices and information security.

As part of external stakeholder engagement, the Company's business partners also receive Code of Conduct socialization through the PERURI Vendor Gathering 2025, ensuring alignment of integrity values in business cooperation relationships.

Enforcement and Sanctions for Violations of the Company's Ethical Standards

Throughout 2025, the Company recorded no violations of the Code of Conduct, whether involving internal or external parties.

The Company periodically conducts evaluations of the Good Corporate Governance (GCG) Guidelines to ensure their alignment with operational needs and to assess the effectiveness of the implementation of GCG programs that have been carried out.

As part of its commitment to the implementation of good corporate governance, the Company continuously refines and develops its GCG Guidelines based on the results of such evaluations. Adjustments to the guidelines are also made in the event of changes to laws and regulations, the Company's Articles of Association, or the organizational structure and policies related to the substance of the GCG Guidelines.

Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran

Whistleblowing System

Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PERURI telah mengimplementasikan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*). Sistem ini berfungsi sebagai sarana pelaporan yang aman dan menjamin kerahasiaan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Setiap laporan yang diterima melalui mekanisme tersebut akan ditelaah, diproses, dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pelaporan dugaan pelanggaran merupakan elemen penting dalam membangun budaya perusahaan yang menjunjung tinggi transparansi, integritas, serta bebas dari praktik kecurangan maupun korupsi. Melalui implementasi WBS, Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga setiap individu dapat berperan aktif dalam menjaga integritas organisasi tanpa rasa khawatir terhadap potensi tekanan atau risiko lainnya. Sistem ini juga memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara objektif, profesional, dan sesuai prosedur, sehingga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pedoman operasional WBS diatur dalam *Risk Management and Compliance Manual*, sedangkan evaluasi serta pembaruan pedoman pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI). Pelaksanaan WBS di PERURI dilakukan secara sistematis dan terstruktur, melibatkan peran aktif karyawan serta pemangku kepentingan terkait, sehingga setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran dapat dikelola dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Di internal Perusahaan, mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran merupakan instrumen strategis untuk mendorong karyawan bertindak proaktif dalam pencegahan praktik kecurangan dan korupsi dengan menyampaikan laporan melalui WBS.

Seluruh insan PERURI, termasuk pihak eksternal, diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi atau laporan berdasarkan itikad baik atau keyakinan atas dugaan kecurangan, penyuapan, atau pelanggaran lain yang berpotensi merugikan Perusahaan. Selanjutnya, setiap laporan akan ditindaklanjuti oleh Manajemen sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran

PERURI menerapkan *Whistleblowing System* yang berfungsi untuk menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh manajemen, karyawan, maupun pihak eksternal sebagai bagian dari pemangku kepentingan.

To ensure compliance with applicable laws and regulations and to support the implementation of the principles of Good Corporate Governance, PERURI has implemented a Whistleblowing System (WBS). This system serves as a secure reporting channel and guarantees confidentiality for all stakeholders to submit information related to alleged violations occurring within the Company. Any report received through this mechanism will be reviewed, processed, and followed up in accordance with applicable policies and procedures.

Reporting of alleged violations is an important element in fostering a corporate culture that upholds transparency, integrity, and freedom from fraudulent and corrupt practices. Through the implementation of the WBS, the Company provides protection to whistleblowers so that individuals may actively contribute to safeguarding organizational integrity without fear of pressure or other potential risks. This system also ensures that every report is handled objectively, professionally, and in accordance with established procedures, thereby supporting the creation of a clean, transparent, and accountable working environment.

The operational guidelines of the WBS are set out in the Risk Management and Compliance Manual, while the evaluation and updating of its implementation guidelines are conducted by the Internal Audit Unit (SPI). The implementation of the WBS at PERURI is carried out in a systematic and structured manner, involving the active participation of employees and relevant stakeholders, so that any information regarding alleged violations can be managed and followed up in accordance with applicable regulations.

Internally, the whistleblowing mechanism serves as a strategic instrument to encourage employees to act proactively in preventing fraudulent and corrupt practices by submitting reports through the WBS.

All PERURI personnel, including external parties, are given the opportunity to submit information or reports in good faith or based on reasonable belief regarding suspected fraud, bribery, or other violations that may potentially harm the Company. Subsequently, each report will be followed up by Management in accordance with applicable procedures and regulations.

Mechanism for Submitting and Handling Allegations of Violations

PERURI implements a Whistleblowing System (WBS) to receive, verify, and follow up on reports submitted by management, employees, and external parties as part of its stakeholders. Every submission of information or report



Setiap penyampaian informasi atau laporan diwajibkan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, melalui saluran resmi yang telah disediakan oleh Perusahaan, yakni:

must be accompanied by verifiable evidence and submitted through the Company's official reporting channels, namely:



Situs Web/Website
www.peruri.co.id



WhatsApp
0811-1703-9267



Email
wbs@peruri.co.id

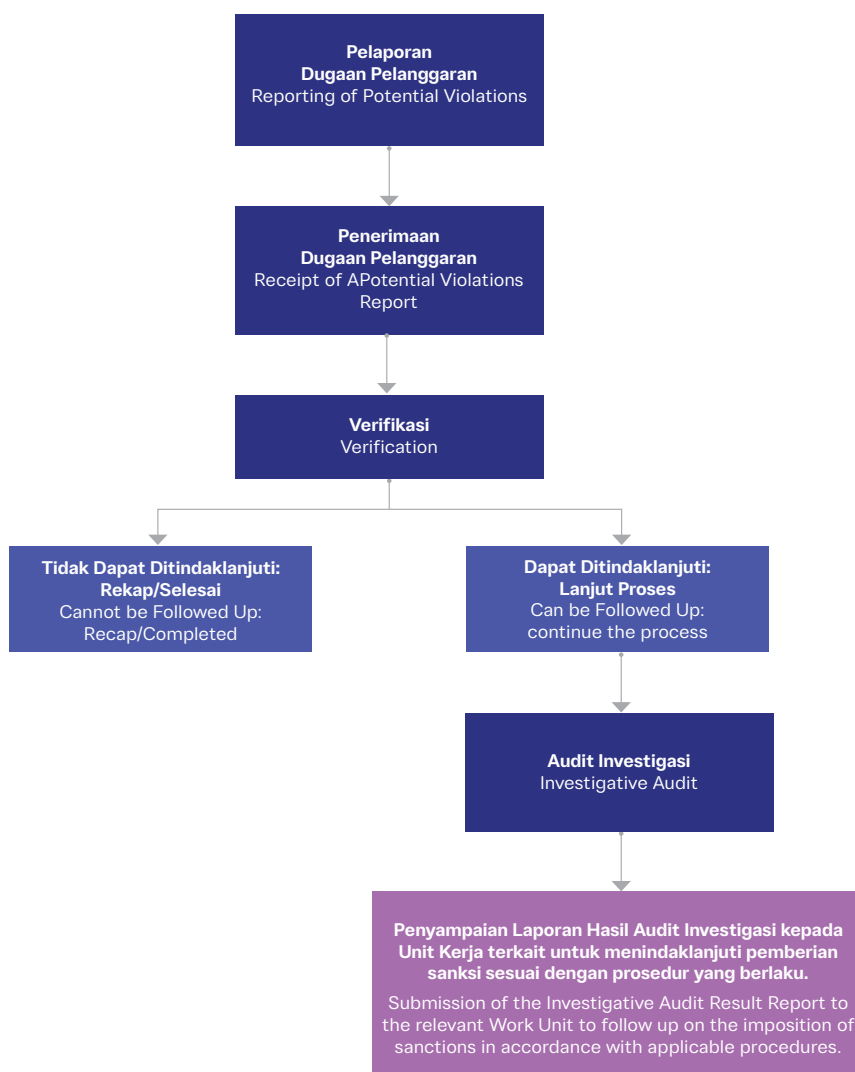
Pengelolaan pelaporan melalui WBS berada dibawah koordinasi Satuan Pengawasan Intern (SPI). Selanjutnya SPI akan melakukan verifikasi. Jika merupakan keluhan kepegawaian akan ditindaklanjuti ke Divisi SDM, dan jika merupakan dugaan pelanggaran ringan akan ditindaklanjuti ke Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan. Selanjutnya SPI akan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran sedang dan berat.

The management of reports submitted through the WBS is coordinated by the Internal Audit Unit (SPI). The SPI will then verify the reports. If the report concerns a personnel complaint, it will be forwarded to the Human Resources Division; if it concerns an alleged minor violation, it will be forwarded to the Security, Occupational Safety and Health, and Environment Division. The SPI will then investigate allegations of moderate and serious violations.

SPI bertanggung jawab untuk memastikan seluruh proses pengelolaan WBS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan tindak lanjut atas setiap laporan WBS melalui proses verifikasi maupun audit investigasi.

SPI is responsible for ensuring that the entire WBS management process is carried out in accordance with applicable regulations, including following up on each WBS report through verification processes and investigative audits.

Alur Proses WBS WBS Process Flow



Perlindungan Bagi Pelapor dan Penanganan Pengaduan

PERURI berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada Pelapor yang bertindak dengan itikad baik, yang meliputi:

1. Tersedianya fasilitas saluran pelaporan yang dapat menyamarkan identitas Pelapor;
2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor dan orang lain yang terlibat atau direferensikan dalam laporan;
3. Jaminan keamanan informasi dan perlindungan terhadap tindakan balasan dari Terlapor, yang berupa ancaman keselamatan fisik, teror psikologis, keselamatan keluarga, keselamatan harta, keamanan pekerjaan dan segala bentuk tindakan lain yang mengancam Pelapor;
4. Perlindungan dari tindakan administratif kepegawaian yang tidak obyektif dipengaruhi oleh keadaan karyawan sebagai Pelapor;
5. PERURI memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada Pelapor atas tindakan balasan dari Terlapor berupa tuntutan hukum.

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya

Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 2 laporan yang diterima melalui saluran WBS, dengan rincian klasifikasi laporan sebagai berikut:

Media Media	Perihal Subject	Jumlah Total	Keterangan Remarks
Website	Laporan WBS WBS Report	1	Sedang proses verifikasi Under verification process
Email	Laporan WBS WBS Report	1	Sedang proses verifikasi Under verification process

Catatan: terdapat 1 proses audit investigasi atas Laporan WBS yang masuk pada tahun 2024
Note: There is 1 ongoing investigative audit related to a WBS report received in 2024.

Protection for Whistleblowers and Complaint Handling

PERURI is committed to maintaining the confidentiality of whistleblowers' identities and providing protection to those who report in good faith, which includes:

1. The availability of reporting channels that allow the whistleblower's identity to remain anonymous;
2. Assurance of confidentiality regarding the identity of the whistleblower as well as any individuals involved or mentioned in the report;
3. Assurance of information security and protection against retaliation from the reported party, including threats to physical safety, psychological intimidation, threats to family safety, threats to personal assets, employment security, and any other forms of actions that may endanger the whistleblower;
4. Protection from administrative employment actions that are not objectively justified and are influenced by the employee's status as a whistleblower;
5. Provision of legal assistance and protection by PERURI to whistleblowers in the event of retaliatory legal actions initiated by the reported party.

Number of Complaints and Follow-Up Actions

Throughout 2025, a total of 2 (two) reports were received through the WBS channel, with the following classification details:



Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control

Perusahaan berkomitmen dengan penandatanganan Pakta Integritas sebagai penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) guna mewujudkan lingkungan usaha yang sehat serta bebas dari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Salah satu upaya utama dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan berintegritas adalah dengan meminimalkan potensi terjadinya konflik kepentingan di lingkungan Perusahaan. Pengendalian konflik kepentingan dilakukan melalui implementasi Program Pengendalian Gratifikasi.

Untuk mendukung program tersebut, Perusahaan menyusun Pedoman Pelaporan Gratifikasi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika Perilaku, dan nilai-nilai Perusahaan.

Komitmen PERURI dalam mewujudkan Program Pengendalian Gratifikasi antara lain:

- Kebijakan Pimpinan Perusahaan dalam menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi;
- Komitmen Insan PERURI dalam melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi;
- Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
- Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi;
- Evaluasi Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi.

Perusahaan menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik dengan fokus pada pengendalian gratifikasi. Upaya ini bertujuan untuk menjaga integritas yang menjadi nilai utama di seluruh perusahaan BUMN. Implementasi pelaporan gratifikasi dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PERURI.

Tugas UPG antara lain adalah:

1. Menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari pegawai di Lingkungan Peruri;
2. Meneruskan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK;
3. Melakukan input hasil monitoring dan evaluasi implementasi Program Pengendalian Gratifikasi kepada KPK;
4. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi serta laporan penerapan Program pengendalian Gratifikasi (PPG) kepada Direksi;
5. Menindaklanjuti hasil penetapan status kepemilikan gratifikasi;
6. Menyusun rencana kerja Unit Pengendalian Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi;
7. Mengoordinasikan kegiatan diseminasi aturan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal perusahaan;

The Company is committed to implementing Integrity Pacts as part of the principles of Good Corporate Governance (GCG) to foster a healthy business environment free from Collusion, Corruption, and Nepotism (KKN) practices.

One of the key efforts in establishing clean and integrity-driven governance is minimizing the potential for conflicts of interest within the Company. Conflict of interest control is carried out through the implementation of a Gratification Control Program.

To support this initiative, the Company has developed a Gratification Reporting Guideline, which is aligned with applicable laws and regulations, as well as the Company's GCG Guidelines, Code of Conduct, and corporate values.

PERURI's commitment to implementing the Gratification Control Program includes:

- Company leadership policies in implementing the Gratification Control Program;
- Commitment of PERURI personnel to carry out the Gratification Control Program;
- Gratification Control Guidelines;
- Socialization of the Gratification Control Program;
- Evaluation of the implementation of the Gratification Control Program.

The Company upholds good governance principles with a strong focus on gratification control. This effort is aimed at safeguarding integrity, which is a core value across all state-owned enterprises (SOEs). The implementation of gratification reporting is carried out by the PERURI Gratification Control Unit (UPG).

The duties of the Gratification Control Unit (UPG) include:

1. Receiving, analyzing, and administering reports on the acceptance and rejection of gratification by employees within PERURI;
2. Forwarding reports on the acceptance and rejection of gratification to the Corruption Eradication Commission (KPK);
3. Entering the results of monitoring and evaluation of the implementation of the Gratification Control Program into the KPK system;
4. Submitting the results of the management of gratification acceptance and rejection reports, as well as reports on the implementation of the Gratification Control Program (PPG), to the Board of Directors;
5. Following up on decisions regarding the ownership status of gratification;
6. Preparing the work plan of the Gratification Control Unit and proposing gratification control policies;
7. Coordinating the dissemination of gratification control regulations to the Company's internal and external parties;

8. Melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung implementasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Peruri;
9. Menunjuk Agent yang bertugas menjadi perwakilan UPG untuk melaksanakan sosialisasi terkait pemahaman gratifikasi di unit kerja masing-masing.

UPG memiliki wewenang untuk menentukan pemanfaatan atas gratifikasi yang ditetapkan KPK untuk dikelola perusahaan, yaitu:

1. Dimanfaatkan untuk keperluan penyelenggaraan Perusahaan;
2. Disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan (sosial);
3. Dikembalikan kepada pihak pemberi;
4. Menjadi milik penerima;
5. Penentuan pemanfaatan diatur lebih lanjut dalam prosedur Program Pengendalian Gratifikasi.

Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di PERURI dipantau secara berkala melalui penyampaian laporan tahunan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui *Dashboard Monitoring* dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Selain mekanisme pelaporan tersebut, KPK juga melakukan penilaian atas efektivitas implementasi program guna memastikan bahwa Perusahaan telah menjalankan langkah-langkah pengendalian gratifikasi secara memadai serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh insan PERURI mengenai pengendalian gratifikasi, serta mendorong sikap anti-gratifikasi, Perusahaan secara rutin mengadakan sosialisasi mengenai hal tersebut. Sosialisasi ini dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan setiap individu di perusahaan memiliki pemahaman yang mendalam terkait aturan dan implementasi pengendalian gratifikasi.

PERURI juga mengikutsertakan beberapa karyawan untuk mengikuti *e-learning* pemahaman terkait gratifikasi yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Prinsip Pengendalian Gratifikasi

a. Penolakan Gratifikasi

Apabila Insan PERURI mendapatkan pemberian (Gratifikasi) yang bertentangan dengan fungsi dan jabatan dia di Perusahaan, maka ia WAJIB untuk MENOLAK pemberian tersebut. Penolakan harus disertai dengan penjelasan kepada pihak pemberi berkaitan dengan peraturan penolakan Gratifikasi. Selanjutnya, Insan PERURI tersebut wajib untuk melaporkan penolakan tersebut kepada Unit Pengelola Gratifikasi.

b. Pemberian Gratifikasi

Insan PERURI DILARANG untuk memberikan Gratifikasi secara langsung maupun tidak langsung kepada *stakeholders*. Larangan pemberian tersebut memenuhi

8. Carrying out various activities that support the implementation of gratification control within PERURI; and
9. Appointing Agents to serve as UPG representatives responsible for conducting awareness sessions on gratification within their respective work units.

The Gratification Control Unit (UPG) is authorized to determine the utilization of gratification as stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) for management by the Company, which may include:

1. Utilization for the Company's operational purposes;
2. Donation to communities in need (social purposes);
3. Return to the giver;
4. Becoming the property of the recipient;
5. The determination of utilization is further regulated in the Standard Operating Procedures of the Gratification Control Program.

The implementation of the Gratification Control Program at PERURI is periodically monitored through the submission of annual reports to the Corruption Eradication Commission (KPK) via the Monitoring and Evaluation Dashboard of the Gratification Control Program (GCP).

In addition to this reporting mechanism, the KPK also evaluates the effectiveness of the program implementation to ensure that the Company has adequately carried out gratification control measures and continuously supports efforts to prevent and eradicate corruption.

To enhance understanding and awareness among all PERURI personnel regarding gratification control and to promote an anti-gratification culture, the Company regularly conducts socialization activities. These programs are carried out on an ongoing basis to ensure that every individual within the Company has a comprehensive understanding of the relevant rules and implementation of gratification control.

PERURI also encourages employees to participate in *e-learning* programs on gratification awareness organized by the Corruption Eradication Commission (KPK).

Principles of Gratification Control

a. Refusal of Gratification

If PERURI personnel receive any form of gratification that is inconsistent with their duties and position within the Company, they are REQUIRED to REFUSE such offer. The refusal must be accompanied by an explanation to the giver regarding the applicable regulations on gratification refusal. Furthermore, the employee is obliged to report the refusal to the Gratification Management Unit.

b. Giving of Gratification

PERURI personnel are PROHIBITED from giving gratification, either directly or indirectly, to stakeholders. Such prohibition applies when one or more of the



salah satu atau lebih dari unsur berikut:

1. Tidak didasarkan pada itikad baik;
2. Pemberian bertujuan untuk mendapatkan informasi ataupun hal lain yang tidak sesuai dengan peraturan;
3. Pemberian bertentangan dengan kaidah hukum (baik internal maupun peraturan pemerintah);
4. Pemberian berdasarkan pada kedudukan/jabatan bertujuan untuk mempengaruhi keputusan.
5. Pemberian yang memiliki hubungan dengan kegiatan politik dan partai politik.

c. Penerimaan Gratifikasi

Insan PERURI DILARANG menerima segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan/atau kewenangannya dalam setiap proses bisnis perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Larangan tersebut juga berlaku bagi keluarga inti dari Insan PERURI. Segala bentuk penerimaan gratifikasi secara langsung atau tidak langsung wajib dilaporkan kepada Unit Pengelola Gratifikasi.

Pelaporan Gratifikasi

Insan PERURI yang dalam kondisi tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib untuk menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mekanisme pelaporan gratifikasi adalah sebagai berikut:

1. Penolakan dan penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada:
 - a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja setelah tanggal penerimaan atau penolakan;
 - b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima.
2. Media pelaporan atas penerimaan dan penolakan gratifikasi dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan laporan melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online);
 - b. Mengisi formulir Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi;
 - c. Menyampaikan laporan melalui e-mail upg@peruri.co.id dengan mengisi data sekurang-kurangnya memuat:
 - › Identitas penerima berupa: NIK, nama, alamat lengkap dan nomor telepon;
 - › Informasi pemberi gratifikasi;
 - › Jabatan penerima gratifikasi;
 - › Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - › Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
 - › Nilai gratifikasi yang diterima;
 - › Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi; dan
 - › Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.
3. UPG menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan.
4. KPK akan melakukan analisis, verifikasi serta memberikan penetapan status gratifikasi atas laporan gratifikasi yang disampaikan oleh UPG selambat-lambatnya 30 hari kerja

following conditions are met:

1. It is not based on good faith;
2. The purpose is to obtain information or other benefits that are not in accordance with regulations;
3. It is contrary to applicable laws and regulations (both internal and government regulations);
4. It is given based on position or office with the intention of influencing decisions;
5. It is related to political activities or political parties.

c. Receipt of Gratification

PERURI personnel are PROHIBITED from accepting any form of gratification related to their position and/or authority in any of the Company's business processes that may influence business decisions. This prohibition also applies to the immediate family members of PERURI personnel. Any form of gratification received, whether directly or indirectly, must be reported to the Gratification Management Unit.

Gratification Reporting

PERURI personnel who are unable to refuse a gratification are required to submit a report on the receipt of the gratification to the Gratification Control Unit (UPG) or to the Corruption Eradication Committee (KPK).

The mechanism for reporting gratification is as follows:

1. Refusal or acceptance of gratification must be reported to:
 - a. The UPG within a maximum of 10 working days from the date of receipt or refusal;
 - b. The KPK within a maximum of 30 (thirty) working days from the date the gratification is received.
2. Reporting channels for acceptance or refusal of gratification may be submitted through:
 - a. The Gratification Online (GOL) application;
 - b. The Gratification Receipt/Refusal Reporting Form;
 - c. E-mail to upg@peruri.co.id, by providing at minimum the following information:
 - › Identity of the recipient (National ID number/NIK, full name, full address, and telephone number);
 - › Information on the giver of the gratification;
 - › Position of the recipient;
 - › Place and time of receipt of gratification;
 - › Description of the type of gratification received;
 - › Estimated value of the gratification;
 - › Chronology of the incident; and
 - › Supporting evidence, documents, or data related to the report.
3. The UPG shall submit the gratification report to the KPK no later than 10 working days from the date the report is received.
4. The KPK will conduct analysis and verification and determine the status of the reported gratification no later than 30 working days.

Sanksi Pelanggaran

Insan PERURI yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pedoman ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan terkait Etika Perilaku Perusahaan. Adapun peraturan yang menjadi acuan dalam pengenaan sanksi adalah Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sanctions for Violations

PERURI personnel who fail to comply with the provisions set out in this Guideline will be subject to sanctions in accordance with the Company's regulations on Code of Conduct. The legal basis for the imposition of sanctions refers to Articles 12B and 12C of Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as amended by Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Conflict of Interest Handling

PERURI senantiasa memperkuat sistem pengendalian internal dengan memastikan seluruh karyawan, termasuk manajemen dan Dewan Pengawas, memahami serta mematuhi pedoman etika dan tata perilaku Perusahaan yang mencakup ketentuan mengenai benturan kepentingan. Setiap individu di lingkungan PERURI diwajibkan untuk mengungkapkan secara terbuka setiap potensi benturan kepentingan serta menghindari kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan.

PERURI continuously strengthens its internal control system by ensuring that all employees, including management and the Supervisory Board, understand and comply with the Company's Code of Conduct, which includes provisions on conflict of interest. Every individual within PERURI is required to openly disclose any potential conflict of interest and to avoid situations that may create a conflict between personal interests and the interests of the Company.

Sebagai bagian dari langkah pencegahan, PERURI secara berkala menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan terkait integritas serta etika kerja, sekaligus menyediakan saluran pelaporan (*whistleblowing system*) yang aman dan andal. Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan terbebas dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan Perusahaan.

As part of its preventive measures, PERURI regularly conducts socialization and training programs on integrity and work ethics, while also providing a secure and reliable reporting channel through the Whistleblowing System. These initiatives aim to foster a professional, transparent, and integrity-driven work environment free from practices that may harm the Company.

Melalui pengelolaan benturan kepentingan yang dilakukan secara konsisten dan terstruktur, PERURI berkomitmen menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan serta memastikan setiap aktivitas usaha dijalankan secara adil, akuntabel, dan berintegritas.

Through consistent and structured conflict of interest management, PERURI is committed to maintaining stakeholder trust and ensuring that all business activities are conducted fairly, accountably, and with integrity.

Kebijakan Anti-Korupsi/Anti-Fraud Anti-Corruption/Anti-Fraud Policy

PERURI menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk kecurangan (*fraud*), termasuk gratifikasi, penyuapan, dan korupsi, baik yang dilakukan oleh maupun yang diterima dari pelanggan, rekanan, pejabat pemerintah, pegawai, maupun pihak lainnya. Untuk memastikan integritas dalam seluruh aktivitas operasional, PERURI menyusun Program *Anti-Fraud* sebagai pedoman yang mengatur standar etika perilaku, prinsip bisnis yang berlandaskan kejujuran, serta kebijakan-kebijakan lain yang mencakup:

1. Penerapan Pedoman Etika Perilaku dan Berbisnis (*Code of Conduct*);
2. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;
3. Pedoman *Anti-Fraud* Perusahaan;

PERURI implements a zero-tolerance policy toward all forms of fraud, including gratification, bribery, and corruption, whether committed by or received from customers, business partners, government officials, employees, or other parties. To ensure integrity across all operational activities, PERURI has established an Anti-Fraud Program as a guideline that sets out standards of ethical conduct, business principles based on honesty, and other related policies, including:

1. Implementation of the Code of Conduct;
2. Whistleblowing System;
3. Company Anti-Fraud Guidelines;



4. Identifikasi Risiko Kepatuhan;
5. Proses Pengawasan.



Program *Anti-Fraud* merupakan wujud komitmen seluruh Insan PERURI dalam mematuhi *Code of Conduct* (Pedoman Etika Perilaku dan Berbisnis). Setiap individu yang terlibat di lingkungan PERURI berkewajiban untuk memahami, melaksanakan, dan menginternalisasikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Program *Anti-Fraud* sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjaga integritas dan transparansi pada setiap aspek operasional Perusahaan.



Direksi telah menetapkan *Risk Management & Control Manual* yang memuat terkait kebijakan anti korupsi serta mengatur pembentukan tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).



Komitmen Anti-Korupsi



Perusahaan secara tegas menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, bersih, dan berintegritas. Dalam dokumen ini, PERURI menegaskan komitmennya untuk menjalankan seluruh aktivitas usaha dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika serta prinsip transparansi, guna mendukung terciptanya budaya perusahaan yang akuntabel dan berkelanjutan.



Komitmen tersebut telah ditandatangani oleh Direksi, Dewan Pengawas, serta jajaran manajemen PERURI yang menyatakan:



1. Tidak melakukan segala bentuk tindakan koruptif/*fraud*, kolusi dan nepotisme dalam melaksanakan pengurusan dan pengawasan kegiatan Perusahaan;
2. Turut serta dalam penyelenggaraan sistem pengendalian/pengawasan yang jujur, adil dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PERURI dan/atau perusahaan anak.

Program dan Prosedur Anti-korupsi

PERURI telah menetapkan Pedoman Anti Korupsi yang tercantum dalam *Risk Management and Compliance Manual*, khususnya pada Bab X mengenai *Anti-Fraud Program*. Pedoman tersebut mengatur antara lain mengenai:

- a. Pengendalian Gratifikasi;
- b. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- c. Larangan mengambil Keuntungan Pribadi;
- d. *Whistle Blowing System*;
- e. Risiko Kepatuhan;
- f. Program *Anti-Fraud*;
- g. Upaya menghindari Praktik *Bad Governance*.

Adapun program yang dijalankan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Anti Penyuapan kepada seluruh Insan PERURI dan stakeholders. Sosialisasi ini dilakukan secara berkelanjutan oleh Perusahaan dengan melibatkan seluruh karyawan, stakeholders serta Anak Perusahaan. Himbuan Larangan Praktik Gratifikasi juga dilakukan

4. Compliance Risk Identification;
5. Monitoring and Control Processes.

The Anti-Fraud Program reflects the commitment of all PERURI personnel to comply with the Code of Conduct (Guidelines for Ethical Conduct and Business Practices). Every individual within PERURI is required to understand, implement, and internalize the principles set out in the Anti-Fraud Program as part of their responsibility to uphold integrity and transparency across all aspects of the Company's operations.

The Board of Directors has adopted a Risk Management & Control Manual that includes anti-corruption policies and provides for the establishment of a Gratification Control Unit (UPG).

Anti-Corruption Commitment

The Company firmly rejects all forms of corruption, collusion, and nepotism (KKN) as part of its efforts to create a healthy, clean, and integrity-driven working environment. In this document, PERURI reaffirms its commitment to conducting all business activities with strong adherence to ethical values and the principles of transparency, in support of a corporate culture that is accountable and sustainable.

This commitment has been formally signed by the Board of Directors, the Supervisory Board, and PERURI management, who declare the following:

1. Not to engage in any form of corrupt practices, fraud, collusion, or nepotism in carrying out the management and supervision of Company activities;
2. To participate in the implementation of a control and supervisory system that is honest, fair, and accountable;
3. Not to have any conflict of interest and/or be involved in transactions that create a conflict of interest with PERURI and/or its subsidiaries.

Anti-Corruption Programs and Procedures

PERURI has established Anti-Corruption Guidelines as set out in the Risk Management and Compliance Manual, specifically in Chapter X on the Anti-Fraud Program. These guidelines regulate, among others:

- a. Gratification control;
- b. State Officials' Wealth Report (LHKPN);
- c. Prohibition of personal gain;
- d. Whistleblowing System;
- e. Compliance risk;
- f. Anti-fraud program;
- g. Efforts to prevent bad governance practices.

The programs implemented in 2025 are as follows:

- a. **Anti-Bribery Awareness Campaigns for all PERURI personnel and stakeholders**

The Company conducts these campaigns on an ongoing basis, involving all employees, stakeholders, and subsidiaries. Reminders regarding the prohibition

setiap Hari Raya Keagamaan dan hari besar lainnya yang berpotensi memiliki peluang adanya praktik Gratifikasi. Himbauan tersebut disampaikan kepada stakeholders melalui laman media sosial dan website resmi PERURI.

- b. Pengelolaan Laporan *Whistleblowing System*
- c. Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi melibatkan seluruh Insan PERURI, meliputi partisipasi aktif karyawan dalam peningkatan budaya Anti Penyuapan serta Implementasi Program. Dilakukan pula pengelolaan Laporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi.
- d. *Bribery Risk Assessment* Seluruh unit kerja melakukan pemetaan risiko penyuapan berdasarkan pada proses bisnis yang berlaku di masing-masing unit kerja. *Bribery Risk Assessment* dilakukan sebagai suatu upaya preventif dalam mencegah adanya praktik – praktik penyuapan. Seluruh Unit kerja telah mengidentifikasi risiko penyuapan yang muncul dan melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan.

Sosialisasi Anti-Korupsi dan Gratifikasi

Perusahaan secara konsisten menyelenggarakan sosialisasi terkait upaya pembentukan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik KKN. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai forum, antara lain Rapat Direksi, Rapat Pimpinan, serta Rapat Koordinasi antara Dewan Pengawas dan Direksi.

Selain itu, penyampaian informasi juga dilakukan melalui media komunikasi internal, seperti Portal PERURI, guna memastikan seluruh karyawan memahami serta mendukung komitmen Perusahaan terhadap penerapan integritas dan transparansi dalam setiap aspek operasional. Terdapat berbagai metode sosialisasi yang dilaksanakan dan ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pihak Internal:

- a. Sosialisasi aturan pengendalian gratifikasi;
- b. Media sosialisasi lainnya, antara lain: *handbook*, *booklet*, *leaflet*, portal, video, dan lainnya.

Pihak Eksternal:

- a. *Customer gathering*;
- b. *Vendor gathering*;
- c. Pakta integritas dengan pemangku kepentingan;
- d. Pencantuman larangan gratifikasi pada dokumen kontrak/ kerja sama;
- e. Kegiatan lain yang melibatkan pemangku kepentingan.

Berikut merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi anti-korupsi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025:

of gratuity practices are also issued during religious holidays and other major events where there is a potential for such practices to occur. These reminders are communicated to stakeholders via social media and PERURI's official website.

- b. Management of the Whistleblowing System
- c. Gratification Control Program (PPG) The implementation of the Gratification Control Program involves all PERURI personnel, including active employee participation in fostering an anti-bribery culture and program implementation. The Gratification Control Unit also manages reports of the acceptance and rejection of gratification.
- d. Bribery Risk Assessment
All work units conduct bribery risk mapping based on the business processes applicable to each unit. The Bribery Risk Assessment is carried out as a preventive measure to curb bribery practices. All work units have identified emerging bribery risks and are continuously implementing risk mitigation measures.

Anti-Corruption and Gratification Socialization

The Company consistently conducts socialization activities aimed at fostering a clean working environment free from collusion, corruption, and nepotism (KKN). These activities are carried out through various forums, including Board of Directors Meetings, Management Meetings, and Coordination Meetings between the Board of Supervisors and the Board of Directors.

In addition, information is also disseminated through internal communication channels such as the PERURI Portal to ensure that all employees understand and support the Company's commitment to integrity and transparency in all operational aspects. Various socialization methods are implemented and directed to all stakeholders.

Internal stakeholders:

- a. Socialization of gratification control policies;
- b. Other communication media, including handbooks, booklets, leaflets, portals, videos, and others.

External stakeholders:

- a. Customer gatherings;
- b. Vendor gatherings;
- c. Integrity pacts with stakeholders;
- d. Inclusion of anti-gratification clauses in contracts/ agreements;
- e. Other stakeholder engagement activities.

The following are the series of anti-corruption socialization activities conducted throughout 2025:

Nama Kegiatan Activity Name	Pelaksanaan Implementation	Peserta Participants
Pelatihan Induksi Tenaga PKWT 2025 Induction Training for PKWT Employees 2025	100% (sepanjang tahun 2025) 100% (throughout 2025)	Karyawan Baru New Employees
Sosialisasi Anti Penyuapan ISO 37001:2016 2025 Anti-Bribery Socialization ISO 37001:2016 2025	16 Juli 2025 July 16, 2025	Karyawan PERURI PERURI Employees



Nama Kegiatan Activity Name	Pelaksanaan Implementation	Peserta Participants
Sosialisasi GCG, Kode Etik (COCG, COC) & Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Socialization on GCG, Code of Conduct (COCG, COC), and Anti-Bribery Management System (ABMS)	12 September 2025 September 12, 2025	Karyawan PERURI PERURI Employees
Refreshment Risk Agent dan Anti-Bribery Agent Tahun 2025 Refreshment for Risk Agents and Anti-Bribery Agents 2025	28 Mei 2025 May 28, 2025	Karyawan PERURI PERURI Employees
Acara Temu Rekanan Perum Peruri Peruri Partner/Vendor Engagement Event	28 November 2025 November 28, 2025	Vendor PERURI PERURI Vendors

Jumlah Karyawan yang Menerima Pelatihan Anti-Korupsi

Jumlah karyawan PERURI yang telah mengikuti kegiatan *Refreshment* Anti-Korupsi bagi *Risk Agent* dan *Anti-Bribery Agent* pada tahun 2025 tercatat sebanyak 884 orang.

Persentase Karyawan/Pemasok yang Telah Menandatangani Kode Etik Anti-Korupsi

Sebanyak 87% yang terdiri dari karyawan tetap, Direksi, dan Dewan Pengawas telah menandatangani Pakta Integritas Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan prinsip integritas di lingkungan Perusahaan.

Number of Employees Receiving Anti-Corruption Training

The number of PERURI employees who participated in the Anti-Corruption Refreshment for Risk Agents and Anti-Bribery Agents in 2025 was 884 employees.

Percentage of Employees/Suppliers who have Signed the Anti-Corruption Code of Ethics

A total of 87%, comprising permanent employees, the Board of Directors, and the Supervisory Board, have signed the 2025 Integrity Pact as a demonstration of their commitment to upholding the principles of integrity within the Company.

Kebijakan Pencegahan Insider Trading

Insider Trading Prevention Policy

Hingga akhir tahun 2025, PERURI belum memiliki kebijakan khusus yang secara tegas mengatur pencegahan praktik *insider trading*. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar terkait larangan penyalahgunaan informasi internal telah tercantum dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Perusahaan, yang menjadi pedoman bagi seluruh insan PERURI dalam menjalankan kegiatan bisnis secara etis, transparan, dan profesional.

PERURI menyadari pentingnya penguatan pengendalian atas akses dan pemanfaatan informasi material non-publik untuk menjamin keadilan serta integritas dalam pengambilan keputusan strategis Perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, ke depan PERURI akan terus melakukan kajian dan penyempurnaan kebijakan internal, termasuk kemungkinan penyusunan kebijakan khusus mengenai pencegahan insider trading, sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

As of the end of 2025, PERURI does not yet have a specific policy that explicitly regulates the prevention of insider trading practices. However, the fundamental principles prohibiting the misuse of internal information have been incorporated into the Company's Code of Conduct, which serve as a guideline for all PERURI personnel in conducting business activities in an ethical, transparent, and professional manner.

PERURI recognizes the importance of strengthening controls over access to and the use of non-public material information to ensure fairness and integrity in the Company's strategic decision-making processes. In line with this, PERURI will continue to review and enhance its internal policies, including the potential development of a specific insider trading prevention policy, as part of its ongoing efforts to strengthen the implementation of Good Corporate Governance principles.

Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Information on Political Funding Contributions

PERURI senantiasa menjaga sikap netral dalam aktivitas politik serta memastikan bahwa seluruh sumber daya Perusahaan dimanfaatkan secara eksklusif untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Perusahaan secara profesional dan berintegritas. Sehubungan dengan hal tersebut, PERURI tidak menyalurkan dana maupun bentuk kontribusi apa pun kepada partai politik, calon anggota legislatif, kandidat kepala daerah, ataupun kegiatan politik lainnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen PERURI dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya dalam aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menjaga independensi Perusahaan sebagai entitas bisnis milik negara.

PERURI consistently maintains a neutral stance in political activities and ensures that all Company resources are used exclusively to support the achievement of its vision, mission, and strategic objectives in a professional and integrity-based manner. In this regard, PERURI does not provide funds or any form of contribution to political parties, legislative candidates, regional head candidates, or any other political activities. This policy forms part of PERURI's commitment to implementing Good Corporate Governance principles, particularly in terms of regulatory compliance and maintaining the Company's independence as a state-owned enterprise.

Etika Perusahaan dalam Berhubungan dengan Pejabat Publik

Company Ethics in Dealing with Public Officials

Seluruh karyawan dan manajemen PERURI dilarang untuk memberikan, menjanjikan, maupun menerima segala bentuk gratifikasi, suap, atau fasilitas yang berpotensi memengaruhi independensi serta objektivitas dalam proses pengambilan keputusan, baik yang melibatkan pihak internal maupun eksternal, termasuk pejabat publik. Setiap bentuk interaksi dan kerja sama dengan pejabat publik dilaksanakan secara resmi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung dokumentasi yang memadai.

All PERURI employees and management are prohibited from giving, promising, or receiving any form of gratification, bribery, or facilitation that may influence independence and objectivity in decision-making processes, involving both internal and external parties, including public officials. All interactions and engagements with public officials are conducted formally, in accordance with applicable laws and regulations, and are supported by adequate documentation.

Sebagai upaya memperkuat budaya integritas, PERURI secara berkesinambungan menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan terkait etika bisnis serta pencegahan korupsi, sekaligus menyediakan saluran pelaporan yang aman dan terpercaya untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika. Melalui langkah tersebut, PERURI berkomitmen menjaga reputasi Perusahaan serta membangun hubungan kemitraan yang profesional dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pejabat publik.

As part of its efforts to strengthen a culture of integrity, PERURI continuously conducts socialization and training on business ethics and corruption prevention, while also providing a secure and reliable reporting channel for reporting suspected ethical violations. Through these measures, PERURI is committed to safeguarding the Company's reputation and fostering professional relationships based on Good Corporate Governance principles with all stakeholders, including public officials.



Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Officials' Wealth Report (LHKPN)

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

PERURI senantiasa berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksanaan kewajiban tersebut mencerminkan komitmen PERURI dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta dalam mendorong terwujudnya tata kelola penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui penyampaian LHKPN yang dilakukan secara akurat, lengkap, dan jujur, PERURI berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas dari perilaku tidak etis dan penyalahgunaan kewenangan.

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan

Landasan hukum dan ketentuan yang menjadi dasar penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Uang Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Basic Principles of the State Officials' Wealth Report

PERURI is fully committed to complying with all applicable laws and regulations, including the obligation to submit the State Officials' Wealth Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK).

The implementation of this obligation reflects PERURI's commitment to supporting efforts to prevent and eradicate corruption, collusion, and nepotism (KKN), as well as promoting clean, transparent, and accountable governance. Through the accurate, complete, and honest submission of LHKPN reports, PERURI actively contributes to creating a governance environment that is free from unethical behavior and abuse of authority.

Legal Basis and Regulations for Implementing LHKPN in the Company

The legal framework and regulations forming the basis for the implementation of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) within the Company are as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 No. 137, Supplement to the State Gazette No. 4250), as amended several times, most recently by Law No. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2019 No. 197, Supplement to the State Gazette No. 6409);
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 dated June 19, 2003 on State-Owned Enterprises;
3. Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption;
4. Law No. 28 of 1999 on Clean and Corruption-Free State Officials;
5. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 6 of 2019 on Public Corporation (PERUM) Percetakan Uang Republik Indonesia;
6. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, as amended by Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;

7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-10/MBU/06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/01/2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

7. Minister of State-Owned Enterprises Regulation of the Republic of Indonesia No. PER-10/MBU/06/2021 concerning Amendments to Ministerial Regulation No. PER-01/MBU/01/2018 on the Reporting of State Officials' Wealth within the Ministry of State-Owned Enterprises.

Kepatuhan Perusahaan atas Penyampaian LHKPN

Sebagai bagian dari komitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara berkelanjutan, PERURI selalu memastikan kepatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). PERURI telah melakukan pemutakhiran pedoman penyampaian LHKPN yang sebelumnya diterbitkan pada 2017, dengan menambahkan ketegasan sanksi bagi pihak yang wajib lapor namun tidak memenuhi kewajibannya. Pada tahun 2025, pedoman tersebut diperbarui dan disahkan dalam *Manual Risk Management and Compliance*, khususnya pada Bab X tentang Anti Fraud Program, yang berlaku sejak 29 Desember 2025. Adapun perubahan tersebut antara lain:

- Wajib Lapor LHKPN di PERURI adalah:
 - Dewan Pengawas;
 - Direksi;
 - Pejabat struktural organik dan non organik 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
 - Pejabat non struktural organik 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
 - Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi;
 - Direksi dan Dewan Komisaris Cucu Perusahaan.
- Dalam hal Wajib Lapor lalai dan tidak memenuhi kewajiban mengisi dan menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No. 28 tahun 1999 kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perusahaan yang berlaku. Adapun sanksi yang akan diberikan pada Wajib Lapor yang tidak menyampaikan LHKPN maka kepada yang bersangkutan akan ditunda pemberian Jasa Produksi hingga Wajib Lapor tersebut menyampaikan LHKPN;

Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan

Hasil/Tingkat Kepatuhan LHKPN PERURI per 31 Desember 2025

Company Compliance on LHKPN Reporting

As part of its commitment to the continuous implementation of Good Corporate Governance (GCG), PERURI consistently ensures compliance with the submission of the State Officials' Wealth Report (LHKPN). The Company has updated its LHKPN reporting guideline, which was previously issued in 2017, by introducing stricter sanctions for individuals who are required to report but fail to fulfill their obligation. In 2025, the guideline was revised and formally incorporated into the Risk Management and Compliance Manual, specifically Chapter X on the Anti-Fraud Program, effective as of December 29, 2025. The key revisions include:

- LHKPN reporting obligors at PERURI consist of:
 - Supervisory Board;
 - Board of Directors;
 - Organic and non-organic structural officials one level below the Board of Directors;
 - Organic non-structural officials one level below the Board of Directors;
 - Directors and Boards of Commissioners of Subsidiaries/Affiliated Companies;
 - Directors and Boards of Commissioners of Second-tier subsidiaries.
- In the event that a reporting obligor is negligent and fails to fulfill the obligation to complete and submit the LHKPN in accordance with applicable laws and regulations, administrative sanctions shall be imposed pursuant to Article 20 of Law No. 28 of 1999 in accordance with Company regulations. The sanction applied to non-compliance is the postponement of production/service incentives until the obligor submits the LHKPN.

Transparency of Officials' LHKPN Reporting

LHKPN Compliance Results/Level at PERURI as of December 31, 2025

Jumlah Wajib Lapor Number of Reporting Obligors	Tingkat Kepatuhan Compliance Rate	Tingkat Ketepatan Timeliness Rate
46	(100%)	(100%)



Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement of Goods and Services



Kebijakan pengadaan barang dan jasa di PERURI mengacu pada Keputusan Direksi No. KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, yang diperbarui melalui Keputusan Direksi No. KEP-11/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 serta selanjutnya diubah menjadi Manual Pengadaan Barang/Jasa di Perum Peruri No. 02/PBJ/DM-DU/IX/2025 tanggal 30 September 2025. Kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di PERURI guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERURI's procurement policy for goods and services refers to Board of Directors Decree No. KEP-11/XII/2019 dated December 19, 2019, which was updated through Board of Directors Decree No. KEP-11/X/2023 dated October 5, 2023 and amended to become the Manual on the Procurement of Goods and Services at Perum Peruri No. 02/PBJ/DM-DU/IX/2025, dated September 30, 2025. This policy serves as the guideline for the implementation of all procurement processes within PERURI to ensure transparency, accountability, and compliance with applicable laws and regulations.

Rantai Pasok

Supply Chain

PERURI melaksanakan proses evaluasi dan seleksi mitra kerja atau pemasok secara kompetitif dan objektif dengan mempertimbangkan aspek legalitas, rekam jejak kinerja, kualitas produk dan/atau jasa, serta komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Seluruh pemasok diwajibkan mematuhi Kode Etik Pemasok yang ditetapkan PERURI, termasuk ketentuan mengenai standar etika, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kepatuhan pada aspek lingkungan dan keselamatan kerja.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan rantai pasok, PERURI mengimplementasikan sistem digital pada proses pengadaan dan manajemen logistik guna meningkatkan akurasi data, mempercepat alur proses, serta meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan. Selain itu, pembinaan dan evaluasi secara berkala terhadap mitra usaha strategis terus dilakukan untuk memastikan kinerja yang optimal dan selaras dengan sasaran Perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, PERURI didukung oleh 950 pemasok yang tersebar di seluruh rantai pasok. Seluruh pemasok tersebut telah melalui tahapan seleksi sesuai prosedur dan mekanisme rekanan yang berlaku. Proses pendaftaran pemasok dilaksanakan melalui Sistem Informasi *e-Procurement* PERURI pada laman <https://eproc.peruri.co.id>.

PERURI conducts the evaluation and selection of business partners or suppliers through a competitive and objective process, taking into account legal compliance, track record of performance, product and/or service quality, as well as commitment to sustainable business practices. All suppliers are required to comply with the PERURI Supplier Code of Ethics, including provisions related to ethical standards, respect for human rights, and compliance with environmental, health, and safety requirements.

To enhance the effectiveness of supply chain management, PERURI has implemented digital systems in procurement and logistics management processes to improve data accuracy, accelerate workflow processes, and minimize the potential for errors or irregularities. In addition, periodic development and evaluation of strategic business partners are continuously conducted to ensure optimal performance aligned with the Company's objectives.

Throughout 2025, PERURI was supported by 950 suppliers across its supply chain. All suppliers have undergone selection stages in accordance with applicable partner procedures and mechanisms. Supplier registration is carried out through the PERURI e-Procurement Information System at <https://eproc.peruri.co.id>.

Keterbukaan dalam Praktik Bad Governance

Disclosure of Bad Governance Practices

Hingga akhir tahun 2025, PERURI tidak menetapkan maupun menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Hal tersebut mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menerapkan GCG secara konsisten di seluruh aspek operasional.

PERURI senantiasa menjunjung tinggi kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan pelaksanaan kewajiban Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas bisnis, termasuk dalam upaya pencegahan, pengungkapan, dan penanganan indikasi praktik tata kelola yang tidak sesuai dengan prinsip GCG.

Sepanjang tahun 2025, PERURI terus memperkuat budaya keterbukaan dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaporan atas setiap dugaan penyimpangan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan integritas dan peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkelanjutan.

As of the end of 2025, PERURI has not established or implemented any policies that are contrary to the principles of Good Corporate Governance (GCG). This reflects the Company's commitment to consistently applying GCG across all operational aspects.

PERURI continuously upholds compliance with all applicable laws and regulations and ensures that the Company's obligations are carried out in accordance with established requirements. This commitment is realized through the implementation of transparency and accountability principles in all business activities, including efforts to prevent, disclose, and address indications of governance practices that are not aligned with GCG principles.

Throughout 2025, PERURI has further strengthened a culture of openness by fostering a conducive working environment for reporting any suspected deviations from Good Corporate Governance principles. These efforts are part of an ongoing initiative to reinforce integrity and continuously improve the quality of GCG implementation.





Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Penerapan 8 (Delapan) Prinsip Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021

Implementation of the 8 (eight) principles of the 2021 Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUGKI)

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners		
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors		
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (<i>corporate resilience</i>) To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carried out the leadership role and strives to achieve the following governance results: a. competitive and focused on long-term performance; b. ethical and responsible in running business; c. contribute positively to society and the environment; as well as ability to survive and grow (<i>corporate resilience</i>)	√	Direksi menjalankan peran kepemimpinan melalui pengurusan Perusahaan sesuai visi, misi, dan strategi PERURI sebagaimana diatur dalam Board of Directors Charter. The Board of Directors carries out its leadership role through managing the Company in line with PERURI's vision, mission, and strategy as set out in the Board of Directors Charter.
1.1.1.1	Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya korporasi yang berintegritas. The Board of Directors embodies high standards of business ethics and ensures the implementation of a code of ethics that creates a corporate culture of integrity.	√	Standar etika bisnis dan budaya integritas korporasi diwujudkan melalui Kode Etik (CoC) dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (CoCG). High standards of business ethics and a culture of corporate integrity are embodied through the Code of Conduct (CoC) and the Code of Corporate Governance (CoCG).
1.1.1.2	Direksi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa karyawan memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai korporasi dan standar etika bisnis yang tinggi. The Board of Directors fosters a corporate culture that ensures that employees understand their responsibility to behave in accordance with corporate values and high standards of business ethics.	√	Sosialisasi nilai-nilai korporasi dan kode etik dilaksanakan secara berkelanjutan kepada seluruh karyawan melalui program induksi dan e-learning. Socialization of corporate values and the code of ethics is conducted continuously to all employees through induction programs and e-learning.
1.1.1.3	Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Direksi mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. The Board of Directors ensures the fulfillment of corporate social and environmental responsibilities. The Board of Directors has a clear strategic plan in implementing corporate social and environmental responsibility.	√	Tanggung jawab sosial dan lingkungan dijalankan melalui Program TJSL dengan rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan setiap tahun. Social and environmental responsibility is carried out through the TJSL Program with an annual work plan and budget established each year.
1.1.1.4	Direksi memastikan bahwa korporasi kuat secara finansial dan gesit secara operasional. The Board of Directors ensures that the corporation is financially strong and operationally agile.	√	Direksi memastikan kekuatan finansial dan kelincihan operasional melalui pengelolaan kinerja, RKAP, dan manajemen risiko korporasi. The Board of Directors ensures financial strength and operational agility through performance management, the RKAP, and corporate risk management.
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporation's mission, vision, goals, objectives, strategies and annual and medium-term plans are consistent with long-term goals, by effectively utilizing innovation and technology.	√	Direksi menyusun RJPP dan RKAP yang konsisten dengan tujuan jangka panjang Perusahaan dan disetujui melalui mekanisme RPB. The Board of Directors prepares the RJPP and RKAP consistent with the Company's long-term objectives, approved through the RPB mechanism.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.1.2.1	Ketika mengembangkan strategi dan rencana, Direksi mempromosikan inovasi dan penggunaan teknologi mutakhir untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. When developing strategies and plans, the Board of Directors promotes innovation and the use of cutting-edge technologies to enhance competitiveness, respond to stakeholder concerns and expectations, and fulfill social and environmental responsibilities.	√	Inovasi dan teknologi menjadi bagian dari strategi bisnis, termasuk transformasi digital dan optimalisasi layanan SPBE (GovTech). Innovation and technology form part of the business strategy, including digital transformation and the optimization of SPBE (GovTech) services
1.1.2.2	Direksi memprioritaskan dan mengedepankan budaya korporasi yang mencakup inovasi dan menyertakan inovasi ke dalam strategi korporasi, perencanaan pengembangan operasional, dan pengawasan operasi. The Board of Directors prioritizes and promotes a corporate culture that encompasses innovation and incorporates innovation into corporate strategy, operational development planning, and operations supervision.	√	Budaya inovasi diarusutamakan dalam strategi korporasi dan perencanaan operasional Perusahaan. A culture of innovation is mainstreamed into corporate strategy and operational development planning.
1.1.2.3	Direksi mendorong inovasi yang meningkatkan penciptaan nilai jangka panjang untuk bisnis dalam lingkungan yang berubah. Inovasi tersebut dapat mencakup merancang model bisnis, produk dan layanan yang inovatif, mempromosikan riset, meningkatkan proses produksi dan operasi, dan berkolaborasi dengan mitra. The Board of Directors encourages innovation that enhances long-term value creation for the business in a changing environment. Such innovation may include designing innovative business models, products and services, promoting research, improving production and operation processes, and collaborating with partners.	√	Inovasi bisnis digital, termasuk e-Meterai dan layanan digital lainnya, terus dikembangkan untuk penciptaan nilai jangka panjang. Digital business innovation, including e-Stamp and other digital services, continues to be developed for long-term value creation.
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with the corporate vision, mission, goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations and standards.	√	Manajemen risiko dan sistem pengendalian internal dijalankan mengacu pada ISO 31000:2018 dan PER-2/MBU/03/2023, mencakup Three Lines Model. Risk management and internal control systems are implemented based on ISO 31000:2018 and PER-2/MBU/03/2023, including the Three Lines Model.
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.	√	Integritas akuntansi dan pelaporan keuangan dijaga melalui audit eksternal oleh KAP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian secara konsisten 2020-2025. The integrity of accounting and financial reporting is maintained through external audits by a Public Accounting Firm, with unqualified opinions consistently obtained from 2020-2025.
1.1.4.1	Direksi memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang relevan yang diterbitkan lembaga yang bereputasi. Selain itu, Direksi juga memastikan ketersediaan sumber daya (termasuk karyawan) yang memadai. The Board of Directors ensures that each person involved in the preparation and disclosure of corporate information has the relevant knowledge, skills and experience, reflected among others by the relevant professional certification issued by a reputable institution. In addition, the Board of Directors also ensures the availability of adequate resources (including employees).	√	Penyusunan dan pengungkapan informasi korporasi dilaksanakan oleh sumber daya yang kompeten di bawah Divisi Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan. The preparation and disclosure of corporate information is carried out by competent personnel under the Governance, Risk and Compliance Division.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.1.4.2	Ketika menyetujui pengungkapan informasi (termasuk untuk pengungkapan informasi keuangan berkala), Direksi mempertimbangkan semua faktor yang berikut ini: - Hasil evaluasi ketepatan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal; - Opini auditor eksternal atas laporan keuangan, pengamatan atas sistem pengendalian internal, dan pengamatan lainnya melalui sumber lain; - Pendapat Komite Audit; - Konsistensi dengan tujuan, strategi, dan kebijakan. When approving the disclosure of information (including periodic financial information disclosure), the Board of Directors considers all of the following factors: - Results of the evaluation of the adequacy of the design and effectiveness of the implementation of internal control systems; - External auditor's opinion on financial statements, observations on internal control systems, and other observations through other sources; - Audit Committee's opinion; - Consistency with objectives, strategies, and policies.	√	Pengungkapan informasi keuangan mempertimbangkan hasil evaluasi pengendalian internal, opini auditor eksternal, dan pendapat Komite Audit. Disclosure of financial information takes into account the results of internal control evaluations, the external auditor's opinion, and the Audit Committee's opinion.
1.1.4.3	Direksi menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan sehingga bermanfaat bagi investor dan analis yang akan meninjau fundamental dan kinerja keuangan korporasi. The Board of Directors submits a report commenting on the Quarterly Financial Statements and publishes it alongside the Quarterly Financial Statements to benefit investors and analysts who will review the corporate fundamentals and financial performance.	X	PERURI merupakan Perum yang tidak menerbitkan Laporan Keuangan Triwulanan untuk publik investor/ analis sebagaimana entitas tercatat di pasar modal; pelaporan triwulanan disampaikan kepada Pemilik Modal melalui mekanisme internal. PERURI is a Perum that does not publish Quarterly Financial Statements for public investors/analysts as a listed entity would; quarterly reporting is submitted to the Capital Owner through internal mechanisms.
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared appropriately.	√	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan disusun, dibuktikan dengan penerbitan Sustainability Report 2024 dan partisipasi pada ASRRAT 2025 dengan peringkat Emas. The Board of Directors ensures sustainability reporting is prepared, as evidenced by the publication of the 2024 Sustainability Report and participation in ASRRAT 2025 with a Gold rating.
1.1.5.1	Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas korporasi dan memenuhi standar nasional dan atau global. The sustainability report is prepared based on a reporting framework that is appropriate to the size and complexity of the corporation and meets national and or global standards.	√	Laporan keberlanjutan disusun mengacu pada kerangka pelaporan GRI dan standar internasional, dengan capaian peringkat Emas ASRRAT 2025. Sustainability reporting is prepared with reference to GRI and international reporting frameworks, evidenced by the Gold rating achieved at ASRRAT 2025.
1.1.5.2	Pelaporan keberlanjutan korporasi mencerminkan praktik korporasi yang mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan. Corporate sustainability reporting reflects corporate practices that support sustainable value creation.	√	Pelaporan keberlanjutan mencerminkan praktik penciptaan nilai berkelanjutan, dibuktikan dengan capaian ASRRAT 2025. Sustainability reporting reflects sustainable value creation practices, evidenced by the ASRRAT 2025 achievement.
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors establish a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities, encourages business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies.	√	Direksi membangun kerangka governansi TI yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan diperkuat melalui Departemen Tata Kelola dan Kepatuhan serta fungsi DPO. The Board of Directors establishes an IT governance framework aligned with business needs, strengthened through the Governance and Compliance Department and the DPO function.
1.1.6.1	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki kebijakan alokasi sumber daya TI yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI yang memadai dan optimal. The Board of Directors ensures that the corporation has an IT resource allocation policy that ensures adequate and optimal investment and allocation of IT resources.	√	Kebijakan alokasi sumber daya TI diatur dalam kerangka manajemen risiko korporasi termasuk investasi teknologi dan transformasi digital. IT resource allocation policy is set out within the corporate risk management framework, including technology investment and digital transformation.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.1.6.2	Direksi memastikan bahwa manajemen risiko korporasi mencakup manajemen risiko TI. The Board of Directors ensures that corporate risk management includes IT risk management.	✓	Manajemen risiko korporasi mencakup manajemen risiko TI sebagai bagian dari Risk Control Matrix dan ICOFR. CORPORATE RISK MANAGEMENT INCLUDES IT RISK MANAGEMENT AS PART OF THE RISK CONTROL MATRIX AND ICOFR.
1.1.6.3	Direksi memastikan korporasi memiliki kebijakan dan prosedur keamanan TI, termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data. The Board of Directors ensures the corporation has IT security policies and procedures, including protection of data security and confidentiality.	✓	Kebijakan keamanan TI termasuk perlindungan data pribadi dijalankan melalui fungsi Data Protection Officer (DPO) sesuai regulasi PDP. IT security policy, including personal data protection, is implemented through the Data Protection Officer (DPO) function in accordance with PDP regulations.
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporate that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting equipment so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.	X	PERURI tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah sehingga tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. PERURI does not conduct business activities based on Sharia principles and therefore does not have a Sharia Supervisory Board.
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles of individual Directors which can be regulated in the Board of Directors' Charter or by Board of Directors' Decree.	✓	Piagam Direksi (Board of Directors Charter) ditinjau secara periodik dan mengatur pembagian tugas individual anggota Direksi. The Board of Directors Charter is periodically reviewed and governs the division of duties among individual members of the Board of Directors.
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	✓	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi terkait kejahatan keuangan diatur dalam ketentuan kepegawaian dan Kode Etik Perusahaan. Policy on the resignation of Board of Directors members involved in financial crimes is set out in employment provisions and the Company's Code of Conduct.
1.2 Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya Performance Assessment – Board of Directors and Members			
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur. The Board of Commissioners conducts annual formal evaluations objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	✓	Dewan Pengawas melakukan evaluasi tahunan atas efektivitas Direksi berdasarkan capaian KPI yang dituangkan dalam RKAP. The Supervisory Board conducts an annual evaluation of the Board of Directors' effectiveness based on KPI achievement set out in the RKAP.
1.2.1.1	Dewan Komisaris menetapkan kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) bagi Direksi untuk menilai kinerja Direksi. Hasil penilaian sendiri disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dinilai dan bila diperlukan disesuaikan dengan penilaian Dewan Komisaris. The Board of Commissioners establishes a self-assessment policy for the Board of Directors to assess the performance of the Board of Directors. The results of the self-assessment are submitted to the Board of Commissioners to be assessed and if necessary adjusted with the Board of Commissioners' assessment.	✓	Kebijakan penilaian kinerja Direksi berbasis <i>self-assessment</i> dengan hasil disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk dinilai dan disesuaikan. The performance assessment policy for the Board of Directors is based on self-assessment, with results submitted to the Supervisory Board for review and adjustment.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.2.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi dan sebagai dasar penilaian akuntabilitas Direksi mengenai tingkat keberhasilan Korporasi dalam mencapai target-target kinerja. Tolak ukur yang terpilih dicantumkan ke dalam kontrak kesepakatan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris. The self-assessment policy or other assessment policy is based on specific, measurable, achievable, and relevant assessment benchmarks as determined by the Board of Commissioners based on the consideration of the Nomination and Remuneration Committee and as a basis for assessing the accountability of the Board of Directors regarding the level of success of the Corporation in achieving performance targets. The selected benchmarks are included in the employment agreement contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners.	√	Tolok ukur penilaian kinerja Direksi bersifat spesifik dan terukur, dituangkan dalam Kontrak Manajemen Individual Direksi yang disetujui Dewan Pengawas. Performance benchmarks for the Board of Directors are specific and measurable, set out in the Individual Management Contract approved by the Supervisory Board.
1.2.1.3	Skema remunerasi yang berupa saham yang diberikan kepada Direktur, Komisaris, dan karyawan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham. Remuneration schemes in the form of shares granted to Directors, Commissioners and employees must be approved by shareholders.	X	PERURI sebagai Perum tidak memiliki saham sehingga skema remunerasi berbasis saham bagi Direksi/Dewan Pengawas tidak relevan; remunerasi ditetapkan melalui mekanisme Pemilik Modal. As a Perum, PERURI has no shares, so share-based remuneration schemes for the Board of Directors/Supervisory Board are not relevant; remuneration is determined through the Capital Owner mechanism.
1.2.1.4	Perpanjangan masa jabatan direktur didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of a director's term of office is based on the results of a satisfactory performance evaluation of his or her contribution.	√	Perpanjangan masa jabatan Direktur didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang ditetapkan melalui Kontrak Manajemen. Extension of a Director's term of office is based on performance evaluation results set out in the Management Contract.
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President/Director and other members of the Board of Directors.	√	Dewan Pengawas melalui Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi dan menilai kinerja Direktur Utama serta anggota Direksi lainnya. The Supervisory Board, through the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other Board of Directors members.
1.2.2.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu. Kriteria atau evaluasi kinerja harus memberi insentif kepada Direktur Utama untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi dan penciptaan nilai berkelanjutan. The Board of Commissioners ensures that the performance evaluation of the President Director is based on pre-determined criteria that have been communicated to him/her in advance. The criteria or performance evaluation should incentivize the President Director to perform his/her role in supporting the achievement of corporate objectives and sustainable value creation.	√	Evaluasi kinerja Direktur Utama didasarkan pada kriteria yang ditetapkan sebelumnya dalam Kontrak Manajemen dan KPI tahunan. Evaluation of the President Director's performance is based on criteria set in advance within the Management Contract and annual KPIs.
1.2.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Direktur Utama. Dewan Komisaris atau Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk Dewan Komisaris mengkomunikasikan hasil (termasuk area pengembangan) evaluasi kinerja kepada Direktur Utama. The Board of Commissioners with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee conducts an annual performance evaluation of the President Director. The Board of Commissioners or the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee appointed by the Board of Commissioners communicates the results (including areas of development) of the performance evaluation to the President Director.	√	Dewan Pengawas melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Direktur Utama dan mengomunikasikan hasilnya. The Supervisory Board, through the Nomination and Remuneration Committee, conducts an annual performance evaluation of the President Director and communicates the results.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.2.2.3	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi menyetujui kriteria evaluasi kinerja anggota Direksi lainnya. Dewan Komisaris memastikan Direktur Utama mengevaluasi kinerja anggota Direksi lainnya secara obyektif dan akurat berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. The Board of Commissioners with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee approves the performance evaluation criteria of other members of the Board of Directors. The Board of Commissioners ensures that the President Director evaluates the performance of other members of the Board of Directors objectively and accurately based on predetermined performance evaluation criteria.	√	Dewan Pengawas memastikan Direktur Utama mengevaluasi kinerja anggota Direksi lainnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. The Supervisory Board ensures the President Director evaluates the performance of other Board of Directors members based on pre-determined criteria.
1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners			
1.3.1	Dewan Komisaris mereview strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereview, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision and corporate strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice and approves business plans and long-term financial plans and short-term financial plans of the corporation. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors regarding implementation management. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in very important decisions for the corporation, regulated in the corporation's articles of association.	√	Dewan Pengawas mereview strategi korporasi, menyetujui RJPP dan RKAP, serta memberikan nasihat kepada Direksi atas implementasinya sepanjang 2025. The Supervisory Board reviewed corporate strategy, approved the RJPP and RKAP, and provided advice to the Board of Directors on implementation throughout 2025.
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan The types of decisions that require approval from the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report	X	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas diatur dan diungkapkan sesuai PP No. 6 Tahun 2019, bukan melalui mekanisme RUPS yang berlaku bagi PT Terbuka. Decisions requiring Supervisory Board approval are governed under PP No. 6 of 2019, rather than through a GMS mechanism applicable to listed companies.
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. By taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and is decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities without distinction between ethnicity, religion, race, group and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	X	PERURI adalah Perum tanpa RUPS; pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas merupakan kewenangan Kepala BP BUMN selaku Pemilik Modal, bukan keputusan RUPS. PERURI is a Perum with no RUPS; the appointment and dismissal of Board of Directors and Supervisory Board members is the authority of the Head of the BUMN Agency as Capital Owner, not a GMS resolution.
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Every year, the Board of Commissioners reviews reports on the implementation of development and succession plans submitted by the President Director.	√	Kebijakan suksesi anggota Direksi disusun melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Suksesi dengan mekanisme Manajemen Talenta. Succession policy for Board of Directors members is prepared through the Nomination and Remuneration Committee and Succession Committee using the Talent Management mechanism.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.3.5	Dewan Komisaris: a. mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b. secara berkala mereview sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Board of Commissioners: a. submit to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee carrying out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; b. periodically review the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.	X	Besaran remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas tidak diajukan kepada RUPS, melainkan ditetapkan melalui mekanisme Pemilik Modal/BP BUMN sesuai struktur Perum. Remuneration amounts for the Board of Directors and Supervisory Board are not submitted to a GMS, but determined through the Capital Owner/BP BUMN mechanism in line with the Perum structure.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners supervises the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	√	Dewan Pengawas mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat melalui hasil self-assessment GCG dengan skor 92,469 (Sangat Baik). The Supervisory Board oversees the effectiveness of corporate governance policy, evidenced by the GCG self-assessment score of 92.469 (Very Good).
1.3.6.1	Dewan Komisaris memastikan dilakukannya evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan governansi korporat baik secara mandiri maupun menggunakan konsultan eksternal independen. The Board of Commissioners ensures periodic evaluation of the implementation of corporate governance policies either independently or using independent external consultants.	√	Evaluasi berkala atas implementasi kebijakan governansi korporat dilakukan melalui self-assessment dan asesmen independen/eksternal. Periodic evaluation of corporate governance policy implementation is conducted through self-assessment and independent/external assessment.
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners supervises and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with corporate goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct and standards.	√	Dewan Pengawas memantau penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Perusahaan yang selaras dengan RKAP dan regulasi berlaku. The Supervisory Board monitors the Company's implementation of risk management and internal control systems aligned with the RKAP and applicable regulations.
1.3.7.1	Dewan Komisaris memahami sifat dan ruang lingkup risiko utama korporasi, serta secara berkala meninjau dan menyetujui selera risiko (<i>risk appetite</i>) korporasi. The Board of Commissioners understands the nature and scope of the Corporation's principal risks, and regularly reviews and approves the Corporation's risk appetite.	√	Dewan Pengawas meninjau dan menyetujui Strategi Risiko dalam RKAP, termasuk persetujuan atas Risiko pada Revisi RKAP 2025 dan RKAP 2026. The Supervisory Board reviews and approves the Risk Strategy in the RKAP, including approval of risk strategy in the Revised 2025 RKAP and the 2026 RKAP.
1.3.7.2	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa: a. penetapan dan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan selera risiko (<i>risk appetite</i>) korporasi; b. kebijakan manajemen risiko dapat memberikan sinyal peringatan dini (<i>early warning signals</i>) atas risiko material; c. kebijakan manajemen risiko ditinjau secara berkala, misalnya setiap tahun. The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that: a. The establishment and implementation of risk management policies are consistent with the corporate objectives, targets, strategies, and risk appetite; b. Risk management policies can provide early warning signals for material risks; c. Risk management policies are reviewed periodically, for example, annually.	√	Dewan Pengawas memantau konsistensi kebijakan manajemen risiko dengan tujuan dan selera risiko korporasi serta peninjauan berkala tahunan. The Supervisory Board monitors the consistency of risk management policy with corporate objectives and risk appetite, with annual periodic review.
1.3.7.3	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan agar risiko utama teridentifikasi melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal. The Board of Commissioners monitors and provides input so that key risks are identified through consideration of internal and external factors.	√	Risiko utama korporasi diidentifikasi melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal sebagaimana tercermin dalam profil risiko korporat. Key corporate risks are identified through consideration of internal and external factors as reflected in the corporate risk profile.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.3.7.4	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah dinilai, dan bahwa tersedia strategi dan rencana mitigasi risiko yang tepat. The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that the impact and likelihood of risks are assessed, and that appropriate risk mitigation strategies and plans are in place.	√	Dewan Pengawas memantau ketersediaan strategi dan rencana mitigasi risiko, dibuktikan dengan penilaian dampak dan kemungkinan risiko dalam RKAP. The Supervisory Board monitors the availability of risk mitigation strategies and plans, evidenced by impact and likelihood assessments in the RKAP.
1.3.7.5	Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal korporasi. The Board of Commissioners regularly monitors the effectiveness of the corporation's risk management and internal control systems.	√	Dewan Pengawas secara teratur memantau efektivitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal melalui rapat koordinasi bulanan dengan Direksi. The Supervisory Board regularly monitors the effectiveness of risk management and internal control systems through monthly coordination meetings with the Board of Directors.
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.	√	Dewan Pengawas mengarahkan integritas akuntansi dan pelaporan keuangan serta independensi audit internal (SPI) dan eksternal (KAP). The Supervisory Board directs the integrity of accounting and financial reporting as well as the independence of internal audit (SPI) and external audit (KAP).
1.3.8.1	Sebelum menyetujui laporan keuangan, Dewan Komisaris menerima pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan korporasi, bahwa menurut pendapat mereka, catatan keuangan entitas telah dikelola dengan baik dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan secara wajar tentang posisi dan kinerja keuangan korporasi dan bahwa pendapat mereka tersebut dibentuk berdasarkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang didesain secara tepat dan diimplementasikan secara efektif. Before approving the financial statements, the Board of Commissioners receives statements from the President Director and Director of Finance of the corporation, stating that in their opinion, the entity's financial records have been managed properly and the financial statements have been prepared in accordance with applicable accounting standards, fairly presenting the corporate financial position and performance. They further assert that their opinions are formed based on a properly designed and effectively implemented internal control and risk management system.	√	Sebelum laporan keuangan disetujui, Dewan Pengawas menerima pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan terkait kecukupan sistem pengendalian internal. Prior to approval of financial statements, the Supervisory Board receives statements from the President Director and Finance Director regarding the adequacy of the internal control system.
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners supervises, reviews and approves the Corporation's annual reports and sustainability reports and ensures their integrity, as well as oversees the corporate disclosure and communication process.	√	Dewan Pengawas memantau, mereviu, dan menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan serta menandatangani laporan tahunan sesuai kewajiban PP No. 6/2019. The Supervisory Board monitors, reviews, and approves the Annual Report and Sustainability Report, and signs the annual report in accordance with the obligations under PP No. 6/2019.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	√	Piagam Dewan Pengawas (<i>Charter</i>) ditinjau secara periodik sebagaimana diatur dalam kebijakan internal Perusahaan. The Supervisory Board Charter is periodically reviewed as set out in the Company's internal policy.
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	√	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas terkait kejahatan keuangan diatur sejalan dengan persyaratan keanggotaan Dewan Pengawas dalam PP No. 6/2019. Resignation policy for Supervisory Board members involved in financial crimes is aligned with membership requirements under PP No. 6/2019.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are highly expected to be able to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	X	Posisi Komisaris Independen kosong sejak 27 Agustus 2025 dan belum diisi kembali hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, sehingga kontribusi diskusi independen pada periode tersebut tidak dapat diungkapkan. The Independent Commissioner position has been vacant since August 27, 2025 and has not yet been refilled as of the publication of this Annual Report, so the role's contribution to independent discussion during that period cannot be disclosed.
1.3.12.1	Jika Komisaris Utama bukan Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen atau Komisaris Independen yang senior (jika Komisaris Independen lebih dari satu orang) untuk menjalankan peran Komisaris Utama untuk tugas-tugas Komisaris Utama yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi. Kriteria dalam menunjuk Komisaris Independen senior yaitu: - mampu menyampaikan pendapat/argumen secara konstruktif kepada Komisaris Utama; - dibandingkan komisaris lainnya, memiliki pengetahuan lebih tentang korporasi, termasuk kinerja, pasar, dan pemangku kepentingannya; - mampu memberikan pandangan/pemikiran yang berimbang terhadap isu dan perhatian dari pemegang saham mayoritas. If the President Commissioner is not an Independent Commissioner, then the Board of Commissioners appoints an Independent Commissioner or a senior Independent Commissioner (if there is more than one Independent Commissioner) to fulfill the role of the President Commissioner for tasks that may pose a potential conflict of interest with affiliated parties. The criteria for appointing a senior Independent Commissioner are as follows: - Capable of delivering opinions/arguments constructively to the President Commissioner ; - Compared to other commissioners, possesses greater knowledge about the corporation, including its performance, markets, and stakeholders; - Capable of providing balanced perspectives on issues and concerns from the majority shareholders.	X	Tidak relevan karena posisi Komisaris Independen kosong sejak Agustus 2025; mekanisme penunjukan Komisaris Independen senior untuk peran Komisaris Utama tidak dapat diterapkan pada periode tersebut. Not relevant because the Independent Commissioner position has been vacant since August 2025; the mechanism for appointing a senior Independent Commissioner to fulfill the President Commissioner role cannot be applied during that period.
1.3.12.2	Dalam menjalankan peran sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris independen agar: - Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; - Memantau benturan kepentingan antara korporasi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali; - Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan - Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. In fulfilling the role as a member of the Board of Commissioners, the Independent Commissioner is expected to: - Act in the best interest of the corporation; - Monitor conflicts of interest between the corporation and members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or controlling shareholders; - Independently consider the viewpoints of minority shareholders and other stakeholders; and - Encourage dialogue between management, shareholders, and other stakeholders.	X	Sehubungan dengan kekosongan posisi Komisaris Independen sejak Agustus 2025, peran tersebut tidak dapat dijalankan secara penuh sepanjang sisa tahun buku 2025. Due to the vacancy of the Independent Commissioner position since August 2025, this role could not be fully performed for the remainder of fiscal year 2025.
1.3.12.3	Korporasi mengungkapkan alasan berakhirnya tugas komisaris independen yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir. The corporation discloses the reason for the end of the independent commissioner's duties that occurred before the end of the term of office.	√	PERURI mengungkapkan alasan berakhirnya tugas Komisaris Independen (purna tugas 27 Agustus 2025) dalam Laporan Tahunan ini. PERURI discloses the reason for the end of the Independent Commissioner's term (retired August 27, 2025) in this Annual Report.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. President Commissioner acts as coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows a variety of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. Apart from that, there must also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	√	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Pengawas dan memastikan efektivitas pengawasan melalui pembagian tugas dan koordinasi rapat. The President Commissioner acts as coordinator of the Supervisory Board and ensures oversight effectiveness through task allocation and meeting coordination.
1.3.13.1	Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi. Details of the duties of the President Commissioner are disclosed in the annual report and the corporation's website.	√	Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam Laporan Tahunan sebagaimana bagian profil dan struktur tata kelola Dewan Pengawas. Details of the President Commissioner's duties are disclosed in the Annual Report as part of the Supervisory Board's profile and governance structure.
1.3.13.2	Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris. The President Commissioner coordinates the division of supervisory roles among the members of the Board of Commissioners, chairs Board of Commissioners meetings and represents the Board of Commissioners in dealings with external parties.	√	Komisaris Utama mengkoordinasikan pembagian peran pengawasan, memimpin rapat Dewan Pengawas, dan mewakili Dewan Pengawas dalam hubungan eksternal. The President Commissioner coordinates the division of supervisory roles, chairs Supervisory Board meetings, and represents the Supervisory Board in external relations.
1.3.13.3	Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan. Former President Directors and members of the Board of Directors who are elected as members of the Board of Commissioners cannot be directly appointed as President Commissioner. There is a 2 (two) year gap to be re-appointed as President Commissioner. If the Board of Commissioners decides that a former President Director/Member of the Board of Directors should be appointed as President Commissioner, the Board of Commissioners shall provide reasons and explanations in the Annual Report.	X	Tidak terdapat mantan Direktur Utama/ anggota Direksi yang diangkat sebagai Komisaris Utama pada periode 2025, sehingga ketentuan masa jeda 2 tahun tidak relevan untuk diungkapkan. There is no former President Director/ Board of Directors member appointed as President Commissioner during the 2025 period, so the two-year gap provision is not relevant.
1.4 Pembentukan Komite Committee Formation			
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Monitoring Committee.	√	PERURI memiliki Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko di bawah Dewan Pengawas. PERURI has an Audit Committee, a Nomination and Remuneration Committee, and a Risk Monitoring Committee under the Supervisory Board.
1.4.1.1	Untuk Komite yang tidak diwajibkan dalam aturan perundangan, jika tidak memiliki Komite, korporasi mengungkapkan fakta tersebut dan mengungkapkan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa fungsi Komite tersebut dilaksanakan Dewan Komisaris sebagaimana mestinya. For committees not required by regulations, if the corporation does not have such a committee, it discloses this fact and discloses the process used to ensure that the functions of the committee are carried out by the Board of Commissioners as appropriate.	X	Tidak relevan karena seluruh komite yang dipersyaratkan (Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko) telah dibentuk oleh PERURI. Not relevant because all required committees (Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee) have been established by PERURI.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and that the majority of other committees formed by the Board of Commissioners are independent, and that all committee members are competent, committed and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	√	Anggota Komite Audit bersifat independen dan Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugasnya secara independen. Audit Committee members are independent, and the Risk Monitoring Committee as well as the Nomination and Remuneration Committee carry out their duties independently.
1.4.2.1	Komite memiliki piagam yang secara jelas menetapkan perannya dan memberikan kepadanya semua wewenang yang diperlukan untuk menjalankan perannya. Wewenang ini antara lain mencakup hak untuk memperoleh informasi, bertemu dengan pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya (dengan atau tanpa kehadiran manajemen), dan meminta nasihat dari konsultan/ahli eksternal independen jika komite menilai diperlukan. The Committee has a charter that clearly defines its role and grants it all the authority necessary to carry out its role. These powers include, among others, the right to obtain information, meet with relevant parties in connection with the performance of its duties (with or without management present), and seek advice from independent external consultants/experts if the committee deems it necessary.	√	Setiap komite memiliki piagam (charter) yang menetapkan peran dan kewenangan, termasuk hak memperoleh informasi dan meminta nasihat konsultan eksternal. Each committee has a charter that sets out its role and authority, including the right to obtain information and seek advice from external consultants.
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure that monitoring of the implementation of the Audit Committee's duties is objective and independent, President Commissioner may not be chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report.	√	Komisaris Utama tidak menjabat sebagai ketua Komite Audit, sesuai struktur komite Dewan Pengawas PERURI. The President Commissioner does not serve as chairman of the Audit Committee, in line with PERURI's Supervisory Board committee structure.
1.5 Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Assessment - Board of Commissioners and Members			
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees and each individual commissioner.	√	Dewan Pengawas melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif terhadap efektivitas Dewan, komite, dan individu anggota berdasarkan capaian KPI 101,89 poin terhadap target 100 poin. The Supervisory Board conducts an annual formal evaluation objectively of the Board's, committees', and individual members' effectiveness based on KPI achievement of 101.89 points against a target of 100 points.
1.5.1.1	Dewan Komisaris dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja sebagai Dewan secara keseluruhan. The Board of Commissioners may have a self-assessment policy to assess its performance as a Board as a whole.	√	Dewan Pengawas memiliki kebijakan penilaian kinerja Dewan secara kolegal sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas No. SK-07/DP/IX/2025. The Supervisory Board has a collegial performance assessment policy as set out in Supervisory Board Decree No. SK-07/DP/IX/2025.
1.5.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris. The self-assessment policy or other assessment policy is based on benchmarks or assessment criteria that are specific, measurable, achievable, and relevant and in accordance with those set by the Board of Commissioners.	√	Tolok ukur penilaian kinerja Dewan Pengawas bersifat spesifik dan terukur, dituangkan dalam RKA Dewan Pengawas sebagai bagian dari RKAP. Performance benchmarks for the Supervisory Board are specific and measurable, set out in the Supervisory Board's RKA as part of the RKAP.
1.5.1.3	Perpanjangan masa jabatan Komisaris didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of a Commissioner's term of office is based on the results of a satisfactory performance evaluation of his or her contribution.	√	Perpanjangan masa jabatan Komisaris didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang ditetapkan oleh Pemilik Modal. Extension of a Commissioner's term of office is based on performance evaluation results determined by the Capital Owner.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.5.1.4	Dewan Komisaris melibatkan konsultan eksternal independen secara berkala paling tidak sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur. The Board of Commissioners engages an independent external consultant periodically, at least once during the term of office, to facilitate an objective and honest evaluation of the Board of Commissioners' performance.	✓	Tidak terdapat pengungkapan keterlibatan konsultan eksternal independen secara berkala dalam memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Pengawas pada periode pelaporan ini. There is no disclosure of periodic engagement of an independent external consultant to facilitate the Supervisory Board's performance evaluation during the reporting period.
1.6 Benturan Kepentingan Conflict of Interest			
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner must notify the Board of Commissioners and the chair of the committee responsible for nominations before accepting a new appointment as a director or commissioner of a publicly traded corporation, another directorship, or any other position requiring a significant time commitment.	✓	Rangkap jabatan anggota Direksi di luar korporasi memerlukan persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam kebijakan benturan kepentingan internal. Concurrent positions held by Board of Directors members outside the Company require Supervisory Board approval as set out in the internal conflict of interest policy.
1.6.1.1	Dewan Komisaris memastikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi anggota Direksi yang menjabat atau ingin menjabat sebagai direktur atau komisaris di korporasi lain. Kebijakan harus menetapkan penunjukan yang diizinkan dan jumlah korporasi yang diizinkan yang di dalamnya mereka dibolehkan untuk secara bersamaan menjabat sebagai direktur atau komisaris. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chair of the committee performing the nominating function, before accepting a new appointment as director or commissioner of a publicly traded corporation, other directorship or other position with a significant time commitment.	✓	Dewan Pengawas menetapkan kebijakan dan pedoman bagi anggota Direksi terkait rangkap jabatan di korporasi lain sesuai ketentuan internal Perusahaan. The Supervisory Board sets policies and guidelines for Board of Directors members regarding concurrent positions at other corporations in accordance with the Company's internal provisions.
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in monitoring and making decisions regarding potential conflicts of interest involving the Commissioner or affiliates of the Commissioner concerned.	✓	Dewan Pengawas memantau dan mengelola potensi konflik kepentingan yang melibatkan jajaran manajemen, Direksi, dan Dewan Pengawas, termasuk dalam transaksi pihak terkait. The Supervisory Board monitors and manages potential conflicts of interest involving management, the Board of Directors, and the Supervisory Board, including in related party transactions.
1.6.2.1	Dewan Komisaris memiliki prosedur untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait (abstain) benturan kepentingan tersebut. The Board of Commissioners has procedures to ensure that members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who have a conflict of interest do not participate in decision making related to the conflict of interest (abstain).	✓	Prosedur abstain bagi anggota Direksi/ Dewan Pengawas yang memiliki benturan kepentingan diatur dalam kebijakan benturan kepentingan dan Kode Etik. Abstention procedures for Board of Directors/Supervisory Board members with a conflict of interest are set out in the conflict of interest policy and the Code of Conduct.
1.6.2.2	Setiap anggota Dewan Komisaris menginformasikan segera kepada Direksi dan Dewan Komisaris jika ada potensi benturan kepentingan, termasuk sebagai akibat dari kedudukannya sebagai konsultan atau pejabat di perusahaan pelanggan, pemasok, kreditur, atau partner bisnis lainnya. Each member of the Board of Commissioners informs the Board of Directors and the Board of Commissioners immediately if there is a potential conflict of interest, including as a result of his/her position as a consultant or officer in a customer company, suppliers, creditors, or other business partners.	✓	Anggota Dewan Pengawas berkewajiban menginformasikan potensi benturan kepentingan sesuai Kode Etik dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Supervisory Board members are obliged to disclose potential conflicts of interest in accordance with the Code of Conduct and the Code of Corporate Governance.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
1.6.2.3	Semua anggota Direksi mengungkapkan dengan segera potensi benturan kepentingannya kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta tidak turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan. All members of the Board of Directors immediately disclose their potential conflicts of interest to the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors and do not participate in decision-making in the event that they have a conflict of interest.	√	Seluruh anggota Direksi wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan sesuai Kode Etik dan tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait. All Board of Directors members are required to disclose potential conflicts of interest under the Code of Conduct and to abstain from related decision-making.
1.6.2.4	Dalam laporannya, Dewan Komisaris menginformasikan kepada RUPS adanya benturan kepentingan material yang terjadi disertai perlakuannya. Benturan kepentingan material yang sifatnya tidak sekadar sementara waktu dapat berakibat pada penghentian jabatan sebagai anggota dewan. In its report, the Board of Commissioners informs the GMS of any material conflicts of interest that occur and their treatment. Material conflicts of interest that are not merely temporary in nature may result in termination of office as a board member.	√	PERURI tidak memiliki RUPS sebagai Perum; pelaporan benturan kepentingan material disampaikan kepada Pemilik Modal/Menteri BUMN, bukan kepada RUPS. As a Perum, PERURI has no GMS; material conflicts of interest are reported to the Capital Owner/Minister of SOEs rather than to a GMS.
1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Competency Development for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners			
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, corporate characteristics and operations, relevant laws and regulations and standards as well as other applicable obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their roles on the Board.	√	Dewan Pengawas memastikan bahwa para anggota Direksi dan Dewan Pengawas memahami peran, tanggung jawab, serta kegiatan operasional Perusahaan melalui program orientasi dan pelatihan berkelanjutan. The Supervisory Board ensures Board of Directors and Supervisory Board members understand their roles, responsibilities, and the Company's operations through orientation programs and ongoing training.
1.7.1.1	Direksi memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat menerima program pengenalan yang formal dan memadai serta semua informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka. The Board of Directors ensures that newly appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners receive a formal and adequate induction program and all information relevant to their roles and responsibilities.	√	Anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang baru diangkat menerima program pengenalan formal sebagaimana diatur dalam Charter masing-masing organ. Newly appointed Board of Directors and Supervisory Board members receive a formal orientation program as set out in each organ's Charter.
1.7.1.2	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners regularly receive relevant, adequate and sustainable training and knowledge development programs.	√	Anggota Direksi dan Dewan Pengawas menerima pelatihan dan pengembangan pengetahuan secara reguler, antara lain pelatihan terkait digital forensik dan kejahatan keuangan. Board of Directors and Supervisory Board members regularly receive training and knowledge development, including training on digital forensics and financial crime.
1.7.1.3	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara regular menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan bisnis korporasi The Board of Directors and Board of Commissioners regularly receive accurate, timely and clear information on the latest developments in relevant laws, regulations and standards, other applicable obligations, risk factors, and the corporate business environment.	√	Anggota Direksi dan Dewan Pengawas menerima informasi terkini terkait peraturan, faktor risiko, dan lingkungan bisnis melalui sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan. Board of Directors and Supervisory Board members receive up-to-date information on regulations, risk factors, and the business environment through ongoing socialization and training.
2 Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners			
2.1	Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors		

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining prospective director candidates, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine candidates who meet the requirements.	✓	Penjaringan kandidat Direksi melibatkan sumber dari Talenta BUMN, Talenta Kementerian BUMN, dan talenta eksternal, tidak hanya rekomendasi internal. Screening of Board of Directors candidates involves SOE Talent, Ministry of SOEs Talent, and external talent, not solely internal recommendations.
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities and skills required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors and pay attention to the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	✓	Kriteria seleksi anggota Direksi mencakup kompetensi, rekam jejak, integritas, dan kapasitas kepemimpinan melalui mekanisme UKK (Uji Kelayakan dan Kepatan). Selection criteria for Board of Directors members include competence, track record, integrity, and leadership capacity through the Fit and Proper Test (UKK) mechanism.
2.1.2.1	Informasi tentang calon Direksi harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: - identitas calon dan alasan pengangkatan; - kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; - jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; - faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; - lama masa jabatan; - kehadiran dalam rapat Direksi (kecuali untuk Direktur baru); dan - setiap kepemilikan saham dalam korporasi. Information about director candidates must be disclosed during the nomination/re-nomination process and must be available from the date of the notice of the GMS until the holding of the GMS and can be downloaded through the Company's website and/or e-RUPS, including: - Candidate's identity and reasons for appointment; - Core competencies, qualifications, and professional background; - Current positions in other corporations, as well as significant roles in non-profit/charitable organizations; - Factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; - Term of office duration; - Attendance at Board of Directors meetings (except for new Directors); and - any share ownership in the corporation.	X	PERURI tidak memiliki RUPS dan situs e-RUPS sebagaimana entitas tercatat; pengungkapan informasi calon Direksi dilakukan melalui mekanisme Pemilik Modal/BP BUMN, bukan melalui pemanggilan RUPS. PERURI has no GMS or e-GMS website as a listed entity would; disclosure of Board of Directors candidate information is conducted through the Capital Owner/BP BUMN mechanism, not through a GMS notice.
2.1.2.2	Komposisi Direksi dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi. The composition of the Board of Directors is such that its members as a group reflect the diversity in terms of skills, expertise, knowledge, experience, age, cultural background and gender required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors.	✓	Komposisi Direksi mencerminkan keberagaman kompetensi, pengalaman, dan latar belakang profesional sesuai kebutuhan peran Direksi PERURI. The composition of the Board of Directors reflects diversity in competence, experience, and professional background appropriate to PERURI's role requirements.
2.1.2.3	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi korporasi serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The determination of the number of members of the Board of Directors considers the corporate condition and effectiveness in decision-making.	✓	Kebijakan keberagaman Direksi dan Dewan Pengawas diungkapkan dalam Laporan Tahunan, termasuk aspek pendidikan, kompetensi, dan gender. Diversity policy for the Board of Directors and Supervisory Board is disclosed in the Annual Report, including educational background, competence, and gender.
2.1.2.4	Setidaknya ada satu direktur yang memiliki pengalaman sebelumnya di sektor utama tempat korporasi beroperasi. There should be at least one director who has prior experience in the main sector in which the corporation operates.	X	PERURI belum melaporkan target komposisi keberagaman yang terukur secara kuantitatif beserta kemajuan pencapaiannya dalam Laporan Tahunan ini. PERURI has not yet reported measurable diversity composition targets and progress achieved in this Annual Report.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
2.1.2.5	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah dan terdaftar sebagai anggota di asosiasi profesi tersebut. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting, reflected, among others, from professional certification issued by a government-recognized accounting professional association and are registered as members of the professional association.	X	Tidak relevan karena pengisian posisi Direksi PERURI tidak menggunakan mekanisme suara/pemilihan kelas saham sebagaimana entitas tercatat di pasar modal. Not relevant because PERURI's Board of Directors appointment process does not use a voting/share-class election mechanism as in listed entities.
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Corporate policies regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners are disclosed in the Annual Report.	√	Kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman di dalam Direksi dan Dewan Pengawas diungkapkan dalam Laporan Tahunan, yang mencakup latar belakang pendidikan, kompetensi, dan jenis kelamin. Corporate policy on diversity within the Board of Directors and Supervisory Board is disclosed in the Annual Report, covering educational background, competence, and gender.
2.1.3.1	Korporasi melaporkan dalam Laporan Tahunan keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut. Informasi harus mencakup referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris. The Corporation reports in the Annual Report the current diversity of the Board of Directors and Board of Commissioners, measurable composition targets and the progress made in achieving those targets. The information should include reference to how diversity is achieved through appropriate succession planning in the Board of Directors and Board of Commissioners.	X	PERURI belum melaporkan secara spesifik target komposisi keberagaman yang terukur beserta kemajuan pencapaiannya, termasuk kaitannya dengan perencanaan suksesi. PERURI has not specifically reported measurable diversity composition targets and progress achieved, including their link to succession planning.
2.1.4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	√	Dewan Pengawas melalui Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan kebijakan dan prosedur seleksi dan nominasi Komisaris/Dewan Pengawas yang jelas dan transparan. The Supervisory Board, through the Nomination and Remuneration Committee, establishes clear and transparent selection and nomination policies and procedures for Commissioners/Supervisory Board members.
2.1.4.1	Informasi tentang calon Komisaris harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: - identitas calon dan alasan pengangkatan; - kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; - jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; - faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; - lama masa jabatan; - kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dan komite (kecuali untuk Komisaris baru); dan - setiap kepemilikan saham dalam korporasi Information about commissioner candidates must be disclosed during the nomination/re-nomination process and must be available from the date of the notice of the GMS until the holding of the GMS and can be downloaded through the Company's website and/or e-RUPS, including: - Candidate's identity and reasons for appointment; - Core competencies, qualifications, and professional background; - Current positions in other corporations, as well as significant roles in non-profit/charitable organizations; - Factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; - Term of office duration; - Attendance at Board of Commissioners meetings (except for new Commissioners); and - any share ownership in the corporation.	X	PERURI tidak memiliki RUPS/e-RUPS; pengungkapan informasi calon Komisaris dilakukan melalui mekanisme Pemilik Modal, bukan melalui pemanggilan RUPS. PERURI has no GMS/e-GMS; disclosure of Commissioner candidate information is conducted through the Capital Owner mechanism, not through a GMS notice.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
2.1.4.2	Jika Dewan Komisaris menggunakan konsultan eksternal independen dalam proses nominasi, maka informasi relevan mengenai konsultan eksternal independen diungkapkan di laporan tahunan, termasuk informasi mengenai independensi dan benturan kepentingan. If the Board of Commissioners uses an independent external consultant in the nomination process, relevant information regarding the independent external consultant is disclosed in the annual report, including information regarding independence and conflict of interest.	X	Tidak terdapat pengungkapan keterlibatan konsultan eksternal independen dalam proses nominasi Dewan Pengawas pada Laporan Tahunan ini. There is no disclosure of involvement of an independent external consultant in the Supervisory Board nomination process in this Annual Report.
2.1.5.	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee which carries out the nomination function determines nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' skills matrix which has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the skills matrix and nomination criteria.	✓	Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan kebutuhan kompetensi Dewan Pengawas. The Nomination and Remuneration Committee establishes nomination procedures and criteria consistent with the Supervisory Board's required competency needs.
2.1.6.	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background and gender required to appropriately fulfill the role of the Board of Commissioners.	✓	Komposisi Dewan Pengawas dibentuk dengan mempertimbangkan keberagaman kemampuan, keahlian, pengalaman, usia, latar belakang, dan gender. The composition of the Supervisory Board is structured to reflect diversity of skills, expertise, experience, age, background, and gender.
2.1.6.1.	Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi At least one Commissioner has prior experience in the main sector in which the corporation operates	✓	Anggota Dewan Pengawas PERURI memiliki pengalaman di sektor terkait bidang usaha Perusahaan sebagaimana tercermin dalam profil anggota Dewan Pengawas. Supervisory Board members have prior experience relevant to the Company's business sector, as reflected in members' profiles.
2.1.6.2.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi. The determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of the corporation.	✓	Jumlah anggota Dewan Pengawas PERURI ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan korporasi sesuai PP No. 6 Tahun 2019. The number of Supervisory Board members is determined considering the Company's conditions and needs in accordance with PP No. 6 of 2019.
2.1.7.	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles where there is a potential conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence. from a corporate perspective.	✓ / x	Komposisi Dewan Pengawas PERURI per 31 Desember 2025 (4 anggota) belum memenuhi ketentuan minimal 20% Komisaris Independen karena posisi tersebut kosong sejak Agustus 2025 dan belum diisi kembali. PERURI's Supervisory Board composition as of December 31, 2025 (4 members) does not yet meet the minimum 20% Independent Commissioner requirement because the position has been vacant since August 2025 and has not been refilled.
2.1.7.1	Mantan Direktur Utama/anggota Direksi dapat masuk ke dalam Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. Former President Directors/Members of the Board of Directors may join the Board of Commissioners as Independent Commissioners only in exceptional circumstances and there must be a gap of at least 2 (two) years between such positions.	✓ / x	Tidak relevan pada periode pelaporan ini karena tidak terdapat mantan Direktur Utama/anggota Direksi yang diangkat sebagai Komisaris Independen. Not relevant for this reporting period as there is no former President Director/ Board of Directors member appointed as Independent Commissioner.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
2.1.7.2	Mantan Komisaris Independen dapat diangkat kembali sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. Former Independent Commissioners may be reappointed as Independent Commissioners only in exceptional circumstances and there must be a gap of at least 2 (two) years between such positions.	X	Tidak relevan pada periode pelaporan ini karena tidak terdapat mantan Komisaris Independen yang diangkat kembali sebagai Komisaris Independen. Not relevant for this reporting period as there is no former Independent Commissioner reappointed as Independent Commissioner.
2.1.7.3	Masa jabatan Komisaris Independen tidak boleh melebihi batas waktu 9 (sembilan) tahun. Bagi korporasi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun maka tidak boleh melebihi batas waktu 10 (sepuluh) tahun. Setelah sembilan/sepuluh tahun, seorang Komisaris Independen dapat terus menjabat hanya sebagai Komisaris. The term of office of the Independent Commissioner may not exceed the time limit of 9 (nine) years. For corporations with a 5 (five) year term of office, the term of office may not exceed 10 (ten) years. After nine/ten years, an Independent Commissioner may continue to serve only as Commissioner.	X	Tidak relevan untuk diungkapkan pada periode ini karena posisi Komisaris Independen PERURI kosong sejak Agustus 2025; masa jabatan Komisaris Independen sebelumnya (diangkat 2024) belum mencapai batas waktu 9 tahun. Not relevant to disclose for this period as PERURI's Independent Commissioner position has been vacant since August 2025; the previous Independent Commissioner's term (appointed 2024) had not yet reached the 9-year limit.
2.1.8.	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, strict and transparent process for the appointment and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	√	Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan proses formal dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Pengawas melalui mekanisme UKK dan Komite Suksesi. The Nomination and Remuneration Committee ensures a formal and transparent process for the appointment of Board of Directors and Supervisory Board members through the UKK and Succession Committee mechanism.
2.1.8.1	Tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas pada: - menyusun pedoman untuk memastikan bahwa semua Komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada korporasi agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Pedoman tersebut mencakup diantaranya: - Dalam penunjukan komisaris utama, Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan uraian spesifikasi pekerjaan, termasuk persyaratan komitmen waktu yang juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen harus segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya; - Dalam penunjukan anggota komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan anggota komisaris. Syarat dan ketentuan ini tersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen waktu yang diharapkan dicantumkan dalam Surat penunjukan anggota Komisaris dan anggota Komisaris harus memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen waktu yang diharapkan. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan Dewan Komisaris harus diberitahu jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut; - secara proaktif memimpin dan bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan reviu berkelanjutan atas perencanaan suksesi Direksi dan Dewan Komisaris; - menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite; - mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen nominasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi.	√	Tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup evaluasi dan kalibrasi daftar Talenta Terseleksi serta nominasi kepada Pemilik Modal. The responsibilities and role of the Nomination and Remuneration Committee include evaluating and calibrating the Selected Talent list and nominating candidates to the Capital Owner.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
	The responsibilities and roles of the Nomination and Remuneration Committee include but are not limited to: - Developing guidelines to ensure that all Commissioners allocate sufficient time to the corporation to effectively fulfill their responsibilities. These guidelines include: - In appointing the President Commissioner, the Nomination and Remuneration Committee prepares a specific job description, including time commitment requirements, which also consider time commitment needs during crises. Any significant commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners before appointment and disclosed in the annual report. Any changes in commitments must be promptly reported to the Board of Commissioners, and their impact explained in the subsequent annual report. - In appointing member of the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee establishes the terms and conditions of their appointment. These terms and conditions are available for examination. Expected time commitments should be included in the appointment letter of the Commissioners, and Commissioners must have sufficient time to meet these expected time commitments. Any significant commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners before appointment, along with indications of the required time commitments, and the Board of Commissioners must be informed of any changes to these commitments. - Proactively leading and being responsible for the development, implementation, and ongoing review of succession planning for the Board of Directors and the Board of Commissioners. - Upholding the principle of independence in dealing with conflicts of interest (and potential conflicts of interest) among committee members in carrying out committee tasks. - Considering and being responsible for appointing independent nomination consultants, including selection and terms of appointment, and disclosing the identity and consultancy fees.		
2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris			
Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners			
2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. Directors' remuneration must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.	X	PERURI tidak memiliki RUPS sebagai Perum; remunerasi Direksi diusulkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dan Dewan Pengawas untuk ditetapkan oleh Pemilik Modal, bukan diputuskan oleh RUPS. As a Perum, PERURI has no GMS; Board of Directors remuneration is proposed through the Nomination and Remuneration Committee and Supervisory Board for determination by the Capital Owner, not decided by a GMS.
2.2.1.1	Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat. Remuneration policies are reasonable and fair, both in structure and amount, and are determined in the context of corporate values, internal reward structures, and encourage competition while remaining sensitive to stakeholder expectations and societal norms.	√	Kebijakan remunerasi Direksi bersifat wajar dan adil, ditentukan dalam konteks nilai korporasi dan kompetisi pasar yang relevan. Board of Directors remuneration policy is fair and reasonable, determined in the context of corporate values and relevant market competition.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
2.2.1.2.	Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (clawback). The Corporation has a remuneration policy for members of the Board of Directors that is performance-based and aligned with the achievement of the long-term interests of the corporation, such as the following performance measures: stock options, deferred bonuses, provision for the return of part or all of the bonus/incentive that has been paid (clawback).	X	PERURI sebagai Perum tidak memiliki saham sehingga ukuran kinerja berbasis opsi saham, bonus ditangguhkan berbasis saham, atau clawback berbasis saham tidak relevan diterapkan. Not relevant because as a Perum, PERURI has no shares, so performance measures based on share options, share-based deferred bonuses, or clawback provisions are not applicable.
2.2.1.3.	Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi. The Board of Directors does not receive any other facilities beyond those already granted under the corporation's General Meeting of Shareholders.	X	Tidak relevan karena fasilitas bagi Direksi PERURI tidak ditetapkan melalui RUPS, melainkan melalui mekanisme persetujuan Pemilik Modal/BP BUMN. Not relevant because facilities for PERURI's Board of Directors are not determined through a GMS, but through the Capital Owner/BP BUMN approval mechanism.
2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Disamping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. Apart from that, consideration must also be given to his position as President Commissioner and chairman as well as his membership in committees.	√	Kebijakan remunerasi Dewan Pengawas berorientasi pada pengembangan korporasi berkelanjutan, ditetapkan melalui mekanisme Pemilik Modal. Supervisory Board remuneration policy is oriented toward sustainable corporate development, determined through the Capital Owner mechanism.
2.2.2.1	Remunerasi Dewan Komisaris harus berupa remunerasi tetap. Jika anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang korporasi dan berbeda dengan anggota Direksi. The remuneration of the Board of Commissioners must be a fixed remuneration. If members of the Board of Commissioners are given performance-related remuneration, the basis for granting must be related to the long-term development of the corporation and different from members of the Board of Directors.	√	Remunerasi Dewan Pengawas PERURI bersifat tetap, sejalan dengan struktur remunerasi BUMN Perum yang tidak terkait dengan kinerja berbasis saham. PERURI's Supervisory Board remuneration is fixed, consistent with the Perum SOE remuneration structure that is not linked to share-based performance.
2.2.2.2	Komisaris Independen tidak boleh menerima opsi saham, saham yang dikaitkan dengan kinerja, atau bonus. Independent Commissioners may not receive stock options, performance-linked shares or bonuses.	X	Tidak relevan karena PERURI sebagai Perum tidak memiliki opsi saham atau instrumen saham yang dapat diberikan kepada Komisaris Independen. Not relevant because as a Perum, PERURI has no share options or share instruments that could be granted to an Independent Commissioner.
2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration packages are determined based on the achievements, qualifications and competencies of directors and commissioners by taking into account corporate operational performance, individual performance and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for determining remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	√	Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas adil dan transparan berdasarkan kinerja dan kompetensi. The Nomination and Remuneration Committee ensures fair and transparent procedures for determining Board of Directors and Supervisory Board remuneration based on performance and competence.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
2.2.3.1	Dalam menjalankan perannya Komite Nominasi dan Remunerasi: - menentukan proporsi yang tepat dan seimbang antara komponen remunerasi yang tetap dan yang terkait kinerja, komponen remunerasi yang dibayar langsung atau yang ditangguhkan. Indikator kinerja, termasuk indikator non-keuangan, dipastikan relevan dan dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja jangka panjang korporat. Insentif remunerasi dipastikan sesuai dengan kebijakan risiko korporasi. Selain itu, terdapat penetapan batas atas remunerasi dan batas atas tersebut diungkapkan di laporan tahunan; - mempertimbangkan apakah direktur dan komisaris memenuhi syarat untuk memperoleh bonus tahunan dan/atau tunjangan dengan skema insentif jangka panjang; - secara hati-hati mempertimbangkan kewajiban kompensasi (termasuk iuran pensiun dan semua komponen lainnya) yang menjadi hak Direktur/Komisaris jika diberhentikan lebih awal. Tujuannya adalah untuk menghindari pemberian penghargaan atas kinerja yang tidak baik; - mempertimbangkan konsekuensi kewajiban pensiun dan manfaat jangka panjang lainnya bagi Direktur dan Komisaris bagi korporasi, termasuk dampak kenaikan imbalan kerja tersebut dan perubahan lainnya, terutama untuk Direktur dan Komisaris yang hampir pensiun; - menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite; - mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen remunerasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi. In carrying out its role, the Nomination and Remuneration Committee: - Determines the appropriate and balanced proportion between fixed and performance-related remuneration components, whether paid directly or deferred. Performance indicators, including non-financial indicators, are ensured to be relevant and designed to support the achievement of long-term corporate performance. Remuneration incentives are ensured to be in line with corporate risk policies. Additionally, there is a setting of upper limits for remuneration, and these upper limits are disclosed in the annual report. - Considers whether directors and commissioners qualify for annual bonuses and/or allowances with long-term incentive schemes. - Carefully considers compensation obligations (including pension contributions and all other components) that are due to Directors/Commissioners if terminated early. The aim is to avoid rewarding poor performance. - Considers the consequences of pension obligations and other long-term benefits for Directors and Commissioners for the corporation, including the impact of increases in such compensation and other changes, especially for Directors and Commissioners nearing retirement. - Upholds the principle of independence in dealing with conflicts of interest (and potential conflicts of interest) among committee members in carrying out committee tasks. - Considers and is responsible for appointing independent remuneration consultants, including selection and terms of appointment, and disclosing the identity and consultancy fees.	√	Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan perannya dalam evaluasi dan rekomendasi remunerasi sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. The Nomination and Remuneration Committee carries out its role in evaluating and recommending remuneration in accordance with its Charter.
3. Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris			
Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners			
3.1	Sifat Hubungan Kerja Nature of Working Relationship		
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to prevent leaks of confidential information.	√	PERURI memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas. PERURI has an Internal Audit Unit (SPI) positioned directly under the President Director and accountable to the President Director with Supervisory Board approval.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.	✓	Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan tertulis Dewan Pengawas, sebagaimana ditetapkan melalui SKEP-182/III/2020. The Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director with the written approval of the Supervisory Board, as established under Decree No. SKEP-182/III/2020.
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	✓	SPI melaksanakan tugas pengawasan berbasis risiko (risk-based audit) sesuai Piagam Audit dan RKAT 2025, meliputi 8 audit umum, 1 audit anak perusahaan, 1 audit khusus, dan 1 konsultasi. SPI carries out risk-based audit duties in accordance with the Audit Charter and the 2025 RKAT, covering 8 general audits, 1 subsidiary audit, 1 special audit, and 1 consulting activity.
3.1.3.1	Peran dan tanggung jawab Sekretaris Korporasi mencakup, namun tidak terbatas pada: - Memastikan arus informasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan komitennya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi; - memantau perkembangan governansi korporat, termasuk memastikan piagam Dewan Komisaris, Direksi, dan komite dilaksanakan sepenuhnya, membantu serta memberikan advis kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan praktik governansi korporat untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan; - Mengelola semua keperluan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Direksi dengan Dewan Komisaris, komite yang dibentuk Dewan Komisaris, menghadiri dan mencatat risalah semua rapat dan memfasilitasi komunikasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris, termasuk memastikan bahwa pembahasan dan keputusan rapat Direksi dan Dewan Komisaris dicatat secara akurat dalam risalah; - Mengatur dan memfasilitasi orientasi Direktur/Komisaris/anggota komite baru dan pengembangan profesional Direktur/Komisaris/anggota komite; - Mengelola aktivitas hubungan investor untuk menjaga dan meningkatkan komunikasi antara korporasi dengan pemegang saham/investor, baik lokal maupun asing. The roles and responsibilities of the Corporate Secretary include, but are not limited to: - Ensuring good information flow between the Board of Commissioners and its committees and between the Board of Commissioners and the Board of Directors; - monitoring the development of corporate governance, including ensuring that the charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, and committees are fully implemented, assisting and advising the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance practices to meet stakeholder expectations; - Managing all meeting needs of the Board of Commissioners, Board of Directors, Board of Directors with the Board of Commissioners, committees established by the Board of Commissioners, attending and recording minutes of all meetings and facilitating communication between the Board of Directors and the Board of Commissioners, including ensuring that discussions and decisions of the Board of Directors and Board of Commissioners meetings are accurately recorded in the minutes; - Organize and facilitate orientation of new Directors/Commissioners/committee members and professional development of Directors/Commissioners/committee members; - Manage investor relations activities to maintain and improve communication between the corporation and shareholders/investors, both local and foreign.	✓	SPI melaksanakan audit khusus (investigative audit) atas kasus berindikasi fraud berdasarkan persetujuan/instruksi Direktur Utama, termasuk hasil dari WBS. SPI conducts special (investigative) audits on cases indicating fraud based on the approval/instruction of the President Director, including those arising from the WBS.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
3.1.3.2	Setiap Direktur dan Komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Korporat dan sebaliknya. Each Director and Commissioner can communicate directly with the Corporate Secretary and vice versa.	✓	SPI memantau dan mendorong auditee untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal melalui sistem monitoring tindak lanjut. SPI monitors and encourages auditees to follow up on recommendations from SPI and external auditor reports through a follow-up monitoring system.
3.1.3.3	Dewan Komisaris memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Korporasi. The Board of Commissioners gives consideration to the Board of Directors in the appointment and dismissal of the Corporate Secretary.	✓	SPI melaksanakan pendampingan pada seluruh kegiatan audit oleh lembaga auditor independen seperti BPK, BPKP, dan KAP. SPI provides assistance for all audit activities conducted by independent auditor institutions such as BPK, BPKP, and the Public Accounting Firm.
3.2 Akses informasi Dewan Komsaris Access to Information on the Board of Commissioners			
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and comprehensively on all issues relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time ask the Board of Directors to provide additional information.	✓	PERURI memiliki Komite Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas dan bekerja secara independen dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan. PERURI has an Audit Committee that is directly accountable to the Supervisory Board and operates independently in the performance and reporting of its duties.
3.2.1.1	Dewan Komisaris memiliki proses yang memungkinkan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen, dapat memiliki akses ke Direksi dan manajemen senior terkait. The Board of Commissioners has a process that enables members of the Board of Commissioners, including Independent Commissioners, to have access to the Board of Directors and relevant senior management.	✓	Komite Audit memastikan efektivitas sistem pengendalian intern serta efektivitas tugas auditor eksternal dan internal sesuai Piagam Komite Audit. The Audit Committee ensures the effectiveness of the internal control system as well as the effectiveness of external and internal auditors' duties in accordance with the Audit Committee Charter.
3.2.1.2	Direktur Utama atau Sekretaris Korporat segera menginformasikan kepada Dewan Komisaris tentang peristiwa besar yang material dan penting mengenai kondisi dan kinerja serta pengelolaan korporasi. Jika diperlukan, rapat Dewan Komisaris diadakan untuk membahas peristiwa tersebut. The President Director or Corporate Secretary immediately informs the Board of Commissioners of major events that are material and important regarding the condition and performance and management of the corporation. If necessary, a Board of Commissioners meeting is held to discuss the event.	✓	Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit oleh SPI maupun auditor eksternal serta memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian. The Audit Committee evaluates the implementation and results of audits by SPI and external auditors and provides recommendations for improving the control system.
3.2.1.3	Di antara rapat Dewan, Dewan Komisaris berhubungan secara teratur dengan Direksi agar terus dapat terinformasikan perkembangan korporasi yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Between Board meetings, the Board of Commissioners liaises regularly with the Board of Directors to keep them informed of corporate developments that require the attention of the Board of Commissioners so that the Board of Commissioners can perform its duties more effectively.	✓	Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas sesuai tugas yang diatur dalam Piagam Komite Audit. The Audit Committee identifies matters requiring the Supervisory Board's attention as set out in the Audit Committee Charter.
3.3 Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure on the Corporation			



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of ownership structure on corporations. The Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the share ownership structure and relationships between corporate shareholders that may have an impact on the management and operations of the corporation.	✓	PERURI memiliki Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) yang dikelola oleh SPI dengan saluran resmi website, e-mail, dan WhatsApp. PERURI has a Whistleblowing System (WBS) managed by SPI with official channels via website, email, and WhatsApp.
3.3.1.1	Direksi dan Dewan Komisaris memahami struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas korporasi, termasuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis keluarga sebagai pemegang saham pengendali, perjanjian antar pemegang saham, atau kebijakan grup bisnis dimana korporasi merupakan bagiannya. The Board of Directors and Board of Commissioners understand the shareholder ownership structure and inter-shareholder relationships of the corporation, and consider their impact on control of the corporation, including written and unwritten family agreements as controlling shareholders, agreements between shareholders, or policies of the business group of which the corporation is a part.	✓	PERURI memberikan perlindungan kerahasiaan dan keamanan kepada Pelapor WBS sesuai kebijakan perlindungan pelapor yang diatur dalam Risk Management and Compliance Manual. PERURI provides confidentiality and security protection to WBS reporters in accordance with the whistleblower protection policy set out in the Risk Management and Compliance Manual.
3.3.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi tidak mempengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, (termasuk di antaranya dalam kaitannya dengan rencana suksesi Direksi) demi kepentingan terbaik korporasi. The Board of Directors and the Board of Commissioners ensure that the shareholder ownership structure and inter-shareholder relationships of the corporation do not affect the implementation of the roles and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, (including in relation to the succession plan of the Board of Directors) in the best interest of the corporation.	✓	Sepanjang 2025, tercatat 2 laporan diterima melalui saluran WBS dengan klasifikasi dan tindak lanjut yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Throughout 2025, 2 reports were received through the WBS channel, with classification and follow-up disclosed in the Annual Report.
3.3.1.3	Dewan Komisaris memantau dan Direksi memastikan bahwa informasi diungkapkan dengan benar ketika terdapat kondisi yang berdampak pada pengendalian atas korporasi. The Board of Commissioners monitors and the Board of Directors ensures that information is properly disclosed when there are conditions that impact control over the corporation.	✓	Pengelolaan laporan WBS berada di bawah koordinasi SPI yang melibatkan unit bisnis, SDM, dan unit penanganan kasus fraud, dengan tindak lanjut melalui verifikasi dan audit investigasi. Management of WBS reports is coordinated by SPI, involving business units, HR, and the fraud-handling unit, with follow-up through verification and investigative audit.
4. Perilaku Etis dan bertanggung jawab Ethical and Responsible Behavior			
4.1 Pedoman Etika dan Perilaku Code of Ethics and Conduct			
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: - Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; - Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; - Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. - Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; - Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; - Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; - Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. - Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. - Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. - Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. - Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	✓	PERURI menerapkan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2018 mencakup komunikasi, konteks risiko, asesmen, treatment, monitoring, dan pelaporan. PERURI implements a risk management process based on ISO 31000:2018, covering communication, risk context, assessment, treatment, monitoring, and reporting.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
	This statement is outlined in the Code of Business Conduct and Ethics which must clearly express the corporation's expectations that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as employees will: - Act in the best interests of the corporation; - Act honestly and with high standards of integrity; - Be independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence and care; - Comply with the laws and regulations that apply to the corporation and its operations; - Avoid actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethical guidelines; - Not be involved or participate in any activity that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that will have a negative impact on the corporation's reputation; - Do not take advantage of property or information owned by the corporation, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes losses to the corporation and its customers; - Not take advantage of his position or the opportunities resulting from his position for personal gain; - Avoid the act of requesting or receiving from a third party payments, gratuities or other benefits for oneself or for another person which creates a conflict of interest/provides benefits to a third party in violation of statutory regulations; - Respect differences of opinion and the rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees. - Ensure complete, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.		
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and anti-money laundering and terrorism financing terrorism, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, political involvement with (antifraud), involvement in politics by referring to national or international standards on anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other relevant standards. other relevant standards.	✓	PERURI sebagai BUMN Konglomerasi menerapkan model tata kelola risiko Three Lines Model sesuai PER-2/MBU/03/2023. As a Conglomerate SOE, PERURI implements the Three Lines Model risk governance approach in accordance with PER-2/MBU/03/2023.
4.1.2.1	Direksi mengembangkan dan menetapkan sistem yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis. The Board of Directors develops and establishes a system that can be used as an effort to prevent money laundering and terrorism financing, anti-corruption, offering or accepting bribes and other payments or inducements to perform acts that violate laws and regulations or are unethical.	✓	Departemen Manajemen Risiko Strategis mengusulkan Risk Appetite Statement (RAS) beserta batasan kapasitas dan toleransi risiko Perusahaan. The Strategic Risk Management Department proposes the Risk Appetite Statement (RAS) along with the Company's risk capacity and tolerance limits.
4.1.2.2	Direksi mengkomunikasikan kebijakan anti pencucian uang, anti suap, dan antikorupsi dengan memberi pelatihan kepada staf serta berupaya memperluas upaya anti pencucian uang, anti suap dan antikorupsi kepada pemangku kepentingan. The Board of Directors communicates anti-money laundering, anti-bribery and anti-corruption policies by providing training to staff as well as working to extend anti-money laundering, anti-bribery and anti-corruption efforts to stakeholders.	✓	Risk Control Matrix dan ICOFR disusun pada setiap proses bisnis sebagai bentuk pengendalian internal lini pertama. Risk Control Matrix and ICOFR are prepared for each business process as a first-line internal control measure.
4.1.2.3	Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi harus diinformasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris. Any material violation of the anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption policies must be informed to the Board of Directors and the Board of Commissioners or the Board of Commissioners Committee.	✓	Evaluasi Indeks Komposit Risiko dan Stress Testing dilakukan terhadap konteks internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja Perusahaan. Composite Risk Index evaluation and Stress Testing are conducted on internal and external contexts affecting the Company's performance.
4.1.2.4	Direksi menetapkan dan meninjau secara teratur kebijakan yang transparan tentang keterlibatan politik, yang mencakup lobi dan donasi untuk tujuan politik atau kandidat jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa manfaat dan risiko dari pendekatan yang diambil dipahami, dipantau, dan ditinjau secara teratur oleh Dewan Komisaris. The Board of Directors establishes and regularly reviews a transparent policy on political engagement, which includes lobbying and donations to political causes or candidates where permitted by law, and ensures that the benefits and risks of the approach taken are understood, monitored and regularly reviewed by the Board of Commissioners.	✓	Loss Event Database (LED) dikelola dan dipantau pada seluruh unit kerja sebagai bagian dari pemantauan risiko operasional. The Loss Event Database (LED) is managed and monitored across all work units as part of operational risk monitoring.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
4.2 Nilai-nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture			
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi Corporations articulate, grow and express corporate culture and values	√	Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas sesuai Piagam Komite Pemantau Risiko. The Risk Monitoring Committee carries out its duties independently and is directly accountable to the Supervisory Board in accordance with its Charter.
4.2.1.1	Korporasi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta seluruh karyawannya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman etika dan perilaku The Corporation fosters a corporate culture that ensures that all members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all employees understand and are committed to carrying out their responsibilities to behave in accordance with the code of ethics and conduct.	√	Komite Pemantau Risiko menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan dalam menjalankan fungsi pemantauan risiko. The Risk Monitoring Committee maintains the confidentiality of Company documents, data, and information in performing its risk monitoring function.
4.2.1.2	Terdapat pelatihan dan sosialisasi yang memadai di level Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh karyawan korporasi yang disebutkan di atas untuk semua aspek yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan etika korporasi. There is adequate training and socialization at the level of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all employees of the above-mentioned corporations for all aspects related to corporate culture, values and ethics.	√	Realisasi kegiatan Komite Pemantau Risiko mencapai 110% dari target, mencakup 12 rapat internal dan 4 rapat koordinasi. Realization of Risk Monitoring Committee activities reached 110% of target, covering 12 internal meetings and 4 coordination meetings.
4.2.1.3	Terdapat penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan korporasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang tidak tepat. There is an assessment and monitoring program in place so that all Directors, Board of Commissioners, and all employees of the corporation understand the relevant code of conduct and apply it effectively to avoid the corporation's involvement in inappropriate behavior.	√	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi atas laporan hasil pemeriksaan SPI termasuk WBS sebagai bagian dari fungsi pemantauannya. The Risk Monitoring Committee evaluates SPI examination reports including WBS as part of its monitoring function.
4.3 Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Communication and Enforcement of Ethical Guidelines, Values and Culture			
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporate code of conduct and ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and enforced.	√	Dewan Pengawas, Direksi, dan Komite Audit menyatakan bahwa sistem manajemen risiko PERURI sepanjang 2025 berjalan adekuat dan efektif. The Supervisory Board, Board of Directors, and Audit Committee state that PERURI's risk management system was adequate and effective throughout 2025.
4.3.1.1	Korporasi memiliki pedoman pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong dilaporkannya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana korporasi melindungi pelapor yang beritikad baik. Corporations have whistleblowing guidelines that can be used to encourage the reporting of behavior that violates laws and regulations or is unethical, which also includes a guideline on how the corporation protects good faith whistleblowers.	√	Pernyataan kecukupan sistem manajemen risiko disampaikan bersama oleh Dewan Pengawas, Direksi, dan Komite Audit dalam Laporan Tahunan. The statement on the adequacy of the risk management system is jointly delivered by the Supervisory Board, Board of Directors, and Audit Committee in the Annual Report.
4.3.1.2	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan komite segera diberitahu jika terdapat pelanggaran material pedoman etika dan perilaku. The Corporation ensures that the Board of Commissioners and committees are promptly notified of any material breach of the code of ethics and conduct.	√	Perbaikan dan peningkatan pengelolaan risiko 2025 difokuskan pada tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian Risk Maturity Index (RMI). Risk management improvements in 2025 focused on following up on recommendations from the Risk Maturity Index (RMI) assessment.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
4.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Komite segera diberitahu jika terdapat insiden material yang dilaporkan berdasarkan kebijakan pelaporan pelanggaran. The Corporation ensures that the Board of Commissioners and Committees are promptly notified of any material incidents reported under the whistleblowing policy.	√	Pemantauan tindak lanjut RMI dilakukan untuk memastikan implementasi berkelanjutan dalam proses pengelolaan risiko PERURI. Monitoring of RMI follow-up is conducted to ensure continuous implementation in PERURI's risk management process.
4.3.1.4	Direksi memastikan bahwa pelanggaran pedoman mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemecatan. Jika terdapat pelanggaran, Direksi wajib mengambil tindakan preventif agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. The Board of Directors ensures that violations of the guidelines result in disciplinary action, including dismissal. If there is a violation, the Board of Directors must take preventive action so that the violation does not recur.	√	PERURI terus meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko serta tingkat kematangan manajemen risiko secara berkelanjutan. PERURI continues to improve the effectiveness of risk management implementation and risk maturity level on an ongoing basis.
5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control, and Compliance			
5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance		
5.1.1	Direksi melakukan review secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil review kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors carries out regular reviews of the accuracy of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Corporation's annual report.	√	Sistem Pengendalian Internal (SPI) PERURI dinilai memadai dan efektif sepanjang 2025 oleh Dewan Pengawas, Direksi, dan Komite Audit. PERURI's Internal Control System (SPI) was assessed as adequate and effective throughout 2025 by the Supervisory Board, Board of Directors, and Audit Committee.
5.1.1.1	Review berkala yang dilakukan oleh Direksi secara khusus mempertimbangkan: a. Adanya perubahan sejak review berkala terakhir tentang sifat dan ruang lingkup risiko signifikan dan kemampuan korporasi dalam merespons perubahan bisnis dan lingkungan eksternalnya; b. Ruang lingkup dan mutu pemantauan yang sedang berjalan atas risiko dan sistem pengendalian internal, peran fungsi audit internal dan penyedia jasa asuransi lainnya; c. Cakupan dan frekuensi komunikasi hasil pemantauan di atas kepada Dewan Komisaris (atau kepada Komite Audit) yang memungkinkan Dewan Komisaris untuk menilai secara menyeluruh tentang kondisi pengendalian internal dan efektivitasnya dalam pengelolaan risiko; d. Terjadinya kegagalan atau defisiensi dalam pengendalian internal yang ditemukan dalam periode yang direview dan luasnya dampak kontinjensi yang telah, dapat, atau mungkin terjadi di masa depan, yang berdampak material atas kondisi atau kinerja keuangan korporasi; dan e. Efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. Periodic reviews conducted by the Board of Directors specifically consider: a. Changes since the last periodic review regarding the nature and scope of significant risks and the corporation's ability to respond to changes in its business and external environment; b. The scope and quality of ongoing monitoring of risks and internal control systems, the role of internal audit functions, and other assurance providers; c. The coverage and frequency of communication of monitoring results to the Board of Commissioners (or to the Audit Committee) enabling them to comprehensively assess the condition of internal controls and their effectiveness in risk management; d. Occurrence of failures or deficiencies in internal controls found during the reviewed period and the extent of contingency impacts that have occurred, can occur, or may occur in the future, materially affecting the corporation's financial condition or performance; and e. The effectiveness of internal controls related to financial reporting and compliance with applicable laws and regulations.	√	Pernyataan kecukupan sistem pengendalian internal disampaikan bersama oleh Dewan Pengawas, Direksi, dan Komite Audit dalam Laporan Tahunan. The statement on the adequacy of the internal control system is jointly delivered by the Supervisory Board, Board of Directors, and Audit Committee in the Annual Report.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
5.1.1.2.	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki sebuah fungsi yang berperan untuk senantiasa mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, serta memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal korporasi. The Board of Directors ensures that the corporation has a function responsible for continuously monitoring changes in various applicable laws and regulations related to its operations and regulations in general, and has a system to ensure the corporation's compliance with applicable laws and regulations and internal corporate regulations.	√	Temuan dan aspek evaluasi pengendalian internal dijadikan acuan oleh manajemen untuk penguatan kualitas pengendalian pada tahun berikutnya. Findings and aspects of internal control evaluation serve as a reference for management to strengthen control quality in subsequent years.
5.2 Manajemen Risiko Risk Management			
5.2.1.	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are one unit, disclosed transparently, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as in discussions at meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.	√	Fungsi audit internal PERURI dijalankan oleh SPI yang independen dan obyektif sesuai PER-2/MBU/03/2023 dengan pendekatan risk-based audit. PERURI's internal audit function is carried out by SPI, which is independent and objective in accordance with PER-2/MBU/03/2023 using a risk-based audit approach.
5.2.1.1	Direksi memimpin penerapan manajemen risiko untuk dimanfaatkan oleh seluruh jajaran manajemen dalam menciptakan dan melindungi nilai bagi korporasi, dengan memberi contoh dan menjadi teladan dalam hal pengendalian dan pengelolaan risiko dalam aktivitas bisnis dan operasional guna menanamkan, memperkuat, dan mengembangkan budaya sadar risiko yang berlandaskan pada kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif The Board of Directors leads the implementation of risk management to be utilized by all levels of management in creating and protecting value for the corporation, by setting an example and being a role model in terms of controlling and managing risks in business and operational activities to instill, strengthen, and develop a risk-aware culture based on compliance and effective internal controls.	√	SPI menjalankan kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi (consulting) sesuai Piagam Audit Internal dan RKAT 2025. SPI performs assurance and consulting activities in accordance with the Internal Audit Charter and the 2025 RKAT.
5.2.1.2	Direksi mengungkapkan: - risiko-risiko utama yang dihadapi korporasi serta pengelolaannya; dan - apakah terdapat eksposur material atas risiko lingkungan atau sosial dan, jika ya, bagaimana mengelola atau intensi dalam mengelola risiko tersebut. The Board of Directors discloses: - the key risks faced by the corporation and their management; and - whether there are material exposures to environmental or social risks, and if so, how these risks are managed or the intentions regarding managing the risks.	√	SPI berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama dan dipimpin oleh Kepala SPI yang bertanggung jawab langsung kepadanya. SPI is positioned directly under the President Director and led by the Head of SPI, who is directly accountable to the President Director.
5.2.1.3	Direksi memastikan kesesuaian sistem pengendalian internal dan kerangka kerja manajemen risiko dengan karakteristik kebutuhan dan proses bisnis korporasi sehingga proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko terhadap seluruh jenis risiko yang dihadapi korporasi, termasuk di dalamnya komunikasi dan pelaporan tentang risiko, manajemen risiko, pemeriksanaannya, serta efektivitasnya, dapat terlaksanakan secara efektif selaras dengan ekspektasi para pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures the alignment of the internal control system and risk management framework with the characteristics of the corporation's needs and business processes so that the processes of internal control and risk management for all types of risks faced by the corporation, including communication and reporting on risks, risk management, its examination, and effectiveness, can be effectively implemented in line with stakeholders' expectations.	√	SPI melaksanakan audit berdasarkan jenis penugasan mencakup audit umum, audit anak perusahaan, audit khusus, dan kegiatan konsultasi. SPI conducts audits by assignment type, including general audits, subsidiary audits, special audits, and consulting activities.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
5.2.1.4	Direksi memastikan proses governansi risiko di Teknologi Informasi termasuk gangguan, keamanan <i>cyber</i>, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. The Board of Directors ensures that the risk governance process in Information Technology, including disruptions, cyber security, and disaster recovery, is in place to ensure that all key risks are identified, managed, and reported to the Board of Commissioners.	✓	SPI menjalankan kegiatan non-audit termasuk pendampingan auditor eksternal, penilaian Tingkat Kesehatan, dan pengelolaan WBS. SPI carries out non-audit activities including assistance to external auditors, Health Level rating assessments, and WBS management.
5.2.2.	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism for supervising corporate risk management.	✓	Auditor eksternal PERURI ditunjuk melalui mekanisme RPB dengan mempertimbangkan usulan Dewan Pengawas dan rekomendasi Komite Audit. PERURI's external auditor is appointed through the RPB mechanism, taking into account the Supervisory Board's proposal and the Audit Committee's recommendation.
5.2.2.1	Peran Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk diantaranya: - memantau kinerja korporat terhadap kerangka manajemen risiko, termasuk memantau apakah korporasi beroperasi dalam selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; - memantau pengendalian terhadap risiko-risiko utama, termasuk risiko utama pelaporan keuangan dan risiko kecurangan (fraud risk); - mereviu setiap kejadian material yang melibatkan fraud atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko korporasi, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa datang; - menerima laporan dari auditor internal tentang hasil reviu atas kecukupan proses manajemen risiko korporasi; - menerima laporan dari manajemen tentang sumber risiko baru dan yang muncul serta pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Direksi untuk menangani risiko tersebut; - menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka manajemen risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; dan - mengawasi program asuransi korporasi, dengan memperhatikan bisnis korporat dan risiko yang dapat diasuransikan. The role of the Risk Management Monitoring Committee includes: - Monitoring corporate performance against the risk management framework, including ensuring that the corporation operates within the risk appetite approved by the Board of Commissioners; - Monitoring controls over key risks, including major financial reporting risks and fraud risks; - Reviewing any material events involving fraud or significant weaknesses in corporate risk controls, and extracting lessons learned to prevent recurrence in the future; - Receiving reports from the internal auditor on the adequacy of the corporate risk management processes; - Receiving reports from management on new and emerging risk sources and the risk controls and mitigation measures implemented by the Board of Directors to address those risks; - Formulating recommendations to the Board of Commissioners regarding changes to the entity's risk management framework or the risk appetite approved by the Board of Commissioners; and - Overseeing the corporate insurance program, taking into account corporate business and insurable risks.	✓	Penunjukan KAP dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, dengan memastikan tidak ada benturan kepentingan. The KAP appointment is carried out through a direct appointment mechanism in accordance with applicable procurement procedures, ensuring no conflict of interest.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
5.2.2.2	Jumlah anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah memadai dan mayoritas independen; di antara anggotanya memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan dan pemahaman yang memadai tentang industri tempat entitas beroperasi, untuk dapat melaksanakan mandat komite secara efektif. The number of members of the Risk Management Monitoring Committee is adequate and the majority are independent. Among its members, there are individuals with the necessary technical expertise and adequate understanding of the industry in which the entity operates, enabling them to fulfill the committee's mandate effectively.	✓	Selama periode 2020-2025, opini auditor eksternal yang diterbitkan secara konsisten adalah Wajar Tanpa Pengecualian. During the period 2020-2025, the external auditor's opinions issued have consistently been unqualified opinions.
5.3. Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management and Compliance			
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors has built an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its goals.	✓	Pernyataan Direksi dan Dewan Pengawas atas kecukupan Sistem Pengendalian Internal disampaikan dalam Laporan Tahunan berdasarkan evaluasi bersama dengan Komite Audit. The Board of Directors' and Supervisory Board's statement on the adequacy of the Internal Control System is presented in the Annual Report based on joint evaluation with the Audit Committee.
5.3.1.1	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya. The Board of Directors ensures coordination and enhancement of capabilities among the main GRC systems, which include governance systems, strategic management, performance management, risk management, compliance management, and internal audit systems, to keep the corporation on track towards achieving its goals.	✓	Temuan dan fokus evaluasi pengendalian internal dijadikan acuan manajemen untuk penguatan kualitas pengendalian pada tahun-tahun berikutnya. Findings and the focus of internal control evaluation serve as a reference for management to strengthen control quality in subsequent years.
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the department in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest.	✓	Realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SPI 2025 diungkapkan mencakup jenis penugasan audit dan kegiatan non-audit lainnya. Realization of SPI's duties and responsibilities in 2025 is disclosed, covering audit assignment types and other non-audit activities.
5.4. Audit Internal Internal Audit			
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function helps the corporation to achieve its goals by bringing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control and corporate governance.	✓	PERURI menerapkan kebijakan anti-korupsi/anti-fraud termasuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. PERURI implements an anti-corruption/anti-fraud policy, including the Anti-Bribery Management System (SMAP) based on ISO 37001:2016.
5.4.1.1	Audit internal dilakukan secara objektif dan independen dari manajemen korporasi dan dari fungsi yang diauditnya. Dengan demikian, Audit Internal secara fungsional bertanggungjawab dan melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris dan dapat berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan atau tanpa kehadiran Direksi. Internal audits are conducted objectively and independently from corporate management and the functions they audit. Therefore, Internal Audit functionally reports to the Board of Commissioners through the Audit Committee, has direct access to the Audit Committee and the Board of Commissioners, and can communicate and meet directly with the Audit Committee and the Board of Commissioners with or without the presence of the Board of Directors.	✓	Program dan prosedur anti-korupsi dijalankan melalui sosialisasi GCG, Kode Etik, dan SMAP secara berkelanjutan kepada karyawan. Anti-corruption programs and procedures are carried out through ongoing socialization of GCG, the Code of Conduct, and SMAP to employees.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
5.4.1.2	Dewan Komisaris melalui komite audit memastikan fungsi audit internal memiliki wewenang, sumber daya dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif. The Board of Commissioners through the audit committee ensures that the internal audit function has the authority, resources, and access to adequate information to perform its role effectively.	√	Komitmen dan sosialisasi anti-korupsi dilaksanakan melalui kegiatan refreshment Risk Agent dan Anti-Bribery Agent sepanjang 2025. Anti-corruption commitment and socialization is conducted through Risk Agent and Anti-Bribery Agent refreshment activities throughout 2025.
5.4.1.3	Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal, lingkup pekerjaan, dan anggaran untuk fungsi Audit Internal. The Audit Committee recommends to the Board of Commissioners the appointment and dismissal of Head of Internal Audit, the scope of work, and the budget for the Internal Audit function.	√	Sosialisasi anti-korupsi dan gratifikasi dilaksanakan kepada karyawan dan vendor/rekanan PERURI sepanjang 2025. Anti-corruption and gratification socialization is conducted for both employees and vendors/partners of PERURI throughout 2025.
5.4.1.4	Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern dan mengevaluasi kinerja Audit Internal setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Setiap tiga tahun sekali, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris menunjuk konsultan eksternal independen untuk mengkaji ulang kinerja Audit Internal. The Audit Committee reviews the effectiveness of the internal audit implementation and evaluates the performance of Internal Audit annually, presenting the results to the Board of Commissioners. Every three years, considering the recommendations of the Audit Committee, the Board of Commissioners appoints an independent external consultant to review the performance of Internal Audit.	X	Jumlah karyawan penerima pelatihan anti-korupsi masih berupa placeholder data kuantitatif yang belum final pada draf ini, sehingga belum dapat diungkapkan secara definitif. The number of employees receiving anti-corruption training is still a quantitative placeholder in this draft that has not yet been finalized, and therefore cannot be definitively disclosed.
5.4.1.5	Audit internal membuat rencana audit, yang melibatkan Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Audit. Rencana audit internal disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. The internal audit creates an audit plan, involving the President Director, the Board of Commissioners with the consideration of the Audit Committee. The internal audit plan is presented to the Board of Directors and the Board of Commissioners for approval.	X	Persentase karyawan/pemasok yang menandatangani Kode Etik Anti-Korupsi masih berupa placeholder data kuantitatif yang belum final pada draf ini. The percentage of employees/suppliers who have signed the Anti-Corruption Code of Ethics is still a quantitative placeholder in this draft that has not yet been finalized.
5.4.1.6	Komite Audit memastikan pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan standar profesional audit internal yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi kode etik profesi serta kode etik organisasi. The Audit Committee ensures that the implementation of internal audits is conducted in accordance with applicable professional internal audit standards and upholds the profession's code of ethics as well as the organization's code of ethics.	X	PERURI belum memiliki kebijakan khusus yang secara tegas mengatur pencegahan insider trading; prinsip larangan penyalahgunaan informasi internal baru tercantum dalam Kode Etik secara umum. PERURI does not yet have a specific policy explicitly governing insider trading prevention; the principle prohibiting misuse of internal information is only generally set out in the Code of Conduct.
6. Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency			
6.1 Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy			
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets.	√	PERURI memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi informasi sesuai prinsip GCG dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PERURI has disclosure and transparency policies and procedures in accordance with GCG principles and applicable laws and regulations.
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' rights to obtain regularly and in a timely manner regarding relevant material information about the corporation must be fulfilled	X	PERURI sebagai Perum tidak memiliki pemegang saham publik; hak atas informasi material yang relevan disampaikan kepada Pemilik Modal melalui mekanisme administrasi bulanan dan RPB. As a Perum, PERURI has no public shareholders; rights to relevant material information are conveyed to the Capital Owner through monthly administrative reports and the RPB mechanism.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
6.1.2.1	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/ keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku. The corporation has and discloses a written policy for carrying out continuous disclosure obligations based on applicable regulations.	✓	PERURI memiliki kebijakan tertulis terkait keterbukaan informasi, dituangkan dalam laporan triwulan, klarifikasi media, dan laporan administrasi bulanan kepada Pemilik Modal. PERURI has a written disclosure policy, reflected in quarterly reports, media clarifications, and monthly administrative reports to the Capital Owner.
6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports			
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that have not been audited or reviewed by an external auditor are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.	✓	PERURI mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan laporan keuangan interim akurat dan lengkap melalui mekanisme internal Triwulan. PERURI discloses systems and procedures to ensure that interim financial statements are accurate and complete through an internal quarterly mechanism.
6.2.1.1	Pengungkapan sistem dan prosedur paling tidak mencakup: - pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim; - peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim; - peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. Disclosure of the system and procedures should at least include: - Internal controls over financial reporting, including interim financial statements; - The roles of risk management/compliance/management oversight functions and internal audit function in ensuring the integrity of interim financial statements; - The role of the Audit Committee in reviewing interim financial statements to be published.	X	Rincian cakupan minimum sistem dan prosedur pelaporan interim sesuai standar pasar modal belum diungkapkan secara spesifik dalam draf ini, mengingat PERURI bukan entitas tercatat. Specific details of the minimum scope of interim reporting systems and procedures in line with capital market standards have not been disclosed in this draft, given PERURI is not a listed entity.
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. These activities include recommending the appointment, reappointment and, if necessary, dismissal and remuneration of external auditors.	✓	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan oleh auditor eksternal, termasuk rekomendasi penunjukan KAP kepada Dewan Pengawas. The Audit Committee ensures the quality of financial statement audits by the external auditor, including recommending KAP appointment to the Supervisory Board.
6.2.2.1	Proses seleksi auditor eksternal yang melalui tender dilakukan secara transparan sehingga pemegang saham dapat mengamati dan memantau proses jika mereka menginginkannya. The process of selecting an external auditor through tender is conducted transparently, allowing shareholders to observe and monitor the process if they wish to do so.	X	Proses penunjukan KAP PERURI dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, bukan tender terbuka yang dapat diamati pemegang saham publik sebagaimana entitas tercatat. PERURI's KAP appointment process is carried out through direct appointment rather than an open tender that public shareholders could observe, as would be the case for a listed entity.
6.2.2.2	Komite Audit memastikan bahwa dalam kontrak dengan auditor tidak terdapat klausula yang dapat mengganggu independensi atau kompetensi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan. The Audit Committee ensures that there are no clauses in the contract with the auditor that could compromise the independence or competence of the auditor in conducting the audit of financial statements.	✓	Komite Audit memastikan tidak terdapat klausula dalam kontrak KAP yang mengganggu independensi atau kompetensi auditor. The Audit Committee ensures there are no clauses in the KAP contract that could compromise the auditor's independence or competence.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
6.2.2.3	Komite Audit melakukan dialog yang memadai dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen dan memantau interaksi antara manajemen dan auditor eksternal, termasuk mereview <i>management letter</i> yang diberikan oleh auditor eksternal dan mengawasi tanggapan manajemen; The Audit Committee conducts adequate dialogue with the external auditor without the presence of management and monitors the interaction between management and the external auditor, including reviewing the management letter provided by the external auditor and overseeing management's responses.	✓	Komite Audit melakukan dialog dengan auditor eksternal dan memantau interaksi antara manajemen dan auditor eksternal sesuai tugas Komite Audit. The Audit Committee conducts dialogue with the external auditor and monitors interaction between management and the external auditor as part of its duties.
6.2.2.4	Dewan Komisaris, atau Komite Audit, memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit. The Board of Commissioners, or the Audit Committee, ensures that the external auditor promptly informs them of all significant findings and issues identified by the external auditor during the audit process.	✓	Dewan Pengawas dan Komite Audit memastikan auditor eksternal menyampaikan temuan dan masalah signifikan selama pelaksanaan audit. The Supervisory Board and Audit Committee ensure the external auditor promptly reports significant findings and issues identified during the audit.
6.2.2.5	Komite Audit mereview setiap jasa nonaudit yang diberikan oleh auditor eksternal dan afiliasinya serta biaya terkait, untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak mengganggu independensi auditor. The Audit Committee reviews every non-audit service provided by the external auditor and its affiliates, as well as related fees, to ensure that these services do not compromise the auditor's independence.	✓	Komite Audit mereview jasa nonaudit yang diberikan KAP untuk memastikan independensi auditor tetap terjaga. The Audit Committee reviews non-audit services provided by the KAP to ensure auditor independence is maintained.
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability report must be prepared and disclosed accurately and prepared in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	✓	Laporan Keberlanjutan PERURI disusun mengacu pada standar GRI dan kerangka pelaporan internasional, dibuktikan dengan peringkat Emas ASRRAT 2025. PERURI's Sustainability Report is prepared with reference to GRI standards and international reporting frameworks, evidenced by the ASRRAT 2025 Gold rating.
6.2.3.1	Laporan keberlanjutan diberikan asurans oleh pihak eksternal yang independen dan kompeten. The sustainability report is assured by an independent and competent external party.	X	Belum terdapat pengungkapan asurans independen pihak eksternal atas Laporan Keberlanjutan PERURI dalam draf ini. There is no disclosure of independent external assurance over PERURI's Sustainability Report in this draft.
6.2.4	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perusahaan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The corporation has published a Sustainability Report that is an integral part of the Annual Report. The Company's Sustainability Report has presented the company's sustainability performance covering economic, social, environmental, and governance aspects, presented in comparison over 3 years, aiming to assist shareholders and stakeholders in understanding the corporation's strategic objectives and progress in creating sustainable value.	✓	PERURI telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. PERURI has published a Sustainability Report covering economic, social, environmental, and governance aspects.
6.3 Diseminasi Informasi Information Dissemination			
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide equal, timely and relatively inexpensive access to relevant information for users.	✓	Saluran penyebaran informasi PERURI mencakup situs web, siaran pers, dan paparan publik yang dapat diakses pemangku kepentingan. PERURI's information dissemination channels include its website, press releases, and public presentations accessible to stakeholders.
6.3.1.1	Korporasi secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan. The corporation periodically holds meetings with financial analysts.	X	Tidak terdapat pengungkapan mengenai pertemuan berkala dengan analis keuangan dalam draf ini, mengingat PERURI bukan entitas tercatat dengan basis investor publik. There is no disclosure of regular meetings with financial analysts in this draft, given PERURI is not a listed entity with a public investor base.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
6.3.1.2	Korporasi memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The corporation utilizes information technology effectively and extensively beyond its website as a means of information disclosure.	✓	PERURI memanfaatkan teknologi informasi secara luas, termasuk platform digital dan saluran komunikasi resmi, sebagai media keterbukaan informasi. PERURI makes extensive use of information technology, including digital platforms and official communication channels, as a disclosure medium.
6.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa informasi yang disebarkan dijaga dan terproteksi keamanannya. The corporation ensures that disseminated information is safeguarded and securely protected.	✓	Keamanan informasi dijaga melalui fungsi Data Protection Officer (DPO) dan kebijakan keamanan TI Perusahaan. Information security is maintained through the Data Protection Officer (DPO) function and the Company's IT security policy.
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporation ensures that an annual statement regarding the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide is available on the website for a minimum period of five years.	X	Belum terdapat pengungkapan ketersediaan pernyataan tahunan penerapan PUGKI di situs web PERURI untuk jangka waktu minimal lima tahun dalam draf ini. There is no disclosure of an annual PUGKI implementation statement being made available on PERURI's website for a minimum of five years in this draft.
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus didiungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations registered on the capital market in jurisdictions other than the home jurisdiction, the applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross listing, cross listing criteria and procedures, criteria and procedures for recognizing listing requirements for the main listing must be transparent and documented.	X	Tidak relevan karena PERURI tidak terdaftar di pasar modal manapun, baik di yurisdiksi asal maupun yurisdiksi lain (cross listing). Not relevant as PERURI is not listed on any capital market, either in its home jurisdiction or elsewhere (cross listing).
7. Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection of Shareholder Rights			
7.1 Hak Pemegang Saham Shareholder Rights			
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The corporation has a communications policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation	X	PERURI sebagai Perum tidak memiliki pemegang saham publik/investor; partisipasi Pemilik Modal difasilitasi melalui mekanisme RPB, bukan kebijakan komunikasi investor sebagaimana entitas tercatat. As a Perum, PERURI has no public shareholders/investors; Capital Owner participation is facilitated through the RPB mechanism rather than an investor communication policy as applied by listed entities.
7.1.1.1	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diperbolehkan untuk melakukan konsultasi satu dengan lainnya tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Prinsip ini, namun hal ini tidak boleh disalahgunakan. Shareholders, including institutional shareholders, are allowed to consult with each other regarding issues related to basic shareholder rights as outlined in these Principles, but this privilege should not be abused.	X	Tidak relevan karena PERURI hanya memiliki satu Pemilik Modal (Pemerintah RI), sehingga konsultasi antarpemegang saham tidak relevan diterapkan. Not relevant because PERURI has only one Capital Owner (the Government of the Republic of Indonesia), so consultation among shareholders is not applicable.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
7.1.1.2	Korporasi mendorong adanya dialog konstruktif antara pemegang saham (terutama investor institusional) dengan manajemen. Korporasi menanggapi permintaan dari pemegang saham untuk terlibat dalam dialog untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai korporasi dalam jangka menengah hingga panjang. The corporation encourages constructive dialogue between shareholders (especially institutional investors) and management. The corporation responds to shareholder requests to engage in dialogue to support sustainable growth and enhance corporate value in the medium to long term.	X	Dialog antara manajemen dan Pemilik Modal dilaksanakan melalui forum RPB dan rapat koordinasi, bukan melalui mekanisme dialog investor institusional sebagaimana PT Terbuka. Dialogue between management and the Capital Owner is conducted through the RPB forum and coordination meetings, rather than an institutional investor dialogue mechanism as applied by listed companies.
7.1.1.3	Korporasi menyediakan wadah atau platform dialog konstruktif antara seluruh pemegang saham dengan manajemen. The corporation provides a platform for constructive dialogue between all shareholders and management.	X	Platform dialog konstruktif PERURI dengan Pemilik Modal diwujudkan melalui forum RPB, bukan mekanisme dialog multi-pemegang-saham sebagaimana entitas tercatat. PERURI's constructive dialogue platform with the Capital Owner is realized through the RPB forum, rather than a multi-shareholder dialogue mechanism as applied by listed entities.
7.1.1.4	Korporasi segera mengungkapkan kepada publik semua fakta baru yang material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa. The corporation promptly discloses to the public any new material facts available to financial analysts and similar parties.	✓	PERURI mengungkapkan fakta material kepada publik melalui siaran pers dan media komunikasi resmi sesuai prinsip transparansi. PERURI discloses material facts to the public through press releases and official communication media in line with the transparency principle.
7.1.1.5	Korporasi mengungkapkan kebijakan komunikasi korporasi dengan pemegang saham atau investor dalam situs web dan laporan. The corporation discloses its corporate communication policy with shareholders or investors on its website and reports.	X	Kebijakan komunikasi formal dengan pemegang saham institusional/publik tidak relevan diungkapkan karena Pemilik Modal PERURI adalah Pemerintah RI tunggal melalui mekanisme RPB. A formal communication policy with institutional/public shareholders is not relevant to disclose, as PERURI's sole Capital Owner is the Government of Indonesia through the RPB mechanism.
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporation which is the parent entity, ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation's investment is significant.	✓	Sebagai entitas induk, PERURI memastikan kebijakan governansi korporat berlaku bagi entitas anak melalui kebijakan tata kelola terintegrasi. As a parent entity, PERURI ensures corporate governance policy applies to subsidiaries through integrated governance policy.
7.1.2.1	Kerangka kerja dan kebijakan governansi korporat di entitas anak termasuk kebijakan tertulis antara lain mengenai: - wewenang untuk menunjuk komisaris dan direktur. Umumnya, untuk entitas anak dengan ukuran relatif besar, Dewan Komisaris perlu dilibatkan dalam penunjukan pengurus di entitas anak. Untuk entitas anak yang lebih kecil, Direksi yang berwenang melaksanakannya; - efektivitas sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku; dan - pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas informasi material entitas anak, termasuk informasi keuangan, transaksi dengan pihak berelasi dan informasi material lainnya. - Jika korporasi memiliki/membentuk entitas berbadan hukum selain perseroan terbatas, korporasi memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas tersebut disesuaikan dengan konteks jenis badan hukumnya. The framework and policies for corporate governance in subsidiary entities include written policies regarding: - Authority to appoint commissioners and directors. Generally, for relatively large subsidiary entities, the Board of Commissioners needs to be involved in appointing executives in subsidiary entities. For smaller subsidiary entities, the Board of Directors is authorized to carry out this task; - Effectiveness of the internal control system and compliance with applicable laws and regulations; and - Timely and accurate disclosure of material information from subsidiary entities, including financial information, transactions with related parties, and other material information. - If the corporation has or establishes legal entities other than limited liability companies, the corporation ensures that its corporate governance policies applicable to those entities are adjusted to the context of their legal entity type.	✓	Kerangka kerja governansi korporat anak perusahaan diatur melalui kebijakan tata kelola terintegrasi PERURI Group. Subsidiary corporate governance frameworks are governed through PERURI Group's integrated governance policy.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
7.1.2.2	Untuk investasi di entitas anak yang signifikan namun di bawah mayoritas (seperti kepemilikan antara 20 persen sampai 50 persen saham), Direksi memastikan bahwa terdapat perjanjian pemegang saham atau perjanjian lain yang memungkinkan korporasi memantau kinerja korporasi dan berpartisipasi dalam kepengurusan, termasuk untuk persetujuan transaksi dan keputusan yang signifikan. Hal ini diperlukan antara lain untuk memastikan bahwa korporasi memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu di entitas anak. For investments in significant but minority-owned subsidiary entities (such as ownership between 20 percent to 50 percent of shares), the Board of Directors ensures that there is a shareholders' agreement or other agreement that allows the corporation to monitor the performance of the corporation and participate in management, including for approval of transactions and significant decisions. This is necessary, among other things, to ensure that the corporation has adequate, accurate, and timely information in the subsidiary entity.	X	Tidak terdapat pengungkapan spesifik mengenai perjanjian pemegang saham untuk investasi minoritas signifikan (20-50%) pada entitas anak dalam draf ini. There is no specific disclosure of shareholder agreements for significant minority investments (20-50%) in subsidiaries in this draft.
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. Corporations have rules and procedures governing acquisitions, takeovers and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur transparently and under fair conditions and protect the rights of all shareholders according to their class.	X	Tidak terdapat aturan dan prosedur khusus terkait akuisisi/merger/penjualan aset substansial yang diungkapkan dalam draf ini; ketentuan tersebut umumnya relevan bagi entitas tercatat dengan basis pemegang saham publik. There are no specific rules and procedures disclosed regarding acquisitions/mergers/substantial asset sales in this draft; such provisions are generally relevant for listed entities with a public shareholder base.
7.1.3.1	Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi. The corporation clearly discloses these rules and procedures so that investors understand their rights and entitlements to compensation.	X	Tidak relevan karena PERURI tidak memiliki basis investor publik yang memerlukan pengungkapan hak kompensasi dalam transaksi akuisisi/merger. Not relevant because PERURI has no public investor base requiring disclosure of compensation rights in acquisition/merger transactions.
7.1.3.2	Taktik yang mencegah pengambil alihan (<i>anti-take-over devices</i>) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. Tactics that prevent takeovers (anti-takeover devices) should not be used to protect management and the Board of Commissioners from accountability.	X	Tidak relevan karena PERURI sebagai Perum tidak memiliki saham yang dapat menjadi objek pengambilalihan (<i>takeover</i>) di pasar modal. Not relevant because, as a Perum, PERURI has no shares that could be subject to a market takeover.
7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment to Shareholders			
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: - semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara; - pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Corporations have rules and procedures that Ensure: - all shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally, - disclosure of such rules and procedures as well as disclosure of capital structures and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control that is disproportionate to their share ownership.	X	PERURI sebagai Perum tidak memiliki saham; hak atas laba disalurkan kepada Pemilik Modal melalui mekanisme RPB, bukan melalui hak pemegang saham sebagaimana PT Terbuka. As a Perum, PERURI has no shares; profit rights are channeled to the Capital Owner through the RPB mechanism, rather than through shareholder rights as applied to listed companies.
7.2.1.1	Untuk memastikan transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba, korporasi mengungkapkan kebijakan dividen yang terukur, misalnya target rasio pembayaran dividen/dividen per saham. To ensure transparency regarding Shareholders' rights to receive a portion of the profits, the corporation discloses a measurable dividend policy, such as target dividend payout ratios/dividends per share.	X	Tidak relevan karena PERURI tidak memiliki kebijakan dividen per saham; alokasi laba kepada Pemilik Modal diatur melalui keputusan RPB. Not relevant because PERURI has no per-share dividend policy; profit allocation to the Capital Owner is governed through RPB resolutions.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
7.2.1.2	Para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif. Investors receive information about the rights inherent in all series or classes of shares before they purchase them. Any changes in the economic value of shares or voting rights require approval from the affected class of shares in a manner that avoids negative impact.	X	Tidak relevan karena PERURI tidak memiliki kelas-kelas saham yang memerlukan pengungkapan hak ekonomi/suara. Not relevant because PERURI has no share classes requiring disclosure of economic/voting rights.
7.2.1.3	Agar pemegang saham dapat mengetahui pemilik manfaat akhir (<i>beneficial owner</i>) korporasi dengan kepemilikan signifikan, korporasi mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham melalui pemegang saham utama dan pengendali serta pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham paling sedikit 5% (lima persen). To enable shareholders to know the ultimate beneficial owner of significant corporate ownership, the corporation discloses ultimate beneficial owners in share ownership through major shareholders and controllers, as well as ultimate beneficial owners in share ownership of at least 5% (five percent).	X	Tidak relevan karena Pemilik Modal PERURI adalah Pemerintah RI secara langsung, tanpa struktur pemilik manfaat akhir berlapis sebagaimana entitas tercatat. Not relevant because PERURI's Capital Owner is the Government of Indonesia directly, without a layered beneficial ownership structure as applies to listed entities.
7.2.1.4	Korporasi mengungkapkan: - perjanjian antar pemegang saham; <i>voting cap</i>; <i>multiple voting rights</i>; - perikatan lain yang memungkinkan pemegang saham tertentu memiliki hak suara di atas kepemilikannya di korporasi. The corporation discloses: - Shareholders' agreements; - Voting caps; - Multiple voting rights; - other arrangements that allow certain shareholders to have voting rights exceeding their ownership in the corporation.	X	Tidak relevan karena struktur kepemilikan PERURI bersifat tunggal (Pemerintah RI) tanpa struktur kepemilikan saham berlapis yang memerlukan pengungkapan tambahan. Not relevant because PERURI's ownership structure is single-tier (the Government of Indonesia) without a layered share ownership structure requiring additional disclosure.
7.2.1.5	Korporasi menyediakan mekanisme/prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan aturan perundangan berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan. The corporation provides mechanisms/procedures that allow shareholders to have the opportunity to seek effective redress for violations of their rights in accordance with applicable laws and regulations, at reasonable cost and without undue delay.	✓	PERURI menyediakan mekanisme pelaporan dan penyelesaian, termasuk WBS, sebagai bentuk akses pemangku kepentingan atas pelanggaran hak. PERURI provides reporting and resolution mechanisms, including the WBS, as a form of stakeholder access for rights violations.
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Corporations have rules and procedures that ensure related party transactions are approved and implemented in a manner that ensures that conflicts of interest are managed appropriately, and protects the interests of the corporation and shareholders.	✓	PERURI memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengatur persetujuan dan pelaksanaan transaksi pihak berelasi sesuai Kode Etik dan kebijakan internal. PERURI has a conflict of interest policy governing the approval and execution of related party transactions in accordance with the Code of Conduct and internal policy.
7.2.2.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur operasional baku bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi adalah adil dan wajar (<i>arm's length transaction</i>). The corporation has policies and standardized operating procedures ensuring that transactions with related parties are conducted in such a way to ensure they are fair and at arm's length.	✓	Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur operasional baku yang mengatur kewajaran transaksi. Related party transactions are conducted in accordance with standard operating policies and procedures governing fairness of transactions.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
7.2.2.2	Transaksi pihak berelasi yang material, termasuk perjanjian jasa konsultasi dan jasa atau pekerjaan lainnya antara direktur/komisaris dan afiliasinya dengan korporasi harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan aturan perundangan berlaku. Selain yang sudah diatur persetujuannya dalam aturan perundangan, transaksi pihak berelasi yang material memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemberian persetujuan. Material related-party transactions, including consultancy agreements and other services or work agreements between directors/commissioners and their affiliates with the corporation, must obtain approval in accordance with applicable laws. In addition to those already regulated by law, material related-party transactions require approval from the Board of Commissioners. Commissioners with conflicts of interest do not participate in granting approval.	X	Tidak terdapat pengungkapan spesifik mengenai persetujuan transaksi pihak berelasi material melalui Dewan Pengawas/Komisaris dalam draf ini. There is no specific disclosure regarding approval of material related party transactions through the Supervisory Board/Commissioners in this draft.
7.2.2.3	Korporasi memiliki kebijakan bahwa transaksi yang sudah pasti merugikan pemegang saham publik/minoritas dilarang. Contoh transaksi tersebut: a. Bantuan/subsidi keuangan kepada Direksi atau Komisaris pada tingkat bunga di bawah kewajaran; walaupun ada pemberian pinjaman harus dilakukan pada tingkat bunga dan syarat wajar dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris; b. Bantuan/subsidi keuangan kepada entitas selain entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh korporasi. The corporation has a policy that transactions that are clearly detrimental to public/minority shareholders are prohibited. Examples of such transactions include: a. =Financial assistance/subsidies to Directors or Commissioners at below-market interest rates; if loans are provided, they must be at fair interest rates and terms and receive approval from the Board of Commissioners; b. =Financial assistance/subsidies to entities other than those fully owned by the corporation.	X	Tidak terdapat pengungkapan spesifik mengenai kebijakan larangan transaksi yang merugikan pemegang saham minoritas, karena PERURI tidak memiliki pemegang saham minoritas sebagai Perum. There is no specific disclosure of a policy prohibiting transactions detrimental to minority shareholders, as PERURI has no minority shareholders as a Perum.
7.2.2.4	Dewan Komisaris mengungkapkan kebijakan proses untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat. The Board of Commissioners discloses the policy process for approving, reviewing, and monitoring related-party transactions and any inherent conflicts of interest.	X	Tidak terdapat pengungkapan kebijakan proses persetujuan, peninjauan, dan pemantauan transaksi pihak berelasi oleh Dewan Pengawas secara spesifik dalam draf ini. There is no disclosure of a specific policy process for the Supervisory Board's approval, review, and monitoring of related party transactions in this draft.
7.2.2.5	Kesimpulan kajian Komite Audit atas transaksi pihak berelasi/benturan kepentingan yang signifikan diungkapkan dalam Laporan Tahunan korporasi. The Audit Committee's findings on significant related-party transactions/conflicts of interest are disclosed in the corporation's Annual Report.	X	Tidak terdapat pengungkapan kesimpulan kajian Komite Audit atas transaksi pihak berelasi/benturan kepentingan signifikan dalam Laporan Tahunan ini. There is no disclosure of the Audit Committee's review conclusions on significant related party transactions/conflicts of interest in this Annual Report.
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. Corporations have and disclose policies to prevent insider trading. Corporations have clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that anyone cannot profit directly or indirectly from information that is not/ yet available on the market.	X	PERURI belum memiliki kebijakan khusus yang secara tegas mengatur pencegahan insider trading, meskipun prinsip larangan penyalahgunaan informasi internal telah tercantum dalam Kode Etik. PERURI does not yet have a specific policy explicitly governing insider trading prevention, although the principle prohibiting misuse of internal information is set out in the Code of Conduct.
7.3 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders			
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi The corporation invitation for a GMS with the GMS agenda and materials as complete and as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed via electronic means such as through the corporate website	X	PERURI tidak menyelenggarakan RUPS sebagai Perum; mekanisme pengambilan keputusan Pemilik Modal dilakukan melalui RPB, yang pada 2025 dilaksanakan melalui keputusan tertulis tanpa rapat fisik. PERURI does not hold a GMS as a Perum; Capital Owner decision-making is conducted through the RPB, which in 2025 was carried out via written resolution without a physical meeting.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
7.3.1.1	Dalam materi atas agenda RUPS, korporasi menyampaikan informasi relevan dan lengkap yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, termasuk penjelasan dan justifikasi (<i>rationale</i>) atas keputusan yang diusulkan untuk disetujui dalam RUPS. In the materials for the agenda of the GMS, the corporation provides relevant and complete information necessary for decision-making, including explanations and justifications for the proposed decisions to be approved at the GMS.	X	Tidak relevan karena PERURI tidak menyelenggarakan RUPS; materi keputusan disampaikan melalui mekanisme keputusan tertulis RPB kepada Pemilik Modal. Not relevant because PERURI does not hold a GMS; resolution materials are conveyed through the RPB's written resolution mechanism to the Capital Owner.
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.	X	Tidak relevan karena PERURI tidak menyelenggarakan RUPS; RPB tahunan 2025 dilaksanakan melalui keputusan tertulis Pemilik Modal tanpa mekanisme pemungutan suara. Not relevant because PERURI does not hold a GMS; the 2025 annual RPB was conducted via the Capital Owner's written resolution without a voting mechanism.
7.3.2.1	Korporasi menyediakan infrastruktur yang memungkinkan kehadiran seluruh pemegang saham domestik maupun asing, termasuk investor institusi dalam RUPS. The Corporation provides infrastructure that enables the presence of all domestic and foreign shareholders, including institutional investors, at the GMS.	X	Tidak relevan karena tidak terdapat RUPS yang memerlukan infrastruktur kehadiran pemegang saham domestik/asing. Not relevant because there is no GMS requiring infrastructure for the attendance of domestic/foreign shareholders.
7.3.2.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan. \\All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners attended the Annual GMS.	X	Tidak relevan karena PERURI tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; kehadiran Direksi dan Dewan Pengawas dilaporkan melalui mekanisme RPB. Not relevant because PERURI does not hold an Annual GMS; attendance of the Board of Directors and Supervisory Board is reported through the RPB mechanism.
7.3.2.3	Ketua Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta komite lainnya siap memberikan tanggapan yang berarti atas pertanyaan yang ditujukan kepada mereka dalam RUPS. \\The Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Management Risk Monitoring Committee, as well as other committees are ready to provide meaningful responses to questions directed to them in the GMS.	X	Tidak relevan karena tidak terdapat forum RUPS bagi ketua komite untuk memberikan tanggapan kepada pemegang saham. Not relevant because there is no GMS forum for committee chairs to respond to shareholders.
7.3.2.4	Pemegang saham memiliki kesempatan, dalam batas kewajaran, untuk: a. mengajukan pertanyaan dalam RUPS, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan hasil audit eksternal tahunan; b. memasukkan suatu acara ke dalam agenda RUPS; dan c. mengajukan usulan resolusi. Shareholders have the opportunity, within reasonable limits, to: a. Raise questions in the GMS, including questions related to the results of the annual external audit; b. Propose an item to be included in the GMS agenda; and c. Submit resolution proposals.	X	Tidak relevan karena tidak terdapat mekanisme RUPS yang memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk berpartisipasi langsung. Not relevant because there is no GMS mechanism providing shareholders the opportunity to participate directly.
7.3.2.5	Korporasi memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara (voting) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, yaitu: a. lokasi RUPS yang mudah diakses sebagian besar pemegang saham; b. pemungutan secara tertutup (<i>poll-voting</i>) dan bukan dengan mengacungkan tangan (<i>show of hands</i>); c. memastikan tidak ada syarat dan prosedur RUPS yang menghambat pemegang saham untuk turut serta mengambil keputusan. The corporation has methods or technical procedures for voting that prioritize independence and shareholder interests, namely: a. Easily accessible locations for GMS for the majority of shareholders; b. Conducting closed voting (poll-voting) rather than by a show of hands; c. Ensuring that there are no conditions or procedures in GMS that hinder shareholders from participating in decision-making.	X	Tidak relevan karena RPB PERURI 2025 dilaksanakan melalui persetujuan tertulis Pemilik Modal, bukan melalui prosedur pemungutan suara. Not relevant because PERURI's 2025 RPB was conducted through the Capital Owner's written approval, not through a voting procedure.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
7.3.2.6	Korporasi mengupayakan prosedur pemungutan suara secara elektronik serta mengambil langkah untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan pemungutan suara secara elektronik atau menggunakan infrastruktur yang telah tersedia di ekosistem dalam pemungutan suara. The corporation strives for electronic voting procedures and takes steps to build infrastructure that enables electronic voting or utilizes existing infrastructure within the ecosystem for voting.	X	Tidak relevan karena tidak terdapat mekanisme pemungutan suara (voting) dalam pengambilan keputusan RPB PERURI. Not relevant because there is no voting mechanism in PERURI's RPB decision-making process.
7.3.2.7	Setiap pemungutan suara dalam RUPS hanya untuk satu keputusan, tidak ada penggabungan beberapa keputusan ke dalam resolusi yang sama (<i>bundling</i>). Each vote in the GMS is only for one resolution, there is no bundling of multiple resolutions into the same resolution.	X	Tidak relevan karena RPB PERURI tidak menggunakan mekanisme pemungutan suara per resolusi. Not relevant because PERURI's RPB does not use a per-resolution voting mechanism.
7.3.2.8	Korporasi menunjuk pihak independen (pengawas/inspektur) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS. The corporation appoints an independent party (supervisor/inspector) to count and/or certify the votes in the GMS and disclose them in the minutes of the GMS.	X	Tidak relevan karena keputusan RPB tidak dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara, melainkan melalui persetujuan tertulis Pemilik Modal, sehingga tidak diperlukan pihak independen penghitung suara. Not relevant because RPB resolutions are not adopted through a voting mechanism, but through the Capital Owner's written approval, so no independent vote-counting party is required.
7.3.2.9	Jika resolusi yang disetujui oleh pemegang saham pengendali bertentangan dengan sebagian besar suara pemegang saham nonpengendali, maka pasca RUPS, korporasi mengungkapkan tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi hal yang menjadi perhatian pemegang saham nonpengendali yang menyebabkannya memberikan suara yang berbeda dari pemegang saham pengendali. If resolutions approved by controlling shareholders contradict the majority of votes from non-controlling shareholders, post-GMS, the corporation discloses actions taken to understand and respond to concerns of non-controlling shareholders, which led to their voting differently from controlling shareholders.	X	Tidak relevan karena PERURI hanya memiliki satu Pemilik Modal (Pemerintah RI) tanpa pemegang saham nonpengendali. Not relevant because PERURI has only one Capital Owner (the Government of Indonesia) without non-controlling shareholders.
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	X	Penunjukan anggota Direksi dan Dewan Pengawas PERURI merupakan kewenangan Pemilik Modal/BP BUMN, bukan melalui partisipasi pemegang saham dalam RUPS. The appointment of PERURI's Board of Directors and Supervisory Board members is the authority of the Capital Owner/BP BUMN, not through shareholder participation in a GMS.
7.3.3.1	Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada pemegang saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan Direktur atau Komisaris di korporasi lain, dan apakah mereka dinilai independen dari sudut pandang korporasi. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, conducts a thorough examination of Director and Commissioner candidates and provides all relevant material information about the candidates to shareholders during the board member selection process. The disclosed information includes details about the candidates' positions as Directors or Commissioners in other corporations and whether they are considered independent from the corporate standpoint.	✓	Dewan Pengawas melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris sebelum diusulkan kepada Pemilik Modal. The Supervisory Board, through the Nomination and Remuneration Committee, conducts an in-depth review of Director and Commissioner candidates before they are proposed to the Capital Owner.
7.3.3.2	Direktur dan Komisaris dicalonkan untuk pemilihan setidaknya sekali setiap tiga tahun atau lima tahun bagi korporasi yang peraturannya mengharuskan lima tahun. Akan lebih baik jika pencalonan dilakukan setiap setahun sekali. Directors and Commissioners are nominated for election at least once every three years or five years for corporations whose regulations require five years. It would be better if nominations were made annually.	X	Tidak relevan karena pencalonan Direktur dan Komisaris PERURI tidak melalui mekanisme pemilihan berkala RUPS, melainkan penetapan oleh Pemilik Modal. Not relevant because the nomination of PERURI's Directors and Commissioners does not go through a periodic GMS election mechanism, but through Capital Owner determination.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
7.3.3.3	Pemegang saham melakukan pemungutan suara terpisah untuk tiap-tiap kandidat Direktur dan Komisaris. Shareholders conduct separate voting for each Director and Commissioner candidate.	X	Tidak relevan karena tidak terdapat mekanisme pemungutan suara terpisah untuk kandidat Direktur dan Komisaris sebagaimana RUPS entitas tercatat. Not relevant because there is no separate voting mechanism for individual Director and Commissioner candidates as in a listed entity's GMS.
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures transparency and accountability of external auditors at the GMS.	X	Tidak relevan karena PERURI tidak menyelenggarakan RUPS; penunjukan auditor eksternal dilakukan melalui mekanisme RPB dengan rekomendasi Dewan Pengawas dan Komite Audit. Not relevant because PERURI does not hold a GMS; the appointment of the external auditor is carried out through the RPB mechanism with the Supervisory Board's and Audit Committee's recommendations.
7.3.4.1	Dalam panggilan RUPS, korporasi mengidentifikasi dan menginformasikan calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS. In the GMS notice, the corporation identifies and informs shareholders of the candidate external auditor who will be appointed or reappointed during the GMS.	X	Tidak relevan karena tidak terdapat panggilan RUPS bagi PERURI untuk mengidentifikasi calon auditor eksternal kepada pemegang saham. Not relevant because there is no GMS notice for PERURI to identify external auditor candidates to shareholders.
7.3.4.2	Korporasi memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan. The corporation ensures that the external auditor attends the GMS and is obligated to respond to shareholders' questions regarding the audit of financial statements.	X	Tidak relevan karena tidak terdapat forum RUPS bagi auditor eksternal untuk menjawab pertanyaan pemegang saham. Not relevant because there is no GMS forum for the external auditor to answer shareholder questions.
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.	X	Tidak relevan karena PERURI tidak menyelenggarakan RUPS; hasil keputusan RPB 2025 disampaikan melalui Keputusan Menteri BUMN, bukan pengumuman hasil pemungutan suara publik. Not relevant because PERURI does not hold a GMS; the 2025 RPB resolution results are conveyed through a Minister of SOEs Decree, not through public voting result announcements.
7.3.5.1	Risalah RUPS diinformasikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS. The minutes of the GMS are communicated to shareholders no later than 30 business days after the GMS.	X	Tidak relevan karena tidak terdapat risalah RUPS; keputusan RPB disampaikan melalui surat keputusan Pemilik Modal. Not relevant because there are no GMS minutes; RPB resolutions are conveyed through the Capital Owner's decree.
7.3.5.2	Risalah RUPS memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab. The minutes of the GMS include questions posed by shareholders and the responses provided by the meeting chairperson or the answering party.	X	Tidak relevan karena tidak terdapat mekanisme tanya-jawab pemegang saham dalam forum RUPS bagi PERURI. Not relevant because there is no shareholder Q&A mechanism within a GMS forum for PERURI.
7.3.5.3	Penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan dimuat di laman atau media digital komunikasi resmi korporasi dan tersedia selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun. The conduct of the GMS, along with all meeting materials, reports, and related documents including the annual report and voting results, including the agenda of the meeting concerned, are published on the corporation's official website or digital communication media and are available for at least 10 (ten) years.	X	Tidak relevan karena PERURI tidak menyelenggarakan RUPS dengan materi yang wajib tersedia di laman resmi selama 10 tahun sebagaimana entitas tercatat. Not relevant because PERURI does not hold a GMS with materials required to be available on an official website for 10 years as applies to listed entities.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
8. Pemangku Kepentingan Lainnya Other Stakeholders			
8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (<i>stakeholder engagement</i>) Key Stakeholder Engagement (Stakeholder Engagement)			
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The Corporation, through the Corporate Secretary, carries out regular, transparent and effective communication with key stakeholders and involves them to understand their hopes and complaints as well as the impact of the corporation on them.	✓	PERURI mengupayakan kesetaraan perlakuan terhadap seluruh pemangku kepentingan sesuai prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Kewajaran (TARIF/ETAK). PERURI seeks equitable treatment of all stakeholders in line with the principles of Accountability, Transparency, and Fairness (TARIF/ETAK).
8.1.1.1	Korporasi mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan. The corporation discloses the process of identifying and selecting key stakeholders to be involved.	✓	PERURI mengedepankan kejujuran dan perlakuan hormat terhadap seluruh pihak sesuai prinsip Perilaku Beretika yang tercantum dalam Pedoman GCG. PERURI upholds honesty and respectful treatment of all parties in accordance with the Ethical Behavior principle set out in the GCG Guidelines.
8.1.1.2	Korporasi mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan kunci termasuk frekuensinya berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan kunci. The corporation discloses its approach and activities in managing the involvement of key stakeholders, including the frequency based on the type and group of key stakeholders.	✓	PERURI menyediakan informasi material yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai prinsip Transparansi. PERURI provides relevant material information that is easily accessible to stakeholders in accordance with the Transparency principle.
8.1.1.3	Korporasi menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan kunci (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll) untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyalurkan keluhan dan/atau pengaduan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka. The corporation provides channels that key stakeholders (such as customers, suppliers, the general public, etc.) can use to express opinions and provide feedback, voice complaints, and/or lodge grievances regarding potential violations of their rights.	✓	PERURI dikelola secara akuntabel dan terukur dengan mempertimbangkan kepentingan Pemilik Modal dan pemangku kepentingan lainnya. PERURI is managed accountably and measurably, taking into account the interests of the Capital Owner and other stakeholders.
8.1.1.4	Korporasi mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan kunci yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan kunci, termasuk: a. respon korporasi; dan b. kelompok pemangku kepentingan kunci yang menyampaikan pandangan dan masukan. The corporation discloses significant views, inputs, and complaints conveyed by key stakeholders obtained from stakeholder engagement, including: a. Corporate responses; and b. Key stakeholder groups expressing views and inputs.	✓	PERURI berkomitmen melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Program TJSL yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. PERURI is committed to fulfilling social and environmental responsibility through the TJSL Program, contributing to sustainable development.
8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis Integration of Sustainability in Business Models			
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including determining corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners include sustainability considerations when carrying out their roles, including, among others, in the development and implementation of corporate strategy, business plans, main action plans and risk management.	✓	PERURI menjaga sikap netral dalam aktivitas politik dan tidak menyalurkan dana kepada partai politik, calon legislatif, atau kandidat kepala daerah. PERURI maintains political neutrality and does not channel funds to political parties, legislative candidates, or regional head candidates.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
8.2.1.1	Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures that the corporation's sustainability strategy, priorities, and targets, as well as performance against these targets, are communicated to stakeholders.	✓	Kebijakan netralitas politik PERURI memastikan seluruh sumber daya Perusahaan digunakan eksklusif untuk pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis. PERURI's political neutrality policy ensures all Company resources are used exclusively to achieve its vision, mission, and strategic objectives.
8.2.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi korporasi dan bisnisnya. The Board of Directors and Board of Commissioners continually monitor and understand sustainability issues relevant to the corporation and its business.	✓	Larangan pemberian gratifikasi yang berkaitan dengan kegiatan politik dan partai politik diatur dalam Prinsip Pengendalian Gratifikasi PERURI. The prohibition on giving gratification related to political activities and political parties is set out in PERURI's Gratification Control Principles.
8.2.1.3	Evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris mencakup kinerja mereka dalam mengawasi dan menangani risiko serta peluang yang signifikan tentang keberlanjutan korporasi. The performance evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners includes their performance in overseeing and addressing significant risks and opportunities related to corporate sustainability.	✓	Etika hubungan dengan pejabat publik diatur secara formal, melarang gratifikasi, suap, atau fasilitas yang dapat mempengaruhi independensi keputusan. Ethics governing relationships with public officials are formally established, prohibiting gratification, bribery, or facilities that could influence decision-making independence.
8.2.1.4	Direksi menunjuk seseorang dalam manajemen yang berperan khusus dalam mengelola secara strategik keberlanjutan, termasuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam kegiatan korporasi. The Board of Directors appoints an individual within management with a specific role in strategically managing sustainability, including integrating sustainability considerations into corporate activities.	✓	PERURI menyediakan saluran pelaporan dugaan pelanggaran etika yang aman dan terpercaya, termasuk dalam interaksi dengan pejabat publik. PERURI provides a safe and trusted reporting channel for alleged ethical violations, including in interactions with public officials.
8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection of Stakeholders			
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensure that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with stakeholder rights.	✓	PERURI mematuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK sesuai ketentuan perundang-undangan. PERURI complies with the obligation to submit the State Officials' Wealth Report (LHKPN) to the KPK in accordance with applicable laws and regulations.
8.3.1.1	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan tentang tanggung jawab korporasi kepada pelanggan termasuk antara lain mempertimbangkan keamanan informasi pelanggan, etika dan perilaku penjualan, layanan purna jual sesuai dengan umur produk/masa layanan, serta menindaklanjuti tingkat kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Iklan dan hubungan masyarakat harus mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dan dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk menghindari penyesatan pelanggan, atau menyebabkan kesalahpahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh korporasi. The corporation implements and discloses policies regarding corporate responsibility to customers, including, among others, considering customer information security, ethics and sales behavior, after-sales service according to product/service lifespan, as well as following up on customer satisfaction levels to improve product and service quality. Advertising and public relations must promote responsible consumption and be conducted responsibly, including avoiding misleading customers or causing misunderstandings about the products and services offered by the corporation.	✓	Dasar hukum dan peraturan penerapan LHKPN diatur mengacu pada UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, dan ketentuan terkait lainnya. The legal basis and regulations for LHKPN implementation refer to Law No. 28 of 1999, Law No. 30 of 2002, and other related provisions.



No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
8.3.1.2	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan yang meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok. Korporasi juga memiliki kebijakan yang mendorong dan memantau pemasok untuk menghormati hak asasi manusia, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memperlakukan karyawan, staf, dan pekerja mereka secara adil, serta memastikan bahwa pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur bisnis yang berkelanjutan dan berbasis nilai berkelanjutan. The corporation implements and discloses policies covering criteria in supplier selection, transparent procurement mechanisms, efforts to enhance supplier capabilities, and fulfillment of supplier-related rights. The corporation also has policies that encourage and monitor suppliers to respect human rights, carry out social and environmental responsibilities, treat their employees, staff, and workers fairly, and ensure that suppliers have implemented sustainable business policies and procedures based on sustainable values.	✓	PERURI memperbarui pedoman penyampaian LHKPN pada 2025 melalui Risk Management and Compliance Manual Bab X tentang Anti Fraud Program, berlaku efektif 29 Desember 2025. PERURI updated its LHKPN submission guideline in 2025 through the Risk Management and Compliance Manual Chapter X on the Anti-Fraud Program, effective December 29, 2025.
8.3.1.3	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman bisnis korporasi untuk mengembangkan dan menghasilkan kegiatan tanggung jawab sosial yang secara kongkrit memberikan nilai tambah bagi masyarakat termasuk mendorong kemandirian masyarakat. The corporation implements and discloses its social responsibility by applying corporate business knowledge and experience to develop and generate concrete social responsibility activities that add value to society, including fostering community empowerment.	✓	Wajib lapor LHKPN PERURI mencakup Dewan Pengawas, Direksi, pejabat struktural dan non-struktural satu tingkat di bawah Direksi, serta organ anak/cucu perusahaan. PERURI's LHKPN reporting obligors include the Supervisory Board, Board of Directors, structural and non-structural officials one level below the Board of Directors, and subsidiary/second-tier subsidiary organs.
8.3.1.4	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi, dan mengelola hal-hal berdampak negatif terhadap lingkungan dari semua aspek operasi korporasi, termasuk dalam penggunaan: - bahan baku; - energi; - penggunaan air; - pemanfaatan sumber daya terbarukan; - pemanfaatan serta rehabilitasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah dan penurunan dampak gas rumah kaca serta emisi karbon. The corporation implements and discloses environmental responsibility by preventing, reducing, and managing negative impacts on the environment from all aspects of corporate operations, including in the use of: - Raw materials; - Energy; - Water usage; - Utilization of renewable resources; - Utilization and rehabilitation of biodiversity, waste management, and reduction of greenhouse gas emissions and carbon emissions.	✓	Sanksi administratif bagi Wajib Lapor yang lalai menyampaikan LHKPN diatur sesuai Pasal 20 UU No. 28 Tahun 1999, berupa penundaan Jasa Produksi. Administrative sanctions for reporting obligors who fail to submit LHKPN are set out under Article 20 of Law No. 28 of 1999, in the form of withholding production incentives.
8.3.1.5	Korporasi melaksanakan dan mengungkapkan kebijakan persaingan yang sehat dengan mengedepankan perilaku bisnis yang etis dan tidak melakukan praktik anti persaingan untuk mendapatkan atau melindungi posisi pasar. The corporation implements and discloses a policy on fair competition by prioritizing ethical business behavior and refraining from engaging in anti-competitive practices to gain or protect market positions.	✓	Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan diungkapkan secara transparan dalam Laporan Tahunan per 31 Desember 2025. The compliance level for LHKPN submission by Company officials is disclosed transparently in the Annual Report as of December 31, 2025.

No.	Uraian Description	Penerapan/ Penjelasan Apply/ Explain	Keterangan Penerapan Implementation
8.3.1.6	Direksi memiliki kebijakan guna melindungi hak para kreditor. a. Dewan Komisaris mengawasi dan Direksi memonitor likuiditas dan solvabilitas keuangan korporasi. b. Direksi memastikan bahwa risiko terhadap posisi keuangan atau kesulitan keuangan segera teridentifikasi, dikelola, dimitigasi serta dilaporkan. Dewan Komisaris memantau penanganan Direksi atas risiko atau kesulitan keuangan dan menerima laporan rutin. The Board of Directors has a policy to protect the rights of creditors. a. The Board of Commissioners oversees, and the Board of Directors monitors the liquidity and financial solvency of the corporation. b. The Board of Directors ensures that risks to the financial position or financial difficulties are promptly identified, managed, mitigated, and reported. The Board of Commissioners monitors the Board of Directors' handling of financial risks or difficulties and receives regular reports.	✓	PERURI menyampaikan transparansi LHKPN pejabat Perusahaan sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan implementasi GCG. PERURI discloses LHKPN transparency for Company officials as part of its commitment to the continuous implementation of GCG.
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritizes sustainability.	✓	PERURI mengimplementasikan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (WBS) sebagai sarana pelaporan aman bagi seluruh pemangku kepentingan. PERURI implements a Whistleblowing System (WBS) as a secure reporting channel for all stakeholders.
8.3.2.1	Korporasi memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan. The corporation has a policy of providing long-term incentives to employees, which encourages the creation of sustainable value.	✓	Pedoman operasional WBS diatur dalam Risk Management and Compliance Manual dengan evaluasi dan pembaruan oleh SPI. Operational guidelines for the WBS are set out in the Risk Management and Compliance Manual, with evaluation and updates conducted by SPI.
8.3.2.2	Remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan harus memperhatikan unsur risiko, termasuk mengukur imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko (<i>risk-adjusted return</i>), untuk memastikan bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk pengambilan risiko yang tidak diinginkan. Performance-based remuneration for employees should take into account risk elements, including measuring risk-adjusted returns, to ensure that no incentives are given for unwanted risk-taking.	✓	PERURI memberikan perlindungan kerahasiaan identitas dan keamanan kepada Pelapor WBS yang bertindak dengan itikad baik. PERURI provides confidentiality protection and security to WBS reporters acting in good faith.
8.3.2.3	Direksi mengelola dengan baik benturan kepentingan yang mungkin timbul antara karyawan sebagai penerima manfaat dana pensiun dengan korporasi sebagai pengelola dana pensiun. The Board of Directors manages potential conflicts of interest that may arise between employees as beneficiaries of the pension fund and the corporation as the manager of the pension fund.	✓	PERURI memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada Pelapor atas tindakan balasan dari pihak terlapor. PERURI provides legal assistance and protection to reporters against retaliatory actions from the reported party.
8.3.2.4	Direksi memastikan korporasi memiliki program pengembangan dan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk memastikan bahwa korporasi memiliki karyawan dalam jumlah yang memadai dan yang berpengetahuan, terampil, dan berpengalaman. The Board of Directors ensures that the corporation has an effective human resources development and management program to ensure that the corporation has an adequate number of knowledgeable, skilled, and experienced employees.	✓	Sepanjang 2025, tercatat 2 laporan diterima melalui saluran WBS dengan klasifikasi dan tindak lanjut yang transparan. Throughout 2025, 2 reports were received through the WBS channel, with transparent classification and follow-up.
8.3.2.5	Pada saat mengisi posisi manajerial dalam korporasi, Direksi mempertimbangkan unsur keberagaman, nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender. Kebijakan keberagaman tersebut disertai dengan tujuan yang terukur. When filling managerial positions within the corporation, the Board of Directors considers diversity, non-discrimination, and provides equal opportunities to all candidates regardless of ethnicity, religion, race, social status, and gender. This diversity policy is accompanied by measurable objectives.	✓	Pengelolaan WBS melibatkan koordinasi SPI dengan unit bisnis, SDM, dan unit penanganan fraud untuk memastikan tindak lanjut sesuai prosedur. WBS management involves coordination among SPI, business units, HR, and the fraud-handling unit to ensure follow-up in accordance with procedures.



Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecards (ACGS)

Implementation of Asean Corporate Governance Scorecards (ACGS)

No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
A. Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders			
A.1	Hak-Hak Dasar Pemegang Saham/ Basic Shareholder Rights	A.1.1 PERURI melakukan pembagian dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu, yaitu seluruh pemegang saham diperlakukan sama dan dividen dibayarkan dalam kurun waktu 30 hari sejak (i) pengumuman dividen interim dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen final	Does PERURI pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case PERURI has offered Scrip dividend, did PERURI paid the dividend within 60 days.
			PERURI sebagai Perusahaan Umum yang seluruh modalnya dimiliki negara, tidak memiliki pemegang saham publik. Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan persetujuan Kementerian BUMN selaku pemilik modal. As a Public Corporation wholly owned by the state, PERURI does not have any public shareholders. The distribution of business profits is carried out fairly and in a timely manner in accordance with applicable laws and regulations, and with the approval of the Ministry of State-Owned Enterprises as the shareholder representative.
A.2	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings	A.2.1 Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan dengan mata acara, untuk menyetujui remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dalam bentuk barang dan jasa, dan emolumen lainnya) atau peningkatan remunerasi untuk direktur/komisaris non-eksekutif? A.2.2 Apakah PERURI memberikan hak kepada pemegang saham non-pengendali untuk mencalonkan kandidat direksi/komisaris? A.2.3 Apakah PERURI mengizinkan pemegang saham untuk memilih direktur/komisaris secara individu? A.2.4 Apakah PERURI mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum dimulainya rapat? A.2.5 Apakah notulen RUPST terakhir mencatat bahwa para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham dan jawaban yang diberikan dicatat? A.2.6 Apakah PERURI mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk semua resolusi/ tiap mata acara RUPST terakhir? A.2.7 Apakah PERURI mengungkapkan daftar anggota dewan yang menghadiri RUPST terakhir? A.2.8 Apakah PERURI mengungkapkan bahwa semua anggota dewan dan CEO (jika dia bukan anggota dewan) menghadiri RUPST terakhir?	Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/ commissioners? Does PERURI provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/ commissioners? Does PERURI allow shareholders to elect directors/ commissioners individually? Does PERURI disclose the voting procedures used before the start of meeting? Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded? Does PERURI disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM? Does PERURI disclose the list of board members who attended the most recent AGM? Does PERURI disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM?
			2.1 Tidak berlaku karena PERURI adalah Perusahaan Umum, bukan Perseroan Terbatas yang memiliki pemegang saham publik. Hak pengambilan keputusan ada pada Pemerintah selaku pemilik modal melalui Kementerian BUMN. A.2.2 Tidak berlaku, karena seluruh pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan pengawas dilakukan oleh Menteri BUMN sebagai wakil pemilik modal. A.2.3 Tidak berlaku untuk PERURI. A.2.4 Tidak berlaku untuk PERURI. A.2.5 Tidak berlaku karena PERURI tidak menyelenggarakan RUPST sebagaimana persero terbuka. A.2.6 Tidak berlaku untuk PERURI. A.2.7 Tidak berlaku untuk PERURI. A.2.8 Tidak berlaku untuk PERURI. A.2.9 Tidak berlaku untuk PERURI. A.2.10 Tidak berlaku untuk PERURI. A.2.11 Tidak berlaku untuk PERURI. A.2.12 Tidak berlaku untuk PERURI. A.2.13 Tidak berlaku untuk PERURI. A.2.14 Tidak berlaku untuk PERURI. A.2.15 Tidak berlaku untuk PERURI.

No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
		A.2.9 Apakah PERURI mengizinkan pemungutan suara secara in absentia? A.2.10 Apakah PERURI melakukan pemungutan suara melalui jajak pendapat (bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua resolusi pada RUPST terakhir? A.2.11 Apakah PERURI mengungkapkan bahwa PERURI telah menunjuk pihak independen (pengawas/pemeriksa) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara pada RUPST? A.2.12 Apakah PERURI menyediakan kepada publik pada hari kerja berikutnya hasil pemungutan suara yang diambil dalam RUPST/RUPSLB terakhir untuk semua resolusi? A.2.13 Apakah PERURI memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari sebelumnya untuk semua RUPST dan RUPSLB? A.2.14 Apakah PERURI memberikan alasan dan penjelasan untuk setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemberitahuan RUPST/surat edaran dan/atau pernyataan yang menyertainya? A.2.15 Apakah PERURI memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memasukkan item-item dalam agenda rapat umum dan/atau meminta rapat umum dengan persentase tertentu?	A.2.1 Not applicable since PERURI is a Public Company, not a Limited Liability Company that has public shareholders. The decision-making rights lie with the Government as the capital owner through the Ministry of SOEs. A.2.2 Not applicable, because all appointments and dismissals of directors and supervisory boards are carried out by the Minister of State-Owned Enterprises as the representative of the capital owner. A.2.3 Not valid for PERURI. A.2.4 Not valid for PERURI. A.2.5 Not applicable, as PERURI does not hold a General Meeting of Shareholders (RUPST) like publicly listed companies. A.2.6 Not valid for PERURI. A.2.7 Not valid for PERURI. A.2.8 Not valid for PERURI. A.2.9 Not valid for PERURI. A.2.10 Not valid for PERURI. A.2.11 Not valid for PERURI. A.2.12 Not valid for PERURI. A.2.13 Not valid for PERURI. A.2.14 Not valid for PERURI. A.2.15 Not valid for PERURI.
A.3	Pasar untuk kontrol PERURI harus diizinkan untuk berfungsi dengan cara yang efisien dan transparan Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner	A.3.1 Dalam kasus merger, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah direksi/komisaris PERURI menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran harga transaksi?	In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders' approval, does the board of directors/commissioners of PERURI appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price? Seluruh aksi korporasi termasuk merger, akuisisi, ataupun aksi korporasi lainnya, PERURI menjalankan sesuai dengan Rapat Pembahasan Bersama (RPB). Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas transaksi, PERURI dapat menggunakan pihak independen. All corporate actions, including mergers, acquisitions, or other corporate activities, are carried out by PERURI in accordance with the Joint Deliberation Meeting (Rapat Pembahasan Bersama or RPB). In evaluating the fairness of such transactions, PERURI may engage independent parties.
A.4	Pelaksanaan hak kepemilikan oleh semua pemegang saham, termasuk investor institusional, harus difasilitasi The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated	A.4.1 Apakah PERURI mengungkapkan praktiknya untuk mendorong para pemegang saham untuk terlibat dengan PERURI di luar rapat umum?	Does PERURI disclose its practices to encourage shareholders to engage with PERURI beyond general meetings? PERURI bukan merupakan perusahaan publik, sehingga tidak berlaku di PERURI. As PERURI is not a publicly listed company, the related provisions applicable to public companies do not apply to PERURI.
A.5	Saham dan hak suara Shares and voting rights	A.5.1 Jika PERURI memiliki lebih dari satu kelas saham, apakah PERURI mempublikasikan hak suara yang melekat pada setiap kelas saham (misalnya, melalui situs web PERURI/laporan/bursa efek/situs web regulator)?	Where PERURI has more than one class of shares, does PERURI publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g., through PERURI website/reports/the stock exchange/the regulator's website)? PERURI bukan merupakan perusahaan publik, sehingga tidak berlaku di PERURI. As PERURI is not a publicly listed company, the related provisions applicable to public companies do not apply to PERURI.



No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
A.6	Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Notice of AGM	A.6.1 Apakah setiap resolusi yang diajukan dalam rapat umum tahunan terakhir hanya membahas satu mata acara saja, dengan kata lain, tidak ada penggabungan beberapa mata acara ke dalam satu resolusi yang sama?	A.6.1 PERURI tidak melaksanakan RUPS namun Rapat Pembahasan Bersama (RPB) untuk membahas secara mendalam berbagai isu strategis, kinerja operasional, serta rencana jangka panjang perusahaan. Dalam rapat tersebut, Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham diwakili oleh Kementerian BUMN yang juga memberikan arahan terhadap perkembangan PERURI. A.6.2 Pemberitahuan terkait RPB PERURI disajikan dalam Bahasa Indonesia saja. A.6.3 Tidak berlaku di PERURI A.6.4 Tidak berlaku di PERURI A.6.5 Tidak berlaku di PERURI A.6.1 PERURI does not conduct a General Meeting of Shareholders (GMS) but instead holds a Joint Deliberation Meeting (Rapat Pembahasan Bersama or RPB) to thoroughly discuss various strategic issues, operational performance, and the company's long-term plans. In these meetings, the Government of the Republic of Indonesia, as the shareholder, is represented by the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN), which also provides directives regarding PERURI's development. A.6.2 Notifications related to PERURI's RPB are presented in Bahasa Indonesia only. A.6.3 Not applicable to PERURI A.6.4 Not applicable to PERURI A.6.5 Not applicable to PERURI
		A.6.2 Apakah pemberitahuan RUPST/ sirkular terbaru PERURI sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal?	
		A.6.3 Apakah pemberitahuan RUPST/ sirkular memiliki rincian sebagai berikut: Apakah profil direktur/ komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman, dan jabatan direktur di PERURI terbuka lainnya) yang akan mencalonkan diri untuk dipilih/dipilih kembali telah dicantumkan?	
		A.6.4 Apakah auditor yang mengajukan penunjukan/penunjukan kembali diidentifikasi dengan jelas?	
		A.6.5 Apakah dokumen kuasa tersedia dengan mudah?	
A.7	Perdagangan orang dalam dan perdagangan sendiri yang kejam harus dilarang Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited	A.7.1 Apakah direktur/komisaris diwajibkan untuk melaporkan transaksi mereka dalam saham PERURI dalam waktu 3 hari kerja?	Tidak berlaku di PERURI Not applicable to PERURI
A.8	Transaksi pihak terkait oleh direktur dan eksekutif kunci Related party transactions by directors and key executives	A.8.1 Apakah PERURI memiliki kebijakan yang mewajibkan komite yang terdiri dari direktur/ komisaris independen untuk meninjau RPT yang bersifat material untuk menentukan apakah RPT tersebut sesuai dengan kepentingan PERURI dan pemegang saham?	Pengungkapan RPT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditinjau kewajarannya sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. The disclosure of Related Party Transactions (RPT) has been carried out in accordance with the prevailing regulations and has been reviewed for fairness, as stated in the financial statements audited by a Public Accounting Firm

No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
A.8.2	Apakah PERURI memiliki kebijakan yang mengharuskan anggota dewan (direktur/komisaris) untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi dewan mengenai agenda tertentu ketika mereka memiliki konflik kepentingan?	Does PERURI have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	PERURI telah memiliki kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan dapat mengacu pada beberapa pengaturan internal berikut: a. Keputusan No.: KEP-6/VIII/2021 Tentang Board Of Director Charter (Pedoman Kerja Direksi) PERURI, pada Bab II Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Direksi khususnya pada Bagian Q.2 diatur terkait benturan kepentingan (butir a) dan larangan untuk anggota Direksi (butir b). b. Risk Management & Compliance Manual, No. Dokumen: 02/RMC/DU-DK/X/2017 Revisi 4 Tanggal 28/11/2022. Khususnya Bab 10.4 Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi. PERURI has established policies and mechanisms to prevent Directors and structural officials from deriving personal or third-party gains due to conflicts of interest, which are regulated in the following internal provisions: a. Decree No. KEP-6/VIII/2021 on the Board of Director Charter (PERURI's Guidelines for Directors' Duties), particularly in Chapter II on the Duties, Authorities, and Obligations of the Board of Directors, specifically Section Q.2 which outlines provisions related to: (a) Conflict of interest; and (b) Prohibitions for members of the Board of Directors. b. Risk Management & Compliance Manual, Document No. 02/RMC/DU-DK/X/2017 Revision 4 dated November 28, 2022, particularly Chapter 10.4 which stipulates the Prohibition Against Deriving Personal Gains.
A.8.3	Apakah PERURI memiliki kebijakan tentang pinjaman kepada direktur dan komisaris yang melarang praktik ini atau memastikan bahwa pinjaman tersebut dilakukan atas dasar kewajaran dan dengan harga pasar?	Does PERURI have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	Tidak berlaku di PERURI Not applicable to PERURI
A.9	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan-tindakan yang tidak semestinya Protecting minority shareholders from abusive actions	A.9.1 Apakah PERURI mengungkapkan bahwa RPT dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa mereka adil dan terbuka?	Pengungkapan RPT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditinjau kewajarannya sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. The disclosure of Related Party Transactions (RPT) has complied with the applicable regulations and has been reviewed for fairness, as stated in the financial statements audited by the Public Accounting Firm.



No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
A.9.2	Dalam hal transaksi pihak terkait yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan?	In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?	Pengungkapan dan keputusan transaksi pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditinjau kewajarannya sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. The disclosure and decision-making related to related party transactions have complied with applicable regulations and have been reviewed for fairness, as disclosed in the financial statements audited by the Public Accounting Firm.
C. Sustainability and Resilience			
C.1	Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material retrospektif dan berwawasan ke depan yang dianggap penting oleh investor yang masuk akal dalam membuat keputusan investasi atau pengambilan suara. Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable, and reliable, and include retrospective and forward-looking material information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision.	C.1.1 Informasi material terkait Keberlanjutan harus disebutkan secara spesifik. Apakah PERURI mengidentifikasi/melaporkan topik-topik ESG yang penting bagi strategi organisasi? C.1.2 Apakah PERURI mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah isu? C.1.3 Apakah PERURI mengadopsi kerangka kerja atau standar pelaporan yang diakui secara internasional untuk keberlanjutan (misalnya, GRI, Pelaporan Terpadu, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)? C.1.4 Apakah PERURI mengungkapkan keberlanjutan kuantitatif?	PERURI telah mengungkapkan informasi material secara spesifik beserta proses untuk menentukan topik material, landasan penentuannya, matriks signifikansinya, serta batasannya. PERURI has disclosed material information in a specific manner, including the process for determining material topics, the underlying basis for their identification, the significance matrix, and the defined boundaries. PERURI mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah isu dan mengelolanya melalui manajemen risiko Perusahaan. PERURI juga telah melakukan evaluasi serta mengimplementasikan mitigasi yang diperlukan. PERURI identifies climate change as a critical issue and addresses it through the Company's risk management framework. The Company has also conducted evaluations and implemented the necessary mitigation measures. PERURI mengadopsi kerangka kerja dan standar pelaporan yang diakui secara internasional, yaitu GRI, IFRS, dan TCFD serta menyusun Laporan Keberlanjutan 2025 dengan mengacu pada kerangka tersebut. PERURI has adopted internationally recognized reporting frameworks and standards, namely GRI, IFRS, and TCFD, and prepared the 2025 Sustainability Report with reference to these frameworks. PERURI mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif, terutama melalui Blueprint PERURI Hijau. Pada Laporan Keberlanjutan 2025, PERURI mengungkapkan pencapaian Roadmap Keberlanjutan beserta status implementasinya secara komprehensif. PERURI discloses quantitative sustainability targets, primarily through the PERURI Hijau Blueprint. In the 2025 Sustainability Report, PERURI comprehensively presents the achievements of its Sustainability Roadmap along with the status of its implementation.

No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
C.1.5	Apakah PERURI mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan sehubungan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya?	PERURI Does PERURI disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets?	PERURI mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan dalam bentuk perbandingan kinerja minimal 2 tahun berturut-turut dan pencapaian target yang telah ditetapkan pada Blueprint PERURI Hijau. Kemajuan yang dicatatkan diantaranya pencapaian efisiensi energi, inovasi, dan perkembangan positif yang berhasil dicapai dalam aspek-aspek keberlanjutan. PERURI discloses progress on its sustainability performance through year-over-year comparisons for at least two consecutive years, as well as the achievement of targets set forth in the PERURI Hijau Blueprint. The recorded progress includes energy efficiency achievements, innovations, and positive developments attained in various sustainability aspects.
C.1.6	Apakah PERURI mengkonfirmasi bahwa Laporan Keberlanjutan/ Pelaporannya ditinjau dan/ atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan?	PERURI Does PERURI confirm that its Sustainability Report / Reporting is reviewed and / or approved by the Board or Board Committee?	PERURI mengkonfirmasi bahwa Laporan Keberlanjutan ditinjau dan disetujui oleh Badan Governansi tertinggi sebelum dipublikasikan kepada pemangku kepentingan. PERURI confirms that the Sustainability Report is reviewed and approved by the highest governance body prior to its publication to stakeholders.
C.2	Kerangka kerja tata kelola PERURI harus memungkinkan dialog antara PERURI, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai masalah-masalah keberlanjutan Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders, and stakeholders to exchange views on sustainability matters	C.2.1 Apakah PERURI melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai hal-hal keberlanjutan yang penting bagi bisnis PERURI? Does PERURI engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of PERURI?	PERURI senantiasa melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai hal-hal keberlanjutan yang penting bagi bisnis sebagaimana diungkapkan pada subbab Pelibatan Pemangku kepentingan, tersedianya Lembar Umpan Balik pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. PERURI consistently engages internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business, as disclosed in the Stakeholder Engagement subsection. This includes the availability of a Feedback Sheet in the Company's Sustainability Report and an accessible grievance mechanism for stakeholders.



No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
C.2.2	Apakah PERURI melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai hal-hal keberlanjutan yang penting bagi bisnis PERURI?	Does PERURI engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of PERURI?	PERURI senantiasa melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai hal-hal keberlanjutan yang penting bagi bisnis sebagaimana diungkapkan pada subbab Pelibatan Pemangku kepentingan, tersedianya Lembar Umpan Balik pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. PERURI consistently engages external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability issues that are material to the business, as disclosed in the Stakeholder Engagement subsection. This includes the availability of a Feedback Sheet in the Company's Sustainability Report and an accessible grievance mechanism for stakeholders.
C.3	Kerangka kerja tata kelola PERURI harus memastikan bahwa dewan direksi secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika memenuhi fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau, dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan informasi, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk sehubungan dengan risiko fisik dan transisi yang berkaitan dengan iklim. The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate-related physical and transition risks	C.3.1 Apakah PERURI mengungkapkan bahwa dewan komisaris dan direksi meninjau setiap tahun apakah struktur modal dan utang PERURI sudah sesuai dengan tujuan strategis PERURI dan risk appetite yang terkait?	PERURI mengungkapkan bahwa Dewan Pengawas dan Direksi meninjau setiap tahun struktur modal dan utang, dan dianggap telah sesuai dengan tujuan strategis serta risk appetite terkait. PERURI discloses that the Supervisory Board and the Board of Directors conduct an annual review of the Company's capital and debt structure. This review is deemed aligned with the Company's strategic objectives and corresponding risk appetite.
C.4	Kerangka kerja tata kelola PERURI harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara PERURI dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan PERURI yang sehat secara finansial. The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active cooperation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises.	Apakah PERURI mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas:	Does PERURI disclose a policy and practices that address:

No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
C.4.1	Keberadaan dan cakupan upaya PERURI untuk menangani kesejahteraan pelanggan?	The existence and scope of PERURI's efforts to address customers' welfare?	PERURI secara komprehensif mengungkapkan kebijakan, praktik, dan evaluasi atas implementasi kebijakan yang membahas kesejahteraan pelanggan pada subbab PERURI untuk Pelanggan. PERURI provides a comprehensive disclosure of its policies, practices, and evaluations regarding the implementation of policies related to customer well-being in the subsection PERURI for Customers.
C.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor?	Supplier/contractor selection procedures?	PERURI mengungkapkan prosedur pemilihan pemasok, pelibatan pemasok, serta evaluasi pemasok pada subbab PERURI untuk Indonesia. PERURI discloses its supplier selection procedures, supplier engagement, and supplier evaluation in the subsection PERURI for Indonesia.
C.4.3	Upaya PERURI untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan?	PERURI's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	PERURI mengungkapkan upaya untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui SOP Pemilihan Pemasok dan evaluasi pemasok berdasarkan kriteria sosial dan lingkungan. PERURI discloses its efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or aligned with the promotion of sustainable development through the implementation of the Supplier Selection SOP and supplier evaluations based on social and environmental criteria.
C.4.4	Upaya PERURI untuk berinteraksi dengan masyarakat di mana mereka beroperasi?	PERURI's efforts to interact with the communities in which they operate?	PERURI secara komprehensif mengungkapkan upaya yang dilakukan untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar area operasi dalam subbab PERURI untuk Masyarakat. PERURI comprehensively discloses the efforts undertaken to engage with communities surrounding its operational areas in the subsection titled PERURI for the Community.
C.4.5	Program dan prosedur anti-korupsi PERURI?	PERURI's anti-corruption programmes and procedures?	PERURI mengungkapkan program dan prosedur antikorupsi, upaya penegakannya, sosialisasinya, serta ketersediaan sarana pelaporan. PERURI discloses its anti-corruption programs and procedures, enforcement efforts, outreach initiatives, and the availability of reporting mechanisms.
C.4.6	Bagaimana hak-hak kreditur dilindungi?	How are creditors' rights safeguarded?	Tidak berlaku di PERURI Not applicable to PERURI
C.4.7	Apakah PERURI memiliki laporan/bagian terpisah yang membahas upaya-upaya PERURI dalam isu-isu lingkungan/ekonomi dan sosial?	Does PERURI have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?	PERURI memiliki laporan terpisah yang membahas upaya-upaya dalam isu-isu lingkungan/ekonomi dan sosial yaitu Laporan Keberlanjutan dan Laporan TJSL. PERURI has issued separate reports addressing environmental, economic, and social issues, namely the Sustainability Report and the TJSL (Social and Environmental Responsibility) Report.



No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
C.5	Ketika kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights	C.5.1 Apakah PERURI menyediakan rincian kontak melalui situs web PERURI atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (misalnya, pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyuarkan keprihatinan dan/atau pengaduan atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka?	Does PERURI provide contact details via PERURI's website or Annual Report which stakeholders (e.g., customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights? PERURI menyediakan rincian kontak melalui situs web PERURI atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum, untuk menyuarkan keprihatinan dan/atau pengaduan atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka. PERURI provides contact details on its official website and in the Annual Report, which stakeholders—including customers, suppliers, and the general public—can use to raise concerns and/or complaints regarding potential violations of their rights.
C.6	Mekanisme untuk partisipasi karyawan harus diizinkan untuk berkembang Mechanisms for employee participation should be permitted to develop	C.6.1 Apakah PERURI secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawannya? C.6.2 Apakah PERURI secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya? C.6.3 Apakah PERURI memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja PERURI di luar ukuran keuangan jangka pendek?	Does PERURI explicitly disclose the policies and practices on health, safety, and welfare for its employees? PERURI secara eksplisit dan komprehensif mengungkapkan kebijakan dan praktik kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan melalui subbab PERURI untuk Karyawan. PERURI explicitly and comprehensively discloses its employee health, safety, and well-being policies and practices through the "PERURI for Employees" subsection. Does PERURI explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees? PERURI secara eksplisit dan komprehensif mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya melalui subbab PERURI untuk Karyawan. PERURI explicitly and comprehensively discloses its policies and practices on employee training and development programs in the same "PERURI for Employees" subsection. Does PERURI have a reward/compensation policy that accounts for the performance of PERURI beyond short-term financial measures? PERURI memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja PERURI di luar ukuran keuangan jangka pendek sebagaimana diatur melalui kebijakan remunerasi dan fasilitas yang disediakan untuk insan PERURI. PERURI has implemented a compensation policy that takes into account performance beyond short-term financial metrics, as stipulated in its remuneration policy and the benefits provided to PERURI personnel.
C.7	Pemangku kepentingan termasuk karyawan perorangan dan badan perwakilan mereka, harus dapat secara bebas mengomunikasikan keprihatinan mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada dewan dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan untuk melakukan hal ini Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this	C.7.1 Apakah PERURI memiliki kebijakan whistle blowing yang mencakup prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis dan memberikan rincian kontak melalui situs web PERURI atau laporan tahunan?	Does PERURI have a whistle blowing policy which includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behaviour and provide contact details via PERURI's website or annual report PERURI telah memiliki kebijakan whistle blowing yang mencakup prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis dan memberikan rincian kontak melalui situs web PERURI, Laporan Tahunan, dan Laporan Keberlanjutan. PERURI has established a whistleblowing policy that includes procedures for employees and other stakeholders to report suspected illegal or unethical behavior, with contact information available on PERURI's website, Annual Report, and Sustainability Report.

No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
C.7.2	Apakah PERURI memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkapkan dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan pembalasan?	Does PERURI have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behaviour from retaliation?	PERURI telah memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkapkan dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan pembalasan melalui kebijakan perlindungan pelapor dalam sistem whistleblowing dan melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 yang mengatur kebijakan no kickback. PERURI has also implemented policies or procedures to protect whistleblowers from retaliation, including a whistleblower protection policy embedded in its whistleblowing system and through its Anti-Bribery Management System based on ISO 37001:2016, which includes a strict no-kickback policy.
D. Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency			
D.1	Struktur kepemilikan yang transparan Transparent ownership structure	D.1.1 Apakah informasi mengenai kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik manfaat, yang memiliki kepemilikan saham 5% atau lebih?	Telah diungkapkan dalam laporan tahunan pada Bab Profil Perusahaan bagian Komposisi Pemegang Saham This has been disclosed in the Annual Report under the Company Profile chapter, in the Shareholder Composition section
		D.1.2 Apakah PERURI mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari pemegang saham utama dan/atau substansial?	
		D.1.3 Apakah PERURI mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari para direktur (komisaris)?	
		D.1.4 Apakah PERURI mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari manajemen senior?	
		D.1.5 Apakah PERURI mengungkapkan rincian PERURI induk/induk, anak PERURI, PERURI asosiasi, PERURI patungan, dan PERURI/PERURI dengan tujuan khusus (SPE) atau special purpose vehicle (SPV)?	
D.2	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report	Apakah laporan tahunan PERURI mengungkapkan hal-hal berikut:	Does PERURI's annual report disclose the following items:
		D.2.1 Tujuan PERURI	Corporate objectives Telah diungkapkan dalam laporan tahunan pada Bab Profil Perusahaan bagian Visi dan Misi PERURI Disclosed in the Annual Report under the Company Profile chapter, Vision and Mission section
		D.2.2 Indikator kinerja keuangan	Financial indicators performance Telah diungkapkan dalam laporan tahunan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen bagian Tinjauan Keuangan Disclosed in the Annual Report under the Management Discussion and Analysis chapter, Financial Review section
		D.2.3 Indikator kinerja non-keuangan	Non-financial indicators performance Telah diungkapkan dalam laporan tahunan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen bagian Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Disclosed in the Annual Report under the Management Discussion and Analysis chapter, Operational Review by Business Segment section



No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
	D.2.4 Kebijakan dividen	Dividend policy	Telah diungkapkan dalam laporan tahunan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen bagian Kebijakan Dividen . Disclosed in the Annual Report under the Management Discussion and Analysis chapter, Dividend Policy section.
	D.2.5 Rincian biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman yang relevan, dan jabatan direktur lainnya di PERURI terbuka) dari semua direktur/komisaris	Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of all directors/commissioners	Telah diungkapkan dalam laporan tahunan pada Bab Profil Perusahaan bagian Profil Dewan Pengawas dan Direksi. Disclosed in the Annual Report under the Company Profile chapter, Supervisory Board and Board of Directors Profile section.
	D.2.6 Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola PERURI Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasi kepatuhan penuh PERURI terhadap kode tata kelola PERURI dan jika terdapat ketidakpatuhan, identifikasi dan jelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut?	Corporate Governance Confirmation Statement Does the Annual Report contain a statement confirming PERURI's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	PERURI telah memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan tidak ada ketidakpatuhan yang terjadi pada periode pelaporan. PERURI has ensured compliance with applicable regulations, with no non-compliance occurring during the reporting period.
D.3 Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Kunci Remuneration of Members of the Board and Key Executives	D.3.1 Apakah ada pengungkapan struktur biaya untuk direktur/komisaris non-eksekutif?	Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	Telah diungkapkan dalam laporan tahunan pada Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, Remuneration of the Supervisory Board and Board of Directors section
	D.3.2 Apakah PERURI mengungkapkan secara terbuka [yaitu, laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi setiap direktur/komisaris non-eksekutif?	Does PERURI publicly disclose [i.e., annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non-executive director/commissioner?	
	D.3.3 Apakah PERURI mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan natura dan emolumen lainnya) untuk direktur eksekutif dan CEO (misalnya penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang serta ukuran kinerja)?	Does PERURI disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e., the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	
	D.3.4 Apakah PERURI mengungkapkan kepada publik [yaitu, laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing direktur eksekutif dan CEO [jika dia bukan anggota Dewan]?	Does PERURI publicly disclose [i.e., annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/she is not a member of the Board]?	
D.4 Pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi (RPT) Disclosure of related party transactions (RPT)	D.4.1 Apakah PERURI mengungkapkan kebijakannya yang mencakup tinjauan dan persetujuan atas RPT yang material?	Does PERURI disclose its policy covering the review and approval of material RPTs?	Telah diungkapkan dalam laporan tahunan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen bagian Informasi Transaksi Pihak Berelasi Disclosed in the Annual Report under the Management Discussion and Analysis chapter, Related Party Transactions section
	D.4.2 Apakah PERURI mengungkapkan nama, hubungan, sifat, dan nilai untuk setiap RPT yang material?	Does PERURI disclose the name, relationship, nature and value for each material RPTs?	
D.5 Transaksi direktur dan komisaris dalam saham PERURI Directors and commissioners dealings in shares of PERURI	D.5.1 Apakah PERURI mengungkapkan perdagangan saham PERURI oleh orang dalam?	Does PERURI disclose trading in PERURI's shares by insiders?	Tidak berlaku di PERURI Not applicable to PERURI

No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
D.6	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor External auditor and Auditor Report	D.6.1 Apabila PERURI audit yang sama digunakan untuk layanan audit dan non-audit	Where the same audit firm is engaged for both audit and non-audit services
		D.6.2 Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	Are the audit and non-audit fees disclosed?
		D.6.3 Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit?	Does the non-audit fee exceed the audit fees?
D.7	Media Komunikasi Medium of communications	Apakah PERURI menggunakan mode komunikasi berikut ini?	Does PERURI use the following modes of communication?
		D.7.1 Pelaporan triwulanan	Quarterly reporting
		D.7.2 Situs web PERURI	Company website
		D.7.3 Pengarahan analis	Analyst's briefing
		D.7.4 Pengarahan media/konferensi pers	Media briefings /press conferences
D.8	Pengajuan/penerbitan laporan tahunan/keuangan yang tepat waktu Timely filing/release of annual/financial reports	D.8.1 Apakah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dirilis dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan?	Are the audited annual financial report / statement released within 120 days from the financial year end?
		D.8.2 Apakah laporan tahunan diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan?	Is the annual report released within 120 days from the financial year end?
		D.8.3 Apakah kebenaran dan kewajaran/keadilan dari laporan keuangan tahunan ditegaskan oleh dewan direksi/komisaris dan/atau pejabat PERURI yang relevan?	Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of PERURI?
D.9	Situs web PERURI Company website	Apakah PERURI memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut ini:	Does PERURI have a website disclosing up-to-date information on the following:
		D.9.1 Laporan keuangan/laporan (triwulanan terbaru)	Financial statements/reports (latest quarterly)
		D.9.2 Materi yang diberikan dalam pengarahan kepada analis dan media	Materials provided in briefings to analysts and media
		D.9.3 Laporan tahunan yang dapat diunduh	Downloadable annual report
		D.9.4 Pemberitahuan RUPST dan/atau RUPSLB	Notice of AGM and/or EGM
		D.9.5 Risalah RUPST dan/atau RUPSLB	Minutes of AGM and/or EGM
D.10	Hubungan investor Investor relations	D.9.6 Konstitusi PERURI (anggaran dasar, memorandum, dan anggaran rumah tangga PERURI)	Company's constitution (company's by-laws, memorandum, and articles of association)
		D.10.1 Apakah PERURI mengungkapkan rincian kontak (mis. telepon, faks, dan email) dari petugas/kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor?	Does PERURI disclose the contact details (e.g., telephone, fax, and email) of the officer / office responsible for investor relations?



No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
E. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Board Duties and Responsibilities			
E.1	Tanggung jawab dewan direksi dan kebijakan tata kelola PERURI yang jelas Clearly defined board responsibilities and corporate governance policy	E.1.1 Apakah PERURI mengungkapkan kebijakan tata kelola PERURI/piagam dewan? Does PERURI disclose its corporate governance policy/board charter?	Ya, PERURI telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan PERURI yang disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi No.: SK-01/DP/I/2021 dan No.: KEP-01/I/2021 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) Yes, PERURI has established the PERURI Corporate Governance Guidelines, ratified through the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors No.: SK-01/DP/I/2021 and No.: KEP-01/I/2021 concerning the Corporate Governance Guidelines (Code of Corporate Governance)
		E.1.2 Apakah jenis-jenis keputusan yang memerlukan persetujuan dewan direksi/komisaris diungkapkan? Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed?	Ya Yes
		E.1.3 Apakah peran dan tanggung jawab dewan direksi/dewan komisaris dinyatakan dengan jelas? Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated?	Ya Yes
	Visi/Misi PERURI	Corporate Vision/Mission	
	E.1.4 Apakah PERURI memiliki pernyataan visi dan misi yang diperbarui? Does PERURI have an updated vision and mission statement?	Ya, PERURI melakukan review berkala atas visi dan misinya, serta melakukan pembaharuan visi dan misinya Yes, PERURI conducts periodic reviews of its vision and mission, and updates them as necessary	
	E.1.5 Apakah dewan direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi PERURI setidaknya setiap tahun? Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing PERURI's strategy at least annually?	Ya, sesuai yang dengan tugas dan tanggung jawab yang tertera dalam Board of Director Charter Yes, this is in accordance with the duties and responsibilities outlined in the Board of Director Charter	
	E.1.6 Apakah dewan direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau, dan mengawasi pelaksanaan strategi PERURI? Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?	Ya, sesuai yang dengan tugas dan tanggung jawab yang tertera dalam Board of Director Charter Yes, this is in accordance with the duties and responsibilities outlined in the Board of Director Charter	
E.2	Struktur Dewan Board structure	Kode Etik atau Perilaku Code of Ethics or Conduct	Ya, sesuai dengan Pedoman Etika Perilaku (Code of Conduct) yang disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi No.: SK-01/DP/I/2021 dan No.: KEP-01/I/2021 Yes, in accordance with the Code of Conduct as stipulated in the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors No.: SK-01/DP/I/2021 and No.: KEP-01/I/2021
		E.2.1 Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	
		E.2.2 Apakah semua direktur/komisaris, manajemen senior dan karyawan diwajibkan untuk mematuhi kode etik tersebut? Are all directors/commissioners, senior management and employees required to comply with the code/s?	
		E.2.3 Apakah PERURI memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku? Does PERURI have a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct?	

No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
Struktur & Komposisi Dewan		Board Structure & Composition	
E.2.4	Apakah direktur/komisaris independen terdiri dari setidaknya 50% dari dewan direksi/komisaris?	Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners?	Ya, struktur dan komposisi Dewan Pengawas dan Direksi PERURI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Dewan Pengawas dan Direksi. Yes, the structure and composition of PERURI's Supervisory Board and Board of Directors are in accordance with the prevailing regulations. This has also been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Supervisory Board and Board of Directors section.
E.2.5	Apakah PERURI memiliki batas masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 kali masa jabatan masing-masing lima tahun untuk direktur/komisaris independen?	Does PERURI have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years ¹ each for its independent directors/commissioners?	
E.2.6	Apakah PERURI telah menetapkan batas lima kursi dewan yang dapat dijabat oleh seorang direktur/komisaris independen/non-eksekutif secara bersamaan?	Has PERURI set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/commissioner may hold simultaneously?	
E.2.7	Apakah PERURI memiliki direktur eksekutif yang menjabat di lebih dari dua dewan direksi di PERURI terbuka di luar grup?	Does PERURI have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?	
Komite Nominasi		Nominating Committee	
E.2.8	Apakah PERURI memiliki Komite Nominasi?	Does PERURI have a Nominating Committee?	Ya, telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Komite Nominasi dan Remunerasi. Yes, this has been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Nomination and Remuneration Committee section.
E.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direktur/komisaris independen?	Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/commissioners?	
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi adalah direktur/komisaris independen?	Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	
E.2.11	Apakah PERURI mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?	Does PERURI disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Nominating Committee?	
E.2.12	Apakah kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan jika ya, apakah Komite Nominasi bertemu setidaknya dua kali dalam setahun?	Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	
Komite Remunerasi		Remuneration Committee	
E.2.13	Apakah PERURI memiliki Komite Remunerasi?	Does PERURI have a Remuneration Committee?	Ya, telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Komite Nominasi dan Remunerasi. Yes, this has been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Nomination and Remuneration Committee section.
E.2.14	Apakah Komite Remunerasi seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen?	Is the Remuneration Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah direktur/komisaris independen?	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah direktur/komisaris independen?	
E.2.16	Apakah PERURI mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi?	Does PERURI disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Remuneration Committee?	
E.2.17	Apakah kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika ya, apakah Komite Remunerasi mengadakan rapat setidaknya dua kali dalam setahun?	Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	



No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
		Komite Audit Audit Committee	
E.2.18	Apakah PERURI memiliki Komite Audit?	Does PERURI have an Audit Committee?	Ya, telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Komite Audit Ya, telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Komite Audit
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen?	Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit adalah direktur/komisaris independen?	Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	
E.2.21	Apakah PERURI mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Audit?	Does PERURI disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu direktur/komisaris independen memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	
E.2.23	Apakah kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika ya, apakah Komite Audit mengadakan rapat setidaknya empat kali dalam setahun?	Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi mengenai penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal?	Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	
E.3	Proses Dewan Board Processes	Rapat dan Kehadiran Dewan Direksi Board Meetings and Attendance	Rapat Direksi telah dijadwalkan sebelum dimulainya tahun keuangan. Board of Directors meetings were scheduled prior to the beginning of the financial year.
E.3.1	Apakah rapat direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun keuangan?	Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year?	Jajaran Direksi/ Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun The Board of Directors/ Supervisory Board convened meetings at least six times a year
E.3.2	Apakah dewan direksi/komisaris mengadakan rapat setidaknya enam kali dalam setahun?	Does the board of directors/ commissioners meet at least six times during the year?	
E.3.3	Apakah setiap direktur/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun?	Has each of the directors/ commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	Setiap Direktur/Dewan Pengawas menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat yang diadakan sepanjang tahun Hal ini telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Rapat Dewan Pengawas dan Direksi Each Director/Supervisory Board member attended no less than 75% of all meetings held throughout the year. This has been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Board of Directors and Supervisory Board Meetings section
E.3.4	Apakah PERURI mensyaratkan kuorum minimal 2/3 untuk pengambilan keputusan dewan?	Does PERURI require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	
E.3.5	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif PERURI mengadakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa dihadiri oleh para eksekutif?	Did the non-executive directors/commissioners of PERURI meet separately at least once during the year without any executives present?	
		Akses ke Informasi Access to Information	
E.3.6	Apakah risalah rapat dewan direksi/dewan komisaris diberikan kepada dewan direksi/dewan komisaris setidaknya lima hari kerja sebelum rapat dewan direksi/dewan komisaris?	Are the minutes of the board of directors/committees provided to the board of directors/committees at least five business days prior to the board of directors/committee meeting?	Ya Yes

No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
E.3.7	Apakah sekretaris memainkan peran penting dalam mendukung dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya?	PERURI Does PERURI secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	Ya, informasi ini telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Sekretaris Perusahaan Yes, this information has been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Corporate Secretary section
E.3.8	Apakah sekretaris terlatih dalam bidang hukum, akuntansi, atau praktik kesekretariatan PERURI dan selalu mengikuti perkembangan yang relevan?	PERURI Does PERURI secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	
Penunjukan dan Pemilihan Ulang Dewan Komisaris dan Direksi		Board Appointments and Re-Election	
E.3.9	Apakah PERURI mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direktur/komisaris baru?	PERURI Does PERURI disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	Ya, telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Yes, it has been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Nomination and Remuneration Policy section
E.3.10	Apakah PERURI menjelaskan proses yang diikuti dalam menunjuk direktur/komisaris baru?	Did PERURI describe the process followed in appointing new directors/commissioners?	
E.3.11	Apakah semua direktur/komisaris dapat dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk PERURI yang terdaftar di negara yang undang-undangnya menetapkan masa jabatan 5 tahun?	Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years each?	
Masalah Remunerasi		Remuneration Matters	
E.3.12	Apakah pemegang saham atau Dewan Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior?	Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	Ya, telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Yes, it has been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Nomination and Remuneration Policy section
E.3.13	Apakah PERURI memiliki standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang PERURI, seperti ketentuan claw back dan bonus yang ditangguhkan?	Does PERURI have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of PERURI, such as claw back provision and deferred bonuses?	
Audit Internal		Internal Audit	
E.3.14	Apakah PERURI memiliki fungsi audit internal yang terpisah?	Does PERURI have a separate internal audit function?	Ya, telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Satuan Pengawasan Internal Yes, it has been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Internal Audit Unit section
E.3.15	Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama PERURI eksternal diungkapkan?	Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	
E.3.16	Apakah penunjukan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit?	Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	
Pengawasan Risiko		Risk Oversight	
E.3.17	Apakah PERURI menetapkan prosedur pengendalian internal/kerangka kerja manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka kerja tersebut?	Does PERURI establish a sound internal control procedures/ risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	Ya, telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Manajemen Risiko Yes, it has been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Risk Management section
E.3.18	Apakah Laporan Tahunan/ Laporan CG Tahunan mengungkapkan bahwa dewan direksi/komisaris telah melakukan tinjauan atas pengendalian material PERURI (termasuk pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko?	Does the Annual Report/ Annual CG Report disclose that the board of directors/ commissioners has conducted a review of PERURI's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	



No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
E.4	Anggota Dewan People on the Board	E.3.19 Apakah PERURI mengungkapkan risiko-risiko utama yang secara material dihadapi PERURI (misalnya risiko keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)?	Does PERURI disclose the key risks to which PERURI is materially exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?
		E.3.20 Apakah Laporan Tahunan/ Laporan CG Tahunan memuat pernyataan dari dewan direksi/ komisaris atau Komite Audit yang mengomentari kecukupan pengendalian internal/sistem manajemen risiko PERURI?	Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/ commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of PERURI's internal controls/risk management systems?
		Ketua Dewan	Board Chairman
		E.4.1 Apakah ada orang yang berbeda yang berperan sebagai ketua dan CEO?	Do different persons assume the roles of chairman and CEO? Tidak No
		E.4.2 Apakah ketua merupakan direktur/komisaris independen?	Is the chairman an independent director/commissioner? Ya Yes
		E.4.3 Apakah ada direktur yang merupakan mantan CEO PERURI dalam 2 tahun terakhir?	Is any of the directors a former CEO of PERURI in the past 2 years? Tidak No
		E.4.4 Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan?	Are the roles and responsibilities of the chairman disclosed? Ya telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Direksi Yes, this has been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Board of Directors section
		Direktur Independen Utama	Lead Independent Director
		E.4.5 Jika Ketua tidak independen, apakah Dewan telah menunjuk seorang Direktur Independen Utama/Senior dan apakah perannya telah didefinisikan?	If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined? Seluruh anggota Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen All members of the Board of Directors carry out their duties and responsibilities independently
		Keterampilan dan Kompetensi	Skills and Competencies
E.5	Kinerja Dewan Direksi Board Performance	E.4.6 Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non-eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang dijalankan PERURI?	Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that PERURI is operating in? Ya, telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Profil Perusahaan bagian Profil Direksi Yes, this has been disclosed in the Annual Report under the Company Profile chapter, in the Board of Directors Profile section
		Pengembangan Direksi	Directors Development
		E.5.1 Apakah PERURI memiliki program orientasi untuk direktur/komisaris baru?	Does PERURI have orientation programmes for new directors/ commissioners? Ya, telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Direksi (Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Direksi) Yes, this has been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Training and Competency Development for the Board of Directors section

No.	Prinsip Principle	Kriteria Criteria	Halaman Page
E.5.2	Apakah PERURI memiliki kebijakan dan praktik nyata serta program yang mendorong direktur/komisaris untuk menghadiri program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan?	Does PERURI have a policy and actual practice and programs that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	
Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif CEO/Executive Appointments Management and Performance			
E.5.3	Apakah PERURI mengungkapkan proses bagaimana dewan direksi/komisaris merencanakan suksesi CEO/Direktur Utama/Presiden dan manajemen kunci?	Does PERURI disclose the process on how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	Ya, telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Yes, this has been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Nomination and Remuneration Policy section
E.5.4	Apakah dewan direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Direktur Utama/Presiden?	Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	Ya, telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi Yes, this has been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Performance Evaluation of the Board of Supervisors and Board of Directors section
Penilaian Dewan Board Appraisal			
E.5.5	Apakah PERURI melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap dewan direksi/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut?	Did PERURI conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Ya, telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi Yes, this has been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Performance Evaluation of the Board of Supervisors and Board of Directors section
Penilaian Direktur Board Appraisal			
E.5.6	Apakah PERURI melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direktur/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut?	Did PERURI conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Ya, telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi Yes, this has been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Performance Evaluation of the Board of Supervisors and Board of Directors section
Penilaian Komite Committee Appraisal			
E.5.7	Apakah PERURI melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite-komite dewan dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut?	Did PERURI conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Ya, telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Pengawas dan Direksi Yes, this has been disclosed in the Annual Report under the Corporate Governance chapter, in the Performance Evaluation of Committees under the Board of Supervisors and the Board of Directors section



C

S



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social and Environmental Responsibility

Komitmen keberlanjutan PERURI diwujudkan melalui program sosial dan lingkungan yang mendukung pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan penciptaan nilai yang selaras dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

PERURI's sustainability commitment was realized through social and environmental programs that support community empowerment, quality of life improvement, and value creation aligned with stakeholder needs.



Komitmen PERURI Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

PERURI Commitment to Sustainable Development

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban mandat strategis dalam pencetakan dokumen sekuriti serta pengembangan solusi teknologi digital, PERURI menyadari pentingnya peran aktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui integrasi prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam seluruh aktivitas operasional dan arah strategis Perusahaan.

PERURI secara berkesinambungan merancang dan merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan mengacu pada regulasi BP BUMN serta selaras dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Pelaksanaan inisiatif TJSL didasarkan pada nilai-nilai AKHLAK sebagai fondasi budaya kerja BUMN, dengan pendekatan partisipatif yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan.

Sejalan dengan transformasi menjadi penyedia solusi digital terintegrasi, PERURI juga memperkuat komitmen keberlanjutan melalui penerapan inovasi teknologi yang berwawasan lingkungan, peningkatan efisiensi energi, serta pelestarian ekosistem dalam proses bisnis. Implementasi tersebut mencakup upaya pengurangan emisi karbon, optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, serta pengembangan ruang terbuka hijau.

PERURI meyakini bahwa pertumbuhan usaha yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila berjalan selaras dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perlindungan lingkungan. Oleh sebab itu, Perusahaan akan terus mengembangkan inisiatif keberlanjutan yang berdampak nyata, terukur, dan berorientasi jangka panjang, sebagai kontribusi terhadap terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 serta masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.

As a State-Owned Enterprise (SOE) carrying a strategic mandate in the printing of security documents and the development of digital technology solutions, PERURI recognizes the importance of actively contributing to sustainable development. This commitment is realized through the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into all of the Company's operational activities and strategic directions.

PERURI continuously designs and implements Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs by referring to the regulations of the BP BUMNs and aligning them with the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The implementation of TJSL initiatives is based on the AKHLAK values as the foundation of the SOE work culture, with a participatory approach that considers the needs of communities surrounding the Company's operational areas.

In line with its transformation into an integrated digital solutions provider, PERURI also strengthens its sustainability commitment through the implementation of environmentally conscious technological innovations, energy efficiency improvements, and ecosystem preservation in its business processes. These implementations include efforts to reduce carbon emissions, optimize the utilization of renewable energy, manage waste responsibly, and develop green open spaces.

PERURI believes that sustainable business growth can only be achieved when it goes hand in hand with improving the quality of life of communities and protecting the environment. Therefore, the Company will continue to develop sustainability initiatives that deliver tangible, measurable, and long-term impacts as a contribution toward realizing the vision of Golden Indonesia 2045 and an inclusive and sustainable future.

Informasi terkait implementasi program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PERURI telah disajikan secara komprehensif dalam Laporan Keberlanjutan 2025. Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 tersebut disusun dan diterbitkan secara terpisah sebagai dokumen tersendiri yang memuat berbagai informasi mengenai pelaksanaan TJSL Perusahaan.

Information regarding the implementation of PERURI's Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs and activities is comprehensively disclosed in the 2025 Sustainability Report. The 2025 Sustainability Report is prepared and published separately as a standalone document, providing detailed information on the Company's TJSL implementation.

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan PERURI

PERURI Sustainability Performance Highlights

PERURI berhasil mencetak kinerja ekonomi positif pada tahun 2025 berdasarkan parameter nilai ekonomi yang dihasilkan, didistribusikan dan disimpan. Nilai ekonomi yang dihasilkan merupakan sejumlah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan bisnis. Sedangkan, nilai ekonomi yang didistribusikan merupakan sejumlah pengeluaran yang didistribusikan kepada para pemangku kepentingan. Dibandingkan tahun 2024, nilai kinerja ekonomi yang dihasilkan tahun 2025 meningkat sebesar 13,24% dengan nilai mencapai Rp4,40 triliun, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3,88 triliun.

Namun demikian terdapat *value added* baru yang diberikan pada tahun 2025 dimana Perum Peruri mendapatkan penugasan untuk menyelenggarakan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) prioritas sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, selain itu PERURI juga melaksanakan penugasan BGN. Untuk nilai ekonomi yang didistribusikan ke PERURI juga mengalami peningkatan sebesar 9,30% dengan nilai mencapai Rp4,02 triliun dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3,68 triliun. Pada akhir periode pelaporan 2025, PERURI mampu mencatatkan nilai ekonomi yang disimpan sebesar Rp 376,06 miliar.

PERURI achieved positive economic performance in 2025 based on the parameters of generated, distributed, and retained economic value. The generated economic value represents the total revenue generated from business activities, while the distributed economic value represents the total expenditures allocated to stakeholders. Compared to 2024, the generated economic value performance in 2025 increased by 13.24%, reaching Rp4.40 trillion, compared to Rp3.88 trillion in 2024.

Furthermore, new value-added initiatives were introduced in 2025, where Perum Peruri was assigned to develop and operate priority Electronic-Based Government Systems (SPBE) applications in accordance with Presidential Regulation (Perpres) No. 82 of 2023 on the Acceleration of Digital Transformation and Integration of National Digital Services. In addition, PERURI also carried out BGN assignment. The economic value distributed by PERURI also increased by 9.30%, reaching Rp4.02 trillion compared to Rp3.68 trillion in 2024. At the end of the 2025 reporting period, PERURI recorded retained economic value amounting to Rp376.06 billion.





Kinerja Ekonomi Economic Performance

Nilai Ekonomi yang Dihasilkan Economic Value Generated

Dalam Juta Rupiah
In Million Rupiah

2025	4.395.753	13,24%	↑
2024	3.881.885	14,55%	↓
2023	4.542.827	13,85%	↑

Nilai Ekonomi yang Didistribusikan Economic Value Distributed

Dalam Juta Rupiah
In Million Rupiah

2025	4.019.696	9,29%	↑
2024	3.677.839	8,15%	↓
2023	4.004.375	17,45%	↑

Nilai Ekonomi yang Disimpan Economic Value Retained

Dalam Juta Rupiah
In Million Rupiah

2025	376.058	84,30%	↑
2024	204.046	62,11%	↓
2023	538.452	7,26%	↓

Kinerja Lingkungan Environmental Performance

Konsumsi Energi Energy Consumption

Dalam Gigajoule
In Gigajoule

2025	195.345	4,04%	↑
2024	187.765	2,56%	↓
2023	192.707		

Penggunaan Air Permukaan Surface Water Usage

Dalam m³
In m³

2025	212.896	2,33%	↓
2024	217.970	24,64%	↓
2023	289.290		

Emisi* Emission*

Dalam ton CO₂e
In ton CO₂e

2025	45.442	3,67%	↑
2024	43.833	3,34%	↓
2023	45.414		

Timbulan Limbah** Waste Generated**

Dalam ton
In ton

2025	4.980,94	44.89%	↑
2024	3.437,72	8,80%	↑
2023	3.159,7		

Catatan/Note:

* Data tahun 2023 dan 2024 telah disajikan kembali (*restated*) untuk menyesuaikan perubahan cakupan pelaporan konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca, yang kini mencakup data operasional di lokasi Karawang dan Jakarta.
The 2023 and 2024 data have been restated to reflect changes in the reporting boundary for energy consumption and greenhouse gas emissions, which now include operational data from both the Karawang and Jakarta sites.

** Kenaikan volume timbulan limbah terjadi seiring dengan peningkatan pada volume produksi Perusahaan di tahun 2025.
The increase in the volume of waste generated was in line with the Company's higher production volume in 2025.

Kinerja Sosial Social Performance

Rata-Rata Jam Pelatihan Average Training Hours

	Dalam Jam In Hours
2025	63,95
2024	46,06
2023	41,80

Indeks Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction Index

	Dalam Skor In Score
2025	8,1 (<i>satisfied</i>)
2024	7,8 (<i>satisfied</i>)
2023	7,8 (<i>satisfied</i>)

Skor Keterikatan Karyawan Employee Engagement Score

	Dalam Skor In Score
2025	8,31 (<i>engaged</i>)
2024	8,1 (<i>engaged</i>)
2023	8,1 (<i>engaged</i>)

Realisasi Penyaluran Program TJSL Realization of TJSL Program Distribution

	Dalam juta Rupiah In Million Rupiah
2025	5.493
2024	5.397
2023	5.397

Informasi terkait capaian kinerja keberlanjutan PERURI telah disajikan dalam Laporan Keberlanjutan 2025 yang diterbitkan secara terpisah, namun tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini. Penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025 tersebut mengacu pada standar dan pedoman yang berlaku.

- Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017
- Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021
- Standar Global Reporting Initiatives (GRI) dengan opsi sesuai (*in accordance*) Standar GRI 2021

Information regarding PERURI's sustainability performance achievements has been presented in the 2025 Sustainability Report, which is published separately while remaining an integral part of this Annual Report. The preparation of the 2025 Sustainability Report refers to the applicable standards and guidelines, including:

- OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017
- OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021
- Global Reporting Initiative (GRI) Standards with the "in accordance" option under the GRI Standards 2021.



A close-up photograph of a coin counting machine. A red handle is visible on the left side. A pile of silver coins is being processed by the machine. The background is a solid dark blue color.

Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statements

**Perusahaan Umum
Percetakan Uang Republik Indonesia
dan Entitas Anak/
*and Its Subsidiaries***

Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
31 Desember 2025 dan 2024/
*Consolidated Financial Statements
for the Years Ended
December 31, 2025 and 2024*

beserta Laporan Auditor Independen/
with Independent Auditor's Report thereon

Daftar Isi/ Table of Contents

	Halaman/ Page
Surat Pernyataan Direksi/ <i>Directors' Statement</i>	
Laporan Auditor Independen/ <i>Independent Auditor's Report</i>	
Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Consolidated Financial Statements</i>	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Financial Position</i>	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>	5
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>	6 - 112
Lampiran/ <i>Attachment</i>	
Informasi Keuangan Tambahan/ <i>Supplementary Financial Information</i>	I - IV



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
PERUM PERCETAKAN UANG
REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Dwina Septiani Wijaya
Alamat kantor : Jalan Palatehan No. 4 Blok B
K-V Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160
Telepon : 021-7395000
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Fajar Rizki
Alamat kantor : Jalan Palatehan No. 4 Blok B
K-V Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160
Telepon : 021-7395000
Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen
Risiko

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Februari 2026 / February 16, 2026

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors


Dwina Septiani Wijaya
Direktur Utama / President Director


Fajar Rizki
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko /
Finance and Risk Management Director

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENTS
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR
THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
PERUM PERCETAKAN UANG
REPUBLIK INDONESIA AND SUBSIDIARIES**

We, the undersigned :

1. Name : Dwina Septiani Wijaya
Office address : Jalan Palatehan No. 4 Blok B
K-V Kebayoran Baru,
South Jakarta 12160
Telephone : 021-7395000
Title : President Director
2. Name : Fajar Rizki
Office address : Jalan Palatehan No. 4 Blok B
K-V Kebayoran Baru,
South Jakarta 12160
Telephone : 021-7395000
Title : Finance and Risk Management
Director

here by state that :

1. Responsible for the preparation and presentation of Perum Percetakan Uang Republik Indonesia and Subsidiaries' consolidated financial statements;
2. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia and Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in Perum Percetakan Uang Republik Indonesia and Subsidiaries' consolidated financial statements is complete and correct;
b. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia and Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain incorrect material information or facts, and do not omit material information or facts;
4. Responsible for Perum Percetakan Uang Republik Indonesia and Subsidiaries' internal control system.

This statement letter is made truthfully.

Headquarters
Jl. Palatehan No. 4,
Blok K-V, Kebayoran Baru,
Jakarta 12160

Contact
T. 021-7395000 F. 021-7221557
E. contact@peruri.co.id
W. peruri.co.id

Production Area
Desa Panung Mulya,
Kec. Ciampel, Karawang,
Jawa Barat 41361

Handwritten signature/initials

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com**Laporan Auditor Independen**No. : 00157/2.1133/AU.1/11/0259-
3/1/II/2026

Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia

Laporan Audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas, konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's ReportNo. : 00157/2.1133/AU.1/11/0259-
3/1/II/2026

The Owner, Board of Supervisors and Directors

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia

Report on the Audit of the Consolidated
Financial Statements**Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of Perum Percetakan Uang Republik Indonesia and Its Subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respect, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 00157/2.1133/AU.1/11/0259-
3/1/II/2026 (lanjutan)

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

No. : 00157/2.1133/AU.1/11/0259-
3/1/II/2026 (continued)

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Financial Audit Standards issued by the Audit Board of the Republic of Indonesia. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



PKF

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 00157/2.1133/AU.1/11/0259-
3/1/II/2026 (lanjutan)

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak
yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)**

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Independent Auditor's Report (continued)

No. : 00157/2.1133/AU.1/11/0259-
3/1/II/2026 (continued)

***Responsibilities of Management and Those
Charged with Governance for the
Consolidated Financial Statements (continued)***

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 00157/2.1133/AU.1/11/0259-
3/1/II/2026 (lanjutan)

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Independent Auditor's Report (continued)

No. : 00157/2.1133/AU.1/11/0259-
3/1/II/2026 (continued)

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Consolidated Financial Statements***

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 00157/2.1133/AU.1/11/0259-
3/1/II/2026 (lanjutan)

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)**

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

No. : 00157/2.1133/AU.1/11/0259-
3/1/II/2026 (continued)

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Consolidated Financial Statements (continued)***

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 00157/2.1133/AU.1/11/0259-
3/1/II/2026 (lanjutan)

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)**

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditor's Report (continued)

No. : 00157/2.1133/AU.1/11/0259-
3/1/II/2026 (continued)

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Consolidated Financial Statements (continued)**

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. : 00157/2.1133/AU.1/11/0259-
3/1/II/2026 (lanjutan)

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian
(lanjutan)**

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Laporan atas Kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-Undangan dan
Pengendalian Intern**

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern disampaikan secara terpisah kepada manajemen, masing-masing dalam laporan kami No. PHHARP-AL/017/B/MK/2026 dan No. PHHARP-AL/018/B/MK/2026 tanggal 16 Februari 2026.

Independent Auditor's Report (continued)

No. : 00157/2.1133/AU.1/11/0259-
3/1/II/2026 (continued)

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Consolidated Financial Statements (continued)**

- Obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

**Report on Compliance with Legislative
Regulations and Internal Control**

Reports of compliance with laws and regulation and internal control are submitted separately to the management in our report No. PHHARP-AL/017/B/MK/2026 and No. PHHARP-AL/018/B/MK/2026 dated February 16, 2026, respectively.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Drs. Sikanto, Ak., CA., CPA., Asean CPA., MM
Registrasi Akuntan Publik / Public Accountant Registration No. AP.0259



16 Februari / February 16, 2026

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	2025	2024	
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	2d, 2e, 2s, 4, 33a, 33b	2.259.085.686.443	2.155.611.544.368	Cash and cash equivalents
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak berelasi	2f, 2g, 2s, 5, 33c	18.308.645.000	17.692.785.974	Related parties
Pihak ketiga	2f, 2g, 5	430.524.867.556	608.240.659.798	Third parties
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak berelasi	2f, 2g, 2s, 6, 33d	356.425.445	287.838.726	Related parties
Pihak ketiga	2f, 2g, 6	5.994.468.944	14.793.342.048	Third parties
Persediaan	2h, 7	730.815.812.866	509.296.544.898	Inventories
Pajak dibayar dimuka	2p, 8a	28.167.746.464	43.340.582.998	Prepaid taxes
Uang muka dan beban dibayar dimuka	2i, 9	421.077.820.769	178.572.602.807	Advances and prepaid expenses
Jumlah aset lancar		3.894.331.473.487	3.527.835.901.617	Total current assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Investasi pada entitas asosiasi	2j, 10	208.081.061.966	202.995.617.390	Investment in associates
Taksiran pengembalian pajak	2p, 8e, 8f	3.931.069.627	4.361.690.482	Estimated tax refund claim
Properti investasi	2k, 12	18.359.849.244	9.144.330.940	Investment properties
Aset tetap - bersih	2l, 13	2.673.052.711.035	2.679.437.706.689	Fixed assets - net
Aset tak berwujud - bersih	2n, 14	306.990.048.329	356.941.540.351	Intangible assets - net
Aset pajak tangguhan	2p, 8d	12.585.014.583	13.213.946.221	Deferred tax assets
Aset hak-guna-usaha	2m, 11	4.873.009.397	1.924.602.750	Right-of-use assets
Aset tidak lancar lainnya	2n, 15, 33g	91.079.226.427	84.715.018.120	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		3.318.951.990.608	3.352.734.452.943	Total non-current assets
Jumlah aset		7.213.283.464.095	6.880.570.354.560	Total assets

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	2025	2024	
Liabilitas dan Ekuitas				Liabilities and Equity
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Bagian jangka pendek dari:				Current portion of:
Pinjaman bank				Long-term
jangka panjang	2g, 2s, 22, 33f	235.698.423.495	323.544.563.355	bank loans
Liabilitas sewa	2m, 18	1.577.217.792	439.088.931	Lease liabilities
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	2g, 2s, 16, 33e	423.605.028.023	266.315.173.076	Related parties
Pihak ketiga	2g, 16	623.825.289.700	474.006.215.256	Third parties
Utang pajak	2p, 8b	133.198.562.615	80.882.550.713	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar	17	414.492.595.424	425.063.190.735	Accrued expenses
Liabilitas kontrak	19	14.073.887.453	12.030.252.312	Contract liabilities
Liabilitas jangka pendek lainnya	20	69.598.360.955	60.992.524.273	Other current liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek		1.916.069.365.457	1.643.273.558.651	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Pinjaman bank jangka panjang	2g, 2s, 33f, 22	74.426.203.154	192.388.708.794	Long-term bank loans
Kewajiban imbalan				Post-employment benefit
pascakerja	2q, 23	418.278.809.856	414.789.142.860	obligations
Liabilitas pajak tangguhan	2p, 8d	24.248.043.560	31.166.044.958	Deferred tax liabilities
Liabilitas sewa	2m	2.075.612.595	172.360.301	Lease liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	21	206.709.751.423	268.924.065.923	Other non-current liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang		725.738.420.588	907.440.322.836	Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas		2.641.807.786.045	2.550.713.881.487	Total liabilities
Ekuitas				Equity
Modal saham	24	363.573.454.896	363.573.454.896	Share capital
Tambahan modal disetor		(64.058.953.996)	(64.058.953.996)	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lainnya	25	(195.475.927.895)	(216.482.549.073)	Other equity components
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya		4.200.992.501.162	4.049.491.651.488	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	2r	235.045.192.311	168.241.660.681	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan				Equity attributable to owners
kepada pemilik entitas induk		4.540.076.266.478	4.300.765.263.996	of the parent
Kepentingan nonpengendali		31.399.411.572	29.091.209.077	Non-controlling interest
Jumlah Ekuitas		4.571.475.678.050	4.329.856.473.073	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		7.213.283.464.095	6.880.570.354.560	Total Liabilities and Equity

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Note	2025	2024	
Penjualan bersih	2o,27	4.221.832.166.332	3.766.407.984.148	Net sales
Beban pokok penjualan	2o, 28	(3.224.606.804.348)	(2.847.016.113.630)	Cost of sales
Laba kotor		997.225.361.984	919.391.870.518	Gross profit
Beban penjualan	2o, 29	(29.722.867.181)	(33.587.473.509)	Selling expenses
Beban umum				General and
dan administrasi	2o, 30	(751.288.342.612)	(707.748.151.873)	administrative expenses
Pendapatan keuangan	31b	84.916.977.747	87.257.654.402	Finance income
Beban keuangan	31a, 33h	(34.122.380.167)	(44.000.525.204)	Finance expenses
Bagian atas laba bersih				Share of profits of
ventura bersama	2j, 10	5.085.444.576	16.611.751.304	joint venture
Pendapatan (beban) lain	32	52.936.606.960	5.785.757.569	Other income (expenses)
Sub jumlah		(672.194.560.677)	(675.680.987.311)	Subtotal
Laba sebelum pajak penghasilan		325.030.801.307	243.710.883.207	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan				Income tax expense
Pajak kini	2p, 8c	(98.855.886.110)	(98.915.441.900)	Current tax
Pajak tangguhan	2p, 8d	12.254.283.461	26.994.935.942	Deferred tax
Jumlah beban pajak penghasilan		(86.601.602.649)	(71.920.505.958)	Total income tax expense
Laba tahun berjalan		238.429.198.658	171.790.377.249	Profit for the year
Penghasilan (beban)				Other comprehensive
 komprehensif lain				income (expenses)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi				Items that will not be reclassified
ke laba rugi:				to profit or loss:
Pengukuran kembali atas				Remeasurement of
imbalan pascakerja		27.089.346.676	(19.972.576.616)	post-employment benefits
Beban pajak terkait		(5.965.213.701)	4.397.157.477	Related income tax
Jumlah penghasilan (beban)		21.124.132.975	(15.575.419.139)	Total other comprehensive
 komprehensif lain				income (expenses)
Jumlah laba komprehensif		259.553.331.633	156.214.958.110	Total comprehensive
 tahun berjalan				income for the year
Laba tahun berjalan yang				Profit for the year
 dapat diatribusikan kepada:				attributable to:
Entitas induk		235.045.192.311	168.241.660.681	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		3.384.006.347	3.548.716.568	Non-controlling interest
Jumlah		238.429.198.658	171.790.377.249	Total
Laba komprehensif tahun				Comprehensive income for
 berjalan yang dapat				the year attributable to:
 diatribusikan kepada:				Owners of the parent
Entitas induk		259.668.647.451	156.366.877.078	Non-controlling interest
Kepentingan nonpengendali		(115.315.818)	(151.918.968)	
Jumlah		259.553.331.633	156.214.958.110	Total

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to the owner of the parent									
	Modal saham/ Share capital		Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated			Saldo laba / Retained earnings		Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interest
					Cadangan umum/ General reserve	Cadangan tujuan/ Specific purpose reserve	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah/ Total	Jumlah ekuitas/ Total equity	
1 Januari 2024	363.573.454.896	(64.058.953.996)		(200.755.210.966)	3.415.134.221.598	230.881.881.354	424.711.103.722	4.169.486.496.608	4.196.139.958.586	January 1, 2024
Penambahan cadangan	-	-	-	-	403.475.548.536	-	(403.475.548.536)	-	-	Additional reserve
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	168.241.660.681	168.241.660.681	171.790.377.249	Profit for the year
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	-	-	-	(15.727.338.107)	-	-	-	(15.727.338.107)	(15.575.419.139)	Remeasurement of post-employment benefits
Dividen	-	-	-	-	(21.235.555.186)	-	-	(21.235.555.186)	(22.498.443.623)	Dividends
31 Desember 2024	363.573.454.896	(64.058.953.996)		(216.482.549.073)	3.797.374.214.948	230.881.881.354	189.477.215.867	4.300.765.263.996	4.329.856.473.073	December 31, 2024
Penambahan cadangan	-	-	-	-	172.736.404.860	-	(172.736.404.860)	-	-	Additional reserve
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	235.045.192.311	235.045.192.311	238.429.198.658	Profit for the year
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	-	-	-	21.006.621.178	-	-	-	21.006.621.178	117.511.797	Remeasurement of post-employment benefits
Dividen	-	-	-	-	(16.740.811.007)	-	-	(16.740.811.007)	(17.934.126.656)	Dividends
31 Desember 2025	363.573.454.896	(64.058.953.996)		(195.475.927.895)	3.953.369.808.801	230.881.881.354	251.786.003.318	4.540.076.266.478	4.571.475.678.050	December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.
The accompanying notes to consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan	4.956.079.857.406	3.953.523.779.230	Receipt from customers
Pembayaran kepada pemasok	(2.775.607.210.150)	(2.267.634.976.569)	Payment to suppliers
Pembayaran untuk direksi dan karyawan	(1.003.273.898.970)	(844.673.040.009)	Payment to directors and employees
Pembayaran untuk aktivitas operasional lainnya	(84.000.716.241)	(92.760.854.530)	Payment for other operating activities
Penghasilan bunga dari deposito dan jasa giro	83.186.009.888	87.275.030.749	Interest income from deposits and current account services
Penerimaan klaim pajak	25.370.766.415	43.542.479.898	Receipt of tax claim
Pembayaran denda pajak	(603.488.343)	(175.467.439)	Payment of tax penalties
Pembayaran pajak penghasilan badan	(6.589.654.710)	(75.433.337.090)	Payment of corporate income tax
Pembayaran pajak lainnya	(422.110.996.963)	(404.752.487.478)	Payment of other taxes
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	772.450.668.332	398.911.126.762	Net cash provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Perolehan aset tak berwujud	(30.306.529.090)	(35.700.518.040)	Acquisition of intangible assets
Perolehan aset tetap	(375.904.635.774)	(225.946.879.511)	Acquisition of fixed assets
Penerimaan dari penjualan aset tetap	1.889.198.750	372.656.000	Proceeds from sale of fixed assets
Kas dividen	-	21.318.612.480	Cash dividends
Perolehan properti investasi	(6.701.825.803)	-	Acquisition of property investment
Penambahan atas surat berharga yang dipasarkan	-	20.000.000.000	Additional investment in marketable securities
Lainnya - bersih	1.549.999.999	2.860.625.000	Others - net
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(409.473.791.918)	(217.095.504.071)	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Pinjaman bank jangka panjang			Long-term bank loans
Penerimaan pinjaman bank	132.707.769.458	153.266.664.356	Proceed from bank loans
Pembayaran pinjaman bank	(340.570.313.591)	(255.338.167.290)	Payment of bank loans
Pembayaran beban bunga dan keuangan	(33.706.063.550)	(44.187.446.729)	Payment of interest and finance cost
Pembayaran dividen	(17.934.126.656)	(22.498.443.623)	Dividends paid
Lainnya - neto	-	(2.357.828.300)	Others - net
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(259.502.734.339)	(171.115.221.586)	Net cash used in financing activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas	103.474.142.075	10.700.401.105	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	2.155.611.544.368	2.144.911.143.263	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	2.259.085.686.443	2.155.611.544.368	Cash and cash equivalents at end of year

1. Umum

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 15 September 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 60 Tahun 1971, yang diubah dengan PP No. 25 Tahun 1982, PP No. 34 Tahun 2000, PP No. 32 Tahun 2006, dan terakhir dengan PP No. 6 Tahun 2019.

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melaksanakan dan menunjang kebijakan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang berhubungan dengan pencetakan mata uang rupiah, pembuatan dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan, berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang baik.

Kegiatan usaha utama Perusahaan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2019 adalah:

- a) Mencetak mata uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan Bank Indonesia;
- b) Membuat dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti berupa Dokumen Keimigrasian dan Benda Meterai guna memenuhi kebutuhan sesuai permintaan instansi yang berwenang;
- c) Membuat dokumen lain untuk negara yang memiliki fitur sekuriti berupa pita cukai dan dokumen pertanahan;
- d) Membuat dokumen lainnya untuk negara yang memiliki fitur sekuriti dan barang cetakan logam non-uang;
- e) Mencetak mata uang dan membuat dokumen negara lain yang memiliki fitur sekuriti atas permintaan negara yang bersangkutan, sepanjang telah terpenuhinya mata uang Rupiah;

1. General

a. Establishment and general information

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia ("the Company") was established on September 15, 1971 based on Government Regulation ("PP") No. 60 Year 1971, which was amended by PP No. 25 Year 1982, PP No. 34 Year 2000, PP No. 32 Year 2006, and finally with PP No. 6 Year 2019.

The Company's purpose and objective are generally to perform and support Government policy programs in the economic and national development sector by conducting business aimed at the public benefit in the form of provision of goods and/or services associated with the printing of Rupiah, state documents with security features, and optimal use of resources of the Company, based on the principles of good corporate governance.

PP No. 6 year 2019 defines that the Company is established with the following main activities:

- a) Printing Rupiah to meet the needs according to Bank Indonesia's request;*
- b) Making state document that has security features in the form of immigration documents and stamps to fulfil the needs according to the request of the authorized agency;*
- c) Making other documents for countries that have security features in the form of excise stamps and land documents;*
- d) Making other documents for countries that have security features and non-money metal printed goods;*
- e) Printing currencies and making documents for other countries that have security features at the request of the country concerned, insofar as the printing of Rupiah is fulfilled;*

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

a. Establishment and general information (continued)

Kegiatan usaha utama Perusahaan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2019 adalah: (lanjutan)

PP No. 6 year 2019 defines that the Company is established with the following main activities: (continued)

- f) Menyediakan jasa yang mempunyai fitur sekuriti yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan;
- g) Pabrikasi kertas uang, kertas sekuriti, dan tinta sekuriti; dan
- h) Jasa digital sekuriti.

- f) Providing services that have security features related to the aims and objectives and business activities of the Company;*
- g) Fabrication of banknotes, security paper, and security ink; and*
- h) Digital security services.*

Kantor pusat Perusahaan terletak di Jalan Palatehan No. 4, Jakarta Selatan. Lokasi pabrik terletak di Karawang, Jawa Barat.

The Company's head office is located at Jalan Palatehan No. 4, South Jakarta. The factory location is located in Karawang, West Java.

b. Susunan Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan

b. Board of Supervisors, Directors and Employees

Susunan Dewan Pengawas Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-07/DP/IX/2025 tanggal 26 September 2025, No. SK-130/MBU/06/2024, tanggal 10 Juni 2024 dan No. SK-132/MBU/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Supervisory Board as of December 31, 2025 and 2024 based on Decree of Minister of State-Owned Enterprises No SK-07/DP/IX/2025 dated September 26, 2025, No. SK-130/MBU/06/2024 dated June 10, 2024, and No. SK-132/MBU/06/2024 dated June 11, 2024 was as follows:

	2025	2024	
Ketua	Marlison Hakim	Marlison Hakim	Chairman
Anggota	Djanurindo Wibowo	Salamat Simanullang	Member
Anggota	Nanik Murwati	Djanurindo Wibowo	Member
Anggota	Sutanto	Nanik Murwati	Member
Anggota	-	Sutanto	Member
Anggota Independen	-	Conny Lolyta Rumondor	Independent Member

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

b. Susunan Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan (lanjutan)

b. Board of Supervisors, Directors and employees (continued)

Susunan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-199/MBU/07/2025 tanggal 10 Juli 2025 dan No. SK-221/MBU/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2025 and 2024 based on Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-199/MBU/07/2025 dated July 10, 2025 and No. SK-221/MBU/07/2023 dated July 31, 2023 was as follows:

2025		2024	
Direktur Utama	Dwina Septiani Wijaya	Dwina Septiani Wijaya	President Director
Direktur Currency & Security Solution	Saiful Bahri	Saiful Bahri	Currency & Security Solution Director
Direktur Digital Business	Farah Fitria Rahmayanti	Farah Fitria Rahmayanti	Digital Business Director
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Fajar Rizki	Fajar Rizki	Finance and Risk Management Director
Direktur SDM, Teknologi dan Informasi	Gandung A. Murdani	Gandung A. Murdani	Human Resources, Technology and Information Director

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewas No. SK-06/DP/IX/2025 tanggal 26 September 2025, No. SK-07/DP/IX/2025 tanggal 26 September 2025 dan No. SK-08/DP/XI/2025 tanggal 14 November 2025 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee on December 31, 2025 and 2024 based on Decree of the Board of Directors No. SK-06/DP/IX/2025 dated September 26, 2025, No. SK-07/DP/IX/2025 dated September 26, 2025, and No. SK08/DP/XI/2025 dated November 14, 2025 is as follows:

2025		2024	
Ketua	Djanurindo Wibowo	Salamat Simanullang	Chairman
Anggota	Budi Rahayu	Heru Sidarta	Member
Anggota	Mohd Irwan	Mohd Irwan	Member

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki jumlah karyawan masing-masing sejumlah 1.884 orang dan 1.982 orang.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has 1,884 and 1,982 employees, respectively.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. Umum (lanjutan)

1. General (continued)

c. Entitas anak yang dikonsolidasi

c. Consolidated subsidiaries

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan entitas anak langsung yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, the consolidated direct subsidiaries are as follows:

Entitas anak/ <i>Subsidiaries</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Dimulainya kegiatan komersil/ <i>Commencement of commercial operations</i>	Persentase kepemilikan efektif/ <i>Effective percentage of ownership</i>		Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ <i>Total assets (before elimination)</i>	
			2025	2024	2025	2024
Kepemilikan langsung/ <i>Direct ownership</i>						
PT Peruri Wira Timur	Surabaya	2011	67,00	67,00	82.725.637.125	82.416.849.026
PT Peruri Digital Security *)	Jakarta	2011	99,78	99,78	155.322.868.156	232.546.991.406
PT Kertas Padalarang	Bandung	1922	93,23	93,23	192.345.955.301	186.554.125.563
PT Peruri Properti	Jakarta	2012	99,50	99,50	123.259.696.648	123.449.974.977

*) dan entitas anak/ *and subsidiary*

PT Peruri Wira Timur

PT Peruri Wira Timur

Pada tanggal 19 Januari 2011, Perusahaan dan PT Panca Wira Usaha Jawa Timur ("PWU") telah menandatangani perjanjian atas pendirian PWT sebagai perubahan dari KSO Peruri Divisi Timur ("KSO-PDT").

On January 19, 2011, the Company and PT Panca Wira Usaha Jawa Timur ("PWU") have signed an agreement for the establishment of PWT as a transformation from KSO Peruri Divisi Timur ("KSO-PDT").

Akta pendirian PWT telah dibuat di hadapan Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., No. 06 tanggal 5 April 2011 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan No. AHU-17296.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 6 April 2011. Berdasarkan akta pendirian tersebut, kedua belah pihak telah sepakat dan setuju mengikatkan diri untuk mendirikan perseroan terbatas di bidang percetakan dokumen sekuriti sebagai perubahan bentuk KSO-PDT menjadi perseroan terbatas.

The PWT's deed of establishment has been put forth into notarial deed by notary M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., No. 06 dated April 5, 2011 and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU- 17296.AH.01.01. Year 2011, dated April 6, 2011. Based on the deed, both parties have agreed and committed to bound themselves to establish a limited liability company in security printing documents as a transformation of KSO-PDT to be a limited liability company.

Modal dasar PWT ditetapkan sebesar Rp 69.124.220.000 yang terbagi atas 69.124.220 saham dengan nilai nominal per lembar sebesar Rp 1.000. Persentase kepemilikan Perusahaan dan PWT sebesar 67,00% dan 33,00%.

PWT's authorized capital is Rp 69,124,220,000 which consists of 69,124,220 shares with par value of Rp 1,000 per share. The percentage of ownership of the Company and PWT are 67.00% and 33.00%, respectively.

Laporan keuangan PWT 31 Desember 2025 dan 2024 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini tanpa modifikasi.

The financial report of PWT as of December 31, 2025 and 2024 was audited by Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan with unmodified opinion.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak yang dikonsolidasi (lanjutan)

PT Peruri Digital Security

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-437/MBU/2011 tanggal 27 Juli 2011, Menteri BUMN telah menyetujui pendirian PT Peruri Digital Security ("PDS") oleh Perusahaan dan PT Pundi Puri Sejahtera. Entitas Anak ini bergerak di bidang *certification authority* dan *smart card*. Akta pendirian PDS telah dibuat di hadapan Notaris Henny Singgih, S.H., No. 22 tanggal 15 September 2011 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan No. AHU- 45677.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 19 September 2011.

Akta anggaran dasar PDS kemudian diubah dengan Akta No. 6 tanggal 20 November 2012 dari Notaris Agung Setiawan, S.H.

Modal PDS ditetapkan sebesar Rp 80.000.000.000 yang terbagi atas 80.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar sebesar Rp 1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor oleh Perusahaan dan PT Pundi Puri Sejahtera masing-masing sebesar Rp 19.800.000.000 dan Rp 200.000.000.

Pada tanggal 21 Agustus 2014, diselenggarakan rapat keputusan sirkuler yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham PDS sehubungan dengan penambahan penyertaan modal pada PDS sebesar Rp 34.067.000.000 oleh Perusahaan. Penambahan penyertaan modal pada PDS ini telah disetujui oleh Menteri BUMN melalui surat No. S-432/MBU/2014 tanggal 22 Juli 2014 dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Direksi PT Pundi Puri Sejahtera melalui surat No. 305/PPS/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.

1. General (continued)

c. Consolidated subsidiaries (continued)

PT Peruri Digital Security

Based on Minister of SOE's letter No. S-437/MBU/2011 dated July 27, 2011, the Minister of SOEs has approved the establishment of PT Peruri Digital Security ("PDS") by the Company and PT Pundi Puri Sejahtera. This subsidiary is engaged in *certification authority* and *smart card*. PDS's deed of establishment was made by Notary Henny Singgih, S.H., No. 22 dated September 15, 2011 and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU- 45677.AH.01.01 year 2011 dated September 19, 2011.

PDS's Articles of Association have been amended, as stated in Deed No. 6 dated November 20, 2012 of Notary Agung Setiawan, S.H.

PDS's authorized capital is Rp 80,000,000,000 divided into 80,000 shares with par value of Rp 1,000,000 per share. The authorized capital issued and fully paid by the Company and PT Pundi Puri Sejahtera is Rp 19,800,000,000 and Rp 200,000,000, respectively.

On August 21, 2014, there was circular resolution signed by all shareholders of PDS in relation to additional capital injection amounting to Rp 34,067,000,000 by the Company. This additional capital injection transaction has been approved by the Minister of State-Owned-Enterprises in his letter No. S-432/MBU/2014 dated July 22, 2014 and has been approved by the Board of Commissioner and Directors of PT Pundi Puri Sejahtera through letter No. 305/PPS/VIII/2014 dated August 18, 2014.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak yang dikonsolidasi (lanjutan)

PT Peruri Digital Security (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 47 tanggal 26 Maret 2018 oleh Notaris B. Andy Widyanto, S.H., PDS melakukan pembelian saham PT Cardsindo Tiga Perkasa sebanyak 12.705.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 12.705.000.000 atau kepemilikan sebesar 55,00%.

Total modal disetor PDS setelah transaksi penambahan penyertaan modal adalah Rp 89.367.000.000 dengan persentase kepemilikan Perusahaan sebesar 99,78% dan PT Pundi Puri Sejahtera sebesar 0,22%.

Laporan keuangan PDS tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini tanpa modifikasi.

PT Kertas Padalarang

Pada tanggal 19 November 2008, Perusahaan, PT Kertas Padalarang ("PTKP") dan Menteri BUMN menyelenggarakan pertemuan sehubungan dengan upaya penyelamatan PTKP dan akuisisi PTKP oleh Perusahaan, yang sahamnya saat itu dimiliki oleh PT Kertas Kraft Aceh (Persero) ("KKA"), PT Pengelola Investama Mandiri dan Negara RI. Akuisisi saham PTKP akan dilakukan setelah dilaksanakan *due diligence* oleh konsultan independen dan skema akuisisi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri BUMN. Untuk mengatasi kesulitan likuiditas PTKP jangka pendek, Perusahaan diminta untuk membantu pendanaan kebutuhan modal kerja (dana talangan) yang kemudian akan dikonversi menjadi kepemilikan saham di PTKP.

1. General (continued)

c. Consolidated subsidiaries (continued)

PT Peruri Digital Security (continued)

Based on the Deed of Decision of Shareholders' Decree No. 47 dated March 26, 2018 by Notary B. Andy Widyanto, S.H., PDS purchased 12,705,000 shares of PT Cardsindo Tiga Perkasa amounting to Rp 12,705,000,000 or ownership of 55.00%.

PDS fully paid capital after the injection transaction is Rp 89,367,000,000 with percentage of ownership of the Company is 99.78% and PT Pundi Puri Sejahtera is 0.22%.

PDS financial report as of December 31, 2025 and 2024 was audited by Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan with unmodified opinion.

PT Kertas Padalarang

On November 19, 2008, the Company, PT Kertas Padalarang ("PTKP") and the Minister of SOEs held a meeting to discuss the rescue and acquisition of PTKP by the Company, which at that time the shares of PTKP were owned by PT Kertas Kraft Aceh (Persero) ("KKA"), PT Pengelola Investama Mandiri and the Republic of Indonesia. The acquisition of PTKP's shares would be conducted after a due diligence review by an independent consultant and furthermore the acquisition scheme would be decided by Minister of SOEs. In order to resolve PTKP's short term liquidity problem, the Company was assigned to give a working capital bridging fund to PTKP which later would be converted into an ownership of shares in PTKP.

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak yang dikonsolidasi (lanjutan)

PT Kertas Padalarang (lanjutan)

Pada tanggal 15 Juni 2009, PTKP dan Perusahaan menandatangani perjanjian No. SP-308/VI/2009, sebagai tindak lanjut dari surat dari Menteri BUMN No. S-368/MBU/2009 tanggal 1 Juni 2009, yang mengatur penyediaan dana oleh Perusahaan untuk kebutuhan modal kerja PTKP sebesar Rp 34.689.259.201 dan dana tersebut akan dikompensasikan dengan hasil penjualan kertas banderol kepada Perusahaan atau dikonversikan menjadi penyertaan saham Perusahaan di PTKP sebagaimana yang telah disetujui oleh pemilik modal dalam pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") tahun 2009. Pada tanggal 30 Oktober 2009, dana tersebut telah dibayarkan oleh Perusahaan.

Di samping itu, sesuai dengan perjanjian antara Perusahaan dengan PT Kertas Kraft Aceh (Persero) ("KKA") No. SP611/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009, Perusahaan melakukan pembelian 8.167 lembar saham (13,32%) PTKP yang dimiliki oleh KKA dengan harga saham sementara sebesar Rp 500.000 per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp 4.083.500.000, sambil menunggu harga saham berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh lembaga penilai independen.

Perusahaan telah membayar uang muka atas pembelian saham PTKP yang dimiliki oleh KKA pada tanggal 30 Oktober 2009. Pada tanggal 31 Desember 2010, telah disepakati harga saham PTKP sebesar Rp 239.699 per lembar saham sesuai dengan laporan penilai independen. Kelebihan uang muka pembelian saham PTKP dari KKA sebesar Rp 2.125.878.267 telah ditagihkan kepada KKA.

1. General (continued)

c. Consolidated subsidiaries (continued)

PT Kertas Padalarang (continued)

On June 15, 2009, PTKP and the Company signed an agreement No. SP-308/VI/2009, as a follow up to the letter of Minister of SOEs No. S-368/MBU/2009, dated June 1, 2009, which regulates the Company's bridging fund for PTKP's working capital requirements amounting to Rp 34,689,259,201, of which then the fund would be compensated with the sales of fiscal stamps paper to the Company or converted into an investment in PTKP in the form of shares as stated by the shareholders in the approval of Work Plan and Company Budget ("RKAP") year 2009. On October 30, 2009, the fund has been paid by the Company.

In addition, according to the agreement between the Company and PT Kertas Kraft Aceh (Persero) ("KKA") No. SP611/X/2009 dated October 27, 2009, the Company agreed to purchase 8,167 shares (13.32%) of PTKP owned by KKA with temporary price of Rp 500,000 per share amounting to Rp 4,083,500,000, while awaiting the results of share price valuation carried out by an independent appraiser.

The Company has paid an advance for the purchase of shares of PTKP owned by KKA on October 30, 2009. On December 31, 2010, PTKP's share price was agreed to be Rp 239,699 per share based on an independent appraiser report. The excess of the share purchase advance of PTKP from KKA amounting to Rp 2,125,878,267 has been billed to KKA.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak yang dikonsolidasi (lanjutan)

PT Kertas Padalarang (lanjutan)

Selanjutnya berdasarkan surat persetujuan dari Menteri BUMN No. S-502/MBU/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal persetujuan pemberian dana talangan modal kerja ke PTKP, selama tahun 2010 Perusahaan telah menyerahkan dana kepada PTKP sebesar Rp 28.000.000.000 dan diperhitungkan dalam akuisisi saham PTKP oleh Perusahaan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PTKP tanggal 31 Desember 2010, para pemegang saham menyetujui:

1. Penjualan saham KKA kepada Perusahaan sejumlah 8.167 lembar saham;
2. Konversi dana talangan dari Perusahaan menjadi saham dengan harga Rp 239.699 per lembar saham atau seluruhnya berjumlah 261.532 lembar saham;
3. Peningkatan modal dasar dari Rp 125.000.000.000 menjadi Rp 500.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 61.327.000.000 menjadi Rp 322.859.000.000 termasuk disagio saham sebesar Rp 198.843.171.599;
4. Pengeluaran saham baru sejumlah 261.532 lembar saham dengan nominal Rp 1.000.000 per lembar saham, yang akan diambil dan disetorkan oleh Perusahaan;

1. General (continued)

c. Consolidated subsidiaries (continued)

PT Kertas Padalarang (continued)

Furthermore, based on the approval letter of Minister of SOEs No. S-502/MBU/2010, dated August 18, 2010, regarding the approval of working capital bridging fund to PTKP, in 2010 the funds have been given by the Company to PTKP amounting to Rp 28,000,000,000 and accounted for as shares acquisition of PTKP by the Company.

Based on the Shareholders' Extraordinary General Meeting ("RUPSLB") of PTKP on December 31, 2010, the shareholders agreed:

1. The sale of shares owned by KKA to the Company was a total of 8,167 shares;
2. The conversion of bridging fund from the Company into shares at a price of Rp 239,699 per share or in total amounting to 261,532 shares;
3. The increase of authorized capital from amounting to Rp 125,000,000,000 to Rp 500,000,000,000 and the increase of issued and fully paid capital from amounting to Rp 61,327,000,000 to Rp 322,859,000,000 including share discount amounting to Rp 198,843,171,599;
4. The issuance of 261,532 new shares with par value of Rp 1,000,000 per share, which would be taken and paid by the Company;

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak yang dikonsolidasi (lanjutan)

PT Kertas Padalarang (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PTKP tanggal 31 Desember 2010, para pemegang saham menyetujui: (lanjutan)

5. Hibah saham yang akan dilakukan oleh Perusahaan kepada Negara Republik Indonesia sejumlah 106.614 lembar saham, sehingga saham Pemerintah RI dalam PTKP menjadi sejumlah 131.614 lembar saham atau 40,77%. Hibah saham tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga kepemilikan saham Negara RI tidak terdilusi. Akta hibah saham tersebut akan ditandatangani oleh Perusahaan dan Kementerian Keuangan RI.

Dengan demikian susunan pemegang saham PTKP untuk seluruh saham yang beredar sejumlah 322.859 lembar dengan nilai Rp 322.859.000.000 terdiri dari:

1. Negara Republik Indonesia sebanyak 25.000 lembar senilai Rp 25.000.000.000;
2. PT Pengelola Investama Mandiri sebanyak 28.160 lembar senilai Rp 28.160.000.000; dan
3. Perusahaan sebanyak 269.699 lembar senilai Rp 269.699.000.000.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-11769.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012.

Pada tanggal 30 Agustus 2013, Menteri BUMN mengirimkan surat No. S-545/MBU/2013 kepada Perusahaan yang menyatakan penawaran penjualan saham milik Negara Republik Indonesia pada PTKP yang kemudian ditanggapi oleh Perusahaan melalui surat No. 1365/IX/2013 tanggal 18 September 2013. Dalam surat balasan tersebut, Perusahaan menyatakan kesediaan untuk membeli seluruh saham yang ditawarkan dengan nilai saham yang ditawarkan sebesar Rp 13.000.000.000.

1. General (continued)

c. Consolidated subsidiaries (continued)

PT Kertas Padalarang (continued)

Based on the Shareholders' Extraordinary General Meeting ("RUPSLB") of PTKP on December 31, 2010, the shareholders agreed: (continued)

5. *The grant of shares from the Company to the Republic of Indonesia of 106,614 shares, which increase the ownership of Government of Republic of Indonesia in PTKP to become 131,614 shares or 40.77%. The grant would be made in accordance with the applicable law, therefore the ownership of shares is not diluted. The deed of the grant will be signed by the Company and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.*

Therefore, the composition of shareholders of PTKP for the entire outstanding shares of 322,859 shares with value amounting to Rp 322,859,000,000 consists of:

1. *The Republic of Indonesia consisting of 25,000 shares amounting to Rp 25,000,000,000;*
2. *PT Pengelola Investama Mandiri of 28,160 shares amounting to Rp 28,160,000,000; and*
3. *The Company consisting of 269,699 shares amounting to Rp 269,699,000,000.*

The amendment of the Articles of Association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his letter No. AHU-11769.AH.01.02. Year 2012 dated March 5, 2012.

On August 30, 2013, the Minister of SOEs sent a letter No. S-545/MBU/2013 to the Company regarding an offer to sell all shares owned by the Republic of Indonesia on PTKP which then responded by the Company through letter No. 1365/IX/2013 dated September 18, 2013. Through the letter, the Company stated its interest to buy all the shares offered with the value of the shares amounting to Rp 13,000,000,000.

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak yang dikonsolidasi (lanjutan)

PT Kertas Padalarang (lanjutan)

Pembayaran atas pembelian saham tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 yang disusul dengan akta jual beli oleh Notaris Dessy, S.H., M.Kn., tanggal 18 Desember 2013. Perubahan anggaran dasar atas penambahan saham tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui surat keterangan No. AHU-AH.01.10-00356.

Berdasarkan RUPSLB PTKP tanggal 29 Desember 2014, para pemegang saham menyetujui konversi dana talangan yang berasal dari Perusahaan menjadi modal saham. Nilai dana talangan yang dikonversi menjadi modal saham sebesar Rp 29.852.000.000 ditambah sebesar Rp 160.000 yang disetor kemudian oleh Perusahaan kepada PTKP. Nilai transaksi saham adalah sebesar Rp 520.000 per lembar saham sehingga jumlah lembar saham yang dikonversi adalah sebesar 57.408 lembar saham. Nilai nominal saham tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000. Selisih yang terjadi antara nilai transaksi dan nilai nominal akan dicatat pada akun disagio saham.

Setelah proses konversi ini, susunan pemegang saham PTKP terdiri dari Perusahaan dan PT Pengelola Investama Mandiri dengan kepemilikan masing-masing sebanyak 352.107 dan 28.160 lembar saham atau setara dengan persentase masing-masing 92,59% dan 7,41%.

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai perubahan anggaran dasar PTKP tentang persetujuan tambahan penyertaan modal ditempatkan/disetor sebesar Rp 35.600.000.000 atau 35.600 lembar saham oleh Perusahaan.

1. General (continued)

c. Consolidated subsidiaries (continued)

PT Kertas Padalarang (continued)

The payment of purchase of shares was executed on December 16, 2013, which then followed by the deed of purchase and sale by Notary Dessy, S.H., M.Kn., dated December 18, 2013. The amended deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and has been received by Directorate General of Legal Administration through his letter No. AHU-AH.01.10-00356.

Based on shareholders' extraordinary general meeting of PTKP dated December 29, 2014, the shareholders have approved the conversion of bridging fund from the Company into share capital. The bridging fund value that was converted into shares was Rp 29,852,000,000 plus the cash paid by the Company amounting to Rp 160,000 to PTKP. Transaction value of shares is Rp 520,000 per share, bringing the total number of shares at the conversion amounted to 57,408 shares. Par value per shares is Rp 1,000,000. The difference between the transaction value and the nominal value will be recorded in share discount account.

After the conversion, the composition of PTKP's shareholders consists of the Company and PT Pengelola Investama Mandiri with ownership of 352,107 and 28,160 shares or equivalent to the percentage of 92.59% and 7.41%, respectively.

Based on Deed No. 7 dated July 23, 2019 made by Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., it has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding amendments to the Articles of Association of PTKP regarding approval of additional equity participation placed/paid-up amounting to Rp 35,600,000,000 or 35,600 shares by the Company.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak yang dikonsolidasi (lanjutan)

PT Kertas Padalarang (lanjutan)

Total modal disetor PTKP setelah transaksi penambahan penyertaan modal adalah Rp 415.867.000.000 dengan persentase kepemilikan Perusahaan sebesar 93,23% dan PT Pengelola Investama Mandiri sebesar 6,77%.

Laporan keuangan PTKP tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini tanpa modifikasi.

PT Peruri Properti

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-179/MBU/2011 tanggal 12 April 2012, Menteri BUMN telah menyetujui pendirian PT Peruri Properti ("PePro") oleh Perusahaan dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Perusahaan Umum Percetakan Uang RI ("Yapetri"). Entitas anak ini bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, teknik, percetakan dan jasa. Pendirian PePro berdasarkan Akta Notaris Dessi, S.H., M.Kn., No. 01 tanggal 10 April 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan No. AHU-22461.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 27 April 2012. Akta pendirian Perusahaan telah mengalami perubahan, dan yang terakhir dengan Akta Notaris Dessi, S.H., M.Kn., dengan No. 01 tanggal 7 Desember 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan No. AHU0006760.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013.

1. General (continued)

c. Consolidated subsidiaries (continued)

PT Kertas Padalarang (continued)

PTKP's fully paid capital after the injection transaction is amounting to Rp 415,867,000,000 with percentage of ownership of the Company at 93.23% and PT Pengelola Investama Mandiri at 6.77%.

PTKP's financial report as of December 31, 2025 and 2024 was audited by Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan with unmodified opinion.

PT Peruri Properti

Based on the letter of Minister of SOEs No. S-179/MBU/2011 dated April 12, 2012, the Minister of SOEs has approved the establishment of PT Peruri Properti ("PePro") by the Company and Yayasan Kesejahteraan Pegawai Perusahaan Umum Percetakan Uang RI ("Yapetri"). The Subsidiary is engaged in trading, building, industrial, transportation, engineering, printing and services. The establishment of PePro is based on the Notarial Deed by Dessi, S.H., M.Kn., No. 01 dated April 10, 2012 and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-22461.AH.01.01 Tahun 2012 dated April 27, 2012. The deed of establishment has been amended several times, and the latest amendment has been put forth into Notarial Deed No. 01 by Dessi, S.H., M.Kn., dated December 7, 2012 and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU0006760.AH.01.09 Year 2013 dated February 1, 2013.

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak yang dikonsolidasi (lanjutan)

PT Peruri Properti (lanjutan)

Modal dasar PePro ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000 yang terbagi atas 20.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar sebesar Rp 1.000.000, dan telah disetor penuh.

Pada tanggal 27 Maret 2019, diselenggarakan rapat keputusan sirkuler yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham PePro sehubungan dengan penambahan penyertaan modal pada PePro sebesar Rp 20.000.000.000 oleh Perusahaan. Penambahan penyertaan modal pada PePro ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui surat No. AHU-0017994.AH.01.02.2019 tanggal 2 April 2019.

Total modal disetor PePro setelah transaksi penambahan penyertaan modal adalah Rp 40.000.000.000 dengan persentase kepemilikan Perusahaan sebesar 99,50% dan Yapetri sebesar 0,50%.

Laporan keuangan PePro tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini tanpa modifikasi.

d. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 16 Februari 2026.

2. Informasi kebijakan akuntansi material

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Perum Peruri dan Entitas Anak ("Grup") telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK - IAI").

1. General (continued)

c. Consolidated subsidiaries (continued)

PT Peruri Properti (continued)

PePro's authorized capital is set at Rp 20,000,000,000 which divided into 20,000 shares with par value of Rp 1,000,000 per share, and is fully paid.

On March 27, 2019, there was circular resolution signed by all shareholders of PePro in relation to additional capital injection amounting to Rp 20,000,000,000 by the Company. This additional capital injection transaction has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his letter No. AHU-0017994.AH.01.02.2019 dated April 2, 2019.

PePro's fully paid capital after the injection transaction is Rp 40,000,000,000 with percentage of ownership of the Company at 99.50% and Yapetri at 0.50%.

PePro's financial report as of December 31, 2025 and 2024 was audited by Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan with unmodified opinion.

d. Management's responsibility on the consolidated financial statements

The Group's management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorised to be issued on February 16, 2026.

2. Material accounting policies information

a. Statement of compliance

The consolidated financial statements of Perum Peruri and Subsidiaries ("Group") have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("FAS"), established by the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants ("FSAB - IIA").

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

Pernyataan dan interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 yaitu:

**2. Material accounting policies information
(continued)**

b. Basis of measurement and preparation of the consolidated financial statements

The Group's consolidated financial statements have been prepared based on the going concern assumption and accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows which use the cash basis. The basis of measurement in the preparation of these consolidated financial statements is the historical costs, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah, which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

New and revised statements and interpretation of financial accounting standards effective in the current year

The following are revisions, amendments and adjustments of standards and interpretations of standards which effectively applied for the year starting on or after January 1, 2025:

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)

b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Pernyataan dan interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang berlaku efektif pada tahun berjalan (lanjutan)

- PSAK 117: “Kontrak Asuransi”;
- Amendemen PSAK 117 “Kontrak Asuransi” terkait Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221: “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan.

PSAK 117: “Kontrak Asuransi”

PSAK 117 adalah standar akuntansi baru yang wajib diterapkan oleh perusahaan yang menerbitkan kontrak asuransi. Dalam penerapannya PSAK 117 menggunakan metode pengukuran yang disesuaikan dengan jenis kontrak asuransi, dan meningkatkan penyajian laporan keuangan yang lebih transparansi dan dapat dikomparasi antara perusahaan asuransi. Tanggal efektif penerapan PSAK 117: Kontrak Asuransi di Indonesia akan berlaku pada 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan Grup, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari amendemen dan interpretasi PSAK 117 tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Grup. Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sesuai dengan penerbitan oleh DSAK-IAI.

2. Material accounting policies information (continued)

b. Basis of measurement and preparation of the consolidated financial statements (continued)

New and revised statements and interpretation of financial accounting standards effective in the current year (continued)

- SFAS 117: “Insurance Contract”;
- Amendment to SFAS 117: “Insurance Contract” regarding Initial Application of SFAS 117 and SFAS 109 - Comparative Information; and
- Amendment to SFAS 221: “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates” regarding conditions when a currency is not exchangeable.

SFAS 117 “Insurance Contract”

SFAS 117 is a new accounting standard that must be applied by companies issuing insurance contracts. In its implementation, SFAS 117 uses a measurement method that is adapted to the type of insurance contract, and improves the presentation of financial reports that are more transparent and can be compared between insurance companies. The effective date for implementing SFAS 117: Insurance Contracts in Indonesia will take effect on January 1, 2025 with early implementation is permitted.

As at the authorisation date of Group’s consolidated financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new and amendments and interpretations of SFAS 117 to the Group’s consolidated financial statements. Beginning January 1, 2024, references to the individual SFAS and IFAS will be changed as published by FASB-IIA.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)

b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Pernyataan dan interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang berlaku efektif pada tahun berjalan (lanjutan)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru sebagai berikut:

- PSAK 118: "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan" yang akan menggantikan PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan";

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027 dan penerapan dini diperbolehkan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru tersebut dan pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1c.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

2. Material accounting policies information (continued)

b. Basis of measurement and preparation of the consolidated financial statements (continued)

New and revised statements and interpretation of financial accounting standards effective in the current year (continued)

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("FASB-IIA") has issued the following new standard:

- SFAS 118: "Presentation and Disclosure in Financial Statements" which will replace SFAS 201: "Presentation in Financial Statements";

The above standard will be effective on January 1, 2027 and early adoption is permitted.

As at the authorization date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of these new standards to the Group's consolidated financial statements.

c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and subsidiaries as described in Note 1c.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, wherein the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the *investee*).

The existence and effect of substantive potential voting rights in which the Group has the practical ability to exercise (i.e., substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls other entities.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Grup dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Grup. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

c. Principles of consolidation (continued)

The Group's financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Group and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

Parent entity prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for similar transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transaction between entities are eliminated in full.

The Group attributes the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity of the owners of the parent.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

c. Principles of consolidation (continued)

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (which are transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- c) Recognizes the fair value of the consideration received (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SFAS, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary; and*
- f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasian, setiap entitas di dalam Grup melakukan pencatatan dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing selama tahun berjalan dicatat dalam Rupiah dengan kurs tengah antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025	2024	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	16.782	16.162	1 United States Dollar (USD)
1 Euro (EUR)	19.753	16.851	1 Euro (EUR)
1 Poundsterling Inggris (GBP)	22.666	20.333	1 British Poundsterling (GBP)
1 Yen Jepang (JPY)	108	102	1 Japan Yen (JPY)
1 Dolar Singapura (SGD)	13.069	11.919	1 Singapore Dollar (SGD)

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas terkait fasilitas *non-cash loan* disajikan sebagai “kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya” dan dikelompokkan ke dalam aset tidak lancar lainnya.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

d. Foreign currency transactions and balances

In preparing the consolidated financial statements, each of the entities within the Group keeps records using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (“the functional currency”). The functional currency of the Group is Rupiah.

Transactions during the year in foreign currency are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount using the middle exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, which is Bank Indonesia’s middle rate as of December 31, 2025 and 2024, as follows:

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits), and time deposits with maturity periods of 3 months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

Cash and cash equivalents related to non-cash loan facilities are presented as “cash and cash equivalents restricted in use” and classified into other non-current assets.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

f. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal.

Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang lain-lain dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai. Lihat Catatan 3 untuk kebijakan akuntansi terkait penurunan nilai setelah penerapan PSAK 109.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan disajikan dalam “beban penurunan nilai”. Ketika piutang usaha dan piutang lain-lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap “beban penurunan nilai” pada laporan laba rugi.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

f. Trade receivables and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for merchandise sold or services performed in the ordinary main business.

If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as noncurrent assets.

Other receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to related parties of the Group.

Trade receivables and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment. See Note 3 for accounting policies related to impairment receivables after adoption of SFAS 109.

The amount of the impairment loss is recognised in profit or loss within “impairment expenses”. When a trade and other receivable for which an impairment allowance had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against “impairment expenses” in profit or loss.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

g. Instrumen keuangan

Aset keuangan

i) Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; dan
- 3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual arus kas—apakah penentuan arus kasnya hanya dari pembayaran pokok dan bunga.

ii) Pengakuan dan penghentian pengakuan

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

iii) Pengukuran

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

g. Financial instruments

Financial assets

i) Classification

The Group shall classify its financial assets into the following categories:

- 1) Financial assets measured at amortized cost;
- 2) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income; and
- 3) Financial assets at fair value through profit or loss.

This classification depends on the Group's business model and the contractual terms of cash flows - whether the determination of cash flows is solely from principal and interest payments.

ii) Recognition and derecognition

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot modify it after initial application.

iii) Measurement

- 1) Financial assets measured at amortized cost

This classification applies to debt instruments that are managed under the held-to-cash flow business model and have cash flows that meet the criteria “solely from payment of principal and interest”.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

iii) Pengukuran (lanjutan)

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.

Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

iii) Measurement (continued)

- 1) Financial assets measured at amortized cost (continued)

Financial assets are recognized initially at fair value plus related transaction costs. These financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method less impairment. Gains or losses on retirement or modification of financial assets carried at amortized cost are recognized in profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the profit or loss.

- 2) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

This classification applies to the following financial assets:

- A debt instrument that is managed under a business model which aims to hold financial assets in order to collect and sell contractual cash flows and for which the cash flows meet the criteria of “solely from payment of principal and interest”.

Changes in fair value of these financial assets are recorded in other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest income (including transaction costs using the effective interest method), gains or losses arising from discontinuation and foreign exchange gains and losses which are recognized in profit loss.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

iii) Pengukuran (lanjutan)

- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif (lanjutan)

Ketika aset keuangan dihentikan, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

- Investasi ekuitas di mana Entitas telah memilih secara tak terbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

- 3) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Biaya transaksi atas klasifikasi ini, dibebankan pada laba rugi. Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan sebagai berikut:

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi;
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi; dan
- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

iii) Measurement (continued)

- 2) Financial assets measured at fair value through comprehensive income (continued)

When a financial asset is discontinued, the cumulative fair value gain or loss that was previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

- Equity investments in which the entity has chosen irrevocably to present fair value gains and losses from a revaluation on other comprehensive income.

- 3) Financial assets measured at fair value through profit or loss

Transaction costs for this classification are charged to profit or loss. This classification applies to financial assets as follows:

- Debt instruments that do not have the criteria for amortized cost or fair value through other comprehensive income. The gain or loss on fair value will then be recorded in profit or loss;
- Investments in equity held for trading or for which other comprehensive income options are not applicable. Fair value gains or losses and related dividend income are recognized in profit or loss; and
- Derivatives that are not hedging instruments. The gain or loss on fair value is subsequently recognized in profit or loss.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

iii) Pengukuran (lanjutan)

- 3) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Biaya transaksi atas klasifikasi ini, dibebankan pada laba rugi. Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan sebagai berikut: (lanjutan)

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 109 diklasifikasikan sebagai berikut:

- i) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi; dan
- ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

g. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

iii) Measurement (continued)

- 3) Financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

Transaction costs for this classification are charged to profit or loss. This classification applies to financial assets as follows: (continued)

Options can be based on individual investments, however, they do not apply to equity investments held for trading. Fair value gains or losses from revaluation of equity investments, including foreign exchange components, are recognized in other comprehensive income. When an equity investment is derecognised, fair value gains or losses previously recognized in other comprehensive income are not reclassified to profit or loss. Dividends are recognized in profit or loss when the right to receive payments has been determined.

Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of SFAS 109 are classified as follows:

- i) Financial liabilities measured at amortized cost; and
- ii) Financial liabilities at fair value through profit or loss.

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value and, in the case of financial liabilities at amortized cost, less directly attributable transaction costs.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, liabilitas keuangan Grup mencakup utang usaha, pinjaman bank jangka panjang, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar dan utang lancar lainnya yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

g. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Initial recognition (continued)

As of December 31, 2025, the Group's financial liabilities include trade payables, long-term bank loans, other payables, accrued expenses and other current liabilities which are categorized as financial liabilities measured at amortized cost. Financial liabilities are classified as long-term liabilities if the maturities exceed 12 months and as current liabilities if the remaining maturities are less than 12 months.

Measurement after initial recognition

After initial recognition, financial liabilities at amortized cost that bear interest are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Gains or losses are recognized in profit or loss when the liability is derecognized and through the amortization process.

Derecognition

Financial liabilities are derecognized when they are terminated or cancelled or expired.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

g. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang prakiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian ("KKE"). Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan prakiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang usaha, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit, misalnya, *letter of credit* dan garansi bank. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Grup menilai KKE terhadap instrumen utang yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan basis *forward-looking*. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

g. Financial instruments (continued)

Impairment of financial assets

In each reporting period, the Group assesses whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses changes in default risk that occur over the expected life of the financial instrument rather than changes in the number of expected credit loss ("ECL"). In making the assessment, the Group compares the risk of default that occurs on financial instruments during the reporting period with the risk of default that occurs for financial instruments at initial recognition and considers the reasonableness and availability of information at the reporting date relating to past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which indicate an increase in credit risk since initial recognition.

The Group shall take a simplified approach in measuring ECL using a lifetime ECL reserve for all trade and other receivables and contract assets without a significant financing component and a generalized approach for other financial assets. A general approach includes reviewing significant changes in credit risk since their occurrence. The ECL's review includes assumptions regarding the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment also considers the use of credit enhancement, for example, letters of credit and bank guarantees. To measure ECL, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and maturities.

The Group assesses ECL against debt instruments measured at fair value through other comprehensive income on a forward-looking basis. The method of impairment is applied by considering whether credit risk has increased significantly.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

h. Persediaan

Persediaan diukur pada nilai yang terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Metode yang dipakai untuk menentukan biaya adalah metode rata-rata bergerak. Biaya perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung serta alokasi biaya *overhead* yang terkait dengan produksi. Persediaan tidak mencakup biaya pinjaman.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Provisi untuk persediaan usang dan persediaan tidak terpakai/tidak laris ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

i. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan beban yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka. Beban dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

h. Inventories

Inventories are measured at cost or net realisable value, whichever is lower. The method used to determine cost is the moving average method. Cost of finished goods and work in process comprises cost of materials, cost of direct labour and an appropriate proportion of directly attributable production overhead cost. It excludes borrowing costs.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated costs of completion and estimated costs necessary to make the sale.

A provision for obsolete and unused/slow moving inventories is determined on the basis of estimated future usage or sale of inventory items.

i. Prepaid expenses

Prepaid expenses are costs that have been paid but will be incurred in future periods, such as prepaid insurance premiums. Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

j. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Perusahaan memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang bagian atas laba rugi investasi setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi investasi diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari investee akan mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas investee yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi, sebagai berikut:

- a. Jika investasi menjadi entitas anak;
- b. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Perusahaan mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar; dan
- c. Ketika Perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas, Perusahaan mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika investee telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

j. Investment in associates

Associates are entities in which the Company has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but has no control or jointly control over those policies (significant influence).

Investment in associates is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is added or subtracted by the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee will reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of fixed assets and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Company discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate, as follows:

- a. *If the investment becomes a subsidiary;*
- b. *If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Company measures the retained interest at fair value; and*
- c. *When the Company discontinues the use of the equity method, the Company accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

j. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Jika bagian Perusahaan atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, maka Perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut.

Kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama adalah jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang ditentukan dengan menggunakan metode ekuitas ditambah dengan setiap kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto Perusahaan pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Kerugian yang diakui dengan menggunakan metode ekuitas atas selisih lebih investasi Perusahaan pada saham biasa diterapkan untuk komponen lain dari bagian Perusahaan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dalam urutan terbalik dengan tingkat senioritasnya (yaitu prioritas dalam likuidasi).

Setelah kepentingan Perusahaan dikurangkan menjadi nol, tambahan kerugian dicadangkan, dan liabilitas diakui, hanya sepanjang Perusahaan memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika entitas asosiasi atau ventura bersama kemudian melaporkan laba, maka Perusahaan mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama dengan bagian atas rugi yang belum diakui.

Perusahaan mengakui kelebihan rugi tersebut sebagai pengurang kepentingan jangka panjang pada entitas asosiasi tersebut.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

j. Investment in associates (continued)

If the Company's share of losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its carrying value in the associate or joint venture, the Company discontinues recognizing its share of further losses.

The interest in an associate or a joint venture is the carrying amount of the investment in the associate or joint venture determined using the equity method together with any long-term interests that, in substance, form part of the Company's net investment in the associate or joint venture. Losses recognized using the equity method in excess of the Company's investment in ordinary shares are applied to the other components of the Company's interest in an associate or a joint venture in the reverse order of their seniority (i.e. priority in liquidation).

After the Company's carrying value is reduced to zero, additional losses are provided for, and a liability is recognized, only to the extent that the Company has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture. If the associate or joint venture subsequently reports profits, the Company resumes recognizing its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognized.

The Company recognizes the excess as a deduction of long-term interest in the associate entity.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

k. Properti investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan properti investasi. Selanjutnya, properti investasi diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi; dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk dijual, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
- Tanggal awal sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

k. Investment properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment properties are measured at cost including transaction costs directly attributable to the acquisition of investment properties. Furthermore, investment property is measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. The carrying amount includes the cost of replacing the existing investment property at the time the cost is incurred, if the recognition criteria are met; and excludes daily costs of using investment properties.

Maintenance and repairment costs are charged to profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalized.

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

- Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner occupation, for a transfer from investment properties to owner-occupied property;*
- Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment properties to inventories;*
- End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment properties; and*
- Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.*

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

k. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

l. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut. Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan diakui dengan metode garis lurus dengan taksiran masa aset tetap adalah sebagai berikut:

Tahun/ Years		
Bangunan	20	Buildings
Mesin utama pabrik	15	Main factory machineries
Mesin pendukung pabrik	10	Supporting machineries
Peralatan pabrik	6	Factory equipment
Peralatan kantor	5	Office equipment
Kendaraan	4	Vehicles

**2. Material accounting policies information
(continued)**

k. Investment properties (continued)

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal.

Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

l. Fixed assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprise the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period. Subsequent to initial recognition, land is carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Depreciation is calculated using the straight-line method with the estimated useful lives of the assets as follows:

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

1. Aset tetap (lanjutan)

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan karena besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana semestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi komprehensif dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.

Pada setiap akhir tahun, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis. Pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

m. Sewa

Pada tanggal permulaan suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

1. Fixed assets (continued)

Lands are stated at cost and not depreciated due to the high possibility that the land rights are renewable/extendable at its maturity date.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized. All other repairs and maintenance are charged to the statements of comprehensive income during the financial period in which they are incurred.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any, are removed from the accounts. Any resulting gain or loss on disposal is reflected in the current operations.

At end of year, the Group periodically reviews the useful lives of the assets, asset's residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical specification. Effect of any changes in estimate is accounted for on a prospective basis.

m. Lease

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:

- a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- b. Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- c. Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal permulaan atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

m. Lease (continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- a. *The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- b. *The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- c. *The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:*
 - *The Group has the right to operate the asset; or*
 - *The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

At inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks liabilitas sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentian jika Grup cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Grup mengakui aset hak-guna dan utang sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari utang sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Periode penyusutan untuk aset hak-guna dengan opsi beli yang dieksekusi tersebut mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

m. Lease (continued)

Lease payments included in the lease liability index include: fixed rent payments, index-dependent variable rents, amounts to be paid in residual value guarantees and purchase option execution prices, renewal options or termination penalties if the Group is reasonably certain to execute such options.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

If the lease transfers the ownership of the underlying asset at the end of the lease term, then the asset will be depreciated from the beginning of the lease term to the end of the underlying asset's useful lives. The depreciation periods for the right-of-use assets with buy options executed should refer to the policy for the property and equipment.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Group's incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Utang sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai *residual*, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Grup menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah berdasarkan sewa per-sewa.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan dibebankan pada laba rugi. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Sewa aset bernilai rendah adalah sewa untuk perlengkapan umum seperti komputer, laptop, telepon genggam, dan perlengkapan kantor lainnya, serta aset lain yang harga barunya tidak lebih dari plafon nilai rendah yang ditetapkan oleh Grup.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

m. Lease (continued)

After the initial acquisition, a lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Group applies the exemption for low-value assets on a lease-by-lease basis; and for all other leases of low value asset.

Furthermore, payments associated with contracts included in the exception, which are payments associated with all short-term leases and certain leases of all low-value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in profit or loss. The lease payments associated with those leases will be recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets are those of general equipment which comprise computers, tablets, mobile phones and small items of office supplies, and other assets which have value less than the maximum amount of low value set in the Group's policy.

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)

n. Aset tak berwujud

Pengeluaran tertentu yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan taksiran masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan legal hak atas tanah (Hak Guna Usaha) diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah tersebut.

o. Pengakuan pendapatan dan beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;
 - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - Kontrak memiliki substansi komersial;
 - Besar kemungkinan Grup akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan;
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan;
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak; dan
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

2. Material accounting policies information (continued)

n. Intangible assets

Certain expenditures that have a useful lives of more than one year, are deferred and amortized in accordance with the estimated useful lives using the straight-line method.

Expenses incurred in connection with acquiring legal rights to land (Leasehold) are amortized over the age of legal rights of the land.

o. Revenue and expense recognition

In determining revenue recognition, the Group performs analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. *Identify contracts with customers with certain criteria as follows:*
 - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract;*
 - *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;*
 - *The contract has commercial substance;*
 - *It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred.*
2. *Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer;*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer;*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each good or service promised in the contract; and*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).*

2. Informasi kebijakan akuntansi material (lanjutan)

o. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi dari sepanjang waktu:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan hingga saat ini.

Kriteria berikut ini juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

Penjualan barang dan jasa

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari jasa tersebut.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

2. Material accounting policies information (continued)

o. Revenue and expense recognition (continued)

A performance obligation may be satisfied at the following:

- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.*

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- *The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group's performance as the Group performs;*
- *The Group's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and*
- *The Group's performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the Group has an enforceable right to payment for performance completed to date.*

The following recognition criteria must also be met before revenue is recognised.

Sales of goods and services

Revenue from the sale of goods is recognized when the control of goods has been transferred to the customer. Revenue from the rendering of service is recognized when the customer has received and consumed benefit from the service.

Expense recognition

Expenses are recognized as incurred (accrual basis), unless they create an asset related to future contract activity.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

p. Pajak penghasilan

Pajak kini

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset.

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

p. Income tax

Current tax

The tax expense is the combined amount of current tax and deferred tax which calculated in determining profit or loss in the period. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset.

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of prior periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

p. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

p. Income tax (continued)

Current tax (continued)

Deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) The initial recognition of goodwill; or*
- b) The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

Deferred tax

Deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

p. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- i. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- ii. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak yang sama atas entitas kena pajak yang sama atas: entitas kena pajak yang sama; atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

p. Income tax (continued)

Deferred tax (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- i. The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and
- ii. The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either: the same taxable entity; or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

q. Liabilitas imbalan pascakerja

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diamendemen dengan Perpu No.2/2022 dan UU No.6/2023 atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") atau Peraturan Perusahaan ("PP"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB atau PP menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB atau PP adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada periode dimana beban tersebut terjadi. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

q. Post-employment benefits obligation

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Law No. 11/2020 on Job Creation ("JCL") as amended by Perpu No.2/2022 and Law No.6/2023 or the Company Collective Labour Agreement (the "CLA") or Company Regulation ("CR"), whichever is higher. Since the Job Creation Law or Labour Law or CLA or CR sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance, pension plans under the Job Creation Law or Labour Law or CLA or CR represent defined benefit plans.

The liability recognized in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of government bonds are used.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in the statement of other comprehensive income in the period in which they arise. The accumulated remeasurement balance is reported in retained earnings.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

q. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbalan hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- i) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- ii) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 219 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lain seperti cuti besar berimbalan jangka panjang dan penghargaan masa kerja dihitung dengan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

r. Penggunaan saldo laba berdasarkan persetujuan dari pemilik modal

Penggunaan saldo laba ditentukan berdasarkan persetujuan dari pemilik modal yang meliputi pembagian dividen dan penyisihan cadangan umum.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

**q. Post-employment benefits obligation
(continued)**

The remeasurement of the net defined benefit liabilities (assets) which comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets and any change in effect of the asset are recognized in other comprehensive income.

Termination benefits

The Group recognizes liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- i) When the Group no longer can withdraw the offer of those benefits; and*
- ii) When the Group recognizes costs for a restructuring within the scope of SFAS 219 and involves payment of termination benefits.*

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Other long-term employee benefits

Other long-term benefits such as long service leave and past service rewards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

r. Utilization of retained earnings based on the approval letter of the shareholders

Retained earnings utilization are based on the capital owner's approval which include dividend's distribution and allocation of general reserve fund.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

s. Transaksi dengan pihak berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; dan
 - iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait entitas dengan entitas lain);
 - ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

**2. Material accounting policies information
(continued)**

s. Transaction with related parties

A related party is a person or entity that is related to the reporting entity.

1. *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:*
 - i) *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii) *Has significant influence over the reporting entity; and*
 - iii) *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
2. *One entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:*
 - i) *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - ii) *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii) *Both entities are joint ventures of the same third parties;*
 - iv) *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

s. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

- v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam (1); atau
- vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Pihak berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini didefinisikan dalam ruang lingkup Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara.

Grup telah menerapkan pengecualian dalam PSAK 224 yang menyajikan luasnya penjelasan dalam kaitannya dengan transaksi dan saldo akun pihak berelasi, termasuk ikatan dengan entitas terkait dengan Pemerintah.

t. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan atas penurunan nilai aset tertentu (yaitu aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

s. Transaction with related parties (continued)

2. One entity is related to the reporting entity if it meets one of the following: (continued)

- v) The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1); or
- vii) A person identified in (1) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

Related parties to the Government are entities controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. Government in this case is defined within the scope of the State-Owned Enterprises (SOE) Regulatory Agency.

The Group has applied the exemption in SFAS 224 on disclosing the extent of detail in relation to related party transactions and outstanding balances, including commitments with Government-related parties.

t. Impairment of non-financial assets

The Group assesses at the end of each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

**2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)**

t. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai “rugii penurunan nilai”.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

**2. Material accounting policies information
(continued)**

**t. Impairment of non-financial assets
(continued)**

An asset's recoverable amount is the higher of an asset or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statement of comprehensive income as “impairment losses”.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiplier or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statements of comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

An assessment is made at each annual reporting period to determine whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

2. Informasi kebijakan akuntansi material
(lanjutan)

t. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat bersih setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

2. Material accounting policies information
(continued)

t. Impairment of non-financial assets
(continued)

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

If that is the case, the carrying amount of the assets is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the assets in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of comprehensive income. After such reversal, the depreciation charge on the said assets is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is tested for impairment annually (as at December 31) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than their carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.

3. Pertimbangan akuntansi penting dan estimasi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas serta pengungkapan liabilitas kontinjensi pada akhir tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut di mana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan di mana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

Pertimbangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK 109 terpenuhi.

Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti yang dijelaskan pada Catatan 2g.

3. Critical accounting judgments and significant accounting estimates

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgments, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group reported in future years.

Judgments

Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definitions set forth in SFAS 109.

Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies described in Note 2g.

3. Pertimbangan akuntansi penting dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Saat pengakuan pendapatan

Grup mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada suatu periode waktu atau pada suatu titik waktu tergantung pada evaluasi manajemen ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa yang dijanjikan dan berdasarkan tingkat kemajuan dalam penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Grup menetapkan bahwa pendapatan dari penjualan uang kertas, uang logam dan dokumen sekuritas diakui pada suatu titik waktu karena kendali atas barang yang dijanjikan dialihkan kepada pelanggan pada suatu titik waktu tertentu. Namun, untuk produk digital, Grup menetapkan bahwa pendapatan diakui pada suatu periode waktu atau titik waktu tergantung pada kontrak.

Estimasi dan asumsi

Penilaian kerugian kredit ekspektasian (KKE) pada piutang usaha

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam penghitungan KKE, awalnya menggunakan matriks provisi berdasarkan tarif gagal bayar historis untuk piutang usaha.

Matriks provisi menentukan tingkat provisi tergantung pada jumlah hari piutang usaha telah lewat jatuh tempo. Grup juga menggunakan pengelompokan yang tepat jika historis pengalaman kerugian kredit menunjukkan pola kerugian yang berbeda secara signifikan untuk segmen pelanggan yang berbeda.

Grup kemudian menyesuaikan historis pengalaman kerugian kredit dengan informasi berwawasan ke depan berdasarkan data yang dapat diobservasi saat ini untuk mencerminkan pengaruh kondisi ekonomi saat ini dan yang diperkirakan.

Grup menyesuaikan tarif gagal bayar historis ke tarif gagal bayar berwawasan ke depan dengan menentukan faktor ekonomi terkait.

3. Critical accounting judgments and significant accounting estimates (continued)

Judgments (continued)

Timing of revenue recognition

The Group recognizes revenue from contracts with customers over time or at a point in time depending on management evaluation of when the customer obtains control of the promised goods or services and based on the extent of progress towards completion of the performance obligation. The Group has determined that revenues from sale of banknotes, coins and other security documents are to be recognized at a point in time because control of the promised goods is transferred to the customers at a point in time. However, for digital products, the Group determines that revenue is recognized either over a period of time or at a point in time, depending on the contract.

Estimates and assumptions

Assessment for expected credit loss (ECL) on trade receivable

The Group applies the simplified approach in the computation of ECL, initially uses a provision matrix based on historical default rates for trade receivables.

The provision matrix specifies provision rates depending on the number of days that a trade receivable is past due. The Group also uses appropriate groupings if its historical credit loss experience showed significantly different loss patterns for different customer segments.

The Group then adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information on the basis of current observable data to reflect the effects of current and forecasted economic conditions.

The Group adjusts historical default rate to forward-looking default rate by determining the closely related economic factor.

3. Pertimbangan akuntansi penting dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penilaian kerugian kredit ekspektasian (KKE) pada piutang usaha (lanjutan)

Grup secara teratur meninjau metodologi dan asumsi yang digunakan untuk memperkirakan KKE untuk mengurangi perbedaan antara estimasi dan pengalaman kerugian kredit yang sebenarnya.

Penentuan hubungan antara tingkat gagal bayar historis dan kondisi ekonomi yang diperkirakan merupakan estimasi akuntansi yang signifikan. Oleh karena itu, ketentuan KKE pada piutang usaha memiliki pengaruh terhadap perubahan asumsi tentang prakiraan kondisi ekonomi.

Grup menentukan penyisihan KKE menggunakan pendekatan yang disederhanakan berdasarkan estimasi tertimbang probabilitas dari nilai sekarang dari semua kekurangan kas selama perkiraan umur aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi. KKE diberikan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh kemungkinan peristiwa gagal bayar dalam 12 bulan ke depan kecuali ada peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal, dimana dalam hal ini KKE diberikan berdasarkan KKE sepanjang tahun.

Ketika menentukan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan, Grup mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya dan yang relevan untuk instrumen keuangan tertentu yang sedang dinilai seperti, tetapi tidak terbatas pada, faktor-faktor berikut:

- 1) Penurunan peringkat kredit eksternal dan internal aktual atau yang diharapkan;
- 2) Perubahan merugikan yang ada atau yang diperkirakan terjadi dalam bisnis, keuangan atau kondisi ekonomi; dan
- 3) Perubahan merugikan signifikan yang aktual atau yang diharapkan dalam hasil operasi peminjam.

3. Critical accounting judgments and significant accounting estimates (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Assessment for expected credit loss (ECL) on trade receivable (continued)

The Group regularly reviews the methodology and assumptions used to estimate ECL to reduce differences between the estimates and actual credit loss.

The determination of the relationship between historical default rates and forecasted economic conditions is a significant accounting estimate. Accordingly, the provision for ECL on trade receivables is sensitive to change in assumptions about forecasted economic conditions.

The Group determines the allowance for ECL using simplified approach based on the probability weighted estimate of the present value of all cash shortfalls over the expected life of financial assets at amortized cost. ECL is provided for credit losses that result from possible default events within the next 12-months unless there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, in which case ECL is provided based on lifetime ECL.

When determining if there has been a significant increase in credit risk, the Group considers reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort and that is relevant for the particular financial instrument being assessed such as, but not limited to, the following factors:

- 1) *Actual or expected external and internal credit rating downgrade;*
- 2) *Existing or forecasted adverse changes in business, financial or economic conditions; and*
- 3) *Actual or expected significant adverse changes in the operating results of the borrower.*

3. Pertimbangan akuntansi penting dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penilaian kerugian kredit ekspektasian (KKE) pada piutang usaha (lanjutan)

Grup juga menganggap aset keuangan yang telah lewat lebih dari 180 hari sebagai titik terakhir dimana KKE seumur hidup harus diakui, kecuali dapat menunjukkan bahwa hal ini tidak mewakili risiko yang signifikan dalam risiko kredit, seperti ketika tidak adanya pembayaran merupakan kesalahan administrasi daripada akibat kesulitan keuangan peminjam.

Grup telah menilai bahwa KKE atas aset keuangan lainnya kas di bank dan setara kas pada biaya perolehan diamortisasi tidak material karena transaksi yang berkaitan dengan aset keuangan ini dilakukan oleh Grup hanya dengan bank dan perusahaan terkemuka dengan reputasi kredit yang baik dan relatif. Risiko gagal bayar yang rendah. Oleh karena itu, tidak ada penyisihan untuk KKE atas aset keuangan lainnya sebesar biaya perolehan diamortisasi yang diakui pada tahun 2025.

Penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap

Estimasi dari masa manfaat aset tetap berdasarkan penelaahan secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya.

Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap 4 sampai dengan 20 tahun. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset.

3. Critical accounting judgments and significant accounting estimates (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Assessment for expected credit loss (ECL) on trade receivable (continued)

The Group also considers financial assets that are more than 180 days past due to be the latest point at which lifetime ECL should be recognized, unless it can be demonstrated that this does not represent a significant risk in credit risk, such as when non-payment was an administrative oversight rather than resulting from financial difficulty of the borrower.

The Group has assessed that the ECL of its other financial assets - cash in banks and cash equivalents at amortized cost - is immaterial because transactions related to these financial assets are carried out by the Group only with reputable banks and companies with relatively good credit standing and low default risk. Therefore, there is no provision for ECL on other financial assets at amortized cost recognized in 2025.

Depreciation and estimated useful lives of fixed assets

The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the group collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The costs of property and equipment are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives.

The management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years. Changes in the expected level of usage and technological development could affect the economic useful lives and the residual values of these assets.

The estimated useful lives are reviewed at least at each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets.

3. Pertimbangan akuntansi penting dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 7.

Imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/ (pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun.

Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan. Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

3. Critical accounting judgments and significant accounting estimates (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Allowance for impairment losses of inventories

Allowance for impairment losses of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices and estimated costs to sell. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. Further details are disclosed in Note 7.

Post-employment benefits

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions.

The assumptions used in determining the net cost/ (income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rate, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligation.

In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of high quality corporate bonds (or government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation. Other key assumptions for pension obligation benefits are based in part on current market conditions.

3. Pertimbangan akuntansi penting dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Komitmen sewa

Komitmen sewa operasi – Grup sebagai Pesewa

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa. Grup menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Perusahaan menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut serta berjangka waktu pendek.

Grup tidak perlu melakukan penyesuaian apapun terhadap akuntansi untuk aset dimiliki sebagai pesewa dalam sewa operasi sebagai akibat dari penerapan PSAK 116.

3. Critical accounting judgments and significant accounting estimates (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Lease commitments

Operating lease commitments – Group as Lessor

The Group has entered into various lease agreements. The Group has determined that these are operating leases since the Company bears substantially all the significant risks and rewards of ownership of the related assets and short-term period as well.

The Group did not need to make any adjustments to the accounting for assets held as lessor under operating leases as a result of the implementation of SFAS 116.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. Kas dan setara kas

4. Cash and cash equivalents

	2025	2024	
Kas	424.431.387	419.726.525	Cash
Bank			Banks
Pihak berelasi (Catatan 33a)	796.603.586.495	474.313.841.818	Related parties (Note 33a)
Pihak ketiga:			Third parties:
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	17.341.674.930	16.056.559.216	PT BPD Jawa Barat and Banten Tbk
PT BPD Jawa Timur Tbk	1.664.223.240	1.478.906.519	PT BPD Jawa Timur Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	695.491.776	436.621.597	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank DKI	211.334.689	212.586.974	PT Bank DKI
PT Bank KB Bukopin Tbk	75.708.754	54.932.691	PT Bank KB Bukopin Tbk
Bank lainnya	13.100.627	10.147.845	Other banks
Sub jumlah	816.605.120.511	492.563.596.660	Subtotal
Mata uang asing			Foreign currencies
Pihak berelasi (Catatan 33a)	2.937.769.679	5.660.586.664	Related parties (Note 33a)
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Bank HSBC Indonesia	307.553.427	284.532.989	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	5.641.102	7.372.135	PT Bank Central Asia Tbk
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	170.337	10.085.533	PT BPD Jawa Barat and Banten Tbk
Sub jumlah	3.251.134.545	5.962.577.321	Subtotal
Jumlah kas di bank	819.856.255.056	498.526.173.981	Total cash in banks
Setara kas			Cash equivalents
Pihak berelasi (Catatan 33b)	1.398.805.000.000	1.471.665.643.862	Related parties (Note 33b)
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Bank BJB Syariah	30.000.000.000	30.000.000.000	PT Bank BJB Syariah
PT Bank Mega Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000	PT Bank Mega Syariah
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	-	145.000.000.000	PT BPD Jawa Barat and Banten Tbk
Sub jumlah	1.438.805.000.000	1.656.665.643.862	Subtotal
Jumlah	2.259.085.686.443	2.155.611.544.368	Total

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. Kas dan setara kas (lanjutan)

Tingkat suku bunga kontraktual untuk deposito bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Rupiah	3,15% - 5,00%	3,15% - 6,70%	Rupiah
Mata uang asing	4,00%	1,00% - 4,50%	Foreign currencies

4. Cash and cash equivalents (continued)

Contractual interest rates on short-term bank deposits are as follows:

5. Piutang usaha

Piutang usaha terdiri dari:

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 33c)	18.308.645.000	17.692.785.974	Related parties (Note 33c)
Pihak ketiga	448.308.189.458	623.706.409.887	Third parties
Sub jumlah	466.616.834.458	641.399.195.861	Subtotal
Penyisihan kerugian penurunan nilai ekspektasian	(17.783.321.902)	(15.465.750.089)	Expected impairment losses
Jumlah	448.833.512.556	625.933.445.772	Total

5. Trade receivables

Trade receivables consist of:

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of these trade receivables is as follows:

	2025	2024	
Sampai dengan 3 bulan	428.711.409.232	605.763.235.611	Up to 3 months
3 - 12 bulan	9.363.229.907	10.481.254.201	3 - 12 months
12 - 24 bulan	4.722.970.122	4.489.751.772	12 - 24 months
Lebih dari 24 bulan	23.819.225.197	20.664.954.277	More than 24 months
Sub jumlah	466.616.834.458	641.399.195.861	Subtotal
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang ekspektasian	(17.783.321.902)	(15.465.750.089)	Expected impairment losses allowance
Jumlah	448.833.512.556	625.933.445.772	Total

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. Piutang usaha (lanjutan)

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Saldo awal	15.465.750.089	14.547.530.000	<i>Beginning balance</i>
Penambahan tahun berjalan	2.317.571.813	918.220.089	<i>Addition during the year</i>
Saldo akhir	17.783.321.902	15.465.750.089	<i>Ending balance</i>

Grup berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian atas kemungkinan piutang usaha tak tertagih.

5. Trade receivables (continued)

The movement of allowance for impairment of trade receivables is as follows:

6. Piutang lain-lain

Piutang lain-lain terdiri dari:

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 33d)	356.425.445	287.838.726	<i>Related parties (Note 33d)</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Lainnya	31.590.081.441	40.381.147.505	<i>Others</i>
Sub jumlah	31.946.506.886	40.668.986.231	<i>Subtotal</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai ekspektasian	(25.595.612.497)	(25.587.805.457)	<i>Expected impairment losses allowance</i>
Jumlah	6.350.894.389	15.081.180.774	<i>Total</i>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Saldo awal	25.587.805.457	16.339.894.124	<i>Beginning balance</i>
Reklasifikasi	-	15.000.000.000	<i>Reclassification</i>
Penambahan (pengurangan) tahun berjalan	7.807.040	(5.752.088.667)	<i>Addition (deduction) during the year</i>
Saldo akhir	25.595.612.497	25.587.805.457	<i>Ending balance</i>

Grup berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian atas kemungkinan piutang lain-lain tak tertagih.

6. Other receivables

Other receivables consist of:

The movement of allowance for impairment of other receivables is as follows:

The Group believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7. Persediaan

7. Inventories

	2025	2024	
Bahan baku	433.413.184.973	393.183.627.780	Raw material
Persediaan dalam proses:			Work in progress:
Uang kertas	238.537.680.886	62.223.132.065	Banknotes
Uang logam	8.972.972.660	3.695.724.554	Coins
Non-uang	31.646.013.039	39.673.615.756	Non-currency
Barang jadi	74.690.885.399	69.481.030.664	Finished goods
Sub jumlah	787.260.736.957	568.257.130.819	Subtotal
Penyisihan kerugian penurunan nilai ekspektasian	(56.444.924.091)	(58.960.585.921)	Expected impairment losses allowance
Jumlah	730.815.812.866	509.296.544.898	Total

Perubahan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment of inventories are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal tahun	58.960.585.921	59.164.794.098	Beginning balance
Penambahan (pengurangan) tahun berjalan	(2.515.661.830)	(204.208.177)	Addition (deduction) during the year
Saldo akhir tahun	56.444.924.091	58.960.585.921	Ending balance

Seluruh persediaan Grup telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah nilai pertanggungan asuransi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 589.009.794.156 dan Rp 520.548.217.369. Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya yang mungkin terjadi.

The Group's inventories are insured against losses from fire disaster, stealing and other risk with the amount of insurance coverage as of December 31, 2025 and 2024 are amounting to Rp 589,009,794,156 and Rp 520,548,217,369, respectively. The Group believes that the insurance coverage is sufficient to cover the possibility of fire disaster risk and other risks that may occur.

8. Perpajakan

8. Taxation

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	2025	2024	
Perusahaan			The Company
Pajak penghasilan:			Income taxes:
Pasal 21	26.415.428.998	25.269.767.833	Article 21
PPN	67.892	-	VAT
Entitas anak			Subsidiaries
Pasal 21	377.253.235	597.884.639	Article 21
Pasal 28	1.043.815.418	-	Article 28
PPN	331.180.921	17.472.930.526	VAT
Jumlah	28.167.746.464	43.340.582.998	Total

8. Perpajakan (lanjutan)

a. Pajak dibayar dimuka (lanjutan)

Pajak yang dibayar dimuka PPh Pasal 21 tahun 2025 sebesar Rp 26.415.428.998, yang terdiri dari Rp 21.421.800.115 yang merupakan yang merupakan Kelebihan Bayar PPh pasal 21 Tahun Pajak 2025 akibat Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : PP-58 Tahun 2023 Mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan juklak Peraturan Pemerintah tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: PMK 168 Tahun 2023 Mengenai Petunjuk Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi. Berdasarkan Ketentuan tersebut, Peruri melakukan perhitungan kembali atas PPh pasal 21 terutang Tahunan Orang Pribadi untuk masa Januari s.d Desember 2025 dengan menggunakan tarif pajak Progresif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), dan hasil perhitungan menunjukkan Kelebihan bayar yang akan dikompensasi ke masa berikutnya di Tahun 2026.

Selain itu terdapat sebesar Rp 4.993.628.883 yang merupakan pengajuan restitusi atas penyetoran angsuran PPh pasal 25 masa Oktober tahun 2024 sebesar Rp 2.199.267.767, November tahun 2024 sebesar Rp 2.199.267.767 dan Desember tahun 2024 sebesar Rp 595.093.349 yang dilakukan melalui Coretax. Atas Pengajuan Restitusi atas angsuran PPh pasal 25 Tahun 2024 tersebut pengadministrasian melalui mekanisme pemindahbukuan ke akun PPh Pasal 21 dan masih dalam proses oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai dibayar dimuka tahun 2025 sebesar Rp 67.892 merupakan saldo lebih bayar yang akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

8. Taxation (continued)

a. Prepaid taxes (continued)

The tax paid in advance for Article 21 Income Tax in 2025 amounted to Rp. 26,415,428,998, which consists of Rp. 21,421,800,115 which is the Excess Payment of Article 21 Income Tax for the 2025 Tax Year due to the Implementation of Government Regulation (PP) Number: PP-58 of 2023 Concerning the Article 21 Income Tax Withholding Rate on Income in Connection with Work, Services or Activities of Individual Taxpayers and the operational guidelines of the Government Regulation, namely the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number: PMK 168 of 2023 Concerning Instructions for Tax Withholding on Income in Connection with Work, Services or Activities of Individuals. Based on these provisions, Peruri recalculated the annual Personal Income Tax Article 21 payable for the period January to December 2025 using the progressive tax rate as stipulated in Article 17 of the Income Tax Law. The calculation results indicate an overpayment that will be carried forward to the next period in 2026.

In addition, there is Rp 4,993,628,883 which is a restitution application for the payment of income tax article 25 installments for the October 2024 period amounting to Rp 2,199,267,767, November 2024 amounting to Rp 2,199,267,767 and December 2024 amounting to Rp 595,093,349 which is made through Coretax. The Submission of Restitution for the installment of Income Tax Article 25 of 2024 is administered through a book-transfer mechanism to the Income Tax Article 21 account and is still in process by the Directorate General of Taxes.

Prepaid Value Added Tax (VAT) for 2025 amounting to Rp 67,892 represents an overpayment balance that will be compensated against the subsequent tax period in accordance with the prevailing tax regulations.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. Perpajakan (lanjutan)

8. Taxation (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	2025	2024	
Perusahaan			The Company
Pajak penghasilan:			Income taxes:
Pasal 4 (2)	439.041.641	120.020.369	Article 4 (2)
Pasal 21	42.002.064	163.297.245	Article 21
Pasal 22	2.889.666.357	13.014.186.569	Article 22
Pasal 23	4.232.908.502	685.103.845	Article 23
Pasal 25	549.863.299	-	Article 25
Pasal 26	105.266.301	-	Article 26
Pasal 29	7.875.318.794	2.835.777.486	Article 29
PPN	114.578.683.454	61.395.512.410	VAT
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak penghasilan:			Income taxes:
Pasal 4 (2)	867.437.290	700.022.503	Article 4 (2)
Pasal 21	401.892.226	36.282.588	Article 21
Pasal 22	8.623.471	9.348.227	Article 22
Pasal 23	84.214.158	100.797.407	Article 23
Pasal 25	189.642.230	188.624.741	Article 25
Pasal 26	5.995.992	-	Article 26
Pasal 29	33.749.871	72.637.990	Article 29
PPN	894.256.965	1.560.939.333	VAT
Jumlah	133.198.562.615	80.882.550.713	Total

c. Beban pajak penghasilan

c. Current tax

	2025	2024	
Perusahaan			The Company
Pajak kini	91.070.612.068	88.987.563.342	Current tax
Pajak tangguhan	(13.223.503.778)	(26.225.491.787)	Deferred tax
Sub jumlah	77.847.108.290	62.762.071.555	Subtotal
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak kini	8.720.244.500	9.927.878.558	Current tax
Pajak tangguhan	34.249.859	(769.444.155)	Deferred tax
Sub jumlah	8.754.494.359	9.158.434.403	Subtotal
Jumlah	86.601.602.649	71.920.505.958	Total

Rekonsiliasi antar laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran laba kena pajak Grup serta perhitungan beban dan utang pajak penghasilan badan tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before corporate income tax, as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the Group's taxable income, and the computation of current corporate income tax payable and current income tax expense are as follows:

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. Perpajakan (lanjutan)

8. Taxation (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Current tax (continued)

	2025	2024	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	325.030.801.307	243.710.883.207	Consolidated profit before income tax
Dikurangi:			Less:
Eliminasi	(49.371.914.609)	12.374.463.056	Elimination
Laba (rugi) entitas anak sebelum pajak	25.897.353.493	(4.905.208.419)	Profit (loss) of subsidiaries before tax
Laba sebelum pajak yang diatribusikan ke Perusahaan	301.556.240.191	251.180.137.846	Profit before tax attributable to the Company
<u>Beda temporer</u>			<u>Timing differences</u>
Beban imbalan kerja	30.277.493.452	19.357.086.000	Employee benefits expense
Beban utilitas	324.775.542	378.311.642	Utilities expense
Beban akrual	(23.711.362.640)	16.796.790.466	Accrued expense
Penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan	171.832.328	(1.522.284.118)	Allowance for impairment losses of inventories
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	2.261.860.594	(5.785.429.185)	Allowance for impairment losses of receivables
Beban penyusutan aset tetap	57.617.438.302	91.030.551.836	Depreciation expense of fixed assets
Beban penyusutan aset hak guna	17.785.255	-	Depreciation expense of right of use assets
<u>Beda tetap</u>	45.441.264.560	33.053.759.794	<u>Permanent difference</u>
Perkiraan penghasilan kena pajak	413.957.327.584	404.488.924.281	Estimated taxable income
Beban pajak penghasilan kini Perusahaan	91.070.612.068	88.987.563.342	Current income tax expense
Dikurangi pajak penghasilan:			Less income tax:
Pasal 22	17.400.039.944	27.453.307.844	Article 22
Pasal 23	59.196.893.742	38.905.068.109	Article 23
Pasal 25	6.598.359.588	19.793.409.903	Article 25
Taksiran kurang bayar pajak penghasilan Perusahaan	7.875.318.794	2.835.777.486	Estimated tax underpayment of the Company

8. Perpajakan (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Grup akan melaporkan laba kena pajak Grup dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2025 dengan jumlah yang sama dengan perhitungan laba kena pajak tahun 2025 tersebut di atas.

Grup secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam SPT dimana pada suatu situasi tertentu peraturan perpajakan yang berlaku memerlukan interpretasi. Manajemen menetapkan ketentuan mana yang tepat atas dasar jumlah yang diharapkan akan dibayarkan kepada pihak berwenang.

Grup telah mengimplementasikan PMK No. 66 Tahun 2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau/ kenikmatan hal ini sehubungan dengan telah berlakunya atas PP No. 55 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan.

Sejak 1 Januari 2024 sesuai dengan PMK No. 168 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi yang merupakan juga dari Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

8. Taxation (continued)

c. Current tax (continued)

The Group will report taxable income in its Annual Tax Return (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) year 2025 using the same figures as shown in the above calculation of the 2025 taxable income.

The Group periodically evaluates positions taken in SPT with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. Management establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the authorities.

The Group has implemented PMK No. 66 of 2023 dated July 1, 2023 concerning income tax treatment of compensation or compensation in connection with works or services received or obtained in kind and/or enjoyment, this is in connection with the enactment of GR No. 55 of 2022 dated December 20, 2022 concerning adjustments to regulations in the income tax sector.

Since January 1, 2024 in accordance with PMK No. 168 of 2023 dated December 29, 2023 concerning Guidelines for the Implementation of Tax Withholding on Income in Connection with Employment, Services or Activities of Individuals which is also from Government Regulation No. 58 of 2023 concerning Income Tax Withholding Rates Article 21 on Income in Connection with Employment, Services or Activities of Individual Taxpayers.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. Perpajakan (lanjutan)

8. Taxation (continued)

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

	1 Januari/ January 1, 2025	Dibebankan ke laba rugi/ Charged to profit (loss)	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2025	
Perusahaan:					The Company:
Imbalan pascakerja	88.441.392.722	6.661.048.559	(6.305.502.379)	88.796.938.902	Post-employment benefits
Penyisihan penurunan nilai piutang	4.761.404.000	497.609.331	-	5.259.013.331	Provision for impairment receivables
Penyisihan penurunan nilai persediaan	8.610.771.981	37.803.112	-	8.648.575.093	Provision for impairment inventories
Depresiasi aset tetap	(193.886.591.656)	11.091.550.620	-	(182.795.041.036)	Depreciation of fixed assets
Depresiasi aset hak guna	-	3.912.756	-	3.912.756	Depreciation of right of use assets
Beban akrual	60.990.206.555	(5.223.099.781)	-	55.767.106.774	Accrued expense
Beban utilitas	(83.228.560)	154.679.180	-	71.450.620	Utility expense
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(31.166.044.958)	13.223.503.777	(6.305.502.379)	(24.248.043.560)	Total deferred tax liabilities
Entitas Anak					Subsidiaries
Imbalan pascakerja	2.346.029.951	21.476.092	340.288.678	2.707.794.721	Post-employment benefits
Penyisihan penurunan nilai piutang	1.000.902.562	(40.351.817)	-	960.550.745	Provision for impairment receivables
Penyisihan penurunan nilai persediaan	4.360.556.920	(591.248.714)	-	3.769.308.206	Provision for impairment inventories
Depresiasi aset tetap	453.886.200	(26.665.158)	-	427.221.042	Depreciation of fixed assets
Depresiasi aset hak guna	-	(269.464)	-	(269.464)	Depreciation of right of use assets
Beban akrual	1.569.252.260	(333.255.623)	-	1.235.996.637	Accrued expense
Uang muka	3.300.000.000	-	-	3.300.000.000	Advance
Lain-lain	183.318.328	1.094.368	-	184.412.696	Others
Jumlah aset pajak tangguhan	13.213.946.221	(969.220.316)	340.288.678	12.585.014.583	Total deferred tax assets
Jumlah aset (liabilitas) pajak tangguhan - neto	(17.952.098.737)	12.254.283.461	(5.965.213.701)	(11.663.028.977)	Total deferred tax assets (liabilities)-net

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. Perpajakan (lanjutan)

8. Taxation (continued)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax (continued)

	1 Januari/ January 1, 2024	Dibebankan ke laba rugi/ Charged to profit (loss)	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2024	
Perusahaan:					The Company:
Imbalan pascakerja	79.872.094.402	4.258.558.920	4.310.739.400	88.441.392.722	Post-employment benefits
Penyisihan penurunan nilai piutang	6.034.198.421	(1.272.794.421)	-	4.761.404.000	Provision for impairment receivables
Penyisihan penurunan nilai persediaan	8.945.674.487	(334.902.506)	-	8.610.771.981	Provision for impairment inventories
Depresiasi aset tetap	(213.913.439.688)	20.026.848.032	-	(193.886.591.656)	Depreciation of fixed assets
Beban pegawai	57.294.912.652	3.695.293.903	-	60.990.206.555	Employee expense
Beban utilitas	64.283.581	(147.512.141)	-	(83.228.560)	Utility expense
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(61.702.276.145)	26.225.491.787	4.310.739.400	(31.166.044.958)	Total deferred tax liabilities
Entitas Anak					Subsidiaries
Imbalan pascakerja	2.234.738.066	24.873.808	86.418.077	2.346.029.951	Post employment benefits
Penyisihan penurunan nilai piutang	944.540.339	56.362.223	-	1.000.902.562	Provision for impairment receivables
Penyisihan penurunan nilai persediaan	4.070.580.213	289.976.707	-	4.360.556.920	Provision for impairment inventories
Depresiasi aset tetap	464.569.697	(10.683.497)	-	453.886.200	Depreciation of fixed assets
Beban akrual	1.255.655.675	313.596.585	-	1.569.252.260	Accrued expense
Uang muka	3.300.000.000	-	-	3.300.000.000	Advance
Lain - Lain	87.999.999	95.318.329	-	183.318.328	Others
Jumlah aset pajak tangguhan	12.358.083.989	769.444.155	86.418.077	13.213.946.221	Total deferred tax assets
Jumlah aset (liabilitas) pajak tangguhan - neto	(49.344.192.156)	26.994.935.942	4.397.157.477	(17.952.098.737)	Total deferred tax assets (liabilities)-net

8. Perpajakan (lanjutan)

e. Ketetapan pajak

Pemeriksaan Pajak - Perusahaan

Berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) No. S-79/P2DK/KPP.1903/2025 tanggal 26 Juni 2025, Perusahaan diminta memberikan penjelasan atas selisih pajak penghasilan untuk Tahun Pajak 2022. Perusahaan telah menyampaikan tanggapan atas SP2DK tersebut melalui surat No. S-428/P3P2DK/KPP.1903/2025 tanggal 24 November 2025.

Sehubungan dengan hasil pembahasan, pada tanggal 24 Oktober 2025 Perusahaan telah melakukan pembayaran atas selisih kewajiban pajak dengan rincian sebagai berikut:

- PPh Badan Tahun Pajak 2022 sebesar Rp 1.143.299.267;
- PPh Pasal 21 sebesar Rp 35.084.753;
- PPN Masa Juli sebesar Rp 1.675.250;
- PPN Masa Agustus sebesar Rp 19.651.949;
- PPN Masa Desember sebesar Rp 198.549.880; dan
- PPN PUT sebesar Rp 108.959.793.

Pemeriksaan Pajak - Entitas Anak

PT Kertas Padalarang ("PTKP")

Pada tanggal 22 Oktober 2025, PTKP menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai atas pajak masukan tahun 2024 sebesar Rp 17.129.024.267. Pengembalian tersebut telah diterima Perusahaan pada bulan November 2025.

8. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters

Tax Audit – The Company

Based on the Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) No. S-79/P2DK/KPP.1903/2025 dated 26 June 2025, the Company was requested to provide an explanation regarding income tax discrepancies for Fiscal Year 2022. The Company submitted its response to the SP2DK through letter No. S-428/P3P2DK/KPP.1903/2025 dated November 24, 2025.

Following the discussion results, on 24 October 2025 the Company made payments for the tax discrepancies with the following details:

- Corporate Income Tax for Fiscal Year 2022 amounting to Rp 1,143,299,267;
- Article 21 Income Tax amounting to Rp 35,084,753;
- VAT for the July tax period amounting to Rp 1,675,250;
- VAT for the August tax period amounting to Rp 19,651,949;
- VAT for the December tax period amounting to Rp 198,549,880; and
- Withholding VAT (PPN PUT) amounting to Rp 108,959,793.

Tax Audit – Subsidiaries

PT Kertas Padalarang ("PTKP")

On October 22, 2025, PTKP received a Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for Value Added Tax input tax for fiscal year 2024 amounting to Rp 17,129,024,267. The refund was received by the Company in November 2025.

8. Perpajakan (lanjutan)

e. Ketetapan pajak (lanjutan)

Pemeriksaan Pajak - Entitas Anak (lanjutan)

PT Peruri Digital Security ("PDS")

Pada tahun 2025, PDS menerima surat pemeriksaan pajak baik Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Januari 2025, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai Nomor KEP-0005/SKPPKP/KPP.3010/2025 untuk masa pajak November 2024 sebesar Rp 210.995.789, dan pengembalian tersebut telah diterima pada tanggal 14 Februari 2025.
2. Pada tanggal 18 Februari 2025, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai Nomor KEP-00024/SKPPKP/KPP.3010/2025 untuk masa pajak Desember 2024 sebesar Rp 387.906.256. Pengembalian tersebut telah diterima masing-masing pada tanggal 12 Maret 2025 sebesar Rp 343.906.256 dan tanggal 3 September 2025 sebesar Rp 44.000.000, sehingga seluruh jumlah pengembalian telah direalisasikan.
3. Pada tanggal 25 Februari 2025, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai Nomor KEP-00002/KP-CT/KPP.3010/2025 untuk masa pajak Januari 2025 sebesar Rp 815.565.093, dan pengembalian tersebut telah diterima pada tanggal 27 Maret 2025.
4. Pada tanggal 22 April 2025, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai Nomor KEP-00228/KP-CT/KPP.3010/2025 untuk masa pajak Oktober 2024 sebesar Rp 38.500.000, dan pengembalian tersebut telah diterima pada tanggal 2 Mei 2025.

8. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

Tax Audit – Subsidiaries (continued)

PT Peruri Digital Security ("PDS")

In 2025, PDS received a tax audit letter of both Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) as follows:

1. On January 14, 2025, the Company received the Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-0005/SKPPKP/KPP.3010/2025 for the November 2024 tax period amounting to Rp 210,995,789, which was received on February 14, 2025.
2. On February 18, 2025, the Company received the Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-00024/SKPPKP/KPP.3010/2025 for the December 2024 tax period amounting to Rp 387,906,256. The refund was received on March 12, 2025 amounting to Rp 343,906,256 and on September 3, 2025 amounting to Rp 44,000,000, respectively, and therefore the refund has been fully realized.
3. On February 25, 2025, the Company received the Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-00002/KP-CT/KPP.3010/2025 for the January 2025 tax period amounting to Rp815,565,093, which was received on March 27, 2025.
4. On April 22, 2025, the Company received the Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-00228/KP-CT/KPP.3010/2025 for the October 2024 tax period amounting to Rp38,500,000, which was received on May 2, 2025.

8. Perpajakan (lanjutan)

e. Ketetapan pajak (lanjutan)

Pemeriksaan Pajak - Entitas Anak (lanjutan)

PT Peruri Digital Security ("PDS") (lanjutan)

Pada tahun 2025, PDS menerima surat pemeriksaan pajak baik Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

5. Pada tanggal 13 Juni 2025, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai Nomor KEP-00593/KP-CT/KPP.3010/2025 untuk masa pajak April 2025 sebesar Rp 163.109.554, dan pengembalian tersebut telah diterima pada tanggal 10 Juli 2025.
6. Pada tanggal 4 Agustus 2025, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai Nomor KEP-00932/KP-CT/KPP.3010/2025 untuk masa pajak Mei 2025 sebesar Rp 68.736.250, dan pengembalian tersebut telah diterima pada tanggal 13 Agustus 2025.
7. Pada tanggal 20 Agustus 2025, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai Nomor KEP-01002/KP-CT/KPP.3010/2025 untuk masa pajak Juni 2025 sebesar Rp 36.861.312, dan pengembalian tersebut telah diterima pada tanggal 3 September 2025.
8. Pada tanggal 11 September 2025, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-01089/KP-CT/KPP.3010/2025 untuk masa pajak Juli 2025 sebesar Rp44.831.361. Pengembalian tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 24 September 2025.

8. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

Tax Audit – Subsidiaries (continued)

PT Peruri Digital Security ("PDS") (continued)

In 2025, PDS received a tax audit letter of both Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) as follows: (continued)

5. *On June 13, 2025, the Company received the Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-00593/KP-CT/KPP.3010/2025 for the April 2025 tax period amounting to Rp163,109,554, which was received on July 10, 2025.*
6. *On August 4, 2025, the Company received the Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-00932/KP-CT/KPP.3010/2025 for the May 2025 tax period amounting to Rp68,736,250, which was received on August 13, 2025.*
7. *On August 20, 2025, the Company received the Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-01002/KP-CT/KPP.3010/2025 for the June 2025 tax period amounting to Rp36,861,312, which was received on September 3, 2025.*
8. *On 11 September 2025, the Company received a Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-01089/KP-CT/KPP.3010/2025 for the July 2025 tax period amounting to Rp44,831,361. The refund was received by the Company on September 24, 2025.*

8. Perpajakan (lanjutan)

e. Ketetapan pajak (lanjutan)

Pemeriksaan Pajak - Entitas Anak (lanjutan)

PT Peruri Digital Security ("PDS") (lanjutan)

Pada tahun 2025, PDS menerima surat pemeriksaan pajak baik Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

9. Pada tanggal 23 Oktober 2025, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-01189/KP-CT/KPP.3010/2025 untuk masa pajak Agustus 2025 sebesar Rp 24.613.403. Pengembalian tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 30 September 2025.
10. Pada tanggal 2 Desember 2025, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-01278/KP-CT/KPP.3010/2025 untuk masa pajak September 2025 sebesar Rp22.178.486. Pengembalian tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 15 Desember 2025.
11. Pada tanggal 15 Desember 2025, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-01348/KP-CT/KPP.3010/2025 untuk masa pajak Oktober 2025 sebesar Rp 151.162.796.
12. Pada tanggal 9 Mei 2025, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) No. KEP-00363/KP-CT/KPP.3010/2025 untuk masa pajak tahun 2024 sebesar Rp 372.839.048. Pengembalian tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 19 Mei 2025.
13. Pada tanggal 14 Juni 2025, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) No. KEP-00646/KP-CT/KPP.3010/2025 untuk masa pajak tahun 2024 sebesar Rp 20.192.500. Pengembalian tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 9 Juli 2025.

8. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

Tax Audit – Subsidiaries (continued)

PT Peruri Digital Security ("PDS") (continued)

In 2025, PDS received a tax audit letter of both Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) as follows: (continued)

9. *On October 23, 2025, the Company received a Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-01189/KP-CT/KPP.3010/2025 for the August 2025 tax period amounting to Rp 24,613,403. The refund was received by the Company on September 30, 2025.*
10. *On December 2, 2025, the Company received a Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-01278/KP-CT/KPP.3010/2025 for the September 2025 tax period amounting to Rp22,178,486. The refund was received by the Company on December 15, 2025.*
11. *On December 15, 2025, the Company received a Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-01348/KP-CT/KPP.3010/2025 for the October 2025 tax period amounting to Rp 151,162,796.*
12. *On May 9, 2025, the Company received a Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) No. KEP-00363/KP-CT/KPP.3010/2025 for the 2024 tax period amounting to Rp 372,839,048. The refund was received by the Company on May 19, 2025.*
13. *On June 14, 2025, the Company received a Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) No. KEP-00646/KP-CT/KPP.3010/2025 for the 2024 tax period amounting to Rp20,192,500. The refund was received by the Company on July 9, 2025.*

8. Perpajakan (lanjutan)

e. Ketetapan pajak (lanjutan)

Pemeriksaan Pajak - Entitas Anak (lanjutan)

PT Carsindo Tiga Perkasa ("CTP")

Pada tahun 2025, CTP menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas penghasilan Badan tahun 2023 sebesar Rp 1.304.189.972 telah diterima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Penghasilan Badan tahun 2023 dengan Nomor Surat 00038/406/23/456/25 tanggal 10 April 2025 dan telah diterima pencairannya pada tanggal 27 Mei 2025, kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp26.705.308 setelah dikurangi kompensasi atas utang pajak dengan total sebesar Rp26.705.308, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 10 April 2025, SKPKB No. 00034/201/23/456/25 atas Pajak penghasilan pasal 21 periode Januari - Desember 2023 sebesar Rp12.412.710.
- Pada tanggal 10 April 2025, SKPKB No. 00043/203/23/456/25 atas Pajak penghasilan pasal 23 periode Januari - Desember 2023 sebesar Rp14.292.598.

Pada tanggal 31 Januari 2025, CTP menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai Nomor KEP-00024/SKPPKP/KPP.0813/2025 untuk masa pajak Desember 2024 sebesar Rp 880.588.872. Pengembalian tersebut telah diterima Perusahaan pada tanggal 6 Maret 2025. Selisih antara jumlah yang ditetapkan dalam SKPPKP dan realisasi penerimaan dicatat sebagai beban pada periode berjalan.

8. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

Tax Audit – Subsidiaries (continued)

PT Carsindo Tiga Perkasa ("CTP")

In 2025, CTP received a Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for its 2023 corporate income amounting to Rp 1,304,189,972. The Tax Overpayment Assessment Letter for 2023 Corporate Income was issued under Letter Number 00038/406/23/456/25 dated April 10, 2025, and the disbursement was received on May 27, 2025, after taking into account compensation for tax debt amounting to Rp26,705,308 with the following details:

- On April 10, 2025, SKPKB No. 00034/201/23/456/25 for Income tax article 21 for the period of January - December 2023 amounting to Rp12,412,710.
- On April 10, 2025, SKPKB No. 00043/203/23/456/25 for Income tax article 21 for the period of January - December 2023 amounting to Rp14,292,598.

On January 31, 2025, CTP received a Preliminary Tax Overpayment Refund Decision Letter (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-00024/SKPPKP/KPP.0813/2025 for the December 2024 tax period amounting to Rp 880,588,872. The refund was received by the Company on March 6, 2025. Any difference between the amount stated in the SKPPKP and the actual cash received was recognized as an expense in the current period.

8. Perpajakan (lanjutan)

e. Ketetapan pajak

Pemeriksaan Pajak - Entitas Anak

Pada tahun 2024, PT Kertas Padalarang menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai Masukan tahun 2023 sebesar Rp18.435.957.197, kemudian Perusahaan mengajukan restitusi dan telah diterima hasil keputusan pajak lebih bayar atas PPN tersebut dengan Surat Nomor: KEP-00474/PPN/KPP.1903/2024 tanggal 19 Desember 2024 sebesar Rp 18.267.968.322 pembayaran telah diterima pada bulan Desember 2024 setelah dikurangi kompensasi atas utang pajak dengan total sebesar Rp 148.683.778, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 19 Desember 2024, SKPKB No. 00044/207/23/051/24 atas PPN periode Oktober 2023 sebesar Rp 38.270.169.
- Pada tanggal 19 Desember 2024, SKPKB No. 00043/207/23/051/24 atas PPN periode September 2023 sebesar Rp 32.279.055.
- Pada tanggal 19 Desember 2024, SKPKB No. 00036/207/23/051/24 atas PPN periode Februari 2023 sebesar Rp 16.866.607.
- Pada tanggal 19 Desember 2024, SKPKB No. 00045/207/23/051/24 atas PPN periode November 2023 sebesar Rp 16.843.278.
- Pada tanggal 19 Desember 2024, SKPKB No. 00040/207/23/051/24 atas PPN periode Juni 2023 sebesar Rp 15.946.905.
- Pada tanggal 19 Desember 2024, SKPKB No. 00037/207/23/051/24 atas PPN periode Maret 2023 sebesar Rp 8.972.728.
- Pada tanggal 19 Desember 2024, SKPKB No. 00039/207/23/051/24 atas PPN periode Mei 2023 sebesar Rp 7.441.413.
- Pada tanggal 19 Desember 2024, SKPKB No. 00042/207/23/051/24 atas PPN periode Agustus 2023 sebesar Rp 4.308.565.

8. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters

Tax Audit – Subsidiaries

In 2024, PT Kertas Padalarang received a Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for the 2023 Input Value Added Tax amounting to Rp 18,435,957,197, a refund has been submitted and the results of the tax overpayment decision on VAT has been received with Letter Number: KEP-00474/PPN/KPP.1903/2024 dated December 19, 2024 amounting to Rp 18,267,968,322. The payment was received in December 2024 after taking into account compensation for tax debt amounting to Rp 148,683,778 with the following details:

- On December 19, 2024, SKPKB No. 00044/207/23/051/24 for VAT for the period of October 2023 amounting to Rp 38,270,169.
- On December 19, 2024, SKPKB No. 00043/207/23/051/24 for VAT for the period of September 2023 amounting to Rp 32,279,055.
- On December 19, 2024, SKPKB No. 00036/207/23/051/24 for VAT for the period of February 2023 amounting to Rp 16,866,607.
- On December 19, 2024, SKPKB No. 00045/207/23/051/24 for VAT for the period of November 2023 amounting to Rp 16,843,278.
- On December 19, 2024, SKPKB No. 00040/207/23/051/24 for VAT for the period of June 2023 amounting to Rp 15,946,905.
- On December 19, 2024, SKPKB No. 00037/207/23/051/24 for VAT for the period of March 2023 amounting to Rp 8,972,728.
- On December 19, 2024, SKPKB No. 00039/207/23/051/24 for VAT for the period of May 2023 amounting to Rp 7,441,413.
- On December 19, 2024, SKPKB No. 00042/207/23/051/24 for VAT for the period August 2023 amounting to Rp 4,308,565.

8. Perpajakan (lanjutan)

e. Ketetapan pajak (lanjutan)

Pemeriksaan Pajak - Entitas Anak (lanjutan)

- Pada tanggal 19 Desember 2024, SKPKB No. 00041/207/23/051/24 atas PPN periode Juli 2023 sebesar Rp 4.136.453.
- Pada tanggal 19 Desember 2024, SKPKB No. 00038/207/23/051/24 atas PPN periode April 2023 sebesar Rp 1.830.528.
- Pada tanggal 19 Desember 2024, SKPKB No. 00035/207/23/051/24 atas PPN periode Januari 2023 sebesar Rp 1.750.277.
- Pada tanggal 19 Desember 2024, SKPKB No. 00083/107/23/051/24 atas PPN periode Mei 2023 sebesar Rp 37.800.

Pada tahun 2024, PT Peruri Digital Security menerima surat pemeriksaan pajak baik Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Januari 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-91008/SKPPKP/KPP.3010/2024 untuk masa pajak Agustus 2023 sebesar Rp 2.475.000 dan telah diterima pembayarannya tanggal 19 Februari 2024.
2. Pada tanggal 17 Januari 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-91010/SKPPKP/KPP.3010/2024 untuk masa pajak Juli 2023 sebesar Rp 158.899.582 dan telah diterima pembayarannya tanggal 20 Februari 2024.

8. Taxation (continued)

e. Tax assessment letter (continued)

Tax Audit – Subsidiaries (continued)

- On December 19, 2024, SKPKB No. 00041/207/23/051/24 for VAT for the period of July 2023 amounting to Rp 4,136,453.
- On December 19, 2024, SKPKB No. 00038/207/23/051/24 for VAT for the period of April 2023 amounting to Rp 1,830,528.
- On December 19, 2024, SKPKB No. 00035/207/23/051/24 for VAT for the period of January 2023 amounting to Rp 1,750,277.
- On December 19, 2024, SKPKB No. 00083/107/23/051/24 for VAT for the period of May 2023 amounting to Rp 37,800.

In 2024, PT Peruri Digital Security received a tax audit letter of both Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) as follows:

1. On January 17, 2024, the Company received a Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) for Corporate Income Tax No. KEP-91008/SKPPKP/KPP.3010/2024 for the August 2023 tax period amounting to Rp 2,475,000 and the payment was received on February 19, 2024.
2. On January 17, 2024, the Company received a Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-91010/SKPPKP/KPP.3010/2024 for the July 2023 tax period amounting to Rp 158,899,582 and the payment was received on February 20, 2024.

8. Perpajakan (lanjutan)

e. Ketetapan pajak (lanjutan)

Pemeriksaan Pajak - Entitas Anak (lanjutan)

Pada tahun 2024, PT Peruri Digital Security menerima surat pemeriksaan pajak baik Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pada tanggal 26 Januari 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-00027/SKPPKP/KPP.3010/2024 untuk masa pajak November 2023 sebesar Rp 556.646.587 dan telah diterima pembayarannya tanggal 15 Maret 2024.
4. Pada tanggal 26 April 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-00091/SKPPKP/KPP.3010/2024 untuk masa pajak Februari 2024 sebesar Rp 592.022.525 dan telah diterima pembayarannya tanggal 21 Mei 2024.
5. Pada tanggal 8 Mei 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-00103/SKPPKP/KPP.3010/2024 untuk masa pajak Maret 2024 sebesar Rp 423.009.808 dan telah diterima pembayarannya tanggal 12 Juni 2024.
6. Pada tanggal 27 Juni 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-00150/SKPPKP/KPP.3010/2024 untuk masa pajak April 2024 sebesar Rp 331.622.276 dan telah diterima pembayarannya tanggal 29 Juli 2024.

8. Taxation (continued)

e. Tax assessment letter (continued)

Tax Audit – Subsidiaries (continued)

In 2024, PT Peruri Digital Security received a tax audit letter of both Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) as follows: (continued)

3. *On January 26, 2024, the Company received a Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-00027/SKPPKP/KPP.3010/2024 for the November 2023 tax period amounting to Rp 556,646,587 and the payment was received on March 15, 2024.*
4. *On April 26, 2024, the Company received a Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-00091/SKPPKP/KPP.3010/2024 for the February 2024 tax period amounting to Rp 592,022,525 and the payment was received on May 21, 2024.*
5. *On May 8, 2024, the Company received a Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-00103/SKPPKP/KPP.3010/2024 for the March 2024 tax period amounting to Rp 432,009,808 and the payment was received on June 12, 2024.*
6. *On June 27, 2024, the Company received a Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-00150/SKPPKP/KPP.3010/2024 for the April 2024 tax period amounting to Rp 331,622,276 and the payment was received on July 29, 2024.*

8. Perpajakan (lanjutan)

e. Ketetapan pajak (lanjutan)

Pemeriksaan Pajak - Entitas Anak (lanjutan)

Pada tahun 2024, PT Peruri Digital Security menerima surat pemeriksaan pajak baik Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

7. Pada tanggal 17 September 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-91047/SKPPKP/KPP.3010/2024 untuk masa pajak April 2024 sebesar Rp 118.069.144 dan telah diterima pembayarannya tanggal 21 Oktober 2024.
8. Pada tanggal 26 Juli 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-00177/SKPPKP/KPP.3010/2024 untuk masa pajak Mei 2024 sebesar Rp 71.623.234 dan telah diterima pembayarannya tanggal 27 Agustus 2024.
9. Pada tanggal 17 September 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-91045/SKPPKP/KPP.3010/2024 untuk masa pajak Mei 2024 sebesar Rp 5.280.000 dan telah diterima pembayarannya tanggal 17 Oktober 2024.
10. Pada tanggal 22 Agustus 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-00189/SKPPKP/KPP.3010/2024 untuk masa pajak Juni 2024 sebesar Rp12.488.445 dan telah diterima pembayarannya tanggal 26 September 2024.

8. Taxation (continued)

e. Tax assessment letter (continued)

Tax Audit – Subsidiaries (continued)

In 2024, PT Peruri Digital Security received a tax audit letter of both Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) as follows: (continued)

- 7. On September 17, 2024, the Company received a Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-91047/SKPPKP/KPP.3010/2024 for the April 2024 tax period amounting to Rp 118,069,144 and the payment was received on October 21, 2024.*
- 8. On July 26, 2024, the Company received a Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-000177/SKPPKP/KPP.3010/2024 for the May 2024 tax period amounting to Rp 71,623,234 and the payment was received on August 27, 2024.*
- 9. On September 17, 2024, the Company received a Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-91045/SKPPKP/KPP.3010/2024 for the May 2024 tax period amounting to Rp 5,280,000 and the payment was received on October 17, 2024.*
- 10. On August 22, 2024, the Company received a Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-00189/SKPPKP/KPP.3010/2024 for the June 2024 tax period amounting to Rp 12,488,445 and the payment was received on September 26, 2024.*

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. Perpajakan (lanjutan)

e. Ketetapan pajak (lanjutan)

Pemeriksaan Pajak - Entitas Anak (lanjutan)

Pada tahun 2024, PT Peruri Digital Security menerima surat pemeriksaan pajak baik Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

11. Pada tanggal 26 November 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-91067/SKPPKP/KPP.3010/2024 untuk masa pajak Juni 2024 sebesar Rp 121.369.144.
12. Pada tanggal 21 November 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-00246/SKPPKP/KPP.3010/2024 untuk masa pajak September 2024 sebesar Rp 223.280.342.
13. Pada tanggal 23 Desember 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai No. KEP-00269/SKPPKP/KPP.3010/2024 untuk masa pajak Oktober 2024 sebesar Rp 3.054.078.529.
14. Pada tanggal 1 April 2024, Perusahaan menerima surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan No. KEP-00079/SKPPKP/KPP.3010/2024 untuk masa pajak tahun 2023 sebesar Rp 878.956.353 dan telah diterima pembayarannya tanggal 30 April 2024.

f. Taksiran pengembalian pajak

	2025	2024	
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak penghasilan:			Income tax:
Pasal 28a	2.662.646.074	3.426.703.527	Article 28a
PPN	1.268.423.553	934.986.955	VAT
Jumlah	3.931.069.627	4.361.690.482	Total

8. Taxation (continued)

e. Tax assessment letter (continued)

Tax Audit – Subsidiaries (continued)

In 2024, PT Peruri Digital Security received a tax audit letter of both Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) as follows: (continued)

11. On November 26, 2024, the Company received a Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-91067/SKPPKP/KPP.3010/2024 for the June 2024 tax period amounting to Rp 121,369,144.
12. On November 21, 2024, the Company received a Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-00246/SKPPKP/KPP.3010/2024 for the September 2024 tax period amounting to Rp 223,280,342.
13. On December 23, 2024, the Company received a Decision on Preliminary Refund of Tax Overpayment (SKPPKP) for Value Added Tax No. KEP-00269/SKPPKP/KPP.3010/2024 for the October 2024 tax period amounting to Rp 3,054,078,529.
14. On April 1, 2024, the Company received a Tax Assessment Letter for Corporate Income Tax Overpayment No. KEP-00079/SKPPKP/KPP.3010/2024 for the 2023 tax period amounting to Rp 878,956,353 and the payment was received on April 30, 2024.

f. Estimated claim for tax refund

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. Perpajakan (lanjutan)

8. Taxation (continued)

g. Informasi kontribusi kepada Negara

g. Information on contributions to the State

Kontribusi pendapatan pajak dan PNPB

Contribution of tax and non tax revenue

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, informasi kontribusi Peruri (Induk) terhadap pendapatan negara dari pembayaran Pajak, pemungutan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (*cash basis*) adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, informations on Peruri's (Parent) contribution to national income from tax revenue, withholding tax and Non-Tax Revenue (PNBP) (cash basis) are as follows:

	2025	2024	
A. Pajak:			A. Tax:
Pajak penghasilan (PPh)	167.776.997.693	232.725.577.003	Income tax (PPh)
Pajak Pertambahan nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	233.384.202.427	209.756.762.592	Value added tax (VAT) & Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM)
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPRD), termasuk PBB P2 (Perkotaan dan Pedesaan)	14.648.589.400	13.871.623.278	Local Taxes and Retributions (DPRD), including PBB P2 (Urban and Rural)
Sub jumlah	415.809.789.520	456.353.962.873	Subtotal
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB):			B. Non-State Revenue Tax (PNPB):
Dividen	16.740.811.007	21.235.555.186	Dividend
PNPB lainnya	546.430.399	213.703.245	Other PNPB
Sub jumlah	17.287.241.406	21.449.258.431	Subtotal
Jumlah Kontribusi Kepada Negara	433.097.030.926	477.803.221.304	Total Contribution to the State

9. Uang muka dan beban dibayar dimuka

9. Advance and prepaid expenses

	2025	2024	
Uang muka:			<i>Advances:</i>
Pemasok	221.776.990.825	161.770.671.419	Suppliers
Operasional	4.134.700.058	3.109.435.526	Operational
Sub jumlah	225.911.690.883	164.880.106.945	Subtotal
Biaya dibayar Dimuka:			<i>Prepaid expenses:</i>
Asuransi	2.041.114.786	1.741.972.461	Insurance
Sewa	10.166.668	20.833.329	Rent
Lain-lain	193.114.848.432	11.929.690.072	Others
Sub jumlah	195.166.129.886	13.692.495.862	Subtotal
Jumlah	421.077.820.769	178.572.602.807	Total

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. Investasi pada ventura bersama

10. Investment in joint ventures

	2025	2024	
Saldo awal	202.995.617.390	207.702.478.566	Beginning balance
Bagian dari laba	5.085.444.576	16.611.751.304	Share of profit
Penerimaan dividen dari ventura bersama	-	(21.318.612.480)	Dividend received from joint ventures
Saldo akhir tahun	208.081.061.966	202.995.617.390	Balance at end of year

Nama Entitas/ Name of Entity	Lokasi usaha/ Place of business	Persentase kepemilikan/ % of ownership interest	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Metode pengukuran/ Measurement method
PT Sicpa Peruri Securink (PT SPS)	Indonesia	48%	PT SPS menyediakan bahan baku tinta untuk keperluan aktivitas produksi Perusahaan/ PT SPS provides ink raw material for the Company's productions activities	Ekuitas/ Equity

PT SPS sebagai ventura bersama memiliki modal saham yang terdiri dari saham biasa yang dimiliki secara langsung oleh Perusahaan.

PT SPS as a joint venture has share capital consisting solely of ordinary shares, which is held directly by the Company.

11. Aset hak guna - bersih

11. Right of use assets - net

Saldo aset hak guna pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Right of use assets as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

	Saldo awal/ Beginning balance/ 1 Januari/ January 1, 2024	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance/ 31 Desember December 31, 2025	
Harga perolehan:					Acquisition costs:
Bangunan	3.102.030.534	690.674.197	(653.076.534)	3.139.628.197	Buildings
Kendaraan	2.226.340.984	3.879.090.174	(699.214.404)	5.406.216.754	Vehicles
Jumlah harga perolehan	5.328.371.518	4.569.764.371	(1.352.290.938)	8.545.844.951	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	1.775.513.784	311.856.532	(653.076.534)	1.434.293.782	Buildings
Kendaraan	1.628.254.984	1.202.988.316	(592.701.528)	2.238.541.772	Vehicles
Jumlah akumulasi penyusutan	3.403.768.768	1.514.844.848	(1.245.778.062)	3.672.835.554	Total depreciation cost
Nilai buku	1.924.602.750			4.873.009.397	Book value

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

11. Aset hak guna - bersih (lanjutan)

Saldo aset hak guna pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

11. Right of use assets - net (continued)

Right of use assets as of December 31, 2025 and 2024 is as follows: (continued)

	Saldo awal/ Beginning balance/ 1 Januari/ January 1, 2024	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance/ 31 Desember December 31, 2025	
Harga perolehan:					Acquisition costs:
Bangunan	3.102.030.534	-	-	3.102.030.534	Buildings
Kendaraan	2.387.708.638	307.776.193	(469.143.847)	2.226.340.984	Vehicles
Jumlah harga perolehan	5.489.739.172	307.776.193	(469.143.847)	5.328.371.518	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	1.693.881.984	81.631.800	-	1.775.513.784	Buildings
Kendaraan	1.664.530.738	343.805.316	(380.081.070)	1.628.254.984	Vehicles
Jumlah akumulasi penyusutan	3.358.412.722	425.437.116	(380.081.070)	3.403.768.768	Total depreciation cost
Nilai buku	2.131.326.450			1.924.602.750	Book value
Beban penyusutan aset hak guna dialokasikan sebagai berikut:					Depreciation of right of use assets – net is allocated as follows:
	2025	2024			
Beban pokok penjualan	982.824.917	-			Cost of sales
Beban umum dan administrasi	532.019.931	425.437.116			General and administrative expenses
Jumlah	1.514.844.848	425.437.116			Total

12. Properti investasi

Properti investasi yang dimiliki oleh Grup terdiri dari:

12. Investment properties

Investment properties held by the Group consist of:

	2025	2024	
Lahan yang tidak terpakai	3.496.996.970	222.508.964	Unused lands
Properti yang disewakan	14.862.852.274	8.921.821.976	Lease out properties
Jumlah	18.359.849.244	9.144.330.940	Total
Mutasi atas properti investasi adalah sebagai berikut:			The movement of the investment properties is as follows:
	2025	2024	
Saldo awal	9.144.330.940	9.734.334.171	Beginning balance
Penambahan	6.701.825.803	-	Addition
Reklasifikasi	3.274.488.007	-	Reclassification
Pengurangan:			Deduction:
Akumulasi penyusutan	(760.795.506)	(590.003.231)	Accumulated depreciation
Jumlah	18.359.849.244	9.144.330.940	Total

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

12. Properti investasi (lanjutan)

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup mereklasifikasi aset tetap lahan sebesar nihil ke properti investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 terdapat penambahan properti investasi sebesar Rp 6.701.825.803 yang berasal dari Entitas Anak Perusahaan.

Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi untuk pembangunan properti investasi.

12. Investment properties (continued)

For the year ended December 31, 2025 and 2024, the Group reclassified fixed asset land amounting to nil to investment properties.

On December 31, 2025, there was an addition of investment property of Rp 6,701,825,803 from Subsidiary Entities.

There are no borrowing costs capitalised for the construction of investment properties.

13. Aset tetap

Saldo aset tetap pada 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

13. Fixed assets

Fixed assets as of December 31, 2025 and 2024 consist of:

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i> 1 Januari/ <i>January 1, 2025</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi ke aset lainnya/ <i>Reclassification to other assets</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> 31 Desember/ <i>December 31, 2025</i>	
Harga perolehan						<u>Acquisition costs</u>
Kepemilikan langsung						<u>Direct acquisition</u>
Tanah	26.652.483.048	-	-	-	26.652.483.048	Land
Bangunan	1.024.966.942.464	1.344.691.509	(409.602.850)	4.072.310.850	1.029.974.341.973	Building
Mesin utama pabrik	5.435.412.599.516	9.206.899.021	(75.112.700.502)	289.835.747.926	5.659.342.545.961	Main factory machineries
Mesin penunjang	323.080.286.583	-	(16.171.168)	18.704.198.820	341.768.314.235	Supporting machineries
Perlitan pabrik	618.647.210.418	10.275.656.676	(22.926.153.056)	5.761.116.418	611.757.830.456	Factory equipment
Peralatan kantor	109.032.636.448	719.134.271	(1.206.620.213)	16.385.468.724	124.930.619.230	Office equipment
Mebel dan perabotan	1.003.718.396	-	(4.482.404)	-	999.235.992	Furniture and fixture
Kendaraan	18.943.163.174	-	(74.850.000)	-	18.868.313.174	Vehicles
Sub jumlah	7.557.739.040.047	21.546.381.477	(99.750.580.193)	334.758.842.738	7.814.293.684.069	Subtotal
Aset pembiayaan – kendaraan	617.076.000	-	-	(617.076.000)	-	Right-of-use-vehicle
Aset dalam penyelesaian	1.855.427.172	352.767.339.988	-	(334.141.766.738)	(12.315.560.000)	Assets under construction
Jumlah harga perolehan	7.560.211.543.219	374.313.721.465	(99.750.580.193)	-	(12.315.560.000)	7.822.459.124.491
Akumulasi penyusutan						<u>Total acquisition cost</u>
Kepemilikan langsung						<u>Accumulated depreciation</u>
Bangunan	635.014.554.970	32.128.772.936	(409.602.844)	-	666.733.725.062	Building
Mesin utama pabrik	3.416.574.544.268	259.808.203.583	(75.112.700.421)	-	3.601.270.047.430	Main factory machineries
Mesin penunjang	209.788.464.570	26.845.286.832	(16.171.163)	-	236.617.580.239	Supporting machineries
Perlitan pabrik	517.560.994.084	37.695.865.531	(22.926.152.995)	-	532.330.706.620	Factory equipment
Peralatan kantor	82.441.559.726	11.330.504.998	(1.206.620.145)	-	92.565.444.579	Office equipment
Mebel dan perabotan	998.400.510	5.317.414	(4.482.380)	-	999.235.544	Furniture and fixture
Kendaraan	17.803.953.902	543.494.079	(74.849.999)	-	18.272.597.982	Vehicles
Sub jumlah	4.880.182.472.030	368.357.445.373	(99.750.579.947)	-	5.148.789.337.456	Subtotal
Aset pembiayaan – kendaraan	591.364.500	25.711.500	-	-	617.076.000	Right-of-use-vehicle
Nilai buku	2.679.437.706.689				2.673.052.711.035	Book value

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. Aset tetap (lanjutan)

13. Fixed assets (continued)

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i> 1 Januari/ <i>January 1, 2024</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi ke aset lainnya/ <i>Reclassification to</i> <i>other assets</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> 31 Desember/ <i>December 31, 2024</i>	
Harga perolehan						Acquisition costs
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Tanah	26.652.483.048	-	-	-	26.652.483.048	Land
Bangunan	1.012.588.901.242	1.207.090.924	(4.303.109.767)	15.032.907.355	1.024.966.942.464	Building
Mesin utama pabrik	5.221.133.076.012	44.051.191.775	(2.380.524.469)	165.108.856.198	5.435.412.599.516	Main factory machineries
Mesin penunjang	301.407.043.887	-	-	21.673.242.696	323.080.286.583	Supporting machineries
Peralatan pabrik	597.184.150.552	11.793.447.591	(51.265.455)	9.720.877.730	618.647.210.418	Factory equipment
Peralatan kantor	92.015.889.041	1.593.010.641	(85.002.014)	15.508.738.780	109.032.636.448	Office equipment
Mebel dan perabotan	1.003.718.396	-	-	-	1.003.718.396	Furniture and fixture
Kendaraan	18.565.949.174	377.214.000	-	-	18.943.163.174	Vehicles
Sub jumlah	7.270.551.211.352	59.021.954.931	(6.819.901.705)	227.044.622.759	7.557.739.040.047	Subtotal
Aset pembiayaan – kendaraan	617.076.000	-	-	-	617.076.000	Right-of-use-vehicle
Aset dalam penyelesaian	24.060.021.762	266.064.382.579	(266.498.700)	(227.044.622.759)	1.855.427.172	Assets under construction
Jumlah harga perolehan	7.295.228.309.114	325.086.337.510	(7.086.400.405)	-	7.560.211.543.219	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Bangunan	607.054.186.183	32.263.478.544	(4.303.109.757)	-	635.014.554.970	Building
Mesin utama pabrik	3.171.819.257.195	247.135.811.472	(2.380.524.399)	-	3.416.574.544.268	Main factory machineries
Mesin penunjang	184.132.577.539	25.655.887.031	-	-	209.788.464.570	Supporting machineries
Peralatan pabrik	482.408.560.735	35.190.703.352	(38.270.003)	-	517.560.994.084	Factory equipment
Peralatan kantor	71.475.927.451	11.033.965.034	(68.332.759)	-	82.441.559.726	Office equipment
Mebel dan perabotan	997.585.510	815.000	-	-	998.400.510	Furniture and fixture
Kendaraan	17.040.272.419	763.681.483	-	-	17.803.953.902	Vehicles
Sub jumlah	4.534.928.367.032	352.044.341.916	(6.790.236.918)	-	4.880.182.472.030	Subtotal
Aset pembiayaan – kendaraan	437.095.500	154.269.000	-	-	591.364.500	Right-of-use-vehicle
Nilai buku	2.759.862.846.582				2.679.437.706.689	Book value

Aset tetap Grup telah dijadikan agunan atas fasilitas pinjaman bank (Catatan 22).

The Group has pledged certain fixed assets as collateral for bank loans (Note 22).

Penambahan dan reklasifikasi aset tetap selama tahun 2025 dan 2024 terdiri dari penambahan dan reklasifikasi aset tetap yang berasal dari Perusahaan masing-masing sebesar Rp 333.820.798.238 dan Rp 261.903.492.848 dan penambahan dan reklasifikasi entitas anak masing-masing sebesar Rp 938.044.500 dan Rp 63.182.844.662.

Additions and reclassifications of fixed assets during 2025 and 2024 consist of additions and reclassifications of fixed assets originating from the Company amounting to Rp 333,820,798,238 and Rp 261,903,492,848, respectively, and the additions and reclassifications of subsidiaries amounting to Rp 938,044,500 and Rp 63,182,844,662, respectively.

Dan penambahan dan reklasifikasi aset tetap yang ke aset tak berwujud di tahun 2025 sebesar Rp 12.315.560.000 berupa aset perangkat digital.

And the addition and reclassification of fixed assets to intangible assets in 2025 amounted to Rp 12,315,560,000 in the form of digital device assets.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. Aset tetap (lanjutan)

13. Fixed assets (continued)

Grup telah mengasuransikan aset tetapnya terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, bencana alam, gempa dan risiko lainnya pada tahun 2025 dan 2024 kepada PT BRI Asuransi Indonesia dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Jenis aset dan nilai yang dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

The Group has insured all its fixed assets against possible losses caused by fire, natural disaster, earthquake and other risks to PT BRI Asuransi Indonesia and PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) in 2025 and in 2024. The types of assets and their coverage were as follows:

	2025	2024	
Mesin	5.371.372.364.315	5.030.728.336.400	Machinery
Bangunan perumahan, gedung pabrik dan kantor	1.418.982.607.437	723.393.889.189	Residential building office and factory buildings
Peralatan	49.903.221.909	56.080.723.368	Equipment
Kendaraan	10.218.600.000	8.038.000.000	Vehicles
Jumlah	6.850.476.793.661	5.818.240.948.957	Total

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from those risks.

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 memiliki rincian sebagai berikut:

Assets under construction as of December 31, 2025 and 2024 have details as follows:

	2025	2024	
Mesin	5.437.893.952	91.478.412	Machinery
Tanah	1.870.361.410	1.763.948.760	Land
Bangunan	857.185.000	-	Building
Jumlah	8.165.440.362	1.855.427.172	Total

Beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets and amortization expense of intangible assets is allocated as follows:

	2025	2024	
Beban pokok penjualan	322.761.693.048	359.780.389.153	Cost of sales
Beban umum dan administrasi	45.621.463.825	53.591.911.037	General and administrative expenses
Jumlah	368.383.156.873	413.372.300.190	Total

Angka diatas merupakan total beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud yang menjadi satu kesatuan.

The figure above is the total depreciation expense of fixed assets and amortization expense of intangible assets which are combined into one unit.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. Aset tak berwujud

14. Intangible assets

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i> 1 Januari/ <i>January 1, 2025</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Reklasifikasi dari aset lainnya/ <i>Reclassification from other assets</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> 31 Desember/ <i>December 31, 2025</i>	
Harga perolehan							<i>Acquisition costs</i>
<u>Kepemilikan langsung</u>							<i>Direct acquisition</i>
Perangkat lunak	173.568.199.372	36.000.000	-	-	-	173.604.199.372	Software
Digital	540.512.275.626	-	-	-	12.315.560.000	552.827.835.626	Devices
Lainnya	6.276.000.000	-	-	-	-	6.276.000.000	Others
Jumlah							<i>Total</i>
harga perolehan	720.356.474.998	36.000.000	-	-	12.315.560.000	732.708.034.998	<i>acquisition cost</i>
Akumulasi							<i>Accumulated</i>
<u>penyusutan</u>							<i>depreciation</i>
<u>Kepemilikan langsung</u>							<i>Direct acquisition</i>
Perangkat lunak	163.009.988.753	4.056.872.027	-	-	-	167.066.860.780	Software
Digital	194.128.945.898	58.246.179.995	-	-	-	252.375.125.893	Devices
Lainnya	6.275.999.996	-	-	-	-	6.275.999.996	Others
Jumlah akumulasi							<i>Total accumulated</i>
penyusutan	363.414.934.647	62.303.052.022	-	-	-	425.717.986.669	<i>depreciation</i>
Nilai buku	356.941.540.351					306.990.048.329	<i>Book value</i>

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i> 1 Januari/ <i>January 1, 2024</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Reklasifikasi dari aset lainnya/ <i>Reclassification from other assets</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> 31 Desember/ <i>December 31, 2024</i>	
Harga perolehan							<i>Acquisition costs</i>
<u>Kepemilikan langsung</u>							<i>Direct acquisition</i>
Perangkat lunak	172.709.298.972	371.400.400	-	-	487.500.000	173.568.199.372	Software
Digital	487.983.072.626	-	-	-	52.529.203.000	540.512.275.626	Devices
Lainnya	6.276.000.000	-	-	-	-	6.276.000.000	Others
Jumlah							<i>Total</i>
harga perolehan	666.968.371.598	371.400.400	-	-	53.016.703.000	720.356.474.998	<i>acquisition cost</i>
Akumulasi							<i>Accumulated</i>
<u>penyusutan</u>							<i>depreciation</i>
<u>Kepemilikan langsung</u>							<i>Direct acquisition</i>
Perangkat lunak	151.480.387.574	11.529.601.179	-	-	-	163.009.988.753	Software
Digital	145.718.379.118	48.410.566.780	-	-	-	194.128.945.898	Devices
Lainnya	6.275.999.996	-	-	-	-	6.275.999.996	Others
Jumlah akumulasi							<i>Total accumulated</i>
penyusutan	303.474.766.688	59.940.167.959	-	-	-	363.414.934.647	<i>depreciation</i>
Nilai buku	363.493.604.910					356.941.540.351	<i>Book value</i>

Dalam arus kas aktivitas investasi terdapat penambahan aset tak berwujud, termasuk uang muka yang dibayarkan untuk perolehan aset tak berwujud. Penambahan tersebut mencerminkan komitmen investasi Grup yang masih dalam proses penyelesaian pada tanggal pelaporan.

Cash flows from investing activities include additions to intangible assets, including advances paid for the acquisition of intangible assets. These additions reflect the Group's investment commitments for assets that were still under development or completion as of the reporting date.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. Aset tidak lancar lainnya

15. Other non-current assets

Saldo aset tidak lancar lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari :

Balance of other non current assets as of December 31, 2025 and 2024 consists of :

	2025	2024	
Hak guna bangunan	4.667.341.658	4.667.341.658	<i>Land rights</i>
Akumulasi amortisasi	(3.667.812.205)	(3.474.884.694)	<i>Accumulated amortization</i>
Sub jumlah	999.529.453	1.192.456.964	<i>Subtotal</i>
Aset yang dibatasi penggunaannya	55.173.000.000	54.459.428.355	<i>Restricted assets</i>
Jaminan deposit	2.298.512.100	5.491.000.141	<i>Guarantee deposits</i>
Lainnya	32.608.184.874	23.572.132.660	<i>Others</i>
Sub jumlah	90.079.696.974	83.522.561.156	<i>Subtotal</i>
Jumlah	91.079.226.427	84.715.018.120	Total

Aset yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka yang dijaminan sehubungan dengan fasilitas non-cash loan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 55.173.000.000 (Catatan 33g).

Restricted assets represent time deposits pledged as collateral for a non-cash loan facility with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp 55,173,000,000 (Note 33g).

16. Utang usaha

16. Trade payables

Rincian utang usaha menurut pihak-pihak adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on parties are as follows:

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 33e)	423.605.028.023	266.315.173.076	<i>Related parties (Note 33e)</i>
Pihak ketiga	623.825.289.700	474.006.215.256	<i>Third parties</i>
Jumlah	1.047.430.317.723	740.321.388.332	Total
	2025	2024	
Rupiah	852.959.916.986	624.683.803.087	<i>Rupiah</i>
Dollar Amerika Serikat	8.579.098.983	1.748.710.570	<i>United States Dollar</i>
Euro	59.332.587.384	112.336.524.864	<i>Euro</i>
Yen Jepang	125.726.676.783	1.300.035.583	<i>Japan Yen</i>
Dollar Singapura	832.037.587	252.314.228	<i>Singapore dollar</i>
Jumlah	1.047.430.317.723	740.321.388.332	Total

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. Beban yang masih harus dibayar

17. Accrued expenses

	2025	2024	
Pegawai	411.762.816.669	421.940.404.441	Employees
Retensi	2.244.135.651	2.244.135.651	Retention
Bunga pinjaman	485.643.104	878.650.643	Interest loan
Jumlah	414.492.595.424	425.063.190.735	Total

18. Liabilitas sewa

18. Lease liabilities

Rincian liabilitas sewa sebagai berikut:

The details of lease liabilities are as follows:

	2025	2024	
Nilai liabilitas sewa			Lease liabilities amount
Kendaraan	611.449.232	612.937.160	Vehicles
Sub jumlah	611.449.232	612.937.160	Subtotal
Penambahan:			Addition:
Bangunan	690.674.197		Building
Kendaraan	3.995.949.132	323.285.267	Vehicles
Sub jumlah	4.686.623.329	323.285.267	Subtotal
Dikurangi:			
Pembayaran pokok	(1.645.242.174)	(324.773.195)	Installment principal
Jumlah	3.652.830.387	611.449.232	Total
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.577.217.792	439.088.931	Less: portion of current maturities
Jumlah	2.075.612.595	172.360.301	Total

19. Liabilitas kontrak

19. Contract liabilities

	2025	2024	
Pelanggan usaha	10.389.550.586	7.795.229.821	Customers
Sewa	3.684.336.867	4.235.022.491	Rent
Jumlah	14.073.887.453	12.030.252.312	Total

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. Liabilitas jangka pendek lainnya

20. Other current liabilities

	2025	2024	
Operasional	63.571.993.788	55.881.919.986	Operational
Program pelayanan kesehatan bersama	5.689.335.193	4.773.572.313	Joint health services program
Dapetri	337.031.974	337.031.974	Dapetri
Jumlah	69.598.360.955	60.992.524.273	Total

21. Liabilitas jangka panjang lainnya

21. Other non-current liabilities

Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 206.709.751.423 dan Rp 268.924.065.923. Nilai tersebut terdiri atas provisi dari penjualan lahan yang dilakukan pada tahun 2019 dan diproyeksikan akan selesai lebih dari 1 (satu) tahun ke depan, menyesuaikan dengan realisasi penyelesaian pembangunan Sentra Pengelolaan Uang (SPU) yang dilakukan Bank Indonesia sebesar Rp 94.352.929.815, untuk tahun 2025 dan Rp 128.170.969.815, untuk tahun 2024. Selain itu, terdapat utang jangka panjang luar negeri atas pembelian bahan baku persediaan dan aset tetap sebesar Rp 66.711.736.968, untuk tahun 2025 dan Rp 93.048.149.968, untuk tahun 2024. Sisanya senilai Rp 45.645.084.640 untuk tahun 2025 dan Rp 47.877.306.441 untuk tahun 2024 merupakan liabilitas jangka panjang lainnya anak perusahaan.

The balance as of December 31, 2025 and 2024 is Rp 206,709,751,423 and Rp 268,924,065,923, respectively. This value consists of provisions from land sales carried out in 2019 and is projected to be completed in more than 1 (one) year, in line with the realization of the completion of the construction of a Money Management Center (SPU) carried out by Bank Indonesia amounting to Rp 94,352,929,815, for 2025 and Rp 128,170,969,815, for 2024. In addition, there is long-term foreign debt for the purchase of raw material supplies and fixed assets amounting to Rp 66,711,736,968, for 2025 and Rp 93,048,149,968, for 2024. The remaining amounts of Rp 45,645,084,640 for 2025 and Rp 47,877,306,441 for 2024 are other long-term liabilities of subsidiaries.

22. Pinjaman bank

22. Bank loans

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 33f)	297.268.370.071	504.814.509.931	Related parties (Note 33f)
Pihak ketiga			Third party
PT BPD Jabar Banten Tbk	12.856.256.578	11.118.762.218	PT BPD Jabar Banten Tbk
Sub jumlah	310.124.626.649	515.933.272.149	Subtotal
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			Less: portion of current maturities
Pihak berelasi	223.235.917.855	315.182.057.715	Related parties
Pihak ketiga			Third party
PT BPD Jabar Banten Tbk	12.462.505.640	8.362.505.640	PT BPD Jabar Banten Tbk
Sub jumlah	235.698.423.495	323.544.563.355	Subtotal
Jumlah	74.426.203.154	192.388.708.794	Total

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. Pinjaman bank (lanjutan)

22. Bank loans (continued)

2025				2024		
		Jumlah tercatat/ <i>Carrying amount</i>		Jumlah tercatat/ <i>Carrying amount</i>		
		Mata uang Rupiah/ <i>Equivalent in Rupiah</i>		Mata uang Rupiah/ <i>Equivalent in Rupiah</i>		
Kreditor	Mata uang/ <i>Currency</i>	Mata uang/ <i>Original currency</i>		Mata uang asli/ <i>Original currency</i>		Creditor
Perusahaan The Company						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rupiah	108.347.408.004	108.347.408.004	206.028.626.198	206.028.626.198	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rupiah	81.285.044.212	81.285.044.212	124.885.044.212	124.885.044.212	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Entitas anak Subsidiaries						
PT Bank BPD Jabar & Banten PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Rupiah	12.856.256.578	12.856.256.578	11.118.762.218	11.118.762.218	PT Bank BPD Jabar & Banten PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Total Total						
Porsi jangka pendek			(235.698.423.495)	(323.544.563.355)		Current portion
Porsi jangka panjang			74.426.203.154	192.388.708.794		Non-current portion

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman bank pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Other significant information related to bank loans as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

Kreditor/ Creditor	Mata uang/ Currency	Fasilitas/ Facility	Periode/ Loan term	Metode pembayaran bunga/ Interest payment period	Pembayaran tahunan/ Annual payment	Jaminan/ Collateral
Perusahaan						The Company
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rupiah	650.000.000.000	17 Juli 2013 - 16 Juli 2025/ July 17, 2013 - July 16, 2025	Bulanan/ Monthly	7,65%	Mesin pabrik/ Funded factory machine
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rupiah	720.000.000.000	19 Desember 2016 – 18 Desember 2028/ December 19, 2016 - December 18, 2028	Bulanan/ Monthly	7,65%	Mesin pabrik/ Funded factory machine
PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rupiah	436.000.000.000	27 Juli 2017 – 26 Juli 2029/ July 27, 2017 - July 26, 2029	Bulanan/ Monthly	7,462%	Mesin pabrik/ Funded factory machine

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. Pinjaman bank (lanjutan)

22. Bank loans (continued)

Kreditor/ Creditor	Mata uang/ Currency	Fasilitas/ Facility	Periode/ Loan term	Metode pembayaran bunga/ Interest payment period	Pembayaran tahunan/ Annual payment	Jaminan/ Collateral
Entitas anak						Subsidiaries
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Rupiah	65.000.000.000	30 Maret 2025 – 30 Maret 2026/ March 30, 2025 - March 30, 2026	Bulanan/ Monthly	3,90%	Deposito/ Deposits
PT Bank BPD Jawa Barat & Banten Tbk	Rupiah	15.000.000.000	28 Februari 2025 – 28 Februari 2026/ February 28, 2025 – February 28, 2026	Bulanan/ Monthly	8,50%	Tanah/ Land
PT Bank BPD Jawa Barat & Banten Tbk	Rupiah	7.400.000.000	27 Februari 2024 – 23 Februari 2027 February 27, 2024 – February 23, 2027	Bulanan/ Monthly	9,50%	Tanah/ Land
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Rupiah	25.000.000.000	21 Juni 2025 – 22 Juni 2026/ June 21, 2025 - June 22, 2026	Bulanan/ Monthly	3,80%	Deposito/ Deposits
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Rupiah	35.000.000.000	20 September 2025 – 20 September 2026/ September 20, 2025- September 20, 2026	Bulanan/ Monthly	4,05%	Deposito/ Deposits
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Rupiah	71.000.000.000	26 Januari 2025 – 26 Januari 2026/ January 26, 2025 – January 26, 2026	Bulanan/ Monthly	3,80%	Deposito/ Deposits

Eksposur pinjaman Grup terhadap perubahan suku bunga pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

The exposure of the Group's borrowings to interest rate changes on the reporting dates are as follows:

	2025	2024	
<i>Floating Rate:</i>			<i>Floating rate:</i>
Kurang dari 6 bulan	49.900.000.000	121.341.648.329	Less than 6 months
6 sampai 12 bulan	57.800.000.000	70.640.609.093	6 until 12 months
Lebih dari 1 tahun	20.362.505.640	192.388.708.802	More than 1 year
Sampai 1 tahun	74.426.203.154	20.362.505.640	Until 1 years
Sub jumlah	202.488.708.794	404.733.471.864	Subtotal
<i>Fixed rate</i>	107.635.917.855	111.199.800.285	<i>Fixed rate</i>
Jumlah	310.124.626.649	515.933.272.149	Total

23. Kewajiban imbalan pascakerja

Grup memberikan imbalan kerja kepada karyawan berdasarkan peraturan Grup dan sesuai dengan Ketenagakerjaan Undang - Undang No.6/2023, Peraturan Pemerintah No.35/2021 dan mengakui liabilitas imbalan kerja karyawan sesuai dengan PSAK No. 219. "Imbalan Kerja".

Grup menyelenggarakan program pensiun untuk kompensasi pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk karyawan tetapnya. Program dana pensiun Grup dikelola secara terpisah oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK").

Terhitung sejak tanggal 1 Desember 2010, untuk karyawan yang baru masuk pada dan setelah tanggal 1 Juli 2007, Grup mengikutkan karyawannya dalam Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang ditunjuk oleh masing-masing peserta. Iuran pensiun tersebut berasal dari kontribusi karyawan dan Grup, masing-masing sebesar 6,00% dan 15,00% dari gaji dasar karyawan.

Untuk karyawan yang masuk sebelum tanggal 1 Juli 2007, imbalan dari manfaat pasti di Dapetri tetap dilanjutkan dengan ketentuan bahwa tidak ada kenaikan gaji dalam perhitungan manfaat pasti pensiunan sejak tanggal 1 Desember 2010, sedangkan masa kerja tetap diperhitungkan. Karyawan yang bersangkutan juga diikutsertakan dalam DPLK yang ditunjuk serta seluruh setoran sebesar 5,90% dari gaji terakhir karyawan dibayarkan oleh Grup.

Perhitungan cadangan imbalan pasca-kerja pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Halim dan Rekan dan Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal, aktuaris independen sesuai No. 0348/KKA-PA-REP/WN/II/2026 dan No. 24033/PRRI/AP/01/2025 laporannya masing-masing tanggal 11 Februari 2026 dan 13 Januari 2025.

23. Post-employment benefits obligation

The Group provides employee benefits based on the Group's regulations and on in accordance with the Manpower Law No.6/2023, Government No.35/2021 and recognizes the liability for employee benefits as accounted for in accordance with the SFAS No. 219. "Employee Benefits".

The Group has a pension program of severance compensation in accordance with prevailing laws covering substantially its permanent employees. The Group's retirement plan is managed separately by Financial Institution Pension Fund (Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK").

Effective from December 1, 2010, for new employees hired on or after July 1, 2007, the Group includes them in the defined contribution pension plan which are managed by the appointed Financial Institution Pension Fund appointed by each participant. Pension contributions are derived from employees and the Group by 6.00% and 15.00% of annual basic salary, respectively.

For employee who entered prior to July 1, 2007, certain defined benefits which previously managed by Dapetri is still continued with the provision that there is no salary increase in the calculation of defined benefit pension from December 1, 2010, while the working period is continued to be counted. Those employees are also included in the appointed DPLK and all payments of 5.90% are borne by the Group which calculated from the employees latest salary.

The calculation of provision for post-employment benefits as of December 31, 2025 and 2024 is based on calculations performed by independent actuaries, Halim and Rekan Actuarial Consulting and Enny Diah Awal Actuarial Consulting Independent according to their reports No. 0348/KKA-PA-REP/WN/II/2026 and No. 24033/PRRI/AP/I/2025 dated February 11, 2026 and January 13, 2025, respectively.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. Kewajiban imbalan pascakerja (lanjutan)

23. Post-employment benefits obligation (continued)

a. Beban imbalan kerja – neto

a. Net employee benefit expense

	2025	2024	
Beban jasa kini	32.162.822.137	36.019.625.747	Current service cost
Biaya bunga	57.965.678.258	24.288.186.289	Interest expenses
Kerugian aktuaris	629.402.568	84.005.919	Loss on actuarial
Penyesuaian	-	114.768.630	Adjustment
Perubahan program	(328.364.101)	(281.887.128)	Change in program
Jumlah	90.429.538.862	60.224.699.457	Total

b. Rekonsiliasi perubahan selama periode berjalan atas liabilitas (kekayaan) bersih yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

b. Reconciliation of the movement of the net liability of the pension plan recognized in the consolidated statement of financial position is as follows:

	2025	2024	
Nilai sekarang kewajiban imbalan pascakerja	904.437.737.521	905.695.426.336	Present value of employee benefit obligation
Nilai wajar aset program	(499.997.326.526)	(507.262.225.476)	Fair value of plan assets
Batas atas aset	12.222.167.000	16.355.942.000	Assets ceiling
Aset imbalan kerja	1.616.231.861	-	Employee benefit assets
Jumlah	418.278.809.856	414.789.142.860	Total

c. Mutasi liabilitas imbalan kerja neto adalah sebagai berikut:

c. The movement in the net employee benefits liability is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	905.695.426.336	871.761.001.280	Beginning balance
Penyesuaian	3.247.267.199	71.093.842	Adjustment
Beban jasa kini	32.162.822.137	28.023.266.361	Current service cost
Pembayaran pesangon	(61.899.044.083)	(62.205.011.479)	Severance payment
Beban bunga	57.965.678.258	57.255.936.906	Interest cost
Kerugian aktuarial	877.961.323	-	Actuarial losses
Kurtailmen	-	(14.548.693)	Currtailments
Penghasilan komprehensif lain	(33.612.373.649)	10.803.688.119	Other comprehensive income
Saldo akhir	904.437.737.521	905.695.426.336	Ending balance

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. Kewajiban imbalan pascakerja (lanjutan)

23. Post-employment benefits obligation (continued)

d. Mutasi nilai wajar aset program sebagai berikut:

d. Movement in the fair value of the plan assets is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	507.262.225.476	506.599.313.879	Beginning balance
Penyesuaian	4.708.505.488	-	Adjustment
Iuran yang dibayarkan	7.719.179.185	25.648.172.000	Contributions
Pembayaran manfaat	(44.595.453.000)	(47.169.965.004)	Benefit payment
Imbal hasil aset program	31.582.559.000	34.196.418.601	Return on plan asset
Hasil pengembangan rill	19.587.377	-	Real development results
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada aset program	(6.699.277.000)	(12.011.714.000)	Actuarial gain (loss) on plan assets
Saldo akhir	499.997.326.526	507.262.225.476	Ending balance

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris dalam perhitungan liabilitas beban pensiun adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used by the actuary in calculating pension expense were as follows:

	2025	2024	
Tingkat diskonto	6,20% - 7,10% per tahun/ annum	6,50% - 7,10% per tahun/ annum	Discount rate
Usia pensiun normal	56 tahun/ years	56 tahun/ years	Normal retirement age
Tingkat pengunduran diri	1% per tahun dari usia 30 tahun sampai dengan usia 46 tahun/ 1% per year from age 30 until 46	1% per tahun dari usia 30 tahun sampai dengan usia 46 tahun/ 1% per year from age 30 until 46	Resignation rate
Tingkat cacat	10%	10%	Disability rate
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019	Mortality rate
Metode aktuarial	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Actuarial method

24. Modal saham

24. Share capital

Pemilik modal Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia dengan jumlah penyertaan sebesar Rp 363.573.454.896 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The owner of the Company's capital was the Government of the Republic of Indonesia with capital amounting to Rp 363,573,454,896 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Modal Perusahaan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PP 06 tahun 2019.

The Company's capital is determined based on the Decision Letter No. PP 06 years 2019 of the Minister of State-Owned Enterprises.

25. Komponen ekuitas lainnya

Ekuitas lainnya merupakan bagian dari ekuitas yang tidak dapat dikategorikan ke dalam saldo laba ditahan maupun saldo laba berjalan. Ekuitas lainnya berasal dari penerapan PSAK yang berdampak retrospektif, pendapatan komprehensif lainnya maupun peristiwa lainnya.

Bagian dari ekuitas lainnya yang berasal dari pendapatan komprehensif lainnya diakui sebagai laba/rugi pada periode berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

25. Other equity component

Other equity represents part of the equity that cannot be categorized into retained earnings and current retained earnings. Other equity derived from impact of retrospective application of SFAS, other comprehensive income and other events.

Part of other equity in other comprehensive income is recognized in profit/loss in the current period in accordance with the criteria established in the applicable financial accounting standards in Indonesia.

26. Pembagian laba

Pada tahun 2025 dan 2024, terdapat pembagian dividen tunai sebesar Rp 16.740.811.007 dan Rp 21.235.555.186 sesuai dengan Surat Pemilik Modal No. S-383/MBU/06/2025 No. S-346/MBU/06/2024 tanggal 30 Juni 2025 dan 28 Juni 2024 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia Tahun Buku 2024 dan 2023.

26. Allocation of retained earnings

On 2025 and 2024, there was a cash dividend distribution of Rp 16,740,811,007 and Rp 21,235,555,186 in according to the Shareholder's Letter No. S-383/MBU/06/2025 and No. S-346/MBU/06/2024 on June 30, 2025 and June 28, 2024, concerning the Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements of Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia for Fiscal Year 2024 and 2023.

27. Penjualan bersih

- a. Rincian penjualan berdasarkan sektor produk adalah sebagai berikut:

27. Net sales

- a. *Detail of sales based on the product sector is as follows:*

	2025	2024	
Uang kertas	2.471.117.529.870	1.719.000.543.400	Banknotes
Uang logam & logam non uang	107.496.944.185	92.515.327.940	Coins & non-currency metal
Paspor & dokumen sekuriti	153.328.505.338	1.025.936.345.714	Passport & security document
Pita cukai	409.792.180.080	389.542.730.411	Excise stamps
Digital	873.979.581.174	163.771.857.297	Digital
Lainnya	206.117.425.685	375.641.179.386	Others
Jumlah	4.221.832.166.332	3.766.407.984.148	Total

Pada bagian lainnya merupakan penjualan yang terdiri dari kontribusi anak Perusahaan yang tidak tereliminasi.

In other parts, the sales consist of contributions from subsidiaries that has not been eliminated.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

27. Penjualan bersih (lanjutan)

27. Net sales (continued)

- b. Rincian penjualan menurut daerah geografis adalah sebagai berikut:

- b. Detail of sales based on geographic is as follows:

	2025	2024	
Domestik	4.221.832.166.332	3.752.441.563.813	Domestic
Ekspor	-	13.966.420.335	Export
Jumlah	4.221.832.166.332	3.766.407.984.148	Total

- c. Digital menurut jenis layanan

- c. Digital by type of service

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, pengelompokan Produk Digital sesuai dengan jenis layanannya adalah sebagai berikut:

In accordance with the Regulation of the Minister of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia Number 11 of 2022 concerning the Administration of Electronic Certificates, the following is the grouping of Digital Products according to the type of service:

	2025	2024	
PSrE	13.874.344.930	13.902.697.004	PSrE
Non-PSrE	860.105.236.244	149.869.160.293	Non-PSrE
Jumlah	873.979.581.174	163.771.857.297	Total

- d. Rincian pembeli dan jumlah penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah sebagai berikut:

- d. The detail of buyers and total of sales more than 10% from total net sales is as follows:

	2025		2024		
	%	Rupiah	%	Rupiah	
Pihak ketiga					Third parties
Bank Indonesia	61,02%	2.576.095.553.370	48,03%	1.808.901.136.610	Bank Indonesia
Badan Gizi Nasional	11,74%	495.641.469.753	0,00%	-	National Nutrition Agency
Direktorat Jenderal					Directorate General
Bea dan Cukai	9,67%	408.401.328.921	10,29%	387.578.742.512	of Customs and Excise
Direktorat Jenderal					Directorate General
Imigrasi	0,00%	-	22,16%	834.472.898.699	of Immigration
Jumlah	82,43%	3.480.138.352.044	80,48%	3.030.952.777.821	Total

Penjualan uang kertas dan uang logam kepada Bank Indonesia untuk tahun 2025 dan 2024 masing-masing dibukukan dengan menggunakan Perjanjian Jasa Percetakan Uang Rupiah Tahun 2024 dan 2025, dan Perjanjian Jasa Percetakan Uang Rupiah Tahun 2022-2023, serta pembayaran atas kewajiban pelaksanaan yang telah dilaksanakan telah diterima oleh Perusahaan sesuai dengan perjanjian tersebut.

Sales of banknotes and coins to Bank Indonesia for 2025 and 2024 were recorded using the 2024 and 2025 Rupiah Money Printing Services Agreement, and the 2022-2023 Rupiah Money Printing Services Agreement, respectively, and payments for the performance obligations that have been carried out has been received by the Company in accordance with these agreements.

27. Penjualan bersih (lanjutan)

Penentuan Harga Cetak Uang berdasarkan *Standard Cost* telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kesepakatan harga final untuk Harga Cetak Uang antara Perusahaan dengan Bank Indonesia untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 s.d 2025 tertuang dalam surat Perjanjian No. 26/117/DPS/P/B - SP-208/II/2024 tanggal 13 Februari 2024.

Pada bulan September 2025, terbit surat dari Bank Indonesia dengan No. 27/8/DPU/P/B tanggal 15 September 2025, perihal addendum keempat atas perjanjian No. 26/117/DPS/P/B-SP-208/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Perjanjian Jasa Percetakan Uang Rupiah Tahun Anggaran 2024 – 2025.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Peruri mendapatkan penugasan untuk menyelenggarakan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. SP-925/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 tentang Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dalam Rangka Mendukung Layanan Administrasi Pemerintah di Bidang Aparatur Negara yang Terintegrasi dengan Layanan Dasar Kepegawaian, dan No. SP-1264/IX/2025, 585/PPK-SDMA/PANRB/09/2025 tanggal 15 September 2025 atas pekerjaan tahap II TA 2025.

Perjanjian berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh para pihak sampai dengan 31 Desember 2025, kecuali diperpanjang atau diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian ini.

Berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. SP-744/VI/2025, No.BJ.02.02/A.VIII.12/496/2025 tanggal 15 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Penugasan Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Prioritas Layanan Kesehatan Terintegrasi, perjanjian berlaku sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

27. Net sales (continued)

The determination of the Money Printing Price based on the Standard Cost has been agreed upon by both parties. The final price agreement for the Money Printing Price between the Company and Bank Indonesia for Fiscal Year (FY) 2024 to 2025 as stated in the Agreement letter No. 26/117/DPS/P/B - SP-208/II/2024 dated February 13, 2024.

In September 2025, a letter was issued from Bank Indonesia with No. 27/8/DPU/P/B dated September 15, 2025, regarding the fourth addendum to agreement No. 26/117/DPS/P/B-SP-208/II/2024 dated February 13, 2024 concerning the Rupiah Money Printing Services Agreement for Fiscal Year 2024 - 2025.

In accordance with Presidential Regulation (Perpres) Number 82 of 2023 dated December 18, 2023 concerning the Acceleration of Digital Transformation and Integration of National Digital Services, Peruri received an assignment to organize the Electronic-Based Government System (SPBE) application.

Based on a cooperation agreement with the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia No. SP-925/VII/2025 dated July 14, 2025 concerning the Implementation of Priority Electronic-Based Government System (SPBE) Application in order to Support Government Administration Services in the Field of State Apparatus that are Integrated with Basic Civil Service Services, and No SP-1264/IX/2025, 585/PPK-SDMA/PANRB/09/2025 dated September 15, 2025 for phase work II TA 2025.

The agreement is effective from the date signed by the parties until December 31, 2025, unless extended or terminated under the terms of this agreement.

Based on the cooperation agreement with the Ministry of Health of the Republic of Indonesia No. SP-744/VI/2025, No.BJ.02.02/A.VIII.12/1496/2025 dated June 15, 2025 concerning the Implementation of the Assignment of Electronic-based Government System Applications for Integrated Health Services Priority, the agreement is valid from June 15, 2025 to December 31, 2025.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

27. Penjualan bersih (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia No. SP-02/I/2025, No. 0061/JI/TI.03.00/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas Dalam Rangka Mendukung Layanan Pendidikan Terintegrasi Tahun 2025, perjanjian berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh para pihak sampai dengan 31 Desember 2025, kecuali diperpanjang atau diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian ini.

Berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 2132/PKS/F1/2025, SP-1535/XI/2025 tanggal 3 November 2025 tentang Penyelenggaraan Aplikasi Sistem, Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Rangka Mendukung Layanan Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi Terintegrasi Tahun 2025, perjanjian berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh para pihak sampai dengan 31 Desember 2025, kecuali diperpanjang atau diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian ini.

Berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Badan Gizi Nasional No. SPK-71/PPK-PUSDATIN/10/2025, SP-1349/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Pengadaan Jasa Lainnya SIPGN. Perjanjian berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh para pihak sampai dengan 31 Desember 2025, kecuali diperpanjang atau diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian ini.

Berdasarkan Addendum perjanjian kerjasama dengan Badan Gizi Nasional No. SPK-165/PPK-PUSDATIN/12/2025, SP-1892/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Pengadaan Sewa Pemenuhan Infrastruktur TIK. Perjanjian berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh para pihak sampai dengan 19 Februari 2026, kecuali diperpanjang atau diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian ini.

27. Net sales (continued)

Based on a cooperation agreement with the Ministry of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia No. SP-02/I/2025, No. 0061/JI/TI.03.00/2025 dated January 2, 2025 concerning the Implementation of Priority Electronic-Based Government System (SPBE) Application in order to Support Integrated Education Services in 2025, the agreement is effective from the date signed by the parties until December 31, 2025, unless extended or terminated under the terms of this agreement.

Based on a cooperation agreement with the Ministry of Higher Education, Science, and Technology of the Republic of Indonesia No. 2132/PKS/F1/2025, SP-1535/XI/2025 dated November 3, 2025 concerning the Implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) Application in order to support integrated higher education, science and technology services in 2025, the agreement is effective from the date signed by the parties until December 31, 2025, unless extended or terminated under the terms of this agreement.

Based on the cooperation agreement with the National Nutrition Agency No. SPK-71/PPK-PUSDATIN/10/2025, SP-1349/X/2025 dated October 1, 2025 concerning the Procurement of Other Services of SIPGN. The agreement is valid from the date of signature by the parties until December 31, 2025, unless extended or terminated based on the provisions of this agreement.

Based on the Addendum of cooperation agreement with the National Nutrition Agency No. SPK-165/PPK-PUSDATIN/12/2025, SP-1892/XII/2025 dated December 31, 2025 concerning the Procurement of Leases for the Fulfillment of TIK Infrastructure. The agreement is valid from the date of signature by the parties until February 19, 2026, unless extended or terminated based on the provisions of this agreement.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

28. Beban pokok penjualan

28. Cost of sales

a. Uang kertas

a. Banknote

	2025	2024	
Biaya bahan/ variabel	981.293.475.524	630.379.536.698	Material/ variable cost
Biaya tenaga kerja	335.996.100.128	250.538.156.800	Labor cost
Biaya pemeliharaan	63.749.998.221	36.665.258.177	Maintenance cost
Biaya penyusutan dan amortisasi	263.002.493.427	245.567.939.759	Depreciation cost and amortization
Biaya energi	26.335.779.785	21.921.019.952	Energy cost
Biaya umum	9.933.942.101	5.766.479.863	General cost
Sub jumlah	1.680.311.789.186	1.190.838.391.249	Subtotal

b. Uang logam dan logam non uang

b. Coin and non-currency metal

	2025	2024	
Bahan bahan/ variabel	11.365.774.910	9.770.536.298	Material/ variable cost
Biaya tenaga kerja	42.022.338.903	34.655.430.577	Labor cost
Biaya pemeliharaan	9.353.254.374	7.581.319.279	Maintenance cost
Biaya penyusutan dan amortisasi	17.495.867.305	16.886.931.860	Depreciation cost and amortization
Biaya energi	10.575.139.960	8.915.871.665	Energy cost
Biaya umum	1.151.619.727	1.307.509.826	General cost
Sub jumlah	91.963.995.179	79.117.599.505	Subtotal

c. Paspur dan dokumen sekuriti

c. Passport and security document

	2025	2024	
Biaya bahan/ variabel	81.999.612.296	524.667.981.846	Material/ variable cost
Biaya tenaga kerja	45.483.399.184	85.932.491.964	Labor cost
Biaya pemeliharaan	3.242.080.083	10.248.107.994	Maintenance cost
Biaya penyusutan dan amortisasi	8.749.896.203	17.277.831.135	Depreciation cost and amortization
Biaya energi	1.895.994.859	5.800.417.070	Energy cost
Biaya umum	1.153.917.298	1.754.046.698	General cost
Sub jumlah	142.524.899.923	645.680.876.707	Subtotal

d. Pita cukai

d. Excise stamp

	2025	2024	
Biaya bahan / variabel	258.847.200.584	237.187.241.943	Material/ variable cost
Biaya tenaga kerja	78.082.041.396	58.578.935.742	Labor cost
Biaya pemeliharaan	9.778.661.392	16.820.250.718	Maintenance cost
Biaya penyusutan dan amortisasi	15.059.092.093	13.774.411.465	Depreciation cost and amortization
Biaya energi	9.358.629.924	10.890.229.792	Energy cost
Biaya umum	4.557.183.863	2.504.314.549	General cost
Sub jumlah	375.682.809.252	339.755.384.209	Subtotal

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

28. Beban pokok penjualan (lanjutan)

28. Cost of sales (continued)

e. Digital

e. Digital

	2025	2024	
Biaya variabel	188.142.414.256	121.160.199.180	Variable cost
Biaya tenaga kerja	214.953.364.477	26.070.813.633	Labor cost
Biaya pemeliharaan	324.033.948.127	91.643.283.170	Maintenance cost
Biaya penyusutan dan amortisasi	58.246.179.995	48.410.566.780	Depreciation cost and amortization
Biaya umum	21.307.310.130	19.577.105.212	General cost
Sub jumlah	806.683.216.985	306.861.967.975	Subtotal

f. Lainnya

f. Others

Pada bagian lainnya merupakan beban pokok penjualan yang terdiri dari kontribusi anak Perusahaan.

In other parts, the cost of sales consists of contributions from subsidiaries.

	2025	2024	
Sub jumlah	127.440.093.823	284.761.893.985	Subtotal
Jumlah beban pokok penjualan	3.224.606.804.348	2.847.016.113.630	Total cost of sales

Rincian pemasok dan jumlah pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian bersih adalah sebagai berikut:

The detail of suppliers and total purchases more than 10% from total net purchases is as follows:

	2025		2024		
	%	Rupiah	%	Rupiah	
Pihak berelasi					Related parties
PT. Sicpa Peruri					PT Sicpa Peruri
Securink	65,21%	1.118.696.384.288	52,35%	571.860.077.805	Securink
Pihak ketiga					Third parties
PT. Sigma					PT. Sigma
Cipta Caraka	8,86%	152.048.071.160	10,40%	113.643.433.005	Cipta Caraka
Jumlah	74,07%	1.270.744.455.448	62,75%	685.503.510.810	Total

29. Beban penjualan

29. Selling expenses

	2025	2024	
Beban iklan, promosi, sponsor	10.465.312.273	13.935.183.033	Advertising, promotion, sponsorship expenses
Beban pemeliharaan relasi	5.272.576.639	4.977.049.789	Relationship maintenance expenses
Beban riset dan desain	3.520.175.656	4.431.026.743	Research and design expenses
Beban pengiriman dan pengangkutan	2.329.029.092	2.456.932.224	Shipping and transportation expenses
Beban lain-lain	8.135.773.521	7.787.281.720	Others expenses
Jumlah	29.722.867.181	33.587.473.509	Total

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

30. Beban umum dan administrasi

30. General and administrative expenses

	2025	2024	
Beban gaji, tunjangan dan umum	592.623.199.551	561.891.738.538	Salaries, allowances and general expenses
Beban pemeliharaan	60.760.189.115	48.005.483.866	Maintenance expenses
Beban penyusutan	45.621.463.825	53.591.911.037	Depreciation expenses
Beban jasa profesional	30.938.765.895	30.265.362.003	Professional fee expenses
Beban pajak bumi dan bangunan	14.441.816.133	14.291.808.258	Land and building tax expenses
Beban air, listrik, bahan bakar	4.159.205.903	4.494.260.661	Utility expenses
Beban penyisihan penurunan nilai piutang	2.743.702.190	(4.792.412.490)	Expected impairment losses on account receivables
Jumlah	751.288.342.612	707.748.151.873	Total

31. Beban dan pendapatan keuangan

31. Finance income and expenses

a. Beban keuangan

a. Finance expenses

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 33h)	25.590.789.828	41.190.865.305	Related parties (Note 33h)
Pihak ketiga	8.531.590.339	2.809.659.899	Third Party
Jumlah	34.122.380.167	44.000.525.204	Total

b. Pendapatan keuangan

b. Finance income

	2025	2024	
Pendapatan bunga deposito	62.743.357.259	72.473.605.749	Interest income on deposits
Pendapatan bunga giro	22.173.620.488	13.961.048.653	Interest income on current account
Pendapatan bunga obligasi	-	823.000.000	Interest income on obligation
Jumlah	84.916.977.747	87.257.654.402	Total

32. Pendapatan (beban) lain – lain

32. Other income (expenses)

	2025	2024	
Pendapatan sewa tanah dan bangunan	1.962.945.422	1.489.194.086	Rental of land and building income
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(18.209.410.885)	315.289.508	Gain (loss) on foreign exchange-net
Laba penjualan aset	3.298.200.156	33.023.400	Gain on disposal of assets
Lain-lain	65.884.872.267	3.948.250.575	Others
Jumlah	52.936.606.960	5.785.757.569	Total

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

33. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

33. Balance and transactions with related parties

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transaction
Pemerintah Republik Indonesia	Pemilik modal/ Shareholder	Pemilik modal, deviden/ Shareholder, dividend
PT SICPA Peruri Securink	Investasi pada ventura bersama/ Investment in joint venture	Pinjaman pemegang saham pembelian bahan baku dan Penjualan/ Shareholder loan purchase of raw materials and Sales
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Kas dan setara kas, pinjaman dan Penjualan/ Cash and cash equivalents, loans and Sales
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Kas dan setara kas, pinjaman dan penjualan / Cash and cash equivalents, loans and sales
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Kas dan setara kas, aset yang dibatasi penggunaannya, pinjaman dan penjualan / Cash and cash equivalents, restricted assets, loans and sales
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Kas dan setara kas dan pinjaman/ Cash and cash equivalents, loans
PT Pertamina (Persero)	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Penjualan/ Sales
PT Pos Indonesia (Persero)	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Penjualan/ Sales
PT Industri Kereta Api (Persero)	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Penjualan/ Sales
PT Hutama Karya (Persero)	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Penjualan/ Sales
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Penjualan/ Sales
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Penjualan/ Sales
Perum Percetakan Negara RI	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Penjualan/ Sales
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Penjualan/ Sales
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Penjualan/Sales
PT Len Industri (Persero)	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Penjualan/ Sales
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Penjualan/ Sales
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Penjualan/ Sales
PT Brantas Abipraya	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Penjualan/ Sales
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Pembelian/ Purchase
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Entity	Kas dan setara kas dan Penjualan / Cash and cash equivalents and Sales
PT Jasaraharja Putera	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ Subsidiary of State Owned Entity	Asuransi aset/ Assets insurance Penjualan/ Sales
PT Asuransi Jasa Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ Subsidiary of State Owned Entity	Asuransi aset/ Assets insurance

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

33. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) **33. Balance and transactions with related parties (continued)**

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transaction
PT BGR Logistik Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Jasa pemindahan/ <i>Handling service</i>
PT Pegadaian	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Kawasan Industri Terpadu Batang	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Mandiri Sekuritas	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Jaminan Kredit Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT PP Presisi	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Telkom Akses	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Borneo Alumina Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Pupuk Kalimantan Timur	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Pupuk Iskandar Muda	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Pupuk Kujang Cikampek	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Pupuk Indonesia Niaga	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Pupuk Indonesia Utilitas	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Pupuk Indonesia Logistik	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Rekayasa Industri	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Balebat Dedikasi Prima	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Terminal Petikemas Surabaya	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Asuransi Jiwa Taspen	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Varia usaha Beton	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Kawasan Industri Makasar	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT PLN Nusantara Power	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Kawasan Berikat Nusantara	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>
PT Saka Energi Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Penjualan/ <i>Sales</i>

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan) **33. Balance and transactions with related parties (continued)**

Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat transaksi/ <i>Nature of transaction</i>
PT Indonesia Comnets Plus	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian dan Penjualan/ <i>Purchase and Sales</i>
PT BRI Multifinance Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian dan Penjualan/ <i>Purchase and Sales</i>
PT Sucofindo	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian dan Penjualan/ <i>Purchase and Sales</i>
PT Sigma Cipta Caraka	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian dan Penjualan/ <i>Purchase and Sales</i>
PT Kimia Farma Diagnostika	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian/ <i>Purchase</i>
PT Bahana Sekuritas	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian/ <i>Purchase</i>
PT BRI Asuransi Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian/ <i>Purchase</i>
PT Administrasi Medika	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian/ <i>Purchase</i>
PT Infomedia Nusantara	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian/ <i>Purchase</i>
PT PINS Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian/ <i>Purchase</i>
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian/ <i>Purchase</i>
PT Solusi Bangun Beton	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian/ <i>Purchase</i>
PT Sinergi Informatika Semen Indonesia	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian/ <i>Purchase</i>
PT Rumah Sakit Peln	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian/ <i>Purchase</i>
PT Asuransi BRI Life	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian/ <i>Purchase</i>
PT Metra Digital Media	Entitas Anak Badan Usaha Milik Negara/ <i>Subsidiary of State Owned Entity</i>	Pembelian/ <i>Purchase</i>
Dewan Pengawas dan Direksi	Manajemen kunci/ <i>Key management</i>	Kompensasi dan remunerasi/ <i>Compensation and remuneration</i>

Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Disclosure of significant balances and transactions with related parties is as follows:

a. Bank

a. Banks

	2025	2024	
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	732.279.168.129	421.844.109.445	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	27.876.704.451	4.833.945.464	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	22.487.918.711	39.739.167.625	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	9.022.470.617	2.656.503.941	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4.937.324.587	5.240.115.343	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Sub jumlah	796.603.586.495	474.313.841.818	Subtotal

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**33. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
(lanjutan)**

Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

a. Bank (lanjutan)

	2025	2024	
Dolar Amerika Serikat:			US Dollar:
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.407.602.107	1.627.727.546	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	118.457.928	2.138.538.224	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Euro:			Euro:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	314.774.079	1.803.216.619	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	95.956.596	84.031.129	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
JPY:			JPY:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	978.969	7.073.146	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sub jumlah	2.937.769.679	5.660.586.664	Subtotal
Jumlah	799.541.356.174	479.974.428.482	Total

b. Deposito

b. Time deposits

	2025	2024	
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	371.800.000.000	471.800.000.000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	357.000.000.000	376.410.643.862	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	258.050.000.000	258.050.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	205.000.000.000	205.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	165.000.000.000	120.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dolar Amerika Serikat:			US Dollar:
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	41.955.000.000	40.405.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	1.398.805.000.000	1.471.665.643.862	Total

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**33. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
(lanjutan)**

**33. Balance and transactions with related parties
(continued)**

c. Piutang usaha

c. Trade receivables

	2025	2024	
PT Sigma Cipta Caraka	6.354.872.168	9.060.351.053	PT Sigma Cipta Caraka
PT Sucofindo	4.052.943.000	2.279.984.400	PT Sucofindo
Perum Percetakan Negara RI	2.834.104.231	2.490.017.796	Perum Percetakan Negara RI
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.671.480.888	1.034.889.250	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Pertamina (Persero)	416.605.150	367.350.700	PT Pertamina (Persero)
PT Pos Indonesia (Persero)	413.700.000	793.475.000	PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pupuk Indonesia (Persero)	373.669.400	199.070.000	PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	341.795.920	131.251.840	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Balebat Dedikasi Prima	217.759.037	-	PT Balebat Dedikasi Prima
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	210.675.871	210.675.871	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Jaminan Kredit Indonesia	191.870.600	154.130.550	PT Jaminan Kredit Indonesia
PT Jalin Pembayaran Nusantara	142.934.700	142.934.700	PT Jalin Pembayaran Nusantara
PT Kawasan Industri Makassar	132.090.000	132.090.000	PT Kawasan Industri Makassar
PT Semen Indonesia (Persero)	129.247.984	-	PT Semen Indonesia (Persero)
PT Mineral Industri Indonesia	124.963.800	-	PT Mineral Industri Indonesia
PT Indonesia Coments Plus	120.349.530	21.381.930	PT Indonesia Coments Plus
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	99.256.200	98.235.000	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Pupuk Kalimantan Timur	96.137.100	126.468.960	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Saka Energi Indonesia	94.183.500	-	PT Saka Energi Indonesia
PT Pupuk Iskandar Muda	76.789.800	38.295.000	PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kujang Cikampek	54.639.750	32.023.500	PT Pupuk Kujang Cikampek
PT Pegadaian	29.216.000	29.216.000	PT Pegadaian
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	22.764.997	15.134.080	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	16.311.351	10.063.106	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT PLN Nusantara Power	15.754.952	-	PT PLN Nusantara Power
PT Telkom Akses	15.093.430	15.093.430	PT Telkom Akses
PT Borneo Alumina Indonesia	11.675.535	25.380.317	PT Borneo Alumina Indonesia
PT Hutama Karya (Persero)	10.410.715	18.845.465	PT Hutama Karya (Persero)
PT Rekayasa Industri	9.407.250	3.402.150	PT Rekayasa Industri
PT Asuransi Jiwa Taspen	8.940.000	8.940.000	PT Asuransi Jiwa Taspen
PT Varia Usaha Beton	7.812.874	54.872.850	PT Varia Usaha Beton
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	3.659.760	3.659.760	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	2.570.316	2.570.316	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Kawasan Berikat Nusantara	2.507.657	-	PT Kawasan Berikat Nusantara
Sub jumlah dipindahkan	18.306.193.466	17.499.803.024	Subtotal carried forward

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**33. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
(lanjutan)**

**33. Balance and transactions with related parties
(continued)**

c. Piutang usaha (lanjutan)

c. Trade receivables (continued)

	2025	2024	
Sub jumlah pindahan	18.306.193.466	17.499.803.024	Subtotal brought forward
PT Pupuk Indonesia Niaga	1.057.220	2.741.700	PT Pupuk Indonesia Niaga
PT Len Industri (Persero)	824.314	-	PT Len Industri (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	530.000	700.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Mandiri Sekuritas	40.000	40.000	PT Mandiri Sekuritas
PT Kawasan Industri Terpadu Batang	-	138.855.450	PT Kawasan Industri Terpadu Batang
PT Pupuk Indonesia Utilitas	-	8.053.050	PT Pupuk Indonesia Utilitas
PT BRI Multifinance Indonesia	-	21.490.000	PT BRI Multifinance Indonesia
PT Industri Kereta Api (Persero)	-	10.041.150	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Jasaraharja Putera	-	6.660.000	PT Jasaraharja Putera
PT Terminal Petikemas Surabaya	-	2.670.000	PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Pupuk Indonesia Logistik	-	1.731.600	PT Pupuk Indonesia Logistik
Jumlah	18.308.645.000	17.692.785.974	Total

d. Piutang lain-lain

d. Other receivables

	2025	2024	
PT Sicpa Peruri Securink	221.051.834	234.985.726	PT Sicpa Peruri Securink
PT Brantas Abipraya	77.984.438	-	PT Brantas Abipraya
PT PP Presisi Tbk	52.853.000	52.853.000	PT PP Presisi Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4.536.173	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Jumlah	356.425.445	287.838.726	Total

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**33. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
(lanjutan)**

**33. Balance and transactions with related parties
(continued)**

e. Utang usaha

e. Trade payables

	2025	2024	
PT Sicpa Peruri Securink	344.016.099.164	126.827.509.667	PT Sicpa Peruri Securink
PT Sigma Cipta Caraka	63.763.622.267	121.059.356.395	PT Sigma Cipta Caraka
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7.121.122.676	9.110.791.076	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Infomedia Nusantara	2.650.000.000	4.377.562.500	PT Infomedia Nusantara
PT Kimia Farma Diagnostika	1.192.990.000	696.314.000	PT Kimia Farma Diagnostika
PT Indonesia Comnets Plus	1.115.491.709	524.139.225	PT Indonesia Comnets Plus
PT Metra Digital Media	826.500.055	-	PT Metra Digital Media
PT Bahana Sekuritas	820.000.000	2.353.600.000	PT Bahana Sekuritas
PT PINS Indonesia	808.307.500	565.434.000	PT PINS Indonesia
PT Rumah Sakit Pelni	485.003.700	-	PT Rumah Sakit Pelni
PT Administrasi Medika	258.785.250	201.229.958	PT Administrasi Medika
PT BRI Asuransi Indonesia	236.810.753	62.375.063	PT BRI Asuransi Indonesia
PT Sucofindo	188.000.000	260.628.000	PT Sucofindo
PT Asuransi BRI Life	53.119.482	-	PT Asuransi BRI Life
PT BGR Logistik Indonesia	39.486.500	39.486.500	PT BGR Logistik Indonesia
PT Asuransi Jasa Indonesia	21.854.890	21.854.890	PT Asuransi Jasa Indonesia
PT Jasaraharja Putera	6.155.346	6.155.346	PT Jasaraharja Putera
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia	1.678.731	1.678.731	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia
PT Sinergi Informatika Semen Indonesia	-	144.000.000	PT Sinergi Informatika Semen Indonesia
PT Solusi Bangun Beton	-	50.557.725	PT Solusi Bangun Beton
PT BRI Multifinance Indonesia	-	12.500.000	PT BRI Multifinance Indonesia
Jumlah	423.605.028.023	266.315.173.076	Total

f. Pinjaman bank

f. Bank loans

	2025	2024	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	108.347.408.004	206.028.626.198	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	107.635.917.855	173.900.839.521	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	81.285.044.212	124.885.044.212	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	297.268.370.071	504.814.509.931	Total

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**33. Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi
(lanjutan)**

**33. Balance and transaction with related parties
(continued)**

g. Aset yang dibatasi penggunaannya

g. Restricted assets

	2025	2024	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	55.173.000.000	54.459.428.355	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	55.173.000.000	54.459.428.355	Total

h. Beban bunga pinjaman

h. Interest loan expenses

	2025	2024	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.424.542.301	21.784.516.672	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.556.893.820	13.268.590.262	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.609.353.707	6.051.889.264	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	85.869.107	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	25.590.789.828	41.190.865.305	Total

i. Gaji dan tunjangan manajemen kunci

i. Key management salaries and allowances

Perincian gaji dan tunjangan untuk Direksi, Dewan Pengawas dan Komite Dewan Pengawas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The details of the Board of Directors, Board of Supervisors and Committee of Board of Supervisors salaries and allowances for the year ended December 31, 2025 and 2024 were as follows:

	2025	2024	
Direksi	13.406.122.476	14.269.200.000	Directors
Dewan Pengawas dan Komite Dewan Pengawas	11.663.760.189	11.574.101.353	Board of Supervisors and Committee of Board of Supervisors
Jumlah	25.069.882.665	25.843.301.353	Total

34. Komitmen dan kontinjensi

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

Fasilitas *Non-Cash Loan* ("NCL")

- a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Perusahaan memiliki fasilitas *Non-Cash Loan* dari BNI yang dapat digunakan untuk bank garansi maupun L/C dengan nilai plafon maksimal sebesar USD 37.195.652 (*Revolving*) dengan jangka waktu 12 Maret 2025 sampai dengan 11 Maret 2026. Pada 31 Desember 2025 saldo *outstanding* adalah sebesar USD 16.142.940 dan sisa plafon sebesar USD 21.052.712.

- b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi dari BRI dengan plafon sebesar Rp 200.000.000.000 dengan jangka waktu 29 November 2025 sampai dengan 29 November 2026. Nilai *outstanding* per 31 Desember 2025 adalah sebesar nihil dan sisa plafon sebesar Rp 200.000.000.000.

- c. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank HSBC")

Perusahaan memiliki fasilitas perbankan korporasi, fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda atau berjangka dan fasilitas treasury dari Bank HSBC dengan plafon maksimal sebesar Rp 150.000.000.000, Rp 175.000.000.000 dan USD 1.000.000 dengan jangka waktu 23 Mei 2025 sampai dengan 23 Mei 2026. Nilai *outstanding* pada 31 Desember 2025 sebesar Rp 104.304.104.961 dengan sisa plafon sebesar Rp 224.058.107.242 dan USD 1.000.000.

34. Commitments and contingencies

As of December 31, 2025, the Company has Commitments and Contingencies as follows:

Non-Cash Loan ("NCL") Facility

- a. *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")*

The Company obtained a Non-Cash Loan facility from BNI which can be used for bank guarantees or L/C with maximum facility amounting to USD 37,195,652 (Revolving) with a period of March 12, 2025 to March 11, 2026. As of December 31, 2025, the outstanding balance was USD 16,142,940 and remaining ceiling of USD 21,052,712.

- b. *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")*

The Company has a bank guarantee facility from BRI with a ceiling of Rp 200,000,000,000 with a period of November 29, 2025 to November 29, 2026. An outstanding value as of December 31, 2025 amounting to nil and a remaining ceiling of Rp 200,000,000,000.

- c. *PT Bank HSBC Indonesia ("Bank HSBC")*

The company has a banking facility, deferred payment credit facility and treasury facility from Bank HSBC with a maximum ceiling of Rp 150,000,000,000, Rp 175,000,000,000 and USD 1,000,000 with a period of May 23, 2025 to May 23, 2026. An outstanding value on December 31, 2025 amounting to Rp 104,304,104,961 with a remaining ceiling amounting to Rp 224,058,107,242 and USD 1,000,000.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

34. Komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut: (berikut)

Fasilitas Non-Cash Loan ("NCL") (lanjutan)

d. Komitmen Pembelian Aset Tetap

Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2025 memiliki komitmen untuk membeli aset tetap berupa peralatan kantor, alat dan perkakas, mesin dan peralatan pabrik, tanah dan bangunan, dan aset tak berwujud masing-masing sebesar Rp 18.553.313.065, Rp 13.260.746.268, Rp 491.478.042.227, Rp 38.305.647.057 dan Rp 27.228.181.444 atas komitmen tersebut telah terealisasi sebesar Rp 17.127.829.738, Rp 12.203.547.984, Rp 424.897.059.514, Rp 18.032.424.678 dan Rp 21.045.538.600.

35. Manajemen risiko keuangan

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	2.259.085.686.443	2.155.611.544.368	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	448.833.512.556	625.933.445.772	Trade receivables
Piutang lain-lain	6.350.894.389	15.081.180.774	Other receivables
Kas yang dibatasi penggunaannya	55.173.000.000	54.459.428.355	Restricted cash
Jumlah	2.769.443.093.388	2.851.085.599.269	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha	1.047.430.317.723	740.321.388.332	Trade payables
Beban yang masih harus dibayar	414.492.595.424	425.063.190.735	Accrued expense
Pinjaman bank	310.124.626.649	515.933.272.149	Bank loan
Liabilitas jangka pendek lainnya	69.598.360.955	60.992.524.273	Other current liabilities
Jumlah	1.841.645.900.751	1.742.310.375.489	Total
Risiko kredit			Credit risk
Piutang usaha	448.833.512.556	625.933.445.772	Trade receivables
Piutang lain-lain	6.350.894.389	15.081.180.774	Other receivables
Jumlah	455.184.406.945	641.014.626.546	Total

34. Commitments and contingencies(continued)

As of December 31, 2024, The Company has Commitments and Contingencies as follows: (continued)

Non-Cash Loan ("NCL") Facility (continued)

d. Fixed Assets Purchase Commitment

As of December 31, 2025, the Company has a commitment to purchase fixed assets in the form of vehicles, office equipment, tools and equipment, building and factory machines amounting to Rp 18,553,313,065, Rp 13,260,746,268, Rp 491,478,042,227, Rp 38,305,647,057 and Rp 27,228,181,444 respectively, and of those commitments had been realized amounting to Rp 17,127,829,738, Rp 12,203,547,984, Rp 429,897,059,514, Rp 18,032,424,678 dan Rp 21,045,538,600, respectively.

35. Financial risks management

The following table represents the carrying values and estimated fair values of the Group's financial instruments as of December 31, 2025 and 2024:

35. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan sebesar jumlah dimana instrumen keuangan tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Instrumen keuangan pokok Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset tidak lancar lainnya (kas yang dibatasi penggunaannya), utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya dan pinjaman bank. Tujuan utama dari instrumen keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional Grup. Telah menjadi kebijakan Grup bahwa tidak akan ada perdagangan dalam instrumen keuangan yang akan dilakukan.

Grup terpengaruh terhadap risiko tingkat suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Manajemen senior Grup mengawasi manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini:

Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek dan utang sewa pembiayaan. Grup berusaha untuk meminimalisir saldo pinjaman yang berbunga tinggi.

Risiko tingkat mata uang asing

Risiko pasar yang melekat kepada Grup adalah risiko mata uang asing, di mana Grup melakukan transaksi dalam mata uang asing dan memiliki aset dan liabilitas keuangan yang didenominasi dalam mata uang asing.

Grup memonitor risiko nilai tukar mata uang asing secara cermat dan mempertahankan dana dalam berbagai mata uang untuk meminimalkan risiko mata uang karena perbedaan waktu antara penjualan dan pembelian. Risiko penjabaran mata uang muncul ketika kewajiban transaksi komersial dan aset diakui dalam mata uang yang bukan merupakan mata uang fungsional Grup.

35. Financial risks management (continued)

The fair values of the financial assets and liabilities are presented as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's-length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

The Group's principal financial instruments comprise cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, other non-current assets (restricted cash), trade payables, accrued expenses other non current liabilities and bank loans. The main purpose of these financial instruments is to raise funds for the Group's operations. It has been the Group's policy that no trading in financial instruments shall be undertaken.

The Group is exposed to interest rate risk, foreign currency risk, credit risk, and liquidity risk. The Group's senior management oversees the management of these risks. The Board of Directors reviews and agrees the policies for managing each of these risks which are summarized below:

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to Group's short-term bank loans and finance lease. The Group seeks to minimize outstanding of high-interest loans.

Foreign exchange rate risk

Market risk attributable to the Group is currency risk, since the Group entered into transactions in foreign currencies and has financial assets and liabilities denominated in foreign currencies.

The Group monitors its foreign currency exchange risks closely and maintains funds in various currencies to minimize currency exposure due to timing differences between sales and purchases. Currency translation risk arises when commercial transaction liabilities and assets are denominated in a currency that is not the Group's functional currency.

35. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

Risiko tingkat mata uang asing (lanjutan)

Hal ini bukan merupakan kebijakan Grup untuk mengambil posisi spekulatif dalam mata uang asing.

Perubahan nilai tukar telah dan diperkirakan akan terus memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Grup. Grup menghadapi risiko ini sebagai bahan jual beli dalam Dolar Amerika Serikat.

Risiko kredit

Selain pinjaman jangka panjang, Grup memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Eksposur dalam mata uang asing tersebut jumlahnya tidak material.

Kualitas aset keuangan

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan rekening bank dan piutang dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Untuk bank, hanya pihak-pihak independen dengan predikat baik yang diterima.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

35. Financial risks management (continued)

Foreign exchange rate risk (continued)

It is not the Group's policy to take speculative positions in foreign currencies.

Changes in exchange rates have affected and may continue to affect the Group's results of operations and cash flows. The Group faces this risk as the materials sold are purchased in US Dollar.

Credit risk

In addition to long-term loans, the Group has exposure in foreign currencies arising from its operational transactions. Such exposure arises because the relevant transaction is made in a currency other than the functional currency of the operating unit or the other party. The exposure in such foreign currency is immaterial.

Quality of financial assets

The Group manages credit risk exposed from its deposits with banks and receivables by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counter party. For banks, only independent parties with a good rating are accepted.

Credit quality of financial assets that are either past due or not impaired can be assessed by reference to historical information regarding the debtor's default rate.

	2025	2024	
Kas dan setara kas			Cash and cash equivalent
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	idAA	idAA	PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	idAAA	idAAA	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT BPD Jawa Timur Tbk	idAA-	idAA-	PT BPD Jawa Timur Tbk
PT Bank DKI	idAA	idAA	PT Bank DKI
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	idAAA	idAAA	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	idAAA	idAAA	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idAAA	idAAA	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	idAAA	idAAA	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	idAAA	idAAA	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	idAAA	idAAA	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	idAAA	idAAA	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	idAAA	idAAA	PT Bank KB Bukopin Tbk

35. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

35. Financial risks management (continued)

Kualitas aset keuangan (lanjutan)		Quality of financial assets (continued)	
	2025	2024	
Piutang usaha			Trade receivables
PT Pertamina (Persero)	idAAA	idAAA	PT Pertamina (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	idAAA	idAAA	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Pos Indonesia (Persero)	idBBB+	idBBB+	PT Pos Indonesia (Persero)
PT Hutama Karya (Persero)	idAA-	idAA-	PT Hutama Karya (Persero)
PT Industri Kereta Api (Persero)	idA-	idBBB+	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Pegadaian	idAAA	idAAA	PT Pegadaian
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	idAAA	idAAA	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	idBBB	idBBB+	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Kas yang dibatasi penggunaannya			Restricted cash
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	idAAA	idAAA	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan suatu risiko pada saat posisi arus kas Grup mengindikasikan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi beban jangka pendek Grup. Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan setara kas yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Grup menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank untuk mengelola risiko likuiditas.

Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the risk when the Group's cash flow position indicates that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditure. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents to support business activities on a timely basis. The Group maintains a balance between continuity of account receivable collections and flexibility through the use of bank loans in order to manage liquidity risk.

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PERUM PERCETAKAN UANG RI
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

35. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

35. Financial risks management (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

Tabel berikut merangkum liabilitas keuangan Grup pada saat jatuh tempo berdasarkan kontrak pembayaran yang tidak didiskontokan.

The following table summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

	< 1 Tahun/ Year	> 1 tahun / Year	Nilai Tercatat/ Carrying Value 31 Desember / December 31, 2025	
Pinjaman bank	235.698.423.495	74.426.203.154	310.124.626.649	Bank loans
Utang usaha	1.047.430.317.723	-	1.047.430.317.723	Trade payables
Beban yang masih harus dibayar	414.492.595.424	-	414.492.595.424	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	69.598.360.955	-	69.598.360.955	Other current liabilities
Jumlah	1.767.219.697.597	74.426.203.154	1.841.645.900.751	Total

	< 1 Tahun/ Year	> 1 tahun / Year	Nilai Tercatat/ Carrying Value 31 Desember / December 31, 2024	
Pinjaman bank	323.544.563.355	192.388.708.794	515.933.272.149	Bank loans
Utang usaha	740.321.388.332	-	740.321.388.332	Trade payables
Beban yang masih harus dibayar	425.063.190.735	-	425.063.190.735	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	60.992.524.273	-	60.992.524.273	Other current liabilities
Jumlah	1.549.921.666.695	192.388.708.794	1.742.310.375.489	Total

36. Informasi keuangan tambahan

36. Supplementary financial information

Grup menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan Perusahaan (Entitas Induk), dimana investasi pada entitas anak dicatat dengan metode biaya disajikan untuk dapat menganalisa hasil usaha Entitas Induk. Informasi keuangan tambahan Perusahaan (Entitas Induk) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup (Lampiran I, II, III, IV).

The Group published consolidated financial statements which are the main financial statements. The additional financial information of the Company (Parent Entity), where investments in subsidiaries are accounted for under the cost method have been presented to analyse the Parent Entity's results of operations. The following additional financial information of the Company (Parent Entity) should be read in conjunction with the consolidated financial statements (Attachment I, II, III, IV).

LAMPIRAN I/1-2

ATTACHMENT I/1-2

PERUM PERCETAKAN UANG RI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM PERCETAKAN UANG RI
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT ENTITY

As of December 31, 2025 and 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
Aset			Assets
Aset lancar			Current assets
Kas dan setara kas	2.167.787.724.678	2.065.053.919.171	Cash and cash equivalents
Piutang usaha			Trade receivables
Pihak berelasi	15.542.408.517	15.169.385.448	Related parties
Pihak ketiga	409.987.476.697	585.887.878.097	Third parties
Piutang lain-lain			Other receivables
Pihak berelasi	16.297.504.215	11.442.891.043	Related parties
Pihak ketiga	1.965.888.072	2.314.127.521	Third parties
Persediaan	615.252.336.971	397.229.380.443	Inventories
Pajak dibayar dimuka	26.415.496.890	25.269.767.833	Prepaid taxes
Uang muka dan beban dibayar dimuka	348.608.366.736	96.218.665.473	Advances and prepaid expenses
Jumlah aset lancar	3.601.857.202.776	3.198.586.015.029	Total current assets
Aset tidak lancar			Non-current assets
Investasi pada ventura bersama	208.081.061.966	202.995.617.390	Investment in joint ventures
Investasi pada entitas anak	281.860.382.601	281.860.382.601	Investment in subsidiaries
Properti investasi	222.508.988	222.508.988	Investment properties
Aset tetap - bersih	2.529.125.941.505	2.532.948.287.512	Fixed assets - net
Aset hak guna - bersih	909.289.963	-	Right of use assets - net
Aset tak berwujud - bersih	306.065.782.985	355.631.793.741	Intangible assets - net
Aset tidak lancar lainnya	143.306.942.236	142.538.842.470	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar	3.469.571.910.244	3.516.197.432.702	Total non-current assets
Jumlah aset	7.071.429.113.020	6.714.783.447.731	Total assets

LAMPIRAN I/2-2

ATTACHMENT I/2-2

PERUM PERCETAKAN UANG RI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM PERCETAKAN UANG RI
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
PARENT ENTITY

As of December 31, 2025 and 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
Liabilitas dan ekuitas			Liabilities and equity
Liabilitas jangka pendek			Current liabilities
Utang usaha			Trade payables
Pihak berelasi	447.679.899.684	301.733.718.822	Related parties
Pihak ketiga	571.638.998.753	405.937.646.547	Third parties
Liabilitas kontrak	1.883.540.041	2.360.001.732	Contract liabilities
Beban yang masih harus dibayar	388.848.910.194	428.060.621.606	Accrued expenses
Utang pajak	130.712.750.412	78.213.897.924	Taxes payable
Bagian jangka pendek atas pinjaman bank	115.600.000.000	141.281.218.194	Current portion of bank loans
liabilitas sewa	318.488.917	-	Lease liability
Liabilitas jangka pendek lainnya	53.030.432.020	44.356.693.776	Other current liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek	1.709.713.020.021	1.401.943.798.601	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang			Non-current liabilities
Pinjaman bank	74.032.452.216	189.632.452.216	Bank loans
Liabilitas sewa	608.586.301	-	Lease liabilities
Kewajiban imbalan pascakerja	403.622.445.000	402.006.326.000	Post-employment benefit obligations
Liabilitas pajak tangguhan	24.248.043.560	31.166.044.958	Deferred tax liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	161.064.666.783	221.219.119.783	Other non-current liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang	663.576.193.860	844.023.942.957	Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas	2.373.289.213.881	2.245.967.741.558	Total liabilities
Ekuitas			Equity
Modal saham	363.573.454.896	363.573.454.896	Share capital
Komponen ekuitas lainnya	(190.688.569.730)	(213.044.441.803)	Other equity components
Saldo laba			Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	1.540.253.152.093	1.556.993.963.100	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	2.985.001.861.880	2.761.292.729.980	Unappropriated
Jumlah ekuitas	4.698.139.899.139	4.468.815.706.173	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	7.071.429.113.020	6.714.783.447.731	Total liabilities and equity

LAMPIRAN II

ATTACHMENT II

PERUM PERCETAKAN UANG RI
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
ENTITAS INDUK

Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM PERCETAKAN UANG RI
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PARENT ENTITY

For the years ended

December 31, 2025 and 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
Penjualan bersih	4.016.629.089.323	3.390.974.118.746	<i>Net sales</i>
Beban pokok penjualan	(3.098.081.059.201)	(2.562.461.533.629)	<i>Cost of sales</i>
Laba kotor	918.548.030.122	828.512.585.117	<i>Gross profit</i>
Beban penjualan	(20.209.325.459)	(23.895.210.603)	<i>Selling expenses</i>
Beban umum dan administrasi	(711.347.204.469)	(633.728.761.403)	<i>General and administrative expenses</i>
Pendapatan keuangan	88.641.513.348	89.678.977.023	<i>Finance income</i>
Beban keuangan	(27.061.568.913)	(35.224.026.996)	<i>Finance cost</i>
Bagian atas laba bersih ventura bersama	5.085.444.576	16.611.751.304	<i>Share of profits of joint venture</i>
Pendapatan (beban) lain-lain	47.899.350.986	9.224.823.404	<i>Other income (expenses)</i>
Laba sebelum pajak penghasilan	301.556.240.191	251.180.137.846	<i>Profit before income tax</i>
Beban pajak penghasilan			<i>Income tax expenses</i>
Pajak kini	(91.070.612.068)	(88.987.563.342)	<i>Current tax</i>
Pajak tangguhan	13.223.503.777	26.225.491.787	<i>Deferred tax</i>
Jumlah beban pajak penghasilan	(77.847.108.291)	(62.762.071.555)	<i>Total income tax expenses</i>
Laba tahun berjalan	223.709.131.900	188.418.066.291	<i>Profit for the year</i>
Penghasilan (beban) Komprehensif lain			<i>Other comprehensive income (expense)</i>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			<i>Items that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	28.661.374.452	(19.594.270.000)	<i>Remeasurement of post - employment benefit</i>
Beban pajak terkait	(6.305.502.379)	4.310.739.400	<i>Related income tax</i>
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain	22.355.872.073	(15.283.530.600)	<i>Total other comprehensive income (loss)</i>
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	246.065.003.973	173.134.535.691	<i>Total comprehensive income for the year</i>

LAMPIRAN III

ATTACHMENT III

PERUM PERCETAKAN UANG RI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUKPERUM PERCETAKAN UANG RI
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
PARENT ENTITY

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

For the years ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo laba/ Retained earnings						
	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated		Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		Jumlah ekuitas/ Total equity	
		Cadangan umum/ General reserves	Cadangan khusus/ Specific purpose reserve				
Modal saham/ Share capital							
31 Januari 2024	363.573.454.896	(197.760.911.203))	1.355.309.004.721	222.920.513.565	2.572.874.663.689	4.316.916.725.668	January 1, 2024
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	188.418.066.291	188.418.066.291	Profit for the year
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja		(15.283.530.600)	-	-	-	(15.283.530.600)	Remeasurement of post-employment benefits
Dividen	-	-	(21.235.555.186)	-	-	(21.235.555.186)	Dividends
31 Desember 2024	363.573.454.896	(213.044.441.803)	1.334.073.449.535	222.920.513.565	2.761.292.729.980	4.468.815.706.173	December 31, 2024
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	223.709.131.900	223.709.131.900	Profit for the year
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	-	22.355.872.073	-	-	-	22.355.872.073	Remeasurement of post-employment benefits
Dividen	-	-	(16.740.811.007)	-	-	(16.740.811.007)	Dividends
31 Desember 2025	363.573.454.896	(190.688.569.730)	1.317.332.638.528	222.920.513.565	2.985.001.861.880	4.698.139.899.139	December 31, 2025

LAMPIRAN IV

ATTACHMENT IV

PERUM PERCETAKAN UANG RI
LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK

Untuk tahun-tahun yang berakhir

31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERUM PERCETAKAN UANG RI
STATEMENT OF CASH FLOWS
PARENT ENTITY

For the years ended

December 31, 2025 and 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan	4.395.261.028.963	3.278.045.658.833	Receipt from customers
Pembayaran kepada pemasok	(2.442.689.248.851)	(1.665.149.029.153)	Payment to suppliers
Pembayaran untuk direksi dan karyawan	(892.221.656.994)	(746.920.182.505)	Payment to directors and employees
Pembayaran untuk aktivitas operasional lainnya	(61.800.539.150)	(61.153.117.376)	Payment for other operating activities
Penghasilan bunga dari deposito dan jasa giro	82.239.071.556	84.982.720.550	Interest income from deposits and current account service
Pembayaran pajak penghasilan badan	(2.835.777.486)	(70.439.671.451)	Payment of corporate income tax
Pembayaran pajak lainnya	(413.520.442.433)	(386.127.994.667)	Payment of other taxes
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	664.432.435.605	433.238.384.231	Net cash flows provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Perolehan aset tak berwujud	(30.026.418.940)	(34.201.276.300)	Acquisition of intangible assets
Perolehan aset tetap	(352.105.026.420)	(162.917.314.063)	Acquisition of fixed assets
Kas dividen	2.422.792.378	23.882.658.701	Cash dividends
Lainnya - bersih	2.787.421.497	25.770.614.752	Others - net
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(376.921.231.485)	(147.465.316.910)	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Pembayaran pinjaman bank	(141.281.218.194)	(166.962.436.372)	Payment of bank loans
Pembayaran beban bunga dan keuangan	(26.755.369.412)	(35.525.809.339)	Payment of interest and finance charges
Pembayaran dividen	(16.740.811.007)	(21.235.555.186)	Payment of dividends
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(184.777.398.613)	(223.723.800.897)	Net cash used in financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	102.733.805.507	62.049.266.424	Net cash increase (decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	2.065.053.919.171	2.003.004.652.747	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	2.167.787.724.678	2.065.053.919.171	Cash and equivalents at end of year

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT
2025

Kantor Pusat | Head Office

Jl. Palatehan No. 4 Blok K–V
Kebayoran Baru
Jakarta 12160
T : (62 21) 739 5000
F : (62 21) 722 1567
E : contact@peruri.co.id
W : www.peruri.co.id